SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 15.1 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan rencana kerja pemerintah daerah berkenaan, dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

b. bahwa perubahan rencana kerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a menjadi pedoman Perubahan rencana kerja perangkat daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 15.1 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
19. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 15.1 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 15.1 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 15.1) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 26 Juni 2025

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

AMIRULLAH

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK SEKRETARIAT DAERAH

FERRY ABDI, S.H., M.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19770211 200212 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 15.1 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025

PENJABARAN RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak;
2. Dinas Kesehatan Kota Pontianak;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak;
5. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak;
7. Dinas Sosial Kota Pontianak;
8. Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak;
9. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak;
10. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak;
11. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
13. Dinas Perhubungan Kota Pontianak;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak;
15. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak;
17. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak;
19. Sekretariat Daerah Kota Pontianak;
20. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak;
21. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak;
22. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak;
23. Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak;
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak;
25. Inspektorat Kota Pontianak;
26. Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
27. Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak;
28. Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;
29. Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak;
30. Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak;
31. Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak; dan
32. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak;

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang atas berkat dan rahmat-Nya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025. Dokumen ini memuat rencana kerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta indikator kinerja dan pendanaannya periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Nomenklatur baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keungan Daerah.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada ssemua pihak yang terlibat dalam memberikan pemikiran, ide dan tenaga guna menyelesaikan dokumen ini. Semoga dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2025 ini dapat memberikan gambaran sesungguhnya tentang rencana pembangunan pada Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Pontianak Tahun 2025, serta menjadikan masukan bagi semua pihak terkait agar dapat direalisasikan sesuai rencana.

Kami sangat menyadari bahwa penyusunan RENJA Perubahan ini maish jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan Penyusunan RENJA Perubahan ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontiank Tahun 2025. Semoga dengan penyusunan RENJA Perubahan ini bermanfaat bagi pembangunan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Pontianak.

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Pontianak

SRI SUJIARTI, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19680215 199303 2 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I. PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-3

1.3 Maksud dan Tujuan I-6

1.4 Sistematika Penulisan I-6

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 ..... II-1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan I II-1

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN III-1

3.1 Rencaan Kerja III-1

3.2 Pendanaan III-70

BAB IV. PENUTUP IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kota Pontianak II-6

Tabel 3.1 Tabel Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2025 ..... III-2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2025 disusun sebagai dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berdasarkan pada permasalahan dan isu strategis, data capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak pada tahun 2025 serta berorientasi pada capaian target indikator kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:
   a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan atau
   b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

2. Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan kepala Daerah dengan ketua DPRD.
3. Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
4. Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional. Keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.
5. Perubahan RKPD sebagimana dimaksud meliputi perubahan:
   a. Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
   b. Target sasaran pembangunan Daerah;
   c. Prioritas pembangunan daerah;
   d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah;dan
   e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah.

Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak berpedoman kepada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2024 - 2026, dengan arahan sebagai berikut:

a. Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
b. Perangkat daerah tidak boleh mengajukan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan baru dalam Perubahan Renja Tahun 2025 yang tidak ada dalam Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2024-2026;
c. Pagu Sebelum Perubahan pada Perubahan Renja Tahun 2025 adalah pagu APBD Induk Tahun Anggaran 2025.
d. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari APBN/APBD Provinsi (DAK Fisik/Non Fisik/DABA Provinsi/Dana Insentif Daerah, dll) yang belum ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Induk Tahun Anggaran 2025 untuk dilaporkan dan dicantumkan dalam PerubahanRenja Tahun 2025.
e. Rumusan program/kegiatan di dalam Rencana Kerja didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif;
f. Penyusunan Rencana Kerja bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;

g. Rumusan program / kegiatan di dalam Rencana Kerja didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib / pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif;
h. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, dan total kebutuhan dana tahun 2025.

Keterkaitan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dengan dokumen perencanaan lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena dokumen ini merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) yang memiliki hubungan keselarasan dengan Dokumen Perencanaan Daerah lainnya baik RPJMD, maupun RKPD. Rencana Kerja Dinas Kesehatan merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, Renstra, dan RPJMD, bagi RKA PD, KUA, PPAS, dan RAPB.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2025 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun

2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).

17. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
19. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 133 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun … Nomor …).
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor ...).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 47).
23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 51 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor ...).
24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 13).
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan indikator dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD Tahun Anggaran 2025 dengan dokumen renja PD Tahun 2025 serta renstra PD dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang dalam kurun waktu Januari-Juni 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja (Triwulan 1)

Tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak telah melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Namun sebagian besar indikator capaian kinerja masih berada di bawah 50%. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam pemenuhan target pelayanan pendidikan dan kebudayaan secara menyeluruh kepada masyarakat. Adapun tujuan dan sasaran RPD yang didukung oleh perangkat daerah sebagai berikut:

Tujuan RPD : Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia yang Berkesetaraan
Sasaran RPD : Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Kebudayaan

Untuk mendukung Tujuan dan Sasaran RPD, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak memiliki tujuan dan sasaran yang menjadi bagian terwujudnya tujuan dan sasaran dari RPD.

Tujuan PD :

”Meningkatnya Kualitas Pendidkan dan Pengembangan Kebudayaan”

Adapun Indikator dari tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak sebagai berikut:

1. Indeks Pendidikan

Sasaran PD :

1. Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar;
2. Meningkatnya Akses dan Pelayanan PAUD;
3. Meningkatnya Akses dan Pelayanan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
4. Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan.

Dengan indikator sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai berikut:

1) Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar

1. **Angka Partisipasi Kasar Jenjang Sekolah Dasar;**
2. **Angka Partisipasi Murni Jenjang Sekolah Dasar;**
3. **Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Sekolah Dasar;**
4. **Angka Partisipasi Kasar Jenjang Sekolah Menengah Pertama;**
5. **Angka Partisipasi Murni Jenjang Sekolah Menengah Pertama;**
6. **Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Pertama.**

Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung capaian Indikator Kinerja Utama Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan Dasar, adalah:

I. Program Pengelolaan Pendidikan

1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

a. Subkegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;
b. Subkegiatan Pengadaan Mebel Sekolah;
c. Subkegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah;
d. Subkegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa;
e. Subkegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
f. Subkegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah;
g. Subkegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar;
h. Subkegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan;
i. Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;
j. Subkegiatan Penyelenggaraan Prosses Belajar Bagi Peserta Didik;
k. Subkegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
l. Subkegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa.

2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

a. Subkegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;
b. Subkegiatan Pengadaan Mebel Sekolah;
c. Subkegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah;
d. Subkegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa;
e. Subkegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
f. Subkegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah;
g. Subkegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama;
h. Subkegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik;
i. Subkegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa.

2) Meningkatnya Akses dan Pelayanan PAUD

1. Angka Partisipasi Kasar Jenjang PAUD

2. Angka Partisipasi Murni Jenjang PAUD

Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung capaian Indikator Kinerja Utama Meningkatnya Akses dan Pelayanan PAUD, adalah:

I. Program Pengelolaan Pendidikan

1. **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**
   a. Subkegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD;
   b. Subkegiatan Pengadaan Mebel PAUD;
   c. Subkegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD;
   d. Subkegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manjemen PAUD;
   e. Subkegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD;
   f. Subkegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD;
   g. Subkegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD.

3) Meningkatnya Akses dan Pelayanan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

1. **Persentase Akreditasi Pendidikan Nonformal dan Lembaga Kursus/Pelatihan Minimal C**

Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Akreditasi Pendidikan Nonformal dan Lembaga Kursus/Pelatihan Minimal C, adalah:

I. Program Pengelolaan Pendidikan

1. **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**
   a. Subkegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
   b. Subkegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan;
   c. Subkegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan;
   d. Subkegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik;
   e. Subkegiatan Pemelihataan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah;
   f. Subkegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan.

4) Meningkatnya Pembinaan Cagar Budaya Kota yang Dilestarikan

1. **Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan**

Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan, adalah:

I. Program Pengembangan Kebudayaan

1. **Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**
   a. Subkegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan;

b. Subkegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan.

2. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalama Daerah Kabupaten/Kota

a. Subkegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya;

b. Subkegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional.

II. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

1. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

a. Subkegiatan Penetapan Cagar Budaya.

Adapun Program, Kegiatan dan Subkegiatan pendukung dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran RPD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2025 sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;

c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;

d. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

e. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

b. Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;

b. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

c. Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkar Daerah

a. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

b. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

c. Subkegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan;

d. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi RKPD;

e. Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

5. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
   a. Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
6. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
   a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
   c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
7. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
   a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
   b. Subkegiatan Pemeliharaan Peraalatan dan Mesin Lainnya;
   c. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

II. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. **Kegiatan Pemerataan Kuantitas, Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**
   a. Subkegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
   b. Subkegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kota Pontianak

NO	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
1	*2*	*3*	4	*5*	*6*			*7*			*8*			*9*			*13 =(9+10+11+12)*		
					K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp
	Tujuan 1 : Meningkatkatnya Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Kebudayaan		**Indeks Pendidikan**		**0.770**	**Tahun**	**1.298.785.693.850,00**		**Tahun**	**-**	**0.768**	**Tahun**	**505.578.085.178,00**		**Tahun**	**50.980.845.143,00**		**Tahun**	
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan**	**Meningkatnya Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**95**	**%**	**843.318.887.360,00**		**%**		**95**	**%**	**338.083.079.115,20**	**25,09**	**%**	**50.675.136.746,00**	**25,09**	**%**	**50.675.136.746,00**
1.1		**KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**631.019.700,00**		**%**		**100**	**%**	**219.159.940,00**	**0,00**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**-**
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen	75.000.000,00		Dokumen		4	Dokumen	33.077.540,00		Dokumen	-	0	Dokumen	-
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dokumen	134.550.000,00		Dokumen		1	Dokumen	32.952.600,00		Dokumen (per 3 Bulan)	-	0	Dokumen	-

NO	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
1	*2*	*3*	4	*5*	*6*			*7*			*8*			*9*			*13 =(9+10+11+12)*		
1.1.3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Dokumen	135.987.600,00		Dokumen		1	Dokumen	44.856.800,00		Dokumen	-	0	Dokumen	-
1.1.6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD	Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9	Laporan	185.200.500,00		Laporan		3	Laporan	53.741.600,00		Laporan	-	0	Laporan	-
1.1.7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Terselenggaranya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	100.281.600,00		Laporan		1	Laporan	54.531.400,00		Laporan (per 3 bulan)	-	0	Laporan	-
1.1.8		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		-	-		Data		1	Data	-		Data	-			
1.2		**KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**829.699.574.000,00**		**%**		**100**	**%**	**305.224.500.447,00**	**99,9728948**	**%**	**50.306.880.595,00**	**100**	**%**	**50.306.880.595,00**
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	5790	Orang/Bulan (1 Tahun)	821.619.095.000,00		Orang/Bulan (1 Tahun)		2766	Orang/Bulan (1 Tahun)	301.733.340.447,00	2766	Orang/Bulan (1 Tahun)	50.208.570.595,00	2766	Orang/Bulan (1 Tahun)	50.208.570.595,00
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	3	Dokumen	8.080.479.000,00		Dokumen		1	Dokumen	3.491.160.000,00	0,25	Dokumen	98.310.000,00	0,25	Dokumen	98.310.000,00
1.3		**KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**814.681.950,00**		**%**		**100**	**%**	**2.403.635.040,00**	**6,96**	**%**	**22.800.000,00**	**6,96**	**%**	**22.800.000,00**
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3	Paket	188.949.000,00		Paket		1	Paket	1.908.171.100,00		Paket	-	0	Paket	-

NO	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
1	*2*	*3*	4	*5*	*6*			*7*			*8*			*9*			*13 =(9+10+11+12)*		
1.3.2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30	Orang	180.000.000,00		Orang		6	Orang	221.500.000,00	3	Orang	18.000.000,00	3	Orang	18.000.000,00
1.3.3		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300	Orang	445.732.950,00		Orang		1472	Orang	273.963.940,00	100	Orang	4.800.000,00	100	Orang	4.800.000,00
1.4		**KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**5.792.404.710,00**		**%**		**100**	**%**	**27.337.444.787,20**	**17,86**	**%**	**28.170.400,00**	**17,86**	**%**	**28.170.400,00**
1.4.1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9	Paket	2.176.095.810,00		Paket		3	Paket	923.859.100,00	1	Paket	26.670.400,00	1	Paket	26.670.400,00
1.4.2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	3	Paket	659.040.900,00		Paket		1	Paket	25.160.245.200,00		Paket	-	0	Paket	-
1.4.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	3	Paket	2.175.129.000,00		Paket		1	Paket	935.450.487,20		Paket	-	0	Paket	-
1.4.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3	Dokumen	49.260.000,00		Dokumen		1	Dokumen	-		Dokumen	-	0	Dokumen	-
1.4.5		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	Laporan	382.443.000,00		Laporan		1	Laporan	100.000.000,00		Laporan	-	0	Laporan	-
1.4.6		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terselenggaranya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3	Dokumen	350.436.000,00		Dokumen		1	Dokumen	217.890.000,00	0,25	Dokumen	1.500.000,00	0,25	Dokumen	1.500.000,00
1.5		**KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**-**		**%**		**0**	**%**	**482.711.360,00**	**0**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**-**

NO	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
1	*2*	*3*	4	*5*	*6*			*7*			*8*			*9*			*13 =(9+10+11+12)*		
1.5.1		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	Unit	-		Unit		1	Unit	482.711.360,00		Unit	-	0	-	-
1.6		**KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**5.779.599.000,00**		**%**		**100**	**%**	**2.228.171.541,00**	**16,67**	**%**	**314.285.751,00**	**16,67**	**%**	**314.285.751,00**
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	3	Laporan	15.525.000,00		Laporan		1	Laporan	4.810.000,00		Laporan	-	0	Laporan	-
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	Laporan	1.071.180.000,00		Laporan		1	Laporan	343.060.700,00	0,25	Laporan	80.723.511,00	0	Laporan	80.723.511,00
1.6.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	Laporan	4.692.894.000,00		Laporan		1	Laporan	1.880.300.841,00	0,25	Laporan	233.562.240,00	0	Laporan	233.562.240,00
1.7		**KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**601.608.000,00**		**%**		**100**	**%**	**187.456.000,00**	**9,09**	**%**	**3.000.000,00**	**9,09**	**%**	**3.000.000,00**
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	Unit	102.420.000,00		Unit		1	Unit	37.510.000,00	1	Unit	3.000.000,00	1	Unit	3.000.000,00
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30	Unit	499.188.000,00		Unit		10	Unit	149.946.000,00		Unit	-	0	Unit	-

NO	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
1	*2*	*3*	4	*5*	*6*			*7*			*8*			*9*			*13 =(9+10+11+12)*		
	Sasaran 1: Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan dasar		Angka Partisipasi Kasar Jenjang Sekolah Dasar		100	%	446.468.307.690,00		%	-	100	%	164.803.037.862,80		%	264.708.397,00		%	264.708.397,00
			Angka Partisipasi Murni Jenjang Sekolah Dasar		100	%			%		97,50	%			%			%	
			Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Sekolah Dasar		100	%			%		99	%			%			%	
			Angka Partisipasi Kasar Jenjang Sekolah Menengah Pertama		100	%			%		100	%			%			%	
			Angka Partisipasi Murni Jenjang Sekolah Menengah Pertama		100	%			%		90	%			%			%	
			Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Pertama		100	%			%		94,50	%			%			%	
	Sasaran 2: Meningkatnya Akses dan Pelayanan PAUD		Angka Partisipasi Kasar Jenjang Paud		70	%			%		60	%			%			%	
			Angka Partisipasi Murni Jenjang Paud		65	%			%		53	%			%			%	

NO	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
1	*2*	*3*	4	*5*	*6*			*7*			*8*			*9*			*13 =(9+10+11+12)*		
	Sasaran 3: Meningkatnya Akses dan Pelayanan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		**Persentase Akreditasi Pendidikan Nonformal Dan Lembaga Kursus/Pelatihan Minimal C**		**100**	**%**			**%**		**100**	**%**			**%**			**%**	
2		**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase SD yang Terakreditasi**	**Terpenuhinya pengelolaan pendidikan Satuan Pendidikan kewenangan Kota yang sesuai standar (akreditasi)**	**100**	**%**	**445.844.409.990,00**		**%**	**-**	**99**	**%**	**164.662.659.162,80**		**%**	**264.708.397,00**		**%**	**264.708.397,00**
			Persentase SMP yang Terakreditasi	**Terpenuhinya pengelolaan pendidikan Satuan Pendidikan kewenangan Kota yang sesuai standar (akreditasi)**	**100**	**%**			**%**		**98**	**%**			**%**			**%**	
			Persentase PAUD yang Terakreditasi	**Terpenuhinya pengelolaan pendidikan Satuan Pendidikan kewenangan Kota yang sesuai standar (akreditasi)**	**100**	**%**			**%**		**98**	**%**			**%**			**%**	
			Persentase PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Terakreditasi	**Terpenuhinya pengelolaan pendidikan Satuan Pendidikan kewenangan Kota yang sesuai standar (akreditasi)**	**100**	**%**			**%**		**100**	**%**			**%**			**%**	
2.1		**KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**	**Persentase Pencapaian Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar yang Sesuai Standar**	**100**	**%**	**282.596.669.405,00**		**%**		**100**	**%**	**103.230.456.359,00**	**7,77**	**%**	**4.500.000,00**	**7,77**	**%**	**4.500.000,00**
2.1.1		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Terlaksananya Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	0	Ruang	-		Ruang		1	Ruang	-		Ruang	-	0	Ruang	-

NO	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
1	*2*	*3*	4	*5*	*6*			*7*			*8*			*9*			*13 =(9+10+11+12)*		
2.1.2		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	6	Ruang	1.329.091.800,00		Ruang		2	Ruang	-		Ruang	-	0	Ruang	-
2.1.3		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Terlaksananya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	0	Unit	-		Unit		1	Unit	16.272.529.800,00		Unit	-	0	Unit	-
2.1.4		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	Ruang	-		Ruang		2	Ruang	-		Ruang	-	0	Ruang	-
2.1.5		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	Ruang	-		Ruang		1	Ruang	-		Ruang	-	0	Ruang	-
2.1.6		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0	Ruang	-		Ruang		15	Ruang	-		Ruang	-	0	Ruang	-
2.1.7		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Tersedianya Mebel Sekolah	3	Paket	12.070.544.400,00		Paket		1	Paket	8.330.061.100,00		Paket	-	0	Paket	-

NO	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
1	*2*	*3*	4	*5*	*6*			*7*			*8*			*9*			*13 =(9+10+11+12)*		
2.1.8		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	-	-	-	-	-	-	1	Paket	1.000.407.400,00		Paket	-		Paket	-
2.1.9		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetesi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akdaemik dan Non Akademik	2400	Peserta Didik	1.439.938.800,00		Peserta Didik		800	Peserta Didik	162.599.500,00		Peserta Didik	-	0	Peserta Didik	-
2.1.10		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar **(SPM)**	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2082	Orang	1.778.718.000,00		Orang		694	Orang	688.692.400,00		Orang	-	0	Orang	-
2.1.11		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah **(SPM)**	Jumlah Sekolah Dasar yang Dillaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	507	Satuan Pendidikan	2.918.136.900,00		Satuan Pendidikan		169	Satuan Pendidikan	413.719.900,00	169	Satuan Pendidikan	4.500.000,00	169	Satuan Pendidikan (per 3 bulan)	4.500.000,00
2.1.12		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	507	Satuan Pendidikan	183.943.659.717,00		Satuan Pendidikan		169	Satuan Pendidikan	59.162.775.733,00		Satuan Pendidikan	-	0	Satuan Pendidikan	-
2.1.13		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	6	Ruang	3.662.989.500,00		Ruang		2	Ruang	-		Ruang	-	0	Ruang	-

NO	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
1	*2*	*3*	4	*5*	*6*			*7*			*8*			*9*			*13 =(9+10+11+12)*		
2.1.14		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah	0	Ruang	-		Ruang		1	Ruang	-		Ruang	-	0	Ruang	-
2.1.15		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	-	-		Dokumen		1	Dokumen	295.667.400,00		Dokumen	-	0	Dokumen	
2.1.16		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang Kelas Baru Bertambah	0	Ruang	-		Ruang		6	Ruang	-		Ruang	-	0	Ruang	-
2.1.17		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Terlaksananya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	300	Unit	50.590.613.588,00		Unit		68	Unit	14.564.318.896,00		Unit	-	0	Unit	-
2.1.18		Penyelengaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	507	Satuan Pendidikan	910.107.900,00		Satuan Pendidikan		169	Satuan Pendidikan	1.521.293.300,00		Satuan Pendidikan	-	0	Satuan Pendidikan (perbulan)	-
2.1.19		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah **(SPM)**	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	30	Ruang	6.974.875.200,00		Ruang		45	Ruang	-		Ruang	-	0	Ruang	-

NO	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
1	*2*	*3*	4	*5*	*6*			*7*			*8*			*9*			*13 =(9+10+11+12)*		
2.1.20		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar **(SPM)**	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Tersedianya Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima Oleh Peserta Didik	300	Peserta Didik	1.307.907.900,00		Peserta Didik		100	Peserta Didik	608.507.930,00		Peserta Didik	-	0	Peserta Didik	-
2.1.21		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	12	Unit	16.999.177.500,00		Paket		2	Paket	209.883.000,00		Paket	-	0	Paket	-
2.2		**KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**	**Persentase Pencapaian Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Sesuai Standar**	**100**	**%**	**117.971.885.665,00**		**%**		**100**	**%**	**43.992.632.861,32**	**5,68**	**%**	**47.000.000,00**	**5,68**	**%**	**47.000.000,00**
2.2.1		Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	6	Ruang	2.943.619.800,00		Ruang		1	Ruang	-		Ruang	-	0	Ruang	-
2.2.2		Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unt Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	6	Ruang	1.529.539.800,00		Ruang		1	Ruang	-		Ruang	-	0	Ruang	-
2.2.3		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Terlaksananya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	0	Unit	-		Unit		1	Unit	-		Unit	-	0	Unit	-

NO	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
1	*2*	*3*	4	*5*	*6*			*7*			*8*			*9*			*13 =(9+10+11+12)*		
2.2.4		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah **(SPM)**	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	15	Ruang	3.454.123.200,00		Ruang		44	Ruang	-		Ruang	-	0	Ruang	-
2.2.5		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	Ruang	-		Ruang		1	Ruang	-		Ruang	-	0	Ruang	-
2.2.6		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0	Ruang	-		Ruang		1	Ruang	-		Ruang	-	0	Ruang	-
2.2.7		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	0	Ruang	-		Ruang		3	Ruang	-		Ruang	-	0	Ruang	-
2.2.8		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Terehabilitasi Sedang/Berat	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	69	Unit	12.667.985.750,00		Unit		22	Unit	4.217.549.061,32		Unit	-	0	Unit	-
2.2.9		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Tersedianya Mebel Sekolah	3	Paket	12.070.544.400,00		Paket		1	Paket	2.188.837.400,00		Paket	-	0	Paket	-

NO	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
1	*2*	*3*	4	*5*	*6*			*7*			*8*			*9*			*13 =(9+10+11+12)*		
2.2.10		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1	Unit	10.428.698.100,00		Unit		1	Paket	612.690.000,00		-	-	0	-	-
2.2.11		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama **(SPM)**	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Pesesrta Didik	300	Peserta Didik	1.272.754.500,00		Peserta Didik		100	Peserta Didik	-		Peserta Didik	-	0	Peserta Didik	-
2.2.12		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akdaemik dan Non Akademik	3000	Peserta Didik	1.401.207.150,00		Peserta Didik		920	Peserta Didik	663.226.900,00		Peserta Didik	-	0	Peserta Didik	-
2.2.13		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama **(SPM)**	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	660	Orang	662.548.200,00		Orang		220	Orang	206.309.800,00		Orang	-	0	Orang	-
2.2.14		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah **(SPM)**	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	240	Satuan Pendidikan	1.819.007.700,00		Satuan Pendidikan		80	Satuan Pendidikan	251.812.400,00	80	Satuan Pendidikan	47.000.000,00	80	Satuan Pendidikan	47.000.000,00
2.2.15		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	240	Satuan Pendidikan	100.543.774.015,00		Satuan Pendidikan		80	Satuan Pendidikan	34.641.650.000,00		Satuan Pendidikan	-	0	Satuan Pendidikan	-

NO	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
1	*2*	*3*	4	*5*	*6*			*7*			*8*			*9*			*13 =(9+10+11+12)*		
2.2.16		Penyelengaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	28500	Satuan Pendidikan	473.128.500,00		Satuan Pendidikan		80	Satuan Pendidikan	991.896.200,00		Satuan Pendidikan	-	0	Satuan Pendidikan	-
2.2.17		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	Ruang	-		Ruang		8	Ruang	-		Ruang	-	0	Ruang	-
2.2.18		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa **(SPM)**	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	3	Paket	1.370.767.500,00		Paket		4	Paket	218.661.100,00		Paket	-	0	Paket	-
2.3		**KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**	**Persentase Pencapaian Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang Sesuai Standar**	**100**	**%**	**33.216.483.645,00**		**%**		**100**	**%**	**12.416.309.866,48**	**22,78**	**%**	**93.900.000,00**	**22,78**	**%**	**93.900.000,00**
2.3.1		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana, dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	15	Unit	4.036.153.200,00		Unit		4	Unit	160.658.566,48		Unit	-	0	Unit	-
2.3.2		Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Tersedianya Mebel PAUD	0	Paket	-		Paket		1	Paket	166.427.400,00		Paket	-	0	Paket	
2.3.3		Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Perlengkapan PAUD yang Tersedia							4	Paket	-		Paket	-		Paket	

NO	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
1	*2*	*3*	4	*5*	*6*			*7*			*8*			*9*			*13 =(9+10+11+12)*		
2.3.4		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD **(SPM)**	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	150	Peserta Didik	494.861.690,00		Peserta Didik		50	Peserta Didik	-		Peserta Didik	-	0	Peserta Didik	-
2.3.5		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD **(SPM)**	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Pendidik dam Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	960	Orang	698.336.400,00		Orang		320	Orang	282.272.100,00		Orang	-	0	Orang	-
2.3.6		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD **(SPM)**	Jumlah PAUD yang Diaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	810	Satuan Pendidikan	5.992.221.300,00		Satuan Pendidikan		270	Satuan Pendidikan	1.762.924.000,00	270	Satuan Pendidikan	93.900.000,00	270	Satuan Pendidikan	93.900.000,00
2.3.7		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	810	Satuan Pendidikan	20.295.559.000,00		Satuan Pendidikan		270	Satuan Pendidikan	6.736.650.000,00		Satuan Pendidikan	-	0	Satuan Pendidikan	-
2.3.8		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD yang Tersedia	0	Unit	-		Unit		50	Paket	2.659.770.000,00		Paket	-	-	Paket	-
2.3.9		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	8100	Peserta Didik	1.699.352.055,00		Peserta Didik		270	Satuan Pendidikan	647.607.800,00		Satuan Pendidikan	-	0	Satuan Pendidikan	-
2.4		**KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN**	**Persentase Pencapaian Pengelolaan Pendidikan Sekolah Nonformal/Kesetaraan**	**Terselenggaranya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Nonformal/Kesetaraan**	**100**	**%**	**12.059.371.275,00**		**%**		**100**	**%**	**5.023.260.076,00**	**27,19**	**%**	**119.308.397,00**	**27,19**	**%**	**119.308.397,00**

NO	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
1	*2*	*3*	4	*5*	*6*			*7*			*8*			*9*			*13 =(9+10+11+12)*		
2.4.1		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan **(SPM)**	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Diterima oleh Peserta Didik	60	Peserta Didik	149.999.700,00		Peserta Didik		50	Peserta Didik	-		Peserta Didik	-	0	Peserta Didik	-
2.4.2		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300	Orang	283.167.300,00		Orang		100	Orang	123.267.600,00	50	Orang	42.431.125,00	50	Orang	42.431.125,00
2.4.3		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal /kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	48	Satuan Pendidikan	1.423.125.135,00		Satuan Pendidikan		16	Satuan Pendidikan	371.812.580,00		Satuan Pendidikan	-	0	Satuan Pendidikan	-
2.4.4		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	48	Satuan Pendidikan	5.835.510.000,00		Satuan Pendidikan		270	Satuan Pendidikan	2.667.630.000,00		Satuan Pendidikan	-	0	Satuan Pendidikan	-
2.4.5		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	1500	Peserta Didik	4.145.398.140,00		Peserta Didik		1635	Peserta Didik	1.491.987.996,00	500	Peserta Didik	76.877.272,00	500	Peserta Didik	76.877.272,00
2.4.6		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3	Unit	222.171.000,00		Unit		1	Unit	66.739.900,00		Unit	-	0	Unit	-

NO	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
1	*2*	*3*	4	*5*	*6*			*7*			*8*			*9*			*13 =(9+10+11+12)*		
2.4.7		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun					Unit		1	Unit	-		Unit	-		Unit	
2.4.8		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia					Paket		1	Paket	301.822.000,00		Paket	-		Paket	
3		**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Rasio Guru SD terhadap murid**	**Rasio = Jumlah guru SD : Jumlah Murid SD**	**01:16**	**Rasio**	**623.897.700,00**		**Rasio**	**-**	**1:17**	**Rasio**	**140.378.700,00**		**Rasio**	**-**	**0**	**Rasio**	**-**
			Persentase Guru yang bersertifikasi	**% = Jumlah Guru SD dan SMP bersertifikasi : Jumlah total guru SD dan SMP**	**64**	**%**			**%**		**63**	**%**			**%**			**%**	
3.1		**KEGIATAN PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN**	**Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal**	**Terlaksananya Pemrataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik danTenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**100**	**%**	**623.897.700,00**		**%**		**100**	**%**	**140.378.700,00**	**0**	**%**	**-**	**0**	**%**	**-**
3.1.1		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonfomal/Kesetaraan	3	Dokumen	175.376.100,00		Dokumen		2	Dokumen	20.479.300,00		Dokumen	-	0	Dokumen	-

NO	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
1	*2*	*3*	4	*5*	*6*			*7*			*8*			*9*			*13 =(9+10+11+12)*		
3.1.2		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12	Laporan	448.521.600,00		Laporan		4	Laporan	119.899.400,00		Laporan	-	0	Laporan	-
	Sasaran 4: Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Lokal yang Dilestarikan		**Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan**		**85**	**%**	**8.998.498.800,00**		**%**		**80**	**%**	**2.691.968.200,00**	**0,12**	**%**	**41.000.000,00**	**0,12**	**%**	**41.000.000,00**
4		**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Presentase Kebudayaan Lokal Daerah yang Mengalami Perkembangan**	**Terwujudnya Pengembangan Kebudayaan Daerah**	**100**	**%**	**8.003.597.400,00**		**%**		**100**	**%**	**2.632.510.200,00**	**0,47**	**%**	**41.000.000,00**	**0,47**	**%**	**41.000.000,00**
4.1		**KEGIATAN PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Kebudayaan Lokal Daerah yang Mengalami Perkembangan**	**Terselenggaranya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**3.707.845.200,00**		**%**		**100**	**%**	**1.054.498.000,00**	**0,94**	**%**	**41.000.000,00**	**0,94**	**%**	**41.000.000,00**
4.1.1		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Pelindungan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	15	Objek	2.054.899.900,00		Objek		6	Objek	761.496.000,00	1	Objek	41.000.000,00	1	Objek	41.000.000,00

NO	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
1	*2*	*3*	4	*5*	*6*			*7*			*8*			*9*			*13 =(9+10+11+12)*		
4.1.2		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	300	Orang	1.652.945.300,00		Orang		100	Orang	293.002.000,00		Orang	-	0	Orang	-
4.2		**KEGIATAN PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penyelenggaraan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Sebagai Pelaku dalam Daerah**	**Terselenggaranya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**4.295.752.200,00**		**%**		**100**	**%**	**1.578.012.200,00**	**0,00**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**-**
4.2.1		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	15	Objek	2.089.121.300,00		Laporan		5	Objek	740.473.200,00		Objek	-	0	Objek	-
4.2.2		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Prantata Tradisional	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	6	Laporan	2.206.630.900,00		Laporan		2	Laporan	837.539.000,00		Laporan	-	0	Laporan (3 Bulan)	-
5		**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan**	**Terwujudnya Pengembangan Kesenian Tradisional**	**100**	**%**	**589.901.400,00**		**%**		**100**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**-**
5.1		**KEGIATAN PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Sebagai Pelaku dalam Daerah**	**Terselenggaranya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**589.901.400,00**		**%**		**100**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**-**

NO	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*			*7*			*8*			*9*			*13 =(9+10+11+12)*		
5.1.1		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia KesenianTradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	498	Orang	589.901.400,00		Orang		166	Orang	-		Orang	-	0	Orang	-
6		**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase Objek Sejarah yang Dibina**	**Terwujudnya Pembinaan Sejarah**	**100**	**%**	**225.000.000,00**		**%**		**100**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**-**
6.1		**KEGIATAN PEMBINAAN SEJARAH LOKAL DALAM 1(SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam Satu Daerah**	**Terselenggaranya Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**%**	**225.000.000,00**		**%**		**100**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**-**
6.1.1		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	900	Unit	225.000.000,00		Unit		10	Unit	-		Unit	-	0	Unit	-
7		**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**Terselenggaranya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**100**	**%**	**180.000.000,00**		**%**		**100**	**%**	**59.458.000,00**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**-**
7.1		**KEGIATAN PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN KOTA**	**Persentase Penyelenggaraan Penetapan Cagar Budaya**	**Terselenggaranya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten//Kota**	**100**	**%**	**180.000.000,00**		**%**		**100**	**%**	**59.458.000,00**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**-**
7.1.1		Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	3	Objek	180.000.000,00		Objek		1	Objek	59.458.000,00	-	Objek	-	0	Objek	0
							1.298.785.693.850,00			**-**			**505.578.085.178,00**	**10,08%**		**50.980.845.143,00**	**10,08%**		**50.980.845.143,00**
	Rata-rata capaian Kinerja Subkegiatan (%)													**13,43**					
	Predikat Kinerja													**SANGAT RENDAH**					
	Rata-rata capaian Kinerja Program(%)													**5,38**					
	Predikat Kinerja													**SANGAT RENDAH**					

Berdasarkan Tabel 2.1, bahwa hasil dari evaluasi rencana kerja sampai dengan triwulan ke-1 tahun 2025 realisasi anggaran yang telah dilaksanakan sebanyak Rp50.939.845.143,00 dari anggaran sebesar Rp 505.578.085.178,00 yaitu 10,08 %. Sehingga hasil dari rata-rata capaian kinerja subkegiatan yaitu 13,43 % dengan predikat kinerja sangat rendah dan realisasi rata-rata capaian kinerja program yaitu 5,38 % dengan predikat kinerjas sangat rendah. Hal ini terjadi karena, sebagian subkegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak banyak terealisasi pada triwulan ke-4 Adapun penjelasan realisasi pada triwulan ke-1 pada masing-masing program, kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada program ini memiliki target kinerja dan anggaran Renja Tahun 2025 yaitu 95% dengan anggaran Rp 338.083.079.115,20 dan pagu yang telah terealisasi pada triwulan ke-1 yaitu sebesar Rp 50.675136.746,00 dengan capaian kinerja sebesar 25,09%. Adapun kegiatan yang mendukung realisasi program ini terdiri dari 7 kegiatan dan 21 subkegiatan sebagai berikut:

1. **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

   Kegiatan ini memiliki target kinerja 100% dan anggaran Renja Tahun 2025 sebesar Rp219.159.940,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1. Adapun subkegiatan yang mendukung realisasi kegiatan ini sebagai berikut:

   a. Subkegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah memiliki target kinerja sebanyak 4 dokumen dan anggaran sebesar Rp 33.077.540,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.
   b. Subkegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD memiliki target kinerja sebanyak 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp 32.952.600,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.
   c. Subkegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD memiliki target kinerja sebanyak 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp44.856.800,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.
   d. Subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD memiliki target kinerja sebanyak 3 laporan dan anggaran sebesar Rp 53.741.600,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.
   e. Subkegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah memiliki target kinerja sebanyak 1 laporan dan anggaran sebesar Rp 54.531.400,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.

2. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

   Kegiatan ini memiliki target kinerja 100% dan anggaran Renja Tahun 2025 sebesar Rp305.224.500.447,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-1 sebanyak

Rp50.306.880.595,00 dengan capaian kinerja sebanyak 99,97%. Adapun subkegiatan yang mendukung realisasi kegiatan ini sebagai berikut:

a. Subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN memiliki target kinerja sebanyak 2766 orang/bulan dan anggaran sebesar Rp 301.733.340.447,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-1 sebesar Rp 50.208.570.595,00 dengan capaian kinerja sebanyak 2766 orang/bulan pada setiap bulannya.
b. Subkegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD memiliki target kinerja sebanyak 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp 3.491.160.000,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-1 sebesar Rp98.310.000,00 dengan capaian kinerja sebanyak 1 dokumen per bulannya.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki target kinerja 100% dan anggaran Renja Tahun 2025 sebesar Rp2.403.635.040,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-1 sebanyak Rp22.800.000,00 dengan capaian kinerja sebanyak 6,96%. Adapun subkegiatan yang mendukung realisasi kegiatan ini sebagai berikut:

a. Subkegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya memiliki target kinerja sebanyak 1 paket dan anggaran sebesar Rp 1.908.171.100,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.
b. Subkegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi memiliki target kinerja sebanyak 6 orang dan anggaran sebesar Rp 221.500.000,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-1 sebesar Rp 18.000.000,00 dengan capaian kinerja sebanyak 3 orang.
c. Subkegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan memiliki target kinerja sebanyak 1472 orang dan anggaran sebesar Rp 273.963.940,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-1 sebesar Rp 4.800.000,00 dengan capaian kinerja sebanyak 100 orang.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki target kinerja 100% dan anggaran Renja Tahun 2025 sebesar Rp 27.337.444.787,20 dan telah terealisasi pada triwulan ke-1 sebanyak Rp28.170.400,00 dengan capaian kinerja sebanyak 17,86%. Adapun subkegiatan yang mendukung realisasi kegiatan ini sebagai berikut:

a. Subkegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor memiliki target kinerja sebanyak 3 paket dan anggaran sebesar Rp 923.859.100,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-1 sebesar Rp 26.670.400,00 dengan capaian kinerja sebanyak 1 paket.
b. Subkegiatan penyediaan bahan logistik kantor memiliki target kinerja sebanyak 1 paket dan anggaran sebesar Rp 25.160.245.200,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.

c. Subkegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan memiliki target kinerja sebanyak 1 paket dan anggaran sebesar Rp 935.450.487,20 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.
d. Subkegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD memiliki target kinerja sebanyak 1 laporan dan anggaran sebesar Rp 100.000.000,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.
e. Subkegiatan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD memiliki target kinerja sebanyak 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp217.890.000,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-1 sebesar Rp1.500.000,00 dengan capaian kinerja sebanyak 1 dokumen.

5. **Kegiatan Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

   Kegiatan ini memiliki target kinerja 100% dan anggaran Renja Tahun 2025 sebesar Rp482.711.360,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1. Adapun subkegiatan yang mendukung realisasi kegiatan ini sebagai berikut:

   a. Subkegiatan pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan sebanyak 1 unit dan anggaran sebesar Rp 482.711.360,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.

6. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

   Kegiatan ini memiliki target kinerja 100% dan anggaran Renja Tahun 2025 sebesar Rp2.228.171.541,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-1 sebanyak Rp 314.285.751,00 dengan capaian kinerja sebanyak 16,67%. Adapun subkegiatan yang mendukung realisasi kegiatan ini sebagai berikut:

   a. Subkegiatan penyediaan jasa surat menyurat memiliki target kinerja sebanyak 1 laporan dan anggaran sebesar Rp 4.810.000,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.
   b. Subkegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik memiliki target kinerja sebanyak 1 laporan dan anggaran sebesar Rp 343.060.700,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-1 sebanyak Rp 80.723.511,00 dengan capaian kinerja sebanyak 1 laporan.
   c. Subkegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor memiliki target kinerja sebanyak 1 laporan dan anggaran sebesar Rp 1.880.300.841,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-1 sebanyak Rp 233.562.240,00 dengan capaian kinerja sebanyak 1 laporan.

7. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

   Kegiatan ini memiliki target kinerja 100% dan anggaran Renja Tahun 2025 sebesar Rp187.456.000,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-1 sebanyak Rp 3.000.000,00

dengan capaian kinerja sebanyak 9,09%. Adapun subkegiatan yang mendukung realisasi kegiatan ini sebagai berikut:

a. Subkegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan memiliki target kinerja sebanyak 1 unit dan anggaran sebesar Rp 37.510.000,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-1 sebanyak Rp 3.000.000,00 dengan capaian kinerja sebanyak 1 unit.
b. Subkegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya memiliki target kinerja sebanyak 10 unit dan anggaran sebesar Rp 149.946.000,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.

B. Program Pengelolaan Pendidikan

Pada program ini memiliki target kinerja dan anggaran Renja Tahun 2025 yaitu 100% dengan anggaran Rp 164.662.659.162,80 dan pagu yang telah terealisasi pada triwulan ke-1 yaitu sebesar Rp 264.708.397,00 dengan capaian kinerja sebesar 15,86%. Adapun kegiatan yang mendukung realisasi program ini terdiri dari 4 kegiatan dan 34 subkegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Kegiatan ini memiliki target kinerja 100% dan anggaran Renja Tahun 2025 sebesar Rp103.230.456.359,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-1 sebanyak Rp4.500.000,00 dengan capaian kinerja sebanyak 7,77%. Adapun subkegiatan yang mendukung realisasi kegiatan ini sebagai berikut:

a. Subkegiatan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah memiliki target kinerja sebanyak 1 unit dan anggaran sebesar Rp 16.272.529.800,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.
b. Subkegiatan pengadaan mebel sekolah memiliki target sebanyak 1 paket dan anggaran sebesar Rp 8.330.061.100,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.
c. Subkegiatan pengadaan perlengkapan sekolah memiliki target sebanyak 1 paket dan anggaran sebesar Rp 1.000.407.400,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.
d. Subkegiatan pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa memiliki target sebanyak 800 peserta didik dan anggaran sebesar Rp 162.599.500,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.
e. Subkegiatan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar memiliki target sebanyak 694 orang dan anggaran sebesar Rp 688.692.400,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.
f. Subkegiatan pembinaan kelembagaan dan manajaemen sekolah memiliki target sebanyak 169 satuan pendidikan dan anggaran sebesar Rp 413.719.900,00 dan

telah terealisasi pada triwulan ke-1 sebanyak Rp 4.500.000,00 dengan capaian kinerja sebanyak 169 satuan pendidikan.

g. Subkegiatan pengelolaan dana BOS sekolah dasar memiliki target kinerja sebanyak 169 satuan pendidikan dan anggaran sebesar Rp 59.162.775.733,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.
h. Subkegiatan koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan memiliki target kinerja sebanyak 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp295.667.400,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.
i. Subkegiatan rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah memiliki target kinerja sebanyak 68 unit dan anggaran sebesar Rp14.564.318.896,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.
j. Subkegiatan penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik memiliki target kinerja sebanyak 169 satuan pendidikan dan anggaran sebesar Rp1.521.293.300,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.
k. Subkegiatan penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar memiliki target sebanyak 100 peserta didik dan anggaran sebesar Rp 608.507.930,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.
l. Subkegiatan pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik memiliki target sebanyak 2 paket dan anggaran sebesar Rp 209.883.000,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.

2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Kegiatan ini memiliki target kinerja 100% dan anggaran Renja Tahun 2025 sebesar Rp43.992.632.861,32 dan telah terealisasi pada triwulan ke-1 sebanyak Rp47.000.000,00 dengan capaian kinerja sebanyak 5,68%. Adapun subkegiatan yang mendukung realisasi kegiatan ini sebagai berikut:

a. Subkegiatan rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah memiliki target kinerja sebanyak 22 unit dan anggaran sebesar Rp4.217.549.061,32 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.
b. Subkegiatan pengadaan mebel sekolah memiliki target sebanyak 1 paket dan anggaran sebesar Rp 2.188.837.400,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.
c. Subkegiatan pengadaan perlengkapan sekolah memiliki target sebanyak 1 paket dan anggaran sebesar Rp 612.690.000,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.
d. Subkegiatan pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa memiliki target sebanyak 920 peserta didik dan anggaran sebesar Rp 663.226.900,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.

e. Subkegiatan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan sekolah dasar memiliki target sebanyak 220 orang dan anggaran sebesar Rp 206.309.800,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.
f. Subkegiatan pembinaan kelembagaan dan manajaemen sekolah memiliki target sebanyak 80 satuan pendidikan dan anggaran sebesar Rp 251.812.400,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-1 sebanyak Rp 47.000.000,00 dengan capaian kinerja sebanyak 80 satuan pendidikan.
g. Subkegiatan pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama memiliki target kinerja sebanyak 80 satuan pendidikan dan anggaran sebesar Rp34.641.650.000,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.
h. Subkegiatan penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik memiliki target kinerja sebanyak 80 satuan pendidikan dan anggaran sebesar Rp 991.896.200,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.
i. Subkegiatan pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik memiliki target sebanyak 4 paket dan anggaran sebesar Rp 218.661.100,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.

3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kegiatan ini memiliki target kinerja 100% dan anggaran Renja Tahun 2025 sebesar Rp 12.416.309.866,48 dan telah terealisasi pada triwulan ke-1 sebanyak Rp 93.900.000,00 dengan capaian kinerja sebanyak 22,78%. Adapun subkegiatan yang mendukung realisasi kegiatan ini sebagai berikut:

a. Subkegiatan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD memiliki target sebanyak 4 unit dan anggaran sebesar Rp 160.658.566,48 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.
b. Subkegiatan pengadaan mebel PAUD memiliki target sebanyak 1 paket dan anggaran sebesar Rp 166.427.400,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.
c. Subkegiatan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD memiliki target sebanyak 320 orang dan anggaran sebesar Rp282.272.100,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.
d. Subkegiatan pembinaan kelembagaan dan manjemen PAUD memiliki target sebanyak 270 satuan pendidikan dan anggaran sebesar Rp 1.762.924.000,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-1 sebanyak Rp 93.900.000,00 dengan capaian kinerja sebanyak 270 satuan pendidikan.
e. Subkegiatan pengelolaan dana BOP PAUD memiliki target sebanyak 270 satuan pendidikan dan anggaran sebesar Rp 6.454.614.000,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.

f. Subkegiatan pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik PAUD memiliki target sebanyak 50 paket dan anggaran sebesar Rp 2.659.770.000,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.
g. Subkegiatan penyelenggaraan proses belajar PAUD memiliki target sebanyak 270 satuan pendidikan dan anggaran sebesar Rp 647.607.800,00 dan belum terealiasasi pada triwulan ke-1.

4. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Kegiatan ini memiliki target kinerja 100% dan anggaran Renja Tahun 2025 sebesar Rp5.023.260.076,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-1 sebanyak Rp119.308.397,00 dengan capaian kinerja sebanyak 27,19%. Adapun subkegiatan yang mendukung realisasi kegiatan ini sebagai berikut:

a. Subkegiatan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan nonformal/kesetaraan memiliki target sebanyak 100 orang dan anggaran sebesar Rp 123.267.600,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-1 sebanyak Rp 42.431.125,00 dengan capaian kinerja sebanyak 50 orang.
b. Subkegiatan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal/kesetaraan memiliki target sebanyak 16 satuan pendidikan dan anggaran sebesar Rp 371.812.580,00 dan belum terealiasasi pada triwulan ke-1.
c. Subkegiatan pengelolaan dana BOP sekolah nonformal/kesetaraan memiliki target sebanyak 270 satuan pendidikan dan anggaran sebesar Rp 2.667.630.000,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.
d. Subkegiatan penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik memiliki target sebanyak 1635 peserta didik dan anggaran sebesar Rp 1.491.987.996,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-1 sebanyak Rp 76.877.272,00 dengan capaian kinerja sebanyak 500 orang.
e. Subkegiatan pemeliharaan rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah nonformal/kesetaraan memiliki target sebanyak 1 unit dan anggaran sebesar Rp66.739.900,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.
f. Subkegiatan pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik PAUD memiliki target sebanyak 1 paket dan anggaran sebesar Rp 301.822.000,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.

C. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pada program ini memiliki target kinerja dan anggaran Renja Tahun 2025 yaitu 1:17 rasio dan 63% dengan anggaran Rp 140.378.700,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1. Adapun kegiatan yang mendukung realisasi program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 2 subkegiatan sebagai berikut:

1. **Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**

   Kegiatan ini memiliki target kinerja 100% dan anggaran Renja Tahun 2025 sebesar Rp 140.378.700,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1. Adapun subkegiatan yang mendukung realisasi kegiatan ini sebagai berikut:

   a. Subkegiatan perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan memiliki target sebanyak 2 dokumen dan anggaran sebesar Rp 20.479.300,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.
   b. Subkegiatan penataan pendistribusian pendidik dantenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan memiliki target sebanyak 4 laporan dan anggaran sebesar Rp 119.899.400,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.

D. Program Pengembangan Kebudayaan

Pada program ini memiliki target kinerja dan anggaran Renja Tahun 2025 yaitu 100% dengan anggaran Rp 2.691.968.200,00 dan pagu yang telah terealisasi pada triwulan ke-1 yaitu sebesar Rp 41.000.000,00 dengan capaian kinerja sebesar 0,47%. Adapun kegiatan yang mendukung realisasi program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 4 subkegiatan sebagai berikut:

1. **Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**

   Kegiatan ini memiliki target kinerja 100% dan anggaran Renja Tahun 2025 sebesar Rp1.054.498.000,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-1 sebanyak Rp41.000.000,00 dengan capaian kinerja sebanyak 0,94%. Adapun subkegiatan yang mendukung realisasi kegiatan ini sebagai berikut:

   a. Subkegiatan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan memiliki target sebanyak 6 objek dan anggaran sebesar Rp761.496.000,00 dan telah terealisasi pada triwulan ke-1 sebanyak Rp41.000.000,00 dengan capaian kinerja sebanyak 1 objek.
   b. Subkegiatan pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan memiliki target sebanyak 100 orang dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.

2. **Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**

   Kegiatan ini memiliki target kinerja 100% dan anggaran Renja Tahun 2025 sebesar Rp1.578.012.200,00 dam belum terealisasi pada triwulan ke-1. Adapun subkegiatan yang mendukung realisasi kegiatan ini sebagai beikut:

a. Subkegiatan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya memiliki target sebanyak 5 objek dan anggaran sebesar Rp 740.473.200,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.
b. Subkegiatan pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata tradisional memiliki target sebanyak 2 laporan dan anggaran sebesar Rp 837.539.000,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.

E. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Pada program ini memiliki target kinerja dan anggaran Renja Tahun 2025 yaitu 100% dengan anggaran Rp 59.458.000,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1. Adapun kegiatan yang mendukung realisasi program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 1 subkegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

   Kegiatan ini memiliki target kinerja 100% dan anggaran Renja Tahun 2025 sebesar Rp59.458.000,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1. Adapun subkegiatan yang mendukung realisasi kegiatan ini sebagai berikut:

   a. Subkegiatan Penetapan Cagar Budaya memiliki target kinerja 1 objek dan anggaran sebesar Rp 59.458.000,00 dan belum terealisasi pada triwulan ke-1.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rencana Kerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Maka, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mengalami perubahan yang cukup signifikan pada program, kegiatan dan subkegiatan untuk tahun 2025.

Untuk mewujudkan tujuan RPD dan sasaran RPD yang telah ditetapkan pada tahun 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak telah merencanakan Program, Kegiatan dan Subkegiatan sebanyak 5 program, 15 kegiatan dan 62 subkegiatan yang akan dialokasikan dengan anggaran sebelumnya sebesar Rp 505.578.085.178,00.

Berdasarkan surat edaran Wali Kota Pontianak Nomor 000.7.2.4/ /BAPPERIDA/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mengalami perubahan RKPD tahun 2025 menjadi Rp 478.564.612.720,00. Secara rinci perubahan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tabel Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Pontianak Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							**472.142.745.000,00**	**483.153.450.447,00**	**478.564.612.720,00**	**6.421.867.720,00**							**479.542.315.876,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**469.065.463.300,00**	**480.076.171.547,00**	**475.593.665.520,68**	**6.528.202.220,68**							**476.423.290.176,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**469.065.463.300,00**	**480.076.171.547,00**	**475.593.665.520,68**	**6.528.202.220,68**							**476.423.290.176,00**	
1,	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan**				**95 %**	**95 %**	**296.445.103.931,00**	**313.766.697.588,00**	**313.466.488.376,20**	**4.260.946.300,00**							**300.706.050.231,00**	
	1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***				**100 %**	**100 %**	**195.208.400,00**	**289.248.400,00**	**500.756.098,00**	**305.547.698,00**			**Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan**	**Seluruh Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak**		**280.339.900,00**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	33.166.000,00	33.166.000,00	34.450.540,00	1.284.540,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	32.952.600,00	32.952.600,00	34.325.600,00	1.373.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			44.850.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	44.856.800,00	44.856.800,00	46.223.400,00	1.366.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang			45.329.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															narkoba, judi, dan penyeludupan.	Berkesetaraan				
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	53.741.600,00	53.741.600,00	55.236.600,00	1.495.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			61.733.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	30.491.400,00	54.531.400,00	330.519.958,00	300.028.558,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			33.427.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				-	1 Data	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***				**100 %**	**100 %**	**288.729.162.600,00**	**305.224.500.447,00**	**305.150.110.860,00**	**16.420.948.260,00**			**Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan**	**Seluruh Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak**		**293.555.119.600,00**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2766 Orang /bulan	2766 Orang /bulan	285.496.971.000,00	301.733.340.447,00	301.658.950.860,00	16.161.979.860,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK NON FISIK-TUNJANGAN GURU ASN DAERAH-TUNJANGAN PROFESI GURU	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			290.322.928.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3.232.191.600,00	3.491.160.000,00	3.491.160.000,00	258.968.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperku	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			3.232.191.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Kel/Desa		at pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan				
	1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Presentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***				**95 %**	**95 %**	**2.138.198.100,00**	**2.403.635.040,00**	**2.398.253.590,00**	**260.055.490,00**			**Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan**	**Seluruh Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak**		**2.159.198.100,00**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	1.812.695.600,00	1.908.171.100,00	1.888.589.200,00	75.893.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			1.812.695.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	39.000.000,00	221.500.000,00	350.474.550,00	311.474.550,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				1472 Orang	1472 Orang	286.502.500,00	273.963.940,00	159.189.840,00	-127.312.660,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			286.502.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah***				**100 %**	**100 %**	**3.152.591.100,00**	**2.950.974.800,00**	**3.074.513.287,20**	**-78.077.812,80**			**Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan**	**Seluruh Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak**		**2.180.665.600,00**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															judi, dan penyeludupan.					
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	975.229.300,00	871.753.600,00	1.606.620.400,00	631.391.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			975.229.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	219.539.600,00	160.245.200,00	160.662.400,00	-58.877.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			219.680.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1.642.292.000,00	1.501.086.000,00	938.040.487,20	-704.251.512,80	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			725.043.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	15.028.200,00	0,00	0,00	-15.028.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			16.420.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	184.010.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	-84.010.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang			127.481.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															narkoba, judi, dan penyeludupan.	Berkesetaraan				
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	116.492.000,00	217.890.000,00	269.190.000,00	152.698.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			116.812.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**482.711.360,00**	**477.317.000,00**	**477.317.000,00**			**-**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan**	**-**		**0,00**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	482.711.360,00	477.317.000,00	477.317.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Kel/Desa			Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan				
	1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				**100 %**	**100 %**	**2.037.476.731,00**	**2.228.171.541,00**	**1.376.041.541,00**	**-661.435.190,00**			**Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan**	**Seluruh Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak**		**2.020.191.031,00**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	4.460.000,00	4.810.000,00	4.810.000,00	350.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			5.175.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	375.060.700,00	343.060.700,00	343.060.700,00	-32.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			357.060.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.657.956.031,00	1.880.300.841,00	1.028.170.841,00	-629.785.190,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			1.657.956.031,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***				**100 %**	**100 %**	**192.467.000,00**	**187.456.000,00**	**489.496.000,00**	**297.029.000,00**			**Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan**	**Seluruh Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak**		**510.536.000,00**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															judi, dan penyeludupan.					
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	34.140.000,00	37.510.000,00	37.510.000,00	3.370.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			34.140.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	158.327.000,00	149.946.000,00	151.306.000,00	-7.021.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			166.396.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	2 Unit	0,00	0,00	300.680.000,00	300.680.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			310.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2,	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**				**100 % 98 %**	**-**	**172.412.393.469,00**	**166.169.095.259,00**	**162.014.511.644,48**	**3.096.880.576,00**							**175.509.274.045,00**	
	1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	***Presentase Pencapaian Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***				**100 %**	**100 %**	**97.196.419.096,00**	**103.969.561.759,01**	**101.063.351.902,00**	**3.866.932.806,00**			**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan**	**Seluruh Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak**		**102.705.960.135,00**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	238.237.600,00	0,00	0,00	-238.237.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			461.556.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	560.945.800,00	0,00	0,00	-560.945.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			443.030.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	1.669.081.100,00	16.290.049.800,00	16.272.529.800,00	14.603.448.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			3.119.831.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	1.661.222.600,00	0,00	0,00	-1.661.222.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			1.661.222.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	322.574.800,00	0,00	0,00	-322.574.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			322.574.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				15 Ruang	15 Ruang	310.012.700,00	0,00	0,00	-310.012.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			310.012.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	4.023.514.800,00	8.340.141.100,00	8.330.061.100,00	4.306.546.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			4.023.514.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	600.000.000,00	599.847.400,00	992.657.400,00	392.657.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				800 Peserta Didik	800 Peserta Didik	542.459.100,00	628.881.900,00	162.599.500,00	-379.859.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			479.979.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				694 Orang	694 Orang	921.393.400,00	889.216.200,00	665.445.400,00	-255.948.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			921.393.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				169 Satuan Pendidikan	169 Satuan Pendidikan	1.129.250.100,00	890.275.300,00	413.719.900,00	-715.530.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			972.712.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				169 Satuan Pendidikan	171 Satuan Pendidikan	58.645.887.500,00	59.162.775.733,01	56.843.890.976,00	-1.801.996.524,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			60.314.553.239,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	572.282.600,00	0,00	0,00	-572.282.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			1.220.996.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar																		
			Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	133.854.200,00	0,00	0,00	-133.854.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			133.854.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	304.067.400,00	295.667.400,00	-4.332.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				6 Ruang	6 Ruang	1.799.876.300,00	0,00	0,00	-1.799.876.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			1.799.876.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				68 Unit	68 Unit	14.564.318.896,00	14.564.318.896,00	14.747.018.896,00	182.700.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			16.564.318.896,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				169 Satuan Pendidikan	169 Satuan Pendidikan	1.446.545.900,00	1.475.997.100,00	1.521.293.300,00	74.747.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			1.301.571.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				45 Ruang	45 Ruang	7.009.998.500,00	0,00	0,00	-7.009.998.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			7.009.998.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	235.969.300,00	608.507.930,00	608.585.230,00	372.615.930,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			235.969.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	2 Paket	508.993.900,00	215.483.000,00	209.883.000,00	-299.110.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			508.993.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	***Presentase Pencapaian Pengelolaan Pendiidkan Sekolah Menengah Pertama***				**100 %**	**100 %**	**57.597.821.218,00**	**44.160.730.299,99**	**43.508.189.800,00**	**-14.089.631.418,00**			**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan**	**Seluruh Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak**		**56.226.026.055,00**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	434.720.700,00	0,00	0,00	-434.720.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			981.206.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	206.430.400,00	0,00	0,00	-206.430.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			509.846.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	78.881.300,00	0,00	0,00	-78.881.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			78.881.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				44 Ruang	44 Ruang	5.746.719.000,00	0,00	0,00	-5.746.719.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			5.746.719.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	156.050.000,00	0,00	0,00	-156.050.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			156.050.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	392.676.300,00	0,00	0,00	-392.676.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			392.676.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium																		
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	3 Ruang	1.610.433.700,00	0,00	0,00	-1.610.433.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			1.610.433.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				17 Unit	22 Unit	4.086.397.918,00	4.154.104.000,00	3.687.436.000,00	-398.961.918,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			3.555.995.250,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	4.023.514.800,00	2.197.677.400,00	2.188.837.400,00	-1.834.677.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			4.023.514.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																		
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	400.000.000,00	401.213.500,00	612.690.000,00	212.690.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	224.251.500,00	0,00	0,00	-224.251.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			224.251.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				800 Peserta Didik	800 Peserta Didik	489.084.100,00	489.084.100,00	342.356.900,00	-146.727.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			489.084.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				220 Orang	220 Orang	220.849.400,00	220.849.100,00	244.379.800,00	23.530.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			220.849.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				80 Satuan Pendidikan	80 Satuan Pendidikan	620.796.400,00	531.745.600,00	251.812.400,00	-368.984.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			606.335.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				80 Satuan Pendidikan	80 Satuan Pendidikan	36.260.500.000,00	34.641.650.000,00	34.641.650.000,00	-1.618.850.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			34.181.258.005,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				80 Satuan Pendidikan	80 Satuan Pendidikan	693.378.700,00	905.530.300,00	999.496.200,00	306.117.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			717.619.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																		
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				8 Ruang	8 Ruang	1.279.006.100,00	0,00	0,00	-1.279.006.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			1.279.006.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				4 Paket	4 Paket	278.755.700,00	223.501.100,00	218.661.100,00	-60.094.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			456.922.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	***Presentase Pencapaian Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)***				**100 %**	**100 %**	**12.491.672.150,00**	**12.740.172.620,00**	**12.419.709.866,48**	**-71.962.283,52**			**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan**	**Seluruh Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak**		**10.845.204.530,00**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				8 Unit	4 Unit	2.800.357.200,00	207.547.100,00	160.658.566,48	-2.639.698.633,52	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			1.345.384.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				1 Paket	1 Paket	390.821.500,00	0,00	166.427.400,00	-224.394.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			390.821.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD																		
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				-	45 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	98.287.230,00	0,00	0,00	-98.287.230,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			98.287.230,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				320 Orang	320 Orang	285.386.400,00	314.564.100,00	285.672.100,00	285.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			232.778.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				270 Satuan Pendidikan	270 Satuan Pendidikan	2.136.294.320,00	2.093.591.320,00	1.762.924.000,00	-373.370.320,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			1.997.407.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				270 Satuan Pendidikan	270 Satuan Pendidikan	6.419.400.000,00	6.736.650.000,00	6.736.650.000,00	317.250.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			6.419.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				-	50 Paket	0,00	2.659.770.000,00	2.659.770.000,00	2.659.770.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				270 Satuan Pendidikan	270 Satuan Pendidikan	361.125.500,00	728.050.100,00	647.607.800,00	286.482.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			361.125.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	***Presentase Pencapaian Pengelolaan Pendidikan Sekolah Nonformal/Kesetaraan***				**95 %**	**95 %**	**5.126.481.005,00**	**5.298.630.580,00**	**5.023.260.076,00**	**-103.220.929,00**			**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan**	**Seluruh Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak**		**5.732.083.325,00**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	49.999.900,00	0,00	0,00	-49.999.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			49.999.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				100 Orang	100 Orang	97.679.000,00	144.688.400,00	123.267.600,00	25.588.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			94.389.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				16 Satuan Pendidikan	16 Satuan Pendidikan	474.415.125,00	381.917.100,00	371.812.580,00	-102.602.545,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			474.375.045,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				16 Satuan Pendidikan	16 Satuan Pendidikan	2.559.440.000,00	2.667.630.000,00	2.667.630.000,00	108.190.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			2.559.440.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	268.429.300,00	336.109.200,00	284.119.600,00	15.690.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			274.863.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun				1 unit	1 unit	227.093.800,00	0,00	0,00	-227.093.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			829.592.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				-	1 Paket	0,00	301.822.000,00	301.822.000,00	301.822.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3,	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Rasio Guru SD Terhadap Murid Persentase Guru yang bersertifikasi**				**1:17 63 Rasio %**	**1:17 63 Rasio %**	**207.965.900,00**	**140.378.700,00**	**112.665.500,00**	**0,00**							**207.965.900,00**	
	1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	***Presentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan***				**100 %**	**100 %**	**207.965.900,00**	**140.378.700,00**	**112.665.500,00**	**-95.300.400,00**			**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan**	**Seluruh Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak**		**207.965.900,00**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2 Dokumen	2 Dokumen	58.458.700,00	20.479.300,00	39.246.100,00	-19.212.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			58.458.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				4 Laporan	4 Laporan	149.507.200,00	119.899.400,00	73.419.400,00	-76.087.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			149.507.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**3.077.281.700,00**	**3.077.278.900,00**	**2.970.947.199,32**	**-106.334.500,68**							**3.119.025.700,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**3.077.281.700,00**	**3.077.278.900,00**	**2.970.947.199,32**	**-106.334.500,68**							**3.119.025.700,00**	
1,	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Kebudayaan Lokal Daerah yang Mengalami Perkembangan**				**100 %**	**100 %**	**2.690.574.900,00**	**2.734.400.200,00**	**2.911.489.199,32**	**7.161.400,00**							**2.697.736.300,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	***Presentase Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota***				**100 %**	**100 %**	**1.074.562.000,00**	**1.156.388.000,00**	**1.054.498.000,00**	**-20.064.000,00**			**Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan**	**Seluruh Masyarakat dan Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak**		**1.069.849.900,00**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																		
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				5 Objek	6 Objek	703.430.000,00	863.386.000,00	746.400.000,00	42.970.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			703.430.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				100 Orang	100 Orang	371.132.000,00	293.002.000,00	308.098.000,00	-63.034.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			366.419.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	***Presentase Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota***				**100 %**	**100 %**	**1.616.012.900,00**	**1.578.012.200,00**	**1.856.991.199,32**	**240.978.299,32**			**Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan**	**Seluruh Masyarakat dan Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak**		**1.627.886.400,00**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				5 Objek	5 Objek	778.473.900,00	740.473.200,00	740.473.200,00	-38.000.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			707.780.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional																		
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				2 Laporan	2 Laporan	837.539.000,00	837.539.000,00	1.116.517.999,32	278.978.999,32	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			920.105.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.02.2.03	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**-**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan**	**-**		**0,00**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi				-	5 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2,	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase Kesenian Tradisional yang Dikembangkan**				**100 %**	**100 %**	**208.512.800,00**	**208.510.700,00**	**0,00**	**0,00**							**208.512.800,00**	
	2.22.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	***Presentase Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota***				**100 %**	**100 %**	**208.512.800,00**	**208.510.700,00**	**0,00**	**-208.512.800,00**			**Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkat**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang**	**Seluruh Masyarakat dan Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak**		**208.512.800,00**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															an toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	**Berkesetaraan**				
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																		
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				166 Orang	166 Orang	208.512.800,00	208.510.700,00	0,00	-208.512.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			208.512.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3,	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase Objek Sejarah yang Dibina**				**100 %**	**100 %**	**74.700.000,00**	**74.910.000,00**	**0,00**	**300.000,00**							**75.000.000,00**	
	2.22.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	***Presentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota***				**100 %**	**100 %**	**74.700.000,00**	**74.910.000,00**	**0,00**	**-74.700.000,00**			**Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkat**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang**	**Seluruh Masyarakat dan Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak**		**75.000.000,00**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															an toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	**Berkesetaraan**				
	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah				10 Unit	10 Unit	74.700.000,00	74.910.000,00	0,00	-74.700.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4,	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Pelestarian Cagar Budaya**				**100 %**	**100 %**	**103.494.000,00**	**59.458.000,00**	**59.458.000,00**	**34.282.600,00**							**137.776.600,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.05.2.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	***Presentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota***				**100 %**	**100 %**	**103.494.000,00**	**59.458.000,00**	**59.458.000,00**	**-44.036.000,00**			**Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan**	**Seluruh Masyarakat dan Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak**		**137.776.600,00**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				1 Objek	1 Objek	103.494.000,00	59.458.000,00	59.458.000,00	-44.036.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			137.776.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**-**				**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**-**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan**	**-**		**0,00**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				-	2 Objek	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		UPT LAYANAN DISABILITAS DAN ASESMEN CENTER							**472.142.745.000,00**	**483.153.450.447,00**	**478.564.612.720,00**	**6.421.867.720,00**							**479.542.315.876,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**469.065.463.300,00**	**480.076.171.547,00**	**475.593.665.520,68**	**6.528.202.220,68**							**476.423.290.176,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**469.065.463.300,00**	**480.076.171.547,00**	**475.593.665.520,68**	**6.528.202.220,68**							**476.423.290.176,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1,	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Presentase PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetraan yang Terakreditasi Persentase Warga Negara Yang Mendapatkan Layanan Disabilitas Presentase PAUD yang Terakreditasi Presentase SMP yang Terkareditasi Presentase SD yang Terkareditasi**				**100% 98% 98% 99 %**	**100% 98% 98% 99 %**	**172.412.393.469,00**	**166.169.095.259,00**	**162.014.511.644,48**	**3.096.880.576,00**							**175.509.274.045,00**	
	1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	***Persentase Warga Negara Yang Mendapatkan Layanan Disabilitas Presentase Pencapaian Pengelolaan Pendidikan Sekolah Nonformal/Kesetaraan***				**95 %**	**95 %**	**5.126.481.005,00**	**5.298.630.580,00**	**5.023.260.076,00**	**-103.220.929,00**			**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan**	**Seluruh Masyarakat dan Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak**		**5.732.083.325,00**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				835 Peserta Didik	835 Peserta Didik	580.878.736,00	569.878.736,00	500.732.796,00	-80.145.940,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			580.878.736,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	74.057.000,00	85.057.000,00	66.739.900,00	-7.317.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			74.057.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															Z), dan penyandang disabilitas.					
		UPT IPTEK DAN BAHASA							**472.142.745.000,00**	**483.153.450.447,00**	**478.564.612.720,00**	**6.421.867.720,00**							**479.542.315.876,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**469.065.463.300,00**	**480.076.171.547,00**	**475.593.665.520,68**	**6.528.202.220,68**							**476.423.290.176,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**469.065.463.300,00**	**480.076.171.547,00**	**475.593.665.520,68**	**6.528.202.220,68**							**476.423.290.176,00**	
1,	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Presentase PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetraan yang Terakreditasi Presentase PAUD yang Terakreditasi Presentase SMP yang Terkareditasi Presentase SD yang Terkareditasi**				**100% 98% 98% 99 %**	**100% 98% 98% 99 %**	**172.412.393.469,00**	**166.169.095.259,00**	**162.014.511.644,48**	**3.096.880.576,00**							**175.509.274.045,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	***Presentase Pencapaian Pengelolaan Pendiidkan Sekolah Menengah Pertama***				**100 %**	**100 %**	**57.597.821.218,00**	**44.160.730.299,99**	**43.508.189.800,00**	**-14.089.631.418,00**			**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan**	**Seluruh Masyarakat dan Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak**		**56.226.026.055,00**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				120 Peserta Didik	120 Peserta Didik	395.375.200,00	395.375.199,99	320.870.000,00	-74.505.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			395.375.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
	1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	***Presentase Pencapaian Pengelolaan Pendidikan Sekolah Nonformal/Kesetaraan***				**95 %**	**95 %**	**5.126.481.005,00**	**5.298.630.580,00**	**5.023.260.076,00**	**-103.220.929,00**			**Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.**	**Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan**	**Seluruh Masyarakat dan Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak**		**5.732.083.325,00**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				300 Peserta Didik	300 Peserta Didik	794.488.144,00	811.528.144,00	707.135.600,00	-87.352.544,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			794.488.144,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	J U M L A H								**472.142.745.000,00**	**483.153.450.447,00**	**478.564.612.720,00**	**6.421.867.720,00**							**479.542.315.876,00**	

3.2. Pendanaan

Rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, serta mengacu pada prioritas Pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025. Rencana ini bertujuan untuk menjawab isu-isu strategis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta mendukung pencapaian target Pembangunan daerah dan nasional.

Total pagu indikatif untuk pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp 478.564.612.720,00, yang mengalami penurunan dibandingkan alokasi pada RKPD murni sebelumnya sebesar Rp483.153.450.447,00. Pendanaan kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak dan diarahkan untuk mendukung prioritas nasional maupun daerah.

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak selama 1 (satu) tahun. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2025 disusun mempedomani dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perubahan Renja ini dilakukan sebagai bentuk respons terhadap dinamika kebijakan, perubahan asumsi perencanaan, serta penyesuaian terhadap kebutuhan dan kondisi aktual di lapangan. Dalam penyusunannya, dokumen ini telah mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Proses penyusunan maupun pelaksanaan serta perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kelurahan hingga Musrenbang tingkat Kota. Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak Tahun 2025 merupakan efesiensi dan efektivitas anggaran dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian optimalisasi kinerja perangkat daerah.

Pontianak, Mei 2025
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Pontianak

SRI SUJIARTI, S.H.M.Si
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19680215 199303 2 009

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

DINAS KESEHATAN
KOTA PONTIANAK

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr.Wb

Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2025. Dokumen ini dibuat sebagai tindak lanjut dari telah ditetapkannya RKPD Tahun 2025 yang menjadi dasar bagi Dinas Kesehatan Kota Pontianak untuk menyusun rencana program dan kegiatan yang disesuaikan dengan arah kebijakan, program, dan kegiatan prioritas bidang kesehatan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan dokumen Renja Perubahan Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2025 sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi seluruh stakeholder yang terlibat di dalam mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan di Kota Pontianak.

Waalaikum Salam. Wr.Wb

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Pontianak

dr. Saptiko,M.Med.PH
Pembina Utama Muda
NIP. 19661113 199603 1 003

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR KEPALA DINAS KESEHATAN …..…….. i

DAFTAR ISI……..……..…….……... ii

DAFTAR TABEL…….……..…… iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang….…….……..... 1

1.2 Landasan Hukum…….…….……..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan…….……..... 4

1.4 Sistematika Penulisan…….. 4

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja ……..……...……...……..…... 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan …….…….…... 20

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan.….…… 22

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD……..……..……. 24

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…….……..……... 45

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Kerja …….……... 50

3.2 Pendanaan ……..... 162

BAB IV PENUTUP ..... ……..……..……..…… 166

.

DAFTAR TABEL

		Hal
2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025 ……	6
2.2	Realisasi Capaian SPM Triwulan I Tahun 2025..……..…	20
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025	25
2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 .....…	45

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2025 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) awal tahun 2025. Perubahan ini merupakan respons atas perkembangan situasi pembangunan kesehatan di daerah, kebijakan nasional maupun daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Perubahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi aktual dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat, serta berbagai masukan dari hasil pengawasan, monitoring, dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Selain itu, perubahan ini juga mencerminkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perubahan, serta kebijakan strategis terkini dari pemerintah pusat dan daerah.

Secara umum, penyusunan Renja Perubahan ini mempertimbangkan hal-hal berikut:

- Penyesuaian terhadap Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2025;
- Perubahan alokasi anggaran berdasarkan hasil Musrenbang Perubahan;
- Masukan dari hasil pengawasan, monitoring, dan evaluasi;
- Perubahan kebijakan strategis dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
- Kebutuhan layanan kesehatan yang berkembang di masyarakat;

Dengan adanya dokumen Renja Perubahan ini, Dinas Kesehatan Kota Pontianak berkomitmen untuk menetapkan kembali arah kebijakan, sasaran, dan kegiatan yang lebih relevan dan adaptif dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat Kota Pontianak.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2025 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/1819.A/SJ tanggal 22 April 2024 tentang hasil pemetaan dan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 119);
10. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5);
11. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 47);
13. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 10);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan Kota Pontianak dalam melaksanakan program dan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2025.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan ini adalah untuk menyempurnakan dokumen Perencanaan Tahunan Dinas Kesehatan Kota Pontianak agar selaras dengan kondisi aktual, memperjelas prioritas pembangunan kesehatan, serta meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan Pembangunan Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Perubahan Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI HASIL PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN BERJALAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB IV	PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja (Triwulan I)

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Pontianak menunjukkan adanya pelaksanaan layanan kesehatan dasar yang sudah berjalan, namun sebagian besar indikator capaian kinerja masih berada di bawah 50%. Hal ini mencerminkan adanya tantangan dalam pemenuhan target pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat.

Berikut ini adalah beberapa capaian indikator pelayanan kesehatan strategis:

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Kegiatan Tahun 2023 (n-1)	Target Program dan Kegiatan (Renja) Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2025	
										Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA (%)
2					3	4	5	6	7	8	9
					DINAS KESEHATAN						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan					
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	3 Dokumen	49,62
1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen		11 Dokumen	3 Dokumen	27,27
1	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	0 Laporan	0,00
1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	2 Laporan	40,00
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan		12 Bulan	3 Bulan	25,00

Page 1

1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.103 Orang/bulan		1.087 Orang/bulan	1,265 Orang/bulan	116,38
1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen		24 Dokumen	6 Dokumen	25,00
1	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	3 Dokumen	25,00
1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00
1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	0 Laporan	0,00
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12 Bulan		12 Bulan	3 Bulan	25,00
1	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	3 Laporan	25,00
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan		12 Bulan	0 Bulan	0,00
1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		2 Paket	0 Paket	0,00
1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00
1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	180 Orang		105 Orang	0 Orang	0,00

Page 2

1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	0 Paket	0,00
1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26 Paket		16 Paket	0 Paket	0,00
1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	0 Paket	0,00
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 Paket		17 Paket	6 Paket	35,29
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	0 Paket	0,00
1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	2 Dokumen	16,67
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan		15 Laporan	0 Laporan	0,00
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	0,00
1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00
1	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	0 Unit	0,00
1	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel						
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35 Unit		55 Unit	0 Unit	0,00
1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60 Unit		60 Unit	1 Unit	1,67

Page 3

1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan		12 Bulan	3 Bulan	25,00
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	3 Laporan	23,08
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	3 Laporan	23,08
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah					
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	48 Unit		48 Unit	12 Unit	25,00
1					NON URUSAN						
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan					
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah					
1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan					
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah					

Page 4

02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit		40 Unit	8 Unit	20,00
				NON URUSAN						
02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						
02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan					
02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah					
02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan					
02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah					
02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	205 Unit		145 Unit	0 Unit	0,00
02	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00
02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	1 Unit	25,00

Page 5

				NON URUSAN						
02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						
02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan					
02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah					
02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 %				
02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Persentase UPT yang melaksanakan PPK-BLUD	100 % 27 Unit		100 % 27 Unit	100 % 27 Unit	100 % 27 Unit
02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		27 Unit Kerja	27Unit Kerja	100,00
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasyankes Pemerintah terakreditasi Persentase Fasyankes Pemerintah terakreditasi Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan					
02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1) Persentase fasilitas kesehatan pemerintah sesuai standar; 2) Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah UPTD/ UPK yang memiliki obat, BMHP, dan Alkes sesuai standar 2)Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan Persentase fasilitas kesehatan pemerintah sesuai standar ; Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah UPTD/ UPK yang memiliki obat, BMHP, dan Alkes sesuai standar					

Page 6

02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas						
					Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	4 Unit		5 Unit	0 Unit	0,00
02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
					Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	6 Unit		2 Unit	0 Unit	0,00
02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas						
					Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00
02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit						
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	40 Unit		30 Unit	0 Unit	0,00
02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas						
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	6 Unit		2 Unit	0 Unit	0,00
02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya						
					Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	6 Unit		2 Unit	0 Unit	0,00
02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	90 Unit		80 Unit	0 Unit	0,00
02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi						
					Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	25 Unit		125 Unit	0 Unit	0,00
02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	5 Unit		5 Unit	1 Unit	20,00

Page 7

02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket		4 Paket	0Paket	0,00
02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan						
					Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	100,00
02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13)Persentase penanggulangan KLB yang direspon < 24 jam 17) Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga 22)Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 33)Persentase penanggulangan KLB yang direspon < 24 jam 5)Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 %		100 %	100 %	100 %
02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.524 Orang		11.506 Orang	1.546 Orang	13,44
02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11.002 Orang		10.984 Orang	1.449 Orang	13,19
02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.477 Orang		10.461 Orang	1.437 Orang	13,74
02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50.378 Orang		50.252 Orang	4.285 Orang	8,53
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					
02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	88.897 Orang		89.041 Orang	18.546Orang	20,83

Page 8

02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	574.165 Orang		56.2876 Orang	52.584 Orang	9,34
02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	81.199 Orang		73.992 Orang	11.849Orang	16,01
02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	172.197 Orang		168.845 Orang	18.884 Orang	11,18
02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14.166 Orang		13.890 Orang	3.359 Orang	24,18
02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.465 Orang		1.436 Orang	630 Orang	43,87
02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	12.495 Orang		11.996 Orang	3.149 Orang	26,25
02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	16.327 Orang		15.936 Orang	3.585 Orang	22,50
02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen		12 Dokumen	3 Dokumen	25,00
02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen		12 Dokumen	0 Dokumen	0,00

Page 9

02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	36 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	8,33
02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	33,33
02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	3 Dokumen	25,00
02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)						
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	131.232 Orang		115.781 Orang	5.189 Orang	4,48
02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan						
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	3 Dokumen	25,00
02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	24 Dokumen		24 Dokumen	6 Dokumen	25,00
02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	3 Dokumen	25,00
02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	24 Dokumen		25 Dokumen	6 Dokumen	24,00
02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	24 Dokumen		24 Dokumen	10 Dokumen	41,67
02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						
					Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.661 Orang		2.221 Orang	509 Orang	22,92

Page 10

02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						
					Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95 Orang		95 Orang	17 Orang	17,89
02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	11.496 Orang		6.588 Orang	896 Orang	13,60
02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok						
					Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	7 Tatanan		7 Tatanan	7 Tatanan	100,00
02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase FKTP dan FKRTL yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan	100%		100%	0	0,00
02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	13 Dokumen		12 Dokumen	3 Dokumen	25,00
02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Perizinan Fasilitas Kesehatan	100 %		100 %	100 %	100,00
02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya						
					Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	14 Unit		14 Unit	14 Unit	100,00
02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
					Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	14 Unit		14 Unit	14 Unit	100,00
02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	25 Unit		25 Unit	25 Unit	100,00
02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-					
02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan	100 %		100 %	100 %	100,00

Page 11

02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	12 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	25,00
02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	12 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	25,00
02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP dan UKM Persentase praktek tenaga kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100%		100%	0%	0,00
02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	3 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00
02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	15 Orang		5 Orang	0 Orang	0,00
02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Kesehatan, Farmasi, Industri Pangan Rumah Tangga, TPM (Tempat Pengolahan Makanan), dan TTU (Tempat-tempat Umum) sesuai standar Persentase Fasilitas Kesehatan, Farmasi, Industri Pangan Rumah Tangga, TPM (Tempat Pengolahan Makanan), dan TTU (Tempat-tempat Umum) sesuai standar					
02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Rekomendasi izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memenuhi syarat Persentase Rekomendasi yang dikeluarkan untuk Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mengurus perizinan					

Page 12

02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	225 Dokumen		75 Dokumen	20 Dokumen	26,67
02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						
02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	300 Dokumen		300 Dokumen	1 Dokumen	0,11
02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase TPM yang terdaftar memiliki sertifikat laik sehat	80 %		68 %	43,64%	64,17
02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12 Dokumen		4 Dokumen	0 Dokumen	0,00
02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase TPM yang mendapatkan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan jajanan	80 %		68 %	11,83%	17,39

Page 13

02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan						
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	12 Dokumen		Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri Rumah Tangga	100%		100%	0	0,00
02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan						
					Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	84 Unit		28 Unit	0 Unit	0,00
02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat di bidang Kesehatan yang di bina	90 %		90 %	0	0,00
02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor dibidang kesehatan	100 %		100%	0	0,00
02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						
					Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	17 Dokumen		6 Dokumen	0 Dokumen	0,00

Page 14

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan jenis pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, termasuk di bidang kesehatan. Pelaksanaan SPM di Kota Pontianak menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk menjamin akses layanan kesehatan dasar secara menyeluruh, terjangkau, dan berkualitas.

Adapun Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Triwulan I Tahun 2025

No	INDIKATOR	Target Dalam Tahun	Sasaran Dalam Tahun	Jumlah Absolut	%
1	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL				
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	11.581	2.224	19,20 %
2	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN				
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	11.523	2.083	18,08 %
3	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR				
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %	10.881	2.062	18,95 %
4	PELAYANAN KESEHATAN BALITA				
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %	44.196	6.857	15,51 %
5	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR				

	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	98.842	18.546	18,76 %
6	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF				
	Persentase orang usia 15-59 tahun menapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	445.199	52.584	11,81 %
7	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT				
	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	76.646	11.849	15,46 %
8	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI				
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	171.270	18.884	11,03 %
9	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS				
	Persentase penderita Diabetes Melitusyang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	14.090	3.359	23,84 %
10	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT				
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	1.441	630	43,72 %
11	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS				
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 %	11.996	3.149	26,25 %
12	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RESIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS=HIV)				
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 %	15.986	3.585	22,43 %

Berdasarkan tabel diatas, capaian pada sebagian besar indikator masih berada di bawah 25% dari target tahunan. Hal ini wajar mengingat pelaksanaan program masih pada awal tahun dan sebagian kegiatan, khususnya yang bersifat skrining massal, memerlukan persiapan administratif, logistik, serta pemetaan sasaran. Beberapa capaian signifikan tercatat pada:

- Pelayanan kesehatan ODGJ berat dengan capaian sebesar 43,72%, menunjukkan pelaksanaan yang cukup baik karena dukungan program PIS-PK dan pelayanan kunjungan rumah oleh tim kesehatan jiwa.
- Pelayanan penderita Diabetes Melitus sebesar 23,84%, serta terduga Tuberkulosis sebesar 26,25%, menunjukkan bahwa kegiatan deteksi dini dan tindak lanjut kasus prioritas sudah mulai berjalan.

Namun demikian, beberapa indikator menunjukkan capaian di bawah 15%, seperti:

- Pelayanan kesehatan penderita hipertensi (11,03%)
- Skrining kesehatan usia produktif (11,81%)
- Pelayanan balita (15,51%)

Hal ini menunjukkan perlunya percepatan pelaksanaan program dan optimalisasi peran Puskesmas dan kader dalam menjangkau sasaran.

Untuk mendorong percepatan pencapaian target SPM, langkah-langkah strategis yang akan dilakukan antara lain:

- Optimalisasi peran tenaga promosi kesehatan dan kader dalam penjaringan sasaran.
- Pelaksanaan skrining terpadu dan massal melalui pendekatan pelayanan berbasis wilayah dan posyandu.
- Monitoring dan evaluasi mingguan capaian per indikator oleh bidang teknis.
- Koordinasi lintas sektor untuk mendukung capaian SPM, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan, sosial, dan masyarakat.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Pelaksanaan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas kesehatan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program

dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas kesehatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, serta capaian Renstra.

1) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak, yaitu:
   a. Rendahnya Capaian Beberapa Indikator SPM
      Hingga Triwulan I, mayoritas indikator SPM belum mencapai 25% dari target tahunan, menandakan perlunya percepatan.
   b. Terbatasnya Pendataan Sasaran Berbasis Individu
      Pendataan masih belum by name by address untuk seluruh indikator, menyulitkan pelacakan target.
   c. SDM Terbatas untuk Layanan Promotif dan Preventif
      Sebagian besar SDM lebih fokus pada pelayanan kuratif sehingga pelaksanaan kegiatan promotif/preventif kurang maksimal.
   d. Koordinasi Lintas Sektor Belum Optimal
      Pelaksanaan program seperti skrining anak sekolah atau deteksi HIV memerlukan dukungan OPD lain, namun koordinasi masih lemah.
   e. Realiasi Anggaran Masih Lambat di Triwulan I
      Pengadaan logistik, alat kesehatan, dan operasional kegiatan belum berjalan maksimal akibat proses administratif yang panjang.
2) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pontianak
   a. Dukungan Program Nasional dan Dana Alokasi Khusus (DAK/BOK)
      Adanya dana transfer pusat untuk mendukung pelaksanaan SPM menjadi peluang untuk mempercepat pencapaian program.
   b. Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan, Swasta, dan Komunitas
      Potensi besar dari sekolah, universitas, dan komunitas lokal untuk menjadi mitra dalam promosi kesehatan dan penjaringan sasaran.
   c. Digitalisasi Layanan dan Pelaporan Kesehatan
      Adopsi teknologi informasi memungkinkan pelaporan yang lebih cepat dan akurat.

d. Peningkatan Kesadaran Masyarakat pasca Pandemi
Masyarakat mulai lebih peduli pada deteksi dini penyakit, gizi, dan akses layanan kesehatan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada tabel dibawah ini dapat dilihat perbandingan rancangan awal RKPD Dinas Kesehatan Kota Pontianak, dan catatan penting terkait hasil analisis kebutuhan di Tahun 2025, sebagai berikut :

Tabel.2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Pontianak

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
				RKPD 2025	RKPD Perubahan 2025
DINAS KESEHATAN				470.100.460.616,00	484.112.233.992,00
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				470.100.460.616,00	484.112.233.992,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				470.100.460.616,00	484.112.233.992,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan		95 %	199.808.000.413,00	336.554.810.923,46
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		100 % 10 Dokumen	248.852.211,00	263.855.145,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Dokumen	148.852.211,00	163.846.245,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	0,00	0,00

Page 1

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	100.000.000,00	100.008.900,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah		12 Bulan	188.549.116.047,00	194.904.490.367,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1087 Orang/bulan	186.428.775.000,00	192.629.710.000,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan					
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Dokumen	1.930.920.000,00	1.721.480.000,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	189.421.047,00	208.621.047,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	0,00	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	0,00	0,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		100 %	155.425.000,00	163.990.000,00

Page 2

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	155.425.000,00	123.490.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12 Bulan	448.900.000,00	146.200.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	448.900.000,00	140.000.000,00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	0,00	0,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	105 Orang	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	702.169.990,00	627.055.420,00
Penyediaan Komponen Instalasi					
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Paket	22.894.690,00	23.245.320,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16 Paket	266.529.100,00	167.483.400,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Paket	42.296.600,00	32.037.500,00

Page 3

Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	17 Paket	92.200.000,00	99.020.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Paket	34.500.000,00	20.778.200,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	1.500.000,00	3.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Laporan	242.249.600,00	143.613.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100 % 12 Bulan	3.849.996.059,00	832.674.700,00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	0,00	0,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	3.110.000.000,00	0,00
Pengadaan Mebel					
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55 Unit	0,00	0,00

Page 4

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Unit	739.996.059,00	720.873.600,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100 % 12 Bulan	1.977.607.800,00	4.903.938.720,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	454.500.000,00	377.210.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	1.523.107.800,00	724.111.560,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah		100 % 48 Unit	3.875.933.306,00	2.305.977.400,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Unit	0,00	562.344.440,00

Page 5

NON URUSAN				470.100.460.616,00	484.112.233.992,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				470.100.460.616,00	484.112.233.992,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan		95 %	199.808.000.413,00	336.554.810.923,46
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah		100 % 48 Unit	3.875.933.306,00	2.305.977.400,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				470.100.460.616,00	484.112.233.992,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				470.100.460.616,00	484.112.233.992,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan		95 %	199.808.000.413,00	336.554.810.923,46
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah		100 % 48 Unit	3.875.933.306,00	2.305.977.400,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Unit	0,00	0,00

Page 6

NON URUSAN				470.100.460.616,00	484.112.233.992,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				470.100.460.616,00	484.112.233.992,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan		95 %	199.808.000.413,00	336.554.810.923,46
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah		100 % 48 Unit	3.875.933.306,00	2.305.977.400,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				470.100.460.616,00	484.112.233.992,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				470.100.460.616,00	484.112.233.992,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan		95 %	199.808.000.413,00	336.554.810.923,46
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah		100 % 48 Unit	3.875.933.306,00	2.305.977.400,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	145 Unit	77.686.000,00	80.550.000,00
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud					
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	165.000.000,00	475.917.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	0,00	890.983.400,00

Page 7

NON URUSAN				470.100.460.616,00	484.112.233.992,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				470.100.460.616,00	484.112.233.992,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan		95 %	199.808.000.413,00	336.554.810.923,46
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah		100 % 48 Unit	3.875.933.306,00	2.305.977.400,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				470.100.460.616,00	484.112.233.992,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				470.100.460.616,00	484.112.233.992,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan		95 %	199.808.000.413,00	336.554.810.923,46
Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Persentase UPT yang melaksanakan PPK-BLUD		100 % 27 Unit	0,00	147.412.940.614,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit Kerja	0,00	0,00
NON URUSAN				470.100.460.616,00	484.112.233.992,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				470.100.460.616,00	484.112.233.992,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan		95 %	199.808.000.413,00	336.554.810.923,46

Page 8

Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Persentase UPT yang melaksanakan PPK-BLUD		100 % 27 Unit	0,00	147.412.940.614,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				470.100.460.616,00	484.112.233.992,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				470.100.460.616,00	484.112.233.992,00
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasyankes Pemerintah terakreditasi Persentase Fasyankes Pemerintah terakreditasi Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan		100 100 95 % Persen %	268.326.369.596,00	145.586.792.662,54
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1) Persentase fasilitas kesehatan pemerintah sesuai standar; 2) Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah UPTD/ UPK yang memiliki obat, BMHP, dan Alkes sesuai standar 2)Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan Persentase fasilitas kesehatan pemerintah sesuai standar ; Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah UPTD/ UPK yang memiliki obat, BMHP, dan Alkes sesuai standar		100 % 1) 100; 2) 100 1) %; 2) % %	42.086.353.724,00	43.539.991.391,00
Pembangunan Puskesmas					
	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	35.600.000.000,00	28.242.385.950,00

Page 9

Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya					
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	0,00	0,00
Pengembangan Puskesmas					
	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	0,00	0,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit					
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit	0,00	0,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas					
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	0,00	0,00
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya					
	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	0,00	0,00
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Unit	1.726.411.000,00	1.971.748.025,00

Page 10

Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi					
	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125 Unit	0,00	0,00
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	95.654.200,00	91.060.500,00
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	4.664.288.524,00	8.651.872.372,54
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan					
	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Paket	0,00	0,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13)Persentase penanggulangan KLB yang direspon < 24 jam 17) Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga 22)Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 33)Persentase penanggulangan KLB yang direspon < 24 jam 5)Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		100 % 60 %	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00

Page 11

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11506 Orang	688.577.600,00	553.062.600,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10984 Orang	76.900.000,00	257.227.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10461 Orang	682.560.000,00	402.849.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					
	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50252 Orang	0,00	0,00
	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Orang	0,00	69.228.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					
	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	89041 Orang	23.400.300,00	23.430.300,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					
	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	562876 Orang	59.418.500,00	321.105.016,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	73992 Orang	30.734.400,00	30.734.400,00

Page 12

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	168845 Orang	18.383.700,00	18.381.800,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					
	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13890 Orang	6.710.000,00	6.710.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1436 Orang	62.397.900,00	10.883.400,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11139 Orang	1.104.916.200,00	2.043.080.800,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					
	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16327 Orang	308.453.400,00	301.788.900,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)					
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	0,00	0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana					
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	0,00	0,00

Page 13

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	962.412.700,00	935.172.700,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	137.326.600,00	137.615.500,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	1.531.734.800,00	1.638.152.300,00
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	393.848.100,00	415.748.100,00
Pengelolaan Surveilans Kesehatan					
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	61.195.300,00	246.974.600,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)					
	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	115781 Orang	10.379.200,00	10.359.000,00
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan					
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	4.760.185.000,00	4.553.098.539,00
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Dokumen	719.219.700,00	721.379.900,00

Page 14

Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat					
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	31.298.722.000,00	59.486.381.181,00
Operasional Pelayanan Puskesmas					
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Dokumen	63.874.212.580,00	0,00
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah					
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Dokumen	0,00	0,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					
	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2504 Orang	96.598.400,00	96.508.200,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)					
	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	95 Orang	298.546.600,00	78.788.800,00
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria					
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11496 Orang	12.101.160,00	2.215.600,00
Pengelolaan Kawasan tanpa rokok					
	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Tatanan	105.531.600,00	7.970.200,00
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase FKTP dan FKRTL yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan		100 %	190.736.400,00	104.183.400,00

Page 15

Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	190.736.400,00	120.328.800,00
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Perizinan Fasilitas Kesehatan		100 %	468.342.216,00	324.011.866,00
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya					
	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Unit	194.622.700,00	124.225.200,00
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Unit	0,00	0,00
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan					
	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Unit	273.719.516,00	207.386.666,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-		-	1.015.719.099,00	908.224.198,00
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan		100 %	0,00	0,00
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan					
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	0,00	0,00

Page 16

Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan					
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	0,00	0,00
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP dan UKM Persentase praktek tenaga kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan		100 %	128.163.599,00	124.044.000,00
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan					
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	128.163.599,00	124.044.000,00
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-		-	887.555.500,00	784.180.198,00
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	887.555.500,00	784.180.198,00
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Kesehatan, Farmasi, Industri Pangan Rumah Tangga, TPM (Tempat Pengolahan Makanan), dan TTU (Tempat-tempat Umum) sesuai standar Persentase Fasilitas Kesehatan, Farmasi, Industri Pangan Rumah Tangga, TPM (Tempat Pengolahan Makanan), dan TTU (Tempat-tempat Umum) sesuai standar		80 80 % Persen	846.487.250,00	744.505.950,00

Page 17

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Rekomendasi izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memenuhi syarat Persentase Rekomendasi yang dikeluarkan untuk Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mengurus perizinan		100 %	113.563.150,00	144.558.100,00
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 Dokumen	113.563.150,00	141.158.100,00
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-			384.867.500,00	94.849.500,00
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk					
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300 Dokumen	384.867.500,00	94.849.500,00

Page 18

Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase TPM yang terdaftar memiliki sertifikat laik sehat		68 %	145.810.800,00	145.810.800,00
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah					
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	145.810.800,00	145.810.800,00
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase TPM yang mendapatkan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan jajanan		68 %	61.662.800,00	61.662.800,00
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan					
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	61.662.800,00	61.662.800,00
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri Rumah Tangga		100 %	140.583.000,00	310.784.750,00

Page 19

Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan					
	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28 Unit	140.583.000,00	301.024.750,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat di bidang Kesehatan yang di bina		90 %	103.884.258,00	317.900.258,00
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor dibidang kesehatan		100 %	103.884.258,00	152.224.258,00
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat					
	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	103.884.258,00	152.224.258,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2025

Page 20

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan kesehatan yang partisipatif, Dinas Kesehatan Kota Pontianak telah melakukan penelaahan terhadap berbagai usulan program dan kegiatan yang diajukan masyarakat melalui forum Musrenbang dan mekanisme aspirasi lainnya. Usulan-usulan tersebut ditelaah berdasarkan kesesuaian dengan prioritas pembangunan daerah, urgensi permasalahan kesehatan di wilayah bersangkutan, serta ketersediaan sumber daya.

Pada tahun 2025, sebagian besar usulan masyarakat berkaitan dengan rehabilitasi fasilitas pelayanan kesehatan dasar, khususnya Puskesmas, yang sejalan dengan tujuan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Melalui kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Secara lebih rinci jabarkan dalam Tabel II.4 dibawah ini:

Tabel. 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kota Pontianak

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Asmas	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Vol (%) 2025		Catatan
I	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Persentase Fasyankes Pemerintah Terakreditasi	100	%	
1	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota		Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah Sesuai Standar	100	%	
			Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah UPTD/UPK yang memiliki obat,BMHP, dan Alkes sesuai standar	100	%	
	Sub Kegiatan : Pembangunan Puskesmas		Jumlah Puskesmas yang dibangun	5	Unit	

	Rincian Asmas :					
1	Rehabilitasi Puskesmas	Jl.Tritura Gg.Tritura Rw.002 Pontianak Timur, Tj Hilir		1	Unit	Tidak Akomodir
2	Rehabilitasi Puskesmas	Puskesmas Paris II Jalan Karya Kita Rt.001/006 Pontianak Tenggara, Bansir Darat		1	Unit	Tidak Akomodir
3	Rehabilitasi Puskesmas	Jl. Khatulistiwa Km 5 Rw.014, Pontianak Utara, Batulayang		1	Unit	Akomodir (Diusulkan DAK 2025)
4	Rehabilitasi Puskesmas	Jl. Abu Naim, Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelan sampit		1	Unit	Akomodir (DAU)
5	Rehabilitasi Puskesmas	RT 02 RW 35, Jl Selat Panjang 2, Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu		1	Unit	Tidak Akomodir
	Sub Kegiatan : Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	2	Unit	
	Rincian Asmas :					
6	Pembangunan Posyandu	RW. 07, Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelan sampit		1	Unit	Tidak Akomodir
7	Pembangunan Posyandu	Posyandu Beringin Jalan Beringin, Posyandu Meranti Jalan Meranti, Posyandu Jarak Jalan Jarak Posyandu, Cendana Jalan Cendana Posyandu, Lansia Melati Jalan Beringin, Kota, Pontianak, Pontianak Kota, Darat sekip		1	Unit	Tidak Akomodir
8	Pembangunan Posyandu	Gg. Teluk Berlian Jl. Khatulistiwa RT 03 / RT 04 RW 37, Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir		1	Unit	Tidak Akomodir

9	Pembangunan Posyandu	GANG FLORA II RT. 004 RW. 017, Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang		1	Unit	Tidak Akomodir
10	Pembangunan Posyandu	Kelurahan Sungaijawi, Jalan Ujung Pandang Gg. Hanura 2 RT.002/RW.037, Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi		1	Unit	Tidak Akomodir
11	Pembangunan Posyandu	Kelurahan Sungaijawi, Jalan. Petani, RW.038, Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi		1	Unit	Tidak Akomodir
12	Pembangunan Posyandu	RW. 08 (Fasum Komp. Zaujati), Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor		1	Unit	Tidak Akomodir
13	Pembangunan Posyandu	Kantor Lurah Siantan Hilir Gg. Teluk Betung 3 Jl. Khatulistiwa RW. 22, Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir		1	Unit	Tidak Akomodir
14	Pembangunan Posyandu	Komplek Taman Anggrek 2 Blok DE No E16 Jl. Budi Utomo RT 01 RW. 34, Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir		1	Unit	Tidak Akomodir
	Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Jumlah sarana prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya	2	Unit	
	Rincian Asmas :					
15	Rehabilitasi Posyandu	Gg. Purnajaya 1 Jl Budi Utomo RW. 05, Siantan Hilir		1	Unit	Tidak Akomodir

16	Rehabilitasi Posyandu	Posyandu Delima Mandiri dan Posyandu, Borneo , Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan		1	Unit	Tidak Akomodir
17	Rehabilitasi Posyandu	Jl. Kurnia RW.14, Lebar 25 meter , Panjang 7 meter dan tinggi 0,5 meter, Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Kotabaru		1	Unit	Tidak Akomodir
18	Rehabilitasi Posyandu	Gg. Bunga Dalam, RT. 005/RW. 017, Kelurahan Sungaijawi Luar Kecamatan, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar		1	Unit	Tidak Akomodir
	Sub Kegiatan : Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan		Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medikfasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	80	Unit	
	Rincian Asmas :					
19	Bantuan Peralatan Kesehatan tertentu untuk Posyandu	Posyandu Beringin Jalan Beringin, Posyandu Meranti Jalan Meranti, Posyandu Jarak Jalan Jarak Posyandu, Cendana Jalan Cendana Posyandu, Lansia Melati Jalan Beringin, Kota Pontianak, Pontianak Kota, Darat sekip		1	Paket	Tidak Akomodir
20	Bantuan Peralatan Kesehatan tertentu untuk Posyandu	Gg. Teluk Berlian Jl. Khatulistiwa RT. 03 / RT 04 RW 37, Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir		1	Paket	Tidak Akomodir
21	Bantuan Peralatan Kesehatan tertentu untuk Posyandu	Gg. Bansir 2 Jl. Imam Bonjol RT. 3 RW.1, Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Laut		1	Paket	Tidak Akomodir
22	Bantuan Peralatan Kesehatan tertentu untuk Posyandu	Wilayah RW.001, RW.005, RW.006, RW.017, RW.013, Kota Pontianak, Pontianak Barat, sei Jawi dalam		1	Paket	Tidak Akomodir
23	Bantuan Peralatan Kesehatan tertentu untuk Posyandu	23 posyandu dan posbang kel. suibeliung, Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung		1	Paket	Tidak Akomodir

24	Bantuan Peralatan Kesehatan tertentu untuk Posyandu	PKK Kelurahan Parittokaya, Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parit Tokaya		1	Paket	Tidak Akomodir

Sumber : Laporan Hasil Usulan Musrembang Dinas Kesehatan Kota Pontianak, 2025

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Kerja

Rencana kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 serta selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Adapun Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2						3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							DINAS KESEHATAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
1	1	02	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 %	95 %	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 % 10 Dokumen	100 % 10 Dokumen	248.852.211,00	263.855.145,00	263.855.145,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		300.333.911,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	148.852.211,00	163.846.245,00	163.846.245,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			91.779.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			10.770.150,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	100.000.000,00	100.008.900,00	100.008.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			197.784.261,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	188.549.116.047,00	194.904.490.367,00	194.904.490.367,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		200.123.040.600,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1087 Orang/bulan	1087 Orang/bulan	186.428.775.000,00	192.629.709.320,00	192.629.710.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			192.629.710.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan													
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	24 Dokumen	1.930.920.000,00	2.066.160.000,00	1.721.480.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			7.135.539.255,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													

							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	189.421.047,00	208.621.047,00	208.621.047,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			309.454.870,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			14.368.750,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			33.967.725,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 %	100 %	155.425.000,00	163.990.000,00	163.990.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		164.062.388,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD													
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12 Laporan	155.425.000,00	163.990.000,00	123.490.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			164.062.388,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	448.900.000,00	146.200.000,00	146.200.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		280.729.655,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	448.900.000,00	146.200.000,00	140.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			280.729.655,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	105 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	702.169.990,00	627.055.420,00	627.055.420,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		2.212.940.542,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi													
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	22.894.690,00	23.245.320,00	23.245.320,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			137.898.870,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	266.529.100,00	178.823.400,00	167.483.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			1.202.535.293,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													

							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	42.296.600,00	35.417.500,00	32.037.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			48.386.636,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	92.200.000,00	103.100.000,00	99.020.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			298.158.460,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	11 Paket	34.500.000,00	20.778.200,00	20.778.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			146.353.352,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			2.528.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan	242.249.600,00	262.691.000,00	143.613.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			377.079.031,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 12 Bulan	100 % 12 Bulan	3.849.996.059,00	832.674.700,00	832.674.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		252.564.057,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN

0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	0 Unit	3.110.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
0005	Pengadaan Mebel														
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	55 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			179.280.200,00	DINAS KESEHATAN
0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60 Unit	60 Unit	739.996.059,00	832.674.700,00	720.873.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			73.283.857,00	DINAS KESEHATAN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 % 12 Bulan	100 % 12 Bulan	1.977.607.800,00	4.903.938.720,00	4.903.938.720,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		9.933.872.558,00	DINAS KESEHATAN
0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	454.500.000,00	455.210.000,00	377.210.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			2.605.214.700,00	DINAS KESEHATAN

0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	1.523.107.800,00	1.521.364.720,00	724.111.560,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			7.328.657.858,00	DINAS KESEHATAN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-	100 % 48 Unit	3.875.933.306,00	2.305.977.400,00	2.305.977.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		2.325.928.153,00	DINAS KESEHATAN
0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40 Unit	40 Unit	0,00	609.700.000,00	562.344.440,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			1.427.707.738,00	DINAS KESEHATAN
	1					NON URUSAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
2	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	-	95 %	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-	100 % 48 Unit	3.875.933.306,00	2.305.977.400,00	2.305.977.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		2.325.928.153,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
3	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	-	95 %	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	

	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-	100 % 48 Unit	3.875.933.306,00	2.305.977.400,00	2.305.977.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		2.325.928.153,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			121.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1					NON URUSAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
4	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	-	95 %	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	

	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-	100 % 48 Unit	3.875.933.306,00	2.305.977.400,00	2.305.977.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		2.325.928.153,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00						563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00						563.664.681.866,60	
5	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	-	95 %	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46						417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-	100 % 48 Unit	3.875.933.306,00	2.305.977.400,00	2.305.977.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		2.325.928.153,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	145 Unit	145 Unit	77.686.000,00	83.930.000,00	80.550.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			287.375.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	165.000.000,00	163.380.000,00	475.917.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			475.917.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	0,00	1.448.967.400,00	890.983.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			13.328.415,00	DINAS KESEHATAN
	1					NON URUSAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
6	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	-	95 %	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-	100 % 48 Unit	3.875.933.306,00	2.305.977.400,00	2.305.977.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		2.325.928.153,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
7	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 %	95 %	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	

	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Persentase UPT yang melaksanakan PPK-BLUD	100 % 27 Unit	100 % 27 Unit	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	0 Unit Kerja	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-			68.369.421.875,00	DINAS KESEHATAN
	1					NON URUSAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
8	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 %	95 %	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	

	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Persentase UPT yang melaksanakan PPK-BLUD	100 % 27 Unit	100 % 27 Unit	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
9	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasyankes Pemerintah terakreditasi Persentase Fasyankes Pemerintah terakreditasi Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	-	100 100 95 % Persen %	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1) Persentase fasilitas kesehatan pemerintah sesuai standar; 2) Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah UPTD/ UPK yang memiliki obat, BMHP, dan Alkes sesuai standar 2)Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan Persentase fasilitas kesehatan pemerintah sesuai standar ; Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah UPTD/ UPK yang memiliki obat, BMHP, dan Alkes sesuai standar		100 % 1) 100; 2) 100 1) %; 2) %	42.086.353.724,00	43.539.991.391,00	43.539.991.391,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		52.446.776.928,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas													

							Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	5 Unit	2 Unit	35.600.000.000,00	34.758.704.000,00	28.242.385.950,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			5.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
							Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			617.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas													

							Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			12.006.276.928,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit													
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	30 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			7.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas													

							Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			5.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
							Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			617.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan													

							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	80 Unit	24 Unit	1.726.411.000,00	1.050.300.075,00	1.971.748.025,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														
							Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	125 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			76.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

							Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	5 Unit	5 Unit	95.654.200,00	91.060.500,00	91.060.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			42.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket	4 Paket	4.664.288.524,00	3.855.324.424,00	8.651.872.372,54	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			18.525.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														

							Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	24 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			61.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13)Persentase penanggulangan KLB yang direspon < 24 jam 17) Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga 22)Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 33)Persentase penanggulangan KLB yang direspon < 24 jam 5)Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 % 60 %	100 % 60 %	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11506 Orang	11506 Orang	688.577.600,00	544.902.600,00	553.062.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			4.291.355.621,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10984 Orang	10984 Orang	76.900.000,00	257.227.000,00	257.227.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			3.359.581.013,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10461 Orang	10461 Orang	682.560.000,00	402.849.000,00	402.849.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			2.658.286.991,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita													
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	50252 Orang	50252 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	0,00	69.228.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													

							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	89041 Orang	89041 Orang	23.400.300,00	92.658.300,00	23.430.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			2.658.286.991,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	562876 Orang	562876 Orang	59.418.500,00	323.145.016,00	321.105.016,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			1.371.320.238,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73992 Orang	73992 Orang	30.734.400,00	30.734.400,00	30.734.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			6.557.302.384,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	168845 Orang	168845 Orang	18.383.700,00	18.381.800,00	18.381.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			23.962.536,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														

							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13890 Orang	13890 Orang	6.710.000,00	6.710.000,00	6.710.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			15.964.100,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1436 Orang	1436 Orang	62.397.900,00	10.883.400,00	10.883.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			11.218.951,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11139 Orang	11139 Orang	1.104.916.200,00	1.335.972.000,00	2.043.080.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pajak Daerah DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			752.439.422,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	16327 Orang	16327 Orang	308.453.400,00	301.788.900,00	301.788.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			768.231.771,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			15.698.905,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			1.935.754.518,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	962.412.700,00	904.512.700,00	935.172.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			785.404.252,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	2 Dokumen	137.326.600,00	137.326.000,00	137.615.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			148.451.234,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.531.734.800,00	1.620.154.600,00	1.638.152.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			941.331.183,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3 Dokumen	3 Dokumen	393.848.100,00	430.268.100,00	415.748.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			63.222.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	61.195.300,00	246.974.600,00	246.974.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			11.759.385,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	115781 Orang	115781 Orang	10.379.200,00	10.359.000,00	10.359.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			3.338.148,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan														

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.760.185.000,00	5.614.042.400,00	4.553.098.539,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			4.750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	24 Dokumen	24 Dokumen	719.219.700,00	742.739.900,00	721.379.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			23.667.685,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	12 Dokumen	31.298.722.000,00	34.018.871.200,00	59.486.381.181,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			35.108.386.250,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	25 Dokumen	25 Dokumen	63.874.212.580,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah														

							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	24 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2504 Orang	2504 Orang	96.598.400,00	96.508.200,00	96.508.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)													

							Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95 Orang	95 Orang	298.546.600,00	78.788.800,00	78.788.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			11.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	11496 Orang	11496 Orang	12.101.160,00	2.215.600,00	2.215.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			8.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok														

							Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	7 Tatanan	7 Tatanan	105.531.600,00	7.970.200,00	7.970.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			33.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase FKTP dan FKRTL yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan	100 %	100 %	190.736.400,00	104.183.400,00	104.183.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	Fasilitas Kesehatan FKTP dan FKRTL		1.226.519.885,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	12 Dokumen	190.736.400,00	90.733.400,00	120.328.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			1.226.412.745,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Perizinan Fasilitas Kesehatan	100 %	100 %	468.342.216,00	324.011.866,00	324.011.866,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		180.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya													
							Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	14 Unit	14 Unit	194.622.700,00	124.225.200,00	124.225.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			66.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													

							Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	14 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			66.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan													
							Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	25 Unit	25 Unit	273.719.516,00	199.786.666,00	207.386.666,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			47.500.000,00	DINAS KESEHATAN
10	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-	-	-	1.015.719.099,00	908.224.198,00	908.224.198,00							229.202.401,00	

	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan	100 %	100 %	0,00	0,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			47.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan													

							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	4 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			47.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan dan pendayagunaan SDM Kesehatan untuk UKP dan UKM Persentase praktek tenaga kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100 %	100 %	128.163.599,00	124.044.000,00	124.044.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	Tenaga kesehatan		39.703.730,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	128.163.599,00	124.044.000,00	124.044.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			39.703.730,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	887.555.500,00	784.180.198,00	784.180.198,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	Tenaga kesehatan		94.498.671,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	5 Orang	100% Orang	887.555.500,00	784.180.198,00	784.180.198,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			94.498.671,00	DINAS KESEHATAN
11	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas Kesehatan, Farmasi, Industri Pangan Rumah Tangga, TPM (Tempat Pengolahan Makanan), dan TTU (Tempat-tempat Umum) sesuai standar Persentase Fasilitas Kesehatan, Farmasi, Industri Pangan Rumah Tangga, TPM (Tempat Pengolahan Makanan), dan TTU (Tempat-tempat Umum) sesuai standar	80 80 % Persen	80 80 % Persen	846.487.250,00	757.665.950,00	744.505.950,00							597.820.642,00	

	1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Rekomendasi izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memenuhi syarat Persentase Rekomendasi yang dikeluarkan untuk Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mengurus perizinan	100 %	100 %	113.563.150,00	144.558.100,00	144.558.100,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	Faskes, IRT, TPM		161.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	75 Dokumen	75 Dokumen	113.563.150,00	144.558.100,00	141.158.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			161.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-			384.867.500,00	94.849.500,00	94.849.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	masyarakat kota Pontianak		118.750.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga															
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	300 Dokumen	300 Dokumen	384.867.500,00	94.849.500,00	94.849.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			118.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase TPM yang terdaftar memiliki sertifikat laik sehat	68 %	68 %	145.810.800,00	145.810.800,00	145.810.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	TPM. DAM		198.334.242,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)															

							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4 Dokumen	4 Dokumen	145.810.800,00	145.810.800,00	145.810.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			198.334.242,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase TPM yang mendapatkan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan jajanan	68 %	68 %	61.662.800,00	61.662.800,00	61.662.800,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	TPM		47.986.400,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	12 Dokumen	12 Dokumen	61.662.800,00	61.662.800,00	61.662.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			47.986.400,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri Rumah Tangga	100 %	100 %	140.583.000,00	310.784.750,00	310.784.750,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		71.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan													
							Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	28 Unit	28 Unit	140.583.000,00	310.784.750,00	301.024.750,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			71.250.000,00	DINAS KESEHATAN
12	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat di bidang Kesehatan yang di bina	90 %	90 %	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	

	1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor dibidang kesehatan	100 %	100 %	103.884.258,00	152.224.258,00	152.224.258,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		853.955.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat													
							Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	6 Dokumen	6 Dokumen	103.884.258,00	152.224.258,00	152.224.258,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			853.955.000,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Gg.Sehat				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
13	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	0,00	2.162.759.252,00	2.340.667.277,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			2.204.561.972,00	DINAS KESEHATAN

14	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	58.320.000,00	58.320.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	111.600.000,00	111.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	0 Dokumen	0,00	300.961.125,00	300.961.125,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	0 Dokumen	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	0 Dokumen	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	0 Dokumen	0,00	34.550.500,00	34.550.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	0 Orang	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	0 Dokumen	0,00	65.129.500,00	65.129.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	0 Dokumen	0,00	482.440.000,00	482.440.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	0 Dokumen	0,00	13.590.000,00	13.590.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0 Dokumen	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	0 Dokumen	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	0 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	0 Dokumen	0,00	105.100.000,00	105.100.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
15	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	

	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		60.898.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	0 Dokumen	0,00	8.775.000,00	8.775.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Purnama				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
16	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	100% Unit Kerja	0,00	1.472.875.019,00	1.420.942.914,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			1.563.037.206,00	DINAS KESEHATAN
17	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100% Orang	0,00	49.680.000,00	49.680.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			54.648.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100% Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			45.078.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100% Orang	0,00	73.500.000,00	73.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			80.850.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	100% Orang	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			15.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	100% Orang	0,00	11.100.000,00	11.100.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			12.210.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV													
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	100% Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			5.445.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	100% Dokumen	0,00	245.182.000,00	245.182.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			269.700.200,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	100% Dokumen	0,00	900.000,00	900.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			990.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	100% Dokumen	0,00	28.800.000,00	28.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			31.680.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	100% Dokumen	0,00	26.599.500,00	26.599.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			29.259.450,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	100% Orang	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			5.280.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	100% Dokumen	0,00	99.288.000,00	99.288.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			109.216.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													

							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	100% Dokumen	0,00	349.439.580,00	349.439.580,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			384.383.538,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	100% Dokumen	0,00	12.009.000,00	12.009.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			13.209.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	100% Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			660.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	100% Orang	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			5.280.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	100% Dokumen	0,00	16.440.000,00	16.440.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			18.084.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	0 Dokumen	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			1.980.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	100% Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			3.960.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	100% Dokumen	0,00	22.350.000,00	22.350.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			24.585.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	190.736.400,00	104.183.400,00	104.183.400,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		1.226.519.885,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan													

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			107.140,00	DINAS KESEHATAN
18	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		60.898.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	100% Dokumen	0,00	8.476.000,00	8.476.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			9.323.600,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Kp. Bangka				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
19	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	0,00	1.033.580.872,00	1.267.309.817,35	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			1.075.383.592,00	DINAS KESEHATAN
20	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100 Orang	0,00	56.160.000,00	56.160.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100 Orang	0,00	42.300.000,00	42.300.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	1 Orang	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	100 Orang	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	100 Dokumen	0,00	130.462.000,00	130.462.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	100 Dokumen	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	100 Dokumen	0,00	23.827.500,00	23.827.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	0 Orang	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	100 Dokumen	0,00	47.482.500,00	47.482.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	1 Dokumen	0,00	252.677.860,00	302.629.860,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													

							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	100 Dokumen	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	100 Dokumen	0,00	9.510.000,00	9.510.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	100 Dokumen	0,00	900.000,00	900.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	0 Dokumen	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0,00	24.600.000,00	24.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
21	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		60.898.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	100 Dokumen	0,00	9.122.000,00	9.122.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Paris 2				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
22	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	0,00	1.029.660.791,00	996.543.312,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	Pendapatan dari BLUD	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			1.071.463.511,00	DINAS KESEHATAN
23	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	- Orang	0,00	72.240.000,00	72.240.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			74.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	- Orang	0,00	57.600.000,00	57.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			58.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			7.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	0 Dokumen	0,00	200.060.000,00	200.060.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			220.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	0 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	0 Dokumen	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			24.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	0 Dokumen	0,00	27.350.000,00	27.350.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			29.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	0 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			7.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	0 Dokumen	0,00	34.327.500,00	34.327.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	- Dokumen	0,00	265.165.790,00	515.115.790,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													

							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	0 Dokumen	0,00	19.437.000,00	19.437.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
							Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	0 Orang	0,00	300.000,00	300.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0 Dokumen	0,00	14.806.000,00	14.806.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	0 Dokumen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														

							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	0 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	0 Dokumen	0,00	48.150.000,00	48.150.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
24	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		60.898.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	0 Dokumen	0,00	6.156.000,00	6.156.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas St.Hilir				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
25	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	0,00	1.925.607.258,00	1.879.437.735,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			1.967.409.978,00	DINAS KESEHATAN
26	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100 Orang	0,00	87.480.000,00	87.480.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			96.228.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100 Orang	0,00	47.400.000,00	47.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			52.140.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	100 Orang	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			41.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	100 Orang	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	100 Dokumen	0,00	286.755.000,00	286.755.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			315.430.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	100 Dokumen	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			2.244.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	100 Dokumen	0,00	34.500.000,00	34.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			37.950.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	0 0	0,00	43.122.500,00	47.322.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			47.434.750,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	100 Orang	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			23.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	100 Dokumen	0,00	69.720.950,00	65.520.950,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			76.693.045,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	100 Dokumen	0,00	375.867.650,00	375.867.650,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			568.123.215,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	100 Dokumen	0,00	9.735.000,00	9.735.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			10.708.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	100 Dokumen	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			1.188.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	100 Dokumen	0,00	600.000,00	600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			660.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	100 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			3.960.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	100 Dokumen	0,00	104.300.000,00	104.300.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			114.730.000,00	DINAS KESEHATAN
27	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		60.898.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	100 Dokumen	0,00	16.732.000,00	16.732.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			18.405.200,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas St.Hulu				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
28	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	0,00	1.220.632.150,00	1.285.684.306,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	Pendapatan dari BLUD	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			1.414.252.736,60	DINAS KESEHATAN
29	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100 Orang	0,00	99.900.000,00	99.900.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			109.890.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100 Orang	0,00	24.300.000,00	24.300.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			26.730.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	100 Orang	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			15.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	100% Orang	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			5.940.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	100 Dokumen	0,00	239.496.000,00	239.496.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			263.445.600,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	100 Dokumen	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			9.900.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	100 Dokumen	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			23.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	100 Dokumen	0,00	17.795.000,00	17.795.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			19.574.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	0 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	100 Dokumen	0,00	61.000.000,00	61.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			67.100.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													

							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	100 Dokumen	0,00	245.459.720,00	305.065.440,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			335.571.984,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	100 Dokumen	0,00	9.570.000,00	9.570.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			10.527.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	100 Dokumen	0,00	4.320.000,00	4.320.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			4.752.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	100 Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			2.640.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	100 Dokumen	0,00	54.600.000,00	54.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			60.060.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	100 Dokumen	0,00	87.450.000,00	87.450.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			96.195.000,00	DINAS KESEHATAN
30	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		60.898.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	100 Dokumen	0,00	9.825.000,00	9.825.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			10.807.500,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas St. Tengah				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	

31	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	0,00	1.117.454.519,00	1.472.944.978,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			1.159.257.239,00	DINAS KESEHATAN
32	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	10 Orang	0,00	0,00	54.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	12 Orang	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	6.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	6 Orang	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			10.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	12 Orang	0,00	0,00	5.250.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	12 Dokumen	0,00	245.667.000,00	245.667.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	3 DOKUMEN Dokumen	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	12 Dokumen	0,00	25.800.000,00	25.800.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	6.000.000,00	27.386.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	13 Orang	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	12 Dokumen	0,00	57.686.000,00	41.574.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	12 Dokumen	0,00	324.321.720,00	577.792.720,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	12 Dokumen	0,00	9.111.000,00	9.111.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis													
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0 Orang	0,00	5.250.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													

							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	12 Dokumen	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	12 Dokumen	0,00	54.000.000,00	1.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	1 dokumen Dokumen	0,00	0,00	6.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	190.736.400,00	104.183.400,00	104.183.400,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		1.226.519.885,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	12 Dokumen	0,00	13.440.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
33	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		60.898.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	12 Dokumen	0,00	6.774.000,00	9.921.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Khatulistiwa				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
34	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN

	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	0,00	1.107.163.349,00	1.135.934.520,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			1.249.527.972,00	DINAS KESEHATAN
35	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	89.640.000,00	89.640.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	20.700.000,00	20.700.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	13.500.000,00	12.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	8.100.000,00	8.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	0 Dokumen	0,00	143.390.000,00	143.390.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	0 Dokumen	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	0 Dokumen	0,00	20.700.000,00	20.700.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	0 Dokumen	0,00	53.768.000,00	53.768.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	0 Orang	0,00	4.800.000,00	5.700.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	0 Dokumen	0,00	66.048.000,00	65.748.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	0 Dokumen	0,00	258.092.000,00	266.156.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0 Dokumen	0,00	53.085.000,00	53.085.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	0 Dokumen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	0 Dokumen	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	0 Dokumen	0,00	78.650.000,00	78.650.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
36	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	

	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		60.898.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	0 Dokumen	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Telaga Biru				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
37	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	0,00	1.155.330.921,00	1.138.206.707,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	Pendapatan dari BLUD	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			1.197.133.641,00	DINAS KESEHATAN
38	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100 Orang	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			39.600.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100 Orang	0,00	42.600.000,00	42.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			45.540.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	100 Orang	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			11.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	100 Dokumen	0,00	259.884.000,00	259.884.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			267.060.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	0 Dokumen	0,00	19.488.000,00	19.488.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			29.488.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	100 Dokumen	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			35.310.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	100 Dokumen	0,00	31.832.500,00	31.832.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			48.190.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	100 Orang	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			19.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	100 Dokumen	0,00	26.800.000,00	26.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			32.955.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	100 Dokumen	0,00	536.156.800,00	544.446.800,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			636.156.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	100 Dokumen	0,00	8.460.000,00	8.460.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			8.976.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	100 Dokumen	0,00	14.580.000,00	14.580.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			15.880.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													

							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	100 Dokumen	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			2.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	100 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	100 Dokumen	0,00	66.950.000,00	66.950.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			76.950.000,00	DINAS KESEHATAN
39	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		60.898.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	100 Dokumen	0,00	9.129.000,00	9.129.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			10.129.000,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Saigon				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
40	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	0,00	1.159.949.283,00	1.281.676.007,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	Pendapatan dari BLUD	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			1.281.676.007,00	DINAS KESEHATAN
41	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	31.280.000,00	31.280.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	30.600.000,00	30.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	6 Orang	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	0 Dokumen	0,00	158.993.000,00	158.993.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	11 Dokumen	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	0 Dokumen	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	0 Dokumen	0,00	29.486.000,00	29.486.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	2 Orang	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	0 Dokumen	0,00	27.216.000,00	27.216.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													

							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	0 Dokumen	0,00	423.055.250,00	423.055.250,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	0 Dokumen	0,00	10.077.000,00	10.077.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	0 Dokumen	0,00	450.000,00	450.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	5 Dokumen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	131 Dokumen	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	190.736.400,00	104.183.400,00	104.183.400,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		1.226.519.885,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
42	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	

	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		60.898.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	0 Dokumen	0,00	4.355.000,00	4.355.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Kp.Dalam				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
43	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	0,00	2.186.894.081,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			2.228.696.801,00	DINAS KESEHATAN
44	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100% Orang	0,00	50.850.000,00	50.850.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100% Orang	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	8 Orang	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													

							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	100% Orang	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	100% Dokumen	0,00	115.300.000,00	115.300.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	100% Dokumen	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	100% Dokumen	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	100% Dokumen	0,00	31.652.500,00	31.652.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	100% Dokumen	0,00	47.585.000,00	47.585.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	100 Dokumen	0,00	473.783.000,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	100% Dokumen	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	100% Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													

							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	100% Dokumen	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	100% Dokumen	0,00	70.250.000,00	70.250.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
45	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		60.898.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	100% Dokumen	0,00	12.341.000,00	12.341.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Tambelan Sampit				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
46	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	0,00	452.063.581,00	544.653.751,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			493.866.301,00	DINAS KESEHATAN
47	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	50.814.000,00	50.814.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN

1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	11.100.000,00	11.100.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	0 Dokumen	0,00	208.176.000,00	208.176.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	0 Dokumen	0,00	900.000,00	900.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	0 Dokumen	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	0 Dokumen	0,00	24.350.000,00	24.350.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	0 Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	0 Dokumen	0,00	45.680.000,00	45.680.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	0 Dokumen	0,00	261.334.008,00	261.334.008,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0 Dokumen	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	0 Dokumen	0,00	600.000,00	600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	0 Dokumen	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	0 Dokumen	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
48	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		60.898.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	0 Dokumen	0,00	1.968.000,00	1.968.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Tj.Hulu				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
49	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	0,00	882.744.389,00	914.567.366,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	Pendapatan dari BLUD	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			924.547.109,00	DINAS KESEHATAN
50	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100% Orang	0,00	18.696.000,00	18.696.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100% Orang	0,00	40.800.000,00	40.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	100% Orang	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	100% Orang	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	100% Dokumen	0,00	145.026.000,00	145.026.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	100% Dokumen	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	100% Dokumen	0,00	21.139.500,00	21.139.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														

							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	100% Orang	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	100% Dokumen	0,00	23.231.500,00	23.231.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	100% Dokumen	0,00	354.313.000,00	624.313.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	100% Dokumen	0,00	6.796.000,00	6.796.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	100% Dokumen	0,00	2.540.000,00	2.540.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	100% Dokumen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	100% Dokumen	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	100% Dokumen	0,00	44.100.000,00	44.100.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
51	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	

	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		60.898.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	100% Dokumen	0,00	8.668.000,00	8.668.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Banjar Serasan				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
52	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	0,00	594.207.508,00	670.310.615,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	Pendapatan dari BLUD	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			636.010.228,00	DINAS KESEHATAN
53	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	40.640.000,00	40.640.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													

							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	0 Dokumen	0,00	181.120.000,00	181.120.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	0 Dokumen	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	0 Dokumen	0,00	33.600.000,00	33.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	0 Dokumen	0,00	27.360.500,00	27.360.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	0 Orang	0,00	0,00	4.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	0 Dokumen	0,00	38.815.000,00	38.815.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	0 Dokumen	0,00	307.897.720,00	311.897.220,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0 Dokumen	0,00	600.000,00	600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													

							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	0 Dokumen	0,00	600.000,00	600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	0 Dokumen	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	0 Dokumen	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
54	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		60.898.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	0 Dokumen	0,00	8.199.500,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Parit Mayor				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
55	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	0,00	495.278.715,00	518.522.442,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			537.081.435,00	DINAS KESEHATAN
56	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN

1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100 Orang	0,00	35.510.000,00	35.510.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			34.650.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100% Orang	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			16.170.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	100 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			6.600.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	100 Orang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	100% Dokumen	0,00	195.670.000,00	195.670.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			200.200.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	100 Dokumen	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			1.900.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	100% Dokumen	0,00	22.800.000,00	22.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			27.390.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	100% Dokumen	0,00	31.503.500,00	31.503.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			33.275.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
						Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	100 Orang	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			1.600.000,00	DINAS KESEHATAN
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	100% Dokumen	0,00	32.464.500,00	32.464.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			102.410.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	100 Dokumen	0,00	233.497.790,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			235.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	100 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			4.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	100 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			13.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	100 Dokumen	0,00	32.950.000,00	32.950.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			33.000.000,00	DINAS KESEHATAN
57	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		60.898.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	100 Dokumen	0,00	4.336.000,00	4.336.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			5.000.000,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Perum I				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
58	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													

							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	0,00	1.567.199.749,00	1.638.371.077,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
59	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	30.240.000,00	30.240.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	16.050.000,00	16.050.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	0 Dokumen	0,00	113.088.875,00	113.088.875,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	0 Dokumen	0,00	600.000,00	600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	0 Dokumen	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	0 Dokumen	0,00	29.046.800,00	29.046.800,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	0 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	0 Dokumen	0,00	81.115.000,00	81.115.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	0 Dokumen	0,00	282.312.000,00	282.312.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	0 Dokumen	0,00	8.028.000,00	8.028.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0 Dokumen	0,00	15.830.000,00	15.830.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	0 Dokumen	0,00	600.000,00	600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	0 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	0 Dokumen	0,00	61.100.000,00	61.100.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN

60	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		60.898.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	0 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Perum II				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
61	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	0,00	2.143.347.547,00	2.303.209.934,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			2.185.150.267,00	DINAS KESEHATAN
62	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	58.800.000,00	58.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibelian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	60.600.000,00	60.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibelian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	9.900.000,00	9.900.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibelian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	0 Dokumen	0,00	285.184.000,00	285.184.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibelian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	0 Dokumen	0,00	29.400.000,00	29.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibelian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	0 Dokumen	0,00	42.928.500,00	42.928.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibelian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	0 Dokumen	0,00	44.104.000,00	44.104.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibelian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	0 Dokumen	0,00	275.695.790,00	275.695.790,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibelian	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0 Dokumen	0,00	9.924.000,00	9.924.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibelian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	0 Dokumen	0,00	25.500.000,00	25.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibelian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	0 Dokumen	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibelian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	0 Dokumen	0,00	96.000.000,00	96.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibelian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	190.736.400,00	104.183.400,00	104.183.400,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		1.226.519.885,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	0 Dokumen	0,00	10.000,00	10.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibelian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
63	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		60.898.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	0 Dokumen	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibelian	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Komyos Sudarso				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
64	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	0,00	1.309.752.545,00	1.515.110.680,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
65	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	47.520.000,00	47.520.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	43.800.000,00	43.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	16.050.000,00	16.050.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	0 Dokumen	0,00	229.500.000,00	229.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	0 Dokumen	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	0 Dokumen	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	0 Dokumen	0,00	20.271.000,00	20.271.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	0 Orang	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	0 Dokumen	0,00	40.361.500,00	40.361.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													

							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	0 Dokumen	0,00	322.140.040,00	348.092.040,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	Dana Bagi Hasil (DBH) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	0 Dokumen	0,00	6.928.000,00	6.928.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0 Dokumen	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	0 Dokumen	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	0 Dokumen	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	0 Dokumen	0,00	71.100.000,00	71.100.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
66	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		60.898.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	0 Dokumen	0,00	4.768.000,00	4.768.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Pal Lima				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
67	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	

	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	0,00	1.006.671.347,00	1.014.462.305,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			1.048.474.067,00	DINAS KESEHATAN
68	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0 0	0,00	44.208.000,00	44.208.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	0 Dokumen	0,00	245.216.000,00	245.216.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	0 Dokumen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	0 Dokumen	0,00	22.200.000,00	22.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	0 Dokumen	0,00	42.625.000,00	42.625.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	0 Orang	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	0 Dokumen	0,00	46.410.000,00	46.410.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	0 Dokumen	0,00	318.127.720,00	319.327.720,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	0 Dokumen	0,00	6.879.000,00	6.879.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0 Dokumen	0,00	7.824.000,00	7.824.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	0 Dokumen	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	0 Dokumen	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	0 Dokumen	0,00	71.750.000,00	71.750.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
69	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		60.898.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	0 Dokumen	0,00	6.480.000,00	5.280.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Kp.Bali				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
70	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	0,00	1.410.262.861,00	1.544.884.293,16	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			1.452.065.581,00	DINAS KESEHATAN
71	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	34.320.000,00	34.320.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	67.500.000,00	67.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	3.600.000,00	7.200.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	9.600.000,00	10.650.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	0 Dokumen	0,00	111.284.000,00	176.360.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	0 Dokumen	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	0 Dokumen	0,00	30.300.000,00	30.300.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	0 Dokumen	0,00	47.541.500,00	22.010.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	0 Orang	0,00	3.000.000,00	6.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	0 Dokumen	0,00	52.374.000,00	56.179.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	0 Dokumen	0,00	358.677.720,00	309.340.120,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	0 Dokumen	0,00	15.039.000,00	19.569.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0 Dokumen	0,00	5.968.000,00	5.968.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													

							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	0 Dokumen	0,00	600.000,00	600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	0 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	0 Dokumen	0,00	33.750.000,00	27.150.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
72	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		60.898.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	0 Dokumen	0,00	9.180.000,00	9.588.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Alianyang				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
73	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	0,00	2.141.245.344,00	2.350.737.983,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			2.183.048.064,00	DINAS KESEHATAN
74	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	52.920.000,00	52.920.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	26.400.000,00	26.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	9.450.000,00	9.450.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	0 Dokumen	0,00	187.238.000,00	187.238.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	0 Dokumen	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	0 Dokumen	0,00	28.200.000,00	28.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	0 Dokumen	0,00	69.442.500,00	69.442.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	0 Orang	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													

							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	0 Dokumen	0,00	39.530.000,00	39.530.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	0 Dokumen	0,00	519.198.414,00	519.198.414,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	0 Dokumen	0,00	9.960.000,00	9.960.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0 Dokumen	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	0 Dokumen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	0 Dokumen	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	0 Dokumen	0,00	42.800.000,00	42.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
75	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		60.898.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	0 Dokumen	0,00	4.648.000,00	4.648.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN

						Puskesmas Pal 3				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
76	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	0,00	1.238.342.259,00	1.469.143.284,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			1.280.144.979,00	DINAS KESEHATAN
77	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100 Orang	0,00	19.632.000,00	19.632.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			21.595.200,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100 Orang	0,00	74.400.000,00	74.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			81.840.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	100 Orang	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			19.800.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	100 Orang	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			15.180.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	100 Dokumen	0,00	194.460.000,00	194.460.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			213.906.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	100 Dokumen	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			1.155.000,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	100 Dokumen	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			24.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	100 Dokumen	0,00	30.256.250,00	30.256.250,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			33.281.875,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	100 Orang	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			13.200.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	100 Dokumen	0,00	45.611.250,00	45.611.250,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			50.172.375,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	100 Dokumen	0,00	259.628.488,00	259.628.488,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			285.591.336,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	100 Dokumen	0,00	7.275.000,00	7.275.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			8.002.500,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	100 Dokumen	0,00	2.508.000,00	2.508.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			2.758.800,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak													
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	100 Dokumen	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			2.310.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan													
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	100 Dokumen	0,00	13.200.000,00	13.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			14.520.000,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	100 Dokumen	0,00	40.900.000,00	40.900.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			44.990.000,00	DINAS KESEHATAN
78	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	

	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		60.898.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	100 Dokumen	0,00	6.576.000,00	6.576.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			7.233.600,00	DINAS KESEHATAN
						Puskesmas Karya Mulya				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
79	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	0,00	1.125.959.502,00	1.196.638.668,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			1.167.762.222,00	DINAS KESEHATAN
80	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	21.096.000,00	21.096.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	65.100.000,00	65.100.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat													
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													

							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	0 Orang	0,00	8.550.000,00	8.550.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	0 Dokumen	0,00	214.930.000,00	214.930.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-	0 Dokumen	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	0 Dokumen	0,00	26.700.000,00	26.700.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	0 Dokumen	0,00	18.600.000,00	18.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)													
							Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	0 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	0 Dokumen	0,00	42.288.750,00	42.288.750,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	100% Dokumen	0,00	272.369.650,00	272.369.650,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	0 Dokumen	0,00	8.440.000,00	8.440.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi													

							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	0 Dokumen	0,00	15.900.000,00	15.900.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	0 Dokumen	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	-	0 Dokumen	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	0 Dokumen	0,00	77.300.000,00	77.300.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
81	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	103.884.258,00	323.744.758,00	317.900.258,00							914.853.900,00	
	1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00	171.520.500,00	171.520.500,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		60.898.900,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
							Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	0 Dokumen	0,00	15.432.000,00	15.432.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
						BKMM				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
82	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	0,00	3.292.585.247,00	3.805.132.013,11	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			3.334.387.975,00	DINAS KESEHATAN
						Labkes				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	

83	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	0,00	604.703.340,00	840.690.182,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			646.506.000,00	DINAS KESEHATAN
84	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	0 Dokumen	0,00	275.478.580,00	275.478.580,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
						RSUD Sultan Syarif Mohamad AlKadrie				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
85	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.977.607.800,00	4.903.938.720,00	4.903.938.720,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		9.933.872.558,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan	0,00	2.927.364.000,00	2.927.364.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	0,00	101.157.205.542,00	95.774.075.861,25	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			101.157.205.542,00	DINAS KESEHATAN
86	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54								144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	42.086.353.724,00	43.539.991.391,00	43.539.991.391,00			-	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	-		52.446.776.928,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit														
							Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-	2 Unit	0,00	3.784.602.392,00	3.784.602.392,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	-	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			0,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
							Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	1 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN

	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10)Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar 11)Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 12)Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 13)Persentase penanggulangan KLB yang direspon < 24 jam 14) Persentase Realisasi Bansos Bidang Kesehatan 15)Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 16)Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai	100 % 1) 100; 2) 100 1)%; 2)% 2 per 1000 penduduk 60 % 67 % 70 % 75 %	100 % 1) 100; 2) 100 1)%; 2)% 2 per 1000 penduduk 60 % 67 % 70 % 75 %	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	1 Dokumen	103.029.439.208,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			10.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
						RSUD Pontianak Utara				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				470.100.460.616,00	471.685.485.136,00	484.112.233.992,00							563.664.681.866,60	
87	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	199.808.000.413,00	351.561.122.366,00	336.554.810.923,46							417.421.544.164,60	
	1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	0,00	147.412.940.614,00	147.412.940.614,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		201.828.072.300,60	DINAS KESEHATAN
	1	02	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													

							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	0,00	12.419.463.643,00	3.899.265.283,59	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	DINAS KESEHATAN
88	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	-	-	268.326.369.596,00	118.134.727.864,00	145.586.792.662,54							144.501.260.759,00	
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11)Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 15)Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 19) Persentase pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan sesuai standar 1)Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hami 36) Persentase Ibu Hamil yang di skrining malaria 9)Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 % 70 % 75 %	100 % 70 % 75 %	225.580.937.256,00	74.166.541.207,00	74.166.541.207,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		90.647.463.946,00	DINAS KESEHATAN
	1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit													
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	12 Dokumen	15.227.032.308,00	7.081.043.201,00	9.941.043.201,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			7.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
									J U M L A H	**470.100.460.616,00**	**471.685.485.136,00**	**484.112.233.992,00**							**563.664.681.866,60**	

3.2 Pendanaan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, serta mengacu pada prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2025. Rencana ini bertujuan untuk menjawab isu-isu strategis di bidang kesehatan serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan nasional.

Program dan kegiatan yang direncanakan mencakup pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang kesehatan. Rencana kerja disusun secara sistematis dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan yang masing-masing memiliki indikator kinerja, target capaian, serta alokasi anggaran yang proporsional.

Total pagu indikatif untuk pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Dinas Kesehatan pada tahun 2025 tercatat sebesar **Rp484.112.233.992,00**, yang mengalami peningkatan dibandingkan alokasi pada RKPD murni sebelumnya sebesar **Rp471.685.485.136,00**. Pendanaan kegiatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak dan diarahkan untuk mendukung prioritas nasional maupun daerah.

Program prioritas dalam rencana ini antara lain meliputi:

- Peningkatan layanan kesehatan dasar dan rujukan
- Penguatan sistem surveilans dan penanggulangan penyakit
- Pengembangan sumber daya manusia kesehatan
- Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak

BAB IV
PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kesehatan Kota Pontianak Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kesehatan yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Pontianak Tahun 2025.

Perubahan Renja ini dilakukan sebagai bentuk respons terhadap dinamika kebijakan, perubahan asumsi perencanaan, serta penyesuaian terhadap kebutuhan dan kondisi aktual di lapangan. Dalam penyusunannya, dokumen ini telah mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

Rencana kerja yang disusun mencerminkan komitmen Dinas Kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program dan kegiatan prioritas yang berbasis pada data dan kebutuhan riil. Seluruh kegiatan yang direncanakan juga telah dilengkapi dengan indikator kinerja, target capaian, serta pagu anggaran yang rasional dan berorientasi hasil.

Dengan ditetapkannya Renja Perubahan ini, diharapkan seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kota Pontianak dapat menjadikannya sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) serta sebagai dasar pelaksanaan dan pengendalian program/kegiatan tahun anggaran 2025.

Akhirnya, dokumen ini menjadi bagian penting dalam menjamin keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran serta dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat Kota Pontianak.

Pontianak, 2 Juni 2025
Kepala Dinas Kesehatan
Kota Pontianak

dr. Saptiko,M.Med.PH
Pembina Utama Muda
NIP. 19661113 199603 1 003

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PONTIANAK

TAHUN 2025

+62 811-5660-161
dpupr.pontianak.go.id

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak Tahun 2025 sebagai implementasi tahapan Rencana Strategis 2024-2026.

Renja Dinas PUPR Kota Pontianak memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PUPR Kota Pontianak, yang disusun berpedoman kepada Renstra Dinas PUPR Kota Pontianak dan RKPD Tahun 2025

Ada beberapa tahapan dalam penyusunan Renja yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan yang terakhir penetapan menjadi sebuah dokumen rencana kerja.

Nomenklatur Renja Tahun 2025 berpedoman pada pemukhtahiran dari Kepmendagri Nomor 900.1.15.5 – 1317 Tahun 2023, dimana ada beberapa sub kegiatan pada program penyelenggaraan penataan ruang yang mengalami perubahan. Dokumen renstra Dinas PUPR Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026 masih menggunakan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021, akan tetapi lampiran sudah menyesuaikan dengan kepmendagri yang terbaru yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Akhir kata kami sangat berharap semoga Rancangan Renja ini dapat bermanfaat dan dijadikan acuan dan panduan bagi seluruh aparatur Dinas PUPR Kota Pontianak sesuai tugas, pokok dan fungsi masing-masing dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan.

Pontianak, Juni 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …… i

DAFTAR ISI …….. ii

BAB I. P E N D A H U L U A N …… I - 1

1.1 Latar Belakang ……. I - 1

1.2 Landasan Hukum ……. I - 2

1.3 Maksud dan Tujuan ……. I - 5

1.4 Sistematika Penulisan ……. 1 - 6

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024……..... II - 1

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN..... III - 1

BAB IV. PENUTUP ……... IV - 1

Daftar Tabel

Tabel. 2.1 Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Pelayanan DPUPR Kota Ptk..... II - 2

Tabel 3.1 Renja OPD DPUPR Kota Pontianak..... III-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Rencana pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat daerah (OPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) OPD

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan di setiap tahun anggaran.

Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (1) menyebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi : 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Perubahan Renja OPD harus menyesuaikan dengan dokumen Perubahan RKPD menjadi dokumen Perubahan Renja OPD. Perubahan Renja OPD juga harus menyesuaikan dengan Renstra OPD. Selanjutnya Renja Perubahan OPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan

(PPAS-P), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) OPD yang kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan APBD Perubahan (APBD-P).

Selain itu, Penyusunan Rancangan Perubahan Renja berpedoman pada (pasal 360 ayat 2): • Rancangan Perubahan RKPD; dan • Hasil Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat daerah Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan II Tahun berjalan.

Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2025 dalam rangka mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak Tahun 2025 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 130 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak. Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 31).

21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 - 2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas PUPR Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 16).
23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 10).
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
25. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/1819.A/SJ tanggal 22 April 2024 tentang Hasil Pemetaan dan Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan indikator dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) PD Tahun Anggaran 2025 dengan dokumen perubahan renja PD Tahun 2025 serta renstra PD dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang dalam kurun waktu Januari-Maret 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Substansi Perubahan Renja Dinas PUPR Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan perubahan renja perangkat daerah agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Memuat laporan capaian target kinerja triwulan 1, tabel beserta narasinya.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Kerja

Memuat tentang tabel perubahan program dan kegiatan PD hasil tarikan dari SIPD beserta narasi alasan atau penjelasan perubahan pada program, kegiatan, sub kegiatan, indikator, dan target.

Narasi yang terkait dengan kebijakan Wali Kota, kebijakan Pemerintah Pusat, kebijakan Pemerintah Provinsi dan hal-hal yang dianggap perlu masuk dalam dokumen Renja perubahan.

3.2 Pendanaan

Memuat narasi tentang pagu yang berubah.

BAB IV. PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian.

Pada bagian terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan Kepala Perangkat Daerah, serta cap Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapainya kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.

Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Hasil evaluasi Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kota Pontianak sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.

TABEL 2.1
EVALUASI HASIL CAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PUPR KOTA PONTIANAK
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Kode Rekening	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Nama Kontrak Nomor Kontrak Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak Rp.	REALISASI					Sisa Anggaran	Ket.
					Fisik			Keuangan			
					Renc.	Real	Dev	Realisasi Rp	%		
4	**PENDAPATAN**										
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**										
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah										
4.1.2.15.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah										
4.1.2.15.05.	Mesin dan Peralatan										
	REALISASI PENDAPATAN										
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**27.585.341.467,00**						**2.509.232.497,00**		**24.552.108.970,00**	**SEKRE**
1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**182.710.110,00**						**0,00**		**182.710.110,00**	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	129.311.700,00						0,00	0,00	129.311.700,00	
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	13.023.000,00						0,00	0,00	13.023.000,00	
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	13.246.500,00						0,00	0,00	13.246.500,00	
1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.735.910,00						0,00	0,00	10.735.910,00	
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.393.000,00						0,00	0,00	16.393.000,00	
1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**19.149.605.146,00**						**1.999.980.657,00**		**17.149.624.489,00**	
1.03.01.2.03.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.093.052.446,00						1.998.070.657,00	0,00	16.094.981.789,00	
1.03.01.2.03.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	1.020.553.200,00						0,00	0,00	1.020.553.200,00	
1.03.01.2.03.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	35.999.500,00						1.910.000,00	0,00	34.089.500,00	
1.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**726.580.000,00**						**0,00**		**202.580.000,00**	
1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	202.580.000,00						0,00	0,00	202.580.000,00	
1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	524.000.000,00									
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.128.126.000,00**						**103.700.010,00**		**2.024.425.990,00**	
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	16.865.500,00						1.694.700,00	0,00	15.170.800,00	
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	764.323.300,00						57.103.000,00	0,00	707.220.300,00	
1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.881.500,00						5.948.500,00	0,00	29.933.000,00	
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	192.663.000,00						0,00	0,00	192.663.000,00	
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	144.832.900,00						14.848.000,00	0,00	129.984.900,00	
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	29.000.000,00						1.300.000,00	0,00	27.700.000,00	
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	727.379.800,00						22.805.810,00	0,00	704.573.990,00	
1.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	217.180.000,00						0,00	0,00	217.180.000,00	

Kode Rekening	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Nama Kontrak Nomor Kontrak Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak Rp.	REALISASI					Sisa Anggaran	Ket.
					Fisik			Keuangan			
					Renc.	Real	Dev	Realisasi Rp	%		
1.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**59.025.800,00**						**0,00**		**59.025.800,00**	
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	3.780.000,00						0,00	0,00	3.780.000,00	
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.269.800,00						0,00	0,00	5.269.800,00	
1.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.976.000,00						0,00	0,00	49.976.000,00	
1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**1.518.498.000,00**						**220.908.830,00**		**1.297.589.170,00**	
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	546.856.000,00						84.834.910,00	0,00	462.021.090,00	
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	971.642.000,00						136.073.920,00	0,00	835.568.080,00	
1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.820.796.411,00**						**184.643.000,00**		**3.636.153.411,00**	
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	1.736.085.811,00						117.958.000,00	0,00	1.618.127.811,00	
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	1.376.000.000,00						48.800.000,00	0,00	1.327.200.000,00	
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	313.710.600,00						17.885.000,00	0,00	295.825.600,00	
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	395.000.000,00						0,00	0,00	395.000.000,00	
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**15.351.076.440,00**						**219.676.596,00**		**15.131.399.844,00**	**SDA**
1.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**15.351.076.440,00**						**219.676.596,00**		**15.131.399.844,00**	
1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	290.000.000,00						24.400.000,00	0,00	265.600.000,00	
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi/ Sungai	14.999.980.840,00						195.276.596,00	0,00	14.804.704.244,00	
1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	61.095.600,00						0,00	0,00	61.095.600,00	
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**1.295.829.900,00**						**0,00**		**1.295.829.900,00**	**CK**
1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**1.295.829.900,00**						**0,00**		**1.295.829.900,00**	
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	93.766.000,00						0,00	0,00	93.766.000,00	
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan	82.051.900,00						0,00	0,01	82.051.900,00	
1.03.03.2.01.0032	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan	1.120.012.000,00						0,00	0,42	1.120.012.000,00	
1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**920.924.804,00**						**0,00**		**829.580.000,00**	**TM**
1.03.04.2.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**920.924.804,00**						**0,00**		**829.580.000,00**	
1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	815.000.000,00						0,00	0,00	815.000.000,00	
1.03.04.2.01.0012	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	45.000.000,00									
1.03.04.2.01.0011	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan							0,00	0,00	0,00	
1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	14.580.000,00						0,00	0,00	14.580.000,00	

Kode Rekening	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Nama Kontrak Nomor Kontrak Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak Rp.	REALISASI					Sisa Anggaran	Ket.
					Fisik			Keuangan			
					Renc.	Real	Dev	Realisasi Rp	%		
1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan							0,00	0,00	0,00	
1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	46.344.804,00									
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**5.834.843.300,00**						**12.200.000,00**		**5.822.643.300,00**	**CK**
1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**5.834.843.300,00**						**12.200.000,00**		**5.822.643.300,00**	
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	245.490.000,00						12.200.000,00	0,00	233.290.000,00	
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	5.589.353.300,00						0,00	0,00	5.589.353.300,00	
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**16.617.331.508,00**						**729.691.700,00**		**15.887.639.808,00**	**SDA**
1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**16.617.331.508,00**						**729.691.700,00**		**15.887.639.808,00**	
1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	42.031.500,00						0,00	0,00	42.031.500,00	
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	145.485.300,00						0,00	0,00	145.485.300,00	
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	429.910.500,00						0,00	0,00	429.910.500,00	
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	15.999.904.208,00						729.691.700,00	0,00	15.270.212.508,00	
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**11.277.726.800,00**						**49.981.600,00**		**11.227.745.200,00**	**CK**
1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**11.277.726.800,00**						**49.981.600,00**		**11.227.745.200,00**	
1.03.08.2.01.0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota							0,00	0,00	0,00	
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	643.000.000,00						12.200.000,00	0,00	630.800.000,00	
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	350.000.000,00						0,00	0,00	350.000.000,00	
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	8.833.317.400,00						12.200.000,00	0,00	8.821.117.400,00	
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung(PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung(SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung(RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedungmelalui SIMBG	1.451.409.400,00						25.581.600,00	0,00	1.425.827.800,00	

Kode Rekening	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Nama Kontrak Nomor Kontrak Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak Rp.	REALISASI					Sisa Anggaran	Ket.
					Fisik			Keuangan			
					Renc.	Real	Dev	Realisasi Rp	%		
1.03.09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**27.088.542.805,00**						**2.455.083.530,00**		**24.633.459.275,00**	**TM**
1.03.09.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**	**27.088.542.805,00**						**2.455.083.530,00**		**24.633.459.275,00**	
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	26.565.014.805,00						2.426.423.530,00	0,00	24.138.591.275,00	
1.03.09.2.01.0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	523.528.000,00						28.660.000,00	0,00	494.868.000,00	
1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota							0,00	0,00	0,00	
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**12.857.785.554,00**						**299.227.019,00**		**12.558.558.535,00**	**BM**
1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**12.857.785.554,00**						**299.227.019,00**		**12.558.558.535,00**	
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	77.935.700,00						0,00	0,00	77.935.700,00	
1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa							0,00	0,00	0,00	
1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan	62.710.300,00						0,00	0,00	62.710.300,00	
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan	339.204.500,00						0,00	0,00	339.204.500,00	
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	358.024.300,00						0,00	0,00	358.024.300,00	
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	330.322.600,00						0,00	0,00	330.322.600,00	
1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	73.081.400,00						0,00	0,00	73.081.400,00	
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	391.626.230,00						0,00	0,00	391.626.230,00	
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan							0,00	0,00	0,00	
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	45.038.500,00						0,00	0,00	45.038.500,00	
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	64.613.400,00						0,00	0,00	64.613.400,00	
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	11.086.388.624,00						299.227.019,00	0,00	10.787.161.605,00	
1.03.10.2.01.0048	Pelebaran Jembatan	28.840.000,00						0,00	0,00	28.840.000,00	
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**650.000.000,00**						**0,00**		**650.000.000,00**	**CK**
1.03.11.2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**650.000.000,00**						**0,00**		**650.000.000,00**	
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	252.500.000,00						0,00	0,00	252.500.000,00	
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	145.000.000,00						0,00	0,00	145.000.000,00	
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	252.500.000,00						0,00	0,00	252.500.000,00	
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**2.068.875.425,00**						**18.300.000,00**		**1.340.693.500,00**	**TR**
1.03.12.201	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota**	**620.709.000,00**						**0,00**		**495.709.000,00**	
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	125.000.000,00									
1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	233.065.500,00						0,00	0,00	233.065.500,00	

Kode Rekening	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran	Nama Kontrak Nomor Kontrak Tanggal Kontrak	Nilai Kontrak Rp.	REALISASI					Sisa Anggaran	Ket.
					Fisik			Keuangan			
					Renc.	Real	Dev	Realisasi Rp	%		
1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	262.643.500,00						0,00	0,00	262.643.500,00	
1.03.12.2.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**725.623.925,00**						**6.100.000,00**		**243.900.000,00**	
1.03.12.2.02.0004	Penyusunan Peta Dasar	105.036.925,00									
1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	213.074.000,00									
1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	157.513.000,00									
1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	250.000.000,00						6.100.000,00	0,00	243.900.000,00	
1.03.12.203	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**413.284.500,00**						**12.200.000,00**		**401.084.500,00**	
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	274.029.500,00						12.200.000,00	0,00	261.829.500,00	
1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	139.255.000,00						0,00	0,00	139.255.000,00	
1.03.12.204	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**309.258.000,00**						**0,00**		**200.000.000,00**	
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	150.000.000,00						0,00	0,00	150.000.000,00	
1.03.12.2.04.0005	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang	109.258.000,00									
1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	50.000.000,00						0,00	0,00	50.000.000,00	
Total		**121.548.278.003,00**						**6.293.392.942,00**	**4,03**	**113.929.658.332,00**	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Pendapatan Daerah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Uraian Pendapatan	APBD 2025	Ranc. RKPD-P 2025	+ / -
1	Retibusi Penyedotan Kakus	150.000.000	80.000.000	- 70.000.000
2	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor (Pemakaian Alat Berat)	350.000.000	350.000.000	-
3	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	6.500.000.000	6.500.000.000	-
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Tanah dan Bangunan-Sewa Kantin)		2.400.000	2.400.000
	Jumlah	**7.000.000.000**	**6.932.400.000**	**- 67.600.000**

Sumber data : SE Wali kota Pontianak No B/000.7.2.4/26/BAPPERIDA/2025

3.2 Rencana Kerja

Sesuai Surat Edaran Walikota Pontianak Nomor B/000.7.2.4/26/BAPPERIDA/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dimana Dinas PUPR Kota Pontianak harus menyesuaikan Pagu Belanja sebesar Rp. 364.163.358.803,- dimana sebelumnya pagu Belanja sebesar Rp. 327.289.846.323,-

Adapun rincian sebagai berikut :

3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	327.289.846.323,00	364.163.358.803,00		
	Belanja Pegawai (Gaji-TPP-Insentif)	18.093.052.446,00	17.546.548.000,00	.	
-	Gaji + Tunjangan PNS	7.080.000.000,00	7.842.907.000,00	1.2.01.08	[DANA UMUM] - Dana Alokasi Umum (DAU)
-	Penambahan PPh 21 gaji	464.757.446,00		1.2.01.08	[DANA UMUM] - Dana Alokasi Umum (DAU)
-	Gaji + Tunjangan PPPK	2.415.492.000,00	1.868.946.000,00	1.2.01.08	[DANA UMUM] - Dana Alokasi Umum (DAU)
-	TPP PNS	6.352.025.000,00	6.352.025.000,00	1.1	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
-	TPP PPPK	1.430.778.000,00	1.132.670.000,00	1.1	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
-	Insentif Retribusi	350.000.000,00	350.000.000,00	1.1	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	Belanja Earmarked	10.699.259.000,00	8.710.075.000,00	.	
-	DAK Fisik - Air Minum	2.438.886.000,00	2.438.886.000,00	2.2.01.09.01.0037	[DANA KHUSUS] - DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler
-	DAK Fisik - Sanitasi	4.328.678.000,00	4.328.678.000,00	2.2.01.09.01.0040	[DANA KHUSUS] - DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler
-	DAU Bidang Pekerjaan Umum	1.989.184.000,00	0,00	2.2.01.08.02.0006	[DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum
-	DBH Sawit	1.942.511.000,00	1.942.511.000,00	2.2.01.07.03.0001	[DANA KHUSUS] - DBH Sawit
	Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	500.000.000,00	500.000.000,00	.	

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	SUMBER PENDANAAN	
				Kode pada SIPD	URAIAN
-	Bansos - Tali Asih Akibat Proyek	500.000.000,00	500.000.000,00	1.2.02	[DANA UMUM] - Pendapatan Transfer Antar Daerah
	Belanja Prioritas Lainnya	297.997.534.877,00	337.406.735.803,00	.	
-	Tambahan untuk Kenaikan Gaji Non ASN	1.903.200.000,00	1.903.200.000,00	1.1	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
-	Pembangunan Lapangan Bola SMPN 3	5.835.000.000,00	5.835.000.000,00	1.2.01.08	[DANA UMUM] - Dana Alokasi Umum (DAU)
-	Pelaksanaan Forum OPD untuk Penyusunan Renstra	15.000.000,00	15.000.000,00	1.2.01.08	[DANA UMUM] - Dana Alokasi Umum (DAU)
-	*Pagu Dasar*	*288.744.334.877,00*	*288.744.334.877,00*		
	- Sumber Dana - PAD - Opsen PKB (untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Kota)	*16.000.000.000,00*	*16.000.000.000,00*	*2.1.01.20.01.0001*	*[DANA KHUSUS] - Opsen PKB*
	- Sumber Dana - PAD Umum	*0,00*	*3.281.258.598,00*	1.1	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	- Sumber Dana - DAU Umum	*272.744.334.877,00*	*269.463.076.279,00*	*1.2.01.08*	*[DANA UMUM] - Dana Alokasi Umum (DAU)*
-	*penambahan pagu lapangan tenis jl. halmahera*	*1.000.000.000,00*	*1.000.000.000,00*	*1.2.01.08*	*[DANA UMUM] - Dana Alokasi Umum (DAU)*
-	*penambahan pagu dasar pembokaran bangungan di gg martapura 2 (Spald-t)*	*500.000.000,00*	*500.000.000,00*	1.2.02	[DANA UMUM] - Pendapatan Transfer Antar Daerah
-	***refocusing pagu 2025***	*0,00*	. **52.297.375.808,00**	*1.2.01.08*	*[DANA UMUM] - Dana Alokasi Umum (DAU)*
-	***redistribusi pagu 2025 Penanganan Genangan: Role Model Penanganan Drainase Kawasan***		**36.915.104.703,00**	*1.2.01.08*	*[DANA UMUM] - Dana Alokasi Umum (DAU)*
	pergeseran belanja gaji pppk ke belanja jasa pjlp		**546.506.000,00**	1.2.02	[DANA UMUM] - Pendapatan Transfer Antar Daerah

-	***Perubahan RKPD 2025***		**54.244.966.031,00**		
	Sisa DBH Sawit Tahun 2023		396.656.766,00	1.4.01	[DANA UMUM] - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	Sisa DBH Sawit Tahun 2024		9.535.731.000,00	1.4.01	[DANA UMUM] - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	Sisa DAK Fisik Tahun 2020		214.630,00	1.4.01	[DANA UMUM] - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	Sisa DAK Fisik Tahun 2024 (Air Minum)		45.000,00	1.4.01	[DANA UMUM] - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

19

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU APBD 2025	Perubahan RKPD 2025	SUMBER PENDANAAN	
				Kode pada SIPD	URAIAN
	DED Bantuan Pembangunan Klinik Pratama Sehat Sejati		100.000.000,00	1.2.02	[DANA UMUM] - Pendapatan Transfer Antar Daerah
	Penambahan Penyelenggaran Jalan dan Air Minum		44.212.318.635,00		
	-Sumber Dana DAU		*16.299.413.005,00*	*1.2.01.08*	*[DANA UMUM] - Dana Alokasi Umum (DAU)*
	-Sumber Dana SILPA		*1.571.462.167,00*	1.4.01	[DANA UMUM] - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
	- Sumber Dana Pendapatan Transfer Antar Daerah		*7.629.124.828,00*	1.2.02	[DANA UMUM] - Pendapatan Transfer Antar Daerah
	-Sumber Dana PAD		*18.712.318.635,00*	1.1	[DANA UMUM] - PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Sumber data : SE Wali kota Pontianak No B/000.7.2.4/26/BAPPERIDA/2025

Penjelasan surat edaran :

Dinas PUPR Kota Pontianak				364.163.358.803,00		Sub kegiatan :
Belanja Pegawai (Gaji-TPP-Insentif)				17.546.548.000,00		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Gaji +Tunjangan PNS		7.842.907.000,00				
Gaji + Tunjangan PPPK		1.868.946.000,00				
			9.711.853.000,00		DAU	
TPP PNS		6.352.025.000,00				
TPP PPPK		1.132.670.000,00				
Insentif Retribusi		350.000.000,00				
			7.834.695.000,00		PAD	
Belanja Earmarked				8.710.075.000,00		
DAK Fisik Air Minum		2.438.886.000,00			Dana Khusus	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan
DAK Fisik Sanitasi		4.328.678.000,00			Dana Khusus	Penyediaan SPALD Setempat
DBH Sawit		1.942.511.000,00			Dana Khusus	Rekonstruksi jalan
Belanja Hibah dan Bantuan Sosial				500.000.000,00		
Bansos - Tali Asih Akibat Proyek		500.000.000,00			Pendapatan Transfer Antar Daerah	Pembangunan Jalan
Belanja Prioritas Lainnya				337.406.735.803,00		
			7.753.200.000,00			

Tambahan untuk kenaikan Gaji Non ASN		1.903.200.000,00			PAD	Tersebar di seluruh bidang
Pembangunan Lapangan Bola SMPN 3		5.835.000.000,00			DAU	tidak dianggarkan karena tidak cukup waktu untuk pelaksanaannya, dana dialihkan untuk pencapaian SPM
Pelaksanaan Forum OPD untuk Penyusunan Renstra		15.000.000,00			DAU	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Pagu Dasar			288.744.334.877,00			
Opsen PKB - (untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan kota)		16.000.000.000,00			Dana Khusus	Pemeliharaan Berkala Jalan
PAD Umum		3.281.258.598,00			PAD	
DAU Umum		269.463.076.279,00			DAU	
Penambahan pagu lapangan tenis jl.halmahera			1.000.000.000,00			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota
penambahan pagu dasar pembongkaranbangunan di gang martapura 2 (Spald-t)			500.000.000,00			kegiatan sudah dilaksanakan oleh bidang aset BPKAD, untuk rumah warga yang 200 juta menunggu hasil nego pemilik rumah
refocusing pagu 2025			- 52.297.375.808,00			

redistribusi pagu 2025 penanganan Genangan : Role Model Penanganan Drainase Kawasan			36.915.104.703,00			tersebar di seluruh sub kegiatan bidang SDA
pergeseran belanja gaji pppk ke belanja pjpl			546.506.000,00			Penyediaan Pelayanan Jasa umum kantor
Perubahan RKPD 2025			54.244.966.031,00			
Sisa DBH Sawit Tahun 2023		396.656.766,00				Rekonstruksi Jalan
Sisa DBH Sawit Tahun 2024		9.535.731.000,00				Rekonstruksi Jalan
Sisa DAK Fisik Tahun 2020		214.630,00				Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan
Sisa DAK Fisik Tahun 2024 (Air Minum)		45.000,00				Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan
DED Bantuan Pembangunan Klinik Pratama Sehat Sejati		100.000.000,00				Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten / Kota
Penambahan Penyelenggaraan Jalan dan Air Minum		44.212.318.635,00				
Dana DAU	16.299.413.005,00				DAU	
Dana Silva	1.571.462.167,00				silva	
Dana Pendapatan Transfer Daerah	7.629.124.828,00				Pendapatan Transfer Antar Daerah	
Dana PAD	18.712.318.635,00				PAD	

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah, memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, dengan mengampu 11 program, 20 kegiatan, 76 sub kegiatan.

Adapun Perubahan Program dan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PONTIANAK

TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							327.899.925.877,00	327.289.846.323,00	364.163.358.803,00							461.759.730.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							327.899.925.877,00	327.289.846.323,00	364.163.358.803,00							461.759.730.000,00	
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							327.899.925.877,00	327.289.846.323,00	364.163.358.803,00							461.759.730.000,00	
1	1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95,00 %	95,00 %	28.856.068.877,00	29.099.352.177,00	27.762.225.223,70							27.587.870.000,00	
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100,00%	100,00%	243.579.877,00	182.710.110,00	182.710.110,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	ASN Dinas PUPR Kota Pontianak		240.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	103.579.877,00	129.311.700,00	97.062.999,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	13.023.000,00	10.416.905,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	13.246.500,00	10.596.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	35.000.000,00	10.735.910,00	8.588.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.01	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	45.000.000,00	16.393.000,00	13.114.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			45.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100,00 %	100,00 %	18.706.295.000,00	19.149.605.146,00	19.149.605.146,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	ASN Dinas PUPR Kota Pontianak		14.344.874.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				105 Orang/bulan	105 Orang/bulan	17.628.295.000,00	18.093.052.446,00	17.546.548.002,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			13.266.874.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1682 Dokumen	1682 Dokumen	1.042.000.000,00	1.020.553.200,00	1.020.553.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			1.042.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.02	000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	36.000.000,00	35.999.500,00	28.799.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			36.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100,00 %	100,00 %	737.000.000,00	726.580.000,00	726.580.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	ASN Dinas PUPR Kota Pontianak		737.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				105 Paket	105 Paket	197.000.000,00	202.580.000,00	202.580.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			197.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	0 Dokumen	108.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			108.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	0 Dokumen	54.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			54.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				54 Orang	54 Orang	324.000.000,00	524.000.000,00	524.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			324.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.05	001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				105 Orang	0 Orang	54.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			54.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah				100,00%	100,00%	1.805.994.000,00	2.128.126.000,00	2.128.126.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	ASN Dinas PUPR Kota Pontianak		1.805.996.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.994.000,00	16.865.500,00	16.865.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			16.996.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	475.000.000,00	764.323.300,00	714.853.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			475.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	36.000.000,00	35.881.500,00	28.648.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			36.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	116.000.000,00	192.663.000,00	154.782.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			116.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.000.000,00	144.832.900,00	115.866.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			26.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				48 Dokumen	48 Dokumen	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			29.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	693.000.000,00	727.379.800,00	249.899.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			693.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.06	001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	414.000.000,00	217.180.000,00	217.180.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			414.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100,00 %	100,00 %	1.253.000.000,00	1.573.036.510,00	1.573.036.510,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	ASN Dinas PUPR Kota Pontianak		6.253.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	000	Pengadaan Alat Besar																	
							Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	000	Pengadaan Mebel																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	139.000.000,00	146.507.900,00	146.507.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			139.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	630.000.000,00	1.311.389.510,00	1.311.389.510,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			630.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																	
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	250.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.07	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	234.000.000,00	115.139.100,00	115.139.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			234.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100,00%	100,00%	3.051.200.000,00	1.518.498.000,00	1.518.498.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	ASN Dinas PUPR Kota Pontianak		1.548.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	0 Laporan	88.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			88.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	366.000.000,00	546.856.000,00	546.856.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			366.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.597.200.000,00	971.642.000,00	1.460.248.040,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			1.094.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah				-	-	3.059.000.000,00	3.820.796.411,00	3.820.796.411,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	ASN Dinas PUPR Kota Pontianak		2.659.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				44 Unit	44 Unit	1.309.000.000,00	1.736.085.811,00	1.215.260.067,70	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			1.309.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya																	
							Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				62 Unit	62 Unit	926.000.000,00	1.376.000.000,00	1.430.900.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			726.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				418 Unit	418 Unit	324.000.000,00	313.710.600,00	223.702.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			324.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	01	2.09	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	395.000.000,00	322.867.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Panjang Saluran yang dipelihara				61,00 %	61,00 %	31.290.000.000,00	33.448.112.212,00	65.402.204.078,94							36.290.000.000,00	
	1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Capaian kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-			100,00 %	100,00 %	31.290.000.000,00	33.448.112.212,00	33.448.112.212,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat Kota Pontianak		36.290.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	008	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir																	
							Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara				2 Unit	2 Unit	290.000.000,00	290.000.000,00	2.583.957.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			290.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	009	Normalisasi/Restorasi Sungai																	
							Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				190 KM	190 KM	18.000.000.000,00	20.999.980.840,00	24.986.482.894,94	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	02	2.01	010	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				1,1 KM	1,1 KM	13.000.000.000,00	12.158.131.372,00	37.831.763.984,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			16.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase sarana prasarana perpipaan terakses ke Rumah Tangga				90,36 %	90,36 %	9.780.091.000,00	28.308.447.446,00	33.089.626.092,00							10.550.000.000,00	
	1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di Kawasan Perkotaan	-			100,00 %	100,00 %	9.780.091.000,00	28.308.447.446,00	28.308.447.446,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat Kota Pontianak		10.550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	002	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																	
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				1,75 Liter/Detik	1,75 Liter/Detik	550.000.000,00	16.723.867.557,00	16.718.238.357,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	002	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																	
							Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun				10,2 Liter/Detik	10,2 Liter/Detik	4.730.091.000,00	7.125.681.889,00	12.604.270.535,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	03	2.01	003	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				1575 SR	1575 SR	4.500.000.000,00	4.458.898.000,00	3.767.117.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	persentase cakupan rumah tangga yang terlayani fasilitas persampahan				70,00 %	70,00 %	1.610.000.000,00	920.924.804,00	905.890.220,97							3.850.000.000,00	
	1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Kegiatan Pengembangan Sistem dan Persampahan di Kota Pontianak	-			100,00 %	100,00 %	1.610.000.000,00	920.924.804,00	920.924.804,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat Kota Pontianak		3.850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	04	2.01	001	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																	
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				300 Ton/hari	300 Ton/hari	815.000.000,00	815.000.000,00	813.230.220,97	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			3.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	04	2.01	001	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan																	
							Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya				30 Orang	30 Orang	45.000.000,00	45.000.000,00	33.540.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	04	2.01	001	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan				300 Ton/hari	300 Ton/hari	200.000.000,00	14.580.000,00	13.224.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	04	2.01	001	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																	
							Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	550.000.000,00	46.344.804,00	45.896.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			550.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5	1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah KK yang dilayani sanitasi				100,00 %	100,00 %	4.628.441.000,00	5.839.353.300,00	5.358.441.200,00							3.750.000.000,00	
	1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-			100,00 %	100,00 %	4.628.441.000,00	5.839.353.300,00	5.839.353.300,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat Kota Pontianak		3.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	003	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja																	
							Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				90 Rumah Tangga	90 Rumah Tangga	250.000.000,00	250.000.000,00	248.616.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	05	2.01	003	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				130 Rumah Tangga	130 Rumah Tangga	4.378.441.000,00	5.589.353.300,00	5.109.825.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			3.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang saluran berkonstruksi baik				57,53 %	57,53 %	37.770.000.000,00	31.555.650.005,00	27.696.548.209,30							51.270.000.000,00	
	1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Capaian kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				100,00 %	100,00 %	37.770.000.000,00	31.555.650.005,00	31.555.650.005,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat Kota Pontianak		51.270.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	002	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan																	
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan				15 Sistem Drainase Perkotaan	15 Sistem Drainase Perkotaan	4.500.000.000,00	5.581.433.554,00	1.210.573.262,50	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			7.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	002	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																	
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				74 Sistem Drainase Perkotaan	74 Sistem Drainase Perkotaan	15.540.000.000,00	9.244.401.743,00	7.825.400.390,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			22.540.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	003	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				35 Dokumen	35 Dokumen	730.000.000,00	729.910.500,00	682.420.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			730.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	06	2.01	003	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan																	
							Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara				622 Sistem Drainase Perkotaan	622 Sistem Drainase Perkotaan	17.000.000.000,00	15.999.904.208,00	17.978.154.156,80	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			20.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan pemerintah dalam kondisi baik				84,00 %	84,00 %	51.521.100.000,00	44.866.817.400,00	40.148.281.948,00							71.100.000.000,00	
	1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Peningkatan Layanan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	-			100,00 %	100,00 %	51.521.100.000,00	44.866.817.400,00	44.866.817.400,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat Kota Pontianak		71.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	001	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan				4 Bangunan Gedung Cagar Budaya	4 Bangunan Gedung Cagar Budaya	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	001	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				18 Bangunan Gedung	18 Bangunan Gedung	7.000.000.000,00	5.733.000.000,00	6.886.770.204,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	001	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung																	
							Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				6 Dokumen	6 Dokumen	300.000.000,00	350.000.000,00	346.773.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	002	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	42.371.100.000,00	36.933.817.400,00	31.050.630.544,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			58.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	08	2.01	002	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																	
							Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				300 Dokumen	300 Dokumen	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	1.764.107.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			1.950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8	1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan / lingkungan yang dikelola pemerintah kota pontianak yang tertata baik				87,00 %	87,00 %	24.662.000.000,00	28.174.528.000,00	26.484.603.501,03							36.422.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	-			100,00 %	100,00 %	24.662.000.000,00	28.174.528.000,00	28.174.528.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat Kota Pontianak		36.422.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	09	2.01	000	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan																	
							Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan				4 Dokumen	0 Dokumen	14.246.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			19.096.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	09	2.01	000	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																	
							Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				29 Kawasan	29 Kawasan	10.085.000.000,00	27.651.000.000,00	25.950.214.101,03	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			16.593.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	09	2.01	000	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																	
							Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan				4 Dokumen	4 Dokumen	331.000.000,00	523.528.000,00	534.389.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			364.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	09	2.01	001	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			369.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	persentase panjang jembatan dalam kondisi baik Persentase perbaikan jalan rusak				92,37 % 1,00 %	92,37 % 1,00 %	135.147.225.000,00	122.357.785.554,00	134.799.844.529,06							218.044.860.000,00	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Capaian kegiatan penyelenggaraaan jalan di kota pontianak	-			100,00 %	100,00 %	135.147.225.000,00	122.357.785.554,00	122.357.785.554,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat Kota Pontianak		218.044.860.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	002	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																	
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				10 Dokumen	10 Dokumen	3.200.000.000,00	2.527.935.700,00	2.017.744.560,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			4.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	003	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa																	
							Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya				17 KM	0 KM	3.000.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	003	Penggantian Jembatan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Jembatan yang Diganti				6 Jembatan	3 Jembatan	3.000.000.000,00	3.762.710.300,00	3.559.780.240,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	003	Pembangunan Jalan																	
							Panjang Jalan yang Dibangun				5 KM	14 KM	30.300.000.000,00	17.939.204.500,00	22.416.735.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			50.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	003	Rekonstruksi Jalan																	
							Panjang Jalan yang Direkonstruksi				7 KM	2,9 KM	30.000.000.000,00	18.908.024.300,00	28.489.497.406,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Sawit	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			68.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	003	Pemeliharaan Berkala Jalan																	
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				5 KM	2 KM	26.300.225.000,00	62.730.322.600,00	54.675.182.080,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah Opsen PKB	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			44.243.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	003	Pelebaran Jalan Menuju Standar																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				2 KM	0,5 KM	9.800.000.000,00	1.373.081.400,00	6.569.309.120,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			12.714.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	003	Pemeliharaan Rutin Jembatan																	
							Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				6 Jembatan	6 Jembatan	420.000.000,00	391.626.230,00	750.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			420.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	004	Pembangunan Jembatan																	
							Jumlah Jembatan yang Dibangun				1 Jembatan	0 Jembatan	1.440.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			1.440.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	004	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																	
							Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				304.700 KM	304.700 KM	400.000.000,00	445.038.500,00	443.142.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	004	Rehabilitasi Jalan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Panjang Jalan yang Direhabilitasi				2 KM	0,5 KM	5.760.000.000,00	314.613.400,00	312.402.720,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			7.031.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	004	Pemeliharaan Rutin Jalan																	
							Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				13 KM	13 KM	20.280.000.000,00	11.086.388.624,00	12.588.398.003,06	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			20.349.860.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	10	2.01	004	Pelebaran Jembatan																	
							Jumlah Jembatan yang Dilebarkan				3 Jembatan	1 Jembatan	1.247.000.000,00	2.878.840.000,00	2.977.652.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			1.247.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10	1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase kualitas tenaga kerja jasa konstruksi				75,00 %	75,00 %	650.000.000,00	650.000.000,00	534.988.000,00							650.000.000,00	
	1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Peserta Tenaga Terampil Konstruksi yang Dilatih	-			50 peserta	50 peserta	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat Kota Pontianak		650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.01	001	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				50 Orang	50 Orang	250.000.000,00	252.500.000,00	207.348.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.01	001	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi																	
							Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				50 Lembaga	50 Lembaga	150.000.000,00	145.000.000,00	118.891.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	11	2.01	001	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																	
							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				50 Orang	50 Orang	250.000.000,00	252.500.000,00	208.748.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan pembangunan terhadap RTRW di Kota Pontianak				85,00 %	85,00 %	1.985.000.000,00	2.068.875.425,00	1.980.705.800,00							2.245.000.000,00	
	1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penetapan RTRW dan RRTR sesuai Ketentuan	-			100,00 %	100,00 %	585.000.000,00	620.709.000,00	620.709.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat Kota Pontianak		545.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	000	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	125.000.000,00	120.000.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			125.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	000	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota																	
							Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	233.065.500,00	227.904.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	000	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota																	
							Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				- Dokumen	- Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.01	001	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang																	
							Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.				1 Laporan	1 Laporan	160.000.000,00	262.643.500,00	192.263.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-			170.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Perencanaan Tata Ruang Daerah	-			100,00 %	100,00 %	600.000.000,00	725.623.925,00	725.623.925,00			-	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat Kota Pontianak		850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02	000	Penyusunan Peta Dasar																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah data SHP Peta Dasar				-	1 Peta	0,00	105.036.925,00	104.761.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02	000	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota																	
							Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	213.074.000,00	212.405.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Lain-lain PAD Yang Sah Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02	000	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang																	
							Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan				-	20 Orang	0,00	157.513.000,00	155.920.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02	000	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota																	
							Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.02	000	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang																	
							Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				1 Kegiatan	0 Kegiatan	100.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pemanfaatan Ruang Daerah yang Baik dan Benar	-			100,00 %	100,00 %	450.000.000,00	413.284.500,00	413.284.500,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat Kota Pontianak		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	000	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang																	
							Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				24 Dokumen	24 Dokumen	300.000.000,00	274.029.500,00	272.406.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.03	000	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																	
							Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	150.000.000,00	139.255.000,00	137.307.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Peningkatan Koordinasi dan Singkronisasi Pengendalian Ruang di Kota Pontianak	-			100,00 %	100,00 %	350.000.000,00	309.258.000,00	309.258.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat Kota Pontianak		350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	000	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	149.930.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	000	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	109.258.000,00	108.121.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1	03	12	2.04	001	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal																	
							Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				3 Berita Acara	3 Berita Acara	50.000.000,00	50.000.000,00	49.685.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
												J U M L A H	**327.899.925.877,00**	**327.289.846.323,00**	**364.163.358.803,00**							**461.759.730.000,00**	

BAB IV

PENUTUP

Uraian rencana program/ kegiatan yang terdapat pada perubahan rencana kerja Tahun 2025 ini diharapkan nantinya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan rencana pembangunan daerah Kota Pontianak.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak Tahun 2025 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pontianak, baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakankan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Pontianak, Juni 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Pontianak

Ir. FIRAYANTA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19680617 199403 1 011

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Letjen Sutoyo No. 1
Telp (0561) 736030 Fax 7360302

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak Tahun 2025 merupakan pengaplikasian Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap instansi pemerintah harus memiliki rencana kerja setiap 1 (satu) tahun.

Perlu diketahui bahwa penyusunan Renja Perubahan ini sudah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan mendasarkan pada analisis berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan Tahun 2025. Kami menyadari bahwa dalam dokumen ini masih terdapat berbagai kekurangan yang memerlukan masukan sebagai upaya perbaikan, dan harapan kami semoga dokumen ini dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak tahun anggaran 2025, sehingga pelaksanaan program kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana.

Pontianak, Mei 2025

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		**i**
DAFTAR ISI		**ii**
DAFTAR TABEL		**iii**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**I - 1**
	1.1. Latar Belakang	I - 1
	1.2. Landasan Hukum	I - 2
	1.3. Maksud Dan Tujuan	I - 5
	1.4. Sistematika Penulisan	I - 5
BAB II	**EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025**	**II – 6**
BAB III	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	**III – 25**
	3.1. Rencana Kerja	III – 25
	3.2. Pendanaan	III – 33
BAB IV	**PENUTUP**	**IV - 55**

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 (T-C.29) II - 7
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman s/d Triwulan II Tahun 2025 Kota Pontianak

Tabel 3.1
Daftar Proyeksi Strategis dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak III – 33

Tabel 3.2 III - 37
Rumusan Perubahan Rencana Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Dinas Peeumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),
2. Perubahan Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025,
3. Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Perubahan Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2025 ini yang merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan,
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan,
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang,
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mendukung arah kebijakan kota Pontianak dalam hal ***"Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan berkelanjutan disertai kondisi aman dan tertib".***

Untuk dapat melaksanakan tujuan sasaran dan kebijakan strategis tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun Pertama dari RPD 2024 – 2026. Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak Tahun 2025 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).

16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
17. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
19. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun Tahun 2021 Nomor 136).
20. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 12).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 10).
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen renja PD dengan renstra PD serta dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan urusan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2025, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak Tahun 2025 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak sampai dengan triwulan II Tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 terlampir

Tabel 2.1 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pencapaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman s/d Bulan Mei Tahun 2025
Kota Pontianak

No	Tujuan/ Sasaran (Renstra)	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional (Formula / Cara)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan Renja Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penangng Jawab	Keterangan
											I		II											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 13 / 8 *100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	TUJUAN PD : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan		Persentase Lingkungan Pemukiman yang Layak	(Persentase perumahan dan kawasan permu-kiman yang layak huni + Persentase capaian penurunan luasan permukiman Kumuh) di bagi dua	89,04 %	511.991.946.000	92,28 %	187.847.280.264	86,95 %	208.038.053.001	0,00 %	2.084.478.841,00	1,00 %	2.357.402.867,00	1,00 %	4.441.881.708,00	1,15	2,14	93,28	192.289.161.972,00	104,76	37,56		
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan diperoleh berdasarkan hasil survey ke bidang-bidang	95,00 %	21.773.645.600,00	95,00 %	8.255.979.590	95,00 %	9.697.596.201,00	20,00 %	1.945.443.614,00	0,00 %	1.246.953.960,00	20,00 %	3.192.397.574,00	21,05	32,92	115,00	11.448.377.164,00	121,05	52,58		

No	Tujuan/ Sasaran (Renstra)	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional (Formula / Cara)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan Renja Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penangng Jawab	Keterangan
											I		II											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 13 / 8 *100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.1		**Kegiatan Perencanaan, Pengangganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah realisasi sub-sub kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dibagi target Renja per sub kegiatan dikali 100 lalu dibagi jumlah sub kegiatan**	**100,00 %**	**81.225.000,00**	**100,00 %**	**42.459.700,00**	**100,00 %**	**42.075.000,00**	**18,86 %**	**-**	**28,51 %**	**1.700.000,00**	**47,37 %**	**1.700.000,00**	**47,37**	**4,04**	**147,37**	**44.159.700,00**	**147,37**	**54,37**	**Sekretariat**	
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		54 Dokumen	46.200.000,00	18 Dokumen	27.759.800,00	19 Dokumen	30.400.000,00	6 Dokumen	-	2 Dokumen	1.700.000,00	8 Dokumen	1.700.000,00	42,11	5,59	26	29.459.800,00	48,15	63,77	Sekretariat	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		24 Laporan	15.225.000,00	8 Laporan	8.099.900,00	8 Laporan	5.075.000,00	2 Laporan	-	2 Laporan	-	4 Laporan	-	50,00	-	12	8.099.900,00	50,00	53,20	Sekretariat	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		18 Laporan	19.800.000,00	6 Laporan	6.600.000,00	6 Laporan	6.600.000,00	0 Laporan	-	3 Laporan	-	3 Laporan	-	50,00	-	9	6.600.000,00	50,00	33,33	Sekretariat	

No	Tujuan/ Sasaran (Renstra)	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional (Formula / Cara)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan Renja Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penangng Jawab	Keterangan
											I		II											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 13 / 8 *100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.2		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah realisasi sub-sub Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dibagi target Renja per sub kegiatan dikali 100 lalu dibagi jumlah sub kegiatan**	**100,00 %**	**16.495.486.000,00**	**100,00 %**	**5.686.736.313,00**	**100,00 %**	**7.893.683.000,00**	**50,00 %**	**1.594.633.375,00**	**50,00 %**	**969.277.667,00**	**100,00 %**	**2.563.911.042,00**	**100,00**	**32,48**	**200,00**	**8.250.647.355,00**	**200,00**	**50,02**	**Sekretariat**	
1.2.1		Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		38 Orang/ bulan	14.545.846.000,00	38 Orang	5.044.636.313,00	52 Orang/ bulan	7.243.803.000,00	52 Orang	1.523.923.375,00	52 Orang	922.137.667,00	104 Orang	2.446.061.042,00	200,00	33,77	142	7.490.697.355,00	373,68	51,50	Sekretariat	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		36 Dokumen	1.920.000.000,00	12 Dokumen	622.610.000,00	12 Dokumen	640.000.000,00	3 Dokumen	70.710.000,00	3 Dokumen	47.140.000,00	6 Dokumen	117.850.000,00	50,00	18,41	18	740.460.000,00	50,00	38,57	Sekretariat	
1.2.3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		36 Dokumen	29.640.000,00	12 Dokumen	19.490.000,00	12 Dokumen	9.880.000,00	3 Dokumen	-	3 Dokumen	-	6 Dokumen	-	50,00	-	18	19.490.000,00	50,00	65,76	Sekretariat	
1.3		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Jumlah realisasi sub-sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dibagi target Renja per sub kegiatan dikali 100 lalu dibagi jumlah sub kegiatan**	**100,00 %**	**6.300.000,00**	**100,00 %**	**2.082.000,00**	**100,00 %**	**2.100.000,00**	**0,00 %**	**-**	**50,00 %**	**-**	**50,00 %**	**-**	**50,00**	**-**	**150,00**	**2.082.000,00**	**150,00**	**33,05**	**Sekretariat**	
1.3.1		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		6 Dokumen	6.300.000,00	2 Dokumen	2.082.000,00	2 Dokumen	2.100.000,00	0 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	50,00	-	3	2.082.000,00	50,00	33,05	Sekretariat	

No	Tujuan/ Sasaran (Renstra)	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional (Formula / Cara)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan Renja Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penangng Jawab	Keterangan
											I		II											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 13 / 8 *100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.4		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Jumlah realisasi sub-sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dibagi target Renja per sub kegiatan dikali 100 lalu dibagi jumlah sub kegiatan**	**100,00 %**	**360.000.000,00**	**114,29 %**	**104.705.549,00**	**100,00 %**	**120.000.000,00**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**0,00**	**-**	**114,29**	**104.705.549,00**	**114,29**	**29,08**	**Sekretariat**	
1.4.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		3 Paket	225.000.000,00	1 Paket	53.939.549,00	1 Paket	75.000.000,00	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0,00	-	1	53.939.549,00	33,33	23,97	Sekretariat	
1.4.2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		15 Orang	135.000.000,00	9 Orang	50.766.000,00	5 Orang	45.000.000,00	0 Orang	-	0 Orang	-	0 Orang	-	0,00	-	9	50.766.000,00	60,00	37,60	Sekretariat	
1.5		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**Jumlah realisasi sub-sub Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dibagi target Renja per sub kegiatan dikali 100 lalu dibagi jumlah sub kegiatan**	**100,00 %**	**760.740.000,00**	**116,67 %**	**406.805.654,00**	**100,00 %**	**248.580.000,00**	**4,17 %**	**-**	**20,83 %**	**22.303.825,00**	**25,00 %**	**22.303.825,00**	**25,00**	**8,97**	**141,67**	**429.109.479,00**	**141,67**	**56,41**	**Sekretariat**	
1.5.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		36 Paket	30.000.000,00	4 Paket	9.496.500,00	12 Paket	10.000.000,00	0 Paket	-	0 Paket	-	0 Paket	-	0,00	-	4	9.496.500,00	11,11	31,66	Sekretariat	

No	Tujuan/ Sasaran (Renstra)	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional (Formula / Cara)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan Renja Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penangng Jawab	Keterangan
														I		II													
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10			13 = 9+10+11+12			14 = 13 / 8 *100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.5.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		110	Paket	270.000.000,00	15	Paket	137.162.660,00	35	Paket	85.000.000,00	0	Paket -	0	Paket 1.032.000,00		0	Paket	1.032.000,00	0,00	1,21	15	138.194.660,00	13,64	51,18	Sekretariat	
1.5.3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		36	Paket	54.000.000,00	12	Paket	44.480.000,00	12	Paket	18.000.000,00	0	Paket -	6	Paket 10.065.000,00		6	Paket	10.065.000,00	50,00	55,92	18	54.545.000,00	50,00	101,01	Sekretariat	
1.5.4		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		36	Paket	90.000.000,00	12	Paket	22.386.000,00	12	Paket	30.000.000,00	0	Paket -	0	Paket -		0	Paket	-	0,00	-	12	22.386.000,00	33,33	24,87	Sekretariat	
1.5.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		36	Dokumen	16.740.000,00	12	Dokumen	4.620.000,00	12	Dokumen	5.580.000,00	3	Dokumen -	3	Dokumen 1.540.000,00		6	Dokumen	1.540.000,00	50,00	27,60	18	6.160.000,00	50,00	36,80	Sekretariat	
1.5.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		36	Laporan	300.000.000,00	12	Laporan	188.660.494,00	12	Laporan	100.000.000,00	0	Laporan -	6	Laporan 9.666.825,00		6	Laporan	9.666.825,00	50,00	9,67	18	198.327.319,00	50,00	66,11	Sekretariat	
1.6		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Jumlah realisasi sub-sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dibagi target Renja per sub kegiatan dikali 100 lalu dibagi jumlah sub kegiatan**	**100,00**	**%**	**190.000.000,00**	**222,22**	**%**	**757.603.000,00**	**100,00**	**%**	**65.000.000,00**	**0,00**	**% -**	**0,00**	**% -**		**0,00**	**%**	**-**	**0,00**	**-**	**222,22**	**757.603.000,00**	**222,22**	**398,74**	**Sekretariat**	
1.6.1		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		0	Unit	-	1	Unit	351.800.000,00	0	Unit	-	0	Unit -	0	Unit -		0	Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	351.800.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Sekretariat	

No	Tujuan/ Sasaran (Renstra)	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional (Formula / Cara)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan Renja Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penangng Jawab	Keterangan
												I		II											
1	2	3	4	5	6			7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 13 / 8 *100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17	18
					K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.6,2		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0	Unit	-	2	Unit 45.330.000,00	0	Unit -	0	Unit -	0	Unit -	0	Unit -	#DIV/0!	#DIV/0!	2	45.330.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Sekretariat	
1.6.3		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		20	Unit	190.000.000,00	28	Unit 360.473.000,00	7	Unit 65.000.000,00	0	Unit -	0	Unit -	0	Unit -	0,00	-	28	360.473.000,00	140,00	189,72	Sekretariat	
1.7		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Jumlah realisasi sub-sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi target Renja per sub kegiatan dikali 100 lalu dibagi jumlah sub kegiatan**	**100,00**	**%**	**2.755.815.600,00**	**466,67**	**% 927.862.324,00**	**100,00**	**% 951.465.200,00**	**16,67**	**% 350.810.239,00**	**16,67**	**% 228.702.968,00**	**33,33**	**% 579.513.207,00**	**33,33**	**60,91**	**500,00**	**1.507.375.531,00**	**500,00**	**54,70**	**Sekretariat**	
1.7.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		36	Laporan	10.500.000,00	12	Laporan 3.500.000,00	1	Laporan 3.500.000,00	0	Laporan -	0	Laporan -	0	Laporan -	0,00	-	12	3.500.000,00	33,33	33,33	Sekretariat	
1.7.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36	Laporan	1.920.000.000,00	12	Laporan 634.532.404,00	12	Laporan 640.000.000,00	3	Laporan 140.904.799,00	3	Laporan 84.094.528,00	6	Laporan 224.999.327,00	50,00	35,16	18	859.531.731,00	50,00	44,77	Sekretariat	
1.7.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		36	Laporan	825.315.600,00	12	Laporan 289.829.920,00	12	Laporan 307.965.200,00	3	Laporan 209.905.440,00	3	Laporan 144.608.440,00	6	Laporan 354.513.880,00	50,00	115,11	18	644.343.800,00	50,00	78,07	Sekretariat	

No	Tujuan/ Sasaran (Renstra)	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional (Formula / Cara)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan Renja Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penangng Jawab	Keterangan
											I		II											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 13 / 8 *100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.8		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah**	**Jumlah realisasi sub-sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibagi target Renja per sub kegiatan dikali 100 lalu dibagi jumlah sub kegiatan**	**100,00 %**	**1.124.079.000,00**	**100,00 %**	**327.725.050,00**	**100,00 %**	**374.693.001,00**	**0,00 %**	**-**	**26,67 %**	**24.969.500,00**	**26,67 %**	**24.969.500,00**	**26,67**	**6,66**	**126,67**	**352.694.550,00**	**126,67**	**31,38**	**Sekretariat**	
1.8.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		7 Unit	385.794.000,00	7 Unit	94.723.750,00	6 Unit	128.598.000,00	0 Unit	-	4 Unit	22.259.500,00	4 Unit	22.259.500,00	66,67	17,31	11	116.983.250,00	157,14	30,32	Sekretariat	
1.8.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		180 Unit	144.000.000,00	60 Unit	35.440.000,00	60 Unit	48.000.000,00	0 Unit	-	8 Unit	2.710.000,00	8 Unit	2.710.000,00	13,33	5,65	68	38.150.000,00	37,78	26,49	Sekretariat	
1.8.3		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		3 Unit	594.285.000,00	1 Unit	197.561.300,00	1 Unit	198.095.001,00	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0,00	-	1	197.561.300,00	33,33	33,24	Sekretariat	

No	Tujuan/ Sasaran (Renstra)	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional (Formula / Cara)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan Renja Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penangng Jawab	Keterangan
											I		II											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 13 / 8 *100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	SASARAN 1 PD : Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Layak Huni		**INDIKATOR 1 : Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni**	**(Persentase Jumlah Jalan Lingkungan dalam kondisi mantap + Persentase Jumlah Drainase Lingkungan dalam kondisi mantap) dibagi 2.**	**78,55 %**	**419.703.370.190,00**	**78,97 %**	**161.344.022.865,00**	**74,40 %**	**151.632.816.730,00**	**0,00 %**	**139.035.227,00**	**1,00 %**	**255.625.407,00**	**1,00 %**	**394.660.634,00**	**1,34**	**0,26**	**79,97**	**161.738.683.499,00**	**101,81**	**101,81**		
2		**Program Pengembangan Perumahan**	**Persentase Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana**	**Perbandingan antara jumlah rumah korban bencana yang ditangani terhadap jumlah seluruh rumah korban bencana yang terjadi x 100%**	**100,00 %**	**8.049.990.000,00**	**100,00 %**	**2.495.308.446,00**	**100,00 %**	**2.683.330.000,00**	**14,08 %**	**139.035.227,00**	**%**	**156.171.407,00**	**14,08 %**	**295.206.634,00**	**14,08**	**11,00**	**114,08**	**2.790.515.080,00**	**114,08**	**34,66**	**Bidang Perumahan**	
2.1		**Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Rumah yang direhabilitasi dan dibangun kembali Bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Kabupaten /kota Pontianak**	**Jumlah realisasi unit rumah pada sub-sub Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota**	**216 Unit Rumah**	**1.599.990.000,00**	**55 Unit Rumah**	**590.850.434,00**	**71 Unit Rumah**	**533.330.000,00**	**10 Unit Rumah**	**-**	**13 Unit Rumah**	**-**	**23 Unit Rumah**	**-**	**32,39**	**-**	**78,00**	**590.850.434,00**	**36,11**	**36,93**	**Bidang Perumahan**	
2.1.1		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terehabilitasi		213 Unit Rumah	1.050.000.000,00	55 Unit Rumah	590.850.434,00	71 Unit Rumah	350.000.000,00	10 Unit Rumah	-	13 Unit Rumah	-	Unit Rumah	-	0,00	-	55	590.850.434,00	25,82	56,27	Bidang Perumahan (SPM)	SPM

No	Tujuan/ Sasaran (Renstra)	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional (Formula / Cara)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan Renja Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penangng Jawab	Keterangan
											I		II											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 13 / 8 *100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2.1.2		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		3 Unit Rumah	549.990.000,00	0 Unit Rumah	-	1 Unit Rumah	183.330.000,00	0 Unit Rumah	-	0 Unit Rumah	-	Unit Rumah	-	0,00	-	0	-	0,00	0,00	Bidang Perumahan (SPM)	SPM
2.2		**Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Jumlah Dokumen pembinaan dan pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Jumlah Realisasi Dokumen pembinaan dan pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**12 Dokumen**	**6.000.000.000,00**	**4 Dokumen**	**1.774.128.012,00**	**4 Dokumen**	**2.000.000.000,00**	**1 Dokumen**	**139.035.227,00**	**Dokumen**	**156.171.407,00**	**1 Dokumen**	**295.206.634,00**	**25,00**	**14,76**	**5,00**	**2.069.334.646,00**	**41,67**	**34,49**	**Bidang Perumahan**	
2.2.1		Penataus ahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		12 Dokumen	6.000.000.000,00	4 Dokumen	1.774.128.012,00	4 Dokumen	2.000.000.000,00	1 Dokumen	139.035.227,00	1 Dokumen	156.171.407,00	2 Dokumen	295.206.634,00	50,00	14,76	6	2.069.334.646,00	50,00	34,49	Bidang Perumahan	
2.3		**Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan**	**Jumlah Realisasi laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan**	**3 Laporan**	**450.000.000,00**	**1 Laporan**	**130.330.000,00**	**1 Laporan**	**150.000.000,00**	**0 Laporan**	**-**	**0 Laporan**	**-**	**0 Laporan**	**-**	**0,00**	**-**	**1,00**	**130.330.000,00**	**33,33**	**28,96**	**Bidang Perumahan**	
2.3.1		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		3 Laporan	450.000.000,00	1 Laporan	13.330.000,00	1 Laporan	150.000.000,00	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0 Laporan	-	0,00	-	1	13.330.000,00	33,33	2,96	Bidang Perumahan	

No	Tujuan/ Sasaran (Renstra)	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional (Formula / Cara)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan Renja Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penangng Jawab	Keterangan
														I		II													
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10			13 = 9+10+11+12			14 = 13 / 8 *100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3		**Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)**	**Persentase Jumlah Jalan Lingkungan Dan Jumlah Drainase Lingkungan Dalam Kondisi Mantap**	**(persentase jumlah jalan lingkungan dalam kondisi mantap + persentase jumlah drainase lingkungan dalam kondisi mantap) dibagi 2**	**78,55**	**%**	**411.653.380.190,00**	**85,30**	**%**	**158.848.714.419,00**	**76,40**	**%**	**148.949.486.730,00**	**0,00**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**99.454.000,00**	**0,00**	**%**	**99.454.000,00**	**0,00**	**0,07**	**85,30**	**158.948.168.419,00**	**108,59**	**108,59**	**Bidang Perumahan**	
3.1		**Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Jumlah Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Jumlah Realisasi lokasi yang disediakan PSU Perumahan (Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan)**	**1800**	**Lokasi**	**411.653.380.190,00**	**923**	**Lokasi**	**158.848.714.419,00**	**645**	**Lokasi**	**148.949.486.730,00**	**0**	**Lokasi**	**-**	**0**	**Lokasi**	**99.454.000,00**	**0**	**Lokasi**	**99.454.000,00**	**0,00**	**0,07**	**923,00**	**158.948.168.419,00**	**51,28**	**38,61**	**Bidang Perumahan**	
3.1.1		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		3	Dokumen	572.550.000,00	1	Dokumen	289.949.400,00	1	Dokumen	190.850.000,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	0,00	-	1	289.949.400,00	33,33	50,64	Bidang Perumahan	
3.1.2		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		1800	Lokasi	410.917.330.190,00	923	Lokasi	158.543.290.219,00	645	Lokasi	148.704.136.730,00	0	Lokasi	-	0	Lokasi	98.394.000,00	0	Lokasi	98.394.000,00	0,00	0,07	923	158.641.684.219,00	51,28	38,61	Bidang Perumahan	POKIR dan ASMAS
3.1.3		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		3	Laporan	163.500.000,00	1	Laporan	15.474.800,00	1	Laporan	54.500.000,00	0	Laporan	-	0	Laporan	1.060.000,00	0	Laporan	1.060.000,00	0,00	1,94	1	16.534.800,00	33,33	10,11	Bidang Perumahan	

No	Tujuan/ Sasaran (Renstra)	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional (Formula / Cara)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan Renja Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penangng Jawab	Keterangan
											I		II											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 13 / 8 *100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	SASARAN 1 PD : Meningkatkan Kawasan Permukiman dan Perumahan yang Layak Huni		**INDIKATOR 2 : Persentase luas permukiman tidak kumuh**	**(Luas Kawasan Permukiman - Luas Kawasan Kumuh) dibagi Luas Kawasan Permukiman x 100%**	**99,53 %**	**26.527.920.210,00**	**99,31 %**	**9.557.204.609,00**	**99,49 %**	**10.862.640.070,00**	**0,00 %**	**-**	**1,00 %**	**74.673.500,00**	**1,00 %**	**74.673.500,00**	**1,01**	**0,69**	**100,31**	**9.631.878.109,00**	**100,78**	**36,31**		
4		**Program Kawasan Permukiman**	**Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Di Bawah 10 (sepuluh) HA Di Kota Yang Ditangani**	**(Luas Kumuh tahun sebelumnya - Luas Kumuh tahun ini) / Luas Kumuh awal tahun Renstra x 100 %**	**16,62 %**	**21.787.920.210,00**	**9,50 %**	**7.767.285.945,00**	**9,50 %**	**7.282.640.070,00**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**54.813.500,00**	**0,00 %**	**54.813.500,00**	**0,00**	**0,75**	**9,50**	**7.822.099.445,00**	**57,16**	**35,90**	**Bidang Kawasan Permukiman**	
4.1		**Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Jumlah dokumen/ laporan lokasi kumuh dan rencana pencegahan serta penanganan perumahan dan permukiman kumuh**	**Jumlah Realisasi dokumen/ laporan lokasi kumuh dan rencana pencegahan serta penanganan perumahan dan permukiman kumuh**	**9 Dokumen**	**233.194.200,00**	**3 Dokumen**	**124.945.700,00**	**3 Dokumen**	**97.731.400,00**	**0 Dokumen**	**-**	**0 Dokumen**	**950.000,00**	**0 Dokumen**	**950.000,00**	**0,00**	**0,97**	**3,00**	**125.895.700,00**	**33,33**	**53,99**	**Bidang Kawasan Permukiman**	
4.1.1		Penyusunan/Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah dokumen/ laporan lokasi kumuh dan rencana pencegahan serta penanganan perumahan dan permukiman kumuh		6 Dokumen	117.694.200,00	2 Dokumen	39.496.800,00	2 Dokumen	59.231.400,00	0 Dokumen	-	0 Dokumen	950.000,00	0 Dokumen	950.000,00	0,00	1,60	2	40.446.800,00	33,33	34,37	Bidang Kawasan Permukiman	
4.1.2		Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		3 Dokumen	115.500.000,00	1 Dokumen	85.448.900,00	1 Dokumen	38.500.000,00	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0,00	-	1	85.448.900,00	33,33	73,98	Bidang Kawasan Permukiman	

No	Tujuan/ Sasaran (Renstra)	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional (Formula / Cara)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan Renja Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penangng Jawab	Keterangan
														I		II														
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10			13 = 9+10+11+12			14 = 13 / 8 *100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp		K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.2		**Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani**	**Jumlah Realisasi Pekerjaan dibagi dengan Jumlah Pagu Kegiatan (APBD) dikali Luasan Kegiatan**	**10,01**	**Ha**	**21.554.726.010,00**	**5,73**	**Ha**	**7.642.340.245,00**	**5,72**	**Ha**	**7.184.908.670,00**	**0,00**	**Ha**	**-**	**0,04**	**Ha**	**53.863.500,00**	**0,04**	**Ha**	**53.863.500,00**	**0,68**	**0,75**	**5,77**	**7.696.203.745,00**	**57,63**	**35,71**	**Bidang Kawasan Permukiman**	
4.2.1		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		300	Unit Rumah	6.000.000.000,00	100	Unit Rumah	1.863.135.960,00	100	Unit Rumah	2.000.000.000,00	0	Unit Rumah	-	0	Unit Rumah	17.560.000,00	0	Unit Rumah	17.560.000,00	0,00	0,88	100	1.880.695.960,00	33,33	31,34	Bidang Kawasan Permukiman	
4.2.2		Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU		3	Dokumen	3.360.238.500,00	6	Dokumen	2.098.962.242,00	1	Dokumen	1.120.079.500,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	12.755.000,00	0	Dokumen	12.755.000,00	0,00	1,14	6	2.111.717.242,00	200,00	62,84	Bidang Kawasan Permukiman	
4.2.3		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh		36	Laporan	442.410.000,00	12	Laporan	104.980.000,00	12	Laporan	147.470.000,00	0	Laporan	-	5	Laporan	2.720.000,00	5	Laporan	2.720.000,00	41,67	1,84	17	107.700.000,00	47,22	24,34	Bidang Kawasan Permukiman	
4.2.4		Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi		3	Dokumen	211.196.400,00	1	Dokumen	70.244.450,00	1	Dokumen	70.398.800,00	0	Dokumen	-	0	Dokumen	2.038.500,00	0	Dokumen	2.038.500,00	0,00	2,90	1	72.282.950,00	33,33	34,23	Bidang Kawasan Permukiman	
4.2.5		Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas permukiman Kumuh yang Diremajakan/ Dipugar		3	Ha	11.540.881.110,00	1	Ha	3.505.017.593,00	1	Ha	3.846.960.370,00	0	Ha	-	0	Ha	18.790.000,00	0,00	Ha	18.790.000,00	0,00	0,49	1	3.523.807.593,00	33,33	30,53	Bidang Kawasan Permukiman	

No	Tujuan/ Sasaran (Renstra)	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional (Formula / Cara)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan Renja Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penangng Jawab	Keterangan
											I		II											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 13 / 8 *100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
5		**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**PRESENTASE RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG DITANGANI**	**Jumlah RTLH ditangani / Jumlah RTLH yang ada dalam perkiraan 3 tahun x 100 %**	**34,78 %**	**4.740.000.000,00**	**11,59 %**	**1.789.918.664,00**	**11,59 %**	**3.580.000.000,00**	**%**	**-**	**%**	**19.860.000,00**	**0,00 %**	**19.860.000,00**	**0,00**	**0,55**	**11,59**	**1.809.778.664,00**	**33,32**	**38,18**	**Bidang Kawasan Permukiman**	
5.1		**Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Berkurangnya jumlah unit RTLH diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditangani**	**Jumlah Realisasi unit RTLH yang disediakan diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditangani**	**324 Unit Rumah**	**4.740.000.000,00**	**107 Unit Rumah**	**1.789.918.664,00**	**107 Unit Rumah**	**3.580.000.000,00**	**0 Unit Rumah**	**-**	**0 Unit Rumah**	**19.860.000,00**	**0 Unit Rumah**	**19.860.000,00**	**0,00**	**0,55**	**107,00**	**1.809.778.664,00**	**33,02**	**38,18**	**Bidang Kawasan Permukiman**	
5.1.1		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha		324 Unit Rumah	4.740.000.000,00	107 Unit Rumah	1.789.918.664,00	108 Unit Rumah	3.580.000.000,00	0 Unit Rumah	-	0 Unit Rumah	19.860.000,00	0 Unit Rumah	19.860.000,00	0,00	0,55	107	1.809.778.664,00	33,02	38,18	Bidang Kawasan Permukiman	

No	Tujuan/ Sasaran (Renstra)	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional (Formula / Cara)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan Renja Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penangng Jawab	Keterangan
														I		II													
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10			13 = 9+10+11+12			14 = 13 / 8 *100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	SASARAN 2 PD : Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Lahan Untuk Pembangunan		**INDIKATOR 3 : Persentase Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum**	**% penyelesaian ganti rugi tanah untuk pembangunan + % Penataguna an tanah + % Penyelesaian konflik pertanahan yang dimediasi dibagi 3**	**93,33**	**%**	**43.424.440.000,00**	**0,00**	**%**	**8.690.073.200**	**93,33**	**%**	**35.845.000.000,00**	**0,00**	**%**	**-**	**1,00**	**%**	**780.150.000,00**	**1,00**	**%**	**780.150.000,00**	**1,07**	**2,18**	**1,00**	**9.470.223.200,00**	**1,07**	**21,81**		
6		**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**PERSENTASE PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN YANG DIMEDIASI**	**% konflik pertanahan yang selesai : konflik pertanahan yang dimediasi**	**100,00**	**%**	**424.440.000,00**	**100**	**%**	**76.094.800,00**	**100,00**	**%**	**150.000.000,00**	**0,00**	**%**	**-**	**12,50**	**%**	**36.150.000,00**	**12,50**	**%**	**36.150.000,00**	**12,50**	**24,10**	**112,50**	**112.244.800,00**	**112,50**	**26,45**	**Bidang Pertanahan**	
6.1		**Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**% Jumlah kasus sengketa tanah yang difasilitasi/ mediasi**	**% dari Jumlah Berita Acara dibagi Target Renja dikali 100**	**100,00**	**%**	**424.440.000,00**	**100**	**%**	**76.094.800,00**	**100,00**	**%**	**150.000.000,00**	**0,00**	**%**	**-**	**12,50**	**%**	**36.150.000,00**	**12,50**	**%**	**36.150.000,00**	**12,50**	**24,10**	**112,50**	**112.244.800,00**	**112,50**	**26,45**	**Bidang Pertanahan**	
6.1.1		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		24	Berita Acara	424.440.000,00	4	Berita Acara	76.094.800,00	8	Berita Acara	150.000.000,00	0	Berita Acara	-	1	Berita Acara	36.150.000,00	1	Berita Acara	36.150.000,00	12,50	24,10	5	112.244.800,00	20,83	26,45	Bidang Pertanahan	

No	Tujuan/ Sasaran (Renstra)	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional (Formula / Cara)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan Renja Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penangng Jawab	Keterangan
											I		II											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 13 / 8 *100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
7		**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**PERSENTASE PENYELESAIAN GANTI RUGI TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**(Luas tanah yang dibebaskan / total luas tanah kebutuhan pembangunan) x 100%**	**80,00 %**	**43.000.000.000,00**	**105,00 %**	**8.613.978.400,00**	**80,00 %**	**35.695.000.000,00**	**0,00 %**	**-**	**%**	**744.000.000,00**	**0,00 %**	**744.000.000,00**	**0,00**	**2,08**	**105,00**	**9.357.978.400,00**	**131,25**	**21,76**	**Bidang Pertanahan**	
7.1		**Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah bidang tanah yang dibebaskan untuk jalan dan bangunan**	**Jumlah Realisasi bidang tanah yang dibebaskan untuk jalan dan bangunan**	**38 Bidang Tanah**	**43.000.000.000,00**	**5 Bidang Tanah**	**8.613.978.400,00**	**5 Bidang Tanah**	**35.695.000.000,00**	**0 Bidang Tanah**	**-**	**1 Bidang Tanah**	**744.000.000,00**	**1 Bidang Tanah**	**744.000.000,00**	**20,00**	**2,08**	**6,00**	**9.357.978.400,00**	**15,79**	**21,76**	**Bidang Pertanahan**	
7.1.1		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		38 Dokumen	43.000.000.000,00	5 Dokumen	8.613.978.400,00	10 Dokumen	35.695.000.000,00	0 Dokumen	-	1 Dokumen	744.000.000,00	1 Dokumen	744.000.000,00	10,00	2,08	6	9.357.978.400,00	15,79	21,76	Bidang Pertanahan	

No	Tujuan/ Sasaran (Renstra)	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Definisi Operasional (Formula / Cara)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan Renja Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat Daerah Penangng Jawab	Keterangan
											I		II											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		13 = 9+10+11+12		14 = 13 / 8 *100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
8		**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**PERSENTASE PENATAGUNAAN TANAH**	**% dari Realisasi dari Jumlah Dokumen Pemetaan ZNT dibagi Target Renja dikali 100**	**100,00 %**	**562.570.000,00**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**	**0,00 %**	**-**		**#DIV/0!**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**		
8.1		**Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Dokumen Pemetaan Zona Nilai Tanah**	**Jumlah Realisasi Dokumen Pemetaan Zona Nilai Tanah**	**3 Dokumen**	**43.000.000.000,00**	**0 Dokumen**	**-**	**0 Dokumen**	**-**	**0 Dokumen**	**-**	**0 Dokumen**	**-**	**0 Dokumen**	**-**		**#DIV/0!**	**0,00**	**-**	**0,00**	**0,00**		
8.1.1		Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pemetaan Data Peta Zona Nilai Tanah di Kota Pontianak sebagai salah satu data penunjang untuk pengadaan tanah/ pembebasan lahan Pemerintah Kota Pontianak		3 Dokumen	43.000.000.000,00	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	0 Dokumen	-	Dokumen	-	0 Dokumen	-		#DIV/0!	0	-	0,00	0,00		
JUMLAH					**75,62**	**511.991.946.000,00**	**106,56 %**	**187.847.280.264**	**59,06 %**	**208.038.053.001,00**	**5,02 %**	**2.084.478.841,00**	**1,79 %**	**2.357.402.867,00**	**6,81 %**	**4.441.881.708,00**	**11,52**	**2,14**		**192.289.161.972,00**	**0,00**	**37,56**		
Rata-rata capaian kinerja (%) Program																	**6,81**				**84,75**			
Predikat Kinerja (Program)																								
Rata-rata capaian kinerja (%) Sub Kegiatan																	**23,32**				**54,76**			
Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)																	Rendah				Sangat Tinggi			

Berdasar evaluasi renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak sampai dengan bulan mei Tahun 2025, teridentifikasi bahwa ada beberapa faktor-faktor penyebab atau penghambat pencapaian kinerja antara lain :

1. Bidang Perumahan
   a. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang harus ditindaklanjuti sebelum memulai sub kegiatan Penyediaan PSU Perumahan, yaitu menyeragamkan Design Mix Formula pekerjaan Latasir dengan membuat sampel campuran di Laboratorium Jalan Raya Fakultas Teknik Untan untuk dimasukan kedalam Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dan Spesifikasi Teknis,
   b. Mereviu Hasil Perencanaan pekerjaan PSU Jalan Lingkungan yang mengakomodir saran dari tim BPK,
   c. Surat Keputusan Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) baru turun bulan Mei 2025,
   d. Peraturan Walikota tentang standar harga satuan Upah dan Bahan 2025 masih berproses di Pemerintah Provinsi Kalbar (ada perbaikan).
2. Bidang Kawasan Permukiman
   a. Bantuan sosial berupa rumah tidak layak huni dan wc, sedang dalam proses SK by name by address (BNBA) serta koordinasi dan sosialisasi dengan pihak-pihak terkait,
   b. Proses perencanaan review belum berakhir,
   c. Koordinasi dan perencanaan dokumen swakelola masih dalam proses,
   d. Proses pembuatan paket BML tanpa konsultan review,
   e. Koordinasi kesiapan penyedia dan Pejabat Pengadaan yang baru dari Badan Layanan Pengadaan,
   f. Kriteria dan pencarian sumber data survey Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
3. Bidang Pertanahan
   a. Perselisihan harga ganti rugi,

      Penyebab utama keterlambatan pembebasan lahan adalah perselisihan harga ganti rugi antara pemilik tanah dan pemerintah. Masyarakat sering merasa harga yang ditawarkan terlalu rendah, sehingga mereka menolak untuk melepas hak atas tanah mereka. Penilaian harga yang tidak sesuai dengan harga pasar dan tidak mempertimbangkan potensi kenaikan nilai tanah setelah proyek selesai juga menjadi masalah.
   b. Kurangnya partisipasi masyarakat,

      Pembebasan lahan yang berjalan tanpa melibatkan masyarakat secara aktif dalam sosialisasi, konsultasi publik, dan persetujuan pengadaan tanah dapat menimbulkan perlawanan dan perseteruan hukum. Masyarakat yang tidak merasa dilibatkan dan

tidak memahami tujuan pembebasan lahan cenderung menentang proses tersebut, sehingga memperlambat pembebasan lahan.

c. Masalah Administrasi dan Legal,

   Proses pengadaan tanah yang rumit dan berbelit-belit, termasuk prosedur perizinan, pengukuran tanah, dan penyelesaian administrasi terkait, juga dapat menjadi penghambat. Beberapa kasus pembebasan lahan terhambat karena masih ada sengketa hukum yang belum selesai.

d. Peraturan Perundangan,

   Peraturan perundangan yang belum lengkap dan belum terintegrasi juga dapat menjadi hambatan dalam pembebasan lahan. Peraturan yang belum jelas mengenai ganti rugi, prosedur pembebasan tanah, dan sanksi bagi pelanggaran dapat menyebabkan interpretasi yang berbeda-beda dan memperlambat proses, belum ada dokumen perencanaan pengadaan tanah dari instansi yang memerlukan.

Selain itu juga penyebab terpenuhinya target kinerja program/ kegiatan dan sub kegiatan pada sekretariat antara lain dikarenakan bahwa sebagian besar pelaksaaan rutinitas kegiatan di sekretariat bersifat rutin seperti penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan bahan logistik, penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor, penyediaan bahan bacaan, pemeliharaan rutin kendaraan dinas, pemeliharaan peralatan dan mesin, serta penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik hal ini dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan tanpa hambatan yang mengganggu rencana.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Kerja

Dalam pelaksanaan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025, terdapat beberapa perubahan baik dari segi anggaran, perubahan output sub kegiatan, penambahan dan pengurangan target kinerja, yang mencangkup semua rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas. Penyajian program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/ fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Kegiatan :

1). Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Pontianak

Sub Kegiatan :

1. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana

   Rencana Aksi :

   - Identifikasi rumah korban yang terkena becncna
   - Pendataan kerusakan bangunan
   - Perhitungan kebutuhan material
   - Penyerahan bantuan material kepada korban bencana

2. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota

   Rencana Aksi :

   - Identifikasi rumah korban yang terkena relokasi
   - Penyerahan rumah untuk korban relokasi

Kegiatan :

2). Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

Sub Kegiatan :

1. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

   Rencana Aksi :

   - Melakukan pengelolaan dan pemeliharaan rusun
   - Melakukan pembinaan terhadap penghuni rusun

Kegiatan :

3). Penerbitan Izin Pembanguna dan Pengembangan Perumahan

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Perumahan

Rencana Aksi :

- Membentuk Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Perumahan
- Melakukan rapat koordinasi bersama instansi terkait

II. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Kegiatan :

1). Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Sub Kegiatan :

1. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan

Rencana Aksi :

- Menyusun data base kondisi jalan lingkungan dan drainase lingkungan

2. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Rencana Aksi :

- Melakukan survei berdasarkan proposal dan usulan masyarakat terhada perbaikan jalan dan saluran
- Melakukan perhitungan RAB terhadap hasil survei
- Melaksanakan pembangunan jalan lingkungan dan drainase lingkungan

3. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas

Rencana Aksi :

- Membentuk Tim Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
- Mengadakan rapat dengan instansi terkait

III. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Kegiatan :

1). Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

Sub Kegiatan:

1. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh

Rencana Aksi :

- Melakukan survei pendataan Rumah Tak Layak Huni dan WC
- Menyusun Dokumen Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh

2. Penyusunan/ Review/ Legalisasasi Kebijakan Bidang PKP

Rencana Aksi :

- Menyusun draft peraturan wali kota tentang penanganan kumuh di kota Pontianak
- Melakukan FGD peraturan wali kota tentang penanganan kumuh di kota Pontianak
- Legalisasi peraturan wali kota tentang penanganan kumuh di kota Pontianak

2). Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

Sub Kegiatan :

1. Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh

Rencana Aksi :

- Melakukan survei lokasi Penanganan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
- Menyusun dokumen perencanaan
- Melaksanakan pembangunan untuk peremajaan kawasan permukiman kumuh

2. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Rencana Aksi :

- Menyusun SK Penetapan penerima bantuan RTLH dan WC pada kawasan kumuh di kota Pontianak
- Melaksanakan sosialisasi kepada penerima bantuan RTLH dan WC
- Pembangunan fisik RTLH dan WC pada kawasan kumuh di kota Pontianak

3. Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU

Rencana Aksi :

- Menyusun nota kesepakatan antara Pemerintah Kota Pontianak dan TNI (KODIM 1207)
- Menyusun dokumen perencanaan
- Melaksanakan pembangunan prasarana umum bersama TNI (KODIM 1207)

4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman kumuh

   Rencana Aksi :

   - Pembentukan TIM kelompok kerja PKP
   - Pembentukan Forum Pokja PKP
   - Melaksanakan rapat koordinasi kelompok kerja PKP

5. Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh

   Rencana Aksi :

   - Melakukan survei pendataan
   - Menyusun data permukiman di kota Pontianak

IV. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Kegiatan :

1). Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha

   Rencana Aksi :

   - Menyusun SK Penetapan penerima bantuan RTLH dan WC pada kawasan luar kumuh
   - Melaksanakan sosialisasi kepada penerima bantuan RTLH dan WC pada Kawasan luar kumuh
   - Melaksanakan Pembangunan RTLH dan WC pada kawasan luar kumuh

V. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

Kegiatan:

1). Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kota

Sub Kegiatan:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   Rencana Aksi :

   - Menyusun SK TIM dan Satuan Tugas (Satgas) pengadaan tanah
   - Menyampaikan Hasil penilaian appraisal ke masyarakat jika tidak setuju

akan dilakukan pendekatan secara kekeluargaan (musyawarah) dan jika masih tidak setuju akan dititipkan di pengadilan

- Melakukan koordinasi dengan Pihak BPN, Kecamatan dan Kelurahan setempat untuk proses turun waris
- Melakukan koordinasi terkait biaya BPHTB yang tinggi atas tanah yang terkena untuk kepentingan umum

VI. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

Kegiatan:

1). Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

1. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

   Rencana Aksi :

   - Menyusun SK penyelesaian sengketa
   - Melakukan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan instansi terkait

VII. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

Kegiatan:

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

   Rencana Aksi :

   - Mengumpulkan data dan menyusun dokumen-dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DPPA, Anggaran Kas, Evaluasi Renja, Cascading, LFW, PK, PMPRB, Rencana Aksi).
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

   Rencana Aksi :

   - Mengumpulkan data dan menyusun dokumen-dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi (Lakip, SPIP, LPPD, LKPJ, Manajemen Resiko, Profil SKPD)
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Rencana Aksi :

   - Mengumpulkan data dan menyusun dokumen-dokumen laporan

evaluasi kinerja (Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Standar Kompetensi Jabatan, Standar Kepuasan Masyarakat Semester 1 dan 2, dan Standar Operasional Prosedur).

Kegiatan:

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

   Rencana Aksi :

   - Mengumpulkan data dan memverifikasi serta melakukan pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan PPPK

2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD

   Rencana Aksi :

   - Mengumpulkan data dan memverifikasi serta melakukan pembayaran honor ASN

3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

   Rencana Aksi :

   - Mengumpulkan data dan menyusun dokumen-dokumen laporan keuangan (Kertas pendukung laporan keuangan, Laporan Keuangan Semester 1 dan Laporan Keuangan Semester 2)

Kegiatan :

3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

   Rencana Aksi :

   - Menyusun rencana kebutuhan dan membuat dokumen RKBMD

4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

   Rencana Aksi :

   - Melaksanakan proses pengadaan pakaian dinas ASN dan PPPK

2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

   Rencana Aksi :

   - Mengakomodir pelaksanaan bimtek pegawai dan membuat laporan hasil pelaksanaan bimtek

5) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

   Rencana Aksi :

   - Menyusun daftar kebutuhan listrik/ penerangan bangunan kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

   Rencana Aksi :

   - Menyusun daftar kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

   Rencana Aksi :

   - Menyusun daftar kebutuhan makan dan minum rapat dan aktifitas lapangan, melaksanakan rapat internal, membuat notulen rapat
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

   Rencana Aksi :

   - Menyusun daftar kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

   Rencana Aksi :

   - Menyusun daftar kebutuhan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

   Rencana Aksi :

   - Melaksanakan fasilitasi rapat-rapat baik didalam maupun diluar daerah serta serta menyusun laporan kegiatan

Kegiatan

6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan

1. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

   Rencana Aksi :

   - Melakukan pengadaan peralatan dan mesin kantor sesuai kebutuhan

Kegiatan

7) Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

Sub Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

   Rencana Aksi :

   - Menyediakan jasa surat menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

   Rencana Aksi :

   - Membayar tagihan jasa telp, internet, listrik dan PDAM

3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

   Rencana Aksi :

   - Menyediakan jasa petugas administrasi kantor dan petugas kebersihan kantor serta melakukan evaluasi terhadap kinerja para petugas tersebut

Kegiatan:

8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Sub Kegiatan

1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

   Rencana Aksi :

   - Melakukan pengecekan secara berkala, perbaikan, serta membayar pajak STNK kendaraan dinas

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

   Rencana Aksi :

   - Melakukan pengecekan peralatan dan mesin serta perbaikan peralatan dan mesin tersebut secara berkala

3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya.

   Rencana Aksi :

   - Melakukan pengecekan Gedung dan memeliharanya secara berkala.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak telah menetapkan 4 (empat) proyek strategis yang menjadi titik berat dan akan diprioritaskan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Daftar Proyek Strategis dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak Tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Proyek Strategis	Anggaran	Volume	Lokasi	Keterangan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	283.074.160,00	40 Unit Rumah	Kota Pontianak	Tersebar di seluruh Kecamatan di Kota Pontianak
2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.740.000.000,00	107 Unit Rumah/WC	Kota Pontianak	Tersebar di seluruh Kecamatan di Kota Pontianak
3	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	124.677.322.478,70	633 Lokasi	Kota Pontianak	Tersebar di seluruh Kecamatan di Kota Pontianak
4	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Pengelolaan Rusunawa	1.699.983.280,00	5 Tower	Kota Pontianak	Lokasi di Sungai Beliung, Nipah Kuning Dalan dan Harapan Jaya

3.2. Pendanaan

Berpedoman pada RKPD Perubahan dan berdasarkan hasil pelaksanaan forum OPD Kota, maka ditetapkan Perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak Tahun 2025 yang terdiri dari 7 (tujuh) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan dengan jumlah total anggaran sebesar Rp. 186.113.073.635,- yang mana mengalami penurunan sebesar Rp. 21.924.979.366,- (10,54%) dari APBD murni tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 208.038.053.001,-. Penurunan sebesar Rp. 21.924.979.366,- merupakan recofusing di beberapa sub kegiatan antara lain efisiensi penganggaran pada perjalanan dinas,makan minum, alat/ bahan untuk kegiatan kantor, pemeliharaan, jalan, jaringan dan irigasi (berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Penghematan Anggaran Belanja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 serta Surat Edara Wali Kota Nomor T/900.1.3/245/01/BKAD/2025 tentang Pelaksanaan Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Penghematan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2025) dan adanya Penganggaran

kembali belanja dengan sumber dana sisa DAK Fisik sisa anggaran tahun lalu pada Bidang Perumahan dan Permukiman di sub kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak. Ada beberapa Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak tahun 2025 sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mengalami perubahan karena adanya refocusing anggaran pada makan minum rapat dari Rp. 54.270.000,- menjadi Rp. 20.570.000,-.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terdapat perubahan jumlah personil dari 37 orang menjadi 52 orang karena adanya penambahan penganggaran formasi CPNS dan P3K yang baru.
3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD mengalami perubahan karena adanya penyesuaian kebijakan terkait pengelola penatausahaan keuangan dari Rp. 504.000.000,- menjadi Rp. 389.000.000,-.
4. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD mengalami perubahan dari Rp. 18.300.000,- menjadi Rp. 10.200.000,- karena adanya penyesuaian personil Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menghasilkan pendapatan.
5. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi terdapat perubahan jumlah output dari 5 orang menjadi 70 orang karena adanya penambahan berupa Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur di lingkungan DPRKP.
6. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adanya penyesuaian perubahan keluaran dari 35 paket menjadi 42 paket dengan anggaran dari Rp. 145.770.000,- menjadi Rp. 119.733.661,- karena adanya refocusing anggaran.
7. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adanya penambahan anggaran dari Rp. 60.430.000,- menjadi 67.750.000,- karena adanya kebutuhan terkait koordinasi dan penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
8. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adanya penyeusaian anggaran dari Rp. 100.000.000,- menjadi Rp. 80.522.000,- karena refocusing anggaran.
9. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya adanya penambahan dari 7 unit menjadi 30 unit berupa peralatan untuk mendukung sarana prasarana kerja dengan penyesuaian anggaran dari Rp. 117.882.800,- menjadi Rp. 128.682.800,-.

10. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor penyesuaian perubahan anggaran dari Rp. 866.163.901,- menjadi Rp. 768.243.160,- karena adanya pengangkatan PJLP jadi P3K.
11. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan penyesuaian anggaran dari Rp. 128.598.000,- menjadi Rp. 83.588.700,- karena adanya refocusing anggaran.
12. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya penyesuaian perubahan dari Rp. 198.095.000,- menjadi Rp. 178.851.985,30,- karena adanya refocusing anggaran.
13. Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana terdapat penyesuaian keluaran dari 71 unit rumah dari 40 unit rumah karena penurunan signifikan dalam terjadinya bencana.
14. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota mengalami penyesuaian dari Rp. 1.790.330.000,- menjadi Rp. 1.613.330.000,- karena terdapat sebagian Bantuan Sosial untuk terdampak Pembangunan Jembatan Paralel Kapuas I dialihkan pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
15. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni mengalami penyesuaian keluaran perubahan dari 100 unit rumah menjadi 107 unit rumah dengan anggaran berubah dari sebesar Rp. 1.888.348.000 menjadi Rp. 1.888.526.600,-.
16. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh mengalami penyesuaian perubahan dari Rp. 147.470.000,- menjadi Rp. 113.770.000,- karena adanya refocusing anggaran pada makan minum rapat.
17. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha mengalami perubahan keluaran dari 108 unit rumah menjadi 217 unit rumah dengan anggaran tetap sebesar Rp. 3.478.119.000,- .
18. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian mengalami penyesuaian keluaran dari 645 menjadi 633 dengan anggaran dari Rp. 168.681.117.633,- menjadi Rp. 125.163.502.478,7,- karena refocusing anggaran.

19. Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota mengalami perubahan anggaran dari Rp. 150.000.000,- menjadi 180.000.000,- karena penyesuaian honorarium tim pelaksana kegiatan.
20. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalami perubahan anggaran dari Rp. 35.580.000.000,- menjadi Rp. 35.682.000.000,- karena penyesuaian pada Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Modal Tanah.

Dengan demikian ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak tahun 2025 pada table 3.2 sebagaimana terlampir.

Tabel 3.2 (T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Perkiraan maju Tahun 2026
Kota Pontianak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							**208.038.053.001,00**	**229.965.575.271,00**	**186.113.073.635,00**							**168.988.826.000,00**	
	1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**172.193.053.001,00**	**194.235.575.271,00**	**150.251.073.635,00**							**160.618.826.000,00**	
	1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**172.193.053.001,00**	**194.235.575.271,00**	**150.251.073.635,00**							**160.618.826.000,00**	
1	**1**	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**TINGKAT KEPUASAN BIDANG TERHADAP PELAYANAN KESEKRETARIATAN**				**95 Persen**	**95 Persen**	**9.697.596.201,00**	**10.649.363.488,00**	**10.392.998.406,30**							**7.241.059.200,00**	
	1	**04**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**-**			**100 Persen**	**100 Persen**	**42.075.000,00**	**65.945.000,00**	**65.945.000,00**			**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	**Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib**	**DPRKP Kota Pontianak**		**27.075.000,00**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
	1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				19 Dokumen	19 Dokumen	30.400.000,00	54.270.000,00	20.570.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			15.400.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	8 Laporan	5.075.000,00	5.075.000,00	5.075.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			5.075.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			6.600.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**			**100 Persen**	**100 Persen**	**7.893.683.000,00**	**7.986.462.687,00**	**7.986.462.687,00**			**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	**Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib**	**DPRKP Kota Pontianak**		**5.470.006.000,00**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
	1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	52 Orang/bulan	7.243.803.000,00	7.472.582.687,00	7.472.585.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			4.820.126.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	04	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	640.000.000,00	504.000.000,00	389.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			640.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	9.880.000,00	9.880.000,00	9.880.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			9.880.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	**04**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**-**			**100 Persen**	**100 Persen**	**2.100.000,00**	**18.300.000,00**	**18.300.000,00**			**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	**Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib**	**DPRKP Kota Pontianak**		**2.100.000,00**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
	1	04	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	2.100.000,00	18.300.000,00	10.200.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			2.100.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	**04**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**-**			**100 Persen**	**100 Persen**	**120.000.000,00**	**114.916.000,00**	**114.916.000,00**			**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	**Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib**	**DPRKP Kota Pontianak**		**120.000.000,00**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
	1	04	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	70.060.000,00	70.060.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			75.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	70 Orang	45.000.000,00	44.856.000,00	134.856.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			45.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**-**			**100 Persen**	**100 Persen**	**248.580.000,00**	**352.200.100,00**	**352.200.100,00**			**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	**Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib**	**DPRKP Kota Pontianak**		**263.580.000,00**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
	1	04	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	10.000.100,00	10.000.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				35 Paket	42 Paket	85.000.000,00	145.770.000,00	119.733.661,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	18.000.000,00	60.430.000,00	67.750.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			18.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	04	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	5.580.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			5.580.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	80.522.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	**04**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**-**			**100 Persen**	**100 Persen**	**65.000.000,00**	**117.882.800,00**	**117.882.800,00**			**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	**Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib**	**DPRKP Kota Pontianak**		**65.000.000,00**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
	1	04	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	30 Unit	65.000.000,00	117.882.800,00	128.682.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			65.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**-**			**100 Persen**	**100 Persen**	**951.465.200,00**	**1.618.463.901,00**	**1.618.463.901,00**			**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	**Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib**	**DPRKP Kota Pontianak**		**918.605.200,00**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
	1	04	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			3.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	640.000.000,00	748.800.000,00	748.800.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			640.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	307.965.200,00	866.163.901,00	768.243.160,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			275.105.200,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	**04**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah**	**-**			**100 Persen**	**100 Persen**	**374.693.001,00**	**375.193.000,00**	**375.193.000,00**			**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	**Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib**	**DPRKP Kota Pontianak**		**374.693.000,00**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
	1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	128.598.000,00	128.598.000,00	83.588.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			128.598.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				60 Unit	60 Unit	48.000.000,00	48.500.000,00	48.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			48.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	198.095.001,00	198.095.000,00	178.851.985,30	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			198.095.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	**1**	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**PERSENTASE PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.683.330.000,00**	**3.952.147.440,00**	**3.775.147.440,00**							**2.683.330.000,00**	
	1	**04**	**02**	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah Rumah yang direhabilitasi dan dibangun kembali Bagi Korban Bencana dan Relokasi Program Kabupaten /kota Pontianak**	**-**			**72 Unit Rumah**	**41 Unit Rumah**	**533.330.000,00**	**2.097.664.160,00**	**2.097.664.160,00**			**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	**Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib**	**Masyarakat Kota Pontianak**		**533.330.000,00**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																	
							Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				71 Unit Rumah	40 Unit Rumah	350.000.000,00	307.334.160,00	307.334.160,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	02	2.03	0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	183.330.000,00	1.790.330.000,00	1.613.330.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			183.330.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	**04**	**02**	**2.05**		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Jumlah Dokumen pembinaan dan pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**-**			**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**2.000.000.000,00**	**1.699.983.280,00**	**1.699.983.280,00**			**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	**Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib**	**Masyarakat Kota Pontianak**		**2.000.000.000,00**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
	1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																	
							Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000.000,00	1.699.983.280,00	1.699.983.280,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			2.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	**04**	**02**	**2.06**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	**Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan**	**-**			**1 Laporan**	**1 Laporan**	**150.000.000,00**	**154.500.000,00**	**154.500.000,00**			**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	**Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib**	**Masyarakat Kota Pontianak**		**150.000.000,00**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
	1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	154.500.000,00	154.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3	**1**	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**PERSENTASE KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA DI KOTA YANG DITANGANI**				**4.75 Persen**	**4.75 Persen**	**7.282.640.070,00**	**7.213.857.710,00**	**7.180.336.310,00**							**7.282.640.070,00**	
	1	**04**	**03**	**2.02**		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Jumlah dokumen/ laporan lokasi kumuh dan rencana pencegahan serta penanganan perumahan dan permukiman kumuh**	**-**			**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**97.731.400,00**	**140.591.400,00**	**140.591.400,00**			**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	**Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib**	**Masyarakat Kota Pontianak**		**97.731.400,00**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																	
							Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi				2 Dokumen	2 Dokumen	59.231.400,00	59.231.400,00	59.231.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			59.231.400,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh																	
							Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	1 Dokumen	38.500.000,00	81.360.000,00	81.360.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			38.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani (Ha)**	**-**			**2.86 Ha**	**2.86 Ha**	**7.184.908.670,00**	**7.073.266.310,00**	**7.073.266.310,00**			**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	**Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib**	**Masyarakat Kota Pontianak**		**7.184.908.670,00**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
	1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																	
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				100 Unit Rumah	107 Unit Rumah	2.000.000.000,00	1.888.348.000,00	1.888.526.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			2.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	04	03	2.03	0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU																	
							Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				1 Dokumen	1 Dokumen	1.120.079.500,00	1.103.779.350,00	1.103.779.350,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			1.120.079.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh																	
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				12 Laporan	12 Laporan	147.470.000,00	147.470.000,00	113.770.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			147.470.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh																	
							Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi				1 Dokumen	1 Dokumen	70.398.800,00	70.398.800,00	70.398.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			70.398.800,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh																	
							Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan				1 Ha	1 Ha	3.846.960.370,00	3.863.270.160,00	3.863.270.160,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			3.846.960.370,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	**1**	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**PERSENTASE RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG DITANGANI**				**11.59 Persen**	**11.59 Persen**	**3.580.000.000,00**	**3.478.119.000,00**	**3.478.119.000,00**							**1.580.000.000,00**	
	1	**04**	**04**	**2.01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Berkurangnya jumlah unit RTLH diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditangani**	**-**			**108 Unit Rumah**	**217 Unit Rumah**	**3.580.000.000,00**	**3.478.119.000,00**	**3.478.119.000,00**			**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	**Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib**	**Masyarakat Kota Pontianak**		**1.580.000.000,00**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
	1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																	
							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				108 Unit Rumah	217 Unit Rumah	3.580.000.000,00	3.478.119.000,00	3.478.119.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			1.580.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	**1**	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**PERSENTASE KUALITAS JALAN LINGKUNGAN DAN DRAINASE LINGKUNGAN DALAM KONDISI BAIK**				**-**	**76,6 Persen**	**148.949.486.730,00**	**168.942.087.633,00**	**125.424.472.478,70**							**141.831.796.730,00**	
	1	**04**	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Jumlah Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**-**			**600 Lokasi**	**633 Lokasi**	**148.949.486.730,00**	**168.942.087.633,00**	**168.942.087.633,00**			**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	**Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib**	**Masyarakat Kota Pontianak**		**141.831.796.730,00**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	190.850.000,00	205.570.000,00	205.570.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			190.850.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																	
							Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				645 Lokasi	633 Lokasi	148.704.136.730,00	168.681.117.633,00	125.163.502.478,70	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			141.586.446.730,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				1 Laporan	1 Laporan	54.500.000,00	55.400.000,00	55.400.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			54.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**35.845.000.000,00**	**35.730.000.000,00**	**35.862.000.000,00**							**8.370.000.000,00**	
	2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**35.845.000.000,00**	**35.730.000.000,00**	**35.862.000.000,00**							**8.370.000.000,00**	
6	**2**	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**PERSENTASE PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN YANG DIMEDIASI**				**100 Persen**	**100 Persen**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**180.000.000,00**							**165.000.000,00**	
	2	**10**	**04**	**2.01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelesaian konflik pertanahan yang dimediasi**	**-**			**100 Persen**	**100 Persen**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**			**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	**Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib**	**Masyarakat Kota Pontianak**		**165.000.000,00**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
	2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				8 Berita Acara	8 Berita Acara	150.000.000,00	150.000.000,00	180.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			165.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	**2**	**10**	**05**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**PERSENTASE PENYELESAIAN GANTI RUGI SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**				**-**	**80 Persen**	**35.695.000.000,00**	**35.580.000.000,00**	**35.682.000.000,00**							**8.205.000.000,00**	
	2	**10**	**05**	**2.01**		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase bidang tanah yang dibebaskan untuk jalan dan bangunan**	**-**			**10 Bidang Tanah**	**80 Persen**	**35.695.000.000,00**	**35.580.000.000,00**	**35.580.000.000,00**			**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	**Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib**	**Masyarakat Kota Pontianak**		**8.205.000.000,00**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
	2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	35.695.000.000,00	35.580.000.000,00	35.682.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			8.205.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	**2**	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**PERSENTASE PENATAGUNAAN TANAH**				**100 Persen**	**0 Persen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							**0,00**	
	2	**10**	**10**	**2.01**		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen penatagunaan tanah**	**-**			**1 Dokumen**	**0 Dokumen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.**	**Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib**	**Masyarakat Kota Pontianak**		**0,00**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
	2	10	10	2.01	0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	J U M L A H												**208.038.053.001,00**	**229.965.575.271,00**	**186.113.073.635,00**							**168.988.826.000,00**	

BAB IV
PENUTUP

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan *good governance*, dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis.

Perencanaan Strategis tersebut meliputi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) untuk jangka waktu tiga tahun dan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu satu tahun. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman disusun dengan berpedoman pada RPD Pemerintah Kota Pontianak yang selanjutnya Renstra dijabarkan dalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman, acuan dan arahan dalam melaksanakan program kegiatan, arah, tujuan dan strategi kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam kurun waktu satu tahun yakni tahun 2025, dalam rangka menciptakan Sistem dan Prosedur yang ideal dalam Urusan Perumahan dan Pertanahan. Tugas lain yang tak kalah pentingnya adalah dalam melaksanakan koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran demi terciptanya pengelolaan keuangan yang baik.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian upaya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam tahun 2025, sehingga dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Dengan demikian Rencana Kerja Perubahan ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi yang secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai namun juga sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Harapan kami, semoga Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *public service* yang lebih baik.

Pontianak, 2025
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA PONTIANAK,

ttd

(Derry Gunawan, ST, MT, M.Sc)
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19721230 200003 1 003

2025

PERUBAHAN

RENCANA KERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA PONTIANAK

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PONTIANAK

TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KOTA PONTIANAK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Strategis sebagaimana diketahui merupakan rencana 5 (lima) tahunan yang diuraikan lebih lanjut ke dalam Rencana Tahunan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan lebih fokus. Dengan adanya Rencana Kerja yang tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus. Rencana Kinerja ini antara lain berisikan ringkasan dari Rencana Strategis dan uraian lebih lanjut dari setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis serta strategi pencapaiannya.

Rencana Strategis menggambarkan tujuan jangka panjang, sasaran dan strategi- strategi. Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ini adalah dasar penyusunan penganggaran untuk tahun mendatang. Kaitan dengan anggaran tetap harus dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran dan tujuan serta strategi pencapaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem penganggaran. Anggaran suatu organisasi dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian - penyesuaian yang diperlukan sehingga sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya juga harus disesuaikan dengan perubahan anggaran tersebut. Untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 ini mengacu pada rancangan Renja 2024 – 2026 tentunya disesuaikan dengan dinamika perubahan capaian kinerja tahun 2025 serta kemampuan penganggarannya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953

Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).

17. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
19. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor … Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor ...).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 10).
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Satuan Polisi pamong praja Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan indikator dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD Tahun Anggaran 2025 dengan dokumen Renja PD Tahun 2025 serta Renstra PD dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang dalam kurun waktu Januari-Maret 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD. Bab ini terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja.

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Berisi mengenai evaluasi hasil pelaksanaan Rencana kerja SKPD tahun 2024 dan capaian renstra OPD, analisis kinerja pelayanan OPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Triwulan I pada tahun 2025 dari 2 Program dan 8 kegiatan selengkapnya diuraikan sebagai berikut :

A. Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2025

Pencapaian realisasi belum bisa terpenuhi seluruhnya dikarenakan dalam kondisi tahun berjalan, sedangkan realisasi yang sudah terlaksana terhitung dari bulan Januari 2025 sampai dengan Maret 2025 dan terbentur Anggaran Kas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2025.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2025

Januari s/d Maret Tahun 2025 (tahun berjalan)

Provinsi/Kabupaten/Kota Pontianak

No	Tujuan/Sasaran (Renstra)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2020-2024 (Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi (Renja Refokusing)			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) (Evaluasi Renstra)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I			II			III			IV															
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13= 9+10+11+12			14=13/8*100		15 = 7 + 13			16=15/6 x100		17
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Tingkat kepuasan bidang/Bagian terhadap pelayanan sekretariatan ((Jumlah Pelayanan yang diberikan sekretariat guna menunjang operasional perangkat daerah / Jumlah Pelayanan yang dibutuhkan perangkat daerah guna menunjang operasional) x 100%)**	100	%	151,960,050,035			17,031,820,688	95	%	30,392,010,007	100	%	5,270,953,894										100	%	5,270,953,894	105.263	17.34	50	%	5,270,953,894	50	3	Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja
1.1		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya administrasi Keuangan perangkat daerah**	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	128,209,912,535	100	%	13,609,911,724	100	%	25,641,982,507	100	%	4,700,987,034										100	%	4,700,987,034	100	18.33	100	%	4,700,987,034	100	4	Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja
1.1.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	376	orang/ bulan	128,209,912,535	94	orang /b ulan	13,609,911,724	96	orang/ bulan	25,641,982,507	94	orang /b ulan	4,700,987,034										94	orang/bu lan	4,700,987,034	97.9167	18.33	94	orang/ bulan	4,700,987,034	25	4	Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja
1.2		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	%	3,357,225,500	100	%	418,700,000	100	%	671,445,100	100	%	-										100	%	-	100	0.00	100	%	-	100	0	Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja
1.2.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10	Paket	2,630,775,000	1	bulan	318,950,000	2	Paket	526,155,000	0	Paket	-										0	bulan	-	0	0.00	0.5	bulan	-	5	0	Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja

1.2.2		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200	orang	726,450,500	50	orang	99,750,000	96	orang	145,290,100	0	orang	-										0	orang	-	0	0	25	orang	-	12.5	0	Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja
1.3		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100	%	3,834,688,250	100	%	582,783,155	100	%	766,937,650	100	%	59,834,983										100	%	59,834,983	100	7.80	100	%	59,834,983	100	2	Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja
1.3.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16	paket	36,500,000	4	Paket	7,186,250	4	Paket	7,300,000	1	Paket	1,230,700										1	Paket	1,230,700	25	16.86	2.5	Paket	1,230,700	15.63	3	Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja
1.3.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	60	bulan	41,484,500	0	bulan	-	1	paket	8,296,900	1	Paket	-										1	bulan	-			0.5	bulan	-	0.83333	0	Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja
1.3.3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	3,279,072,500	3	Paket	401,360,300	12	Paket	655,814,500	3	Paket	41,987,800										3	Paket	41,987,800	25	6.40	3	Paket	41,987,800	5	1	Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja
1.3.4		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60	bulan	187,166,250	12	Paket	36,011,600	12	Paket	37,433,250	3	Paket	1,957,000										3	Paket	1,957,000	25	5.23	7.5	Paket	1,957,000	12.5	1	Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja
1.3.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Periode pemenuhan Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	60	bulan	30,000,000	12	bulan	6,000,000	12	bulan	6,000,000	3	bulan	1,020,000										3	bulan	1,020,000	25	17	7.5	bulan	1,020,000	12.5	3	Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja
1.3.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordisi dan Konsultasi SKPD	40	Laporan	260,465,000	12	bulan	132,225,005	12	laporan	52,093,000	3	laporan	13,639,483										3	bulan	13,639,483	25	26.18	7.5	bulan	13,639,483	18.75	5	Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja
1.4		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	**%**	-	100	%	**234,200,000**	**100**	**%**	**900,000,000**	**100**	**%**	**-**										100	%	**-**	100	0.00	100	%	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja
1.4.1		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional dan Lapanga yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional dan Lapanga yang disediakan	-	Unit	-	2	Unit	68,720,000	3	Unit	900,000,000	-	Unit	-										0	Unit	-	0	0.00	1	Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja
1.4.2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	-	Unit	-	6	Unit	165,480,000	-	Unit	-	-	Unit	-										0	Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	3	Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja

1.5		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Tingkat kepuasan bidang/Bagian terhadap pelayanan sekretariatan	**100**	**%**	**8,629,323,750**	**100**	**%**	**1,650,053,603**	**100**	**%**	**1,725,864,750**	**100**	**%**	**472,149,770**									**100**	**%**	**472,149,770**	**100**	**27.36**	**100**	**%**	**472,149,770**	**100**	**5**	Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	361,358,000	12	Laporan	10,416,840	12	Laporan	72,271,600	3	Laporan	2,387,850									3	Laporan	2,387,850	25	3.30	7.5	Laporan	2,387,850	15.63	1	Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja
1.5.2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	Laporan	8,267,965,750	12	Laporan	1,639,636,763	12	Laporan	1,653,593,150	3	Laporan	469,761,920									3	Laporan	469,761,920	25	28.41	7.5	Laporan	469,761,920	15.63	6	Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja
1.6		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat kepuasan bidang/Bagian terhadap pelayanan sekretariatan	100	%	3,428,900,000	100	%	536,172,206	100	%	685,780,000	100	%	37,982,107									100	%	37,982,107	100	5.54	100	%	37,982,107	100	1	Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja
1.6.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	128	unit	3,176,600,000	32	unit	472,362,206	32	unit	635,320,000	32	unit	32,992,107									32	unit	32,992,107	100	5.19	32	unit	32,992,107	25	1	Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja
1.6.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	312	unit	252,300,000	78	unit	63,81000	78	unit	50,460,000	78	unit	4,990,000									78	unit	4,990,000	100	9.89	78	unit	4,990,000	25	2	Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja
	Tujuan PD 1: Meningkatnya Ketertiban di Kalangan Masyarakat		Persentase Penduduk yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	(Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada / Jumlah Warga Negara yang Berhak Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada) x 100%	100	%	10,332,653,000	100	%	1,837,950,200	100	%	2,066,530,600	100	%										100	%	447,303,000		**21.65**		%				BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH, PERLINDUNGAN MASYARAKAT, OPERASIONAL
	Sasaran 1: Meningkatnya Situasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kota Pontianak		Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3) preventif dan represif non yustisi	Warga negara yang mendapatkan manfaat dari penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3) preventif dan represif non yustisi sesuai dengan mutu pelayanan dasar ((Jumlah Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3) yang diselesaikan secara preventif dan represif non yustisi / Jumlah Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3) yang dilaporkan/ditemukan) x 100%)	100	%	10,332,653,000	100	%	1,837,950,200	100	%	2,066,530,600	100	%										100	%	447,303,000	**100**	**21.65**	**100**	%	**447,303,000**	**100**	4	BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH, PERLINDUNGAN MASYARAKAT, OPERASIONAL

2		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelanggaran Penegakan PERDA dan PERKADA yang dapat diselesaikan secara Preventif dan Represif, Non Yustisi maupun Yustisi	Persentase Pelanggaran Penegakan PERDA dan PERKADA yang dapat diselesaikan secara Preventif dan Represif, Non Yustisi maupun Yustisi ((Jumlah Penegakan PERDA dan PERKADA yang diselesaikan secara Preventif dan Represif, Non Yustisi maupun Yustisi / Jumlah Penegakan PERDA dan	**100**	**%**	**10,332,653,000**	**100**	**%**	**1,837,950,200**	**100**	**%**	***2,066,530,600***	**100**	**%**	***447,303,000***										**100**	**%**	**447,303,000**	**100**	**21.65**	**100**	**%**	**447,303,000**	**100**	**4**	**BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH, PERLINDUNGAN MASYARAKAT,**
2.1		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan ((Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum / Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan/ditemukan) x 100%)	**100**	**%**	**6,124,702,000**	**100**	**%**	**1,343,725,200**	**100**	**%**	**1,224,940,400**	**100**	**%**	**325,275,000**										**100**	**%**	**325,275,000**	**100**	**26.55**	**100**	**%**	**325,275,000**	**100**	**5**	**BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH, PERLINDUNGAN MASYARAKAT,**
2.1.1		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi ini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	48	Laporan	1,634,800,000	12	Laporan	369,564,000	12	Laporan	326,960,000	3	Laporan	108,860,000										3	Laporan	108,860,000	25	33.29	7.5	Laporan	108,860,000	15.63	7	BIDANG OPERASI DAN KETERTIBAN UMUM
2.1.2		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12	Laporan	1,274,875,000	12	bulan	419,855,400	12	kasus	254,975,000	3	bulan	84,889,000										3	bulan	84,889,000	25	33.29	7.5	bulan	84,889,000	62.5	7	BIDANG OPERASI DAN KETERTIBAN UMUM

2.1.3		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4	Dokumen	955,227,000	0	dokumen	93,667,000	2	dokumen	191,045,400	0	dokumen	31,800,000										0	dokumen	31,800,000	0	16.65	0	dokumen	31,800,000	0	3	BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2.1.4		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Persentase Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	100	%	500,000,000	100	%	5,500,000	100	%	100,000,000	100	%	-										100	%	-		0		%		0	0	BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
2.1.5		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	48	Dokumen	1,759,800,000	1	Dokumen	455,138,800	12	Dokumen	351,960,000	3	Dokumen	99,726,000										3	Dokumen	99,726,000	25	28.33	2	Dokumen	99,726,000	4.16667	6	BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2.2		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terselenggaranya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran Penegakan PERDA dan PERKADA yang dapat diselesaikan secara Preventif dan Represif, Non Yustisi maupun Yustisi	**100**	**%**	**4,207,951,000**	**100**	**%**	**494,225,000**	**100**	**%**	**841,590,200**	**100**	**%**	**122,028,000**										**100**	**%**	**122,028,000**	**100**	**14.50**	**100**	**%**	**122,028,000**	**100**	**3**	**BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH dan OPERASIONAL**
2.2.1		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	4	Laporan	685,451,000	3	Laporan	67,880,000	1	Laporan	137,090,200	0	Laporan	-										0	Laporan	-	0	0.00	1.5	Laporan	-	37.5	0	BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
2.2.2		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	48	Laporan	2,266,600,000	12	Laporan	55,135,000	12	Laporan	453,320,000	3	Laporan	46,184,000										3	Laporan	46,184,000	25	10.19	7.5	Laporan	46,184,000	15.63	2	BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
2.2.3		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	48	Laporan	1,255,900,000	12	Laporan	371,210,000	12	Laporan	251,180,000	3	Laporan	75,844,000										3	Laporan	75,844,000	25	30.20	7.5	Laporan	75,844,000	15.63	6	BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

2.3		Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	**48**	**Laporan**	**-**			**-**			**-**			**-**											**-**		**-**						**BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH**
2.3.1		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	16	Laporan	-			-			-			-											-		-						BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
							162,292,703,035			**19,229,107,517**			**32,458,540,607**			**5,718,256,894**										**5,718,256,894**		**18**			**24,947,364,411**		**15.37**	
	Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan (%)															18										18					**18**	-		
	Predikat Kinerja															Sangat Rendah										Sangat Rendah		Sangat Rendah						
	Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)															18										18								
	Predikat Kinerja															Sangat Rendah										Sangat Rendah								
	Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Penetapan Rencana Program terorganisir dengan baik dalam satu program dan kegiatan																																	
	Faktor penghambat pencapaian kinerja : belum optimalnya penerapan Penegakan Hukum daerah dan belum optimalnya pelayanan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran																																	
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) :																																	
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya *) :																																	

Pontianak, Mei 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Pontianak

Drs. Ahmad Sudiyantoro
NIP. 19690312 199703 1

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rencana Kerja

Sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap tujuan dan strateginya, maka langkah operasional harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Program merupakan kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sementara kegiatan adalah sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Rencana program dan kegiatan merupakan proses penetapan rangkaian tindakan yang terorganisir dalam suatu program dan kegiatan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak telah menyusun program dan kegiatan dalam rangka Meningkatkan kualitas ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan Meningkatkan penanggulangan bencana dan kebakaran.

Program dan kegiatan yang disusun ini memuat berbagai kebijakan yang tersusun secara terinci dan sesuai fungsi organisasi serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan memuat indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai tujuan yang harus dicapai dan dapat digambarkan sebagai skala atau tingkatan yang digunakan. Indikator kinerja juga merupakan alat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran program dan kegiatan.

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							**30.733.405.000,00**	**33.375.682.507,00**	**32.458.541.100,00**	**1.725.136.100,00**							**18.433.073.000,00**		
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**30.733.405.000,00**	**33.375.682.507,00**	**32.458.541.100,00**	**1.725.136.100,00**							**18.433.073.000,00**		
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**30.733.405.000,00**	**33.375.682.507,00**	**32.458.541.100,00**	**1.725.136.100,00**							**18.433.073.000,00**		
.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan**				**95 Persen**	**95 Persen**	**28.706.405.000,00**	**30.915.383.907,00**	**30.392.010.500,00**	**-12.398.332.000,00**							**16.308.073.000,00**		
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				96 Orang/bulan	96 Orang/bulan	23.538.905.000,00	25.641.982.507,00	25.641.983.000,00	2.103.078.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan,	-		12.718.223.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

																Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib					
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				96 Orang/bulan	96 Orang/bulan	23.538.905.000,00	25.641.982.507,00	25.641.983.000,00	2.103.078.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			12.718.223.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Adanya Penambahan Pegawai Baru
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				96 Orang/bulan	96 Orang/bulan	480.000.000,00	798.330.000,00	558.323.400,00	78.323.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanj	-		530.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

																utan disertai Kondisi Aman dan Tertib					
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	360.000.000,00	642.330.000,00	526.155.000,00	166.155.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) ANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			380.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Adanya Penambahan Pegawai Baru
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				96 Orang	96 Orang	120.000.000,00	156.000.000,00	32.168.400,00	-87.831.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan			150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Anggaran di drop ke pengadaan Mebel dan Mesin lainnya guna menampabah prasarana adanya penambahan ASN di Sat.PP PP

																, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib						
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah*				1 Dokumen	1 Dokumen	572.000.000,00	941.898.650,00	766.937.650,00	194.937.650,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	-		628.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																				
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7.300.000,00	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanj			7.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Adanya Penambahan Pegawai Baru

																utan disertai Kondisi Aman dan Tertib					
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	8.296.900,00	8.296.900,00	-31.703.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	375.000.000,00	726.109.500,00	655.814.500,00	280.814.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan,			400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Adanya Penambahan Pegawai Baru

																Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib					
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	37.300.000,00	37.433.250,00	37.433.250,00	133.250,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Adanya Penambahan Pegawai Baru
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan			6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Adanya Penambahan Pegawai Baru

																, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib						
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	106.400.000,00	156.759.000,00	52.093.000,00	-54.307.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			115.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*				1 Unit	1 Unit	900.000.000,00	900.000.000,00	1.013.121.700,00	113.121.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanj	-		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

																utan disertai Kondisi Aman dan Tertib					
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Adanya Penambahan Pegawai Baru
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					94 Unit	0,00	0,00	75.352.400,00	75.352.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan,			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Adanya Penambahan Pegawai Baru

																Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib					
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					3 Unit	0,00	0,00	37.769.300,00	37.769.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Adanya Penambahan Pegawai Baru
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				12 Laporan	12 Laporan	2.685.500.000,00	1.947.392.750,00	1.725.864.750,00	-959.635.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanj	-		1.860.350.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

																utan disertai Kondisi Aman dan Tertib					
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	52.000.000,00	72.271.600,00	72.271.600,00	20.271.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			53.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Adanya Penambahan Pegawai Baru
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.633.500.000,00	1.875.121.150,00	1.653.593.150,00	-979.906.850,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) ANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur			1.807.350.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025

																Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib						
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah*				12 Laporan	12 Laporan	530.000.000,00	685.780.000,00	685.780.000,00	155.780.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	-		571.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penambahan Kendaraan Operasional Lapngan
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				36 Unit	36 Unit	480.000.000,00	635.320.000,00	635.320.000,00	155.320.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanj			520.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penambahan Kendaraan Operasional Lapngan

																utan disertai Kondisi Aman dan Tertib					
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	28 Unit	50.000.000,00	50.460.000,00	50.460.000,00	460.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			51.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Penambahan Prasarana Penunjang Pekerjaan dan Penambahan Pegawai Baru
.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pelanggaran penegakan PERDA dan PERKADA yang dapat diselesaikan secara preventif dan represif, non Yustisi maupun Yustisi**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2.027.000.000,00**	**2.460.298.600,00**	**2.066.530.600,00**	**98.000.000,00**							**2.125.000.000,00**		
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan*				100 persen	100 persen	1.451.000.000,00	1.668.678.400,00	1.224.940.400,00	-226.059.600,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandir	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi	Masyarakat		1.495.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

															ian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib					(APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																			
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	155.000.000,00	211.278.400,00	191.045.400,00	36.045.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			180.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Adanya Penambahan Pegawai Baru
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia																			

			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				96 Orang	96 Orang	16.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	84.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Adanya Penambahan Pegawai Baru
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				12 Dokumen	12 Dokumen	510.000.000,00	451.800.000,00	351.960.000,00	-158.040.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			515.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025

	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																			
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				12 laporan	12 laporan	368.000.000,00	469.400.000,00	326.960.000,00	-41.040.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			375.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																			
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				12 Laporan	12 Laporan	402.000.000,00	336.200.000,00	254.975.000,00	-147.025.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			405.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025

	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Persentase Jumlah laporan penyelenggaraan penegakan Perda dan Perwa*				100 persen	100 persen	576.000.000,00	791.620.200,00	841.590.200,00	265.590.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	-		630.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	177.120.200,00	137.090.200,00	-12.909.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			175.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																			

			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				12 Laporan	12 Laporan	326.000.000,00	336.680.000,00	453.320.000,00	127.320.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			330.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Adanya Penambahan Pegawai Baru
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	277.820.000,00	251.180.000,00	151.180.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			125.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Adanya Penambahan Pegawai Baru
	J U M L A H								**30.733.405.000,00**	**33.375.682.507,00**	**32.458.541.100,00**	**1.725.136.100,00**							**18.433.073.000,00**		

Perubahan Renja Satuan Polisi pamong praja Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan menindaklanjuti Surat Edaran Walikota Pontianak dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Pemerintah Daerah

3.2. Pendanaan

Perubahan Pagu Satuan Polisi pamong praja Kota Pontianak Tahun 2025 Berdasarkan Surat Edaran Walikota Pontianak Nomor : B/000.7.2.4/ /BAPPERIDA/2025 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang dimana didalamnya terdapat perubahan anggaran Tahun 2025 dan Pendanaan pada setiap Program Kerja yang ada di Satuan polisi Pamong Praja Kota Pontianak

BAB IV
PENUTUP

Program dan kegiatan yang disusun ini memuat berbagai kebijakan yang tersusun secara terinci dan sesuai fungsi organisasi serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan memuat indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai tujuan yang harus dicapai dan dapat digambarkan sebagai skala atau tingkatan yang digunakan. Indikator kinerja juga merupakan alat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran program dan kegiatan.

Rencana Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2025 ini merupakan kegiatan, program dan sasaran tahunan yang disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026 yang sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Target kinerja yang ada pada Rencana Kinerja Tahun 2025 mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada sasaran akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.

Dengan disusunnya Rencana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2025 ini diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dalam rangka mendukung terwujudnya *good government* dan *good governance*.

Pontianak, Juni 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak

Drs. Ahmad Sudiyantoro
Pembina Tk. I
NIP. 19690312 199703 1 009

PEMERINTAH KOTA
PONTIANAK

RENJA PERUBAHAN

TAHUN 2025

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

website : bpbd.pontianak.go.id
email : bpbd@pontianak.go.id
instagram : @pusdalopsbpbdpontianak

KATA PENGANTAR

Penyusunan dokumen Rencana Kerja adalah bagian dari manajemen kinerja yang baik. Rencana kerja yang baik haruslah selaras dan terintegrasi dengan penataan program dan perencanaan kegiatan yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak disusun berdasarkan RKPD Perubahan Kota Pontianak. RENJA ini merupakan alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban. Renja disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan jangka pendek sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan daerah dan acuan resmi bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 dibuat sebagai acuan pelaksanaan tugas bagi BPBD Kota Pontianak, dan dapat memberikan kontribusi keberhasilan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kota Pontianak.

Daftar Isi

Cover.....i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPBD TAHUN LALU..... 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II..... 6

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 21
3.1 Rencana kerja BPBD 21
3.2 Pendanaan program kerja BPBD..... 22

BAB IV PENUTUP..... 45

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perbuahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman bagi Organisasi Peringkat Daerah untuk membuat sebuah rencana kerja. Rencana Kerja yangdisusun merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk mengarahkan organisasi mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Strategis BPBD Tahun 2024-2026 Renja ini merupakan alat kendali dan tolok ukur bagi manajemen Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban. Rencana Kerja ini sejalan dengan tujuan Kota Pontianak khususnya mendukung tujuan ke-1 yakni **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, berkelanjutan, disertai kondisi aman dan tertib.**

Renja Perubahan adalah dokumen perencanaan yang disusun untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perubahan BPBD Kota Pontianak ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan faktor-faktor yang akan mempengaruhi dan penyesuaian terhadap kebijakan dari pemerintah daerah. Renja ini ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pontianak agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategi pembangunan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
13. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan DaerahTentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perbuahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standard Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standard Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
20. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5)
23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 47).
24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 51).
25. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tantang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 13).
26. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 2).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan indikator dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD Tahun Anggaran 2025 dengan dokumen Renja PD Tahun 2025 serta renstra PD dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang dalam kurun waktu Januari-Juni 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan sitematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja Perubahan, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2025

Menerangkan tentang Evaluasi pelaksanaan Renja BPBD tahun 2025 sampai dengan Triwulan II.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD

Memuat telaahan terhadap Rencana Kerja Perubahan yang menjelaskan Program, Kegiatan dan Pendanaan BPBD tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja Perubahan BPBD.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan I

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak sebagai institusi (Perangkat Daerah) yang mempunyai tugas pokok di bidang penanggulangan bencana di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, memiliki peran dan tanggung jawab stategis dalam mewujudkan rasa aman dari ancaman bencana. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Pontianak sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja BPBD Kota Pontianak yaitu **membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan dibidang penanggulangan bencana.**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, BPBD Kota Pontianak menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan program kerja di bidang penanggulangan bencana daerah;
b. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana daerah;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana daerah;
d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana daerah;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penanggulangan bencana daerah;
f. pelaksanaan administrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tahun Anggaran 2025 alokasi dana untuk Badan Penanggulangan Bencana Kota Pontianak sebesar Rp.7.061.711.899,- pada DPA Murni Tahun Anggaran 2025. Namun berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Penghematan Anggaran Belanja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025 maka total anggaran pada BPBD Kota Pontianak telah di lakukan refocusing sehingga menjadi Rp.6.341.713.663,- terealisasi sebesar Rp.1.052.632.519,- atau 16,6 % pada triwulan ke 1.

Total Anggaran ini terdiri dari 3 program dan 12 kegiatan yakni Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Penanggulangan Bencana, dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pelaksanaan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak yang dapat dilihat pada uraian berikut:

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tujuan / Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2025)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
														I			II																
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			13			14=13/8x100%		15=7+13			16=15/6x100%		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	%		
1	Tujuan PD: Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana		Indeks Kapasitas Daerah		0,6	Indeks			Indeks		0,58	Indeks																					
	Sasaran : Meningkatnya penanggulangan bencana		Persentase Pemenuhan 34 indikator IKD		69,12	persen			persen		44,12	persen		0	persen		0	persen		0	persen		0	persen	0	persen		0%			
1		Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase tingkat Kepuasan Bidang/ Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Persentase Tingkat kepuasan seluruh ASN BPBD Kota Pontianak terhadap layanan kesekretariatan.	100	persen	11.117.897.000	0	persen	0	100	persen	4.819.886.059	25	persen	1.005.564.029	25	persen	0	100	persen	1.005.564.029	100	1.005.564.029	100	20,86	1.005.564.029	100	9,04%	Sekretariat	
1,1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja	Jumlah dokumen dan laporan dibagian perencanaan yang disusun dan diselesaikan.	100	persen	117.444.600	0	persen	0	100	persen	54.935.000	7,69	persen	12.400.000	0,00	persen	-	8	persen	12.400.000	8	12.400.000	8	persen	12.400.000	8	10,56%	Sekretariat	

USER

			perangkat daerah																												
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun		18	dokumen	22.724.700	0	dokumen	0	6	dokumen	24.440.000	0	dokumen	0,00	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	0	0	dokumen	0			Sekretariat	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun		12	Laporan	16.377.900	0	laporan	0	3	Laporan	1.865.000	0	laporan	0,00	0	laporan	-	**0**	Laporan	0	0	0	0	Laporan	0			Sekretariat	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		9	laporan	78.342.000	0	laporan	0	4	laporan	28.630.000	1	laporan	12.400.000,00	0	laporan	0	**1**	laporan	12.400.000	25	12.400.000	1	laporan	12.400.000			Sekretariat	
1,2		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah**	**Administrasi keuangan BPBD yang dilaksanakan.**	**100**	**persen**	**8.692.921.000**	**0**	**persen**	**0**	**100**	**persen**	**3.359.986.899**	**28,00**	**persen**	**884.106.027**	**0,00**	**persen**	**-**	**28**	**persen**	**884.106.027**	28	**884.106.027**	**28**	**persen**	**884.106.027**	**28**	**10,17 %**	**Sekretariat**	
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN		19	org/bulan	8.244.187.000	0	org/bulan	0	12	bulan	3.146.711.899	3	bulan	856.836.027	0	bulan	0	3	bulan	856.836.027	25	856.836.027	3	bulan	856.836.027			Sekretariat	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		36	dokumen	437.400.000	0	dokumen	0	12	dokumen	211.920.000	3	dokumen	27.270.000	0	dokumen	0	**3**	dokumen	27.270.000	25	27.270.000	3	dokumen	27.270.000			Sekretariat	
1.2.3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		3	laporan	11.334.000	0	laporan	0	1	Laporan	1.355.000	1	laporan	-	0	laporan	0	**1**	laporan	0	100	0	1	Laporan	0			Sekretariat	

1,3		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya**	**Jumlah ASN yang mendapatkan pakaian dinas dan mengikuti pelatihan.**	**100**	**persen**	**154.039.824**	**0**	**persen**	**0**	**100**	**persen**	**176.419.000**	**0,00**	**persen**	**0**	**0,00**	**persen**	**-**	**0,00**	**persen**	**0**	0	**0**	**0**	**persen**	**0**	**0**	**0%**	**Sekretariat**	
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		1	paket	89.370.000	0	paket	0	1	paket	46.200.000	0	paket	0	0	paket	0	0	paket	0	0	0	0	paket	0			Sekretariat	
1.3.2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		6	orang	64.669.824	0	orang	0	2	orang	130.219.000	0	orang	0	0	orang	0	0	orang	0	0	0	0	orang	0			Sekretariat	
1,4		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah**	**Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor.**	**100**	**persen**	**1.224.116.757**	**0**	**persen**	**0**	**138**	**persen**	**472.249.600**	**23,28**	**persen**	**54.594.676**	**0,00**	**persen**	**-**	**23**	**persen**	**54.594.676**	17	**54.594.676**	**23**	**persen**	**54.594.676**	**23**	**4%**	**Sekretariat**	
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		3	paket	258.931.857	0,00	paket	0	2	paket	5.550.900	0,25	paket	2.692.288	0	paket	0	0	paket	2.692.288	13	2.692.288	0	paket	2.692.288			Sekretariat	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		1	paket	57.750.000	0,00	paket	0	5	paket	169.272.400	0,25	paket	7.357.288	0	paket	0	0,3	paket	7.357.288	5	7.357.288	0	paket	7.357.288			Sekretariat	
1.4.3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3	paket	15.000.000	0	paket	0	4	paket	43.504.000	0	paket	7.260.000	0	paket	0	0	paket	7.260.000	0	7.260.000	0	paket	7.260.000			Sekretariat	
1.4.4		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		36	dokumen	15.000.000	0	dokumen	0	4	paket	38.122.300	3	dokumen	8.219.500	0	dokumen	0	3	dokumen	8.219.500	75	8.219.500	3	paket	8.219.500			Sekretariat	
1.4.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan		3	paket	86.916.900	0,00	paket	0	12	Dokumen	6.000.000	0,25	paket	700.000	0	paket	0	**0,3**	paket	700.000	2	700.000	0	Dokumen	700.000			Sekretariat	

			yang Disediakan																											
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		3	laporan	595.818.000	0	laporan	0	1	Laporan	110.000.000	0	laporan	7.015.600	0	laporan	0	0	laporan	7.015.600	0	7.015.600	0	Laporan	7.015.600			Sekretariat	
1.4.7		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemeringahan berbasis Elektronik pada SKPD		36	dokumen	194.700.000	0	dokumen	0	12	dokumen	99.800.000	3	dokumen	21.350.000	0	dokumen	0	3	dokumen	21.350.000	25	21.350.000	3	dokumen	21.350.000			Sekretariat	
1,5		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Jasa penunjang operasional kantor yang dibayarkan.**	**100**	**persen**	**438.411.219**	**0**	**persen**	**0**	**100**	**persen**	**178.562.780**	**25**	**persen**	**39.405.874**	**0**	**persen**	**-**	**25**	**persen**	**39.405.874**	25	**39.405.874**	**25**	**persen**	**39.405.874**	**25**	**8,99%**	**Sekretariat**	
1.5.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik yang Disediakan		36	laporan	202.526.019	0	laporan	0	12	Laporan	87.868.300	3	Laporan	20.100.594	0	Laporan	0	3	Laporan	20.100.594	25	20.100.594	3	Laporan	20.100.594			Sekretariat	
1.5.2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		36	laporan	235.885.200	0	laporan	0	12	laporan	90.694.480	3	laporan	19.305.280	0	laporan	0	3	laporan	19.305.280	25	19.305.280	3	laporan	19.305.280			Sekretariat	
1,6		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara**	**Jumlah barang milik daerah yang tercatat dan dipelihara.**	**100**	**persen**	**490.963.600**	**0**	**persen**	**0**	**121**	**persen**	**577.732.780**	**5,77**	**persen**	**15.057.452**	**0,00**	**persen**	**-**	**25**	**persen**	**15.057.452**	21	**15.057.452**	**25**	**persen**	**15.057.452**	**25**	**3,07%**	**Sekretariat**	
1.6.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.		42	unit	122.520.000	0	unit	0	16	unit	340.940.000	0	unit	9.463.952	0	unit	0	0	unit	9.463.952	0	9.463.952	0	unit	9.463.952			Sekretariat	

		Operasional atau Lapangan																													
1.6.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		9	unit	340.840.000	0	unit	0	46	unit	56.390.000	3	unit	5.593.500	0	unit	0	3	unit	5.593.500	7	5.593.500	3	unit	5.593.500			Sekretariat	
1.6.3		Pemeliharaan/ Rehabiitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi		1	unit	27.603.600	0	unit	0	1	unit	180.402.780	0	unit	0	0	unit	0	0	unit	0	0	0	0	unit	0			Sekretariat	
2		**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Tingkat waktu tanggap (response time rate) penanggulangan bencana**	**Jumlah waktu tanggap kurang dari 24 jam dibagi jumlah total kejadian bencana dikali 100 persen**	**100**	**persen**	**4.459.272.200**	**0**	**persen**	**0**	**100**	**persen**	**1.891.139.670**	**25**	**persen**	**47.068.490**	**25**	**persen**	**-**	**100**	**persen**	**47.068.490**	**100**	**47.068.490**	**100**	**2,49**	**47.068.490**	**100**	**1,06%**	**Bidang Penanggulangan Bencana**	
			Cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	**Jumlah kawasan rawan bencana (Kelurahan) yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi jumlah kawasan rawan bencana dikali 100 persen**	**100**	**persen**																									
2,1		**Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**Jumlah penduduk yang mendapatkan layanan informasi dan edukasi bencana, khususnya di wilayah rawan bencana.**	**100**	**persen**	**345.461.200**	**0**	**persen**	**0**	**100**	**persen**	**36.671.600**	**0**	**persen**	**0**	**0**	**persen**	**-**	**0**	**persen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**persen**	**0**	**0**	**0,00%**	**Bidang Penanggulangan Bencana**	

2,1.1		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Ancaman Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya.		750	orang	167.730.600		orang	0	250	orang	34.231.600	0	orang	0	0	orang	0	0	orang	0	**0**	0	0	orang	0			**Bidang Penanggulangan Bencana**	ASMAS, SPM
2,1.2		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dinyatakan sah/legal		750	orang	167.730.600		orang	0	1	Dokumen	2.440.000	0	orang	0	0	orang	0	0	orang	0	**0**	0	0	Dokumen	0			**Bidang Penanggulangan Bencana**	
2,2		**Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**Jumlah WN yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, dibagi jumlah WN yang berada di wilayah rawan bencana.**	**100**	**persen**	**974.440.700**	**0**	**persen**	**0**	**205**	**persen**	**923.470.570**	**0**	**persen**	**-**	**0**	**persen**	**-**	**0,00**	**persen**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**persen**	**0**	**0**	**0,00%**	**Bidang Penanggulangan Bencana**	
2.2.1		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu, Warga Negara, Keluarga maupun Petugas		1	dokumen	200.000.000	0	Dokumen	0	15	unit	484.436.970	0	dokumen	-	0	dokumen	0	0	dokumen	0	**0**	0	0	unit	0			**Bidang Penanggulangan Bencana**	SPM
2.2.2		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan		240	orang	90.188.400	0	orang	0	200	orang	71.025.600	0	orang	0	0	orang	0	0	orang	0	**0**	0	0	orang	0			**Bidang Penanggulangan Bencana**	ASMAS, SPM

2.2.3		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana		36	dokumen	15.055.500	0	Dokumen	0	3	kawasan	50.394.000	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	**0**	0	0	kawasan	0			**Bidang Penanggulangan Bencana**	SPM
2.2.4		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya		225	unit	65.070.000	0	unit	0	80	orang	140.742.400	0	unit	0	0	unit	0	0	unit	0	**0**	0	0	orang	0			**Bidang Penanggulangan Bencana**	SPM
2.2.5		Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi		15	kawasan	189.788.400	0	kawasan	0	1	dokumen	129.445.600	0	kawasan	0	0	kawasan	0	0	kawasan	0	**0**	0	0	dokumen	0			**Bidang Penanggulangan Bencana**	ASMAS
2.2.6		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota		120	orang	240.000.000	0	orang		12	laporan	8.604.000	0	orang	0	0	orang	0	0	orang	0	**0**	0		orang				**Bidang Penanggulangan Bencana**	
2.2.6		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		3	dokumen	174.338.400	0	Dokumen	0	80	kawasan	38.822.000	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	**0**	0	0	kawasan	0			**Bidang Penanggulangan Bencana**	SPM
2,3		**Kegiatan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dibagi dengan WN yang menjadi korban**	**100**	**persen**	**2.765.190.300**	**0**	**persen**	**0**	**100**	**persen**	**896.837.500**	**23**	**persen**	**47.068.490**	**0**	**persen**	**-**	**23**	**persen**	**47.068.490**	**23**	**47.068.490**	**23**	**persen**	**47.068.490**	**23**	**1,70%**	**Bidang Penanggulangan Bencana**	

				bencana, dikali 100%																											
2.3.1		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen Laporan Kaji Cepat.		3	dokumen	711.738.000	0	dokumen	0	1	dokumen	293.993.000	0,25	dokumen	5.616.000	0	dokumen	0	0,3	dokumen	5.616.000	**25**	5.616.000	0	dokumen	5.616.000			**Bidang Penanggulangan Bencana**	SPM
2.3.2		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan di evakuasi per jenis kejadian bencana.		600	orang	1.646.718.000	0	orang	0	200	orang	465.418.500	54	orang	29.104.000	0	orang	0	54	orang	29.104.000	**27**	29.104.000	54	orang	29.104.000			**Bidang Penanggulangan Bencana**	SPM
2.3.3		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana.		825	orang	399.324.300	0	orang	0	275	orang	128.176.000	54	orang	12.348.490	0	orang	0	54	orang	12.348.490	**20**	12.348.490	54	orang	12.348.490			**Bidang Penanggulangan Bencana**	Karena Kejadian bencana bersifat insidentil dan situasional
2.3.4		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah laporan pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.		3	Laporan	7.410.000	0	laporan	0	1	Laporan	9.250.000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	**0**	0	0	Laporan	0			**Bidang Penanggulangan Bencana**	SPM

USER

2,4		**Kegiatan Penataan sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Persentase Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggara Penanggulangan Bencana yang di buat**	**Jumlah SOP yang dibuat dibagi target SOP yg direncanakan untuk disusun, dikali 100%**	**100**	**persen**	**374.180.000**	**0**	**persen**	**0**	**100**	**persen**	**34.160.000**	**0**	**persen**	**-**	**0**	**persen**	**-**	**0**	**persen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**persen**	**0**	**0**	**0,00%**	**Bidang Penanggulangan Bencana**	
2.4.1		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kaupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang dibuat.		2	dokumen	5.060.000	0	dokumen	0	1	dokumen	6.045.000	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	**0**	0	0	dokumen	0			**Bidang Penanggulangan Bencana**	
2.4.2		Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		3	dokumen	253.620.000	0	dokumen	0	1	dokumen	6.775.000	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	**0**	0	0	dokumen	0			**Bidang Penanggulangan Bencana**	
2.4.3		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan		3	laporan	52.500.000	0	laporan	0	1	laporan	6.840.000	0	laporan	0	0	laporan	0	0	laporan	0	**0**	0	0	laporan	0			**Bidang Penanggulangan Bencana**	
2.4.4		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		3	laporan	33.000.000	0	laporan	0	1	laporan	7.250.000	0	laporan	0	0	laporan	0	0	laporan	0	**0**	0	0	laporan	0			**Bidang Penanggulangan Bencana**	

2.4.5		Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)		3	Dokumen	30.000.000	0	dokumen	0	1	dokumen	7.250.000	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	**0**	0	0	dokumen	0			**Bidang Penanggulangan Bencana**	
3		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	**Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran**	**Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat kebakaran dan non kebakaran)**	**100**	**persen**	**-**	**0**	**persen**	**0**	**100**	**persen**	**350.686.170**	**0**	**persen**	**-**	**0**	**persen**	**-**	**0**	**persen**	**0**	**0**	**0**	**100**	**0,00**	**0**	**100**	**#DIV/0!**	**Bidang Kebakaran**	
3,1		**Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelayanan Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi yang berhasil ditangani dalam tingkat waktu tanggap (response time)**	**Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh DAMKAR Kota dan Yayasan/Damkar swasta dibawah binaan DAMKAR Kota yang berhasil ditangani pada tingkat waktu tanggap (response time)**	**100**	**persen**	**-**	**0**	**persen**	**0**	**1**	**persen**	**221.617.170**	**0**	**persen**	**0**	**0**	**persen**	**0**	**0**	**persen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**persen**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**Bidang Kebakaran**	
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran								1	Dokumen	187.200.000	0			0	unit	0	0	-	0	0	0	0	Dokumen	0			**Bidang Kebakaran**	

			dan Non Kebakaran																												
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal								1	Unit	4.950.000				0	unit	0	0	-	0	0	0	0	Unit	0			**Bidang Kebakaran**	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait								5	Unit	29.467.170				0	unit	0	0	-	0	0	0	0	Unit	0			**Bidang Kebakaran**	
3,2		**Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Cakupan Wilayah yang Mendapat Layanan Pemberdayaan Pencegahan Kebakaran**	**Persentase Wilayah (Keluarahan) di Kota Pontianak yang mendapat layanan Pemberdayaan Pencegahan Kebakaran**	**100**	**persen**	**-**	**0**	**persen**	**0**	**40**	**persen**	**129.069.000**	**0**	**persen**	**0**	**0**	**persen**	**-**	**0**	**persen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**persen**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**Bidang Kebakaran**	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulanga								100	orang	58.569.000	0			0	Laporan	0	0	-	0	0	0	0	orang	0			**Bidang Kebakaran**	

		Edukasi Masyarakat	n Kebakaran Setiap Tahunnya																															
		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar								1	Dokumen	70.500.000				0	laporan	0	0	-	0	0	0	0	Dokumen	0			**Bidang Kebakaran**	
JUMLAH													**7.061.711.899**			**1.052.632.519**						**1.052.632.519**		**1.052.632.519**			**1.052.632.519**					
Rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan (%)																							**###**											
Predikat Kinerja															Sangat Rendah													**100,00**					
Rata-rata capaian kinerja Program (%)																							**###**											
Predikat Kinerja															Rendah																			
Capaian Keuangan																							**###**											

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :	Perencanaan kegiatan yang dibuat sudah sesuai dengan anggaran kas yang telah disusun
Faktor penghambat pencapaian kinerja :	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak merupakan OPD yang beberapa kegiatannya bersifat situasional dan insidentil
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) :	Adapun tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah dengan mendorong kegiatan yang telah ada masuk angkas serta mengoptimalkan kegiatan yang ada, yang bukan eksidentil atau berdasarkan situasional
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya *) :	Penyusunan RENJA pada kegiatan yang dapat dilaksanakan pada awal Triwulan dan memperhatikan dalam proses penyusunan RKA serta angkas pada setiap kegiatan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tidak mengalami hambatan

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Kerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga sosial dituntut untuk menghasilkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat, khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan bencana.

Penyusunan Renja Perubahan berpedoman pada Perubahan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD) Perubahan.

Perubahan yang dilakukan dalam Rencana Kerja meliputi perubahan pada Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator maupun target yang berbeda dari Renja Murni yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun perubahan yang dilakukan oleh BPBD Kota Pontianak yaitu perubahan terkait target beberapa sub kegiatan diantaranya adalah:

1. Sesuai Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor: B/00.7.2.4/26/BAPPERIDA/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, Jumlah Pagu BPBD Kota Pontianak berkurang senilai Rp.619.998.135,- dari Pagu RKPD Murni 2025. Perubahan ini merupakan efek dari efisiensi yang ditetapkan dalam Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Penghematan Anggaran Belanja di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025 dimana BPBD mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp.719.998.135,- namun dalam RKPD Perubahan terdapat tagging belanja untuk DED Pembangunan Bangunan dan Hanggar sebesar Rp.100.000.000,- sehingga Anggaran Renja Perubahan BPBD menjadi Rp.6.441.713.764,-
2. Pengurangan Anggaran terjadi pada beberapa sub kegiatan karena adanya efesiensi anggaran pada saat refocusing, sebagian besar pada belanja perjalanan dinas dan pemeliharaan kendaraan. Selain itu BPBD juga mengurangi 6 sub kegiatan pada Program Penanggualangan Bencana sebagai langkan refocusing anggaran.
3. Terdapat penambahan 1 sub kegiatan yang baru dimunculkan pada Renja Perubahan 2025 yang sebelumnya tidak ada di Renja Murni 2025 yaitu Pemeliharaan/Rehablitiasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Sub Kegiatan ini diusulkan oleh BPBD melalui Surat Nomor : B/000.7.2.4/101/BPBD/2025.

4. Terdapat penyesuaian terhadap Indikator Sasaran OPD dan Indikator Program. Hal ini dikarenakan terbitnya Peraturan Wali Kota Kota Pontianak Nomor: Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025-2029. Penyesuaian ini perlu dilakukan dalam rangka penyelarasan dokumen perencanaan Tahun 2025. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak, pemindahan Bidang Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana dari Satuan Polisi Pamong Praja ke BPBD telah dilakukan pada Tahun 2025, namun hal ini belum terakomodir dalam Renstra BPBD Tahun 2024-2026 sehingga perlu dilakukan perubahan. Oleh sebab itu, Renja Perubahan ini mengacu pada Renstra BPBD tahun 2025-2029 dengan rincian perubahan indikator sebagai berikut :

TABEL

INDIKATOR SASARAN DAN PROGRAM TAHUN 2025-2029

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran PD	Definisi Oporasional dan Formulasi	Satuan	Target Kinerja Sasaran PD						Program	Indikator Program	Definisi Oporasional dan Formulasi
				2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Meningkatnya pencegahan dan mitigasi bencana dan kebakaran	Persentase fasilitasi penanganan pra bencana dan kebakaran	Jumlah kelurahan yang mendapat layanan pra bencana dan kebakaran dibandingkan dengan total kelurahan yang ada di Kota Pontianak dikali seratus persen	persen	100	100	100	100	100	100	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah kelurahan yang mendapat layanan pencegahan dan mitigasi bencana dibandingkan dengan total kelurahan yang ada di Kota Pontianak dikali seratus persen
Meningjatnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dan kebakaran	Persentase Penyelamatan dan Evakuasi kejadian bencana dan kebakaran yang berhasil ditangani dalam tingkat waktu tanggap (response time)	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bencana yang berhasil ditangani pada tingkat waktu tanggap (response time) dibandingkan dengan total seluruh kejadian bencana dan kebakaran	persen	100	100	100	100	100	100		Persentase kejadian bencana yang ditangani dalam tingkat waktu tanggap (response time)	Jumlah layanan penanganan bencana yang berhasil ditangani pada tingkat waktu tanggap (response time) dibandingkan dengan total seluruh kejadian bencana dikali 100%
Meningkatnya pencegahan dan mitigasi bencana dan kebakaran	Persentase fasilitasi penanganan pra bencana dan kebakaran	Jumlah kelurahan yang mendapat layanan pra bencana dan kebakaran dibandingkan dengan total kelurahan yang ada di Kota Pontianak dikali seratus persen	persen	100	100	100	100	100	100	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan pencegahan kebakaran	Jumlah kelurahan yang mendapat layanan pencegahan kebakaran dibandingkan dengan total kelurahan yang ada di Kota Pontianak dikali seratus persen
Meningjatnya kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dan kebakaran	Persentase Penyelamatan dan Evakuasi kejadian bencana dan kebakaran yang berhasil ditangani dalam tingkat waktu tanggap (response time)	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bencana yang berhasil ditangani pada tingkat waktu tanggap (response time) dibandingkan dengan total seluruh kejadian	persen	100	100	100	100	100	100		Persentase kejadian kebakaran yang ditangani dalam tingkat waktu tanggap (response time)	Jumlah layanan penanganan kebakaran yang berhasil ditangani pada tingkat waktu tanggap (response time) dibandingkan dengan total seluruh kejadian kebakaran dikali 100%

Berdasarkan uraian diatas maka dapat kami sampaikan bahwa Renja Perubahan Tahun 2025 pagu anggaran BPBD Kota Pontianak tetap mengacu pada Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor: B/00.7.2.4/26/BAPPERIDA/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dimana bidang Damkar pada tahun anggaran 2025 telah bergabung dengan BPBD Kota Pontianak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor: 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor: 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor: 2 Tahun 2025

tentang Kedudukan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak. Namun pada indikator sasaran dan program tahun 2024-2026 Rencana Pemerintah Daerah Bidang Damkar belum bergabung pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak. Sehingga tidah selaras antara SE Walikota terkait pagu Renja Perubahan dengan Renstra RPD Tahun 2024-2026. Untuk itu, pada Rencana Kerja 2025 ini perlu penyesuaian dengan mencantumkan Indikator Sasaran dan Program Bidang Pemadam Kebakaran.

3.2 Pendanaan Program Kerja BPBD

Pendanaan untuk mencapai rencana kerja yang telah ditetapkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 berasal dari APBD Kota Pontianak. Adapun penetapan pagu untuk Renja perubahan BPBD tahun 2025 semula Rp. 7.061.711.899- menjadi Rp. 6.441.713.764,-.

	PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN MURNI	JUMLAH KEGIATAN PERUBAHAN	JUMLAH SUB KEGIATAN MURNI	JUMLAH SUB KEGIATAN PERUBAHAN	PAGU RENJA MURNI (Rp)	PAGU RENJA PERUBAHAN (Rp)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	20 Sub Kegiatan	20 Sub Kegiatan	4.819.886.059,00	4.715.596.424,00
	Program Penanggulangan Bencana	4 Kegiatan	3 Kegiatan	18 Sub Kegiatan	12 Sub Kegiatan	1.891.139.670,00	1.536.131.170
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	2 Kegiatan	2 Kegiatan	5 Sub Kegaiatan	5 Sub Kegaiatan	350.686.170,00	189.986.170,00
		12 Kegiatan	**11 Kegiatan**	**43 Sub Kegiatan**	**38 Sub Kegiatan**	**7.061.711.899,00**	**6.441.713.764,00**

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PONTIANAK

TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							8.276.920.000,00	7.061.711.899,00	6.441.713.764,00							7.893.926.100,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.276.920.000,00	7.061.711.899,00	6.441.713.764,00							7.893.926.100,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							8.276.920.000,00	7.061.711.899,00	6.441.713.764,00							7.893.926.100,00	
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 Persen	95 Persen	5.637.645.800,00	4.819.886.059,00	4.715.596.424,00							5.659.637.200,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	37.794.000,00	54.935.000,00	154.935.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	-		22.794.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	23.051.000,00	24.440.000,00	124.440.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba,	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			8.051.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
																		Judi dan Penyeludupan					
	1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	5.409.000,00	1.865.000,00	1.865.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			5.409.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	9.334.000,00	28.630.000,00	28.630.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			9.334.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	4.558.647.000,00	3.359.986.899,00	3.315.946.899,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	-		4.558.647.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	4.361.920.000,00	3.146.711.899,00	3.146.712.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			4.361.920.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	192.600.000,00	211.920.000,00	167.880.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			192.600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.127.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			4.127.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	51.826.000,00	176.419.000,00	91.419.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	-		51.826.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	31.100.000,00	46.200.000,00	46.200.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			31.100.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	20.726.000,00	130.219.000,00	45.219.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			20.726.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	406.698.500,00	472.249.600,00	481.918.200,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	-		406.698.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	5.550.000,00	5.550.900,00	5.550.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			5.550.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	135.227.300,00	169.272.400,00	194.345.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			135.227.300,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	41.250.000,00	43.504.000,00	48.900.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			41.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	35.601.200,00	38.122.300,00	38.122.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			35.601.200,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			6.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	123.070.000,00	110.000.000,00	90.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			123.070.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00	99.800.000,00	99.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			60.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	172.341.700,00	178.562.780,00	178.494.380,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	-		172.341.700,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	81.341.700,00	87.868.300,00	89.068.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			81.341.700,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	91.000.000,00	90.694.480,00	89.426.080,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			91.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 Persen	100 Persen	410.338.600,00	577.732.780,00	492.882.945,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	-		447.330.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				16 Unit	14 Unit	340.940.000,00	340.940.000,00	267.480.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			340.940.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				46 Unit	44 Unit	56.390.000,00	56.390.000,00	50.330.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			56.390.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	0,00	175.072.945,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	13.008.600,00	180.402.780,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-				-	-	1.892.074.200,00	1.891.139.670,00	1.536.131.170,00							1.467.088.900,00	
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	-	92.439.600,00	36.671.600,00	34.231.600,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat		82.439.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				250 Orang	250 Orang	82.439.600,00	34.231.600,00	34.231.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			82.439.600,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	2.440.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Mitigasi Bencana yang dilaksanakan	-			100 Persen	100 Persen	911.836.000,00	923.470.570,00	923.470.570,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat		460.136.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
																		Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur					
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																	
							Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				15 Unit	15 Unit	530.000.000,00	484.436.970,00	484.436.970,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			78.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota																	
							Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	31.584.000,00	71.025.600,00	71.025.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			31.584.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana																	
							Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				3 Kawasan	3 Kawasan	72.685.000,00	50.394.000,00	50.394.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			72.685.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				80 Orang	80 Orang	150.000.000,00	140.742.400,00	140.742.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			150.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
							Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	98.314.000,00	129.445.600,00	129.445.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			98.314.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				12 laporan	12 laporan	5.400.000,00	8.604.000,00	8.604.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			5.400.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan				80 Kawasan	80 Kawasan	23.853.000,00	38.822.000,00	38.822.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			23.853.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
							pencegahan dan mitigasi bencana											Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur					
	1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase kejadian bencana alam dan nonalam yang ditanggulangi	-			100 Persen	100 Persen	853.683.600,00	896.837.500,00	578.429.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat		890.398.300,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				1 Dokumen	1 Dokumen	250.880.800,00	293.993.000,00	172.603.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			250.880.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
							Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				200 Orang	200 Orang	465.425.300,00	465.418.500,00	280.775.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			502.140.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				275 Orang	275 Orang	128.127.500,00	128.176.000,00	115.801.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			128.127.500,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana																	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			9.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
																		Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur					
	1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penyelesaian Dokumen Kebencanaan	-			100 Persen	100 Persen	34.115.000,00	34.160.000,00	0,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat		34.115.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		
							Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah				1 Dokumen	0 Dokumen	6.000.000,00	6.045.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			6.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
							Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	0 Dokumen	6.775.000,00	6.775.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			6.775.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan																	
							Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				1 Dokumen	0 Dokumen	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			6.840.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana																	
							Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				1 Laporan	0 Laporan	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			7.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
																		Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur					
	1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota																		
							Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	0 Dokumen	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			7.250.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
3	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi yang berhasil ditangani dalam tingkat waktu tanggap (response time)				100 Persen	100 Persen	747.200.000,00	350.686.170,00	189.986.170,00							767.200.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	-			100 Persen	100 Persen	584.000.000,00	221.617.170,00	84.417.170,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat		584.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	452.000.000,00	187.200.000,00	50.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			452.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				1 Dokumen	1 Dokumen	82.000.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			82.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
							Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal											Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur					
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				5 Unit	5 Unit	50.000.000,00	29.467.170,00	29.467.170,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Cakupan Wilayah yang Mendapat Layanan Pemberdayaan Pencegahan Kebakaran	-			15 Persen	15 Persen	163.200.000,00	129.069.000,00	105.569.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat		183.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
							Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				100 Orang	100 Orang	78.200.000,00	58.569.000,00	58.569.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			78.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	05	04	2.04	0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana																	
							Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar				1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	70.500.000,00	47.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			105.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	J U M L A H												**8.276.920.000,00**	**7.061.711.899,00**	**6.441.713.764,00**							**7.893.926.100,00**	

BAB IV
PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak maka dapat menjadi patokan dalam evaluasi Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 selama masa peralihan yang di pimpin oleh Pj. Walikota Pontianak. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 juga merupakan implementasi dari Rencana Strategis Periode 2024–2026, dimana Renja ini menjadi pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2024 dengan tujuan untuk mendukung pencapaian tujuan kota yaitu : Mewujudkan Kota yang Bersih, Hijau, Aman, Tertib dan Berkelanjutan.

Demikianlah Renja Perubahan Tahun Anggaran 2025 ini dibuat. Harapan kami Renja ini diharapkan juga dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak, sehingga perencanaan dan penganggaran yang telah disusun dapat berhasil dan bermanfaat bagi pembangunan masyarakat Kota Pontianak.

Pontianak, Juli 2025
Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Pontianak

Ir. R.M Nasir, MT
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19690416 199603 1

DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK

Empati

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

DINAS SOSIAL

KOTA PONTIANAK

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Sosial Kota Pontianak ini sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan umum bidang sosial dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026.

Di dalam dokumen ini memuat konsep, rencana kerja, indikator kinerja, dan pendanaan pada Dinas Sosial Kota Pontianak.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang ikut andil untuk menyumbangkan pemikiran, ide dan tenaga guna menyelesaikan dokumen ini. Kami berupaya menyajikan informasi dengan selengkap-lengkapnya walaupun disadari masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penyajiannya.

Selanjutnya masukan dan saran senantiasa kami harapkan demi perbaikan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Dinas Sosial Kota Pontianak. Semoga Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025 ini dapat menjadi masukan bagi semua pihak dan dapat direalisasikan sesuai rencana.

Pontianak, 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……. i

DAFTAR ISI ……. ii

BAB I PENDAHULUAN……..... 1
1.1 Latar Belakang……...……..... 1
1.2 Landasan Hukum…..……...……..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan……...……..... 5
1.4 Sistematika Penulisan……..……... 6

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025.... 7
2.1 Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025..... 7

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....…… 18
3.1 Rencana Kerja..... 18
3.2 Pendanaan..... 34

BAB IV PENUTUP..... 49

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Sosial merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan mengacu pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, maka Perangkat Daerah wajib membuat Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi yang ada pada Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perubahan Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman dilingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025 adalah :

1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2002-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintagan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
7) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
8) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tetang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).

11) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
16) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868).
17) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomro 73).
18) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
19) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomot 149) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).

20) Peraturan Walikota Pontianak Nomor 131 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 131).
21) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
22) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pontianak Tahunn 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 15).
23) Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 47).
24) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 51).
25) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 13).
26) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025 adalah menyelaraskan dokumen Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah serta dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang sosial berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*).

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja Perubahan ini dengan sistematika meliputi:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB IV	PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan prima, Dinas Sosial Kota Pontianak mengoptimalkan pelayanan publik guna mewujudkan lembaga yang komunikatif dalam memberikan pelayanan publik yang prima melalui berbagai bantuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Demi mengoptimalkan pelayanan, Dinas Sosial Kota Pontianak membuat komitmen pelayanan EMPATI (Enerjik, Melayani, Profesional, Adaptif, Terdepan dan Inovatif) dengan :

a. Memberikan pelayanan yang ramah, sopan, tepat dan cepat.
b. Melayani dengan sepenuh hati tanpa pamrih.
c. Bekerja professional sesuai dengan aturan.

Tujuan yang dirumuskan Dinas Sosial Kota Pontianak dalam menyelaraskan dengan RPJMD Kota Pontianak yaitu Menurunnya Kemiskinan.

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Sosial Kota Pontianak. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci dapat terukur dan dapat dicapai. Adapun yang menjadi sasaran dalam Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025 sebanyak 3 (tiga) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
2. Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial.
3. Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar KPM dan Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai standar waktu.

Berangkat dari sasaran tersebut kinerja yang akan dicapai dalam periode tahun 2024-2026 adalah sesuai dengan target indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan, dimana hasil capaian tersebut menunjukkan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024-2026.

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja pada Dinas Sosial Tahun 2025 (tahun berjalan) triwulan II dapat tergambar pada Anggaran dan Realisasi APBD pada tahun yang bersangkutan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak tahun lalu bertujuan untuk mengetahui capaian sasaran-sasaran yang diinginkan, Dinas Sosial Kota Pontianak telah menyusun anggaran dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang disepakati bersama. Adapun Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Pontianak dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial Kota

Pontianak sampai dengan Tahun 2025 triwulan I dapat dilihat dengan tabel sebagai berikut :

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025 (JAN-MAR)

Indikator dan target kinerja DINAS SOSIAL Kota Pontianak yang mengacu pada sasaran RKPD :

No	Tujuan /Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%) per Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		14=13/8x100		15=7+13		16=15/6x100		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Tujuan PD: Menurunnya Kemiskinan		**Tingkat Kemiskinan**	**Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat**	**4,3 - 4,4 %**				**4,3 - 4,4 %**												Dinas Sosial Kota Ptk	
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesektariatan**	**Terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota**	**95 %**	**22,795,820,600**			**95 %**	**8,639,731,500**	**22.25 %**	**1,546,615,325**	**22 %**		**23.4**		**22 %**		**23.42**		**Sekretariat**	
1.1		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan yang telah disusun**	**Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**	**174,808,200**	**82 %**	**45,545,900**	**100 %**	**75,394,400**	**13 %**	**-**	**13 %**	**-**	**13**	**0.00**	**95 %**	**45,545,900**	**95**	**26.05**	**Sekretariat**	
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 Dokumen	51,645,000	8 Dokumen	14,449,100	8 Dokumen	33,500,000	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	25	**0.00**	10 Dokumen	**14,449,100**	**41.67**	**27.98**	**Sekretariat**	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	18,000,000	1 Dokumen	5,999,200	1 Dokumen	6,000,000	- Dokumen	-	- Dokumen	-	0	**0.00**	1 Dokumen	**5,999,200**	**33.33**	**33.32888889**	**Sekretariat**	
1.1.3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dokumen	22,500,000	2 Dokumen	6,354,150	2 Dokumen	7,500,000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	50	**0.00**	3 Dokumen	**6,354,150**	**50.00**	**28.24066667**	**Sekretariat**	
1.1.4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Laporan	42,480,000	8 Laporan	9,301,950	8 Laporan	15,000,000	1 Laporan	-	1 Laporan	-	12.5	**0.00**	9 Laporan	**9,301,950**	**37.50**	**21.90**	**Sekretariat**	
1.1.5		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	40,183,200	5 Laporan	9,441,500	5 Laporan	13,394,400	- Laporan	-	- Laporan	-	0	**0.00**	5 Laporan	**9,441,500**	**33.33**	**23.50**	**Sekretariat**	
1.2		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya administrasi Keuangan perangkat daerah**	**100 %**	**14,200,881,000**	**100 %**	**4,646,562,465**	**100 %**	**5,594,482,000**	**44 %**	**1,170,789,006**	**44 %**	**1,170,789,006**	44	**20.93**	144 %	**5,817,351,471**	**144**	**40.96**	**Sekretariat**	
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang	13,329,921,000	28 Orang	4,433,673,065	34 Orang	5,304,162,000	29 Orang	1,140,329,006	29 Orang	1,140,329,006	85.29	**21.50**	28 Orang	**5,574,002,071**	**34.57**	**41.82**	**Sekretariat**	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	826,200,000	12 Dokumen	207,530,000	12 Dokumen	275,400,000	3 Dokumen	30,460,000	3 Dokumen	30,460,000	25	**11.06**	15 Dokumen	**237,990,000**	**41.67**	**28.81**	**Sekretariat**	
1.2.3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	54 Laporan	44,760,000	18 Laporan	5,359,400	18 Laporan	14,920,000	4 Laporan	-	4 Laporan	-	22.22	**0.00**	22 Laporan	**5,359,400**	**40.74**	**11.97**	**Sekretariat**	
1.3		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Terkelolanya barang milik daerah dengan baik**	**100 %**	**4,790,000**	**100 %**	**1,145,000**	**100 %**	**1,145,000**	**- %**	**-**	**- %**	**-**	0	**0**	100 %	**1,145,000**	**100**	**23.9**	**Sekretariat**	
1.3.1		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	4,790,000	1 Dokumen	1,145,000	1 Dokumen	1,145,000	- Dokumen	-	1 Dokumen	-	100	**0**	2 Dokumen	**1,145,000**	**66.67**	**23.90**	**Sekretariat**	
1.4		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Terpenuhinya adminsitrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 %**	**212,860,000**	**77 %**	**95,044,000**	**100 %**	**62,620,000**	**41 %**	**-**	**41 %**	**-**	41	**0.00**	118 %	**95,044,000**	**118**	**44.65**	**Sekretariat**	
1.4.1		Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	210 Paket	127,860,000	108 Paket	95,044,000	70 Paket	42,620,000	58 paket	-	58 Paket	-	82.9	**0.00**	166 Paket	**95,044,000**	**79.05**	**74.33**	**Sekretariat**	

No	Tujuan /Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%) per Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		14=13/8x100		15=7+13		16=15/6x100		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.4.2		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 orang	85,000,000	- Orang	-	5 Orang	20,000,000	- Orang	-	- Orang	-	0	**0**	-	**-**	**0**	**0**	**Sekretariat**	
1.5		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah**	**100 %**	**1,568,299,150**	**110 %**	**399,012,330**	**100 %**	**387,521,500**	**18 %**	**40,370,957**	**18 %**	**40,370,957**	18	**10.42**	128 **%**	**439,383,287**	**128**	**28.02**	**Sekretariat**	
1.5.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	36 Paket	89,519,850	12 Paket	19,425,800	12 paket	18,000,000	3 paket	-	3 Paket	-	25	**0.00**	15 Paket	**19,425,800**	**41.67**	**21.70**	**Sekretariat**	
1.5.2		Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	36 Paket	300,023,000	12 Paket	96,080,997	12 paket	90,011,500	3 paket	4,892,500	3 Paket	4,892,500	25	**5.44**	15 Paket	**100,973,497**	**41.67**	**33.66**	**Sekretariat**	
1.5.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	36 Paket	242,658,300	12 Paket	58,202,725	12 paket	70,000,000	3 paket	3,093,900	3 Paket	3,093,900	25	**4.42**	15 Paket	**61,296,625**	**41.67**	**25.26**	**Sekretariat**	
1.5.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36 Dokumen	7,500,000	12 Dokumen	2,640,000	12 Dokumen	2,500,000	3 Dokumen	-	3 Dokumen	-	25	**0**	15 Dokumen	**2,640,000**	**41.67**	**35.20**	**Sekretariat**	
1.5.5		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan	15,000,000	- Laporan	-	- Laporan	5,000,000	- Laporan	-	- Laporan	-	0	**0**	- Laporan	**-**	**0**	**0**	**Sekretariat**	
1.5.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96 Laporan	709,578,000	55 Laporan	172,859,808	34 laporan	150,000,000	8 laporan	32,384,557	8 Laporan	32,384,557	23.53	**21.59**	63 Laporan	**205,244,365**	**65.63**	**28.92**	**Sekretariat**	
1.5.7		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36 Dokumen	204,020,000	1 Dokumen	49,803,000	12 Dokumen	52,010,000	- Dokumen	-	- Dokumen	-	0.00	**0.00**	1 Dokumen	**49,803,000**	**2.78**	**24.41084207**	**Sekretariat**	
1.6		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 %**	**1,107,425,704**	**600 %**	**923,108,000**	**100 %**	**250,000,000**	**15 %**	**-**	**15 %**	**-**	15	**0.00**	615 **%**	**923,108,000**	**615.00**	**83.36**	**Sekretariat**	
1.6.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	36 unit	1,107,425,704	78 Unit	923,108,000	13 Unit	250,000,000	2 Unit	-	2 Unit	-	15.38	**0.00**	80 Unit	**923,108,000**	**222.22**	**83.36**	**Sekretariat**	
1.7		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Lainnya**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 %**	**3,925,816,306**	**103 %**	**1,551,964,596**	**100 %**	**1,354,403,278**	**17 %**	**321,043,160**	**17 %**	**321,043,160**	17.0	**23.70**	120 **%**	**1,873,007,756**	**120**	**47.71**	**Sekretariat**	
1.7.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	36,000,000	- Laporan	-	12 laporan	12,000,000	- laporan	-	- Laporan	-	0	**0**	- Laporan	**-**	**0**	**0**	**Sekretariat**	
1.7.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Laporan	766,518,706	12 Laporan	239,935,159	12 laporan	266,304,078	3 laporan	50,004,520	3 Laporan	50,004,520	25	**18.78**	15 Laporan	**289,939,679**	**41.67**	**37.83**	**Sekretariat**	
1.7.3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Laporan	60,000,000	2 Laporan	50,136,847	2 Laporan	55,000,000	- Laporan	-	- Laporan	-	0	**0**	2 Laporan	**50,136,847**	**33.33**	**83.56141167**	**Sekretariat**	
1.7.4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	36 Laporan	3,063,297,600	13 Laporan	1,261,892,590	12 laporan	1,021,099,200	3 laporan	271,038,640	3 Laporan	271,038,640	25.0	**26.54**	16 Laporan	**1,532,931,230**	**44.44**	**50.04**	**Sekretariat**	
1.8		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**1,600,940,240**	**167 %**	**843,196,000**	**100 %**	**914,165,322**	**30 %**	**14,412,202**	**30 %**	**14,412,202**	**31.3**	**1.58**	**197 %**	**857,608,202**	**197**	**53.57**	**Sekretariat**	
1.8.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 unit	477,360,000	9 Unit	193,223,500	12 unit	227,400,000	5 unit	14,412,202	9 Unit	14,412,202	75.0	**6.34**	8 Unit	**207,635,702**	**88.89**	**43.50**	**Sekretariat**	
1.8.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 unit	333,030,000	100 Unit	40,367,500	100 Unit	111,010,000	19 Unit	-	19 Unit	-	19	**0.00**	119 Unit	**40,367,500**	**119**	**12.12**	**Sekretariat**	

No	Tujuan /Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%) per Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		14=13/8x100		15=7+13		16=15/6x100		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.8.3		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	790,550,240	3 Unit	609,605,000	1 unit	575,755,322	- unit	-	- Unit	-	-	**0**	3 Unit	**609,605,000**	**100**	**0.77**	**Sekretariat**	
	Sasaran 1 PD: Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		**Persentase peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**	**Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sehingga dengan peningkatan potensi PSKS berfungsi untuk menjaga dan memperkuat kesejahteraan sosial masyarakat yang membutuhkan. (Jumlah PSKS yang mengikuti pelatihan / Jumlah PSKS yang tersedia) x100%**	**100 %**				**100 %**												
2		**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Keaktifan tingkat Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**	**Tingkat keaktifan PSKS dalam pemberdayaan masyarakat (jumlah PSKS yang dibina / populasi PSKS) x 100%**	**100 %**	**4,376,939,700**	**76,53 %**	**1,491,482,800**	**100 %**	**1,593,066,500**	**- %**	**148,446,400**	**- %**	**148,446,400**	**-**	**9.32**	**20.00 %**	**1,639,929,200**	**20**	**37.47**	**Bidang Pemberdayaan Sosial**	
2.1		**Kegiatan Pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase fasilitasi kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Terfasilitasinya kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**60,000,000**	**20 %**	**4,400,000**	**100 %**	**20,000,000**	**- %**	**-**	**- %**	**-**	**-**	**0.00**	**20 %**	**4,400,000**	**20**	**7.33**		
2.1.1		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Terlaksansanya koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	60 Dokumen	60,000,000	5 Dokumen	4,400,000	20 Dokumen	20,000,000	0 Dokumen	**-**	- Dokumen	-	-	**0.00**	5 Dokumen	**4,400,000**	**8.33**	**7.33**		
2.2		**Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelaksanaan pengembangan PSKS**	**Terselenggaranya Pengembangan PSKS**	**100 %**	**4,316,939,700**	**133 %**	**1,487,082,800**	**100 %**	**1,573,066,500**	**95.00 %**	**148,446,400**	**95 %**	**148,446,400**	**95**	**9.44**	228 **%**	**1,635,529,200**	**228.00**	**37.89**	**Bidang Pemberdayaan Sosial**	
2.2.1		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	1,477,397,100	19 Orang	453,206,100	50 Orang	592,465,700	50 Orang	30,027,000	50 Orang	30,027,000	100	**5.07**	69 Orang	**483,233,100**	**115.00**	**32.71**	**Bidang Pemberdayaan Sosial**	
2.2.2		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan Kab/ Kota yang menigkat kapasitasnya kewenangan Kab/ Kota	Meningkatnya kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	126 orang	1,171,201,600	41 Orang	326,465,800	42 Orang	410,600,800	40 Orang	52,000,000	40 Orang	52,000,000	95.24	**12.66**	81 Orang	**378,465,800**	**64.29**	**32.31**	**Bidang Pemberdayaan Sosial**	
2.2.3		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	111 Keluarga	1,131,037,000	109 Keluarga	671,905,500	27 Keluarga	400,000,000	14 Keluarga	65,154,400	14 Keluarga	65,154,400	51.9	**16.29**	123 Keluarga	**737,059,900**	**110.81**	**65.17**	**Bidang Pemberdayaan Sosial**	**ASMAS**
2.2.4		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kab/ Kota	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial kewenangan Kabupaten/Kota	21 Lembaga	390,000,000	3 Lembaga	35,505,400	7 Lembaga	120,000,000	1 Lembaga	1,265,000	1 Lembaga	1,265,000	14.29	**1.05**	4 Lembaga	**36,770,400**	**19.05**	**9.43**	**Bidang Pemberdayaan Sosial**	
2.2.5		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan penguatan lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah sertifikat dari hasil peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Sertifikat	147,304,000	- Sertifikat	-	20 Sertifikat	50,000,000	- Sertifikat		- Sertifikat	-	0	**0**	- Sertifikat	**-**	**0**	**0**	**Bidang Pemberdayaan Sosial**	

No	Tujuan /Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%) per Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		14=13/8x100		15=7+13		16=15/6x100		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Sasaran 2 PD: Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**	**Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam 1 (satu) tahun kewenangan Kab/Kota (Jumlah PMKS yang dilayani / Jumlah PMKS yang sudah tervalidasi) x100%**	**100 %**		**%**		**100 %**													
3		**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Persentase Tingkat Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**	**Meningkatnya penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani/Populasi Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan) x100%**	**100 %**	**14,960,000**	**20 %**	**200,000**	**100 %**	**2,480,000**	**60.00 %**	**-**	**60 %**	**-**	60	**0.000**	80 **%**	**200,000**	**80.00**	**1.34**	**Bidang Rehabilitasi Sosial**	
3.1		**Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**Persentase pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan asal**	**Meningkatnya pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan asal**	**100 %**	**14,960,000**	**20 %**	**200,000**	**100 %**	**2,480,000**	**60.00 %**		**60 %**	**-**	60	**0.00**	80 **%**	**200,000**	**80.00**	**1.34**	**Bidang Rehabilitasi Sosial**	
3.1.1		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal	15 Orang	14,960,000	1 Orang	200,000	5 Orang	2,480,000	3 Orang	-	3 Orang	-	60	**0.00**	4 Orang	**200,000**	**26.67**	**1.34**	Bidang Rehabilitasi Sosial	
4		**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial**	**Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam 1 (satu) tahun kewenangan Kab/Kota (Jumlah PMKS yang mendapatkan layanan/ populasi PMKS) x 100%**	**100 %**	**3,151,777,200**	**124 %**	**1,076,208,440**	**100 %**	**1,209,273,400**	**43.00 %**	**206,220,000**	**43 %**	**206,220,000**	43	**17.05**	167 **%**	**1,282,428,440**	**167**	**40.69**	**Bidang Rehabilitasi Sosial**	
4.1		**Kegiatan Rehabilitisasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang Pengemis diluar Panti Sosial**	**Persentase pelaksanaan penanganan dan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti**	**Meningkatnya penanganan dan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti**	**100 %**	**2,677,311,600**	**260 %**	**1,001,124,700**	**100 %**	**1,051,118,200**	**33.00 %**	**150,120,000**	**33 %**	**150,120,000**	33	**14.28**	293 **%**	**1,151,244,700**	**293**	**43.00**	**Bidang Rehabilitasi Sosial**	**SPM**
4.1.1		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan permakanan per orang sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan Kabupaten/Kota	23,385 Orang	1,447,980,000	7,428 Orang	476,665,000	7,795 Orang	475,000,000	73 Orang	120,240,000	73 Orang	120,240,000	0.9	**25.31**	7,501 Orang	**596,905,000**	**32.08**	**41.22**	**Bidang Rehabilitasi Sosial**	**SPM**
4.1.2		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya pakaian dan kelengkapan lainnya dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	900 orang	391,920,400	300 Orang	172,110,000	300 Orang	120,960,200	6 Orang	-	6 Orang	-	2	**0.00**	306 Orang	**172,110,000**	**34**	**43.91**	**Bidang Rehabilitasi Sosial**	**SPM**
4.1.3		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya orang yang mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota	15 orang	237,420,000	58 Orang	119,680,000	50 Orang	258,710,000	- Orang	**-**	- Orang	-	0	**0.00**	58 Orang	**119,680,000**	**386.67**	**50.41**	**Bidang Rehabilitasi Sosial**	**SPM**
4.1.4		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya orang yang mendapatkan pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	120 orang	14,940,000	97 Orang	2,700,000	40 Orang	4,980,000	13 Orang	**-**	13 Orang	-	32.5	**0**	110 Orang	**2,700,000**	**91.6666667**	**18.07**	**Bidang Rehabilitasi Sosial**	**SPM**
4.1.5		Pemberian Bimbingan Fisik,Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian bimbingan fisik, mental, Spiritual dan sosial kewenangan Kab/Kota	150 orang	70,825,600	148 Orang	12,376,000	50 Orang	20,412,800	51 Orang	-	51 Orang	-	102	**0.00**	199 Orang	**12,376,000**	**132.67**	**17.47**	**Bidang Rehabilitasi Sosial**	**SPM**

No	Tujuan /Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%) per Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		14=13/8x100		15=7+13		16=15/6x100		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.1.6		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan, pengemis dan masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	300 orang	145,725,600	280 Orang	65,552,300	100 Orang	48,575,200	11 Orang	-	11 Orang	-	11	**0.00**	291 Orang	**65,552,300**	**97.00**	**44.98**	**Bidang Rehabilitasi Sosial**	**SPM**
4.1.7		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan,Akta Kelahiran,Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya orang yang membutuhkan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	120 orang	14,960,000	24 Orang	2,700,000	40 Orang	4,980,000	18 Orang	-	18 Orang	-	45	**0**	42 Orang	**2,700,000**	**35.00**	**18.05**	**Bidang Rehabilitasi Sosial**	**SPM**
4.1.8		Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya orang yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	180 orang	44,940,000	73 Orang	12,200,000	60 Orang	14,980,000	24 Orang	1,200,000	24 Orang	1,200,000	40.00	**8.01**	97 Orang	**13,400,000**	**53.89**	**29.82**	**Bidang Rehabilitasi Sosial**	**SPM**
4.1.9		Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberian layanan data dan pengaduan kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	184,740,000	337 Orang	104,941,400	200 Orang	61,580,000	74 Orang	20,480,000	74 Orang	20,480,000	37	**33.26**	411 Orang	**125,421,400**	**68.50**	**67.89**	**Bidang Rehabilitasi Sosial**	**SPM**
4.1.10		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberian layanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/Kota	30 orang	95,940,000	7 Orang	21,800,000	10 Orang	31,980,000	3 Orang	7,500,000	3 Orang	7,500,000	30	**23.45**	10 Orang	**29,300,000**	**33.3**	**30.5**	**Bidang Rehabilitasi Sosial**	**SPM**
4.1.11		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya orang yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	120 orang	12,960,000	95 Orang	2,700,000	40 Orang	3,980,000	15 Orang	-	15 Orang	-	37.5	**0.00**	110 Orang	**2,700,000**	**91.67**	**20.83**	**Bidang Rehabilitasi Sosial**	**SPM**
4.1.12		Pemberian Pelayanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberian layanan rujukan kewenangan Kabupaten/Kota	240 orang	14,960,000	228 Orang	7,700,000	80 Orang	4,980,000	44 Orang	700,000	44 Orang	700,000	55	**14.06**	272 Orang	**8,400,000**	**113.33**	**56.15**	**Bidang Rehabilitasi Sosial**	**SPM**
4.2		**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial**	**Persentase pemenuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial bukan korban HIV/AIDS dan Napza**	**Meningkatnya pelaksanaan rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti**	**100 %**	**474,465,600**	**119 %**	**75,083,740**	**100 %**	**158,155,200**	**54.00 %**	**56,100,000**	**54 %**	**56,100,000**	54	**35.47**	173 **%**	**131,183,740**	**173**	**27.65**	**Bidang Rehabilitasi Sosial**	
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan kewenangan Kab/ Kota	**-** Orang	**-**	107 Orang	12,588,240	- Orang	-	- Orang	-	- Orang	-	#DIV/0!	**#DIV/0!**	107 Orang	12,588,240	**107**	**107.00**	Bidang Rehabilitasi Sosial	
4.2.1		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian bimbingan fisik, mental, Spiritual dan sosial kewenangan Kab/Kota	900 orang	111,525,600	315 Orang	39,395,500	300 Orang	37,175,200	360 Orang	46,800,000	360 Orang	46,800,000	120	**125.89**	675 Orang	**86,195,500**	**75**	**77.29**	Bidang Rehabilitasi Sosial	
4.2.2		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberian bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	362,940,000	103 Orang	23,100,000	50 Orang	120,980,000	21 Orang	9,300,000	21 Orang	9,300,000	42	**7.69**	124 Orang	**32,400,000**	**82.67**	**8.93**	Bidang Rehabilitasi Sosial	

No	Tujuan /Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%) per Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		14=13/8x100		15=7+13		16=15/6x100		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Sasaran 3 PD: Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar KPM dan Korban Bencana Alam dan Sosial Sesuai Standar Waktu		**Persentase pemenuhan kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM)**	**Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial sesuai Data yang terverifikasi dan tervalidasi baik bersumber APBD maupun APBN (Jumlah KPM yang terpenuhi kebutuhan dasarnya / populasi KPM) x100%**	**100 %**		%		**100 %**												
5		**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM)**	**Tingkat perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin warga kota Pontianak (Jumlah KPM yang mendapat pelayanan perlindungan dan jaminan sosial / populasi KPM) x100%**	**100 %**	**9,485,831,600**	**133 %**	**3,172,577,550**	**100 %**	**3,634,980,000**	**50.00 %**	**1,667,375,000**	**50 %**	**-**	50	**0.00**	183 **%**	**3,172,577,550**	**183**	**33.45**	**Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial**	
5.1		**Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase data fakir miskin warga kota Pontianak yang diperbaharui**	**Meningkatnya pengelolaan data fakir miskin warga Kota Pontianak**	100 %	9,485,831,600	**133 %**	**3,172,577,550**	**100 %**	**3,634,980,000**	**50.00 %**	**1,667,375,000**	**50 %**	**1,667,375,000**	50	**45.87**	183 **%**	**4,839,952,550**	**183**	**51.02**	**Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial**	
5.1.1		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Terlaksananya pendataan fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota	120,000 Orang	1,577,255,000	47,322 Orang	610,470,450	40,000 Orang	450,000,000	857 Orang	15,855,000	857 Orang	15,855,000	2.1	**3.52**	##### Orang	**626,325,450**	**40.15**	**39.71**	**Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial**	
5.1.2		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengentasan keluarga fakir miskin Kabupaten/Kota	60,000 Keluarga	104,940,000	40,106 Keluarga	172,446,500	20,000 Keluarga	34,980,000	1,060 Keluarga	-	1,060 Keluarga	-	5.3	**0.00**	##### Keluarga	**172,446,500**	**68.61**	**164.33**	**Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial**	
5.1.3		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya orang yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30,000 Keluarga	7,725,910,200	11,342 Keluarga	2,259,685,600	10,000 Keluarga	2,850,000,000	##### Keluarga	1,651,520,000	##### Keluarga	1,651,520,000	142.28	**57.95**	##### Keluarga	**3,911,205,600**	**85.23**	**50.62**	**Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial**	
5.1.4		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya orang yang mendapatkan bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	77,726,400	121 Orang	129,975,000	100 Orang	300,000,000	- Orang	-	- Orang	-	0	**0.00**	121 Orang	**129,975,000**	**40.33**	**167.22**	**Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial**	
6		**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial**	**Meningkatnya pelayanan bagi korban bencana alam dan bencana sosial (Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang dilayani / populasi korban bencana alam dan bencana sosial) x100%**	**100 %**	**1,317,741,900**	**215 %**	**292,046,000**	**100 %**	**410,680,600**	**26.00 %**	**25,960,000**	**26 %**	**-**	26	**0.00**	241 **%**	**292,046,000**	**241.00**	**22.16**	**Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial**	**SPM**
6.1		**Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemberian Perlindungan dan Bantuan Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial**	**Persentase pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota**	**100 %**	**1,233,050,100**	**141 %**	**192,625,000**	**100 %**	**382,450,000**	**51.00 %**	**25,960,000**	**51 %**	**25,960,000**	51	**6.79**	192 **%**	**218,585,000**	**192**	**17.73**	**Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial**	**SPM**
6.1.1		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya orang yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	1,050 Orang	426,270,000	323 Orang	100,745,000	350 Orang	142,090,000	762 Orang	24,460,000	762 Orang	24,460,000	217.71	**17.21**	1,085 Orang	**125,205,000**	**103.33**	**29.37**	**Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial**	**SPM**
6.1.2		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	477,675,000	338 Orang	51,195,000	200 Orang	159,225,000	35 Orang	1,500,000	35 Orang	1,500,000	17.5	**0.94**	373 Orang	**52,695,000**	**62.17**	**11.03**	**Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial**	**SPM**
6.1.3		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya tempat pengungsian kewenangan Kabupaten/Kota	300 Unit	100,000,000	23 Unit	6,850,000	100 Unit	20,000,000	22 Unit	-	22 Unit	-	22	**0.00**	45 Unit	**6,850,000**	**15.00**	**6.85**	**Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial**	**SPM**
6.1.4		Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Kelompok Rentan yang mendapat bantuan	Terpenuhinya orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang	94,105,100	17 Orang	21,415,000	40 Orang	31,135,000	- Orang	-	- Orang	-	0	**0.00**	17 Orang	**21,415,000**	**14.17**	**22.76**	**Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial**	**SPM**
6.1.5		Pelayanan Dukungan Psikosisial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana kewenangan Kabupaten/Kota	36 Orang	135,000,000	16 Orang	12,420,000	12 Orang	30,000,000	- Orang	-	- Orang	-	0.00	**0.00**	16 Orang	**12,420,000**	**44.44**	**9.2**	**Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial**	**SPM**

No	Tujuan /Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%) per Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2	3	4	5	6		7		8		9		13		14=13/8x100		15=7+13		16=15/6x100		17	18
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
6.2		**Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota**	**Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota**	**Terlaksananya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota**	**100 %**	**84,691,800**	**288 %**	**99,421,000**	**100 %**	**28,230,600**	**- %**	**-**	**- %**	**-**	0	**0**	288 **%**	**99,421,000**	**2.88**	**1.17**		
6.2.1		Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi, dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	84,691,800	144 Orang	99,421,000	50 Orang	28,230,600	- Orang	-	- Orang	-	0	**0**	144 Orang	**99,421,000**	**96**	**1.17**		
JUMLAH						**41,143,071,000**				**15,490,212,000**		**3,594,616,725**										
Rata-rata capaian kinerja (%) Program													**#### %**		**33.74** %		**#### %**		**119.07**	**%**		% Program
Predikat Kinerja													**Sangat Rendah**		**Sangat Rendah**		**Sangat Tinggi**		**Sangat Tinggi**			
Rata-rata capaian kinerja (%) Kegiatan											**37.54 %**		**37.54 %**		**37.64** %		**182.54** %		**182.54**	%		% Kegiatan
Predikat Kinerja													**Sangat Rendah**		**Sangat Rendah**		**Sangat Tinggi**		**Sangat Tinggi**			
Rata-rata capaian kinerja (%) sub Kegiatan															**34.54** %				**68.36**	%		% sub Kegiatan
Predikat Kinerja											**Sangat Rendah**				**Sangat Rendah**				**Sedang**			

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

1 Adanya komitmen dalam peningkatan pelayanan
2 Pemanfaatan inovasi digital D MASTER dalam pencatatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang membutuhkan bansos
3 Komitmen Kepala Dinas Sosial dalam peningkatan kinerja pelayanan
4 Kerjasama dengan Pekerja Sosial di Kecamatan dan Relawan Sosial yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial di Kota Pontianak
5 Crosscutting antar Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dapat terlaksana
6 Pemanfaatan inovasi BDESUT untuk meningkatkan kelancaran pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

1 Bantuan yang belum tepat sasaran sehingga harus dilakukan verifikasi dan validasi data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial APBD maupun APBD
2 Belum tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) ahli psikologi dan analis bencana yang dapat membantu ketika terjadi bencana dan pasca bencana
3 Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
4 Kurangnya integrasi pemangku kepentingan yang melayani PPKS
5 Keterbatasan wewenang Dinas Sosial Kota Pontianak yang hanya dapat melayani PPKS di luar panti selama 7 (tujuh) hari
6 Kepedulian masyarakat terkait masalah sosial yang masih kurang
7 Peningkatan kemampuan yang harus dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kinerja Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
8 Kurangnya sumber daya PSKS yang kompeten

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya :

I. Penjelasan pada Kegiatan dengan capaian kurang dari 25% :

a. Pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD belum dilaksanakan (0%), akan dilaksanakan pada pertengahan sampai akhir tahun
b. Pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD belum dilaksanakan (0%), akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
c. Pada sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah belum dilaksanakan (0%), akan dilaksanakan akhir tahun
d. Pada sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan belum dilaksanakan (0%), akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
e. Pada sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan terlaksana 8% dan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
f. Pada sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan tamu belum terlaksana (0%) dan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
g. Pada sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD belum terlaksana (0%) dan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
h. Pada sub kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya terlaksana 15% dan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
i. Pada sub kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat belum terlaksana (0%) dan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
j. Pada sub kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor belum terlaksana (0%), akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
k. Pada sub kegiatan Pemeliharaan rehabilitasi gudang kantor dan bangunan lainnya belum terlaksana (0%) dan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
l. Pada sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota terlaksana 23,7% dan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
m. Pada sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota belum terlaksana (0%), akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
n. Pada sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) belum dilaksanakan (0%), akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya jika tidak ada perubahan
o. Pada sub kegiatan Penyediaan sandang kegiatan Rehabilitasi Sosial terlaksana 2% dan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
p. Pada sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu belum terlaksana (0%), akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
q. Pada sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis dan masyarakat terlaksana 11% dan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
r. Pada sub kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan diluar panti belum terlaksana (0%), akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
s. Pada sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota belum terlaksana (0%), akan dilaksanakan bertahap setiap triwulan
t. Pada sub kegiatan Fasilitasi bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat belum terlaksana (0%), akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
u. Pada sub kegiatan Penyediaan Sandang terlaksana 18% hanya dilaksanakan pada saat terjadi bencana
v. Pada sub kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan belum terlaksana (0%), hanya dilaksanakan pada saat terjadi bencana
w. Pada sub kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial belum terlaksana (0%), hanya dilaksanakan pada saat terjadi bencana
x. Pada sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana belum terlaksana (0%) dan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya

No	Tujuan /Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah 2024-2026 Tahun		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024 (%) per Triwulan IV		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
					6		7		8		9		13		14=13/8x100		15=7+13		16=15/6x100		17	18
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2025 sampai dengan triwulan I telah sejalan dengan visi, misi dan arah kebijakan umum APBD tahun 2025, alokasi anggaran keseluruhan Dinas Sosial Kota Pontianak mencapai Rp. 15.307.587.431,00 dengan rincian:

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 14.780.529.882,00;
2. Belanja Modal sebesar Rp. 527.057.549,00.

Capaian Realisasi Anggaran sampai dengan 27 Mei 2025 sebesar Rp. 5.322.411.045,00 atau 34,77%.

Reviu terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial sampai dengan triwulan I tahun 2025 dapat dijelaskan per kegiatan yang capaian sudah tinggi maupun masih rendah adalah sebagai berikut :

1) Pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pelaksanaannya baru mencapai 13% dikarenakan terdapat dokumen yang akan direalisasikan pada triwulan 3 dan triwulan 4.
2) Pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pelaksanaannya mencapai 44% sudah dilaksanakan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD telah terlaksana 25% dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD terlaksana 22,22%.
3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terlaksana 41% dikarenakan telah dilaksanakannya pengadaan Pakaian Dinas.
4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mencapai 18% dikarenakan sudah terlaksana kegiatan-kegiatan pada triwulan I.
5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terlaksana sebanyak 15% karena sudah dilakukan belanja modal.
6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Lainnya terlaksana sebanyak 17% pada triwulan I.
7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah terlaksana 30% untuk pembayaran pajak Kendaraan Dinas.

8) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota terlaksana 95% karena sudah dilaksanakan pelatihan untuk PSM, TKSK dan Pendamping Rehabilitasi Sosial pada triwulan I.
9) Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal telah memulangkan 3 (tiga) orang PPKS Korban Tindak Kekerasan atau sebesar 60% pada triwulan I.
10) Kegiatan Rehabilitisasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang Pengemis diluar Panti Sosial telah terlaksana 33% pada triwulan I.
11) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial telah terlaksana 54% pada triwulan I.
12) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota terlaksana 50% pada triwulan I dikarenakan telah disalurkan Bantuan Sosial Tuna kepada 1060 Keluarga Penerima Manfaat.
13) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota telah terlaksana 51% pada triwulan I.

Penjelasan tersebut diatas dapat dilihat pada tabel berikut :

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 . Rencana Kerja

Program Dinas Sosial Kota Pontianak merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial. Rencana program priotitas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2024-2026, selanjuntnya dijabarkan Dinas Sosial kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dan kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program – program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Pontianak.

Rencana program dan kegiatan prioritas (utama) merupakan uraian rincian yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja, kebutuhan dan sumber dana/pagu indikatif, catatan penting, prakiraan maju rencana tahun 2026.

Rencana program dan kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial, review terhadap kinerja Dinas Sosial Tahun 2025 serta penelaahan usulan program dan kegiatan

masyarakat. Selain itu juga diselaraskan dengan hasil telaahan terhadap kebijakan Nasional.

Adapun program kegiatan yang ada di Dinas Sosial Kota Pontianak terdiri dari 6 program dan 16 kegiatan serta 58 sub kegiatan, rincian rencana program dan kegiatan prioritas dan pendukung akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Untuk pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 15.490.212.000,00 (Lima Belas Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), sedangkan pagu anggaran Renja Perubahan sebesar Rp. 15.314.115.533,00 (Lima Belas Miliar Tiga Ratus Empat Belas Juta Seratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kota Pontianak Tahun 2025.

Rumusan perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2025 pada Dinas Sosial Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK

TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS SOSIAL							15.490.212.000,00	15.760.932.164,00	15.314.115.533,00							13.764.357.000,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.490.212.000,00	15.760.932.164,00	15.314.115.533,00							13.764.357.000,00	
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							15.490.212.000,00	15.760.932.164,00	15.314.115.533,00							13.764.357.000,00	
1	1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	8.639.731.500,00	8.842.170.564,00	8.608.819.593,00							7.572.025.200,00	
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	75.394.400,00	75.394.800,00	75.394.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak		60.394.400,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	33.500.000,00	33.500.800,00	33.500.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			18.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	4.665.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			6.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	

							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	6.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			7.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	8 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	12.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			15.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	13.394.400,00	13.394.000,00	10.715.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			13.394.400,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	5.594.482.000,00	5.763.402.164,00	5.763.402.164,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak		4.783.627.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/ bulan	34 Orang/ bulan	5.304.162.000,00	5.519.882.164,00	5.519.884.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			4.493.307.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	

							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	275.400.000,00	228.600.000,00	228.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			275.400.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	14.920.000,00	14.920.000,00	11.936.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			14.920.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-			100 %	100 %	1.145.000,00	1.132.000,00	1.132.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak		2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.145.000,00	1.132.000,00	905.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			-	100 %	62.620.000,00	81.460.000,00	81.460.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak		87.620.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	

							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	70 Paket	42.620.000,00	48.960.000,00	63.660.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			42.620.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	2 Orang	20.000.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			45.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	387.521.500,00	437.888.600,00	437.888.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak		638.226.050,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	18.000.000,00	16.678.450,00	13.891.563,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			29.839.950,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	90.011.500,00	85.952.350,00	86.906.280,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			120.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	70.000.000,00	65.959.800,00	48.626.040,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			80.886.100,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			2.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	4.998.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				34 Laporan	15 Laporan	150.000.000,00	209.790.000,00	111.375.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	52.010.000,00	52.010.000,00	40.185.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL

	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			-	100 %	250.000.000,00	244.876.700,00	244.876.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak		300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	21 Unit	250.000.000,00	244.876.700,00	183.439.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			300.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	1.333.144.278,00	1.328.921.978,00	1.328.921.978,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak		1.329.527.750,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			12.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	245.045.078,00	250.874.898,00	267.885.825,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			276.428.550,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	55.000.000,00	62.094.000,00	55.840.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.021.099.200,00	1.015.953.080,00	1.109.753.880,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			1.021.099.200,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	935.424.322,00	909.094.322,00	909.094.322,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN Dinas Sosial Kota Pontianak		370.130.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	11 Unit	227.400.000,00	218.030.000,00	218.030.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			159.120.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	111.010.000,00	110.580.000,00	77.406.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			111.010.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3 Unit	597.014.322,00	580.484.322,00	468.614.405,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			100.000.000,00	DINAS SOSIAL
2	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase tingkat keaktifan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial				100 %	100 %	1.593.066.500,00	1.571.493.600,00	1.472.503.100,00							1.562.465.700,00	
	1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	100 %	20.000.000,00	19.806.200,00	19.806.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat		20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				20 Dokumen	5 Dokumen	20.000.000,00	19.806.200,00	15.831.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengembangan PSKS	-			100 %	100 %	1.573.066.500,00	1.551.687.400,00	1.551.687.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat		1.542.465.700,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	592.465.700,00	618.806.600,00	545.049.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			492.465.700,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																	

							Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				42 Orang	40 Orang	410.600.800,00	400.600.800,00	486.437.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			450.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				27 Keluarga	44 Keluarga	400.000.000,00	393.000.000,00	378.556.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			400.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				7 Lembaga	7 Lembaga	120.000.000,00	116.370.000,00	27.061.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																	
							Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Sertifikat	20 Sertifikat	50.000.000,00	22.910.000,00	19.568.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			50.000.000,00	DINAS SOSIAL
3	1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase tingkat penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan				100 %	100 %	2.480.000,00	2.330.000,00	1.714.000,00							10.000.000,00	
	1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan asal	-			-	100 %	2.480.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat		10.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal																	

							Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	5 Orang	2.480.000,00	2.330.000,00	1.714.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			10.000.000,00	DINAS SOSIAL
4	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				-	100 %	1.209.273.400,00	1.210.071.200,00	1.141.060.540,00							1.185.250.400,00	
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase pelaksanaan penanganan dan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti	-			-	100 %	1.051.118.200,00	1.064.289.600,00	1.064.289.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat		1.027.095.200,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				7795 Orang	200 Orang	475.000.000,00	466.940.000,00	498.800.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			550.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang																	
							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				300 Orang	300 Orang	120.960.200,00	101.220.000,00	41.860.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			150.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	258.710.000,00	230.540.000,00	229.860.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			120.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga																	

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	4.980.000,00	6.440.000,00	3.952.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			4.980.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																	
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	100 Orang	20.412.800,00	13.585.600,00	9.968.480,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat																	
							Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	150 Orang	48.575.200,00	51.925.200,00	34.634.560,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			48.575.200,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak																	
							Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	30 Orang	4.980.000,00	6.440.000,00	3.952.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	14.980.000,00	36.191.400,00	31.191.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			14.980.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan																	

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	61.580.000,00	101.907.400,00	98.296.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			61.580.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	20 Orang	31.980.000,00	32.525.000,00	57.220.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			31.980.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	3.980.000,00	6.440.000,00	3.952.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan																	
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				80 Orang	80 Orang	4.980.000,00	10.135.000,00	5.708.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			5.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase pelaksanaan rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti	-			100 %	100 %	158.155.200,00	145.781.600,00	145.781.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat		158.155.200,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																	
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				300 Orang	375 Orang	37.175.200,00	56.451.800,00	54.657.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			37.175.200,00	DINAS SOSIAL
	1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA																	

							Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	100 Orang	120.980.000,00	89.329.800,00	67.009.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			120.980.000,00	DINAS SOSIAL
5	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar KPM				-	100 %	3.634.980.000,00	3.730.377.000,00	3.792.449.500,00							3.023.935.100,00	
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data fakir miskin warga kota Pontianak yang diperbaharui	-			-	100 %	3.634.980.000,00	3.730.377.000,00	3.730.377.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat		3.023.935.100,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				40000 Orang	23283 Orang	450.000.000,00	502.145.200,00	410.644.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			450.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				20000 Keluarga	20000 Keluarga	34.980.000,00	34.914.800,00	161.142.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			34.980.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																	
							Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10000 Keluarga	4312 Keluarga	2.850.000.000,00	2.896.301.200,00	2.920.661.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			2.512.955.100,00	DINAS SOSIAL
	1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																	

							Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	300.000.000,00	297.015.800,00	300.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			26.000.000,00	DINAS SOSIAL
6	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial				-	100 %	410.680.600,00	404.489.800,00	297.568.800,00							410.680.600,00	
	1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota	-			-	100 %	382.450.000,00	376.226.000,00	376.226.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat		382.450.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				350 Orang	350 Orang	142.090.000,00	139.053.000,00	113.052.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			142.090.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	159.225.000,00	156.188.000,00	70.508.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			159.225.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																	
							Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Unit	100 Unit	20.000.000,00	19.981.000,00	21.341.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			20.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																	

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	31.135.000,00	31.029.000,00	32.389.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			31.135.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																	
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Orang	12 Orang	30.000.000,00	29.975.000,00	31.335.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			30.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota	-			-	100 %	28.230.600,00	28.263.800,00	28.263.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat		28.230.600,00	DINAS SOSIAL
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																	
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	28.230.600,00	28.263.800,00	28.943.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			28.230.600,00	DINAS SOSIAL
												J U M L A H	**15.490.212.000,00**	**15.760.932.164,00**	**15.314.115.533,00**							**13.764.357.000,00**	

3.2. Pendanaan

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi pada Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025, penganggaran untuk program dan, kegiaran dan sub kegiatan yaitu :

a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Pagu sebelumnya sebesar Rp. 8.639.731.500,00 dan pagu sesudahnya sebesar Rp. 8.615.569.393,00 dengan 8 kegiatan dan 26 sub kegiatan.

b. **Program Pemberdayaan Sosial**

Pagu sebelumnya sebesar Rp. 1.593.066.500,00 dan pagu sesudahnya sebesar Rp. 1.472.503.100,00 dengan 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan.

c. **Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**

Pagu sebelumnya sebesar Rp. 2.700.000,00 dan pagu sesudahnya sebesar Rp. 1.714.000,00 dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan.

d. **Program Rehabilitas Sosial**

Pagu sebelumnya sebesar Rp. 1.209.273.400,00 dan pagu sesudahnya sebesar Rp. 1.141.060.540,00 dengan 2 kegiatan dan 14 sub kegiatan.

e. **Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Pagu sebelumnya sebesar Rp. 3.634.980.000,00 dan pagu sesudahnya sebesar Rp. 3.785.699.700,00 dengan 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan.

f. **Program Penanganan Bencana**

Pagu sebelumnya sebesar Rp. 410.680.600,00 dan pagu sesudahnya sebesar Rp. 297.568.800,00 dengan 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan.

Rincian perubahan pagu anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN
PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2025

PROVINSI/KAB/KOTA : PONTIANAK
PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL

No	URUSAN	PROGRAM / KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) SEMULA	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) SESUDAH	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		SEMULA	MENJADI			RKPD 2025	RKPD 2025 PERUBAHAN	RKPD 2025 (Rp.)	RKPD 2025 PERUBAHAN (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**WAJIB BIDANG SOSIAL**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**PERSENTASE TINGKAT KEPUASAN BIDANG/BAGIAN TERHADAP PELAYANAN KESEKRETARIATAN**	**PERSENTASE TINGKAT KEPUASAN BIDANG/BAGIAN TERHADAP PELAYANAN KESEKRETARIATAN**	**95%**	**95%**	**8.639.731.500**	**8.615.569.393**	
		KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	**KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE PELAKSANAAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE PELAKSANAAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**100%**	**100%**	**75.394.400**	**75.394.400**	
		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	9 Dokumen	9 Dokumen	33.500.000	33.500.000	
		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	JUMLAH DOKUMEN RKA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	JUMLAH DOKUMEN RKA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000	4.665.000	

		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	JUMLAH DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	JUMLAH DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000	6.000.000	
		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD DAN LAPORAN HASIL KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	8 Laporan	8 Laporan	15.000.000	12.000.000	
		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5 Laporan	5 Laporan	13.394.000	10.715.200	
		KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	**KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**100%**	**100%**	**5.594.482.000**	**5.763.402.164**	EVALUASI JUMLAH PEGAWAI YANG MASUK DAN PENSIUN
		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	JUMLAH ORANG YANG MENERIMA GAJI DAN TUNJANGAN ASN	JUMLAH ORANG YANG MENERIMA GAJI DAN TUNJANGAN ASN	34Orang/ Bulan	34 Orang/ Bulan	5.304.162.000	5.519.884.000	EVALUASI JUMLAH PEGAWAI YANG MASUK DAN PENSIUN
		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/ VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/ VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	JUMLAH DOKUMEN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/ VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	JUMLAH DOKUMEN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/ VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	275.400.000	228.600.000	
		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD DAN KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD DAN KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/	18 Laporan	18 Laporan	14.920.000	11.936.000	

				TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD					
		KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	**KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE PENGELOLAAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE PENGELOLAAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH**	**100%**	**100%**	**1.145.000**	**905.600**	
		PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	JUMLAH RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	JUMLAH RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.145.000	905.600	
		KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	**KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**100%**	**100%**	**62.620.000**	**81.460.000**	
		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	JUMLAH PAKET PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPAN	JUMLAH PAKET PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPAN	70 Paket	2 Paket	42.620.000	63.660.000	Penambahan paket pakaian dinas untuk CPNS dan PPPK
		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH ORANG YANG MENGIKUTI BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH ORANG YANG MENGIKUTI BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5 Orang	2 Orang	20.000.000	32.500.000	Peningkatan kinerja ASN
		KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	**KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**PERSENTASE PEMENUHAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**100%**	**100%**	**387.521.500**	**437.888.600**	
		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	JUMLAH PAKET KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	JUMLAH PAKET KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	12 Paket	4 Paket	18.000.000	13.891.563	

		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	JUMLAH PAKET BAHAN LOGISTIK KANTOR YANG DISEDIAKAN	JUMLAH PAKET BAHAN LOGISTIK KANTOR YANG DISEDIAKAN	12 Paket	4 Paket	90.011.500	86.906.280	
		PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN	JUMLAH PAKET BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN YANG DISEDIAKAN	JUMLAH PAKET BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN YANG DISEDIAKAN	12 Paket	12 Paket	70.000.000	55.375.840	
		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH DOKUMEN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DISEDIAKAN	JUMLAH DOKUMEN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DISEDIAKAN	12 Dokumen	12 Dokumen	2.500.000	2.500.000	
		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	JUMLAH LAPORAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	JUMLAH LAPORAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	34 Laporan	34 Laporan	150.000.000	111.375.000	Peningkatan Koordinasi antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dan pengantaran ODGJ ke RSJ Provinsi Kalbar di Singkawang
		DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	JUMLAH DOKUMEN DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	JUMLAH DOKUMEN DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	12 Dokumen	1 Dokumen	52.010.000	40.185.000	
		KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	**KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**PERSENTASE PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**PERSENTASE PENYEDIAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**100%**	**100%**	**250.000.000**	**183.439.000**	
		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	JUMLAH UNIT PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DISEDIAKAN	JUMLAH UNIT PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DISEDIAKAN	13 Unit	21 Unit	**250.000.000**	**183.439.000**	
		KEGIATAN PENYEDIAAN JASA	**KEGIATAN PENYEDIAAN JASA**	**PERSENTASE PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN**	**PERSENTASE PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN**	**100%**	**100%**	**1.542.700.629**	**1.542.700.629**	

		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**PEMERINTAHAN DAERAH**	**PEMERINTAH DAERAH**					
		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	12 Laporan	0 Laporan	12.000.000	0	Refocusing Anggaran
		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK YANG DISEDIAKAN	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK YANG DISEDIAKAN	12 Laporan	12 Laporan	245.045.078	267.885.825	
		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR YANG DISEDIAKAN	2 Laporan	2 Laporan	55.000.000	55.840.000	
		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR YANG DISEDIAKAN	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR YANG DISEDIAKAN	12 Laporan	12 Laporan	1.021.099.200	1.109.753.880	
		KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	**KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**PERSENTASE PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**PERSENTASE PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**100%**	**100%**	**935.424.322**	**909.094.322**	
		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	JUMLAH KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN YANG DIPELIHARA DAN DIBAYARKAN PAJAK DAN PERIZINANNYA	JUMLAH KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN YANG DIPELIHARA DAN DIBAYARKAN PAJAK DAN PERIZINANNYA	12 Unit	11 Unit	227.400.000	218.030.000	

		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	JUMLAH PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DIPELIHARA	JUMLAH PERALATAN DAN MESIN LAINNYA YANG DIPELIHARA	100 Unit	100 Unit	111.010.000	77.406.000	
		PEMELIHARAAN/ REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	PEMELIHARAAN/ REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA/ DIREHABILITASI	JUMLAH GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA/ DIREHABILITASI	1 Unit	1 Unit	597.014.322	468.614.405	Refovusing Anggaran
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**PERSENTASE TINGKAT KEAKTIFAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL**	**PERSENTASE TINGKAT KEAKTIFAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL**	**100%**	**100%**	**1.593.066.500**	**1.472.503.100**	
		KEGIATAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**KEGIATAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**PERSENTASE FASILITASI KEGIATAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**PERSENTASE FASILITASI KEGIATAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**100%**	**100%**	**19.957.000**	**19.957.000**	
		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERBITAN IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH DAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERBITAN IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH DAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG	JUMLAH DOKUMEN HASIL KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERBITAN IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH DAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG	JUMLAH DOKUMEN HASIL KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERBITAN IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH DAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG	20 Dokumen	20 Dokumen	20.000.000	19.957.000	
		KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**PERSENTASE PELAYANAN PEKERJA SOSIAL BAGI MASYARAKAT**	**PERSENTASE PELAYANAN PEKERJA SOSIAL BAGI MASYARAKAT**	**100%**	**100%**	**1.573.066.500**	**1.551.687.400**	
		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN	JUMLAH ORANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH ORANG MENDAPAT PENINGKATAN KAPASITAS PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KEWENANGAN KAB/ KOTA	50 Orang	50 Orang	592.465.700	545.049.300	Refocusing Anggaran

		KABUPATEN/ KOTA	KABUPATEN/ KOTA							
		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KAB/ KOTA YANG MENINGKAT KAPASITASNYA KEWENANGAN KAB/KOTA	JUMLAH TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KAB/ KOTA YANG MENINGKAT KAPASITASNYA KEWENANGAN KAB/KOTA	42 Orang	42 Orang	410.600.800	486.437.000	Refocusing Anggaran
		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELUARGA KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KELUARGA YANG MENINGKAT KAPASITASNYA KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH KELUARGA YANG MENINGKAT KAPASITASNYA KEWENANGAN KAB/ KOTA	27 Keluarga	44 Keluarga	400.000.000	378.556.000	
		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KABUPATEN/ KOTA	PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENINGKAT KAPASITASNYA KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENINGKAT KAPASITASNYA KEWENANGAN KAB/ KOTA	7 Lembaga	20 Lembaga	120.000.000	27.061.600	
		PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGUATAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)	PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGUATAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3	JUMLAH SERTIFIKAT YANG DARI HASIL PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)	JUMLAH SERTIFIKAT YANG DARI HASIL PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)	20 Sertifikat	20 Sertifikat	50.000.000	19.568.000	
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**PERSENTASE TINGKAT PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**PERSENTASE TINGKAT PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**100%**	**100%**	**2.480.000**	**1.714.000**	

		KEGIATAN PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/ KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/ KELURAHAN ASAL	**KEGIATAN PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/ KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/ KELURAHAN ASAL**	**PERSENTASE PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/ KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/ KELURAHAN ASAL**	**PERSENTASE PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/ KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/ KELURAHAN ASAL**	**100%**	**100%**	**2.480.000**	**1.714.000**	
		FASILITASI PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KAB/ KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/ KELURAHAN ASAL	FASILITASI PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KAB/ KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/ KELURAHAN ASAL	JUMLAH WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG DIPULANGKAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH PROVINSI UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/ KELURAHAN ASAL KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG DIPULANGKAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH PROVINSI UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/ KELURAHAN ASAL KEWENANGAN KAB/ KOTA	5 Orang	5 Orang	2.480.000	1.714.000	
		PROGRAM REHABILITAS SOSIAL	**PROGRAM REHABILITAS SOSIAL**	**PERSENTASE PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENDAPATKAN LAYANAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL**	**PERSENTASE PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENDAPATKAN LAYANAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL**	**100%**	**100%**	**1.209.273.400**	**1.141.060.540**	
		KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK	**KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK**	**PERSENTASE TINGKAT PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR DAN BANTUAN SOSIAL**	**PERSENTASE TINGKAT PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR DAN BANTUAN SOSIAL**	**100%**	**100%**	**1.051.118.200**	**1.064.289.600**	

		TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DILUAR PANTI SOSIAL	**TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DILUAR PANTI SOSIAL**							
		PENYEDIAAN PERMAKANAN	PENYEDIAAN PERMAKANAN	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PERMAKANAN SESUAI DENGAN STANDAR GIZI MINIMAL KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PERMAKANAN SESUAI DENGAN STANDAR GIZI MINIMAL KEWENANGAN KAB/ KOTA	7795 Orang	200 Orang	475.000.000	498.800.000	
		PENYEDIAAN SANDANG	PENYEDIAAN SANDANG	JUMLAH ORANG YANG MENERIMA PAKAIAN DAN KELENGKAPAN LAINNYA YANG TERSEDIA DALAM 1 TAHUN KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH ORANG YANG MENERIMA PAKAIAN DAN KELENGKAPAN LAINNYA YANG TERSEDIA DALAM 1 TAHUN KEWENANGAN KAB/ KOTA	300 Orang	300 Orang	120.960.200	41.860.000	
		PENYEDIAAN ALAT BANTU	PENYEDIAAN ALAT BANTU	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN ALAT BANTU DAN ALAT BANTU PERAGA SESUAI KEBUTUHAN KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN ALAT BANTU DAN ALAT BANTU PERAGA SESUAI KEBUTUHAN KEWENANGAN KAB/ KOTA	50 Orang	50 Orang	258.710.000	229.860.000	
		PEMBERIAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA	PEMBERIAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA KEWENANGAN KAB/ KOTA	40 Orang	40 Orang	4.980.000	3.952.000	
		PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL DAN SOSIAL	PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL DAN SOSIAL	JUMLAH PESERTA BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL DAN SOSIAL	JUMLAH PESERTA BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL DAN SOSIAL	50 Orang	100 Orang	20.412.800	9.968.480	

				KEWENANGAN KAB/ KOTA	KEWENANGAN KAB/ KOTA					
		PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DAN MASYARAKAT	PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DAN MASYARAKAT	JUMLAH PESERTA BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DAN MASYARAKAT KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH PESERTA BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DAN MASYARAKAT KEWENANGAN KAB/ KOTA	100 Orang	150 Orang	48.575.200	34.634.560	
		FASILITASI PEMBUATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, AKTA KELAHIRAN, SURAT NIKAH DAN KARTU IDENTITAS ANAK	FASILITASI PEMBUATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, AKTA KELAHIRAN, SURAT NIKAH DAN KARTU IDENTITAS ANAK	JUMLAH ORANG YANG TERPENUHI KEBUTUHAN PEMBUATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, AKTA KELAHIRAN, SURAT NIKAH, DAN KARTU IDENTITAS ANAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS	JUMLAH ORANG YANG TERPENUHI KEBUTUHAN PEMBUATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, AKTA KELAHIRAN, SURAT NIKAH, DAN KARTU IDENTITAS ANAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS	40 Orang	30 Orang	4.980.000	3.952.000	
		PEMBERIAN AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR	PEMBERIAN AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR KEWENANGAN KAB/ KOTA	60 Orang	60 Orang	14.980.000	31.191.400	
		PEMBERIAN LAYANAN DATA DAN PENGADUAN	PEMBERIAN LAYANAN DATA DAN PENGADUAN	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN LAYANAN DATA DAN PENGADUAN KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN LAYANAN DATA DAN PENGADUAN KEWENANGAN KAB/ KOTA	200 Orang	200 Orang	61.580.000	98.296.000	
		PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN	PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN PELAYANAN	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN PELAYANAN	10 Orang	20 Orang	31.980.000	57.220.000	

				KEDARURATAN KEWENANGAN KAB/ KOTA	KEDARURATAN KEWENANGAN KAB/ KOTA					
		PEMBERIAN PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA	PEMBERIAN PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA KEWENANGAN KAB/ KOTA	40 Orang	40 Orang	3.980.000	3.952.000	
		PEMBERIAN PELAYANAN RUJUKAN	PEMBERIAN PELAYANAN RUJUKAN	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN LAYANAN RUJUKAN KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN LAYANAN RUJUKAN KEWENANGAN KAB/ KOTA	80 Orang	80 Orang	4.980.000	5.708.000	
		KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL	**KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL**	**PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL**	**PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA DI LUAR PANTI SOSIAL**	**100%**	**100%**	**158.155.200**	**145.781.600**	
		PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL	PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL, DAN SOSIAL	JUMLAH PESERTA BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL DAN SOSIAL KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH PESERTA BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL DAN SOSIAL KEWENANGAN KAB/ KOTA	300 Orang	375 Orang	37.175.200	54.657.000	
		PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN	PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN	JUMLAH PESERTA DALAM PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA	JUMLAH PESERTA DALAM PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA BUKAN KORBAN HIV/AIDS DAN NAPZA	50 Orang	100 Orang	120.980.000	67.009.100	

		HIV/AIDS DAN NAPZA	HIV/AIDS DAN NAPZA	KEWENANGAN KAB/ KOTA	KEWENANGAN KAB/ KOTA					
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**PERSENTASE PENERIMA BANTUAN KEBUTUHAN DASAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)**	**PERSENTASE PENERIMA BANTUAN KEBUTUHAN DASAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)**	**100%**	**100%**	**3.634.980.000**	**3.785.699.700**	
		KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**KEGIATAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**TERSEDIANYA DATA FAKIR MISKIN WARGA KOTA PONTIANAK**	**PERSENTASE DATA FAKIR MISKIN WARGA KOTA PONTIANAK YANG DIPERBAHARUI**	**100%**	**100%**	**3.634.980.000**	**3.785.699.700**	
		PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KAB/ KOTA YANG DIDATA	JUMLAH FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KAB/ KOTA YANG DIDATA	40.000 Orang	28.283 Orang	450.000.000	410.644.800	
		PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KAB/ KOTA	PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KAB/ KOTA	JUMLAH KELUARGA YANG MENDAPATKAN PENGENTASAN FAKIR MISKIN KAB/ KOTA	JUMLAH KELUARGA YANG MENDAPATKAN PENGENTASAN FAKIR MISKIN KAB/ KOTA	20.000 Keluarga	20.000 Keluarga	34.980.000	161.142.800	
		FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA	FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA	JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) YANG MENDAPATKAN BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) YANG MENDAPATKAN BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA KEWENANGAN KAB/ KOTA	10.000 Keluarga	4312 Keluarga	2.850.000.000	2.920.661.900	
		FASILITASI BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT	FASILITASI BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT	JUMLAH ORANG MENDAPATKAN BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH ORANG MENDAPATKAN BANTUAN PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT KEWENANGAN KABUPATEN/ KOTA	100 Orang	100 Orang	300.000.000	293.250.200	

		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**PERSENTASE PENANGANAN KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL**	**PERSENTASE PENANGANAN KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL**	**100%**	**100%**	**410.680.600**	**297.568.800**	
		KEGIATAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/ KOTA	**KEGIATAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/ KOTA**	**PERSENTASE PEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN BANTUAN BAGI KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL**	**PERSENTASE PEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN BANTUAN BAGI KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL**	**100%**	**100%**	**382.450.000**	**269.305.000**	
		PENYEDIAAN MAKANAN	PENYEDIAAN MAKANAN	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN PERMAKANAN 3X1 HARI DALAM MASA TANGGAP DARURAT (PENGUNGSIAN) KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN PERMAKANAN 3X1 HARI DALAM MASA TANGGAP DARURAT (PENGUNGSIAN) KEWENANGAN KAB/ KOTA	350 Orang	300 Orang	142.090.000	113.052.000	
		PENYEDIAAN SANDANG	PENYEDIAAN SANDANG	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN SANDANG YANG TERSEDIA PADA MASA TANGGAP DARURAT (PENGUNGSIAN) DAN PASCA BENCANA KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH ORANG YANG MENDAPATKAN SANDANG YANG TERSEDIA PADA MASA TANGGAP DARURAT (PENGUNGSIAN) DAN PASCA BENCANA KEWENANGAN KAB/ KOTA	200 Orang	200 Orang	159.225.000	70.508.000	
		PENYEDIAAN TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGSI	PENYEDIAAN TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNGSI	JUMLAH TEMPAT PENGUNGSIAN KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH TEMPAT PENGUNGSIAN KEWENANGAN KAB/ KOTA	100 Unit	100 Unit	20.000.000	21.341.000	
		PENANGANAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN	PENANGANAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN	JUMLAH KELOMPOK RENTAN YANG MENDAPAT BANTUAN	JUMLAH KELOMPOK RENTAN YANG MENDAPAT BANTUAN	40 Orang	40 Orang	31.135.000	32.389.000	
		PELAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL	PELAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL	JUMLAH MASYARAKAT YANG MENDAPATKAN LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH MASYARAKAT YANG MENDAPATKAN LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL KEWENANGAN KAB/ KOTA	12 Orang	12 Orang	30.000.000	31.335.000	

		KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/ KOTA	**KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/ KOTA**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/ KOTA BENCANA KABUPATEN/ KOTA**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/ KOTA**	**100%**	**100%**	**28.230.600**	**28.943.800**	
		KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA	KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA	JUMLAH ORANG YANG MELAKSANAKAN KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA KEWENANGAN KAB/ KOTA	JUMLAH ORANG YANG MELAKSANAKAN KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA KEWENANGAN KAB/ KOTA	50 Orang	50 Orang	28.230.600	28.943.800	
T O T A L								**15.490.212.000**	**15.314.115.533**	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasi berbagai persoalan-persoalan terkait dengan persoalan masyarakat khususnya dalam bidang sosial sebagai wujud nyata dari tanggungjawab Pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan kehidupan harkat dan martabat manusia seutuhnya dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan kehidupan masyarakat Kota Pontianak yang berharkat dan bermartabat sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak adalah Program Tahunan Dinas Sosial Kota Pontianak yang sesuai Tupoksi dan sasaran Program Dinas Sosial Kota Pontianak. Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Sosial Kota Pontianak ini disusun sebagai bahan acuan serta evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Tahun anggaran 2025, dengan Renja Perubahan ini pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Kota Pontianak, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan masyarakat Kota Pontianak.

Pontianak, 2025
KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PONTIANAK

drg. TRISNAWATI, M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19730610 200012 2 004

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS TENAGA KERJA
KOTA PONTIANAK

Jalan Letnan Jendral Sutoyo No. 1 (Kantor Terpadu) Pontianak 78121

Website : www.disnaker.pontianak.go.id E-Mail : dinastenagakerjakotapontianak@gmail.com

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

DINAS TENAGA KERJA

KOTA PONTIANAK TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang selanjutnya dijabarkan pada Rencana Kerja untuk periode satu (satu) tahun untuk mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan OPD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai sebuah dokumen resmi perangkat daerah, Renja Perubahan-PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja-PD disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja-PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan selanjutnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, proses penyusunan Renja Perubahan-PD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu:

1. Persiapan Penyusunan Renja-PD

   Melalui tahapan ini persiapan meliputi pembentukan tim penyusun Renja-PD, orientasi mengenai Renja-PD, penyusunan agenda kerja dan penyiapan data dan informasi.
2. Penyusunan rancangan Renja-PD.

   Pada tahapan ini penyusunan rancangan diawali dengan penysunan rancangan awal Renja-PD yang mencakup analisis gambaran pelayananperangkat daerah dan hasil

evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Ranwal Renja-PD dilanjutkan dengan tahap penyempurnaan menjadi dokumen Renja-PD yang defenitif.

3. Penetapan Renja-PD.

   Tahapan ini dimana penetapan rancangan akhir Renja-PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, yang dilanjutkan dengan penetapan Renja-PD oleh Kepala Daerah sebagai pedoman dalam Menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2025 memuat berbagai program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) Program dan kegiatan harus mengarah pada pencapaian target dalam indikator kinerja utama;
b) Program dan kegiatan harus mengarah pada pencapaian target dalam indikator kinerja renstra;
c) Program dan kegiatan harus mendukung Visi, Misi Walikota Pontianak.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2025 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pontianak Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 227.)
21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 4).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).

23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 15.1 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 15.1).
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
25. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen renja PD dengan renstra PD serta dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar penyelenggaraan urusan Dinas Tenaga Kerja berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RENJA PERUBAHAN pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK TAHUN LALU

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi dan analisis capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil instansi dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran (*Outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*Output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja disajikan secara sistematika berdasarkan format pengukuran kinerja yaitu, dengan terlebih dahulu menyajikan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran, target dan realisasisnya dan selanjutnya dilanjutkan dengan hasil pengukuran kinerja kegiatan beserta indikator kinerja sub kegiatan, target dan realisasinya, dan realisasi anggarannya.

TABEL. II.I

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA

DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS TENAGA KERJA s/d TRIWULAN I TAHUN 2025

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2024 - 2026		TAHUN 2022		TARGET DAN REALISASI KERJA PROGRAM & KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)					TARGET POGRAM & KEGIATAN (RENJA SKPD TAHUN 2024		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN		
									TARGET	REALISASI	TARGET RENJA SKPD TAHUN 2023		REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2023		TING-KAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM & KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (TAHUN 2025)		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					*2*	*3*	*4*		*5*		*6*		*7*		*8*	*9*		*10*		*11*
					PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA (RTK)	**TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA**	***69***	**%**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**65**	**%**	***0***	**%**	***0***
					Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	***Persentase tersusunya rencana tenaga kerja (RTK)***	***100***	**%**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	**100**	**%**	***0***	**%**	*0*
					Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	3	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	1	Dokumen	0	Dokumen	*0*
					Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	90	Perusahaan	0	0	0	0	0	0	*0*	20	Perusahaan	0	Perusahaan	*0*

					PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**BESARAN TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI**	**58**	**%**			**52**	**%**	**13,16**	**%**	**13,16 %**	**54%**		**4,49%**		**7,74%**
					Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	***Persentase Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi***	**100**	**%**			**52**	**%**	**0**	**%**	**0%**	**100%**		**17,95%**		**17,95%**
					Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun N	780	Orang			30	orang	0	orang	0%	230	Orang	56	Orang	7,17%
					Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Jumlah kesepakatan atau koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun N	43	Lembaga			0	0	0	0o	0%	40	Lembaga	0	Lembaga	0
					Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	***Persentase Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan kerja swasta***	**100**	**%**			**100**	**%**	**26,32**	**%**	**26,32 %**	**100%**		**0%**		**0**
					Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	43	Lembaga			38	lembaga	10	lembaga	26,32%	40	Lembaga	0	Lembaga	0
					Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	***Persentase Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran***	**100**	**%**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100%**		**0%**		**0**

						Lembaga Pelatihan Kerja													
					Penyediaan sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	Jumlah sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	45	Perizinan			0	0	0	0	0%	10	Perizinan	0	Perizinan	0
					Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	***Persentase Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil***	**100**	**%**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**100**	**0%**	**0**	**%**	**0**
					Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	45	Perusahaan			**0**	**0**	**0**	**0**	0%	10	Perusahaan	0	Perusahaan	**0**
					Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota	***Persentase Terlaksananya Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota***	**100**	**%**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**100**	**%**	**0**	**%**	**0**
					Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di Tingkat Daerah	45	Dokumen			**0**	**0**	**0**	**0**	0%	10	Dokumen	0	Dokumen	0
					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	**PERSENTASE TERLAKSANANYA PENEMPATAN TENAGA KERJA YANG LULUS SELEKSI**	**20**	**%**			**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**	**10**	**'%**	**0**	**%**	**0**
					Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	***Persentase Terlaksananya Pelayanan antar kerja di***	**100**	**%**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**%**	**0**	**%**	**0**

						Daerah Kabupaten/Kota													
					Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	9	Orang			0	0	0	0	0	2	Orang	0	Orang	0
					Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Angkatan Kerja Lokal (AKL) dan ULD	900	Orang			0	0	0	0	0	200	Orang	0	Orang	0
					Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	520	Orang			0	0	0	0	0	150	Orang	0	Orang	0
					Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layananan ULD	45	Orang			0	0	0	0	0	10	Orang	0	Orang	0
					Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	400	Orang			0	0	0	0	0	120	Orang	0	Orang	0
					Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	***Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/***	**100**	**%**			0	0	0	0	**0**	**100**	**%**	**0**	**%**	**0**

						Kota														
					Penyediaan sumber daya perizinan LPTKS secara terintegrasi	Jumlah perizinan LPTKS Yang terintegrasi	21	Lembaga			0	0	0	0	0	5	Lembaga	0	Lembaga	0
					Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan aturan yang berlaku	9	Lembaga			0	0	0	0	0	5	Lembaga	0	Lembaga	0
					Pengelolaan informasi pasar kerja	***Persentase Terlaksananya Pengelolaan Informasi pasar Kerja***	**100**	**%**			**100**	**%**	**100**	**%**	**0**	**100**	**%**	**0**	**%**	**0**
					Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online	1	Dokumen			0	0	0	0	0	1	Dokumen	0	Dokumen	0
					Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Jumlah pencari kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online [karir hub]	1.800	Orang			0	0	0	0	0	400	Orang	0	Orang	0
					Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	3.000	Orang			30	orang	30	orang	100%	800	Orang	0	Orang	0
					Perlindungan PMI [Pra dan Purna Penempatan] di daerah kabupaten/kota	***Persentase Terlaksananya Perlindungan PMI [Pra dan Purna Penempatan] di daerah kabupaten/kota***	**100**	**%**			0	0	0	0	**0**	**100**	**%**	**0**	**100%**	**0**

					Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran indonesia (PMI/Pekerja Migran Indonesia	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	60	Orang			0	0	0	0	0	15	Orang	0	Orang	0
					Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang di tangani	10	Orang			0	0	0	0	0	4	Orang	0	Orang	0
					Pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan	36	Orang			0	0	0	0	0	10	Orang	0	Orang	0
					PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	**BESARAN KASUS YANG DISELESAIKAN DENGAN PERJANJIAN BERSAMA (PB)**	**57**	**%**			**100**	**%**	**28,33**	**%**	**28,33 %**	**55**	**%**	**0,02**	**%**	**0,02**
					Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 [satu] daerah	***Persentase Terlaksananya Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 [satu] daerah kabupaten/kotamempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota***	**100**	**%**			0	0	0	0	**0**	**100**	**%**	**0**	**%**	**0**
					Pengesahan peraturan perusahaan	Jumlah perusahaan yang	150	Peru			0	0	0	0	0	40	Perusa	0	Perusa	0

					bagi perusahaan	melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terakit dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP Online		saha an									haan		haan	
					Pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan	Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerja bersama	100	Peru saha an			0	0	0	0	0	20	Perusa haan	0	Perusa haan	0
					Penyelenggaraan Pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	4	Lapo ran			0	0	0	0	0	4	Lapor an	0	Lapor an	0
					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	***Persentase Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota***	**100**	**%**			**100**	**%**	**28,33**	**%**	**28,33 %**	**100**	**%**	**3,29**	**%**	**3,29**
					Pencegahan perselisihan hubungan industrial,mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kotadi Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	30	Perk ara			0	0	0	0	0	12	Perkar a	0	Perkar a	0

					Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	84	Perkara			30	perkara	7	Perkara		30	Perkara	0	Perkara	0
					Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha,federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non Afiliasi	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	6	Asosiasi & Serikat Pekerja			0	0	0	0	0	4	Asosiasi & Serikat Pekerja	0	Asosiasi & Serikat Pekerja	0
					Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1	Lembaga			9	lembaga	3	lembaga		1	Lembaga	1	Lembaga	100
					Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	9000	Orang			0	0	0	0	0	3000	Orang	0	Orang	0
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB / KOTA	Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayananan kesektariatan	**95**	**%**			**95**	**%**	**50**	**%**	**50%**	**95**	**%**	**10,90**	**%**	**11,47**
					Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	**100**	**%**			0	0	0	0	**0**	**100%**		**0%**		**0**

					Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	Dokumen			0	0	0	0	0	15	Dokumen	0	Dokumen	0
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6	Laporan			0	0	0	0	0	6	Laporan	0	Laporan	0
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	Laporan			0	0	0	0	0	9	Laporan	09	Laporan	100
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	**100**	**%**			**100**	**%**	**25**	**%**	**0**	**100%**		**23,53%**		**23,53**
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	23	Orang / Bulan			12	bulan	12	bulan	100%	23	Orang / Bulan	18	Orang/ Bulan	78,26
					Pelaksanaan Penanatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	5	Dokumen			12	bulan	12	bulan	100%	5	Dokumen	1	Dokumen	20

					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	12	Laporan			0	0	0	0	0	12	Laporan	3	Laporan	25%
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah***	**100**	**%**			0	0	0	0	**0**	**100**	**%**	**0**	**%**	**0**
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.	3	Paket			0	0	0	0	0	3	Paket	0	Paket	0
					Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	30	Orang			0	0	0	0	0	8	Orang	0	Orang	0
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah***	**100**	**%**			**100**	**%**	**100**	**100%**	**0%**	**100%**		**16,67%**		**16,67%**
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan.	2	Paket			12	bulan	12	bulan	100%	2	Paket	0	Paket	0
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang sediakan.	2	Paket			12	bulan	12	bulan	100%	2	Paket	1	Paket	50%

					Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan.	2	Paket			12	bulan	12	bulan	100%	2	Paket	1	Paket	50%
					Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4	Paket			12	bulan	12	bulan	100%	4	Paket	1	Paket	25%
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2	Paket			12	bulan	12	bulan	100%	2	Paket	1	Paket	50%
					Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan			12	bulan	12	bulan	100%	12	Laporan	0	Laporan	0
					Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	***Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah***	**100**	**%**			**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**	**100%**		**0%**		**0**
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	17	Unit			12	bulan	12	bulan	100%	5	Unit	0	Unit	0
					Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan.	16	Unit			12	bulan	12	bulan	100%	4	Unit	0	Unit	0
					Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	18	Unit			12	bulan	12	bulan	100%	4	Unit	0	Unit	0

					Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	***Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah***	**100**	**%**			**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**	**100,00%**		**16,67%**		**16,67**
					Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Laporan			12	bulan	12	bulan	100%	12	Laporan	3	Laporan	25%
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan.	12	Laporan			12	bulan	12	bulan	100%	12	Laporan			
					Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	Laporan			0	0	0	0	100%	12	Laporan	0	Laporan	0%
					Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	***Persentase Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah***	**100**	**%**			**100**	**%**	**100**	**%**	**100%**	**100%**		**19,44%**		**19,44%**
					Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perseorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perseorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.	1	Unit			0	0	0	0	0%	1	Unit	1	Unit	100
					Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	30	Unit			0	0	0	0	0%	8	Unit	0	Unit	0
					Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah peralatan dan mesin	28	Unit			12	bulan	12	bulan	0%	18	Unit	5	Unit	62,5%

					Mesin lainnya	lainnya yang dipelihara														
					Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	Unit			0	0	0	0	0%	1	Unit	1	Unit	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak menempati gedung terpadu Kota Pontianak yang terletak di Jalan Letjen Sutoyo No. 1 Pontianak, yang menyatu dengan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pontianak.

Dalam hal tingkat capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak berdasarkan sasaran/target Renstra pada periode sebelumnya. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui indikator-indikator kinerja. Pengukuran tersebut dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

1. 85 s.d 100 : Sangat Berhasil
2. 70 s.d < 85 : Berhasil
3. 55 s.d < 70 : Cukup Berhasil
4. 0 s.d < 55 : Kurang Berhasil

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah serta ketentuan Perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika perangkat daerah belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing.

Tabel. II.II

Pencapaian Kinerja Pelayanan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah 2024-2026				Realisasi Capaian		Proyeksi		Capaian Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	-	-		8,35 – 10,25	8,20 – 10,20	8,15-10,15	8,92	8,29	-	-	
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	-	-		156.400.000	160.109.000	155.418.000	14,60-	19,93	-	-	
3	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja	-	-		65 %	67 %	69%	-		-	-	
4	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan yang berbasis kompetensi	-	-		54 %	56 %	58%	52 %		-	-	
5	Presentase terlaksananya penempatan tenaga kerja yang lulus seleksi	-	-		10 %	15 %	20%	68 %		-	-	
6	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	-	-		55 %	56 %	57%	61,46	38,88	-	-	
7	Tingkat Kepuasan bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	-	-		95 %	95 %	100	95 %	95%	-	-	
8	Presentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacuh kerencana tenaga kerja		√		-	-		100	76,19	-	-	

9	Presentase Tenaga kerja bersertifikat kompetensi		√		-	-		2,11	10,86		-	
10	Presentase perusahaan yang menerapkan tata kelolah yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)		√		-	-		100	66,12	-	-	
11	Presentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme layanan atar kerja dalam wilayah kabupaten (Kota)		√		10 %	15 %		50,57	27,43	-	-	

Pencapaian kinerja pelayanan terdapat sebelas indikator penilaian dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka dengan target Tahun 2024 sebesar 8,35 – 10,25 dan target Tahun 2025 sebesar 8,20 – 10,20, Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja dengan target Tahun 2024 sebesar 156.400.000 dan target Tahun 2025 sebesar 160.109.000, Tingkat partisipasi Angkatan Kerja dengan target Tahun 2024 sebesar 65 % dan target Tahun 2025 sebesar 67 %, Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan yang berbasis kompetensi dengan target Tahun 2024 sebesar 54 % dan target Tahun 2025 sebesar 56 %, Presentase terlaksananya penempatan tenaga kerja yang lulus seleksi dengan target Tahun 2024 sebesar 10 % dan target Tahun 2025 sebesar 15 %, Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) target Tahun 2024 sebesar 55 % dan target Tahun 2025 sebesar 56 %, Tingkat Kepuasan bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan target Tahun 2024 sebesar 95 % dan target Tahun 2025 sebesar 95 %, Presentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) melalui mekanisme layanan atar kerja dalam wilayah kabupaten (Kota) dengan target Tahun 2024 sebesar 10 % dan target Tahun 2025 sebesar 15 %.

Dikarenakan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak tidak mengampu SPM, maka Pencapaian Kinerja Pelayanan NIHIL.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Tujuan utama dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat selaku konsumen penikmat layanan. Untuk itu isu strategis pelayanan publik adalah meningkatkan kualitas layanan sehingga mencapai level kepuasan masyarakat. Untuk dapat mencapai level tersebut diperlukan berbagai perbaikan yang keterkaitannya dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal yang perlu juga mendapatkan perhatian dalam peningkatan pelayanan publik ini adalah penciptaan sistem pelayanan yang efisien yang tidak memberikan peluang terjadinya penyelewengan/penyalahgunaan wewenang.

Beberapa isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak antara lain adalah :

1. Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja

   Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja menjadi isu penting karena berdampak pada daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah

2. Kesempatan Kerja

   Terbatasnya kesempatan kerja dan tingginya angka pengangguran menjadi tantangan utama yang perlu diatasi

3. Perlindungan Tenaga Kerja

   Perlindungan tenaga kerja,terutama terhadap pekerja migran,menjadi isu strategis Yang memerlukan perhatian khusus

Tabel II.III

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas

dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Kualitas Tenaga Kerja yang rendah	Produktivitas yang rendah	Pendidikan dan keterampilan yang tidak memadai
2	Perselisihan Hubungan Industrial	Konflik antara pekerja dan pengusaha	Komunikasi yang buruk antara pekerja dan pengusaha serta kurangnya partisipasi serikat buruh

3	Angka Pengangguran terbuka masih tinggi	Masih banyaknya pengangguran	Ketidakseimbangan Antara Pertumbuhan Penduduk dan Lapangan Kerja

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Program prioritas pembangunan Kota Pontianak merupakan instrumen kebijakan pembangunan utama dalam mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan, sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2025 sangat tergantung pada kemampuan pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta. Adapun pagu anggaran/pendanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak meliputi belanja langsung yang meliputi komponen belanja pegawai, barang/jasa dan belanja modal. Belanja langsung meliputi kegiatan rutin penunjang Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak dan termasuk belanja kegiatan pembangunan yang meliputi kegiatan usulan/rencana kerja kegiatan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak.

Tabel II.IV

Review Rencana Kerja Terhadap

Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
KETENAGAKERJAAN											
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**		Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	**95%**	**3.857.746.000,00**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Kota Pontianak**	Persentase tingkat kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	**95%**	**4.180.235.000,00**	
1.1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**15.700.000,00**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kota Pontianak**	**Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**15.700.000,00**	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	15 Dokumen	8.200.000,00	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	15 Dokumen	8.200.000,00	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	4.700.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	4.700.000,00	
1.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	2.800.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	2.800.000,00	

1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**3.151.446.000,00**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kota Pontianak**	**Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	**3.473.935.000,00**	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	23 Orang/ Bulan	2.886.746.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	23 Orang/ Bulan	3.209.235.000,00	
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	5 Dokumen	260.000.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	5 Dokumen	260.000.000,00	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	4.700.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	4.700.000,00	
1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	**100%**	**61.200.000,00**	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	**100%**	**61.200.000,00**	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	3 Paket	43.200.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pontianak	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	3 Paket	43.200.000,00	
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 Orang	18.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Kota Pontianak	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 Orang	18.000.000,00	
1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**334.300.000,00**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kota Pontianak**	**Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**334.300.000,00**	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2 Paket	4.300.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2 Paket	4.300.000,00	
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jangka waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	65.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	65.000.000,00	
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jangka waktu penyediaan peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket	40.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Paket	40.000.000,00	

1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jangka waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	62.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	62.000.000,00	
1.4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 Paket	38.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 Paket	38.000.000,00	
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 Laporan	125.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	Jangka waktu rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 Laporan	125.000.000,00	
1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**100%**	**111.000.000,00**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Pontianak**	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**111.000.000,00**	
1.5.1	Pengadaan Mebel	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah	7 Unit	33.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kota Pontianak	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah	14 Unit	33.000.000,00	
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Unit	40.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Pontianak	Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 Unit	40.000.000,00	
1.5.3	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	6 Unit	38.000.000,00	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Pontianak	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	6 Unit	38.000.000,00	
1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**78.600.000,00**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Pontianak**	**Jangka Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**78.600.000,00**	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	2.600.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	2.600.000,00	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12 Laporan	52.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik	12 Laporan	52.000.000,00	
1.6.3	Peyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jangka waktu Peyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	24.000.000,00	Peyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	Jangka waktu Peyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	24.000.000,00	

1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara**	**100%**	**105.500.000,00**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kota Pontianak**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara**	**100%**	**105.500.000,00**	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	38.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pontianak	Jumlah unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	38.000.000,00	
1.7.2	Pemeliharaan mebel	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah mebel yang dipelihara	12 Unit	14.000.000,00	Pemeliharaan mebel	Kota Pontianak	Jumlah mebel yang dipelihara	12 Unit	14.000.000,00	
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	22 Unit	32.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Pontianak	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	22 Unit	32.000.000,00	
1.7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Gedung	21.500.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Gedung	21.500.000,00	
2	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA (RTK)**		**TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA**	**67%**	**52.000.000,00**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA (RTK)**	**Kota Pontianak**	**TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA**	**67%**	**52.000.000,00**	
2.1	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**		**Persentase Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**100%**	**52.000.000,00**	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**Kota Pontianak**	**Persentase Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**100%**	**52.000.000,00**	
2.1.1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	1 Dokumen	24.000.000,00	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Pontianak	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro	1 Dokumen	24.000.000,00	
2.2.2	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja mikro	30 Perusahaan	28.000.000,00	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Pontianak	Jumlah Perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja mikro	30 Perusahaan	28.000.000,00	
3	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**		**BESARAN TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI**	**56%**	**575.000.000,00**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Kota Pontianak**	**BESARAN TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI**	**56%**	**617.000.000,00**	
3.1	**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**		**Persentase Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi**	**100%**	**470.000.000,00**	**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Kota Pontianak**	**Persentase Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi**	**100%**	**520.000.000,00**	

3.1.1	Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun N	260 Orang	450.000.000,00	Proses Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Kota Pontianak	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun N	260 Orang	500.000.000,00	
3.1.2	Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah kesepakatan atau koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun N	40 Lembaga	20.000.000,00	Koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	Kota Pontianak	Jumlah kesepakatan atau koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana dan prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun N	40 Lembaga	20.000.000,00	
3.2	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**		**Persentase Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan kerja swasta**	**100%**	**50.000.000,00**	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Kota Pontianak**	**Persentase Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan kerja swasta**	**100%**	**50.000.000,00**	
3.2.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	42 Lembaga	50.000.000,00	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Pontianak	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	42 Lembaga	50.000.000,00	
3.3	**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**		**Persentase Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	**100%**	**17.000.000,00**	**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	**Kota Pontianak**	**Persentase Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	**100%**	**17.000.000,00**	
3.3.1	Penyediaan sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	15 Perizinan	17.000.000,00	Penyediaan sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	Kota Pontianak	Jumlah sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi	15 Perizinan	17.000.000,00	
3.4	**Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**		**Persentase Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**100%**	**20.000.000,00**	**Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	Kota Pontianak	Persentase Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	**100%**	**18.000.000,00**	
3.4.1	Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	15 Perusahaan	20.000.000,00	Pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil	Kota Pontianak	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas	15 Perusahaan	18.000.000,00	
3.5	**Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota**		**Persentase Terlaksananya Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota**	**100%**	**18.000.000,00**	**Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota**	**Kota Pontianak**	**Persentase Terlaksananya Pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota**	**100%**	**12.000.000,00**	
3.5.1	Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di Tingkat Daerah	15 Dokumen	18.000.000,00	Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Kota Pontianak	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di Tingkat Daerah	15 Dokumen	12.000.000,00	

4	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**		**PERSENTASE TERLAKSANANYA PENEMPATAN TENAGA KERJA YANG LULUS SELEKSI**	**15%**	**383.000.000,00**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Kota Pontianak**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA PENEMPATAN TENAGA KERJA YANG LULUS SELEKSI**	**15%**	**441.000.000,00**	
4.1	**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Terlaksananya Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**119.000.000,00**	**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Kota Pontianak**	**Persentase Terlaksananya Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**188.000.000,00**	
4.1.1	Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah SDM Pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	3 Orang	24.000.000,00	Penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja	Kota Pontianak	Jumlah SDM Pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	3 Orang	20.000.000,00	
4.1.2	Pelayanan Antar Kerja	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Angkatan Kerja Lokal (AKL) dan ULD	300 Orang	24.000.000,00	Pelayanan Antar Kerja	Kota Pontianak	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Angkatan Kerja Lokal (AKL) dan ULD	300 Orang	20.000.000,00	
4.1.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	170 Orang	34.000.000,00	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Kota Pontianak	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	170 Orang	30.000.000,00	
4.1.4	Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layananan ULD	15 Orang	17.000.000,00	Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	Kota Pontianak	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layananan ULD	15 Orang	100.000.000,00	
4.1.5	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	130 Orang	20.000.000,00	**Perluasan Kesempatan Kerja**	Kota Pontianak	Jumlah tenaga Kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	130 Orang	18.000.000,00	
4.2	**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**		**Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**29.000.000,00**	**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Kota Pontianak**	**Persentase Terlaksananya Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**100%**	**29.000.000,00**	
4.2.1	Penyediaan sumber daya perizinan LPTKS secra terintegrasi	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah perizinan LPTKS Yang terintegrasi	7 Lembaga	14.000.000,00	Penyediaan sumber daya perizinan LPTKS secra terintegrasi	Kota Pontianak	Jumlah perizinan LPTKS Yang terintegrasi	7 Lembaga	14.000.000,00	

4.2.2	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan aturan yang berlaku	7 Lembaga	15.000.000,00	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kota Pontianak	Jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan aturan yang berlaku	7 Lembaga	15.000.000,00	
4.3	**Pengelolaan informasi pasar kerja**		**Jumlah kegiatan**	**100%**	**196.000.000,00**	**Pengelolaan informasi pasar kerja**	**Kota Pontianak**	**Jumlah kegiatan**	**100%**	**185.000.000,00**	
4.3.1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online	1 Dokumen	12.000.000,00	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kota Pontianak	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online	1 Dokumen	12.000.000,00	
4.3.2	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah pencari kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online [karir hub]	600 Orang	22.000.000,00	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Kota Pontianak	Jumlah pencari kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online [karir hub]	600 Orang	22.000.000,00	
4.3.3	Job Fair/ Bursa Kerja	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	1000 Orang	162.000.000,00	Job Fair/ Bursa Kerja	Kota Pontianak	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	1000 Orang	151.000.000,00	
4.4	**Perlindungan PMI [Pra dan Purna Penempatan] di daerah kabupaten/kota**		**Persentase Terlaksananya Perlindungan PMI [Pra dan Purna Penempatan] di daerah kabupaten/kota**	**100%**	**39.000.000,00**	**Perlindungan PMI [Pra dan Purna Penempatan] di daerah kabupaten/kota**	**Kota Pontianak**	**Persentase Terlaksananya Perlindungan PMI [Pra dan Purna Penempatan] di daerah kabupaten/kota**	**100%**	**39.000.000,00**	
4.4.1	Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	20 Orang	15.000.000,00	Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja	Kota Pontianak	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	20 Orang	15.000.000,00	
4.4.2	Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang di tangani	3 Orang	10.000.000,00	Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran	Kota Pontianak	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang di tangani	3 Orang	10.000.000,00	
4.4.3	Pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan	12 Orang	14.000.000,00	Pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan	Kota Pontianak	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan	12 Orang	14.000.000,00	
5	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**		**Terwujudnya Kearifan Lokal di masyarakat terhadap PPLH**	**56%**	**365.000.000,00**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Kota Pontianak**	**Terwujudnya Kearifan Lokal di masyarakat terhadap PPLH**	**56%**	**365.000.000,00**	
5.1	**Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 [satu] daerah**		**Persentase Terlaksananya Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya**	**100%**	**82.000.000,00**	**Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 [satu]**	**Kota Pontianak**	**Persentase Terlaksananya Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang**	**100%**	**82.000.000,00**	

			beroperasi dalam 1 [satu] daerah kabupaten/kotamempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota			**daerah**		**hanya beroperasi dalam 1 [satu] daerah kabupaten/kotamempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota**			
5.1.1	Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terakit dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP Online	50 Perusahaan	22.000.000,00	Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	Kota Pontianak	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terakit dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP Online	50 Perusahaan	22.000.000,00	
5.1.2	Pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerja bersama	40 Perusahaan	40.000.000,00	Pendaftaran perjanjian kerja sama bagi perusahaan	Kota Pontianak	Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerja bersama	40 Perusahaan	40.000.000,00	
5.1.3	Penyelenggaraan Pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	4 Laporan	20.000.000,00	Penyelenggaraan Pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	Kota Pontianak	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	4 Laporan	20.000.000,00	
5.2	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota**		Persentase Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	**100%**	**283.000.000,00**	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota**	Kota Pontianak	Persentase Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	**100%**	**283.000.000,00**	
5.2.1	Pencegahan perselisihan hubungan industrial,mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kotadi Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah perselisihan yang dicegah	10 Perkara	20.000.000,00	Pencegahan perselisihan hubungan industrial,mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kotadi Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah perselisihan yang dicegah	10 Perkara	20.000.000,00	
5.2.2	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	28 Perkara	20.000.000,00	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	28 Perkara	20.000.000,00	

5.2.3	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha,federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non Afiliasi	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	5 Asosiasi & Serikat Pekerja	14.000.000,00	Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha,federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non Afiliasi	Kota Pontianak	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	5 Asosiasi & Serikat Pekerja	14.000.000,00	
5.2.4	Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah Kabupaten /Kota	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	204.000.000,00	Pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 Lembaga	204.000.000,00	
5.2.5	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Kota Pontianak, semua kecamatan, semua kelurahan	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	3000 Orang	25.000.000,00	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Kota Pontianak	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	3000 Orang	25.000.000,00	

Jumlah Program : 5

Jumlah Kegiatan : 18

Jumlah Sub Kegiatan : 48

Jumlah anggaran hasil dari analisis kebutuhan : Rp. 5.655.235.000

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Perubaahn Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
2. Mempedomani RPD Kota Pontianak Tahun 2024 serta Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pontianak, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Pontianak.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak melakukan beberapa penyesuaian dalam penyusunan rencana kerja perubahan, dengan memperhatikan nomenklatur sub-kegiatan dengan indikator kinerjanya. Rencana Kerja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak tahun 2025 mencangkup rencana kerja sebanyak 5 program, 18 kegiatan, dan 48 sub-kegiatan. Terkait pendanaan, Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak melakukan penyesuaian terkait sumber dana, menjadi Dana Bagi Hasil, terkecuali untuk sub-kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, gaji ASN bersumber pada Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, sedangkan tunjangan ASN bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Total pagu anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp. 6.345.326.237,-. Adapun rincian Rumusan Rancana Program Dan Kegiatan Tahun 2025 Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Pontianak tabel IV.I berikut:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS TENAGA KERJA KOTA PONTIANAK

TAHUN 2025

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	DINAS TENAGA KERJA				5.975.473.000,00	6.610.143.803,00	6.345.326.237,00							5.663.946.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.975.473.000,00	6.610.143.803,00	6.345.326.237,00							5.663.946.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				5.975.473.000,00	6.610.143.803,00	6.345.326.237,00							5.663.946.000,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	4.500.473.000,00	4.693.108.203,00	4.656.261.837,00							4.236.946.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	30.700.000,00	34.038.000,00	29.614.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Perangkat Daerah		16.100.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	15	4	23.200.000,00	29.614.000,00	29.614.000,00	Kota Pontianak,	Dana Bagi	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia	Terciptanya Pembangunan			8.400.000,00	DINAS TENAGA

		Daerah	Dokumen	Dokumen				Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Hasil (DBH)	(SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				KERJA
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	4.700.000,00	2.124.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			4.800.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	9 Laporan	2.800.000,00	2.300.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			2.900.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	3.779.173.000,00	3.962.149.803,00	3.969.629.200,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Perangkat Daerah		3.191.246.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	23 Orang/bula	23 Orang/bul	3.514.473.000,00	3.662.892.603,00	3.671.872.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan			2.915.946.000,00	DINAS TENAGA

		Tunjangan ASN	n	an				Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				KERJA
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	260.000.000,00	299.257.200,00	297.757.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			270.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	12 Laporan	4.700.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			5.300.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	61.200.000,00	32.680.000,00	26.500.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Perangkat Daerah		95.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	43.200.000,00	32.680.000,00	26.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga,	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing			45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

								Kel/Desa		kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	18.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	334.300.000,00	239.828.100,00	228.285.337,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Perangkat Daerah		404.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	4.300.000,00	12.006.600,00	12.006.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			4.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	65.000.000,00	53.869.300,00	74.426.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai			74.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

								Kel/Desa		penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	40.000.000,00	23.038.200,00	23.038.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			52.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	62.000.000,00	33.830.000,00	33.830.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			77.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	38.000.000,00	37.084.000,00	37.084.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			72.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	125.000.000,00	80.000.000,00	47.900.237,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan			125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

										perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	111.000.000,00	261.315.600,00	255.036.600,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	-		268.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Pengadaan Mebel														
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	33.000.000,00	89.979.900,00	87.349.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	40.000.000,00	160.814.300,00	157.165.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	38.000.000,00	10.521.400,00	10.521.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			68.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

										penyandang disabilitas.					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	100 Persen	100 Persen	78.600.000,00	24.223.700,00	20.323.700,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Perangkat Daerah		103.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.600.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			3.200.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	52.000.000,00	15.600.000,00	9.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			56.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	2.623.700,00	5.323.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			44.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	105.500.000,00	138.873.000,00	126.873.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Perangkat Daerah		159.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	38.000.000,00	38.750.000,00	26.750.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			52.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Pemeliharaan Mebel														
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	14.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	22 Unit	32.000.000,00	55.280.000,00	55.280.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			56.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	21.500.000,00	44.843.000,00	44.843.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			36.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67 Persen	67 Persen	28.000.000,00	28.000.000,00	16.640.000,00							38.000.000,00	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	100 Persen	100 Persen	28.000.000,00	28.000.000,00	16.640.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat Kota Pontianak		38.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro														
		Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	30 Orang	30 Orang	28.000.000,00	28.000.000,00	16.640.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			38.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-	-	692.000.000,00	742.000.000,00	670.566.000,00							597.000.000,00	

	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	100 Persen	100 Persen	595.000.000,00	645.000.000,00	636.166.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat Kota Pontianak		478.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	270 Orang	270 Orang	575.000.000,00	625.000.000,00	622.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			450.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja														
		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	42 Lembaga	42 Lembaga	20.000.000,00	20.000.000,00	14.066.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			28.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	50.000.000,00	34.400.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat Kota Pontianak		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														

		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	65 Lembaga	65 Lembaga	50.000.000,00	50.000.000,00	34.400.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	-	-	-	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat Kota Pontianak		22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi														
		Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	15 Perizinan	15 Perizinan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Terlaksananya Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	100 Persen	100 Persen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat Kota Pontianak		25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil														

		Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	15 Perusahaan	15 Perusahaan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	56 Persen	56 Persen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat Kota Pontianak		22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														
		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-	-	390.000.000,00	340.953.800,00	279.955.000,00							391.000.000,00	
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pelayanan Antar Kerja Di Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	188.000.000,00	136.000.000,00	96.955.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat Kota Pontianak		139.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja														

		Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	3 Orang	3 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			32.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Pelayanan antar Kerja														
		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	300 Orang	300 Orang	20.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			26.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	170 Orang	170 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	18.850.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			36.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan														
		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	15 Orang	15 Orang	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			19.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Perluasan Kesempatan Kerja														

		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	130 Orang	130 Orang	18.000.000,00	18.000.000,00	10.105.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			26.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100 Persen	100 Persen	173.000.000,00	172.953.800,00	151.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat Kota Pontianak		204.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														
		Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	600 Orang	600 Orang	22.000.000,00	21.953.800,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			26.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Job Fair/Bursa Kerja														
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	1000 Orang	1000 Orang	151.000.000,00	151.000.000,00	151.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			178.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Perlindungan PMI(Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	29.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat Kota Pontianak		48.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														
		Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	20 Orang	20 Orang	15.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			32.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan														
		Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	12 Orang	12 Orang	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			16.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	-	365.000.000,00	806.081.800,00	721.903.400,00							401.000.000,00	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah	-	-	-	82.000.000,00	114.801.600,00	96.132.400,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat Kota Pontianak		84.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

	Kabupaten/Kota														
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan														
		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	50 Perusahaan	30 Perusahaan	22.000.000,00	30.581.400,00	27.246.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan														
		Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	40 Perusahaan	10 Perusahaan	40.000.000,00	24.774.200,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			42.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 Laporan	5 Laporan	20.000.000,00	59.446.000,00	68.886.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananaya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	283.000.000,00	691.280.200,00	625.771.000			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat Kota Pontianak		317.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara	28 Perkara	20.000.000,00	47.057.000,00	32.057.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	28 Perkara	28 Perkara	20.000.000,00	44.945.200,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			36.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi														
		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	5 Asosiasi dan Serikat Pekerja	5 Asosiasi dan Serikat Pekerja	14.000.000,00	5.564.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			16.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	11 Lembaga	204.000.000,00	146.982.000,00	146.982.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			215.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	3000 Orang	6230 Orang	25.000.000,00	446.732.000,00	446.732.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			28.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	J U M L A H				**5.975.473.000,00**	**6.610.143.803,00**	**6.345.326.237,00**							**5.663.946.000,00**	

Jumlah Program : 5 Program

Jumlah Kegiatan : 18 Kegiatan

Jumlah Sub Kegiatan : 48 Sub kegiatan

Jumlah anggaran : Rp. 6.345.326.237,-

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rancangan Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak tahun 2025 mengacu pada RPJMD Perubahan Kota Pontianak Tahun 2024-2026 dan rencana strategis Dinas Tenaga Kerja Pontianak tahun 2024-2026 serta Indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi batu loncatan pada tujuan dan sasaran RPJMD. Maka dari itu, setiap Perangkat Daerah harus menetapkan parameter kinerja tertentu untuk mengukur pencapaian kinerjanya, yang jauh lebih penting, indikator kinerja merupakan alat ukur suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah. Informasi kinerja ini mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Rancangan Renja Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak Tahun 2025 selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 berfungsi sebagai syarat peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak. Dokumen Renja Perubahan ini selanjutnya akan menjadi patokan bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Pontianak di dalam pelaksanaan kinerja dan pembangunan satu tahun ke depan.

Pontianak, 20 Juni 2025
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Pontianak,

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS TENAGA KERJA

ISMAIL ABDURRAHMAN, SH. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670704 199403 1 019

RENJA PERUBAHAN

TAHUN 2025

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlinguan Anak Kota Pontianak

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas berkat rahmat-Nya, Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKota Pontianak Tahun 2025 disusun.

Renja Perubahan Tahun Anggaran 2025 ini juga masih menyimpan banyak kekurangan. Oleh karena itu, walaupun rencana yang Kami susun dalam buku ini belum seluruhnya memenuhi keinginan atau kebutuhan sebagaimana yang diharapkan, namun dapat menjadi panduan dan bermanfaat khususnya bagi para pengelola dan pelaksana program di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKota Pontianak, serta mitra terkait di luar sektor Instansi dan siapa saja yang memiliki perhatian dan kepentingan terhadap program-program DP2KBP3A termasuk masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan swasta dalam meningkatkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keluarga, serta memfasilitasi menanggulangi masalah sosial masyarakat.

Akhirnya, terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi sejak awal proses penyusunan Buku Renja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 ini hingga selesai.

Pontianak, 24 Juni 2025

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak,

dr. Rifka, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19740303 200212 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksut dan Tujuan 4

1.4. Sistematika 5

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025 ..... **6**

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 5

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN **31**

3.1. Rencana Kerja 31

3.2. Pendanaan 74

BAB IV PENUTUP 76

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Perubahan 2025 ini sebagai lanjutan atas Renja Murni tahun 2025 baik pada nama program maupun kegiatan, disesuaikan pada togas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak. Perencanaan Pembangunan Tahunan diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja perubahan Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja perubahan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD) , RKPD merupakan Dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 tahun sebagai penjabaran dari RPD Kota Pontianak Tahun 2024 - 2026 dan mengacu pada RKPD Kota Pontianak Tahun 2024 memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah,

Rencana Kerja perubahan dan penganggarannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, sedangkan Rencana Kerja perubahan SKPD merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun , disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 yang mengacu pada RKPD Perubahan Kota Pontianak Tahun 2025.

Sebagai salah satu perangkat daerah, DP2KBP3A Kota Pontianak berkewajiban untuk menyiapkan Renja sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu 1 tahun sebagai aplikasi dari pelaksanaan pembangunan 3 tahun (Renstra) SKPD. DP2KBP3A Kota Pontianak pada tahun 2025 pada prinsipnya tertuju pada upaya untuk mewujudkan Sasaran Daerah yang menjadi Tujuan OPD yaitu :

1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
2. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk
3. Meningkatnya Peran Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Menurunnya Kemiskinan

Pada akhirnya Rencana Kerja perubahan DP2KBP3A Kota Pontianak pada tahun 2025 diharapkan mampu menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evluasi pelaksanaan rencana pembangunan Tahun 2025. Selanjutnya Renja Perubahan PD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan OPD dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kota Pontianak tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun 2025 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
17. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
19. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 118).

20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 35).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 10).
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksut dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) DP2KBP3A Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan maksud menyiapkan dokumen sinkronisasi dengan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang disusun oleh DP2KBP3A Kota Pontianak dan menjadi pedoman bagi DP2KBP3A untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) DP2KBP3A Kota Pontianak Tahun 2025 adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RECANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan I Tahun 2025

Evaluasi dan analisa capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah - langkah pemecahan masalah yang diambil Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing - masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada Renja OPD tahun 2025.

Review pada Renja 2025 melihat pada capaian kinerja oucome dan output kegiatan yang sudah ditetapkan berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2025, untuk setiap sasaran Pemerintah Kota Pontianak yang ada diidentifikasikan indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan di atas, tingkat pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025 Kota Pontianak

OPD : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12=11/6*100	13
			K		K		K		K		K		K		K		K		K	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100	Persen	100	persen	95	persen		persen		persen		persen		persen	0	persen	0,00	
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	100	persen	100	persen	25	persen		persen		persen		persen	25	persen	25,00	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0,00	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0,00	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0,00	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	1	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	1	Laporan	25,00	
1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	1	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	1	Laporan	25,00	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12=11/6*100	13
			K		K		K		K		K		K		K		K		K	
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	100	Persen	100	persen Persen	25	persen Persen		persen Persen		persen Persen		persen Persen	25	persen Persen	25,00	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	Orang/bulan	32	Orang/bulan	34	Orang/bulan	31	Orang/bulan		Orang/bulan		Orang/bulan		Orang/bulan	31	Orang/bulan	91,18	
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0,00	
1.2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0,00	
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Laporan	1	Laporan	1	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	0	Laporan	0,00	
1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36	Laporan	7	Laporan	12	Laporan	3	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	3	Laporan	25,00	
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100	Persen			100	persen Persen	25	persen Persen		persen Persen		persen Persen		persen Persen	25	persen Persen	25,00	
1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6	dokumen	0		2	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0,00	
1.3.2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	laporan	0		1	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	0	Laporan	0,00	
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	Persen	100	persen	100	persen Persen	25	persen Persen		persen Persen		persen Persen		persen Persen	25	persen Persen	25,00	
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12	dokumen/laporan	2	Paket	4	Paket		Paket		Paket		Paket		Paket	0	Paket	0,00	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12=11/6*100	13
			K		K		K		K		K		K		K		K		K	
1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	orang	2	Orang	2	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang	0	Orang	0,00	
1.4.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	180	orang	60	Orang	60	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang	0	Orang	0,00	
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100	Persen	100	persen	100	persen Persen	25	persen Persen		persen Persen		persen Persen		persen Persen	25	persen Persen	25,00	
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	4	Paket	4	Paket		Paket		Paket		Paket		Paket	0	Paket	0,00	
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	54	Paket	18	Paket	18	Paket	5	Paket		Paket		Paket		Paket	5	Paket	27,78	
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24	Paket	8	Paket	8	Paket	2	Paket		Paket		Paket		Paket	2	Paket	25,00	
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	48	Paket	16	Paket	16	Paket	4	Paket		Paket		Paket		Paket	4	Paket	25,00	
1.5.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	96	Paket	32	Paket	32	Paket	8	Paket		Paket		Paket		Paket	8	Paket	25,00	
1.5.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	108	Dokumen	36	Dokumen	36	Dokumen	9	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	9	Dokumen	25,00	
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	1	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	1	Laporan	25,00	
1.5.8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0		0		12	Dokumen	3	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	3	Dokumen	25,00	
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persen	100	persen	100	persen Persen	25	persen Persen		persen Persen		persen Persen		persen Persen	25	persen Persen	25,00	
1.6.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	unit	4	Unit	4	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	0	Unit	0,00	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12=11/6*100	13
			K		K		K		K		K		K		K		K		K	
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persen	100	persen	100	persen Persen		persen Persen		persen Persen		persen Persen		persen Persen	0	persen Persen	0,00	
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	Laporan	1	Laporan	1	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	0	Laporan	0,00	
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan	1	Laporan	1	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	0	Laporan	0,00	
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	Laporan	1	Laporan	1	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	0	Laporan	0,00	
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persen	100	persen	100	persen Persen		persen Persen		persen Persen		persen Persen		persen Persen	0	persen Persen	0,00	
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51	Unit	48	Unit	51	Unit	12	Unit		Unit		Unit		Unit	12	Unit	23,53	
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45	Unit	45	Unit	45	Unit	11	Unit		Unit		Unit		Unit	11	Unit	24,44	
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0		0		7	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	0	Unit	0,00	
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	20	Persen	27,58	persen	15	Persen		Persen		Persen		Persen		Persen	0	Persen	0,00	
2.1	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah	Persentase OPD yang memiliki perencanaan penganggaran responsif gender (pprg) dan anggaran responsif gender (ARG)	100	Persen	65	persen	100	persen		persen		persen		persen		persen	0	persen	0,00	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12=11/6*100	13
			K		K		K		K		K		K		K		K		K	
	Kewenangan Kabupaten/Kota																			
2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	0				2	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0,00	
2.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	6	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	2	Dokumen	100,00	
2.1.3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	25	Lembaga	30	Perangkat Daerah	35	Orang	35	Orang		Orang		Orang		Orang	35	Orang	100,00	
2.2	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	0		0		100	persen		persen		persen		persen		persen	0	persen	0,00	
2.2.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	0		0		2	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0,00	
2.3	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan lembaga	100	Persen	100	Persen	100	persen		persen		persen		persen		persen	0	persen	0,00	
2.3.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang	0				30	Lembaga		Lembaga		Lembaga		Lembaga		Lembaga	0	Lembaga	0,00	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12=11/6*100	13
			K		K		K		K		K		K		K		K		K	
	Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Mendapat Advokasi dan Pendampingan																		
2.3.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	60	orang			30	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang	0	Orang	0,00	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	7,1	Persen	4,097	Persentase	7,2	, Persentase		, Persentase		, Persentase		, Persentase		, Persentase	0	, Persentase	200,00	
3.1	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pendampingan perempuan korban kekerasan	0				100	persen		persen		persen		persen		persen	0	persen	0,00	
3.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3				1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0,00	
3.1.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	0				30	Perangkat Daerah		Perangkat Daerah		Perangkat Daerah		Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	0	Perangkat Daerah	0,00	
3.2	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan	750				100	persen		persen		persen		persen		persen	0	persen	0,00	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12=11/6*100	13
			K		K		K		K		K		K		K		K		K	
3.2.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	0				40	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang	0	Orang	0,00	
3.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0				20	Layanan		Layanan		Layanan		Layanan		Layanan	0	Layanan	0,00	
3.3	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan	100	Persen	100	persen	100	persen		persen		persen		persen		persen	0	persen	0,00	
3.3.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0				1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0,00	
3.3.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	90	Orang	90	Orang	30	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang	0	Orang	0,00	
3.3.3	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0,00	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12=11/6*100	13
			K		K		K		K		K		K		K		K		K	
4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase keterlibatan stackholder dalam pemutakhiran data Gender dan Anak	100	Persen	100	Persentase	100	Persentase		Persentase		Persentase		Persentase		Persentase	0	Persentase	0,00	
4.1	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Gender dan Anak yang Update	100	Persen	2	persen	100	persen		persen		persen		persen		persen	0	persen	0,00	
4.1.1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	6	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0,00	
5	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Forum Anak Daerah Aktif	100	Persen	100	Persentase	100	Persentase		Persentase		Persentase		Persentase		Persentase	0	Persentase	0,00	
5.1	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Hak Anak Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha	100	Persen	100	persen	100	persen		persen		persen		persen		persen	0	persen	0,00	
5.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30	Organisasi	30	Organisasi	30	Organisasi		Organisasi		Organisasi		Organisasi		Organisasi	0	Organisasi	0,00	
5.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			0		1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0,00	
5.2	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan	Persentase Lembaga Penyedia Layanan	85	Persen	0	persen	85	persen		persen		persen		persen		persen	0	persen	0,00	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12=11/6*100	13
			K		K		K		K		K		K		K		K		K	
	Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga																		
5.2.1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	750	orang	59		250	Orang	8	Orang		Orang		Orang		Orang	8	Orang	3,20	
5.2.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			0		2	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0,00	
5.2.3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			0		2	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0,00	
5.2.4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			0		1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0,00	
6	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Pendampingan	100	Persen	100	persen	100	persen		persen		persen		persen		persen	0	persen	200,00	
6.1	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pencegahan kekerasan terhadap Anak	85	Persen	100	persen	85	persen		persen		persen		persen		persen	0	persen	0,00	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12=11/6*100	13
			K		K		K		K		K		K		K		K		K	
6.1.1	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	35	Perangkat Daerah			35	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang	0	Orang	0,00	
6.2	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak yang mendapatkan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi	85	Persen	100	persen	100	persen		persen		persen		persen		persen	0	persen	0,00	
6.2.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	750	Orang	68	Orang	250	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang	0	Orang	0,00	
6.2.2	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	750	Layanan	68	Orang	250	Layanan	8	Layanan		Layanan		Layanan		Layanan	8	Layanan	3,20	
6.3	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga	100	Persen	0	0	95	persen		persen		persen		persen		persen	0	persen	0,00	
6.3.1	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar			0		4	Lembaga		Lembaga		Lembaga		Lembaga		Lembaga	0	Lembaga	0,00	
6.3.2	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK			0		2	Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan	0	Kegiatan	0,00	
6.3.3	Peningkatan kapasitas SDM	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan	6	Orang	0		2	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang	0	Orang	0,00	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12=11/6*100	13
			K		K		K		K		K		K		K		K		K	
	lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK																		
6.3.4	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak			0		2	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0,00	
7	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan dengan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100	Persen	100	persen	100	persen		persen		persen		persen		persen	0	persen	0,00	
7.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan yang mendapatkan Pembinaan dalam rangka Lomba Kelurahan	100	Persen	100	persen	100	persen		persen		persen		persen		persen	0	persen	0,00	
7.1.1	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	6	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0,00	
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Peresentase lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan penguatan/pemberdayaan	75	Persen	35	Persentase	70	Persentase		Persentase		Persentase		Persentase		Persentase	0	Persentase	0,00	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12=11/6*100	13
			K		K		K		K		K		K		K		K		K	
8.1	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Kelurahan Tingkat Kota	70	Persen	35	persen	60	persen		persen		persen		persen		persen	0	persen	0,00	
8.1.1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0,00	
8.1.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	36	Lembaga	36	Lembaga	36	Lembaga		Lembaga		Lembaga		Lembaga		Lembaga	0	Lembaga	0,00	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12=11/6*100	13
			K		K		K		K		K		K		K		K		K	
8.1.3	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	36	Unit	25	Unit	36	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	0	Unit	0,00	
8.1.4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			0		2	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0,00	
8.1.5	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			2	Laporan	2	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	0	Laporan	0,00	
8.1.6	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	6	Laporan	0		1	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	0	Laporan	0,00	
8.1.7	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	100,00	
9	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	15	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	20	Kelahiran /0 WUS 5-9	17	Kelahiran / WUS -		Kelahiran / WUS -		Kelahiran / WUS -		Kelahiran / WUS -		Kelahiran / WUS -	0	Kelahiran / WUS -	200,00	
9.1	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	3	kelompok	3	kelompok	3	kelompok		kelompok		kelompok		kelompok		kelompok	0	kelompok	0,00	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12=11/6*100	13
			K		K		K		K		K		K		K		K		K	
	Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk																			
9.1.1	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	3	Dokumen	0		1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0,00	
9.1.2	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan			0		30	Organisasi		Organisasi		Organisasi		Organisasi		Organisasi	0	Organisasi	0,00	
9.1.3	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga			0		1	Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan	0	Kegiatan	0,00	
9.1.4	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12	Laporan	4	Laporan	4	Kegiatan	1	Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan	1	Kegiatan	25,00	
9.2	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100	Persen	85	persen	100	persen		persen		persen		persen		persen	0	persen	0,00	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12=11/6*100	13
			K		K		K		K		K		K		K		K		K	
9.2.1	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya			0		1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0,00	
9.2.2	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12	dokumen	1	Laporan	4	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	0	Laporan	0,00	
9.2.3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	25,00	
9.2.4	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	9	Unit	1	Unit	2	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	0	Unit	0,00	
9.2.5	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana			0		2	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	0	Laporan	0,00	
9.2.6	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0,00	
10	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persentase Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan	70,85	Persen	11,35	Persen	70,8	Persen		Persen		Persen		Persen		Persen	0	Persen	0,00	
		Persentase Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan	72	Persen	69,68	Persen	71,8	Persen		Persen		Persen		Persen		Persen	0	Persen	0,00	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12=11/6*100	13
			K		K		K		K		K		K		K		K		K	
10.1	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	100	Persen	100	Persen	100	Persen		Persen		Persen		Persen		Persen	0	Persen	0,00	
10.1.1	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	12	Laporan	4	Laporan	4	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	0	Laporan	0,00	
10.1.2	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	1	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	1	Laporan	25,00	
10.1.3	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12	Laporan	4	Laporan	4	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	0	Laporan	0,00	
10.1.4	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,	9	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0,00	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12=11/6*100	13
			K		K		K		K		K		K		K		K		K	
	dan Elektronik serta Media Luar Ruang	dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
10.1.5	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	6	Dokumen	0		2	Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	0,00	
10.1.6	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	16	organisasi	16	Organisasi	16	Organisasi		Organisasi		Organisasi		Organisasi		Organisasi	0	Organisasi	0,00	
10.2	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase pelaksanaan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100	Persen	100	persen	100	persen		persen		persen		persen		persen	0	persen	0,00	
10.2.1	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	580	orang	500	Orang	580	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang	0	Orang	0,00	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12=11/6*100	13
			K		K		K		K		K		K		K		K		K	
10.3	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan	100	Persen	100	persen	100	persen		persen		persen		persen		persen	0	persen	0,00	
10.3.1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	Laporan	3	Laporan	4	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	0	Laporan	0,00	
10.3.2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2118	Orang	1754	Orang	706	Orang	387	Orang		Orang		Orang		Orang	387	Orang	54,82	
10.3.3	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	15	unit	0		5	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	0	Unit	0,00	
10.3.4	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	6	Laporan	2	Laporan	2	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	0	Laporan	0,00	
10.3.5	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan	90	Orang	90	Orang	90	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang	0	Orang	0,00	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12=11/6*100	13
				K		K		K		K		K		K		K		K	K	
	Kesehatan Reproduksi	Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi																		
10.4	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase pelaksanaan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100	Persen	100	persen	100	persen		persen		persen		persen		persen	0	persen	0,00	
10.4.1	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12	Kampung	7	Kampung	11	Kampung		Kampung		Kampung		Kampung		Kampung	0	Kampung	0,00	
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	23,1	Tahun	23,25	Tahun Indeks (skala 0-)	22,56	Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun	0	Tahun	0,00	
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kota Pontianak	63	Indeks (skala 0-100)	62,66		62	Indeks (skala -)		Indeks (skala -)		Indeks (skala -)		Indeks (skala -)		Indeks (skala -)	0	Indeks (skala -)	0,00	
11.1	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Ketahaan dan Kesejahteraan Keluara yang aktif	100	Persen	100	persen	100	persen		persen Persen		persen Persen		persen Persen		persen Persen	0	persen Persen	0,00	
		Persentase Kelompok TPK yang aktif dalam melakukan pendampingan kepada keluarga beresiko stunting	100	Persen	40	persen	100	persen											0,00	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12=11/6*100	13
			K		K		K		K		K		K		K		K		K	
11.1.1	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			0		2	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	0	Laporan	0,00	
11.1.2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	45	unit	15	Unit	5	Unit		Unit		Unit		Unit		Unit	0	Unit	0,00	
11.1.3	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	150	kader	250	Orang	50	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang	0	Orang	0,00	

11.1.4	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)			0		2	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	0	Laporan	0,00	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12=11/6*100	13
			K		K		K		K		K		K		K		K		K	
11.1.5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	273	orang	0		270	Orang		Orang		Orang		Orang		Orang	0	Orang	0,00	
11.1.6	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk			0		10	Kelompok		Kelompok		Kelompok		Kelompok		Kelompok	0	Kelompok	0,00	
11.2	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase keterlibatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			75	persen	100	persen		persen		persen		persen		persen	0	persen	0,00	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									I		II		III		IV					
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11 = 7+8+9+10		12=11/6*100	13
			K		K		K		K		K		K		K		K		K	
11.2.1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			0		14	Organisasi		Organisasi		Organisasi		Organisasi		Organisasi	0	Organisasi	0,00	
11.2.2	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja			0		2	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	0	Laporan	0,00	
Rata-rata capaian kinerja (%) Sub Kegiatan																			**4,84**	
Predikat kinerja																			**Sangat Rendah**	
Rata-rata capaian kinerja (%) Program																			**46,15**	
Predikat kinerja																			**Sangat Rendah**	

1. Realisasi Kinerja program/kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
   a) Realisasi Kinerja Program

      Realisasi kinerja program sampai dengan Realisasi Renja Triwulan I belum dapat disajikan, karena belum tersedianya data atau belum dapat diperoleh data untuk mengukur gagal atau berhasilnya kinerja program. Penyajian data kinerja program dapat ditampilkan pada triwulan IV pelaksanaan Renja tahun 2025, dikarenakan data disajikan oleh instansi lain. Dari hasil rekapan pada tabel diatas, sampai dengan triwulan ke 1, rata-rata capaian kinerja sebesar 46,15% dengan predikat sangat rendah.
   b) Realisasi Kinerja Kegiatan

      Dari 27 Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025, sampai dengan realiasi Renja Triwulan I, hanya 12 Indikator Kinerja Kegian yang sudah dapat dilihat realisasi kinerjanya. Belum semua dapat disajikan capaian kinerja kegiatan, karena belum semua data tersedia. Dari hasi rekapan pada tabel diatas, sampai dengan triwulan ke 1.
   c) Realisasi Kinerja Sub Kegiatan

      Realisasi indikator kinerja sub kegiatan sampai dengan triwulan II masih dalam progres pelaksanaan. Ada beberapa sub kegiatan yang telah dilaksanakan dan ada beberapa sub kegiatan yang belum dilaksanakan, karena pelaksanaan sub kegiatan sesuai dengan jadwal waktu yang telah disusun oleh masing – masing Bidang. Realisasi kinerja sub kegiatan dapat dilihat pada tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan I Tahun 2025 Kota Pontianak diatas, rata-rata capaian kinerja Sub Kegiatan sebesar 4,84% dengan predikat sangat rendah.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Kerja

Dalam mendukung Tujan dan Sasaran Kota Pontianak, diperlukan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pada Renja Perubahan tahun 2025 tidak terlalu banyak anggaran yang berubah, perubahan besar terlihat pada Belanja Tidak Langsung yaitu pada belanja Gaji dan Tunjangan ASN, hal ini dikarenakan ada beberapa Pegawai yang telah memasuki waktu Purna Tugas, sehingga mengurangi pagu belanja tidak langsung (belanja pegawai). Sementara pada Belanja Langsung terutama pada Belanja Perjalanan Dinas, terjadi penambahan yang tidak terlalu signifikan. Penyesuaian Pagu Belanja OPD ini sebagai tindak lanjut dari surat Edaran Walikota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Adapun Rencana Kerja Perubahan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), yang telah disusun dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1

REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2025

KOTA : Pontianak
OPD : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				15.049.479.000,00	13.789.024.644,00	13.229.040.966,00							14.179.760.693,62
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				15.049.479.000,00	13.789.024.644,00	13.229.040.966,00							14.179.760.693,62
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				8.699.703.577,50	8.969.641.644,00	8.533.392.900,00							7.067.860.827,50
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen	95 Persen	7.236.464.000,00	7.626.973.244,00	7.404.515.200,00							5.639.731.250,00
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	87.765.000,00	107.508.000,00	107.508.000,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		76.403.250,00
2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	36.315.000,00	36.858.000,00	36.858.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia			22.380.750,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												Semua Kel/Desa			Yang Berkesetaraan			
2	08	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD													
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	11.550.000,00	30.750.000,00	33.240.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			12.127.500,00
2	08	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD													
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	11.550.000,00	11.550.000,00	10.006.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			12.127.500,00
2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	16.800.000,00	16.800.000,00	14.386.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			17.640.000,00
2	08	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	11.550.000,00	11.550.000,00	9.545.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia			12.127.500,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												Semua Kel/Desa			Yang Berkesetaraan			
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	100 persen	5.784.379.000,00	5.969.241.644,00	5.969.241.644,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		4.330.292.000,00
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	5.530.279.000,00	5.731.651.644,00	5.731.652.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			4.063.487.000,00
2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	210.000.000,00	193.490.000,00	189.769.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			220.500.000,00
2	08	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	21.000.000,00	21.000.000,00	14.400.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang			22.050.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												Semua Kel/Desa			Berkesetaraan			
2	08	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	11.550.000,00	11.550.000,00	9.240.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			12.127.500,00
2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	11.550.000,00	11.550.000,00	9.240.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			12.127.500,00
2	08	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 persen	100 persen	10.500.000,00	0,00	0,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		11.025.000,00
2	08	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD													
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	5.250.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			5.512.500,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	0 8	0 1	2.0 3	000 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD													
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.250.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			5.512.500,00
2	0 8	0 1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 persen	57.330.000,00	115.330.000,00	115.330.000,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		60.196.500,00
2	0 8	0 1	2.0 5	000 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	4 Paket	25.830.000,00	56.580.000,00	56.580.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			27.121.500,00
2	0 8	0 1	2.0 5	000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	2 Orang	15.750.000,00	43.000.000,00	13.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			16.537.500,00
2	0 8	0 1	2.0 5	001 0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	60 Orang	15.750.000,00	15.750.000,00	5.836.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			16.537.500,00
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 persen	100 persen	285.810.000,00	280.236.300,00	280.236.300,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		300.100.500,00
2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	5.880.000,00	5.081.000,00	5.081.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			6.174.000,00
2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	18 Paket	43.890.000,00	54.119.300,00	36.904.150,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			46.084.500,00
2	08	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	10.605.000,00	10.605.000,00	6.190.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			11.135.250,00
2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	25.725.000,00	28.954.000,00	16.754.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			27.011.250,00
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	32 Paket	32 Paket	30.975.000,00	30.975.000,00	9.614.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			32.523.750,00
2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	36 Dokumen	5.985.000,00	5.985.000,00	5.985.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			6.284.250,00
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	157.500.000,00	144.517.000,00	77.170.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			165.375.000,00
2	08	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD													
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	5.250.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			5.512.500,00
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	47.250.000,00	152.962.000,00	152.962.000,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		49.612.500,00
2	08	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	4 Unit	47.250.000,00	152.962.000,00	155.681.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			49.612.500,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	580.950.000,00	641.941.300,00	641.941.300,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		483.997.500,00
2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			6.615.000,00
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	146.775.000,00	122.243.620,00	155.724.510,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			28.113.750,00
2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	427.875.000,00	513.397.680,00	514.584.240,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			449.268.750,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	100 persen	382.480.000,00	359.754.000,00	359.754.000,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		328.104.000,00
2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	51 Unit	249.900.000,00	227.184.000,00	169.203.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			262.395.000,00
2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	45 Unit	62.580.000,00	62.570.000,00	62.570.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			65.709.000,00
2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	49.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	15 Persen	15 Persen	184.810.000,00	102.840.000,00	71.710.000,00							169.700.000,00
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang memiliki perencanaan penganggaran responsif gender (pprg) dan anggaran responsif gender (ARG)	100 persen	100 persen	144.700.000,00	68.400.000,00	68.400.000,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		144.700.000,00
2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG													
						Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	109.700.000,00	27.143.000,00	6.863.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			109.700.000,00
2	08	02	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	13.915.000,00	13.915.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			10.000.000,00
2	08	02	2.01	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	25 Orang	35 Orang	25.000.000,00	27.342.000,00	27.342.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			25.000.000,00
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	100 persen	100 persen	10.000.000,00	23.590.000,00	23.590.000,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		10.000.000,00
2	08	02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi													
						Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	23.590.000,00	23.590.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			10.000.000,00
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan lembaga	100 persen	100 persen	30.110.000,00	10.850.000,00	10.850.000,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		15.000.000,00
2	08	02	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	20 Lembaga	0 Lembaga	15.110.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00
2	08	02	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	20 Orang	0 Orang	15.000.000,00	10.850.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			15.000.000,00
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	7,2 Persentase	7,2 Persentase	183.755.100,00	148.212.200,00	30.728.000,00							173.755.100,00
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pendampingan perempuan korban kekerasan	100 persen	100 persen	25.755.100,00	109.592.200,00	109.592.200,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		15.755.100,00
2	08	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota													
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	17.877.550,00	109.592.200,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			7.877.550,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	08	03	2.01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	0 Perangkat Daerah	7.877.550,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			7.877.550,00
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan	100 persen	100 persen	23.000.000,00	13.040.000,00	13.040.000,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		23.000.000,00
2	08	03	2.02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	20 Orang	40 Orang	10.000.000,00	13.040.000,00	13.040.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			10.000.000,00
2	08	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Layanan	0 Layanan	13.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			13.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan	100 persen	100 persen	135.000.000,00	25.580.000,00	25.580.000,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		135.000.000,00
2	08	03	2.03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	11.260.000,00	10.528.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			10.000.000,00
2	08	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	30 Orang	30 Orang	100.000.000,00	7.160.000,00	7.160.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			100.000.000,00
2	08	03	2.03	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	25.000.000,00	7.160.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			25.000.000,00
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase keterlibatan stackholder dalam pemutakhiran data Gender dan Anak	100 Persentase	100 Persentase	35.000.000,00	11.130.000,00	11.130.000,00							35.000.000,00
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Gender dan Anak yang Update	100 persen	100 persen	35.000.000,00	11.130.000,00	11.130.000,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		35.000.000,00
2	08	05	2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	11.130.000,00	11.130.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			35.000.000,00
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Forum Anak Daerah Aktif	100 Persentase	100 Persentase	188.693.000,00	237.186.600,00	226.360.100,00							188.693.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Hak Anak Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha	100 persen	100 persen	115.000.000,00	163.015.100,00	163.015.100,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		115.000.000,00
2	08	06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30 Organisasi	30 Organisasi	100.000.000,00	148.015.500,00	148.015.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			100.000.000,00
2	08	06	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	14.999.600,00	14.999.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			15.000.000,00
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga	85 persen	85 persen	73.693.000,00	74.171.500,00	74.171.500,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		73.693.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					Kewenangan Kabupaten/Kota													
2	08	06	2.02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota													
						Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	250 Orang	250 Orang	30.000.000,00	40.479.000,00	40.479.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			30.000.000,00
2	08	06	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	22.866.200,00	22.866.000,00	22.866.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			22.866.200,00
2	08	06	2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
						Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			10.000.000,00
2	08	06	2.02	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	10.826.800,00	10.826.500,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			10.826.800,00
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Pendampingan	100 persen	100 persen	870.981.477,50	843.299.600,00	788.949.600,00							860.981.477,50
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pencegahan kekerasan terhadap Anak	85 persen	85 persen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		10.000.000,00
2	08	07	2.01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA													
						Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	35 Orang	0 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			10.000.000,00
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak yang mendapatkan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi	100 persen	100 persen	754.504.000,00	770.012.600,00	770.012.600,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		754.504.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	08	07	2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota													
						Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	250 Orang	250 Orang	500.000.000,00	519.300.000,00	519.300.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			500.000.000,00
2	08	07	2.02	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK													
						Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	250 Layanan	250 Layanan	254.504.000,00	250.712.600,00	206.362.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			254.504.000,00
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Penguatan dan Pengembangan Lembaga	95 persen	95 persen	106.477.477,50	63.287.000,00	63.287.000,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		96.477.477,50
2	08	07	2.03	0004	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar	4 Lembaga	0 Lembaga	5.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			5.000.000,00
2	08	07	2.03	0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota													
						Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	2 Kegiatan	2 Kegiatan	84.596.000,00	56.413.000,00	56.413.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			74.596.000,00
2	08	07	2.03	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/													
						Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	2 Orang	2 Orang	6.881.477,50	6.874.000,00	6.874.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			6.881.477,50
2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota													
						Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	2 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			10.000.000,00
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				1.777.465.550,00	1.819.245.100,00	1.726.697.950,00							1.586.588.827,50

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan dengan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100 persen	100 persen	172.974.550,00	314.071.100,00	225.421.200,00							181.623.277,50
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan yang mendapatkan Pembinaan dalam rangka Lomba Kelurahan	100 persen	100 persen	172.974.550,00	314.071.100,00	314.071.100,00			-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	-		181.623.277,50
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan													
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	2 Dokumen	172.974.550,00	314.071.100,00	225.421.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataa			181.623.277,50

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
															n Kesejahteraan			
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Peresentase lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan penguatan/pemberdayaan	70 Persentase	70 Persentase	1.604.491.000,00	1.505.174.000,00	1.501.276.750,00							1.404.965.550,00
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Kelurahan Tingkat Kota	60 persen	60 persen	1.604.491.000,00	1.505.174.000,00	1.505.174.000,00			-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	-		1.404.965.550,00
2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1 Dokumen	204.745.500,00	123.166.500,00	215.172.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			4.982.775,00
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat													
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	36 Lembaga	36 Lembaga	40.000.000,00	23.735.000,00	25.252.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			40.000.000,00
2	13	05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	36 Unit	36 Unit	4.745.500,00	9.950.000,00	7.700.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			4.982.775,00
2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa													
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	17.115.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			40.000.000,00
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	0 Laporan	90.000.000,00	13.233.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			90.000.000,00
2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat													
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	97.474.500,00	32.693.250,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			25.000.000,00
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000.000,00	1.220.500.000,00	1.220.459.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			1.200.000.000,00
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				4.572.309.872,50	3.000.137.900,00	2.968.950.116,00							5.525.311.038,62
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	17 Kelahiran/1000 WUS 15-19	17 Kelahiran/1000 WUS 15-19	240.200.000,00	339.500.000,00	299.400.000,00							225.200.000,00
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	3 kelompok	3 kelompok	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00			-	-	-		60.000.000,00
2	14	02	2.01	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0 Dokumen	15.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			0,00
2	14	02	2.01	0012	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan													
						Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	30 Organisasi	30 Organisasi	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00
2	14	02	2.01	0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga													
						Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1 Kegiatan	0 Kegiatan	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			10.000.000,00
2	14	02	2.01	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana													
						Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 Kegiatan	4 Kegiatan	25.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	100 persen	165.200.000,00	264.500.000,00	264.500.000,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		165.200.000,00
2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga													
						Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	-	4 Laporan	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00
2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga													
						Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	20.000.000,00	4.800.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			10.000.000,00
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga													
						Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	63.000.000,00	63.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			10.000.000,00
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	4 Dokumen	4 Dokumen	100.200.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			100.200.000,00
2	14	02	2.02	0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain													
						Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	2 Unit	2 Unit	25.000.000,00	24.600.000,00	24.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00
2	14	02	2.02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana													
						Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	2 Laporan	0 Laporan	10.000.000,00	14.900.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			10.000.000,00
2	14	02	2.02	0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)													
						Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	0 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	1 4	0 3			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Persentase Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan	70,80 71,80 Persentase Persen	70,80 71,80 Persentase Persen	3.341.941.872,50	1.862.593.100,00	1.906.723.716,00							4.310.811.038,62
2	1 4	0 3	2.0 1		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	100 Persen	100 Persen	989.074.550,00	806.617.000,00	806.617.000,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		826.080.000,00
2	1 4	0 3	2.0 1	000 8	Pengendalian Program KKBPK													
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	4 Laporan	0 Laporan	80.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			80.000.000,00
2	1 4	0 3	2.0 1	001 0	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana													
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 Laporan	4 Laporan	317.700.000,00	258.000.000,00	258.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			317.700.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)													
						Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	4 Laporan	4 Laporan	198.000.000,00	114.000.000,00	114.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			198.000.000,00
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang													
						Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	97.267.000,00	97.267.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			150.000.000,00
2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal													
						Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	2 Dokumen	0 Dokumen	75.400.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-			75.400.000,00
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	16 Organisasi	16 Organisasi	167.974.550,00	337.350.000,00	381.480.616,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			4.980.000,00
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase pelaksanaan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100 persen	100 persen	4.980.000,00	275.500.000,00	275.500.000,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		4.980.000,00
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)													
						Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	580 Orang	580 Orang	4.980.000,00	275.500.000,00	275.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			4.980.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan	100 persen	100 persen	1.985.387.322,50	737.276.100,00	737.276.100,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		3.117.251.038,62
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya													
						Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan	0 Laporan	43.200.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			43.200.000,00
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	706 Orang	706 Orang	556.882.000,00	686.783.000,00	686.783.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			330.714.000,00
2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	5 Unit	0 Unit	1.139.971.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			2.489.291.000,00
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya													
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 Laporan	2 Laporan	71.100.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			71.100.000,00
2	14	03	2.03	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi													
						Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	90 Orang	90 Orang	174.234.322,50	36.993.100,00	36.993.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			182.946.038,62

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	1 4	0 3	2.0 4		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase pelaksanaan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100 persen	100 persen	362.500.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		362.500.000,00
2	1 4	0 3	2.0 4	000 6	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas													
						Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	11 Kampung	11 Kampung	362.500.000,00	43.200.000,00	43.200.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			362.500.000,00
2	1 4	0 4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kota Pontianak	22,56 62 Tahun Indeks (skala 0-100)	22,56 62 Tahun Indeks (skala 0-100)	990.168.000,00	798.044.800,00	762.826.400,00							989.300.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Ketahaan dan Kesejahteraan Keluara yang aktif Persentase Kelompok TPK yang aktif dalam melakukan pendampingan kepada keluarga beresiko stunting	100 persen 100 Persen	100 persen 100 Persen	978.300.000,00	197.444.800,00	197.444.800,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		978.300.000,00
2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)													
						Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	-	4 Laporan / Dokumen	0,00	28.800.000,00	28.800.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00
2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))													
						Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00	7.312.800,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			5.000.000,00
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)													
						Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan	5 Unit	0 Unit	360.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang			360.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia									Berkesetaraan			
2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)													
						Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	50 Orang	50 Orang	15.000.000,00	133.426.400,00	133.426.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			15.000.000,00
2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)													
						Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	2 Laporan	0 Laporan	15.000.000,00	17.905.600,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			15.000.000,00
2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)													
						Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	270 Orang	270 Orang	573.300.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			573.300.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)													
						Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	10 Kelompok	0 Kelompok	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			10.000.000,00
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase keterlibatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen	100 persen	11.868.000,00	600.600.000,00	600.600.000,00			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	-		11.000.000,00
2	14	04	2.02	0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	14 Organisasi	0 Organisasi	6.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			6.000.000,00
2	14	04	2.02	0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja													
						Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	2 Laporan	0 Laporan	5.868.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			5.000.000,00
2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)													
						Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-	10 laporan	0,00	273.000.000,00	273.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00
2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)													

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	-	10 laporan	0,00	327.600.000,00	327.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			0,00	
J U M L A H					15.049.479.000,00	13.789.024.644,00	13.229.040.966,00							14.179.760.693,62	

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), dengan kriteria tipelogi A dan menjalankan urusan wajib bukan pelayanan dasar pemerintah yaitu Urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemberdayaan Masyarakat.

Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota dan tugas pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.

Kebijakan Walikota tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 78 /Bappeda/Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 535/Bappeda/Tahun 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2020-2024.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta apa yang telah diamanatkan dalam RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026 dan termuat dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pontianak, maka Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak mendukung Sasaran Daerah yang menjadi Tujuan OPD yaitu :

1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
2. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk
3. Meningkatnya Peran Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Menurunnya Kemiskinan

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas, sesuai dengan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 768 /Bappeda/Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 telah ditetapkan 4 Indikator Kinerja Utama Walikota Pontianak yang diemban oleh DP2KBP3A yaitu :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		1.1 Angka Stunting Balita	14	13	12
		a. Meningkatnya pendampingan Keluarga Beresiko Stunting oleh TPK	a.1 Cakupan Keluarga Beresiko Stunting yang Memperoleh Pendampingan	90	92	95
2	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk		2.1 Laju pertumbuhan Penduduk	0,94	0,93	0,92
		a. Menurunnya Angka Kelahiran Total	a.1 Angka kelahiran total (Total Fertility Rate /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,37	2,22	2,10
		b. Menurunnya kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi	b.1 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	9,8	8,8	7,8
3	Meningkatnya Peran Perempuan dan Perlindungan Anak		3.1 Indeks Pembangunan Gender Kota Pontianak	94,2	94,25	94,3
			3.2 Tingkat Capaian Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	Utama
		a. Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	a.1 Tingkat capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Utama	Utama	Mentor
		b. Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	b.1 Rasio anak korban kekerasan	0,05	0,04	0,02
4	Menurunnya Kemiskinan		4.1 Tingkat Kemiskinan	4,3 - 4,4	4,2 - 4,3	4,1- 4,2
		a. Meningkatnya Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan	a.1 Persentase keterlibatan lembaga Kemasyarakatan dalam program pembangunan di wilayah kelurahan	78,25	80,00	85,00

Sesuai core bisnisnya DP2KBP3A Kota Pontianak juga tentu ikut mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, baik itu dalam Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat. Arah kebijakan pemerintah pusat inipun sudah searah dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak antara lain, dalam Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024.

Dalam Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah mensinergikan program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan kebijakan pemerintah pusat, antara lain:

a. pencapaian SDG's, seperti: penanggulangan stunting, kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS, dan tuberculosis (TBC), malaria, penanggulangan kemiskinan, dan akses penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dengan uraian:
   1) Upaya percepatan penanggulangan stunting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2) Upaya percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3) Peningkatan kesejahteraan gender dan pemberdayaan perempuan mencakup:
      a) penguatan kebijakan dan regulasi;
      b) percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui penguatan kelembagaan PUG dan penguatan Perencanaan dan Penganggaran Yang Refonsif Gender (PPRG).
      c) penyusunan analisis gender yang dituangkan dalam Gender Budget Statment (GBS) sebagai dasar penyusunan kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD;
b. penurunan Angka Fertilitas Total (Total Fertility Rate) guna mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, peningkatan ketahanan keluarga termasuk ketahanan remaja serta pengendalian penduduk, dalam pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. peningkatan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO) melalui gugus tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. peningkatan pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pembentukan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
f. perlindungan perempuan dan perlindungan anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. pembentukan forum koordinasi penyelenggaraan dan kejasama pemulihan korban KDRT antara lain:

1) penyediaan tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani;
2) pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasma program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban;
3) memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.

i. pembentukan forum koordinasi perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3.2 Pendanaan

Pada tahun anggaran 2025, DP2KBP3A Kota Pontianak mengelola pagu anggaran yang mengalami tiga tahapan penting: Pagu APBD Murni**,** Refocusing (Pergeseran)**,** dan akhirnya Perubahan RKPD. Pada tahap awal, total pagu ditetapkan sebesar **Rp 13.789.024.644,00**. Namun, seiring dengan proses penyesuaian dan efisiensi anggaran, dilakukan refocusing yang menurunkan pagu menjadi **Rp 13.030.389.994,00**. Penurunan ini mencapai angka **Rp 758.634.650,00**, mencerminkan pemangkasan terhadap beberapa kegiatan prioritas lainnya.

Selanjutnya, dalam proses **Perubahan RKPD 2025**, pagu kembali mengalami penyesuaian dengan adanya tambahan alokasi dari sumber dana lain seperti Silpa dan dana transfer antar daerah. Hal ini menyebabkan pagu naik menjadi **Rp 13.229.040.966,00**, atau mengalami **kenaikan sebesar Rp 198.650.972,00** dibanding hasil refocusing sebelumnya. Tambahan ini antara lain berasal dari **Sisa DAK Non Fisik BOKB Tahun Sebelumnya sebesar Rp 104.130.616,00** dan **Tambahan Operasional Tim Posyandu sebesar Rp 94.520.000,00**.

Struktur belanja masih didominasi oleh **Gaji dan Tunjangan ASN** sebesar **Rp 5.731.651.644,00**, yang tidak berubah dari awal hingga akhir. Komponen ini meliputi gaji pokok PNS dan PPPK, tunjangan keluarga, tunjangan fungsional, hingga TPP, dan seluruhnya dibiayai melalui **Dana Alokasi Umum (DAU)**.

Sementara itu, **Belanja Earmarked (DAK Non Fisik BOKB-KB)** tetap konsisten di angka **Rp 2.500.000.000,00**. Sedangkan **Belanja Hibah dan Bantuan Sosial** juga tidak berubah sepanjang proses, dengan total **Rp 1.700.000.000,00**, yang terdiri atas hibah untuk PKK (**Rp 1.200.000.000,00**) dan hibah untuk KPAD (**Rp 500.000.000,00**), seluruhnya bersumber dari **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**.

Yang paling terdampak dari refocusing adalah komponen **Belanja Prioritas Lainnya**, yang semula dianggarkan sebesar **Rp 3.857.373.000,00**, dipotong menjadi **Rp 3.098.738.350,00** saat refocusing, atau turun sebesar **Rp 758.634.650,00**. Namun dalam Perubahan RKPD, nilainya sedikit dinaikkan kembali menjadi **Rp 3.297.388.966,00**, menunjukkan bahwa beberapa kegiatan yang sempat dipangkas akhirnya mendapat tambahan anggaran.

Secara keseluruhan, proses pengelolaan pagu ini menggambarkan dinamika perencanaan anggaran yang adaptif, dengan tetap menjaga prioritas pada belanja wajib seperti gaji ASN dan hibah strategis, sembari menyesuaikan belanja lainnya sesuai kemampuan fiskal dan kebutuhan aktual di lapangan. Rincian perubahan anggaran tahun 2025 meliputi ;

a. Sub kegiatan Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja, anggaran belanja bertambah, untuk mengakomodasi kegiatan monitoring dan evaluasi Posyandu serta pembentukan Posyandu baru yang menerapkan pendekatan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM). Posyandu dengan 6 SPM dirancang menjadi pusat pelayanan masyarakat yang menyentuh berbagai aspek dasar, tidak hanya kesehatan, tetapi juga mencakup pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban umum, dan pelayanan sosial. Dalam pelaksanaannya, Posyandu ini menjalankan layanan seperti penyuluhan gizi, imunisasi, deteksi dini stunting, edukasi sanitasi dan lingkungan bersih, hingga pendataan keluarga rentan dan pemberdayaan sosial. Penerapan ini bertujuan menjadikan Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan publik berbasis komunitas yang lebih terintegrasi dan responsif, khususnya untuk keluarga berisiko stunting dan pemenuhan hak dasar masyarakat Kelurahan.
b. Sub kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, anggaran belanja bertambah, untuk monitoring dan evaluasi (monev) serta koordinasi dengan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Kegiatan ini berfokus pada peningkatan kualitas pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting, sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting di Kota Pontianak.

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan tahun 2025 dengan mengacu pada pendekatan perencanaan penganggaran yang telah disediakan.

Pada Renja Perubahan total pagu OPD berada pada angka **Rp 13.229.040.966,00**, terdiri dari **5.731.652.000,00** Belanja Gaji dan Tunjangan, Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) **2.500.000.000,00**, Dana Hibah Untuk PKK Kota Pontianak Rp. 1.200.000.000, Dana Hibah untuk KPAD Kota Pontianak **Rp. 500.000.000** dan Belanja Langsung yang bersumber dari APBD sebesar **Rp 3.297.388.966,00**, anggaran terbagi dalam 11 (sebelas) program, 29 (dua puluh sembilan) Kegiatan dan 69 (enam puluh sembilan) Sub kegiatan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.

Pontianak, 24 Juni 2025
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Pontianak

dr. Rifka, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19740303 200212 2 006

RENCANA KERJA (RENJA) TH. 2025

PERUBAHAN

DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA PONTIANAK
Jl. Budi Utomo No. 29 Pontianak

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rakhmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai penurunan Renstra SKPD yang memuat rencana kegiatan pembangunan per tahun. RENJA Perubahan dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan dua tahun ke depan. Dengan adanya RENJA perubahan diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih terarah.

Semoga Rencana Kerja tahun 2025 perubahan ini dapat dijadikan bahan acuan untuk melaksanakan kegiatan agar tercapai keberhasilan pembangunan pada bidang pangan pertanian, peternakan dan juga perikanan di Kota Pontianak.

Pontianak, Juni 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
DAFTAR TABEL			iii
BAB I	:	PENDAHULUAN	
		1.1 Latar Belakang	1
		1.2 Landasan Hukum	2
		1.3 Maksud dan Tujuan	5
		1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	:	EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	
		2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan II	1
BAB III	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
		3.1 Rencana Kerja …….	1
		3.2 Pendanaan ……...	70
BAB IV	:	PENUTUP	1

DAFTAR TABEL

			Halaman
Tabel 2.1	:	Capaian target kinerja dan realisasi anggaran Triwulan II Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak …	2
Tabel 3.1	:	Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2025……	2
Tabel 3.2	:	Rekapitulasi Daftar Perubahan Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak ……	71

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Rencana Kerja Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak Perubahan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran/tujuan pembangunan urusan Pangan, Pertanian, dan Perikanan selama Tahun 2025 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja Perubahan ini merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Pangan, Pertanian, dan

Perikanan tahun 2024 - 2026. Penjabaran yang dimaksud menitikberatkan pada penyelarasan prioritas, sasaran, program, kegiatan prioritas pembangunan tahunan urusan Pangan, Pertanian, dan Perikanan dengan dokumen RPJMD pemerintah Kota Pontianak, Renstra dan Renja Dinas tingkat Provinsi Kalimantan Barat serta Renstra dan Renja Direktorat Jenderal Teknis lingkup Kementrian Pertanian dan Kementrian Kelautan dan Perikanan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2025 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
17. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
18. eraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);
19. Peraturan Wali Kota Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 126);
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5);
21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor … Tahun 2024 tentang Rencana Strategis … (nama perangkat daerah) Kota Pontianak Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor ...);
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 10);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Perubahan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan indikator dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 dengan dokumen renja PD Tahun 2025 serta renstra Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang dalam kurun waktu Januari-Juni 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Perubahan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Renja dan sistematika dokumen Perubahan Renja

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab ini berisikan capaian target kinerja Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan sampai dengan triwulan II

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini berisi rencana kerja yang terdiri dari program, kegiatan dan subkegiatan perangkat daerah serta pendanaan untuk Perubahan Renja tahun 2025

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2025 Sampai dengan Triwulan II (bulan Mei)

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 pagu anggaran sebesar Rp. 24.010.845.876,- dengan realisasi sampai dengan triwulan II (bulan Mei) sebesar Rp. 5.302.837.728,- atau 22,09 %.

Capaian realisasi anggaran sampai dengan triwulan II (bulan Mei) sebesar 22,09 % (masih dibawah 50%) , hal ini disebabkan oleh :

1. Realisasi sampai bulan Mei 2025;
2. Anggaran kas subkegiatan memang akan dilaksanakan pada semester II (triwulan III dan IV) sebagian besar untuk pekerjaan konstruksi;
3. Ada pekerjaan di subkegiatan terutama pekerjaan konstruksi yang akan dilakukan perubahan

Capaian target kinerja dan realisasi anggaran Triwulan I Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1 : Capaian target kinerja dan realisasi anggaran Triwulan I Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada TW		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	
					I			
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	**95 %**	**14.862.158.446**	**95 %**	**2.640.025.529**	**- %**	**2.640.025.529**
1.1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 %	**98.399.389,32**	**100** %	**-**	**100** %	**-**
1.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 dok	70.296.389,32	3 dok	-	**3** dok	-
1.1.2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 lap	28.103.000,00	7 lap	-	**7** lap	-
1.2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**100 %**	**11.308.835.375**	100 **%**	**1.950.715.530**	**- %**	**1.950.715.530**
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 org/bln	11.297.799.791	49 org	1.950.715.530	**-** org	1.950.715.530
1.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 dok	11.035.584	- dok	-	**-** dok	-
1.3	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	**100 %**	**175.960.000**	100 **%**	**-**	**- %**	**-**
1.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	112.960.000,00	- paket	-	**-** paket	-
1.3.2	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 org	15.000.000,00	- org	-	**-** org	-
1.3.3	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 org	48.000.000,00	- org	-	**-** org	-
1.4	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	**100 %**	**390.410.450**	100 **%**	**49.430.461**	**- %**	**49.430.461**
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	12.750.000,00	- paket	2.010.000	**-** paket	2.010.000
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	94.768.000,00	- paket	15.346.200	**-** paket	15.346.200
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	19.554.450,00	- paket	-	**-** paket	-
1.4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	13.892.000,00	- paket	1.220.000	**-** paket	1.220.000
1.4.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	44.606.000,00	- paket	9.240.000	**-** paket	9.240.000
1.4.6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dok	5.940.000,00	- Dok	990.000	**-** Dok	990.000
1.4.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Lap	150.000.000,00	- Lap	15.324.261	**-** Lap	15.324.261

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada TW I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	
1.4.8	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dok	48.900.000,00	2 Dok	5.300.000	**2** Dok	5.300.000
1.5	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	**100 %**	**254.010.199,68**	100 %	**-**	**- %**	**-**
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel			5.488.600				
1.5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	248.521.599,68	- unit	-	**-** unit	-
1.6	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	**100 %**	**2.288.010.956**	100 %	**613.210.538**	**- %**	**613.210.538**
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	8.568.000,00	- Lap	2.850.000	**-** Lap	2.850.000
1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	431.713.196,00	- Lap	91.236.458	**-** Lap	91.236.458
1.6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1.847.729.760,00	- Lap	519.124.080	**-** Lap	519.124.080
1.7	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	**100 %**	**346.532.076**	**100 %**	**26.669.000**	**100 unit**	**26.669.000**
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kedaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 unit	230.860.000,00	3 unit	18.319.000	**3** unit	18.319.000
1.7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 unit	12.925.000	- unit	-	**-** unit	-
1.7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 unit	25.920.000,00	8 unit	5.350.000	**8** unit	5.350.000
1.7.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 unit	51.360.000,00	- unit	-	**-** unit	-
1.7.5	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	25.467.076,00	- unit	3.000.000	**-** unit	3.000.000
		Laju PDRB sektor pertanian dan perikanan	**2,75 %**		**%**		**%**	
		1. Ketersediaan energi dan protein perkapita						
		- Ketersediaan Energi per Kapita (Kkal/Kapita/Hari)	3020		3.210		-	
		- Ketersediaan Protein per Kapita (Gr/Kapita/Hari)	109		109,09		-	
		2. Skor pola pangan harapan (konsumsi)	87		88,6		-	
2	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**1. Persentase Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan**	**143 %**	**340.094.980**	**116,67 %**	**20.100.000**	- **%**	**20.100.000**
		2. Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah sesuai Standar	22 **%**		89,50 **%**		- **%**	
		3. Persentase Target Konsumsi Pangan	99,1 **%**		106,61 **%**		- **%**	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada TW I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	
2.1	**Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kota Dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan**	Jumlah laporan Pengawasan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	**12 lap**	**134.127.100**	**3 lap**	**20.100.000**	**3 lap**	**20.100.000**
2.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	13 dok	86.976.800,00	3 lap	14.150.000	**3** lap	14.150.000
2.1.2	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	12 dok	12.371.900,00	3 dok	2.700.000	**3** dok	2.700.000
2.1.3	Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2000 keluarga	34.778.400,00	196 keluarga	3.250.000	**196** keluarga	3.250.000
2.2	**Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah	**12 lap**	**148.377.000**	**3 lap**	**-**	**3**	**-**
2.2.1	Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	17,4 ton	148.377.000,00	- ton	-	**-**	-
2.3	**Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**2 lap**	**57.590.880**	**- lap**	**-**	**- lap**	**-**
2.3.1	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	2 dok	13.782.840,00	- dok	-	**-** dok	-
2.3.2	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya Lokal	2 lap	43.808.040,00	- lap	-	**-** lap	-
3	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Peningkatan Tahan Pangan**	**93 %**	**39.709.300**	91 **%**	**-**	**- %**	**-**
3.1	**Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Kerawanan Pangan	4 lap	**39.709.300**	1 lap	**-**	**1** lap	**-**
3.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kota	12 lap	39.709.300,00	3 lap	-	**3** lap	-
4	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase kasus pangan yang tidak sesuai standar mutu yang telah ditetapkan**	**17,5 %**	**101.327.000**	- **%**	**12.661.500**	**- %**	**12.661.500**
4.1	**Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	12 kali	**101.327.000**	3 kali	**12.661.500**	**3** kali	**12.661.500**
4.1.1	Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kota	6 dok	6.452.000	1 dok	-	**1** dok	-
4.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kota	1 dok	55.865.000,00	1 dok	8.911.500	**1** dok	8.911.500

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada TW		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	
					I			
4.1.3	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar asal Tumbuhan	KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	12 dok	39.010.000,00	3 dok	3.750.000	**3** dok	3.750.000
		Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	**742 ton**	0	185.500 **ton**		**185.500 ton**	-
5	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase Kelompok Usaha Bersama yang difasilitasi**	**100 %**	**193.000.000**	25 **%**	**-**	25 **%**	**-**
5.1	**Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangaan Air Lainnya Yang Dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.**	Persentase Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangaan Air Lainnya Yang Dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.	**100 %**	**168.000.000**	25 **%**	**-**	**25 %**	**-**
5.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 dok	15.000.000	- dok	-	**-** dok	-
5.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	1 unit	153.000.000,00	- unit	-	**-**	-
5.2	**Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota	**100 %**	**25.000.000**	25 **%**	**-**	**25 %**	**-**
5.2.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	2 klp	10.000.000	5 klp	-	**5** klp	-
5.2.2	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	30 org	15.000.000	- org	-	**-** orang	-
		Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	249 ton		57 ton		57 ton	
		Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1764 ton	-	650.950 ton		650.950 ton	-
6	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BIDIDAYA**	Persentase kelompok pembudidaya ikan yang difasilitasi	**75 %**	**445.901.681**	**25 %**	**-**	**25 %**	**-**
6.1	**Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil**	Jumlah Kegiatan pembinaan dan pendampingan dalam rangka pengembangan usaha perikanan budidaya	**2 kali**	**65.000.000**	1 **kali**	-	**1 kali**	**-**
6.1.1	Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	30 klp	65.000.000,00	- klp	-	**-** klp	-
6.2	**Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**100 %**	**380.901.681,00**	25 **%**	**-**	**25 %**	**-**
6.2.1	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 unit	365.901.681,00	- unit	-	- unit	-
6.2.2	Sub Kegiatan Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 dok	15.000.000,00	- dok	-	**-** dok	-

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada TW		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	
					I			
7	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase jumlah pelaku Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan yang difasilitasi**	**100 %**	**10.000.000**	- %	**-**	**- %**	**-**
7.1	**Kegiatan Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil**	Jumlah kegiatan pelayanan Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil	**1 kali**	**10.000.000**	- **kali**	-	**- kali**	**-**
7.1.1	Sub Kegiatan Pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	2 unit usaha	10.000.000,00	- unit usaha	-	**-** unit usaha	-
		1. Produktivitas Tanaman Pangan (Ku/Ha)						
		- Produktivitas Padi	37,49 ku/ha		28,60 ku/ha		**-** ku/ha	
		- Produktivitas Ubi Kayu	223,00 ku/ha		223,46 ku/ha		**-** ku/ha	
		- Produktivitas Keladi	142,1 ku/ha		143 ku/ha		**-** ku/ha	
		2. Produksi Tanaman Hortikultura					**-**	
		- Produksi Sayuran (Ton)	7.111,75 ton		1.806 ton		**1.806** ton	
		- Produksi Buah-buahan (Ton)	23.667 ton		961,30 ton		**961** ton	
		- Produksi Biofarmaka (kg)	2.268.566 kg		463.981 kg		**463.981** ton	
8	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	1. Persentase petani tanaman pangan dan hortikultura yang menggunakan agroinput pertanian sesuai anjuran/ rekomendasi	**40,00 %**	**550.598.100**	**- %**	**17.485.000**	**- %**	**17.485.000**
		2. Persentase peningkatan kunjungan di UPTD Agribisnis	15 **%**		- **%**		**- %**	-
8.1	**Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**8 lap**	**162.069.900**	- **lap**	**-**	**- lap**	**-**
8.1.1	Sub Kegiatan Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Jumlah Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	4 lap	162.069.900	1 lap	-	**1**	-
8.2	**Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	16 dok	**388.528.200,00**	4 dok	**17.485.000**	**4** dok	**17.485.000**
8.2.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	12 dok	260.850.000,00	3 dok	3.900.000	**3** dok	3.900.000,00
8.2.2	Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	4 dok	127.678.200,00	1 dok	13.585.000	**1** dok	13.585.000,00
9	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	1. Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana Pertanian	**30 %**	**316.718.478**	- **%**	**538.100**	**- %**	**538.100,00**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada TW			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		
						I					
		2. Persentase Peningkatan Ketersediaan Prasarana di UPTD Agribisnis	2	%		-	%		-	%	
9.1	**Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian**	Jumlah Prasarana pertanian yang dibangun	**9**	**unit**	**316.718.478**	-	unit	**538.100**	**-**	**jenis**	**538.100,00**
9.1.1	Sub Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1	unit		-	unit	-	-	unit	-
9.1.2	Sub Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2	unit	87.945.875,00	-	unit	538.100	-	unit	538.100,00
9.1.3	Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2	unit	228.772.603,00	-	unit	-	-	unit	-
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase fasilitasi pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	60	%	**55.000.100,00**	-	%	-	-		
	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas areal yang dapat ditangani akibat dampak dari perubahan iklim dan OPT pada Tanaman Pangan dan Hortikultura	20	Ha	**55.000.100,00**	-	Ha	-	-		
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	10	Ha	30.000.100,00	-	Ha	-			
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	10	Ha	25.000.000,00	-	Ha	-			
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh, petani dan pelaku agribisnis	30	%	**91.134.900,00**	-	%	-	-	%	-
	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Pertanian	11	kegiatan	**91.134.900,00**	-	kegiatan	-	-	keg	-
	Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	unit	36.134.900,00	-	unit	-	-	unit	-
	Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4	unit	55.000.000,00	-	unit	-	-	unit	-
		Produksi Daging Ternak (Kg)	6.164.885,60	kg		3.240.912	kg		**3.240.912**	kg	-
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase peningkatan unit usaha pengecer obat hewan yang memiliki izin	100,00	%	**11.000.000,00**	-	%	-	-	%	-
	Kegiatan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah laporan fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	1	lap	**11.000.000,00**	-	lap	-	-	Lap	-

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada TW		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)	
					I			
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang memenuhi Komitmen	4 lap	11.000.000,00	1 lap	-	**1** lap	-
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan	100 %	**15.000.000**	- %	**1.200.000**	**-**	1.200.000,00
	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan kelompok tani/ternak	4 kali	**10.000.000,00**	- lap	-	**-**	-
	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 lap	10.000.000,00	- lap	**-**	**-**	-
	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	12 kali	**5.000.000,00**	3 kali	1.200.000	**3**	1.200.000,00
	Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1 lap	5.000.000,00	- lap	1.200.000	**-**	1.200.000,00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Indeks kepuasan pelayanan RPH Sapi	95 %	**5.423.636.561**	- %	**58.665.840**	**-**	58.665.840,00
	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah pemotongan ternak di RPH Sapi	2.500 ekor	5.423.636.561	449 ekor	58.665.840	**449**	58.665.840,00
	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	1 unit	5.423.636.561	- unit	58.665.840	**-**	58.665.840,00
10	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	30 %	**1.846.880.300**	**0 %**	**200.000**	**- %**	**200.000,00**
10.1	**Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan	3 kegiatn	**39.040.000**	**0 kegiatan**	**200.000**	**- keg**	**200.000,00**
10.1.1	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	4 lap	39.040.000	1 lap	**200.000**	**1** lap	200.000,00
10.2	**Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah pemeriksaan/pengobatan yang dilaksanakan	4 lap	**339.379.700**	**1 lap**	**-**	**1 lap**	**-**
10.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	4 lap	339.379.700	1 lap	**-**	**1** lap	-
10.3	**Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	Jumlah penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 lap	**110.949.000**	**0 lap**	**-**	**- lap**	**-**

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada TW			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		
						I					
10.3.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	4	dok	11.000.000	**1**	**dok**	**-**	**1**	dok	-
10.3.2	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	2	lap	13.500.000	**0**	**lap**	**-**	**-**	lap	-
10.3.3	Sub Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	325	org	86.449.000	23	org	-	**23**	org	-
10.4	**Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan hewan	1	lap	**1.357.511.600**	**0**	**lap**	**-**	**-**	**lap**	**-**
10.4.1	Sub Kegiatan Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	1	unit	1.357.511.600	0	unit	-	**-**	unit	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALSASI KINERJA					**24.302.159.846**			**2.750.875.969**			**2.750.875.969**

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rencana Kerja

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak tidak ada merubah program, kegiatan dan subkegiatan yang telah disusun pada Renja murni Tahun 2025. Perubahan terjadi pada target indikator di beberapa sub kegiatan dikarenakan pengurangan/ perubahan pagu pada subkegiatan tersebut.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 Perubahan dapat di lihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 : Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN			**25.888.650.400,00**	**24.302.159.846,00**	**24.032.881.819,00**							**16.414.815.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**14.703.397.866,00**	**15.343.289.726,00**	**15.233.491.685,00**							**11.293.550.823,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**			**14.703.397.866,00**	**15.343.289.726,00**	**15.233.491.685,00**							**11.293.550.823,00**	
1,	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**95 Persen**	**95 Persen**	**14.156.856.506,00**	**14.862.158.446,00**	**14.760.760.405,00**							**10.706.903.838,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	83.000.000,00	98.399.389,32	98.399.389,32			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan	Perangkat Daerah		78.880.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
											Kesejahteraan				
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
			9 Dokumen	9 Dokumen	38.000.000,00	70.296.389,32	58.706.389,32	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			26.680.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
			17 Laporan	17 Laporan	45.000.000,00	28.103.000,00	15.903.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			52.200.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	10.958.601.334,00	11.308.835.375,00	11.308.837.334,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan	Perangkat Daerah		8.186.521.277,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
											Kesejahteraan				
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
			50 Orang/bulan	80 Orang/bulan	10.947.565.750,00	11.297.799.791,00	11.297.801.750,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			8.173.720.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
			6 Dokumen	6 Dokumen	11.035.584,00	11.035.584,00	11.035.584,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			12.801.277,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	173.000.000,00	175.960.000,00	175.960.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan	Perangkat Daerah		174.955.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
											Kesejahteraan				
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
			3 Paket	3 Paket	110.000.000,00	112.960.000,00	112.960.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			110.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
			50 Orang	50 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			14.955.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
			8 Orang	8 Orang	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan			50.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
											yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	100 Persen	372.488.450,00	390.410.450,00	289.010.450,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Perangkat Daerah		378.132.450,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
			1 Paket	1 Paket	12.750.000,00	12.750.000,00	12.750.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			13.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
			1 Paket	1 Paket	94.768.000,00	94.768.000,00	94.768.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan			94.768.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
											yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
			1 Paket	1 Paket	19.554.450,00	19.554.450,00	19.554.450,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			19.554.450,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
			1 Paket	1 Paket	19.870.000,00	13.892.000,00	13.892.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			19.870.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
			1 Paket	1 Paket	44.606.000,00	44.606.000,00	44.606.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan			45.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
											yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan													
			2 Dokumen	2 Dokumen	5.940.000,00	5.940.000,00	5.940.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			5.940.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
			3 Laporan	3 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	48.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			150.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
			10 Dokumen	10 Dokumen	25.000.000,00	48.900.000,00	48.900.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan			30.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
											yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	254.010.199,68	254.010.199,68			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Perangkat Daerah		200.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
			0 Unit	0 Unit	0,00	5.488.600,00	5.488.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			50.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			4 Unit	4 Unit	50.000.000,00	248.521.599,68	248.521.599,68	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan			50.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
											yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	2.09.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			100.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	2.173.234.646,00	2.288.010.956,00	2.288.010.956,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Perangkat Daerah		1.341.883.035,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
			1 Laporan	1 Laporan	8.568.000,00	8.568.000,00	8.568.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan			8.568.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
											yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			1 Laporan	1 Laporan	431.713.196,00	431.713.196,00	431.713.196,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			483.315.035,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
			1 Laporan	1 Laporan	1.732.953.450,00	1.847.729.760,00	1.847.729.760,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			850.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	346.532.076,00	346.532.076,00	346.532.076,00			-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan	Perangkat Daerah		346.532.076,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
											Kesejahteraan				
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			21 Unit	21 Unit	230.860.000,00	230.860.000,00	230.860.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			230.860.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
			50 Unit	50 Unit	12.925.000,00	12.925.000,00	12.925.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			12.925.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			31 Unit	31 Unit	25.920.000,00	25.920.000,00	49.710.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan			25.920.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
											yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	2.09.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud													
			1 Unit	1 Unit	51.360.000,00	51.360.000,00	51.360.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			51.360.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
			1 Unit	1 Unit	25.467.076,00	25.467.076,00	25.467.076,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			25.467.076,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2,	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**143 22 99.05 Persen Persen Persen**	**143 22 99.05 Persen Persen Persen**	**455.646.012,00**	**340.094.980,00**	**331.694.980,00**							**495.751.637,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	12 Laporan	12 Laporan	196.199.180,00	134.127.100,00	125.727.100,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	M asyarakat		155.387.980,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga													
			2000 Keluarga	2000 Keluarga	32.391.280,00	34.778.400,00	33.778.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan			32.391.280,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
											yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan													
			12 Dokumen	12 Dokumen	80.000.000,00	12.371.900,00	4.971.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			79.188.800,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
			13 Dokumen	13 Dokumen	83.807.900,00	86.976.800,00	86.976.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			43.807.900,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	209.446.832,00	148.377.000,00	148.377.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan	M asyarakat		290.363.657,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
											Kesejahteraan				
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota													
			17,4 Ton	11,375 Ton	209.446.832,00	148.377.000,00	148.377.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			290.363.657,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	57.590.880,00	57.590.880,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	M asyarakat		50.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun													
			2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	13.782.840,00	13.782.840,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan			10.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
											yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal													
			2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00	43.808.040,00	43.808.040,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			40.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3,	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**93 Persen**	**93 Persen**	**15.000.000,00**	**39.709.300,00**	**39.709.300,00**							**15.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	39.709.300,00	39.709.300,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	M asyarakat		15.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota													
			12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	39.709.300,00	39.709.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan			15.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
											yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
4,	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**17.5 Persen**	**17.5 Persen**	**75.895.348,00**	**101.327.000,00**	**101.327.000,00**							**75.895.348,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	12 Kali	12 Kali	75.895.348,00	101.327.000,00	101.327.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Pedagang, retail Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)		75.895.348,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
			6 Dokumen	6 Dokumen	20.000.000,00	6.452.000,00	6.452.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			20.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota													
			1 Dokumen	1 Dokumen	42.500.000,00	55.865.000,00	55.865.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan			42.500.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
											yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan													
			12 Dokuman	12 Dokuman	13.395.348,00	39.010.000,00	39.010.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			13.395.348,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			**11.185.252.534,00**	**8.958.870.120,00**	**8.799.390.134,00**							**5.121.264.177,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**2.235.088.481,00**	**648.901.681,00**	**643.710.331,00**							**502.672.638,00**	
1,	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**100 Persen**	**100 Persen**	**193.000.000,00**	**193.000.000,00**	**187.600.000,00**							**105.000.000,00**	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100 Persen	100 Persen	168.000.000,00	168.000.000,00	168.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Nelayan		70.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
			2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			15.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap													
			0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan			5.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
											yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap													
			1 Unit	1 Unit	153.000.000,00	153.000.000,00	153.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			50.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	100 Persen	100 Persen	25.000.000,00	25.000.000,00	19.600.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	-		35.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil													
			30 Orang	30 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	9.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan			25.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
											yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil													
			2 Kelompok	2 Kelompok	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			10.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2,	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**75 Persen**	**75 Persen**	**532.088.481,00**	**445.901.681,00**	**446.110.331,00**							**382.672.638,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	2 Kali	2 Kali	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Kelompok Pembudidaya Ikan		25.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil													
			30 Kelompok	30 Kelompok	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan			25.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
											yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	100 Persen	100 Persen	467.088.481,00	380.901.681,00	381.110.331,00			-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Kelompok Pembudidaya Ikan		357.672.638,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
			0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			15.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan			15.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
											yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
			1 Unit	1 Unit	452.088.481,00	365.901.681,00	366.110.331,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			327.672.638,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3,	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1.510.000.000,00**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**							**15.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	1 Kali	1 Kali	1.510.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP)		10.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko													
			2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	1.510.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan			10.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
											yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	0 Kali	0 Kali	0,00	0,00	0,00			-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	-		5.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
			0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			5.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**8.950.164.053,00**	**8.309.968.439,00**	**8.155.679.803,00**							**4.618.591.539,00**	
1,	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**100 15 40 Persen Persen Persen**	**100 15 40 Persen Persen Persen**	**1.133.600.000,00**	**565.598.100,00**	**583.623.434,00**							**1.827.967.437,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	8 Laporan	8 Laporan	690.000.000,00	162.069.900,00	183.895.234,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Kelompok Tani		750.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi													
			5 Laporan	0 Laporan	520.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan			520.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
											yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian													
			4 Laporan	4 Laporan	170.000.000,00	162.069.900,00	183.895.234,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			230.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	428.600.000,00	388.528.200,00	388.528.200,00			-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	-		1.077.967.437,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman													
			12 Dokumen	12 Dokumen	293.850.000,00	260.850.000,00	260.850.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan			780.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
											yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman													
			4 Dokumen	4 Dokumen	134.750.000,00	127.678.200,00	127.678.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			297.967.437,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	-		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil													
			1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan			0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
											yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Kali	12 Kali	5.000.000,00	5.000.000,00	1.200.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat peternak		0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
			1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	1.200.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			0,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2,	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**2 30 95 Persen Persen Nilai**	**2 30 95 Persen Persen Nilai**	**5.740.409.164,00**	**5.740.355.039,00**	**5.738.355.039,00**							**1.138.614.631,00**	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	2500 Ekor 9 Unit	2040 Ekor 9 Unit	5.740.409.164,00	5.740.355.039,00	5.738.355.039,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan	UPT Agribisnis, RPH Sapi, Kelompok Tani, Balai Penyuluh Pertanian		1.138.614.631,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
										hijau, dan ekonomi biru	Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani													
			0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			230.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
			2 Unit	2 Unit	88.000.000,00	87.945.875,00	87.945.875,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			95.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya													
			2 Unit	2 Unit	228.772.603,00	228.772.603,00	228.772.603,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan			333.536.220,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
											yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan													
			1 Unit	1 Unit	5.423.636.561,00	5.423.636.561,00	5.421.636.561,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			480.078.411,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
3,	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**30 Persen**	**30 Persen**	**1.935.729.889,00**	**1.846.880.300,00**	**1.618.014.330,00**							**1.111.909.471,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	3 Kegiatan	89.043.080,00	39.040.000,00	32.940.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat peternak		419.752.388,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
			4 Laporan	4 Laporan	89.043.080,00	39.040.000,00	32.940.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			419.752.388,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	378.226.169,00	339.379.700,00	332.179.700,00			-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan	-		384.700.379,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
											Kesejahteraan				
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner													
			4 Laporan	4 Laporan	378.226.169,00	339.379.700,00	332.179.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			384.700.379,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Laporan	1 Laporan	110.949.000,00	110.949.000,00	110.549.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Masyarakat peternak		295.356.704,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan													
			2 Laporan	2 Laporan	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan			173.262.804,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
											yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	3.27.04.2.04.0006	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)													
			4 Dokumen	4 Dokumen	11.000.000,00	11.000.000,00	10.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			27.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04.0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
			325 Orang	325 Orang	86.449.000,00	86.449.000,00	86.449.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			9 5.093.900,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	-	-	1.357.511.640,00	1.357.511.600,00	1.142.345.630,00			-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan	-		1 2.100.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
											Kesejahteraan				
	3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha													
			1 Unit	1 Unit	1.357.511.640,00	1.357.511.600,00	1.142.345.630,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			1 2.100.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
4,	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**60 Persen**	**60 Persen**	**55.000.000,00**	**55.000.100,00**	**55.000.100,00**							**4 0.000.000,00**	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	20 Ha	20 Ha	55.000.000,00	55.000.100,00	55.000.100,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	-		4 0.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan													
			10 Ha	10 Ha	35.000.000,00	30.000.100,00	30.000.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan			2 0.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
										masyarakat yang adil dan makmur.	Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan													
			10 Ha	10 Ha	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			2 0.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
5,	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**100 Persen**	**100 Persen**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**							**1 2.100.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	1 Laporan	1 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Toko, Retail, Sub Distributor Obat Hewan		12.100.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.06.2.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan													
			4 Laporan	4 Laporan	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan			12.100.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
											yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
6,	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**30 Persen**	**30 Persen**	**74.425.000,00**	**91.134.900,00**	**149.686.900,00**							**488.000.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	11 Kegiatan	11 Kegiatan	74.425.000,00	91.134.900,00	149.686.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Kelompok Tani, Balai Penyuluh Pertanian		488.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
			2 Unit	2 Unit	19.425.000,00	36.134.900,00	94.686.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			423.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa													
			4 Unit	4 Unit	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan			65.000.000,00	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	21
											yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	J U M L A H				25.888.650.400,00	24.302.159.846,00	24.032.881.819,00							16.414.815.000,00	

3.2. Pendanaan

Berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Pontianak NOMOR B/000.7.2.4/ /BAPPERIDA/2025 Tentang : Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Sumber dana untuk melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan pada Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dan Dana Insentif Daerah (DID)

Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak pada Perubahan Renja Tahun 2025 secara umum terjadi penambahan pagu anggaran semula Rp. 24.302.159.846,- menjadi Rp. 24.032.881.819,- atau berkurang Rp. 269.278.027,- (1,11%). Penambahan dan pengurangan pagu dan pendapatan terdiri dari :

1. Penganggaran kembali belanja dengan sumber dana sisa DAK Fisik Bidang kelautan dan Perikanan Tahun 2018 sebesar Rp. 208.650,-
2. Penganggaran kembali belanja dengan sumber dana sisa DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2018 sebesar Rp. 1.962.540,-.
3. Penganggaran kembali belanja dengan sumber dana sisa DAK Non Fisik KPP Tahun 2024 sebesar Rp. 256.700,-.
4. Penganggaran kembali belanja dengan sumber dana sisa Dana Insentif Daerah Tahun 2022 sebesar Rp. 19.606.094,-.
5. Penyesuaian Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 1.959,-.
6. Penambahan DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp. 68.400.000,-
7. Refocusing pagu tahun 2025 sebesar Rp. 359.713.970,-
8. Serta pergeseran pagu antara subkegiatan.
9. Untuk target pendapatan terjadi peningkatan semula Rp. 1.279.895.000,- menjadi Rp. 1,283.745.000,- atau bertambah Rp. 3.850.000 (0,30%)

Subkegiatan yang mengalami perubahan pagu anggaran dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 : Rekapitulasi Daftar Perubahan Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025
Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak

NO	URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT/ SUBKEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RENJA 2025	RENJA 2025 PERUBAHAN	RENJA 2025	RENJA 2025 PERUBAHAN	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase capaian kinerja pelaksanaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan**	**100%**	**100%**			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***100%***	***100%***			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang/ bulan	80 orang/ bulan	11.297.799.791	11.297.801.750	Penyesuaian Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah***	***100%***	***100%***			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan	150.000.000	48.600.000	Refocusing
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN	**Persentase Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan**	**143%**	**143%**			
			Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan Daerah sesuai Standar	**22%**	**22%**			
			Persentase Target Konsumsi Pangan	**99,05%**	**99,05%**			
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kab/Kota Dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	***Jumlah laporan Pengawasan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya***	***12 Laporan***	***12 Laporan***			
		Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2000 Keluarga	2000 Keluarga	34.778.400	33.778.400	Refocusing
		Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	12 Dokumen	12 Dokumen	12.371.900	4.971.900	Refocusing
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah Kabupaten/ Kota	***Jumlah Laporan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Daerah***	***12 Laporan***	***12 Laporan***			

NO	URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT/ SUBKEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RENJA 2025	RENJA 2025 PERUBAHAN	RENJA 2025	RENJA 2025 PERUBAHAN	
		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	17,4 Ton	11,375 Ton	148.377.000	148.377.000	Perubahan Target
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase Kelompok Usaha Bersama yang difasilitasi**	**100%**	**100%**			
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota	***Persentase Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota***	**100%**	**100%**			
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	30 Orang	30 Orang	15.000.000	9.600.000	Refocusing
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Persentase kelompok pembudidaya ikan yang difasilitasi**	**75%**	**75%**			
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	***Persentase Pengelolaan Pembudidayaan Ikan***	**100%**	**100%**			
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1 Unit	365.901.681	366.110.331	Penganggaran kembali belanja dengan sumber dana sisa DAK Fisik Bidang kelautan dan Perikanan Tahun 2018
3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**1. Persentase petani tanaman pangan dan hortikultura yang menggunakan agroinput pertanian sesuai anjuran/ rekomendasi**	**40%**	**40%**			
			2. Persentase peningkatan kunjungan di UPTD Agribisnis	**15%**	**15%**			
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	***Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian***	**8 Laporan**	**8 Laporan**			

NO	URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT/ SUBKEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RENJA 2025	RENJA 2025 PERUBAHAN	RENJA 2025	RENJA 2025 PERUBAHAN	
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	4 Laporan	4 Laporan	162.069.900	183.895.234	Penganggaran kembali belanja dengan sumber dana sisa DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2018 dan sisa DAK Non Fisik KPP Tahun 2024
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	5 Laporan	0 Laporan	-	-	Perubahan Target
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	**Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh, petani dan pelaku agribisnis**	**30%**	**30%**			
		Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	***Jumlah Kegiatan Penyuluhan Pertanian***	**11 Kegiatan**	**11 Kegiatan**			
		Peningkatan Kapasitas Kelembangaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Unit	2 Unit	36.134.900	94.686.900	Refocusing dan Penambahan DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan**	**100%**	**100%**			
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	***Jumlah Kegiatan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak***	***12 Kali***	***12 Kali***			
		Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	1.200.000	Refocusing
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	**Indeks kepuasan pelayanan RPH Sapi**	**95**	**95**			
		Pembangunan Prasarana Pertanian	***Jumlah pemotongan ternak di RPH Sapi***	***2500 Ekor***	***2053 Ekor***			
		Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	1 Unit	5.423.636.561	5.421.636.561	Refocusing
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	**Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**30%**	**30%**			

NO	URUSAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT/ SUBKEGIATAN	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
				RENJA 2025	RENJA 2025 PERUBAHAN	RENJA 2025	RENJA 2025 PERUBAHAN	
		Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota	***Jumlah Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan***	***3 Kegiatan***	***3 Kegiatan***			
		Subkegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	4 Laporan	4 Laporan	39.040.000	32.940.000	Refocusing
		Pengelolaan pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	***Jumlah pemeriksaan/pengobatan yang dilaksanakan***	***4 Laporan***	***4 Laporan***			
		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	4 Laporan	4 Laporan	339.379.700	332.179.700	Refocusing
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	***Jumlah penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner***	***1 Laporan***	***1 Laporan***			
		Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	4 Dokumen	4 Dokumen	11.000.000	10.600.000	Refocusing
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	***Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan hewan***	***1 Laporan***	***1 Laporan***			
		Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	1 Unit	1 Unit	1.357.511.600	1.142.345.630	Refocusing

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 disusun melalui proses tahapan yang cukup panjang dengan memperhatikan konsistensi antara Renja Perubahan Tahun 2025 dengan alokasi anggaran dalam RAPBDP Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, dalam pelaksanaan kegiatan yang sangat strategis dan tidak mampu dilaksanakan oleh Kota, karena keterbatasan dana atau menyangkut kaitan kegiatan antar Kota/Kabupaten, maka perlu diusulkan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan program-program pembangunan di daerah, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program-program di masing-masing bidang sehingga diperlukan perubahan dan revisi dengan memperhatikan aturan yang berlaku. Untuk itu, Dinas berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program pembangunan setiap Triwulan sekali kepada Wali Kota melalui Bappeda Kota Pontianak keseluruhan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi bahan penyusunan RKPD Tahun berikutnya.

Pontianak, Juni 2025

Plt. KEPALA DINAS
PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA PONTIANAK,

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

MUCH. YAMIN, S.Sos.,M.Ec..Dev
Pembina TK. I
Nip. 19760312 199803 1 004

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PONTIANAK

2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PONTIANAK
Jalan Alianyang No.7B
www.dlh.pontianakkota.go.id
(0561) – 76980
dlh@pontianakkota.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya kami dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2025. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini mencakup pelaksanaan Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan dan Rencana Pembiayaannya.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak disusun dalam upaya menentukan skala prioritas penanganan permasalahan persampahan dan lingkungan hidup. Oleh karena itu Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak ini sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dengan mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki berdasarkan prinsip-prinsip Good Environment dengan indikator yang dapat diukur.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih terdapat kekurangan oleh karena itu saran/masukan yang sangat kami harapkan dalam upaya penyempurnaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak yang akan datang.

Pontianak, Juli 2025

DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum 1-3

Bab II Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 ..... II-1

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah III-1
3.1 Rencana Kerja III-1
3.2 Pendanaan III-1

Bab IV Penutup IV-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja (Renja) adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, danpagu indikatif yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1(satu) tahun. Penyusunan rancangan Renja merupakan hasil pembahasan atas usulan program dan kegiatan yang telah disinergikan dengan hasil Musrenbang Kota Pontianak dengan tetap mengacu pada program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Renja memilki fungsi yang fundamental dalam system perencanaan daerah, karena Renja merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Proses penyusunan Renja dimulai dengan persiapan penyusunanan Renja PD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisa gambaran perangkat daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, berdasarkan Renstra PD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Sementara itu terkait pendapatan, Dinas Lingkungan Hidup mengelola 2 jenis pendapatan yaitu Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Retribusi Pemakaian Laboratorium. Untuk pengelolaan Retriibusi Kebersihan DLH menggunakan PERDA Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum dan PERWA Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan, sedangkan untuk dasar pengelolaan Retribusi Pemakaian Laboratorium berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak mengelola Pendapatan Retribusi Kebersihan yang ditarikkan secara Tunai dan Non Tunai. Adapun penarikkan secara tunai diperuntukkan untuk pedagang kaki lima, sedangkan penarikan secara non tunai dilakukan dengan transfer langsung melalui bendahara penerimaan DLH Kota Pontianak dan PDAM serta melakukan inovasi dengan Virtual Account, QRIS. Oleh karena itu keberadaan dan peranan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak selaku institusi/lembaga yang bertanggungjawab dalam pengendalian dampak lingkungan hidup dan kebersihan persampahan menjadi sangat strategis yang melaksanakan, memotivasi, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan pencapaian Visi Kota dan Misi Kota Pontianak pada Misi Ke-3 yaitu Mewujudkan Manajemen Wilayah Perkotaan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan Melalui Penyediaan Infranstruktur Hijau.

Prinsip-prinsip didalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

a. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
c. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja,keluaran, biaya satuan per keluaran,dantotal kebutuhan dana.

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, dan Renstra OPD. Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, Renstra OPD, RPJMD, RKA OPD, KUA dan PPAS, serta RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2026 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaandan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahdan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah(Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 1781).

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
21. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191.
24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 127 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 127).
25. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
26. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 209 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 995 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan maksud menyiapkan dokumen sinkronisasi dengan okumen Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2025 yang disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak dan menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun 2025 adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Menindaklanjuti KEPMENDAGRI NOMOR 900.1.15.5-1317 TAHUN 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verfikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan berdasarkan hasil asistensi Renja Tahun 2025 ada beberapa Sub Kegiatan yang tidak ada di perubahan yaitu:

1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
5. Pemantauan dan Evaluasi KLHS
6. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
7. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
8. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
9. Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
10. Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
11. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
12. Penghentiaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
13. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
14. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan yang bukan menjadi kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang sesuai dengan Kewenangannya.
15. Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah
16. Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan.

Adapun Sub Kegiatan yang ada di perubahan adalah :

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor T/900.1.3/245/01/BKAD/2025 Tanggal 4 Maret 2025 Tentang Reforcusing Anggaran Tahun 2025 berikut disampaikan Laporan Hasil Reforcusing Anggaran Tahun 2025. (Nomor 600.11/104.8/DLH_Perc Tanggal 07 Maret 2025 Tentang Penyampaian Laporan Hasil Reforcusing Anggaran Tahun 2025).

1. Pagu Murni Tahun 2025 sebesar Rp. 66.989.548.473,00
2. Anggaran Reforcusing sebesar Rp. 1.538.625.683,00
3. Pagu Tahun 2025 setelah reforcusing sebesar Rp. 65.450.922.790,00

Tabel 1

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

No				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		Uraian
						Target	Realisasi	Pagu	Realisasi	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP								66.989.548.473,00	13.883.525.336,00	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								66.989.548.473,00	13.883.525.336,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								66.989.548.473,00	13.883.525.336,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100 %	25%	18.366.659.046,00	4.207.272.962,00	
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 %	25%	134.914.000,00	-	
		1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1 Dokumen	95.398.000,00	-	
		2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	9.210.000,00	-	
		3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	9.210.000,00	-	

No			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		Uraian
					Target	Realisasi	Pagu	Realisasi	
		4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1 Laporan	21.096.000,00	-	
	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	25%	13.277.042.473,00	3.147.729.326,00	
		5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 orang/bulan	73 orang/bulan	12.675.316.473,00	3.067.509.326,00	
		6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	-	586.920.000,00	80.220.000	
		7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	5 Laporan	14.806.000,00	-	

No			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		Uraian
					Target	Realisasi	Pagu	Realisasi	
	3		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 %	25%	473.953.800,00	197.693.800	
		8	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	4 Laporan	1 Laporan	274.859.000,00	164.360.000	
		9	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	-	150.194.800,00	33.333.800	
		10	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	-	48.900.000,00	-	
	4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	-	188.198.000,00	19.533.558	
		11	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-	63.090.000,00	-	
		12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	-	125.108.000,00	19.533.558	

No			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		Uraian
					Target	Realisasi	Pagu	Realisasi	
	5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	-	1.527.064.800,00	429.008.758	
		13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	38.829.350,00	-	
		14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	162.487.200,00	36.170.000	
		15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	-	141.177.300,00	39.488.360	
		16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	101.385.000,00	22.920.000	
		17	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	-	146.871.500,00	22.550.800	
		18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	-	5.940.000,00	1.485.000	
		19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	-	372.550.325,00	28.389.598	

No			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		Uraian
					Target	Realisasi	Pagu	Realisasi	
		20	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	-	557.824.125,00	278.005.000	
	6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	-	589.495.700,00	-	
		21	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-	350.000.000,00	-	
		22	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	220.020.000,00	-	
		23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	21 Unit	-	19.475.700,00	-	

No			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		Uraian
					Target	Realisasi	Pagu	Realisasi	
	7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	-	1.652.622.273,00	388.015.278	
		24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	-	31.700.000,00	20.000.000	
		25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	-	453.688.878,00	114.856.878	
		26	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	-	15.580.700,00	-	
		27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	-	1.151.652.695,00	253.158.400	

No			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		Uraian
					Target	Realisasi	Pagu	Realisasi	
	8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	25%	523.368.000,00	25.292.242	
		28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	133.350.000,00	11.627.920	
		29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	60 Unit	44.344.400,00	-	
		30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	254.543.600,00	-	
		31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	131 Unit	10 unit	91.130.000,00	13.664.322	

No			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		Uraian
					Target	Realisasi	Pagu	Realisasi	
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			Persentase perencanaan lingkungan hidup	100 %	-	148.075.000,00	3.761.200	
	9	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen evaluasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	1 dokumen	-	87.275.000,00	3.761.200	
		32	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	87.275.000,00	3.761.200	
	10	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	1 dokumen	-	60.800.000,00	-	
		33	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	1 Dokumen	-	60.800.000,00	-	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		Uraian
			Target	Realisasi	Pagu	Realisasi	
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	70 %	-	1.119.319.400,00	385.542.400	
11	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	5 dokumen	-	971.006.900,00	383.442.400	
34	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	75 Lokasi	-	323.240.000,00	56.389.500	
35	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	-	163.780.000,00	143.230.000	
36	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan	-	84.531.000,00	2.880.000	
37	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	-	61.695.000,00	-	
38	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	-	337.760.900,00	180.942.900	

No			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		Uraian
					Target	Realisasi	Pagu	Realisasi	
	12		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1 dokumen	-	46.038.900,00	-	
		39	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	2 Lokasi	-	46.038.900,00	-	
	13		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2 Dokumen	-	102.273.600,00	2.100.000	
		40	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	1 Dokumen	-	29.476.000,00	-	
		41	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	1 Dokumen	-	72.797.600,00	2.100.000	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		Uraian
			Target	Realisasi	Pagu	Realisasi	
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	100%	-	242.000.000,00	4.695.200	
14	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan Pengelolaan KEHATI	1 Dokumen	-	242.000.000,00	4.695.200	
42	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1.9 Ha	-	79.591.000,00	3.952.000	
43	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman Kehati lainnya yang dikelola lingkungan hidup kewenangan Kabupaten/Kota	1 unit	-	79.591.000,00	743.200	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		Uraian
			Target	Realisasi	Pagu	Realisasi	
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100 %	-	133.384.400,00	19.772.500	
15	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah dokumen Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang terfasilitasi	11 dokumen	-	112.131.800,00	17.550.000	
44	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	-	37.915.000,00	3.900.000	
45	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	10 Laporan	-	74.216.800,00	13.650.000	
16	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 dokumen	-	21.252.600,00	2.222.500	
46	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	-	21.252.600,00	2.222.500	

No			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		Uraian
					Target	Realisasi	Pagu	Realisasi	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			Persentase pelaku usaha yang menerapkan izin lingkungan dan izin PPLH	100 %	-	282.232.500,00	-	
	17		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	-	282.232.500,00	-	
		47	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	-	76.615.000,00	-	
		48	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Orang	-	42.140.000,00	-	
		49	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	4 Badan Usaha	-	163.477.500,00	-	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		Uraian
			Target	Realisasi	Pagu	Realisasi	
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100%	25%	747.180.700,00	62.177.000	
18	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	-	747.180.700,00	62.177.000	
50	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	6 Dokumen	1 dokumen	320.295.500,00	30.277.000	
51	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	120 Orang	120 Orang	133.844.700,00	-	
52	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Lembaga	-	293.040.500,00	31.900.000	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		Uraian
			Target	Realisasi	Pagu	Realisasi	
8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	65 %	25%	227.723.700,00	76.200.000	
19	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11 penghargaan	6 penghargaan	227.723.700,00	76.200.000	
53	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	16 Entitas	6 entitas	227.723.700,00	76.200.000	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		Uraian
			Target	Realisasi	Pagu	Realisasi	
9	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100 %	25%	148.378.500,00	-	
20	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan yang ditangani	25 pengaduan	10 pengaduan	148.378.500,00	-	
54	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	24 Pengaduan	10 pengaduan	43.023.500,00	-	
55	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Perkara	-	24.000.000,00	-	
56	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	11 Perkara	-	81.355.000,00	-	

No			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		Uraian
					Target	Realisasi	Pagu	Realisasi	
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			Persentase penanganan dan pengurangan sampah	100 %	-	45.574.595.227,00	9.124.104.074,00	
	21	Pengelolaan Sampah		Jumlah sampah yang dikelola	152.275.95 ton	-	45.574.595.227,00	9.124.104.074,00	
		57	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	24 Kelompok	24 Kelompok	640.074.100,00	62.760.000	
		58	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	-	138.787.800,00	28.800.000	
		59	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	61 Unit	61 Unit	8.259.570.202,00	1.789.749.944	
		60	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditangani	1 Dokumen	-	2.160.110.262,00	582.500.000	

No			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		Uraian
					Target	Realisasi	Pagu	Realisasi	
		61	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	107123.85 Ton	-	10.552.778.294,00	2.793.839.600	
		62	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	3 Ton	-	75.580.000,00	-	
		63	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	61 Unit	61 Unit	2.160.618.650,00	387.674.330	
		64	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	70 Persentase	25 Persentase	9.496.150.408,00	2.506.856.000	
		65	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	559.86 Ton	-	2.408.342.008,00	570.976.000	

No			Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Kinerja		Anggaran		Uraian
					Target	Realisasi	Pagu	Realisasi	
		66	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	2 Laporan	-	54.558.800,00	-	
		67	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	7 Ton	-	130.226.000,00	30.000.000	
		68	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	107123.85 Ton	-	9.497.798.703,00	370.948.200	
							66.989.548.473,00	**13.883.525.336,00**	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rencana Kerja, Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan harus konsisten dan relevan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi yang menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak untuk periode 2024 – 2026 adalah ***Terwujudnya Kota Yang Bersih, Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan dan Sesuai dengan Tata Ruang***. Sedangkan sasaran adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.
2. Meningkatnya pengelolaan sampah

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 2
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Kota Yang Bersih, Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan dan Sesuai dengan Tata Ruang		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,40	63,90	63,96
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	54,50	55,00	55,50
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	83,50	84,00	84,50
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	41,50	42,00	42,60
		Meningkatnya pengelolaan sampah	persentase pengelolaan sampah	100	100	100

Pengelolaan Kemitraan dan Retribusi Kebersihan

Merupakan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menciptakan dan memelihara kebersihan lingkungan serta peningkatan PAD Kota melalui peningkatan pendapatan retribusi kebersihan. Adapun hasil yang ingin diperoleh adalah meningkatnya pendapatan retribusi kebersihan sesuai target yang ditentukan melalui pendaataan objek wajib retribusi kebersihan secara akurat. Dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak dengan melakukan pemungutan retribusi kebersihan sampah sebagai salah satu bentuk partisipasi warga turut serta menjaga dan membangun kota agar tetap bersih dan indah.

Rencana Aksi Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak Melalui Retribusi Persampahan :

1. Melakukan Verifikasi Data Retribusi pada Usaha Jasa dan Perdagangan.
2. Pengoptimalan Penyesuaian Reklarifikasi Tarif Retribusi terhadap wajib retribusi yang belum sesuai dengan Klarifikasinya menurut Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berlaku, khususnya pada Usaha Jasa dan Perdagangan (Retail, Hotel, Restoran).
3. Survey Peninjauan Kembali atas Pengenaan Retribusi yang belum sesuai dengan tarif yang dikenakan.

Tabel 3

TARGET PENDAPATAN 2025

URAIAN PENDAPATAN	APBD 2025	RANC RKPD-P 2025
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Rp. 27.801.197.000	Rp. 27.907.419.000
Retribusi Pemakaian Laboratorium	Rp. 60.000.000	Rp. 70.000.000
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
JUMLAH	**Rp. 27.871.197.000**	**Rp. 27.987.419.000**

3.2. Pendanaan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak adalah mengacu dari program yang telah ditetapkan yaitu tidak lepas dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tercantum dalam RPJMD Kota Pontianak, terdiri dari **10 Program** yaitu 1 (satu) Program Penunjang dan 9 (sembilan) Program Pembangunan. Program dan Kegiatan ini dilaksanakan untuk kelancaran operasional perkantoran, sedangkan untuk kegiatan terdapat **21 Kegiatan** dengan **68 Sub Kegiatan** sebagai berikut :

Belanja Kegiatan Urusan Sekretariat terdiri 1 program penunjang yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sebesar Rp. 17.909.997.084 dengan jumlah kegiatan sebanyak 8 buah kegiatan dan 31 Sub kegiatan.

Belanja Kegiatan Urusan Bidang Lingkungan Hidup terdiri 9 program pembangunan yaitu :

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup Sebesar Rp. 556.955.000 dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 buah kegiatan dan 2 sub kegiatan.
3. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Sebesar Rp.1.045.518.050 dengan jumlah kegiatan sebanyak 3 buah kegiatan dan 8 Sub Kegiatan.
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Sebesar Rp. 236.350.000 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 buah kegiatan dan 2 Sub Kegiatan.
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Sebesar Rp. 119.105.400 dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 buah kegiatan dan 3 sub kegiatan.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Sebesar Rp. 212.801.500 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 buah kegiatan dan 3 sub kegiatan.
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Sebesar Rp. 707.931.400 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 buah kegiatan dan 3 sub kegiatan.
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Sebesar Rp. 199.748.700 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 buah kegiatan dan 1 sub kegiatan.
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Sebesar Rp. 134.593.500 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 buah kegiatan dan 3 sub kegiatan.
10. Program Pengelolaan Persampahan Sebesar Rp. 50.432.276.533 dengan jumlah kegiatan sebanyak 1 buah kegiatan dan 12 sub kegiatan.

Total Perubahan Anggaran program yang direncanakan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4
Anggaran Perubahan
Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak

No	Program / Kegiatan	Pagu Perubahan	Sumber Dana
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.909.997.084	APBD
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup Sebesar	556.955.000	APBD
3	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1.045.518.050	APBD
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	236.350.000	APBD
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	119.105.400	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	212.801.500	APBD
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	707.931.400	APBD
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	199.748.700	APBD
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	134.593.500	APBD
10	Program Pengelolaan Persampahan	50.432.276.533	APBD
	Jumlah	**71.555.277.167**	

Terdapat beberapa catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD yaitu :

1. Berdasarkan Laporan Staf Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Nomor 900/104.6/DLH-Sek/I/2025 Tanggal 07 Maret 2025 tentang Permohonan Penambahan Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Program Pengelolaan Persampahan sebesar Rp.5.704.354.000 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Penambahan
1	Kebutuhan BBM	Rp. 1.973.628.000
2	Sewa Alat Berat Baru untuk timbunan sampah	Rp. 563.700.000
3	Kenaikan Harga Sewa Buldozer	Rp. 289.366.000
4	Pemenuhan 75% Tutupan Lahan Sel Aktif	Rp. 1.200.000.000
5	Pembuatan DED Jaringan Penangkapan Gas Methan	Rp. 90.000.000
6	Pembangunan Fisik Jaringan Penangkapan Gas Methan	Rp. 900.000.000
7	Pemindahan dari Solar ke Dexlite untuk alat berat	Rp. 687.660.000
	Total	**Rp. 5.704.354.000**

2. Penambahan Anggaran untuk Penyusunan Dokumen AMDAL SEKOLAH RAKYAT sebesar Rp.400.000.000

Tabel 5

Perubahan Program dan Kegiatan serta Pendanaan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS LINGKUNGAN HIDUP							66.604.845.850,00	66.989.548.473,00	71.555.277.167,00							68.981.025.307,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							66.604.845.850,00	66.989.548.473,00	71.555.277.167,00							68.981.025.307,00	
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							66.604.845.850,00	66.989.548.473,00	71.555.277.167,00							68.981.025.307,00	
1	2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	-	-	-	95 %	95 %	17.186.118.103,00	18.366.659.046,00	17.909.997.084,00							17.314.428.428,00	
	2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	100 %	100 %	201.968.800,00	134.914.000,00	53.024.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	DLH Kota Pontianak		201.968.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	3 Dokumen	2 Dokumen	50.199.000,00	95.398.000,00	31.648.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	DLH Kota Pontianak		50.199.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	33.055.200,00	9.210.000,00	7.075.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	DLH Kota Pontianak		33.055.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	35.128.500,00	9.210.000,00	7.075.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	DLH Kota Pontianak		35.128.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	4 Laporan	10 Laporan	33.715.500,00	21.096.000,00	7.226.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	DLH Kota Pontianak		33.715.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	5 Laporan	0 Laporan	49.870.600,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	DLH Kota Pontianak		49.870.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	100 %	100 %	12.920.671.850,00	13.277.042.473,00	13.014.133.854,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	DLH Kota Pontianak		12.936.231.850,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	73 Orang/bulan	73 Orang/bulan	12.290.613.850,00	12.675.316.473,00	12.675.316.850,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	DLH Kota Pontianak		12.290.613.850,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	595.920.000,00	586.920.000,00	328.061.004,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	DLH Kota Pontianak		609.720.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	1 Dokumen	0 Dokumen	5.377.400,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	DLH Kota Pontianak		5.377.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	5 Laporan	0 Laporan	3.313.700,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	DLH Kota Pontianak		3.313.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	-	-	1 Dokumen	0 Dokumen	7.624.500,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	DLH Kota Pontianak		9.384.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	18 Laporan	18 Laporan	17.822.400,00	14.806.000,00	10.756.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	DLH Kota Pontianak		17.822.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	-	100 %	100 %	420.112.900,00	473.953.800,00	466.443.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		420.112.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	223.679.000,00	274.859.000,00	269.279.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		223.679.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah																
							Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	147.533.900,00	150.194.800,00	147.654.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		147.533.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	48.900.000,00	48.900.000,00	49.510.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		48.900.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	100 %	100 %	68.445.000,00	188.198.000,00	235.720.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	DLH Kota Pontianak		68.575.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	-	1 Paket	1 Paket	56.190.000,00	63.090.000,00	93.050.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	DLH Kota Pontianak		56.320.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	1 Orang	1 Orang	12.255.000,00	125.108.000,00	142.670.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	DLH Kota Pontianak		12.255.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-	-	-	100 %	100 %	951.617.975,00	1.527.064.800,00	1.525.525.522,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	DLH Kota Pontianak		972.492.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	1 Paket	1 Paket	38.829.350,00	38.829.350,00	31.063.480,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	DLH Kota Pontianak		41.386.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	1 Paket	1 Paket	148.694.500,00	162.487.200,00	209.713.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	DLH Kota Pontianak		162.406.750,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	-	-	1 Paket	1 Paket	100.727.300,00	141.177.300,00	217.923.080,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	DLH Kota Pontianak		105.332.825,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	1 Paket	1 Paket	92.005.000,00	101.385.000,00	91.076.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	DLH Kota Pontianak		92.005.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	2 Paket	2 Paket	146.871.500,00	146.871.500,00	120.453.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	DLH Kota Pontianak		146.871.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	5.940.000,00	5.940.000,00	5.940.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	DLH Kota Pontianak		5.940.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	222.550.325,00	372.550.325,00	100.490.662,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	DLH Kota Pontianak		222.550.325,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	196.000.000,00	557.824.125,00	748.865.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	DLH Kota Pontianak		196.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	-	-	100 %	100 %	220.279.000,00	589.495.700,00	466.858.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	DLH Kota Pontianak		249.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	-	1 Unit	0,00	350.000.000,00	338.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	DLH Kota Pontianak		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	1 Unit	0,00	220.020.000,00	27.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	DLH Kota Pontianak		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	21 Unit	21 Unit	220.279.000,00	19.475.700,00	101.858.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	DLH Kota Pontianak		249.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	-	-	100 %	100 %	1.879.654.578,00	1.652.622.273,00	1.650.651.158,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	DLH Kota Pontianak		1.935.202.878,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	23.700.000,00	31.700.000,00	25.360.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	DLH Kota Pontianak		23.704.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	453.688.878,00	453.688.878,00	546.988.878,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	DLH Kota Pontianak	!	453.688.878,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	54.960.700,00	15.580.700,00	10.924.560,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	DLH Kota Pontianak		56.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1.347.305.000,00	1.151.652.695,00	1.067.377.720,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	DLH Kota Pontianak		1.401.809.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	100 %	100 %	523.368.000,00	523.368.000,00	497.640.150,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	DLH Kota Pontianak		530.844.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	-	10 Unit	10 Unit	138.410.000,00	133.350.000,00	133.350.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	DLH Kota Pontianak	!	138.410.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	60 Unit	60 Unit	39.284.400,00	44.344.400,00	44.344.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	DLH Kota Pontianak		39.284.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	2 Unit	2 Unit	254.543.600,00	254.543.600,00	228.815.750,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	DLH Kota Pontianak		255.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	-	131 Unit	131 Unit	91.130.000,00	91.130.000,00	91.130.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	DLH Kota Pontianak		98.150.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2	2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perencanaan lingkungan hidup	-	-	-	100 %	100 %	148.075.000,00	148.075.000,00	556.955.000,00							102.490.000,00	
	2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	62.275.000,00	87.275.000,00	87.275.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat, Steakholder dan Pelaku Usaha		62.275.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	62.275.000,00	87.275.000,00	493.355.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat, Steakholder dan Pelaku Usaha		62.275.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	-	-	0 dokumen	0 dokumen	85.800.000,00	60.800.000,00	60.800.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat, Steakholder dan Pelaku Usaha		40.215.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	02	2.02	0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS																	
							Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	47.500.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat, Steakholder dan Pelaku Usaha		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	02	2.02	0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup																	
							Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	38.300.000,00	60.800.000,00	63.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat, Steakholder dan Pelaku Usaha		40.215.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	-	-	-	70 %	70 %	1.240.103.395,00	1.119.319.400,00	1.045.518.050,00							1.123.835.775,00	
	2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	-	5 dokumen	5 dokumen	1.002.273.215,00	971.006.900,00	971.006.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat dan Steakholder		944.942.775,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																	
							Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	12.005.500,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat, Steakholder dan Pelaku Usaha		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat, Steakholder dan Pelaku Usaha		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																	
							Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	6.775.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat, Steakholder dan Pelaku Usaha		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0006	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut																	
							Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	13.550.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat, Steakholder dan Pelaku Usaha		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																	
							Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	-	-	-	75 Lokasi	75 Lokasi	317.740.000,00	323.240.000,00	316.613.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat, Steakholder dan Pelaku Usaha		317.740.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	03	2.01	0008	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan																	
							Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	24.999.940,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota																	
							Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	-	-	-	1 Unit	1 Unit	157.000.000,00	163.780.000,00	149.980.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		157.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota																	
							Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	24.031.440,00	84.531.000,00	88.858.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		24.031.440,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.01	0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah																	
							Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	61.695.000,00	61.695.000,00	54.415.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		61.695.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																	
							Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	384.476.335,00	337.760.900,00	327.915.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		384.476.335,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	159.147.080,00	46.038.900,00	46.038.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		99.999.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																	
							Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	-	-	-	4 Laporan	4 Laporan	15.803.940,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.02	0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup																	
							Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	-	-	-	2 Lokasi	2 Lokasi	46.499.700,00	46.038.900,00	35.211.650,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		99.999.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup																	
							Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	-	-	-	2 Titik	2 Titik	96.843.440,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	78.683.100,00	102.273.600,00	102.273.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		78.893.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	29.789.600,00	29.476.000,00	18.507.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		29.999.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	03	2.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota																	
							jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	48.893.500,00	72.797.600,00	54.017.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		48.893.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

4	2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	-	-	-	100 %	100 %	242.000.000,00	242.000.000,00	236.350.000,00							184.000.000,00	
	2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan Pengelolaan KEHATI	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	242.000.000,00	242.000.000,00	242.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat, Steakholder dan Pelaku Usaha		184.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati																	
							Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	58.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat, Steakholder dan Pelaku Usaha		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																	
							Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	1.9 Ha	1.9 Ha	118.000.000,00	79.591.000,00	75.961.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat, Steakholder dan Pelaku Usaha		118.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	04	2.01	0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya																	
							Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	1 Unit	1 Unit	66.000.000,00	162.409.000,00	160.389.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat, Steakholder dan Pelaku Usaha		66.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

5	2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	-	-	-	100 %	100 %	127.587.000,00	133.384.400,00	119.105.400,00							127.587.000,00	
	2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah dokumen Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang terfasilitasi	-	-	-	11 dokumen	11 dokumen	101.414.800,00	112.131.800,00	112.131.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		103.601.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	05	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																	
							Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	36.680.000,00	37.915.000,00	30.590.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		43.524.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	05	2.01	0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3																	
							Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	-	-	-	10 Laporan	10 Laporan	64.734.800,00	74.216.800,00	73.240.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		60.077.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	2 dokumen	2 dokumen	26.172.200,00	21.252.600,00	21.252.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		23.986.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	05	2.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																	
							Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	21.047.200,00	21.252.600,00	15.274.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		17.940.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	-	-	-	1 Dokumen	0 Dokumen	5.125.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		6.046.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

6	2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang menerapkan izin lingkungan dan izin PPLH	-	-	-	100 %	100 %	191.495.600,00	282.232.500,00	212.801.500,00							191.495.600,00	
	2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	191.495.600,00	282.232.500,00	282.232.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		191.495.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																	
							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	76.615.000,00	48.404.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																	
							Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	-	-	-	1 Orang	1 Orang	56.378.000,00	42.140.000,00	22.070.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		56.378.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																	
							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	-	-	-	4 Badan Usaha	4 Badan Usaha	95.117.600,00	163.477.500,00	142.327.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		95.117.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

7	2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	-	-	-	100 %	100 %	641.586.100,00	747.180.700,00	707.931.400,00							641.586.100,00	
	2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	641.586.100,00	747.180.700,00	747.180.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat, Steakholder dan Pelaku Usaha		641.586.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																	
							Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-	-	-	6 Dokumen	6 Dokumen	265.679.900,00	320.295.500,00	278.819.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat, Steakholder dan Pelaku Usaha		265.679.900,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup																	
							Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	-	-	-	120 Orang	120 Orang	126.402.700,00	133.844.700,00	116.082.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat, Steakholder dan Pelaku Usaha		126.402.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																	
							Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	-	-	-	1 Lembaga	1 Lembaga	249.503.500,00	293.040.500,00	313.029.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat, Steakholder dan Pelaku Usaha		249.503.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

8	2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	-	-	-	65 %	65 %	189.278.700,00	227.723.700,00	199.748.700,00							334.834.400,00	
	2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	11 penghargaan	11 penghargaan	189.278.700,00	227.723.700,00	227.723.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat, Steakholder dan Pelaku Usaha		334.834.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																	
							Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	-	-	-	16 Entitas	16 Entitas	189.278.700,00	227.723.700,00	199.748.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat, Steakholder dan Pelaku Usaha		334.834.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	-	-	-	100 %	100 %	182.804.500,00	148.378.500,00	134.593.500,00							182.804.500,00	
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan yang ditangani	-	-	-	25 pengaduan	25 pengaduan	182.804.500,00	148.378.500,00	148.378.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat, Steakholder dan Pelaku Usaha		182.804.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																	
							Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	-	-	-	24 Pengaduan	24 Pengaduan	43.023.500,00	43.023.500,00	33.569.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat, Steakholder dan Pelaku Usaha		43.023.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	10	2.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																	
							Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	-	-	-	1 Perkara	1 Perkara	24.000.000,00	24.000.000,00	19.669.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat, Steakholder dan Pelaku Usaha		24.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	10	2.01	0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																	
							Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	-	-	-	11 Perkara	11 Perkara	96.655.000,00	81.355.000,00	81.355.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat, Steakholder dan Pelaku Usaha		96.655.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	10	2.01	0007	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah																	
							Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	-	-	-	1 Orang	0 Orang	19.126.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat, Steakholder dan Pelaku Usaha		19.126.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

10	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase penanganan dan pengurangan sampah	-	-	-	100 %	100 %	46.455.797.452,00	45.574.595.227,00	50.432.276.533,00							48.777.963.504,00	
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola	-	-	-	152.275.95 ton	152.275.95 ton	46.455.797.452,00	45.574.595.227,00	45.574.595.227,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		48.777.963.504,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																	
							Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	-	-	-	24 Kelompok	24 Kelompok	506.175.500,00	640.074.100,00	721.074.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		206.175.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota																	
							Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	164.596.500,00	138.787.800,00	137.010.240,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		164.596.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah																	
							Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	-	-	-	61 Unit	61 Unit	7.944.728.713,29	8.259.570.202,00	10.188.756.374,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		9.483.283.944,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	11	2.01	0010	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus																	
							Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditangani	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1.989.026.811,04	2.160.110.262,00	2.213.939.176,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		2.086.272.811,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																	
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	-	-	-	107123.85 Ton	107123.85 Ton	10.612.570.823,20	10.552.778.294,00	10.641.172.854,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		10.729.765.795,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah																	
							Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	-	-	-	3 Ton	3 Ton	73.750.000,00	75.580.000,00	67.384.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		73.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah																	
							Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	-	-	-	61 Unit	61 Unit	1.492.081.588,47	2.160.618.650,00	1.931.250.650,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		1.492.075.388,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	11	2.01	0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah																
							Persentase luas layanan pengumpulan sampah	-	-	-	70 Persentase	100 Persentase	9.912.706.700,00	9.496.150.408,00	9.453.710.408,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		9.583.748.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan																
							Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	-	-	-	559.86 Ton	559.86 Ton	2.369.737.539,00	2.408.342.008,00	2.433.232.008,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		2.369.737.539,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah																
							Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	57.336.000,00	54.558.800,00	48.458.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		57.336.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah																
							Jumlah sampah yang terdaur ulang	-	-	-	7 Ton	7 Ton	263.160.100,00	130.226.000,00	103.166.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		263.160.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

	2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																
							jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	-	-	-	107123.85 Ton	107123.85 Ton	10.888.666.477,00	9.497.798.703,00	12.493.121.923,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		12.086.800.527,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	11	2.01	0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan																
							jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	-	-	-	1 Dokumen	0 Dokumen	181.260.700,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat , Steakholder dan Pelaku Usaha		181.260.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
													JUMLAH	**66.604.845.850,00**	**66.989.548.473,00**	**71.555.277.167,00**						**68.981.025.307,00**	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) DLH Kota Pontianak Tahun 2025 ini disusun dalam rumusan program dan kegiatan yang merupakan hasil sinkronisasi antara evaluasi hasil capaian kinerja Renstra DLH Tahun 2024-2026, identifikasi isu-isu penting bidang lingkungan hidup, keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DLH Kota Pontianak, review atas Rancangan Awal RKPD Kota Pontianak Tahun 2025, Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025.

Usulan program dan kegiatan untuk tahun 2025 masih dititikberatkan pada upaya pengendalian pencemaran lingkungan dengan menurunkan beban pencemaran baik air maupun udara, peningkatan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan, peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, pendidikan lingkungan di sekolah, pelayanan kebersihan dan pengangkutan sampah serta upaya pengurangan sampah sejak dari sumber sampah baik rumah tangga maupun usaha/industri sesuai dengan Renstra, hasil Musrenbang. Namun demikian apabila ternyata di dalam pelaksanaan kegiatan ternyata anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, DLH Kota Pontianak akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi ketugasan dan tanggung jawab DLH Kota Pontianak sesuai tupoksinya dengan mengoptimalkan seluruh anggaran yang tersedia dan sumber daya yang dimiliki.

Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 dengan berdasarkan azas perencanaan berbasis kinerja sebagai pokok acuan untuk melaksanakan kegiatan pada Tahun Anggaran 2026 yang akan datang.

Pontianak, Juli 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Pontianak

Ir. Sy. Usmulyono, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19671017 199703 1 002

PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan-Nya Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2025 ini dapat diselesaikan. Sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2024-2026.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2025 memuat rencana kerja, indikator kinerja dan pendanaan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang ikut andil menyumbangkan pemikiran, ide, tenaga guna menyelesaikan dokumen ini. Kami berupaya menyajikan informasi dengan selengkap-lengkapnya walaupun disadari masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penyajiannya.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2025 ini dapat menjadi masukan bagi semua pihak dan dapat direalisasikan sesuai rencana.

Pontianak, Maret 2025

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Tahun 2024 dan Capaian Renstra 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 19

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 30

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 32

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan 38

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 39

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 41

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025 42

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 45

BAB V PENUTUP 64

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra	7
Tabel II.2	Target dan Realisasi Indikator Kinerja	15
Tabel II.3	Target dan Indikator Kinerja	20
Tabel II.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan	21
Tabel II.5	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	29
Tabel VI.1	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 ….....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah pada tahun berkenaan yang disusun sebagai penyesuaian terhadap muatan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan menganalisa gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
2. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas

penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;

3. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat Daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

2.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).
7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354).
11) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
13) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

17) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
18) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
19) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
20) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).
21) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 174).
22) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

23) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 134).
24) Peraturan Wali Kota Nomor 53.9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 53.9).
25) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
26) Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 19).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan periode sisa pada tahun berkenaan;
b. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menentukan lokasi kegiatan periode sisa pada tahun berkenaan;
c. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode sisa pada tahun berkenaan;
d. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam kelompok sasaran kegiatan periode sisa pada tahun berkenaan;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2025 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB III. Tujuan dan Sasaran

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Perangkat Daerah.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan

BAB V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2024 telah terlaksana. Dan perlu dilakukan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2024-2026.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan/ atau realisasi APBD Tahun 2024 untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

Pada Tahun 2025 program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan bahkan ada yang melebihi target kinerja dan ada yang tidak memenuhi target kinerja sebagaimana uraian berikut ini:

1. Realisasi Program dan Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja

a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

Realisasi program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota telah 100% memenuhi persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan. Dengan penyerapan anggaran sebesar 92,60%.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja ini adalah berkat kemampuan SDM dalam menyiapkan dokumen dan laporan.

Sehingga memberikan implikasi terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah diantaranya terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang baik, terselenggaranya

administrasi umum perangkat daerah yang baik, terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dan terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah.

Implikasi lainnya yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah mampu menopang kebutuhan kesekretariatan.

Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengoptimalkan faktor-faktor pendukung tersebut adalah menambah pagu anggaran yang ditetapkan. Khususnya pada sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya harus sama dengan jumlah ASN dan Non ASN yang ada pada tahun berjalan dan sesuai dengan jumlah pakaian dinas yang diwajibkan.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil lainnya adalah pada sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi. Mengingat kompetensi ASN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih perlu ditingkatkan, maka masih sangat diperlukan terbukanya kesempatan mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Baik dari tataran pengambilan kebijakan, penguasaan bidang teknis hingga *soft skill* yang sangat diperlukan dalam pelayanan kepada masyarakat.

b. Program pengelolaan profil kependudukan

Realisasi program pengelolaan profil kependudukan telah memenuhi 100% dari target persentase penyusunan profil kependudukan. Dengan penyerapan anggaran sebesar 100% pula.

Hal ini didukung oleh faktor terbukanya akses pengelolaan data kependudukan dengan pemerintah pusat. Meski ada keterbatasan pada beberapa kategori, namun data yang diperlukan baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat umum, sudah terpenuhi dengan baik.

Sehingga memberikan implikasi terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah antara lain tersusunnya profil kependudukan Kota Pontianak. Begitu pula berdampak pada tersedianya data agregat kependudukan Kota Pontianak dan tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan, serta data-data untuk kebutuhan yang lainnya.

Maka perlu mempertahankan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang ada, sembari memikirkan optimalisasi agar tidak mengalami kemunduran atau tidak mencapai target kinerja.

2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran

a. Program Pendaftaran Penduduk

Realisasi program pendaftaran penduduk melebihi target adalah pada indikator persentase penyelesaian penerbitan kartu keluarga dengan realisasi sebesar 104,17 persen. Begitu juga pada persentase penyelesaian penerbitan KTP berhasil terrealisasi mencapai 120,48 persen. Selain itu, persentase penyelesaian surat tanda bukti pendataan penduduk non permanen pun berhasil mencapai realisasi 100,50 persen. Dan semua pencapaian yang melebihi target tersebut telah mengoptimalkan anggaran sebesar 100,00 persen.

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan diatas bahkan melebihi target yang ditetapkan adalah dikarenakan adanya kemudahan persyaratan yang ditetapkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri sehingga memudahkan petugas dalam melakukan verifikasi berkas permohonan, adanya pelayanan jemput bola perekaman KTP serta berusaha memenuhi ketersediaan blanko KTP dengan selalu mengajukan permohonan Ke Ditjen Dukcapil Kemendagri. Pelayanan penerbitan surat tanda bukti pendataan penduduk permanen pun jika dilengkapi persyaratan yang akurat dapat terselesaikan tepat waktu.

b. Program Pencatatan Sipil

Realisasi program pencatatan sipil telah melebihi target kinerja hasil/keluaran pada lima indikator: Persentase Penyelesaian Penerbitan Akta Kelahiran sebesar 153,85 persen. Persentase Penerbitan Akta Perkawinan (Non Muslim) sebesar 153,85 persen. Persentase Penerbitan Akta Perceraian (Non Muslim) sebesar 222,22 persen, Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status sebesar 222,22 persen dan Persentase Penerbitan Akta Kematian sebesar 219,36 persen.

Faktor-faktor yang menyebabkan realisasi bisa melebihi target yang telah ditentukan yaitu:

- Pelayanan dilakukan di rumah sakit/bidan praktek, selain itu juga adanya pelayanan keliling di kelurahan-kelurahan.
- Pentingnya dokumen akta perkawinan untuk kepentingan tertentu sehingga masyarakat melakukan pengurusannya tepat waktu.
- Pentingnya dokumen akta cerai untuk kepentingan tertentu sehingga masyarakat melakukan pengurusannya tepat waktu.
- Pentingnya dokumen perubahan status (akta kelahiran) untuk kepentingan tertentu.
- Pentingnya dokumen akta kematian untuk kepentingan tertentu serta kemudahan persyaratan untuk pengurusan dokumen akta kematian

Adapun secara umum faktor-faktor penyebab melebihi target kinerja program/kegiatan diatas adalah sebagai berikut:

a. Senantiasa terbuka dengan kritik dan saran masyarakat pengguna layanan ;
b. Komitmen pegawai dalam memberikan pelayanan yang prima.

Dengan demikian memberi implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 berupa keberhasilan diluar espektasi sehingga bisa mendukung peningkatan Indeks Pelayanan Publik (IPP)

perangkat daerah penyedia layanan. Pada tahun 2024, IPP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak mendapatkan nilai indeks 4,49 dengan kategori A- (Sangat Baik). Maka diharapkan pada periode penilaian selanjutnya mendapatkan nilai A sebagai pelaksana pelayanan publik dengan kategori pelayanan prima.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang telah diambil oleh pimpinan akan dipertahankan dan akan diupayakan bisa mewujudkan inovasi pelayanan yang berbasis kepuasan masyarakat.

3. Realisasi program/kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi subkegiatan penyediaan jasa surat menyurat belum memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yakni belanja peket pengiriman tidak dapat direalisasikan secara maksimal yaitu sebesar 76.90%. Belanja tersebut dipergunakan untuk biaya pengiriman blanko KTP El dari Jakarta. Untuk jumlah blanko yang diberikan oleh Ditjen Dukcapil jumlahnya tidak selalu sesuai kebutuhan karena menyesuaikan jumlah permintaan se-Indonesia. Sehingga untuk biaya pengirimannya tergantung dengan berat blanko KTP El dan jarak yang ditempuh serta volume kiriman yang di dapat.

Untuk optimalisasi semua pelayanan di kantor, maka dilakukan evaluasi penyerapan realisasi anggaran secara berkala sehingga anggaran yang tidak efektif dapat dilakukan pergeseran ke kegiatan lain.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023
Kota Pontianak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 s/d Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
2:12:01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**95**	**Persen**		**95**	**Persen**	**95**	**100.00**	**95**	**Persen**	**190**	**2**
2.12.01.2.01	**PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**		**100**	**Persen**	**100**	**100.00**	**100**	**Persen**	**200**	**2**
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5	Dokumen		5	Dokumen	5	100.00	5	Dokumen	10	2
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen		2	Dokumen	2	100.00	2	Dokumen	4	2
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	Laporan		5	Laporan	5	100.00	5	Laporan	10	2
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5	Laporan		5	Laporan	5	100.00	5	Laporan	10	2
2.12.01.2.02	**ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**Persen**		**100**	**Persen**	**92.54**	**92.54**	**100**	**Persen**	**192.54**	**1.9254**
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	Orang/Bulan		55	Orang/Bulan	50	90.91	55	Orang/Bulan	105	1.9090909
2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen		12	Dokumen	12	100.00	12	Dokumen	24	2

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 s/d Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	Laporan		6	Laporan	6	100.00	6	Laporan	12	2
2.12.01.2.05	**ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**Persen**		**100**	**Persen**	**100**	**100.00**	**100**	**Persen**	**200**	**2**
2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55	Paket		1	Paket	1	100.00	1	Paket	2	0.0363636
2.12.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	Orang		2	Orang	0	0.00	2	Orang	2	1
2.12.01.2.06	**ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**Persen**		**100**	**Persen**	**127**	**127.00**	**100**	**Persen**	**227**	**2.27**
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket		2	Paket	2	100.00	2	Paket	4	2
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket		3	Paket	3	100.00	3	Paket	6	1.5
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket		12	Paket	12	100.00	12	Paket	24	2
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket		1	Paket	1	100.00	1	Paket	2	2
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		12	Laporan	20	166.67	12	Laporan	32	2.6666667
2.12.01.2.07	**PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERA**	**Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**Persen**		**100**	**Persen**	**191.67**	**191.67**	**100**	**Persen**	**291.67**	**2.9167**
2.12.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	13	Unit		12	Unit	23	191.67	12	Unit	35	2.6923077

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 s/d Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.01.2.08	**PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**Persen**		**100**	**Persen**	**100**	**100.00**	**100**	**Persen**	**200**	**2**
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan		12	Laporan	12	100.00	12	Laporan	24	2
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		12	Laporan	12	100.00	12	Laporan	24	2
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		12	Laporan	12	100.00	12	Laporan	24	2
2.12.01.2.09	**PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**Persen**		**100**	**Persen**	**100**	**100.00**	**100**	**Persen**	**200**	**2**
2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit		3	Unit	3	100.00	3	Unit	6	2
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30	Unit		30	Unit	30	100.00	30	Unit	60	2
2:12:02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga**	**90**	**Persen**		**96.00**	**Persen**	**100**	**104.17**	**96.00**	**Persen**	**196**	**2.1777778**
		Persentase penyelesaian penerbitan KTP	**82**	**Persen**		**83.00**	**Persen**	**100**	**120.48**	**83.00**	**Persen**	**183**	**2.23**
		Persentase penyelesaian penerbitan KIA	**87**	**Persen**		**88.00**	**Persen**	**100**	**113.64**	**88.00**	**Persen**	**188**	**2.16**
		Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen	**99**	**Persen**		**99.50**	**Persen**	**100**	**100.50**	**99.50**	**Persen**	**199.5**	**2.02**
2.12.02.2.01	**PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase pelayanan pendaftaran penduduk**	**100**	**%**		**100**	**Persen**	**100**	**100.00**	**100**	**Persen**	**200**	**2**
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	665	Dokumen		665	Dokumen	365	54.89	665	Dokumen	1030	1.5488722
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	56	Laporan		56	Laporan	150	267.86	56	Laporan	206	3.6785714

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 s/d Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	12500	Dokumen		12500	Dokumen	14482	115.86	12500	Dokumen	26982	2.15856
2.12.02.2.03	**PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**100**	**%**		**100**	**Persen**	**100**	**100.00**	**100**	**Persen**	**200**	**2**
2.12.02.2.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran	90	Dokumen		90	Dokumen	90	100.00	90	Dokumen	180	2
2:12:03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Presentase Penerbitan Akta Kelahiran**	**55**	**Persen**		**65.00**	**Persen**	**100.00**	**153.85**	**65.00**	**Persen**	**165**	**3.00**
		Persentase penerbitan akta perkawinan (non muslim)	**60**	**Persen**		**65.00**	**Persen**	**100.00**	**153.85**	**65.00**	**Persen**	**165**	**2.75**
		Persentase penerbitan akta perceraian (non muslim)	**40**	**Persen**		**45.00**	**Persen**	**100.00**	**222.22**	**45.00**	**Persen**		
		Persentase penerbitan akta kematian	**40**	**Persen**		**45.00**	**Persen**	**100.00**	**222.22**	**45.00**	**Persen**		
		Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status	**40**	**Persen**		**45.00**	**Persen**	**100.00**	**222.22**	**45.00**	**Persen**		
02.12.03.2.01	**PELAYANAN PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil**	**100**	**%**		**100**	**Persen**	**100**	**100.00**	**100**	**Persen**	**200**	**2**
02.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	11000	Dokumen		11000	Dokumen	11000	100.00	11000	Dokumen	22000	2
02.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	16	Layanan		16	Layanan	16	100.00	16	Layanan	32	2
2.12.03.2.02	**PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**100**	**%**		**100**	**Persen**	**100**	**100.00**	**100**	**Persen**	**200**	**2**
2.12.03.2.02.03	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1	Laporan		1	Laporan	1	100.00	1	Laporan	2	2

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 s/d Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	35	Laporan		35	Laporan	61	174.29	35	Laporan	96	2.7428571
2.12.03.2.03	**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**100**	**%**		**100**	**Persen**	**100**	**100.00**	**100**	**Persen**	**200**	**2**
2.12.03.2.03.03	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	2	Laporan		2	Laporan	2	100.00	2	Laporan	4	2
2:12:04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**85**	**Persen**		**82.5**	**Persen**	**88.24**	**106.96**	**82.5**	**Persen**		
2.12.04.2.01	**PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN**	**Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Kependudukan melalui DWH**	**100**	**%**		**100**	**Persen**	**100**	**100.00**	**100**	**Persen**	**200**	**2**
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1	Dokumen		1	Dokumen	1	100.00	1	Dokumen	2	2
02.12.04.2.03	**PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan**	**100**	**%**		**100**	**Persen**	**100**	**100.00**	**100**	**Persen**	**200**	**2**
02.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4	Laporan		4	Laporan	4	100.00	4	Laporan	8	2

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*)/ Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 s/d Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6		7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)
02.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Terhadap Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	2	Dokumen		2	Laporan	2	100.00	2	Laporan	4	2
2:12:05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase penyajian komponen data dalam profil kependudukan**	**100**	**Persen**		**100**	**Persen**	**100**	**100.00**	**100**	**Persen**		
2.12.05.2.01	**PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase terpenuhinya penyediaan buku profil dan buku agregat kependudukan**	**100**	**%**		**100**	**Persen**	**100**	**100.00**	**100**	**Persen**	**200**	**2**
2.12.05.2.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1	Dokumen		1	Dokumen	1	100.00	1	Dokumen	2	2
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1	Dokumen		1	Dokumen	1	100.00	1	Dokumen	2	2

Sumber: Renstra Tahun 2024-2026

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan kependudukan dan pencatatan sipil perlu upaya-upaya strategis yang secara menyeluruh dan terpadu meliputi perumusan kebijakan program operasional dan kegiatan-kegiatan. Untuk itu dibutuhkan jalinan kerjasama yang kuat dan kepercayaan antara masyarakat dan instansi terkait**.**

Keberhasilan program Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sulit untuk terwujud jika tidak didukung oleh berbagai faktor internal antara lain perencanaan program yang akuntabilitas, aparat yang terampil serta dukungan dana yang memadai. Sedangkan yang menjadi faktor eksternalnya adalah bentuk kepercayaan masyarakat terhadap program-program yang ditawarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada satu tujuan mewujudkan visi dan misi Kota Pontianak yang akan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan beserta program prioritas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak mempunyai sasaran meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk mencapai sasaran tersebut dituangkan dalam beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

a. Persentase Keluarga yang Memiliki KK
b. Persentase Penduduk yang memiiki KTP
c. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang sudah memiliki KIA
d. Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akte Kelahiran
e. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perceraian
f. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan
g. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kematian

h. Persentase Pemanfaatan Database SIAK untuk kepentingan Pembangunan

Target dan realisasi indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Target dan Realisasi Indikator Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pontianak Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
				(%)	(%)	(%)
1	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase Keluarga yang memiliki KK	99,00	99,98	100,99
			Persentase Penduduk yang memiliki KTP	95,00	98,45	103,63
			Persentase anak usia 0-16 tahun yang memiliki KIA	60,00	65,00	108,33
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	98,00	98,10	100,10
			Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	60,00	71,93	119,88
			Persentase Penduduk yang memilik Akta Cerai	40,00	77,49	193,73
			Persentase Penduduk meninggal yang memilik Akta Kematian	97,00	100,00	103,09
		Meningkatnya Ketersediaan Database Kependudukan berskala Kota	Persentase pemanfaatan *Database* SIAK untuk kepentingan Pembangunan	100,00	100,00	100,00

Sumber: Renstra Perubahan Kedua Disdukcapil Kota Pontianak Tahun 2020-2024

a. Persentase Keluarga yang memiliki KK

Kartu Keluarga, yang selanjutnya disebut KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat nomor induk kependudukan, data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta

identitas anggota keluarga. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Persentase keluarga yang memiliki KK adalah jumlah kartu keluarga yang diterbitkan dibagi dengan jumlah kepala keluarga. Persentase Keluarga yang memiliki KK memiliki angka capaian sebesar 99,98 %. Pengelolaan infrastruktur jaringan yang baik turut mendukung tercapainya indikator kinerja ini. Kegiatan ini membuat masyarakat semakin menyadari pentingnya dokumen kependudukan baik KK maupun KTP elektronik yang senantiasa dibutuhkan untuk berbagai macam urusan.

b. Persentase Penduduk yang memiliki KTP

Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

Pelayanan Penerbitan KTP Elektronik adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan KTP Elektronik baru atau penggantian KTP Elektronik karena hilang, rusak, pindah datang dan perubahan elemen data bagi seluruh penduduk wajib KTP Elektronik di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah jumlah penduduk yang memiliki KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP. Jumlah penduduk yang memiliki KTP adalah sebanyak 487.680 dari 495.381 penduduk wajib KTP, sehingga diperoleh realisasi sebesar 98,45%.

Sampai dengan tahun 2024, Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan target 95,00% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 103,63%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan perekaman, pencetakan dan

pendistribusian KTP Elektronik di Kota Pontianak berjalan dengan efektif. Keberhasilan Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk didukung dengan kegiatan pelayanan aktif jemput bola perekaMAN Di Area sekoLAh tingkat SLTA (MANDALA), Ini merupakan inovasi untuk percepatan perekaman bagi pemilik KTP pemula. Di samping kegiatan pelayanan aktif jemput bola perekaman KTP di 29 Kelurahan dan di Kecamatan. Selain itu pelayanan aktif jemput bola perekaman KTP bagi ODGJ, orang sakit, Lansia dan Disabilitas (MANGGIS SI ABIL) yang merupakan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada penduduk rentan administrasi kependudukan. Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak melaksanakan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang merupakan sarana bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk menerima masukan dan memperbaiki sistem pelayanan administrasi kependudukan juga turut mendukung pencapaian indikator kinerja ini.

c. Persentase anak usia 01-17 Tahun kurang 1 hari yang sudah memiliki KIA

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

KIA dibagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama untuk anak yang berumur 0 sampai dengan kurang dari 5 tahun. Sementara itu, jenis yang kedua untuk anak yang berusia 5 tahun sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang sudah memiliki KIA dapat dirumuskan sebagai berikut Jumlah Anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang sudah memiliki

KIA dibagi Jumlah Anak usia 0-17 Tahun kurang 1 hari. Jumlah Anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang sudah memiliki KIA adalah sebanyak 121.461, sedangkan Jumlah Anak usia 0-17 Tahun kurang 1 hari sebanyak 186.864, sehingga diperoleh realisasi sebesar 65,00%. Sampai dengan tahun 2024, persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang sudah memiliki KIA mempunyai target 60,00% sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 108,33%. Keberhasilan ini didukung dengan kegiatan pelayanan aktif jemput bola di tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) dengan inovasi PElayanan Cetak KIA seHAri JadI (PECI HAJI).

d. Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran

Kutipan Akta Kelahiran adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kelahiran yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada penduduk yang baru lahir dan kepada penduduk yang belum mempunyai/belum diterbitkan kutipan Akta Kelahiran di suatu wilayah kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penerbitan kutipan Akta Kelahiran adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan kutipan akta kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa kelahiran tersebut dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan Akta Kelahiran berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam perda mengenai administrasi kependudukan. Persentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran adalah jumlah penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran dibagi jumlah penduduk usia 0-18 tahun. Penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran sebanyak 194.638 dari 198.410 penduduk usia 0-18 tahun, sehingga diperoleh realisasi sebesar 98,10%.

Tahun 2024, target persentase penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran adalah 98,00%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,10%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan jemput bola yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal pembuatan akta kelahiran, baik yang dilakukan melalui *MoU* dengan klinik-klinik bersalin dan rumah sakit, maupun pelayanan rutin yang dilakukan di kelurahan-kelurahan se-Kota Pontianak berjalan baik. Pencapaian indikator kinerja ini juga didukung oleh pengelolaan *website* dinas yang berjalan baik sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

e. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan

Sebuah pernikahan merupakan hal yang harus dilegalkan secara Negara agar pasangan suami istri memiliki perlindungan dan pengakuan tentang status pernikahan, hak dan kewajiban serta anak-anak yang akan dilahirkan kelak.

Salah satu dokumen penting yang perlu di miliki oleh pasangan suami dan istri yang telah sah menikah secara agama dan Negara adalah akta nikah. Dalam akta nikah dijelaskan tentang terjadinya perkawinan antara suami dan istri dan hal tersebut diakui oleh Negara setelah sah secara agama.

Akta nikah merupakan dokumen penting yang menjadi bukti peristiwa nikah yang sah yang mendokumentasikan pernikahan dengan pasangan. Akta Nikah memiliki kekuatan pembiktian formal karena didalamnya telah dinyatakan dan dilegalisasi oleh epjabat umum dan dicatatn secara benar oleh Negara. Selain itu, akta nikah juga memiliki kekuatan pembuktian material yang memberikan kepastian bahwa isi yang diterangkan dalam akta tersebut benar secara matetial dan benar-benar terjadi.

Persentase penduduk yang memiliki Akta Perkawinan di rumuskan yaitu jumlah penduduk yang memiliki Akta Perkawinan

dibagi jumlah penduduk berstatus kawin. Sampai dengan tahun 2024, jumlah penduduk yang memiliki Akta Perkawinan sebanyak 203.454 dari 282.847 penduduk yang berstatus kawin. Persentase penduduk yang memiliki Akta Perkawinan memiliki realisasi 71,93% dari target yang ditetapkan sebesar 60,00% sehingga memiliki capaian sebesar 119,88%.

f. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perceraian

Akta Perceraian merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta Cerai bisa diterbitkan jika gugatan/permohonan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pencatatan perceraian dilakukan dengan cara yaitu pasangan suami dan istri yang bercerai mengisi formulir pencatatan perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan putusan pengadilan dan kutipan akta perkawinan.

Persentase penduduk yang memiliki Akta Perceraian dirumuskan yaitu jumlah penduduk yang memiliki Akta perceraian dibagi jumlah penduduk berstatus cerai hidup, sampai dengan tahun 2024 jumlah penduduk yang memiliki Akta perceraian adalah sebanyak 12.174 sedangkan jumlah penduduk berstatus cerai hidup tercatat dan tidak tercatat sebanyak 15.710, sehingga diperoleh realisasi sebesar 77,49% dari target yang ditetapkan sebesar 40,00%, sehingga diperoleh capaian kinerjanya sebesar 193,73%.

g. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kematian

Kutipan akta kematian adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kematian yang meregistrasi setiap kematian sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada keluarga penduduk yang melaporkan peristiwa kematian. Penerbitan kutipan akta kematian

adalah pelayanan terhadap keluarga penduduk yang mengajukan penerbitan kutipan akta kematian paling lambat 30 hari sejak peristiwa kematian dan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota menerbitkan kutipan akta kematian berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai administrasi kependudukan.

Persentase penduduk yang meninggal yang memiliki akta kematian adalah jumlah penduduk yang memiliki akta kematian dibagi jumlah pelaporan kematian.

Sampai dengan tahun 2024, jumlah 45 penduduk yang memiliki akta kematian sebanyak 46.640 dari 46.640 pelaporan akta kematian, sehingga diperoleh realisasi sebesar 100,00%. Target persentase penduduk yang memiliki akta kematian sebesar 97,00% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 103,09%.

Serupa dengan pelayanan kutipan akta kelahiran, pelayanan jemput bola yang dilakukan dalam rangka percepatan kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal dunia yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak membuahkan hasil yang memuaskan.

h. Persentase Pemanfaatan *Database* SIAK untuk Kepentingan Pembangunan

Berdasarkan Pasal 58 ayat 4 UU Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa Data Kependudukan digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertangungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembanguan demokrasi dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya ketersediaan *Database* kependudukan bersakala kota dan dapat di rumuskan yaitu ketersediaan *Database* SIAK untuk pembangunan

dibagi 5 (lima) jenis pelayanan sesuai peraturan. Untuk tahun 2024 telah dicapai.

Jenis pengelompokkan kepentingan pemanfaatan data sesuai peraturan perundang-undangan dijelaskan sebagai berikut :

1. Pelayanan publik yang menggunakan NIK sebagai Single Identity Number antara lain untuk pengurusan administrasi kependudukan di Kota Pontianak pada 6 kecamatan dan 29 kelurahan, penerbitan surat izin mengemudi di Kepolisian, pelayanan izin usaha, pelayanan wajib pajak di layanan publik bidang perpajakan, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, pelayanan paspor, pelayanan jaminan kesehatan masyarakat di BPJS Kesehatan, dan jaminan sosial tenaga kerja di BPJS Ketenagakerjaan.
2. Perencanaan pembangunan yakni untuk perencanaan pembangunan Kota Pontianak seperti perencanaan pendidikan seperti verifikasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru, perencanaan kesehatan untuk verifikasi dan validasi Penerima Bantuan Iuran APBD dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan yaitu verifikasi dan validasi data Bantuan Sosial Uang Tunai.
3. Alokasi anggaran dalam penentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan verifikasi dan validasi data Wajib Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
4. Pembangunan demokrasi yaitu penyiapan data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) pada Pemilihan Umum Presiden dengan total 490.015 jiwa dan Pemilihan Kepala Daerah yang berjumlah 491.059 jiwa serta Pengawasan Pemilihan Umum.
5. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal antara lain untuk melakukan verifikasi dan validasi data pelaku kriminal berdasarkan surat resmi permintaan Aparat Penegak Hukum

(Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Kejaksaaan Tinggi), dan berupa koordinasi dari Badan Intelijen Negara.

Untuk target indikator pada tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Target dan Indikator Kinerja
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	**2**	**3**
1	Persentase Keluarga yang Memiliki KK	99,00
2	Persentase Penduduk yang memiiki KTP	95,00
3	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang sudah memiliki KIA	60,00
4	Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	98,00
5	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	60,00
6	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perceraian	40,00
7	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kematian	97,00
8	Persentase Pemanfaatan Database SIAK untuk kepentingan Pembangunan	100,00

Sumber: Renstra Disdukcapil Tahun 2024-2026

Analisis kinerja pelayanan dari tahun (n-2) , tahun(n-1), tahun n, tahun (n+1) dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)	Tahun (n)	Tahun (n+1)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
	SASARAN											
1	Persentase Keluarga yang Memiliki KK	-	-	98,00	99,00	99,10	99,20	99,99	99,98	98,00	98,50	
2	Persentase Penduduk yang memiliki KTP	-	-	94,00	95,00	96,00	97,00	97,95	98,45	94,00	94,50	
3	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang sudah memiliki KIA	-	-	50,00	60,00	70,00	80,00	53,76	65,00	50,00	50,50	
4	Persentase Penduduk Non Permanen yang memiliki Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen	-	-	98,50	-	-	-	100,00	-	98,50	99,00	
5	Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	-	-	97,00	98,00	98,25	98,50	99,30	98,10	97,00	97,50	
6	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan	-	-	57,50	60,00	62,50	65,00	70,93	71,93	57,50	58,00	
7	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perceraian	-	-	37,50	40,00	42,50	45,00	76,95	77,49	37,50	38,00	
8	Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status	-	-	37,50	-	-	-	100,00	-	37,50	38,00	
9	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kematian	-	-	95,00	97,00	97,25	97,50	88,21	100,00	95,00	95,50	
10	Persentase jumlah Instansi yang telah melakukan PKS Pemanfaatan Data	-	-	62,50	65,00	-	-	80,95	-	62,50	63,00	
11	Persentase Pemanfaatan Database SIAK untuk kepentingan Pembangunan	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
12	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	Sangat Baik	-	-	-	Sangat Baik	-	Sangat Baik	Sangat Baik	

Sumber: Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2024

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Penerapan Identitas Kependudukan Digital (Digital ID)

Digital ID ini merupakan informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Mulai Bulan Juli Tahun 2022, penerapan Digital ID masih diujicobakan pada internal Aparatur Sipil Negara Disdukcapil di tiap daerah, secara bertahap akan diterapkan pada seluruh penduduk. Tercatat sampai dengan 14 April 2023, ada 3098 pemilik IKD di Kota Pontianak.

2.3.2. Peralihan Kartu Keluarga Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (KK SIAK) yang terintegrasi

Berdasarkan Data SIAK Hasil Konsolidasi Berkala Kemendagri Semester II tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sudah mencetak 204.053 kartu keluarga. Namun disinyalir masih ada penduduk yang belum memiliki Kartu Keluarga Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (KK SIAK) yang terintegrasi dan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE).

2.3.3. Penerapan Kertas pada Dokumen Kependudukan

Berdasarkan Permendagri nomor 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan, maka sejak 1 Juli 2020 seluruh dokumen kependudukan dan pencatatan sipil menggunakan kertas HVS 80 gr ukuran A4 warna putih. Namun masyarakat masih terbiasa dengan Kartu Keluarga model lama dan belum terbiasa mengakses *email* dimana *file* dokumen tersebut bisa pula dicetak secara mandiri, bahkan dengan kertas biasa. Hal ini menjadikan pegawai yang memberikan pelayanan harus berupaya lebih untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut. Dan kurang ramah lingkungan jika tidak sebisa mungkin menerapkan *paperless* dalam administrasi kependudukan.

2.3.4. Pembatasan Pengelolaan Data di Daerah

Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilaksanakan mulai tahun 2020 sehingga

daerah wajib menerapkan SIAK Terpusat. Untuk Kota Pontianak mulai menerapkan SIAK Terpusat ini sejak 20 september 2021.

Sehingga berdampak pada penyajian data kependudukan yang tidak dapat diolah secara lengkap karena semua tabel data kependudukan hanya bisa disajikan sesuai dengan apa yang diberikan oleh Tim Teknis dari Ditjen Dukcapil Kemendagri (data agregat) setiap semesternya dan tidak dapat diolah dan dikembangkan sesuai kebutuhan daerah.

Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pun memiliki peluang (*Opportunities)* adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk yang cukup besar sebagai modal pembangunan.
2. Partisipasi masyarakat semakin besar.
3. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat.
4. Perkembangan kota yang semakin cepat seiring perkembangan masyarakat.
5. Adanya komitmen untuk mensukseskan gerakan tertib administrasi kependudukan.

Tantangan (*Threats)* merupakan situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi perangkat daerah yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi perangkat daerah dimasa depan. Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak diantaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat.
3. Lemahnya penegakan hukum atas penyalahgunaan dokumen kependudukan.
4. Mobilitas penduduk yang cukup tinggi dari luar dan dalam daerah.
5. Tidak stabilnya jaringan internet baik jaringan internet daerah maupun pusat, sehingga mengganggu perekaman, pengiriman data hasil perekaman, verifikasi, validasi data dan pencetakan dokumen.

6. Terbatasnya ketersediaan blangko KTP elektronik yang bersumber dari APBN Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

Maka rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan media sosial sebagai sarana sosialisasi sekaligus komunikasi dengan warga Kota Pontianak.
2. Terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kecepatan dan kenyamanan pelayanan yang diterima oleh masyarakat.
3. Perlu adanya penegakan hukum dan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang menyalahgunakan dokumen kependudukan.
4. Adanya kebijakan untuk kemudahan perpindahan penduduk antar kota/ kabupaten dan propinsi.
5. Disokongnya perangkat keras dan lunak untuk operasional pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
6. Peningkatan ketersediaan blangko KTP Elektronik agar dapat memenuhi kebutuhan daerah dan lain-lain.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD sudah memenuhi hasil analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak di Tahun 2025. Hanya saja diharapkan agar ada peningkatan besaran pagu anggaran untuk program dan kegiatan yang menyentuh langsung pelayanan kepada masyarakat.

Program-program yang mendukung Rencana Kerja 2025 dalam pencapaian target indikator kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Pontianak

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan**	**100**	**%**	**10.306.057.720**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan**	**100**	**%**	**11.655.489.415**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**30.722.900**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**30.722.900**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	5	dokumen	8.201.900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	5	dokumen	8.201.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	dokumen	1.653.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	dokumen	1.653.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	laporan	16.108.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	laporan	16.108.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5	laporan	4.760.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5	laporan	4.760.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**6.753.477.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**6.753.477.000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	orang/bulan	6.521.784.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	orang/bulan	6.521.784.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	228.240.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen	228.240.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	6	laporan	3.453.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	6	laporan	3.453.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya**	**57**	**ASN**	**47.995.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya**	**57**	**ASN**	**185.500.000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55	paket	35.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	55	paket	35.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	orang	12.495.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	orang	60.495.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**1.421.827.180**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**2.025.753.875**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	paket	11.873.875	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	paket	11.873.875	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	paket	1.291.076.700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	paket	1.700.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	paket	39.880.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	paket	39.880.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	24.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	24.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	54.996.605	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35	laporan	250.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**%**	**462.266.100**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**%**	**1.070.266.100**	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	unit	462.266.100	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	36	unit	1.070.266.100	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**%**	**1.473.949.540**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**%**	**1.473.949.540**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	26.900.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	26.900.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	30.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	30.400.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	1.416.649.540	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	1.416.649.540	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**%**	**115.820.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**%**	**115.820.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	unit	76.650.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	unit	76.650.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	unit	39.170.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	unit	39.170.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
2	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga**	**95,00**	**%**	**116.104.200**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga**	**95,00**	**%**	**190.704.200**	
		Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP	**82,50**	**%**			**Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP**	**82,50**	**%**		
		Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA	**87,50**	**%**			**Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA**	**87,50**	**%**		
		Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen	**99,25**	**%**			**Persentase penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen**	**99,25**	**%**		
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**100,00**	**%**	**51.104.200**	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**100,00**	**%**	**125.704.200**	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	670	dokumen	12.935.000	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	670	dokumen	12.935.000	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	56	laporan	35.184.200	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	80	laporan	61.884.200	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	13.000	dokumen	2.985.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	20.000	dokumen	50.885.000	
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	**Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**100,00**	**%**	**65.000.000**	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**100,00**	**%**	**65.000.000**	
	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	100	dokumen	65.000.000	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	100	dokumen	65.000.000	
3	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran**	**60,00**	**%**	**257.687.400**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Penduduk berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran**	**60,00**	**%**	**868.025.700**	
		Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status	**42,50**	**%**			**Persentase anak yang memiliki dokumen perubahan status**	**42,50**	**%**		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	
		Persentase Penerbitan akta Perkawinan (Non Muslim)	**62,50**	**%**			**Persentase Penerbitan akta Perkawinan (Non Muslim)**	**62,50**	**%**		
		Persentase Penerbitan akta Perceraian (Non Muslim)	**42,50**	**%**			**Persentase Penerbitan akta Perceraian (Non Muslim)**	**42,50**	**%**		
		Persentase Penerbitan Akta Kematian	**42,50**	**%**			**Persentase Penerbitan Akta Kematian**	**42,50**	**%**		
	Pelayanan Pencatatan Sipil	**Persentrase Pelayanan Pencatatan Sipil**	**100,00**	**%**	**128.788.900**	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Persentrase Pelayanan Pencatatan Sipil**	**100,00**	**%**	**568.627.100**	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	12.000	dokumen	12.203.900	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	20.000	dokumen	327.647.400	
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	18	layanan	116.585.000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	26	layanan	240.979.700	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**100,00**	**%**	**99.864.000**	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**100,00**	**%**	**208.784.100**	
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1	laporan	34.864.000	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	3	laporan	58.429.100	
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	40	laporan	65.000.000	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	80	laporan	150.355.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**100,00**	**%**	**29.034.500**	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**100,00**	**%**	**90.614.500**	
	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	2	laporan	29.034.500	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	2	laporan	90.614.500	
4	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Agregat Kependudukan**	**85,00**	**%**	**244.155.080**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Jumlah Instansi yang telah memanfaatkan Data Agregat Kependudukan**	**85,00**	**%**	**244.155.080**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp.)	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	**Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**100,00**	**%**	**89.723.080**	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**100,00**	**%**	**89.723.080**	
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1	dokumen	89.723.080	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1	dokumen	89.723.080	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**100,00**	**%**	**154.432.000**	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**100,00**	**%**	**154.432.000**	
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4	laporan	100.000.000	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	4	laporan	100.000.000	
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	2	laporan	54.432.000	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	2	laporan	54.432.000	
5	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase penyajian komponen data dalam pofil kependudukan**	**100,00**	**%**	**16.944.600**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase penyajian komponen data dalam pofil kependudukan**	**100,00**	**%**	**42.344.600**	
	Penyusunan Profil Kependudukan	**Persentase terpenuhinya penyediaan buku profil**	**100,00**	**%**	**16.944.600**	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**Persentase terpenuhinya penyediaan buku profil**	**100,00**	**%**	**42.344.600**	
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1	dokumen	2.136.600	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1	dokumen	2.136.600	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1	dokumen	14.808.000	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1	dokumen	40.208.000	
					10.940.949.000					**12.911.213.995**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil untuk masyarakat di wujudkan dalam bentuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk elektronik, penerbitan Kartu Keluarga, penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), penerbitan akta kelahiran dan akta kematian serta semua pengurusan dokumen lainnya terkait kependudukan dan pencatatan sipil. Pelayanan KTP elektronik, KK, akta kelahiran, akta kematian serta semua pengurusan dokumen kependudukan dan terus di tingkatkan dengan menyiapkan unit mobil keliling lengkap dengan perlengkapan cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil. Perbaikan pelayanan dilakukan dengan penyerderhanaan prosedur, pelayanan ditempat-tempat tertentu misalnya *Car free Day* serta kecepatan pelayanan dilakukan dengan modernisasi dan penerapan teknologi berbasis elektronik dengan diberlakukannya pendaftaran pengurusan secara *online.*

Sehingga dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **tidak langsung mengakomodir** usulan program dan kegiatan yang secara fisik di usulkan oleh masyarakat, yang dilakukan adalah selalu meningkatkan pelayanan sesuai dengan keinginan masyarakat yaitu pelayanan prima.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan harus dilaksanakan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib dokumen kependudukan. Dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 beserta berbagai aturan di bawahnya maka penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2022 merupakan kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan sebelumnya. Kebijakan Nasional yang didukung DPR telah memprogramkan 5 (lima) program strategis nasional yaitu :

1. Pemutakhiran data kependudukan;
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
3. Penerapan KTP Elektronik
4. Bidang Pencatatan Sipil “Semua anak Indonesia tercatat kelahirannya”;
5. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).

Beberapa Kebijakan Nasional :

a) SIAK TERPUSAT

SIAK Terpusat merupakan sistem digitalisasi yang digunakan agar pelayanan kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) dapat terkoneksi daring secara nasional. Sistem terpusat ini lebih efisien dari segi sistem keamanan siber dan dapat memberikan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) dengan lebih cepat.

Isu digitalisasi pada sistem dukcapil ini terus bertransformasi. Dimulai sejak 1995 dengan nama Sistem Manajemen Informasi Kependudukan (SIMDUK), lalu berubah pada 2000 menjadi Sistem Informasi Registrasi Penduduk (SIREP), dan terakhir pada 2022 berubah nomenklatur menjadi SIAK Terpusat.

Pemerintah Kota Pontianak turut menjadi daerah yang menyelenggarakan SIAK Terpusat. Dengan tujuan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi demi mewujudkan pelayanan kependudukan yang lebih cepat dan berkualitas. Diantara 514 dinas Dukcapil yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia, Kota Pontianak salah satu yang telah bermigrasi pada SIAK terpusat dengan baik, tanpa menghentikan pelayanan rutin kepada masyarakat.

Pada Tahun 2022, Ditjen Dukcapil Kemendagri mempercepat proses migrasi data ini dari SIAK terdistribusi menuju SIAK terpusat tersebut. Konsentrasi SIAK terpusat ini salah satunya menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan jadwal bagi Kemendagri untuk menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) pada 14 Oktober 2022 atau 16 bulan sebelum pencoblosan. Hal ini sebagai dukungan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 yang tahapannya sudah dimulai tahun ini.

b) IDENTITAS DIGITAL (DIGITAL ID)

Digital-ID merupakan petunjuk identitas berbentuk digital yang diberikan kepada seseorang setelah diidentifikasi dan diverifikasi secara fisik oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Isu Digital ID ini muncul dari hasil kajian aktual Penerapan Digital-ID dalam Pelayanan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disusun Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kemendagri pada 2021. Isu ini mendapat antusiasme masyarakat. Meski masih ada problem perlunya menyiapkan serangkaian upaya peningkatan literasi digital bagi masyarakat. Meningkatkan literasi digital, terutama untuk masyarakat perdesaan dan 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal) dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan lembaga non-profit.

Pemerintah Kota Pontianak siap turut melakukan sosialisasi dan diseminasi terkait Digital ID. Di daerah berpeluang membuat grup-grup fasilitator untuk menjangkau masyarakat di tingkat bawah. Bersamaan hal tersebut, Kemendagri mulai memetakan

peluang, potensi, dan beragam hal yang perlu diperhatikan untuk penerapan digital-ID.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

A. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan instansi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, menggambarkan arah strategis instansi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi serta dirumuskan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga. Tujuan juga harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur instansi sehingga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Karenanya tujuan harus dapat menyediakan dasar yang kuat untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) (*key performance indicator*) yang terukur.

Adapun rumusan tujuan dalam perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2024-2026 adalah:

Tujuan : “Meningkatkan Kualitas Layanan Publik”

2. Sasaran

Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dicapai untuk mencapai tujuan. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria SMART. Kriteria SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*Specific*), terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Attainable*), nyata (*Realistic*) dan tepat waktu (*Time Bound*). Penentuan sasaran

strategis yang tepat dan terukur akan menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang menyangkut keseluruhan instansi berikut satuan kerjanya, serta meletakkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau kinerja instansi.

Sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll Kota Pontianak Tahun 2024-2026 adalah:

a. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan.
b. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil.
c. Meningkatnya Ketersediaan Database Kependudukan berskala Kota

Untuk menilai keberhasilan pencapaiannya sasaran ini diukur dengan indikator-indikator sebagai tolok ukurnya, yaitu:

a. Persentase Keluarga yang Memiliki KK
b. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang sudah memiliki KIA
c. Persentase Penduduk yang memiiki KTP
d. Persentase Penduduk yang berusia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran
e. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perceraian
f. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Perkawinan
g. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kematian
h. Persentase Pemanfaatan Database SIAK untuk kepentingan Pembangunan

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Program/Kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program prioritas, indikator kinerja program/kegiatan, tahun indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap pada matrik rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Program prioritas yang direncanakan dibiayai tahun 2025 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Prioritas pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2025 diselaraskan dengan pelaksanaan

urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten, dijabarkan sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
2. **Program Pendaftaran Penduduk**
3. **Program Pencatatan Sipil**
4. **Program Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan**
5. **Program Pengelolaan Profil Kependudukan**

Program-program ini merupakan pedoman bagi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

Adanya beberapa sub kegiatan yang mengalami perubahan pagu anggaran dikarenakan adanya *refocusing* anggaran serta efisiensi. Selain itu terdapat pula perubahan target indikator pada beberapa sub kegiatan, antara lain :

1. **Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan,**Adanya penambahan target indikator dari 300 dokumen menjadi 340 dokumen, karena adanya penyesuaian berdasarkan trend yang sudah tercapai
2. **Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk,** Adanya penambahan target indikator dari 80 laporan menjadi 100 laporan, karena adanya penyesuaian berdasarkan trend yang sudah tercapai
3. **Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan** .Adanya pengurangan target indikator dari 30.000 dokumen menjadi 24.000 dokumen, karena adanya penyesuaian berdasarkan trend yang sudah tercapai
4. **Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk.**Adanya pengurangan target indikator dari 6.246

dokumen menjadi 2.700 dokumen, karena adanya penyesuaian berdasarkan ketersediaan anggaran

5. **Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil** Adanya pengurangan target indikator dari 18 layanan menjadi 1 layanan, karena adanya *refocussing* pada sub kegiatan tesebut
6. **Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil** Adanya pengurangan target indikator dari 80 laporan menjadi 51 laporan, karena adanya *refocussing* pada sub kegiatan tesebut

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sesuai dengan berbagai isu-isu penting yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, dalam menopang salah satu sasaran dari pemerintah daerah yaitu ***Meningkatnya Kualitas Layanan Publik.*** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak menciptakan pemerataan pelayanan dengan berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta aktualisasi kondisi pelayanan saat ini dikaitkan dengan kondisi masyarakat kota Pontianak dalam bidang administrasi kependudukan.

Untuk menjawab dan mengatasi tantangan pelayanan administrasi kependudukan maka program dan kegiatan yang dirumuskan dan akan dilaksanakan di tahun 2025, berikut kami sajikan tabel IV.1 terkait dengan rumusan rencana program dan kegiatan dan perkiraan maju dapat dilihat berikut ini:

Tabel IV.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							13.386.002.701,00	14.179.181.686,00	13.668.650.284,00							11.219.308.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.386.002.701,00	14.179.181.686,00	13.668.650.284,00							11.219.308.000,00	
	2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							13.386.002.701,00	14.179.181.686,00	13.668.650.284,00							11.219.308.000,00	
1	2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	12.675.672.881,00	13.388.001.066,00	13.240.162.364,00							10.559.172.156,00	
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	44.171.700,00	41.695.200,00	41.695.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Disdukcapil		32.259.045,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	20.203.700,00	16.795.200,00	16.795.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			8.611.995,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		penyeludupan.					
	2	12	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.100.000,00	3.720.000,00	2.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			1.735.650,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	16.108.000,00	10.930.000,00	9.100.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			16.913.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	4.760.000,00	10.250.000,00	8.298.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			4.998.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		dan penyeludupan.					
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	8.864.694.000,00	9.151.211.985,00	9.151.211.985,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Disdukcapil		6.842.961.650,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	8.633.001.000,00	8.917.179.985,00	8.917.181.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			6.599.684.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	228.240.000,00	230.640.000,00	194.520.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			239.652.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		penyeludupan.					
	2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	3.453.000,00	3.392.000,00	1.562.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			3.625.650,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	43.085.000,00	56.350.000,00	56.350.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	ASN Disdukcapil		50.394.750,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				54 Paket	54 Paket	36.590.000,00	50.250.000,00	50.250.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			37.275.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		penyeludupan.					
	2	12	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	6.495.000,00	6.100.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			13.119.750,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	1.359.184.082,00	1.480.610.781,00	1.480.610.781,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Disdukcapil		1.492.918.539,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	11.798.000,00	14.408.000,00	14.408.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			12.467.569,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		penyeludupan.					
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	1.184.509.477,00	1.256.789.200,00	1.203.794.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			1.355.630.535,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	44.880.000,00	105.472.399,00	101.141.399,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			41.874.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	28.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			25.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		narkoba, judi, dan penyeludupan.					
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	89.996.605,00	68.941.182,00	43.617.591,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			57.746.435,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	654.000.000,00	1.056.610.000,00	1.056.610.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Disdukcapil		485.379.405,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	350.000.000,00	337.400.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.					
	2	12	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				34 Unit	34 Unit	354.000.000,00	706.610.000,00	706.610.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			485.379.405,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	1.555.968.099,00	1.443.946.000,00	1.443.946.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Disdukcapil		1.533.647.767,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	30.650.000,00	30.650.000,00	45.811.874,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			28.245.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		narkoba, judi, dan penyeludupan.					
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30.400.000,00	18.700.000,00	18.700.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			31.920.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.494.918.099,00	1.394.596.000,00	1.394.596.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			1.473.482.767,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	154.570.000,00	157.577.100,00	157.577.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi,	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Disdukcapil		121.611.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		dan penyeludupan.					
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	115.400.000,00	115.400.000,00	96.700.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			80.482.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	39.170.000,00	42.177.100,00	42.177.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			41.128.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penyelesaian Penerbitan KTP Persentase Penyelesaian Penerbitan KIA Persentase Penyelesaian Penerbitan Kartu Keluarga Persentase Penyelesaian Surat Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non Permanen				82,5 87,5 95 99,25 % % % %	82,5 87,5 95 99,25 % % % %	129.104.200,00	92.775.000,00	56.162.000,00							118.659.410,00	
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-			100 %	100 %	69.104.200,00	62.815.000,00	62.815.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Lansia, ODGJ, Orang Sakit dan Disabilitas dan siswa sekolah (SD/SMP/SMA) di Kota Pontianak		53.659.410,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				300 Dokumen	340 Dokumen	20.935.000,00	20.935.000,00	11.735.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			13.581.750,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk																	
							Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				80 Laporan	100 Laporan	45.184.200,00	38.895.000,00	22.595.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			36.943.410,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan																	
							Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				30000 Dokumen	24000 Dokumen	2.985.000,00	2.985.000,00	2.985.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			3.134.250,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-			100 %	100 %	60.000.000,00	29.960.000,00	29.960.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat di Kota Pontianak		65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				6246 Dokumen	2700 Dokumen	60.000.000,00	29.960.000,00	18.847.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3	2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-				-	-	328.761.000,00	406.561.000,00	96.507.300,00							267.321.770,00	
	2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil	-			100 %	100 %	217.147.400,00	301.932.000,00	301.932.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Disdukcapil, Masyarakat di Kota Pontianak		135.228.345,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				12000 Dokumen	12000 Dokumen	7.147.400,00	11.572.300,00	11.572.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			12.814.095,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				18 Layanan	1 Layanan	210.000.000,00	290.359.700,00	7.210.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			122.414.250,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-			100 %	100 %	86.779.100,00	74.879.000,00	74.879.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Perangkat Daerah terkait, Yayasan Pemakaman,Masyarakat di Kota Pontianak		101.607.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02	0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil																		
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	26.779.100,00	26.779.000,00	26.779.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			36.607.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil																		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				80 Laporan	51 Laporan	60.000.000,00	48.100.000,00	21.196.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-			100 %	100 %	24.834.500,00	29.750.000,00	29.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Pengadilan Agama Kota Pontianak, Kemenag Kota Pontianak		30.486.225,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	03	2.03	0003	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil																		
							Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan				2 Laporan	2 Laporan	24.834.500,00	29.750.000,00	29.750.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			30.486.225,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	2	1 2	0 4			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Jumlah Instansi yang telah Memanfaatkan Data Agregat Kependudukan				85 %	85 %	229.830.020,00	253.548.020,00	237.522.020,00							256.362.834,00	
	2	1 2	0 4	2.0 1		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-			100 %	100 %	88.400.000,00	73.553.000,00	73.553.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Perangkat Daerah		94.209.234,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 4	2.0 1	000 2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																	
							Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	88.400.000,00	73.553.000,00	69.527.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			94.209.234,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	1 2	0 4	2.0 3		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-			100 %	100 %	141.430.020,00	179.995.020,00	179.995.020,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Pemangku kepentingan (Perangkat Daerah, Lembaga, swasta) dan masyarakat		162.153.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		penyeludupan.					
	2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				4 Laporan	4 Laporan	108.630.020,00	116.653.020,00	129.653.020,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			105.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	04	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	32.800.000,00	63.342.000,00	38.342.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			57.153.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase penyajian komponen data dalam profil kependudukan				100 %	100 %	22.634.600,00	38.296.600,00	38.296.600,00							17.791.830,00	
	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase terpenuhinya penyediaan buku profil kependudukan	-			100 %	100 %	22.634.600,00	38.296.600,00	38.296.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Pemangku kepentingan (Perangkat Daerah, Lembaga, swasta) dan masyarakat		17.791.830,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																		narkoba, judi, dan penyeludupan.					
	2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	2.301.600,00	4.576.600,00	4.576.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			2.243.430,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																	
							Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	20.333.000,00	33.720.000,00	33.720.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			15.548.400,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	JUMLAH												**13.386.002.701,00**	**14.179.181.686,00**	**13.668.650.284,00**							**11.219.308.000,00**	

Sumber: SIPD, Tahun 2025

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Tahun 2025 merupakan suatu dokumen yang disusun dalam kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari Siklus Akuntabilitas Kinerja yang dimulai dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan diakhiri dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Rencana Kerja (Renja) merupakan Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kerja memberikan gambaran lebih mendetail tentang sasaran serta program dan kegiatan yang ditetapkan sebagaisuatu strategi untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dalam dokumen ini termuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja khususnya *outcomes* dituangkan dalam dokumen yang termuat dalam indikator sasaran. Indikator sasaran tersebut merupakan hasil (*outcomes*) dari kegiatan yang akan dilaksanakan dan diharapkan dapat diukur capaian kinerjanya.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2025 akan melaksanakan 5 program, 15 kegiatan dan 34 sub kegiatan untuk mendukung pelaksanaan penerapan KTP-el dan dokumen pencatatan sipil di Kota Pontianak yang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi.

Setelah dilakukan evaluasi/pengukuran terhadap kinerja, baik kinerja kegiatan, program maupun kebijakan, diharapkan menjelang akhir Tahun Anggaran 2025 telah mencapai sasaran kinerja kegiatan sebagaimana yang direncanakan.

Adapun keberhasilan terhadap capaian kinerja tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain:

1. Meningkatnya kemampuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Meningkatnya tertib administrasi Aparat petugas pelaksana pelayanan sesuai standar nasional; kependudukan, pendokumentasian akta catatan sipil serta tersedianya Database Kependudukan;
3. Meningkatnya kepedulian masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

Selanjutnya kami menyadari bahwa Perubahan Rencana Kerja yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik berbagai pihak untuk penyempurnaan dimasa-masa yang akan datang.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak ini dapat mejadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat untuk mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pontianak, Juni 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pontianak

ERMA SURYANI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19671101 198803 2 004

Rencana Kerja (Renja) Perubahan

Tahun 2025

DINAS PERHUBUNGAN

KOTA PONTIANAK

KATA PENGANTAR

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah maka sebagai rangkaian dokumen perencanaan pembangunan daerah, Dinas Perhubungan Kota Pontianak menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 (Tahun ke-2) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2024 s/d 2026.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan merupakan penyesuaian dan perubahan terhadap RENJA awal/murni tahun 2025 yang disusun pada tahun berjalan. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 memberikan gambaran terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan penyesuaian terhadap kondisi saat ini dan berdasarkan prioritas kebutuhan pencapaian tujuan Perangkat Daerah pada tahun 2025 dengan indikator output dan indikator outcomes yang akan dicapai.

Dalam penyusunan Renja Perubahan ini, masukan dan saran tentunya sangat diharapkan untuk dapat lebih menyempurnakan RENJA menuju Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang responsive dan aspiratif.

Pontianak, Mei 2025

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Pontianak,

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PERHUBUNGAN

H. Y. TRISNA IBRAHIM, ST, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710719 199803 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

I. PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Landasan Hukum I-2
1.3. Maksud dan Tujuan. I-5
1.4. Sistematika Penulisan I-6

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA II-1

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja s.d Triwulan II Tahun 2025 . . . . . II-1

III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN III-1

3.1. Rencana Kerja III-1
3.2. Pendanaan III-30

IV. PENUTUP IV-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan Tata Cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana–rencana pembangunan baik dalam Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menuangkan langkah-langkah dan kebijakan yang responsive terhadap perubahan yang terjadi baik yang berhubungan dengan kompleksitas lingkungan internal maupun lingkungan ekternal. Selain itu Renja Perangkat Daerah merupakan Dokumen yang mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan salah satu dokumen yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan.

Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk mempersiapkan diri agar eksis dan berhasil dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus di susun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, untuk itu Satuan Kerja Perangkat Daerah Perlu melakukan penyusunan terhadap Rencana Kerja (Renja) Tahun Berjalan sebagai evaluasi dan penyesuaian terhadap perubahan Kegiatan dan proses penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2022 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73);
17. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);
19. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 123 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 123).
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).

21. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 14).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 10).
23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 15.1 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 15.1).
24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 23).
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
26. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2024-2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan maksud menyiapkan dokumen sinkronisasi dengan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak dan menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025.

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2025 adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kota Pontianak disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) serta Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun berjalan (tahun 2025) hingga pelaksanaan pada Triwulan II, mengacu pada APBD murni tahun berjalan (2025), yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD Tahun 2025 hingga Triwulan II.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini memuat uraian tentang Rencana Kerja yaitu Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun Berjalan.

BAB IV. PENUTUP

Dalam Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2025

Dalam rencana jangka waktu 3 tahun yaitu 2024-2026, dan hingga Triwulan ke II tahun kedua (2025) atau tahun berjalan, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan berdasarkan program-program strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Bidang Perhubungan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun sasaran strategis serta program yang dilaksanakan pada tahun 2025 oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak yaitu sebagaimana berikut :

1. Sasaran ***Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan***, yang dicapai melalui pelaksanaan Program :
   1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Sasaran ***Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan***, yang dicapai melalui pelaksanaan Program :
   1) Program Pengelolaan Pelayaran

Adapun secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Program	Anggaran Perubahan (Rp)
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	37.986.956.346
2.	Program Pengelolaan Pelayaran	1.056.649.180
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.844.479.404
	Total	***56.925.584.930***

Untuk Anggaran tahun 2025 analisa penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan hanya terbatas sampai dengan triwulan II (mei) karena merupakan tahun berjalan yang mana pencapaian kinerja yaitu sebesar 36,49%.

Adapun secara rinci pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Perhubungan hingga Triwulan II pada tahun 2025 (tahun berjalan), sebagaimana berikut ini :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1.1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Indikator kegiatan yaitu jumlah perlengkapan jalan dan pendukung lalu lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas adalah 16 jenis perlengkapan jalan dari target 16 jenis.

1.1.1. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini belum terealisasi dari target anggaran Rp. 2.373.084.168 . Belum ada capaian realisasi fisik dari target 112 unit.

1.1.2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 44.900.000 dari target anggaran Rp. 2.990.895.777.atau 1,5%. Capaian realisasi fisik adalah 61 unit yaitu pengadaan rambu 75 cm dan lampu LED dari target fisik 289 unit.

1.1.3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 9.997.383.625 dari target anggaran Rp. 27.791.947.961 atau 35,97 %. Realisasi fisik 287 unit yaitu pemeliharaan PJU dari target fisik 1011 unit.

1.2. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.

Indikator kegiatan yaitu jumlah kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan II adalah 41,67% kegiatan dari target 100%.

1.2.1. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/ Kota.

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 407.021.124 dari target anggaran Rp. 1.341.228.280,00 atau 30,35%. Realisasi fisik adalah 5 laporan

pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota dari target 12 laporan.

1.2.2. Forum Lalu Lintas dan Angkutran Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 46.680.000 dari target anggaran Rp. 167.082.000,00 atau 27,94%. Realisasi fisik 5 laporan yang telah dihasilkan sampai dengan triwulan II dari target fisik 12 laporan.

1.3. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kegiatan yaitu persentase pelaksanaan penyediaan angkutan umum dengan target 100% dan telah terealisasi 100%.

1.3.1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 261.829.017 dari target anggaran Rp. 941.484.000,00 atau 27,81%. Realisasi fisik telah terlaksana 10 unit kendaraan BRT.

1.3.2. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 16.992.680 dari target anggaran Rp. 22.771.920,00 atau 74,62%. Realisasi fisik 5 laporan kegiatan pengendalian dan pengawasan dari target fisik 12 laporan.

1.4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Indikator kegiatan yaitu jumlah lokasi penyelenggaraan dan pengawasan titik perparkiran sampai denga triwulan II adalah 191 titik perparkiran dari target 191 titik.

1.4.1 *Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota.*

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 483.119.546 dari target anggaran Rp. 1.282.389.540,00 atau 37,67%. Realisasi fisik 5 laporan dari target 12 laporan.

1.5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Indikator kegiatan yaitu jumlah kendaraan bermotor yang diuji sampai dengan triwulan II (mei) adalah sebanyak 3.375 unit kendaraan dari target 17.200 unit kendaraan atau 8,29%.

1.5.1. Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor

Sub Kegiatan ini belum terealisasi dari target anggaran Rp. 345.025.000. Realisasi fisik belum ada dari target fisik 1 unit.

1.5.2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 41.145.060,00 dari target anggaran Rp. 176.919.200,00 atau 23,26%. Realisasi fisik yaitu 1 unit sapras yaitu pemeliharaan genset dari target fisik 2 unit.

1.5.3. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 6.624.000,00 dari target anggaran Rp. 54.128.500,00 atau 12,24%. Kegiatan pengawasan PKB telah dilaksanakan sebanyak 5 laporan sampai dengan triwulan II dari target 12 laporan.

2. Program Pengelolaan Pelayaran

2.1. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Indikator kegiatan yaitu Persentase Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau. Sampai dengan triwulan II kegiatan ini telah terlaksana 66,67% dari target 100%.

2.1.1. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 174.042.590 dari target anggaran Rp. 678.629.180 atau 25,65%. Realisasi fisik 5 unit Pelabuhan sungai dan danau yang beroperasi dan terpelihara.

2.1.2. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Sub Kegiatan ini telah terealisasi Rp. 99.968.000,00 dari target anggaran Rp. 328.210.000,00 atau 30,46%. Realisasi fisik yaitu 5

laporan pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau dari target fisik 12 laporan.

2.1.3. Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Sub Kegiatan ini belum terealisasi dari target anggaran Rp. 49.810.000. Belum terdapat realisasi fisik dari target fisik 1 unit.

Untuk lebih rinci capaian kinerja hingga triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA

No	Tujuan /Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I			Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Kinerja pada Triwulan III			Realisasi Kinerja pada Triwulan IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13 = SUM(8:11)			14=13/8*100		15 = 7 + 13			16=15/6 x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
	Tujuan : Meningkatnya kelancaran transportasi		Rata-rata kecepatan perjalanan dalam kota (km/jam)	Penjelasan : rata - rata kecepatan perjalanan adalah rata - rata kecepatan dalam melakukan perjalanan tanpa memeperhitungkan perubahan kecepatan selama perjalanan, berdasarkan jarak yang ditempuh dan total waktu untuk melakukan perjalanan. Rata-rata kecepatan menuju pusat kota yaitu di Tugu Adipura, Dengan kecmak 40 km/jam dan menggunakan R4 saat waktu pagi, siang, sore dan malam yang dirata2kan. 1. jembatan nipah kuning ke tugu adipura 2. husein hamzah ke tugu adipura 3. jl. M. yamin(batas kota) ke tugu adipura 4. simpang polda ke tugu adipura 5. batu layang ke tugu adipura 6. Tanjungraya 2 ke tugu adipura						25	km/jam																											

No	Tujuan /Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
														I			II			III			IV																
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13 = SUM(8:11)			14=13/8*100		15 = 7 + 13			16=15/6 x100		17	18
				Formulasi : ∑v = ∑s : ∑t ∑t = rata-rata waktu tempuh (jam), ∑s = rata-rata jarak (km), ∑v = rata-rata kecepatan (km/jam) TARGET KECEPATAN RATA-RATA 25 KM/JAM																																			
1		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan yang dilakukan	95	%	92.203.973.628				95	%	######## ######	95	%	2.450.620.827	95	%	2.146.951.802							100	%	4.597.572.629	105,26	25,71	50	%	4.597.572.629	53	5,0	Bagian Umpar dan Bagian Perencanaan dan Keuangan	
			1. Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan yang dilakukan	95	%	92.203.973.628				95	%	######## ######	95	%	2.450.620.827	95	%	2.146.951.802							95	%	4.597.572.629	100,00	25,71	48	%	4.597.572.629	50	5,0		
1.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Dokumen yang disediakan dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	95.000.000				100	%	28.987.000	25	%	-	25,00	%	8.975.000							50	%	8.975.000	50,00	30,96	50	%	8.975.000	50,0	9		
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		27	dokumen	52.500.000				10	dokumen	22.500.000	4	dokumen	-	3	dokumen	8.975.000							7	dokumen	8.975.000	70,00	39,89	7	dokumen	8.975.000	25,9	17	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realsiasi kinerja SKPD		18	laporan	30.000.000				6	laporan	3.987.000,00	4	laporan	-		laporan	-							4	laporan	-	66,67	-	4	laporan	-	22,2	-		
1.1.3		Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		18	laporan	12.500.000				6	laporan	2.500.000	0	laporan	-		laporan	-							0	laporan	-	-	-	0	laporan	-	0,0	-	Bagian Umpar	
1.		Administrasi	Persentase	waktu untuk	10	%					10	%	########	25	%		25	%								50	%					%		50,0			

No	Tujuan /Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I			Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Kinerja pada Triwulan III			Realisasi Kinerja pada Triwulan IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13 = SUM(8:11)			14=13/8*100		15 = 7 + 13			16=15/6 x100		17	18
2		Keuangan Perangkat Daerah	pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	0		77.092.538.546				0		#######			2.268.388.548			1.936.172.784									4.204.561.332	50,00	29,28	50		4.204.561.332		5		
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		189	o/b	74.278.069.398				63	o/b	13.982.007.958	57	orang	2.241.508.548	97	orang	1.847.052.784							57	orang	4.088.561.332	90,48	29,24	57	orang	4.088.561.332	30,2	6	Bagian Umpar	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		36	dokumen	2.769.719.148				12	dokumen	372.042.000,00	3	dokumen	26.880.000	2	dokumen	89.120.000							5	dokumen	116.000.000	41,67	31,18	5	dokumen	116.000.000	13,9	4		
1.2.3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan//Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD		36	laporan	44.750.000				12	laporan	6.022.000,00	3	laporan	-	2	laporan	-							5	laporan	-	41,67	-	5	laporan	-	13,9	-	Bagian Perencanaan dan Keuangan	
1.3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	100	%	1.988.418.000				100	%	685.183.600	0	%	-	-	%	-							-	%	-	-	-	-	%	-	0,0	-		
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		3	paket	1.988.418.000				1	paket	397.683.600	0	paket	-	0	paket	-							0	paket	-	-	-	-	paket	-	0,0	-	Bagian Umpar	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan								97	orang	287.500.000				0	orang	-																			
1.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	waktu untuk penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	100	%	5.633.935.482				100	%	919.301.566	33,82	%	6.220.000	14,71	%	78.096.905							49	%	84.316.905	48,53	9,17	49	%	84.316.905	49	1		
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		3	paket	131.054.500				1	paket	26.210.900	0	paket	-	0	paket	-							0	paket	-	-	-	0	paket	-	0,0	-	Bagian Umpar	
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		12	paket	1.850.469.495				4	paket	322.302.066	0	paket	-	1	paket	11.889.000							1	paket	11.889.000	25,00	3,69	1	paket	11.889.000	8,3	1		
1.4.3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang		6	paket	1.394.372.007				2	paket	203.133.900,00	0	paket	-	1	paket	38.979.000							1	paket	38.979.000	50,00	19,19	1	paket	38.979.000	16,7	3		

No	Tujuan /Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I			Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Kinerja pada Triwulan III			Realisasi Kinerja pada Triwulan IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13 = SUM(8:11)			14=13/8*100		15 = 7 + 13			16=15/6 x100		17	18
			disediakan																																		
1.4.4		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		6	paket	1.012.074.480				2	paket	172.851.700,00	0	paket	-	0	paket	-							0	paket	-	-	-	0	paket	-	0,0	-		
1.4.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		108	dokumen	52.500.000				36	dokumen	11.760.000,00	9	dokumen	1.890.000	6	dokumen	2.660.000							15	dokumen	4.550.000	41,67	38,69	15	dokumen	4.550.000	13,9	9		
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		39	laporan	503.250.000				15	laporan	45.000.000,00	11	laporan	4.330.000	1	laporan	8.768.905							12	laporan	13.098.905	80,00	29,11	12	laporan	13.098.905	30,8	3		
1.4.7		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD		24	dokumen	690.215.000				8	dokumen	138.043.000	3	dokumen	-	1	dokumen	15.800.000							3	dokumen	15.800.000	37,50	11,45	3	dokumen	15.800.000	12,5	2		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang di adakan	0	Paket	2.888.857.000				100	%	695.685.000	0	%	-		%	-							0	%	-	-	-	-	%	-	#DIV/0!	-		
		Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional				2.888.857.000				4	unit	695.685.000	0	unit	-	0	unit	-							0	unit	-	-	-	-	unit	-	#DIV/0!	-		
1.5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Waktu untuk melaksanakan Pelayanan Administrasi Umum	100	%	4.063.457.600				100	%	798.676.280	25,00	%	135.926.767	11,11	%	123.707.113							36	%	259.633.880	36,11	32,51	36	%	259.633.880	36	6		
1.5.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		36	laporan	58.000.000				12	laporan	10.000.000	3	laporan	-	2	laporan	2.000.000							5	laporan	2.000.000	41,67	20,00	5	laporan	2.000.000	13,9	3		
1.5.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		36	laporan	3.159.540.000				12	laporan	645.149.360,00	3	laporan	103.344.847	0	laporan	98.275.193							3	laporan	201.620.040	25,00	31,25	3	laporan	201.620.040	8,3	6	Bagian Umpar	
1.5.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		36	laporan	845.917.600				12	laporan	143.526.920,00	3	laporan	32.581.920	2	laporan	23.431.920							5	laporan	56.013.840	41,67	39,03	5	laporan	56.013.840	13,9	7		
1.6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang	100	%	3.330.624.000				100	%	394.074.000	2,16	%	40.085.512	0,00	%	-							2	%	40.085.512	2,16	10,17	2	%	40.085.512	2	1		

No	Tujuan /Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
														I			II			III			IV																
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13 = SUM(8:11)			14=13/8*100		15 = 7 + 13			16=15/6 x100		17	18
		Daerah	daerah	dipelihara																																		
1.6.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		3	unit	193.750.000				1	unit	38.750.000	1	unit	6.751.296	1	unit	-							1	unit	6.751.296	100,00	17,42	1	unit	6.751.296	33,3	3	Bagian Umpar	
1.6.2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		42	unit	1.499.300.000				14	unit	238.500.000	2	unit	33.334.216	0	unit	-							2	unit	33.334.216	14,29	13,98	2	unit	33.334.216	4,8	2		
1.6.3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		357	unit	465.124.000				119	unit	80.934.000,00	0	unit	-	0	unit	-							0	unit	-	-	-	0	unit	-	0,0	-		
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3	unit	1.127.450.000				1	unit	26.890.000,00	0	unit	-	0	unit	-							0	unit	-	-	-	0	unit	-	0,0	-		
1.6.4		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		12	unit	45.000.000				4	unit	9.000.000	0	unit	-	0	unit	-							0	unit	-	-	-	0	unit	-	0,0	-		
	Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	Penjelasan : Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kualitas suatu ruas jalan dalam melayani arus lalu lintas Formulasi : VOLUME / CAPACITY RATIO rencana - (realisasi-rencana)/renca	0,7	-					0,7														90,91	%												

No	Tujuan /Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I			Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Kinerja pada Triwulan III			Realisasi Kinerja pada Triwulan IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13 = SUM(8:11)			14=13/8*100		15 = 7 + 13			16=15/6 x100		17	18
				na (dminta penjelasan OPD)																									-								
2		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		Penjelasan : Perlengkapan Jalan adalah sarana untuk mengatur kelancaran, keamanan dan ketertiban lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas Menggunakan PEMBOBOTAN untuk JENIS BARANG :marka, rambu, zebracross cctv, traffic light, flashing light, halte, PJU, Zoss, Halte (tersedia di sheet sebelah) Formulasi : Menggunakan PEMBOBOTAN untuk JENIS BARANG :marka, rambu, zebracross cctv, traffic light, flashing light, halte, PJU, Zoss, Halte (tersedia di sheet sebelah)			211.403.435.260						##########			6.647.033.364			4.658.661.688									##########	-	-	-		##########	0	5	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Bidang Perlengkapan Jalan dan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	
			1. Indeks Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas	Formulasi : Menggunakan PEMBOBOTAN untuk JENIS BARANG :marka, rambu, zebracross cctv, traffic light, flashing light, halte, PJU, Zoss, Halte (tersedia di sheet sebelah)	84	Indeks	185.454.761.174				84	indeks	##########	0	indeks	5.967.112.867		indeks	4.075.170.758							-	indeks	10.042.283.625	-	30,29	-	indeks	##########	0	5	-	
2.1		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan dan	Jumlah Jenis Perlengkapan Jalan dan	7231	Unit	185.454.761.174				1412	Unit	##########	0	Jenis	5.967.112.867	3	Jenis	4.075.170.758							3	jenis	10.042.283.625	0,21	30,29	3	jenis	##########	0,0	5		

No	Tujuan /Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I			Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Kinerja pada Triwulan III			Realisasi Kinerja pada Triwulan IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13 = SUM(8:11)			14=13/8*100		15 = 7 + 13			16=15/6 x100		17	18
		Kabupaten/Kota	Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas	Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas																																		
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Terbangun		78	unit	12.832.255.628				112	Unit	######## #######	0	unit	-	0	unit	-							0	unit	-	-	-	0	unit	-	0,0		Bidang Perlengkapan Jalan	
2.1.1		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota yanng tersedia		546	unit	15.978.861.300				289	unit	######## #######	0	unit	20.300.000	61	unit	24.600.000							61	unit	44.900.000	21,11	1,50	61	unit	44.900.000	11,2	0		Asmas (Meterisasi Gg. Persada Antara RT 004/RW 006 Kel. Siantan Tengah) Akan dilaksanakan di Bulan Juli
2.1.2		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara		3009	unit	156.643.644.246				1011	unit	######## #######	0	unit	5.946.812.867	287	unit	4.050.570.758							287	unit	9.997.383.625	28,39	35,97	287	unit	9.997.383.625	9,5	6		
			2. Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar	Jalan utama adalah jalan yang dipergunakan secara luas oleh masyarakat sebagai jalan utama menuju dan kembali dalam melakukan aktivitasnya. Formulasi : [(JUMLAH JALAN UTAMA YANG DILAKUKAN PENGAWASAN)/(JUMLAH JALAN UTAMA DALAM KOTA	86	%	22.553.950.426				86	%	4.254.955.740	87,3	%	658.059.217		%	557.583.150							87,33	%	1.215.642.367	101,55	28,57	44	%	1.215.642.367	51	5		

No	Tujuan /Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I			Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Kinerja pada Triwulan III			Realisasi Kinerja pada Triwulan IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13 = SUM(8:11)			14=13/8*100		15 = 7 + 13			16=15/6 x100		17	18
				PONTIANAK)] x 100%																																	
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		100	%					100	%	500.000.000	-	%	0		%	0							-	%	0	-	-	-	%	-	-	#DIV/0!		
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		0		1.160.000.000				2	Dokumen	500.000.000	-	Dokumen	0	-	Dokumen	0							0	Dokumen	0	-								
2.4		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Lokasi penyelenggaraan dan pengawasan titik perparkiran	Jumlah Lokasi penyelenggaraan dan pengawasan titik perparkiran	300	titik	8.308.817.068				194	titik	1.282.389.540	191	titik	257.990.080	191	titik	225.129.466							191	titik	483.119.546	98,45	37,67	96	titik	483.119.546	32	6		
2.4.1		Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		36	laporan	8.308.817.068				12	laporan	###########	3	laporan	257.990.080	2	laporan	225.129.466							5	laporan	483.119.546	41,67	37,67	5	laporan	483.119.546	13,9	6	Bidang LLAJ	
2.2		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Kegiatan untuk melakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100	%	9.134.185.918				100	%	1.508.310.280	25,00	%	225.951.760	16,67	%	227.749.364							41,67	%	453.701.124	41,67	30,08	42	%	453.701.124	41,7	5		
2.2.1		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota		36	laporan	8.298.775.918				12	laporan	###########	3	laporan	204.851.760	2	laporan	202.169.364							5	laporan	407.021.124	41,67	30,35	5	laporan	407.021.124	13,9	5	Bidang LLAJ	
2.2.2		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota		36	laporan	835.410.000				12	laporan	167.082.000,00	3	laporan	21.100.000	2	laporan	25.580.000							5	laporan	46.680.000	41,67	27,94	5	laporan	46.680.000	13,9	6		
2.3		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1	Persentase Pelaksanaan Penyediaan Angkutan Umum	Jumlah Unit Angkutan Orang yang Tersedia	100	%	5.110.947.440				100	%	964.255.920	100	%	174.117.377	100	%	104.704.320							100	%	278.821.697	100,00	28,92	50	%	278.821.697	50	5		

No	Tujuan /Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I			Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Kinerja pada Triwulan III			Realisasi Kinerja pada Triwulan IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13 = SUM(8:11)			14=13/8*100		15 = 7 + 13			16=15/6 x100		17	18
		(Satu) Daerah Kabupaten/Kota																																			
2.3.2		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota		36	laporan	422.771.920				12	laporan	22.771.920,00	3	laporan	9.652.640	2	laporan	7.340.040							5	laporan	16.992.680	41,67	74,62	5	laporan	16.992.680	13,9	4	Bidang LLAJ	
2.3.1		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota yang tersedia		30	Unit	4.688.175.520				10	Unit	941.484.000,00	7	Unit	164.464.737	3	Unit	97.364.280							7	Unit	261.829.017	70,00	27,81	3,5	Unit	261.829.017	11,7	6		
			3. Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan, mencegah terjadinya pencemaran udara, dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan formula : (jumlah kendaraan yang diuji + jumlah kendaraan yang numpang uji) / jumlah kendaraan wajib ujiKendaraan yang termasuk dalam kendaraan wajib uji adalah	83	%	3.394.723.660				83	%	576.072.700	82,9	%	21.861.280		%	25.907.780							82,94	%	47.769.060	99,93	8,29	41	%	47.769.060	50	1		

No	Tujuan /Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I			Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Kinerja pada Triwulan III			Realisasi Kinerja pada Triwulan IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13 = SUM(8:11)			14=13/8*100		15 = 7 + 13			16=15/6 x100		17	18
				kendaraan yang terdaftar di UPT PKB Pontianak Formulasi : perbandingan jumlah kendaraan yang lulus kir dengan Jumlah Kendaraan Yang Melakukan Uji Laik Jalan di UPT PKB)																																		
2.5		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji	########	unit	3.394.723.660				########	unit	576.072.700	########	unit	21.861.280	1.147	unit	25.907.780							3.375	unit	47.769.060	19,62	8,29	3.375	unit	47.769.060	6	1		
2.5.1		Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia		1	paket	1.831.455.000				1	unit	345.025.000,00	-	unit	-	0	unit	-							0	unit	-	-	-	0	unit	-	0	-	UPT PKB	
2.5.2		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana Pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara		6	unit	1.199.283.160				2	unit	176.919.200,00	0	unit	21.861.280	1	unit	19.283.780							1	unit	41.145.060	50,00	23,26	1	unit	41.145.060	16,7	3		
2.5.3		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		36	laporan	363.985.500				12	laporan	54.128.500,00	3	laporan	-	2	laporan	6.624.000							5	laporan	6.624.000	41,67	12,24	5	laporan	6.624.000	13,9	2		
	Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan		Tingkat kinerja pelayanan Pelabuhan Sungai dan Pelabuhan Penyeberangan	Penjelasan : Tingkat kinerja pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelayanan sungai dan dermaga penyebrangan dalam periode waktu tertentu yang ditentukan	80	%					80	%																	-								

No	Tujuan /Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I			Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Kinerja pada Triwulan III			Realisasi Kinerja pada Triwulan IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13 = SUM(8:11)			14=13/8*100		15 = 7 + 13			16=15/6 x100		17	18
				dalam ukuran ratio perbandingan (persentase) Formulasi : jumlah fasilitas pelabuhan sungai dan penyeberangan yang tersedia (unit) dibagi jumlah fasilitas pokok yang wajib dimiliki menurut PP n0. 61 tahun 2009 (unit)																																		
3		Program Pengelolaan Pelayaran		Penjelasan : mengukur kinerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam melakukan pemeliharaan dan pengawasan fasilitas sarana prasarana pelabuhan di Kota Pontianak Formulasi : [jumlah fasilitas yang berfungsi baik (unit)dibagi jumlah fasilitas yang ada (unit)] x 100%	88	%	5.747.330.900				88	%	1.056.649.180	88	%	119.868.480	88	%	154.142.110							88	%	274.010.590	100,00	25,93	44	%	274.010.590	50	4,768	Bidang Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASP)	
			1. Persentase fasilitas yang dibangun, dipelihara dan diawasi pada pelabuhan sungai dan pelabuhan penyeberangan	mengukur kinerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam melakukan pemeliharaan dan pengawasan fasilitas sarana prasarana pelabuhan di Kota Pontianak Formulasi : [jumlah fasilitas yang berfungsi baik (unit)dibagi jumlah fasilitas yang ada (unit)] x 100%	88	%	5.747.330.900				88	%	1.056.649.180	88	%	119.868.480	88	%	154.142.110							88	%	274.010.590	100,00	25,93	44	%	274.010.590	50	4,768		
3.1		Pembangunan dan Penerbitan	Persentase Kegiatan	Jumlah Kegiatan	100	%	5.747.330.				100	%	1.056.649.	44	%	119.868.480	16,67	%	154.142.1	0			0			61,	%	274.010.5	61,1	25,	61	%	274.010.5	61,1	4,768		

No	Tujuan /Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja pada Triwulan I			Realisasi Kinerja pada Triwulan II			Realisasi Kinerja pada Triwulan III			Realisasi Kinerja pada Triwulan IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13 = SUM(8:11)			14=13/8*100		15 = 7 + 13			16=15/6 x100		17	18
		Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan			900						180						10									11		90	1	93			90				
3.1.2		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang beroperasi dan terpelihara		5	unit	4.147.520.900				5	unit	678.629.180,00	5	unit	77.956.480	5	unit	96.086.110	0			0			5	unit	174.042.590	100,00	25,65	5	unit	174.042.590	100,0	4,196		
		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah laporan pengawasan pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		36	laporan	1.550.000.000				12	laporan	328.210.000,00	3	laporan	41.912.000	2	laporan	58.056.000	0			0			5	laporan	99.968.000	41,67	30,46	5	laporan	99.968.000	13,9	6,450		
		Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Tersedia		2	unit	49.810.000				1	unit	49.810.000	0	unit	-	1	unit	-	0			0			1			100,00					0,0				
SUB KEGIATAN																							Rata-rata capaian kinerja (%)						36,49								
PREDIKAT																							Predikat kinerja						T					SR			
PROGRAM																							Rata-rata capaian kinerja (%)			71			80,29	28,42	35			40,11			
PREDIKAT																							Predikat kinerja			S			T	SR	SR			SR			
							JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						######## #######			9.217.522.671			6.959.755.600			-			-			16.177.278.271										

Dari alokasi anggaran dan realisasi anggaran tahun 2025 berdasarkan Pagu Indikatif sebagaimana yang dialokasikan untuk Dinas Perhubungan Kota Pontianak serta realisasi dan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel dan grafik Pagu anggaran sebagai berikut :

Total Alokasi dan Realisasi Anggaran
Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2025

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Anggaran	42.691.172.205	43.253.956.136	45.789.797.227	51.144.920.461	56.925.584.930
Realisasi	40.610.597.238	42.828.540.406	45.335.809.072	49.671.885.239	16.177.278.271 (Per Mei 2025

Total Alokasi dan Realisasi Anggaran
Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2025 (Per Mei 2025)

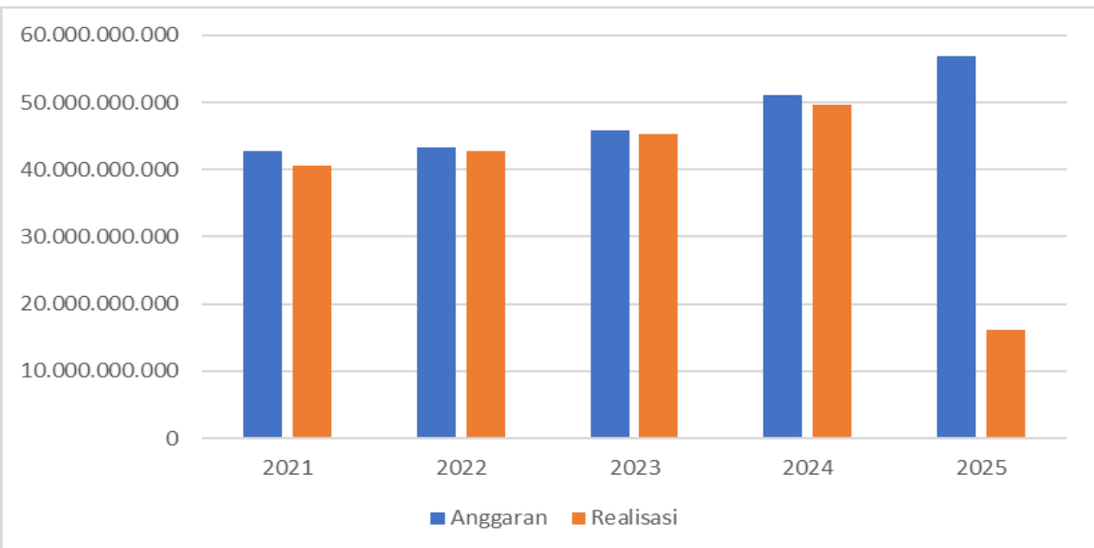

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Kerja

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026. Dokumen tersebut akan digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Renstra Dinas Perhubungan Kota Pontianak menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu tiga tahun. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan di Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

Di periode RPD ini tidak ditetapkan Visi dan Misi Kepala Daerah, sehingga Visi dan Misi Perangkat Daerah pun tidak dibuat. Hanya ada Tujuan dan sasaran

Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan tersebut sebagaimana berikut :

1. Tujuan Dinas Perhubungan Kota Pontianak

Tujuan Dinas Perhubungan Kota Pontianak merupakan permasalahan pokok bidang perhubungan yang ada di Kota Pontianak yang dirumuskan dan menjadi fokus dalam pengambilan kebijakan bidang perhubungan dan mendukung pencapaian Tujuan RPD Kota Pontianak. Jadi berdasarkan permasalahan yang ada dan dipadukan dengan Tujuan Kota Pontianak dapat dirangkum bahwa permasalahan pokok yang ada yang harus ditangani dan menjadi fokus untuk periode 3 tahun kedepan (2024-2026), dalam mencapai Tujuan ke 2 RPD Kota Pontianak yaitu "*Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan, disertai Kondisi Aman dan Tertib"* adalah bagaimana Dinas Perhubungan Kota Pontianak berupaya memberikan pelayanan berupa Peningkatan dan penyediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bidang Perhubungan yang berkualitas dan representatif, serta meningkatkan Kualitas Transportasi dalam kelancaran berlalu lintas.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rumusan tujuan khusus Bidang Perhubungan di dalam Perencanaan Strategis Dinas

Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2024–2026 berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pontianak adalah :

"Meningkatnya Kualitas Transportasi dalam kelancaran berlalu lintas"

Dengan dirumuskannya tujuan Dinas Perhubungan Kota Pontianak, diharapkan akan dapat mendukung pencapaian Tujuan ke 2 RPD Kota Pontianak dalam Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan, disertai Kondisi Aman dan Tertib.

2. Sasaran Dinas Perhubungan Kota Pontianak

Sasaran Strategis adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam jangka waktu tahunan, sampai tiga tahun mendatang. Sasaran strategis merupakan arah atau fokus masalah yang akan dibenahi dari masalah pokok yang dirumuskan dalam tujuan yang akan dicapai pada periode 3 tahun.

Sasaran Strategis Dinas Perhubungan adalah sasaran dibidang perhubungan (transportasi darat dan sungai) yang dituangkan di dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2024–2026. Adapun Sasaran Strategis Dinas Perhubungan dalam upaya pencapaian tujuan *"Meningkatnya kualitas transportasi dalam kelancaran berlalu lintas"*, yaitu :

1) Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2) Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan.

Secara ringkas Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan yaitu pada tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2024-2026

No	Tujuan / Sasaran PD	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun		
			2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*5*	*6*	*7*
1	Meningkatnya kualitas transportasi dalam kelancaran berlalu lintas	Rata-Rata Waktu Tempuh Perjalanan Dalam Kota	0.035	0.035	0.035
1.1	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	78%	79%	80%
1.2	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	80%	80%	90%

Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pontianak

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran. Adapun Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Pontianak juga akan ditempuh dengan menetapkan kebijakan- kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang di tetapkan oleh pihak yang berwenang untuk di jadikan pedoman bagi setiap organisasi, agar adanya keterpaduan dan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis dalam pencapaian Tujuan san Sasaran RPD Kota Pontianak yang telah ditetapkan .

Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pontianak

Dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, tujuan Dinas Perhubungan tahun 2024-2026 yang akan dicapai dengan penetapan sasaran yang dituangkan melalui strategi dan kebijakan. Adapun Strategi dan Kebijakan yang diterapkan dalam pencapaian sasaran dan tujuan, sebagaimana berikut ini:

1. **Sasaran 1** : **Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

   Upaya pencapaian Sasaran ini dilakukan melalui 2 Strategi, yaitu :

   a. Strategi 1 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana jalan

   b. Strategi 2 : Meningkatkan kinerja lalu lintas

   Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi 1 yaitu :

   1. Menyiapkan dan memelihara kualitas perlengkapan jalan
   2. Menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor
   3. Menyediakan, mengawasi dan memelihara fasilitas parkir untuk umum milik pemerintah
   4. Menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi 2 yaitu :

1. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas
2. Memberdayakan forum lalu lintas dan angkutan jalan
3. Meningkatkan kegiatan pembinaan dan pengawasan

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan

Upaya pencapaian Sasaran ini dilakukan melalui 2 Strategi, yaitu :

a. Strategi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana serta kinerja angkutan sungai dan penyeberangan

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan Strategi 3, yaitu :

1. Menyiapkan dan memelihara fasilitas Pelabuhan sungai dan penyeberangan
2. Melaksanakan kegiatan pengawasan Pelabuhan dan penyeberangan

Dari 4 strategi dengan beberapa arah kebijakan yang dituangkan di atas, akan menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan dalam menetapkan program-program maupun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa periode 2024-2026, sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran Kota Pontianak tahun *2024-2026*.

Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2024-2026, secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	*2*		*3*		*4*	
Meningkatnya kualitas transportasi dalam kelancaran berlalu lintas	1	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1.1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana jalan	1	Menyediakan Perlengkapan Jalan di Wilayah Kota Pontianak
					2	Menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor
					3	Menyediakan, mengawasi dan memelihara fasilitas parkir untuk umum milik pemerintah
					4	Menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang
			1.2	Meningkatkan kinerja lalu lintas	1	Melaksanakan manjemen dan rekayasa lalu lintas
					2	Memberdayakan forum lalu lintas dan angkutan jalan
					3	Meningkatkan kegiatan pembinaan dan pengawasan
	2	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	2.1	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana serta kinerja angkutan sungai dan penyeberangan	1	Menyiapkan dan memelihara fasilitas Pelabuhan sungai dan penyeberangan
					2	Melaksanakan kegiatan pengawasan pelabuhan dan penyeberangan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak pada tahun 2025 disusun berdasarkan Isu strategis daerah dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu :

- Mengoptimalkan dan meningkatkan keterpaduan proses perencanaan dan penganggaran dengan memproporsionalkan prioritas belanja yang berbasis kinerja dan program yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- Mengutamakan belanja publik yang mampu memberikan dampak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Mengoptimalkan sumberdaya yang ada dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan berkesinambungan.
- Efisiensi Anggaran dikarenakan defisit anggaran Kota Pontianak.

Adapun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RK OPD)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERHUBUNGAN							**57.384.559.250,00**	**57.783.237.958,00**	**56.925.584.930,00**	**-458.974.320,00**							**47.347.236.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**57.384.559.250,00**	**57.783.237.958,00**	**56.925.584.930,00**	**-458.974.320,00**							**47.347.236.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**57.384.559.250,00**	**57.783.237.958,00**	**56.925.584.930,00**	**-458.974.320,00**							**47.347.236.000,00**	
1,	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan**				**95 Persen**	**95 Persen**	**17.073.815.850,00**	**17.969.089.144,00**	**17.881.979.404,00**	**-5.620.859.850,00**							**11.452.956.000,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	31.000.000,00	31.000.000,00	28.987.000,00	-2.013.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Dinas Perhubungan		16.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			7.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	3.987.000,00	-2.013.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan,			6.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	2025 RKPD	2025 APBD	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib				
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			2.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	14.117.279.250,00	14.501.479.958,00	14.360.071.958,00	242.792.708,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Dinas Perhubungan		8.936.206.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				63 Orang/bulan	98 Orang/bulan	13.583.329.250,00	13.982.007.958,00	13.982.008.250,00	398.678.708,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			8.402.256.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	525.000.000,00	510.522.000,00	372.042.000,00	-152.958.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai			525.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	2025 RKPD	2025 APBD	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Kondisi Aman dan Tertib				
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				15 Laporan	12 Laporan	8.950.000,00	8.950.000,00	6.022.000,00	-2.928.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			8.950.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	300.000.000,00	397.683.600,00	685.183.600,00	385.183.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Asn dan Non ASN Dinas Perhubungan		410.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	300.000.000,00	397.683.600,00	397.683.600,00	97.683.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			210.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				-	97 Orang	0,00	0,00	287.500.000,00	287.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	-	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Kondisi Aman dan Tertib				
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah*				-	100 Persen	749.914.600,00	992.673.066,00	919.301.566,00	169.386.966,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Dinas Perhubungan		741.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26.400.000,00	26.210.900,00	26.210.900,00	-189.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			19.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	106.500.000,00	322.302.066,00	322.302.066,00	215.802.066,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	294.864.600,00	207.545.900,00	203.133.900,00	-91.730.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan			315.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Tertib				
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	175.000.000,00	187.421.200,00	172.851.700,00	-2.148.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2920 Dokumen	2932 Dokumen	10.500.000,00	10.500.000,00	11.760.000,00	1.260.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			10.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	15 Laporan	100.650.000,00	100.650.000,00	45.000.000,00	-55.650.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	36.000.000,00	138.043.000,00	138.043.000,00	102.043.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai			36.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Kondisi Aman dan Tertib				
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*				100 Persen	100 Persen	695.000.000,00	695.685.000,00	695.685.000,00	685.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	4 Unit	695.000.000,00	695.685.000,00	695.685.000,00	685.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 Persen	100 Persen	711.760.000,00	754.983.520,00	798.676.280,00	86.916.280,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Dinas Perhubungan		662.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			8.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	530.000.000,00	540.000.000,00	645.149.068,00	115.149.360,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			515.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	171.760.000,00	204.983.520,00	143.526.920,00	-28.233.080,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			139.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah*				-	100 Persen	468.862.000,00	595.584.000,00	394.074.000,00	-74.788.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Dinas Perhubungan		687.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	38.750.000,00	38.750.000,00	38.750.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			38.750.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	237.000.000,00	238.500.000,00	238.500.000,00	1.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			490.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				119 Unit	119 Unit	99.112.000,00	83.844.000,00	80.934.000,00	-18.178.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	85.000.000,00	225.490.000,00	26.890.000,00	-58.110.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			9.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM**	**Persentase**				**-**	**83**	**39.065.635.400,0**	**38.588.133.834,0**	**37.986.956.346,0**	**-4.221.355.400,00**							**34.844.280.000,0**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**Kendaraan Bermotor Laik Jalan Indeks Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas Persentase Jalan Utama Dalam Kondisi Tertib dan Lancar**					**84 86 Persen Indeks Persen**	**0**	**0**	**0**								**0**	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Persentase Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota*				-	100 Persen	300.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	200.000.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat Pengguna Angkutan dan Operator Angkutan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				1 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	200.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas*				16 Jenis	16 Jenis	34.424.075.552,00	33.462.637.966,00	33.155.927.906,00	-1.268.147.646,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat		31.434.780.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		

			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				26 Unit	112 Unit	2.889.720.000,00	2.322.314.870,00	2.373.084.168,00	-516.635.832,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas			1.179.720.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib				
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				183 Unit	289 Unit	1.987.850.000,00	2.891.771.200,00	2.990.895.777,00	1.003.045.777,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			1.865.580.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				1001 Unit	1011 Unit	29.546.505.552,00	28.248.551.896,00	27.791.947.961,00	-1.754.557.591,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			28.389.480.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Jumlah Lokasi penyelenggaraan dan pengawasan titik perparkiran*				300 Titik	194 Titik	1.717.537.196,00	1.519.604.420,00	1.282.389.540,00	-435.147.656,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat		1.380.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	1.717.537.196,00	1.519.604.420,00	1.282.389.540,00	-435.147.656,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangka	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan,			1.380.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															n agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib				
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji*				17200 unit	17200 unit	449.309.500,00	634.838.660,00	576.072.700,00	126.763.200,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat		431.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	115.000.000,00	347.745.000,00	345.025.000,00	230.025.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				2 Unit	2 Unit	264.036.000,00	216.820.160,00	176.919.200,00	-87.116.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			259.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		

			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				12 Laporan	12 Laporan	70.273.500,00	70.273.500,00	54.128.500,00	-16.145.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangka	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan,			72.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															n agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib				
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas*				100 Persen	100 Persen	1.420.578.968,00	1.706.796.868,00	1.508.310.280,00	87.731.312,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat		916.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	1.334.378.968,00	1.539.714.868,00	1.341.228.280,00	6.849.312,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			860.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				7 Laporan	12 Laporan	86.200.000,00	167.082.000,00	167.082.000,00	80.882.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			56.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pelaksanaan Penyediaan Angkutan Umum*				-	100 Persen	754.134.184,00	764.255.920,00	964.255.920,00	210.121.736,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan	Masyarakat		682.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															aktif koperasi.	Tertib				
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	67.650.184,00	22.771.920,00	22.771.920,00	-44.878.264,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			62.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				10 Unit	10 Unit	686.484.000,00	741.484.000,00	941.484.000,00	255.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			620.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3,	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengawasan pada Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan**				**88 Persen**	**88 Persen**	**1.245.108.000,00**	**1.226.014.980,00**	**1.056.649.180,00**	**-195.108.000,00**							**1.050.000.000,00**	

	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	*Persentase Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau*				84 Persen	84 Persen	1.245.108.000,00	1.226.014.980,00	1.056.649.180,00	-188.458.820,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Masyarakat Pengguna Angkutan dan Operator Angkutan		1.050.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau																		
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara				5 Unit	5 Unit	775.108.000,00	826.204.980,00	678.629.180,00	-96.478.820,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangka	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatny			560.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															n industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	a Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib				
	2.15.03.2.13.0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan				12 Laporan	12 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	328.210.000,00	-21.790.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan																		
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	120.000.000,00	49.810.000,00	49.810.000,00	-70.190.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PBJT-KONSUMS I TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			190.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	J U M L A H								**57.384.559.250,00**	**57.783.237.958,00**	**56.925.584.930,00**	**-458.974.320,00**							**47.347.236.000,00**	

3.2 Pendanaan

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak, dalam upaya pencapaian Sasaran dan Tujuan yang ditetapkan.

Program-program pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak pada tahun 2025 sesuai dengan yang tertuang dalam DPA (Murni) tahun 2025 dengan prioritas kegiatan dan penyerapan aspirasi masyarakat, dengan total anggaran Rp. 57.783.237.958 (termasuk Gaji dan Tunjangan PNS), yang terdiri dari 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 17.969.089.144 dan 2 (dua) Program Pokok Pembangunan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.814.148.814.

Sedangkan berdasarkan RKPD Perubahan, Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang telah ditetapkan pagu indikatif adalah Rp. 56.925.584.930 (termasuk Gaji dan Tunjangan PNS) berkurang sebesar 1,48% atau sebesar Rp. 857.653.028 dari anggaran murni tahun 2025.

Dengan berdasar pada pertimbangan di atas maka Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebelum perubahan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 17.969.089.144 dan direncanakan mengalami perubahan menjadi Rp. 17.881.979.404 (berkurang Rp. 87.109.740 atau 0,48%).
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebelum perubahan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 38.588.133.834 dan direncanakan mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 37.986.956.346 (berkurang Rp. 601.177.488 atau 1,56%).
3. Program Pengelolaan Pelayaran sebelum perubahan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 1.226.014.980 dan direncanakan mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 1.056.649.180 (berkurang Rp. 169.365.800 atau 13,81%).

Adapun secara rinci Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengalami perubahan pada anggaran perubahan untuk tahun anggaran

2025 sesuai plafon anggaran pagu indikatif perubahan yang ditetapkan, yaitu sebagaimana berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mengalami perubahan pada anggaran perubahan yaitu dari anggaran Rp. 31.000.000 menjadi Rp. 28.987.000 (berkurang Rp. 2.013.000 atau 6,49% dari pagu murni), dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 6.000.000 menjadi Rp. 3.987.000 (berkurang Rp. 2.013.000).

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mengalami perubahan yaitu pengurangan anggaran dari anggaran murni Rp. 14.501.479.958 menjadi Rp. 14.360.071.958 (berkurang Rp. 141.408.000 atau 0,97% dari pagu murni), dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :
   - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD mengalami perubahan anggaran berupa penurunan dari pagu murni Rp. 510.522.000 menjadi Rp. 372.042.000 (berkurang Rp. 138.480.000).
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 8.950.000 menjadi Rp. 6.022.000 (berkurang Rp. 2.928.000).

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah mengalami perubahan yaitu penambahan dari anggaran murni Rp. 397.683.600 menjadi Rp. 685.183.600 (bertambah 287.500.000 atau 72,29% dari pagu murni), dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :
   - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, merupakan tambahan sub kegiatan dalam

RKPD Perubahan Tahun 2025 dengan pagu anggaran Rp. 287.500.000.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mengalami perubahan yaitu adanya pengurangan anggaran dari anggaran murni Rp. 992.673.066 menjadi Rp. 919.301.566 (berkurang Rp. 73.371.500 atau 7,39%), dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :
   - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 207.545.900 menjadi Rp. 203.133.900 (berkurang Rp. 4.412.000)
   - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 187.421.200 menjadi Rp. 172.851.700 (berkurang Rp. 14.569.500).
   - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 10.500.000 menjadi Rp. 11.760.000 (bertambah Rp. 1.260.000).
   - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 100.650.000 menjadi Rp. 45.000.000 (berkurang Rp. 55.650.000).

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mengalami perubahan yaitu adanya pengurangan anggaran dari anggaran murni Rp. 754.983.520 menjadi Rp. 798.676.280 (bertambah Rp. 43.692.760 atau 5,78%), dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 540.000.000 menjadi Rp. 645.149.068 (bertambah Rp. 105.149.068).
   - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 204.983.520 menjadi Rp. 143.526.920 (berkurang Rp. 61.456.600).

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mengalami perubahan yaitu adanya pengurangan anggaran dari anggaran murni Rp. 595.584.000 menjadi Rp. 394.074.000 (berkurang Rp. 201.510.000 atau 33,83%), dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 83.844.000 menjadi Rp. 80.934.000 (berkurang Rp. 2.910.000).
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 225.490.000 menjadi Rp. 26.890.000 (berkurang Rp. 198.600.000).

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota mengalami perubahan dari anggaran murni Rp. 33.462.637.966 menjadi Rp. 33.155.927.906 (berkurang Rp. 306.710.060 atau 0,92% dari pagu murni), dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :
   - Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 2.322.314.870 menjadi Rp. 2.373.084.168 (bertambah Rp. 50.769.298).
   - Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 2.891.771.200 menjadi Rp. 2.990.895.777 (bertambah Rp. 99.124.577).
   - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 28.248.551.896 menjadi Rp. 27.791.947.961 (berkurang Rp. 456.603.935.

2. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir mengalami perubahan dari anggaran murni Rp. 1.519.604.420 menjadi Rp. 1.282.389.540 (berkurang Rp.

237.214.880 atau 15,61% dari pagu murni), dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 1.519.604.420 menjadi Rp. 1.282.389.540 (berkurang Rp. 237.214.880).

3. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor mengalami perubahan yaitu penurunan anggaran dari anggaran murni Rp. 634.838.660 menjadi Rp. 576.072.700 (berkurang Rp. 58.765.960 atau 9,26% dari pagu murni), dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :
   - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 347.745.000 menjadi Rp. 345.025.000 (berkurang Rp. 2.720.000).
   - Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 216.820.160 menjadi Rp. 176.919.200 (berkurang Rp. 39.900.960).
   - Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 70.273.500 menjadi Rp. 54.128.500 (berkurang Rp. 16.145.000).

4. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan mengalami perubahan berupa penurunan anggaran dari anggaran sebesar Rp. 1.706.796.868 menjadi Rp. 1.508.310.280 (berkurang Rp. 198.486.588 atau 11,63% dari pagu murni), dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :
   - Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 1.539.714.868 menjadi Rp. 1.341.228.280 (bertambah Rp. 198.486.588).

5. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota juga mengalami perubahan yaitu dari anggaran murni Rp. 764.255.920 menjadi Rp. 964.255.920 (bertambah Rp. 200.000.000 atau 26,17% dari pagu murni), dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :
   - Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 741.484.000 menjadi Rp. 941.484.000 (bertambah Rp. 200.000.000.

C. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

1. Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau mengalami perubahan yaitu dari anggaran murni Rp. 1.226.014.980 menjadi Rp. 1.056.649.180 (berkurang Rp. 169.365.800 atau 13,81% dari pagu murni), dengan rincian Sub Kegiatan antara lain :
   - Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 826.204.980 menjadi Rp. 678.629.180 (berkurang Rp. 147.575.800.
   - Sub Kegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan mengalami perubahan dari pagu murni Rp. 350.000.000 menjadi Rp. 328.210.000 (berkurang Rp. 21.790.000).

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Perubahan adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang disesuaikan terhadap kondisi dan kebutuhan tahun berjalan yang menuangkan langkah-langkah dan kebijakan yang responsive terhadap perubahan yang terjadi baik yang berhubungan dengan kompleksitas lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.

Rencana Kerja yang merupakan suatu proses yang mengarahkan para pemimpin Dinas beserta jajarannya dalam merealisasikan Visi dan Misi yang merupakan acuan dasar untuk pencapaian program, kegiatan dan kebijakan pada tahun yang ditetapkan. Dengan demikian, Rencana Kerja bagi Dinas Perhubungan merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan rencana diatasnya (Renstra OPD, RKPD dan RPJMD Kota Pontianak) serta memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk mempersiapkan diri agar eksis dan berhasil dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus di susun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat.

Program-program yang akan dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak tahun 2025 Anggaran Perubahan dengan total 3 Program, 14 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Urusan Kesekretariatan) yang terdiri dari 7 kegiatan dan 24 Sub Kegiatan serta pada 2 (dua) Program

Pokok Pembangunan Urusan Perhubungan yang terdiri dari 7 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan Dinas Perhubungan Kota Pontianak menerapkan manajemen Strategik sebagai langkah awal dalam menentukan strategi kedepan tentang apa yang akan dilaksanakan, bagaimana melaksanakannya serta evaluasi, untuk itu Dinas Perhubungan Kota Pontianak memiliki Tujuan dan Sasaran selaras dengan apa yang dituangkan dalam Renstra Kota dengan program dan kegiatan yang realistis sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan.

Dalam perjalanan waktu serta perkembangan dan perubahan kondisi baik ekonomi, sosial maupun perubahan kebijakan Pusat dan Daerah, Dinas Perhubungan Kota Pontianak tentunya akan melakukan perubahan dan penyesuaian jika program dan kegiatan yang diusulkan memang secara prinsip harus disesuaikan. Untuk itu masukan dan saran tentunya sangat kami harapkan untuk menjadikan Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang lebih baik.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PONTIANAK

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PERHUBUNGAN

H. Y. TRISNA IBRAHIM, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19710719 199803 1 007

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Anggaran tahun 2025 yang merupakan rencana kerja tahunan. Perubahan Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan perubahan dari Rencana Kerja murni yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

Rencana kerja perubahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) dan dokumen perencanaan Pemerintah Kota Pontianak. Dengan demikian Perubahan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak merupakan turunan dan bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak, dan RPD serta Renstra 2024-2026.

Rencana kerja perubahan dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sampai dengan bulan Juni 2025 atau di TW II, renja kerja perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan tahun 2025.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan perubahan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2025 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja perubahan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

Pontianak, Juni 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
LAMPIRAN		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	7
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	20
BAB IV	PENUTUP	42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Capaian Kinerja Diskominfo Kota Pontianak ……..... 8

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sampai dengan Triwulan II (Bulan Mei) Tahun Anggaran 2025……..... 9

Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2025……..... 24

LAMPIRAN

LAMPIRAN I : PENYELARASAN SUB KEGIATAN ……...…..... 43

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak merupakan Penjabaran dari Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor B/000.7.2.4/26/BAPPERIDA/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2025 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor B/000.7.2.4/26/BAPPERIDA/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Pontianak.

Adapun alasan yang mendasar dilakukan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Adapun alasan yang mendasar dilakukan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a). perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan.

b). adanya penambahan dan pengurangan sasaran kegiatan.

c). adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar sub kegiatan, kegiatan dan program maupun antar jenis belanja.

d). adanya perubahan indikator kerja pada sub kegiatan.

e). adanya penyesuaian sasaran kegiatan mendahului perubahan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2025 ini memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 yang sudah dicapai sampai dengan triwulan II. Selain itu memuat usulan Program, Kegiatan dan beserta Sub Kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kota Pontianak Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 116);
21. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2024-2026
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 10).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

a). Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk

mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah. Serta menjadi panduan dalam evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun selanjutnya.

b). Tujuan

Adapun tujuannya adalah :

- Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara DPRD Kota Pontianak dengan Wali Kota Pontianak yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P- APBD) Tahun 2025.
- Sebagai perubahan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.
- Sebagai sarana pengendalian perubahan program dan kegiatan tahun 2025.

Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja yang dibuat untuk rentang waktu selama satu tahun ini memuat 7 (tujuh) komponen utama seperti yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dalam pasal 128 yaitu hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat daerah sistematika paling sedikit memuat terdiri dari pendahuluan, evaluasi Renja Perangkat daerah Tahun lalu, tujuan dan sasaran Perangkat daerah, rencana kerja dan pendanaan Perangakat Daerah dan penutup, sistematika renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Menjelaskan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat Sasaran yang ingin dicapai dan Program Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan Perangkat Daerah dalam rangka mencapai Tujuan Organisasi.

Evaluasi adalah suatu upaya untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan, yang nantinya hasil evaluasi digunakan oleh pembuat kebijakan dalam mengambil Keputusan untuk Perencanaan Kedepan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Progran, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Pada Bab ini berisikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan, mengacu pada APBD Tahun Berjalan yang seharusnya pada waktu Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan Pencapaian Target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Realisasi Program dan Kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan. Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan Perangkat Daerah dan/atau Realisasi APBD untuk Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak.

Adapun Program-Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yang dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2). Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
3). Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
4). Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
5). Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Berdasarkan Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sampai dengan Triwulan II, Program Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tingkat Capaian Kinerja yang dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1. Rekapitulasi Capaian Kinerja Diskominfo Kota Pontianak

No	Program	Indikator	Kinerja		Keterangan
			Target	Realisasi	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 %	93,59 %	Proses Penilaian Survey Kepuasaan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan dilakukan pertriwulanan dan dimana hasil dari survey akan dibagi rata-rata pertriwulan
2.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi yang dikelola dan berfungsi secara baik sesuai ketentuan SPBE	97,01 %	92,31 %	Hasil dari capaian kinerja berupa Jumlah Aplikasi yang berfungsi secara baik dibandingkan dengan Jumlah aplikasi yang tersedia
3.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi pemerintah	28,13 %	12,00 %	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan persandian/Jumlah Perangkat Daerah X 100%
4.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik	80,00 %	32,60%	Jumlah Layanan Informasi yang dilakukan dibagi Jumlah Layanan Informasi yang harus dilakukan sesuai ketetapan X 100% Jumlah Pengaduan yang masuk atau diterima dibagi Jumlah Pengaduan yang selesai ditindaklanjuti X 100%
5.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase pemenuhan data prioritas daerah	61,54 %	44,45 %	Jumlah Data Prioritas yang terpenuhi dibagi Jumlah Data Prioritas daerah yang harus dipenuhi X 100%

Berikut disajikan Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sampai Triwulan II (Bulan Juni 2025) secara rinci dituangkan dalam Tabel 2.2. berikut ini :

Tabel 2.2.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sampai dengan Triwulan II (Bulan Mei) Tahun Anggaran 2025

No	Program/Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ (output)/ (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
									Triwulan I		Triwulan II										
1	3	4	5		6		7		8		9		10=8+9		11=10/7x100		12=6+10			16=12/5x100	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan**	**95 Persen**	**21.629.274.250**	**99,07 persen**	**7.159.669.075**	**95,00 persen**	**8.844.288.704**	**92,31 persen**	**1.732.050.188**	**- persen**	**774.778.046**	**23,08 persen**	**2.506.828.234**	**24,29**	**28,34**	**122,15**	**persen**	**9.666.497.309**	**128,58**	**44,69**
I.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**100 persen**	**81.952.400**	**100 persen**	**37.322.000**	**100 persen**	**40.033.300**	**13,33 persen**	**-**	**- persen**	**24.050.000**	**13,33 persen**	**24.050.000**	**13,33**	**60,07**	**113,33**	**persen**	**61.372.000**	**113,33**	**74,89**
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	29.780.400	6 Dokumen	11.355.000	7 Dokumen	27.639.800	2 Dokumen		2 Dokumen	24.050.000	4 Dokumen	24.050.000	57,14	87,01	10	Dokumen	35.405.000	55,56	118,89
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	12.750.000	1 Dokumen	6.365.000	1 Dokumen	3.106.200	Dokumen		Dokumen	-	- Dokumen	-	-	0,00	1	Dokumen	6.365.000	33,33	49,92
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	12.750.000	1 Dokumen	6.855.000	1 Dokumen	3.106.200	- Dokumen		Dokumen	-	- Dokumen	-	-	0,00	1	Dokumen	6.855.000	33,33	53,76
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	13.539.200	4 Laporan	7.057.500	4 Laporan	4.100.700	Laporan		1 Laporan	-	1 Laporan	-	25,00	0,00	5	Laporan	7.057.500	41,67	52,13
1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	13.132.800	2 Laporan	5.689.500	2 Lapo	2.080.400	- Laporan		1 Laporan	-	1 Laporan	-	50,00	0,00	3	Laporan	5.689.500	50,00	43,32

							r a n																
I.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 persen**	**15.858.900.000**	**97,58 Persen**	**5.080.081.759**	**100 Persen**	**7.135.274.400**	**56,85 Persen**	**1.545.817.032**	**12,50 Persen**	**595.427.789**	**69,35 Persen**	**2.141.244.821**	**69,35**	**30,01**	**66,93**	**Persen**	**7.221.326.580**	**166,93**	**45,53**
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang / Bulan	15.204.593.000	28 Orang / Bulan	4.904.973.759	31 Orang / Bulan	6.977.915.000	24 Orang / Bulan	1.515.457.032	26 Orang / Bulan	673.630.389	50 Orang / Bulan	2.089.087.421	161,29	29,94	78	Orang / Bulan	6.994.061.180	252	46,00
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	638.760.000	12 Dokumen	167.653.000	12 Dokumen	152.520.000	3 Dokume	30.360.000	3 Dokumen	20.240.000	6 Dokumen	50.600.000	50,00	33,18	18	Dokumen	218.253.000	50,00	34,17
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	3.267.000	1 Laporan	2.345.000	1 Laporan	1.643.800	1 Lapora		Laoran	1.557.400	1 Laporan	1.557.400	100,00	94,74	2	Laporan	3.902.400	66,67	119,45
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	36 Laporan	12.280.000	12 Laporan	5.110.000	12 Laporan	3.195.600	3 Laporan		3 Laporan		6 Laporan	-	50,00	0,00	18	Laporan	5.110.000	50,00	41,61
I.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 persen**	**257.100.000**	**100 Persen**	**77.559.016**	**100 Persen**	**94.682.900**	**0,00 Persen**	**-**	**66,67 Persen**		**66,67 Persen**	**-**	**66,67**	**0,00**	**166,67**	**Persen**	**77.559.016**	**166,67**	**30,17**
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	203.100.000	1 Paket	62.280.000	1 Paket	75.249.900	- Paket		1 Paket		1 Paket	-	100,00	0,00	2	Paket	62.280.000	66,67	30,66
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 orang	54.000.000	3 orang	15.279.016	3 orang	19.433.000	- orang		1 orang		1 orang	-	33,33	0,00	4	orang	15.279.016	50,00	28,29
1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**100 persen**	**863.930.629**	**98,21 persen**	**359.989.499**	**100 persen**	**329.067.173**	**15,48 persen**	**27.940.550**	**52,82 persen**	**64.120.824**	**68,30 persen**	**92.061.374**	**68,30**	**27,98**	**166,51**	**persen**	**452.050.873**	**166,51**	**52,32**
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	26.864.764	1 Paket	8.814.500	1 paket	9.300.095	paket	-	1 Paket	2.043.000	1 Paket	2.043.000	100,00	21,97	2	Paket	8.857.500	66,67	40,42
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	-	5 Paket	74.922.000	7 paket	61.236.206	paket	0	5 Paket	13.145.000	5 Paket	13.145.000	71,43	21,47	10	Paket	112.780.000	-	0,00

1.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	435.000.000	7 Paket	99.635.000	3 paket	83.741.952	1 paket	5.280.000	1 Paket	18.120.000	2 Paket	23.400.000	66,67	27,94	9	Paket		112,50	25,93
1.4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	82.625.865	1 Paket	27.012.000	1 paket	27.877.800	paket	3.152.000	1 Paket	6.460.000	1 Paket	9.612.000	100,00	34,48	2	Paket	36.624.000	66,67	44,33
1.4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	26.640.000	12 Dokumen	6.820.000	12 Dokumen	8.880.000	3 Dokumen	1.120.000	3 Dokumen	1.120.000	6 Dokumen	2.240.000	50,00	25,23	18	Dokumen	9.060.000	50,00	34,01
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	240.000.000	2 Laporan	124.835.999	2 Laporan	88.131.120	1 Laporan	18.388.550	Laporan	23.232.824	1 Laporan	41.621.374	50,00	47,23	3	Laporan	166.457.373	50,00	69,36
1.4.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15 Dokumen	52.800.000	5 Dokumen	17.950.000	5 Dokumen	49.900.000	Dokumen		2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	40,00	0,00	7	Dokumen	17.950.000	46,67	34,00
I.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 Persen**	**1.204.486.048**	**100 Persen**	**546.754.400**	**100 Persen**	**210.173.115**	**50,00 Persen**	**21.500.000**	**5,88 Persen**	**-**	**55,88 Persen**	**21.500.000**	**55,88**	**10,23**	**155,88**	**Persen**	**568.254.400**	**155,88**	**47,18**
1.5.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	26 paket	127.000.000	16 unit	18.760.000	5 unit	24.530.700	5 unit	21.500.000	- unit	-	5 unit	21.500.000	100,00	87,65	21	unit	40.260.000	80,77	31,70
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	87 Unit	1.077.486.048	20 Unit	527.994.400	17 unit	185.642.415	unit		2 Unit	-	2 Unit	-	11,76	0,00	22	Unit	527.994.400	25,29	49,00
I.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 Persen**	**3.042.202.427**	**100 Persen**	**949.610.901**	**100 Persen**	**941.195.185**	**0,00 Persen**	**122.672.106**	**25,00 Persen**	**81.620.833**	**25,00 Persen**	**204.292.939**	**25,00**	**21,71**	**125**	**Persen**	**1.153.903.840**	**125,00**	**37,93**
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	17.000.000	1 Laporan	5.220.000	1 Laporan	6.070.000	Laporan	Rp3.000.000	1 Laporan	2.800.000	1 Laporan	5.800.000	100,00	95,55	2	Laporan	11.020.000	66,67	64,82
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2.300.000.000	1 Laporan	698.646.733	1 Laporan	738.600.000	Laporan	Rp83.876.410	Laporan	53.165.137	- Laporan	137.041.547	-	18,55	1	Laporan	835.688.280	33,33	36,33
1.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	725.202.427	1 Laporan	245.744.168	1 Laporan	196.525.185	Laporan	Rp35.795.696	Laporan	25.655.696	- Laporan	61.451.392	-	31,27	1	Laporan	307.195.560	33,33	42,36
I.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 persen**	**320.702.746**	**100 Persen**	**108.351.500**	**100 Persen**	**93.862.631**	**25,00 Persen**	**14.120.500**	**5,43 Persen**	**9.558.600**	**30,43 Persen**	**23.679.100**	**0,4348**	**25,23**	**130,43**	**Persen**	**132.030.600**	**130,43**	**41,17**

1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	110.702.746	2 unit	37.851.500	2 unit	42.590.000	unit	7.540.500,00	unit	6.108.600	- unit	13.649.100	-	32,05	2	unit	51.500.600	100,00	46,52
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	92 unit	180.000.000	92 unit	60.560.000	92 unit	41.272.631	15 unit	6.580.000,00	15 unit	3.450.000	30 unit	10.030.000	32,61	24,30	122	unit	70.590.000	132,61	39,22
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	1 unit	30.000.000	1 unit	9.940.000	1 unit	10.000.000	- unit		unit -	-	- unit	-	-	0,00	1	unit	9.940.000	100,00	33,13
2	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**Persentase aplikasi yang dikelola dan berfungsi secara baik sesuai ketentuan SPBE**	**98,51 Persen**	**8.817.790.000**	**97,50 Persen**	**3.582.876.179**	**97,01 Persen**	**2.775.100.750**	**91,36 Persen**	**984.505.056**	**95,03 Persen**	**740.098.148**	**92,31 Persen**	**1.724.603.204**	**95,16**	**62,15**	**189,81**	**Persen**	**5.307.479.383**	**192,68**	**60,19**
2.1	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Sub Domain yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah**	**32 Perangkat Daerah**	**1.973.000.000**	**32 Perangkat Daerah**	**881.092.251**	**32 Perangkat Daerah**	**118.336.971**	**32 Perangkat Daerah**	**1.800.000**	**Perangkat Daerah**	**104.347.500**	**32,00 Perangkat Daerah**	**106.147.500**	**00,00**	**89,70**	**64**	**Perangkat Daerah**	**987.239.751**	**200,00**	**50,04**
2.1.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	3 Dokumen	330.000.000	1 Dokumen	118.048.251				-	Dokumen		- Dokumen	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	Dokumen	118.048.251	33,33	35,77
2.1.2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	3 Unit	1.643.000.000	1 Unit	763.044.000				-	Unit		- Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	1	Unit	763.044.000	33,33	46,44
2.1.1	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	0	-			1 Dokumen	118.336.971	- Dokumen	Rp1.800.000	Dokumen	104.347.500	- Dokumen	106.147.500	-	89,70	-	Dokumen	106.147.500	#DIV/0!	#DIV/0!
2.2	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah Perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE**	**8 Aplikasi / Layanan Publik**	**6.844.790.000**	**30 Perangkat Daerah**	**2.701.783.928**	**32 Perangkat Daerah**	**2.656.763.779**	**32 Perangkat Daerah**	**982.705.056**	**Perangkat Daerah**	**635.750.648**	**32,00 Perangkat Daerah**	**1.618.455.704**	**100,00**	**60,92**	**62,00**	**Perangkat Daerah**	**4.320.239.632**	**775,00**	**63,12**
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	5.470.000.000	1 Unit	2.385.713.288															
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	9 Unit	630.000.000	3 Unit	56.385.840															

	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	15 Layanan	310.000.000	5 Layanan	64.519.800															
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	3 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	49.250.000															
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3 Dokumen	144.000.000	1 Dokumen	51.485.000															
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	3 Dokumen	110.790.000	**1** Dokumen	94.430.000															
2.2.1	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				-	1 Laporan	152.415.000	Laporan	0	Laporan	-	- Laporan	-	-	0,00	-	Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!
2.2.2	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional				-	1 Dokumen	1.604.694.496	Dokumen	257.725.056	Dokumen	632.190.648	- Dokumen	889.915.704	-	55,46	-	Unit	889.915.704	#DIV/0!	#DIV/0!
2.2.3	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				-	3 Aplikasi	31.428.000	Aplikasi	4.500.000	1 Aplikasi	1.800.000	3 Aplikasi	6.300.000	100,00	20,05	3	Layanan	6.300.000	#DIV/0!	#DIV/0!
2.2.4	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				-	5 Aplikasi	17.690.000	Aplikasi	Rp0	Aplikasi	-	- Aplikasi		-	#VALUE!	-	Dokumen	#VALUE!	#DIV/0!	#VALUE!
2.2.5	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas				-	32 unit	115.050.000	unit	0	unit	-	- unit	-	-	0,00	-	Dokumen	-	#DIV/0!	#DIV/0!
2.2.6	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				-	32 PD	735.486.283	24 PD	720.480.000	2 PD	1.760.000	26 PD	722.240.0	81,25	98,20	26	Dokumen	722.240.000	#DIV/0!	#DIV/0!

3	**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi pemerintah**	**34,38**	**Persen**	**282.950.000**	**21,88**	**Persen**	**125.999.614**	**28.13**	**Persen**	**135.018.000**		**Persen**	**-**	**12,50**	**Persen**	**-**	**12,50**	**Persen**	**-**	**ALUE!**	**0,00**	**34,38**	**Persen**	**125.999.614**	**100,00**	**44,53**
3.1	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**Persentase Sistem Elektronik Pemerintah yang telah menerapkan prinsip Manajemen Kemanan Informasi (SMKI)**	**44,78**	**Persen**	**245.450.000**	**33,58**	**Persen**	**117.099.614**	**35,82**	**Persen**	**128.618.000**		**Persen**	**-**	**9,38**	**Persen**	**-**	**9,38**	**Persen**	**-**	**26,17**	**0,00**	**42,96**	**Persen**	**117.099.614**	**95,92**	**47,71**
3.1.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan	3	Dokumen	23.500.000	1	Dokumen	7.000.000	1	Dokumen	8.000.000		Dokumen			Dokumen	-	-	Dokumen	-	-	0,00	1	Dokumen	7.000.000	33,33	29,79
3.1.2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	3	Laporan	44.000.000	1	Laporan	8.755.000	1	Laporan	15.000.000		Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	0,00	1	Laporan	8.755.000	33,33	19,90
3.1.3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3	Laporan	165.000.000	1	Laporan	98.894.614	1	Laporan	100.618.000		Laporan		-	Laporan	-	-	Laporan	-	-	0,00	1	Laporan	98.894.614	33,33	59,94
3.1.4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	15	PD	12.950.000	5	PD	2.450.000	5	PD	5.000.000	5	PD			PD	-	5	PD	-	100,00	0,00	10	PD	2.450.000	66,67	18,92
3.2	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota**	**Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Jaring Komunikasi Sandi**	**79,13**	**Persen**	**37.500.000**	**50,00**	**Persen**	**8.900.000**	**63,51**	**Persen**	**6.400.000**		**Persen**	**-**	**Persen**		**-**	**Persen**		**-**	**-**	**0,00**	**50,00**	**Persen**	**8.900.000**	**63,19**	**23,73**
3.2.1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	15	PD	37.500.000	5	PD	8.900.000	5	PD	6.400.000		PD	-	PD	-	-	PD		-	-	0,00	5	PD	8.900.000	33,33	23,73
4	**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**Perentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik**	**90**	**Persen**	**2.360.055.506**	**98,98**	**Persen**	**607.494.107**	**80,00**	**Persen**	**668.898.400**	**24,30**	**Persen**	**51.389.888**	**16,67**	**Persen**	**74.289.888**	**40,97**	**Persen**	**125.679.776**	**51,21**	**18,79**	**139,95**	**Persen**	**733.173.883**	**155,50**	**31,07**
4.1	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah sarana/media informasi dan komunikasi publik yang dilakukan/ dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat**	**15**	**Informasi**	**2.360.055.506**	**13**	**Media**	**607.494.107**	**15**	**Media**	**668.898.400**	**8**	**Media**	**51.389.888**	**1**	**Media**	**74.289.888**	**9**	**Media**	**125.679.776**	**60,00**	**18,79**	**22**	**Media**	**733.173.883**	**146,67**	**31,07**
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring	12	Dokumen	159.999.920	4	Dokumen	41.375.000																			

		Opini dan Aspirasi Publik																				
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	36 Dokumen	797.684.059	12 Dokumen	231.448.667																
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	6 Dokumen	174.505.120	2 Dokumen	34.480.000																
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	36 Dokumen	254.102.540	12 Dokumen	68.364.840																
	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	4 Layanan	494.448.460	4 Layanan	130.710.000																
	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	6 Dokumen	393.261.100	2 Dokumen	73.105.500																
	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	3 Dokumen	86.054.307	**1** Dokumen	28.010.100																
4.1.1	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				-	4 Laporan	21.488.000	1 Laporan	6.840.000	-Laporan	1.360.000	1 Laporan	8.200.000	25,00	38,16	1	Dokumen	8.200.000	#DIV/0!	#DIV/0!
4.2.2	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				-	6 Komunitas	92.893.400	4 Komunitas	0	2Komunitas	13.480.000	6 Komunitas	13.480.000	100,00	14,51	6	Dokumen	13.480.000	#DIV/0!	#DIV/0!
4.2.3	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				-	24 permohonan	104.659.068	4 permohonan	10.032.416	7permohonan	9.022.416	11 permohonan	19.054.832	45,83	18,21	11	Dokumen	19.054.832	#DIV/0!	#DIV/0!
4.2.4	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				-	4 Rekomendasi	43.120.000	1 Rekomendasi	0	-Rekomendasi	-	1 Rekomendasi	-	25,00	0,00	1	Dokumen	-	#DIV/0!	#DIV/0!
4.2.5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				-	2 Media	170.532.000	1 Media	0	1Media	27.000.000	2 Media	27.000.000	100,00	15,83	2	Layanan	27.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!
4.2.6	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik				-	240 Konten	236.205.932	91 Konten	34.517.472	58 Konten	23.427.472	149 Konten	57.944.944	62,08	24,53	149	Dokumen	57.944.944	#DIV/0!	#DIV/0!
5	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**Persentase pemenuhan data prioritas daerah**	**69,23 persen**	**1.524.351.244**	**64,02 persen**	**369.900.700,00**	**61,54 persen**	**387.756.463**	**25,00 persen**	**53.442.030**	**25,00 persen**	**91.654.000**	**50,00 persen**	**145.096.030**	**81,25**	**37,42**	**114,02**	**persen**	**514.996.730**	**164,70**	**33,78**

5.1	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota**	**Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota**	**100 Persen**	**1.524.351.244**	**100 persen**	**369.900.700,00**	**100 persen**	**387.756.463**	**25,00 persen**	**53.442.030**	**25,00 persen**	**91.654.000**	**50,00 persen**	**145.096.030**	**50,00**	**37,42**	**150,00**	**persen**	**514.996.730**	**150,00**	**33,78**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	9 Dokumen	176.332.639	3 Dokumen	51.285.000,00															
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	32 orang	110.149.845	32 Orang	31.706.000,00															
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	6 Dokumen	174.505.120	2 Dokumen	46.470.500,00															
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	32 PD	350.102.540	32 Orang	56.610.800,00															
	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	9 Dokumen	713.261.100	3 Dokumen	183.828.400,00															
5.1.1	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				-	37 Orang	96.149.906	2 Orang	Rp22.782.030	32 Orang	13.400.000	34 Orang	36.182.030	91,89	37,63	34	Dokumen	36.182.030	#DIV/0!	#DIV/0!
5.1.2	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan				-	100 %	38.929.638	25,00 %	Rp3.600.000	25 %	11.705.500	50 %	15.305.500	50,00	39,32	50	Orang	15.305.500	#DIV/0!	#DIV/0!
5.1.3	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				-	100 %	252.676.919	25,00 %	Rp27.060.000	25 %	66.548.500	50 %	93.608.500	50,00	37,05	50	Dokumen	93.608.500	#DIV/0!	#DIV/0!
				11.845.939.675				**12.811.062.317**		**2.821.387.162**		**1.680.820.082**		**4.502.207.244**					**6.348.146.919**		

Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2025 yang belum mendapai target kinerja dengan Pemetaan sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Hasil/Keluaran yang direncanakan antara lain :
   - Realisasi Sub Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang durencanakan antara lain :
     - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) dikarenakan Proses Penyusunan RKA Tahun 2025 dimulai pada Triwulan III.
     - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) dikarenakan Proses Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025 dimulai pada Triwulan III.
     - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dilaksanakan selama 12 bulan dan kinerja masih 0 dari target sebanyak 1 laporan, hal ini disebabkan berupa laporan yang akan dilakukan pada triwulan IV
     - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dilaksanakan selama 12 bulan dan kinerja masih 0 dari target sebanyak 1 laporan, hal ini disebabkan berupa laporan yang akan dilakukan pada triwulan IV
     - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pembayaran pajak kendaraan yakni mobil dan motor yang dilakukan pada triwulan III, dengan target kinerja 2 unit dan terealisasi 0.
     - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Unit (0 %) dikarenakan di perubahan anggaran Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan
     - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Unit (0 %) dikarenakan di perubahan anggaran Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan di ubah menjadi Renovasi (Perbaikan Aset Tetap yang Rusak atau Mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas) dari Akun Belanja Pemeliharan ke Belanja Modal.

2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Hasil/Keluaran yang direncanakan antara lain :

- Realisasi Sub Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang durencanakan antara lain :
  - Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa, selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) dan akan direalisasikan di triwulan IV. Selain melakukan penyusunan dokumen juga telah dilakukan penambahan sub domain sebanyak 1 sub domain dan dilakukan monitoring dan evaluasi serta pemeliharaan sub domain yang ada.
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah, selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) dan akan direalisasikan di triwulan IV. Selain penyusunan dokumen kinerja lain yang dihasilkan adalah penyediaan internet di data senter, mengelola server dan Perangkat Daerah IT, melakukan Monitoring dan pemeliharaan server, penambahan server gaji dari unit BKD dan penambahan instalasi 2 unit UPS sebesar 15 dan 20 Va.
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah, selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) dan akan direalisasikan di triwulan IV. Selain penyusunan dokumen kinerja yang dilakukan pada sub kegiatan ini Rapat Koordinasi, Mengelola SPLP pusat untuk di integrasikan (antara aplikasi teman disko dengan BSSN) dan Pengembangan SPLP Daerah.
  - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas, selama 6 Bulan mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) dan akan direalisasikan di triwulan IV. Selain penyusunan dokumen kinerja yang dilakukan pada sub kegiatan ini Pengembangan dan lengelolaan aplikasi jepin sebagai portal Smart City dan Pelaksanaan literasi digital berkolaborasi dengan BPSDM Komdigi terkait Cyber Security di lingkungan SMP di Kota Pontianak.

3) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Hasil/Keluaran yang durencanakan antara lain :

- Realisasi Sub Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang durencanakan antara lain :
  - Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, target kinerja mencapai 0 dari Target 1 Dokumen (0 %) dikarenakan pembuatan

Dokumen hasil kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan IV. Selain penyusunan dokumen kinerja yang dilakukan pada sub kegiatan ini adalah penyusunan draft Keputusan Wali Kota tentang Pola Hubungan Komunikasi Sandi.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, target kinerja mencapai 0 dari Target 1 Laporan (0 %) dikarenakan pembuatan Laporan hasil kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan IV.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik, target kinerja mencapai 0 dari Target 1 Laporan (0 %) dikarenakan pembuatan Laporan hasil kegiatan akan dilaksanakan pada Triwulan IV. Selain penyusunan laporan kinerja yang dilakukan pada sub kegiatan ini dilakukan identifikasi kerentanan, monitoring keamanan jaringan.
- Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, realisasi kinerja mencapai 0 dari Target 5 Perangkat Daerah (0 %) dikarenakan belum dilakukan sosialisasi keamanan informasi dan tandatangan elektronik yang akan dilaksanakan sebanyak 5 Perangkat Daerah yang telah ditargetkan.
- Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sampai dengan triwulan II masih 0, hal ini disebabkan masih dilakukan proses perjanjian kerjama sama dengan pihak Badan Siber Sandi Negara (BSSN).

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target Kinerja, Pagu Indikatif, yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Secara keseluruhan pagu indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika menurun dari APBD Kota Pontianak Tahun 2025 yang semula sebesar Rp.13.094.574.484,- pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 menjadi Rp.12.811.062.317,- ada penurunan sebesar Rp.283.512.167,- Hal ini disebabkan karena adanya refocusing yang berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor B/000.7.2.4/26/BAPPERIDA/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Kategori belanja yang harus dilakukan refocusing antara lain pada belanja makan dan minum, Bahan Kegiatan Kantor, Pemeliharaan Alat Kantor dan Perjalanan Dinas.

Adapun uraian Sub Kegiatan yang mengalami penurunan atau kenaikan pagu indikatif adalah sebagai berikut :

1. Relasi Media

   Anggaran murni pada sub kegiatan Relasi Media sebesar Rp.33.744.600,- dan terjadi pengurangan anggaran menjadi Rp.20.390.000,-. Pengurangan anggaran sub kegiatan ini pada Alata tulis kantor, makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman lapangan serta perjalanan dinas dalam kota.

2. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat

   Anggaran murni pada sub kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat sebesar Rp.118.886.400,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.92.893.400,- Pengurangan anggaran pada sub kegiatan ini pada belanja alat tulis kantor dan perjalanan dinas.

3. Pelayanan Informasi Publik

   Anggaran murni pada sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik sebesar Rp.116.447.910,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.95.582.420,- Pengurangan anggaran sub kegiatan ini pada belanja makanan dan minuman lapangan serta belanja jasa tenaga informasi dan teknologi.

4. Monitoring Informasi Kebijakan Opini dan Aspirasi Publik

   Anggaran murni pada sub kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan Opini dan Aspirasi Publik sebesar Rp.43.730.000,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.43.120.000,- Pengurangan anggaran sub kegiatan ini pada makanan dan minuman rapat.

5. Pengelolaan Media Komunikasi Publik

   Anggaran murni pada sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik sebesar Rp.173.110.000,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.170.532.000,- Pengurangan anggaran sub kegiatan ini pada makanan dan minuman rapat serta makanan dan minuman lapangan.

6. Penyusunan Konten

   Anggaran murni pada sub kegiatan Penyusunan Konten sebesar Rp.260.299.912,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.215.382.132,- Pengurangan anggaran sub kegiatan ini pada belanja bahan komputer serta makanan dan minuman rapat.

7. Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa

   Anggaran murni pada sub kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa sebesar Rp.124.070.971,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.118.336.971,- Pengurangan anggaran sub kegiatan ini pada belanja makanan dan minuman rapat.

8. Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah

   Anggaran murni pada sub kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah sebesar Rp.1.567.779.496,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.1.604.694.496,- Pengurangan anggaran sub kegiatan ini pada Belanja Modal Personal Computer (Handphone IPhone sebanyak 1 unit dan SSD server sebanyak 3 unit) serta Belanja Modal Peralatan Jaringan

9. Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah

   Anggaran murni pada sub kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah sebesar Rp.59.328.000,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.31.428.000,- Pengurangan anggaran sub kegiatan ini pada belanja makanan dan minuman lapangan.

10. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

    Anggaran murni pada sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebesar Rp.32.940.000,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.17.690.000,- Pengurangan anggaran sub kegiatan ini makanan dan minuman rapat.

11. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas

    Anggaran murni pada sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas sebesar Rp.127.810.000,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.115.050.000,- Pengurangan anggaran sub kegiatan ini pada belanja perjalanan dinas dalam kota.

12. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota

    Anggaran murni pada sub kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota sebesar Rp.738.486.283,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.735.486.283,- Pengurangan anggaran sub kegiatan ini pada belanja perjalanan dinas dalam kota.

13. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

    Anggaran murni pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp.38.039.800,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.27.639.000,- Pengurangan pada sub kegiatan ini pada Sovenir Acara Forum SKPD yang akan diperuntukkan dalam acara Forum Perangkat Daerah

14. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

    Anggaran murni pada sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebesar Rp.201.720.000,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.152.520.000,- Pengurangan anggaran dilakukan pada belanja honorarium PPTK dan honorarium KPA yang menyesuaikan dengan kondisi.

15. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

    Anggaran murni pada sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya sebesar Rp.78.780.000,- terjadi penguirangan anggaran sehingga anggarannya menjadi Rp.75.249.900,-, hal ini disebabkan adanya mutasi pegawai PJLP yang diangkat menjadi PPPK di instansi luar.

16. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

    Anggaran murni pada sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi sebesar Rp.36.000.000,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.84.190.000,- penambahan anggaran ini dilakukan adanya penambahan Bimtek yang harus diikuti oleh ASN dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun pendidikan dan pelatihan yang telah terlaksana seperti Pelatihan Visualisasi Data Menggunakan Metabase, Optimalisasi Manajemen API Menggunakan WSO2 dan Pemanfaatan AI untuk Chatbot Sistem Layanan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik.

17. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

    Anggaran murni sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp.72.097.600,- dan terjadi pengurangan anggaran perubahan menjadi Rp.61.236.206,- Pengurangan anggaran dilakukan pada belanja barang habis pakai.

18. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

    Anggaran murni sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor sebesar Rp. 50.702.000,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.84.147.195,- atau terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.33.445.195,-. Penambahan anggaran dilakukan pada sub belanja makanan dan minuman rapat.

19. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Anggaran murni sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp.91.000.000,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.94.171.120,- atau terjadi pernambahan anggaran yang diperuntukkan untuk tambahan perjalanan dinas luar daerah.

20. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Anggaran murni sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD sebesar Rp.17.600.000,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.54.700.000,- atau terjadi pernambahan anggaran yang diperuntukkan untuk honorarium operator sistem.

21. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran murni sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp.219.735.185,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.166.956.185,- atau terjadi pengurangan anggaran pada belanja Jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga informasi dan teknologi dan belanja lembur serta belanja sewa lapangan.

22. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran murni sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp.64.377.500,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.42.228.500,- atau terjadi pengurangan anggaran pada belanja pemeliharaan AC, pemeliharaan komputer/laptop dan pemeliharaan printer.

23. Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

Anggaran murni sub kegiatan Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral sebesar Rp.151.720.876,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.96.149.906,- atau terjadi pengurangan anggaran pada belanja makanan dan minuman rapat.

24. Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional

Anggaran murni sub kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional sebesar Rp.57.992.638,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.38.929.638,- atau terjadi pengurangan anggaran pada belanja alat tulis kantor serta makanan dan minuman rapat.

25. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral

Anggaran murni sub kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional sebesar Rp.274.798.919,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.252.676.919,- atau terjadi pengurangan anggaran pada belanja alat tulis kantor.

26. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran murni sub kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.12.500.000,- dan terjadi perubahan menjadi Rp.6.400.000,- atau terjadi pengurangan anggaran pada belanja perjalanan dinas dalam kota.

Tabel. 3.1

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA PONTIANAK TAHUN 2025

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**12.826.779.000,00**	**13.094.074.484,00**	**12.811.062.317,00**	**-15.716.683,00**							**10.340.726.714,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**12.826.779.000,00**	**13.094.074.484,00**	**12.811.062.317,00**	**-15.716.683,00**							**10.340.726.714,00**	
	2,16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**12.192.748.567,00**	**12.468.444.051,00**	**12.304.315.854,00**	**111.567.287,00**							**9.927.895.214,00**	
1	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan**				**95 %**	**95 %**	**8.624.081.315,00**	**8.919.365.479,00**	**8.890.317.816,00**	**-152.847.101,00**							**8.471.234.214,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	42.512.800,00	50.433.300,00	40.033.300,00	-2.479.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-		14.164.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	24.926.800,00	38.039.800,00	27.639.800,00	2.713.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			1.772.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.250.000,00	3.106.200,00	3.106.200,00	-1.143.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			3.106.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.250.000,00	3.106.200,00	3.106.200,00	-1.143.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			3.106.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	4.644.600,00	4.100.700,00	4.100.700,00	-543.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			4.100.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	4.441.400,00	2.080.400,00	2.080.400,00	-2.361.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			2.080.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				-	100 %	6.929.678.000,00	7.184.473.884,00	7.135.274.400,00	205.596.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	null		7.228.410.114,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	45 Orang/bulan	6.710.619.000,00	6.977.914.484,00	6.977.915.000,00	267.296.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			7.021.873.514,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	213.720.000,00	201.720.000,00	152.520.000,00	-61.200.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			201.720.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.089.000,00	1.643.800,00	1.643.800,00	554.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			1.621.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.250.000,00	3.195.600,00	3.195.600,00	-1.054.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			3.195.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				-	100 %	85.700.000,00	115.455.000,00	159.439.900,00	73.739.900,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	null		112.855.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	67.700.000,00	78.780.000,00	75.249.900,00	7.549.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			76.180.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	4 Orang	18.000.000,00	36.675.000,00	84.190.000,00	66.190.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			36.675.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	308.317.155,00	277.457.495,00	340.312.416,00	31.995.261,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	null		298.589.615,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.000.000,00	9.300.095,00	9.300.095,00	300.095,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			9.300.095,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	78.260.200,00	72.097.600,00	61.236.206,00	-17.023.994,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			62.594.100,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	82.035.000,00	50.702.000,00	84.147.195,00	2.112.195,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			73.933.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	27.541.955,00	27.877.800,00	27.877.800,00	335.845,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			27.877.800,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	8.880.000,00	8.880.000,00	8.880.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			8.880.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	85.000.000,00	91.000.000,00	94.171.120,00	9.171.120,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			69.004.120,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5 Dokumen	14 Dokumen	17.600.000,00	17.600.000,00	54.700.000,00	37.100.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			47.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	163.320.360,00	210.173.115,00	208.813.115,00	45.492.755,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-		74.995.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	30.000.000,00	24.530.700,00	24.530.700,00	-5.469.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			24.530.700,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				17 Unit	17 Unit	133.320.360,00	185.642.415,00	184.282.415,00	50.962.055,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			50.464.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	987.553.000,00	964.405.185,00	911.626.185,00	-75.926.815,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-		600.155.185,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.070.000,00	6.070.000,00	70.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			6.070.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	735.000.000,00	738.600.000,00	738.600.000,00	3.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			420.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	246.553.000,00	219.735.185,00	166.956.185,00	-79.596.815,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			174.085.185,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	107.000.000,00	116.967.500,00	94.818.500,00	-12.181.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-		142.064.300,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	37.000.000,00	42.590.000,00	42.590.000,00	5.590.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			37.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				92 Unit	92 Unit	60.000.000,00	64.377.500,00	42.228.500,00	-17.771.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			45.064.300,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase pemenuhan layanan informasi dan komunikasi publik**				**80 %**	**80 %**	**748.613.612,00**	**746.248.822,00**	**637.899.952,00**	**-188.613.612,00**							**560.000.000,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana / media informasi dan komunikasi publik yang dilakukan / dikelola dan dipublikasikan kepada masyarakat*				15 Media	15 Media	748.613.612,00	746.248.822,00	637.899.952,00	-110.713.660,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		560.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media																		
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				4 Laporan	4 Laporan	150.372.600,00	33.774.600,00	20.390.000,00	-129.982.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																		
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				6 Komunitas	6 Komunitas	130.691.000,00	118.886.400,00	92.893.400,00	-37.797.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			110.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															melalui peran aktif koperasi.					
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				24 Permohonan	24 Permohonan	102.946.384,00	116.447.910,00	95.582.420,00	-7.363.964,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			83.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																		
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	55.175.200,00	43.730.000,00	43.120.000,00	-12.055.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			42.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				2 Media	2 Media	57.992.638,00	173.110.000,00	170.532.000,00	112.539.362,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten																		
			Jumlah Konten Informasi Publik				240 Konten	240 Konten	251.435.790,00	260.299.912,00	215.382.132,00	-36.053.658,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase aplikasi yang dikelola dan berfungsi secara baik sesuai ketentuan SPBE**				**97,01 Persen**	**97,01 Persen**	**2.820.053.640,00**	**2.802.829.750,00**	**2.776.098.086,00**	**-1.923.392.640,00**							**896.661.000,00**	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Sub Domain yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah*				32 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	158.000.000,00	124.070.971,00	118.336.971,00	-39.663.029,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-		156.978.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	158.000.000,00	124.070.971,00	118.336.971,00	-39.663.029,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			156.978.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perangkat daerah yang telah menerapkan SPBE*				-	32 Perangkat Daerah	2.662.053.640,00	2.678.758.779,00	2.657.761.115,00	-4.292.525,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		739.683.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																		
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				1 Laporan	1 Laporan	103.430.000,00	152.415.000,00	152.415.000,00	48.985.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			152.415.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah																		

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional				1 Dokumen	1 Dokumen	1.607.433.000,00	1.567.779.496,00	1.605.691.832,00	-1.741.168,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			80.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah																		
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				3 Aplikasi	3 Aplikasi	118.285.840,00	59.328.000,00	31.428.000,00	-86.857.840,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			59.328.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				5 Aplikasi	5 Aplikasi	100.000.000,00	32.940.000,00	17.690.000,00	-82.310.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			32.940.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas																		

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas				32 unit	32 unit	65.000.000,00	127.810.000,00	115.050.000,00	50.050.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			115.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				32 Perangkat Daerah	32 Perangkat Daerah	667.904.800,00	738.486.283,00	735.486.283,00	67.581.483,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2,2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**492.912.433,00**	**484.512.433,00**	**371.728.463,00**	**-121.183.970,00**							**271.213.500,00**	
1	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase pemenuhan data prioritas daerah**				**61,54 %**	**61,54 %**	**492.912.433,00**	**484.512.433,00**	**371.728.463,00**	**-221.698.933,00**							**271.213.500,00**	

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kab/Kota*				100 %	100 %	492.912.433,00	484.512.433,00	371.728.463,00	-121.183.970,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-		271.213.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				37 Orang	37 Orang	151.720.876,00	151.720.876,00	94.636.906,00	-57.083.970,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			101.003.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional																		
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan				100 Persentase	100 Persentase	57.992.638,00	57.992.638,00	36.209.638,00	-21.783.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			5.490.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																		

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				100 Persentase	100 Persentase	283.198.919,00	274.798.919,00	240.881.919,00	-42.317.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			164.720.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2,21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**141.118.000,00**	**141.118.000,00**	**135.018.000,00**	**-6.100.000,00**							**141.618.000,00**	
1	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi pemerintah**				**-**	**28,13 %**	**141.118.000,00**	**141.118.000,00**	**135.018.000,00**	**500.000,00**							**141.618.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Sistem Elektronik Pemerintah yang telah menerapkan prinsip Manajemen Kemanan Informasi (SMKI)*				-	35,82 %	128.618.000,00	128.618.000,00	128.618.000,00	0,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	null		129.118.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			8.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	1 Laporan	100.618.000,00	100.618.000,00	100.618.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			100.618.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		

No	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			5.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Jaring Komunikasi Sandi*				-	63,51 %	12.500.000,00	12.500.000,00	6.400.000,00	-6.100.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	null		12.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	12.500.000,00	12.500.000,00	6.400.000,00	-6.100.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			12.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	J U M L A H								**12.826.779.000,00**	**13.094.074.484,00**	**12.811.062.317,00**	**-15.716.683,00**							**10.340.726.714,00**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Tahun 2025 ini merupakan pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang dijabarkan ke dalam Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2025, yang mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025 untuk menjaga Konsistensi Capaian Kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan serta untuk menjaga Konsistensi antara Perencanaan dan Penganggaran.

A. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1). Sekretariat, Bidang-Bidang 2025 dan seluruh staf di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak secara bersama bertanggungjawab untuk melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 serta menjaga Konsistensi dengan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2025 yang ditetapkan.

2). Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025.

B. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, akan ditindaklanjuti dengan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak yang sudah ditetapkan.

Akhirnya, Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan, sekaligus menjadi sarana peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pontianak, Juni 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

Drs. Zulkarnain, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660127 198603 1 009

LAMPIRAN I

PENYELARASAN SUB KEGIATAN

No	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
	KEPMEN 1317	**APLIKASI SIPD.RI**
1	Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik
2	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Sub Kegiatan Penyusunan Konten
3	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
4	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
5	Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	
6	Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Sub Kegiatan Relasi Media
7	Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Sub Kegiatan Kemitraan dengan Komunitas Informasi Masyarakat
	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	**Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**
8	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa
9	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	
	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	**Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
10	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Kendali pemerintah Daerah
11	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah
12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
13	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas

No	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
	KEPMEN 1317	**APLIKASI SIPD.RI**
	Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	
14	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
15	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Sub Kegiatan fasilitas Penyelenggaraan SPBE Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
16	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
17	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	
18	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
19	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
20	Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK

PERUBAHAN RENCANA KERJA

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025 ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan *Good Governance* yang merupakan tuntutan terselenggaranya manajemen Pemerintah yang bersih dan berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna.

Perencanaan kerja merupakan proses sistematis penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) untuk periode 1 (satu) tahun, sehingga merupakan terobosan dalam pembangunan, terutama untuk memajukan perekonomian di bidang Koperasi, Usaha mikro, Perindustrian dan perdagangan di Kota Pontianak.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak tahun 2025 ini dapat dilaksanakan dan memberi manfaat bagi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya urusan Koperasi dan Usaha mikro, Perdagangan, Perindustrian di Kota Pontianak.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I.	**PENDAHULUAN**	**I.1**
1.1.	LATAR BELAKANG	I.1
1.2.	LANDASAN HUKUM	I.2
1.3.	MAKSUD DAN TUJUAN	I.5
1.4.	SISTEMATIKA PENULISAN	I.5
BAB II.	**EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025**	**II.1**
2.1.	EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I	II.1
BAB III.	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**	**III.1**
3.1.	RENCANA KERJA	III.1
3.2.	PENDANAAN	III.49
BAB IV.	**PENUTUP**	**IV.1**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk periode 3 (tiga) tahun dan sebagai turunannya maka wajib disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak tiap tahunnya.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Adapun tujuan RPD Kota Pontianak yang diemban Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak adalah Tujuan ke empat yaitu : “Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan Yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan”.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan landasan hukum di bidang Perencanaan Pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sehingga terwujud sinergi dalam memformulasikan perencanaan pembangunan di Daerah. Dalam Undang-undang ini ditetapkan bahwa sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Undang-undang 25 Tahun 2004 ini juga memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan antara lain bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik Pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun Pembangunan Antar Daerah.

Dengan tersusunnya Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan serta Perindustrian.

1.2 Landasan Hukum

Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Renja ini adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
22. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 121).
25. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
26. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2024-2026.
27. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 10).
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan indikator dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025 dengan dokumen Renja Tahun 2025 serta Renstra dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang dalam kurun waktu bulan Januari-Mei 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak merupakan unsur pelaksana bidang koperasi, usaha mikro, industri, perdagangan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan. Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak mengacu pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 121 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak.

Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak:

a. Perumusan kebijakan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan;
e. Pelaksanaan administrasi dinas Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan Kota Pontianak; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Pontianak yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan.

Berikut Tabel Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pontianak Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan Kota Pontianak Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2025 :

Tabel 2.1

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

RENJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK

PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN I (SATU) TAHUN ANGGARAN 2025

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024-2026)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6			7			8			9			13=8+9+10+11			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
		URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																										
		BIDANG KOPERASI,USAHA KECIL, DAN MENENGAH																										
	Tujuan PD																											
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Industri		1. Laju PDRB sektor Perdagangan	Perbandingan Nilai PDRB sektor Perdagangan terhadap Jumlah Nilai PDRB	5,00	Persen	49.645.069.340									3.629.694.636	6,8	Persen	3.794.162.036	#DIV/0!	#DIV/0!	6,8	Persen	3.794.162.036	#DIV/0!	8		
			2. Laju PDRB sektor Industri	Perbandingan Nilai PDRB sektor Industri terhadap Jumlah Nilai PDRB	4,80	Persen											0,05	Persen		#DIV/0!	#DIV/0!	0,05	Persen	-	#DIV/0!			
		TAHUN 2024																										
01		2.17.01 .- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan Bidang terhadap pelayanan Kesekretariatan		95	Persen	51.425.146.290	100	Persen	11.199.932.951	95	Persen	13.668.401.663	25	Persen	3.151.226.282	100	Persen	3.151.226.282	105	23,05	200	Persen	14.351.159.233	26%	#DIV/0!	Sekretariat	
01,01		2.17.01.2.01. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		100	Persen	30.500.000	100	Persen	30.507.400	100	Persen	40.800.000	40	Persen	-	100	Persen	-	100	0,00	200	Persen	30.507.400	200%	100%	Sekretariat	
01.01,01		2.17.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		24	Dokumen	26.000.000	5	Dokumen	29.507.400	5	Dokumen	30.500.000	2	Dokumen		2	Dokumen	-	40	0,00	7	Dokumen	29.507.400	29%	113%	Sekretariat	
01.01,02		2.17.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		3	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1	Dokumen					0	Dokumen	-	0	#DIV/0!	1	Dokumen	-	33%	#DIV/0!	Sekretariat	
01.01,03		2.17.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		3	Dokumen	-	1	Dokumen	-	1	Dokumen					0	Dokumen	-	0	#DIV/0!	1	Dokumen	-	33%	#DIV/0!	Sekretariat	

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024-2026)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6			7			8			9			13=8+9+10+11			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
01.01,04		2.17.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3	Laporan	-		Laporan									Laporan	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	Dokumen	-	0%	#DIV/0!	Sekretariat	
01.01,05		2.17.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		9	Laporan	4.500.000	3	Laporan	1.000.000	3	Laporan	10.300.000		Laporan		0	Laporan	-	0	0,00	3	Dokumen	1.000.000	33%	22%	Sekretariat	
01,02		2.17.01.2.02 . Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	Persen	33.737.989.569	100	Persen	7.709.683.465	100	Persen	9.843.994.843	25	Persen	2.469.834.215	100	Persen	2.469.834.215	100	25,09	200	Persen	10.179.517.680	200%	30%	Sekretariat	
01,02.01		2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		195	Orang/Bulan	32.375.309.569	55	Orang bulan	7.445.823.465	65	Orang bulan	9.529.234.843	60	Orang bulan	2.400.414.215	60	Orang bulan	2.400.414.215	92	25,19	115	Orang bulan	9.846.237.680	59%	30%	Sekretariat	
01,02.02		2.17.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		6	Dokumen	1.362.680.000	2	Dokumen	263.860.000	2	Dokumen	314.760.000	1	Dokumen	69.420.000	1	Dokumen	69.420.000	50	22,05	3	Dokumen	333.280.000	50%	24%	Sekretariat	
01,02.03		X.XX.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		3	Laporan	-	1	Laporan	-							1	Laporan	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2	Laporan	-	67%		Sekretariat	
01,03		2.17.01.2.05 . Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100	Persen	241.212.000	100	Persen	99.276.500	100	Persen	100.180.000	25	Persen	-	100	Persen	-	100	0,00	200	Persen	99.276.500	200%	41%	Sekretariat	
01,03.01		2.17.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		6	Paket	241.212.000	2	paket	99.276.500	2	Paket	100.180.000		Paket		0	paket	-	0	0,00	2		99.276.500	33%	41%	Sekretariat	
01,04		2.17.01.2.06 . Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah		100	Persen	986.500.000	100	Persen	430.515.452	100	Persen	502.917.200	25	Persen	106.239.000	100	Persen	106.239.000	100	21,12	200	Persen	536.754.452	200%	54%	Sekretariat	
01,04.01		2.17.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		3	Paket	37.000.000	1	Paket	20.287.000	1	Paket	12.119.500		Paket		0	Paket	-	0	0,00	1	Paket	20.287.000	33%	55%	Sekretariat	
01,04.02		2.17.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12	Paket	204.000.000	3	Paket	64.481.600	4	Paket	89.317.400	2	Paket	40.431.000	2	Paket	40.431.000	50	45,27	5	Paket	104.912.600	42%	51%	Sekretariat	

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024-2026)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6			7			8			9			13=8+9+10+11			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
01,04.03		2.17.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		6	Paket	40.000.000	2	Paket	4.545.000	2	Paket	26.566.500		Paket		0	Paket	-	0	0,00	2	Paket	4.545.000	33%	11%	Sekretariat	
01,04.04		2.17.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3	Paket	108.000.000	1	Paket	149.862.150	1	Paket	151.791.100	0,2	Paket	18.000.000	0,2	Paket	18.000.000	20	11,86	1,2	Paket	167.862.150	40%	155%	Sekretariat	
01,04.05		2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		3	Paket	90.000.000	1	Paket	60.690.000	1	Paket	62.122.700	0,5	Paket	23.562.000	0,5	Paket	23.562.000	50	37,93	1,5	Paket	84.252.000	50%	94%	Sekretariat	
01,04.06		2.17.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		36	Dokumen	17.500.000	12	Dokumen	2.640.000	12	Dokumen	6.000.000	3	Dokumen	220.000	3	Dokumen	220.000	25	3,67	15	Dokumen	2.860.000	42%	16%	Sekretariat	
		2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		15	Laporan	490.000.000	6	Laporan	128.009.702	5	Laporan	155.000.000	2	Laporan	24.026.000	2	Laporan	24.026.000	40	15,50	8	Laporan	152.035.702	53%	31%	Sekretariat	
01,05		2.17.01.2.07 . Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100	Persen	920.000.000	100	Persen	295.294.000	100	Persen	315.000.000	25	Persen	61.600.000	100	Persen	61.600.000	100	19,56	200	Persen	356.894.000	200%	39%	Sekretariat	
01,05.01		2.17.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		6	Unit	-	42	Unit	175.190.000	33	Unit	150.000.000	23	Unit	61.600.000	23	Unit	61.600.000	70	41,07	65	Unit	236.790.000	1083%		Sekretariat	
01,05.01		2.17.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		30	Unit	920.000.000	10	Unit	120.104.000	13	Unit	165.000.000		Unit		0	Unit	-	0	0,00	10	Unit	120.104.000	33%	13%	Sekretariat	
01,06		2.17.01.2.08 . Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		100	Persen	12.515.116.684	100	Persen	2.259.426.184	100	Persen	2.570.509.620	25	Persen	512.853.067	100	Persen	512.853.067	100	19,95	200	Persen	2.772.279.251	200%	22%	Sekretariat	
01,06.01		2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36	Laporan	1.165.000.000	12	Laporan	335.839.992	12	Laporan	396.460.200	3	Laporan	75.258.587	3	Laporan	75.258.587	25	18,98	15	Laporan	411.098.579	42%	35%	Sekretariat	
01,06.02		2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		36	Laporan	6.833.970.610	12	Laporan	1.923.586.192	12	Laporan	2.174.049.420	3	Laporan	437.594.480	3	Laporan	437.594.480	25	20,13	15	Laporan	2.361.180.672	42%	35%	Sekretariat	

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024-2026)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6			7			8			9			13=8+9+10+11			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
01,07		2.17.01.2.09 . Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah		100	Persen	2.993.828.037	100	Persen	375.229.950	100	Persen	295.000.000	25	Persen	700.000	100	Persen	700.000	100	0,24	200	Persen	375.929.950	200%	13%	Sekretariat	
01,07.01		2.17.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		0	Unit	27.312.000	0	Unit	-							0	Unit	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	Laporan	-	#DIV/0!	0%	Sekretariat	
01,07.02		2.17.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5	Unit	202.599.200	5	Unit	84.835.250	5	Unit	70.000.000	2	Unit	700.000	2	Unit	700.000	40	1,00	7	Laporan	85.535.250	140%	42%	Sekretariat	
01,07.03		2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		40	unit	194.231.000	54	unit	94.014.700	54	unit	55.000.000		unit		0	unit	-	0	0,00	54	Laporan	94.014.700	135%	48%	Sekretariat	
01,07.04		2.17.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4	Unit	1.098.175.837	4	Unit	196.380.000	4	Unit	170.000.000		Unit		0	Unit	-	0	0,00	4	Laporan	196.380.000	100%	18%	Sekretariat	
	Sasaran PD 1 : Meningkatnya Koperasi yang Aktif		persentase koperasi aktif	= Jumlah koperasi aktif / (Jumlah koperasi seluruhnya - jumlah koperasi yang dibubarkan) x 100%	98	Persen	1.441.510.000						908.058.000		Persen		94,14	Persen	3.200.000	#DIV/0!	0,35	94,14	Persen	167.905.300	94	12%	Sekretariat	
02,		02.17.02 . PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	Perbandingan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan terhadap jumlah izin usaha simpan pinjam keseluruhan yang telah terbit	100,00	Persen	15.000.000	100,00	Persen	-	100,00	Persen	-		Persen	-	100	Persen	-	100	#DIV/0!	200	Persen	-	200%	0%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
02,01		2.17.02.2.01. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang diterbitkan	= (jumlah permohonan izin usaha simpan pinjam yang difasilitasi penerbitannya / jumlah permohonan izin yang masuk) x 100%	3	Dokumen	15.000.000	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-		Dokumen		1	Dokumen	-	100	#DIV/0!	2	Dokumen	-	67%	0%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	selama tahun 2024 tidak ada permohonan izin yang masuk

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024-2026)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6			7			8			9			13=8+9+10+11			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
02,01,01		2.17.01.2.07.10 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		3	Unit Usaha	15.000.000	0	Laporan	-					Unit Usaha		0	Laporan	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	Laporan	-	0%	0%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	selama tahun 2024 USP dan Pembukaan Kacab, capem dan kantor kas KSP.
03		02.17.03 . PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase jumlah Koperasi yang sesuai ketentuan	Perbandingan jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa terhadap jumlah koperasi aktif	45	Persen	100.500.000	35	Persen	21.237.200	40	Persen	21.500.000		Persen	3.200.000	35	Persen	3.200.000	88	14,88	70	Persen	24.437.200	156%	24%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Pada program pengawasan dan pemeriksaan koperasi realisasi kinerjanya kurang karena koperasi di kota pontianak banyak yang tidaj aktif dan tidak bisa diketahui alamatnya.
03,01		2.17.03.2.01 Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	= (Jumlah koperasi yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan / jumlah koperasi aktif) x 100%	485	Unit Usaha	100.500.000	482	Unit Usaha	21.237.200	485	Unit Usaha	21.500.000		Unit Usaha	3.200.000	482	Unit Usaha	3.200.000	99	14,88	964	Unit Usaha	24.437.200	199%	24%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
03,01.01		2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		512	Unit Usaha	21.500.000	482	Unit Usaha	-							0	Unit Usaha	-	#DIV/0!	#DIV/0!	482	Unit Usaha	-	94%	0%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
03,01.02		2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan		485	Unit Usaha	79.000.000	482	Unit Usaha	21.237.200	512	Unit Usaha	21.500.000	40	Unit Usaha	3.200.000	40	Unit Usaha	3.200.000	8	14,88	522	Unit Usaha	24.437.200	108%	31%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024-2026)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6			7			8			9			13=8+9+10+11			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
		Daerah Kabupaten/Kota																										
04		02.17.04 . PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT	= (Jumlah KSP/USP yang bernilai sehat : Jumlah Total KSP/USP) x 100%	6,00	Persen	16.000.000	4	Persen	2.421.600	6,00	Persen	3.000.000		Persen	-	4	Persen	-	74,40	0,00	9	Persen	2.421.600	149%	15%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
04,01		2.17.04.2.01. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP yang benilai SEHAT	= (jumlah usaha simpan pinjam yang dinilai kesehatannya / jumlah usaha simpan pinjam) x 100%	10	Unit Usaha	16.000.000	5	Unit Usaha	2.421.600	10	Unit Usaha	3.000.000		Unit Usaha	-	5	Unit Usaha	-	50,00	0,00	10	Unit Usaha	2.421.600	100%	15%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	peraturan penilaian mengalami perubahan
04,01.01		2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan		150	Unit Usaha	16.000.000	125	Unit Usaha	2.421.600	130	Unit Usaha	3.000.000		Unit Usaha		0	Unit Usaha	-	0,00	0,00	125	Unit Usaha	2.421.600	83%	15%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	target kinerja belum disesuaikan
05		02.17.05 . PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan perkoperasian	= (Jumlah koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan perkoperasian : Jumlah total koperasi) x 100%	40	Persen	1.230.510.000	35	Persen	133.317.500	40	Persen	878.058.000		Persen	-	35	Persen	-	88	0,00	70	Persen	133.317.500	176%	11%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
05,01		2.17.05.2.01 Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota Koperasi yang dilatih	= (Jumlah koperasi yang telah mendapatkan pelatihan : Jumlah total koperasi) x 100%	180	Orang	1.230.510.000	180	Orang	133.317.500	180	Orang	878.058.000		Orang	-	180	Orang	-	100	0,00	360	Orang	133.317.500	200%	11%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
05,01.01		2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		180	Orang	1.230.510.000	180	Orang	133.317.500	180	Orang	878.058.000		Orang		0	Orang	-	0	0,00	180	Orang	133.317.500	100%	11%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	target kinerja belum disesuaikan
06		02.17.06 . PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang telah mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	= (Jumlah koperasi yang telah mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi : Jumlah total koperasi) x 100%	96	Persen	19.500.000	96	Persen	7.729.000	95	Persen	5.500.000		Persen	-	96	Persen	-	101	0,00	192	Persen	7.729.000	200%	40%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
06,01		2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi	= (Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan : Jumlah total koperasi) x 100%	3	Kegiatan	19.500.000	3	Kegiatan	7.729.000	1	Kegiatan	5.500.000		Kegiatan	-	3	Kegiatan	-	300	0,00	6	Kegiatan	7.729.000	200%	40%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024-2026)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6			7			8			9			13=8+9+10+11			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
06,01.01		2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		150	Unit Usaha	19.500.000	140	Unit Usaha	7.729.000	120	Unit Usaha	5.500.000		Unit Usaha		0	Unit Usaha	-	0	0,00	140	Unit Usaha	7.729.000	93%	40%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
	Sasaran PD 2 : Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro		Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Baru	= (Jumlah usaha mikro pada tahun n - jumlah usaha mikro tahun n-1) x 100%	6	persen	41.631.738.540										0	Unit Usaha	21.848.960	#DIV/0!	#DIV/0!	0	Unit Usaha	21.848.960	0%	0%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
07		02.17.07 . PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	= Jumlah usaha mikro yang diberdayakan / jumlah usaha mikro yang ada	3	Persen	87.000.000	2,84	Persen	12.962.500	2,95	Persen	13.000.000	0,08	Persen	1.600.000	2,84	Persen	1.600.000	96	12,31	6	Persen	14.562.500	190%	17%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
07,01		2.17.07.2.01 Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang diberdayakan	= (jumlah wirausaha baru / jumlah wirausaha) x 100%	50	Unit Usaha	87.000.000	50	Unit Usaha	12.962.500	50	Unit Usaha	13.000.000	18	Unit Usaha	1.600.000	50	Unit Usaha	1.600.000	100	12,31	100	Unit Usaha	14.562.500	200%	17%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
07,01.01		2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro		120	Unit Usaha	87.000.000	100	Unit Usaha	12.962.500	100	Unit Usaha	13.000.000	25	Unit Usaha	1.600.000	25	Unit Usaha	1.600.000	25	12,31	125	Unit Usaha	14.562.500	104%	17%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	target kinerja belum disesuaikan
08		02.17.08 . PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya	= (Jumlah usaha mikro yang meningkat skala usahanya : Jumlah total usaha mikro) x 100%	0,37	Persen	3.883.400.000	0	Persen	1.540.904.500	0,37	Persen	1.936.878.565		Persen	20.248.960	0,30	Persen	20.248.960	81	1,05	1	Persen	1.561.153.460	161%	40%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
08,01		2.17.08.2.01 Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha mikro	= (jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran / jumlah usaha mikro yang ada) x 100%	3	Kegiatan	3.883.400.000	1	Kegiatan	1.540.904.500	1	Kegiatan	1.936.878.565	1	Kegiatan	20.248.960	1	Kegiatan	20.248.960	100	1,05	2	Unit Usaha	1.561.153.460	67%	40%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
08,01.01		2.17.08.2.01.0002 Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi		120	Unit Usaha	3.883.400.000	583	Unit Usaha	1.540.904.500	200	Unit Usaha	1.936.878.565	50	Unit Usaha	20.248.960	50	Unit Usaha	20.248.960	25	1,05	633	Unit Usaha	1.561.153.460	528%	40%	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024-2026)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6			7			8			9			13=8+9+10+11			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
		URUSAN PILIHAN																											
		BIDANG PERDAGANGAN																											
			3. Tingkat Inflasi		3 + 1	Persen	2.842.213.660										100	Persen		100		100	Persen	-					
	Sasaran PD 3 : Terkendalinya Ketersediaan stok sembako dan barang penting lainnya		Persentase tingkat kecukupan stok sembako dan barang penting lainnya	= (stok awal + pengadaan / penyaluran) x 100%	100	Persen	2.512.213.660									176.019.094	100	Persen	340.486.494	#DIV/0!	#DIV/0!				100		Bidang Perdagangan	
	TAHUN 2023																												
09		03.30.02.- PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	= (Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan / Jumlah pelaku usaha di wilayah kota) x 100%	100	Persen	107.654.930	50	Persen	12.700.000	100	Persen	33.407.880		Persen	500.000	50	Persen	500.000	50	1,50	100	Persen	13.200.000	100%	12%	Bidang Perdagangan	
09,01		3.30.02.2.05 .- Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Fasilitasi Penerbitan SIUP Minol Gol B dan C	= (jumlah permohonan penerbitan SIUP Minol Gol B dan C yang difasilitasi / jumlah permohonan penerbitan SIUP Minol Gol B dan C) x 100%	3	Kegiatan	107.654.930	1	Kegiatan	12.700.000	1	Kegiatan	33.407.880		Kegiatan	500.000	1	Kegiatan	500.000	100	1,50	2	Kegiatan	13.200.000	67%	12%	Bidang Perdagangan	
09,01.01		3.30.02.2.05.0001 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		3	dokumen	107.654.930	3	dokumen	12.700.000	1	dokumen	33.407.880		dokumen	500.000	0	dokumen	500.000	0	1,50	3	dokumen	13.200.000	100%	12%	Bidang Perdagangan	target perlu disesuaikan
10		03.30.04.- PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1. Persentase Koefisien variasi harga antar waktu 2. Persentase kinerja realisasi pupuk	1. = koefisien harga barang kebutuhan pokok dan barang penting per bulan / harga rata - rata barang kebutuhan pokok dan barang penting x 100% 2. = Realisasi / Rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK)	3 70	Persen Persen	1.118.445.600	100	Persen Persen	275.654.800	3 60	Persen Persen	1.267.000.000	2 70	Persen Persen	105.480.000	100	Persen Persen	105.480.000	100	8,33	83 100	Persen Persen	381.134.800	40%	34%	Bidang Perdagangan	

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024-2026)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6			7			8			9			13=8+9+10+11			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
10,01		3.30.04.2.01 .- Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.	Laporan STOK	36	Bulan	51.000.000	12	Bulan	5.125.000	12	Bulan	7.000.000	3	Bulan	-	12	Bulan	-	100	0,00	24	Bulan	5.125.000	46%	10%	Bidang Perdagangan	
10,01.01		3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		6	Laporan	51.000.000	2	Laporan	5.125.000	12	Laporan	7.000.000		Laporan		0	Laporan	-	0	0,00	2	Laporan	5.125.000	33%	10%	Bidang Perdagangan	
10,02		3.30.04.2.02 .- Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah laporan dalam rangka pengendalian harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar	Laporan Harga SEMBAKO dan Barang Penting	36	Bulan	1.067.445.600	12	Bulan	270.529.800	12	Bulan	1.260.000.000	3	Bulan	105.480.000	12	Bulan	105.480.000	100	8,37	24	Bulan	376.009.800	58%	35%	Bidang Perdagangan	
10,02.01		3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		36	Laporan	167.445.600	12	Laporan	73.962.500	12	Laporan	60.000.000		Laporan	12.000.000	0	Laporan	12.000.000	0	20,00	12	Laporan	85.962.500	33%	51%	Bidang Perdagangan	
10,02.02		3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		6	Laporan	900.000.000	5	Laporan	196.567.300	2	Laporan	1.200.000.000		Laporan	93.480.000		Laporan	93.480.000	0	7,79	5	Laporan	290.047.300	83%	32%	Bidang Perdagangan	Pelaksanaan operasi pasar melebihi target sebesar 250% karena operasi pasar dilaksanakan setiap triwulan, sesuai arahan pj Walikota dimana target awal hanya 2x dalam setahun
12		03.30.06.- PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	= Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan / Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang	100	Persen	386.113.130	112	Persen	182.366.022	100	Persen	282.295.800	12	Persen	70.039.094	112	Persen	70.039.094	112	24,81	224	Persen	252.405.116	224%	65%	UPT Metrologi Legal	tidak ada pengenaan retribusi tera/tera ulang dan kenaikan permintaan UTTP alokasi daerah lain. Peningkatan pada jenis
12,01		3.30.06.2.01 .- Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	= Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan ditera ulang	53900	Unit	386.113.130	20048	Unit	182.366.022	18000	Unit	282.295.800	-	Unit	70.039.094	-	Unit	70.039.094	-	24,81	20.048	Unit	252.405.116	37%	65%	UPT Metrologi Legal	

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024-2026)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6			7			8			9			13=8+9+10+11			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
		Ulang, dan Pengawasan																										Meter Air ..dari target 6,341 unit menjadi 15.350 unit
12,01.01		3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		53900	Unit	386.113.130	20048	Unit	182.366.022	18000	Unit	282.295.800		Unit	70.039.094		Unit	70.039.094	0	24,81	20048	Unit	252.405.116	37%	65%	UPT Metrologi Legal	
13		03.30.07.- PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Usaha Mikro yang melakukan pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	= Jumlah Usaha Mikro yang melakukan pemasaran dan peningkatan PDN / target Usaha Mikro penggunaan produk dalam negeri) x 100%	0,53	Persen	900.000.000	-	Persen	164.467.400	0,4	Persen	870.000.000		Persen	-	-	Persen	164.467.400	-	18,90	-	Persen	328.934.800	0%	37%	Bidang Perdagangan	
13,01		3.30.07.2.01 .- Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Usaha Mikro yang melakukan pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		225	Unit Usaha	-	50	Unit Usaha	164.467.400	75	Unit Usaha	870.000.000		Unit Usaha	-	-	Unit Usaha	-	-	0,00	50	Unit Usaha	164.467.400	22%	#DIV/0!	Bidang Perdagangan	
13,01.01		3.30.07.2.01.01 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelah dan jasa akomodasi		50	UMKM	900.000.000	260	UMKM	164.467.400				50	UMKM		260	UMKM	164.467.400	#DIV/0!	#DIV/0!	#REF!	UMKM	#REF!	#REF!	#REF!	Bidang Perdagangan	
13,01.02		3.30.07.2.01.05 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Memperoleh fasilitasi promosi penggunaan produk dalam negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			UMKM					30	UMKM	270.000.000		UMKM		0	UMKM	-	0	0,00	0	UMKM	-	#DIV/0!	#DIV/0!	Bidang Perdagangan	
13,01.03		3.30.07.2.01.06 Pemasaran dan peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi			UMKM					75	UMKM	600.000.000		UMKM		0	UMKM	-	0	0,00	0	UMKM	-	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Sasaran PD 4 : Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan Binaan		Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Dimanfaatkan	= (jumlah sarana distribusi perdagangan yang dimanfaatkan / jumlah sarana distribusi perdagangan yang tersedia) x 100%	85	Persen	3.097.820.800							80	Persen	113.870.000	80	Persen	113.870.000	#DIV/0!	#DIV/0!	80	Persen	113.870.000	94%	4%	Bidang Pasar	

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024-2026)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6			7			8			9			13=8+9+10+11			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
14		03.30.03.- PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan	K = (a + b) x 100% K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya |a = Pembangunan / Pemeliharaan sarana distribusi perdagangan yang telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) |b = Sarana Distribusi Perdagangan yang telah dimanfaatkan sesuai peruntukkannya (nilai 0.5)	100	Persen	3.097.820.800	100	Persen	479.728.662	100	Persen	342.209.435	25	Persen	113.870.000	100	Persen	113.870.000	100	33,27	200	Persen	593.598.662	200%	19%	Bidang Pasar	
14,01		3.30.03.2.01 .- Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola	= (jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola / jumlah sarana distribusi perdagangan yang tersedia) x 100%	18	Unit	2.773.920.800	14	Unit	311.429.662	15	Unit	279.209.435	14	Unit	64.970.000	14	Unit	64.970.000	93	23,27	28	Unit	376.399.662	156%	14%	Bidang Pasar	
14,01.01		3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		8	Unit	2.618.920.800	2	Unit	276.965.662	3	Unit	134.179.435	3	Unit	49.570.000	3	Unit	49.570.000	100	36,94	5	Unit	326.535.662	63%	12%	Bidang Pasar	
14,01.02		3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		18	Unit	155.000.000	14	Unit	34.464.000	15	Unit	145.030.000	15	Unit	15.400.000	15	Unit	15.400.000	100	10,62	29	Unit	49.864.000	161%	32%	Bidang Pasar	
14,02		3.30.03.2.02 .- Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pasar rakyat yang dibina	18	Unit	323.900.000	18	Unit	168.299.000	15	Unit	63.000.000	18	Unit	48.900.000	18	Unit	48.900.000	120	77,62	36	Unit	217.199.000	200%	67%	Bidang Pasar	
14,02.01		3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		3	dokumen	161.950.000	1	dokumen	137.084.000	1	dokumen	31.500.000	1	dokumen	26.700.000	1	dokumen	26.700.000	100	84,76	2	dokumen	163.784.000	67%	101%	Bidang Pasar	
14,02.02		3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		3	dokumen	161.950.000	1	dokumen	31.215.000	1	dokumen	31.500.000	1	dokumen	22.200.000	1	dokumen	22.200.000	100	70,48	2	dokumen	53.415.000	67%	33%	Bidang Pasar	
		URUSAN PILIHAN																										
		BIDANG PERINDUSTRIAN																										

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024-2026)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6			7			8			9			13=8+9+10+11			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
	Sasaran PD 5 : Meningkatnya pelaku industri kecil		Persentase pertumbuhan jumlah pelaku industri kecil	= (jumlah industri tahun n - jumlah industri tahun n-1) x 100%	28	Persen											3,45	persen										
	TAHUN 2023																											
15		03.31.02.- PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Jika terdapat N Indikator pembagunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N) % Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)%...Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut.	100	Persen	700.793.250	100	Persen	739.714.684	100	Persen	1.591.000.000	25	Persen	159.930.300	100	Persen	159.930.300	100	10,05	200	Persen	899.644.984	200%	128%	Bidang Industri	
15,01		3.31.02.2.01 .- Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen dalam rangka Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1	Dokumen	700.793.250	1	Dokumen	739.714.684	1	Dokumen	1.591.000.000	1	Dokumen	159.930.300	1	Dokumen	159.930.300	100	10,05	2	Dokumen	899.644.984	200%	128%	Bidang Industri	
15,01.01		3.31.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		3	Dokumen	114.930.650	1	Dokumen	206.171.000	1	Dokumen	65.000.000		Dokumen	6.000.000	0	Dokumen	6.000.000	0	9,23	1	Dokumen	212.171.000	33%	185%	Bidang Industri	
15,01.02		3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		3	Dokumen	271.010.000	1	Dokumen	167.745.584	1	Dokumen	576.002.000		Dokumen	140.980.300	0	Dokumen	140.980.300	0	24,48	1	Dokumen	308.725.884	33%	114%	Bidang Industri	
15,01.03		3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		3	Dokumen	86.250.700	1	Dokumen	62.807.500	1	Dokumen	186.000.000		Dokumen		0	Dokumen	-	0	0,00	1	Dokumen	62.807.500	33%	73%	Bidang Industri	
15,01.04		3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		3	Dokumen	228.601.900	1	Dokumen	302.990.600	1	Dokumen	163.998.000		Dokumen		0	Dokumen	-	0	0,00	1	Dokumen	302.990.600	33%	133%	Bidang Industri	
15,01.05		3.31.02.2.01.08 Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di Level Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Pengawasan Jaminan Produk Halal yang dapat Diawasi - Jumlah Program Pengawasan			Dokumen			Dokumen		100	Dokumen	600.000.000		Dokumen	12.950.000	0	Dokumen	12.950.000	0	2,16	0	Dokumen	12.950.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Bidang Industri	

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024-2026)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6			7			8			9			13=8+9+10+11			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
			Jaminan Produk Halal yang dapat Diimpelementasikan																									
16		03.31.03.- PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh industri terkait	= (jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan / jumlah izin yang dikeluarkan) x100%	85	Persen	16.500.000	75	Persen	82.788.150	80	Persen	40.000.000	25	Persen	3.600.000	75	Persen	3.600.000	94	9,00	150	Persen	86.388.150	176%	524%	Bidang Industri	
16,01		3.31.03.2.01 .- Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen dalam rangka penerbitan Izin Industri	= (jumlah permohonan IUKI dan IPKI / jumlah IUKI dan IPKI yang ditetapkan sesuai ketentuan) x 100%	3	Dokumen	16.500.000	1	Dokumen	82.788.150	1	Dokumen	40.000.000	1	Dokumen	3.600.000	1	Dokumen	3.600.000	100	9,00	2	Dokumen	86.388.150	67%	524%	Bidang Industri	
16,01.01		3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan berusaha sektor perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan Skala Usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Selain Bidang Usaha Tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat		3	Dokumen	16.500.000	1	Dokumen	82.788.150	1	Dokumen	40.000.000		Dokumen	3.600.000	0	Dokumen	3.600.000	0	9,00	1	Dokumen	86.388.150	33%	524%	Bidang Industri	
17		03.31.04.- PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Nilai kelengkapan dan keterkinian informasi industri	1. Keterkinian Informasi Industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2. Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan	90	Persen	46.000.000	90	Persen	80.849.500	90	Persen	-	25	Persen	-	90	Persen	-	100	#DIV/0!	180	Persen	80.849.500	200%	176%	Bidang Industri	

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025-2029			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024-2026)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(%)		Unit Perangkat daerah Penanggung jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6			7			8			9			13=8+9+10+11			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
				penolong (10%). Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1+2)																									
17,01		3.31.04.2.01 .- Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase industri terdata dalam SIINAS	= (Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SIINas / total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan Industri) x 100%	60	Persen	46.000.000	90	Persen	80.849.500	50	Persen	-	15	Persen	-	90	Persen	-	100	#DIV/0!	180	Persen	80.849.500	300%	176%	Bidang Industri	
17,01.01		3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		3	Dokumen	46.000.000	2	Dokumen	80.849.500							0	Dokumen	-	#DIV/0!	#DIV/0!	2	Dokumen	80.849.500	67%	176%	Bidang Industri	
Jumlah							63.150.384.000			14.936.774.469			20.952.251.343			3.629.694.636			3.794.162.036					18.730.936.505					
Rata-rata Capaian Kinerja(%) Sub Kegiatan																				98	#DIV/0!								
Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi								
Rata-rata Capaian Kinerja(%) Program																				93	#DIV/0!				154				
Predikat Kinerja																				Tinggi	#DIV/0!				Tinggi				

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Kerja

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 3 (tiga) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Pontianak. Adapun rumusan tujuan di dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025 adalah: **Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Industri.** Untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan indikator: **Laju PDRB sektor Perdagangan, Laju PDRB sektor Industri dan Tingkat Inflasi.**

- Laju PDRB sektor Perdagangan.
  Target : 4,99 %
- Laju PDRB sektor Industri
  Target : 4,77 %
- Tingkat Inflasi
  Target : 3±1 %

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dalam jangka waktu tahunan, sampai tiga tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*spesific*), terukur (*measureable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*). Sasaran di dalam RENJA Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025 adalah:

1. **Meningkatnya Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan Binaan.**
   Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang Dimanfaatkan.
   Target : 80 %
2. **Meningkatnya Pelaku Industri Kecil**
   Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase Pertumbuhan Jumlah Pelaku Industri Kecil.
   Target : 2,60 %

3. **Meningkatnya Koperasi yang Aktif.**

   Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase Koperasi Aktif.

   Target : 97,50 %

4. **Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro.**

   Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro Baru.

   Target : 5,50 %

5. **Terkendalinya Ketersediaan Stok Sembako Dan Barang Penting Lainnya**

   Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: Persentase Tingkat Kecukupan Stok Sembako Dan Barang Penting Lainnya.

   Target : 100 %

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak yang direncanakan untuk Tahun 2025 meliputi:

1. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

   Indikator : Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan.

   Kegiatan :

   a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.

      Indikator Keluaran (Output): Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya.

      Kelompok sasaran: pasar rakyat.

      Sub Kegiatan :

      - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

        <u>Rencana Aksi</u> : Pemeliharaan Kebersihan Saluran Pasar Rakyat Binaan

      - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

        <u>Rencana Aksi</u> : Tim Pengawasan dan Penindakan di Pasar Rakyat Binaan

   b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.

      Indikator Keluaran (Output): Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya.

      Kelompok sasaran: Pasar Rakyat.

Sub Kegiatan :

- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

  Rencana Aksi : Operasional UPT Pasar Tradisional
- Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

  Rencana Aksi : Operasional UPT Jasa Usaha Pasar

2. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

   Indikator : Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP.

   Kegiatan:

   a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

      Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah dokumen dalam rangka Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

      Kelompok sasaran: pelaku IKM/IRT

      Sub Kegiatan :

      - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

        Rencana Aksi : Pelatihan PIRT untuk pelaku Industri
      - Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

        Rencana Aksi : Business Matching antara pelaku industri dan buyer
      - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

        Rencana Aksi : Bantuan Sarana dan Prasarana untuk pelaku Industri
      - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

        Rencana Aksi : Pelatihan untuk pelaku Industri dan Dana Hibah untuk Dekranasda Kota Pontianak
      - Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) Di Level Kabupaten/Kota

        Rencana Aksi : Fasilitasi Sertifikasi Halal untuk pelaku Industri

3. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA.

   Indikator : Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh industri terkait.

   Kegiatan:

a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.

Indikator Keluaran (Output): jumlah dokumen dalam rangka penerbitan Izin Industri.

Kelompok sasaran: pelaku IKM/IRT

Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
- Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)

Rencana Aksi : Tim Terpadu Pengawasan Perijinan Industri

4. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Indikator : **Nilai kelengkapan dan keterkinian informasi industri**

Kegiatan:

a. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
- Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas
- Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas

Rencana Aksi : Pengelolaan Data Industri pada SIINas

5. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

Indikator : Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam

Kegiatan:

b. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

  Rencana Aksi : Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

6. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

   Indikator : Persentase jumlah koperasi yang sesuai ketentuan.

   Kegiatan:

   a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

      Indikator Keluaran (Output): Jumlah Koperasi Yang Di Periksa Dan Awasi.

      Kelompok sasaran: Koperasi

      Sub Kegiatan :

      - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

        Rencana Aksi : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi

      - Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan

        Rencana Aksi : Penilaian Kesehatan Koperasi

7. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

   Indikator : Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT.

   Kegiatan:

   a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

      Indikator Keluaran (Output): Jumlah KSP/USP yang benilai SEHAT.

      Kelompok sasaran: Koperasi

      Sub Kegiatan :

      - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

        Rencana Aksi : Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

8. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

   Indikator : Persentase Koperasi Yang Telah Mendapatkan Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian.

   Kegiatan:

   a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

      Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah anggota Koperasi yang dilatih.

      Kelompok sasaran: Koperasi

Sub Kegiatan :

- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.

  Rencana Aksi : Pelatihan untuk Koperasi

9. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI.

   Indikator : Persentase koperasi yang telah mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi.

   Kegiatan:

   a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

      Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi.

      Kelompok sasaran: Koperasi

      Sub Kegiatan :

      - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha.

        Rencana Aksi : Pendampingan kepada Koperasi berupa akses pembiayaan, kelembagaan, standarisasi dll.

10. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM).

    Indikator : Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan

    Kegiatan:

    a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.

       Indikator Keluaran (*Output*): Jumlah usaha mikro yang diberdayakan

       Kelompok sasaran: Pelaku Usaha Mikro

       Sub Kegiatan :

       - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

         Rencana Aksi : Pembinaan dan pendampingan kepada Usaha Mikro dalam hal proses memperoleh perizinan.

11. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

    Indikator : Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya.

    Kegiatan:

    a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

Indikator Keluaran (Output): Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha mikro.

Kelompok sasaran: Pelaku Usaha Mikro

Sub Kegiatan :

- Pengembangan Usaha Mikro

  Rencana Aksi : Pelatihan kepada Usaha Mikro

12. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA.

Indikator : Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan.

Kegiatan:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

   Indikator Keluaran (Output): Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah

   Kelompok sasaran: OPD

   Sub Kegiatan :

   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

   Indikator Keluaran (Output) : Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

   Kelompok sasaran : OPD

   Sub Kegiatan :

   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

   Indikator Keluaran (Output) : Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah administrasi kepegawaiannya.

   Kelompok sasaran: OPD

   Sub Kegiatan :

   - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

   Indikator Keluaran (Output) : Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah.

   Kelompok sasaran: OPD

   Sub Kegiatan :

   - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Indikator Keluaran (Output): Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

Kelompok sasaran: OPD

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran (Output): Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Kelompok sasaran: OPD

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator Keluaran (Output): Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah.

Kelompok sasaran: OPD

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

13. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Indikator : Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan).

Kegiatan:

a. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat.

Indikator Keluaran (Output): Jumlah Fasilitasi Penerbitan SIUP Minol Gol B dan C.

Kelompok sasaran: Pelaku Usaha

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C.

  Rencana Aksi : Tim pengawasan perizinan Minuman Beralkohol Golongan B dan C.

14. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG

Indikator :

- Persentase Koefisien variasi harga antar waktu.
- Persentase kinerja realisasi pupuk

Kegiatan:

a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

   Indikator Keluaran (Output): Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

   Kelompok sasaran: Pelaku Usaha

   Sub Kegiatan :

   - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
   - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
   - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

     Rencana Aksi : Tim Monitoring dan Evaluasi stok barang pokok dan penting.

b. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.

   Indikator Keluaran (Output): Jumlah laporan dalam rangka pengendalian harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar.

   Kelompok sasaran: Pelaku Usaha

   Sub Kegiatan :

   - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
   - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.

     Rencana Aksi : Operasional Tim pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan diinformasikan kepada masyarakat pada aplikasi JEPIN.

- Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

  Rencana Aksi : Pelaksanaan Operasi Pasar dalam rangka pengendalian Inflasi.

15. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

    Indikator : Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku.

    Kegiatan:

    a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.

       Indikator Keluaran (Output): Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan.

       Kelompok sasaran: alat UTTP

       Sub Kegiatan :

       - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

         Rencana Aksi : Operasional UPT Metrologi Legal berupa Tera/Tera Ulang alat UTTP

16. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

    Indikator : Persentase Usaha Mikro yang melakukan pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

    Kegiatan:

    a. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

       Indikator Keluaran (Output): Jumlah Usaha Mikro yang melakukan pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

       Kelompok sasaran: Pelaku Usaha

       Sub Kegiatan :

       - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota.

         Rencana Aksi : Promosi Produk Dalam Negeri Melalui Pameran Dalam Dan Luar Daerah Kalbar.

Tabel III.1
Daftar Rencana Aksi dan Sub Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
Kota Pontianak Tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran	Volume	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pemeliharaan Kebersihan Saluran Pasar Rakyat Binaan	123,427,048.00	3 Unit	Kota Pontianak	…
2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tim Pengawasan dan Penindakan di Pasar Rakyat Binaan	109,819,000.00	15 Unit	Kota Pontianak	
3	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Operasional UPT Pasar Tradisional	27,545,000.00	1 Dokumen	Kota Pontianak	
4	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Operasional UPT Jasa Usaha Pasar	28,250,000.00	1 Dokumen	Kota Pontianak	
5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Pelatihan PIRT untuk pelaku Industri	63,938,000.00	1 Dokumen	Kota Pontianak	
6	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Business Matching antara pelaku industri dan buyer	614,346,760.00	1 Dokumen	Kota Pontianak	
7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Bantuan Sarana dan Prasarana untuk pelaku Industri	1,130,467,173.00	1 Dokumen	Kota Pontianak	
8	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pelatihan untuk pelaku Industri dan Dana Hibah untuk Dekranasda Kota Pontianak	293,928,100.00	1 Dokumen	Kota Pontianak	
9	Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) Di Level Kabupaten/Kota	Fasilitasi Sertifikasi Halal untuk pelaku Industri	593,404,000.00	100 Obyek	Kota Pontianak	
10	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Tim Terpadu Pengawasan Perijinan Industri	32,500,000.00	1 Dokumen	Kota Pontianak	
11	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Tim Terpadu Pengawasan Perijinan Industri	-	1 Dokumen	Kota Pontianak	

No	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran	Volume	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
12	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Pengelolaan Data Industri di SIINas	-	1 Dokumen	Kota Pontianak	
13	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Pengelolaan Data Industri di SIINas	-	1 Dokumen	Kota Pontianak	
14	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Pengelolaan Data Industri di SIINas	-	1 Dokumen	Kota Pontianak	
15	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	-	1 Unit Usaha	Kota Pontianak	
16	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi	11,440,000.00	512 Unit Usaha	Kota Pontianak	
17	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	2,435,680.00	130 Unit Usaha	Kota Pontianak	
18	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	-	25 Unit Usaha	Kota Pontianak	
19	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Pelatihan untuk Koperasi	866,966,800.00	180 Orang	Kota Pontianak	
20	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Pendampingan kepada Koperasi berupa akses pembiayaan, kelembagaan, standarisasi dll.	4,400,180.00	120 Unit Usaha	Kota Pontianak	
21	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Pembinaan dan pendampingan kepada Usaha Mikro dalam hal proses memperoleh perizinan	6,650,000.00	100 Unit Usaha	Kota Pontianak	

No	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran	Volume	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
22	Pengembangan Usaha Mikro	Pelatihan kepada Usaha Mikro	1,918,602,650.00	100 Unit Usaha	Kota Pontianak	
23	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan	22,900,000.00	5 Dokumen	Kota Pontianak	
24	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen laporan evaluasi kinerja	8,240,000.00	3 Laporan	Kota Pontianak	
25	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja gaji dan tunjangan ASN	9,529,235,000.00	65 Orang/Bulan	Kota Pontianak	
26	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Belanja Honorarium ASN	314,760,000.00	2 Dokumen	Kota Pontianak	
27	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Belanja Pakaian Dinas	100,180,000.00	2 paket	Kota Pontianak	
28	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Belanja Komponen Instalasi listrik	9,695,600.00	1 Paket	Kota Pontianak	
29	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Alat tulis kantor	71,077,991.00	4 Paket	Kota Pontianak	
30	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Belanja Peralatan Rumah Tangga	21,253,200.00	2 Paket	Kota Pontianak	
31	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Belanja Bahan Logistik dan Makan Minum Kantor	113,994,151.00	1 Paket	Kota Pontianak	
32	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Belanja cetak blanko, spanduk dll	50,198,160.00	1 Paket	Kota Pontianak	
33	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Belanja langganan surat kabar	6,000,000.00	12 Dokumen	Kota Pontianak	
34	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Perjalanan Dinas	51,600,000.00	5 Laporan	Kota Pontianak	
35	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis	-	1 Dokumen	Kota Pontianak	
36	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja Meubel, AC dll	150,000,000.00	44 Unit	Kota Pontianak	
37	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Belanja PC, Printer dll	165,000,000.00	13 unit	Kota Pontianak	
38	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Tagihan Air, Listrik dan Internet	396,460,200.00	12 Laporan	Kota Pontianak	
39	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Belanja tenaga non ASN	2,174,049,420.00	12 Laporan	Kota Pontianak	
40	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja pemeliharaan kendaraan dinas	43,550,825.00	5 Unit	Kota Pontianak	
41	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja pemeliharaan AC, PC, Printer dll	34,650,000.00	54 Unit	Kota Pontianak	

No	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran	Volume	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
42	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan bangunan gedung kantor	22,680,000.00	4 Unit	Kota Pontianak	
43	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Tim pengawasan perizinan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	30,094,304.00	1 Dokumen	Kota Pontianak	
44	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Koordinasi dan Sinkronisasi stok barang pokok dan penting	-	1 Laporan	Kota Pontianak	
45	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Koordinasi dan Sinkronisasi stok barang pokok dan penting	-	1 Laporan	Kota Pontianak	
46	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tim Monitoring dan Evaluasi stok barang pokok dan penting.	4,160,000.00	2 Laporan	Kota Pontianak	
47	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	-	12 Laporan	Kota Pontianak	
48	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Operasional Tim pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan diinformasikan kepada masyarakat pada aplikasi JEPIN	34,600,000.00	12 Laporan	Kota Pontianak	
49	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar dalam rangka pengendalian Inflasi	1,214,424,979.00	2 Laporan	Kota Pontianak	
50	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Operasional UPT Metrologi Legal berupa Tera/Tera Ulang alat UTTP	239,749,800.00	18000 Unit	Kota Pontianak	
51	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Promosi Produk Dalam Negeri Melalui Pameran Dalam Dan Luar Daerah Kalbar	156,872,500.00	30 UMKM	Kota Pontianak	
52	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Workshop / Gebyar UMKM	553,586,200.00	75 UMKM	Kota Pontianak	
	Total Anggaran		**21,347,132,721.00**			

Tabel III.2 Ringkasan Anggaran Pendapatan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025

No	Uraian Pendapatan	Keterangan	Nilai
1.	Retribusi Pelataran	Retribusi Pelataran Pasar	6.900.000
2.	Retribusi Los	Retribusi Los	1.300.000.000
3.	Retribusi Kios	Retribusi Kios Pasar	2.200.000.000
4.	Retribusi Penyewaan Bangunan	Penyewaan Bangunan Pasar	3.193.100.000
5.	Hasil Sewa BMD	Penyewaan Bangunan Pasar	100.000.000
	TOTAL		**6.800.000.000**

Perubahan Rencana Kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 untuk mendukung program dan kegiatan prioritas daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.3
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pontianak Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN							**18,261,030,500.00**	**20,952,251,343.00**	**21,347,132,721.00**	**3,086,102,221.00**							**18,351,193,000.00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**13,705,117,385.00**	**16,526,338,228.00**	**16,096,019,857.00**	**2,390,902,472.00**							**14,709,881,690.00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**13,705,117,385.00**	**16,526,338,228.00**	**16,096,019,857.00**	**2,390,902,472.00**							**14,709,881,690.00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan**				**95 Persen**	**95 Persen**	**13,182,018,820.00**	**13,668,401,663.42**	**13,285,524,547.00**	**-465,107,130.00**							**12,716,911,690.00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	40,800,000.00	40,800,000.00	31,140,000.00	-9,660,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	OPD		12,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	30,500,000.00	30,500,000.00	22,900,000.00	-7,600,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan			10,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	10,300,000.00	10,300,000.00	8,240,000.00	-2,060,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			2,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	9,592,097,100.00	9,843,994,843.42	9,843,995,000.00	251,897,900.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	OPD		8,764,947,930.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	9,253,852,000.00	9,529,234,843.42	9,529,235,000.00	275,383,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan			8,421,723,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	2.17.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	338,245,100.00	314,760,000.00	314,760,000.00	-23,485,100.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			343,224,930.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	99,280,000.00	100,180,000.00	100,180,000.00	900,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	OPD		80,610,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	99,280,000.00	100,180,000.00	100,180,000.00	900,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan			70,610,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	0 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			5,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	0 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			5,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	401,881,400.00	502,917,200.00	333,579,602.00	-68,301,798.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan	OPD		376,500,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,119,500.00	12,119,500.00	9,695,600.00	-2,423,900.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			15,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	67,900,400.00	89,317,400.00	71,077,991.00	3,177,591.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			70,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	4,962,000.00	26,566,500.00	31,013,700.00	26,051,700.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba,	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan			15,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															judi, dan penyeludupan.	Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	111,097,100.00	151,791,100.00	113,994,151.00	2,897,051.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			40,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	44,802,400.00	62,122,700.00	50,198,160.00	5,395,760.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			35,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-				12 Dokumen	12 Dokumen	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai			6,500,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Undangan yang Disediakan										Semua Kel/Desa		pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	155,000,000.00	155,000,000.00	51,600,000.00	-103,400,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			185,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			5,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan				0 Dokumen	0 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Pontianak,	-	Memperkuat reformasi politik,	Terciptanya Pembangunan			5,000,000.00	DINAS KOPERASI,

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD										Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 Persen	100 Persen	315,000,000.00	315,000,000.00	458,220,000.00	143,220,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	OPD		350,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			150,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas				0 Unit	0 Unit	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Pontianak,	-	Memperkuat reformasi politik,	Terciptanya Pembangunan			150,000,000.00	DINAS KOPERASI,

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Operasional atau Lapangan yang Disediakan										Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	45 Unit	150,000,000.00	150,000,000.00	293,220,000.00	143,220,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			25,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	13 Unit	165,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00	0.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			25,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang	*Persentase penyediaan jasa*				100 Persen	100 Persen	2,437,960,320.00	2,570,509,620.00	2,369,413,580.00	-68,546,740.00			Memperkuat reformasi politik,	Terciptanya Pembangunan	OPD		2,817,853,760.00	DINAS KOPERASI,

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Urusan Pemerintahan Daerah	*penunjang urusan pemerintah daerah*												hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	0 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			5,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	390,000,000.00	396,460,200.00	396,460,200.00	6,460,200.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			450,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2,047,960,320.00	2,174,049,420.00	1,972,953,380.00	-75,006,940.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			2,362,853,760.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah*				100 Persen	100 Persen	295,000,000.00	295,000,000.00	148,996,365.00	-146,003,635.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	OPD		315,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	70,000,000.00	70,000,000.00	43,550,825.00	-26,449,175.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			75,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	54 Unit	55,000,000.00	55,000,000.00	34,650,000.00	-20,350,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			65,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	170,000,000.00	170,000,000.00	70,795,540.00	-99,204,460.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			175,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2.	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam**				**100 Persen**	**100 Persen**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,000,000.00**							**15,000,000.00**	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah izin yang diterbitkan*				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai	Koperasi		15,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															produksi melalui peran aktif koperasi.	Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			15,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
3.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase jumlah koperasi yang sesuai ketentuan**				**40 Persen**	**40 Persen**	**21,500,000.00**	**21,500,000.00**	**11,440,000.00**	**24,000,000.00**							**45,500,000.00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi*				485 Unit Usaha	485 Unit Usaha	21,500,000.00	21,500,000.00	11,440,000.00	-10,060,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Koperasi		45,500,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				512 Unit Usaha	512 Unit Usaha	21,500,000.00	21,500,000.00	11,440,000.00	-10,060,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			45,500,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
															industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
4.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase KSP/USP yang bernilai SEHAT**				**6 Persen**	**6 Persen**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**2,435,680.00**	**39,500,000.00**							**42,500,000.00**	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah KSP/USP yang benilai SEHAT*				10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	3,000,000.00	3,000,000.00	2,435,680.00	-564,320.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Koperasi		42,500,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				130 Unit Usaha	130 Unit Usaha	3,000,000.00	3,000,000.00	2,435,680.00	-564,320.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			7,500,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan																		
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan				25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan,	-	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya			35,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
													Semua Kel/Desa		lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				PERDAGANGAN
5.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan perkoperasian**				**40 Persen**	**40 Persen**	**134,308,000.00**	**878,058,000.00**	**866,966,800.00**	**275,862,000.00**							**410,170,000.00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah anggota Koperasi yang dilatih*				180 Orang	180 Orang	134,308,000.00	878,058,000.00	866,966,800.00	732,658,800.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Koperasi		410,170,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				180 Orang	400 Orang	134,308,000.00	878,058,000.00	866,966,800.00	732,658,800.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-PK2UMK	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			410,170,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase koperasi yang telah mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi**				**95 Persen**	**95 Persen**	**5,500,000.00**	**5,500,000.00**	**4,400,180.00**	**4,500,000.00**							**10,000,000.00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	5,500,000.00	5,500,000.00	4,400,180.00	-1,099,820.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Koperasi		10,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				120 Unit Usaha	120 Unit Usaha	5,500,000.00	5,500,000.00	4,400,180.00	-1,099,820.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			10,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
7.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan**				**2.95 Persen**	**2.95 Persen**	**13,000,000.00**	**13,000,000.00**	**6,650,000.00**	**37,000,000.00**							**50,000,000.00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan,	*Jumlah usaha mikro yang diberdayakan*				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	13,000,000.00	13,000,000.00	6,650,000.00	-6,350,000.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang	Usaha Mikro		50,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan													mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	13,000,000.00	13,000,000.00	6,650,000.00	-6,350,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			50,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
8.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Usaha Mikro yang meningkat skala usahanya**				**0.37 Persen**	**0.37 Persen**	**345,790,565.00**	**1,936,878,564.58**	**1,918,602,650.00**	**1,074,009,435.00**							**1,419,800,000.00**	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha mikro*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	345,790,565.00	1,936,878,564.58	1,918,602,650.00	1,572,812,085.00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Usaha Mikro		1,419,800,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				100 Unit Usaha	280 Unit Usaha	345,790,565.00	1,936,878,564.58	1,918,602,650.00	1,572,812,085.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-PK2UMK	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			1,419,800,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**4,555,913,115.00**	**4,425,913,115.00**	**5,251,112,864.00**	**695,199,749.00**							**3,641,311,310.00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**2,264,913,115.00**	**2,794,913,115.00**	**2,522,528,831.00**	**257,615,716.00**							**2,371,311,310.00**	
1.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)**				**-**	**100 Persen**	**33,407,880.00**	**33,407,880.00**	**30,094,304.00**	**49,592,120.00**							**83,000,000.00**	
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	*Jumlah Fasilitasi Penerbitan SIUP Minol Gol B dan C*				-	1 Kegiatan	33,407,880.00	33,407,880.00	30,094,304.00	-3,313,576.00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Pelaku Usaha		58,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C																		
			Jumlah Surat Izin Usaha				1 Dokumen	1 Dokumen	33,407,880.00	33,407,880.00	30,094,304.00	-3,313,576.00	Kota Pontianak,	PENDAPATAN ASLI	Melanjutkan hilirisasi dan	Terciptanya Pembangunan			58,000,000.00	DINAS KOPERASI,

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik										Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)	mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota*				-	1 Kegiatan	0.00	0.00	0.00	0.00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Pelaku Usaha		25,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				1 Laporan	1 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			25,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase sarana distribusi perdagangan binaan yang tingkatkan**				**100 Persen**	**100 Persen**	**342,209,435.00**	**342,209,435.00**	**289,041,048.00**	**865,064,165.00**							**1,207,273,600.00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola*				15 Unit	15 Unit	279,209,435.00	279,209,435.00	233,246,048.00	-45,963,387.00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Pasar Binaan		1,059,973,600.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				3 Unit	3 Unit	134,179,435.00	134,179,435.00	123,427,048.00	-10,752,387.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			989,473,600.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				15 Unit	15 Unit	145,030,000.00	145,030,000.00	109,819,000.00	-35,211,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			70,500,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Jumlah Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya*				15 Unit	15 Unit	63,000,000.00	63,000,000.00	55,795,000.00	-7,205,000.00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Pasar Binaan		147,300,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	31,500,000.00	31,500,000.00	27,545,000.00	-3,955,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			73,650,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	31,500,000.00	31,500,000.00	28,250,000.00	-3,250,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			73,650,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase Koefisien variasi harga antar waktu Persentase kinerja realisasi pupuk**				**3 60 Persen Persen**	**3 60 Persen Persen**	**1,307,000,000.00**	**1,267,000,000.00**	**1,253,184,979.00**	**-848,000,000.00**							**459,000,000.00**	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.*				12 Laporan	12 Laporan	7,000,000.00	7,000,000.00	4,160,000.00	-2,840,000.00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Pelaku Usaha		79,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				1 Laporan	1 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			25,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				1 Laporan	1 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan			25,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				2 Laporan	12 Laporan	7,000,000.00	7,000,000.00	4,160,000.00	-2,840,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			29,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan dalam rangka pengendalian harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar*				12 Laporan	12 Laporan	1,300,000,000.00	1,260,000,000.00	1,249,024,979.00	-50,975,021.00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Pelaku Usaha		380,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan			15,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				12 Laporan	12 Laporan	100,000,000.00	60,000,000.00	34,600,000.00	-65,400,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			65,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,214,424,979.00	14,424,979.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			300,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
4.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase Pelaku Usaha Ekspor yang dibina**				**60 Persen**	**60 Persen**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100,000,000.00**							**100,000,000.00**	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang	*Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang*				1 Kegiatan	1 Kegiatan	0.00	0.00	0.00	0.00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan	Pelaku Usaha		100,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													nilai tambah di dalam negeri.	Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				5 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			100,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor																		
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				2 Produk	0 Produk	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			0.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
5.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**				**100 Persen**	**100 Persen**	**282,295,800.00**	**282,295,800.00**	**239,749,800.00**	**-135,258,090.00**							**147,037,710.00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang*				18000 Unit	18000 Unit	282,295,800.00	282,295,800.00	239,749,800.00	-42,546,000.00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Pelaku Usaha		147,037,710.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				18000 Unit	18000 Unit	282,295,800.00	282,295,800.00	239,749,800.00	-42,546,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			147,037,710.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
6.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Usaha Mikro yang melakukan pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**				**0.40 Persen**	**0.40 Persen**	**300,000,000.00**	**870,000,000.00**	**710,458,700.00**	**75,000,000.00**							**375,000,000.00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah Usaha Mikro yang melakukan pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri*				75 Unit Usaha	75 Unit Usaha	300,000,000.00	870,000,000.00	710,458,700.00	410,458,700.00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya	Pelaku Usaha		375,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	3.30.07.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				30 Orang	0 Orang	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			25,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				30 UMKM	30 UMKM	0.00	270,000,000.00	156,872,500.00	156,872,500.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			50,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace,				75 UMKM	75 UMKM	300,000,000.00	600,000,000.00	553,586,200.00	253,586,200.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya			300,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			perhotelan dan jasa akomodasi											TAHUN SEBELUMNYA		Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**2,291,000,000.00**	**1,631,000,000.00**	**2,728,584,033.00**	**437,584,033.00**							**1,270,000,000.00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK**				**100 Persen**	**100 Persen**	**2,251,000,000.00**	**1,591,000,000.00**	**2,696,084,033.00**	**-1,051,000,000.00**							**1,200,000,000.00**	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen dalam rangka Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota*				1 Dokumen	1 Dokumen	2,251,000,000.00	1,591,000,000.00	2,696,084,033.00	445,084,033.00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Industri		1,200,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	65,000,000.00	65,000,000.00	63,938,000.00	-1,062,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai			1,000,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000.00	576,002,000.00	614,346,760.00	414,346,760.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			85,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	186,000,000.00	186,000,000.00	1,130,467,173.00	944,467,173.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			65,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	1,200,000,000.00	163,998,000.00	293,928,100.00	-906,071,900.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan			40,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
																Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																		
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				0 Dokumen	0 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			10,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota																		
			- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan				100 Dokumen	100 Dokumen	600,000,000.00	600,000,000.00	593,404,000.00	-6,596,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			0.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang**				**80 Persen**	**80 Persen**	**40,000,000.00**	**40,000,000.00**	**32,500,000.00**	**-20,000,000.00**							**20,000,000.00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			dikeluarkan oleh industri terkait																	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen dalam rangka penerbitan Izin Industri*				1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000.00	40,000,000.00	32,500,000.00	-7,500,000.00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Industri		20,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																		
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000.00	40,000,000.00	32,500,000.00	-7,500,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			10,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																		
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya			10,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat												Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Nilai kelengkapan dan keterkinian informasi industri**				**90 Persen**	**90 Persen**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000,000.00**							**50,000,000.00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase industri terdata dalam SIINAS*				55 Persen	55 Persen	0.00	0.00	0.00	0.00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Industri		50,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang			25,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/ Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)												meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan				
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			15,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			10,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	J U M L A H								**18,261,030,500.00**	**20,952,251,343.00**	**21,347,132,721.00**	**3,086,102,221.00**							**18,351,193,000.00**	

Total pagu anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak adalah sebesar Rp.21.347.132.721,- untuk 16 Program, 24 Kegiatan dan 52 Sub Kegiatan. Pagu tersebut mengalami perubahan dari yang awalnya sebesar Rp.20.952.251.343,- menjadi Rp.21.347.132.721,-. Perubahan pagu pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan mengalami kenaikan sebesar Rp.394.881.378, dari pagu murni Tahun 2025.

Adapun beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengalami perubahan dan tidak dilaksanakan pada rencana kerja perubahan tahun 2025. Hal ini dikarenakan adanya refocusing anggaran.

3.2 Pendanaan

Pendanaan untuk mencapai perubahan rencana kerja yang telah ditetapkan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Tahun 2025 berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), [DANA KHUSUS] - Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya serta [DANA KHUSUS] - DAK Non Fisik-PK2UMK .

Perincian pendanaan dapat dilihat pada tabel 3.2. Adapun pagu yang ditetapkan pada perubahan rencana kerja tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak yang semula sebesar Rp.20.952.251.343,- menjadi sebesar Rp.21.347.132.721,-.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang bersifat teknis operasional dan berfungsi sebagai acuan operasional di dalam terwujudnya perencanaan pembangunan sebagaimana yang dikehendaki.

Rencana Kerja juga digunakan sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi program kerja tahunan, dimana hasil-hasil yang dicapai apakah telah sesuai dengan program dan kegiatan yang tercantum di dalam program dan sasaran yang bersifat makro.

Akhirnya, semoga dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak Tahun 2025 ini bermanfaat untuk dijadikan bahan masukan bagi pencitraan Manajemen Publik dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang dan mewujudkan "*Good Governance*" di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak khususnya dan Pemerintah Kota Pontianak pada umumnya.

Pontianak, Juni 2025

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro
Dan Perdagangan Kota Pontianak

IRKAHIM, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690211 199003 1 005

DPMPTSP KOTA PONTIANAK

BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

RENJA (RENCANA KERJA) PERUBAHAN DPMPTSP KOTA PONTIANAK

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DPMPTSP Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini dilakukan sebagai acuan bagi DPMPTSP Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DPMPTSP Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai rencana pelaksanaan kegiatan yang merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPTSP Kota Pontianak Tahun 2024-2026, yang di dalamnya tertuang Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang selanjutnya di tetapkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

Menyadari pentingnya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan DPMPTSP Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 ini sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, maka penyusunannya senantiasa melibatkan seluruh Pejabat Eselon III / Pejabat Penyetaraan dan Pejabat Eselon IV / Pejabat Penyetaraan di lingkungan DPMPTSP Kota Pontianak guna mendapat masukan-masukan yang diharapkan demi tercapainya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Demikian Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak terutama seluruh unit yang tergabung dalam DPMPTSP Kota Pontianak untuk memperoleh kinerja yang baik pada periode berikutnya.

Pontianak, Mei 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

Ir. HIDAYATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19650526 199103 2 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
DAFTAR TABEL			iii
BAB I	PENDAHULUAN		1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Landasan Hukum ……..……...…….……...	1
	1.3	Maksud dan Tujuan …….…….……...	4
	1.4	Sistematika Penulisan .....…….....	4
BAB II	EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025		5
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN		13
	3.1	Rencana Kerja …….....	13
	3.2	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional …..... ..	13
	3.3	Pendanaan …….....……...	24
BAB IV	PENUTUP ……..……...		26

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Evaluasi terhadap Hasil RENJA Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pontianak …….…… 6
Tabel 3.1 Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah……... 15

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan DPMPTSP Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang selanjutnya dijabarkan pada Rencana Kerja untuk periode satu (satu) tahun untuk mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi DPMPTSP.

Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya penyusunan rancangan Renja DPMPTSP mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD yang mengacu pada RPJM.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja DPMPTSP Kota Pontianak, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman dalam menyusun kegiatan setiap tahunnya.

Hubungan RENJA dengan dokumen lainnya adalah sebagai berikut:

1. Renstra DPMPTSP Kota Pontianak mengacu pada RPJMD Kota Pontianak dan RPJMD Provinsi Kal-Bar.
2. Renstra DPMPTSP menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya.
3. Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak Tahun 2024 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
17. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
19. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 22).

20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 38 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 38).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 10).
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan indikator dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD Tahun Anggaran 2025 dengan dokumen renja PD Tahun 2025 serta renstra PD dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang dalam kurun waktu Januari-Mei 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Untuk mengetahui pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak, perlu dilakukan evaluasi kinerja yaitu dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan capaian realisasinya. Perbandingan antara target dan capaian realisasi ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dalam tahun anggaran 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak melaksanakan 6 (enam) program dan 13 (tiga belas) kegiatan serta 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak Tahun 2024. Dari 6 program dan 13 kegiatan serta 35 sub kegiatan tersebut secara umum dapat dilaksanakan namun belum memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 21,37%.

Realisasi belanja tahun 2025 secara keseluruhan adalah Rp. 2.330.390.552 atau 21,37% dari total anggaran Rp. 10.903.838.000. Secara umum pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan belum memenuhi target Rencana Kerja Operasional. Kinerja hasil atau keluaran program adalah sebesar 21,37% dari total anggaran sebesar Rp. 10.903.838.000. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota dengan hasil kinerja 36,07%, program pengembangan iklim penanaman modal dengan hasil kinerja 4,17%, program promosi penanaman modal dengan hasil kinerja 0%, program pelayanan penanaman modal dengan hasil kinerja 25,06%, program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan hasil kinerja 1,39% dan program pengelolaan data dan system informasi penanaman modal dengan hasil kinerja 57,14%.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor	Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III		Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10		11		12		13			14 = 13/8X100		15 = 7 + 13			16 = 15/6X100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
	Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas layanan publik		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**(Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur) / (Total Unsur Yang Terisi) x Nilai Penimbang**	Tahun 2024 Sangat Baik	Tahun 2025 Sangat Baik	Tahun 2026 Sangat Baik	Sangat Baik			Sangat Baik																							**DPMPTSP**	
	Tujuan 2 : Meningkatnya daya saing kota melalui inovasi dan kolaborasi		**Indeks daya saing daerah**	**Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan**	Tahun 2024 : sangat tinggi	Tahun 2025 : sangat tinggi	Tahun 2026 : sangat tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi																							**DPMPTSP**	
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan**	**Tingkat kepuasan terhadap pelayanan sekretariat terkait urusan kepegawaian, surat menyurat, perencanaan, keuangan dan sarana prasarana**	**95**	**%**	**26,207,177,000**	**100**	**%**	**7,947,302,757**	**95**	**%**	**10,239,581,000**		**%**	**2,309,480,552**								**36.07**	**%**	**2,309,480,552**	**37.97**	**22.55**	**136**	**%**	**10,256,783,309**	**143.23**	**277.14**	**Sekretariat**	
1.1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	%	40,500,000	100	%	13,484,500	100	%	30,000,000		%	1,020,000								50.00	%	1,020,000	50.00	3.40	150.00	%	14,504,500	150.00	35.81	Sekretariat	
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		12	Dokumen	13,500,000	12	Dokumen	4,484,500	12	Dokumen	20,000,000	6	Dokumen	0								6	0	0	50.00	0.00	18	0	4,484,500	150.00	33.22	Sekretariat	
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4	Laporan	13,500,000	4	Laporan	4,500,000	4	Laporan	5,000,000	3	Laporan	1,020,000								3	Laporan	1,020,000	75.00	20.40	7	Laporan	5,520,000	175.00	40.89	Sekretariat	
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		4	Laporan	13,500,000	4	Laporan	4,500,000	4	Laporan	5,000,000	1	Laporan	0								1	Laporan	0	25.00	0.00	5	Laporan	4,500,000	125.00	33.33	Sekretariat	
1.2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Terpenuhinya administrasi Keuangan perangkat daerah	100	%	18,121,850,000	100.00	%	4,971,900,433	100	%	5,805,174,000		%	1,451,972,105								46.66	%	1,451,972,105	46.66	25.01	146.66	%	6,423,872,538	146.66	35.45	Sekretariat	
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		32	Orang / Bulan	16,548,650,000	32	Orang / Bulan	4,756,390,433	38	Orang / Bulan	5,069,738,000	31	Orang / Bulan	1,428,582,105								32	0	1,428,582,105	84.21	28.18	64	0	6,184,972,538	200.00	37.37	Sekretariat	
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD		12	Dokumen	1,543,200,000	12	Dokumen	205,620,000	12	Dokumen	250,000,000	3	Dokumen	22,490,000								3	0	22,490,000	25.00	9.00	0	0	228,110,000	0.00	14.78	Sekretariat	

Nomor	Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Keterangan
														I			II			III			IV															
1.2.3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD		13	Dokumen	30,000,000	13	Dokumen	9,890,000	13	Dokumen	10,000,000	4	Dokumen	900,000									4	0	900,000	30.77	9.00	17	0	10,790,000	130.77	35.97	Sekretariat	
1.3		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	100	%	2,770,205,000	100	%	366,155,515	100	%	569,393,000		%	12,120,000									8.33	%	12,120,000	8.33	2.13	108.33	%	378,275,515	108.33	13.66	Sekretariat	
1.3.1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		4	Paket	564,516,150	4	Paket	62,709,150	4	Paket	200,000,000	0	Paket	0									0	0	0	0.00	0.00	4	0	62,709,150	100.00	11.11	Sekretariat	penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan
1.3.2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		12	Paket	337,260,000	12	Bulan	145,772,350	12	Paket	200,000,000	3	Paket	10,980,000									3	0	10,980,000	25.00	5.49	15	0	156,752,350	125.00	46.48	Sekretariat	
1.3.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		4	Paket	174,598,000	4	Bulan	25,349,900	4	Paket	30,000,000	0	Paket	0									0	0	0	0.00	0.00	4	0	25,349,900	100.00	14.52	Sekretariat	
1.3.4		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan		2	Paket	167,794,250	2	Paket	31,819,500	2	Paket	50,000,000	0	Paket	0									0	0	0	0.00	0.00	2	0	31,819,500	100.00	18.96	Sekretariat	penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan
1.3.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		12	Dokumen	37,000,000	12	Dokumen	6,840,000	12	Dokumen	14,393,000	3	Dokumen	1,140,000									3	0	1,140,000	25.00	7.92	15	0	7,980,000	125.00	21.57	Sekretariat	
1.3.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		4	Laporan	91,620,000	4	Laporan	93,664,615	4	Laporan	75,000,000	0	Laporan	0									0	0	0	0.00	0.00	4	0	93,664,615	100.00	102.23	Sekretariat	
1.3.7		Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		36	Paket	1,397,416,600		Paket		12	Paket	0		Paket										0	0	0	0.00	#DIV/0!	0	0	0	0.00	0.00	Sekretariat	-

Nomor	Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan											Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Keterangan
														I			II			III			IV													
1.4		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	3,096,459,000	100.00	%	1,161,191,850	100	%	2,000,000,000		%	550,294,500									41.7	%	550,294,500	41.67	27.51	141.67	%	1,711,486,350	141.67	55.27	Sekretariat	
1.4.1		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan		20	Unit	1,077,969,000	58	Unit	351,085,000	20	Unit	500,000,000	0	Unit	1,360,000									0	Unit	1,360,000	0.00	0.27	58	Unit	352,445,000	290.00	32.70	Sekretariat	
1.4.2		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan		6	Unit	2,018,490,000	56	Unit	810,106,850	6	Unit	1,500,000,000	5	Unit	548,934,500									5	Unit	548,934,500	83.33	36.60	61	Unit	1,359,041,350	1,016.67	67.33	Sekretariat	
1.5		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	1,449,793,000	100	%	1,215,688,004	100	%	1,722,350,000		%	256,136,047									25.00	%	256,136,047	25.00	14.87	125.00	%	1,471,824,051	125.00	101.52	Sekretariat	
1.5.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		12	Laporan	22,050,000	12	Laporan	6,682,000	12	Laporan	7,350,000	3	Laporan	0									3	0	0	25.00	0.00	15	0	6,682,000	125.00	30.30	Sekretariat	
1.5.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		12	Laporan	1,010,243,000	12	Laporan	403,458,370	12	Laporan	790,000,000	3	Laporan	68,050,647									3	0	68,050,647	25.00	8.61	15	0	471,509,017	125.00	46.67	Sekretariat	penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan
1.5.3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		4	Laporan	417,500,000	4	Laporan	19,246,000	4	Laporan	75,000,000	1	Laporan	1,950,000									1	0	1,950,000	25.00	2.60	5	0	21,196,000	125.00	5.08	Sekretariat	
1.5.4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Laporan		12	Laporan	786,301,634	12	Laporan	850,000,000	3	Laporan	186,135,400									3	0	186,135,400	25.00	21.90	15		972,437,034				
1.6		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	384,000,000	100	%	98,302,455	100	%	438,100,000		%	14,877,900									30.83	%	14,877,900	30.83	3.40	130.83	%	113,180,355	76.43	29.47	Sekretariat	
1.6.1		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi		1	Unit	74,000,000	1	Unit	20,750,000	1	Unit	35,000,000	0	Unit	0									0	Unit	0	0.00	0.00	1	Unit	20,750,000	100.00	28.04	Sekretariat	
1.6.2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		5	Unit	143,000,000	4	Unit	41,692,345	5	Unit	48,000,000	5	Unit	442900									5	Unit	442,900	100.00	0.92	9	Unit	42,135,245	180.00	29.47	Sekretariat	
1.6.3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		38	Unit	96,000,000	151	Unit	30,860,110	30	Unit	305,100,000	7	Unit	14,435,000									7	Unit	14,435,000	23.33	4.73	158	Unit	45,295,110	415.79	47.18	Sekretariat	
1.6.4		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara		12	Unit	71,000,000	15	Unit	5,000,000	12	Unit	50,000,000	0	Unit	0									0	0	0	0.00	0.00	15	0	5,000,000	125.00	7.04	Sekretariat	
1.7		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	%	344,370,000	100	%	120,580,000	100	%	150,000,000		%	23,060,000									50.00	%	23,060,000	50.00	15.37	150.00	%	143,640,000	150.00	41.71	50	
1.7.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		1	Paket	205,080,000	1	Paket	22,580,000	1	Paket	50,000,000	1	Paket	23,060,000									1	0	23,060,000	100.00	46.12	2	0	45,640,000	200.00	22.25	Sekretariat	
1.7.2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		10	orang	139,290,000	32	Orang	98,000,000	10	orang	100,000,000	0	Orang	0									0	0	0	0.00	0.00	32	0	98,000,000	320.00	70.36	Sekretariat	penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan

Nomor	Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Keterangan
														I			II			III			IV													
	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan DPMPTSP**	**(Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur) / (Total Unsur Yang Terisi) x Nilai Penimbang**	Tahun 2024 : Sangat Baik	Tahun 2025 : Sangat Baik	Tahun 2026 : Sangat Baik	Baik			Sangat Baik																								DPMPTSP	
	Sasaran 2 : Meningkatnya nilai investasi daerah		**Nilai Investasi Daerah (PMA/PMDN)**	**Nilai Investasi Daerah adalah Jumlah penempatan sejumlah dana dan atau barang di suatu daerah tertentu pada tahun yang bersangkutan**	Tahun 2024 : Rp. 555.500.000.000	Tahun 2025 : Rp. 561.055.000.000	Tahun 2026 : Rp. 566.665.550.000	Rp		1,666,922,661,024	Rp		561,055,000,000																					DPMPTSP	
2		**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal yang sesuai dengan SOP**	**jumlah pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal yang sesuai dengan SOP / keseluruhan pelayanan perizinan x 100%**	**100**	**%**	**615,600,000**	**100**	**%**	**105,747,500**	**100**	**%**	**244,807,000**		**%**	**2,800,000**								**25.06**	**%**	**2,800,000**	**25.06**	**1.14**	**125**	**%**	**108,547,500**	**125.06**	**17.63**	**Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu**	
2.1		Kegiatan Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota	Persentase terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	100	%	615,600,000	100	%	105,747,500	100	%	244,807,000		%	2,800,000								25.06	%	2,800,000	25.06	1.14	125	%	108,547,500	125.06	17.633	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.1.1		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik		1,800	Pelaku Usaha	250,000,000	1,020	Pelaku Usaha	42,449,500	1,700	Pelaku Usaha	104,157,000	258	Pelaku Usaha	1,500,000								258	0	1,500,000	15.18	1.440	1278	Pelaku Usaha	43,949,500	71.00	17.580	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

Nomor	Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Kinerja Pada Triwulan III			Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Keterangan
2.1.2		Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik		5	orang	112,040,000	12	orang	20,260,000	5	pelaku usaha	56,100,000	3	pelaku usaha	1,300,000									3	elaku usah	1,300,000	60.00	2.317	15	elaku usal	21,560,000	300.00	19.24	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan
2.1.3		Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang mendapatkan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal		400	Kegiatan Usaha	253,560,000	100	Kegiatan Usaha	43,038,000	400	Kegiatan Usaha	84,550,000	0	Kegiatan Usaha	0									0	0	0	0.00	0.000	100	0	43,038,000	25.00	16.97	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
3		**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase sistem pengelolaan data dan sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi dengan Simyandu**	**jumlah sistem yang terintegrasi / jumlah keseluruhan sistem yang dikelola DPMPTSP x 100%**	**100**	**%**	**298,000,000**	**100**	**%**	**102,088,500**	**100**	**%**	**70,000,000**		**%**	**0**									**57.14**	**%**	**0**	**57.14**	**0.00**	**157.14**	**%**	**102,088,500**	**157.14**	**34.26**	**Bidang Penanaman Modal**	
3.1		Kegiatan Pengelolaan data dan infromasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten / kota	Persentase pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten / kota	Terlaksananya pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten / kota	100	%	298,000,000	100	%	102,088,500	100	%	70,000,000		%	0									57.14	%	0	57.14	0.00	157.14	%	102,088,500	157.14	34.26	Bidang Penanaman Modal	
3.1.1		Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan		7	Dokumen	298,000,000	7	Dokumen	102,088,500	7	Dokumen	70,000,000	4	Dokumen	0									4	0	0	57.14	0.00	11	0	102,088,500	157.14	34.26	Bidang Penanaman Modal	
4		**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase perusahaan PMA / PMDN yang melaporkan investasi penanaman modal sesuai SOP**	**Jumlah perusahaan PMA/PMDN yang melaporkan investasi penanaman modal sesuai SOP dibagi jumlah perusahaan yang terdaftar di OSS dikali 100%**	**100**	**%**	**1,344,228,000**	**100**	**%**	**83,483,000**	**100**	**%**	**167,000,000**		**%**	**1,500,000**									**1.39**	**%**	**1,500,000**	**1**	**0.90**	**101**	**%**	**84,983,000**	**101**	**6.32**	**Bidang Penanaman Modal**	
4.1		Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten / Kota	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota	Terlaksananya pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota	100	%	1,344,228,000	100	%	83,483,000	100	%	167,000,000		%	1,500,000									1.39	%	1,500,000	1	0.90	101	%	84,983,000	101	6.32	Bidang Penanaman Modal (DAK)	
4.1.1		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal		8	Kegiatan Usaha	138,859,600	3	Kegiatan Usaha	6,850,000	8	Kegiatan Usaha	12,000,000	0	Kegiatan Usaha	0									0	0	0	0.00	0.00	3	0	6,850,000	37.50	4.93	Bidang Penanaman Modal (DAK)	
4.1.2		Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal		272	Pelaku Usaha	915,498,400	70	Pelaku Usaha	38,763,000	272	Pelaku Usaha	100,000,000	0	Pelaku Usaha	0									0	0	0	0.00	0.00	70	0	38,763,000	25.74	4.23	Bidang Penanaman Modal (DAK)	
4.1.3		Pengawasan Penanaman Modal	jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan		120	Kegiatan Usaha	289,870,000	23	Kegiatan Usaha	37,870,000	120	Kegiatan Usaha	55,000,000	5	Kegiatan Usaha	1,500,000									5	0	1,500,000	4.17	2.73	28	0	39,370,000	23.33	13.58	Bidang Penanaman Modal (DAK)	

Nomor	Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Keterangan
														I			II			III			IV															
5		**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase pengembangan iklim penanaman modal yang dilaksanakan**	**Penentuan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan pengembangan iklim penanaman modal**	**100**	**%**	**679,310,000**	**100**	**%**	**246,100,000**	**100**	**%**	**101,450,000**		**%**	**16,610,000**									**4.17**	**%**	**16,610,000**	**4.17**	**16.37**	**104.17**	**%**	**262,710,000**	**104.17**	**38.67**	**Bidang Penanaman Modal**	
5.1		Kegiatan Penetapan pemberian fasilitasi / insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota	Persentase terlaksananya penetapan pemberian fasilitas / insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota	Ditetapkannya Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota	100	%	379,310,000	100.00	%	46,100,000	100	%	101,450,000		%	13,610,000									4.17	%	13,610,000	4.17	13.42	104.17	%	59,710,000	104.17	15.74	Bidang Penanaman Modal	
5.1.1		Penetapan Kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah peraturan daerah / provinsi dalam pemberian fasilitas / insentif dan kemudahan penanaman modal		3	Dokumen	336,560,000	5	Dokumen	31,850,000	3	Dokumen	66,550,000	0	Dokumen	13,610,000									0	0	13,610,000	0.00	20.45	5	0	45,460,000	166.67	13.51	Bidang Penanaman Modal	
5.1.2		Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait peirizinan berusaha berbasis resiko		12	Pelaku usaha	42,750,000	4	DOkumen	14,250,000	12	Dokumen	34,900,000	1	Dokumen	0									1	0	0	8.33	0.00	5	0	14,250,000	41.7	33.33	Bidang Penanaman Modal	
5.2		Kegiatan Pembuatan peta potensi investasi kabupaten / kota	Persentase terlaksananya pembuatan peta potensi investasi kabupaten / kota	Tersedianya peta potensi investasi Kota Pontianak	100	%	300,000,000	100	%	200,000,000	1	Dokumen	-	1	Dokumen	3,000,000									0.00	%	3,000,000	100.00	0.00	100	%	203,000,000	100.0	67.67	Bidang Penanaman Modal	

Nomor	Tujuan / Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Kinerja Pada Triwulan III			Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2025 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Keterangan
5.2.1		Sub Kegiatan Penyusunan peta potensi Investasi kabupaten / kota	Jumlah peta potensi investasi dan peluang usaha kabupaten / kota		1	Dokumen	300,000,000	1	Dokumen	200,000,000	1	Dokumen	-	0	Dokumen	3,000,000										0	0	3,000,000	100.00	#DIV/0!	1	0	203,000,000	100.00	68	Bidang Penanaman Modal	
6		**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase promosi penanaman modal yang dilakukan**	**Kegiatan yang menyampaikan keunggulan daerah untuk menarik investor yang berpotensi menanamkan modalnya**	**100**	**%**	**451,335,000**	**100**	**%**	**106,580,850**	**100**	**%**	**81,000,000**		**%**	**0**									**0.00**	**%**	**0**	**0**	**0.00**	**100**	**%**	**106,580,850**	**100**	**23.61**	**Bidang Penanaman Modal**	
6.1		Kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota	Jumlah peraturan dan dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Terselenggaranya promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota	6	dokumen	451,335,000	100	dokumen	106,580,850	2	dokumen	81,000,000		dokumen	0									0.00	%	0	100	0.00	100	%	106,580,850	1,667	23.61	Bidang Penanaman Modal	
6.1.1		pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten / kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten / kota		2	Dokumen	451,335,000	2	Dokumen	106,580,850	2	Dokumen	81,000,000	0	Dokumen	0									0	0	0	0.00	0	2	0	106,580,850	100	24	Bidang Penanaman Modal	
		TOTAL					29,595,650,000			8,591,302,607			10,903,838,000			2,330,390,552											2,330,390,552					10,921,693,159				
Rata-rata capaian kinerja (%) Sub Kegiatan																												**30.04**					**166.7051572**			
Predikat kinerja																																				
Rata-rata capaian kinerja (%) Program						%		**100**	%																			**20.95**					**121.83**			
Predikat kinerja																																				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja																																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kota berikutnya																																				

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rencana Kerja

Perencanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak Tahun 2025 mengacu pada arah kebijakan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025 dan disesuaikan dengan jumlah dana / anggaran yang sudah ditetapkan pagunya.

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 berjumlah 6 (enam) program, terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 12.431.472.392 (dua belas milyar empat ratus tiga puluh satu juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).

3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana tata ruang wilayah merupakan acuan bagi Pemerintah Kota Pontianak dalam melaksanakan pembangunan dan menjadi dasar perumusan dalam berbagai aspek kebijakan.

Kota Pontianak mempunyai fungsi dan peran yaitu :

1. Kota Pontianak sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional) dengan fungsi dan peran sebagai berikut :
   - Menjadi pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional (khususnya ASEAN) dan menjadi pendorong bagi daerah sekitarnya.
   - Sebagai pusat jasa-jasa pelayanan keuangan/bank dengan skala pelayanan nasional atau melayani beberapa provinsi.
   - Sebagai pusat pengolahan/pengumpul barang secara nasional atau beberapa provinsi.
   - Sebagai simpul transportasi secara nasional atau untuk beberapa provinsi di sekitarnya.
   - Sebagai pusat jasa pemerintah untuk nasional atau meliputi beberapa provinsi di sekitarnya.
   - Sebagai pusat jasa-jasa kemasyarakatan.
   - Fungsi dan peran Kota Pontianak dalam konstelasinya terhadap wilayah regional yaitu sebagai pusat perdagangan dan jasa serta sebagai pintu masuk dan keluar baik barang maupun orang ke wilayah provinsi Kalimantan barat.
2. Kota Pontianak sebagai pendorong daerah sekitarnya, maka di Kota Pontianak harus tersedia fasilitas dan uang untuk memberikan jasa pelayanan untuk

mewadahi kegiatan terkait dengan sektor ungulan di kawasan sekitarnya (berperan sebagai pintu keluar perdagangan untuk produk sekitar unggulan maupun industri pengololaan tanaman pangan / perkebunan dan perikanan laut yang berasal dari wilayah luar Kota Pontianak).

3. Kota Pontianak sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalbar. Dimana kota-kota yang merupakan kota penyebar kegiatan ekonomi dan Pontianak tersebut terdiri dari Singkawang, Sintang, Sanggau, dan Ketapang.

Kota Pontianak diarahkan untuk dikembangkan sebagai Pelabuhan Internasional dalam sistem simpul transportasi laut Indonesia mengacu pada fungsi dan peran Kota Pontianak tersebut, maka sesuai dengan visi dan misi DPMPTSP Kota Pontianak diarahkan guna mewujudkan peningkatan perekonomian masyarakat Kota Pontianak melalui peningkatan jumlah investasi yang menanamkan modalnya di Kota Pontianak setiap tahunnya.

TABEL 3.1

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							10.903.838.000,00	11.129.765.105,00	12.431.472.392,00							10,875,893,997.00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.903.838.000,00	11.129.765.105,00	12.431.472.392,00							10,875,893,997.00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							10.903.838.000,00	11.129.765.105,00	12.431.472.392,00							10,875,893,997.00	
1	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Keskretariatan				95 %	95 %	10.239.581.000,00	10.471.152.305,00	11,868,375,492.00							10,040,696,697.00	
	2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			100 %	100 %	30.000.000,00	408.016.510,00	391,860,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Organisasi Perangkat Daerah		434,300,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13 Dokumen	13 Dokumen	20.000.000,00	21.831.510,00	20,280,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			3,700,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	4.215.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			400,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	8 Laporan	5.000.000,00	381.185.000,00	367,365,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			7,500,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	100 %	5.329.738.000,00	5.513.132.605,00	7,034,722,122.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Organisasi Perangkat Daerah		5,743,753,997.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	5.069.738.000,00	5.295.665.105,00	6.817.254.622,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			5,520,633,997.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi SKPD																
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	250.000.000,00	206.520.000,00	206.520.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			206,520,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				13 Dokumen	13 Dokumen	10.000.000,00	10.947.500,00	10.947.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			5,800,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			-	100 %	150.000.000,00	173.783.000,00	146,120,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Organisasi Perangkat Daerah		164,760,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	2 Paket	50.000.000,00	50.390.000,00	44.760.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			53,160,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																

							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	30 Orang	100.000.000,00	123.393.000,00	101.360.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			100,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	569.393.000,00	582.602.550,00	463,113,680.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Organisasi Perangkat Daerah		1,034,132,700.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	46.961.300,00	51.794.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			100,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	200.000.000,00	177.327.900,00	151,652,480.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			250,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	0 Paket	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			150,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	200.000.000,00	215.393.750,00	172,147,300.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			352,732,700.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	

							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	30.000.000,00	30.919.600,00	25.519.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			30,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	14.393.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			15,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00	100.000.000,00	50,000,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			50,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	2.000.000.000,00	1.539.858.840,00	1,527,483,620.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Organisasi Perangkat Daerah		700,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	67 Unit	500.000.000,00	424.597.150,00	261,054,350.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			200,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	82 Unit	1.500.000.000,00	1.115.261.690,00	1,266,429,270.00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			-	100 %	1.722.350.000,00	1.827.848.800,00	1,979,628,070.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Organisasi Perangkat Daerah		1,572,560,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	7.350.000,00	7.302.000,00	7.302.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			8,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	790.000.000,00	767.000.000,00	781,876,270.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			500,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00	168.376.000,00	309.429.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			100,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	850.000.000,00	885.170.800,00	881.020.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			964,560,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	438.100.000,00	425.910.000,00	325,448,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Organisasi Perangkat Daerah		378,990,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	4 Unit	48.000.000,00	48.000.000,00	49.418.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			15,240,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																	

							Jumlah Mebel yang Dipelihara				12 Unit	5 Unit	50.000.000,00	18.000.000,00	5.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			5,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	116 Unit	305.100.000,00	319.710.000,00	210,730,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			195,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	40.200.000,00	60,300,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			50,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase penetapan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal				100 %	100 %	101.450.000,00	286.384.600,00	281,138,600.00							616,000,000.00	
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota	-			100 %	100 %	101.450.000,00	78.344.600,00	73,098,600.00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Pelaku Usaha		16,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																	
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				3 Dokumen	1 Dokumen	66.550.000,00	40.444.600,00	37.882.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.01	0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko																	
							Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				12 Dokumen	4 Dokumen	34.900.000,00	37.900.000,00	35.216.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			16,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan dan Peta Potensi Investasi Kota Pontianak	-			-	1 Dokumen	0,00	208.040.000,00	208.040.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Pelaku Usaha		600,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	208.040.000,00	208.040.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi penanaman modal yang dilakukan				100 %	100 %	81.000.000,00	81.000.000,00	35.560.000,00							60,000,000.00	
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan dan dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota	-			2 Dokumen	2 Dokumen	81.000.000,00	81.000.000,00	35.560.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Pelaku Usaha		60,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	81.000.000,00	81.000.000,00	35.560.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			60,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal yang sesuai dengan SOP				-	100 %	244.807.000,00	149.428.000,00	149.428.000,00							96,900,000.00	
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-			-	100 %	244.807.000,00	149.428.000,00	149.428.000,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Pelaku Usaha		96,900,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																	
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1700 Pelaku Usaha	1000 Pelaku Usaha	104.157.000,00	86.858.000,00	86.858.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			43,400,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																	
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	56.100.000,00	23.230.000,00	23.230.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			12,000,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																	
							Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				400 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	84.550.000,00	39.340.000,00	39.340.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			25,500,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan PMA / PMDN yang melaporkan investasi penanaman modal sesuai SOP				100 %	100 %	167.000.000,00	71.800.000,00	53.000.000,00							57,950,000.00	
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota	-			100 %	100 %	167.000.000,00	71.800.000,00	53,000,000.00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Pelaku Usaha		57,950,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																	
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				8 Kegiatan Usaha.	6 Kegiatan Usaha.	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			11,800,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																	
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				272 Pelaku Usaha	78 Pelaku Usaha	100.000.000,00	39.800.000,00	21.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			26,300,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal																	

							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				120 Kegiatan Usaha	35 Kegiatan Usaha	55.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			19,850,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase sistem pengelolaan data dan sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi dengan Simyandu				100 %	100 %	70.000.000,00	70.000.200,00	43.970.300,00							4,347,300.00	
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten / kota	-			100 %	100 %	70.000.000,00	70.000.200,00	43.970.300,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Pelaku Usaha		4,347,300.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																	
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				7 Dokumen	7 Dokumen	70.000.000,00	70.000.200,00	43.970.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			4,347,300.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
												J U M L A H	**10.903.838.000,00**	**11.129.765.105,00**	**12.431.472.392,00**							**10,875,893,997.00**	

3.3. Pendanaan

Pendanaan untuk mencapai Rencana Kerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak Tahun 2025 berasal dari Pendapatan Transfer Antar Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, nilai pagu awal sebesar Rp. 70.000.200, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 43.970.300 (refocusing sebesar Rp. 26.029.900)
2. Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha, nilai pagu awal sebesar Rp. 39.800.000, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 21.000.000 (refocusing sebesar Rp. 18.800.000)
3. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota, nilai pagu awal sebesar Rp. 81.000.000, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 35.560.000 (refocusing sebesar Rp. 45.440.000)
4. Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, nilai pagu awal sebesar Rp. 37.900.000, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 35.216.000 (refocusing sebesar Rp. 2.684.000)
5. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, nilai pagu awal sebesar Rp. 40.444.600, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 37.882.600 (refocusing sebesar Rp. 2.562.000)
6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, nilai pagu awal sebesar Rp. 21.831.510, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 20.280.000 (refocusing sebesar Rp. 1.551.510)
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, nilai pagu awal sebesar Rp. 5.000.000, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 4.215.000 (refocusing sebesar Rp. 785.000)
8. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, nilai pagu awal sebesar Rp. 381.185.000, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 367.365.000 (refocusing sebesar Rp. 13.820.000)
9. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, nilai pagu awal sebesar Rp. 5.295.665.105, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 6.817.254.622 (refocusing sebesar Rp. 1.521.589.517)
10. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, nilai pagu awal sebesar Rp. 50.390.000, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 44.760.000 (refocusing sebesar Rp. 5.630.000)
11. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, nilai pagu awal sebesar Rp. 123.393.000, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 101.360.000 (refocusing sebesar Rp. 22.033.000)

12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor, nilai pagu awal sebesar Rp. 46.961.300, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 51.794.300 (refocusing sebesar Rp. 4.833.000)
13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, nilai pagu awal sebesar Rp. 177.327.900, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 151.652.480 (refocusing sebesar Rp. 25.675.420)
14. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, nilai pagu awal sebesar Rp. 215.393.750, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 172.147.300 (refocusing sebesar Rp. 43.246.450)
15. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, nilai pagu awal sebesar Rp. 30.919.600, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 25.519.600 (refocusing sebesar Rp. 5.400.000)
16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, nilai pagu awal sebesar Rp. 100.000.000, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 50.000.000 (refocusing sebesar Rp. 50.000.000)
17. Pengadaan Mebel, nilai pagu awal sebesar Rp. 424.597.150, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 261.054.350 (refocusing sebesar Rp. 163.542.800)
18. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, nilai pagu awal sebesar Rp. 1.115.261.690, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 1.266.429.270 (refocusing sebesar Rp. 151.167.580)
19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, nilai pagu awal sebesar Rp. 767.000.000, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 781.876.270 (refocusing sebesar Rp. 14.876.270)
20. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, nilai pagu awal sebesar Rp. 168.376.000, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 309.429.000 (refocusing sebesar Rp. 141.053.000)
21. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, nilai pagu awal sebesar Rp. 885.170.800, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 881.020.800 (refocusing sebesar Rp. 4.150.000)
22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, nilai pagu awal sebesar Rp. 48.000.000, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 49.418.000 (refocusing sebesar Rp. 1.418.000)
23. Pemeliharaan Mebel, nilai pagu awal sebesar Rp. 18.000.000, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 5.000.000 (refocusing sebesar Rp. 13.000.000)
24. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, nilai pagu awal sebesar Rp. 319.710.000, nilai pagu perubahan sebesar Rp. 210.730.000 (refocusing sebesar Rp. 108.980.000)
25. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, nilai pagu awal Rp. 40.200.000, nilai pagu perubahan Rp. 60.300.000 (refocusing Rp. 20.100.000)

BAB IV
PENUTUP

Rencana kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak yang disusun untuk 1 (satu) Tahun Anggaran berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024 - 2026 adalah merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada RPJMD Kota Pontianak tahun 2024 - 2026 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025, semoga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program / kegiatan / sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak.

Pontianak, Mei 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

Ir. HIDAYATI

Pembina Utama Muda

NIP. 19650526 199103 2 008

disporapar
Kota Pontianak

KOTA PONTIANAK

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2025

DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK

Alamat :

Jln. Gusti Sulung Lelanang No. 1 B

Telp (0561) 577047

PONTIANAK

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan tepat waktu sebagai rencana pelaksanaan kegiatan yang sudah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub. kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kami menyadari Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini masih banyak kekurangannya, kami berharap dengan Renja Perubahan ini semua kebijakan, program, kegiatan dan sub. kegiatan yang di susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini dapat dijadikan pedoman bagi semua komponen Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan mendukung dalam tercapainya visi Kota Pontianak yaitu “ Maju, Sejahtera, berwawasan lingkungan yang Humanis”.

Demikian penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 semoga dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak sehingga pelaksanaan program kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana.

Pontianak, Juni 2025

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		**i**
DAFTAR ISI		**ii**
DAFTAR TABEL		**iii**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**I - 1**
	1.1. Latar Belakang	I - 1
	1.2. Landasan Hukum	I - 2
	1.3. Maksud Dan Tujuan	I - 5
	1.4. Sistematika Penulisan	I - 5
BAB II	**HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II**	**II – 8**
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tiwulan II	II - 8
BAB III	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	**III – 14**
	3.1. Rencana Kerja	III – 14
	3.2. Pendanaan	III – 15
BAB IV	**PENUTUP**	**IV –39**

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman s/d Tahun 2024 (tahun berjalan) Kota Pontianak	II - 12
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota pontianak	III - 18
Tabel 3.2 Daftar Rencana Aksi da Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pontianak Tahun 2025	III - 20

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam pelaksanaan rencana kerja tahun 2025, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan RKPD tahun 2025 harus berubah antara lain :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
3. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan/subkegiatan, penambahan kegiatan/subkegiatan baru/subkegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan/subkegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan/subkegiatan.

Dengan adanya beberapa kebijakan dan peraturan yang baru serta untuk menyesuaikan dengan kondisi riil yang terjadi pada saat ini, serta adanya perubahan dalam RKPD tahun 2025, maka dianggap perlu untuk melakukan perubahan atas Renja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2025, sehingga dokumen perencanaan yang disusun dapat selaras dengan peraturan perundangan yang ada dan dapat menjawab permasalahan aktual yang terjadi pada saat ini sampai batas tahun yang direncanakan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2025 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
17. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
19. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 117). (contoh perwa tentang tupoksi)

20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor … Tahun 2024 tentang Rencana Strategis … (nama perangkat daerah) Kota Pontianak Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor ...).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 10).
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 128).
25. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
26. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor … Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor ..).
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
28. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Kepariwisataan
29. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kepemudaan

1.3 Maksud Dan Tujuan

Renja Perubahan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen renja PD dengan renstra PD serta dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan urusan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II

Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 merupakan tahun kedua dari renstra perangkat daerah periode 2024-2026. Tahun 2024 yang merupakan tahun pertama baru berjalan beberapa bulan sehingga tidak bisa dilakukan evaluasi tahunan.

Jumlah Pagu Anggaran murni Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak Tahun 2025 untuk pendapatan sebesar Rp. 3.505.000.000,00 dengan realisasi Triwulan II sebesar Rp. 990.705.000,00 atau sebesar 28,27% kemudian pagu belanja barang dan jasa sebesar Rp 17.880.987.868,00 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp 5.505.026.094,00 atau sebesar 30,79%.Pagu Anggaran tersebut dibagi dalam 8 (delapan) Program Utama dengan pagu anggaran dan realisasi dengan triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

   Pada program ini, pagu anggaran Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 8.761.835.870,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar Rp 3.489.854.723,00 atau 39.83%.
2. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan

   Pada program ini, pagu anggaran Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 1.171412.750,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar Rp 98.210.200,00 atau sekitar 8.38%.
3. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan

   Pada program ini, pagu anggaran Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 5.277.214.447,00 dengan realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.325.539.020,00 atau 25.12 %.
4. Program pengembangan kapasitas kepramukaan

   Pada program ini, pagu anggaran Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 150.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar Rp 150.000.000,00 atau 100 %.
5. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata

   Pada program ini, pagu anggaran Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 354.203.300,00 dengan realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar Rp 13.750.000,00 atau 3.88 %.

6. Program pemasaran pariwisata

   Pada program ini, pagu anggaran Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 1.359318.500,00 dengan realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar Rp 408.172.151,00 atau 30.02%.
7. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual

   Pada program ini, pagu anggaran Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 38.081.000,00 dengan realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar Rp 0,00 atau 0 %.
8. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif

   Pada program ini, pagu anggaran Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 768.922.000,00 dengan realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar Rp 19.500.000,00 atau 2.53%.

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan pencapaian perencanaan strategis (Renstra) perangkat Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak sampai dengan triwulan II Tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut dalam table 2.1 terlampir.

Tabel 2.1 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Per Triwulan II Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Target Renstra PD pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) 2024			Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (tahun n-1) yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024(%)	
														I			II			III			IV													
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100	
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp						R	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp
	Tujuan PD : Meningkatnya Prestasi Atlet Olahraga		**Persentase Atlet Olah Raga dan pemuda yang berprestasi di tingkat Provinsi dan Nasional**	**Jumlah Persentase Peningkatan Atlet Olah Raga dan pemuda yang berprestasi di tingkat Provinsi dan Nasional**			**20.812.654.629**				**100**	**persen**	**17.880.987.867,00**	**17,62**	**persen**	**3.151.260.870,00**	**13,16**	**persen**	**2.353.765.224,00**							**30,79**	**persen**	**5.505.026.094,00**							
1		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase tingkat kepuasan bidang/ bagian terhadap pelayanan kesekretariatan**	**Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan adalah tingkat kepuasan terhadap pelayanan sekretariat terkait urusan kepegawaian, surat menyurat, perencnaaan, keuangan dan sarana**	**95**	**Persen**	**23.893.889.286**	**70,74**	**persen**	**6.683.799.499,00**	**95**	**persen**	**8.761.835.870,00**	**21,12**	**persen**	**1.850.691.251**	**18,71**	**persen**	**1.639.163.472**		**persen**					**39,83**	**persen**	**3.489.854.723,00**	**41,93**	**39,83**	**110,57**	**persen**	**10.173.654.222,00**	**116,39**	**42,58**
1.1		**KEGIATAN : PERENCANAAN, PENGANGGARAAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH**	**Terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Persentase terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100**	**Persen**	**188.547.000**	**100,00**	**persen**	**93.624.500,00**	**100**	**persen**	**79.949.995,00**	**11,01**	**persen**	**8.800.000**	**18,11**	**persen**	**14.475.000**		**persen**					**29,11**	**persen**	**23.275.000,00**	**29**	**29**	**146,22**	**persen**	**116.899.500,00**	**146**	**146,22**
1.1.1		2.19.01.2.01.01 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		**14**	**Dokumen**	**77.198.500**	**3**	**Dokumen**	**36.365.500**	**5**	**Dokumen**	**37.695.180**	**0**	**Dokumen**	**4.800.000**	**1**	**Dokumen**	**14.475.000**							**1**	**Dokumen**	**19.275.000**	20	51,13	4	Dokumen	55.640.500,00	28,57	397.432.142,86
1.1.2		2.19.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		**1**	**Dokumen**	**27.398.500**	**1**	**Dokumen**	**11.798.500**	**1**	**Dokumen**	**12.854.500**	**0**	**Dokumen**	**-**		**Dokumen**	**-**							**0**	**Dokumen**	**0**	0	-	1	Dokumen	11.798.500,00	100,00	1.179.850.000,00
1.1.3		2.19.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-		**1**	**Dokumen**	**21.600.000**	**0**	**Dokumen**	**12.659.500**	**1**	**Dokumen**	**8.500.315**	**0**	**Dokumen**	**-**		**Dokumen**	**-**							**0**	**Dokumen**	**0**	0	-	0	Dokumen	12.659.500,00	0,00	1.265.950.000,00
1.1.5		2.19.01.2.01.06 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		**9**	**Laporan**	**50.900.000**	**4**	**Laporan**	**28.801.000**	**7**	**Laporan**	**16.400.000**	**0**	**Laporan**	**4.000.000**		**Laporan**	**-**							**0**	**Laporan**	**4.000.000**	0	24,39	4	Laporan	32.801.000,00	44,44	364.455.555,56
1.1.6		2.19.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		**2**	**Laporan**	**11.450.000**	**1**	**Laporan**	**4.000.000**	**2**	**Laporan**	**4.500.000**	**0**	**Laporan**	**-**		**Laporan**	**-**							**0**	**Laporan**	**0**	0	-	1	Laporan	4.000.000,00	50,00	200.000.000,00

1,2		**KEGIATAN: ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH**	**Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah**	**100**	**Persen**	**18.998.437.722**	**93,63**	**persen**	**6.264.627.045,00**	**100**	**persen**	**6.784.082.168,00**	**22,35**	**persen**	**1.516.406.371**	**19,42**	**persen**	**1.317.308.038**							**41,77**	**persen**	**2.833.714.409,00**	**42**	**42**	**135**	**persen**		**135**	**-**
1.2.1		2.19.01.2.02.01 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN		**12**	**org/bulan**	**18.034.017.722**	**12**	**org/bulan**	**5.952.035.045**	**12**	**org/bulan**	**6.496.742.168**	**3**	**org/bulan**	**1.459.096.371**	**2**	**org/bulan**	**1.262.778.038**							**5**	**org/bulan**	**2.721.874.409**	42	41,90	17	org/bulan	8.673.909.454,00	141,67	###############
1.2.2		2.19.01.2.02.03 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		**12**	**Dokumen**	**939.520.000**	**12**	**Dokumen**	**302.940.000**	**12**	**Dokumen**	**282.220.000**	**2**	**Dokumen**	**57.310.000**	**3**	**Dokumen**	**54.530.000**							**5**	**Dokumen**	**111.840.000**	42	39,63	17	Dokumen	414.780.000,00	141,67	3.456.500.000,00
1.2.3		2.19.01.2.02.07 Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		**3**	**Laporan**	**24.900.000**	**7**	**laporan**	**9.652.000**	**7**	**laporan**	**5.120.000**	**0**	**Laporan**	**-**		**Laporan**	**-**							**0**	**Laporan**	**0**	0	-	7	Laporan	9.652.000,00	233,33	321.733.333,33
1,3		**KEGIATAN : ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH**	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perhitungan dilakukan membandingkan Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian pada tahun ini dibagi dengan jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian pada tahun lalu dikali seratus	**100**	**Persen**	**288.070.000**	**100**	**persen**	**54.090.000,00**	**100**	**persen**	**127.076.037,00**	**-**	**persen**	**-**		**persen**							**-**	**persen**	**-**	**0**	**-**	**100**	**persen**		**100**	**-**
1.3.1		2.19.01.2.05.02 Pengadaan pakaian dinas beserta Atribut perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		**104**	**Paket**	**188.070.000**	**1**	**paket**	**54.090.000**	**1**	**paket**	**74.980.000**	**0**	**paket**	**-**		**paket**	**-**							**0**	**paket**	**0**	0	-	1	paket	54.090.000,00	0,96	52.009.615,38
1.3.2		2.23.01.2.02.09 Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		**3**	**Orang**	**100.000.000**	**6**	**Orang**	**0**	**6**	**Orang**	**52.096.037**	**0**	**Orang**	**-**		**Orang**	**-**							**0**	**Orang**	**0**	0	-	6	Orang	-	200,00	-
1,4		**KEGIATAN : ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH**	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perhitungan dilakukan membandingkan Jumlah Dokumen Administrasi Umum pada tahun ini dibagi dengan jumlah Dokumen Administrasi	**100**	**Persen**	**1.841.527.820**	**88,81**	**persen**	**741.408.774,00**	**100**	**persen**	**431.918.180,00**	**14,72**	**persen**	**63.584.600**	**17,32**	**persen**	**74.825.339**							**32,05**	**persen**	**138.409.939,00**	**32**	**32**	**121**	**persen**		**121**	**-**
1.4.1		2.19.01.2.06.01 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		**12**	**Paket**	**28.875.420**	**1**	**paket**	**68.898.700**	**1**	**paket**	**9.613.050**	**0**	**paket**	**957.900**		**paket**	**-**							**0**	**paket**	**957.900**	0	9,96	1	paket	69.856.600,00	8,33	582.138.333,33
1.4.2		2.19.01.2.06.02 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		**18**	**Paket**	**336.829.800**	**1**	**paket**	**165.325.000**	**1**	**paket**	**109.975.900**	**0**	**paket**	**-**	**1**	**paket**	**34.300.000**							**1**	**paket**	**34.300.000**	100	31,19	2	paket	199.625.000,00	11,11	1.109.027.777,78
1.4.3		2.19.01.2.06.04 Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		**12**	**Paket**	**449.879.600**	**3**	**paket**	**148.979.200**	**3**	**paket**	**107.797.900**	**1**	**paket**	**19.661.700**		**paket**	**4.992.600**							**1**	**paket**	**24.654.300**	33	22,87	4	paket	173.633.500,00	33,33	1.446.945.833,33
1.4.4		2.19.01.2.06.05 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		**12**	**Paket**	**522.006.000**	**2**	**paket**	**173.152.200**	**2**	**paket**	**151.720.580**	**1**	**paket**	**40.000.000**		**paket**	**19.944.000**							**1**	**paket**	**59.944.000**	50	39,51	3	paket	233.096.200,00	25,00	1.942.468.333,33
1.4.5		2.19.01.2.06.06 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		**12**	**Dokumen**	**24.000.000**	**3**	**Dokumen**	**17.860.000**	**3**	**Dokumen**	**3.000.000**	**0**	**Dokumen**	**165.000**		**Dokumen**	**-**							**0**	**Dokumen**	**165.000**	0	5,50	3	Dokumen	18.025.000,00	25,00	150.208.333,33
1.4.6		2.19.01.2.06.09 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		**12**	**Laporan**	**479.937.000**	**1**	**laporan**	**167.193.674**	**1**	**laporan**	**49.810.750**	**0**	**Laporan**	**2.800.000**		**Laporan**	**15.588.739**							**0**	**Laporan**	**18.388.739**	0	36,92	1	Laporan	185.582.413,00	8,33	1.546.520.108,33

1,5		**KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia pada tahun ini	**100**	**Persen**	**1.668.127.744**	**98,58**	**persen**	**1.135.495.051,00**	**100**	**persen**	**1.212.460.240,00**	**21,11**	**persen**	**255.900.280**	**18,19**	**persen**	**220.581.695**							**39,30**	**persen**	**476.481.975,00**	**39**	**39**	**138**	**persen**		**138**	**-**
1.5.1		2.19.01.2.08.01 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat		**12**	**Laporan**	**11.982.000**	**1**	**laporan**	**3.990.000**	**1**	**laporan**	**3.998.400**	**0**	**Laporan**	**750.000**		**Laporan**	**-**							**0**	**Laporan**	**750.000**	0	18,76	1	Laporan	4.740.000,00	8,33	39500000,00
1.5.2		2.19.01.2.08.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		**12**	**Laporan**	**316.938.000**	**12**	**laporan**	**69.068.299**	**12**	**laporan**	**99.150.000**	**3**	**Laporan**	**31.451.608**	**2**	**Laporan**	**18.413.055**							**5**	**Laporan**	**49.864.663**	42	50,29	17	Laporan	118.932.962,00	141,67	991108016,67
1.5.3		2.19.01.2.08.04 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		**12**	**Laporan**	**1.339.207.744**	**12**	**laporan**	**1.062.436.752**	**12**	**laporan**	**1.109.311.840**	**2**	**Laporan**	**223.698.672**	**2**	**Laporan**	**202.168.640**							**4**	**Laporan**	**425.867.312**	33	38,39	16	Laporan	1.488.304.064,00	133,33	12402533866,67
1,6		**KEGIATAN : PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang	**95**	**Persen**	**529.210.000**	**99,84**	**persen**	**264.532.350,00**	**100**	**persen**	**126.349.250,00**	**4,75**	**persen**	**6.000.000**	**9,48**	**persen**	**11.973.400**							**14,23**	**persen**	**17.973.400,00**	**14**	**14**	**114**	**persen**		**120**	**-**
1.6.1		2.19.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		**3**	**Unit**	**159.940.000**	**3**	**Unit**	**68.279.500**	**3**	**Unit**	**80.100.000**	**1**	**Unit**	**6.000.000**		**Unit**	**7.626.900**							**1**	**Unit**	**13.626.900**	33	17,01	4	Unit	81.906.400,00	133,33	2730213333,33
1.6.2		2.19.01.2.09.06 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		**12**	**Unit**	**109.270.000**	**41**	**Unit**	**36.404.850**	**41**	**Unit**	**36.060.000**	**0**	**Unit**	**-**	**5**	**Unit**	**4.346.500**							**5**	**Unit**	**4.346.500**	12	12,05	46	Unit	40.751.350,00	383,33	339594583,33
1.6.3		2.19.01.2.09.09 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		**1**	**Unit**	**260.000.000**	**1**	**Unit**	**159.848.000**	**1**	**Unit**	**10.189.250**	**0**	**Unit**	**-**		**Unit**	**-**							**0**	**Unit**	**0**	0	-	1	Unit	159.848.000,00	100,00	15984800000,00
1,7		**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah**	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	**100**	**Persen**	**379.969.000**	**99,79**	**persen**	**374.674.522,00**	**0**	**persen**	**-**	**0,00**	**persen**	**-**		**persen**								**-**	**persen**	**-**	**0**	**-**	**100**	**persen**		**100**	**#DIV/0!**
		Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		**1**	**Unit**	**379.969.000**	**2**	**Unit**	**374.674.522**	**0**	**Unit**	**0**	**0**	**Unit**	**-**		**Unit**								**0**	**Unit**	**-**	**0**	-	1	Unit	374.674.522,00	100	98,61
	Sasaran PD 1 : Meningkatnya Kualitas Prestasi		Persentase Peningkatan Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi/Nasional	(Jumlah Medali yang diperoleh dalam event Pemuda Pelopor dan PPAN /Jumlah Medali yang di perebutkan pada event Pemuda Pelopor dan PPAN di			**4.500.987.516**																											
2		**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Persentase pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	60% (persentase pemuda berprestasi) + 40% (persentase Organisasi kepemudaan yang dibina)	**70**	**Indeks**	**4.050.987.516**	**70**	**persen**	**737.812.865,00**	**70**	**indeks**	**1.171.412.750,00**	**1,28**	**persen**	**15.050.000**	**7,10**	**persen**	**83.160.200**							**8,38**	**persen**	**98.210.200,00**	**11,98**	**8,38**	**78,38**	**persen**	**836.023.065,00**	**111,98**	**20,64**
2,1		**Kegiatan : Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	(Jumlah kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan /Jumlah Kegitan Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota di	**100**	**Persen**	**1.402.077.000**	**98,86**	**persen**	**441.064.565,00**	**100**	**persen**	**336.690.000,00**	**-**	**persen**	**-**	**23,13**	**persen**	**77.889.200**							**23,13**	**persen**	**77.889.200,00**	**23**	**23**	**122**	**persen**		**122**	**-**
2.1.1		2.19.02.2.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah pemuda yang ikut dalam kegiatan peningkatan kapasitas daya saing wira usaha		**45**	**Orang**	**149.876.000**	**45**	**Orang**	**49.876.000**	**45**	**Orang**	**49.755.000**	**100**	**Orang**	**-**		**Orang**								**100**	**Orang**	**0**	222,22	-	145	Orang	49.876.000,00	322,22	110835555,56
2.1.2		2.19.02.2.01.04 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan Hak Pemuda di tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan		**40**	**Orang**	**946.541.000**	**100**	**Orang**	**263.093.165**	**100**	**Orang**	**177.856.000**	**10**	**Orang**	**-**		**Orang**								**10**	**Orang**	**0**	10,00	-	110	Orang	263.093.165,00	275,00	657732912,50
2.1.3		2.19.02.2.01.07 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan		**7**	**Orang**	**135.124.000**	**10**	**Orang**	**74.680.400**	**10**	**Orang**	**50.000.000**	**0**	**Orang**	**-**		**Orang**	**42.199.200**							**0**	**Orang**	**42.199.200**	0,00	84,40	10	Orang	116.879.600,00	142,86	1669708571,43
2.1.4		2.19.02.2.01.08 Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda peloporn tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan		**11**	**Orang**	**170.536.000**	**10**	**Orang**	**53.415.000**	**10**	**Orang**	**59.079.000**	**0**	**Orang**	**-**		**Orang**	**35.690.000**							**0**	**Orang**	**35.690.000**	0,00	60,41	10	Orang	89.105.000,00	90,91	810045454,55

2,2		**Kegiatan : Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	(Jumlah Organisasi kepemudaan yang diberdayakan/Jumlah Organisasi kepemudaan yang ada di Kota Pontianak) x 100%	**95**	**Persen**	**2.648.910.516**	**38,12**	**persen**	**296.748.300,00**	**100**	**persen**	**834.722.750,00**	**1,80**	**persen**	**15.050.000**	**0,63**	**persen**	**5.271.000**							**2,43**	**persen**	**20.321.000,00**	**2**	**2**	**41**	**persen**		**43**	**-**
2.2.1		2.19.02.2.01.02 Koordinasi, sinkroniosasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasikepemudaan tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan		**100**	**Dokumen**	**2.648.910.516**	**5**	**Dokumen**	**296.748.300**	**5**	**Dokumen**	**834.722.750**	**0**	**dokumen**	**15.050.000**		**dokumen**	**5.271.000**							**0**	**dokumen**	**20.321.000**	0,00	2,43	5	dokumen	317.069.300,00	5,00	317069300,00
3		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase Peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh Kwarcab**	**Persentase Peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh Kwarcab**	**90**	**Persen**	**450.000.000**	**90**	**persen**	**150.000.000,00**	**90**	**persen**	**150.000.000,00**	**#####**	**persen**	**150.000.000**		**persen**			**persen**					**100,00**	**persen**	**150.000.000,00**	**111,11**	**100,00**	**190,00**	**persen**	**300.000.000,00**	**211,11**	**66,67**
3,1		**Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Perhitungan dilakukan dengan menghitung jumlah Organisasi Kepramukaan yang dibina dan dikembangkan pada tahun ini	**90**	**Orang**	**450.000.000**	**100**	**persen**	**150.000.000,00**	**100**	**persen**	**150.000.000,00**	**#####**	**persen**	**150.000.000**		**persen**			**persen**					**100,00**	**persen**	**150.000.000,00**	**100**	**100**	**200**	**persen**		**222**	**-**
3.1.2		2.19.04.2.01.05 Peningkatan Kapasitas Organisasi keprarmukaan Tingkat	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya		**1**	**Laporan**	**450.000.000**	**1**	**organisasi**	**150.000.000**	**1**	**organisasi**	**150.000.000**	**1**	**organisasi**	**150.000.000**		**organisasi**								**1**	**organisasi**	**150.000.000**	100,00	100,00	2	organisasi	300.000.000,00	200,00	30000000000,00
	Sasaran PD 2 : Meningkatnya Kualitas Prestasi		Persentase Peningkatan Atlet Berprestasi Tingkat Kota/Provinsi/Nasional	(Jumlah Medali yang diperoleh di Event Olahraga Provinsi /Jumlah Medali yang di perebutkan di Event Provinsi) x 100%			**16.311.667.113**																											
4		**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Persentase pengembangan kapasitas daya saing olahraga	45%(persentase Atlet yang mengikuti kejuaraan) + 35% (persentase Organisasi yang dibina) + 20% (persentase Sapras yang dilakukan	**70**	**Indeks**	**16.311.667.113**	**70**	**indeks**	**6.439.941.016,00**	**70**	**persen**	**5.277.214.447,00**	**16,47**	**persen**	**868.915.419**	**8,65**	**persen**	**456.623.601**		**persen**					**25**	**persen**	**1.325.539.020,00**	**35,88**	**25,12**	**95,12**	**persen**	**7.765.480.036,00**	**135,88**	**47,61**
4,1		**Kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten/Kota	Perhitungan dilakukan dengan menghitung Persentase Atlet yang mengikuti kejuaraan daerah pada tahun ini	**100**	**Persen**	**900.000.000**	**98,99**	**persen**	**236.544.400,00**	**100**	**persen**	**239.154.040,00**	**-**	**persen**	**-**		**persen**								**-**	**persen**	**-**	**0**	**-**	**99**	**persen**		**99**	**-**
4.1.1		2.19.03.2.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		**15**	**kegiatan**	**450.000.000**	**1**	**Dokumen**	**118.272.200**	**1**	**Dokumen**	**83.300.000**	**0**	**dokumen**	**-**		**dokumen**								**0**	**dokumen**	**0**	0,00	-				0,00	0,00
4.1.2		2.19.03.2.02.02 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		**3**	**Dokumen**	**450.000.000**	**1**	**Dokumen**	**134.670.000**	**1**	**Dokumen**	**155.854.040**	**0**	**dokumen**	**-**		**dokumen**								**0**	**dokumen**	**0**	0,00	-				0,00	0,00
4,2		**Kegiatan : Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olaharaga Prestasi Tingkat daerah Provinsi	Perhitungan dilakukan membandingkan Jumlah Medali yang di peroleh di Event Olahraga Provinsi dengan Jumlah Medali yang diperebutkan di event Provinsi	**100**	**Persen**	**450.000.000**	**80,96**	**persen**	**139.215.000**	**100**	**persen**	**199.790.607**	**-**	**persen**	**-**		**persen**								**-**	**persen**	**-**	**0**	**-**	**81**	**persen**		**81**	**-**
4.2.1		2.19.03.2.03.01 Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi		**150**	**Orang**	**450.000.000**	**100**	**orang**	**139.215.000**	**100**	**orang**	**199.790.607**	**0**	**orang**	**-**		**orang**								**0**	**orang**	**0**	0,00	-				0,00	0,00
4,3		**Kegiatan : Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga**	Persentase Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	Perhitungan dilakukan membandingkan Jumlah organisasi olahraga tahun ini dengan Jumlah organisasi olahraga tahun lalu di kali	**100**	**Persen**	**9.000.000.000**	**99,99**	**persen**	**3.986.438.910**	**100**	**persen**	**2.793.000.000**	**17,90**	**persen**	**500.000.000**		**persen**								**17,90**	**persen**	**500.000.000**	**18**	**18**	**118**	**persen**		**118**	**-**
4.3.1		2.19.03.2.04.02 Peningkatan Kerja sama OrganisasiKeolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan		**3**	**Dokumen**	**9.000.000.000**	**1**	**Organisasi**	**3.986.438.910**	**3**	**Organisasi**	**2.793.000.000**	**1**	**organisasi**	**500.000.000**		**organisasi**								**1**	**organisasi**	**500.000.000**	33,33	17,90				0,00	0,00
4,4		**Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Perhitungan dilakukan membandingkan Jumlah organisasi olahraga rekreasi tahun ini dengan Jumlah organisasi olahraga rekreasi	**100**	**Persen**	**5.961.667.113**	**99,25**	**persen**	**2.077.742.706,00**	**100**	**persen**	**2.045.269.800,00**	**18,04**	**persen**	**368.915.419**	**22,33**	**persen**	**456.623.601**		**persen**					**40,36**	**persen**	**825.539.020,00**	**40**	**40**	**140**	**persen**		**140**	**-**
4.4.1		2.19.03.2.05.01 Pemasalan Olahraga dan penyelenggaran Festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional dan internasional	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		**5**	**Dokumen**	**1.673.325.000**	**5**	**Dokumen**	**406.647.640**	**5**	**Dokumen**	**1.258.400.000**	**1**	**dokumen**	**111.900.000**	**1**	**dokumen**	**384.725.000**							**2**	**dokumen**	**496.625.000**	40,00	39,46				0,00	0,00
4.4.2		2.19.03.2.05.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan dan pengawasan	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai		**7**	**Unit**	**4.288.342.113**	**7**	**Unit**	**1.671.095.066**	**7**	**Unit**	**786.869.800**	**2**	**Sapras**	**257.015.419**	**2**	**Sapras**	**71.898.601**							**4**	**Sapras**	**328.914.020**	57,14	41,80				0,00	0,00

	Tujuan PD : Meningkatnya Sektor Pariwisata		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB				8.815.783.663																												
	Sasaran PD 3 : Meningkatnya Industri		Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun ini - Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun Lalu dibagi Jumlah Kunjungan Wisatawan			8.815.783.663																												
5		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya persentase Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Destinasi Wisata tahun ini dibagi dengan Jumlah destinasi wisata tahun lalu dikali seratus	85	Persen	2.385.228.100	85	persen	370.557.150,00	85	persen	354.203.300,00	3,88	persen	13.750.000		persen			7,17					3,88	persen	13.750.000,00	4,57	3,88	88,88	persen	384.307.150,00	104,57	16,11
5,1		Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Perhitungan dilakukan membandingkan Jumlah Destinasi Wisata tahun ini dibagi dengan Jumlah destinasi	100	Persen	1.857.503.900	98,74	persen	339.177.150,00	100	persen	194.153.300,00	4,71	persen	9.150.000		persen								4,71	persen	9.150.000,00	5	5	103	persen		103	-
5.1.1		3.26.02.2.01.007 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan		40	Orang	1.097.544.000	40	orang	48.315.400	40	orang	133.279.300	0	Orang	-		Orang								0	Orang	0	0,00	-	40	Orang	48.315.400,00	100,00	120788500,00
5.1.2		3.26.02.2.01.008 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		3	Laporan	159.959.900	1	laporan	48.579.300	1	laporan	60.874.000	0	Laporan	9.150.000		Laporan								0	Laporan	9.150.000	0,00	15,03	1	Laporan	57.729.300,00	33,33	1924310000,00
5.1.3		3.26.02.2.01.009 Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan		1	Dokumen	600.000.000	2	Dokumen	242.282.450	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-		Dokumen								0	Dokumen	0	0,00	-	2	Dokumen	242.282.450,00	200,00	24228245000,00
5,2		Pkegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Destinasi wisata Kabupaten/Kota		100	Persen	527.724.200	99,98	persen	31.380.000,00	100	persen	160.050.000,00	2,87	persen	4.600.000		persen								2,87	persen	4.600.000,00	3	3	103	persen		103	-
5.2.1		3.26.02.2.03.06 Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		3	Laporan	527.724.200	12	laporan	31.380.000	0	laporan	0	0	Laporan	-		Laporan								0	Laporan	0	0,00	-	12	Laporan	31.380.000,00	400,00	1046000000,00
5.2.2		3.26.02.2.03.08 Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Laporan hasil Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/kota								1	laporan	160.050.000	0	Laporan	4.600.000		Laporan								0	Laporan	4.600.000	0,00	2,87	0	Laporan	4.600.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya persentase Program Pemasaran Pariwisata	Perhitungan dilakukan membandingkan Jumlah Event Pariwisata yang diselenggarakan Tahun ini dikurangi Tahun lalu	95	Persen	1.759.911.071	95	persen	535.316.547,00	95	persen	1.359.318.500,00	17,17	persen	233.354.200	12,86	persen	174.817.951		7,17					30,03	persen	408.172.151,00	31,61	30,03	125,03	persen	943.488.698,00	131,61	53,61
6,1		Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinsi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Perhitungan dilakukan menghitung Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang terlaksana pada tahun ini	100	Persen	1.759.911.071	99,3	persen	535.316.547,00	100	persen	1.359.318.500,00	17,17	persen	233.354.200	12,86	persen	174.817.951							30,03	persen	408.172.151,00	30	30	129	persen		129	-
6.1.1		3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik dalam dan	Jumlah Promosi melalui Media Cetak Elektronik dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri		0	Paket		0	Paket	0	0	Paket	0	0	0	-		0			0														
6.1.2		3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Periwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam maupun Luar negeri		3	kegiatan	1.759.911.071	4	kegiatan	535.316.547	4	kegiatan	1.348.318.500	1	kegiatan	233.354.200	1	kegiatan	174.817.951							2	kegiatan	408.172.151	50,00	30,27	6	kegiatan	943.488.698,00	200,00	31449623266,67
		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		1	Paket					1	Paket	11.000.000																						
7		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual	Jumlah Pelaku Ekonomi Kraeatif Yang Mengikuti sosialisasi dibagi Jumlah Pelaku yang memperoleh HAKI di kali sertus	64	Persen	150.000.000	64	persen	26.959.500,00	64	persen	38.081.000,00	-	persen	-		persen			7,17					-	persen	-	0,00	-	64,00	persen	26.959.500,00	100,00	17,97
7,1		Kegiatan : Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Perhitungan dilakukan menghitung Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang terlaksana pada tahun ini	100	Persen	150.000.000,00	100	persen	26.959.500,00	100	persen	38.081.000,00	-	persen	-		persen								-	persen	-	0	-	100	persen		100	-
7.1.1		3.26.04.2.02.07 Fasilitasi Penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif		1	produk	150.000.000	1	produk	26.959.500	4	produk	38.081.000	0	produk	-		produk								0	produk	0	0,00	-	1	produk	26.959.500,00	100,00	2695950000,00

7		**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK**	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual	Jumlah Pelaku Ekonomi Kraeatif Yang Mengikuti sosialisasi dibagi Jumlah Pelaku yang memperoleh HAKI di kali sertus	**64**	**Persen**	**150.000.000**	**64**	**persen**	**26.959.500,00**	**64**	**persen**	**38.081.000,00**	**-**	**persen**	**-**		**persen**			**Orang**					**-**	**persen**	**-**	**0,00**	**-**	**64,00**	**persen**	**26.959.500,00**	**100,00**	**17,97**	
7,1		**Kegiatan : Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Jumlah Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif**	Perhitungan dilakukan menghitung Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang terlaksana pada tahun ini	**100**	**Persen**	**150.000.000,00**	**100**	**persen**	**26.959.500,00**	**100**	**persen**	**38.081.000,00**	**-**	**persen**	**-**		**persen**			**-**					**-**	**persen**	**-**	**0**	**-**	**100**	**persen**		**100**	**-**	
7.1.1		**3.26.04.2.02.07** Fasilitasi Penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif		**1**	**produk**	**150.000.000**	**1**	**produk**	**26.959.500**	**4**	**produk**	**38.081.000**	**0**	**produk**	**-**		**produk**								**0**	**produk**	**0**	0,00	-	1	produk	26.959.500,00	100,00	2695950000,00	
8		**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Persentase Pelaku Ekonomi Kraetif Yang Mengikuti Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kraeatif Yang Mengikuti dibagi Jumlah pelatihan Ekenomi kreatif yang diadakan dikali seratus	**30**	**Persen**	**2.546.748.896**	**30**	**persen**	**770.082.850,00**	**30**	**persen**	**768.922.000,00**	**2,54**	**persen**	**19.500.000**		**persen**			**Orang**					**2,54**	**persen**	**19.500.000,00**	**8,45**	**2,54**	**32,54**	**persen**	**789.582.850,00**	**108,45**	**31,00**	
8,1		**Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kretaif Tingkat Dasar**	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku Ekonomi Kraeatif tingkat dasar Yang Mengikuti dibagi Jumlah pelatihan Ekenomi kreatif tingkat dasar yang diadakan dikali seratus	**100**	**Persen**	**2.546.748.896**	**97,15**	**persen**	**770.082.850,00**	**100**	**persen**	**768.922.000,00**	**2,54**	**persen**	**19.500.000**		**persen**			**Orang**					**2,54**	**persen**	**19.500.000,00**	**3**	**3**	**100**	**persen**		**100**	**-**	**Bidang Ekonomi Kreatif**
8.1.1		3.26.05.2.01.03 Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar		**250**	**Orang**	**100.010.800**	0	**Orang**	0	0	**Orang**	0	0		**-**					**Orang**														
8.1.2		3.26.05.2.01.05 Fasilitasi Proses Kreasi,Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif		**1**	**Laporan**	**1.973.895.596**	**5**	**laporan**	**407.984.350**	**5**	**laporan**	**622.287.000**	**0**	**Laporan**	**19.500.000**		**Laporan**								**0**	**Laporan**	**19.500.000**	0,00	3,13	5	Laporan	427.484.350,00	500,00	42748435000,00	
8.1.3		3.26.05.2.01.06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		**70**	**Orang**	**472.842.500**	**70**	**Orang**	**362.098.500**	**70**	**Orang**	**146.635.000**	**0**	**orang**	**-**		**orang**								**30**	**orang**	**0**	42,86	-	100	orang	362.098.500,00	142,86	517283571,43	
8.1.4		3.26.05.2.02.01 Pelatihan Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif		**0**	**Orang**	**0**	0	**Orang**	0	0	**Orang**	0	0	**Orang**	**-**		**Orang**			**Orang**					0	**Orang**	0								
Rata-rata Capaian Kinerja(%) Sub Kegiatan														**12,00**	**%**	3.142.110.870	**7,12**	**%**	2.353.765.224		**%**	-				**19,12**	%	**5.495.876.094,00**	**20,06**						
Predikat Kinerja																													**Sedang**						
Rata-rata Capaian Kinerja(%) Program								**20,31**	**%**	**3.151.260.870**	**5,92**	**%**	**2.353.765.224**		**%**	-	-	**%**		**26,22224**	%	**5.505.026.094**	**30,69**		**98,06**	**%**	**21.219.495.521**	**127,50**	**37,02**	
Predikat Kinerja																							**Sedang**						

Realisasi fisik	**26,22**	**%**
Realisasi keuangan	**30,79**	**%**
Faktor pendorong keberhasilan kinerja	kerjasama yang baik bersama tim serta adanya landasan hukum tentang pelaksanaan kegiatan	
Faktor penghambat pencapaian kinerja	terdapat kendala dalam Perubahan Anggaran pada Sub Kegiatan	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	*1*	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja.PD		

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Kerja

Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak perubahan Tahun 2025 tidak terdapat perubahan program, kegiatan, maupun subkegiatan sebagaimana yang terdapat pada renja tahun 2025. Perubahan pada rencana kerja ini hanya pada volume target beberapa sub kegiatan yang menyesuaikan dengan kebijakan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Adapun rincian perubahan rencana kerja tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pada Belanja Prioritas Pemeliharaan Sapras Water Boom Kolam Renang pada sub kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan ditambahkan sumber dana Pendapatan Transfer Antar Daerah sesuai SE.
2. Pada Belanja Bantuan Sosial (Bansos) untuk Mahasiswa / Pemuda /Pelajar Tidak Mampu, akan di alihkan ke hibah KORMI dan akan di koordinasikan lebih lanjut ke Bidang PPEP untuk pemindahan pagu anggaran tersebut.
3. Kegiatan festival backcang akan dialihkan ke kegiatan pemasaran pariwisata dan olahraga sesuai evaluasi RKPD Perubahan bersama walikota ditindaklanjuti koordinasi lebih lanjut ke Bidang PPEP untuk pemindahan pagu anggaran tersebut.
4. Pada Belanja Pendapatan terdapat penambahan target sebesar Rp. 10.200.000,- pada retribusi pemanfaatan bangunan sehingga target pendapatan menjadi Rp.3.515.200.000,-
5. Ada beberapa sub kegiatan yang di drop karena belum dipergunakan pada Tahun 2025 yaitu pada sub kegiatan :

   1). Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota

   2). Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

   3).Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

3.2 Pendanaan

Pada perubahan rencana kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak terdapat perubahan anggaran pada beberapa sub kegiatan yang disebabkan oleh adanya pengurangan anggaran maupun perubahan volume target subkegiatan antara lain:

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA							17,936,932,000.00	18,586,342,168.00	18,705,988,700.00	769,056,700.00							16,557,531,000.00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15,082,984,664.00	15,671,092,928.00	16,185,463,900.00	1,102,479,236.00							14,053,753,600.00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							15,082,984,664.00	15,671,092,928.00	16,185,463,900.00	1,102,479,236.00							14,053,753,600.00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	8,608,636,034.00	8,913,446,230.86	8,761,836,702.86	-160,508,200.00							8,448,127,834.00	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	82,950,000.00	87,564,355.60	79,949,995.60	-3,000,004.40			-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan	Seluruh ASN pada bidang di perangkat daerah		70,450,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	3 Dokumen	40,450,000.00	39,209,540.00	37,695,180.00	-2,754,820.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan Meningkatnya Kualitas Hidup Manusia Yang Berkesetaraan			25,950,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11,500,000.00	12,854,500.00	12,854,500.00	1,354,500.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			11,500,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8,500,000.00	8,500,315.60	8,500,315.60	315.60	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			9,500,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				9 Laporan	9 Laporan	18,000,000.00	22,500,000.00	16,400,000.00	-1,600,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			18,500,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			5,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	6,555,272,000.00	6,796,162,168.00	6,784,083,000.00	228,811,000.00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Seluruh ASN pada bidang di perangkat daerah		6,319,356,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	39 Orang/bulan	6,215,332,000.00	6,496,742,168.00	6,496,743,000.00	281,411,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			5,979,416,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	329,940,000.00	289,420,000.00	282,220,000.00	-47,720,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			329,940,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	10,000,000.00	10,000,000.00	5,120,000.00	-4,880,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			10,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 persen	100 persen	96,000,000.00	147,092,037.26	127,076,037.26	31,076,037.26			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-		108,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				104 Paket	1 Paket	72,000,000.00	74,980,000.00	74,980,000.00	2,980,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			72,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	24,000,000.00	72,112,037.26	52,096,037.26	28,096,037.26	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			36,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	515,779,890.00	494,007,430.00	431,918,180.00	-83,861,710.00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Seluruh ASN pada bidang di perangkat daerah		581,741,834.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	1 Paket	9,626,010.00	9,613,050.00	9,613,050.00	-12,960.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			9,626,010.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				18 Paket	18 Paket	78,000,000.00	111,100,600.00	109,975,900.00	31,975,900.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			85,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	150,000,000.00	126,107,900.00	107,797,900.00	-42,202,100.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			150,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	135,153,880.00	109,185,880.00	151,720,580.00	16,566,700.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			150,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			3,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	140,000,000.00	135,000,000.00	49,810,750.00	-90,189,250.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			184,115,824.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 persen	100 persen	1,214,054,144.00	1,212,460,240.00	1,212,460,240.00	-1,593,904.00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Seluruh ASN pada bidang di perangkat daerah		1,224,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	4,000,000.00	3,998,400.00	3,998,400.00	-1,600.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			4,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	100,000,000.00	99,150,000.00	99,150,000.00	-850,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			100,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,110,054,144.00	1,109,311,840.00	1,109,311,840.00	-742,304.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			1,120,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah*				95 persen	95 persen	144,580,000.00	176,160,000.00	126,349,250.00	-18,230,750.00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Seluruh ASN pada bidang di perangkat daerah		144,580,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	58,280,000.00	80,100,000.00	80,100,000.00	21,820,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			58,280,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	36,300,000.00	36,060,000.00	36,060,000.00	-240,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			36,300,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50,000,000.00	60,000,000.00	10,189,250.00	-39,810,750.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			50,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Indeks pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan**				**70 Indeks**	**70 Indeks**	**1,305,457,250.00**	**1,305,332,250.00**	**1,171,412,750.00**	**-34,068,984.00**							**1,271,388,266.00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Persentase Penyadaran , dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota*				100 persen	100 persen	454,579,000.00	454,454,000.00	336,690,000.00	-117,889,000.00			-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Organisasi Kepemudaan tingkat Kota untuk peningkatan kapasitas		460,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota																		

			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				45 Orang	45 Orang	50,000,000.00	49,755,000.00	49,755,000.00	-245,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			50,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda																		
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda				27 Orang	4 Orang	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			50,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota																		

			Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi				200 Orang	200 Orang	300,000,000.00	295,620,000.00	177,856,000.00	-122,144,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			300,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota																		
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				12 Orang	14 Orang	54,579,000.00	59,079,000.00	59,079,000.00	4,500,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			60,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*				95 persen	95 persen	850,878,250.00	850,878,250.00	834,722,750.00	-16,155,500.00			-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Organisasi Kepemudaan tingkat Kota untuk peningkatan kapasitas		811,388,266.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				97 Organisasi	97 Organisasi	850,878,250.00	850,878,250.00	834,722,750.00	-16,155,500.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			811,388,266.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Indeks pengembangan kapasitas daya saing olahraga**				**70 Indeks**	**70 Indeks**	**5,018,891,380.00**	**5,302,314,447.14**	**6,102,214,447.14**	**-834,653,880.00**							**4,184,237,500.00**	

	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah*				5 Dokumen	5 Dokumen	300,000,000.00	248,304,040.00	239,154,040.00	-60,845,960.00			-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Atlet yang mengikuti Kejuaran Multi event dan singel event		300,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				5 Kegiatan	5 Kegiatan	150,000,000.00	92,450,000.00	83,300,000.00	-66,700,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			150,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga																		

			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				350 Orang	350 Orang	150,000,000.00	155,854,040.00	155,854,040.00	5,854,040.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			150,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	*Persentase Atlet yang mengikuti kejuaraan Tingkat Provinsi*				100 persen	100 persen	150,000,000.00	205,890,607.14	199,790,607.14	49,790,607.14			-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Atlet yang mengikuti Kejuaran Multi event dan singel event		150,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah																		

			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				90 Orang	90 Orang	150,000,000.00	205,890,607.14	199,790,607.14	49,790,607.14	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			150,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	*Persentase Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga*				100 persen	100 persen	2,500,000,000.00	2,793,000,000.00	2,793,000,000.00	293,000,000.00			-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Atlet yang mengikuti Kejuaran Multi event dan singel event		2,500,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait																		

			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	2,500,000,000.00	2,793,000,000.00	2,793,000,000.00	293,000,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			2,500,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi*				100 persen	100 persen	2,068,891,380.00	2,055,119,800.00	2,870,269,800.00	801,378,420.00			-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Atlet yang mengikuti Kejuaran Multi event dan singel event		1,234,237,500.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan																		

			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				8 Unit	8 Unit	718,891,380.00	792,869,800.00	1,611,869,800.00	892,978,420.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			734,237,500.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional																		
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				3 Lembaga	3 Lembaga	1,350,000,000.00	1,262,250,000.00	1,258,400,000.00	-91,600,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			500,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase partisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh Kwarcab**				**90 Persen**	**90 Persen**	**150,000,000.00**	**150,000,000.00**	**150,000,000.00**	**0.00**							**150,000,000.00**	

	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	*Jumlah Peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan oleh Kwarcab*				90 Orang	90 Orang	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00			-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Organisasi Kepemudaan tingkat Kota untuk peningkatan kapasitas		150,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			150,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**2,853,947,336.00**	**2,915,249,240.00**	**2,520,524,800.00**	**-333,422,536.00**							**2,503,777,400.00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**2,853,947,336.00**	**2,915,249,240.00**	**2,520,524,800.00**	**-333,422,536.00**							**2,503,777,400.00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**-**				**-**	**-**	**473,675,740.00**	**473,675,740.00**	**354,203,300.00**	**430,101,660.00**							**903,777,400.00**	

	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-				-	-	303,675,740.00	303,675,740.00	194,153,300.00	-109,522,440.00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Destinasi Wisata serta kelompok sadar wisata		653,777,400.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				3 Laporan	15 Laporan	55,000,000.00	63,636,000.00	60,874,000.00	5,874,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			55,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		

			Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan				5 Orang	150 Orang	248,675,740.00	240,039,740.00	133,279,300.00	-115,396,440.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			598,777,400.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0 Dokumen	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			0.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	170,000,000.00	170,000,000.00	160,050,000.00	-9,950,000.00			-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Destinasi Wisata serta kelompok sadar wisata		250,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				2 Lokasi	0 Lokasi	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			0.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																	

			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				3 Laporan	0 Laporan	0.00	0.00	0.00	0.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			250,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	170,000,000.00	170,000,000.00	160,050,000.00	-9,950,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			0.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Peningkatan Pemasaran Pariwisata**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1,500,000,000.00**	**1,561,701,500.00**	**1,359,318,500.00**	**-800,000,000.00**							**700,000,000.00**	

	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinsi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota*				100 persen	100 persen	1,500,000,000.00	1,561,701,500.00	1,359,318,500.00	-140,681,500.00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Destinasi Wisata serta kelompok sadar wisata		700,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,500,000,000.00	1,550,701,500.00	1,348,318,500.00	-151,681,500.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			700,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		

			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				0 Promosi	4 Promosi	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			0.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Intelektual**				**66 Persen**	**66 Persen**	**50,000,000.00**	**49,996,500.00**	**38,081,000.00**	**0.00**							**50,000,000.00**	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	*Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif*				100 persen	100 persen	50,000,000.00	49,996,500.00	38,081,000.00	-11,919,000.00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Pelaku Ekonomi Kreatif		50,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual																		

			Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50,000,000.00	49,996,500.00	38,081,000.00	-11,919,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			50,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
4.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**-**				**-**	**-**	**830,271,596.00**	**829,875,500.00**	**768,922,000.00**	**19,728,404.00**							**850,000,000.00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar*				100 persen	100 persen	830,271,596.00	829,875,500.00	768,922,000.00	-61,349,596.00			-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Pelaku Ekonomi Kreatif		850,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																		

			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 Laporan	6 Laporan	780,271,596.00	643,879,000.00	622,287,000.00	-157,984,596.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			800,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				70 Orang	70 Orang	50,000,000.00	185,996,500.00	146,635,000.00	96,635,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			50,000,000.00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	J U M L A H								**17,936,932,000.00**	**18,586,342,168.00**	**18,705,988,700.00**	**769,056,700.00**							**16,557,531,000.00**	

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan/subkegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu RENJA juga berfungsi untuk mengevaluasi kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam RENJA Perubahan diharapkan akan lebih terkoordinasi, efektif, dan efisien dengan menitikberatkan pada pencapaian kinerja.

Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam RENJA Perubahan tahun 2025 ini. Keberhasilan pelaksanaan RENJA Perubahan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh ASN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak serta *stakeholder* yang bersangkutan untuk mewujudkan peningkatan profesionalisme ASN Pemerintah Kota Pontianak.

Pontianak, Juni 2025
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA PONTIANAK,

RIZAL, S.Sos
Pembina Utama Muda
Nip. 19690510 199010 1 001

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

Tahun 2025

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak

(0561) 8102060
Jl. Alianyang No.7b
https://disperpusip.pontianak.go.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan segala Keberlimpahan-NYA dan keberkahan rahmat-NYA, kami masih diberi kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai implementasi tahapan Rencana Strategis 2024 – 2026 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak.

Perubahan Rencana Kerja disusun dalam rangka efektivitas dan efesiensi perencanan yang sudah ditetapkan dan pelaksanaan program, kegiatan, subkegiatan agar dapat memberikan arah atau pedoman rencana tindak lanjut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak selama tahun 2025, dan Perubahan Rencana Kerja ini juga merupakan kegiatan solusi dari persoalan, atau permasalahan serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.

Kami sangat berharap semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan dijadikan acuan dan panduan bagi seluruh pegawai Dinas Perpustakaan Kota Pontianak sesuai tugas, pokok dan fungsi masing-masing dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan.

Akhir kata kami sangat berharap semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak ini dapat bermanfaat dan dijadikan pedoman dan panduan bagi seluruh pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak sesuai tugas, pokok dan fungsi masing-masing dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan.

Pontianak, 26 Mei 2025

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KOTA PONTIANAK,

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Hj. RENDRAYANI, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780624 199703 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……..... i

DAFTAR ISI ……..... ii

BAB I PENDAHULUAN ……..... 1

1.1.Latar Belakang ……..... **1**

1.2.Landasan Hukum ……..... **2**

1.3.Maksud dan Tujuan ……..... **4**

1.4. Sistematika Penulisan ……..... **5**

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025. 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II (Dua) Tahun 2025 dan Capaian Renstra ……..... **6**

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025…… 24

BAB IV PENUTUP ……..... 35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak tahun anggaran 2025 merupakan langkah kebijakan efesiensi dan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatab yang dilaksanakan disesuaikan terhadap ketersediaan anggaran pada Tahun Anggaran 2025. Perubahan Rencana Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun 2025 tetap berpedoman pada Perencanaan yang sistematis dan matang, baik dari perencanaan jangka panjang, menengah maupun tahunan yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan suatu organisasi Perangkat Daerah, RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renstra PD yang telah tersusun. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan penjabaran tahunan anggaran yang disediakan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Perpustakaan Tahun 2024 –2026.

Dengan berpedoman pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2024-2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2025, maka Perubahan Renja Perangkat Daerah ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan, atau yang sedang dilaksanakan dan atau yang belum dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Perubahan Renja mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah mengingat Perubahan Rencana Kerja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan perangkat Daerah. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Perangkat Kerja Daerah yang merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra). Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak sebagai Perangkat Daerah telah menyusun dokumen perencanaan strategis Tahun 2024-2026 merupakan Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Perubahan Rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah (PD) yang dilakukan dalam proses tahun berjalannya anggaran Tahun 2025, yang memuat kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Rencana kerja perangkat daerah (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun 2025 secara hirarki berpedoman pada perencanaan Pembangunan Daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dalam setiap tahunnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak menjadi pedoman dalam pembuatan Rencana Strategis perangkat daerah. Selanjutnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak akan dijabarkan dalam rencana kerja perangkat daerah tiap tahun.

Rencana kerja perangkat daerah (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun 2025 secara hirarki berpedoman pada perencanaan Pembangunan Daerah yang dimulai dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, yang dijabarkan dalam rencana panjang jangka menengah daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun dan rencana kerja perangkat daerah (RKPD) dalam setiap tahunnya. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Pontianak menjadi pedoman dalam pembuatan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD). Selanjutnya rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak akan dijabarkan dalam rencana kerja perangkat daerah (Renja PD) tiap tahun.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang- undangan, diantaranya :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) ;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undnag-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang perpanjangan pembentukan daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6757);
13. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
14. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta TataCara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5—1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050—5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional;
25. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Daerah RPJMD Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024;
27. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
29. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perpustakaan;
30. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 137 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi uraian tugas dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan Kota Pontianak;
31. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026;
32. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Rencana Startegis Dinas Perpustakaan Kota Pontianak Tahun 2024-2026;
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan indikator dan target dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan dokumen renja Perangkat Daerah Tahun 2025 serta renstra Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang dalam kurun waktu Januari- April 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Substansi Peruhan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II (Dua) Tahun 2025

Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak tahun 2025 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA dengan target yangditetapkan dalam Rencana Strategis. Secara umum diperoleh hasil bahwa capaian kinerja tahun 2025 telah memenuhi target yang ditetapkan. Berdasarkan data SIPD-RI tanggal 26 Mei 2025 bahwa RKPD tahun 2025 Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak sebesar 21.270.803.000,- (dua puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus tiga ribu rupiah), pagu APBD Kota Pontianak Tahun 2025 sebesar 22.501.834.047 (dua puluh dua milyar lima ratus satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat puluh tujuh rupiah), dan RKPD Perubahan tahun 2025 sebesar 22.161.909.960,- (dua puluh dua milyar serratus enam puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah). Perubahan RKPD Tahun 2025 ini dikarenakan ada refocusing anggaran yang dilakukan Pemerintah Kota Pontianak. Pagu Perubahan RKPD Tahun 2025 dipergunakan untuk membiayai 4 Program, 13 Kegiatan, dan 42 Subkegiatan.

Adapun realisasi anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak sampai dengan tanggal 30 April 2025 yaitu sebesar 2.910.820.388,- (dua milyar Sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) dari pagu anggaran sebesar 22.161.909.960,- (dua puluh dua milyar serratus enam puluh satu juta Sembilan ratus Sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah). Prosentase realisasi anggaran sampai dengan 30 April 2025 yaitu sebesar 13,13 %.

a. Evaluasi Capaian Renstra Perangkat Daerah

Review hasil pelaksanaan Renja PD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak dilihat sebagai berikut :

a) Realisasi Program sampai dengan 30 April 2025 yaitu;

Dari 4 Program, 13 kegiatan, dan 42 Sub Kegiatan terdapat beberapa

- Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, anggaran yang terealisasi mencapai 29,77%;
- Program Pembinaan Perpustakaan, anggaran yang terealisasi mencapai 1,10%;
- Program Pengelolaan Arsip. Anggaran yang terealisasi mencapai 43,07%
- Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip. Anggaran yang terealisasi belum ada.

b) Realisasi kegiatan sampai dengan 30 April 2025 yaitu;

Realisasi kegiatan pada program adalah:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan yang terealisasi diatas 29,77 %, yaitu pada kegiatan:
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang telah terealisasi anggarannya mencapai 0%.
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah telah terealisasi anggaran mencapai 30,92%.
  3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang telah terealisasi anggarannya mencapai 0%.
  4. Administrasi Umum Perangkat Daerah telah terealisasi anggaran mencapai 23,66%.
  5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang telah terealisasi anggarannya mencapai 43%.
  6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah terealisasi anggarannya mencapai 28,13%.
  7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang telah terealisasi anggarannya mencapai 19,91%.

- Program Pembinaan Perpustakaan, anggaran yang terealisasi mencapai 1,10%, pada kegiatan:
  1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota realisasi anggaran sampai dengan tgl 30 April 2025 telah mencapai 18,99%.
  2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota realisasi anggaran sampai dengan tgl 30 April 2025 telah mencapai 0,45%

- Program Pengelolaan Arsip anggaran yang terealisasi mencapai 43,07 %, pada kegiatan:
  1. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota realisasi anggaran sampai dengan tgl 30 April 2025 telah mencapai 16,00%.
  2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota realisasi anggaran sampai dengan tgl 30 April 2025 telah mencapai 94,59%.
  3. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota realisasi anggaran sampai dengan tgl 30 April 2025 telah mencapai 9%.

- Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip, anggaran yang terealisasi mencapai

  0 %, pada kegiatan:

  1 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun, realisasi anggaran sampai dengan tgl 30 April 2025 telah mencapai 0%.

  2 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota, realisasi anggaran sampai dengan tgl 30 April 2025 telah mencapai 0 %.

c) Faktor-faktor penyebab perubahan anggaran yaitu:

Adanya efesiensi dan refocusing anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota PontianakTahun Anggaran 2025.

Tabel. 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan
Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan Triwulan Kedua Tahun Anggaran 2025
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kota Pontianak

Nama Perangkat Daerah: DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PONTIANAK

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Output)2024	Definisi Operasional	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024(%)		Unit Bidang SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	8			9			10			13			14=13/8*100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Unit/ Satuan	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
	Tujuan OPD : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Survey Pelayanan Publik	95	Sangat Baik	22.501.834.047	92,00	%	2.304.391.431		%	2.910.820.388	90,00	%	5.215.211.819	95	23,18	180,00	%	15.755.848.925	200,00	42,03	Kepala Dinas	
	Sasaran OPD: 1. Meningkatnya Pembudayaan Gemar Membaca dan Pembinaan Perpustakaan		Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	jumlah kunjungan ke perpustakaan paling sedikit 0,10 perkapita pertahun	85	%	22.270.786.547		%	2.206.349.331		%	2.825.298.288	85,00	%	2.206.349.331	100	9,91	170,00	%	12.363.408.587	200,00	33,85	Kepala Dinas	
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan adalah tingkat kepuasan terhadap pelayanan sekretariat terkait urusan kepegawaian, surat menyurat, perencanaaan, keuangan dan sarana prasarana	95	%	9.126.593.447	95,00	%	2.066.460.631		%	2.682.649.588	95,00	%	2.066.460.631	100	22,64	190,30	%	10.357.668.625	200,32	44,46	Sekretariat	Target Program 95 adalah hasil penilaian Bidang-Bidang.

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Output)2024	Definisi Operasional	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024(%)		Unit Bidang SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	8			9			10			13			14=13/8*100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Unit/ Satuan	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
1.1.		KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	29	dokumen	37.256.000	0,00	%	0		%	0	0,00	%	0,00	0,00	0,00	100	%	25.184.000	100,00	25,13	Sekretariat	
1.1.1		SubKegiatan 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	perhitungan dokumen rencana kerja yang berjumlah 10 dokumen	8	dokumen	24.774.000	1	dokumen	0		dokumen		1	dokumen	0	12,50	0,00	11	dokumen	8.967.000	45,83	20,76	Sekretariat	
1.1.2.		SubKegiatan 2.23.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	1	dokumen	3.000.000	0	dokumen	0				0	dokumen	0	0,00	0,00	1	dokumen	4.950.000	33,33	30,00	Sekretariat	
1.1.3.		2.23.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	1.750.000	0	dokumen	0				0	dokumen	0	0,00	0,00	1	dokumen	4.450.000	33,33	26,97	Sekretariat	
1.1.4.		SubKegiatan 2.23.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	perhitungan laporan IKM berjumlah 4 dokumen	19	Laporan	7.732.000	0	Laporan	0		dokumen		0	Laporan	0	0,00	0,00	13	laporan	6.817.000	68,42	28,40	Sekretariat	
1.2.		KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100	%	7.675.804.047	8,30	%	1.854.898.069	30,92	%	2.373.251.251	39,22	%	4.228.149.320	39,22	55,08	139	%	10.585.873.652	139,22	54,77	Sekretariat	
1.2.1.		SubKegiatan 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	pegawai ASN berjumlah 43 orang dan Non ASN berjumlah 8 orang	43	orang/ bulan	7.515.834.047	43	orang/ bulan	1.820.448.069	42	orang/ bulan	2.338.801.251	43	orang/ bulan	4.159.249.320	100	55,34	86	orang	10.326.813.652	200,00	54,85	Sekretariat	
1.2.2.		SubKegiatan 2.23.01.2.02.0003 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Homor PA, KPA, Pejabat Pengelola Keuangan, PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara Gaji	1	dokumen	156.720.000	1	dokumen	34.450.000		dokumen	34.450.000	1	dokumen	68.900.000	100,00	43,96	2	dokumen	251.760.000	200,00	53,67	Sekretariat	

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Output)2024	Definisi Operasional	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024(%)		Unit Bidang SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	8			9			10			13			14=13/8*100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Unit/ Satuan	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
1.2.3.		SubKegiatan 2.23.01.2.02.0004 Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan keuangan (LRA, LO, Neraca, LPE, CALK, Monev, Lap. Keu. Bulanan dan Sementara, Lap. Keu Akhir Tahun)	7	dokumen	3.250.000	7	dokumen	0			-	7	dokumen	0	100,00	0,00	14	dokumen	7.300.000	66,67	24,33	Sekretariat	
1.3.		KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	110.830.000	0	%	0		%	-	0,00	%	0,00	0,00	0,00	100	%	82.207.600	100,00	31,31	Sekretariat	
1.3.1.		SubKegiatan 2.23.01.2.05.0002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan baju untuk ASN dan Non ASN	2	paket	75.330.000	0	paket	0		paket	-	0	paket	0	0,00	0,00	6	paket	54.751.000	100,00	31,73	Sekretariat	
1.3.2.		SubKegiatan 2.23.01.2.05.0009 Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Biaya kontribusi kursus/ pelatihan untuk 2 orang tanpa transportasi	5	orang	35.500.000	0	orang	0		orang	0,00	0	orang	0	0,00	0,00	5	orang	27.456.600	33,33	30,51	Sekretariat	
1.4.		KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Persentase Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	428.920.400	2,70	%	59.382.055	23,66	%	86.469.430	26,36	%	145.851.485	26,36	34,00	126	%	597.142.843	126,36	81,75	Sekretariat	
1.4.1.		2.23.01.2.06.0001 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	penyediaan alat listrik (baterai, lampu, kabel dll)	1	paket	15.248.700	0	paket	0		paket	4.657.000	0	paket	4.657.000	0,00	30,54	1	paket	18.660.900	33,33	44,40	Sekretariat	
1.4.2.		SubKegiatan 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan ATK, kertas dan bahan komputer, spanduk	1	paket	144.442.200	1	paket	5.000.000		paket	10.540.975	1	paket	15.540.975	100,00	10,76	2	paket	123.192.975	66,67	81,58	Sekretariat	
1.4.3.		SubKegiatan 2.23.01.2.06.0003 Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan alat kebersihan	1	paket	19.150.900	0	paket	-		paket	320.000	0	paket	320.000	0,00	1,67	1	paket	20.672.500	33,33	25,84	Sekretariat	
1.4.4.		SubKegiatan 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan bahan logistik kantor	jumlah bahan paket logistik kantor yang disediakan	Penyediaan makanan dan minuman rapat dinas	1	paket	98.197.200	1	paket	17.760.000		paket	29.289.400	1	paket	47.049.400	100,00	47,91	2	paket	98.084.400	66,67	81,74	Sekretariat	

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Output)2024	Definisi Operasional	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024(%)		Unit Bidang SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	8			9			10			13			14=13/8*100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Unit/ Satuan	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
1.4.5.		SubKegiatan 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Penyediaan cetak dan fotocopy	1	paket	40.063.400	1	paket	20.597.000		paket	24.347.000	1	paket	44.944.000	100,00	112,18	2	paket	84.107.500	66,67	60,78	Sekretariat	
1.4.6.		SubKegiatan 2.23.01.2.06.0006 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Belanja langganan surat kabar dan majalah	1	dokumen	13.440.000	1	dokumen	2.580.000		paket	3.870.000	1	paket	6.450.000	100,00	47,99	2	paket	19.890.000	66,67	51,00	Sekretariat	
1.4.7.		SubKegiatan 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Belanja rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	6	laporan	98.378.000	1	laporan	13.445.055		laporan	13.445.055	1	laporan	26.890.110	16,67	27,33	10	paket	232.534.568	55,56	145,33	Sekretariat	
1.5.		KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	120.870.200	0	%	0,00	43	%	29.890.000	43,00	%	29890000,00	43,00	24,73	143	%	549.444.850	143,00	99,90	Sekretariat	Pengadaan yang dilaksanakan lebih dari target Rentsra/Renja 2024
1.5.1.		2.23.01.2.07.0001 Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terlaksananya Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan			-	0	unit			unit		0	unit	-		-	1	unit	308.710.000	0,00	0,00	Sekretariat	Penambahan subkegiatan Pagu Anggaran 2024 untuk pengadaan mobil dinas Kadis.
		2.23.01.2.07.0008 Pengadaan aset tak berwujud	jumlah aset tak berwujud yang diadakan				50.680.000			0						0		0,00							

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Output)2024	Definisi Operasional	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024(%)		Unit Bidang SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	8			9			10			13			14=13/8*100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Unit/ Satuan	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
1.5.2.		SubKegiatan 2.23.01.2.07.0010 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pembelian laptop, printer, scanner, AC, dll	56	unit	70.190.200	0	unit	0		unit	29.890.000	0	unit	29.890.000	0,00	42,58	56	unit	240.734.850	33,33	43,77	Sekretariat	
1.6.		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	524.732.800	8,0	%	109.068.707	28,13	%	147.607.107	36,13	%	256.675.814	36	48,92	118	%	813.102.968	117,95	51,64	Sekretariat	
1.6.1.		2.23.01.2.08.0001 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Belanja materai	1	laporan	10.000.000	1	laporan	3.000.000			3.000.000	1	laporan	6.000.000	100,00	60,00	2	laporan	10.000.000	200,00	277,78	Sekretariat	
1.6.2.		SubKegiatan 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Belanja tagihan listrik, air, telpon dan internet	5	laporan	188.371.920	1	laporan	33.550.227	1	laporan	48.729.387	2	laporan	82.279.614	40	43,68	5	laporan	244.860.984	125,00	33,77	Sekretariat	
1.6.3.		SubKegiatan 2.23.01.2.08.0003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Belanja jasa reparasi perlengkapan dan peralatan kantor	0	laporan	0	0	laporan	0				0	laporan	0	0,00	0,00	1	laporan	4.596.200	100,00	15,32	Sekretariat	
1.6.4.		SubKegiatan 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Belanja daya tahan tubuh, Pembayaran honor non ASN, pembayaran BPJS non ASN, honor operator SIM TPP	5	laporan	326.360.880	1	laporan	72.518.480		laporan	95.877.720	1	laporan	168.396.200	20	51,60	6	laporan	553.645.784	120,00	67,85	Sekretariat	

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Output)2024	Definisi Operasional	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024(%)		Unit Bidang SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	8			9			10			13			14=13/8*100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Unit/ Satuan	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
1.7.		KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100	%	228.180.000	46,00	%	43.111.800	19,91	%	45.431.800	65,91	%	88.543.600	66	38,80	166	%	387.362.300	165,91	51,40	Sekretariat	
1.7.1.		SubKegiatan 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Belanja servis dan ganti sparepart kendaraan dinas, bensin dan pembayaran pajak kendaraan roda 4 dan roda 2	5	unit	155.120.000	5	unit	25.551.800	5	unit	25.551.800	10	unit	51.103.600	200	32,94	15	unit	179.721.900	300,00	42,69	Sekretariat	
1.7.2.		SubKegiatan 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Belanja bahan bakar genset, isi ulang tabung pemadam kebakaran, pemeliharaan genset, AC, komputer PC, laptop dan printer	72	unit	73.060.000	34	unit	17.560.000		unit	19.880.000	34	unit	37.440.000	47	51,25	133	unit	110.065.000	184,72	56,19	Sekretariat	
1.7.3		SubKegiatan 2.23.01.2.09.0010 Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yangDipelihara/Di rehabilitasi	Pemeliharaan perpustakaan	3	unit	0	0	unit	0		unit		0	unit	0	-	-	0	unit	97.575.400	0,00	71,31	Sekretariat	
2		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Ketercukupan koleksi perpustakaan	Jumlah ketercukuoan koleksi perpustakaan	150	Judul	13.144.193.100	0	exemplar	139.888.700		Judul	142.648.700	0	eksemplar	139.888.700	0,00	1,06	150	judul	2.148.388.662	100,00	16,24	Bidang Pembinaan Perpustakaan	

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Output)2024	Definisi Operasional	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024(%)		Unit Bidang SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	8			9			10			13			14=13/8*100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Unit/ Satuan	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
			Ketercukupan tenaga perpustakaan	Jumlah ketercukupan tenaga perpustakaan yang berikan pelatihan	47, 50	%		64,25	%					64,25	%		135,25		101	%	0	171,29	#DIV/0!	Bidang Pembinaan Perpustakaan	
2.1.		KEGIATAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN	Persentase Pengelolaan perpustakaan tingkat kab/kota	Terlaksananya kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/ kota	100	%	536.654.000	18,30	%	83.240.000	18,99	%	86.000.000	37,29	%	169.240.000	37	31,54	137	%	874.838.062	137,29	58,32	Bidang Pembinaan Perpustakaan	
2.1.2.		SubKegiatan 2.23.02.201.0004. Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah Kab/Kota sesuai standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Kegiatan Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kab/kota	6	Perpustakaan	26.189.500	0	perpustakaan	-		perpustakaan	-	0	perpustakaan	0	-	-	6	perpustakaan		33,33	0,00	Bidang Pembinaan Perpustakaan	
2.1.1.		SubKegiatan 2.23.02.201.0011. Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/ kota	Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai Kewenangannya	Kegiatan peningkatan layanan perpustakaan (perpustakaan umum dan rumah baca), inovasi perpustakaan (SMS gateway, aplikasi perpustakaan) Stock opname buku perpustakaan	6	Perpustakaan	238.565.500	1	perpustakaan	17.660.000		perpustakaan	20.420.000	5	perpustakaan	38.080.000	83	15,96	11	perpustakaan	395.753.400	61,11	60,22	Bidang Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan Umum, mobil keliling, rumah baca akcaya, rumah baca alun kapuas.
2.1.3		SubKegiatan 2.23.02.201.0016. Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/ kota	jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/ kota	Kegiatan workshop petugas perpustakaan (peserta pengelola perpustakaan sekolah SD, SMP dan kelurahan, jumlah peserta 60 orang)	40	orang	106.119.000	100	orang	65.580.000		orang	65.580.000	100	orang	131.160.000	250	123,60	140	orang	243.503.162	116,67	162,34	Bidang Pembinaan Perpustakaan	

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Output)2024	Definisi Operasional	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024(%)		Unit Bidang SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	8			9			10			13			14=13/8*100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Unit/ Satuan	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
2.1.4.		SubKegiatan 2.23.02.201.0018. Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi	Pengadaan buku/ bahan pustaka, pengadaan e-book, majalah koleksi perpustakaan, koleksi deposit (surat kabar)	500	Eksemplar	165.780.000	0	eksemplar	-		eksemplar	-	0	eksemplar	0	0,00	0,00	300	exemplar	200.084.000	33,33	69,29	Bidang Pembinaan Perpustakaan	
2.2.		KEGIATAN PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/ Kota 2021.	Terlaksananya kegiatan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/ kota	100	%	12.607.539.100	312,00	%	56.648.700	0,45	%	56.648.700	312,45	%	113.297.400	312	0,90	412	%	1.273.550.600	412,45	10,86	Bidang Pembinaan Perpustakaan	
		SubKegiatan 2.23.02.202.0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	Seleksi Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6	Orang	150.820.000	0,00	orang	0			0	0	orang	0,00	0,00	0,00							
		SubKegiatan 2.23.02.202.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Kegiatan peningkatan keterampilan literasi masyarakat dengan pendekatan yang inklusif, partisipatif, dan berbasis kebutuhan komunitas yang memanfaatkan perpustakaan atau ruang publik sebagai pusat pembelajaran yang tidak hanya menyediakan akses terhadap bahan bacaan tetapi juga mendukung pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan edukatif, pelatihan	6	Perpustakaan	123.355.200	1	perpustakaan	30.018.700			30.018.700	5	perpustakaan	60.037.400	83,33	48,67							

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Output)2024	Definisi Operasional	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024(%)		Unit Bidang SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	8			9			10			13			14=13/8*100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Unit/ Satuan	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
				keterampilan, serta fasilitasi akses informasi yang relevan. Dalam konteks operasional, kegiatan ini mencakup: Akses Informasi yang Merata – Menyediakan bahan bacaan, pelatihan, dan teknologi bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti difabel, perempuan, dan masyarakat kurang mampu. Pemberdayaan Masyarakat – Mengembangkan keterampilan praktis (seperti wirausaha, keterampilan digital, dan literasi keuangan) yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kolaborasi dengan Berbagai Pihak – Melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, serta sektor swasta untuk memperkuat ekosistem literasi yang berkelanjutan. Pendekatan Berbasis Kebutuhan Lokal – Menyesuaikan																						

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Output)2024	Definisi Operasional	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024(%)		Unit Bidang SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	8			9			10			13			14=13/8*100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Unit/ Satuan	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
				program literasi dengan kebutuhan spesifik masyarakat setempat agar lebih relevan dan bermanfaat. Inklusi dan Kesetaraan – Memastikan bahwa semua anggota masyarakat, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan untuk mengakses dan berpartisipasi dalam kegiatan literasi. Dengan demikian, kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial tidak hanya berfokus pada kemampuan membaca dan menulis tetapi juga pada peningkatan kapasitas individu dan komunitas untuk mengakses serta memanfaatkan informasi guna meningkatkan kualitas hidup mereka.																							
2.2.2.		SubKegiatan 2.23.02.202.0008 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun diTempat- Tempat Umum yang MenjadiKewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Sarana Perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah Kab/Kota	1	Perpustakaan	11.971.000.000	1	perpustakaan	11.555.000			11.555.000	1	perpustakaan	23.110.000	100,00	0,19	2	perpustakaan		200,00	0,00	Bidang Pembinaan Perpustakaan	

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Output)2024	Definisi Operasional	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024(%)		Unit Bidang SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	8			9			10			13			14=13/8*100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Unit/ Satuan	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
2.2.3.		SubKegiatan 2.23.02.202.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat kabupaten/ kota	Pelaksanaan pemberian penghargaan gerakan buaya gemar membaca	6	orang	150.636.700	0	orang	-		orang	-	0	orang	0,00	0,00	0,00	6	orang	153.338.700	33,33	37,17	Bidang Pembinaan Perpustakaan	
2.2.1.		SubKegiatan 2.23.02.202.0010 Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Pameran dirubah ke kegiatan sosialisasi, literasi sekolah, lomba literasi antar sekolah, mobil keliling	6	lokus	211.727.200	76	lokus	15.075.000		lokus	15.075.000	76	lokus	30.150.000	1266,67	14,24	82	Lokus	492.027.400	1366,67	155,73	Bidang Pembinaan Perpustakaan	
	2. Meningkatnya Pengelolaan Arsip Daerah		Indeks kearsipan	(60% x nilai pengawasan eksternal) + (40% x nilai pengawasan internal)	70	CC (Cukup)	231.047.500		indeks	98.042.100			85.522.100	84	indeks	162.944.200	120	70,52	168	indeks	546.522.050	240,00	56,92	Kepala Dinas	Tahun 2024 Kota Pontianak mendapat nilai Indeks Kearsipan A (Memuaskan) dg nilai 84
3		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip	Terlaksananya pengelolaan ketersediaan arsip	75	%	213.034.500	78,56	%	98.042.100		indeks	85.522.100	74,00	indeks	162.944.200	99	76,49	148	%	531.862.050	194,74	60,70	Bidang Kearsipan	
3.1.		KEGIATAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/kota	Terlaksananya kegiatan pengelolaan arsip dinamis daerah kabupaten/ kota	34	%	142.156.100	57,14	%	33.140.000	16,06	%	20.620.000	73,20	%	33.140.000	215	23,31	105	%	325.508.676	105,20	60,93	Bidang Kearsipan	
3.1.1.		SubKegiatan 2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	Kegiatan workshop penerapan aplikasi Srikandi (peserta 60 orang), pembinaan kearsipan (monev), sosialisasi penataan Kearsipan ormas/ parpol, sosialisasi pengelolaan arsip inaktif dan arsip statis OPD (30 OPD) Gerakan Nasional Standar Arsip Aktif	21	berkas	4.395.000	0	berkas	0,00		berkas	-	0	berkas	0,00	0,00	0,00	20	berkas	131.046.126	32,26	51,39	Bidang Kearsipan	

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Output)2024	Definisi Operasional	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024(%)		Unit Bidang SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	8			9			10			13			14=13/8*100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Unit/ Satuan	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
3.1.2.		SubKegiatan 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	Kegiatan penyusutan arsip untuk arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	21	berkas	5.630.000	0	berkas	0,00				0	berkas	0	0,00	-	20	berkas	109.245.350	32,26	110,13	Bidang Kearsipan	
3.1.3.		SubKegiatan 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	jumlah laporan hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/ kota	Kegiatan penyusutan arsip untuk arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10	laporan	52.871.600	1	laporam	1.020.000		laporan	5.820.000	1	laporan	6.840.000	10,00	12,94	11	Lporam		36,67	0,00	Bidang Kearsipan	
		SubKegiatan 2.24.02.2.01.0010 Pembinaan Kearsipan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	Kegiatan pembinaan kepada OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	32	Instansi	79.259.500	15	instansi	11.500.000			14.800.000	15	instansi	26.300.000	46,88	33,18							
3.2.		KEGIATAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/kota	Terlaksananya pengelolaan arsip statis daerah kabupaten/ kota	100	%	69.292.400	179	%	64.902.100	94,59	%	64.902.100	273,14	%	129.804.200	273	187,33	346		203.953.374	346,14	61,80	Bidang Kearsipan	
3.2.1.		SubKegiatan 2.24.02.2.02.0002 Akusisi, pengelolaan prevensi dan akses arsip statis	jumlah arsip statis yang dilakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	Kegiatan fumigasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5000	arsip	69.292.400	9124	arsip	64.902.100		arsip	64.902.100	9124	arsip	129.804.200	182	187,33	14124		203.953.374	94,16	61,80	Bidang Kearsipan	
3.3.		KEGIATAN PENGELOLAAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/ KOTA	Persentase pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/kota melalui JIKN	Terlaksananya pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kabupaten/ kota melalui JIKN	100	%	1.586.000	0	%	0,00	0	%	0	0,00	%	0	0,00	0,00	100		2.400.000	100,00	20,00	Bidang Kearsipan	
3.3.1.		SubKegiatan 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/ kota melalui JKIN	jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/ kota melalui JIKN	Kegiatan layanan JIKN	10	pengguna	1.586.000	0	pengguna	0		pengguna	0,00	0	pengguna	0,00	0,00	0,00	10	%	2.400.000	33,33	20,00	Bidang Kearsipan	

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Output)2024	Definisi Operasional	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024(%)		Unit Bidang SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	8			9			10			13			14=13/8*100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Unit/ Satuan	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
4		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban	Terlaksananya perlindungan dan penyelamatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	60	%	18.013.000	0	%	0,00		%	0	50	%	0,00	83	-	100	%	3.750.000	142,86	4,46	Bidang Kearsipan	
4.1.		KEGIATAN PEMUSNAHAN ARSIP DI LINGKUNGAN PEMDA KAB/KOTA YANG MEMILIKI RETENSI DIBAWAH 10 TAHUN	Persentase Arsip yg dimusnahkan dilingkungan Pemda Kab/Kota yang memiliki Retensi dibawah 10 tahun	Terlaksananya kegiatan arsip perangkat daerah yang dimusnahkan	100	%	3.996.000	0	%	0,00		%	0	0,00	%	0	0,00	0,00	82	%	5.360.000	82,33	16,24	Bidang Kearsipan	
4.1.2.		SubKegiatan 2.24.03.201.0003 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun	jumlah arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun yang dimusnahkan	Kegiatan Pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun (yang sudah dilakukan penilaian dan sudah ada daftar arsip usul musnah)	0	0	0	0	arsip	0		berkas	0	0	berkas	0,00	0,00	0,00	6	berkas	2.196.400	33,33	14,64	Bidang Kearsipan	
4.1.1.		SubKegiatan 2.24.03.2.01.0004 Penilaian. Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) Tahun.	jumlah arsip yang dilakukan penilaian, penetapan, dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun	Kegiatan Penyusutan Arsip yang dimulai dari Penilaian berdasarkan JRA, lalu pembuatan daftar arsip usul musnah dan proses Penetapan Arsip usul musnah	300	arsip	3.996.000	0	arsip	0,00		arsip	0	0	arsip	0,00	0,00	0,00	300	arsip	3.163.600	33,33	17,58	Bidang Kearsipan	
4.2.		KEGIATAN AUTENTIKASI ARSIP STATIS DAN ARSIP HASIL ALIH MEDIA KAB/KOTA	Persentase Daftar arsip hasil penilaian dan penetapan arsip statis dan arsip hasil alih media Kab/ Kota	Terlaksananya kegiatan arsip alih media dan arsip yang telah diimput	100	%	5.123.000	0	%	0,00		%	0	0,00	%	0	0,00	0,00	100	%	3.750.000	100,00	19,23	Bidang Kearsipan	
4.2.1.		SubKegiatan 2.24.03.2.04.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip SesuaiPersyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Kegiatan Autentisitas terhadap Arsip statis (sub kegiatan baru 2024)	1	arsip	2.549.000	0	arsip	0,00				0	arsip	0	0,00	0,00	1	arsip		33,33	0,00	Bidang Kearsipan	

No	Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) /Subkegiatan (Output)2024	Definisi Operasional	Target Kinerja Dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024(%)		Unit Bidang SKPD Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	8			9			10			13			14=13/8*100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Unit/ Satuan	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp		
4.2.2.		SubKegiatan 2.24.03.2.04.0002 Penilaian dan penetapan hasil ahli media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	jumlah daftar arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih media sesuai persyaratan peminjaman keabsahan arsip	Kegiatan Alih Media	1	arsip	2.574.000	0	arsip	0,00		arsip		0	arsip	0,00	0,00	0,00	1	arsip	1.770.000	33,33	13,11	Bidang Kearsipan	
4.3.		KEGIATAN PENCARIAN ARSIP STATIS KABUPATEN/KOTA YANG DINYATAKAN HILANG	Persentase pencarian Arsip Statis Kab/kota yang dinyatakan hilang	Terlaksananya pencarian Arsip Statis Kab/Kota yang dinyatakan hilang	100	%	8.894.000	0	%	0				0,00	%	1.850.000	0,00	20,80	100	%		100,00	0,00	Bidang Kearsipan	
4.3.1.		SubKegiatan 2.24.03.2.05.0001 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autenfikasi Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	0	arsip	-		arsip					0	arsip		0,00	0,00	1	arsip		33,33	0,00	Bidang Kearsipan	
4.3.2.		SubKegiatan 2.24.03.2.05.0002 Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yanng Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Terlaksananya Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yanng Dinyatakan Hilang	0	arsip	-		arsip				0	0	arsip		0,00	0,00	1	arsip		33,33	0,00	Bidang Kearsipan	
4.3.3.		SubKegiatan 2.24.03.2.05.0003 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Terlaksananya Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	1	arsip	8.894.000	0	arsip	0			0	0	arsip	1.850.000	0,00	20,80	1	arsip		33,33	0,00	Bidang Kearsipan	
					95		22.501.834.047			2.304.391.431	13,13	%	2.910.820.388			2.369.293.531			162,77		13.041.669.337	16502 %	4046,63%		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak melaksanakan tugas dan fungsinya terdiri atas urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan yang digunakan sebagai analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah sedangkan untuk Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah merujuk pada IKK Bidang Perpustakaan dan Kearsipan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Untuk lebih lengkapnya hasil analisis capaian kinerja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak

NO.	Indikator	SPM/ standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	**Indeks Kepuasan Masyarakat**	-	-	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	**Sangat Baik**	
	Meningkatnya pembudayaan gemar membaca dan pembinaan perpustakaan; Indikator: Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	-	√	**82%**	**85%**	**85%**	**85%**	**85%**	**94%**	**85%**	**85%**	
	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah. Indikator: Indeks Kearsipan	-	√	**CC (Cukup)**	**CC (Cukup)**	**CC (Cukup)**	**B (Baik)**	**BB (Sangat Baik)**	**84,78 A (Memuaskan)**	**CC (Cukup)**	**B (Baik)**	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan tahun Anggaran 2025 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak dijabarkan dalam Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	*2*					*3*	*4*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				21.270.803.000,00	22.501.834.047,00	22.161.909.960,00							10.196.858.150,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				21.270.803.000,00	22.501.834.047,00	22.161.909.960,00							10.196.858.150,00	
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				21.002.768.400,00	22.270.786.547,00	21.945.929.960,00							9.626.258.150,00	
1	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen	95 Persen	8.849.520.500,00	9.126.593.447,00	8.998.035.000,00							8.510.938.750,00	
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	100 persen	40.184.000,00	37.256.000,00	37.256.000,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak		33.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	23.967.000,00	24.774.000,00	23.859.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			14.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.950.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			5.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.450.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			5.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19 Laporan	19 Laporan	6.817.000,00	7.732.000,00	4.987.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			8.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
													Kel/Desa							
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	7.451.983.000,00	7.675.804.047,00	7.675.804.047,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak		6.489.493.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	50 Orang/bulan	7.255.803.000,00	7.515.834.047,00	7.515.835.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			6.323.133.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	188.880.000,00	156.720.000,00	149.170.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			156.360.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	7.300.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	100 persen	91.640.000,00	110.830.000,00	110.830.000,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak		87.510.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	6 Paket	56.140.000,00	75.330.000,00	74.450.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			57.510.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	50 Orang	35.500.000,00	35.500.000,00	27.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	100 Persen	306.445.400,00	428.920.400,00	428.920.400,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak		243.476.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.004.200,00	15.248.700,00	15.248.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			14.008.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	72.984.200,00	144.442.200,00	149.442.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			50.339.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.396.800,00	19.150.900,00	19.150.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	53.235.000,00	98.197.200,00	94.537.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	39.164.200,00	40.063.400,00	40.063.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			46.128.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	13.440.000,00	13.440.000,00	15.480.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			13.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan	93.221.000,00	98.378.000,00	43.086.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	23	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	100 Persen	44.530.000,00	120.870.200,00	120.870.200,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak		250.680.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
							Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-	0 Unit	0,00	50.680.000,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			50.680.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	56 Unit	19 Unit	44.530.000,00	70.190.200,00	65.293.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	664.048.100,00	524.732.800,00	524.732.800,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak		596.384.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	254.050.700,00	188.371.920,00	283.746.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	399.997.400,00	326.360.880,00	276.542.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			324.384.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen	250.690.000,00	228.180.000,00	228.180.000,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak		809.995.150,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	5 Unit	177.630.000,00	155.120.000,00	108.584.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			140.320.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	104 Unit	73.060.000,00	73.060.000,00	73.060.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			652.973.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			16.701.650,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Ketercukupan tenaga perpustakaan Ketercukupan koleksi Perpustakaan	300 47,5 Eksemplar Persen	47,5 300 Persen Eksemplar	12.153.247.900,00	13.144.193.100,00	12.947.894.960,00							1.115.319.400,00	
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Kabupaten/ Kota	100 persen	100 persen	486.736.900,00	536.654.000,00	536.654.000,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak		500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														
							Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	6 Perpustakaan	6 Perpustakaan	27.997.500,00	26.189.500,00	21.839.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			134.680.600,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	6 Perpustakaan	6 Perpustakaan 25 perpus	177.494.400,00	238.565.500,00	193.908.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			219.069.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	79.515.000,00	106.119.000,00	65.580.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														
							Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	300 Eksemplar	300 Eksemplar	201.730.000,00	165.780.000,00	109.420.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			96.250.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100 persen	100 persen	11.666.511.000,00	12.607.539.100,00	12.607.539.100,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-		615.319.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	6 Orang	0 Orang	144.680.000,00	150.820.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			160.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
							Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	6 Perpustakaan	6 Perpustakaan	120.372.000,00	123.355.200,00	133.115.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2	23	02	2.02	0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
							Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	11.000.000.000,00	11.971.000.000,00	12.060.909.560,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Perpustakaan	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	6 Orang	6 Orang	159.913.000,00	150.636.700,00	146.570.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat														
							Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	6 Lokus	6 Lokus	241.546.000,00	211.727.200,00	216.552.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			105.319.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				268.034.600,00	231.047.500,00	215.980.000,00							570.600.000,00	
3	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip	75 Persentase	75 Persentase	253.373.800,00	213.034.500,00	201.004.500,00							542.600.000,00	
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis pada Perangkat Daerah, Kelurahan dan Ormas	34 persen	34 persen	171.524.400,00	142.156.100,00	142.156.100,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak		428.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis														
							Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	21 Berkas	21 Berkas	4.548.000,00	4.395.000,00	4.395.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			85.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis														
							Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	21 Berkas	21 Berkas	4.548.000,00	5.630.000,00	3.190.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			33.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	*2*					*3*	*4*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Laporan	10 Laporan	42.355.300,00	52.871.600,00	52.871.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.01	0010	Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota														
							Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	32 Instansi	32 Instansi	120.073.100,00	79.259.500,00	70.349.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/ Kota	100 Persen	100 Persen	79.449.400,00	69.292.400,00	69.292.400,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak		110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis														
							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	5000 Arsip	5000 Arsip	79.449.400,00	69.292.400,00	68.612.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			110.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Simpul JIKN Kota Pontianak	100 Persen	100 Persen	2.400.000,00	1.586.000,00	1.586.000,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak		4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN														
							Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	10 Pengguna	10 Pengguna	2.400.000,00	1.586.000,00	1.586.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			4.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
4	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	60 Persen	60 Persen 100	14.660.800,00	18.013.000,00	14.975.500,00							28.000.000,00	
	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di	Persentase Arsip yg dimusnahkan dilingkungan Pemda Kab/Kota yang memiliki Retensi dibawah 10	100 Persen	100 Persen	5.360.800,00	3.996.000,00	3.996.000,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak		11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	tahun													
	2	24	03	2.01	0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun														
							Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	6 Berkas	0 Berkas	3.163.600,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun														
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	300 Arsip	300 Arsip	2.197.200,00	3.996.000,00	3.996.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase Daftar arsip hasil penilaian dan penetapan arsip statis dan arsip hasil alih media Kab/ Kota	100 Persen	100 Persen	3.750.000,00	5.123.000,00	5.123.000,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak		6.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip														
							Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	1 Arsip	1 Arsip	1.980.000,00	2.549.000,00	1.787.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip														
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1 Arsip	1 Arsip	1.770.000,00	2.574.000,00	1.787.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			4.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Persentase pencarian Arsip Statis Kab/kota yang dinyatakan hilang	100 Persen	100 Persen	5.550.000,00	8.894.000,00	8.894.000,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak		10.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.05	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang														
							Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	1 Arsip	0 Arsip	1.850.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			3.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	*2*					*3*	*4*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	2	24	03	2.05	0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang														
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	1 Arsip	0 Arsip	1.850.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			3.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2	24	03	2.05	0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)														
							Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	1 Arsip	1 Arsip	1.850.000,00	8.894.000,00	7.405.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			3.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
									J U M L A H	**21.270.803.000,00**	**22.501.834.047,00**	**22.161.909.960,00**							**10.196.858.150,00**	

BAB IV PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak selama 1 (satu) tahun. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun 2025 disusun mempedomani dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun 2025 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan serta perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Kelurahan hingga Musrenbang tingkat Kota.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik sebagai dasar pelaksanaan yang merupakan kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan proses selanjutnya. Perubahan Renja Disperpusip Kota Pontianak Tahun 2025 merupakan efesiensi dan efektivitas anggaran dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian optimalisasi kinerja perangkat daerah.

c. Rencana Tindak lanjut

Perubahan Dokumen Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Tahun 2025 pada dasarnya merupakan upaya pembangunan yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimana yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pontianak, 26 Mei 2025

Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kota Pontianak,

Hj. RENDRAYANI, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780624 199703 2 004

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
SEKRETARIAT DAERAH

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2025 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari 9 (sembilan) bagian yang ada di lingkup Sekretariat Daerah Kota Pontianak.

Usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak. Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2025 ini, diharapkan apa yang telah dituangkan dapat direalisasikan oleh masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pontianak dengan optimal.

Pontianak, Juni 2025

DAFTAR ISI

		HAL
BAB I	**PENDAHULUAN**	
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Landasan Hukum	I-1
1.3	Maksud dan Tujuan	I-4
1.4	Sistematika Penulisan	I-4
BAB II	**EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025**	II-1
BAB III	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**	III-1
BAB V	**PENUTUP**	IV-1

DAFTAR TABEL

TABEL	JUDUL TABEL	
BAB II	Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan triwulan I Tahun 2025	II-2
BAB III	Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2025	III-8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Sekretariat Daerah Kota Pontianak berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024.

Untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik, dilaksanakan melalui pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Proses penyusunan perubahan renja merupakan penjabaran dari Renstra Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 tahun, pada triwulan ke 4 (empat) yang memuat tentang kebijakan , program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Pontianak dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
17. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
19. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 125).
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).

21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 37).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 1190).
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan indikator dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan dokumen renja Perangkat Daerah Tahun 2025 serta renstra Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang dalam kurun waktu Januari-Mei 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2025, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Analisis Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak tahun 2025 didasarkan pada Renstra 2024-2026 dimana indikator program dan target renstra Perangkat Daerah telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Pontianak.

Sampai dengan triwulan I penyerapan anggaran Sekretariat Daerah Kota Pontianak sebesar 17.07% masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai, sedangkan target kinerja sampai dengan Triwulan I sebesar 36,99%, ini disebabkan adanya beberapa kegiatan yang pelaksanaan kegiatannya pada triwulan II, III dan Triwulan IV, sehingga target kinerja yang ditetapkan untuk setahun belum tercapai, walaupun pencapaian target kinerja tersebut sudah lebih dari 30% di triwulan I ini.

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Pontianak sampai dengan triwulan I Tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan triwulan I Tahun 2025

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Kinerja Pada Triwulan III			Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/8x100		17	18
1	2				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp		
		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																																				
	Tujuan PD: 1. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik		**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Pontianak dari Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)**	**Sangat Baik**	**Predikat**	**161.454.675.850**	**Sangat Baik**	**Predikat**	**58.121.229.114**	**Sangat Baik**	**Predikat**	**59.872.063.683**		**Predikat**	**10.294.739.577**		**Predikat**	**-**		**Predikat**	**-**		**Predikat**			**Predikat**	**10.294.739.577**	**Sangat Baik**	**17,19**	**Sangat Baik**	**Predikat**	**68.415.968.691**		**42,37**	**WALIKOTA PONTIANAK**	**Nilai IKM 90,197**
	Sasaran PD : 1. 1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perangkat		**Nilai rata-rata IKM Perangkat Daerah se Kota Pontianak**	**Nilai rata-rata IKM Perangkat Daerah se Kota Pontianak dari Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)**	**89,00**	**Point**	**148.702.030.755**	**90,197**	**Point**	**54.711.967.020**	**88,9**	**Point**	**55.490.680.368**		**Point**	**9.945.988.362**		**Point**	**-**		**Point**	**-**		**Point**			**Point**	**9.945.988.362**	**-**	**17,92**	**90,197**	**Point**	**64.657.955.382**	**101,345**	**43,48**	**SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK**	
1		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Nilai IKM Sekretariat Daerah**	**Hasil Survey kepuasaan Sekretariat Daerah**	**98,7**	**Nilai**	**10.132.012.649**	**98,48**	**Nilai**	**4.142.264.294**	**98,6**	**Nilai**	**4.320.878.283**		**Nilai**	**416.736.861**		**Nilai**	**0**		**Nilai**	**0**		**Nilai**	**0**		**Nilai**	**416.736.861**	**-**	**9,64**	**98,48**	**Nilai**	**4.559.001.155**	**99,7771**	**45,00**	**ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**	
1.1.		**Kegiatan Penataan Organisasi**	**Persentase capaian penataan organisasi**	**∑ Output Sub kegiatan**	**100,00**	**%**	**3.747.629.525**	**100,00**	**%**	**1.335.527.774**	**100,00**	**%**	**1.182.543.175**	**11,111**	**%**	**124.287.790**	**0**	**%**	**0**	**0**	**%**	**0**	**0**	**%**	**0**	**11,11**	**%**	**124.287.790**	**11,11**	**10,51**	**111,11**	**%**	**1.459.815.564**	**111,111**	**38,95**	**BAGIAN ORGANISASI**	
1.1.1		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	15	Dok	1.996.756.150	4	Dok	782.769.898	4	Dok	632.252.050		Dok	75.117.790										0	Dok	75.117.790	0,00	11,88	4	Dok	857.887.688	26,67	42,96	SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	TW I dokumen kelembagaan masih dalam proses penyusunan
1.1.2		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12	Laporan	1.535.804.800	4	Laporan	501.593.576	4	Laporan	478.601.600	1	Laporan	49.170.000										1	Laporan	49.170.000	25,00	10,27	5	Laporan	550.763.576	41,67	35,86	SUB BAGIAN PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	1 dokumen Perwa Pakaian Kerja yg sudah ada
1.1.3		Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3	Dok	215.068.575	1	Dok	51.164.300	1	Dok	71.689.525		Dok											0	Dok	0	0,00	0,00	1	Dok	51.164.300	33,33	23,79	SUB BAGIAN PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	
1.2		**Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**persentase jumlah fasilitasi kegiatan kepala daerah**	**(Jumlah realisasi kegiatan yang difasilitasi dibagi Jumlah target kegiatan) x 100**	**100,00**	**%**	6.384.383.124	75,00	**%**	2.806.736.520	**100,00**	**%**	3.138.335.108	**17,25**	**%**	292.449.071		**%**	0		**%**	0		**%**	0	17,25	**%**	292.449.071	17,25	9,32	92,25	**%**	1.761.583.131	**92,25**	**27,59**	**BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN**	
			persentase jumlah publikasi kegiatan kepala daerah	**(Jumlah realisasi kegiatan yang dipublikasikan dibagi Jumlah target kegiatan) x 100**	**100,00**	**%**		93,33			**100,00**	**%**		**23,33**												23,33			23,33		116,67			**116,67**			
1.2.1		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	Laporan	1.595.857.095	4	Laporan	600.205.015	4	Laporan	631.952.365	1	Laporan	82.627.971										1	Laporan	82.627.971	25,00	13,08	5	Laporan	682.832.986	41,67	42,79	SUB BAGIAN PROTOKOL	

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Kinerja Pada Triwulan III			Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
1	2				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp		
1.2.2		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	9	Laporan	2.397.803.829	3	Laporan	917.644.845	3	Laporan	1.062.567.943	1	Laporan	161.105.300										1	Laporan	161.105.300	33,33	15,16	4	Laporan	1.078.750.145	44,44	44,99	SUB BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
1.2.3		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	Laporan	2.390.722.200	4	Laporan	1.288.886.660	4	Laporan	1.443.814.800	1	Laporan	48.715.800										1	Laporan	48.715.800	25,00	3,37	5	Laporan	1.337.602.460	41,67	55,95	SUB BAGIAN PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN	
2		**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase implementasi kebijakan Hukum dan kesra**	**(persentase penyusunan produk hukum daerah + persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang difasilitasi) / 2**	**100**	**%**	**30.961.420.820**	105,07	**%**	**11.868.298.465**	**100**	**%**	**10.202.408.590**	**40,105**	**%**	**2.185.734.704**	**0,00**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**-**	**0**	**%**		40,11	**%**	**2.185.734.704**	**40,11**	**21,42**	**145,175**	**%**	**14.054.033.169**	**145,175**	**45,39**	**ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	
2.1		**Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**persentase organisasi/lembaga sosial masyarakat yang difasilitasi**	**(Jumlah organisasi/lembaga sosial masyarakat yang difasilitasi dibagi Jumlah organisasi/lembaga sosial masyarakat yang mengajukan permohonan fasilitasi) x 100**	100	%	**27.089.553.700**	100,00	%	**10.594.086.362**	100	%	**8.835.725.350**	**22,22**	%	**1.987.863.359**	**0,00**	%	**-**	**0,00**	%	**-**	**0,00**	%	,	22,22	%	**1.987.863.359**	**22,22**	**22,50**	**122,22**	%	**12.581.949.721**	122,222	46,45	**BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	
2.1.1		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	30	Dok	19.126.039.900	10	Dok	6.335.000.162	10	Dok	6.906.468.700	1	Dok	957.708.959										1	Dok	957.708.959	10	13,87	11,00	Dok	7.292.709.121	36,6667	38,13	SUB BAGIAN BINA MENTAL SPIRITUAL	TW 1 Pemberian Bantuan Jasa Penanganan Sosial Guru Ngaji, Pemberian Hibah dilakukan pada TW 2
2.1.2		Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerta Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Mas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Mas	6	Dok	2.037.744.600	2	Dok	578.416.800	3	Dok	731.252.200	1	Dok	487.371.000										1	Dok	487.371.000	33,33333	66,65	3,00	Dok	1.065.787.800	50	52,30	SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN MASYARAKAT	TW 1 Pemberian Bantuan Jasa Penanganan Sosial Petugas Fardhu Kifayah

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Kinerja Pada Triwulan III			Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
1	2				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp		
2.1.3		Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerta Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	18	Dok	5.925.769.200	6	Dok	3.680.669.400	5	Dok	1.198.004.450	**2**	Dok	542.783.400									2	Dok	542.783.400	40,00	45,31	8,00	Dok	4.223.452.800	44,44	71,27	SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN MASYARAKAT	TW 1 Pemberian Bantuan Jasa Penanganan Sosial Guru MDT dan Hibah untuk Dharma Wanita
2.2		**Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**persentase penyusunan produk hukum daerah**	**(Jumlah realisasi penyusunan produk hukum daerah dibagi jumlah target penyusunan produk**	**100,00**	**%**	**3.871.867.120**	**110,14**	**%**	**1.274.212.103**	**100**	**%**	**1.366.683.240**	**57,99**	**%**	**197.871.345**	**0,00**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**0**	**57,99**	**%**	**197.871.345**	**57,99**	**14,48**	**168,13**	**%**	**1.157.439.323**	**168,13**	**29,89**	**BAGIAN HUKUM**	
2.2.1		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	2340	Dok	1.512.609.300	890	Dok	518.241.205	780	Dok	542.869.300	445	Dok	99.371.845										445	Dok	99.371.845	57,05	18,30	1.335	Dok	617.613.050	57,05	40,83	SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	
2.2.2		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	15	Kasus	1.504.685.200	8	Kasus	475.096.773	5	Kasus	510.303.400		Kasus	64.729.500										0	Kasus	64.729.500	0,00	12,68	8	Kasus	539.826.273	53,33	35,88	SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM	
2.2.3		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	170	Dok	854.572.620	123	Dok	280.874.125	60	Dok	313.510.540	45	Dok	33.770.000										45	Dok	33.770.000	75,00	10,77	168	Dok	314.644.125	98,82	36,82	SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI	
3		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariat**	**Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan Kesekretariatan diperoleh berdasarkan hasil survey dari bagian bagian**	**95**	**%**	**107.608.597.286**	**93,04**	**%**	**38.701.404.261**	**95**	**%**	**40.967.393.495**		**%**	**7.343.516.797**		**%**	**-**		**%**	**-**		**%**	**-**	**93,04**	**%**	**7.343.516.797**	**93,04**	17,93	**93,04**	**%**	**46.044.921.058**	**97,9368**		**ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**	
3.1		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**Sigma output sub keg**	**100**	**%**	**366.904.200**	**100,00**	**%**	**112.054.000**	**100**	**%**	**137.301.400**	**42,11**	**%**	**9.000.000**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**42,11**	**%**	**9.000.000**	**42,11**	6,55	**142,11**	**%**	**121.054.000**	**142,11**	**32,99**	**BAGIAN UMUM**	
3.1.1		Penyusunan Dokumen Perancanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	dokumen	70.157.400	5	dokumen	22.593.500	5	dokumen	38.385.800	2	dokumen	2.700.000										2	dokumen	2.700.000	40,00	7,03	7	dokumen	25.293.500	46,67	36,05	SUB BAGIAN KEUANGAN	

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Kinerja Pada Triwulan III			Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/8x100		17	18
1	2				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp		
3.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	dokumen	90.000.000	2	dokumen	26.498.000	2	dokumen	30.000.000	2	dokumen	2.700.000										2	dokumen	2.700.000	100,00	9,00	4	dokumen	29.198.000	66,67	0,00	SUB BAGIAN KEUANGAN	
3.1.3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	dokumen	72.461.700	2	dokumen	19.178.000	2	dokumen	24.153.900		dokumen											0	dokumen	0	0,00	-	2	dokumen	19.178.000	33,33	26,47	SUB BAGIAN KEUANGAN	
3.1.4		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	30	Laporan	134.285.100	10	Laporan	43.784.500	10	Laporan	44.761.700	4	Laporan	3.600.000										4	Laporan	3.600.000	40,00	8,04	14	Laporan	47.384.500	46,67	35,29	SUB BAGIAN KEUANGAN	
3.2		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat**	**Sigma output sub keg**	**100**	**%**	62.138.022.483	100,00	**%**	20.290.285.278	**100**	**%**	22.846.117.739	25,00	**%**	4.754.251.417	0,00	**%**	0	0,00	**%**	0	0,00	**%**	0	25,00	**%**	4.754.251.417	25,00	20,81	125,00	**%**	25.044.536.695	125,00	40,30	BAGIAN UMUM	
3.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	426	Orang/bulan	57.267.113.000	131	Orang/bulan	19.026.292.978	142	Orang/bulan	21.231.889.000	118	Orang/bulan	4.497.277.017										118	Orang/bulan	4.497.277.017	83,10	21,18	249	Orang/bulan	23.523.569.995	58,45	41,08	SUB BAGIAN KEUANGAN	
3.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	dokumen	4.775.523.583	12	dokumen	1.238.836.300	12	dokumen	1.582.433.439	3	dokumen	254.274.400										3	dokumen	254.274.400	25,00	16,07	15	dokumen	1.493.110.700	41,67	31,27	SUB BAGIAN KEUANGAN	
3.2.3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36	dokumen	95.385.900	12	dokumen	25.156.000	12	dokumen	31.795.300	3	dokumen	2.700.000										3	dokumen	2.700.000	25,00	8,49	15	dokumen	27.856.000	41,67	29,20	SUB BAGIAN KEUANGAN	
3.3		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada Perangkat**	**Sigma output sub keg**	**100**	**%**	66.529.500	100	**%**	3.564.000	**100**	**%**	22.176.500	0	**%**	-		**%**	-	100	**%**	-		**%**	-	100	**%**	-	100,00	0,00	200	**%**	3.564.000	200,00	5,36	BAGIAN UMUM	
3.3.1		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	6	Dokumen	66.529.500	2	dokumen	3.564.000	2	dokumen	22.176.500		dokumen											0	dokumen	0	0,00	-	2	dokumen	3.564.000	33,33	5,36	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Kinerja Pada Triwulan III			Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
1	2				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp		
3.4		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat**	**Sigma output sub keg**	**100**	**%**	1.389.068.400	102,44	**%**	537.890.000	100	**%**	413.022.800	3,25	**%**	9.600.000	0,00	**%**	0	0,00	**%**	0	0,00	**%**	0	3,25	**%**	9.600.000	3,25	2,32	105,69	**%**	547.490.000	105,69	39,41	BAGIAN UMUM	
3.4.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3	Paket	733.740.000	1	Paket	187.800.000	1	Paket	244.580.000		Paket											0	Paket	0	0,00		1	Paket	187.800.000	**33,33**	**25,59**	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
3.4.2		Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	36	dokumen	88.446.300	12	dokumen	29.412.000	12	dokumen	29.482.100	**3,00**	dokumen	7.200.000										3	dokumen	7.200.000	25,00	**24,42**	15	dokumen	36.612.000	**41,67**	**41,39**	SUB BAGIAN TU PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN	
3.4.3		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	12	dokumen	55.834.800	4	dokumen	15.838.000	4	dokumen	18.611.600	**1,00**	dokumen	2.400.000										1	dokumen	2.400.000	25,00	**12,90**	5	dokumen	18.238.000	**41,67**	32,66	SUB BAGIAN TU PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN	
3.4.4		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6	dokumen	43.459.500	2	dokumen	2.899.000	2	dokumen	14.486.500		dokumen											0	dokumen	0	0,00	**0,00**	2	dokumen	2.899.000	**33,33**	6,67	SUB BAGIAN TU PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAW	
3.4.5		Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31	orang	186.000.000	2	Orang	265.870.000	2	Orang	12.000.000		Orang											0	Orang	0	0,00	0,00	2	Orang	265.870.000	**6,45**	142,94	SUB BAGIAN TU PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN	
3.4.6		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300	orang	155.587.800	100	orang	2.701.000	100	orang	51.862.600		orang											0	orang	0	0,00	**0,00**	100	orang	2.701.000	**33,33**	1,74	SUB BAGIAN TU PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAW	
3.4.7		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21	orang	126.000.000	5	Orang	33.370.000	2	Orang	42.000.000		Orang											0	Orang	0	0,00	0,00	5	Orang	33.370.000	**23,81**	26,48	SUB BAGIAN TU PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN	

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Kinerja Pada Triwulan III			Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
1	2				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp		
3.5		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat**	**Sigma output sub keg**	**100**	**%**	12.786.502.403	100,00	**%**	6.419.879.663	100	**%**	4.492.152.023	**25,00**	**%**	953.786.116	**0,00**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**0**	25,00	**%**	953.786.116	25,00	21,23	125,00	**%**	7.373.665.779	125,00	57,67	BAGIAN UMUM	
3.5.1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	Paket	562.875.000	12	Paket	182.520.100	12	Paket	187.625.000	3	Paket	36.584.300										3	Paket	36.584.300	25,00	**19,50**	15	Paket	219.104.400	41,67	38,93	SUB BAGIAN TU PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAW	
3.5.2		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36	Paket	673.736.400	12	Paket	241.147.800	12	Paket	224.578.800	3	Paket	18.115.000										3	Paket	18.115.000	25,00	**8,07**	15	Paket	259.262.800	41,67	**38,48**	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
3.5.3		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36	Paket	2.055.300.000	12	Paket	749.767.500	12	Paket	685.100.000	3	Paket	204.810.000										3	Paket	204.810.000	25,00	**29,89**	15	Paket	954.577.500	41,67	**46,44**	SUB BAGIAN TU PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAW	
3.5.4		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36	Paket	880.861.050	12	Paket	218.790.500	12	Paket	293.620.350	3	Paket	50.914.500										3	Paket	50.914.500	25,00	**17,34**	15	Paket	269.705.000	41,67	**30,62**	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
3.5.5		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	Dokumen	180.000.000	12	Paket	86.150.000	12	Paket	90.000.000	3	Paket	13.250.000										3	Paket	13.250.000	25,00	**14,72**	15	Paket	99.400.000	41,67	**55,22**	SUB BAGIAN TU PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN	
3.5.6		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36	Laporan	6.224.250.953	4	Laporan	3.833.671.501	4	Laporan	2.274.734.873	1	Laporan	286.050.596										1	Laporan	286.050.596	25,00	**12,58**	5	Laporan	4.119.722.097	13,89	**66,19**	SUB BAGIAN TU PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAW	
3.5.7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	Laporan	2.209.479.000	12	Laporan	1.107.832.262	12	Laporan	736.493.000	3	Laporan	344.061.720										3	Laporan	344.061.720	25,00	**46,72**	15	Laporan	1.451.893.982	41,67	**65,71**	SUB BAGIAN TU PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAW	

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Kinerja Pada Triwulan III			Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
1	2				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp		
3.6		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah**	**Sigma output sub keg**	100	%	2.606.246.100	93,44	%	1.557.520.914	100	%	2.750.605.700	15,63	%	188.500.000	0,00	%	0	0,00	%	0	0,00	%	0	15,63	%	188.500.000	15,63	6,85	109,07	%	1.746.020.914	109,07	66,99	BAGIAN UMUM	
3.6.1		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	Unit	934.239.000	1	Unit	308.860.000	4	Unit	2.193.270.000		Unit	-										0	Unit	0	0,00	0,00	1	Unit	308.860.000	33,33	33,06	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
3.6.2		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah unit pengadaan mebel / Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	129	unit	112.845.900	40	Unit	97.830.000	43	Unit	37.615.300		Unit											0	Unit	0	0,00	0,00	40	Unit	97.830.000	31,01	86,69	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
3.6.3		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45	unit	1.116.576.300	14	Unit	514.960.000	15	Unit	372.192.100	8	Unit	83.800.000										8	Unit	83.800.000	53,33	22,52	22	Unit	598.760.000	48,89	53,62	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
3.6.4		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	6	unit	442.584.900	2	unit	635.870.914	2	unit	147.528.300	2	unit	104.700.000										2	unit	104.700.000	100,00	70,97	4	unit	740.570.914	66,67	0,00	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
3.7		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah**	**Sigma output sub keg**	**100**	**%**	9.473.879.100	100	**%**	4.365.242.458	100	**%**	4.098.143.700	25,00	**%**	842.102.668	0,00	**%**	0	0,00	**%**	0	0,00	**%**	0	25	**%**	842.102.668	25,00	20,55	125	**%**	5.207.345.126	125,00	54,97	BAGIAN UMUM	
3.7.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	Laporan	41.400.000	12	Laporan	8.000.000	12	Laporan	13.800.000	3	Laporan	3.000.000										3	Laporan	3.000.000	25,00	21,74	15	Laporan	11.000.000	41,67	26,57	SUB BAGIAN TU PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAW	
3.7.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	4.794.684.000	12	Laporan	1.478.706.602	12	Laporan	1.598.228.000	3	Laporan	289.778.668										3	Laporan	289.778.668	25,00	18,13	15	Laporan	1.768.485.270	41,67	36,88	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
3.7.3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	Laporan	2.172.103.500	12	Laporan	1.369.568.000	12	Laporan	724.034.500	3	Laporan	211.424.000										3	Laporan	211.424.000	25,00	29,20	15	Laporan	1.580.992.000	41,67	72,79	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
3.7.4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Laporan	2.465.691.600	12	Laporan	1.508.967.856	12	Laporan	1.762.081.200	3	Laporan	337.900.000										3	Laporan	337.900.000	25,00	19,18	15	Laporan	1.846.867.856	41,67	74,90	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Kinerja Pada Triwulan III			Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/8x100		17	18
1	2				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp		
3.8		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah**	**Sigma output sub keg**	100	%	8.047.685.550	100,00	%	2.207.405.392	100	%	1.987.617.050	5,00	%	25.755.200	0,00	%	0	0,00	%	0	0,00	%	0	4,57	%	25.755.200	4,57	1,30	104,57	%	2.233.160.592	104,57	27,75	BAGIAN UMUM	
3.8.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36	unit	1.269.480.000	12	unit	378.269.765	10	unit	423.160.000		unit												0	unit	0	0,00	1,60	12	unit	385.021.965	33,33	30,33	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
3.8.2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	unit	1.169.670.000	12	unit	386.374.178	23	unit	389.890.000	4	unit	6.752.200											4	unit	6.752.200	17,39	1,73	16	unit	393.126.378	44,44	33,61	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
3.8.3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	150	unit	911.490.150	50	unit	291.180.750	184	unit	303.830.050	6	unit	13.963.000										6	unit	13.963.000	3,26	4,60	56	unit	305.143.750	37,33	33,48	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
3.8.4		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6	unit	2.162.211.000	2	unit	1.046.145.699,00	2	unit	720.737.000		unit											0	unit	0	0,00	0,00	2	unit	1.046.145.699	33,33	48,38	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
3.8.5		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jangka Waktu pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	3	Unit	2.534.834.400	1	Bulan	105.435.000	1	Unit	150.000.000	1	Bulan	5.040.000										1	Bulan	5.040.000	100,00	3,36	2	Bulan	110.475.000	66,67	4,36	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
3.9		**Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Sigma output sub keg**	100	%	2.634.630.000	100	%	629.160.000	100	%	1.118.806.733	66,67	%	145.174.286	0,00	%	0	0,00	%	0	0,00	%	0	66,67	%	145.174.286	66,67	12,98	167	%	774.334.286	166,67	29,39	BAGIAN UMUM	
3.9.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4	Orang	360.000.000	0	Orang	0	2	Orang	180.000.000	2	Orang	12.374.286										2	Orang	12.374.286			2	Orang	12.374.286	50,00	3,44	SUB BAGIAN KEUANGAN	

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Kinerja Pada Triwulan III			Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
1	2				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp		
3.9.2		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan KDH dan Wakil KDH	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6	Paket	128.880.000	2	Paket	47.160.000	2	Paket	42.960.000		Paket												0	Paket	0	0,00	0,00	2	Paket	47.160.000	33,33	36,59	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
3.9.3		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6	Orang	2.145.750.000	1	Orang	582.000.000	2	Orang	895.846.733	2	Orang	132.800.000										2	Orang	132.800.000	100,00	14,82	3	Orang	714.800.000	50,00	33,31	SUB BAGIAN KEUANGAN	
3.10		Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	**Sigma output sub keg**	100	%	8.099.129.550	100,00	%	2.578.402.556	100	%	3.101.449.850	25,00	%	415.347.110	0,00	%	0	0,00	%	0	0,00	%	0	25,00	%	415.347.110	25,00	13,39	125,00	%	2.993.749.666	125,00	36,96	BAGIAN UMUM	
3.10.1		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	36	Paket	4.349.410.050	12	Paket	2.103.332.052	12	Paket	1.480.603.350	3	Paket	321.613.100										3	Paket	321.613.100	25,00	21,72	15	Paket	2.424.945.152	41,67	55,75	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
3.10.2		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	36	Paket	2.849.719.500	12	Paket	318.410.504	12	Paket	1.270.846.500	3	Paket	75.484.010										3	Paket	75.484.010	25,00	5,94	15	Paket	393.894.514	41,67	13,82	SUB BAGIAN RUMAH TANGGA	
3.10.3		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	30	Paket	900.000.000	6		156.660.000	12	Paket	350.000.000	3		18.250.000										3		18.250.000	25,00	5,21	9		174.910.000	30,00	19,43		

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Kinerja Pada Triwulan III			Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/8x100		17	18
1	2				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp		
	Sasaran PD : Meningkatkan kualitas kebijakan perekonomian		Indeks Perekonomian	Indeks ini menunjukkan kinerja dalam bidang kebijakan perkonomian serta kinerja kebijakan pengelolaan BUMD / BLUD. Formula : (50% Kinerja kebijakan perekonomian + 50% Kinerja Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam) x 100	100	%	3.727.933.750	100,00	%	1.259.217.553	100	%	1.270.247.600	2,50	%	145.613.323	0,00	%	0	0,00	%	0	25,00	%	0	27,50	%	145.613.323	27,50	11,46	128	%	1.404.830.876	127,50	37,68	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK	
4		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase implementasi kebijakan Perekonomian	**[(Persentase BUMD berkinerja baik + Persentase BLUD Berkinerja Baik + Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian + sumber daya alam)/4**	100	%	3.727.933.750	100,00	%	1.259.217.553	100	%	1.270.247.600	5,00	%	145.613.323	-	%	0	-	%	0	50,00	%	0	55,00	%	145.613.323	55,00	11,46	155	%	1.404.830.876	155,00	37,68	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
4.1		**Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase BUMD berkinerja baik (berdasarkan laporan Audited dan**	**[(Jumlah BUMD berkinerja baik (berdasarkan laporan) dibagi Jumlah seluruh BUMD)] x 100**	**100,00**	%	3.415.349.400	100,00	%	1.098.444.580	**100,00**	%	1.138.449.800	0,00	%	119.952.450	0,00	%	0	0,00	%	0	100,00	%	0	100,00	%	119.952.450	100,00	10,54	200,00	%	1.218.397.030	200,00	35,67	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	
			Persentase BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan kinerja keuangan dan non	**[(Jumlah BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan) dibagi Jumlah seluruh BLUD)] x 100**	**100,00**	%		100,00	%		**100,00**	%		0,00	%								100,00			100,00	%		100,00		200,00			200,00				
			Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	**(Jumlah kebijakan perekonomian yang terealisasi dibagi Jumlah kebijakan perekonomian yang di rencanakan) x 100**	**100,00**	%		100,00	%		**100,00**	%		20,00	%		0,00			0,00			0,00			20,00	%		20,00		120,00			120,00				
4.1.1		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	6	Dok	1.814.765.500	2	Dok	515.101.437	2	Dok	629.244.700		Dok	64.185.400										0	Dok	64.185.400	0,00	10,20	2	Dok	579.286.837	33,33	31,92	SUB BAGIAN PEMBINAAN BUMD DAN BLUD	
4.1.2		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12	Laporan	887.250.900	4	Laporan	274.338.400	4	Laporan	295.750.300	1	Laporan	37.045.550										1	Laporan	37.045.550	25,00	12,53	5	Laporan	311.383.950	41,67	35,10	SUB BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Kinerja Pada Triwulan III			Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
1	2				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp		
4.1.3		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	6	Dok	640.364.400	1	Dok	236.372.400	1	Dok	213.454.800		Dok	18.721.500										0	Dok	18.721.500	0,00	8,77	1	Dok	255.093.900	16,67	39,84	SUB BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	
4.1.4		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	1	Dok	72.968.600	1	Dok	72.632.343	0	Dok	0		Dok											0	Dok	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1	Dok	72.632.343	100,00	99,54	SUB BAGIAN PEMBINAAN BUMD DAN BLUD	
4.2		**Kegiatan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam**	**Persentase terlaksananya pemantauan kebijakan sumber daya alam**	**(Jumlah kebijakan sumber daya alam yang terealisasi dibagi Jumlah kebijakan sumber daya alam yang di rencanakan) x 100**	**100,00**	%	312.584.350	100,00	%	160.772.973	**100,00**	%	131.797.800	0,00	%	25.660.873	0	%	0	0,00	%	0	0,00	%	0	0,00	%	25.660.873	0,00	19,47	100,00	%	186.433.846	100,00	59,64	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	
4.2.1		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	3	Dok	118.306.450	1	Dok	97.404.150	1	Dok	58.749.800		Dok	5.040.300											0	Dok	5.040.300	0,00	8,58	1	Dok	102.444.450		86,59	SUB BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	
4.2.2		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	3	Dok	96.916.200	1	Dok	33.503.523	1	Dok	50.594.100		Dok	20.306.373											0	Dok	20.306.373	0,00	40,14	1	Dok	53.809.896	33,33	55,52	SUB BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Kinerja Pada Triwulan III			Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
1	2				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp		
4.2.3		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	3	Dok	97.361.700	1	Dok	29.865.300	1	Dok	22.453.900		Dok	314.200									0	Dok	314.200	0,00	1,40	1	Dok	30.179.500	33,33	31,00	SUB BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	
	Sasaran PD : Meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan		Indeks Pelaksanaan Pembangunan	Indeks ini menunjukkan kinerja pengendalian melalui persentase penyerapan anggaran Pemerintah Daerah Kota Pontianak, Formula : (Penyerapan anggaran belanja PD/Total Anggaran Belanja APBD) x 100)	100	%	3.232.801.625	93,52	%	934.471.250	92,51	%	1.213.832.475	10.26	%	97.998.450			0			0			0	-	%	97.998.450	0,00	8,07	93,52		1.032.469.700		31,94	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK	
5		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan	**{(70% x kinerja penerbitan dokumen kebijakan standar harga satuan (ASB/HSPK dan Standar Biaya Umum)] + [30% x (jumlah PD yang melaksanakan kegiatan/jumlah perangkat daerah)]) x 100**	100	%	3.232.801.625	100,00	%	934.471.250	98,06	%	1.213.832.475	55,45	%	97.998.450			0			0			0		%	97.998.450	0,00	8,07	100		1.032.469.700	100,00	31,94	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
5.1		**Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan**	**{((Realisasi Penerbitan dokumen program pembangunan / target penerbitan dokumen program pembangunan) + (Realisasi jumlah OPD**	**100,00**	%	3.232.801.625	100,00	%	934.471.250	**100,00**	%	1.213.832.475	63,64	%	97.998.450		%	0		%	0		%	0		%	97.998.450	0,00	8,07	100,00	%	695.794.150	100,00	21,52	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
5.1.1		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	24	Dok	1.825.220.250	3	Dok	540.420.800	5	Dok	577.175.350	**3**	Dok	49.157.050										3	Dok	49.157.050	60,00	8,52	6	Dok	589.577.850	25,00	32,30	SUB BAGIAN PENYUSUNAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM	
5.1.2		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	3	Laporan	538.239.675	0	Laporan	84.806.300	1	Laporan	367.414.625	0	Laporan	21.410.000										0	Laporan	21.410.000	0,00	5,83	0	Laporan	106.216.300	0,00	19,73	SUB BAGIAN PENYUSUNAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM	
5.1.3		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	24	Laporan	869.341.700	5	Laporan	309.244.150	5	Laporan	269.242.500	1	Laporan	27.431.400										1	Laporan	27.431.400	20,00	10,19	6	Laporan	336.675.550	25,00	38,73	SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Kinerja Pada Triwulan III			Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/8x100		17	18
1	2				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp		
	Sasaran PD : Meningkatkan kualitas kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah		Indeks Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Indeks ini menunjukkan kinerja layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, Formula : (Realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui tender/seleksi dibagi Total Rencana Pengadaan Baran/Jasa Pemerintah melalui tender/seleksi)x100)	100	%	5.791.909.720	100	%	1.215.573.291	96,5	%	1.897.303.240		%	105.139.442		%	0		%	0		%	0	0	%	105.139.442	0,00	5,54	100	%	1.320.712.733	100,00	22,80	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK	
6		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	**Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat**	**(jumlah realisasi tender/seleksi/rencana tender/seleksi dalam RUP) x 100**	**100**	**%**	5.791.909.720	100,00	**%**	1.215.573.291	94	**%**	1.897.303.240	**9,09**	**%**	105.139.442		**%**	0		**%**	0		**%**	0	0,00	**%**	105.139.442	0,00	5,54	100,00	**%**	1.320.712.733	100,00	22,80	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
6.1		**Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase Proses Tender/Seleksi yang sesuai dengan rencana umum pengadaan (RUP)**	**(Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui tender/seleksi dibagi Jumlah Permohonan Pengadaan Barang/Jasa melalui Tender/Seleksi) x 100**	**100,00**	%	5.791.909.720	102,38	%	1.215.573.291	**100,00**	%	1.897.303.240	100,00	%	105.139.442		%	0		%	0		%	0	33,33	%	105.139.442	33,33	5,54	135,71	%	1.320.712.733	135,71	22,80	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
6.1.1		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	240	paket	878.057.400	98	Dok	181.798.975	60	Dok	292.685.800	6	Dok	16.500.000										6	Dok	16.500.000	10,00	5,64	104	Dok	198.298.975	43,33	22,58	SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG	
6.1.2		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	135	Dok	973.729.300	70	Dok	301.853.433	150	Dok	291.243.100	30	Dok	43.650.000										30	Dok	43.650.000	20,00	14,99	100	Dok	345.503.433	74,07	35,48	SUB BAGIAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRON	
6.1.3		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1050	Dok	3.940.123.020	350	Orang	731.920.883	600	Orang	1.313.374.340	260	Orang	44.989.442										260	Orang	44.989.442	43,33	3,43	610	Orang	776.910.325	58,10	19,72	SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	
	Tujuan PD: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		**Nilai Akuntabilita Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**Persentase nilai yang dicantumkan tahun-n merupakan hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP tahun n-1 yang dikeluarkan pada tahun n. oleh KEMENPAN-RB**	**82 (A)**	**Nilai**	7.395.787.150	71,04 (BB)	**Nilai**	2.042.830.438	81 (A)	**Nilai**	2.916.929.050		**Nilai**	424.192.338		**Nilai**	0		**Nilai**	0		**Nilai**	0		**Nilai**	424.192.338	0,00	14,54		**Nilai**	2.467.022.776	0,00	33,36	WALIKOTA PONTIANAK	
	Sasaran PD : Meningkatkan Kinerja Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		Nilai AKIP Kota Pontianak	Nilai evaluasi AKIP oleh Kemenpan RB	82	Nilai	1.012.343.050	71,04	Nilai	358.875.786	81	Nilai	304.114.350		Nilai	40.660.600		Nilai	0		Nilai	0		Nilai	0		Nilai	40.660.600	0,00	Nilai	0,00	Nilai	399.536.386	0,00	39,47	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK	

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Kinerja Pada Triwulan III			Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/8x100		17	18
1	2				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp		
7		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Nilai komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak**	**Nilai evaluasi AKIP Komponen pelaporan kinerja oleh Kemenpan RB**	**12,2**	**Nilai (Predikat)**	1.012.343.050	10,64	Nilai	358.875.786	12,1		304.114.350		Nilai	40.660.600			0			0		Nilai	0		Nilai	40.660.600	0,00	Nilai	0,00	Nilai	399.536.386	0,00	39,47	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
7.1		**Kegiatan Penataan Organisasi**	**Persentase Laporan Kinerja Perangkat daerah yang tersusun Baik**	**(Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun Baik dibagi Jumlah Perangkat Daerah) x 100**	**100,00**	%	1.012.343.050	100,00	%	358.875.786	**100,00**	%	304.114.350	**100,00**	%	40.660.600	0,00	%	0	0,00	%	0		%	0	100,00	%	40.660.600	100,00	13,37	200,00	%	399.536.386	200,00	39,47	BAGIAN ORGANISASI	
7.1.1		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan RB Kota Pontianak / Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3	Dok	373.873.350	1	Dok	98.196.200	1	Dok	124.624.450	1	Dok	6.500.000									1	Dok	6.500.000	100,00	5,22	2	Dok	104.696.200	66,67	28,00	SUB BAGIAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	rencana akan dilaksanakan monitoring per 3 bln
7.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	6	Dok	638.469.700	2	Dok	260.679.586	2	Dok	179.489.900	2	Dok	34.160.600										2	Dok	34.160.600	100,00	19,03	4	Dok	294.840.186	66,67	46,18	SUB BAGIAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	2 Dokumen : Perjanjian Kinerja dan Laporan realisasi Kinerja
	Sasaran PD : Meningkatkan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Nilai LPPD Kota Pontianak	Nilai evaluasi Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)	Tinggi	Predikat	6.383.444.100		Predikat	1.683.954.652	Tinggi	Predikat	2.612.814.700		Predikat	383.531.738		Predikat	0		Predikat	0		Predikat	0		Predikat	383.531.738		14,68	0,00	Predikat	2.067.486.390		32,39	SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK	**Nilai LPPD Kota Pontianak Belum Keluar**
8		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	**Persentase implementasi kebijakan Pemerintahan**	**(persentase Administrasi Tata Pemerintahan + persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah) / 2**	**100**	**%**	6.383.444.100	100	**%**	1.683.954.652	100	**%**	2.612.814.700	67	**%**	383.531.738	0	**%**	0	0	**%**	0	0	**%**	0	67	**%**	383.531.738	66,67	14,68	166,67	**%**	2.067.486.390	166,67	32,39	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
8.1		**Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase perangkat daerah yang memenuhi indikator kinerja kunci**	**(Jumlah Perangkat Daerah Yang memenuhi Indikator Kinerja Kunci (IKK) / Jumlah Seluruh Perangkat Daerah) X 100**	**100,00**	%	5.817.159.600	100,00	%	1.505.941.446	**100,00**	%	2.294.053.200	100,00	%	351.581.738		%	0		%	0	0,00	%	0	100,00	%	351.581.738	100,00	15,33	100,00	%	1.857.523.184	100,00	31,93	BAGIAN PEMERINTAHAN	
8.1.1		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	9	Dok	913.647.600	2	Dok	204.397.800	2	Dok	304.549.200		Dok	3.300.000										0	Dok	3.300.000	0,00	1,08	2	Dok	207.697.800	22,22	22,73	SUB BAGIAN PEMERNTAHAN DAN KEWILAYAHAN	
8.1.2		Pengelolaan administrasi kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6	Dok	668.918.900	2	Dok	184.879.500	3	Dok	400.306.300	1	Dok	29.400.000										1	Dok	29.400.000	33,33	7,34	3	Dok	214.279.500	50,00	32,03	SUB BAGIAN PEMERNTAHAN DAN KEWILAYAHAN	
8.1.3		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	9	Dok	4.234.593.100	2	Dok	1.116.664.146	2	Dok	1.589.197.700	2	Dok	318.881.738										2	Dok	318.881.738	100,00	20,07	4	Dok	1.435.545.884	44,44	33,90	SUB BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH	

Kode	Tujuan/Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Definisi Operasional / Formula Pengukuran	Target RENSTRA Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA s/d Renja Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan yang dievaluasi 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Kinerja Pada Triwulan III			Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2025(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d Tahun 2025(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
		3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
1	2				K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Satuan	Rp	K	Rp		
8.2		**Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**(Jumlah realisasi kejasama daerah yang difasilitasi dibagi jumlah target kerjasama yang difasilitasi) x 100**	**100,00**	%	566.284.500	100	%	178.013.206	**100,00**	%	318.761.500	33	%	31.950.000	0	%	0	0	%	0	0	%	0	33	%	31.950.000	33,33	16,93	133,33	%	209.963.206,00	133,33	37,08	BAGIAN PEMERINTAHAN	
8.2.1		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	3	dok	566.284.500	10	dok	178.013.206	1	dok	188.761.500	1	dok	31.950.000										1	dok	31.950.000	100,00	16,93	11	dok	209.963.206	366,67	37,08	SUB BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH	
8.2.2		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri							1	dok	100.000.000		dok											0	dok	0									
8.2.3		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama							1	dok	30.000.000		dok											0	dok	0									
					100	%	168.850.463.000			60.164.059.552																											
		Jumlah Anggaran Dan Realisasi Program											62.788.992.733			10.718.931.915			0			0			0			10.718.931.915		**17,07**			70.882.991.467		**41,98**		
		Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan(%)												**33,98**		**17,07**	**0,00**		**0,00**	**5,88**		**#DIV/0!**	**5,88**		**#DIV/0!**	**38,67**			**36,99**		**131,63**		**41,98**	**131,63**	**41,98**		
		Predikat Kinerja												**Rendah**		**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**									**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**		**Sangat Tinggi**		**Sangat Rendah**	**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**		
		Rata-rata Capaian Kinerja Program(%)												**35,26**			**0,00**			**0,00**			**0,00**			**36,40**			**31,85**		**107,47**			**108,07**			
		Predikat Kinerja												**Rendah**		**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**									**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**		**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**			

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rencana Kerja

Adapun Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp. 30.584.200,- atau berkurang sebesar Rp. 7.801.600,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 38.385.800,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dianggarkan sebesar Rp. 23.925.900,- atau berkurang sebesar Rp. 6.074.100,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 30.000.000,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dianggarkan sebesar Rp. 19.302.000,,- atau berkurang sebesar Rp. 4.851.900,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 24.153.900,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
4. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp. 35.621.200,,- atau berkurang sebesar Rp. 9.140.500,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 44.761.700,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
5. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp. 22.187.907.000,- atau bertambah sebesar Rp 1.678,00,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 22.187.905.322,- dikarenakan penyesuaian Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2025
6. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dianggarkan sebesar Rp. 1.325.624.728,- atau berkurang sebesar Rp. 100.916.414,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.426.541.142,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
7. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dianggarkan sebesar Rp. 15.807.800,- atau berkurang sebesar Rp. 3.787.500,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 19.595.300,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
8. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dianggarkan sebesar Rp. 89.058.200,- atau berkurang sebesar Rp. 3.238.300,- dari

APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 92.296.500,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran

9. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian dianggarkan sebesar Rp. 19.859.800,- atau bertambah sebesar Rp. 1.248.200,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 18.611.600,- dikarenakan penyesuaian kegiatan
10. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 11.080.300,- atau berkurang sebesar Rp. 3.371.200,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 14.451.500,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
11. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan sebesar Rp. 21.861.800,- atau berkurang sebesar Rp. 4.374.800,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 26.236.600,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
12. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dianggarkan sebesar Rp. 147.226.500,- atau berkurang sebesar Rp. 40.398.500,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 187.625.000,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
13. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp. 171.416.350,- atau berkurang sebesar Rp. 41.567.650,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 212.984.000,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
14. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dianggarkan sebesar Rp. 1.013.820.000,- atau bertambah sebesar Rp. 172.020.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 841.800.000,- dikarenakan adanya peningkatan pembiayaan kegiatan
15. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp. 177.064.200,- atau berkurang sebesar Rp. 44.352.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 221.416.200,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
16. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dianggarkan sebesar Rp. 2.196.057.367,- atau bertambah sebesar Rp. 8.137.367,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.187.920.000,- dikarenakan adanya peningkatan pembiayaan kegiatan
17. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dianggarkan sebesar Rp. 635.267.000,- atau berkurang sebesar Rp. 65.000.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 700.267.000,- dikarenakan refocusing atau kebijakan efisiensi anggaran

18. Sub Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang semula dianggarakan sebesar Rp.1.887.037.000,- pada pergeseran anggaran yang ke 2 di alihkan ke Sewa Kendaraan Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah
19. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dianggarkan sebesar Rp. 589.281.200,- atau bertambah sebesar Rp. 221.953.700,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 367.327.500,- dikarenakan penambahan kebutuhan Pengadaan Mebel
20. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 998.599.900,- atau bertambah sebesar Rp. 642.440.800,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 356.159.100,- dikarenakan adanya peningkatan pembiayaan kegiatan
21. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dianggarkan sebesar Rp. 1.798.227.900,- atau bertambah sebesar Rp. 199.999.900,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.598.228.000,- dikarenakan adanya peningkatan pembiayaan kegiatan
22. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dianggarkan sebesar Rp2.772.370.000,- atau bertambah sebesar Rp 1.774.970.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 997.400.000,- dikarenakan adanya Penambahan Sewa Kendaraan Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah
23. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dianggarkan sebesar Rp. 1.997.868.080,- atau bertambah sebesar Rp. 196.239.120,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.801.628.960,- dikarenakan adanya peningkatan pembiayaan kegiatan
24. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dianggarkan sebesar Rp. 394.598.109,- atau bertambah sebesar Rp. 7.738.109,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 386.860.000,- dikarenakan adanya peningkatan pembiayaan kegiatan
25. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 312.330.050,- atau berkurang sebesar Rp. 7.350.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 319.680.050,- dikarenakan refocusing atau penyesuaian anggaran
26. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 509.565.690,- atau bertambah sebesar Rp. 226.405.690,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 283.160.000,- dikarenakan adanya peningkatan pembiayaan kegiatan
27. Sub Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan sebesar Rp. 68.480.000,- atau bertambah sebesar Rp. 25.100.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 43.380.000,- dikarenakan adanya peningkatan pembiayaan kegiatan

28. Sub Penyediaan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.227.600.000,- atau bertambah sebesar Rp. 331.753.267,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 895.846.733,- dikarenakan bertambahnya relaisasi PAD Kota Pontianak sehingga biaya operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga bertambah
29. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dianggarkan sebesar Rp. 2.419.743.970,- atau bertambah sebesar Rp. 863.577.020,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.556.166.950,- dikarenakan banyaknya agenda acara dan tamu yang berkunjung ke Pemerintah Kota Pontianak.
30. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.633.908.060,- atau bertambah sebesar Rp. 363.061.560,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.270.846.500,- dikarenakan banyaknya agenda acara dan tamu yang berkunjung ke Pemerintah Kota Pontianak
31. Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah dianggarkan sebesar Rp. 378.596.680,- atau bertambah sebesar Rp. 395.520,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 378.201.160,- dikarenakan penyesuaian anggaran
32. Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan dianggarkan sebesar Rp. 455.080.400,- atau berkurang sebesar Rp. 163.971.750,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 619.052.150,- dikarenakan refocusing atau kebijakan efisiensi anggaran
33. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana dianggarkan sebesar Rp. 391.330.400,- atau berkurang sebesar Rp. 87.271.200,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 478.601.600,- dikarenakan refocusing atau kebijakan efisiensi anggaran
34. Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi dianggarkan sebesar Rp. 110.628.000,- atau berkurang sebesar Rp. 13.996.050,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 124.624.050,- dikarenakan refocusing atau kebijakan efisiensi anggaran
35. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana dianggarkan sebesar Rp. 50.903.200,- atau berkurang sebesar Rp. 20.786.325,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 71.689.525,- dikarenakan refocusing atau kebijakan efisiensi anggaran
36. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp. 196.595.300,- atau bertambah sebesar Rp. 17.105.400,00,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 179.489.900,- dikarenakan penyesuaian anggaran

37. Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan dianggarkan sebesar Rp. 573.193.865,- atau berkurang sebesar Rp. 58.758.500,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 631.952.365,- dikarenakan refocusing atau kebijakan efisiensi anggaran
38. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan dianggarkan sebesar Rp. 1.070.025.943,- atau bertambah sebesar Rp. 7.458.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.062.567.943,- dikarenakan penyesuaian anggaran
39. Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan dianggarkan sebesar Rp. 96.139.200,- atau berkurang sebesar Rp. 208.410.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 304.549.200,- dikarenakan refocusing atau kebijakan efisiensi anggaran
40. Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dianggarkan sebesar Rp. 375.306.650,- atau berkurang sebesar Rp. 25.000.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 400.306.650,- dikarenakan refocusing atau kebijakan efisiensi anggaran
41. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dianggarkan sebesar Rp. 1.352.611.500,- atau berkurang sebesar Rp. 168.809.700,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.521.421.200,- dikarenakan refocusing atau kebijakan efisiensi anggaran
42. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dianggarkan sebesar Rp. 8.571.934.700,- atau bertambah sebesar Rp. 1.642.610.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 6.929.324.700,- dikarenakan Penambahan Quota Jumlah Insentif Guru Ngaji Tradisional
43. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial dianggarkan sebesar Rp. 2.603.733.400,- atau bertambah sebesar Rp. 1.872.488.500,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 731.244.900,- dikarenakan Penambahan Quota Jumlah Insentif petugas Fardhu Kifayah
44. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp. 952.163.150,- atau berkurang sebesar Rp. -123.016.300,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.075.179.450,- dikarenakan refocusing atau kebijakan efisiensi anggaran
45. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah dianggarkan sebesar Rp. 442.471.800,- atau berkurang sebesar Rp. 100.397.500,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 542.869.300,- dikarenakan refocusing atau kebijakan efisiensi anggaran
46. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum dianggarkan sebesar Rp. 420.193.700,- atau berkurang sebesar Rp. 90.109.700,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 510.303.400,- dikarenakan refocusing atau kebijakan efisiensi anggaran

47. Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum dianggarkan sebesar Rp. 275.001.040,- atau berkurang sebesar Rp. 38.509.500,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 313.510.540,- dikarenakan refocusing atau kebijakan efisiensi anggaran
48. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri dianggarkan sebesar Rp. 159.545.500,- atau berkurang sebesar Rp. 29.216.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 188.761.500,- dikarenakan refocusing atau kebijakan efisiensi anggaran
49. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri dianggarkan sebesar Rp. 13.544.000,- atau berkurang sebesar Rp. 86.456.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 100.000.000,- dikarenakan refocusing atau kebijakan efisiensi anggaran
50. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD dianggarkan sebesar Rp. 546.353.800,- atau berkurang sebesar Rp. 82.890.900,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 629.244.700,- dikarenakan refocusing atau kebijakan efisiensi anggaran
51. Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dianggarkan sebesar Rp. 236.714.950,- atau berkurang sebesar Rp. 37.033.400,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 273.748.350,- dikarenakan refocusing atau kebijakan efisiensi anggaran
52. Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil dianggarkan sebesar Rp. 202.099.100,- atau berkurang sebesar Rp. 11.355.700,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 213.454.800,- dikarenakan refocusing atau kebijakan efisiensi anggaran
53. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan dianggarkan sebesar Rp. 384.085.620,- atau berkurang sebesar Rp. 148.444.730,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 532.530.350,- dikarenakan refocusing atau kebijakan efisiensi anggaran
54. Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan dianggarkan sebesar Rp. 367.414.335,- atau berkurang sebesar Rp. 290,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 367.414.625,- dikarenakan penyesuaian anggaran
55. Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dianggarkan sebesar Rp. 277.358.590,- atau berkurang sebesar Rp. 36.528.910,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 313.887.500,- dikarenakan refocusing atau kebijakan efisiensi anggaran
56. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 152.877.300,- atau berkurang sebesar Rp. 139.808.500,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 292.685.800,- dikarenakan refocusing atau kebijakan efisiensi anggaran

57. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dianggarkan sebesar Rp. 283.524.100,- atau berkurang sebesar Rp. 7.719.000,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 291.243.100,- dikarenakan refocusing atau kebijakan efisiensi anggaran
58. Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 1.018.672.800,- atau berkurang sebesar Rp. 262.701.540,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.281.374.340,- dikarenakan refocusing atau kebijakan efisiensi anggaran
59. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan dianggarkan sebesar Rp. 44.639.600,- atau berkurang sebesar Rp. 14.110.200,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 58.749.800,- dikarenakan refocusing atau kebijakan efisiensi anggaran
60. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup dianggarkan sebesar Rp. 45.833.800,- atau berkurang sebesar Rp. 4.328.300,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 50.162.100,- dikarenakan refocusing atau kebijakan efisiensi anggaran
61. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air dianggarkan sebesar Rp. 13.916.200,- atau berkurang sebesar Rp. 8.465.700,- dari APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 22.381.900,- dikarenakan refocusing atau kebijakan efisiensi anggaran

Adapun Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						SEKRETARIAT DAERAH							62.788.992.733,00	63.893.285.055,00	68.699.514.212,00							64.679.645.294,00	
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							62.788.992.733,00	63.893.285.055,00	68.699.514.212,00							64.679.645.294,00	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH							62.788.992.733,00	63.893.285.055,00	68.699.514.212,00							64.679.645.294,00	
1	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Kota Pontianak Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan Nilai IKM Sekretariat Daerah				12.1 95 98.6 Nilai Persen Nilai	12.1 95 98.6 Nilai Persen Nilai	45.592.386.128,00	46.918.936.850,00	49.833.379.377,00							45.266.020.858,00	
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	137.301.400,00	137.301.400,00	137.301.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Sekretariat Daerah Kota Pontianak		124.080.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	38.385.800,00	38.385.800,00	30.584.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			24.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	23.925.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	24.153.900,00	24.153.900,00	19.302.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			24.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10 Laporan	10 Laporan	44.761.700,00	44.761.700,00	35.621.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			45.880.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	22.846.117.739,00	23.634.041.764,00	23.634.041.764,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Sekretariat Daerah Kota Pontianak		23.489.732.955,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				142 Orang/bulan	135 Orang/bulan	21.231.889.000,00	22.187.905.322,00	22.187.907.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			22.279.732.955,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	1.582.433.439,00	1.426.541.142,00	1.325.624.728,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			1.190.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	31.795.300,00	19.595.300,00	15.807.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	22.176.500,00	92.296.500,00	92.296.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Sekretariat Daerah Kota Pontianak		4.612.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	22.176.500,00	92.296.500,00	89.058.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			4.612.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	413.022.800,00	383.961.800,00	383.961.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Sekretariat Daerah Kota Pontianak		326.350.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	244.580.000,00	244.180.000,00	244.180.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			244.180.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	29.482.100,00	29.482.100,00	29.482.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			15.482.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				4 Dokumen	4 Dokumen	18.611.600,00	18.611.600,00	19.859.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	14.486.500,00	14.451.500,00	11.080.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			14.451.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			26.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	51.862.600,00	26.236.600,00	21.861.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			26.236.600,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				7 Orang	6 Orang	42.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka Waktu Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			-	100 Persen 12 Bulan	4.492.152.023,00	4.442.012.200,00	4.442.012.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Sekretariat Daerah Kota Pontianak		4.216.028.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	187.625.000,00	187.625.000,00	147.226.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			187.625.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	224.578.800,00	212.984.000,00	171.416.350,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			187.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	685.100.000,00	841.800.000,00	1.013.820.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			841.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	293.620.350,00	221.416.200,00	177.064.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			221.416.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	2.274.734.873,00	2.187.920.000,00	2.196.057.367,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			1.987.920.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	736.493.000,00	700.267.000,00	635.267.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			700.267.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			-	100 Persen	2.750.605.700,00	3.319.172.500,00	3.319.172.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Sekretariat Daerah Kota Pontianak		1.432.135.500,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	0 Unit	2.193.270.000,00	1.887.037.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel																	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				43 Unit	62 Unit	37.615.300,00	367.327.500,00	589.281.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			367.327.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	30 Unit	372.192.100,00	356.159.100,00	998.599.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			356.159.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	56 Unit	147.528.300,00	708.648.900,00	1.177.624.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			708.648.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 Persen	100 Persen	4.098.143.700,00	4.411.056.960,00	4.411.056.960,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Sekretariat Daerah Kota Pontianak		5.612.696.080,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			13.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.598.228.000,00	1.598.228.000,00	1.798.227.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			1.598.228.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	724.034.500,00	997.400.000,00	2.772.370.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			1.962.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1.762.081.200,00	1.801.628.960,00	1.997.868.080,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			2.038.268.080,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.987.617.050,00	1.562.860.050,00	1.562.860.050,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Sekretariat Daerah Kota Pontianak		1.562.860.050,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	10 Unit	423.160.000,00	423.160.000,00	423.160.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			423.160.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	389.890.000,00	386.860.000,00	394.598.109,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			386.860.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				184 Unit	184 Unit	303.830.050,00	319.680.050,00	312.330.050,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			319.680.050,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	720.737.000,00	283.160.000,00	509.565.690,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			283.160.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.118.806.733,00	1.119.226.733,00	1.119.226.733,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pontianak		1.119.226.733,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	42.960.000,00	43.380.000,00	68.480.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			43.380.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
							Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	895.846.733,00	895.846.733,00	1.227.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			895.846.733,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	3.101.449.850,00	3.205.214.610,00	3.205.214.610,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Sekretariat Daerah Kota Pontianak		3.080.108.190,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																	
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.480.603.350,00	1.556.166.950,00	2.419.743.970,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			1.469.573.970,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																	
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1.270.846.500,00	1.270.846.500,00	1.633.908.060,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			1.232.333.060,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																	
							Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	350.000.000,00	378.201.160,00	378.596.680,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			378.201.160,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase capaian penataan organisasi Persentase Laporan Kinerja Perangkat daerah yang tersusun Baik	-			100 Persen	100 Persen	1.486.657.525,00	1.473.457.225,00	1.473.457.225,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Pemerintah Kota Pontianak		1.373.262.131,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																	
							Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				4 Dokumen	4 Dokumen	632.252.050,00	619.052.150,00	455.080.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			576.956.603,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				4 Laporan	4 Laporan	478.601.600,00	478.601.600,00	391.330.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			446.056.691,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																	
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	1 Dokumen	124.624.450,00	124.624.050,00	110.628.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			116.149.614,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																	
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	1 Dokumen	71.689.525,00	71.689.525,00	50.903.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			66.814.637,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	179.489.900,00	179.489.900,00	196.595.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			167.284.586,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kepala Daerah Persentase Jumlah Publikasi Kegiatan Kepala Daerah	-			100 Persen	100 Persen	3.138.335.108,00	3.138.335.108,00	3.138.335.108,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Pemerintah Kota Pontianak dan Masyarakat Kota Pontianak		2.924.928.319,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				4 Laporan	4 Laporan	631.952.365,00	631.952.365,00	573.193.865,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			588.979.604,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																	
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				3 Laporan	3 Laporan	1.062.567.943,00	1.062.567.943,00	1.070.025.943,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			990.313.322,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																	
							Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				4 Laporan	4 Laporan	1.443.814.800,00	1.443.814.800,00	1.403.721.985,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			1.345.635.393,00	SEKRETARIAT DAERAH
2	4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase implementasi kebijakan Hukum dan kesra				100 Persen	100 Persen	12.815.223.290,00	12.647.470.840,00	15.292.644.640,00							15.448.981.472,00	
	4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang memenuhi Indikator Kinerja Kunci (IKK)	-			100 Persen	100 Persen	2.294.053.200,00	2.226.277.050,00	2.226.277.050,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Pemerintah Kota Pontianak		1.888.490.209,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				2 Dokumen	2 Dokumen	304.549.200,00	304.549.200,00	96.139.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			283.839.854,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				3 Dokumen	3 Dokumen	400.306.300,00	400.306.650,00	375.306.650,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			186.685.797,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				2 Dokumen	3 Dokumen	1.589.197.700,00	1.521.421.200,00	1.352.611.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			1.417.964.558,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Organisasi/Lembaga Sosial Masyarakat yang difasilitasi	-			100 Persen	100 Persen	8.835.725.350,00	8.735.749.050,00	8.735.749.050,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kota Pontianak		12.001.749.050,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				10 Dokumen	10 Dokumen	6.906.468.700,00	6.929.324.700,00	8.571.934.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			8.894.324.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																	
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				3 Dokumen	3 Dokumen	731.252.200,00	731.244.900,00	2.603.733.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			2.282.244.900,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				5 Dokumen	5 Dokumen	1.198.004.450,00	1.075.179.450,00	952.163.150,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			825.179.450,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah	-			100 Persen	100 Persen	1.366.683.240,00	1.366.683.240,00	1.366.683.240,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Seluruh Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Pontianak		1.261.656.495,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																	
							Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				780 Dokumen	780 Dokumen	542.869.300,00	542.869.300,00	442.471.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			505.954.187,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																	
							Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				5 Kasus	5 Kasus	510.303.400,00	510.303.400,00	420.193.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			475.602.768,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan																	
							Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				60 Dokumen	60 Dokumen	313.510.540,00	313.510.540,00	275.001.040,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			280.099.540,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Presentase Fasilitasi Kerjasama Daerah	-			100 Persen	100 Persen	318.761.500,00	318.761.500,00	318.761.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Pemerintah Kota Pontianak		297.085.718,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen	10 Dokumen	188.761.500,00	188.761.500,00	159.545.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			175.925.718,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	13.544.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			93.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			27.960.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase implementasi kebijakan Perekeonomian Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat sesuai SOP Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan				100 94 98.06 Persen Persen Persen	100 94 98.06 Persen Persen Persen	4.381.383.315,00	4.326.877.365,00	3.573.490.195,00							3.964.642.964,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan kinerja keuangan dan non keuangan) Persentase BUMD berkinerja baik (berdasarkan laporan Audited dan Evkin BPKP) Persentase terlaksananya kebijakan perekonomian	-			100 Persen	100 Persen	1.138.449.800,00	1.116.447.850,00	1.116.447.850,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kota Pontianak, Perangkat Daerah, Stakeholder, Pelaku Usaha, BUMD & BLUD		972.522.660,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				2 Dokumen	2 Dokumen	629.244.700,00	629.244.700,00	546.353.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			518.449.325,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan	5 Laporan	295.750.300,00	273.748.350,00	236.714.950,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			255.133.462,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																	
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				2 Dokumen	1 Dokumen	213.454.800,00	213.454.800,00	202.099.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			198.939.873,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	-			100 Persen	100 Persen	1.213.832.475,00	1.213.832.475,00	1.213.832.475,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Pemerintah Kota Pontianak		1.131.291.866,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	577.175.350,00	532.530.350,00	384.085.620,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			496.318.286,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	1 Laporan	367.414.625,00	367.414.625,00	367.414.335,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			342.430.430,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																	
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				5 Laporan	3 Laporan	269.242.500,00	313.887.500,00	277.358.590,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			292.543.150,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Proses Tender/Seleksi yang sesuai dengan rencana umum pengadaan (RUP)	-			100 Persen	100 Persen	1.897.303.240,00	1.865.303.240,00	1.865.303.240,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Pemerintah Kota Pontianak dan Masyarakat Kota Pontianak		1.738.462.618,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				60 Dokumen	50 Dokumen	292.685.800,00	292.685.800,00	152.877.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			272.783.165,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah					
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																	
							Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				150 Dokumen	100 Dokumen	291.243.100,00	291.243.100,00	283.524.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			271.438.569,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				600 Orang	550 Orang	1.313.374.340,00	1.281.374.340,00	1.018.672.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			1.194.240.884,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase terlaksananya pemantauan kebijakan sumber daya alam	-			-	100 Persen	131.797.800,00	131.293.800,00	131.293.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kota Pontianak, Perangkat Daerah, Stakeholder		122.365.820,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	1 Dokumen	58.749.800,00	58.749.800,00	44.639.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			54.754.813,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	1 Dokumen	50.594.100,00	50.162.100,00	45.833.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			46.751.077,00	SEKRETARIAT DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air																	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	1 Dokumen	22.453.900,00	22.381.900,00	13.916.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			20.859.930,00	SEKRETARIAT DAERAH
												J U M L A H	**62.788.992.733,00**	**63.893.285.055,00**	**68.699.514.212,00**							**64.679.645.294,00**	

3.2.Pendanaan

Pelaksanaan program kegiatan Sekretariat Daerah Kota Pontianak sesuai dengan program yang telah digariskan oleh Pemerintah Kota maupun Pemerintah Pusat dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026. Anggaran Sekretariat Daerah Kota Pontianak dalam Perubahan APBD Tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp 68.699.514.212,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.806.229.157,- (7.52 %) dari APBD Murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.63.893.285.055,- terdiri dari 3 Program, 20 Kegiatan dan 72 Sub Kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Pontianak

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan I tahun 2025, masih diperlukan kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2025 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Walikota Pontianak serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Pontianak tahun 2025.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Perangkat Daerah diharapkan akan lebih terakomodasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Pontianak maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Pemerintah Kota Pontianak. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparasi, dan akuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2025, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Pontianak.

Pontianak, Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PONTIANAK

Dr. Ir. AMIRULLAH, MA
Pembina Utama Madya
NIP. 19690804 199303 1 005

SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PONTIANAK

Jl. Rahadi Oesman No.3 – Telp. (0561) 732570,733040, 733041, 733042, Fax. 736029 Pontianak 78111
Website : www.pontianak.go.id Email/Akun : sekda@pontianakkota.go.id

Perubahan Rencana Kerja (Renja)

Tahun 2025

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PONTIANAK

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Kami Panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun Rencana Kerja (renja) Perubahan Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat DPRD Kota Pontianak yang disusun ini merupakan acuan perencanaan kegiatan SKPD sampai dengan akhir tahun anggaran yang berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2025 serta Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Pontianak. Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Anggaran tahun 2025.

Kami berharap Dokumen Renja Perubahan ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Pontianak serta mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah dan pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak, sehingga dapat berjalan dengan lancar.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR ..... (i)

DAFTAR ISI ..... (ii)

BAB I : PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang……..... I-1
1.2 Landasan Hukum..... I-2
1.3 Maksud dan Tujuan……..... I-4
1.4 Sistematika Penulisan……..... I-5

BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025…… II-1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah..... II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... II-13
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... II-14

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN III-1

3.1 Rencana Kerja…….. III-2
3.2 Pendanaan…… III-41

BAB IV : PENUTUP IV-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan mengacu pada Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 serta Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pontianak nomor B/000.7.2.4/491/Bapp.3/2025 tanggal 22 Mei 2025 perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025, maka Perangkat Daerah Wajib membuat Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan acuan dan tolok ukur yang jelas dan tegas bagi Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pontianak sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Perubahan Rencana Kerja dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kota Pontianak ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan, dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Sekretariat DPRD Kota Pontianak saja, melainkan juga seluruh aparatur pemerintah Kota Pontianak dan stakeholder lainnya yang berada di kota Pontianak.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Sekretariat DPRD Kota Pontianak dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kedudukan dan peran strategis. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dengan tersusunnya Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak, diharapkan dapat dijadikan pedoman

dalam menyusun perencanaan dengan memperhatikan kepentingan pelayanan anggota DPRD dan masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
17. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).

19. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 32 Tahun 2021 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 32).
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 129).
21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 21 Tahun 2023 Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 21).
23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 47).
24. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 51 tahun 2023 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 51);
25. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024.
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan indikator dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD Tahun Anggaran 2025 dengan dokumen renja PD Tahun 2025 serta renstra PD dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang dalam kurun waktu Januari-Juni 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
BAB IV	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB V	:	PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauhmana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Terkait dengan Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja Ketersediaan Dokumen Perencanaan. Ketersediaan Dokumen Perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan/ subkegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian triwulan I tahun 2025. Pada tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Pontianak melaksanakan sebanyak 2 (dua) program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sejumlah Rp. 66.561.979.566,- *(Enam Puluh Enam Milyar Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Rupiah)*. Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan per Maret (triwulan I) tahun 2025 dengan realisasi anggaran Rp. 13.408.275.588,- (*Tiga Belas Milyar Empat Ratus Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*) sebesar 12,50% Secara detail pelaksanaan untuk program-program Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025 dapat diberikan gambaran sebagai berikut :

Tabel 2.1

Realisasi Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sekretariat DPRD Kota Pontianak sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan renja Tahun lalu (2024)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
														I		II		III		IV				
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11		12		13		
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
1		**4.02.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan**	**Hasil survey kepuasan kepada seluruh ASN Set.DPRD**	**95**	**%**	**124.944.465.486**	**90,96**	**%**	**42.822.809.417**	**95**	**%**	**51.094.926.186**		**9.915.737.984**	**%**	**-**		**-**	**%**	**-**	**0**	**%**	**9.915.737.984**
1.1		**4.02.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah output sub kegiatan yang telah dilaksanakan / Jumlah output yang direncanakan x 100%**	**100**	**%**	**83.654.400**	**100**	**%**	**19.634.800**	**100**	**%**	**42.884.800**	**0,00**	**%** **-**	**-**	**%** **-**	**0**	**%** **-**	**0**	**%** **-**	**0,00**	**%**	**-**
1.1.1		4.02.01.2.01.0001 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6	dokumen	29.077.200	2	dokumen	4.232.400	3	dokumen	24.692.400										0	dokumen	-
1.1.2		4.02.01.2.01.0006 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12	Laporan	28.924.800	4	laporan	9.421.600	4	laporan	9.641.600										0	laporan	-
1.1.3		4.02.01.2.01.0007 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8	Laporan	25.652.400	3	laporan	5.980.800	3	Laporan	8.550.800										0	Laporan	-

No	Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan renja Tahun lalu (2024)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
														I			II		III		IV				
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10		11		12		13		
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
1.2		**4.02.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah output sub kegiatan yang telah dilaksanakan / Jumlah output yang direncanakan**	**100**	**%**	**15.784.065.900**	**99,1**	**%**	**5.765.925.014**	**100**	**%**	**6.148.052.300**	**37,16**	**%**	**1.501.858.646**	**-**	**%** **-**	**0,00**	**%** **-**	**0**	**%** **-**	**37,16**	**%**	**1.501.858.646**
1.2.1		4.02.01.2.02.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		37	orang/bulan	14.404.329.000	36	orang/bulan	5.317.732.714	37	orang/bulan	5.677.080.000	32	orang/bulan	1.440.388.646								orang/bulan	1.440.388.646
1.2.3		4.02.01.2.02.01.0003 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		36	dokumen	1.371.570.000	12	dokumen	446.290.000	12	dokumen	468.250.000	3	dokumen	61.470.000								dokumen	61.470.000
1.2.4		4.02.01.2.02.01.0007 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan		12	Laporan	8.166.900	4	laporan	1.902.300	4	Laporan	2.722.300											Laporan	-
1.3		**4.02.01.2.03 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Jumlah output sub kegiatan yang telah dilaksanakan / Jumlah output yang direncanakan x 100%**	**100**	**%**	**111.456.000**				**100**	**%**	**37.152.000**	**0**	**%**	**-**		**-**		-		**-**	**0**	**%**	**-**
1.3.1		4.02.01.2.03.0002 Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		3	dokumen	111.456.000				1	dokumen	37.152.000												-
1.4		**4.02.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**Jumlah output sub kegiatan yang telah dilaksanakan / Jumlah output yang direncanakan**	**100**	**%**	**320.832.000**	**75**	**%**	**281.405.248**	**100**	**%**	**118.944.000**	25	%	**21.195.285**	**-**	**%** **-**	**0**	**%** -	**0**	**%** **-**	**25**	**%**	**21.195.285**
1.4.1		4.02.01.2.05.0002 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		9	paket	145.680.000	3	paket	62.270.000	3	paket	48.560.000										0	paket	-

No	Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan renja Tahun lalu (2024)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
														I			II		III		IV				
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10		11		12		13		
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
1.4.2		4.02.01.2.05.0009 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		12	orang	175.152.000	2	orang	219.135.248	4	orang	70.384.000	2	orang	21.195.285							2	orang	21.195.285
1.5		**4.02.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**Jumlah output sub kegiatan yang telah dilaksanakan / Jumlah output yang direncanakan**	**100**	**%**	**7.691.289.102**	**140,7**	**%**	**3.284.225.964**	**100**	**%**	**2.947.654.050**	**24,88**	**%**	**363.257.116**	**-**	**%**	**-**	**0**	**%**	**-**	0 **%**	**-**	**24,88**	**%**	**363.257.116**
1.5.1		4.02.01.2.06.0001 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		72	Paket	219.225.720	24	paket	83.203.900	24	paket	83.234.400	6	paket									6	paket	-
1.5.2		4.02.01.2.06.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		108	Paket	729.956.700	36	paket	300.391.050	36	paket	255.029.900	9	paket	6.000.000								9	paket	6.000.000
1.5.3		4.02.01.2.06.0003 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		36	Paket	365.304.300	12	paket	101.721.700	12	paket	89.909.400	3	paket									3	paket	-
1.5.4		4.02.01.2.06.0004 Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		72	Paket	2.836.143.132	12	paket	192.125.000	12	paket	178.955.600	3	paket	78.505.000								3	paket	78.505.000
1.5.5		4.02.01.2.06.0005 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		36	Paket	544.076.250	12	paket	330.866.600	12	paket	181.358.750	3	paket	37.750.000								3	paket	37.750.000
1.5.6		4.02.01.2.06.0006 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		216	Dokumen	228.000.000	72	dokumen	71.520.000	72	dokumen	76.000.000	18	dokumen									18	dokumen	-

No	Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan renja Tahun lalu (2024)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Kinerja Pada Triwulan III			Realisasi Kinerja Pada Triwulan IV			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13		
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp
1.5.7		4.02.01.2.06.0008 Sub Kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		108	Laporan	1.336.080.000	158	laporan	1.437.685.000	48	laporan	1.605.665.000	12	laporan	204.000.000										12	laporan	204.000.000
1.5.8		4.02.01.2.06.0009 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		150	Laporan	1.432.503.000	98	laporan	766.712.714	50	laporan	477.501.000	12	laporan	37.002.116										12	laporan	37.002.116
1.6		**4.02.01.2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Jumlah output sub kegiatan yang telah dilaksanakan / Jumlah output yang direncanakan x 100%**	**100**	**%**	**917.894.700**	**190**	**%**	**399.749.000**	**100**	**%**	**2.209.632.900**	**8,33**		-	**-**	**%**	**-**	0	%	**-**	**0**		**-**	**8,333333**	**%**	**-**
		4.02.01.2.07.0001 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan								4	unit	1.903.668.000	1	unit														
1.6.1		4.02.01.2.07.0005 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		15	unit	337.301.100	13	unit	103.945.000	5	unit	112.433.700													0	unit	-
1.6.2		4.02.01.2.07.0011 Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		60	unit	580.593.600	24	unit	295.804.000	20	unit	193.531.200													0	unit	-
1.7		**4.02.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**Jumlah output sub kegiatan yang telah dilaksanakan / Jumlah output yang direncanakan x 100%**	**100**	**%**	**7.998.891.816**	**100**	**%**	**2.660.504.170**	**100**	**%**	**2.803.897.980**	**22,2**	**%**	**309.112.439**	**-**	**%**	**-**	**0**	**%**	**-**	**0**	**%**	**-**	**22,22222**	**%**	**309.112.439**
1.7.1		4.02.01.2.08.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		288	Laporan	1.410.303.816	96	laporan	452.597.854	96	laporan	514.101.980	24	laporan	91.865.559										24	laporan	91.865.559

No	Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan renja Tahun lalu (2024)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
														I			II		III		IV				
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10		11		12		13		
						K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1.7.2		4.02.01.2.08.0003 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		36	Laporan	981.618.000	12	laporan	341.979.380	12	laporan	327.206.000	3	laporan								3	laporan	-
1.7.3		4.02.01.2.08.0004 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		144	Laporan	5.606.970.000	48	laporan	1.865.926.936	48	laporan	1.962.590.000	8	laporan	217.246.880							8	laporan	217.246.880
1.8		**4.02.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**Jumlah output sub kegiatan yang telah dilaksanakan / Jumlah output yang direncanakan x 100%**	**100**	**%**	**3.084.814.068**	**110**	**%**	**1.310.670.201**	**100**	**%**	**1.057.441.356**	**2,25**	**%**	**13.571.600**	**-**	**%**	**-**	**0**	**%**	**-**	**0**	**%**	**-**	**2,25**	**%**	**13.571.600**
1.8.1		4.02.01.2.09.0001 Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		5	unit	581.250.000	5	unit	193.750.000	5	unit	193.750.000		unit								5	unit	-
1.8.2		4.02.01.2.09.0002 Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		3	unit	194.910.000	3	unit	71.534.271	3	unit	72.040.000		unit								3	unit	-
1.8.3		4.02.01.2.09.0005 Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		30	unit	90.000.000	45	unit	29.500.000	30	unit	30.000.000										0	unit	-
1.8.4		4.02.01.2.09.0006 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		237	unit	753.450.000	178	unit	202.150.980	178	unit	273.250.000	20	unit	13.571.600							20	unit	13.571.600

No	Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan renja Tahun lalu (2024)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
														I			II			III			IV					
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13		
						K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp		K	Rp
1.8.5		4.02.01.2.09.0009 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2	unit	1.465.204.068	2	unit	813.734.950	2	unit	488.401.356													0	unit	-
1.9		**4.02.01.2.15 Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase capaian layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD**	**Jumlah output sub kegiatan yang telah dilaksanakan / Jumlah output yang direncanakan**	**100**	**%**	**87.324.330.000**	**100**	**%**	**28.642.015.064**	**100**	**%**	**35.167.465.000**	**50**	**%**	**7.615.668.498**	**-**	**%**	**-**	**0**	**%**	**-**	**0**	**%**	**-**	**50**	**%**	**7.615.668.498**
1.9.1		4.02.01.2.15.0001 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		45	orang/bulan	86.274.360.000	45	orang/bulan	28.448.160.064	45	orang/bulan	34.843.120.000	45	orang/bulan	7.615.668.498										45	orang/bulan	7.615.668.498
1.9.2		4.02.01.2.15.0002 Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		12	Paket	1.049.970.000	4	paket	193.855.000	4	paket	193.990.000													0	paket	-
		Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check Up DPRD								45	orang	130.355.000															
1.10		**4.02.01.2.16 Kegiatan Layanan Administrasi DPRD**	**Jumlah paket layanan administrasi DPRD**	**dilihat dari jumlah paket yang dibuat**	**108**	**Paket**	**1.627.237.500**	**36**	**paket**	**458.679.956**	**36**	**paket**	**561.801.800**	**9**	**paket**	**91.074.400**		**-**			**-**			**-**		**9**	**paket**	**91.074.400**
1.10.1		4.02.01.2.16.0004 Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan		108	Paket	1.627.237.500	36	paket	458.679.956	36	paket	561.801.800	9	paket	91.074.400										9	paket	91.074.400

No	Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan renja Tahun lalu (2024)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
														I			II		III		IV					
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10		11		12		13			
2		**4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase agenda kerja DPRD yang terfasilitasi**	**Jumlah agenda kerja yang telah dilaksanakan / Jumlah agenda kerja yang direncanakan x 100%**	**100**	**%**	**42.242.093.514**	**100**	**%**	**19.469.585.410**	**100**	**%**	**15.467.053.380**	**100**	**%**	**3.492.537.604**	**%**	**-**	**%**	**-**	%	-	**25,00**	**%**	**3.492.537.604**
2.1		**4.02.02.2.01 Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**jumlah dokumen rancangan peraturan daerah dan peraturan DPRD**	**dilihat dari jumlah dokumen yang dibuat**	**78**	**dokumen**	**1.620.894.900**	**23**	**dokumen**	**785.498.526**	**26**	**dokumen**	**540.298.300**	**7**	**dokumen**	**76.903.000**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**7**	**dokumen**	**76.903.000**
2.1.1		4.02.02.2.01.0001 Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		3	dokumen	7.157.700	1	dokumen	4.570.300	1	dokumen	2.385.900										0	dokumen	-
2.1.2		4.02.02.2.01.0002 Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		36	dokumen	620.757.300	9	dokumen	234.447.726	12	dokumen	206.919.100										0	dokumen	-
2.1.3		4.02.02.2.01.0003 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan		30	dokumen	227.940.000	9	dokumen	71.241.900	10	dokumen	75.980.000	5	dokumen	24.000.000							5	dokumen	24.000.000
2.1.4		4.02.02.2.01.0004 Sub Kegiatan Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		6	dokumen	753.153.000	3	dokumen	467.738.300	2	dokumen	251.051.000	1	dokumen	49.000.000							1	dokumen	49.000.000
2.1.5		4.02.02.2.01.0005 Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		3	dokumen	11.886.900	1	dokumen	7.500.300	1	dokumen	3.962.300	1	dokumen	3.903.000	dokumen						1	dokumen	3.903.000

No	Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan renja Tahun lalu (2024)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
														I			II		III		IV					
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10		11		12			13		
2.2		**4.02.02.2.02** **Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**jumlah dokumen hasil pembahasan kebijakan anggaran**	**dilihat dari jumlah dokumen yang dibuat**	**14**	**dokumen**	**677.760.000**	**7**	**dokumen**	**126.376.000**	**7**	**dokumen**	**225.920.000**			**-**		**-**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**dokumen**	**-**
2.2.1		4.02.02.2.02.0001 Sub Kegiatan pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		3	dokumen	11.775.000	1	dokumen	3.925.000	1	dokumen	3.925.000			-		-		-		-	0	dokumen	-
2.2.2		4.02.02.2.02.0002 Sub Kegiatan pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		3	dokumen	11.775.000	1	dokumen	3.925.000	1	dokumen	3.925.000			-		-		-		-	0	dokumen	-
2.2.3		4.02.02.2.02.0003 Sub Kegiatan Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		6	dokumen	630.060.000	2	dokumen	110.476.000	2	dokumen	210.020.000			-		-		-		-	0	dokumen	-
2.2.4		4.02.02.2.02.0004 Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan		6	dokumen	12.075.000	2	dokumen	4.025.000	2	dokumen	4.025.000			-		-		-		-	0	dokumen	-
2.2.5		4.02.02.2.02.0006 Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		3	dokumen	12.075.000	1	dokumen	4.025.000	1	dokumen	4.025.000			-		-		-		-	0	dokumen	-
2.3		**4.02.02.2.03** **Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan**	**Jumlah output sub kegiatan yang telah dilaksanakan / Jumlah output yang direncanakan**	**100**	**%**	**218.039.100**	**55,25**	**%**	**79.452.000**	**100**	**%**	**72.679.700**	**0,00**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**0,00**	**%**	**-**	**-**	**%**	**0,00**	**%**	**-**
2.3.1		4.02.02.2.03.0001 Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		180	Laporan	46.470.000	17	laporan	26.234.000	60	laporan	15.490.000			-		-		-		-	0	laporan	-
2.3.2		4.02.02.2.03.0002 Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		180	Laporan	46.470.000	17	laporan	14.540.000	60	laporan	15.490.000			-		-		-		-	0	laporan	-

No	Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan renja Tahun lalu (2024)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
														I			II			III			IV					
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13		
2.3.3.		4.02.02.2.03.0003 Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		180	Laporan	46.470.000	21	laporan	13.340.000	60	laporan	15.490.000												0	laporan	-
2.3.4		4.02.02.2.03.0004 Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		180	Laporan	40.410.000	24	laporan	12.769.000	60	laporan	13.470.000												0	laporan	-
2.3.5		4.02.02.2.03.0006 Sub Kegiatan Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		3	dokumen	10.095.000	1	dokumen	3.365.000	1	dokumen	3.365.000												0	dokumen	-
2.3.6		4.02.02.2.03.0008 Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		3	dokumen	28.124.100	1	dokumen	9.024.000	1	Dokumen	9.374.700												0	dokumen	-
2.4		**4.02.02.2.04** **Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase pelaksanaan hasil peningkatan kapasitas**	**Jumlah output sub kegiatan yang telah dilaksanakan / Jumlah output yang direncanakan**	**100**	**%**	**7.591.185.681**	**101**	**%**	**3.675.925.184**	**100**	**%**	**3.999.460.633**	**32,7**	**%**	**599.609.681**	**-**	**%**	**-**	**0**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**33**	**%**	**599.609.681**
2.4.1		4.02.02.2.04.0002 Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		18	dokumen	4.725.075.681	6	dokumen	2.875.812.184	6	dokumen	3.044.090.633	1	dokumen	557.609.681										1	dokumen	557.609.681
2.4.2		4.02.02.2.04.0005 Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		21	orang	882.900.000	8	orang	213.000.000	7	orang	294.300.000	8	orang	42.000.000										8	orang	42.000.000
2.4.3		4.02.02.2.04.0007 Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		3	dokumen	35.310.000	1	dokumen	11.682.000	1	dokumen	11.770.000												0	dokumen	-

No	Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan renja Tahun lalu (2024)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
														I			II			III			IV					
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13		
2.4.4		4.02.02.2.04.0008 Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan		78	dokumen	1.947.900.000	23	dokumen	575.431.000	26	dokumen	649.300.000													0	dokumen	-
2.5		**4.02.02.2.05** **Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Jumlah Dokumen penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat**	**dilihat dari jumlah dokumen yang dibuat**	**540**	**dokumen**	**16.716.021.333**	**135**	**dokumen**	**4.023.073.400**	**180**	**dokumen**	**6.267.463.000**	**45**	**dokumen**	**2.511.701.400**		**-**		**-**		**-**	**45**	**dokumen**	**2.511.701.400**
2.5.1		4.02.02.2.05.0002 Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		135	dokumen	9.960.000	45	dokumen	3.305.000	45	dokumen	3.320.000		dokumen									0	dokumen	-
2.5.2		4.02.02.2.05.0003 Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		405	kegiatan	16.706.061.333	90	dokumen	4.019.768.400	135	dokumen	6.264.143.000	45	dokumen	2.511.701.400								45	dokumen	2.511.701.400
2.6		**4.02.02.2.06** **Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD**	**Jumlah output sub kegiatan yang telah dilaksanakan / Jumlah output yang direncanakan**	**100**	**%**	**39.819.600**	**100**	**%**	**11.020.000**	**100**	**%**	**13.273.200**	**50**	**%**	**3.704.000**	**-**	**%**	**-**	**0**	**%**	**-**	**0**	**%**	**-**	**50**	**%**	**3.704.000**
2.6.1		4.02.02.2.06.0001 Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD		6	dokumen	11.289.300	2	dokumen	7.135.600	2	dokumen	3.763.100	2	dokumen	3.704.000								2	dokumen	3.704.000
2.6.2		4.02.02.2.06.0002 Sub Kegiatan Pengawasan kode etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		3	Laporan	28.530.300	1	laporan	3.884.400	1	laporan	9.510.100		laporan									0	laporan	-
2.7		**4.02.02.2.08** **Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase pelaksanaan fasilitasi tugas DPRD**	**Jumlah output sub kegiatan yang telah dilaksanakan / Jumlah output yang**	**100**	**%**	**15.378.372.900**	**119**	**%**	**10.768.240.300**	**100**	**%**	**4.347.958.547**	**13**	**%**	**300.619.523**	**-**	**%**	**-**	**0**	**%**	**-**	**-**	**%**	**-**	**13**	**%**	**300.619.523**
2.7.1		4.02.02.2.08.0001 Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		120	dokumen	11.550.204.000	95	dokumen	10.377.283.450	40	dokumen	3.850.068.000	8	dokumen	269.719.523								8	dokumen	269.719.523

No	Tujuan / Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan renja Tahun lalu (2024)			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		
														I			II			III			IV					
2.7.1		4.02.02.2.08.0001 Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		120	dokumen	11.550.204.000	95	dokumen	10.377.283.450	40	dokumen	3.850.068.000	8	dokumen	269.719.523									8	dokumen	269.719.523
2.7.2		4.02.02.2.08.0002 Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun		459	laporan	427.995.000	24	laporan	209.050.000	153	laporan	142.665.000	9	laporan	23.530.000									9	laporan	23.530.000
2.7.3		4.02.02.2.08.0003 Sub Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		36	dokumen	520.431.900	12	dokumen	160.912.850	12	dokumen	173.477.300	3	dokumen	7.370.000									3	dokumen	7.370.000
2.7.4		4.02.02.2.08.0004 Sub Kegiatan Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		42	dokumen	2.879.742.000	4	dokumen	20.994.000	14	dokumen	181.748.247		dokumen										0	dokumen	-
Jumlah Anggaran dan Realisasi Program													66.561.979.566			13.408.275.588			-			-		-			13.408.275.588
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)																											
Predikat Kinerja																											
Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																											
Predikat Kinerja																											

Dilihat dari tabel di atas bahwa Sekretariat DPRD Kota Pontianak untuk di tahun 2025 memiliki 2 (dua) Program, 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 58 (lima puluh delapan) Sub Kegiatan. Kalau di lihat dari masing-masing capaian kinerja untuk serapan masih belum maksimal dapat ditingkatkan lebih baik lagi. Adapun faktor pendorong keberhasilan yaitu adanya Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan terhadap DPRD dengan tugas pokoknya menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Namun pelayanan yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD tidaklah berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Tidak ada standar pelayanan minimal tertentu yang wajib dipenuhi oleh Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

Meskipun demikian, Sekretariat DPRD mempunyai peranan yang sangat penting dan turut menentukan efektifitas pelaksanaan fungsi DPRD; artinya bahwa efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD akan berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan fungsi DPRD.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas DPRD maka Sekretariat DPRD harus dapat berperan secara maksimal, dan untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku.

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, Sekretariat DPRD sebagai sistem pendukung pelaksanaan tugas-tugas dan wewenang DPRD .

Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi DPRD diperlukan Peningkatan kualitas penyelenggara pelayanan pada Sekretariat DPRD Kota Pontianak meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem pelayanan dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

a) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat fungsional dan struktural serta bimbingan teknis/kursus-kursus singkat.
b) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD
c) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan penyajian informasi.
d) Kualitas tenaga ahli dalam penyusunan / perancangan peraturan daerah, Peraturan DPRD dan Keputusan DPRD

IDENTIFIKASI FAKTOR STRATEGI

Dalam melakukan analisis untuk menentukan strategi, sasaran, program dan kegiatan tahunan ke depan Renja Sekretariat DPRD Kota Pontianak, dengan menganalisis faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman.

A. Identifikasi Faktor Strategi Eksternal

1. Peluang yang dapat dimanfaatkan, antara lain :
   a) Ketersediaan anggaran yang cukup memadai sehingga memungkinkan bagi organisasi untuk terus berinovasi dalam penyusunan program dan kegiatan guna menunjang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
   b) Adanya peluang bagi setiap staf untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dan pengembangan SDM.
   c) Pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka menunjang kinerja DPRD
   d) Pesatnya perkembangan teknologi informasi membuka peluang pengembangan aplikasi teknologi informasi untuk peningkatan aksesibilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
   e) Adanya forum Asosiasi Sekretariat DPRD Kab/ Kota Seluruh Indonesia (ASDEKSI) sebagai wadah bertukar informasi antar Sekretariat DPRD seluruh Indonesia.

2. Tantangan/ancaman yang perlu diantisipasi, antara lain :

a) Peraturan perundang-undangan sebagai instrument penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sering mengalami perubahan dan tidak dapat diprediksi.

B. Identifikasi Faktor Strategi Internal

1. Kekuatan yang bisa digunakan, antara lain :

a) Sinergitas hubungan yang cukup harmonis antara Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD.

b) Ketersediaan sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas yang cukup memadai.

2. Kendala/kelemahan yang perlu diperhatikan, antara lain :

a) Kualitas sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang belum memadai sehingga pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan pun dirasa belum optimal

b) Manajemen pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan penyebarluasan data dan informasi kedewanan yang belum terkelola dengan baik dan professional, sehingga belum mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat kota Pontianak.

c) Struktur organisasi belum mengacu pada Permendagri 104 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota

d) Tingginya intensitas kegiatan DPRD yang menyebabkan tuntutan pelayanan yang semakin meningkat

Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang,tantangan/ancaman diperoleh strategi alternative sebagai berikut :

1. Strategi memakai kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
2. Strategi menanggulangi kendala / kelemahan dengan memanfaatkan peluang;
3. Strategi memakai kekuatan untuk menghadapi tantangan /ancaman;
4. Strategi memperkecil kendala/kelemahan dan menghadapi tantangan/ancaman.

Dari hasil analisis sederhana, dengan membandingkan antara faktor eksternal peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dengan internal kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses). Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah dengan mengoptimalkan potensi yang ada, namun pengaruh kelemahan maupun ancaman perlu di perhatikan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dokumen Perubahan Rencana kerja dan pendanaan berisi program, kegiatan,sub kegiatan, lokasi, hasil program dan target, masukan kegiatan dan target, keluaran kegiatan dan target, hasil kegiatan dan target, serta pagu indikatif tahun anggaran 2025, sebagai cara untuk melaksanakan dan mengukur capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kebijakan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Penetapan prioritas program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak diselaraskan dengan perkembangan Kota Pontianak secara umum. Sedangkan kinerja yang berkaitan dengan terwujudnya pelayanan terhadap pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan) merupakan prioritas kinerja utama Sekretariat DPRD Kota Pontianak.

Secara rinci Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Pontianak Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

3.1 Rencana Kerja

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		SEKRETARIAT DPRD							**66.431.624.566,00**	**66.661.197.855,00**	**60.278.369.120,00**	**-6.153.255.446,00**							**55.794.024.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**							**66.431.624.566,00**	**66.661.197.855,00**	**60.278.369.120,00**	**-6.153.255.446,00**							**55.794.024.000,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**							**66.431.624.566,00**	**66.661.197.855,00**	**60.278.369.120,00**	**-6.153.255.446,00**							**55.794.024.000,00**	
1,	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Kepuasan Bidang/ Bagian Terhadap Pelayanan Kesekretariatan**				**95 Persen**	**95 Persen**	**50.964.571.186,00**	**51.014.662.902,00**	**49.567.850.469,00**	**-9.407.245.024,00**							**41.557.326.162,00**	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	42.884.800,00	21.158.000,00	21.158.000,00	-21.726.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	ASN		27.884.800,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	24.692.400,00	15.723.000,00	15.723.000,00	-8.969.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			9.692.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	9.641.600,00	346.600,00	346.600,00	-9.295.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			9.641.600,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	4 Laporan	8.550.800,00	5.088.400,00	5.088.400,00	-3.462.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			8.550.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 persen	100 persen	6.148.052.300,00	6.362.673.735,60	6.362.674.446,60	214.622.146,60			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	ASN		5.196.171.300,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	5.677.080.000,00	5.906.653.735,60	5.906.654.446,60	229.574.446,60	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			4.736.259.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	468.250.000,00	430.292.800,00	430.292.800,00	-37.957.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			457.190.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.722.300,00	25.727.200,00	25.727.200,00	23.004.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			2.722.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah*				100 persen	100 persen	37.152.000,00	0,00	0,00	-37.152.000,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Pimpinan DPRD		37.152.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	37.152.000,00	0,00	0,00	-37.152.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang			37.152.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 persen	100 persen	118.944.000,00	140.994.000,00	124.010.000,00	5.066.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	ASN		106.944.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	48.560.000,00	70.610.000,00	70.610.000,00	22.050.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			48.560.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	2 Orang	70.384.000,00	70.384.000,00	53.400.000,00	-16.984.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			58.384.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi perangkat daerah*				100 Persen	100 Persen	2.947.654.050,00	2.956.142.900,00	2.316.100.256,00	-631.553.794,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	ASN dan Anggota DPRD		2.563.763.034,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	83.234.400,00	78.822.400,00	78.822.400,00	-4.412.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			73.075.240,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				36 Paket	36 Paket	255.029.900,00	288.301.700,00	248.301.700,00	-6.728.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			243.318.900,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	89.909.400,00	96.889.600,00	96.889.600,00	6.980.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			121.768.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				24 Paket	24 Paket	178.955.600,00	985.952.200,00	835.160.756,00	656.205.156,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			945.381.044,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	181.358.750,00	251.186.000,00	212.214.800,00	30.856.050,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			181.358.750,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				72 Dokumen	72 Dokumen	76.000.000,00	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			76.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				36 Laporan	36 Laporan	1.605.665.000,00	735.360.000,00	625.360.000,00	-980.305.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			445.360.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	20 Laporan	477.501.000,00	443.631.000,00	143.351.000,00	-334.150.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			477.501.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 persen	100 persen	2.209.632.900,00	1.450.099.300,00	1.450.099.300,00	-759.533.600,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	ASN dan Anggota DPRD		305.964.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	1 Unit	1.903.668.000,00	475.917.000,00	475.917.000,00	-1.427.751.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	112.433.700,00	296.510.800,00	296.510.800,00	184.077.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			112.433.700,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	193.531.200,00	677.671.500,00	677.671.500,00	484.140.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			193.531.200,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 persen	100 persen	2.803.897.980,00	3.057.878.110,40	3.041.998.110,40	238.100.130,40			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	ASN dan Anggota DPRD		2.666.297.272,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				96 Laporan	96 Laporan	514.101.980,00	514.101.980,00	514.101.980,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			470.101.272,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	327.206.000,00	249.024.400,00	249.024.400,00	-78.181.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			327.206.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	48 Laporan	1.962.590.000,00	2.294.751.730,40	2.278.871.730,40	316.281.730,40	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			1.868.990.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah*				100 persen	100 persen	1.057.441.356,00	910.501.356,00	910.501.356,00	-146.940.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	ASN dan Anggota DPRD		1.028.271.356,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	193.750.000,00	38.750.000,00	38.750.000,00	-155.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			193.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	72.040.000,00	80.100.000,00	80.100.000,00	8.060.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			64.970.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			30.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				178 Unit	178 Unit	273.250.000,00	273.250.000,00	273.250.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			251.150.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	488.401.356,00	488.401.356,00	488.401.356,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			488.401.356,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*persentase capaian Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*				100 persen	100 persen	35.037.110.000,00	35.307.835.000,00	34.646.335.000,00	-390.775.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Anggota DPRD		29.082.465.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	34.843.120.000,00	34.843.120.000,00	34.181.620.000,00	-661.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			28.758.120.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	193.990.000,00	334.360.000,00	334.360.000,00	140.370.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			193.990.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				-	45 Orang	0,00	130.355.000,00	130.355.000,00	130.355.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			130.355.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Jumlah paket layanan administrasi DPRD*				36 paket	36 paket	561.801.800,00	807.380.500,00	694.974.000,00	133.172.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	ASN dan Anggota DPRD		542.412.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				36 Paket	36 Paket	561.801.800,00	807.380.500,00	694.974.000,00	133.172.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			542.412.500,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2,	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase agenda kerja DPRD yang terfasilitasi**				**100 persen**	**100 persen**	**15.467.053.380,00**	**15.646.534.953,00**	**10.710.518.651,00**	**-1.230.355.542,00**							**14.236.697.838,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*jumlah dokumen rancangan peraturan daerah dan peraturan DPRD*				26 Dokumen	26 Dokumen	540.298.300,00	734.700.100,00	714.191.580,00	173.893.280,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	ASN dan Anggota DPRD		540.298.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.385.900,00	2.385.500,00	2.385.500,00	-400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			2.385.900,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	206.919.100,00	221.919.000,00	209.809.200,00	2.890.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			206.919.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan																		
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				10 Dokumen	10 Dokumen	75.980.000,00	255.980.000,00	255.980.000,00	180.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			75.980.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				2 Dokumen	2 Dokumen	251.051.000,00	250.453.600,00	242.054.880,00	-8.996.120,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			251.051.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD																		
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	3.962.300,00	3.962.000,00	3.962.000,00	-300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			3.962.300,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-				-	-	225.920.000,00	225.920.000,00	188.126.800,00	-37.793.200,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	ASN dan Anggota DPRD		225.920.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	3.925.000,00	3.925.000,00	3.925.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			3.925.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	3.925.000,00	3.925.000,00	3.925.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			3.925.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	210.020.000,00	210.020.000,00	172.226.800,00	-37.793.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			210.020.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				2 Dokumen	2 Dokumen	4.025.000,00	4.025.000,00	4.025.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			4.025.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.025.000,00	4.025.000,00	4.025.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			4.025.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Persentase pelaksanaan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan*				100 persen	100 persen	72.679.700,00	72.679.700,00	64.416.760,00	-8.262.940,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	ASN, masyarakat dan Anggota DPRD		72.679.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				60 Laporan	60 Laporan	15.490.000,00	15.490.000,00	13.792.000,00	-1.698.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			15.490.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				60 Laporan	60 Laporan	15.490.000,00	15.490.000,00	13.792.000,00	-1.698.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			15.490.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				60 Laporan	60 Laporan	15.490.000,00	15.490.000,00	13.792.000,00	-1.698.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			15.490.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				60 Laporan	60 Laporan	13.470.000,00	13.470.000,00	12.176.000,00	-1.294.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			13.470.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	3.365.000,00	3.365.000,00	3.365.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			3.365.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	9.374.700,00	9.374.700,00	7.499.760,00	-1.874.940,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			9.374.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Persentase pelaksanaan hasil peningkatan kapasitas DPRD*				100 persen	100 persen	3.999.460.633,00	3.775.716.153,00	2.168.541.311,00	-1.830.919.322,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	ASN dan Anggota DPRD		1.990.939.338,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	3 Dokumen	3.044.090.633,00	2.881.798.684,00	1.496.892.842,00	-1.547.197.791,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			1.035.569.338,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	8 Orang	294.300.000,00	336.300.000,00	252.000.000,00	-42.300.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			294.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.770.000,00	11.750.000,00	11.750.000,00	-20.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			11.770.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				26 Dokumen	20 Dokumen	649.300.000,00	545.867.469,00	407.898.469,00	-241.401.531,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			649.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Jumlah Dokumen penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat*				180 Dokumen	180 Dokumen	6.267.463.000,00	6.251.773.000,00	5.130.707.200,00	-1.136.755.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	ASN, masyarakat dan Anggota DPRD		6.267.463.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				45 Dokumen	45 Dokumen	3.320.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			3.320.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				135 Dokumen	135 Dokumen	6.264.143.000,00	6.248.453.000,00	5.127.387.200,00	-1.136.755.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			6.264.143.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD*				100 persen	100 persen	13.273.200,00	15.273.000,00	15.273.000,00	1.999.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Anggota DPRD		13.273.200,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.763.100,00	3.763.000,00	3.763.000,00	-100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			3.763.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	1 Laporan	9.510.100,00	11.510.000,00	11.510.000,00	1.999.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			9.510.100,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Persentase pelaksanaan fasilitasi tugas DPRD*				100 persen	100 persen	4.347.958.547,00	4.570.473.000,00	2.429.262.000,00	-1.918.696.547,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Anggota DPRD		5.126.124.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				40 Dokumen	20 Dokumen	3.850.068.000,00	4.138.006.000,00	2.097.624.000,00	-1.752.444.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			3.850.068.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																		
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				153 Laporan	36 Laporan	142.665.000,00	142.525.000,00	122.020.000,00	-20.645.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			142.665.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	12 Dokumen	173.477.300,00	173.320.000,00	173.320.000,00	-157.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			173.477.300,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				14 Dokumen	4 Dokumen	181.748.247,00	116.622.000,00	36.298.000,00	-145.450.247,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			959.914.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	J U M L A H								**66.431.624.566,00**	**66.661.197.855,00**	**60.278.369.120,00**	**49.793.924.220,00**							**55.794.024.000,00**	

Adapun Program, kegiatan, Sub kegiatan dan target yang mengalami perubahan diantaranya :

- Sub kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD target sebelumnya 50 laporan yaitu belanja perjalanan dinas, menjadi 20 laporan
- Sub kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dimana target sebelumnya 4 unit menjadi 1 unit dikarenakan pimpinan DPRD tidak membeli mobil.
- Sub kegiatan : Pendalaman Tugas DPRD dimana target sebelumnya 6 dokumen yaitu 6 kali bimtek dalam satu tahun, menjadi 3 dokumen dikarenakan efisiensi.
- Sub kegiatan : Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dimana target awal sebanyak 7 orang dikarenakan adanya penambahan jumlah fraksi sehingga menjadi 8 orang.
- Sub kegiatan : koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD target sebelumnya 40 dokumen menjadi 20 dokumen dikartenakan efisiensi.
- Sub kegiatan : penyusunan laporan kinerja DPRD target sebelumnya 153 laporan menjadi 36 laporan yang hanya kinerjanya berupa laporan risalah
- Sub kegiatan : Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD target sebelumnya 14 dokumen menjadi 4 dokumen dikarenakan efisiensi.

3.2. Pendanaan

Pelaksanaan program kegiatan Sekretariat Daerah Kota Pontianak sesuai dengan program yang telah digariskan oleh Pemerintah Kota maupun Pemerintah Pusat dengan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026. Anggaran Sekretariat Daerah Kota Pontianak dalam Perubahan APBD Tahun anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

   Program ini pada anggaran murni tahun 2025 sebesar Rp. 51.014.662.902,- pada anggaran perubahan tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 49.567.850.469,-. Ada penurunan anggaran sebesar Rp. 1.446.812.433,-.

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

   Program ini pada anggaran murni tahun 2025 sebesar Rp. 15.646.534.953,- pada anggaran perubahan tahun 2025 menjadi sebesar Rp. 10.710.518.651,- mengalami penurunan sebesar Rp. 4.936.016.302,-.

BAB IV
PENUTUP

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan I tahun 2025, masih diperlukan kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2025 ini sebagaimana telah ditargetkan pada renstra Sekretariat DPRD Kota Pontianak tahun 2024-2026 dalam rangka menunjang tercapainya visi dan misi Walikota Pontianak serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Perubahan Rencana kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Pontianak tahun 2025.

Perubahan Rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Pontianak tahun 2025 untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Pemerintah Kota Pontianak. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

Perubahan rencana kerja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan tahun anggaran 2025, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Pontianak.

Demikian Renja Sekretariat DPRD Kota Pontianak disusun untuk menjadi arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Pontianak, Juni 2025

Sekretaris DPRD Kota Pontianak

TITIN SUBAKTI, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19691207 198803 2 001

BAPPERIDA
KOTA PONTIANAK

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak

(0561) 734294 – 733045

bapperida@pontianak.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami menyampaikan bahwa Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 telah dapat disusun dan diselesaikan sebagai bahan dari upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang adaptif, responsif dan berkelanjutan.

Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja ini merupakan langkah strategis dalam rangka penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan pembangunan yang terjadi pada tahun berjalan. Perubahan ini mencakup berbagai aspek penting antara lain penyesuaian target kinerja, indikator hasil, prioritas kegiatan, hingga alokasi anggaran yang didasarkan pada realisasi kebijakan nasional dan daerah, perkembangan ekonomi, sosial serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja sebelumnya.

Tahun 2025 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 yang menjadi landasan arah pembangunan jangka menengah daerah. Oleh karena itu, dokumen perubahan rencana kerja ini memegang peranan penting dalam menjaga kesinambungan dan konsistensi capaian pembangunan sekaligus memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapperida dapat memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.

Sebagai perangkat daerah perencana yang juga memegang mandat di bidang penelitian dan pengembangan Bapperida dituntut untuk tidak hanya menyusun rencana yang bersifat teknokratis tetapi mampu menerjemahkan visi pembangunan ke dalam langkah-langkah yang terukur, berbasis data dan inovatif. Proses penyusunan dokumen ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik unsur pemerintah daerah, legislatif, akademisi, pelaku usaha hingga masyarakat sehingga dokumen ini mencerminkan kebutuhan riil dan aspirasi yang berkembang ditengah masyarakat.

Melalui dokumen ini, Bapperida berkomitmen untuk terus memperkuat peran sebagai perangkat daerah penggerak perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berbasis bukti serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Harapan kami Dokumen Perubahan Renja Bapperida Kota Pontianak Tahun 2025 ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran, efektif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan Kota Pontianak.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar …… i
Daftar Isi ……..... ii
Daftar Tabel ……..…….. iii

BAB I. Pendahuluan ……..…….. I-1
I.1. Latar Belakang ……..... I-1
I.2. Landasan Hukum ……... I-4
I.3. Maksud dan Tujuan ……..... I-7
I.4. Sistematika Penulisan ……..... I-8
BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan I ……..... II-1
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapperida Kota Pontianak dan CapaianRenstra Bapperida Kota Pontianak II-1
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapperida Kota Pontianak II-25

BAB III. Rencana, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah …….. III-1
III.1. Rencana Kerja Perangkat Daerah III-1
III.2. Pendanaan Perangkat Daerah III-60
BAB IV. Penutup ……. IV-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Bapperida Kota Pontianak II-2

Tabel 2.2. Realisasi Keuangan Bapperida Kota Pontianak Triwulan II Tahun 2025 ..... II-19

Tabel 3.1. Rincian Perubahan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bapperida Kota Pontianak Tahun 2025 ..... III-34

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran operasional dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam konteks pemerintahan daerah, Renja tidak hanya menjadi instrumen teknis pelaksanaan pembangunan, melainkan juga merupakan cerminan dari dinamika kebijakan, pengelolaan anggaran, serta upaya peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah.

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih adaptif, respontif, dan berkualitas serta untuk menyesuaikan dengan dinamika kebijakan dan kondisi terkini, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025. Penyusunan Perubahan ini didasari oleh berbagai regulasi dan kebijakan strategis sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengatur bahwa Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan

perubahan apabila terjadi :

- Perubahan kebijakan nasioanal dan/atau daerah
- Perubahan kerangka ekonomi makro dan kemampuan pendanaan
- Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya
- Perubahan prioritas pembangunan dan kondisi objektif daerah

Dengan mengacu ketentuan diatas, maka penyusunan Perubahan Renja BAPPERIDA Tahun 2025 merupakan langkah normatif dan diperlukan untuk memastikan agar program dan kegiatan tetap relevan, responsif dan sesuai arah kebijakan yang berlaku.

2. Rencana Strategis BAPPERIDA Kota Pontianak Tahun 2024-2026

Renstra BAPPERIDA Kota Pontianak Tahun 2024-2026 merupakan pedoman arah kebijakan jangka menengah dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, adaptif, dan berorientasi hasil. Renstra ini menetapkan lima arah kebijakan sebagai landasan operasional :

- Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah guna memastikan keselarasan antar perangkat daerah dan antar level pemerintahan.
- Peningkatan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran agar proses pembangunan berjalan selaras dengan ketersediaan dan efisiensi penggunaan anggaran.
- Peningkatan kualitas pengendalian, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk mempermudah fungsi monitoring dan akuntabilitas.
- Peningkatan kualitas dan kebermanfaatan penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.
- Peningkatan kualitas dan kebermanfaatan pengembangan inovasi dan teknologi untuk mendorong penciptaan solusi kreatif dalam menghadapi tantangan pembangunan.

Perubahan Renja Tahun 2025 menjadi sarana penyesuaian program dan kegiatan agar tetap selaras dengan arah kebijakan tersebut, terutama dalam menguatkan fungsi koordinasi lintas sektor, memperkuat integrasi perencanaan dan penganggaran, serta memastikan bahwa riset, evaluasi dan inovasi benar-benar digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan

pembangunan di kota Pontianak.

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025

Sebagai upaya pengendalian belanja dan peningkatan efisiensi pengeluaran pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD memberikan arahan tegas kepada seluruh pemerintah daerah untuk :

- Melakukan rasionalisasi belanja terhadap program dan kegiatan yang tidak mendukung prioritas pembangunan nasional dan daerah.
- Mengutamakan belanja produktif serta memastikan alokasi anggaran menghasilkan output dan outcome yang nyata.
- Memperkuat integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis hasil.

Dalam konteks ini, perubahan Renja BAPPERIDA Tahun 2025 menjadi sarana penting untuk melakukan penajaman fokus kegiatan, efisiensi alokasi anggaran dan penyesuaian belanja dengan hasil pembangunan yang diharapkan tanpa mengabaikan fungsi strategis kelembagaan.

4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tahun 2024

Surat edaran ini diterbitkan sebagai tindak lanjut atas kebijakan nasional dalam rangka penyesuaian arah pembangunan tahun 2025. Beberapa poin penting dalam SE ini antara lain :

- Pemerintah daerah diwajibkan melakukan penyesuaian terhadap RKPD, APBD, dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
- Tema Pembangunan Nasional 2025 adalah Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
- Fokus pembangunan meliputi Ketahanan pangan, transformasi digital, ekonomi hijau, dan pelayanan dasar berkualitas.

Surat Edaran ini memberikan arahan agar perubahan Renja tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substansial dalam mendukung efektivitas pembangunan daerah yang bersinergi dengan kebijakan pusat. Perubahan Renja BAPPERIDA diharapkan dapat mengoptimalkan perannya dalam menyusun, mengoordinasikan, dan mengarahkan perencanaan pembangunan kota pontianak secara lebih efisien, inklusif, inovatif dan berkelanjutan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Pontianak merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk :

- Menyesuaikan pelaksanaan program dan kegiatan dengan kebijakan nasional dan arah pembangunan daerah.
- Mengimplementasikan arah kebijakan Renstra BAPPERIDA yang berorientasi pada peningkatan koordinasi, evaluasi, riset dan inovasi.
- Mendukung prinsip efisiensi belanja daerah sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025.
- Menindaklanjuti arahan teknis penyesuaian kebijakan melalui Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.1/640/SJ Tahun 2024.

Dengan perubahan ini, BAPPERIDA diharapkan dapat memperkuat peran strategisnya dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan yang adaptif, kolaboratif serta berorientasi hasil dan inovasi demi mendukung pencapaian visi pembangunan kota pontianak.

I.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6402).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaandan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6178).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6322).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah(Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 1781).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).

19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228).
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 227).
21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 15.1 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 15.1).
23. Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 1).
24. Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor B/0007.2.4/ 26 /BAPPERIDA/2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

I.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

a). Maksud

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 dimaksudkan untuk :

1). Menyesuaikan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kota

Pontianak Tahun 2025 sebagai Dokumen Perencanaan Tahunan yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan daerah.

2). Menjamin keterpaduan dan keselarasan perencanaan serta penganggaran, dengan memperhatikan Dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun 2025 serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak Tahun 2025.

3). Mengakomodasi perubahan kondisi dan kebutuhan pembangunan yang bersifat strategis dan mendesak, baik yang berasal dari evaluasi pelaksanaan tahun berjalan, dinamika kebijakan nasional/daerah maupun aspirasi masyarakat.

b). Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 bertujuan untuk :

1). Menjamin Konsistensi antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, sehingga program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak dapat terlaksana sesuai target dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun 2025.

2). Mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah melalui perencanaan yang adaptif dan akuntabel, selaras dengan prioritas pembangunan yang diperbaharui dalam Perubahan RKPD Kota Pontianak Tahun 2025.

3). Menyesuaikan Substansi Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak dengan Plafon Anggaran yang tersedia, serta mengoptimalkan hasil pembangunan melalui pendekatan perencanaan partisipatif.

4). Mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan yang inovatif, kolaboratif dan berkelanjutan.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak, disusun dengan sistematika yang meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai Latar Belakang Penyusunan Dokumen Perubahan, Landasan Hukum yang digunakan, Maksud dan Tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan dokumen. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal terkait alasan dan urgensi penyusunan perubahan Rencana Kerja serta kerangka berpikir yang mendasari penyusunan dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab ini menyajikan hasil Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan hingga akhir Triwulan II Tahun 2025. Evaluasi mencakup analisis capaian indikator kinerja, identifikasi permasalahan dan hambatan. Informasi dalam Bab ini menjadi dasar merumuskan perubahan dan penyesuaian rencana kerja ke depan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjabarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengalami perubahan sebagai hasil dari evaluasi sebelumnya. Setiap komponen dilengkapi dengan informasi terkait Indikator Kinerja, Target, Output, Lokasi Pelaksanaan, Penanggung Jawab, serta Alokasi Anggaran. Bab ini merupakan inti dari dokumen perubahan yang mencerminkan penyesuaian arah pelaksanaan rencana kerja untuk sisa tahun anggaran.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan proses evaluasi dan penyesuaian rencana kerja, serta rekomendasi strategis yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pada sisa tahun berjalan. Penutup ini memberikan arah bagi pelaksanaan dan pengawasan rencana kerja perubahan ke depan.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bapperida Kota Pontianak dan Capaian Renstra Bapperida Kota Pontianak.

Kualitas Renja Perangkat Daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pencapain visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Dalam penyusunan perubahan Renja Bapperida Kota Pontianak Tahun 2025 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Bapperida Kota Pontianak Tahun 2025 sampai dengan triwulan II serta juga disajikan capaian Renstra Bapperida Kota Pontianak Tahun 2024-2026 sampai dengan Tahun 2025 triwulan II.

a. *Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Capaian Target Renstra Tahun 2024-2026 sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Bapperida Kota Pontianak.*

Pada Renstra Tahun 2024-2026 terlihat bahwa Bapperida Kota Pontianak melaksanakan 2 urusan yaitu Urusan Perencanaan serta Urusan Penelitian dan Pengembangan yang memuat 4 Program, 19 Kegiatan, dan 78 Sub Kegiatan.

Secara rinci evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan perkiraan capaian target Renstra Tahun 2024-2026 Bapperida Kota Pontianak sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersaji dalam Tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2025
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025					Tingkat Capaian Realisasi Tingkat Renstra s.d. Triwulan II Tahun 2025 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2025		
							Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*		*(5)*		*(6)*		*(7)*		*(8)*	*(9)*	*(10)*		*(11)*
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Persentase Tingkat Kepuasaan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan**	**95.00**	**%**	**95.00**	**%**	**95.00**	**%**	**0.00**	**%**	**0.00**	**100.00**	**95.00**	**%**	**100.00**
1.1.	***Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***100.00***	***%***	***94.74***	***%***	***100.00***	***%***	***27.78***	***%***	***27.78***	***41.54***	***65.73***	***%***	***65.73***
1.1.1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.00	Dokumen	10.00	Dokumen	9.00	Dokumen	5.00	Dokumen	55.56	57.69	19.00	Dokumen	73.08
1.1.2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.00	Dokumen	1.00	Dokumen	1.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	33.33	2.00	Dokumen	66.67
1.1.3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.00	Dokumen	1.00	Dokumen	1.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	33.33	2.00	Dokumen	66.67
1.1.4.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.00	Laporan	4.00	Laporan	4.00	Laporan	2.00	Laporan	50.00	50.00	8.00	Laporan	66.67

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025					Tingkat Capaian Realisasi Tingkat Renstra s.d. Triwulan II Tahun 2025 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2025		
							Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)		(11)
1.1.5.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.00	Laporan	2.00	Laporan	3.00	Laporan	1.00	Laporan	33.33	33.33	5.00	Laporan	55.56
1.2.	***Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***100.00***	***%***	***100.00***	***%***	***100.00***	***%***	***34.26***	***%***	***34.26***	***49.33***	***67.46***	***%***	***67.46***
1.2.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	126.00	Orang/ Bulan	42.00	Orang/ Bulan	42.00	Orang/ Bulan	47.00	Orang/ Bulan	43.25	70.63	89.00	Orang/ Bulan	70.63
1.2.2.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36.00	Dokumen	12.00	Dokumen	12.00	Dokumen	5.00	Dokumen	41.67	47.22	24.00	Dokumen	66.67
1.2.3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15.00	Dokumen	5.00	Dokumen	5.00	Dokumen	1.00	Dokumen	20.00	40.00	10.00	Dokumen	66.67
1.2.4.	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	30.00	Dokumen	10.00	Dokumen	10.00	Dokumen	3.00	Dokumen	30.00	43.33	20.00	Dokumen	66.67
1.2.5.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran	66.00	Laporan	22.00	Laporan	22.00	Laporan	8.00	Laporan	36.36	45.45	44.00	Laporan	66.67

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025					Tingkat Capaian Realisasi Tingkat Renstra s.d. Triwulan II Tahun 2025 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2025		
							Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)		(11)
1.3.	***Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah***	***Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***100.00***	***%***	***100.00***	***%***	***100.00***	***%***	***0.00***	***%***	***0.00***	***33.33***	***66.67***	***%***	***66.67***
1.3.1.	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.00	Dokumen	1.00	Dokumen	1.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	33.33	2.00	Dokumen	66.67
1.4.	***Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***100.00***	***%***	***98.98***	***%***	***100.00***	***%***	***26.39***	***%***	***26.39***	***41.17***	***65.38***	***%***	***65.38***
1.4.1.	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	9.00	Paket	3.00	Paket	3.00	Paket	0.00	Paket	0.00	33.33	6.00	Paket	66.67
1.4.2.	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.00	Dokumen	1.00	Dokumen	1.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	33.33	2.00	Dokumen	66.67
1.4.3.	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13.00	Orang	4.00	Orang	4.00	Orang	2.00	Orang	50.00	46.15	8.00	Orang	61.54
1.4.4.	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	270.00	Orang	90.00	Orang	90.00	Orang	50.00	Orang	55.56	51.85	180.00	Orang	66.67
1.5.	***Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***100.00***	***%***	***100.00***	***%***	***100.00***	***%***	***24.48***	***%***	***24.48***	***56.77***	***112.50***	***%***	***112.50***

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025					Tingkat Capaian Realisasi Tingkat Renstra s.d. Triwulan II Tahun 2025 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2025		
							Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)		(11)
1.5.1.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	36.00	Paket	12.00	Paket	12.00	Paket	2.00	Paket	16.67	38.89	24.00	Paket	66.67
1.5.2.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	36.00	Paket	12.00	Paket	12.00	Paket	5.00	Paket	41.67	47.22	24.00	Paket	66.67
1.5.3.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	36.00	Paket	12.00	Paket	12.00	Paket	4.00	Paket	33.33	44.44	24.00	Paket	66.67
1.5.4.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	36.00	Paket	12.00	Paket	12.00	Paket	4.00	Paket	33.33	44.44	24.00	Paket	66.67
1.5.5.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	5040.00	Paket	1680.00	Paket	1680.00	Paket	630.00	Paket	37.50	45.83	3360.00	Paket	66.67
1.5.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.00	Laporan	1.00	Laporan	12.00	Laporan	4.00	Laporan	33.33	166.67	13.00	Laporan	433.33
1.5.7.	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.00	Dokumen	1.00	Dokumen	1.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	33.33	2.00	Dokumen	66.67
1.5.8.	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.00	Dokumen	1.00	Dokumen	1.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	33.33	2.00	Dokumen	66.67

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025					Tingkat Capaian Realisasi Tingkat Renstra s.d. Triwulan II Tahun 2025 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2025		
							Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)		(11)
1.6.	***Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***100.00***	***%***	***200.00***	***%***	***100.00***	***%***	***0.00***	***%***	***0.00***	***66.67***	***100.00***	***%***	***100.00***
1.6.1.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	30.00	Unit	20.00	Unit	10.00	Unit	0.00	Unit	0.00	66.67	30.00	Unit	100.00
1.7.	***Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***100.00***	***%***	***100.00***	***%***	***100.00***	***%***	***27.78***	***%***	***27.78***	***36.67***	***66.67***	***%***	***66.67***
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.00	Laporan	1.00	Laporan	1.00	Laporan	0.00	Laporan	0.00	33.33	2.00	Laporan	66.67
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36.00	Laporan	12.00	Laporan	12.00	Laporan	5.00	Laporan	41.67	38.33	24.00	Laporan	66.67
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	36.00	Laporan	12.00	Laporan	12.00	Laporan	5.00	Laporan	41.67	38.33	24.00	Laporan	66.67
1.8.	***Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***100.00***	***%***	***95.83***	***%***	***100.00***	***%***	***19.44***	***%***	***19.44***	***36.65***	***61.57***	***%***	***61.57***

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025					Tingkat Capaian Realisasi Tingkat Renstra s.d. Triwulan II Tahun 2025 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2025		
							Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*		*(5)*		*(6)*		*(7)*		*(8)*	*(9)*	*(10)*		*(11)*
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9.00	Unit	2.00	Unit	2.00	Unit	2.00	Unit	25.00	25.22	4.00	Unit	44.44
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	216.00	Unit	87.00	Unit	72.00	Unit	24.00	Unit	33.33	51.39	159.00	Unit	73.61
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3.00	Unit	1.00	Unit	1.00	Unit	0.00	Unit	0.00	33.33	2.00	Unit	66.67
2	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**1). Persentase Keselarasan Kinerja Pembangunan pada Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan DPA-APBD**	**80.00**	**%**	**100.00**	**%**	**75.00**	**%**	**0.00**	**%**	**0.00**	**125.00**	**75.00**	**%**	**93.75**
		2). Indeks Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	**82.00**	**Indeks**	**88.50**	**Indeks**	**81.00**	**Indeks**	**0.00**	**Indeks**	**0.00**	**107.93**	**81.00**	**Indeks**	**98.78**
2.1.	***Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan***	***Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan***	***100.00***	***%***	***106.63***	***%***	***100.00***	***%***	***68.85***	***%***	***68.65***	***62.49***	***70.87***	***%***	***70.87***
2.1.1.	Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	5.00	Dokumen	2.00	Dokumen	2.00	Dokumen	2.00	Dokumen	100.00	80.00	4.00	Dokumen	80.00

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025					Tingkat Capaian Realisasi Tingkat Renstra s.d. Triwulan II Tahun 2025 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2025		
							Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)		(11)
2.1.2.	Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3.00	Dokumen	1.00	Dokumen	1.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	33.33	2.00	Dokumen	66.67
2.1.3.	Sub Kegiatan Pelaksaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	5.00	Berita Acara	1.00	Berita Acara	2.00	Berita Acara	2.00	Berita Acara	100.00	80.00	3.00	Berita Acara	60.00
2.1.4.	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	96.00	Berita Acara	32.00	Berita Acara	32.00	Berita Acara	32.00	Berita Acara	100.00	66.67	64.00	Berita Acara	66.67
2.1.5.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	5.00	Berita Acara	2.00	Berita Acara	2.00	Berita Acara	2.00	Berita Acara	100.00	80.00	4.00	Berita Acara	80.00
2.1.6.	Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	2110.00	Usulan	730.00	Usulan	700.00	Usulan	564.00	Usulan	80.57	59.91	1430.00	Usulan	67.77
2.1.7.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	8.00	Dokumen	3.00	Dokumen	3.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	37.50	6.00	Dokumen	75.00
2.2.	***Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah***	***Persentase Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah***	***100.00***	***%***	***100.00***	***%***	***100.00***	***%***	***33.33***	***%***	***33.33***	***44.44***	***66.67***	***%***	***66.67***

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025					Tingkat Capaian Realisasi Tingkat Renstra s.d. Triwulan II Tahun 2025 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2025		
							Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*		*(5)*		*(6)*		*(7)*		*(8)*	*(9)*	*(10)*		*(11)*
2.2.1.	Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3.00	Dokumen	1.00	Dokumen	1.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	33.33	2.00	Dokumen	66.67
2.2.2.	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	240.00	Orang	80.00	Orang	80.00	Orang	0.00	Orang	0.00	33.33	160.00	Orang	66.67
2.2.3.	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan	3.00	Buku	1.00	Buku	1.00	Buku	1.00	Buku	100.00	66.67	2.00	Buku	66.67
2.3.	***Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah***	***Persentase Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah***	***100.00***	***%***	***100.00***	***%***	***100.00***	***%***	***16.67***	***%***	***16.67***	***37.04***	***64.81***	***%***	***64.81***
2.3.1.	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksaaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	6.00	Laporan	2.00	Laporan	2.00	Laporan	0.00	Laporan	0.00	33.33	4.00	Laporan	66.67
2.3.2.	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja sama Daerah yang dikoordinasikan Pelaksanaannya	18.00	Kerjasama	5.00	Kerjasama	6.00	Kerjasama	0.00	Kerjasama	0.00	27.78	11.00	Kerjasama	61.11

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025					Tingkat Capaian Realisasi Tingkat Renstra s.d. Triwulan II Tahun 2025 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2025		
							Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)		(11)
2.3.3.	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	24.00	Laporan	8.00	Laporan	8.00	Laporan	4.00	Laporan	50.00	50.00	16.00	Laporan	66.67
2.4.	**Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**Persentase Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	**100.00**	**%**	**100.00**	**%**	**100.00**	**%**	**33.33**	**%**	**0.00**	**33.33**	**66.67**	**%**	**66.67**
2.4.1.	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang dikelola	3.00	Dokumen	1.00	Dokumen	1.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	33.33	2.00	Dokumen	66.67
2.4.2.	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	6.00	Dokumen	2.00	Dokumen	2.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	33.33	4.00	Dokumen	66.67
3	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keselarasan Kinerja Pembangunan pada Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan DPA-APBD**	**80.00**	**%**	**100.00**	**%**	**75.00**	**%**	**0.00**	**%**	**0.00**	**125.00**	**75.00**	**%**	**93.75**

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025					Tingkat Capaian Realisasi Tingkat Renstra s.d. Triwulan II Tahun 2025 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2025		
							Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*		*(5)*		*(6)*		*(7)*		*(8)*	*(9)*	*(10)*		*(11)*
3.1.	***Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia***	***Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia***	***100.00***	***%***	***100.00***	***%***	***100.00***	***%***	***0.00***	***%***	***0.00***	***33.33***	***66.67***	***%***	***66.67***
3.1.1.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3.00	Dokumen	1.00	Dokumen	1.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	33.33	2.00	Dokumen	66.67
3.1.2.	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3.00	Laporan	1.00	Laporan	1.00	Laporan	0.00	Laporan	0.00	33.33	2.00	Laporan	66.67
3.1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	3.00	Laporan	1.00	Laporan	1.00	Laporan	0.00	Laporan	0.00	33.33	2.00	Laporan	66.67
3.1.4.	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3.00	Laporan	1.00	Laporan	1.00	Laporan	0.00	Laporan	0.00	33.33	2.00	Laporan	66.67

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025					Tingkat Capaian Realisasi Tingkat Renstra s.d. Triwulan II Tahun 2025 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2025		
							Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*		*(5)*		*(6)*		*(7)*		*(8)*	*(9)*	*(10)*		*(11)*
3.1.5.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	3.00	Dokumen	1.00	Dokumen	1.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	33.33	2.00	Dokumen	66.67
3.1.6.	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3.00	Laporan	1.00	Laporan	1.00	Laporan	0.00	Laporan	0.00	33.33	2.00	Laporan	66.67
3.1.7	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3.00	Laporan	1.00	Laporan	1.00	Laporan	0.00	Laporan	0.00	33.33	2.00	Laporan	66.67
3.1.8	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3.00	Laporan	1.00	Laporan	1.00	Laporan	0.00	Laporan	0.00	33.33	2.00	Laporan	66.67
3.2.	***Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA***	***Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA***	***100.00***	***%***	***100.00***	***%***	***100.00***	***%***	***0.00***	***%***	***0.00***	***37.07***	***66.67***	***%***	***66.67***

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025					Tingkat Capaian Realisasi Tingkat Renstra s.d. Triwulan II Tahun 2025 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2025		
							Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)		(11)
3.2.1.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3.00	Dokumen	1.00	Dokumen	1.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	33.33	2.00	Dokumen	66.67
3.2.2.	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3.00	Laporan	1.00	Laporan	1.00	Laporan	0.00	Laporan	0.00	33.33	2.00	Laporan	66.67
3.2.3.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3.00	Laporan	1.00	Laporan	1.00	Laporan	0.00	Laporan	0.00	33.33	2.00	Laporan	66.67
3.2.4.	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3.00	Laporan	1.00	Laporan	1.00	Laporan	0.00	Laporan	0.00	33.33	2.00	Laporan	66.67
3.2.5.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3.00	Dokumen	1.00	Dokumen	1.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	33.33	2.00	Dokumen	66.67

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025					Tingkat Capaian Realisasi Tingkat Renstra s.d. Triwulan II Tahun 2025 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2025		
							Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*		*(5)*		*(6)*		*(7)*		*(8)*	*(9)*	*(10)*		*(11)*
3.2.6.	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	3.00	Laporan	1.00	Laporan	1.00	Laporan	0.00	Laporan	0.00	33.33	2.00	Laporan	66.67
3.2.7.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3.00	Laporan	1.00	Laporan	1.00	Laporan	0.00	Laporan	0.00	33.33	2.00	Laporan	66.67
3.2.8.	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3.00	Laporan	1.00	Laporan	1.00	Laporan	0.00	Laporan	0.00	33.33	2.00	Laporan	66.67
3.3.	***Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan***	***Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan***	***100.00***	***%***	***100.00***	***%***	***100.00***	***%***	***0.00***	***%***	***0.00***	***37.88***	***66.67***	***%***	***68.80***
3.3.1.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3.00	Dokumen	1.00	Dokumen	1.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	33.33	2.00	Dokumen	66.67

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025					Tingkat Capaian Realisasi Tingkat Renstra s.d. Triwulan II Tahun 2025 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2025		
							Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)		(11)
3.3.2.	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3.00	Laporan	1.00	Laporan	1.00	Laporan	0.00	Laporan	0.00	33.33	2.00	Laporan	66.67
3.3.3.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3.00	Laporan	1.00	Laporan	1.00	Laporan	0.00	Laporan	0.00	33.33	2.00	Laporan	66.67
3.3.4.	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3.00	Laporan	1.00	Laporan	1.00	Laporan	0.00	Laporan	0.00	33.33	2.00	Laporan	66.67
3.3.5.	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	3.00	Dokumen	1.00	Dokumen	1.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	33.33	2.00	Dokumen	66.67
3.3.6.	Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3.00	Laporan	1.00	Laporan	1.00	Laporan	0.00	Laporan	0.00	33.33	2.00	Laporan	66.67

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025					Tingkat Capaian Realisasi Tingkat Renstra s.d. Triwulan II Tahun 2025 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2025		
							Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)	(10)		(11)
3.3.7.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3.00	Laporan	1.00	Laporan	1.00	Laporan	0.00	Laporan	0.00	33.33	2.00	Laporan	66.67
3.3.8.	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	3.00	Laporan	1.00	Laporan	1.00	Laporan	0.00	Laporan	0.00	33.33	2.00	Laporan	66.67
4	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Indeks Kebermanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan (Litbang)**	**90.00**	**Indeks**	**100.00**	**%**	**85.00**	**%**	**0.00**	**%**	**0.00**	**111.11**	**85.00**	**%**	**94.44**
4.1.	***Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan***	***Persentase Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan***	***100.00***	***%***	***100.00***	***%***	***100.00***	***%***	***0.00***	***%***	***0.00***	***33.33***	***66.67***	***%***	***66.67***
4.1.1.	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	6.00	Laporan	2.00	Laporan	2.00	Laporan	0.00	Laporan	0.00	33.33	4.00	Laporan	66.67

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025					Tingkat Capaian Realisasi Tingkat Renstra s.d. Triwulan II Tahun 2025 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2025		
							Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*		*(5)*		*(6)*		*(7)*		*(8)*	*(9)*	*(10)*		*(11)*
4.1.2.	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang terkelola dengan baik	3.00	Laporan	1.00	Laporan	1.00	Laporan	0.00	Laporan	0.00	33.33	2.00	Laporan	66.67
4.2.	***Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan***	***Persentase Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan***	***100.00***	***%***	***100.00***	***%***	***100.00***	***%***	***0.00***	***%***	***0.00***	***100.00***	***66.67***	***%***	***66.67***
4.2.1	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	6.00	Dokumen	2.00	Dokumen	2.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	33.33	4.00	Dokumen	66.67
4.3.	***Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan***	***Persentase Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan***	***100.00***	***%***	***100.00***	***%***	***100.00***	***%***	***0.00***	***%***	***0.00***	***22.22***	***55.56***	***%***	***55.56***
4.3.1.	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	6.00	Dokumen	2.00	Dokumen	2.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	33.33	4.00	Dokumen	66.67
4.3.2.	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	3.00	Dokumen	1.00	Dokumen	1.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	33.33	2.00	Dokumen	66.67
4.3.3.	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	3.00	Dokumen	0.00	Dokumen	1.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	0.00	1.00	Dokumen	33.33

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2024		Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2025					Tingkat Capaian Realisasi Tingkat Renstra s.d. Triwulan II Tahun 2025 (%)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2025		
							Target Renja Tahun 2025		Realisasi Renja Triwulan II Tahun 2025		Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d. Tahun 2025		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*		*(5)*		*(6)*		*(7)*		*(8)*	*(9)*	*(10)*		*(11)*
4.4.	***Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi***	***Persentase Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi***	***100.00***	***%***	***100.00***	***%***	***100.00***	***%***	***0.00***	***%***	***0.00***	***33.33***	***66.67***	***%***	***66.67***
4.4.1.	Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	9.00	Dokumen	3.00	Dokumen	3.00	Dokumen	0.00	Dokumen	0.00	33.33	6.00	Dokumen	66.67
4.4.2.	Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif	6.00	Laporan	2.00	Laporan	2.00	Laporan	0.00	Laporan	0.00	33.33	4.00	Laporan	66.67
4.4.3.	Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	6.00	Laporan	2.00	Laporan	2.00	Laporan	0.00	Laporan	0.00	33.33	4.00	Laporan	66.67

b. *Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan*

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu anggaran Bapperida Kota Pontianak tahun 2025 yang telah dilakukan pergeseran/recofusing sesuai Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Anggaran transfer ke daerah dan penghematan anggaran belanja di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025. Rincian dari pagu beserta realisasi anggaran Bapperida Kota Pontianak sampai dengan Triwulan II tahun 2025 tersaji pada tabel 2.2. sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Realisasi Keuangan Bapperida Kota Pontianak Triwulan II Tahun 2025

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Pergeseran/ Recofusing (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**9,429,418,857.00**	**4,063,940,732.00**	**5,365,478,125.00**	**56.90**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***68,662,200.00***	***30,256,000.00***	***38,406,200.00***	***44.07***
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32,829,500.00	25,756,000.00	7,073,500.00	78.45
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7,830,000.00	-	7,830,000.00	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4,501,500.00	-	4,501,500.00	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,178,200.00	1,500,000.00	10,678,200.00	12.32
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11,323,000.00	3,000,000.00	8,323,000.00	26.49
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***8,030,638,237.00***	***3,756,656,184.00***	***4,273,982,053.00***	***46.78***
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,660,136,257.00	3,647,712,904.00	4,012,423,353.00	47.62
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	339,605,580.00	106,243,280.00	233,362,300.00	31.28
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9,596,000.00	-	9,596,000.00	0.00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	9,400,000.00	2,700,000.00	6,700,000.00	28.72
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	11,900,400.00	-	11,900,400.00	0.00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***3,283,600.00***	***-***	***3,283,600.00***	***0.00***
Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	3,283,600.00	-	3,283,600.00	0.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***136,949,000.00***	***10,000,000.00***	***126,949,000.00***	***7.30***

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Pergeseran/ Recofusing (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	71,750,000.00	-	71,750,000.00	0.00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9,393,000.00	-	9,393,000.00	0.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45,606,000.00	10,000,000.00	35,606,000.00	21.93
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10,200,000.00	-	10,200,000.00	0.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	***424,680,200.00***	***118,384,211.00***	***306,295,989.00***	***27.88***
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21,326,500.00	2,744,500.00	18,582,000.00	12.87
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123,795,700.00	31,192,700.00	92,603,000.00	25.20
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64,120,000.00	20,280,000.00	43,840,000.00	31.63
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23,014,000.00	8,847,700.00	14,166,300.00	38.44
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8,700,000.00	2,160,000.00	6,540,000.00	24.83
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70,715,000.00	30,799,311.00	39,915,689.00	43.55
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3,000,000.00	-	3,000,000.00	0.00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	110,009,000.00	22,360,000.00	87,649,000.00	20.33
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***266,428,100.00***	***-***	***266,428,100.00***	***0.00***
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	266,428,100.00	-	266,428,100.00	0.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***327,447,520.00***	***127,517,737.00***	***199,929,783.00***	***38.94***
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11,510,000.00	3,800,000.00	7,710,000.00	33.01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	166,480,000.00	64,773,257.00	101,706,743.00	38.91
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	149,457,520.00	58,944,480.00	90,513,040.00	39.44
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***171,330,000.00***	***21,126,600.00***	***150,203,400.00***	***12.33***
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42,590,000.00	13,701,600.00	28,888,400.00	32.17
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64,350,000.00	7,425,000.00	56,925,000.00	11.54
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	64,390,000.00	-	64,390,000.00	0.00

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Pergeseran/ Recofusing (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase (%)
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**1,020,894,700.00**	**520,600,800.00**	**500,293,900.00**	**50.99**
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	***784,298,900.00***	***457,800,800.00***	***326,498,100.00***	***58.37***
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	36,326,200.00	11,400,000.00	24,926,200.00	31.38
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	22,916,000.00	1,200,000.00	21,716,000.00	5.24
Pelaksanaan Konsultasi Publik	76,046,000.00	72,792,800.00	3,253,200.00	95.72
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	147,512,800.00	103,598,000.00	43,914,800.00	70.23
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	91,550,000.00	42,020,000.00	49,530,000.00	45.90
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	19,696,000.00	13,600,000.00	6,096,000.00	69.05
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	390,251,900.00	213,190,000.00	177,061,900.00	54.63
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**120,854,000.00**	**54,250,000.00**	**66,604,000.00**	**44.89**
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	30,216,000.00	6,800,000.00	23,416,000.00	22.50
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	22,360,000.00	-	22,360,000.00	0.00
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	68,278,000.00	47,450,000.00	20,828,000.00	69.50
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	***69,000,800.00***	***-***	***69,000,800.00***	***0.00***
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	17,400,800.00	-	17,400,800.00	0.00
Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	-	-	-	0.00
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	51,600,000.00	-	51,600,000.00	0.00
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	**46,741,000.00**	**8,550,000.00**	**38,191,000.00**	**18.29**
Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	25,079,000.00	750,000.00	24,329,000.00	2.99

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Pergeseran/ Recofusing (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	21,662,000.00	7,800,000.00	13,862,000.00	36.01
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**1,055,040,500.00**	**159,216,000.00**	**895,824,500.00**	**15.09**
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**403,721,800.00**	**63,425,000.00**	**340,296,800.00**	**15.71**
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12,027,700.00	-	12,027,700.00	0.00
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	126,265,200.00	21,250,000.00	105,015,200.00	16.83
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	3,979,200.00	-	3,979,200.00	0.00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	108,840,700.00	25,450,000.00	83,390,700.00	23.38
Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJD, RPJMD dan RKPD)	12,027,700.00	-	12,027,700.00	0.00
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	63,137,700.00	7,425,000.00	55,712,700.00	11.76
Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3,979,200.00	-	3,979,200.00	0.00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	73,464,400.00	9,300,000.00	64,164,400.00	12.66
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	***171,544,200.00***	***29,584,000.00***	***141,960,200.00***	***17.25***
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12,027,700.00	-	12,027,700.00	0.00
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	35,615,200.00	4,178,000.00	31,437,200.00	11.73

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Pergeseran/ Recofusing (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3,979,200.00	-	3,979,200.00	0.00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	25,710,000.00	7,009,000.00	18,701,000.00	27.26
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12,027,700.00	-	12,027,700.00	0.00
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	18,520,200.00	1,322,000.00	17,198,200.00	7.14
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3,979,200.00	-	3,979,200.00	0.00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	59,685,000.00	17,075,000.00	42,610,000.00	28.61
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**479,774,500.00**	**66,207,000.00**	**413,567,500.00**	**13.80**
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12,027,700.00	-	12,027,700.00	0.00
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	40,010,200.00	6,009,000.00	34,001,200.00	15.02
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3,979,200.00	-	3,979,200.00	0.00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	23,347,000.00	6,345,000.00	17,002,000.00	27.18
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	347,289,500.00	46,050,000.00	301,239,500.00	13.26
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	24,335,200.00	4,403,000.00	19,932,200.00	18.09
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3,979,200.00	1,100,000.00	2,879,200.00	27.64
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	24,806,500.00	2,300,000.00	22,506,500.00	9.27

Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Pergeseran/ Recofusing (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase (%)
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**848,968,000.00**	**142,100,000.00**	**706,868,000.00**	**16.74**
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	***232,598,000.00***	***25,850,000.00***	***206,748,000.00***	***11.11***
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	124,725,000.00	21,400,000.00	103,325,000.00	17.16
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	107,873,000.00	4,450,000.00	103,423,000.00	4.13
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	***131,510,000.00***	***9,000,000.00***	***122,510,000.00***	***6.84***
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	131,510,000.00	9,000,000.00	122,510,000.00	6.84
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	***268,370,000.00***	***6,600,000.00***	***261,770,000.00***	***2.46***
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	268,370,000.00	6,600,000.00	261,770,000.00	2.46
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	***216,490,000.00***	***100,650,000.00***	***115,840,000.00***	***46.49***
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	177,060,000.00	64,820,000.00	112,240,000.00	36.61
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	19,720,000.00	17,920,000.00	1,800,000.00	90.87
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	19,710,000.00	17,910,000.00	1,800,000.00	90.87
Total	**12,354,322,057.00**	**4,885,857,532.00**	**7,468,464,525.00**	**39.55**

Dari data tabel 2.2. tersebut diatas dapat diketahui bahwa tahun anggaran 2025, dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 2 urusan, 4 program, 19 kegiatan, dan 78 sub kegiatan pada Bapperida Kota Pontianak adalah sebesar Rp. 12.987.210.057,00. berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Anggaran transfer ke daerah dan penghematan anggaran belanja di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 dilakukan pergeseran/recofusing sebesar Rp. 632.888.000,00 sehingga anggaran menjadi sebesar Rp. 12.354.322.057,00. Dari anggaran tersebut, sampai dengan triwulan II realisasinya adalah sebesar Rp. 4.885.857.532,00 (39.55 %) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 7.468.464.525,00 (60.45 %).

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bapperida Kota Pontianak.

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan serta Bidang Penelitian dan Pengembangan. Dengan demikian salah satu ketugasannya adalah

- ❖ Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menegah, dan Tahunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
- ❖ Melakukan Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- ❖ Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan di bidang Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan data dan informasi yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan.
- ❖ Mendorong dan Memfasilitasi Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan daerah.
- ❖ Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan antar Perangkat Daerah serta antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemangku Kepentingan Lainnya.
- ❖ Menyediakan Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang akurat, mutakhir, dan dapat diakses oleh publik sebagai dasar Pengambilan Keputusan.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak adalah pemberian informasi dan pemikiran strategis berbasis Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan yang meliputi :

1). Pelayanan Perencanaan Pembangunan Daerah

BAPPERIDA menyusun rencana pembangunan daerah yang menyeluruh dan terarah meliputi :

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pelayanan ini juga mencakup sinkronisasi dan harmonisasi program antar OPD serta penyusunan prioritas pembangunan tahunan.

2). Pelayanan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

- Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pembangunan daerah.
- Menyediakan masukan strategis untuk perbaikan kebijakan termasuk indikator capaian pembangunan dan efektivitas pelaksanaan program.

3). Pelayanan Penelitian dan Pengembangan

- Melaksanakan penelitian sektoral dan strategis dalam rangka pengembangan kebijakan daerah.
- Menyediakan rekomendasi kebijakan dari hasil kajian dan riset.

4). Pelayanan Inovasi Daerah

- Menyediakan Layanan Pembinaan, dan Kompetisi Inovasi

5). Pelayanan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

- Menyediakan data pembangunan secara komprehensif melalui publikasi
- Mengelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mendukung transparansi dan partisipasi.

6). Pelayanan Konsultasi dan Pendampingan Teknis

- Memberikan konsultasi kepada Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan program dan anggaran.
- Menyediakan pendampingan teknis terkait perencanaan, inovasi, riset kebijakan dan evaluasi program.

7). Fasilitasi Kolaborasi dan Kemitraan Strategis

- Menjalin kemitraan dengan BRIN, perguruan tinggi, lembaga riset dan sektor swasta dalam mendukung pelaksanaan riset dan inovasi.

Upaya Bapperida Kota Pontianak dalam meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :

a) Tersusunnya Dokumen Perencanaan seperti RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja OPD secara tepat, waktu, sistematis dan akuntabel.
b) Bertambahnya jumlah kajian strategis yang mendukung pengambilan kebijakan daerah dan kajian digunakan sebagai dasar formulasi kebijakan.
c) Meningkatnya penggunaan data untuk perencanaan dan evaluasi oleh Perangkat Daerah.
d) Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi secara sistematis dan tepat waktu.
e) Penggunaan Hasil Evaluasi sebagai dasar perbaikan kebijakan dan perencanaan.
f) Peningkatan permintaan dan kepuasaan atas Layanan Kosultasi Perencanaan dan Fasilitasi Inovasi kepada OPD.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Rencana Kerja Perangkat Daerah

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Secara keseluruhan pagu indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak turun dari APBD Kota Pontianak Tahun 2025 yang semula sebesar Rp. 12.987.210.057,00 pada Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 turun menjadi Rp. 12.576.324.000,00 ada penurunan sebesar Rp. 410.886.057,00 berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor B/000.7.2.4/26/BAPPERIDA/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Sub Kegiatan yang anggarannya turun antara lain pada Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi, Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya, Pelaksanaan Konsultasi Publik, Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, Analisis Data dan Informasi Perencanaan Perangkat Daerah, Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah, Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota, Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah, Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD), Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial, Penelitian dan

Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi, Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif, serta Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan.

Adapun uraian program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami kenaikan atau penurunan pagu indikatif adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

   Program ini semula anggaran murni tahun 2025 sebesar Rp. 9.481.453.857,00 dan pada Perubahan Renja 2025 naik menjadi Rp. 9.711.420.800,00. Ada kenaikan pagu anggaran sebesar Rp. 229.966.943,00.

   Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

   1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Anggaran murni sebesar Rp. 68.662.000,00 pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 74.162.200,00 atau naik sebeser Rp. 5.500.000,00.

   Terdiri dari 5 Sub Kegiatan yaitu :

   a). Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

   Anggaran murni sebesar Rp. 32.829.500,00 pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 38.329.500,00 atau naik sebesar Rp. 5.500.000,00. Adapun rincian penambahannya dengan rincian sebagai

berikut :

- Penggandaan Dokumen Perencanaan yang dialokasikan untuk kebutuhan penggandaan dokumen perencanaan seperti Renja, Renstra, dan dokumen pendukung lainnya. Dokumen ini digunakan untuk distribusi, keperluan evaluasi, arsip internal dan bahan rapat pembahasan.
- Makanan dan Minuman Rapat yang dialokasikan untuk komsumsi rapat koordinasi eksternal yang mendukung proses penyusunan dokumen perencanaan secara partisipatif dan efisien.

Penambahan anggaran ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan dengan target kinerja yang telah ditetapkan adalah 9 dokumen perencanaan.

b). *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*

Anggaran murni sebesar Rp. 7.830.000,00 pada Perubahan Renja anggaran tetap sebesar Rp. 7.830.000,00 tidak terdapat perubahan anggaran. Sub kegiatan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan dokumen RKA-SKPD Bapperida Kota Pontianak tahun 2026 dengan target kinerja yang telah ditetapkan adalah 1 dokumen RKA-SKPD.

c). *Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*

Anggaran murni sebesar Rp. 4.501.500,00 pada Perubahan Renja anggaran tetap sebesar Rp. 4.501.500,00 tidak terdapat perubahan anggaran. Sub kegiatan untuk mendukung pelaksanaan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD Bapperida Kota Pontianak tahun 2025 dengan target kinerja yang telah ditetapkan adalah 1 dokumen Perubahan RKA-SKPD.

d). *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*

Anggaran murni sebesar Rp. 12.178.200,00 pada Perubahan Renja anggaran tetap sebesar Rp. 12.178.200,00 tidak terdapat perubahan anggaran. Sub kegiatan untuk mendukung penyusunan laporan capaian kinerja Bapperida Kota Pontianak triwulan I, II, III dan IV sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dengan target kinerja yang telah ditetapkan adalah 4 laporan evaluasi Renja Triwulanan.

e). *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

Anggaran murni sebesar Rp. 11.323.000,00 pada Perubahan Renja anggaran tetap sebesar Rp. 11.323.000,00 tidak terdapat perubahan anggaran. Sub kegiatan untuk mendukung penyusunan laporan evaluasi

kinerja berupa 1). LAKIP yang memuat laporan capaian kinerja Bapperida atas pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, 2). SPIP yang merupakan evaluasi atas sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan kegiatan Bapperida Kota Pontianak, 3). Data LPPD serta Data LKPJ dalam menyediakan dan mengolah data pendukung untuk LPPD dan LKPJ sehingga target kinerja yang telah ditetapkan adalah 3 laporan.

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 8.030.638.237,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 7.955.299.180,00 atau turun sebesar Rp. 75.339.057,00.

Terdiri dari 5 Sub Kegiatan yaitu :

a). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran murni sebesar Rp. 7.660.136.257,00 pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 7.660.138.680 atau naik sebesar Rp. 2.423,00. Kenaikan tersebut sesuai Update Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor B/000.7.2.4/26/BAPPERIDA/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Sub kegiatan bertujuan untuk menjamin kelancaran pembayaran gaji dan tunjangan ASN secara tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai ketentuan yang berlaku dengan target kinerja adalah 47 Orang/Bulan pegawai ASN yang menerima gaji dan tunjangan tahun 2025 yang terdiri dari PNS berjumlah 36 orang dan PPPK berjumlah 11 orang.

Di perubahan sub kegiatan ini mengalami perubahan target menjadi 47 Orang/Bulan dari semula 42 Orang/Bulan disebabkan adanya pengangkatan CPNS dan PPPK sebanyak 6 orang pada tahun 2025 sehingga jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan bertambah dibanding triwulan sebelumnya.

b). Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Anggaran murni sebesar Rp. 339.605.580,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 264.264.100,00 atau turun sebesar Rp. 75.341.480,00. Adapun rincian pengurangannya adalah sebagai berikut :

- Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp. 19.200.000,00
- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp. 45.840.000,00
- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 6.800.000,00

- Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp. 3.050.000,00
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (Jasa Tenaga Administrasi) sebesar Rp. 244.000,00
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN (Jasa Tenaga Administrasi) sebesar Rp. 14.640,00
- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN (Jasa Tenaga Administrasi) sebesar Rp. 18.940,00
- Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN (Jasa Tenaga Administrasi) sebesar Rp. 173.900,00

Sub kegiatan ini mencakup proses pencatatan, pengujian, verifikasi dan pengesahan terhadap dokumen-dokumen keuangan sebagai bagian dari siklus pelaksanaan anggaran dengan target kinerja adalah 12 dokumen administrasi penatausahaan keuangan bulanan tahun anggaran 2025.

c). *Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*

Anggaran murni sebesar Rp. 9.596.000,00 pada Perubahan Renja anggaran tetap sebesar Rp. 9.596.000,00 tidak terdapat perubahan anggaran. Sub kegiatan ini mencakup proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan serta koordinasi antar bidang guna menjamin keselarasan dan keterpaduan data keuangan dengan target kinerja adalah 5 dokumen penyusunan Laporan Keuangan SKPD seperti Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

d). *Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan*

Anggaran murni sebesar Rp. 9.400.000,00 pada Perubahan Renja anggaran tetap sebesar Rp. 9.400.000,00 tidak terdapat perubahan anggaran. Sub kegiatan ini menyiapkan dan menyusun bahan tanggapan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah maupun lembaga eksternal seperti BPK dan aparat pengawas lainnya berupa temuan pemeriksaan, rekomendasi, maupun permintaan klasifikasi dengan target kinerja adalah 10 dokumen bahan tanggapan pemeriksaan yang disiapkan sebagai bentuk respon terhadap hasil pemeriksaan. Dokumen tanggapan ini mencakup klarifikasi, bukti pendukung, serta rencana tindak lanjut atas temuan pemeriksaan yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran dan program kegiatan perangkat daerah.

e). *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD*

Anggaran murni sebesar Rp. 11.900.400,00 pada Perubahan Renja anggaran tetap sebesar Rp. 11.900.400,00 tidak terdapat perubahan anggaran. Sub kegiatan ini memastikan tersusunnya laporan keuangan SKPD secara periodik (bulanan, triwulanan dan semesteran) yang akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan target kinerja adalah 22 laporan terdiri dari : Laporan Keuangan Bulanan dan Laporan Bendahara Bulanan yang merupakan mekanisme pelaporan rutin pengelolaan keuangan SKPD dan merupakan bahan evaluasi serta pelengkap dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahunan.

1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 3.283.600,00 pada Perubahan Renja anggaran tetap sebesar Rp. 3.283.600,00 tidak terdapat perubahan anggaran. Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

a). Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Anggaran murni sebesar Rp. 3.283.600,00 pada Perubahan Renja anggaran tetap sebesar Rp. 3.283.600,00 tidak terdapat perubahan anggaran. Sub kegiatan ini mencakup seluruh proses administrasi aset mulai dari pencatatan, pembukuan, pelaporan, hingga inventarisasi barang milik daerah di lingkungan SKPD dengan target kinerja adalah 1 laporan penatausahaan barang milik daerah pada Bapperida Kota Pontianak.

1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 159.699.000,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 129.039.000,00 atau turun sebesar Rp. 30.660.000,00.

Terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu :

a). Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Anggaran murni sebesar Rp. 71.750.000,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 67.030.000,00 atau turun sebesar Rp. 4.720.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp. 2.020.000,00
- Belanja Pakaian Dinas Lapangan untuk Tenaga Jasa Lainnya Orang Perorangan berjumlah 2 Orang sebesar Rp. 1.300.000,00
- Belanja Pakaian Dinas Harian Warna Khaki dan Warna Putih Hitam berjumlah 1 Orang sebesar Rp. 1.400.000,00

Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan ASN di lingkungan SKPD Bapperida Kota Pontianak akan pakaian dinas dan atribut

kelengkapan yang menjadi hak pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan ini bertujuan untuk mendukung kerapian, keseragaman, serta meningkatkan citra profesional ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan target kinerja adalah 3 paket pengadaan yaitu Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki, Pakaian Dinas Harian Warna (PDH) Putih Hitam dan Pakaian Dinas Lapangan (PDL).

b). *Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*

Anggaran murni sebesar Rp. 9.393.000,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 7.503.000,00 atau turun sebesar Rp. 1.890.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 1.890.000,00

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2025 dijelaskan bahwa belanja konsumsi hanya dapat diberikan untuk kegiatan rapat, sosialisasi atau pertemuan resmi yang bersifat strategis, melibatkan lintas perangkat daerah dan/atau menghadirkan pihak eksternal. Kegiatan rutin internal tanpa unsur tersebut tidak diperkenankan untuk dibebankan pada belanja makanan dan minuman APBD. Dengan demikian karena rapat dimaksud merupakan rapat koordinasi internal rutin maka tidak memenuhi kriteria sebagai kegiatan yang dapat dibebankan pada APBD dan pengeluaran sebesar Rp. 1.890.000,00 tersebut tidak dapat dibayarkan.

Sub kegiatan ini mencakup pendataan, pemuktahiran, dan pengelolaan informasi kepegawaian ASN di lingkungan Bapperida Kota Pontianak dengan target kinerja adalah 1 dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian yang valid, lengkap dan mutakhir sebagai dasar perencanaan, pelayanan dan pengambilan keputusan terkait manajemen ASN.

c). *Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi*

Anggaran murni sebesar Rp. 68.356.000,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 45.606.000,00 atau turun sebesar Rp. 22.750.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Perjalanan Dinas Biasa bagi pegawai yang mengikuti Pelatihan di luar daerah dikurangi sebanyak 2 Orang sebesar Rp. 22.750.000,00.

Sub kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pengembangan kompetensi

ASN melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan tugas dan fungsi jabatan masing-masing dengan target kinerja adalah 4 Orang pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan kompetensi yang meningkat dan mampu menunjang pencapaian sasaran organisasi.

d). Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Anggaran murni sebesar Rp. 10.200.000,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 8.900.000,00 atau turun sebesar Rp. 1.300,000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp. 1.300.000,00

Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk menyebarluaskan informasi dan meningkatkan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan kepada aparatur pemerintah dengan target kinerja adalah 80 orang peserta yang mengikuti sosialisasi dan mendapatkan informasi serta pemahaman yang komprehensif mengenai peraturan terkait.

1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 453.965.200,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 412.031.200,00 atau turun sebesar Rp. 41.934.000,00.

Terdiri dari 8 Sub Kegiatan yaitu :

a). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran murni sebesar Rp. 21.326.500,00 pada Perubahan Renja anggaran tetap sebesar Rp. 21.326.500,00 tidak terdapat perubahan anggaran. Sub kegiatan ini untuk mendukung kelancaran operasional dan kenyamanan kerja di lingkungan kantor melalui penyediaan komponen instalasi listrik dan sistem penerangan yang efisien, aman dan sesuai standar. Kegiatan ini mencakup pengadaan berbagai material dan peralatan listrik yang dibutuhkan dalam instalasi maupun pemeliharaan sistem penerangan bangunan kantor dengan target kinerja adalah 12 paket pengadaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan untuk Bangunan Kantor.

b). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Anggaran murni sebesar Rp. 123.795.700,00 pada Perubahan Renja anggaran tetap sebesar Rp. 123.795.700,00 tidak terdapat perubahan anggaran. Sub kegiatan untuk menyediakan berbagai peralatan dan

perlengkapan yang dibutuhkan guna mendukung kelancaran operasional, administrasi, dan pelayanan di lingkungan kantor Bapperida Kota Pontianak meliputi pengadaan barang seperti Alat Tulis Kantor, Kertas, Bahan Komputer (seperti Tinta Printer, Cartridge dan Mouse) serta Perlengkapan Kantor (seperti Pengharum Ruangan, Keset Lantai, Pembersih Lantai, Pembersih Kaca dan Lain-lain) dengan target kinerja adalah 12 paket pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.

c). *Penyediaan Bahan Logistik Kantor*

Anggaran murni sebesar Rp. 64.120.000,00 pada Perubahan Renja anggaran tetap sebesar Rp. 64.120.000,00 tidak terdapat perubahan anggaran. Sub kegiatan ini merupakan upaya pemenuhan kebutuhan barang konsumtif dan pendukung operasional harian kantor, guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Kegiatan ini mencakup pengadaan bahan logistik meliputi bahan pendukung kegiatan seperti rapat dan aktivitas lapangan (snack, makanan, minuman dan perlengakapan saji), bahan habis pakai (air minum galon) dengan target kinerja adalah 12 paket logistik.

d). *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*

Anggaran murni sebesar Rp. 23.014.000,00 pada Perubahan Renja anggaran tetap sebesar Rp. 23.014.000,00 tidak terdapat perubahan anggaran. Sub kegiatan memenuhi kebutuhan dokumen serta bahan administrasi yang dicetak atau digandakan guna mendukung kelancaran tugas-tugas kedinasan dan pelayanan publik di lingkungan Bapperida Kota Pontianak, serta dengan target kinerja adalah 12 Paket Pengadaan terdiri dari : Pengadaan Belanja Cetak meliputi Amplop, Blanko Kop Surat, Stopmap Berkop, dan Blanko Nota Dinas serta Pengadaan Belanja Fotocopy untuk menunjang aktivitas penggandaan dokumen administrasi kantor.

e). *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan*

Anggaran murni sebesar Rp. 8.700.000,00 pada Perubahan Renja anggaran tetap sebesar Rp. 8.700.000,00 tidak terdapat perubahan anggaran. Sub kegiatan ini meliputi pengadaan bahan bacaan berupa Surat Kabar dan Majalah dengan target kinerja adalah 1680 Dokumen berupa Surat Kabar (Tribun Pontianak dan AP Post) selama 12 Bulan guna mendukung akses informasi aktual dan relevan bagi pegawai dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di lingkungan kantor.

f). *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*

Anggaran murni sebesar Rp. 100.000.000,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 70.715.000,00 atau turun sebesar Rp. 29.285.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp. 29.285.000,00

Seiring dengan penyesuaian anggaran tersebut, target kinerja juga mengalami perubahan. Awalnya ditetapkan 12 laporan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi namun disesuaikan menjadi 8 laporan sesuai dengan orang pegawai yang dapat difasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan rapat/koordinasi/ konsultasi sesuai dengan kapasitas anggaran yang tersedia.

g). *Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD*

Anggaran murni sebesar Rp. 3.000.000,00 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp. 3.000.000,00 tidak apa perubahan anggaran. Sub kegiatan ini merupakan proses pengelolaan arsip yang masih digunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik. Arsip dinamis mencakup arsip aktif dan inaktif yang berkaitan dengan pelaksanaan tuigas dan fungsi Bapperida Kota Pontianak dengan target kinerja adalah 1 Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

h). *Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD*

Anggaran murni sebesar Rp. 110.009.000,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 97.360.000,00 atau turun sebesar Rp. 12.649.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 6.100.000,00
- Belanja Fotocopy sebesar Rp. 2.949.000,00
- Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website sebesar Rp. 3.600.000,00

Sub kegiatan merupakan dukungan teknis, operasional, dan administratif dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Bapperida kota pontianak. Tujuannya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi. Dengan Target Kinerja adalah 1 Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Perangkat Daerah.

1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a). Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran murni sebesar Rp. 266.428.100,00 pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 608.978.100,00 atau naik sebesar Rp. 342.550.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi penambahan dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Modal Personal Computer (All In One PC) berjumlah 7 Unit sebesar Rp. 189.000.000,00 (Penambahan sarana dan prasarana untuk CPNS dan PPPK berjumlah 6 Unit dan 1 unit untuk Kepala Bapperida Kota Pontianak).
- Belanja Modal Personal Computer (All In One PC) berjumlah 1 Unit sebesar Rp. 20.000.000,00. (Penambahan sarana dan prasarana untuk Pegawai di bidang pembangunan sektoral Bapperida Kota Pontianak).
- Belanja Modal Personal Computer (Laptop) berjumlah 2 unit sebesar Rp. 46.113.400,00 (Penambahan sarana dan prasarana untuk Pegawai di bidang pembangunan sektoral dan sekretariat Bapperida Kota Pontianak).
- Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Printer) berjumlah 6 Unit sebesar Rp. 36.000.000,00 (Penambahan sarana dan prasarana untuk CPNS dan PPPK berjumlah 6 Unit).
- Belanja Modal Alat Pendingin (Air Conditioner) pada awalnya anggaran dialokasikan sebesar Rp. 7.706.600,00 namun seiring dengan kebutuhan teknis yang meningkat dan ketentuan pengadaan barang dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) maka dilakukan penambahan anggaran sebesar Rp. 7.706.600,00 sehingga total menjadi Rp. 15.413.200,00. Penambahan ini untuk pengajuan 1 unit AC 2 PK yang memenuhi persyaratan TKDN sesuai dengan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang mengutamakan produk dalam negeri.
- Diperlukan perangkat penyangga permanen yang digunakan untuk menopang alat elektronik seperti televisi/monitor dalam ruang layanan publik kantor sehingga perlu penambahan 1 unit Standing Braket sebesar Rp. 3.000.000,00.
- Pengadaan Komputer Tablet digunakan oleh Pejabat sebagai media baca dokumen rapat digital sehingga tidak lagi tergantung pada dokumen cetak sehingga perlu penambahan 1 Unit Komputer Tablet sebesar Rp. 27.000.000,00.

- Pengadaan Handphone berbasis android diperlukan untuk mendukung operasional sistem keuangan berbasis digital khususnya dalam mengakses Cash Management System (CMS) yang digunakan untuk transaksi dan pemantauan keuangan daerah secara real time sehingga perlu penambahan 1 Unit Handphone berbasis android sebesar Rp. 10.000.000,00.

Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja berupa peralatan dan mesin yang tidak termasuk dalam klasifikasi khusus namun memiliki fungsi strategis dalam mendukung kelancaran operasional dan peningkatan kinerja perangkat daerah Bapperida Kota Pontianak dengan target kinerja adalah 32 Unit Peralatan dan Mesin Lainnya.

1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a). Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran murni sebesar Rp. 11.510.000,00 pada Perubahan Renja anggaran tetap sebesar Rp. 11.510.000,00 tidak terdapat perubahan anggaran. Sub kegiatan mencakup penyediaan berbagai jasa pengiriman dan distribusi dokumen resmi baik dalam bentuk fisik maupun digital sebagai bagian dari tata kelola administrasi pemerintahan yang tertib dan akuntabel dengan target kinerja adalah 1 Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

b). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran murni sebesar Rp. 166.480.000,00 pada Perubahan Renja anggaran tetap sebesar Rp. 166.480.000,00 tidak terdapat perubahan anggaran. Sub kegiatan untuk menyediakan layanan pendukung operasional kantor berupa jasa komunikasi dan listrik sebagai kebutuhan dasar dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Kegiatan ini bersifat rutin dan esensial guna menjamin kelangsungan fungsi organisasi perangkat daerah Bapperida Kota Pontianak dengan target kinerja adalah 12 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terdiri dari : Pembayaran Tagihan Listrik per bulan, Pembayaran Tagihan Telepon per bulan dan Sewa Lisensi Google Drive serta aplikasi Canva.

c). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Anggaran murni sebesar Rp. 149.457.520,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang sebesar Rp. 137.337.520,00 atau turun sebesar Rp. 12.120.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi pengurangan dengan

rincian sebagai berikut :

- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp. 12.120.000,00

Sub kegiatan dilaksanakan untuk mendukung kelancaran operasional dan pelayanan administrasi perkantoran melalui penyediaan jasa-jasa umum yang dibutuhkan dalam lingkungan kerja Bapperida Kota Pontianak. Dengan Target Kinerja adalah 12 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang terdiri dari : 1). Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan per bulan (mencakup Gaji dan Tunjangan); 2). Penyediaan Jasa Tenaga Supir per bulan (mencakup Gaji dan Tunjanga); 3). Penyediaan Jasa Tenaga Instruktur Senam; dan 4). Penyediaan Jasa Penceramah Agama.

1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a). Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Anggaran murni sebesar Rp. 42.590.000,00 pada Perubahan Renja anggaran tetap sebesar Rp. 42.590.000,00 tidak terdapat perubahan anggaran. Sub kegiatan mencakup pemeliharaan rutin, perbaikan kendaraan, pengadaan suku cadang, serta pembayaran pajak kendaraan bermotor secara berkala. Dengan target kinerja adalah 2 Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara : 1). Kendaraan Bermotor Roda Dua Jumlah 1 Unit; dan 2). Kendaraan Bermotor Roda Empat Jumlah 1 Unit.

b). Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Anggaran murni sebesar Rp. 64.350.000,00 pada Perubahan Renja anggaran tetap sebesar Rp. 64.350.000,00 tidak terdapat perubahan anggaran. Sub kegiatan mencakup berbagai bentuk pemeliharaan berkala maupun perbaikan atas peralatan dan mesin yang tidak termasuk dalam kategori pemeliharaan khusus namun penting dalam operasional kantor dengan target kinerja adalah 95 Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara terdiri dari : 1). Pemeliharaan AC berjumlah 31 Unit ; 2). Pemeliharaan Personal Computer/Laptop berjumlah 32 Unit; dan 3). Pemeliharaan Printer berjumlah 32 Unit.

c). Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Anggaran murni sebesar Rp. 64.390.000,00 pada Perubahan Renja anggaran bertambah sebesar Rp. 106.360.000,00 atau naik sebesar Rp. 41.970.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi penambahan dengan rincian sebagai berikut :

- Rehab Penataan Halaman dan Identitas Visual Kantor SKPD sebesar Rp. 41.970.000,00 (Rehab Penataan Halaman Kantor dan Penggantian Papan nama dan Plang Spanduk)

Sub kegiatan dilaksanakan untuk menjaga kondisi fisik gedung kantor dan bangunan penunjang lainnya agar tetap layak, aman, nyaman dan fungsional dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan publik. Pemeliharaan mencakup perawatan ringan hingga rehabilitasi sebagian bangunan yang mengalami penurunan kondisi atau kerusakan dengan target kinerja adalah 2 Unit berupa pemeliharaan gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara dan rehab penataan halaman.

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini semula

Program ini semula anggaran murni tahun 2025 sebesar Rp. 1.406.515.700,00 dan pada Perubahan Renja 2025 turun menjadi Rp. 1.020.894.700,00. Ada penurunan pagu anggaran sebesar Rp. 385.621.000,00.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

2.1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Anggaran murni sebesar Rp. 1.151.338.900,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 784.298.900,00 atau turun sebesar Rp. 367.040.000,00.

Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu :

a). Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 36.826.200,00 pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 46.326.200,00 atau naik sebesar Rp. 9.500.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi penambahan dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Penggandaan Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sebesar Rp. 9.500.000,00.

Sub kegiatan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai capaian pembangunan daerah, tantangan yang dihadapi, serta potensi yang dapat dioptimalkan dalam rangka penyusunan arah kebijakan, strategi, dan program prioritas pembangunan daerah dengan target kinerja adalah 2 Dokumen yaitu Dokumen Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029 dan Dokumen Ranwal RKPD Tahun 2026.

b). *Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya*

Anggaran murni sebesar Rp. 42.601.000,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 15.596.000,00 atau turun sebesar Rp. 27.005.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Perjalanan Dinas untuk memfasilitasi Narasumber dari Kemendagri sebesar Rp. 19.685.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 7.320.000,00.

Sub kegiatan untuk memastikan keselarasan, keterpaduan, dan konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan berbagai dokumen kebijakan lainnya dengan target kinerja adalah 1 Dokumen yaitu Telaahan Dokumen RPJMD untuk RKPD Murni dan Telaahan Pedum RKPD untuk Perubahan RKPD.

c). *Pelaksanaan Konsultasi Publik*

Anggaran murni sebesar Rp. 168.096.000,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 76.046.000,00 atau turun sebesar Rp. 92.050.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

- Uang Transport Stakeholder untuk Peserta Konsultasi Publik sebesar Rp. 5.700.000,00.
- Honorarium Naraumber sebesar Rp. 1.000.000,00.
- Honorarium Panitia Kegiatan Forum Konsultasi Publik sebesar Rp. 200.000,00.
- Paket Halfday Meeting Forum Konsultasi Publik RPJMD Tahun 2025-2029 sebesar Rp. 31.690.000,00.
- Belanja Alat Tulis Kantor (Seminar Kit dan Jilid Bahan) sebesar Rp. 53.460.000,00.

Sub kegiatan untuk menjaring aspirasi, masukan dan tanggapan dari masyarakat serta para pemangku kepentingan terhadap rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka menengah maupun tahunan dengan target kinerja adalah 2 Berita Acara yaitu Berita Acara Konsultasi Publik untuk RKPD Tahun 2026 dan Berita Acara Konsultasi Publik untuk RPJMD Tahun 2025-2029.

d). *Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah*

Anggaran murni sebesar Rp. 307.507.800,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 130.912.800,00 atau turun sebesar

Rp. 176.595.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

- Paket Fullday Meeting Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah sebesar Rp. 144.095.000,00.
- Belanja Alat Tulis Kantor (Seminar Kit) sebesar Rp. 32.500.000,00.

Sub kegiatan dilaksanakan dalam rangka menyelenggarakan forum perangkat daerah atau forum lintas perangkat daerah untuk menyelaraskan rencana kerja antar perangkat daerah serta menyinkronkan hasil musrenbang kecamatan/kelurahan dengan prioritas program dan kegiatan SKPD, dengan target kinerja adalah 32 Berita Acara yaitu Berita Acara Forum Lintas Perangkat Daerah untuk RKPD setiap Perangkat Daerah.

e). Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Anggaran murni sebesar Rp. 182.660.000,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 59.350.000,00 atau turun sebesar Rp. 123.310.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

- Uang Transport Stakeholder untuk Peserta Musrenbang sebesar Rp. 7.000.000,00.
- Honorarium Panitia Kegiatan Musrenbang sebesar Rp. 6.350.000,00.
- Paket Halfday Meeting Kegiatan Musrenbang sebesar Rp. 109.960.000,00.

Sub kegiatan merupakan pelaksanaan forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) ditingkat kabupaten/kota untuk membahas dan menyepakati prioritas pembangunan daerah tahun berikutnya. Dengan target kinerja adalah 2 Berita Acara yaitu Berita Acara Musrenbang RKPD Tahun 2026 dan Berita Acara Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029.

f). Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan

Anggaran murni sebesar Rp. 19.896.000,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 19.696.000,00 atau turun sebesar Rp. 200.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

- Uang Transport untuk ASN Bapperida Kota Pontianak yang melaksanakan pendampingan Musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan sebesar Rp. 200.000,00.

Sub kegiatan dilaksanakan untuk mempersiapkan berbagai dokumen, data, dan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat kecamatan dan

kelurahan. Dengan target kinerja adalah 700 Usulan yaitu Usulan Aspirasi Masyarakat (Asmas).

g). *Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten/Kota*

Anggaran murni sebesar Rp. 393.751.900,00 pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 436.371.900,00 atau naik sebesar Rp. 42.620.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi penambahan dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Fotocopy warna untuk Dokumen RKPD Murni Tahun 2026, Perubahan RKPD Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029 sebesar Rp. 13.200.000,00.
- Belanja Fotocopy Hitam Putih untuk Dokumen RKPD Murni Tahun 2026, Perubahan RKPD Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2025-2029 sebesar Rp. 5.486.000,00.
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen sebesar Rp 23.934.000,00.

Sub kegiatan dilaksanakan untuk memastikan proses penyusunan hingga penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah ditingkat kabupaten/kota berjalan secara terkoordinasi, partisipatif dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan target kinerja adalah 3 Dokumen yaitu Dokumen Perda RPJMD Tahun 2025-2029, Perwa RKPD Tahun 2026 dan Perwa Perubahan RKPD Tahun 2025.

2.2. *Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*

Anggaran murni sebesar Rp. 121.466.000,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 120.854.000,00 atau turun sebesar Rp. 612.000,00.

Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

a). *Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah*

Anggaran murni sebesar Rp. 30.528.000,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 30.216.000,00 atau turun sebesar Rp. 312.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 312.000,00.

Sub kegiatan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data serta informasi yang relevan dalam rangka mendukung proses perencanaan pembangunan daerah dengan target kinerja adalah 1

Dokumen yaitu Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah.

b). *Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah*

Anggaran murni sebesar Rp. 22.660.000,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 22.360.000,00 atau turun sebesar Rp. 300.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 300.000,00.

Sub kegiatan dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam mengelola, menyediakan, dan memanfaatkan data serta informasi perencanaan pembangunan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi dengan target kinerja adalah 80 Orang Pegawai yang terlibat dalam Forum Satu Data dilakukan Pembinaan.

c). *Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota*

Anggaran murni sebesar Rp. 68.278.000,00 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp. 68.278.000,00 tidak terdapat perubahan anggaran.

Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk menyusun dokumen profil pembangunan daerah yang memuat data, informasi dan analisis menyeluruh mengenai kondisi faktual wilayah kabupaten/kota. Dengan Target Kinerja adalah 1 Buku yaitu Buku Profil Pembangunan Daerah.

2.3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 86.435.800,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 69.000.800,00 atau turun sebesar Rp. 17.435.000,00.

Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

a). *Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota*

Anggaran murni sebesar Rp. 22.600.800,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 17.400.800,00 atau turun sebesar Rp. 5.200.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 200.000,00.
- Uang Transport ASN sebesar Rp. 5.000.000,00.

Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa proses

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten/kota berjalan secara konsisten, terarah dan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Dengan target kinerja adalah 2 Laporan yaitu Laporan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah Lingkup Kota (Laporan E.35) dan Lap. Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lingkup Kota (Laporan E.33).

b). Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 6.655.000,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 0,00 atau turun sebesar Rp. 0,00. Pada sub kegiatan ini terjadi pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 6.405.000,00.
- Belanja Fotocopy sebesar Rp. 250.000,00.

Sub Kegiatan ini pada Perubahan Renja tidak dilaksanakan sehingga Target Kinerja juga mengalami penyesuaian dari semula 6 Kerjasama menjadi 0.

c). Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 57.180.000,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 51.600.000,00 atau turun sebesar Rp. 5.580.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 580.000,00.
- Uang Transport ASN Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebesar Rp. 5.000.000,00.

Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk memantau, mengevaluasi dan melaporkan capaian pelaksanaan pembangunan daerah secara berkala guna memastikan ketercapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan target kinerja adalah 8 Laporan yaitu 1). Laporan Monev. Capaian Kinerja dan Keuangan berdasarkan Renja PD (per triwulanan) dan 2). Laporan Monev DAK (per triwulanan).

2.4. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

Anggaran murni sebesar Rp. 47.275.000,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 46.741.000,00 atau turun sebesar Rp. 534.000,00.

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

a). *Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah*

Anggaran murni sebesar Rp. 25.352.000,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 25.079.000,00. atau turun sebesar Rp. 273.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 273.000,00.

Sub kegiatan ini untuk mengelola, memutakhirkan, dan menyajikan data pembangunan daerah secara sistematis melalui sistem informasi pemerintahan yang mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dengan target kinerja adalah 1 Dokumen yaitu Dokumen Hasil Penginputan Kamus Asmas/e-rakortek/Pokir/E-Wali Data.

b). *Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota*

Anggaran murni sebesar Rp. 21.923.000,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 21.662.000,00. atau turun sebesar Rp. 261.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 261.000,00.

Sub kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas, kualitas, dan tata kelola sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan daerah pada lingkup pemerintah kabupaten/kota dengan target kinerja adalah 2 Dokumen yaitu Dokumen Hasil Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dibidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (per semester).

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini semula anggaran murni tahun 2025 sebesar Rp. 1.248.867.780,00 dan pada Perubahan Renja 2025 turun menjadi Rp. 995.040.500,00. Ada penurunan pagu anggaran sebesar Rp. 253.827.280,00.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

3.1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Anggaran murni sebesar Rp. 453.249.080,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 401.456.800,00 atau turun sebesar Rp. 51.792.280,00.

Terdiri dari 8 Sub Kegiatan yaitu :

a). *Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*

Anggaran murni sebesar Rp. 21.977.700,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 12.027.700,00. atau turun sebesar Rp. 9.950.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Alat Tulis Kantor (Seminar Kit) sebesar Rp. 8.450.000,00.
- Uang Transport Stakeholder untuk peserta FGD sebesar Rp. 1.500.000,00.

Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk mengoordinasikan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dibidang pemerintahan dengan target kinerja adalah 1 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya.

b). *Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan*

Anggaran murni sebesar Rp. 126.265.200,00. pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 113.800.200,00. atau turun sebesar Rp. 12.465.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 12.465.000,00.

Sub kegiatan ini memberikan pendampingan dan fasilitasi teknis kepada perangkat daerah lingkup urusan pemerintahan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang meliputi Renstra SKPD, dan Renja SKPD dengan target kinerja adalah 1 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.

c). *Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan*

Anggaran murni sebesar Rp. 3.979.200,00. pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp. 3.979.200,00 tidak terjadi perubahan anggaran. Sub kegiatan untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas proses dan hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan dengan target kinerja adalah 1 Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.

d). *Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan*

Anggaran murni sebesar Rp. 108.840.700,00 pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 118.840.700,00 atau naik sebesar Rp. 10.000.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi penambahan dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat koordinasi posyandu, koordinasi pembahasan SDGs dan rapat koordinasi yang berkaitan dengan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan sebesar Rp. 9.970.000,00.
- Belanja Fotocopy Bahan Rapat sebesar Rp. 30.000,00.

Sub kegiatan untuk mengoordinasikan proses sinergitas dan harmonisasi antar perangkat daerah serta antar level pemerintahan dalam perencanaan pembangunan daerah khususnya dibidang pemerintahan dengan target kinerja adalah 1 Laporan yaitu Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.

e). *Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*

Anggaran murni sebesar Rp. 21.977.700,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 12.027.700,00. atau turun sebesar Rp. 9.950.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Alat Tulis Kantor (Seminar Kit) sebesar Rp. 8.450.000,00.
- Uang Transport Stakeholder untuk peserta FGD sebesar Rp. 1.500.000,00.

Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk mengoordinasikan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dibidang pembangunan manusia dengan target kinerja adalah 1 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya.

f). *Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia*

Anggaran murni sebesar Rp. 63.137.700,00. pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 33.337.700,00. atau turun sebesar Rp. 29.800.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 29.800.000,00

Sub kegiatan ini memberikan pendampingan dan fasilitasi teknis kepada perangkat daerah lingkup urusan pembangunan manusia dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang meliputi Renstra SKPD, dan Renja SKPD dengan target kinerja adalah 1 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

g). *Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia*

Anggaran murni sebesar Rp. 3.979.200,00. pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp. 3.979.200,00 tidak terjadi perubahan anggaran. Sub kegiatan untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas proses dan hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan oleh perangkat daerah yang menangani urusan pembangunan manusia dengan target kinerja adalah 1 Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

h). *Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia*

Anggaran murni sebesar Rp. 73.464.400,00 pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 103.464.400,00 atau naik sebesar Rp. 30.000.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi penambahan dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat koordinasi Stunting, koordinasi TKPKD, koordinasi KLA dan rapat koordinasi terkait Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia sebesar Rp. 11.630.000,00
- Petugas Survey berjumlah 1.500 Orang/Responden sebesar Rp. 18.000.000,00.

Sub kegiatan untuk mengoordinasikan proses sinergitas dan harmonisasi antar perangkat daerah serta antar level pemerintahan dalam perencanaan pembangunan daerah khususnya dibidang pembangunan manusia dengan target kinerja adalah 1 Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

3.2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Anggaran murni sebesar Rp. 295.944.200,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 124.834.200,00 atau turun sebesar Rp. 171.110.000,00.

Terdiri dari 8 Sub Kegiatan yaitu :

a). *Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*

Anggaran murni sebesar Rp. 21.977.700,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 12.027.700,00. atau turun sebesar Rp. 9.950.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Alat Tulis Kantor (Seminar Kit) sebesar Rp. 8.450.000,00.
- Uang Transport Stakeholder untuk peserta FGD sebesar Rp. 1.500.000,00.

Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk mengoordinasikan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dibidang Perekonomian dengan target kinerja adalah 1 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya.

b). *Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian*

Anggaran murni sebesar Rp. 35.615.200,00. pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 19.750.000,00. atau turun sebesar Rp. 15.865.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 15.865.000,00

Sub kegiatan ini memberikan pendampingan dan fasilitasi teknis kepada perangkat daerah lingkup urusan perekonomian dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang meliputi Renstra SKPD, dan Renja SKPD dengan target kinerja adalah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.

c). *Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian*

Anggaran murni sebesar Rp. 3.979.200,00. pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp. 3.979.200,00 tidak terjadi perubahan anggaran.

Sub kegiatan untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas proses dan hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan oleh

perangkat daerah yang menangani urusan perekonomian dengan target kinerja adalah 1 Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian.

d). *Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian*

Anggaran murni sebesar Rp. 25.710.000,00 pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 25.710.000,00 atau naik sebesar Rp. 30.000.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi penambahan dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat koordinasi Stunting, koordinasi TKPKD, koordinasi KLA dan rapat koordinasi terkait Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia sebesar Rp. 11.630.000,00
- Petugas Survey berjumlah 1.500 Orang/Responden sebesar Rp. 18.000.000,00.

Sub kegiatan untuk mengoordinasikan proses sinergitas dan harmonisasi antar perangkat daerah serta antar level pemerintahan dalam perencanaan pembangunan daerah khususnya dibidang perekonomian dengan target kinerja adalah 1 Laporan yaitu Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian.

e). *Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*

Anggaran murni sebesar Rp. 21.977.700,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 12.027.700,00. atau turun sebesar Rp. 9.950.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Alat Tulis Kantor (Seminar Kit) sebesar Rp. 8.450.000,00.
- Uang Transport Stakeholder untuk peserta FGD sebesar Rp. 1.500.000,00.

Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk mengoordinasikan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dibidang SDA dengan target kinerja adalah 1 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya.

f). *Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA*

Anggaran murni sebesar Rp. 18.520.200,00. pada Perubahan Renja

anggaran berkurang menjadi Rp. 6.225.000,00. atau turun sebesar Rp. 12.295.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 12.295.000,00

Sub kegiatan ini memberikan pendampingan dan fasilitasi teknis kepada perangkat daerah lingkup urusan SDA dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang meliputi Renstra SKPD, dan Renja SKPD dengan target kinerja adalah 1 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.

g). *Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA*

Anggaran murni sebesar Rp. 3.979.200,00. pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp. 3.979.200,00 tidak terjadi perubahan anggaran. Sub kegiatan untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas proses dan hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan oleh perangkat daerah yang menangani urusan SDA dengan target kinerja adalah 1 Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.

h). *Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA*

Anggaran murni sebesar Rp. 164.185.000,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 41.135.000,00 atau turun sebesar Rp. 123.050.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

Uang Transport Stakeholder/Masyarakat untuk Kegiatan Sosialisasi terkait SPALDT sebesar Rp. 33.000.000,00.

- Belanja Alat Tulis Kantor (Seminar Kit) untuk Kegiatan SPALDT sebesar Rp. 71.500.000,00.
- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan untuk Kegiatan Sosialisasi terkait SPALDT sebesar Rp. 18.550.000,00

Sub kegiatan untuk mengoordinasikan proses sinergitas dan harmonisasi antar perangkat daerah serta antar level pemerintahan dalam perencanaan pembangunan daerah khususnya dibidang SDA dengan target kinerja adalah 1 Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.

3.3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Anggaran murni sebesar Rp. 499.674.500,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 468.749.500,00 atau turun sebesar Rp. 30.925.000,00.

Terdiri dari 8 Sub Kegiatan yaitu :

a). *Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*

Anggaran murni sebesar Rp. 21.977.700,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 12.027.700,00. atau turun sebesar Rp. 9.950.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Alat Tulis Kantor (Seminar Kit) sebesar Rp. 8.450.000,00.
- Uang Transport Stakeholder untuk peserta FGD sebesar Rp. 1.500.000,00.

Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk mengoordinasikan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dibidang Infrastruktur dengan target kinerja adalah 1 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya.

b). *Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur*

Anggaran murni sebesar Rp. 40.010.200,00. pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 25.275.200,00. atau turun sebesar Rp. 14.735.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 14.735.000,00

Sub kegiatan ini memberikan pendampingan dan fasilitasi teknis kepada perangkat daerah lingkup urusan Infrastruktur dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang meliputi Renstra SKPD, dan Renja SKPD dengan target kinerja adalah 1 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.

c). *Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur*

Anggaran murni sebesar Rp. 3.979.200,00. pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp. 3.979.200,00 tidak terjadi perubahan anggaran.

Sub kegiatan untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas proses dan hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan oleh

perangkat daerah yang menangani urusan Infrastruktur dengan target kinerja adalah 1 Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.

d). *Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.*

Anggaran murni sebesar Rp. 23.347.000,00 pada Perubahan Renja anggaran bertambah menjadi Rp. 33.442.000,00 atau naik sebesar Rp. 10.095.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi penambahan dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat berkaitan dengan kebutuhan Inftastruktur di Kota Pontianak, Pembahasan Jembatan Garuda dan Rapat koordinasi terkait Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur sebesar Rp. 10.080.000,00
- Belanja Fotocopy bahan rapat sebesar Rp. 15.000,00.

Sub kegiatan untuk mengoordinasikan proses sinergitas dan harmonisasi antar perangkat daerah serta antar level pemerintahan dalam perencanaan pembangunan daerah khususnya dibidang infrastruktur dengan target kinerja adalah 1 Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur.

e). *Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD.*

Anggaran murni sebesar Rp. 357.239.500,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 347.289.500,00. atau turun sebesar Rp. 9.950.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Alat Tulis Kantor (Seminar Kit) sebesar Rp. 8.450.000,00.
- Uang Transport Stakeholder untuk peserta FGD sebesar Rp. 1.500.000,00.

Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk mengoordinasikan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dibidang Kewilayahan dengan target kinerja adalah 1 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya.

f). *Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.*

Anggaran murni sebesar Rp. 24.335.200,00. pada Perubahan Renja

anggaran berkurang menjadi Rp. 17.950.200,00 atau turun sebesar Rp. 14.735.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 14.735.000,00

Sub kegiatan ini memberikan pendampingan dan fasilitasi teknis kepada perangkat daerah lingkup urusan Kewilayahan dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang meliputi Renstra SKPD, dan Renja SKPD dengan target kinerja 1 Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.

g). *Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan*

Anggaran murni sebesar Rp. 3.979.200,00. pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp. 3.979.200,00 tidak terjadi perubahan anggaran. Sub kegiatan untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas proses dan hasil penyusunan dokumen perencanaan pembangunan oleh perangkat daerah yang menangani urusan Kewilayahan dengan target kinerja adalah 1 Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan.

h). *Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan*

Anggaran murni sebesar Rp. 24.806.500,00 pada Perubahan Renja anggaran tetap menjadi Rp. 24.806.500,00 tidak ada perubahan anggaran. Sub kegiatan untuk mengoordinasikan proses sinergitas dan harmonisasi antar perangkat daerah serta antar level pemerintahan dalam perencanaan pembangunan daerah khususnya dibidang Kewilayahan dengan target kinerja adalah 1 Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan.

4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini semula anggaran murni tahun 2025 sebesar Rp. 880.000.000,00 dan pada Perubahan Renja 2025 turun menjadi Rp. 848.968.000,00. Ada penurunan pagu anggaran sebesar Rp. 31.032.000,00.

Adapun rincian kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :

4.1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Anggaran murni sebesar Rp. 253.650.000,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 232.598.000,00 atau turun sebesar Rp.

21.052.000,00.

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

a). *Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.*

Anggaran murni sebesar Rp. 143.650.000,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 124.725.000,00 atau turun sebesar Rp. 18.925.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

- Honorarium Narasumber dan Moderator sebesar Rp. 8.100.000,00
- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp. 3.030.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan untuk Pelaksanaaan FGD sebesar Rp. 7.625.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 170.000,00.

Dengan Target Kinerja adalah 2 Laporan berupa Laporan hasil penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah dan Laporan hasil evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah yang akan digunakan sebagai bahan masukan strategis dalam proses pengambilan kebijakan serta penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.

b). *Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan*

Anggaran murni sebesar Rp. 110.000.000,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 107.873.000,00 atau turun sebesar Rp. 2.127.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp. 2.020.000,00.
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 107.000,00.

Dengan Target Kinerja adalah 1 Laporan Roadmap Riset dan Inovasi Daerah yang berfungsi sebagai panduan strategis dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan berbasis kebutuhan daerah serta mendukung penguatan ekosistem inovasi di wilayah Kota Pontianak.

4.2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Anggaran murni sebesar Rp. 135.000.000,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 131.510.000,00 atau turun sebesar Rp. 3.490.000,00.

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

a). *Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek – Aspek Sosial*

Anggaran murni sebesar Rp. 135.000.000,00 pada Perubahan Renja

anggaran berkurang menjadi Rp. 131.510.000,00 atau turun sebesar Rp. 3.490.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp. 3.030.000,00.
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 460.000,00.

Dengan Target Kinerja adalah 2 dokumen berupa 1 Dokumen kajian berupa Dokumen Penyusunan Kajian Kota Ramah Disabilitas yang akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kebijakan pembangunan inklusif di kota pontianak dan 1 Dokumen Hasil Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek – Aspek Sosial.

4.3. Penelitian dan Pengembangan ekonomi dan Pembangunan

Anggaran murni sebesar Rp. 273.850.000,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 268.370.000,00 atau turun sebesar Rp. 5.480.000,00.

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

a). Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Anggaran murni sebesar Rp. 273.850.000,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 268.370.000,00 atau turun sebesar Rp. 5.480.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen sebesar Rp. 3.630.000,00.
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 1.850.000,00.

Dengan Target Kinerja adalah 3 dokumen kajian berupa Dokumen Produk Unggulan Daerah, Dokumen Kajian Kota Kuliner Kota Pontianak, dan Dokumen Riset Penataan Pasar Tengah di Kota Pontianak yang diharapkan menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan strategis untuk pengembangan sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan tata ruang ekonomi lokal di Kota Pontianak.

4.4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Anggaran murni sebesar Rp. 217.500.000,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 216.490.000,00 atau turun sebesar Rp. 1.010.000,00.

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

a). Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Anggaran murni sebesar Rp. 177.500.000,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 177.060.000,00 atau turun sebesar Rp.

440.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 440.000,00.

Dengan Target Kinerja adalah 2 dokumen berupa 1 Dokumen Pelaksanaan Coaching Klinik Inovasi, Pelaksanaan Pontianak Innovators Academy for P3K, dan Pendampingan dan Asistensi Inovasi, termasuk Workshop Penulisan Proposal Inovasi untuk memparkuat kapasitas inovator daerah dan menghasilkan proposal inovasi yang aplikatif, berdampak nyata serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien serta 1 Dokumen terkait Hasil pelaksanaan IPKD.

b). *Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif*

Anggaran murni sebesar Rp. 20.000.000,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 19.720.000,00 atau turun sebesar Rp. 280.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 280.000,00.

Dengan Target Kinerja adalah 2 Laporan Pelaksanaan Sharing Inovasi yang mencakup kegiatan sharing inovasi kelompok OPD/BUMD/Kecamatan, Sharing Inovasi Kelompok Kelurahan/UPT, dan Sharing Inovasi Sekolah serta Laporan Tematik yang memuat hasil pembahasan isu strategis dan tematik terkait pengembangan inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

c). *Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan*

Anggaran murni sebesar Rp. 20.000.000,00 pada Perubahan Renja anggaran berkurang menjadi Rp. 19.710.000,00 atau turun sebesar Rp. 290.000,00. Pada sub kegiatan ini terjadi pengurangan dengan rincian sebagai berikut

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 290.000,00.

Dengan Target Kinerja adalah 2 Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2024 dan Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 sehingga seluruh perangkat daerah memperoleh pemahaman yang lebih baik dalam mengidentifikasi, mengembangkan, dan melaporkan inovasi guna mendorong peningkatan skor indeks inovasi daerah secara berkelanjutan.

Secara rinci, Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta pagu indikatif pada Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 dapat terlihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Rincian Perubahan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH							**12.805.543.000,00**	**12.987.210.057,00**	**12.576.324.000,00**							**10,686,162,400.00**	
	5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**12.805.543.000,00**	**12.987.210.057,00**	**12.576.324.000,00**							**10,686,162,400.00**	
	5	**01**				**PERENCANAAN**							**11.925.543.000,00**	**12.107.210.057,00**	**11.727.356.000,00**							**9,956,162,400.00**	
1	**5**	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan**				**95%**	**95%**	**9,142,509,010.00**	**9,481,453,857.00**	**9,711,420,800.00**							**7,519,968,530.00**	
	5	***01***	***01***	***2.01***		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***				***100%***	***100%***	***70,176,500.00***	***68,662,200.00***	***74,162,200.00***						***100%***	***89,718,000.00***	***Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah***
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	32,602,000.00	32,829,500.00	38,329,500.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	8 Dokumen	26,498,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,830,400.00	7,830,000.00	7,830,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	1 Dokumen	8,380,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,501,600.00	4,501,500.00	4,501,500.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	1 Dokumen	7,380,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	12,177,000.00	12,178,200.00	12,178,200.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	4 Laporan	22,740,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	13,065,500.00	11,323,000.00	11,323,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	3 Laporan	24,720,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	***01***	***01***	***2.02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***				*100 %*	*100 %*	*7,803,068,300.00*	*8,030,638,237.00*	*7,955,298,500.00*						***100%***	***6,140,631,300.00***	***Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah***
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/ bulan	47 Orang/ bulan	7,330,193,000.00	7,660,136,257.00	7,660,138,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	42 Orang/Bulan	5,658,667,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	441,979,300.00	339,605,580.00	264,264,100.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	12 Dokumen	441,979,300.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	9,596,000.00	9,596,000.00	9,596,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	5 Dokumen	10,485,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				10 Dokumen	10 Dokumen	9,400,000.00	9,400,000.00	9,400,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	10 Dokumen	9,400,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				22 Laporan	22 Laporan	11,900,000.00	11,900,400.00	11,900,400.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	22 Laporan	20,100,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	***01***	***01***	***2.03***		***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***				***100 %***	***100 %***	***3,008,600.00***	***3,283,600.00***	***3,283,600.00***						***100%***	***3,008,600.00***	***Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah***
	5	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,008,600.00	3,283,600.00	3,283,600.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	1 Dokumen	3,008,600.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	***01***	***01***	***2.05***		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***				***100 %***	***100 %***	***124,063,300.00***	***159,699,000.00***	***129,039,000.00***						***100%***	***124,063,300.00***	***Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah***
	5	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	53,720,000.00	71,750,000.00	67,030,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	3 Paket	53,720,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	9,393,300.00	9,393,000.00	7,503,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	1 Dokumen	9,393,300.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	4 Orang	50,000,000.00	68,356,000.00	45,606,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	4 Orang	50,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				90 Orang	80 Orang	10,950,000.00	10,200,000.00	8,900,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	90 Orang	10,950,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	***01***	***01***	***2.06***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah***				***100 %***	***100 %***	***504,772,300.00***	***453,965,200.00***	***412,031,200.00***						***100%***	***514,772,300.00***	***Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah***
	5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20,596,000.00	21,326,500.00	21,326,500.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	12 Paket	20,596,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	121,476,300.00	123,795,700.00	123,795,700.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	12 Paket	20,476,300.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	99,000,000.00	64,120,000.00	64,120,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	12 Paket	200,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	28,000,000.00	23,014,000.00	23,014,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	12 Paket	28,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1680 Dokumen	1680 Dokumen	8,700,000.00	8,700,000.00	8,700,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	1680 Dokumen	8,700,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	8 Laporan	100,000,000.00	100,000,000.00	70,715,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	1 Laporan	110,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	1 Dokumen	3,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	124,000,000.00	110,009,000.00	97,360,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	1 Dokumen	124,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	***01***	***01***	***2.07***		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				***100 %***	***100 %***	***83,000,000.00***	***266,428,100.00***	***608,978,100.00***						***100%***	***83,000,000.00***	***Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah***
	5	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	32 Unit	83,000,000.00	266,428,100.00	608,978,100.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	10 Unit	83,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	***01***	***01***	***2.08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				***100 %***	***100 %***	***392,060,010.00***	***327,447,520.00***	***315,327,520.00***						***100%***	***398,655,030.00***	***Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah***
	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	12,240,000.00	11,510,000.00	11,510,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	1 Laporan	12,240,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	225,000,000.00	166,480,000.00	166,480,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	12 Laporan	225,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	154,820,010.00	149,457,520.00	137,337,520.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	12 Laporan	161,415,030.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	***01***	***01***	***2.09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***				***100 %***	***100 %***	***162,360,000.00***	***171,330,000.00***	***213,300,000.00***						***100%***	***166,120,000.00***	***Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah***
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	37,900,000.00	42,590,000.00	42,590,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	3 Unit	41,660,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				72 Unit	95 Unit	64,460,000.00	64,350,000.00	64,350,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	72 Unit	64,460,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	60,000,000.00	64,390,000.00	106,360,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	1 Unit	60,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
2	**5**	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keselarasan Kinerja Pembangunan pada Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan DPA-APBD** **Indeks Capaian Kinerja Pembangunan Daerah**				**75 %** **81 Indeks**	**75 %** **81 Indeks**	**1,563,793,490.00**	**1,406,515,700.00**	**1,020,894,700.00**						**80%** **82 Indeks**	**1,628,342,590.00**	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	***01***	***02***	***2.01***		***Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan***	***Persentase Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan***				***100 %***	***100 %***	***1,117,800,000.00***	***1,151,338,900.00***	***784,298,900.00***						***100%***	***1,097,813,000.00***	***Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah***
	5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah																	
							Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				2 Dokumen	2 Dokumen	106,533,000.00	36,826,200.00	46,326,200.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	1 Dokumen	38,668,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya																	
							Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	6,929,000.00	42,601,000.00	15,596,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	1 Dokumen	25,047,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik																	
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	2 Berita Acara	142,442,000.00	168,096,000.00	76,046,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	1 Berita Acara	123,090,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah																	
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				32 Berita Acara	32 Berita Acara	307,000,000.00	307,507,800.00	130,912,800.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	32 Berita Acara	293,534,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				2 Berita Acara	2 Berita Acara	225,000,000.00	182,660,000.00	59,350,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	1 Berita Acara	191,793,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan																	
							Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				700 Usulan	700 Usulan	19,896,000.00	19,896,000.00	19,696,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	680 Usulan	20,891,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD)				3 Dokumen	3 Dokumen	310,000,000.00	393,751,900.00	436,371,900.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	2 Dokumen	404,790,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	***01***	***02***	***2.02***		***Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah***	***Persentase Terlaksananya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah***				***100 %***	***100 %***	***160,577,400.00***	***121,466,000.00***	***120,854,000.00***						***100%***	***215,846,400.00***	***Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah***
	5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	1 Dokumen	36,005,200.00	30,528,000.00	30,216,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	1 Dokumen	64,755,200.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				80 Orang	80 Orang	65,221,600.00	22,660,000.00	22,360,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	80 Orang	85,511,600.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	59,350,600.00	68,278,000.00	68,278,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	1 Buku	65,579,600.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	***01***	***02***	***2.03***		***Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah***	***Persentase Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah***				***100 %***	***100 %***	***248,646,000.00***	***86,435,800.00***	***69,000,800.00***						***100%***	***263,569,100.00***	***Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah***
	5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	181,646,000.00	22,600,800.00	17,400,800.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	2 Laporan	185,271,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	02	2.03	0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah																	
							Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya				6 Kerja Sama	0	7,000,000.00	6,655,000.00	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	7 Kerja sama	8,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				8 Laporan	8 Laporan	60,000,000.00	57,180,000.00	51,600,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	8 Laporan	70,298,100.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	***01***	***02***	***2.04***		***Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah***	***Persentase Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah***				***100 %***	***100 %***	***36,770,090.00***	***47,275,000.00***	***46,741,000.00***						***100%***	***51,114,090.00***	***Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah***
	5	01	02	2.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah																	
							Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	10,033,990.00	25,352,000.00	25,079,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	1 Dokumen	21,033,990.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	*2*					*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
	5	01	02	2.04	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	26,736,100.00	21,923,000.00	21,662,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	2 Dokumen	30,080,100.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
3	**5**	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Keselarasan Kinerja Pembangunan pada Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan DPA-APBD**				**75%**	**75%**	**1,219,240,500.00**	**1,248,867,780.00**	**995,040,500.00**						**80%**	**807,851,280.00**	
	5	***01***	***03***	***2.01***		***Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia***	***Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia***				***100%***	***100%***	***453,249,080.00***	***423,821,800.00***	***401,456,800.00***						***100%***	***294,774,080.00***	***Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah***
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	27,427,400.00	21,977,700.00	12,027,700.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	1 Dokumen	27,427,400.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	76,898,000.00	126,265,200.00	113,800,200.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	1 Laporan	40,573,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan																	
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	17,200,000.00	3,979,200.00	3,979,200.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	1 Laporan	4,600,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	98,605,000.00	108,840,700.00	118,840,700.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	1 Laporan	65,230,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	27,427,400.00	21,977,700.00	12,027,700.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	1 Dokumen	27,427,400.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																	
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	32,117,600.00	63,137,700.00	33,337,700.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	1 Laporan	17,817,600.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	20,000,000.00	3,979,200.00	3,979,200.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	1 Laporan	3,500,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	1 Laporan	153,573,680.00	73,464,400.00	103,464,400.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	1 Laporan	108,198,680.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	***01***	***03***	***2.02***		***Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)***	***Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA***	***-***			***100 %***	***100 %***	***274,667,900.00***	***295,944,200.00***	***124,834,200.00***						***100%***	***176,753,900.00***	***Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah***
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	15,963,700.00	21,977,700.00	12,027,700.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	1 Dokumen	15,963,700.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																	
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	20,750,000.00	35,615,200.00	19,750,200.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	1 Laporan	18,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	11,500,000.00	3,979,200.00	3,979,200.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	1 Laporan	3,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	150,000,000.00	25,710,000.00	25,710,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	1 Laporan	103,826,500.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	15,963,700.00	21,977,700.00	12,027,700.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	1 Dokumen	15,963,700.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																	
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	4,525,000.00	18,520,200.00	6,225,200.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	1 Laporan	7,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	4,990,500.00	3,979,200.00	3,979,200.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	1 Laporan	3,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	1 Laporan	50,975,000.00	164,185,000.00	41,135,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	1 Laporan	10,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	***01***	***03***	***2.03***		***Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan***	***Persentase Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan***				***100%***	***100%***	***491,323,520.00***	***499,674,500.00***	***468,749,500.00***						***100%***	***336,323,300.00***	***Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah***
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	27,427,400.00	21,977,700.00	12,027,700.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	1 Dokumen	27,427,400.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																	
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	24,930,000.00	40,010,200.00	25,275,200.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	1 Laporan	27,680,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	11,600,000.00	3,979,200.00	3,979,200.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	1 Laporan	6,500,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	1 Laporan	78,387,000.00	23,347,000.00	33,442,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	1 Laporan	16,512,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	1 Dokumen	254,818,920.00	357,239,500.00	347,289,500.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	1 Dokumen	179,843,700.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	24,350,200.00	24,335,200.00	17,950,200.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	1 Laporan	15,000,200.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	10,200,000.00	3,979,200.00	3,979,200.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	1 Laporan	6,500,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	1 Laporan	59,610,000.00	24,806,500.00	24,806,500.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	OPD	1 Laporan	56,860,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**880,000,000.00**	**880,000,000.00**	**848,968,000.00**							**730,000,000.00**	
4	**5**	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Indeks Kebermanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan (Litbang)**				**85.00 Indeks**	**85.00 Indeks**	**880,000,000.00**	**880,000,000.00**	**848,968,000.00**						**90.00 Indeks**	**730,000,000.00**	
	5	***05***	***02***	***2.01***		***Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan***	***Persentase Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan***				***100 %***	***100 %***	***200,000,000.00***	***253,650,000.00***	***232,598,000.00***						***100%***	***180,000,000.00***	***Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah***
	5	05	02	2.01	0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				2 Laporan	2 Laporan	120,000,000.00	143,650,000.00	124,725,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan		2 Laporan	110,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan																	
							Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	1 Laporan	80,000,000.00	110,000,000.00	107,873,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan		1 Laporan	70,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	***05***	***02***	***2.02***		***Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan***	***Persentase Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan***	*-*			***100 %***	***100 %***	***120,000,000.00***	***135,000,000.00***	***131,510,000.00***						***100%***	***110,000,000.00***	***Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah***
	5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				2 Dokumen	2 Dokumen	120,000,000.00	135,000,000.00	131,510,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan		2 Dokumen	110,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	***05***	***02***	***2.03***		***Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan***	***Persentase Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan***				***100 %***	***100 %***	***320,000,000.00***	***273,850,000.00***	***268,370,000.00***						***100%***	***220,000,000.00***	***Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah***
	5	05	02	2.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				2 Dokumen	3 Dokumen	120,000,000.00	273,850,000.00	268,370,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan		2 Dokumen	110,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	02	2.03	0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral				1 Dokumen	0 Dokumen	120,000,000.00	-	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan		1 Dokumen	110,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	02	2.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				1 Dokumen	0 Dokumen	80,000,000.00	-	-	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan		1 Dokumen	-	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5	***05***	***02***	***2.04***		***Pengembangan Inovasi dan Teknologi***	***Persentase Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi***	***-***			***100 %***	***100 %***	***240,000,000.00***	***217,500,000.00***	***216,490,000.00***						***100%***	***220,000,000.00***	***Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah***
	5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																	
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				3 Dokumen	2 Dokumen	200,000,000.00	177,500,000.00	177,060,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan		3 Dokumen	180,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				2 Laporan	2 Laporan	20,000,000.00	20,000,000.00	19,720,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan		2 Laporan	20,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
	5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan																	
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				2 Laporan	2 Laporan	20,000,000.00	20,000,000.00	19,710,000.00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan		2 Laporan	20,000,000.00	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
												J U M L A H	**12.805.543.000,00**	**12.987.210.057,00**	**12.576.324.000,00**							**10.686.162.400,00**	

III.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida Kota Pontianak tahun 2025 melalui target-target program dan kegiatan yang bersifat regular maupun dukungan terhadap prioritas dengan mempertimbangkan kondisi keuangan pusat dan daerah maka rencana kebutuhan pendanaan kegiatan pada masing-masing program untuk tahun 2025 didukung dari pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp. 4.916.186.000,00 untuk mengakomodir belanja prioritas operasional Bapperida Kota Pontianak, Dana Alokasi Umum untuk mengakomodir Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 3.866.667.000,00 serta Pendapatan Asli Daerah untuk mengakomodir Tambahan Penghasilan Pegawai PNS dan PPPK sebesar Rp. 3.793.471.000,00.

BAB IV
PENUTUP

BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen perubahan Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Bapperida Kota Pontianak di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada perubahan anggaran tahun 2025, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a). Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada perubahan Rencana Kerja Bapperida Kota Pontianak tahun 2025 antara lain :

1. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada perubahan Rencana Kerja Bapperida pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pontianak.
2. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bapperida Kota Pontianak ini berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Pontianak tahun 2025 sebagai komitmen untuk melaksanakan kebijakan Kepala Daerah, serta untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b). Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Perubahan Rencana Kerja Bapperida Kota Pontianak tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Renja Bapperida ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (Perubahan RKA) sebelum ditetapkan menjadi Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Perubahan DPA) Bapperida Kota Pontianak tahun 2025.
2. Dalam penyusunan Perubahan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pontianak begitu pula dalam penyusunan Perubahan DPA, dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kota Pontianak serta hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Barat.

c). Rencana Tindak Lanjut

Sebagai rencana tindak lanjut dari penyusunan dokumen perubahan Rencana Kerja Bapperida Kota Pontianak tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan

evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen perubahan Rencana Kerja pada triwulan III dan IV tahun 2025.

Selanjutnya program dan kegiatan pada perubahan Rencana Kerja Bapperida Kota Pontianak tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergitas dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan perubahan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Bapperida Kota Pontianak.

Dengan disusunnya Perubahan Renja Bapperida Kota Pontianak tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan pembangunan. Rencana Kerja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapperida Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2025.

Pontianak, Juni 2025
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Riset dan Inovasi Daerah Kota Pontianak

dr. H. Sidig Handanu Widoyono, M.Kes
Pembina Utama Muda– IV/c
NIP. 19660516 199603 1 003

BAPPERIDA
KOTA PONTIANAK

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA PONTIANAK

Jalan Zainuddin No. 5 Pontianak, Kalimantan Barat
Telp. (0561) 734294 - 733045 Fax. (0561) 733045
Pontianak 78111

PERUBAHAN RENCANA KERJA

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Revisi Tahun 2024-2026. Sejalan dengan penganggaran yang berbasis kinerja, maka semua kegiatan yang direncanakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, jelas dan terukur.

Perubahan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, sehingga Rencana Kerja dapat menggambarkan rencana capaian kinerja tahunan, yang memetakan sasaran, indikator dan targetnya. Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak mempunyai 3 (tiga) program prioritas dan 1 (satu) program rutin/wajib penunjang yang kemudian akan dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tanggung jawab sekretariat dan bidang-bidang teknis.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

5. Undang-UndangNomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
19. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
21. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191.

22. PeraturanWali Kota Pontianak Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 52).
23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 53.24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 53.24).
24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 63).
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
26. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 135).

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan indikator dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD Tahun Anggaran 2024 dengan dokumen renja PD Tahun 2024 serta renstra PD dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang dalam kurun waktu Januari-Juni 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Tabel II.1 menggambarkan capaian program, kegiatan dan sub kegiatan pada Triwulan II Tahun 2024. Penyusunan renja 2024 merupakan tahun pertama pada periodesasi renstra 2024-2026 diukur dari realisasi kinerja pada Triwulan II Tahun 2024.

Adapun tabel II.1 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel II.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RencanaKerja dan Pencapaian Rencana Strategis

Tahun2024

Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2024) Yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024(%)	
			K		Rp	K	K	Rp	K	Rp			K		Rp	K	Rp
	Tingkatan Opini BPK terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pernyataan profesional Badan Pemeriksa Keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah sesuai dengan standar	WTP			WTP	WTP		WTP								

		akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan																		
	Persentase pemenuhan aspek pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sesuai perundang-undangan	Jumlah Regulasi, Kebijakan dan Implementasi dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Yang disusun Dan Dilaksanakan Sesuai Ketentuan dibagi Jumlah Regulasi, Kebijakan dan Implementasi dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Yang Harus disusun	100	%		100	%		100	%	31.185.356.217	99,41	%	28.621.411.953	99,41	%	99,41	%		99,41	

		Sesuai Ketentuan																			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan terkait urusan kepegawaian, surat menyurat, perencanaan, keuangan dan sarana prasarana	100	%	116.540.444.696	95	%	6.873.330.524	100	%	14.453.501.217	98,62	%	13.059.628.384	98,62	%	99	%	19.932.958.908	98,62	17,10
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	26	Dokumen/ Laporan	80.750.000	4	Dokumen/ Laporan	4.198.800	26	Dokumen/ Laporan	43.657.500	26	Dokumen/ Laporan	40.162.750	98,99	%	26	Dokumen/ Laporan	40.162.750	98,99	49,74
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	5.438.000	-	Dokumen	147.600	4	Dokumen	10.012.500	4	Dokumen	9.308.750	99,81	%	4	Dokumen	9.308.750	99,81	171,18
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen	8.030.000	1	Dokumen	381.600	4	Dokumen	7.630.000	4	Dokumen	6.690.000	100,00	%	5	Dokumen	6.690.000	125,00	83,31

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	Dokumen	8.030.000	-	Dokumen	1.063.800	4	Dokumen	3.255.000	4	Dokumen	1.925.000	100,00	%	4	Dokumen	1.925.000	100,00	23,97
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Laporan	5.504.000	1	Laporan	810.000	10	Laporan	14.086.000	10	Laporan	13.965.000	97,46	%	10	Laporan	13.965.000	97,46	253,72
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	5.451.200	2	Laporan	1.795.800	4	Laporan	8.674.000	4	Laporan	8.274.000	100,00	%	4	Laporan	8.274.000	100,00	151,78
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan	24	Bulan	103.756.901.668	3	Bulan	4.521.322.321	24	Bulan	8.755.629.617	24	Bulan	8.049.407.713	100,00	%	24	Bulan	12.570.730.034	100,00	12,12

	daerah	perangkat daerah																			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180	orang/ bulan	46.251.385.000	93	orang/ bulan	4.297.581.821	54	orang/ bulan	8.020.568.617	54	orang/ bulan	7.344.207.895	100,00	%	54	orang/ bulan	7.344.207.895	30,00	15,88
Pelaksanaan Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	48	Dokumen	1.537.610.000	6	Dokumen	223.740.500	48	Dokumen	726.470.000	48	Dokumen	696.670.000	100,00	%	48	Dokumen	696.670.000	100,25	45,31
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72	Lapo ran	8.030.000	-	Laporan	-	72	Laporan	8.591.000	72	Laporan	8.529.818	100,00	%	72	Laporan	8.529.818	100	106,22
Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang dikelola administrasi	Jumlah ASN yang dikelola	90	orang	653.770.000	93	orang	133.550.000	54	orang	546.757.000	54	orang	410.227.402	75,	%	54	orang	543.777.402	60,00	83,18

Perangkat Daerah	kepegawaiannya	administrasi kepegawaiannya													03						
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengka pannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	paket	129.890.000	1	paket	121.200.000	2	paket	84.380.000	2	paket	77.680.000	92,06	%	4	paket	77.680.000	200,00	59,80
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									54	orang	195.000.000	54	orang	194.721.750	99,86						
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	90	orang	16.070.000	90	orang	12.350.000	90	orang	20.760.000	54	orang	4.950.000	23,84	%	54	orang	51.964.398	60,00	323,36
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	orang	96.566.550	-	orang	-	20	orang	246.617.000	8	orang	132.875.652	53,88	%	8	orang	461.904.363	40,00	478,33
Administrasi Umum	Jangka waktu penyelengga raan	Jangka waktu penyelenggaraan	24	bulan	3.778.884.108	3	bulan	523.062.278	24	bulan	1.208.867.650	24	bulan	1.078.557.214	10	%	24	bulan	1.601.619.492	100,00	42,38

Perangkat Daerah	administrasi umum perangkat daerah	administrasi umum perangkat daerah													0,00						
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	paket	29.136.550	-	paket	-	2	paket	12.255.250	2	paket	12.207.000	100,00	%	2	paket	141.413.000	100,00	485,35
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18	paket	422.403.534	-	paket	196.373.000	18	paket	375.776.700	18	paket	342.761.800	100,00	%	18	paket	539.134.800	100,00	127,64
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	paket	27.486.000	1	paket	1.459.500	4	paket	55.686.900	4	paket	55.373.180	97,64	%	4	paket	78.353.180	97,64	285,07
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	paket	315.270.516	1	paket	44.490.000	6	paket	86.090.000	6	paket	73.088.000	100,00	%	6	paket	111.288.000	100,00	35,30
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	670.228.740	-	paket	93.656.400	2	paket	228.376.000	2	paket	198.919.700	100,00	%	2	paket	140.504.700	100,00	20,96

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	Dokumen	46.715.000	3	Dokumen	5.455.000	24	Dokumen	14.500.000	24	Dokumen	13.640.000	100,00	%	24	Dokumen	165.787.109	100,00	354,89
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	Lapo ran	313.000.000	3	Laporan	181.628.378	36	Laporan	436.182.800	36	Laporan	382.567.534	100,00	%	36	Laporan	1.127.159.625	150,00	360,11
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	#REF!	unit	2.038.404.200	26	unit	528.486.101	29	unit	1.183.086.125	29	unit	1.156.817.900	97,78	%	29	unit	1.685.304.001	#REF!	82,68
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24	unit	94.511.670	-	unit	680.000	10	unit	297.570.800	10	unit	287.693.900	96,68	%	10	unit	700.417.700	41,67	741,09
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8	unit	183.440.000	26	unit	527.806.101	19	unit	885.515.325	19	unit	869.124.000	98,15	%	19	unit	746.703.636	243,38	407,06
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan	Jangka Waktu penyediaan jasa penunjang urusan	24	bulan	4.066.302.380	3	bulan	751.827.580	24	Laporan	1.978.683.325	24	Laporan	1.709.191.124	100,0	%	24	bulan	1.715.385.124	100,00	42,19

Pemerintahan Daerah	pemerintah daerah	pemerintah daerah													0						
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24	Lapo ran	28.712.800	3	Lapo ran	6.194.000	24	Lapo ran	10.600.000	24	Lapo ran	10.000.000	94,34	%	24	Lapo ran	228.768.496	100,00	796,75
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	Lapo ran	1.292.960.376	3	Lapo ran	264.250.342	24	Lapo ran	1.034.524.672	24	Lapo ran	830.344.548	80,26	%	24	Lapo ran	915.001.192	100,00	70,77
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	Lapo ran	1.309.340.357	3	Lapo ran	481.383.238	24	Lapo ran	933.558.653	24	Lapo ran	868.846.576	93,07	%	24	Lapo ran	767.504.109	100,00	58,62
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	840	unit	2.165.432.340	120	unit	410.883.444	194	unit	736.820.000	192	unit	615.264.281	83,50	%	192	unit	626.349.861	22,91	28,92
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	2	unit	50.620.000	1	unit	11.085.580	2	unit	38.750.000	1	unit	33.496.743	50,00	%	1	unit	16.256.175	50,00	32,11

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya																				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	unit	359.612.528	10	unit	70.485.864	4	unit	68.280.000	4	unit	67.915.298	100,00	%	4	unit	181.031.098	28,57	50,34
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	542	unit	445.010.150	108	unit	113.115.800	185	unit	303.100.000	185	unit	187.973.100	100,25	%	185	unit	187.973.100	34,22	42,24
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	unit	17.010.000	-	unit	-	1	unit	43.380.000	1	unit	43.241.210	100,00		1	unit	259.437.410	100,00	1.525,21
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2	unit	277.830.000	1	unit	216.196.200	2	unit	283.310.000	1	unit	282.637.930	50,00	%	1	unit	15.911.330.887	50,00	5.727,00

	Dipelihara/Direhabilitasi	Dipelihara/Direhabilitasi																			
Program Pengeloaan Keuangan Daerah			100	%	26.318.973.482	100	%	6.947.639.728	100		13.657.756.200	99,79	%	12.728.584.272	99,79	%	199,79	%	19.676.224.000	199,79	297,45
Program Pengeloaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah dokumen APBD diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan dibagi jumlah semua dokumen APBD	100	%	6.614.967.000	100	%	4.317.106.364	100	%	5.370.901.700	99,90	%	4.911.337.900	99,90	%	99,90	%	9.228.444.264	99,90	139,51
	Persentase dokumen Perbendaha raan tervalidasi tepat waktu dan sesuai ketentuan	Jumlah dokumen Perbendaharaan tervalidasi tepat waktu dan sesuai ketentuan dibagi seluruh dokumen perbendaharaan	100	%	1.280.644.741	99,97	%	372.608.000	100	%	1.260.926.500	100,00	%	1.229.271.500	100,00	%	100	%	1.601.879.500	100,00	125,08
	Persentase laporan keuangan sesuai SAP dan disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan keuangan sesuai SAP yang disampaikan tepat waktu dibagi Jumlah laporan keuangan sesuai SAP	100	%	1.373.411.741	100,00	%	518.328.100	100	%	1.166.020.700	99,06	%	1.047.704.062	99,06	%	99,06	%	1.566.032.162	99,06	114,02

	Persentase dokumen data penunjang urusan pengelolaan keuangan daerah yang tervalidasi dan sesuai ketentuan	Jumlah dokumen data penunjang urusan pengelolaan keuangan daerah yang telah tervalidasi sesuai ketentuan dibagi Jumlah dokumen data penunjang urusan pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan	100	%	16.061.700.000	100,00	%	1.452.827.864	100	%	4.343.270.000	100,00	%	4.157.073.110	100,00	%	100	%	5.609.900.974	100,00	34,93
	Persentase ketersediaan data keuangan dalam sistem informasi yang tervalidasi	Jumlah data keuangan dalam sistem informasi yang tervalidasi dibagi data keuangan yang harus tersedia dalam sistem informasi	100	%	988.250.000	100,00	%	286.769.400	100	%	1.516.637.300	100,00	%	1.383.197.700	100,00	%	100	%	1.669.967.100	100,00	168,98
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen dan atau orang yang mengikuti pembinaan hasil kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran	Jumlah dokumen dan atau orang yang mengikuti pembinaan hasil kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana	472	Dokumen	6.614.967.000	142	Dokumen	1.686.573.000	1672	Dokumen/orang	5.370.901.700	1.670	Dokumen / orang	4.911.337.900	99,90	%	1.670	Dokumen	6.597.910.900	353,89	99,74

		Anggaran																			
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4	Dokumen	662.417.000	-	Dokumen	262.363.000	4	Dokumen	490.920.500	4	Dokumen	468.431.700	100,00	%	4	Dokumen	730.794.700	108,05	110,32
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4	Dokumen	691.328.000	-	Dokumen	42.802.000	4	Dokumen	488.547.500	4	Dokumen	440.647.000	100,00	%	4	Dokumen	483.449.000	104,54	69,93
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	60	Dokumen	546.787.000	32	Dokumen	244.092.400	60	Dokumen	570.788.000	60	Dokumen	537.360.000	100,00	%	60	Dokumen	781.452.400	100,00	142,92
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	60	Dokumen	436.157.000	31	Dokumen	97.900.000	60	Dokumen	197.780.000	60	Dokumen	177.860.000	100,00	%	60	Dokumen	275.760.000	100,00	63,22
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	60	Dokumen	228.735.000	2	Dokumen	2.260.000	60	Dokumen	173.801.000	60	Dokumen	138.758.000	100,00	%	60	Dokumen	141.018.000	100,00	61,65
Koordinasi, Penyusunan dan	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang	180	Doku-	300.478.000	61	Doku	121.938.800	180	Doku-	466.695.000	18	Doku	340.848.000	10	%	18	Doku-	462.786.800	100,00	154,02

Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Diverifikasi	Diverifikasi		men			- men			men		0	- men		0,00		0	men			
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4	Dokumen	1.126.423.000	-	Dokumen	134.952.500	4	Dokumen	688.160.900	4	Dokumen	674.407.900	100,00	%	4	Dokumen	809.360.400	100,00	71,85
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	8	Dokumen	1.276.814.000	3	Dokumen	270.393.300	8	Dokumen	726.225.300	8	Dokumen	681.922.300	100,00	%	8	Dokumen	952.315.600	102,95	74,59
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2	Dokumen	333.829.000	-	Dokumen	80.336.000	2	Dokumen	14.375.000	2	Dokumen	13.280.000	100,00	%	2	Dokumen	93.616.000	78,70	28,04

Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	28	Dokumen	82.379.000	2	Dokumen	282.650.000	28	Dokumen	285.575.000	28	Dokumen	271.237.000	100,00	%	28	Dokumen	553.887.000	100,21	672,36
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	58	Dokumen	292.506.000	10	Dokumen	500.000	58	Dokumen	970.257.500	58	Dokumen	968.761.000	100,00	%	58	Dokumen	969.261.000	100,00	331,36
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	4	Dokumen	123.406.000	1	Dokumen	5.800.000	4	Dokumen	3.825.000	2	Dokumen	3.821.000	100,00	%	2	Dokumen	9.621.000	50,00	7,80
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1200	orang	513.708.000	285	orang	140.585.000	1200	orang	293.951.000	1.200	orang	194.004.000	100,00	%	1.200	orang	334.589.000	100,00	65,13
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen dan atau laporan, orang yang mengikuti pembinaan hasil kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbenda haraan daerah	Jumlah dokumen dan atau laporan, orang yang mengikuti pembinaan hasil kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan	24.474	Dokumen	1.280.644.741	5.051	Dokumen	372.608.000	24.476	Dokumen	1.260.926.500	24.476	Dokumen	1.229.271.500	100,00	%	24.476	Dokumen	1.601.879.500	100,01	125,08
			26	Lapo-ran		3	Lapo-ran	-	26	Lapo-ran	146.721.000	26	Lapo-ran	141.616.000	100,00	%	26	Lapo-ran		100,00	

		daerah	400	Orang		110	Orang	-	400	Orang	118.110.000	400	Orang	117.710.000	100,00	%	400	Orang		100,00	
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	23100	Dokumen	55.571.000	4.886	Dokumen	19.865.000	23100	Dokumen	26.591.500	23.100	Dokumen	26.591.500	100,00	%	23.100	Dokumen	46.456.500	100,00	83,60
Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2	Lapo-ran	10.397.000	-	Lapo-ran	-	2	Lapo-ran	4.875.000	2	Lapo-ran	4.870.000	100,00	%	2	Lapo-ran	4.870.000	100,00	46,84
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	300	Dokumen	23.189.000	28	Dokumen	21.305.000	300	Dokumen	16.480.000	64	Dokumen	16.480.000	21,33	%	64	Dokumen	37.785.000	21,33	162,94
Penatausa haan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	2	Dokumen	12.397.000	1	Dokumen	7.875.000	3	Dokumen	15.750.000	-	Dokumen	14.375.000	-	%	-	Dokumen	22.250.000	-	179,48
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi,	8	Dokumen	174.106.000	1	Dokumen	144.316.000	8	Dokumen	363.831.000	8	Dokumen	363.831.000	100,00	%	8	Dokumen	508.147.000	100,00	291,86

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																				
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	24	Dokumen	33.667.900	1	Dokumen	111.900.000	24	Dokumen	149.500.000	24	Dokumen	147.025.000	100,00	%	24	Dokumen	258.925.000	100,00	769,06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak	24	Lapo-ran	88.188.861	3	Lapo-ran	21.175.000	24	Lapo-ran	141.846.000	24	Lapo-ran	136.746.000	100,00	%	24	Lapo-ran	157.921.000	100,00	179,07

motongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																				
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	6	Dokumen	487.386.000	1	Dokumen	6.775.000	6	Dokumen	241.309.000	6	Dokumen	228.009.000	100,00	%	6	Dokumen	234.784.000	100,00	48,17

Kas																					
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1032	Dokumen	94.977.760	133	Dokumen	23.630.000	1032	Dokumen	50.534.000	1.032	Dokumen	50.534.000	100,00	%	1.032	Dokumen	74.164.000	100,00	78,09
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	2	Dokumen	154.539.160	-	Dokumen	3.667.000	3	Dokumen	132.100.000	3	Dokumen	123.100.000	100,00	%	3	Dokumen	126.767.000	150,00	82,03

Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	400	orang	146.225.060	110	orang	12.100.000	400	orang	118.110.000	400	orang	117.710.000	100,00	%	400	orang	129.810.000	100,00	88,77
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen dan atau laporan, BLUD, orang yang mengikuti pembinaan hasil kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Jumlah dokumen dan atau laporan, BLUD, orang yang mengikuti pembinaan hasil kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	44	Dokumen	1.373.411.741	6	Dokumen	518.328.100	44	Dokumen	1.166.020.700	44	Dokumen	902.784.162	99,06	%	44	Dokumen	1.421.112.262	99,06	103,47
			58	Lapo-ran		8	Lapo-ran	-	58	Lapo-ran	159.654.500	58	Lapo-ran	200.908.800	100,00	%	58	Lapo-ran		100,00	
			26	Lembaga		-	Lembaga	-	26	Lembaga	9.198.000	26	Lembaga	9.198.000	100,00	%	26	Lembaga		100,00	
			240	orang		60	orang	-	240	orang	230.808.000	240	orang	226.679.962	100,00	%	240	orang		100,00	
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	24	Lapo-ran	8.617.464	3	Lapo-ran	-	12	Lapo-ran	1.716.200	12	Lapo-ran	45.541.500	100,00	%	12	Lapo-ran	45.541.500	50,00	528,48

	Daerah	Daerah																			
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	24	Dokumen	175.100.558	3	Dokumen	10.120.000	4	Dokumen	45.541.500	4	Dokumen	65.041.500	96,74	%	4	Dokumen	75.161.500	16,12	42,92
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	8	Lapo-ran	15.071.650	1	Lapo-ran	6.290.000	12	Lapo-ran	3.040.500	12	Lapo-ran	3.040.500	100,00	%	12	Lapo-ran	9.330.500	150,00	61,91
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	24	Lapo-ran	59.299.180	3	Lapo-ran	42.470.000	12	Lapo-ran	122.372.800	12	Lapo-ran	122.351.800	100,00	%	12	Lapo-ran	164.821.800	50,00	277,95

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	8	Dokumen	254.687.246	-	Dokumen	349.414.000	8	Dokumen	562.462.200	8	Dokumen	366.400.000	100,00	%	8	Dokumen	715.814.000	105,49	281,06
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4	Dokumen	202.310.351	1	Dokumen	4.392.300	4	Dokumen	3.700.000	4	Dokumen	3.700.000	100,00	%	4	Dokumen	8.092.300	100,00	4,00
Penyusunan Analisis Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan	2	Dokumen	7.582.928	-	Dokume	945.000	2	Dokume	2.425.000	2	Dokume	2.425.000	100,0	%	2	Dokumen	3.370.000	100,00	44,44

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					n			n			n		0						
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2	Dokumen	142.504.928	1	Dokumen	41.514.500	4	Dokumen	132.100.000	4	Dokumen	10.099.400	100,00	%	4	Dokumen	51.613.900	200,00	36,22
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	2	Dokumen	12.445.928	1	Dokumen	3.817.200	2	Dokumen	20.131.500	2	Dokumen	18.331.500	100,00	%	2	Dokumen	22.148.700	100,00	177,96
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	240	orang	183.813.108	60	orang	12.167.100	240	orang	230.808.000	240	orang	226.679.962	100,00	%	240	orang	238.847.062	100,00	129,94
Pembinaan Pengelolaan Keuangan	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	26	Lem-baga	270.519.544	-	Lem-ba	16.088.000	26	Lem-ba	9.198.000	26	Lem-ba	9.198.000	100,0	%	26	Lem-baga	25.286.000	100,00	9,35

BLUD Kabupaten/ Kota							ga			ga			ga		0						
Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	2	Lapo-ran	9.253.928	1	Lapo-ran	31.110.000	2	Lapo-ran	32.525.000	2	Lapo-ran	29.975.000	100,00	%	2	Lapo-ran	61.085.000	100,00	660,10
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen dan atau laporan hasil Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen dan atau laporan hasil Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	12	Lapo-ran	16.061.700.000	2	Lapo-ran	1.452.827.864	12	Lapo-ran	4.343.270.000	12	Lapo-ran	4.157.073.110	100,00	%	12	Lapo-ran	5.609.900.974	100,00	34,93
Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2	Lapo-ran	33.693.750	1	Lapo-ran	155.670.000	2	Lapo-ran	188.420.000	2	Lapo-ran	186.595.000	100,00	%	2	Lapo-ran	342.265.000	100,00	1.015,81
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	2	Lapo-ran	33.693.750	-	Lapo-ran	-	2	Lapo-ran		-	Lapo-ran	-	-		-	Lapo-ran	-	-	-

Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2	Lapo-ran	926.925.000	-	Lapo-ran	-	-	Lapo-ran		-	Lapo-ran	-	-	%	-	Lapo-ran	-	-	-
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	2	Lapo-ran	33.693.750	-	Lapo-ran	-	2	Lapo-ran		-	Lapo-ran	-	-		-	Lapo-ran	-	-	-
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2	Lapo-ran	15.000.000.000	1	Lapo-ran	1.297.157.864	2	Lapo-ran	4.154.850.000	4	Lapo-ran	3.970.478.110	200,00	%	4	Lapo-ran	5.267.635.974	200,00	35,12
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen dan atau orang yang mengikuti pembinaan hasil Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen dan atau orang yang mengikuti pembinaan hasil Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	24	Dokum-en	988.250.000	10	Dokum-en	286.769.400	24	Dokum-en	1.516.637.300	24	Dokum-en	1.383.197.700	98,60	%	24	Dokum-en	1.669.967.100	98,60	168,98

Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	12	Dokumen	140.452.000	4	Dokumen	13.743.500	12	Dokumen	589.259.000	12	Dokumen	573.981.300	100,28	%	12	Dokumen	587.724.800	100,28	418,45
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	12	Dokumen	751.272.000	6	Dokumen	273.025.900	12	Dokumen	541.998.500	12	Dokumen	516.806.300	96,93	%	12	Dokumen	789.832.200	96,93	105,13
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	60	orang	96.526.000	-	orang	-	60	orang	385.379.800	60	orang	292.410.100	100,00	%	60	orang	292.410.100	100,00	302,93
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase barang milik daerah yang tercatat sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah barang milik daerah yang tercatat sesuai ketentuan yang berlaku dibagi seluruh barang	100	%	25.303.017.693	-	%	869.551.404	100	%	3.074.098.800	99,83	%	2.833.199.297	99,83	%	100	%	3.754.915.265	99,83	14,84

		milik daerah																			
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen dan atau laporan, orang yang mengikuti pembinaan hasil kegiatan pengelolaan barang milik daerah	Jumlah dokumen dan atau laporan, orang yang mengikuti pembinaan hasil kegiatan pengelolaan barang milik daerah	8	Dokumen	9.211.374.154	7	Dokumen	869.551.404	32	Dokumen	3.074.098.800	32	Dokumen	2.885.363.861	98,79	%	32	Dokumen	3.754.915.265	395,15	40,76
			12	Laporan		2	Laporan	-	12	Laporan	2.101.040.600	12	Laporan	1.966.086.902	99,10	%	12	Laporan		99,10	
			500	Orang		211	Orang	-	250	Orang	164.518.400	250	Orang	162.378.400	100,00	%	250	Orang		50,00	
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2	Dokumen	130.214.000	-	Dokumen	3.985.750	2	Dokumen	72.326.000	2	Dokumen	68.176.000	100,00	%	2	Dokumen	72.161.750	100,00	55,42
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	Dokumen	87.556.000	-	Dokumen	-	2	Dokumen	7.760.500	2	Dokumen	450.000	100,00	%	2	Dokumen	450.000	100,00	0,51
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	Dokumen	69.395.000	1	Dokumen	6.783.000	2	Dokumen	61.030.600	2	Dokumen	57.062.500	100,00	%	2	Dokumen	63.845.500	100,00	92,00
Penyusunan Kebijakan	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang	Jumlah Kebijakan Pengelolaan	2	Doku	62.981.600	1	Doku	4.015.000	2	Doku	38.413.800	2	Doku	33.902.200	80,	%	2	Doku	37.917.200	80,62	60,20

Pengelolaan Barang Milik Daerah	Milik Daerah	Barang Milik Daerah		men			men			men			men		62			men			
Penatausa haan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2	Lap o ran	47.396.000	-	La po ran	8.750.000	2	La po ran	42.690.000	2	La po ran	22.969.600	-	%	2	Lapo ran	31.719.600	100,00	66,92
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2	Lap o ran	4.752.260.000	1	La po ran	314.255.000	2	La po ran	1.429.324.000	2	La po ran	1.291.725.650	11 7,5 2	%	2	Lapo ran	1.605.980.650	117,52	33,79
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2	Lap o ran	600.255.000	1	La po ran	76.207.000	2	La po ran	263.200.000	2	La po ran	304.046.764	79, 32	%	2	Lapo ran	380.253.764	79,32	63,35
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	24	Dok u men	2.333.081.000	-	Do ku me n	-	24	Do ku me n	629.008.900,00	24	Do ku me n	597.307.859	10 0,0 0	%	24	Dok u men	597.307.859	100,00	25,60
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian	2	Lap o ran	18.676.000	-	La po ran	-	2	La po ran	19.833.500	2	La po ran	16.787.200	-		2	Lapo ran	16.787.200	100,00	89,89

Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah																			
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2	Lapo ran	87.558.000	-	Lapo ran	4.565.000	2	Lapo ran	53.423.000	2	Lapo ran	51.652.500	97,73	%	2	Lapo ran	56.217.500	97,73	64,21
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2	Lapo ran	636.203.000	-	Lapo ran	164.615.110	2	Lapo ran	292.570.100	2	Lapo ran	278.905.188	100,00	Lapo ran	2	Lapo ran	443.520.298	100,00	69,71
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	500	oran g	385.798.554	211	oran g	147.469.800	250	oran g	164.518.400	250	oran g	162.378.400	100,00	oran g	250	oran g	309.848.200	50,00	80,31
					148.458.429.389	99,97	%	15.628.692.957	100	%	31.185.356.217			28.621.411.953							

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak tidak mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak diukur berdasarkan indikator sasaran strategis, indikator program dan indikator kinerja kunci (IKK).

Adapun indikator sasaran strategis, indikator program dan indikator kinerja kunci (IKK) dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indikator Sasaran Strategis

   Indikator Sasaran Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak periode 2024-2026 adalah Persentase Pemenuhan Aspek Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan. Pemenuhan Aspek Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan didefinisikan sebagai pemenuhan seluruh regulasi, kebijakan, dokumen, laporan serta implementasi sesuai ketentuan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Disebabkan penyusunan renja tahun 2024 merupakan tahun pertama periodesasi renstra 2024-2026 maka capaian indikator sasaran strategis masih belum terealisasi.

2. Indikator Program

   a. Persentase Ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran

      Dokumen penganggaran didefinisikan sebagai dokumen yang dihasikan dalam tahap penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Disebabkan penyusunan renja tahun 2024 merupakan tahun pertama periodesasi renstra 2024-2026 maka capaian indikator program masih belum terealisasi.

   b. Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu

      Laporan Keuangan tepat waktu didefinisikan laporan keuangan yang disampaikan sesuai dengan waktu / periode yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Disebabkan penyusunan renja tahun 2024 merupakan tahun pertama periodesasi renstra 2024-2026 maka capaian indikator program masih belum terealisasi.

   c. Persentase penatausahaan keuangan dan manajemen kas dilaksanakan sesuai ketentuan

      Penatausahaan keuangan didefinisikan segala administrasi yang diselenggarakan dalam rangka penerimaan maupun pengeluaran kas. Manajemen kas adalah praktek atau teknik yang dirancang untuk mempercepat dan mengontrol penerimaan kas, menjamin keamanan penerimaan, meningkatkan kontrol atas cara cara pembayaran dan menghilangkan saldo kas menganggur.

Disebabkan penyusunan renja tahun 2024 merupakan tahun pertama periodesasi renstra 2024-2026 maka capaian indikator program masih belum terealisasi.

d. Persentase akses publik terhadap informasi keuangan daerah

Akses publik terhadap informasi keuangan didefinisikan akses terhadap dokumen keuangan yang berdasarkan ketentuan dapat di publikasikan. Disebabkan penyusunan renja tahun 2024 merupakan tahun pertama periodesasi renstra 2024-2026 maka capaian indikator program masih belum terealisasi.

e. Persentase OPD dengan pengelolaan barang milik daerah dengan kategori baik

Pengelolaan barang milik daerah dengan kategori baik adalah pengelolaan barang yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Disebabkan penyusunan renja tahun 2024 merupakan tahun pertama periodesasi renstra 2024-2026 maka capaian indikator program masih belum terealisasi.

3. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

a. Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total Dalam APBD

Definisi IKK ini adalah untuk melihat kredibilitas belanja dari perencanaan awal.

Adapun capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 8,40%

b. Assets Management

Definisi IKK ini adalah untuk melihat manajemen aset seluruh perangkat daerah yang ada.Adapun capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 100%

c. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum Dikurangi Transfer Expenditure

Definisi IKK ini adalah untuk mengukur efisiensi belanja operasi di luar Transfer Expenditure atau rasio belanja operasi dalam APBD di luar Transfer Expenditure

Adapun capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 69,86%.

d. Opini Laporan Keuangan

Definisi IKK ini adalah untuk melihat perkembangan opini laporan keuangan dalam 10 tahun terakhir.

Adapun capaian kinerja pada tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

e. Informasi Tentang Sumber Daya Yang Tersedia Untuk Pelayanan

Definisi IKK ini adalah untuk melihat ketersediaan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan. Data yang diminta adalah jumlah unit pelayanan yang mempublikasikan informasi anggaran dan realisasi belanja pada tahun sebelumnya melalui website pemerintah daerah.

Adapun capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 100%

f. Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah

Definisi IKK ini adalah untuk mengukur akses publik terhadap informasi keuangan daerah. Informasi keuangan daerah adalah dokumen keuangan yang berdasarkan ketentuan dapat diakses dan dipublikasikan.

Adapun capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 77,78%

g. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru Dan Tenaga Kesehatan

Definisi IKK ini adalah untuk mengukur rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan. Adapun capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 21,39%.

h. Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya

Definisi IKK ini adalah untuk melihat rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya. Adapun capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 2,00%.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak s/d tahun 2023 dapat diuraikan dalam tabel II.2 sebagai berikut :

Tabel II.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Peranngkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	**Indikator Sasaran Strategis**											
1	Persentase Pemenuhan Aspek Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Sesuai Ketentuan	-	-			100	100			100	100	
II	**Indikator Program**											
1	Persentase Ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	-	-			100	100			100	100	
2	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	-	-			100	100			100	100	
3	Persentase penatausahaan keuangan dan manajemen kas dilaksanakan sesuai ketentuan	-	-			100	100			100	100	
4	Persentase akses publik terhadap informasi keuangan daerah	-	-			100	100			100	100	
5	Persentase OPD dengan pengelolaan barang milik daerah dengan kategori baik	-	-			100	100			100	100	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Peranngkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**											
1	Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total Dalam APBD	-	IKK					8,40%				
2	Assets Management	-	IKK					100%				
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum Dikurangi Transfer Expenditure	-	IKK					69,86%				
4	Opini Laporan Keuangan	-	IKK					WTP				
5	Informasi Tentang Sumber Daya Yang Tersedia Untuk Pelayanan	-	IKK					100%				
6	Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah	-	IKK					77,78%				
7	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru Dan Tenaga Kesehatan	-	IKK					21,39%				
8	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	-	IKK					2,00%				

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi

Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi yang dipergunakan untuk menentukan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kewenangannya. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan OPD.

Untuk menentukan isu strategis maka permasalahan yang dihadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak dapat dirumuskan sebagai berikut :

Tabel II.3

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangun Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana salah satu isu yang dikedepankan adalah perluasan skema pembiayaan daerah, dan peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.	Belanja daerah belum disusun berdasarkan skala prioritas	Belum optimalnya analisis terhadap kualitas belanja daerah dan koordinasi dengan OPD masih harus ditingkatkan
2	Pengelolaan keuangan masih belum mengikuti perkembangan teknologi digitalisasi yang berkembang secara masif	- Penatausahaan keuangan masih belum sepenuhnya berbasis teknologi informasi sehingga data data keuangan menyangkut arus kas masuk dan keluar belum dapat disajikan secara tepat, cepat dan akurat sehingga memperlambat pelayanan dan pengambilan keputusan. - Digitalisasi membawa dampak kemudahan dan kecepatan, namun juga menimbulkan resiko	Belum optimalnya penyesuaian core bisnis Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan regulasi yang digunakan, antara Pemda dan Bank RKUD.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		terjadinya cyber crime. Pengembangan sistem informasi keuangan harus memperhatikan aspek keamanan.	
3	Pengelolaan dan pemanfaatan aset aset masih belum optimal	- Masih terdapat aset aset yang belum dimanfaatkan secara optimal termasuk aset yang disewakan yang melibatkan SKPD lain sebagai pengelola - Aset aset dengan beban pemeliharaan yang besar tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh - Masih terdapat aset yang belum bersertifikat	Terdapat aset aset yang statusnya bermasalah dengan pihak III
			Informasi / data yang tersedia terkait pengeloaan aset belum tervalidasi
			Cakupan dan rentang kendali dalam pengelolaan aset yang besar
			Jumlah Sumber daya manusia pengelolaan aset yang tidak memadai
			Masih kurangnya koordinasi dengan OPD terkait data pemeliharaan dan pemanfaatan aset yang digunakan
			Masih terdapat aset yang belum didukung dokumen /data untuk dilakukan proses pensertifikatan tanah

Berdasarkan perumusan masalah, masalah pokok dan akar masalah maka penentuan isu strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membawa perubahan yang cukup mendasar terhadap tata kelola keuangan Pemerintah Daerah
2. Inovasi digitalisasi sektor keuangan yang tidak hanya memperhatikan aspek kemudahan dan kecepatan namun juga aspek keamanan.

3. Optimalisasi peran Bank Kalbar selaku Bank RKUD dalam mengembangkan teknologi informasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)
4. Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah secara optimal.

Terdapat berbagai tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan dan kinerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak. Dalam upaya untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran perlu dilakukan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats). Dalam analisis SWOT terdapat dua lingkungan strategis yang harus diperhitungkan, yakni lingkungan Strategis Internal (Kekuatan dan Kelemahan) dan lingkungan Strategis Eksternal (Tantangan dan Peluang). Adapun Analis SWOT Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strengths)
   1) Adanya *Political Will* dari Kepala Daerah
   2) Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak.
b. Kelemahan (Weaknesses)
   1) Terbatasnya Sumber Daya Aparatur yang memiliki keahlian khusus di antaranya penilai barang milik daerah dan lambannya adaptasi terhadap perubahan tegnologi dan informasi sektor keuangan yang semakin masif
   2) Sarana prasana masih terbatas terutama sarana prasarana dalam tegnologi informasi
c. Ancaman (Threat)
   1) Berkembangnya cyber crime seiring berkembangnya digitalisasi dalam sektor keuangan
   2) Aparatur pengelola keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak lamban beradaptasi dengan perubahan aturan keuangan yang berlaku dan perkembangan tegnologi informasi di sektor keuangan
d. Peluang
   1) Adanya hubungan yang harmonis dan sinergitas dengan instansi vertikal seperti Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait pensertifikatan tanah
   2) Adanya dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui program Kopsurgah KPK dalam upaya pengamanan barang milik daerah
   3) Adanya dukungan dari Lembaga Penegak Hukum dalam hal ini Kejaksaan dalam penanganan aset aset milik pemerintah Kota Pontianak yang bermasalah

Berdasarkan formulasi isu-isu penting yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan analisa SWOT maka hal yang harus ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas adalah sebagai berikut :

1. Menyusun/menyempurnakan regulasi agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan agar mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi dan tegnologi yang semakin berkembang.
3. Mengembangkan digitalisasi sektor keuangan yang tidak hanya memperhatikan aspek kemudahan dan kecepatan namun juga aspek keamanan.
4. Meningkatkan kerja sama dengan Bank Kalbar selaku Bank RKUD dalam mengembangkan teknologi informasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)
5. Meningkatkan kerjasama/koordinasi dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dan instansi vertikal dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah yang optimal.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 tidak mengalami perbedaan dengan rancangan awal RKPD tahun 2024 yaitu dalam hal besaran pagu anggaran, jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan. Pagu anggaran sebesar Rp 29.966.282.000,00 adalah pagu indikatif yang besarannya ditetapkan oleh Walikota Pontianak melalui Bappeda Kota Pontianak. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, pagu tersebut dibagi ke masing masing program, kegiatan dan sub kegiatan. Adapun jumlah program adalah sebanyak 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 87 (delapan puluh tujuh) sub kegiatan yang selengkapnya dapat dilihat dalam tabel II.4 berikut :

Tabel II.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				29.966.282.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				29.966.282.000,00	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				29.966.282.000,00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				29.966.282.000,00	
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase penatausahaan keuangan dan manajemen kas dilaksanakan sesuai ketentuan Persentase akses publik terhadap informasi keuangan daerah Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100%	11.856.773.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran Persentase penatausahaan keuangan dan manajemen kas dilaksanakan sesuai ketentuan Persentase akses publik terhadap informasi keuangan daerah Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100%	11.856.773.000,00	
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase capaian koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	100 persen	5.038.194.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase capaian koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	100 persen	5.038.194.400,00	
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	1.069.160.000,00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	1.069.160.000,00	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	1.051.172.700,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	1.051.172.700,00	
5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	32 Dokumen	557.583.500,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	32 Dokumen	557.583.500,00	
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	32 Dokumen	66.400.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	32 Dokumen	66.400.000,00	
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	32 Dokumen	155.535.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	32 Dokumen	155.535.000,00	
5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	93 Dokumen	303.426.500,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	93 Dokumen	303.426.500,00	
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	620.668.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	620.668.000,00	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	783.634.200,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	783.634.200,00	
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	196.110.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	196.110.500,00	
5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	14 Dokumen	5.300.000,00	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	14 Dokumen	5.300.000,00	
5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	32 Dokumen	11.850.000,00	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	32 Dokumen	11.850.000,00	
5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	1.800.000,00	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	1.800.000,00	
5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	300 Orang	215.554.000,00	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	300 Orang	215.554.000,00	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Capaian Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 Persen	430.000.000,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Capaian Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100 Persen	430.000.000,00	
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12000 Dokumen	26.591.500,00	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12000 Dokumen	26.591.500,00	
5	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	4.875.000,00	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	4.875.000,00	
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	60 Dokumen	16.477.425,00	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	60 Dokumen	16.477.425,00	
5	02	02	2.02	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	6.256.175,00	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	6.256.175,00	
5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6 Dokumen	117.831.350,00	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	6 Dokumen	117.831.350,00	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen	10.000.000,00	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen	10.000.000,00	
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	42.224.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	42.224.000,00	
5	02	02	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2 Dokumen	45.500.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2 Dokumen	45.500.000,00	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	24 Dokumen	50.544.000,00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	24 Dokumen	50.544.000,00	
5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	59.700.550,00	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	59.700.550,00	
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	50.000.000,00	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200 Orang	50.000.000,00	
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Capaian Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 Persen	616.000.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Capaian Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 Persen	616.000.000,00	
5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	7.127.500,00	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	7.127.500,00	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	43.066.500,00	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	43.066.500,00	
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	6.822.500,00	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	6.822.500,00	
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan	155.919.800,00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan	155.919.800,00	
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	153.153.200,00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	153.153.200,00	
5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	100.000,00	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	100.000,00	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	4.800.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	4.800.000,00	
5	02	02	2.03	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	432.500,00	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	432.500,00	
5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	45.162.700,00	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	45.162.700,00	
5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	11.831.500,00	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	11.831.500,00	
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Orang	7.128.000,00	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	120 Orang	7.128.000,00	
5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	26 Lembaga	143.595.800,00	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	26 Lembaga	143.595.800,00	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	02	2.03	0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	36.860.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	36.860.000,00	
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Capaian Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 Persen	5.110.773.000,00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Capaian Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 Persen	5.110.773.000,00	
5	02	02	2.04	0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	102.000.000,00	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	102.000.000,00	
5	02	02	2.04	0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	1.500.000,00	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	1.500.000,00	
5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	1.500.000,00	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	1.500.000,00	
5	02	02	2.04	0005	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	1 Laporan	1.500.000,00	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	1 Laporan	1.500.000,00	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	02	2.04	0006	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	1 Laporan	4.273.000,00	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	1 Laporan	4.273.000,00	
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	5.000.000.000,00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	5.000.000.000,00	
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Capaian Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan	100 Persen	661.805.600,00	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Capaian Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan	100 Persen	661.805.600,00	
5	02	02	2.05	0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	6 Dokumen	17.730.000,00	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	6 Dokumen	17.730.000,00	
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	6 Dokumen	502.175.600,00	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	6 Dokumen	502.175.600,00	
5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	250 Orang	141.900.000,00	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	250 Orang	141.900.000,00	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase OPD dengan pengelolaan barang milik daerah dengan kategori baik	100 Persen	3.743.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase OPD dengan pengelolaan barang milik daerah dengan kategori baik	100 Persen	3.743.000.000,00	
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Capaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 Persen	3.743.000.000,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Capaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 Persen	3.743.000.000,00	
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	68.965.000,00	Penyusunan Standar Harga	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	68.965.000,00	
5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	6.000.000,00	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	6.000.000,00	
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	50.476.600,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	50.476.600,00	
5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	24.203.600,00	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	24.203.600,00	
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	7.320.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	7.320.000,00	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	800.000.000,00	Inventarisasi Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	800.000.000,00	
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.375.380.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.375.380.000,00	
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	168.805.400,00	Penilaian Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	168.805.400,00	
5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	3.473.100,00	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	3.473.100,00	
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	776.540.900,00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	776.540.900,00	
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	21.543.000,00	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	21.543.000,00	
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	287.499.700,00	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	287.499.700,00	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	250 Orang	152.792.700,00	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	250 Orang	152.792.700,00	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen	14.366.509.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen	14.366.509.000,00	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	22.582.500,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	22.582.500,00	
5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.012.500,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.012.500,00	
5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	3.255.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	3.255.000,00	
5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.255.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.255.000,00	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	10.786.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	10.786.000,00	
5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.274.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	1.274.000,00	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	11.107.678.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	11.107.678.000,00	
5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	10.342.602.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	10.342.602.000,00	
5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	762.846.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	762.846.000,00	
5	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.230.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	2.230.000,00	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	124.800.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	124.800.000,00	
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	57.600.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	57.600.000,00	
5	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	17.200.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	17.200.000,00	
5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	50.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	50.000.000,00	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	616.684.675,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	616.684.675,00	
5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.216.450,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.216.450,00	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	225.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	225.000.000,00	
5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.921.050,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.921.050,00	
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	80.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	80.000.000,00	
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	87.547.175,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	87.547.175,00	
5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.000.000,00	
5	02 1	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	200.000.000,00	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	269.492.600,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	269.492.600,00	
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	62.921.000,00	Pengadaan Mebel	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	62.921.000,00	
5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	206.571.600,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	206.571.600,00	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	1.673.241.225,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	1.673.241.225,00	
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.000.000,00	
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.061.313.250,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.061.313.250,00	
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	599.927.975,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	599.927.975,00	

Kode					RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1					2	3	3	5	6	7	8	9	10	11	12
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	552.030.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	552.030.000,00	
5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.750.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.750.000,00	
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	68.280.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	68.280.000,00	
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit	145.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit	145.000.000,00	
5	02	01	2.09	0008	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000,00	
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	100.000.000,00	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	- Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	100.000.000,00	
								TOTAL	**29.966.282.000,00**					**29.966.282.000,00**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kota Pontianak. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kota di kecamatan. Pada forum Perangkat Daerah tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak selaku Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM maupun perguruan tinggI

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Secara spesifik penentuan tujuan dan sasaran strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak tidak ada kaitannya dengan kebijakan nasional. Namun dalam menentukan tujuan dan sasaran strategis, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak mengacu pada tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Pontianak. Tujuan Pemerintah Kota Pontianak yang selaras dengan tujuan dan sasaran strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak adalah Meningkatkan Good Governance atau Tata kelola Kepemerintahan dengan Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Sehat Dan Akuntabel. Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Pontianak tersebut sejalan dan selaras dengan konsep tata kelola pemerintahan secara nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Tujuan dan Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel III.1
Tujuan dan Sasaran
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak Tahun 2025

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET TAHUN 2025
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan akuntabel		Opini BPK Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
		Terpenuhinya aspek pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Persentase pemenuhan aspek pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sesuai ketentuan	100

Perumusan tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak telah disinergikan dengan tujuan Kota Pontianak yaitu "**Meningkatkan Good Governance atau Tata kelola Kepemerintahan yang Baik"** dengan sasarannya yaitu "**Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Sehat Dan Akuntabel".**

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah :

1. Keterkaitan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan
2. Keterkaitan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak

b. Uraian Garis Besar Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran strategis pada tahun 2025, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak melaksanakan 1 program rutin/penunjang dan 3 program prioritas dengan jumlah kegiatan sebanyak 13 kegiatan dan 87 sub kegiatan sebagaimana terdapat dalam uraian berikut :

I	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			Indikator Kinerja	:	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran
					:	Persentase penatausahaan keuangan dan manajemen kas dilaksanakan sesuai ketentuan
					:	Persentase OPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu
					:	Persentase akses publik terhadap informasi keuangan daerah
	1	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		Indikator Kinerja	:	Persentase capaian koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah
		1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun
		2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun
		3	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Indikator Kinerja	:	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi

		4	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Indikator Kinerja	:	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi
		5	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Indikator Kinerja	:	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi
		6	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Indikator Kinerja	:	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi
		7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Indikator Kinerja	:	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
		8	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Indikator Kinerja	:	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
		9	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
		10	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
		11	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
		12	Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan

		13	Sub Kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	:	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
	2	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Indikator Kinerja	:	Persentase Capaian Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
		1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
		2	Sub Kegiatan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
		3	Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
		4	Sub Kegiatan Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah
		5	Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
		6	Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

		7	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
		8	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
		9	Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
		10	Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan	Indikator Kinerja	:	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta

			Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
		11	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	:	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
	3	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Indikator Kinerja	:	Persentase Capaian Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
		1	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
		2	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban
		3	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
		4	Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi

		5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	:	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
		6	Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
		7	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
		8	Sub Kegiatan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
		9	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
		10	Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan	Indikator Kinerja	:	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan

			Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
		11	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	:	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
		12	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	:	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina
		13	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota
	4	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Indikator Kinerja	:	Persentase Capaian Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		1	Sub Kegiatan Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah
		2	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah
		3	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
		4	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah

		5	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah
		6	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
	5	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Indikator Kinerja	:	Persentase Capaian Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan
		1	Sub Kegiatan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah
		2	Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
		3	Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	:	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
II	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			Indikator Kinerja	:	Persentase OPD dengan pengelolaan barang milik daerah dengan kategori baik
	1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Indikator Kinerja	:	Persentase Capaian Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
		1	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	Indikator Kinerja	:	Jumlah Standar Harga yang Disusun

		2	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
		3	Sub Kegiatan enyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
		4	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
		5	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah
		6	Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah
		7	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah
		8	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah
		9	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
		10	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
		11	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

		12	Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun
		13	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	:	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Indikator Kinerja	:	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan
	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	:	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
		1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		5	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	:	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan

						Perangkat Daerah
		1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Indikator Kinerja	:	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
		2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	:	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah
		1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Indikator Kinerja	:	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
		2	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Indikator Kinerja	:	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		3	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Indikator Kinerja	:	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
	4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indikator Kinerja	:	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah

		1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Indikator Kinerja	:	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
		2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indikator Kinerja	:	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
		3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Indikator Kinerja	:	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
		4	Sub KegiatanPenyediaan Bahan Logistik Kantor	Indikator Kinerja	:	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
		5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Indikator Kinerja	:	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
		6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Indikator Kinerja	:	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
		7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Indikator Kinerja	:	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
		1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Indikator Kinerja	:	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
		2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator Kinerja	:	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indikator Kinerja	:	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
		1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat

						Menyurat
		2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
		3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Indikator Kinerja	:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indikator Kinerja	:	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah
		1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indikator Kinerja	:	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
		2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Indikator Kinerja	:	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
		3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indikator Kinerja	:	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
		4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Indikator Kinerja	:	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
		5	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Indikator Kinerja	:	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak menetapkan 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 87 (delapan puluh tujuh) sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 35.391.926.897,00 sebagaimana dijabarkan dalam tabel IV.1 di bawah ini :

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PONTIANAK

TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana	Prioritas Daerah	Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14	16	18	19	20
						BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH				29.199.458.330,00	30.101.809.398,00	35.391.926.897,00				31.731.604.000,00	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				29.199.458.330,00	30.101.809.398,00	35.391.926.897,00				31.731.604.000,00	
	5	02				KEUANGAN				29.199.458.330,00	30.101.809.398,00	35.391.926.897,00				31.731.604.000,00	
1	5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 %	95 %	12.340.735.675,00	13.478.977.429,00	13.338.553.380,00				14.678.662.000,00	
	5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan	100 %	100 %	57.582.500,00	112.144.583,00	112.144.583,00		Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	67.582.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

							evaluasi kinerja Perangkat Daerah										
	5	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen Dokumen	4 Dokumen	24.012.500,00	38.131.953,00	16.842.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	4.012.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD											
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	8.255.000,00	8.255.000,00	8.255.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	3.255.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD											

							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	3.255.000,00	3.255.000,00	3.255.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	3.255.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	10.786.000,00	10.237.000,00	10.237.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	10.786.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	11.274.000,00	12.265.630,00	12.265.630,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	1.274.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	2 Dokumen	0,00	25.000.000,00	0,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	25.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
							Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka	-	1 Berita Acara	0,00	15.000.000,00	16.810.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	20.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	8.610.513.000,00	9.486.888.376,00	9.486.888.376,00		Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	10.856.942.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	7.837.437.000,00	8.723.046.376,00	8.723.047.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	10.091.866.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian	12 Dokumen	12 Dokumen	762.846.000,00	753.612.000,00	753.612.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepeme	100%	762.846.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

							/Verifikasi Keuangan SKPD							rintahan yang Baik			
	5	02	01	2.02	000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	10.230.000,00	10.230.000,00	2.436.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	2.230.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	124.800.000,00	503.273.000,00	503.273.000,00		Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	319.800.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	000 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											

							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	57.600.000,00	141.080.000,00	141.080.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	57.600.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi											
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	53 Orang	0,00	195.000.000,00	195.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	195.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	60 Orang	17.200.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	17.200.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											

							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	4 Orang	50.000.000,00	149.993.000,00	35.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	50.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	787.493.350,00	857.939.920,00	857.939.920,00		Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	595.684.675,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.216.450,00	12.216.450,00	12.216.450,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	12.216.450,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											

							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	225.000.000,00	225.000.000,00	150.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	194.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga											
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1.921.050,00	39.235.900,00	39.235.900,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	1.921.050,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	150.808.675,00	65.750.570,00	65.750.570,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	90.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand	1 Paket	1 Paket	87.547.175,00	200.737.000,00	200.737.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan	100%	87.547.175,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

							aan yang Disediakan							yang Baik			
	5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	10.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	200.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang	100 %	100 %	417.075.600,00	382.488.300,00	382.488.300,00		Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang	100%	732.381.600,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

							Urusan Pemerintah Daerah							Baik			
	5	02	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	2 Unit	0,00	0,00	442.889.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	442.889.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel											
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	82.921.000,00	74.169.000,00	74.169.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	82.921.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	334.154.600,00	308.319.300,00	308.319.300,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	206.571.600,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	1.741.241.225,00	1.611.593.250,00	1.611.593.250,00		Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	1.694.241.225,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	12.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.081.313.250,00	1.081.313.250,00	997.213.576,60	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	1.081.313.250,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	647.927.975,00	518.280.000,00	476.811.200,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	600.927.975,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	602.030.000,00	524.650.000,00	524.650.000,00		Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	412.030.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	38.750.000,00	38.750.000,00	38.750.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	38.750.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	68.280.000,00	68.280.000,00	68.280.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	68.280.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit	130 Unit	195.000.000,00	189.240.000,00	173.761.753,40	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	155.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud											
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	28.380.000,00	28.380.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	50.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-	-	13.709.743.655,00	13.039.376.469,00	18.609.071.484,00			100%	13.829.942.000,00	
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-	-	5.305.105.000,00	5.342.510.500,00	5.342.510.500,00		Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	5.517.311.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS											
							Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	1.122.618.000,00	509.686.500,00	505.111.500,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	1.167.522.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS											

							Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	1.103.731.000,00	507.313.500,00	502.722.500,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	1.147.880.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD											
							Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	32 Dokumen	32 Dokumen	585.462.000,00	585.462.000,00	554.962.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	608.880.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD											
							Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	32 Dokumen	32 Dokumen	69.720.000,00	69.720.000,00	69.720.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	72.508.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD											
							Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	32 Dokumen	32 Dokumen	163.311.000,00	163.311.000,00	163.311.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	169.843.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD											
							Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	93 Dokumen	93 Dokumen	318.597.000,00	318.597.000,00	318.597.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	331.340.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD											
							Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	651.701.000,00	651.701.000,00	651.701.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	677.769.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD											
							Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	4 Dokumen	4 Dokumen	822.815.000,00	822.815.000,00	819.215.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	855.727.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

							Perubahan APBD										
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran											
							Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	205.916.000,00	14.910.500,00	14.910.500,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	214.152.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	14 Dokumen	14 Dokumen	5.565.000,00	286.955.000,00	286.955.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	5.787.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah											

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	32 Dokumen	32 Dokumen	12.442.000,00	1.166.577.000,00	1.179.577.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	12.939.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen	2 Dokumen	1.890.000,00	4.125.000,00	4.125.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	1.965.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	300 Orang	300 Orang	241.337.000,00	241.337.000,00	241.337.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	250.999.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase capaian koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	100 %	100 %	586.856.625,00	1.959.358.300,00	1.959.358.300,00		Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	471.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	13000 Dokumen	13000 Dokumen	37.000.850,00	37.000.500,00	37.000.500,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	29.120.884,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya											
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	1 Laporan	48.200.000,00	30.000.000,00	20.850.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	5.338.710,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD											

							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	60 Dokumen	60 Dokumen	19.472.085,00	38.943.600,00	38.943.600,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	10.890.968,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	22.945.749,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	6.851.262,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan	6 Dokumen	6 Dokumen	133.076.412,00	394.526.000,00	394.526.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	129.039.465,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

							Dana Transfer Lainnya										
	5	02	02	2.02	000 6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank											
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi , Pelaksana an Kerja Sama dan Pemantau an Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen	2 Dokume n	13.172.003,00	235.750.000,00	188.170.000,00	Pendap atan Transfer Antar Daerah	Mening katnya Tata Kelola Kepeme rintahan yang Baik	100%	10.951.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)											

							Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas,	12 Laporan	12 Laporan	53.461.872,00	290.656.000,00	290.656.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	46.240.349,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

							dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)											
	5	02	02	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas												

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	2 Dokumen	2 Dokumen	56.911.500,00	417.950.000,00	420.050.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	49.827.960,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait											
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan	24 Dokumen	24 Dokumen	62.222.832,00	62.222.500,00	62.222.500,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	55.351.745,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

							Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait										
	5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan											
							Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	71.864.679,00	327.600.000,00	327.600.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	65.379.266,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota											

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	220 Orang	220 Orang	68.528.643,00	118.109.700,00	66.584.700,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	62.008.191,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	-	665.092.700,00	1.182.005.600,00	1.182.005.600,00		Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	2.008.169.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	12 Laporan	9.634.500,00	2.253.500,00	2.253.500,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	11.661.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban											

							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	12 Dokumen	12 Dokumen	62.018.200,00	62.018.000,00	62.018.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	47.600.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran											
							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	12 Laporan	12 Laporan	9.329.500,00	3.684.000,00	3.684.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	11.356.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah											

							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	12 Laporan	12 Laporan	158.426.800,00	295.756.900,00	314.276.900,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	160.453.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota												
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaba	4 Dokumen	4 Dokumen	155.717.200,00	513.967.700,00	566.870.200,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	157.745.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

							n Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota										
	5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD											
							Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.607.000,00	0,00	0,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	4.634.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah											

							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	7.307.000,00	4.745.000,00	3.115.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	9.334.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD											
							Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.939.500,00	2.072.000,00	852.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	4.966.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah											

							Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	47.669.700,00	14.793.200,00	195.548.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	49.696.700,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah											
							Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	14.338.500,00	14.480.000,00	14.480.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	16.365.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaba	120 Orang	120 Orang	9.635.000,00	119.797.500,00	70.068.500,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	11.662.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

							n Pemerintah Kabupaten/Kota										
	5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota											
							Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	26 Lembaga	26 Lembaga	146.102.800,00	146.102.800,00	34.130.200,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	1.481.298.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.03	0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah											
							Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	39.367.000,00	2.335.000,00	100.300.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	41.394.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase capaian penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	100 persen	100 persen	6.457.794.330,00	3.911.420.569,00	3.911.420.569,00		Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	5.110.773.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	0 Laporan	102.000.000,00	205.075.000,00	0,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	102.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	0 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	1.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah											

							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	0 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	1.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0005	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	1 Laporan	0 Laporan	1.500.000,00	0,00	0,00	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	1.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0006	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah											

							Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	1 Laporan	0 Laporan	4.273.000,00	4.350.000,00	0,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	4.273.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak											
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	12 Laporan	6.347.021.330,00	3.701.995.569,00	9.845.287.884,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Penerimaan Pinjaman Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) Dana	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	5.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

													Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah				
	5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase capaian Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100 persen	100 persen	694.895.000,00	644.081.500,00	644.081.500,00		Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	722.689.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05	0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah											

							Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	18.616.000,00	18.616.000,00	9.771.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	19.360.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	527.284.000,00	56.658.500,00	56.658.500,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	548.375.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang	250 Orang	250 Orang	148.995.000,00	568.807.000,00	164.310.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	154.954.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

							Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota										
3	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD dengan pengelolaan barang milik daerah dengan kategori baik	100 persen	100 persen	3.148.979.000,00	3.583.455.500,00	3.444.302.033,00			100%	3.223.000.000,00	
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	3.148.979.000,00	3.583.455.500,00	3.583.455.500,00		Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	3.223.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga											
							Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	72.413.000,00	72.413.000,00	69.668.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	75.309.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah											
							Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	6.300.000,00	6.300.000,00	2.752.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	6.552.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah											
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	53.000.000,00	53.000.000,00	9.982.650,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	55.120.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah											
							Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	25.413.000,00	25.413.000,00	10.773.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	26.429.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah											

							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	7.686.000,00	7.686.000,00	7.686.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	7.993.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1.502.983.000,00	1.441.102.200,00	1.429.502.200,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	1.511.102.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah											
							Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	177.245.000,00	333.948.000,00	333.948.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	184.334.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah											

							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	3.646.000,00	3.646.000,00	1.846.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	3.791.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah											
							Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	815.367.000,00	1.155.021.300,00	1.132.354.183,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	847.981.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah											

							Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	22.620.000,00	22.620.000,00	22.620.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	23.524.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah											
							Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	301.874.000,00	301.874.000,00	284.983.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	313.948.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota											
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	250 Orang	250 Orang	160.432.000,00	160.432.000,00	138.187.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	100%	166.917.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

	J U M L A H	**29.199.458.330,00**	**30.101.809.398,00**	**35.391.926.897,00**			**31.731.604.000,00**	

PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunianya, kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan mempertimbangkan dinamika yang sedang terjadi dan berdasarkan hasil evaluasi rencana kerja pada triwulan I tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 ini merupakan dokumen resmi dan menjadi acuan penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025.

Perubahan Rencana kerja yang telah disusun ini belum berarti sempurna tanpa implementasi dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi yang kuat dari seluruh jajaran Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Oleh karena itu sangat diharapkan masukan maupun saran yang sifatnya konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja yang akan datang.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Kerja ini dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja

Pontianak, Juni 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Pontianak,

Ruli Sudira, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19690522 199503 1 004

DAFTAR ISI

			Hal
KATA PENGANTAR			**i**
DAFTAR ISI			**ii**
BAB I	**:**	**PENDAHULUAN**	**I-1**
	1.1.	Latar belakang	I-1
	1.2.	Landasan Hukum	I-1
	1.3.	Maksud dan Tujuan	I-4
	1.4.	Sistematika Penulisan	I-5
BAB II	**:**	**EVALUASI RENCANA KERJA S/D TRIWULAN I TAHUN 2025**	**II-1**
	.		
BAB III	**:**	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**	**III-1**
	3.1.	Rencana Pendapatan Daerah	III-1
	3.2	Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024	III-6
BAB IV	**:**	**PENUTUP**	**IV-1**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026. Sejalan dengan penganggaran yang berbasis kinerja, maka semua kegiatan yang direncanakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, jelas dan terukur.

Perubahan Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, sehingga Rencana Kerja dapat menggambarkan rencana capaian kinerja tahunan, yang memetakan sasaran, indikator dan targetnya. Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak mempunyai 1 (satu) program prioritas dan 1 (satu) program rutin/wajib penunjang yang kemudian akan dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tanggung jawab sekretariat dan bidang-bidang teknis.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
17. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).

19. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 42)
21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 47).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 62 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 62)
23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 13).
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Badan PendapatanDaerah Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan indikator dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD Tahun Anggaran 2024 dengan dokumen renja PD Tahun 2024 serta renstra PD dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang dalam kurun waktu Januari-Juni 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan dari renstra perangkat daerah periode 2024-2026. Adapun evaluasi pelaksaaan rencana kerja pada tahun 2024 dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel II.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak s/d Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5					Urusan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
5	2				Bidang Urusan Keuangan									
5	02	04			I Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1 Persentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah	100 Persen	0	100	89,28	89,28	100	100	94,24
5	02	04	2.01		1 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1 persentase capaian kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	100 Persen	0	100	90,13	90,13	100	100	100

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	02	04	2.01	0001	1 Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	1 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	12 Dokumen	0	2	2	100,00	4	6	50,00
5	02	04	2.01	0002	2 Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1 Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	24 Dokumen	0	10	7	70,00	8	15	62,50
5	02	04	2.01	0003	3 Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	36 Laporan	0	18	22	122,22	12	34	94,44

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	02	04	2.01	0004	4 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	22 Unit	0	20	23	115,00	20	43	195,45
5	02	04	2.01	0005	5 Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1 Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	36 Laporan	0	480	701	146,04	12	713	1980,56
5	02	04	2.01	0006	6 Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	36 Laporan	0	12	12	100,00	12	24	66,67
5	02	04	2.01	0008	7 Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	1 Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	705.000 Dokumen	0	235.000	236.398	100,59	235.000	471.398	66,86

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	02	04	2.01	0009	8 Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1 Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2.400 Layanan	0	800	999	124,88	800	1.799	74,96
5	02	04	2.01	0011	9 Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	1 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	529.146 Dokumen	0	167.850	167.520	99,80	167850	335.370	63,38
5	02	04	2.01	0012	10 Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	7.200 Dokumen	0	400	207	51,75	2400	2607	36,21
5	02	04	2.01	0013	11 Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	204 Dokumen	0	400	483	120,75	68	551	270,01

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	02	04	2.01	0014	12 Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	54 Laporan	0	48	48	100,00	18	66	122,22
5	02	04	2.01	0015	13 Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12 Laporan	0	4	2	50,00	4	6	50,00
5	2	1			II Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 Persen	0	95	90	94,74	95	95	100,00
5	2	1	2.01		1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	0	100,00	100,00	100,00	100	100	100,00
5	2	1	2.01	1	a Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	0	2	2	100,00	3	5	83,33

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	2	1	2.01	2	b Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	0	2	2	100,00	2	4	66,67
5	2	1	2.01	3	c Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	1 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dokumen	0	2	2	100,00	2	4	66,67
5	2	1	2.01	6	d Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	0	5	5	100,00	5	10	66,67

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	2	1	2.01	7	e Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	0	2	2	100	2	4	66,67
5	2	1	2.02		2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	0	100	100	100	100	100	100
5	2	1	2.02	1	a Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang	0	39	39	100	44	44	89,80
5	2	1	2.02	3	b Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi-kasi Keuangan SKPD	1 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	0	12	12	100	12	24	66,67

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	2	1	2.02	7	c Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	36 Laporan	0	12	12	100	12	24	66,67
5	2	1	2.05		3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	0	100	91,67	91,67	100	100	100
5	2	1	2.05	2	a Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	0	3	3	100	1	4	133,33

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	2	1	2.05	10	b Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	49 Orang	0	39	39	100	44	44	79,59
5	2	1	2.05	11	c Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	0	4	3	75	10	13	130.00
5	2	1	2.06		4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	0	100	96.83	96,83	100	100	100,00
5	2	1	2.06	1	a Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene-rangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	0	1	1	100	1	3	66,67

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	2	1	2.06	2	b Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	0	6	5	43,3	1	6	200,00
5	2	1	2.06	3	c Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	0	3	3	100	1	4	133,33
5	2	1	2.06	4	d Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	0	3	3	100	3	6	100,00
5	2	1	2.06	5	e Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	0	1	1	100	1	2	66,67

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	2	1	2.06	6	f Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	0	12	12	100	12	24	66,67
5	2	1	2.06	9	g Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Jumlah Laporan Penyelengga-raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	0	36	34	94,44	12	36	66,67
5	2	1	2.07		5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	0	100	50,13	50,13	100	100	`100,00
5	2	1	2.07	5	a Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	1 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	0	11	4	36,36	20	24	200,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	2	1	2.07	6	b Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	0	36	23	63,89	12	25	50,00
5	2	1	2.07	8	b Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	1 Jumlah Unit aset tak berwujud yang disediakan	1 Unit	0	0	0	0	0	0	100,00
5	2	1	2.08		6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	0	100	100	100	100	100	100,00
5	2	1	2.08	1	a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	0	12	12	100,00	12	24	33,33

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	2	1	2.08	2	b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	0	12	12	100,00	12	24	33,33
5	2	1	2.08	4	d Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	0	12	12	100,00	12	24	33,33
5	2	1	2.09		7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	0	100	86,24	86,24	100	100	100,00
5	2	1	2.09	1	a Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	0	0	0	0	1	1	0

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	2	1	2.09	2	b Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	0	6	5	83,3	5	5	100,00
5	2	1	2.09	6	c Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit	0	130	98	75,38	130	130	100,00
5	2	1	2.09	8	d Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	1 Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	0	0	0	0	0	0	0
5	2	1	2.09	9	e Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0	1	1	100,00	1	1	100,00

Data di atas menunjukkan bahwa capaian sub kegiatan pada tahun 2025 masih sangat rendah. Hal ini disebabkan masih dilakukan proses pengadaan barang dan jasa dan adanya sub kegiatan yang baru akan dilaksanakan pada triwulan 2 (dua).

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melakukan pemungutan pendapatan asli daerah berupa pajak daerah dan denda pajak daerah. Pada Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 pendapatan asli daerah yang ditargetkan adalah sebesar Rp. 532.087.662.000,00 dengan rincian pajak daerah sebesar Rp. 530.087.662.000,00 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah berupa denda pajak daerah sebesar Rp. 2.000.000.000,00.

Jumlah pajak daerah yang dipungut sebanyak 7 (tujuh) jenis pajak dengan target penerimaan sebagai berikut :

1. Pajak Reklame sebesar Rp. 18.360.000.000,00
2. Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp. 50.000.000,00
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp. 38.000.000.000,00
4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp. 111.000.000.000,00
5. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp. 258.177.662.000,00
6. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp. 68.500.000.000,00
7. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp. 36.000.000.000,00

Adapun rincian target penerimaan pendapatan asli daerah sebelum dan setelah perubahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan Daerah

Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026

Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang	
				Rp	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**585.929.435.000**	**532.087.662.000**	**53.841.773.000**	**-9,19%**
4.1.01	**Pajak Daerah**	**583.929.435.000**	**530.087.662.000**	**53.841.773.000**	**-9,22%**
4.1.01.09	**Pajak Reklame**	**18.360.000.000**	**18.360.000.000**	**-**	**0,00%**
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	15.120.000.000	15.120.000.000	-	0,00%
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	15.120.000.000	15.120.000.000	-	0,00%
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	2.926.800.000	2.926.800.000	-	0,00%
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	2.926.800.000	2.926.800.000	-	0,00%
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	-	-	-	0,00%
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	-	-	-	0,00%
4.1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran	-	-	-	0,00%
4.1.01.09.04.0001	Pajak Reklame Selebaran	-	-	-	0,00%
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	189.000.000	189.000.000	-	0,00%
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	189.000.000	189.000.000	-	0,00%
4.1.01.09.06	Pajak Reklame Udara	-	-	-	0,00%
4.1.01.09.06.0001	Pajak Reklame Udara	-	-	-	0,00%
4.1.01.09.07	Pajak Reklame Apung	-	-	-	0,00%
4.1.01.09.07.0001	Pajak Reklame Apung	-	-	-	0,00%
4.1.01.09.08	Pajak Reklame Suara	-	-	-	0,00%
4.1.01.09.08.0001	Pajak Reklame Suara	-	-	-	0,00%
4.1.01.09.09	Pajak Reklame Film/Slide	16.200.000	16.200.000	-	0,00%
4.1.01.09.09.0001	Pajak Reklame Film/Slide	16.200.000	16.200.000	-	0,00%
4.1.01.09.10	Pajak Reklame Peragaan	108.000.000	108.000.000	-	0,00%
4.1.01.09.10.0001	Pajak Reklame Peragaan	108.000.000	108.000.000	-	0,00%
4.1.01.13	**Pajak Sarang Burung Walet**	**50.000.000**	**50.000.000**	**-**	**0,00%**
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000	50.000.000	-	0,00%
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000	50.000.000	-	0,00%
4.1.01.15	**Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)**	**47.000.000.000**	**38.000.000.000**	**- 9.000.000.000**	**-19,15%**
4.1.01.15.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	47.000.000.000	38.000.000.000	- 9.000.000.000	-19,15%
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	47.000.000.000	38.000.000.000	- 9.000.000.000	-19,15%

Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang	
				Rp	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
4.1.01.16	**Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**	**118.170.000.000**	**111.000.000.000**	**- 7.170.000.000**	**-6,07%**
4.1.01.16.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	118.170.000.000	111.000.000.000	- 7.170.000.000	-6,07%
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	115.140.000.000	107.970.000.000	- 7.170.000.000	-6,23%
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	3.030.000.000	3.030.000.000	-	0,00%
4.1.01.19	**Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)**	**259.677.662.000**	**258.177.662.000**	**- 1.500.000.000**	**-0,58%**
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	103.577.662.000	103.577.662.000	-	0,00%
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	100.000.000.000	100.000.000.000	-	0,00%
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.577.662.000	3.577.662.000	-	0,00%
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	95.000.000.000	95.000.000.000	-	0,00%
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	94.990.000.000	94.990.000.000	-	0,00%
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	10.000.000	10.000.000	-	0,00%
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	33.000.000.000	33.000.000.000	-	0,00%
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	31.300.000.000	31.300.000.000	-	0,00%
4.1.01.19.03.0009	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	830.000.000	830.000.000	-	0,00%
4.1.01.19.03.0010	PBJT-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel	870.000.000	870.000.000	-	0,00%
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	6.500.000.000	5.600.000.000	- 900.000.000	-13,85%
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	6.500.000.000	5.600.000.000	- 900.000.000	-13,85%
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	21.600.000.000	21.000.000.000	- 600.000.000	-2,78%
4.1.01.19.05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	4.300.000.000	4.300.000.000	-	0,00%
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	150.000.000	150.000.000	-	0,00%
4.1.01.19.05.0005	PBJT-Pameran	5.000.000	5.000.000	-	0,00%
4.1.01.19.05.0006	PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap	25.000.000	25.000.000	-	0,00%
4.1.01.19.05.0007	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	2.000.000	2.000.000	-	0,00%

Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang	
				Rp	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan	3.500.000.000	3.500.000.000	-	0,00%
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	1.600.000.000	1.600.000.000	-	0,00%
4.1.01.19.05.0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju,Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	18.000.000	18.000.000	-	0,00%
4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	2.000.000.000	1.400.000.000	- 600.000.000	-30,00%
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	10.000.000.000	10.000.000.000	-	0,00%
4.1.01.20	**Opsen PKB**	**84.093.915.000**	**68.500.000.000**	**- 15.593.915.000**	**-18,54%**
4.1.01.20.01	Opsen PKB	84.093.915.000	68.500.000.000	- 15.593.915.000	-18,54%
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	84.093.915.000	68.500.000.000	- 15.593.915.000	-18,54%
4.1.01.21	**Opsen BBNKB**	**56.577.858.000**	**36.000.000.000**	**- 20.577.858.000**	**-36,37%**
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	56.577.858.000	36.000.000.000	- 20.577.858.000	-36,37%
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	56.577.858.000	36.000.000.000	- 20.577.858.000	-36,37%
04:01:04	**Lain-lain PAD yang Sah**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	**-**	**0,00%**
4.1.04.12	**Denda Pajak**	**2.000.000.000**	**2.000.000.000**	**-**	**0,00%**
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	250.000.000	250.000.000	-	0,00%
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	248.000.000	248.000.000	-	0,00%
4.1.04.12.09.0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	300.000	300.000	-	0,00%
4.1.04.12.09.0005	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan	1.300.000	1.300.000	-	0,00%
4.1.04.12.09.0009	Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/Slide	300.000	300.000	-	0,00%
4.1.04.12.09.0010	Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan	100.000	100.000	-	0,00%
4.1.04.12.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	500.000	500.000	-	0,00%
4.1.04.12.13.0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	500.000	500.000	-	0,00%

Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang	
				Rp	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	958.000.000	958.000.000	-	0,00%
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	958.000.000	958.000.000	-	0,00%
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda BPHTB	-	-	-	0,00%
4.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	-	-	-	0,00%
4.1.04.12.16.0002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru	-	-	-	0,00%
4.1.04.12.19	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	791.500.000	675.500.000	- 116.000.000	-14,66%
4.1.04.12.19.0001	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	561.000.000	445.000.000	- 116.000.000	-20,68%
4.1.04.12.19.0002	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering	9.000.000	9.000.000	-	0,00%
4.1.04.12.19.0004	Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	1.500.000	1.500.000	-	0,00%
4.1.04.12.19.0005	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	60.000.000	60.000.000	-	0,00%
4.1.04.12.19.0013	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	10.000.000	10.000.000	-	0,00%
4.1.04.12.19.0014	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel	-	-	-	0,00%
4.1.04.12.19.0015	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Glamping	-	-	-	0,00%
4.1.04.12.19.0016	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	100.000.000	100.000.000	-	0,00%
4.1.04.12.19.0019	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atauBusana	2.000.000	2.000.000	-	0,00%
4.1.04.12.19.0025	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan	5.000.000	5.000.000	-	0,00%

Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang	
				Rp	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
4.1.04.12.19.0026	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	20.000.000	20.000.000	-	0,00%
4.1.04.12.19.0028	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	10.000.000	10.000.000	-	0,00%
4.1.04.12.19.0029	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	13.000.000	13.000.000	-	0,00%
4.1.04.12.20	Pendapatan Denda Opsen PKB	-	100.000.000	100.000.000	0,00%
4.1.04.12.20.0001	Pendapatan Denda Opsen PKB	-	100.000.000	100.000.000	0,00%
4.1.04.12.21	Pendapatan Denda Opsen BBNKB	-	16.000.000	16.000.000	0,00%
4.1.04.12.21.0001	Pendapatan Denda Opsen BBNKB	-	16.000.000	16.000.000	0,00%

3.2 Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

Dalam Perubahan Rencana Kerja tahun 2025, Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak menetapkan 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 28.528.030.959,00. Jumlah pagu indikatif pada Perubahan Renja Tahun 2025 meningkat sebesar Rp 96.675.615,00 dari Renja Sebelum Perubahan sebesar Rp 28.431.355.344,00. Jumlah program dan kegiatan tidak mengalami perubahan sementara jumlah sub kegiatan dari semula 41 (empat puluh satu) sub kegiatan menjadi 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan.

Adapun 2 (dua) sub kegiatan yang ditiadakan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan sub kegiatan pemeliharaan aset tak berwujud. Hal ini disebabkan pengadaan kendaraan dinas untuk esselon 2 (dua) yang semula direncanakan pada tahun 2025 baru dilaksanakan pada tahun 2026 dan tidak dilaksanakannya pengadaan aset tak berwujud berupa website. Sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan tidak mengalami

perubahan dan mengacu pada RKPD 2024-2026. Target kinerja program dan kegiatan tidak mengalami perubahan sedangkan target sub kegiatan disesuaikan dengan hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan triwulan I (satu) tahun 2025.

Adapun Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025

NO	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		BADAN PENDAPATAN DAERAH							**28.431.355.344,00**	**29.604.245.080,00**	**28.528.030.959,00**							**23.644.160.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**28.431.355.344,00**	**29.604.245.080,00**	**28.528.030.959,00**							**23.644.160.000,00**	
	5.02	**KEUANGAN**							**28.431.355.344,00**	**29.604.245.080,00**	**28.528.030.959,00**							**23.644.160.000,00**	
1	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan**				**95 %**	**95 %**	**22.362.095.844,00**	**22.558.049.380,00**	**22.253.872.859,00**							**19.267.812.500,00**	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah				100 %	100 %	37.582.500,00	36.653.800,00	10.564.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN di lingkungan Bapenda Kota Pontianak		22.586.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	19.012.500,00	23.887.000,00	7.957.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			4.016.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	3.255.000,00	1.844.800,00	1.344.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			3.255.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	

NO	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	1 Dokumen	3.255.000,00	544.800,00	544.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			3.255.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	10.786.000,00	9.932.400,00	272.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			10.786.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	1.274.000,00	444.800,00	444.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			1.274.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	20.007.735.344,00	20.041.805.280,00	20.041.465.344,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN di lingkungan Bapenda Kota Pontianak		17.471.678.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				44 Orang/bulan	46 Orang/bulan	19.652.255.344,00	19.848.314.280,00	19.848.314.344,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			17.062.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	352.080.000,00	192.960.000,00	192.620.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			407.478.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.400.000,00	531.000,00	531.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			1.400.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah				100 %	100 %	114.922.000,00	150.080.000,00	102.514.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN di lingkungan Bapenda Kota Pontianak		98.691.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	3 Paket	64.580.000,00	81.180.000,00	69.660.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			52.800.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	

NO	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				44 Orang	46 Orang	21.335.000,00	25.950.000,00	7.200.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			15.360.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	2 Orang	29.007.000,00	42.950.000,00	25.654.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			30.531.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	612.365.150,00	651.640.700,00	554.792.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN di lingkungan Bapenda Kota Pontianak		510.518.925,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.539.450,00	12.097.500,00	12.097.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			12.216.450,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	

NO	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4 Paket	288.564.100,00	300.800.100,00	296.448.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			225.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	43.290.100,00	45.554.600,00	44.090.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			1.921.050,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	58.295.000,00	31.445.000,00	30.990.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			41.806.250,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	68.648.500,00	57.982.500,00	55.962.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			87.547.175,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	

NO	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	10.020.000,00	7.220.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			10.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	9 Laporan	132.028.000,00	193.741.000,00	107.984.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			132.028.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	237.383.200,00	397.423.800,00	490.021.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN di lingkungan Bapenda Kota Pontianak		265.340.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	3 Unit	53.950.200,00	29.058.700,00	15.220.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			13.712.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

NO	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				12 Unit	59 Unit	183.433.000,00	368.365.100,00	474.801.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			251.628.300,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	864.750.250,00	873.125.800,00	713.804.715,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN di lingkungan Bapenda Kota Pontianak		477.739.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	10.380.000,00	10.380.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan			12.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	369.750.250,00	319.939.848,00	305.990.747,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			95.600.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	485.000.000,00	542.805.952,00	397.433.968,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			370.139.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	487.357.400,00	407.320.000,00	340.710.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	ASN di lingkungan Bapenda Kota Pontianak		421.258.175,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	0 Unit	38.750.000,00	38.780.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			31.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	136.560.000,00	191.360.000,00	187.550.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			136.560.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				130 Unit	141 Unit	160.287.400,00	158.600.000,00	136.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			123.698.175,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																	

NO	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	0 Unit	33.380.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			100.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	118.380.000,00	18.580.000,00	16.560.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			30.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah**				**100 %**	**100 %**	**6.069.259.500,00**	**7.046.195.700,00**	**6.274.158.100,00**							**4.376.347.500,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian kegiatan pengelolaan pendapatan daerah				100 %	100 %	6.069.259.500,00	7.046.195.700,00	6.274.158.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan	Wajib Pajak		4.376.347.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.000.000,00	109.000.000,00	5.495.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			9.922.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																	

NO	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	255.710.000,00	255.510.000,00	239.960.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			387.209.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	18 Laporan	434.319.800,00	940.900.000,00	883.466.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			51.518.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				16 Unit	25 Unit	983.562.000,00	997.311.000,00	818.171.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			945.422.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	420 Laporan	471.802.500,00	617.830.200,00	499.594.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			299.725.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																	

NO	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				1 Laporan	3 Laporan	711.860.000,00	711.860.000,00	610.180.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			619.450.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				235000 Dokumen	236000 Dokumen	160.585.000,00	338.443.000,00	446.366.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			177.044.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																	
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				800 Layanan	1000 Layanan	450.590.900,00	459.099.900,00	406.309.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			324.400.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				176242 Dokumen	167520 Dokumen	1.265.980.000,00	1.258.277.500,00	1.473.163.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			844.758.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																	

NO	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				400 Dokumen	200 Dokumen	23.460.000,00	23.460.000,00	23.460.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			25.864.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				416 Dokumen	378 Dokumen	267.845.000,00	373.195.000,00	210.250.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			151.449.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				18 Laporan	48 Laporan	268.834.300,00	195.599.100,00	235.462.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			412.016.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah																	
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				3 Laporan	1 Laporan	765.710.000,00	765.710.000,00	422.280.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan Terciptanya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing disertai Penghidupan yang Layak dan Pemerataan Kesejahteraan			127.570.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	J U M L A H								**28.431.355.344,00**	**29.604.245.080,00**	**28.528.030.959,00**							**23.644.160.000,00**	

Adapun perubahan terhadap target kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Target Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD mengalami perubahan dari 2 (dua) dokumen menjadi 1 (satu) dokumen berdasarkan hasil evaluasi terhadap jumlah output yang dapat dihasilkan.
2. Target Kinerja Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD mengalami perubahan dari 2 (dua) dokumen menjadi 1 (satu) dokumen berdasarkan hasil evaluasi terhadap jumlah output yang dapat dihasilkan.
3. Target Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan mengalami perubahan dari 44 orang/bulan menjadi 46 orang/bulan disebaban adanya penambahan ASN existing.
4. Target Kinerja Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya mengalami perubahan dari 1 (satu) paket menjadi 3 (tiga) paket dikarenakan penyesuaian dengan jumlah jenis pakaian yang disediakan.
5. Target Kinerja Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan mengalami perubahan dari 44 orang/bulan menjadi 46 orang/bulan disebabkan penambaan ASN existing.
6. Target Kinerja Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan mengalami perubahan dari 10 (sepuluh) orang menjadi 2 (dua) orang berdasarkan diklat yang dapat diikuti.
7. Target Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mengalami perubahan dari 1 (satu) paket menjadi 4 (empat) paket disebabkan adanya permintaan/kebutuhan.
8. Target Kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga mengalami perubahan dari 1 (satu) paket menjadi 3 (tiga) paket disebabkan adanya permintaan/kebutuhan.
9. Target Kinerja Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mengalami perubahan dari 12 (dua belas) laporan menjadi 9 (sembillan) laporan disebabkan refocusing biaya perjalanan dinas.
10. Target kinerja sub kegiatan pengadaan mebel mengalami perubahan dari 4 (empat) unit menjadi 3 (tiga) unit berdasarkan evaluasi/penyesuaian atas kebutuhan mebel.
11. Target kinerja sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin mengalami perubahan dari 12 (dua belas) unit menjadi 59 (lima puluh sembilan) unit disebabkan adanya permintaan peralatan dan mesin yang baru.

12. Target kinerja sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya mengalam perubahan dari 130 (seratus tiga puluh) unit menjadi 141 (seratus empat puluh satu unit) berdasarkan jumlah barang yang dapat dipelihara.
13. Target kinerja sub kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah mengalami perubahan dari 12 (dua belas) laporan menjadi 18 (delapan belas) laporan disebabkan adanya evaluasi terhadap output yang dapat dihasilkan.
14. Target kinerja sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah mengalami perubahan dari 16 (enam belas) unit menjadi 25 (dua puluh lima) unit disebabkan adanya penyesuaian terhadap jumlah output yang dapat dihasilkan.
15. Target kinerja sub kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah mengalami perubahan dari 12 (dua belas) laporan menjadi 420 laporan disebabkan jumlah output berupa laporan dihitung berdasarkan jumlah objek pajak yang dilakukan pendataan.
16. Target kinerja sub kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah mengalami perubahan dari 3 (tiga) dokumen menjadi 1 (satu) dokumen berdasarkan evaluasi terhadap jumlah output yang dapat dihasilkan.
17. Target kinerja sub kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah mengalami perubahan dari 235.000 menjadi 236.000 berdasarkan evaluasi terhadap jumlah output yang dapat dihasilkan.
18. Target kinerja sub kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah mengalami perubahan dari 800 layanan menjadi 1000 layanan disebabkan adanya upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
19. Target kinerja sub kegiatan penagihan pajak daerah mengalami perubahan dari 176.242 dokumen menjadi 167.520 dokumen disebabkan hasil evaluasi kinerja triwulan 1 (satu) terhadap output yang dapat dihasilkan.
20. Target kinerja sub kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah mengalami perubahan dari 400 dokumen menjadi 200 dokumen disebabkan penyesuaian evaluasi kinerja triwulan 1 terhadap permohonan yang masuk.
21. Target kinerja sub kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah mengalami perubahan dari 416 dokumen menjadi 378 dokumen disebabkan evaluasi terhadap capaian kinerja yang dapat dihasilkan dan aktivitas pemeriksaan yang dialihkan kepada aktivitas pengawasan.

22. Target kinerja sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah mengalami perubahan dari 3 (tiga) laporan menjadi 1 (satu) laporan disebabkan penghapusan high level metting dan colocation server.

Dalam rangka pencapaian target kinerja, dilaksanakan rencana aksi yang merupakan rangkaian aktivitas dalam masing masing Sub Kegiatan. Capaian Kinerja Sub Kegiatan menunjang capaian kinerja Kegiatan sementara capaian kinerja Kegiatan menunjang capaian kinerja Program. Adapun rencana aksi masing – masing sub kegiatan disajikan sebagai berikut :

Tabel III.3

Rencana Aksi Sub Kegiatan Tahun 2025

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	RENCANA AKSI
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	95 %	
	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	
		1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Penyusunan Renstra 2025-2029, Penyusunan Renja 2026, Perubahan Renja 2025
		2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Penyusunan Dokumen RKA 2026

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	RENCANA AKSI
		3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA 2025
		4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Penyusunan Lakip dan Evaluasi Renja Per triwulan
		5	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Penyusunan Dokumen SPIP, LKPJ
	2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	
		1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Verifikasi SPJ, dan Pembayaran honor Pengelola Keuangan 12 bulan
		3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	Penyusunan Laporan keuangan

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	RENCANA AKSI
	3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	
		1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan nya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	Pengadaan pakaian dinas harian, lapangan dan
		2	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	46 Orang	Sosialisasi peraturan perundang-undangan
		3	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang	Fasilitasi Bimtek Keluar Daerah
	4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	
		1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Penyediaan alat listrik
		2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Penyediaan barang pakai habis antara lain alat tulis kantor
		3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Penyediaan makan dan minum rapat
		4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	Penyediaan peralatan kebersihan

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	RENCANA AKSI
		5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
		6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Penyediaan langganan koran
		7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	Pelaksanaan perjalanan dinas keluar daerah dalam rangka koordinasi konsultasi
	5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	
		1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	Pengadaan meja dan kursi kerja serta sofa kepada badan
		2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	59 Unit	Pengadaan peralatan dan mesin seperti komputer, printer, dan sebagainya
	6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	
		1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Penyediaan jasa surat menyurat, materai
		2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Penyediaan air dan internet
		3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Penyediaan jasa cleaning service dan jasa keamanan 13 bulan dan honorer 5 bulan

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	RENCANA AKSI
	7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	
		1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Pemeliharaan kendaraan dinas lapangan
		2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	141 Unit	Pemeliharaan barang inventaris
		4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Pemeliharaan gedung dan bangunan yang tidak dapat dikapitalisasi
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			Persentase realisasi penerimaan pendapatan asli daerah	100 %	
	1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase capaian kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	100 %	
		1	Sub KegiatanPerencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	- Mengevaluasi target proyeksi pajak tahun berjalan - Menyusun Proyeksi target pajak tahun berikutnya

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	RENCANA AKSI
		2	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen	- Koordinasi penyusunan peraturan perundangan (raperda dan raperwa) pajak daerah - Koordinasi Penyusunan kebijakan Lainnya (MOU dan PKS) terkait Pajak Daerah - jasa konsultansi pemutakhiran/ perbaikan data NJOP yang belum sesuai
		3	Sub KegiatanPenyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	18 Laporan	- Sosialisasi Opsen PKB, BNKB dan Samsat Gokatan '-Edukasi Pajak Sinergi dengan KPP Pratama, -Pemasangan Spanduk/Banner Perpajakan,'-Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah setiap Bulannya (12). - Sosialisasi Pajak Daerah jenis Opsen PKB-Opsen BBNKB (6). -Film Opsen PKB, Sosialisasi pajak melalui sosial media dan media massa. - Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah secara Online (2)
		4	Sub KegiatanPenyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	25 Unit	Pengadaan sarana prasarana pengelolaan pajak : - Sarpras untuk cetak masal PBB-P2 - Komputer pendukung pelayanan dan bidang P3TI - Hardisk Eksternal - Hardisk dan RAM untuk Server - Printer Scanner - Kerjasama dengan media

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	RENCANA AKSI
		5	Sub KegiatanPendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	420 Laporan	- Survey Objek Pajak berbasis geospasial pihak ketiga Qrop Spasial, Pengembangan sistem Pendataan Qrop Spasial, Layanan Percepatan Pendaftaran Pajak Daerah Hotline, Wa BLast Pengingat Pajak, Pengawasan Wajib Pajak Bersama dengan KPP DJP , Pendataan dan Pendaftaran Per Objek Pajak Daerah Baru Jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Pendataan dan Pendaftaran Per Objek Pajak Daerah Baru Jenis Reklame Pendataan/ Verifikasi Lapangan Objek Pendaftaran BPHTB dan PBB-P2.
		6	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3 Laporan	- Review dan evaluasi data NJOP bumii - Updating data bangunan
		7	Sub KegiatanPenetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	236000 Dokumen	- Perhitungan dan Penetapan DHKP PBB-P2 - Cetak Masal PBB-P2 (2 kali)
		8	Sub KegiatanPelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1000 Layanan	- Operasional Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah - Jemput Pajak (Pembayaran, Mutasi data dan Konsultasi) - Pajak Award (Penganugrahan Wajib Pajak Terbaik)
		9	Sub KegiatanPenagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	167520 Dokumen	- Penagihan atas Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) - Penagihan atas Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) PBB-P2 - Penagihan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN KINERJA	RENCANA AKSI
		10	Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	200 Dokumen	- Penyelesaian permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak - Penyelesaian keberatan pajak daerah - Penyelesaian permohonan Restitusi Pajak
		11	Sub KegiatanPengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	378 Dokumen	- Pelaksanaan Pemeriksaan atas Wajib Pajak yang terindikasi Kurang Bayar
		12	Sub KegiatanPembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	48 Laporan	- Menerbitkan dan Menyampaikan Surat Teguran Kepada Wajib Pajak - Penempelan Stikerisasi Objek Pajak - Penertiban atas Objek Reklame - Kegiatan pelaksanaan Inspeksi Lapangan terhadap Wajib Pajak Yang Terindikasi tidak membayar Pajak - Penyusunan Laporan atas Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan
		13	Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	- Peningkatan/pemeliharaan aplikasi e ponti dan Lihai PBB - Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)

BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak tahun 2025 ini diharapkan capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2025 dapat tercapai. Perubahan Rencana Kerja ini juga disusun berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2025 sehingga diharapkan dalam pelaksanaannya akan semakin meningkatkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparasi.

Perubahan Renja ini merupakan bahan acuan dalam pelaksanaan perubahan rencana kerja dan anggaran tahun anggaran 2025, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja yang berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Pontianak.

Akhir kata semoga dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 ini akan memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.

Pontianak, Juni 2025
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Pontianak,

Ruli Sudira, SE
Pembina Tingkat I
NIP. 19690522 199503 1 004

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Rahadi Oesman Nomor 3 Pontianak, Kalimantan Barat 78111
Telp. (0561) 577074 , Fax. (0561) 747910
Laman www.bkpsdm.pontianak.go.id Pos-el bkpsdm@pontianak.go.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan merupakan implementasi penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak yang memuat Tujuan, Sasaran, Evaluasi Kegiatan Tahun sebelumnya, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan serta Indikator Kinerja berikut Kelompok Sasarannya. Dengan adanya Renja ini diharapkan dapat menyusun APBD yang objektif, hal ini dikarenakan rencana program dan kegiatan didalamnya sedapat mungkin terukur dan telah memperhitungkan ketersediaan anggaran.

Menyadari Pentingnya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini sebagai Dasar pelaksanaan kegiatan, maka penyusunannya senantiasa melibatkan unit-unit pelaksanaan seperti : Sekretaris, Kabid, Kasubbag dan Subkoordinator di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak guna mendapat masukan-masukan demi tercapainya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Program dan Kegiatan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR LAMPIRAN iii

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-2

1.3 Maksud dan Tujuan I-5

1.4 Sistematika Penulisan I-5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BKPSDM TAHUN LALU II-1

2.1 Evaluasi Rencana Kerja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025 ..... II-1

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN III-1

3.1 Rencana Kerja III-1

3.2 Pendanaan III-2

BAB IV PENUTUP IV-1

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pontianak

LAMPIRAN 2 Tabel 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja. Ketentuan Pasal 1 ayat (30) Permendagri 86 Tahun 2017 berbunyi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam pelaksanaan rencana kerja tahun 2025, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan RKPD tahun 2025 harus berubah antara lain :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanaan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2025;
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan/subkegiatan, penambahan kegiatan/subkegiatan baru/subkegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan/subkegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan/subkegiatan.

   Dengan adanya beberapa kebijakan dan peraturan yang baru serta untuk menyesuaikan dengan kondisi riil yang terjadi pada saat ini, serta adanya perubahan dalam RKPD tahun 2025, maka dianggap perlu untuk melakukan perubahan atas

Renja BKPSDM Kota Pontianak Tahun 2025, sehingga dokumen perencanaan yang disusun dapat selaras dengan peraturan perundangan yang ada dan dapat menjawab permasalahan aktual yang terjadi pada saat ini sampai batas tahun yang direncanakan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Tahun 2025 yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
17. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
19. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak;
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Tahun 2024-2026 2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 30).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 15.1 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 15.1).
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak Tahun 2024 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan indikator dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan dokumen renja Perangkat Daerah Tahun 2025 serta Renstra Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang dalam kurun waktu Januari-Juni 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TRIWULAN I

Dalam melaksanakan tugas pokok di bidang kepegawaian serta untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2024-2026, BKPSDM didukung anggaran yang termuat dalam APBD Tahun 2025. Jumlah Pagu Anggaran BKPSDM Tahun 2025 adalah sebesar Rp 16.961.658,00 dengan realisasi sampai dengan Triwulan I adalah sebesar Rp 2.736.871.331,00 atau sebesar 16.14 %. Masih rendahnya realisasi anggaran di triwulan I dikarenakan banyaknya pelaksanaan kegiatan yang berada ditriwulan II dan Triwulan III, sehingga target kinerja yang ditetapkan di triwulan I belum tercapai.

Pagu Anggaran BKPSDM Kota Pontianak dibagi dalam 3 (tiga) Program Utama dengan pagu anggaran dan realisasi dengan triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Kepegawaian Daerah

   Pada program ini, pagu anggaran Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 5.533.044.049,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar Rp 663.626.007,00 atau 14.92%.

2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

   Pada program ini, pagu anggaran Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 1.246.629.727 dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar Rp 0,00 atau sekitar 0%.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

   Pada program ini, pagu anggaran Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 10.181.984.179,00 dengan realisasi sampai dengan triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.068.041.324 atau 19.70 %.

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan pencapaian perencanaan strategis (Renstra) perangkat Daerah BKPSDM Kota Pontianak sampai dengan triwulan I Tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut dalam table 2.1 terlampir.

TABEL 2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAI PEMERINTAI KOTA PONTIANAK
RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PONTIANAK
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD 2026)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
3	4	6			7			8			9			13			14 = 13/8		15 = 7 + 13			16 = (15/6)X100%		17
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp			K		Rp	K	Rp	
	Indeks Profesionalisme ASN	73	Indeks					73	**Indeks**					**78**			**109,86**					**0**		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAI DAERAI	**Persentase Realisasi Anggaran dalam Pemenuhan Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**28.180.131.537**	**120,53**	**%**	**9.526.839.222**	**100**	**%**	**10.181.984.179**	**19,70**	**%**	**2.068.041.324**	**19,70**	**%**	**2.068.041.324**	**19,70**	**20,31**	**140,23**	**%**	**11.594.880.546**	**45,02**	**0,00**	
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**151.910.700**	**100,00**	**%**	**64.374.000**	**100**	**%**	**65.636.900**	**18,18**	**%**	**0**	**18,18**	**%**	**0**	**18,18**	**0,00**	**118,18**	**%**	**64.374.000**	**36,67**	**0,00**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	12	Dokumen	47.900.700	4	**Dokumen**	22.589.000	4	Dokumen	30.966.900	1	Dokumen	0	1	Dokumen	0	25,00	0,00	5	Dokumen	22.589.000	42	0	Sekretariat
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dokumen	22.200.000	1	**Dokumen**	9.709.000	1	Dokumen	7.400.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0,00	0,00	1	Dokumen	9.709.000	33	0	Sekretariat
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Dokumen	36.300.000	1	**Dokumen**	14.730.000	1	Dokumen	12.100.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0,00	0,00	1	Dokumen	14.730.000	33	0	Sekretariat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan	32.700.000	4	**Laporan**	11.200.000	4	Laporan	10.900.000	1	Laporan	0	1	Laporan	0	25,00	0,00	5	Laporan	11.200.000	42	0	Sekretariat
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3	Laporan	12.810.000	1	**Laporan**	6.146.000	1	Laporan	4.270.000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0,00	0,00	1	Laporan	6.146.000	33	0	Sekretariat
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Laporan Keuangan yang disusun**	**100**	**%**	**21.615.735.000**	**134,76**	**%**	**7.165.838.112**	**100**	**%**	**7.978.852.000**	**64,29**	**%**	**1.973.491.583**	**64,29**	**%**	**1.973.491.583**	**64,29**	**24,73**	**99,52**	**%**	**9.139.329.695**	**99,52**	**0,00**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	165	Orang / Bulan	21.536.445.000	51	**Orang / Bulan**	7.146.983.112	55	orang / Bulan	7.952.422.000	50	orang / Bulan	1.973.491.583	52	orang / Bulan	1.973.491.583	94,55	24,82	51	orang / Bulan	9.120.474.695	30,91	0	Sekretariat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir TAhun SKPD	3	Laporan	6.690.000	1	**Laporan**	3.450.000	1	Laporan	2.230.000	1	Laporan	0	1	Laporan	0	100,00	0,00	2	Laporan	3.450.000	66,67	0	Sekretariat
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen BAhan Tanggapan Pemeriksaaan Tindak Lanjut pemeriksaan	12	Dokumen	33.000.000	1	**Dokumen**	2.700.000	4	Dokumen	11.000.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0,00	0,00	1	Dokumen	2.700.000	8,33	0	Sekretariat
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyususnan Laporan Keuangan	36	Laporan	39.600.000	12	**Laporan**	12.705.000	12	Laporan	13.200.000	3	Laporan		3	Laporan	0	25,00	0,00	15	Laporan	12.705.000	41,67	0	Sekretariat
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**%**	**324.930.000**	**100,00**	**%**	**92.710.000**	**100**	**%**	**108.310.000**	**0,00**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**0**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**%**	**92.710.000**	**33,33**	**0,00**	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya	9	Paket	324.930.000	3,00	**Paket**	92.710.000	3	Paket	108.310.000	0	Paket	0	0	Paket	0	0,00	0,00	3	Paket	92.710.000	33,33	0	Sekretariat
4. Administrasi Umum Perangkat DaerAI	**Persentase Pelayanan administrasi kantor**	**100**	**%**	**1.716.828.750**	**100,00**	**%**	**581.160.911**	**100**	**%**	**572.276.250**	**27,08**	**%**	**18.503.700**	**27,08**	**%**	**18.503.700**	**27,08**	**3,23**	**127,08**	**%**	**599.664.611**	**42,11**	**0,00**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	30	Paket	30.002.100	10	**Paket**	18.904.400	10	Paket	10.000.700	2	Paket	0	2	Paket	0	20,00	0,00	12	Paket	18.904.400	40,00	0,00	Sekretariat
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	36	Paket	831.408.450	12	**Paket**	298.669.700	12	Paket	277.136.150	4	Paket	14.194.000	4	Paket	14.194.000	33,33	5,12	16	Paket	312.863.700	44,44	0,00	Sekretariat
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang dan Penggandaan yang disediakan	36	paket	384.154.200	12	**paket**	80.302.500	12	paket	128.051.400	4	paket	2.989.700	4	paket	2.989.700	33,33	2,33	16	paket	83.292.200	44,44	0,00	Sekretariat
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen bAlan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	Dokumen	36.000.000	4	**Dokumen**	7.920.000	4	Dokumen	12.000.000	1	Dokumen	1.320.000	1	Dokumen	1.320.000	25,00	11,00	5	Dokumen	9.240.000	41,67	0,00	Sekretariat
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	laporan	435.264.000	10	**laporan**	175.364.311	10	laporan	145.088.000	2	laporan	0	2	laporan	0	20,00	0,00	12	laporan	175.364.311	40,00	0,00	Sekretariat

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD 2026)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
5. Pengadaan Barang Milik DaerAl Penunjang Urusan PemerintAl DaerAl	**0**	**100**	**%**	**600.000.000**	**89,23**	**%**	**718.649.000**	**85**	**%**	**200.000.000**	**0,00**	**%**	**0**	**0,00**	**%**	**0**	**0,00**	**0,00**	**89,23**	**%**	**718.649.000**	**19,93**	**0,00**	
Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel	90	Unit	300.000.000	30	**Unit**	145.670.000	30	Unit	100.000.000	0	Unit	0	0	Unit	0	0,00	0,00	30	Unit	145.670.000	33,33	0	Sekretariat
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	102	Unit	300.000.000	27	**Unit**	372.558.000	34	Unit	100.000.000	0	Unit	0	0	Unit	0	0,00	0,00	27	Unit	372.558.000	26,47	0,00	Sekretariat
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Unit		1	**Unit**	200.421.000	1	Unit	-	0	Unit	0	0	Unit	0	0,00	#DIV/0!	1	Unit	200.421.000			Sekretariat
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintAlan DaerAl	**Persentase pelayanan urusan adminitrasi kantor**	**100**	**%**	**2.705.367.087**	**100,00**	**%**	**781.531.587**	**100**	**%**	**901.789.029**	**25,00**	**%**	**65.248.041**	**25,00**	**%**	**65.248.041**	**25,00**	**7,24**	**125,00**	**%**	**846.779.628**	**41,67**	**0,00**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	84.000.000	4	**laporan**	24.900.000	4	Laporan	28.000.000	1	Laporan	3.510.000	1	Laporan	3.510.000	25,00	12,54	5	Laporan	28.410.000	41,67	0,00	Sekretariat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	laporan	1.766.153.400	4	**laporan**	387.649.707	4	Laporan	588.717.800	1	Laporan	47.428.041	1	Laporan	47.428.041	25,00	8,06	5	Laporan	435.077.748	41,67	0,00	Sekretariat
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralaan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	laporan	120.600.000	4	**laporan**	44.180.000	4	laporan	40.200.000	1	laporan	2.210.000	1	laporan	2.210.000	25,00	5,50	5	laporan	46.390.000	41,67	0,00	Sekretariat
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor yang disediakan	36	laporan	734.613.687	12	**laporan**	324.801.880	12	Laporan	244.871.229	3	Laporan	12.100.000	3	Laporan	12.100.000	25,00	4,94	15	Laporan	336.901.880	41,67	0,00	Sekretariat
7. Pemeliharaan Barang Milik DaerAl Penunjang Urusan PemerintAlan DaerAl	**Persentase barang inventaris yang dipelihara**	**100**	**%**	**1.065.360.000**	**85,00**	**%**	**122.575.612**	**100**	**%**	**355.120.000**	**3,33**	**%**	**10.798.000**	**3,33**	**%**	**10.798.000**	**3,33**	**3,04**	**88,33**	**%**	**133.373.612**	**41,91**	**0,00**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dab dibayarkan pajaknya	6	Unit	173.400.000	2	**Unit**	41.405.250	2	Unit	57.800.000	2	Unit	6.478.000	2	Unit	6.478.000	100,00	11,21	4	Unit	47.883.250	66,67	0,00	Sekretariat
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	171	Unit	591.960.000	44	**Unit**	36.577.000	57	Unit	197.320.000	0	Unit	4.320.000	0	Unit	4.320.000	0,00	2,19	44	Unit	40.897.000	25,73	0,00	Sekretariat
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	300.000.000	1	**Unit**	44.593.362	1	Unit	100.000.000	0	Unit	0	0	Unit	0	0,00	0,00	1	Unit	44.593.362	33,33	0,00	Sekretariat
	Indeks Sistem Merit	**329**	**nilai/skor**		**100,76**	**nilai/skor**		**327**	**nilai/skor**					**331,5**			102,00		**100,76**					
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAI	**Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian DaerAl**	**80**	**%**	**14.806.987.647**	**111,88**	**%**	**4.317.165.739**	**80**	**%**	**5.533.044.049**	**14,92**	**%**	**663.626.007**	**14,92**	**%**	**663.626.007**	**14,92**	**11,99**	**126,80**	**%**	**4.980.791.746**	**43,77**	**0,00**	
1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	**Persentase Informasi dan Data Kepegawaian yang dapat dilayani, Persentase Proses Pengadaa ASN dan pemberhentian ASN sesuai SOP**	**100**	**%**	**2.068.025.385**	**100,00**	**%**	**461.223.901**	**100**	**%**	**689.341.795**	**22,22**	**%**	**69.200.000**	**22,22**	**%**	**69.200.000**	**22,22**	**10,04**	**122,22**	**%**	**530.423.901**	**38,33**	**0,00**	
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan JumlAl Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan JumlAl jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	6	Dokumen	52.500.000	2	**Dokumen**	64.520.004	2	Dokumen	17.500.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0,00	0,00	2	Dokumen	64.520.004	33,33	0,00	Bidang Mutas
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	6	Dokumen	1.700.735.385	2	**Dokumen**	337.350.022	2	Dokumen	566.911.795	0	Dokumen	67.400.000	0	Dokumen	67.400.000	0,00	11,89	2	Dokumen	404.750.022	33,33	0,00	Bidang Mutas
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi pemberhentian	12	Dokumen	131.634.000	4	**Dokumen**	30.029.522	4	Dokumen	43.878.000	1	Dokumen	1.800.000	1	Dokumen	1.800.000	25,00	4,10	5	Dokumen	31.829.522	41,67	0,00	Bidang Mutas
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	36	Dokumen	166.356.000	12	**Dokumen**	23.769.353	12	Dokumen	55.452.000	3	Dokumen	0	3	Dokumen	0	25,00	0,00	15	Dokumen	23.769.353	41,67	0,00	Bidan PSDA
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	48	Dokumen	16.800.000	16	**Dokumen**	5.555.000	16	Dokumen	5.600.000	4	Dokumen	0	4	Dokumen	0	25,00	0,00	20	Dokumen	5.555.000	41,67	0,00	Bidan PSDA

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD 2026)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
2. Mutasi dan Promosi ASN	**Persentase Proses Administraasi kepegawaian, Mutasi dan Promosi ASN sesuai SOP**	**80**	**%**	**1.785.468.000**	**100,00**	**%**	**477.486.926**	**80**	**%**	**595.156.000**	**20,00**	**%**	**7.860.000**	**20,00**	**%**	**7.860.000**	**25,00**	**1,32**	**120,00**	**%**	**485.346.926**	**38,89**	**0,00**	
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrasi, jabatan pelaksana dan Mutasi ASN antar daerah	12	Dokumen	291.060.000	4	**Dokumen**	119.570.000	4	Dokumen	97.020.000	1	Dokumen	900.000	1	Dokumen	900.000	25,00	0,93	5	Dokumen	120.470.000	41,67	0,00	Bidang Mutasi
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	6	Dokumen	302.178.000	2	**Dokumen**	20.466.690	2	Dokumen	100.726.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0,00	0,00	2	Dokumen	20.466.690	33,33	0,00	Bidang Mutasi
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan promosi ASN	12	Dokumen	1.192.230.000	4	**Dokumen**	337.450.236	4	Dokumen	397.410.000	1	Dokumen	6.960.000	1	Dokumen	6.960.000	25,00	1,75	5	Dokumen	344.410.236	41,67	0,00	Bidang Mutasi
3. Pengembangan Kompetensi ASN	**Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan pengembangan kompetensi JFT, Persentase ASN yang mendapat pengembangan Kompetensi sesuai kebutuhan**	**70**	**%**	**7.338.165.180**	**231,87**	**%**	**2.341.059.235**	**70**	**%**	**3.043.436.560**	**16,52**	**%**	**566.486.007**	**16,52**	**%**	**566.486.007**	**23,60**	**18,61**	**248,39**	**%**	**2.907.545.242**	**58,34**	**0,00**	**BKPSDM Kota Pontianak**
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang meningkat Kapasitasnya	6000	Orang	2.406.204.360	5063	**Orang**	817.434.570	2000	Orang	1.280.905.620	215	Orang	114.141.007	215	Orang	114.141.007	10,75	8,91	5.278	Orang	931.575.577	87,97	0,00	Bidang PSDA
Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assesment Centre	12	Dokumen	466.830.900	2	**Dokumen**	134.679.844	4	Dokumen	155.610.300	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0,00	0,00	2	Dokumen	134.679.844	16,67	0,00	Bidang PSDA
Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	6	Dokumen	226.585.020	2	**Dokumen**	44.883.000	2	Dokumen	75.528.340	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0,00	0,00	2	Dokumen	44.883.000	33,33	0,00	Bidang PSDA
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	240	Orang	1.353.000.000	104	**Orang**	537.180.000	80	Orang	669.544.000	95	Orang	382.500.000	95	Orang	382.500.000	118,75	57,13	199	Dokumen	919.680.000	82,92	0,00	Bidang PSDA
Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	6	Dokumen	1.605.369.000	2	**Dokumen**	523.863.038	2	Dokumen	435.123.000	0	Dokumen	43.985.000	0	Dokumen	43.985.000	0,00	10,11	2	Orang	567.848.038	33,33	0,00	Bidang PSDA
Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan fasilitasi sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	600	Orang	494.034.000	14	**Orang**	43.276.127	200	Orang	164.678.000	66	Orang	0	66	Orang	0	33,00	0,00	80	Orang	43.276.127	13,33	0,00	Bidang Mutasi
Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi pejabat Fungsional					**0**																		Bidang Mutasi
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang dibina	750	Orang	728.391.900	1167	**Orang**	220.492.656	250	Orang	242.797.300	77	Orang	25.860.000	77	Orang	25.860.000	30,80	10,65	1.244	0	246.352.656	165,87	0,00	Bidang Mutasi
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karir	600	orang	12.750.000		**orang**		200	Orang	4.250.000	0	Orang												Bidang Mutasi
Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	12	Laporan	45.000.000	4	**Laporan**	19.250.000	4	Laporan	15.000.000		Laporan		0	Laporan	0	0,00	0,00	4	PD	19.250.000	33,33	0,00	Bidang Mutasi
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	**Persentase Penilaian Kinerja sangat baik, Persentase pemberian penghargaan dan perlindungan ASN tepat waktu dan tepat sasaran, Persentase Kepatuhan ASN terhadap peraturan kepegawaian**	**100**	**%**	**3.615.329.082**	**102,53**	**%**	**1.037.395.677**	**100**	**%**	**1.205.109.694**	**11,48**	**%**	**20.080.000**	**11,48**	**%**	**20.080.000**	**11,48**	**1,67**	**114,01**	**%**	**1.057.475.677**	**39,51**	**0,00**	**BKPSDM Kota Pontianak**
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		12	Dokumen	846.377.250	4	**Dokumen**	215.450.832	4	Dokumen	282.125.750	1	Dokumen	8.148.000	1	Dokumen	8.148.000	25,00	2,89	5	Dokumen	223.598.832	41,67	0,00	Bidang Disiplin
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan penghargaan	4.317	Orang	1.567.290.000	1479	**Orang**	539.783.882	1439	Orang	522.430.000	297	Orang	6.352.000	297	Orang	6.352.000	20,64	1,22	1.776	Orang	546.135.882	41,14	0,00	Bidang Disiplin
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa	150	Orang	52.650.000	55	**Orang**	3.390.000	50	Orang	17.550.000	0	Orang	0	0	Orang	0	0,00	0,00	55	Orang	3.390.000	36,67	0,00	Bidang Disiplin
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah OPD yang melaksanakan monitoring aplikasi SIM TPP	4	Dokumen	111.000.000	0	**Dokumen**		4	Dokumen	37.000.000		Dokumen	0		Dokumen		0,00		0	Dokumen	-	0,00	0,00	Bidang Disiplin
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	360	Orang	734.711.832	120	**Orang**	191.724.532	1200	Orang	244.903.944	11	Orang	0	11	Orang	0	0,92	0,00	131	Orang	191.724.532	36,39	0,00	Bidang Disiplin
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin	12	laporan	303.300.000	4	**laporan**	87.046.431	4	laporan	101.100.000	1	laporan	5.580.000	1	laporan	5.580.000	25,00	5,52	5	laporan	92.626.431	41,67	0,00	Bidang Disiplin

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD 2026)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah sd Tahun 2026 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	**Persentase ASN yang ditingkatkan kemampuan manajerial dan fungsional**	**80**	**%**	**3.739.889.316**	**80,00**	**%**	**983.356.796**	**80**	**%**	**1.246.629.772**	**0,00**	**%**	**5.204.000**	**0,00**	**%**	**5.204.000**	**0,00**	**0,42**	**80,00**	**%**	**988.560.796**	**33,33**	**0,00**	
5. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	**Persentase Pejabat Pengawas dan CASN yang telAI mengikuti Pendiidkan dan Pelatihan Manajerial dan Pelatihan Dasar**	**100**	**%**	**3.739.889.316**	**100,00**	**%**	**983.356.796**	**100**	**%**	**1.246.629.772**	**0,00**	**%**	**5.204.000**	**0,00**	**%**	**5.204.000**	**0,00**	**0,42**	**100,00**	**%**	**988.560.796**	**~~33,33~~**	**0,00**	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan DaerAI, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan DaerAI , jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, kepemimpinan dan Prajabatan	6	laporan	3.556.664.916	2	laporan	946.531.796	2	Laporan	1.185.554.972	0	Laporan	5.204.000	0	Laporan	5.204.000	0,00	0,44	2	Laporan	951.735.796	33,33	0,00	Bidang PSDA
Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Krjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan DaerAI Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, pemantauan, Evaluasi dan pelaporan Pelaporan pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja Sama	12	Dokumen	183.224.400	4	Dokumen	36.825.000	4	Dokumen	61.074.800	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0,00	0,00	4	Dokumen	36.825.000	33,33	0,00	Bidang PSDA
TOTAL				46.727.008.500			14.827.361.757			**16.961.658.000**			2.736.871.331			2.736.871.331								
Rata-rata capaian kinerja Program(%)													**16,14**			**16,14**	**11,54**					**40,71**		
Predikat kinerja																	Sangat Rendah					Sangat Rendah		
Rata-rata capaian kinerja Subkegiatan(%)										16.961.658.000			2.736.871.331			2.736.871.331	**20,23**					**39,33**		
Predikat kinerja													**16,14**			**16,14**	Sangat Rendah					Sangat Rendah		

Sumber Data : Olahan BKPSDM Kota Pontianak Tahun 2025

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Kerja

Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kota Pontianak Tahun 2025 dilakukan berdasarkan adanya arahan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah, serta mendukung upaya pemerintah pusat dalam penguatan stabilitas ekonomi nasional. Adapun perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kota Pontianak Tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							**16.961.658.000,00**	**18.643.357.516,00**	**17.266.236.945,00**	**304.578.945,00**							**16.800.476.236,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**16.961.658.000,00**	**18.643.357.516,00**	**17.266.236.945,00**	**304.578.945,00**							**16.800.476.236,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**							**15.715.028.228,00**	**16.041.732.126,00**	**15.210.132.275,00**	**-504.895.953,00**							**15.553.846.464,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase tingkat kepuasaan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan**				**95 Persen**	**95 Persen**	**10.181.984.179,00**	**10.636.018.441,00**	**10.393.276.888,00**	**310.325.031,00**							**10.492.309.210,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase realisasi anggaran dalam pemenuhan urusan pemerintahan daerah*				100 Persen	100 Persen	65.636.900,00	44.474.000,00	37.199.200,00	-28.437.700,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	BKPSDM Kota Pontianak		65.636.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	30.966.900,00	12.584.000,00	10.537.200,00	-20.429.700,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			30.966.900,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.400.000,00	9.330.000,00	7.464.000,00	64.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			7.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	12.100.000,00	6.220.000,00	4.976.000,00	-7.124.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			12.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	10.900.000,00	6.220.000,00	4.976.000,00	-5.924.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			10.900.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4.270.000,00	10.120.000,00	9.246.000,00	4.976.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			4.270.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	7.978.852.000,00	8.495.121.898,00	8.488.083.304,00	509.231.304,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	BKPSDM Kota Pontianak		8.191.342.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	57 Orang/bulan	7.952.422.000,00	8.254.881.898,00	8.254.883.304,00	302.461.304,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			7.952.422.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				-	12 Dokumen	0,00	225.720.000,00	225.720.000,00	225.720.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			225.720.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.230.000,00	0,00	0,00	-2.230.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				4 Dokumen	4 Dokumen	11.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	13.200.000,00	14.520.000,00	7.480.000,00	-5.720.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			13.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	108.310.000,00	122.310.000,00	127.910.000,00	19.600.000,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	BKPSDM Kota Pontianak		108.310.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	108.310.000,00	122.310.000,00	127.910.000,00	19.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			108.310.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	572.276.250,00	583.913.250,00	402.655.441,00	-169.620.809,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	BKPSDM Kota Pontianak		572.276.250,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	10.000.700,00	10.000.700,00	10.000.700,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			10.000.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	277.136.150,00	288.763.150,00	229.582.400,00	-47.553.750,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			277.136.150,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	128.051.400,00	128.051.400,00	104.968.200,00	-23.083.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			128.051.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	4 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	7.200.000,00	-4.800.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	145.088.000,00	145.098.000,00	50.904.141,00	-94.183.859,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			145.088.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah*				85 Persen	85 Persen	200.000.000,00	296.619.500,00	569.711.600,00	369.711.600,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	BKPSDM Kota Pontianak		377.144.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	5 Unit	100.000.000,00	16.421.200,00	52.607.000,00	-47.393.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				34 Unit	19 Unit	100.000.000,00	113.210.800,00	350.117.100,00	250.117.100,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	166.987.500,00	166.987.500,00	166.987.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			177.144.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah*				100 Persen	100 Persen	901.789.029,00	842.381.793,00	476.990.000,00	-424.799.029,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	BKPSDM Kota Pontianak		822.479.960,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	28.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	10.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			28.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	588.717.800,00	516.789.633,00	196.000.000,00	-392.717.800,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			588.717.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	40.200.000,00	154.410.000,00	154.410.000,00	114.210.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			40.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	244.871.229,00	133.182.160,00	88.580.000,00	-156.291.229,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			165.562.160,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah*				85 Persen	85 Persen	355.120.000,00	251.198.000,00	290.727.343,00	-64.392.657,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	BKPSDM Kota Pontianak		355.120.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	57.800.000,00	57.800.000,00	40.460.000,00	-17.340.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			57.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				57 Unit	57 Unit	197.320.000,00	105.680.000,00	184.390.000,00	-12.930.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			197.320.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	87.718.000,00	65.877.343,00	-34.122.657,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah**				**80 Persen**	**80 Persen**	**5.533.044.049,00**	**5.405.713.685,00**	**4.816.855.387,00**	**-471.506.795,00**							**5.061.537.254,00**	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Persentase Administrasi Pelaksanaan Pengadaan, dan Pemberhentian ASN sesuai SOP serta sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi*				100 Persen	100 Persen	689.341.795,00	652.588.795,00	548.869.795,00	-140.472.000,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	ASN Pemerintah Kota Pontianak		812.071.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	17.500.000,00	73.128.000,00	50.244.000,00	32.744.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			17.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																		
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	2 Dokumen	566.911.795,00	464.583.795,00	416.382.795,00	-150.529.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			689.641.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				4 Dokumen	4 Dokumen	43.878.000,00	19.326.000,00	12.713.000,00	-31.165.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			43.878.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	55.452.000,00	78.631.000,00	64.030.000,00	8.578.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			55.452.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				16 Dokumen	16 Dokumen	5.600.000,00	16.920.000,00	5.500.000,00	-100.000,00	-	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			5.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Persentase pelayanan kepegawaian yang sesuai SOP*				80 Persen	80 Persen	595.156.000,00	611.768.000,00	792.124.000,00	196.968.000,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	ASN Pemerintah Kota Pontianak		595.156.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	97.020.000,00	123.455.000,00	117.455.000,00	20.435.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			97.020.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	100.726.000,00	47.000.000,00	21.070.000,00	-79.656.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			100.726.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				4 Dokumen	4 Dokumen	397.410.000,00	441.313.000,00	653.599.000,00	256.189.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			397.410.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi*				70 Persen	70 Persen	3.043.436.560,00	3.104.324.340,00	2.555.540.422,00	-487.896.138,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	ASN Pemerintah Kota Pontianak		2.449.200.560,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				2000 Orang	2000 Orang	1.280.905.620,00	1.230.882.000,00	1.063.718.600,00	-217.187.020,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			686.669.620,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				4 Dokumen	4 Dokumen	155.610.300,00	263.239.000,00	251.072.200,00	95.461.900,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			155.610.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	75.528.340,00	64.464.340,00	50.374.622,00	-25.153.718,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			75.528.340,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				80 Orang	80 Orang	669.544.000,00	610.160.000,00	544.940.000,00	-124.604.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			669.544.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat				2 Dokumen	2 Dokumen	435.123.000,00	543.317.000,00	380.179.000,00	-54.944.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			435.123.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN				35 Orang	35 Orang	164.678.000,00	119.620.000,00	86.555.000,00	-78.123.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			164.678.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																		
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				250 Orang	250 Orang	242.797.300,00	272.642.000,00	178.701.000,00	-64.096.300,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			242.797.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																		
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				200 Orang	200 Orang	4.250.000,00	0,00	0,00	-4.250.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			4.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional				4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Persentase ASN yang memiliki disiplin dan integritas tinggi*				100 Persen	100 Persen	1.205.109.694,00	1.037.032.550,00	920.321.170,00	-284.788.524,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	ASN Pemerintah Kota Pontianak		1.205.109.694,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				4 Dokumen	4 Dokumen	282.125.750,00	282.493.750,00	174.869.750,00	-107.256.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			282.125.750,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				1439 Orang	1439 Orang	522.430.000,00	357.710.000,00	318.211.000,00	-204.219.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			522.430.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				50 Orang	50 Orang	17.550.000,00	50.851.000,00	46.918.000,00	29.368.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			17.550.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur																		
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur				4 Dokumen	4 Dokumen	37.000.000,00	0,00	0,00	-37.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			37.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				1200 Orang	1200 Orang	244.903.944,00	231.898.800,00	259.877.420,00	14.973.476,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			244.903.944,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				4 Laporan	4 Laporan	101.100.000,00	114.079.000,00	120.445.000,00	19.345.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			101.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**1.246.629.772,00**	**2.601.625.390,00**	**2.056.104.670,00**	**809.474.898,00**							**1.246.629.772,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN ditingkatkan kemampuan manajerial dan fungsional**				**80 Persen**	**80 Persen**	**1.246.629.772,00**	**2.601.625.390,00**	**2.056.104.670,00**	**0,00**							**1.246.629.772,00**	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Persentase ASN yang mengikuti pengembangan Manajerial fungsional*				100 Persen	100 Persen	1.246.629.772,00	2.601.625.390,00	2.056.104.670,00	809.474.898,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	ASN Pemerintah Kota Pontianak		1.246.629.772,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				2 Laporan	2 Laporan	1.185.554.972,00	2.550.954.590,00	2.007.188.050,00	821.633.078,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			1.185.554.972,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama				4 Dokumen	4 Dokumen	61.074.800,00	50.670.800,00	48.916.620,00	-12.158.180,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			61.074.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	J U M L A H								**16.961.658.000,00**	**18.643.357.516,00**	**17.266.236.945,00**	**304.578.945,00**							**16.800.476.236,00**	

3.2 Pendanaan

Pada perubahan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak terdapat perubahan anggaran pada beberapa subkegiatan yang menyebabkan adanya pengurangan anggaran maupun perubahan volume target subkegiatan.

Pagu anggaran BKPSDM Kota Pontianak dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 17.266.236.945,00, mengalami kenaikan sebesar Rp 304.578.945,00 (1.76 %), dibanding pada RKPD Murni sebesar Rp 16.961.658.000,00. Anggaran tersebut terbagi menjadi 3 Program, 12 Kegiatan dan 51 Subkegiatan.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan/subkegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu RENJA juga berfungsi untuk mengevaluasi kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam RENJA Perubahan diharapkan akan lebih terkoordinasi, efektif, dan efisien dengan menitikberatkan pada pencapaian kinerja.

Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan BKPSDM Kota Pontianak sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam RENJA Perubahan tahun 2025 ini. Keberhasilan pelaksanaan RENJA Perubahan BKPSDM Kota Pontianak tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh ASN BKPSDM Kota Pontianak serta *stakeholder* yang bersangkutan untuk mewujudkan peningkatan profesionalisme ASN Pemerintah Kota Pontianak.

Pontianak, Juni 2025
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Pontianak

YUNI ROSDIAH, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19690606 198903 2 007

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
INSPEKTORAT
Jl.Rahadi Oesman No. 3 Telp/Fax (0561) 8103413
e-mail : inspektorat@pontianak.go.id
Kode Pos 78111 Pontianak

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

INSPEKTORAT KOTA PONTIANAK

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dalam rangka penajaman fungsi pengawasan untuk mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah, Inspektorat Kota Pontianak menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 berpedoman pada Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor B/000.7.2.4/26/BAPERIDA/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 akan berfokus pada pengawasan internal dan sosialisasi antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Dengan ditetapkan Perubahan Rencana Kerja ini, diharapkan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kota Pontianak tahun 2025 memiliki arah yang jelas dan dapat dievaluasi tingkat keberhasilannya sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan serta dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja ini disusun untuk menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025.

Pontianak, Juni 2025
Inspektur Kota Pontianak

YAYA MAULIDIA, SH, MH, CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19680606 199503 2 003

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubbag Renkeu	
Analis Perencanaan	

KATA PENGANTAR

Dalam rangka penajaman fungsi pengawasan untuk mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah, Inspektorat Kota Pontianak menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 berpedoman pada Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor B/000.7.2.4/26/BAPERIDA/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 akan berfokus pada pengawasan internal dan sosialisasi antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

Dengan ditetapkan Perubahan Rencana Kerja ini, diharapkan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kota Pontianak tahun 2025 memiliki arah yang jelas dan dapat dievaluasi tingkat keberhasilannya sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan serta dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penentu kebijakan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja ini disusun untuk menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025.

Pontianak, Juni 2025
Inspektur Kota Pontianak

YAYA MAULIDIA, SH, MH, CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19680606 199503 2 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar			ii
Daftar Isi			iii
BAB I	:	**PENDAHULUAN**	
		1.1 Latar Belakang	I-1
		1.2 Landasan Hukum	I-2
		1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
		1.4 Sistematika Penulisan	I-5
BAB II	:	**EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN BERJALAN**	II-1
BAB III	:	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**	III-1
BAB IV	:	**PENUTUP**	IV-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Perubahan Renja Inspektorat Kota Pontianak merupakan dokumen perencanaan Inspektorat untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat 2024-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2025 sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat serta sejalan dengan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pontianak yaitu "Pontianak Kota Khatulistiwa berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat".

Tahapan penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 sebagai berikut

1. Persiapan penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025
2. Penyusunan rancangan Perubahan Renja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025
3. Pelaksanaan Pembahasan Rancangan Perubahan Renja Inspektorat Kota Pontianak mencakup :
   - Pengolahan data dan informasi;
   - Penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Pontianak berdasarkan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan;

- Penajaman indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Pontianak;
- Penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Pontianak.
- Penyesuaian pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif Inspektorat Kota Pontianak.

Dalam penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 senantiasa ada keterkaitan dengan dokumen RKPD Kota Pontianak dan Renstra Inspektorat Kota Pontianak serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

Penetapan Perubahan Renja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 dilakukan dengan menyempurnakan rancangan Renja Inspektorat Kota Pontianak yang berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan untuk disampaikan dan diverifikasi oleh BAPPERIDA Kota Pontianak.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30).

17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).

18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).

19. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 64).

20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).

21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 24).

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025
2. Menyediakan sarana pengendalian program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap Perubahan Rencana Kerja ini maka penyajiannya disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang, mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025, proses penyusunan renja, keterkaitan antar Renja dengan RKPD, Renstra, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tetang SOTK, kewenangan Inspektorat Kota Pontianak, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Inspektorat Kota Pontianak.

1.3. Maksud dan Tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat Kota Pontianak.

1.4. Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat Kota Pontianak, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN BERJALAN

Bab ini memuat kajian *(review)* terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Pontianak sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 yang mengacu pada APBD tahun berjalan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran beserta pendanaan indikatifnya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa :

- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- Kaidah-kaidah pelaksanaan
- Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Berjalan

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Pontianak sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 mengacu pada Laporan Evaluasi Hasil Renja dan/atau realisasi APBD untuk Inspektorat kota Pontianak sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Terhadap hasil evaluasi tersebut dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. **Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;**
   - Sebagian besar target pada Program Utama Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 berupa penilaian-penilaian hasil pengawasan yang pada umumnya baru dapat diselesaikan pada Triwulan III dan Triwulan IV tahun berjalan sehingga realisasi target pada program utama tidak dapat dipenuhi pada Triwulan I Tahun 2025. Meskipun demikian target output pada masing-masing Sub Kegiatan terealisasi sesuai dengan yang yang telah direncanakan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana telah ditetapkan oleh Wali Kota Pontianak melalui SK Wali Kota Pontianak Nomor 158 Tahun 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun dan Peta Pengawasan Pada Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025.

2. **Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;**
   - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indiator Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan berdasarkan hasil survei dari seluruh ASN Inspektorat Kota Pontianak pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 92%. Adapun faktor pendorong keberhasilannya adalah meningkatnya koordinasi antar bidang dan sub bagian dalam upaya percepatan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan dan beberapa tugas mandatori yang harus diselesaikan pada Triwulan I Tahun 2025. Adapun bentuk pekerjaan-pekerjaan tersebut antara lain penyusunan dokumen, sosialisasi dan pelayanan kesekretariatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan.

3. **Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;**
   - Tidak ada program/kegiatan yang realisasinya melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

4. **Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;**
   - Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar target pada Program Utama Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 berupa penilaian-penilaian hasil pengawasan yang pada umumnya baru dapat diselesaikan pada Triwulan III dan Triwulan IV tahun berjalan sehingga realisasi target pada program utama tidak dapat dipenuhi pada Triwulan I Tahun 2025
   - Adapun realisasi Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang masih rendah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disebabkan antara lain :
     - Beralihnya pejabat pengadaan dari Perangkat Daerah kepada UKPBJ sehingga proses pengadaan dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA) tanpa dibantu oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sementara itu PA yang merupakan Inspektur memiliki tugas dan fungsi dengan lingkup Kota Pontianak dengan jadwal pekerjaan yang sangat padat.
     - Proses registrasi pada INAPROC Katalog Elektronik terkendala autentifikasi dokumen.
     - Mekanisme belanja penyelenggaraan acara yang pada tahun lalu dapat dilakukan melalui e-catalog dengan dokumen yang ringkas pada tahun 2025 tidak dapat lagi dilaksanakan melalui e-catalog sehingga proses pengadaan menjadi panjang dengan dokumen yang banyak.

5. **Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya program dan kegiatan**
   - Melakukan upaya percepatan penyelesaian pekerjaan dengan meningkatkan monitoring tugas pengawasan oleh pimpinan
   - Meningkatkan koordinasi dan distribusi pekerjaan
   - Monitoring terhadap penyerapan anggaran dan percepatan realisasi pengadaan barang jasa

Adapun Evaluasi terhadap Hasil Renja Inspektorat Kota Pontianak Triwulan I Tahun 2025 dijelaskan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Pontianak
Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja per Triwulan Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) (Evaluasi Renstra)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)	
										I												
1	2	3	4	6			8			9			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100	
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp.	K		Rp	K	Rp
	Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)		**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**	**82 (A)**	**Nilai (Predikat)**	**32.138.040.000**	**81**	**Nilai (Predikat)**	**25.006.558.891**		**Nilai (Predikat)**	**3.668.506.124**	**0**	**Nilai (Predikat)**	**3.668.506.124**	**0**	**14,67017569**	**0**	**Nilai (Predikat)**	**18.020.525.849**	**0**	**56,07**
	Sasaran 1 : Meningkatnya nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan		**Persentase nilai evaluasi LAKIP Perangkat Daerah dengan kategori memuaskan**	**100 %**	**Persen**		**62,50 %**	**Persen**			**Persen**		**0,00 %**	**Persen**		**0**		**0,00 %**	**Persen**		**0,00**	
	Sasaran 2 : Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi		**Nilai Maturitas SPIP**	**3,42**	**Persen**		**3,41**	**Persen**			**Persen**		**0**	**Persen**		**0**		**0**	**Persen**		**0,00**	
1		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan**	**95**	**%**	**28.986.191.000**	**95**	**%**	**20.815.852.891**	**92**	**%**	**3.296.726.124**	**92**	**%**	**3.296.726.124**	**96,84**	**15,84**	**92,00**	**%**	**15.201.436.135**	**96,84**	**52,44**
1.1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100	%	90.306.000	100	%	93.628.000	27	%	0	27	%	0	**27,27**	**0,00**	27	%	90.994.000	27,27	100,76
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50	Dok	17.985.000	16	Dok	47.535.000	5	Dok		5	Dok	0	**31,25**	**0,00**	23	Dok	57.515.500	46,00	319,80

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja per Triwulan Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) (Evaluasi Renstra)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)	
										I												
1	2	3	4	6			8			9			13=9+10+11+12			14=13/6x100		15=7+13			16=15/6x100	
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp.	K		Rp	K	Rp
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dok	3.783.000	1	Dok	10.643.000		Dok		0	Dok	0	0,00	0,00	1	Dok	8.672.500	33,33	229,25
1.1.3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	Dok	3.117.000	1	Dok	10.643.000		Dok		0	Dok	0	0,00	0,00	1	Dok	8.562.500	33,33	274,70
1.1.4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9	Lap	55.401.000	3	Lap	18.501.000		Lap		0	Lap	0	0,00	0,00	3	Lap	11.272.500	33,33	20,35
1.1.5		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	Lap	10.020.000	1	Lap	6.306.000	1	Lap		1	Lap	0	100,00	0,00	3	Lap	4.971.000	50,00	49,61
1.2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	23.335.890.000	100	%	10.036.524.891	78	%	2.827.092.350	78	%	2.827.092.350	77,78	28,17	158	%	11.401.020.392	157,54	48,86
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138	Org/ Bln	23.322.090.000	46	Org/ Bln	10.018.748.891	46	Org/ Bln	2.827.092.350	46	Org/ Bln	2.827.092.350	100,00	28,22	92	Org/ Bln	11.386.597.392	66,67	48,82
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	Dok	6.900.000	12	Dok	8.888.000	3	Dok		3	Dok	0	25,00	0,00	15	Dok	7.294.000	41,67	105,71
1.2.3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15	Dok	6.900.000	5	Dok	8.888.000		Dok		0	Dok	0	0,00	0,00	5	Dok	7.129.000	33,33	103,32
1.3		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	3.018.848.000	100	%	2.935.517.000	27	%	267.945.033	27	%	267.945.033	26,56	9,13	127	%	1.219.524.320	126,56	40,40

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja per Triwulan Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) (Evaluasi Renstra)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)	
										I												
1	2	3	4	6			8			9			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100	
					K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp.		K	Rp	K	Rp
1.3.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6	Paket	174.270.000	1	Paket	82.590.000		Paket		0	Paket	0	0,00	0,00	2	Paket	84.380.000	33,33	48,42
1.3.2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	105	Orang	1.717.763.000	46	Orang	2.850.927.000	17	Orang	267.945.033,00	17	Orang	267.945.033	36,96	9,40	48	Orang	1.134.944.320	45,71	66,07
1.3.3		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10	Orang	144.719.000		Orang	2.000.000		Orang		0		0		0,00	0		0	0,00	0,00
1.3.4		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54	Orang	982.096.000	17	Orang			Orang		0	Orang	0	0,00	#DIV/0!	17	Orang	200.000	31,48	0,02
1.4		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	818.191.800	100	%	1.335.009.400	23	%	65.477.496	23	%	65.477.496	22,73	4,90	123	%	691.898.213	122,73	84,56
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Paket	19.602.600	1	Paket	7.933.400	1,00	Paket	7.933.400	1,00	Paket	7.933.400	100,00	100,00	2	Paket	14.474.500	66,67	73,84
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	157.704.900	4	Paket	83.404.300	1	Paket	3.000.000	1	Paket	3.000.000	25,00	3,60	5	Paket	73.571.400	41,67	46,65
1.4.3		Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	Paket	33.871.500	2	Paket	30.194.600	1	Paket	9.104.800	1	Paket	9.104.800	50,00	30,15	3	Paket	29.237.100	50,00	86,32
1.4.4		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	140.580.000	1	Paket	82.500.000		Paket	20.496.000	0	Paket	20.496.000	0,00	24,84	1	Paket	125.336.000	33,33	89,16
1.4.5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaanyang Disediakan	6	Paket	73.408.800	2	Paket	29.477.100	1	Paket	7.200.000	1	Paket	7.200.000	50,00	24,43	3	Paket	43.210.800	50,00	58,88
1.4.6		Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Dokumen Bahan	6	Dok	4.500.000	2	Dok	1.500.000		Dok		0	Dok	0	0,00	0,00	2	Dok	1.320.000	33,33	29,33

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja per Triwulan Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) (Evaluasi Renstra)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)	
										I												
1	2	3	4	6			8			9			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100	
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp.	K		Rp	K	Rp
		Peraturan Perundang-Undangan	Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan																			
1.4.7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kosultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Lap	388.524.000	10	Lap	1.100.000.000	1	Lap	17.743.296	1	Lap	17.743.296	**10,00**	**1,61**	11	Lap	404.748.413	36,67	104,18
1.5		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	248.126.400	100	Persen	896.359.200	0	Persen	0	0	Persen	0	**0,00**	**0,00**	100	Persen	1.028.050.000	100,00	414,33
1.5.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27	Unit	248.126.400	15	Unit	896.359.200		Unit		0	Unit	0	**0,00**	**0,00**	55	Unit	1.028.050.000	203,70	414,33
1.6		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	1.190.248.800	100	Persen	593.804.240	15	Persen	109.775.245	15	Persen	109.775.245	**15,38**	**18,49**	115	Persen	627.758.310	115,38	52,74
1.6.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	9	Laporan	132.678.000	3	Lap	182.720.000	1	Lap	24.989.245	1	Lap	24.989.245	**33,33**	**13,68**	4	Lap	172.190.758	44,44	129,78
1.6.2		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Laporan	170.088.000	1	Lap	22.250.000		Lap		0	Lap	0	**0,00**	**0,00**	1	Lap	25.640.000	33,33	15,07
1.6.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	27	Laporan	887.482.800	9	Lap	388.834.240	1	Lap	84.786.000	1	Lap	84.786.000	**11,11**	**21,81**	10	Lap	429.927.552	37,04	48,44
1.7		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	100	Persen	284.580.000	100	Persen	4.925.010.160	11	Persen	26.436.000	11	%	26.436.000	**10,77**	**0,54**	111	%	142.190.900	110,77	49,97

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja per Triwulan Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) (Evaluasi Renstra)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)	
										I												
1	2	3	4	6			8			9			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100	
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp.	K		Rp	K	Rp
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah																			
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	127.530.000	5	Unit	91.500.000	1	Unit	14.256.000	1	Unit	14.256.000	**20,00**	**15,58**	6	Unit	68.424.100	100,00	53,65
1.7.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	174	Unit	139.050.000	58	Unit	48.240.000	6	Unit	12.180.000	6	Unit	12.180.000	**10,34**	**25,25**	64	Unit	58.970.000	36,78	42,41
1.7.3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	15.000.000	1	Unit	4.785.270.160		Unit		0	Unit	0	**0,00**	**0,00**	1	Unit	9.750.000	33,33	65,00
1.7.4		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	3.000.000	1	Unit			Unit		0	Unit	0	**0,00**	**#DIV/0!**	1	Unit	5.046.800	33,33	168,23
2		**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi implementasi SAKIP**	**100,00**	**Persen**	**1.506.794.000**	**100,00**	**Persen**	**2.439.615.000**		**%**	**273.460.000**	**0,00**	**%**	**273.460.000**	**0,00**	**11,21**	**50,00**	**%**	**1.299.900.500**	**50,00**	**86,27**
			Persentase tindak lanjut hasil rekomendasi BPKP atas evaluasi SPIP Terintegrasi Pemerintah Kota Pontianak	**100**	**Persen**		**100**	**%**			**%**		**0**	**%**		**0,00**		**100,00**	**%**	**0**	**100,00**	
2.1		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Internal	100	%	1.020.794.000	100	%	2.035.005.000	3	%	269.400.000	3	%	269.400.000	**2,78**	**13,24**	51	%	1.064.785.500	51,16	104,31
2.1.1		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	111	Lap	397.150.000	37	Lap	1.108.040.000	1	Lap	47.100.000	1	Lap	47.100.000	**2,70**	**4,25**	38	Lap	354.490.000	34,23	89,26

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja per Triwulan Tahun 2025 I			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) (Evaluasi Renstra)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)	
1	2	3	4	6			8			9			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100	
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp.	K		Rp	K	Rp
2.1.2		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan KeuanganPemerintah Daerah	132	Lap	86.850.000	44	Lap	481.855.000	2	Lap	40.220.000	2	Lap	40.220.000	**4,55**	**8,35**	46	Lap	222.570.000	34,85	259,25
2.1.3		Reviu Laporan kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	387	Lap	64.100.000	129	Lap	64.440.000	1	Lap	37.600.000	1	Lap	37.600.000	**0,78**	**58,35**	130	Lap	45.590.000	33,59	71,12
2.1.4		Reviu Laporan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3	Lap	51.900.000	1	Lap	54.530.000	1	Lap	37.180.000	1	Lap	37.180.000	**100,00**	**68,18**	2	Lap	55.615.000	66,67	107,16
2.1.5		Kerjasama pengawasan internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yangTerbentuk	6	Kesepakatan	184.344.000	1	Kesepakatan	4.980.000		Kesepakatan	3.000.000	0	Kesepakatan	3.000.000	**0,00**	**60,24**	1	Kesepakatan	8.730.500	16,67	4,74
2.1.6		Monitoring dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	24	Dok	237.450.000	4	Dok	321.160.000	1	Dok	104.300.000	1	Dok	104.300.000	**25,00**	**32,48**	9	Dok	377.790.000	37,50	159,10
2.2		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	100	%	486.000.000	100	%	404.610.000	20	%	4.060.000	20	%	4.060.000	**20,00**	**1,00**	60	%	235.115.000	60,00	48,38
2.2.1		Penanganan penyelesaian kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah yang Ditangani	2	Lap	331.500.000	2	Lap	186.740.000		Lap		0	Lap	0	**0,00**	**0,00**	2	Lap	65.870.000	100,00	19,87
2.2.2		Pengawasan dengan tujuan tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan DenganTujuan Tertentu	20	Lap	154.500.000	3	Lap	217.870.000	1	Lap	4.060.000	1	Lap	4.060.000	**33,33**	**1,86**	21	Lap	169.245.000	105,00	109,54
3		**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan & Asistensi**	**Level Kapabilitas APIP**	**3,00**	**Level**	**1.845.055.000**	**3**	**Level**	**1.751.091.000**		**Level**	**98.320.000**	**3**	**Level**	**98.320.000**	**100,00**	**5,61**	**6,00**	**Level**	**1.519.189.214**	**200,00**	**92,35**
			Persentase Perangkat Daerah yang menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Asistensi Manajemen Risiko	**100**	**Persen**		**90**	**Persen**			**%**		**0,00**	**%**		**100,00**		**50**	**%**		**50,00**	
3.1		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis	Persentase terlaksananya kegiatan	100	Persen	17.325.000	100	%	6.650.000	0	%	0	0	%	0	**0,00**	**0,00**	50	%	5.500.000	50,00	31,75

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja per Triwulan Tahun 2025			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) (Evaluasi Renstra)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)	
										I												
1	2	3	4	6			8			9			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100	
					K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp	K	Rp.		K	Rp	K	Rp
		di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	perumusan kebijakan tehnis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan																			
3.1.1		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di BidangPengawasan yang Disusun	6	Rekomendasi	9.075.000	1	Rekomendasi	3.325.000		Rekomendasi		0	Rekomendasi	0	0,00	0,00	1	Rekomendasi	3.025.000	16,67	33,33
3.1.2		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di BidangFasilitasi Pengawasan yang Disusun	12	Rekomendasi	8.250.000	1	Rekomendasi	3.325.000		Rekomendasi		0	Rekomendasi	0	0,00	0,00	2	Rekomendasi	2.475.000	16,67	30,00
3.2		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi	100	Persen	1.627.730.000	100	Persen	1.744.441.000	1	Persen	98.320.000	1	%	98.320.000	1,45	5,64	49	%	1.513.669.214	49,45	92,99
3.2.1		Pendampingan dan asitensi urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang DilakukanPendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	3	PD	30.570.000	1	PD	31.690.000		PD		0	PD	0	0,00	0,00	1	PD	9.800.000	16,67	32,06
3.2.2		Pendampingan, asistensi, verifkasi dan penilaian reformasi birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang DilakukanPendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	96	PD	960.950.000	32	PD	623.480.000		PD	49.720.000	0	PD	49.720.000	0,00	7,97	16	PD	456.083.414	16,67	47,46
3.2.3		Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan danPemberantasan Korupsi	24	Keg	620.100.000	4	Keg	978.351.000	1	Keg	48.600.000	1	Keg	48.600.000	25,00	4,97	9	Keg	676.990.000	37,50	109,17
3.2.4		Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang DilakukanPendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6	PD	16.110.000	32	PD	110.920.000		PD		0	PD	0	0,00	0,00	2	PD	370.815.800	33,33	2.301,77
			JUMLAH SELURUH PROGRAM	100	%	32.138.040.000	100	%	25.006.558.891	32	%	3.668.506.124	19	%	3.668.506.124			55	%	18.020.525.849	54,90	46,21
													Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)			19					88,26	97,19

No	Tujuan/ Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja per Triwulan Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026) (Evaluasi Renstra)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026 (%)	
								I									
1	2	3	4	6		8		9		13=9+10+11+12		14=13/8x100		15=7+13		16=15/6x100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp
Predikat Kinerja : Sangat Rendah																	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%) : 59%																	
Predikat Kinerja : Rendah																	

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang masih 0 (nol) adalah bahwa penyusunan Perubahan Renja 2024 Inspektorat Kota Pontianak merupakan tahun pertama pada periodesasi Renstra 2024-2026 sehingga belum ada realisasi kinerja yang dapat diukur.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 merupakan acuan Inspektorat Kota Pontianak dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Kota Pontianak tahun 2024-2026 yaitu "Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah" dengan indikator tujuan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam wujud pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terukur dan didukung oleh pendanaan yang berasal dari APBD Kota Pontianak.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 disusun sebagai upaya penyesuaian terhadap dinamika pengawasan agar pelaksanaan tugas-tugas pengawasan mampu mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan perubahan-perubahan yang ada di lapangan.

Beberapa perubahan yang dilakukan dalam Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 antara lain perubahan pada output sub kegiatan dan perubahan pada anggaran belanja pegawai.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kota Pontianak Tahun 2025 terdiri dari 3 Program, 11 Kegiatan, 41 Sub Kegiatan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta perubahan outputnya pada tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut.:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025 dan Proyeksi Anggaran Tahun 2026
Inspektorat Kota Pontianak

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
	INSPEKTORAT							17.452.367.000,00	25.006.558.891,00	25.018.750.000,00					10.682.274.000,00	
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							17.452.367.000,00	25.006.558.891,00	25.018.750.000,00					10.682.274.000,00	
	INSPEKTORAT DAERAH							17.452.367.000,00	25.006.558.891,00	25.018.750.000,00					10.682.274.000,00	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 Persen	95 Persen	14.342.701.500,00	20.815.852.891,00	20.313.254.200,00					9.642.591.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	262.455.400,00	93.628.000,00	93.628.000,00			Inspektorat		30.102.000,00	INSPEKTORAT
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				16 Dokumen	16 Dokumen	222.826.000,00	47.535.000,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5.995.000,00	INSPEKTORAT
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.858.600,00	10.643.000,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.261.000,00	INSPEKTORAT
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.952.000,00	10.643.000,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.039.000,00	INSPEKTORAT
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	24.476.400,00	18.501.000,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			18.467.000,00	INSPEKTORAT
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4.342.400,00	6.306.000,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3.340.000,00	INSPEKTORAT

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
											Tengah					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	9.448.420.600,00	10.036.524.891,00	10.036.524.891,00			Inspektorat		7.575.234.000,00	INSPEKTORAT
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	55 Orang/bulan	9.437.367.000,00	10.018.748.891,00	10.018.750.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)			7.570.634.000,00	INSPEKTORAT
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5.526.800,00	8.888.000,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.300.000,00	INSPEKTORAT
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD															
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	5.526.800,00	8.888.000,00	8.888.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.300.000,00	INSPEKTORAT

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
											Tengah					
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	2.179.972.300,00	2.935.517.000,00	2.935.517.000,00			Inspektorat		1.268.232.000,00	INSPEKTORAT
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	55.200.000,00	82.590.000,00	141.590.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			58.090.000,00	INSPEKTORAT
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				46 Orang	110 Orang	2.094.726.300,00	2.850.927.000,00	591.341.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			706.537.000,00	INSPEKTORAT
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan															

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	10 Orang	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			139.219.000,00	INSPEKTORAT
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan															
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				17 Orang	-	30.046.000,00	0,00	0,00	Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-			364.386.000,00	INSPEKTORAT
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	712.576.300,00	1.335.009.400,00	1.335.009.400,00			Inspektorat		272.730.600,00	INSPEKTORAT
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	280.163.100,00	7.933.400,00	7.933.400,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			6.534.200,00	INSPEKTORAT
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	66.444.700,00	83.404.300,00	91.304.300,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			52.568.300,00	INSPEKTORAT
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.423.400,00	30.194.600,00	30.194.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			11.290.500,00	INSPEKTORAT
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	82.500.000,00	82.500.000,00	82.500.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			46.860.000,00	INSPEKTORAT
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	29.477.100,00	29.477.100,00	29.477.100,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			24.469.600,00	INSPEKTORAT
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.500.000,00	INSPEKTORAT
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	24 Laporan	232.068.000,00	1.100.000.000,00	540.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			129.508.000,00	INSPEKTORAT
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	1.043.400.000,00	896.359.200,00	896.359.200,00			Inspektorat		4.682.800,00	INSPEKTORAT
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	123 Unit	1.043.400.000,00	896.359.200,00	1.401.575.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			4.682.800,00	INSPEKTORAT
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	545.571.100,00	593.804.240,00	593.804.240,00			Inspektorat		396.749.600,00	INSPEKTORAT
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	79.140.060,00	182.720.000,00	182.720.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			44.226.000,00	INSPEKTORAT
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	89.250.000,00	22.250.000,00	38.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			56.696.000,00	INSPEKTORAT
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	377.181.040,00	388.834.240,00	404.394.240,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			295.827.600,00	INSPEKTORAT
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	150.305.800,00	4.925.010.160,00	4.925.010.160,00			Inspektorat		94.860.000,00	INSPEKTORAT

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	80.410.000,00	91.500.000,00	91.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			42.510.000,00	INSPEKTORAT
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				58 Unit	60 Unit	48.240.000,00	48.240.000,00	60.430.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			46.350.000,00	INSPEKTORAT
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	13.229.000,00	4.785.270.160,00	6.588.655.660,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5.000.000,00	INSPEKTORAT
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	-	8.426.800,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	-			1.000.000,00	INSPEKTORAT
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-				-	-	1.306.325.500,00	2.439.615.000,00	2.563.992.200,00					497.998.000,00	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-			-	-	885.375.500,00	2.035.005.000,00	2.035.005.000,00			Perangkat Daerah		316.998.000,00	INSPEKTORAT
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah															
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				19 Laporan	19 Laporan	348.650.000,00	1.108.040.000,00	583.140.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			123.450.000,00	INSPEKTORAT
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah															
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				19 Laporan	19 Laporan	182.735.000,00	481.855.000,00	481.855.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			20.950.000,00	INSPEKTORAT

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
											, Semua Kel/Desa					
	Reviu Laporan Kinerja															
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				2 Laporan	2 Laporan	9.420.000,00	64.440.000,00	38.940.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			14.700.000,00	INSPEKTORAT
	Reviu Laporan Keuangan															
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	18.740.000,00	54.530.000,00	54.715.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			17.300.000,00	INSPEKTORAT
	Kerja Sama Pengawasan Internal															

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	5.730.500,00	4.980.000,00	264.317.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			61.448.000,00	INSPEKTORAT
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP															
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	2 Dokumen	320.100.000,00	321.160.000,00	500.695.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			79.150.000,00	INSPEKTORAT
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Terselenggaranya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	-			100 Persen	100 Persen	420.950.000,00	404.610.000,00	404.610.000,00			Perangkat Daerah		181.000.000,00	INSPEKTORAT
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah															

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Laporan	2 Laporan	234.690.000,00	186.740.000,00	272.590.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			110.500.000,00	INSPEKTORAT
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu															
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				15 Laporan	15 Laporan	186.260.000,00	217.870.000,00	367.740.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			70.500.000,00	INSPEKTORAT
3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-				-	-	1.803.340.000,00	1.751.091.000,00	2.141.503.600,00					541.685.000,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-			-	-	6.050.000,00	6.650.000,00	6.650.000,00			Perangkat Daerah		5.775.000,00	INSPEKTORAT

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan															
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	3.025.000,00	3.325.000,00	19.800.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			3.025.000,00	INSPEKTORAT
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan															
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	3.025.000,00	3.325.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			2.750.000,00	INSPEKTORAT
	Pendampingan dan Asistensi	Persentase terlaksananya kegiatan pendampingan dan asistensi	-			100 Persen	100 Persen	1.797.290.000,00	1.744.441.000,00	1.744.441.000,00			Perangkat Daerah		535.910.000,00	INSPEKTORAT
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah															

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	35.400.000,00	31.690.000,00	31.690.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			10.190.000,00	INSPEKTORAT
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi															
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				32 perangkat daerah	32 perangkat daerah	304.430.000,00	623.480.000,00	524.710.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			313.650.000,00	INSPEKTORAT
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi															
		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				4 Kegiatan	4 Kegiatan	1.034.910.000,00	978.351.000,00	1.182.393.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			206.700.000,00	INSPEKTORAT

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
						Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19	20
											a Kel/Desa					
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas															
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				32 perangkat daerah	32 perangkat daerah	422.550.000,00	110.920.000,00	382.910.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			5.370.000,00	INSPEKTORAT
								17.452.367.000,00	**25.006.558.891,00**	**25.018.750.000,00**					**10.682.274.000,00**	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Pontianak tahun 2025 telah merangkum permasalahan seputar tugas-tugas pengawasan seperti kualitas strategi pencapaian sasaran strategis yang kurang optimal, hasil temuan pemeriksaan yang berulang dan kurangnya kompetensi APIP dalam melaksanakan pemeriksaan sebagai penjamin kualitas *(Quality Assurance)* sehingga kualitas pemeriksaan kurang maksimal.

Beberapa isu strategis yang mencul sebagai dampak dari permasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan fungsi Inspektorat sebagai Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) untuk menjaga nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK), manajemen risiko, tindak lanjut atas rekomendasi oleh pengawas internal maupun eksternal, Peningkatan Nilai dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Pengembangan Kemampuan SDM dalam bidang pengawasan (Kapabilitas APIP).

Permasalahan dan isu strategis tersebut telah diformulasikan berdasarkan kaidah dan peraturan-peraturan terkait tugas pengawasan pemerintah daerah sehingga dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Pontianak tahun 2025 telah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pemecahan permasalahan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya yang dimiliki Inspektorat Kota Pontianak, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Pontianak tahun 2025 diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Perangkat Daerah maupun di lingkup Pemerintah Kota.

Akhirnya dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Pontianak tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian tujuan Kota Pontianak 2024-2026 ***"Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)"***

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kasubbag Renkeu	
Analis Perencanaan	

Pontianak, Juni 2025
Inspektur Kota Pontianak

YAYA MAULIDIA, SH, MH, CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19680606 199503 2 003

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Pontianak tahun 2025 telah merangkum permasalahan seputar tugas-tugas pengawasan seperti kualitas strategi pencapaian sasaran strategis yang kurang optimal, hasil temuan pemeriksaan yang berulang dan kurangnya kompetensi APIP dalam melaksanakan pemeriksaan sebagai penjamin kualitas *(Quality Assurance)* sehingga kualitas pemeriksaan kurang maksimal.

Beberapa isu strategis yang mencul sebagai dampak dari permasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan fungsi Inspektorat sebagai Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) untuk menjaga nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK), manajemen risiko, tindak lanjut atas rekomendasi oleh pengawas internal maupun eksternal, Peningkatan Nilai dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Pengembangan Kemampuan SDM dalam bidang pengawasan (Kapabilitas APIP).

Permasalahan dan isu strategis tersebut telah diformulasikan berdasarkan kaidah dan peraturan-peraturan terkait tugas pengawasan pemerintah daerah sehingga dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Pontianak tahun 2025 telah memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pemecahan permasalahan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya yang dimiliki Inspektorat Kota Pontianak, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Pontianak tahun 2025 diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Perangkat Daerah maupun di lingkup Pemerintah Kota.

Akhirnya dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Pontianak tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian tujuan Kota Pontianak 2024-2026 ***"Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)"***

Pontianak, Juni 2025
Inspektur Kota Pontianak

YAYA MAULIDIA, SH, MH, CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19680606 199503 2 003

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PONTIANAK BARAT

TAHUN 2025

(0561) 772324

www.camatbarat.pontianakkota.go.id

Jl.Tabrani Ahmad No. 02

Kelurahan Sungai Jawi Dalam

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, karena berkat rahmat-Nya juga akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2025.

Perubahan Renja ini disusun sebagai respon terhadap kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Pontianak Barat. Penyusunan perubahan dokumen mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan dan tetap mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pontianak.

Untuk itu harapan kami supaya semua pihak dapat mendukung Perubahan Rencana Kerja ini baik itu dari Pemerintah Kota Pontianak sebagai pembina supaya dapat memfasilitasi baik dari segi pendanaan dan dari segi sumber daya manusia untuk selalu dapat membina OPD khususnya Kecamatan Pontianak Barat dalam pelaksanaan kegiatannya. Serta pihak swasta/pengusaha diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan dapat lebih bertanggungjawab sehingga hasil yang dicapai lebih maksimal dan masyarakat sebagai pemanfaat, pengawas dan pemelihara diharapkan juga lebih berperan aktif dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang ada.

Demikian Dokumen Perubahan Rencana Kerja kecamatan Pontianak Barat disusun dengan harapan semoga Allah SWT akan memberikan taufiq dan hidayah-Nya, serta yang direncanakan dapat terealisasi dengan baik yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pontianak, Mei 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang juga berisi rencana pembangunan tahunan daerah, mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD untuk menyiapkan Rencana Kerja SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 277 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Penyusunan Renja Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Barat tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pontianak Barat yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025. Rencana kerja Kecamatan Pontianak Barat merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Pontianak Barat yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kecamatan Pontianak Barat melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Barat dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipasif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Barat mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategi dalam penyelenggaraan pelayanan kinerja Kecamatan :

1. Secara substansi, memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju yang dilaksanakan Kecamatan Pontianak Barat dalam 1 (satu) tahun.
2. Secara normatif, menjadi acuan bagi Kecamatan Pontianak Barat untuk memasukkan program, kegiatan dan sub kegiatan ke dalam KUA-PPAS yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan pada Unsur Kewilayahan.
4. Secara faktual, merupakan salah satu instrumen evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Pontianak Barat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Barat tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja
    - Menilai kinerja pelaksanaan Renja tahun sebelumnya berdasarkan capaian indikator, dan identifikasi tantangan atau masalah yang muncul
2. Identifikasi Perubahan Asumsi dan Kondisi
    - Menganalisis perubahan yang terjadi, baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan renja
    - Menilai dampak perubahan tersebut terhadap target, sasaran dan program pembangunan
3. Perumusan Rancangan Perubahan
    - Menyesuaikan program, kegiatan dan anggaran berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi perubahan
    - Koordinasi dengan seksi-seksi dan kelurahan se-Kecamatan Pontianak Barat
4. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja
    - Mengintegrasikan hasil perumusan rancangan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RKPD dan Renstra
    - Masukan dari pelaksana kegiatan di Kecamatan Pontianak Barat
5. Konsultasi Publik
    - Menerima masukan dan saran dari berbagai pihak untuk perbaikan rancangan

6. Penetapan Perubahan Renja
    - Melakukan penetapan perubahan Renja melalui Peraturan Kepala Daerah atau instansi terkait

Pada Tahun 2025 Kecamatan Pontianak Barat mengharapkan dapat terakomodirnya semua Program dan Kegiatan dalam KUA-PPAS dan penetapan APBD Tahun 2025, sehingga akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Pontianak Barat mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dibahas dalam forum OPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan. Sebagai gambaran umum, Kecamatan Pontianak Barat adalah salah satu perangkat daerah Kota Pontianak yang memiliki luas wilayah 1682 Ha atau 33,00% dari luas keseluruhan Kota Pontianak dan terbagi menjadi 4 kelurahan, yaitu Kelurahan Sungai jawi Dalam, Kelurahan Sungai jawi Luar, Kelurahan Sungai Beliung, Kelurahan Pallima berdasarkan data dari 4 Kelurahan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak per Semester I tahun 2023 jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Pontianak Barat adalah sebanyak 151.008 jiwa atau 22,34 persen dari total jumlah penduduk.

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban pemerintahan, Kecamatan Pontianak Barat sebagai salah satu perangkat daerah Kota Pontianak mengacu pada Peraturan

Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata kerja Kecamatan kota Pontianak.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Pontianak.secara umum, dapat diketahui bahwa tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum, pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
17. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
19. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 79).
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2024 2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 40)

22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 10).
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen Perubahan Rencana Kerja dengan Rencana Strategi serta dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan urusan Kecamatan Pontianak Barat berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Adapun tujuan dari disusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2025 adalah:

1. Program-program prioritas dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 serta mengacu kepada agenda jangka menengah Provinsi dan Nasional, yang selanjutnya menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;
2. Menyiapkan rancangan arah pembangunan tahunan sebagai acuan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dalam periode tahun 2024-2026 dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Pontianak;

3. Untuk memasukan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja ke dalam kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2025 sehingga menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada kantor Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2025.
4. Merumuskan rancangan kerangka perekonomian Kecamatan serta pembiayaan pembangunan di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak untuk periode Tahun 2025;
5. Menetapkan rumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Pontianak Barat Kota pontianak dalam bentuk program-program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Indikator kinerja tersebut selanjutnya menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota, serta tolok ukur penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;
6. Menyiapkan instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Pontianak Barat tahun 2025 sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan setiap tahunnya dapat tercapai dengan baik.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum Penyusunan

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Tahun Anggaran 2025 terdiri dari 5 (lima) Program, 14 kegiatan dan 36 sub kegiatan.

Dari 5 (lima) Program tersebut ada 4 (empat) program yang masuk dalam Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dalam Renstra yaitu :

- **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
  1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
     - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
  2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak di Laksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan
     - Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada publik di Wilayah Kecamatan

Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%	%	%
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terhadap Layanan Kepada Masyarakat	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.080.974.900	1.080.974.900	100	100	0

- **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
  1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
     - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
  2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan

Sasaran Strategi	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%	%	%
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.129.977.900	1.114.628.000	98,64	98,64	1,35

- **Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sasaran Strategi	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%	%	%
Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Terhadap Layanan Masyarakat	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	42.826.400	41.306.000	96,45	96,45	3,55

- **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional.

Dari Sub kegiatan masing-masing Program/kegiatan hasil keluaran sesuai dengan target yang ditetapkan karena jika ditelaah kegiatan/subkegiatan berjalan

sesuai dengan Rencana Anggaran Kas yang di tentukan awal tahun sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Sehingga anggaran yang di sediakan di tahun 2024 dapat terserap secara maksimal. Namun Kecamatan Pontianak Barat tetap membuat prioritas kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat di lingkungan Kecamatan dengan acuan efisiensi anggaran.

Sub Bab ini memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pontianak Barat berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam RPJMD Kota Pontianak dan/atau Renstra Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2025-2030 dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hasil analisis dimasukkan ke dalam tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pontianak Barat yang disesuaikan.

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 merupakan tahun kedua dari renstra perangkat daerah periode 2024 – 2026.

Beberapa kali perubahan regulasi tentang nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan, dan satuannya menjadi salah satu kendala dalam perhitungan realisasi dan capaian. Misalnya setelah menetapkan indikator dan satuan pada saat penyusunan dokumen renstra, ternyata tahun berikutnya keluar aturan baru yang mewajibkan perubahan indikator dan satuan. Akibatnya terjadi tidak sinkronan antara perencanaan dan evaluasi.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026 sudah mengacu kepada keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

Tabel II.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024 -2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)2023	Realisasi Renja Perangkat Daearah Tahun (n-2) 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	01				KECAMATAN									
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	360 %					-	-	
7	01	01	2.01		**Perancanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat**	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kineja Perangkat Daerah	360 %					-	-	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39 dokumen					13 dokumen	13 dokumen	33,33
7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 dokumen					2 dokumen	2 dokumen	33,33
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 dokumen					2 dokumen	2 dokumen	33,33
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	24 laporan					8 laporan	8 laporan	33,33

					Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan					4 laporan	4 laporan	33,33
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat daerah	360 %					-	-	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan Tunjangan AS	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	150 orang					50 orang	50 orang	33,33
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024 -2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)2023	Realisasi Renja Perangkat Daearah Tahun (n-2) 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	36 laporan					12 laporan	12 laporan	33,33
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan lapaoran Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuanan akhir tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi penyusunan laporan	3 laporan					1 laporan	1 laporan	33,33
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporran keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuanan bulanan /triwulan/semesteran SKPD	54 laporan					18 laporan	18 laporan	33,33
7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase pengelolaan dministrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	360 %					-	-	

7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 paket					2 paket	2 paket	33,33
7	01	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan adminisstrasi kepegawaian perangkat daerah	360 %					-	-	
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	6 paket					2 paket	2 paket	33,33
7	01	01	2,05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	12 orang					4 orang	4 orang	33,33
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase pemenuhan adminitrasi umum perangkat daerah	360 %					-	-	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	36 paket					12 paket	12 paket	33,33
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	36 paket					12 paket	12paket	33,33
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	36 paket					12 paket	12 paket	33,33
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024 -2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)2023	Realisasi Renja Perangkat Daearah Tahun (n-2) 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Penyediaan bahan logistik kantor yang disediakan	36 paket					12 paket	12 paket	33,33
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pnggandaan yang disediakan	36 paket					12 paket	12 paket	33,33

7	01	01	2.06	0006	Penyediaaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peerundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	36 dokumen					12 dokumen	12 dokumen	33,33
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsutasi	12 laporan					4 laporan	4 laporan	33,33
7	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase penyediaan barang milik daerah penujang urusan pemerintah daerah	360 %					-	-	
7	01	01	2.07	0002	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesian lainnya yang disediakan	30 unit					10 unit	10 unit	33,33
7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	360 %					-	-	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 laporan					12 laporan	12 laporan	33,33
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36 laporan					12 laporan	12 laporan	33,33
7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	360 %					-	-	
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Pajak Kendaraaan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	54 unit					18 unit	18 unit	33,33
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	80 unit					30 unit	30 unit	37,5
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024 -2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)2023	Realisasi Renja Perangkat Daearah Tahun (n-2) 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan	Tingkat Capaian Realisasi Target			Realisasi Capaian Program dan	Tingkat Capaian Realisasi Target

									Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2024	Renstra (%)			Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2024	Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipeliharanya	125 unit					45 unit	45 unit	36
7	01	01	2.09	011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit					1 unit	1 unit	33,33
7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Persentase penyelesaian layanan publik di kecamatan dan kelurahan	360 %					-	-	
7	01	02	2.01		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan	360 %					-	-	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/ sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	3 laporan					1 laporan	1 laporan	33,33
7	01	02	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Tiak Dolaksanakan oleh Unir Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan**	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan publik yang dilimpahkan di Kecamatan	360 %					-	-	
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	216 laporan					72 laporan	72 laporan	33,33
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024 -2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	

									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)2023	Realisasi Renja Perangkat Daearah Tahun (n-2) 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		360%					-	-	
7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan di Kecamatan	360 %					-	-	
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peninkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	21 laporan					7 laporan	7 laporan	33,33
7	01	03	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	360 %					-	-	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	48 laporan					16 laporan	16 laporan	33,33
7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase koordinasi penanganan gangguan trantibum	360%							
7	01	04	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Persentase terlaksananya koordinasi gangguan trantubum yang dapat diselesaikan	360%					-	-	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peratuarn Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase terlaksananya koordinasi gangguan trantubum yang dapat diselesaikan	177 laporan					57 laporan	57 laporan	32,2
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian	Realisasi Target Kinerja	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2023			Target Program dan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	

					Program Kegiatan dan Sub Kegiatan		Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024 -2026	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) 2022				Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) 2024	Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)2023	Realisasi Renja Perangkat Daearah Tahun (n-2) 2023	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase koordinasi penyelengaraan urusan pemerintahan umum	360%					-	-	
7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	360%					-	-	
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan bangsa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	2.250 orang					750 orang	750 orang	33,33
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat beragama, Ras dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional dan nasional	2370 orang					790 orang	790 orang	33,33

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel II.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Pontianak

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pontianak Barat

No	Indikator	SPM /standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
1	Indeks Kepuasan Masyarakat			Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1) Sangat Baik	Tahun 2025 (n) Sangat Baik	Tahun 2026 (n+1) Sangat Baik	Tahun 2023 (n-2) Sangat Baik	Tahau 2024 (n-1) Sangat Baik	Tahun 2025 (n) Sangat Baik	Tahun 2026 (n+1) Sangat Baik	
	Persentase Penyelesaian Laporan Publik di Kecamatan dan Kelurahan			90	95	95	95	90	95	95	95	
	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			90	95	95	95	90	95	95	95	
	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantubum			90	95	95	95	90	95	95	95	
2	Indeks Gotong Royong			90	95	95	95	90	95	95	95	
	Persentase Lembaga/ masyarakat yang Aktif			90	95	95	95	90	95	95	95	

No	Indikator	SPM /standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
3	Persentase Partisipasi Masyarakat			90	95	95	95	90	95	95	95	
	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan			90	95	95	95	90	95	95	95	

2. 3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal
   - Adanya dukungan dan komitmen antara atasan dan bawahan
   - Adanya dukungan dana operasional penunjang kegiatan
   - Belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi pembinaan, pelayanan dan pelaksanaan lainnya
   - Belum optimalnya kuantitas dan kualitas infrastruktur
   - Masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di kecamatan
   - Rentannya kerusakan lingkungan akibat drainase yang kurang lancar
2. Lingkungan Eksternal
   - Adanya hubungan kemasyarakat yang terjalin cukup baik mempengaruhi situasi yang kondusif
   - Menurunnya daya beli masyarakat yang berakibat kepada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat
   - Ketidakstabilan perekonomian masyarakat

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan berbagai cara

diantaranya dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) sebagai sebuah rangkaian cara untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan yang akan ditetapkan. Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi ada beberapa permasalahan/kendala atau isu-isu di Kecamatan Pontianak Barat, sebagai berikut :

1. Sekretariat Kecamatan
   a) Kurangnya pegawai di Kecamatan dan Kelurahan
   b) Meningkatkan pembinaan Apararturpegawai di Kecamatan dan Kelurahan
   c) Fasilitasi kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan
   d) Memperoleh data yang cepat dan tepat untuk penyusunan laporan di Kecamatan dan Kelurahan
2. Seksi Pemerintahan
   a) Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan umum
   b) Kesadaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan masih rendah
   c) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
   a) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
   b) Belum terakomodirnya semua usulan masyarakat
   c) Meningkatkan sektor ekonomi lokal
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
   a) Belum tertata rapinya pedagang informal (PKL)
   b) Pengetahuan tentang peraturan yang berlaku masih rendah

Dari beberapa permasalahan/kendala atau isu-isu berdasarkan tugas pokok dan fungsi , maka ditetapkanlah isu strategis Kecamatan pontianak Barat tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Issu-issu Strategis Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak

Tahun 2024 – 2026

NO	ISSUE STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1	Pengelolaan Keuangan Daerah	• Perlu mendapatkan perhatian dalam aspek pengelolaan keuangan adalah tata kelola aset-aset daerah dalam hal ini aset aset di Kecamatan yang dirasa saat ini masih jauh dari kata optimal. Tata kelola aset ini menyangkut aspek manajemen data dan informasi aset-aset yang ada serta optimalisasi pemanfaatannya bagi pelayanan prima kepada publik
2	Pelayanan Publik	• Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan umum perlu ditingkatkan. • Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah perlu ditingkatkan. • Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan (kantor camat dan lurah)
3.	Kemiskinan Ekstrim	• Kecamatan/kelurahan menjadi lokus penanggulangan kemiskinan ekstrim
4.	Perubahan Iklim	• Perlu adanya peningkatan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim (ketahanan iklim)
5	Stunting	• Prioritas Penanganan stunting di masing-masing kelurahan khususnya yang ditetapkan pada lokus stunting
6 7	Kesehatan Sarana Pendidikan	• Mengeliminasi hiv/aids, TBC, dan malaria pada Tahun 2030 • Belum terpenuhinya sarana pendidikan yang sesuai dengan standar
8	Kelembagaan Masyarakat	• Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan
9	Sektor Pedagang Informal (PKL)	• Penataan pedagang kaki lima (PKL) • Keterlibatan tokoh masyarakat agar sering dilakukan untuk koordinasi • Perlu penataan terhadap jalan akses masuk, ketertiban pedagang informal maupun areal perparkiran di Wilayah Waterfront

NO	ISSUE STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
		• Penataan kembali beberapa Taman Bermain dan Ruang Terbuka Hijau • Peningkatan Fasilitas Ekonomi Kreatif • Penggalian potensi Kecamatan di bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif
10.	Kualitas Lingkungan Hidup	• Rendahnya cakupan layanan persampahan • Masih kurangnya kesadaran serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah • Meningkatnya jumlah penduduk dan perumahan yang mengakibatkan berkurangnya ruang terbuka hijau.
11	Peningkatan infrastrukstur jalan, drainase dan fasilitas umum di Kecamatan	• Penyaluran bantuan material di wilayah yang belum tertangani oleh PD Teknis
12	Kepadatan jumlah penduduk	• Tidak meratanya sebaran penduduk di setiap kecamatan
13	Penanganan Kawasan Kumuh Pinggiran Sungai	• Penanganan kawasan kumuh di beberapa kecamatan yang berada di pinggiran sungai

Untuk menindaklanjuti perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025 Kecamatan Pontianak Barat mengacu pada Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator utama dengan Meningkatkan Kualitas Layanan Publik serta membuat prioritas kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat Kecamatan dengan acuan efisiensi anggaran.

Tujuan meningkatnya kualitas layanan kepada publik dengan indikator sasaran adalah Indek Kepuasan Masyarakat yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pontianak Barat Periode 2024-2026 adalah :

- Sasaran 1

  Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan dengan Indikator :

  1. Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (didalamnya memuat pertanyaan tentang layanan trantib)
- Sasaran 2

Terwujudnya Masyarakat Kecamatan yang berdaya untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat di ukur dengan indikator :

1. Indek Gotong Royong
2. Persentase Partisipasi masyarakat

Tabel II.3

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik
		Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (didalamnya termuat tentang pertanyaan layanan transtib)	Sangat Baik
		Terwujudnya Masyarakat Kecamatan yang Berdaya	Indeks Gotong Royong	95%
			Persentase Partisipasi Masyarakat	95%

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2025

Program pada Rancangan Kerja Pembangunan Daerah sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota
- Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Proses perbandingan antara rancangan awal dan hasil kebutuhan harus di lakukan karena untuk melihat riil dari penggunaan pagu anggaran, sehingga ketika tahun berjalan anggaran tidak mengalami bias sehingga sulit untuk dipertanggungjawabkan.

Tujuan meningkatnya kualitas layanan kepada publik dengan indikator sasaran adalah Indek Kepuasan Masyarakat yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pontianak Barat Periode 2024-2026 adalah :

- Sasaran 1

  Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan dengan Indikator :

  1. Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (didalamnya memuat pertanyaan tentang layanan trantib)
- Sasaran 2

  Terwujudnya Masyarakat Kecamatan yang berdaya untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat di ukur dengan indikator :

  1. Indek Gotong Royong
  2. Persentase Partisipasi Masyarakat

Tabel II.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Pontianak

Kecamatan Pontianak Barat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	7.01.01										
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Pontianak Barat	Tingkat kepuasan Bidang terhadap pelyanan kesekretariatan	95%	9.063.491.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Pontianak Barat	Tingkat kepuasan Bidang terhadap pelyanan kesekretariatan	95%	9.063.491.000	
	7.01.01.2.01					7.01.01.2.01					
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan perenanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	95%	35.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan perenanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	95%	35.000.000	
	7.01.01.01.2.01.0001					7.01.01.01.2.01.0001					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	13 dok	9.538.250	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	13 dok	9.538.250	
	7.01.01.2.01.0002					7.01.01.2.01.0002					
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 dok	8.755.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 dok	8.755.000	
	7.01.01.2.01.0003					7.01.01.2.01.0003					
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	2 dok	3.994.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	2 dok	3.994.000	
	7.01.01.2.01.0006					7.01.01.2.01.0006					
	Koordinasi dan Penyusnan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 lap	6.920.000	Koordinasi dan Penyusnan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 lap	6.920.000	
	7.01.01.2.01.0007					7.01.01.2.01.0007					
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 lap	5.792.740	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 lap	5.792.740	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.02					7.01.01.2.02					
2.	Adminsitrasi Keuangan Perangkat daearah		Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	95%	6.994.682.000	Adminsitrasi Keuangan Perangkat daearah		Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	95%	6.994.682.000	
	7.01.01.2.02.0001					7.01.01.2.02.0001					
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN		Jumkah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	50 0rang	5.558.623.000	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN		Jumkah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	50 orang	5.558.623.000	
	7.01.01.2.02.0003					7.01.01.2.02.0003					
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dok	742.920.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 dok	742.920.000	
	7.01.01.2.02.0005					7.01.01.2.02.0005					
	Koordinasi dan Penyususnan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jummlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 lap	2.135.000	Koordinasi dan Penyususnan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jummlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 lap	2.135.000	
	7.01.01.2.02.0007					7.01.01.2.02.0007					
	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laoran koordinasi penyusunan laporan keuangan buanan/triwulan/semesteran SKPD	18 lap	18.600.000	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laoran koordinasi penyusunan laporan keuangan buanan/triwulan/semesteran SKPD	18 lap	18.600.000	
	7.01.01.2.03					7.01.01.2.03					
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	95%	1.980.000	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	95%	1.980.000	
	7.01.01.2.03.0001					7.01.01.2.03.0001					
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	2 paket	1.980.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang Milik daerah SKPD		Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	2 paket	1.980.000	
	7.01.01.2.05					7.01.01.2.05					
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95%	99.080.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95%	99.080.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.05.0002					7.01.01.2.05.0002					
	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	2 paket	96.860.000	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	2 paket	96.860.000	
	7.01.01.2.05.0011					7.01.01.2.05.0011					
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4 orang	50.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	4 orang	50.000.000	
	7.01.01.2.06					7.01.01.2.06					
5	Administrasi Umum Perangkat daerah		Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	95%	446.450.225	Administrasi Umum Perangkat daerah		Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	95%	446.450.225	
	7.01.01.2.06.0001					7.01.01.2.06.0001					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 paket	70.973.225	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 paket	70.973.225	
	7.01.01.2.06.0002					7.01.01.2.06.0002					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 paket	150.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 paket	150.000.000	
	7.01.01.2.06.0003					7.01.01.2.06.0003					
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Penyediaan peralatan rumah tangga	12 paket	54.410.000	Penyediaan Peraltan Rumah Tangga		Penyediaan peralatan rumah tangga	12 paket	54.410.000	
	7.01.01.2.06.0004					7.01.01.2.06.0004					
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Penyediaan bahan logistik kantor	60 paket	104.467.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Penyediaan bahan logistik kantor	60 paket	104.467.000	
	7.01.01.2.06.0005					7.01.01.2.06.0005					
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	60 paket	136.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	60 paket	136.000.000	
	7.01.01.2.06.0006					7.01.01.2.06.0006					
	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 lap	19.600.000	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 lap	19.600.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.06.0009					7.01.01.2.06.0009					
	Peneyelnggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 lap	50.000.000	Peneyelnggaraan rapt Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 lap	50.000.000	
6.	7.01.01.1.07					7.01.01.1.07					
	Pengadaan Barang Milik Darah Penunjang Urusan Perangkat daerah		Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan prangkat deaerah	95%	300.000.000	Pengadaan barang Milik Darah Penunjang Urusan Perangkat daerah		Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan prangkat deaerah	95%	300.000.000	
	7.01.01/2/07.0006					7.01.01/2/07.0006					
	Pengadaan Peraltaan dan Mesin lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 unit	300.000.000	Pengadaan Peraltan dan Mesin lainnya		Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 unit	300.000.000	
7.	7.01.01.2.08					7.01.01.2.08					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah		Persentase penyediaan jasa penunjnag urusan pemerintah daerah	95%	1.056.620.075	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah		Persentase penyediaan jasa penunjnag urusan pemerintah daerah	95%	1.056.620.075	
	7.01.01.2.08.02					7.01.01.2.08.02					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediaka	12 lap	252.003.836	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik		Jumlah laporan penyediaan jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediaka	12 lap	252.003.836	
	7.01.01.2.08.0004					7.01.01.2.08.0004					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor		Jumkah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 lap	808.340.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor		Jumkah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 lap	808.340.000	
8.	7.01.01.2.09					7.01.01.2.09					
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	95%	239.678.700	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	95%	239.678.700	
	7.01.01.2.09.0001					7.01.01.2.09.0001					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dadn pajak Kebdaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	18 unit	278.200.000	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dadn pajak Kebdaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	18 unit	278.200.000	
	7.01.01.2.09.0005					7.01.01.2.09.0005					
	Pemeliharaan Mebel		Jumkah mebel yang dipelahara	30 unit	100.000.000	Pemeliharaan Mebel		Jumkah mebel yang dipelahara	30 unit	100.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.01.2.09.0006					7.01.01.2.09.0006					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah perslatan dan mesin lainnya yang dipelihara	45 unit	112.478.700	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah perslatan dan mesin lainnya yang dipelihara	45 unit	112.478.700	
	7.01.01.2,09.0009					7.01.01.2,09.0009					
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	120.900.239	Pemeliharaan/ rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	120.900.239	
2	7.01.02					7.01.02					
	PROGRAM PENYELEMGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelesaian lauanan publik di Kecamatan dan Keluarahan	95%	1.168.500.000	PROGRAM PENYELEMGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelesaian lauanan publik di Kecamatan dan Keluarahan	95%	1.168.500.000	
	7.01.02.2.01					7.01.02.2.01					
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di ingkat Kecamatan		Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	95%	70.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di ingkat Kecamatan		Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	95%	70.000.000	
	7.01.02.2.01.0001					7.01.02.2.01.0001					
	Koordinassi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dn pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	1 lap	70.000.000	Koordinassi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dn pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan Perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	1 lap	70.000.000	
	7.01.02.2.02					7.01.02.2.02					
	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan		Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan publik yang dilimpahkan di Kecamatan	95%	1.098.500.000	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan		Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan publik yang dilimpahkan di Kecamatan	95%	1.098.500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.02.2.02.0003					7.01.02.2.02.0003					
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada masyarakat di Wilayah kecamatan		Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	72 lap	1.098.500.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada masyarakat di Wilayah kecamatan		Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	72 lap	1.098.500.000	
3	7.01.03					7.01.03					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga/ masyarakat yang aktif	95%	1.350.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase lembaga/ masyarakat yang aktif	95%	1.350.000.000	
	7.01.03.2.01					7.01.03.2.01					
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan di Kecamatan	95%	70.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan di Kecamatan	95%	70.000.000	
	7.01.03.2.01.03					7.01.03.2.01.03					
	Peningkatan Efektfitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	7 laporan	70.000.000	Peningkatan Efektfitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	7 laporan	70.000.000	
	7.01.03.2.02					7.01.03.2.02					
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	95%	1.280.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	95%	1.280.000.000	
	7.01.03.2.02.0001					7.01.03.2.02.0001					
	Peningkatan Parisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	4 lap	160.000.000	Peningkatan Parisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	4 lap	160.000.000	
	7.01.03.2.02.0002					7.01.03.2.02.0002					
	Pembangunan sarana dan Prasaran Kelurahan		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	16 unit	120.000.000	Pembangunan sarana dan Prasaran Kelurahan		Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	16 unit	120.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	7.01.03.2.02.0003					7.01.03.2.02.0003					
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	16 pokmas/ ormas	920.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	16 pokmas/ormas	920.000.000	
	7.01.03.2.02.0004					7.01.03.2.02.0004					
	Evaluasi Kelurahan		Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	16 lap	80.000.000	Evaluasi Kelurahan		Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	16 lap	80.000.000	
4	7.01.04					7.01.04					
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan gangguan trantibum	95%	120.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan gangguan trantibum	95%	120.000.000	
	7.01 04. 2.02					7.01 04. 2.02					
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase terlaksananya koordinasi gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	95%	120.000.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase terlaksananya koordinasi gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	95%	120.000.000	
	7.01.04.2.02.0001					7.01.04.2.02.0001					
	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Repiblik Indonesia	60 lap	120.000.000	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Repiblik Indonesia	60 lap	120.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	7.01.05					7.01.05					
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM		Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	95%	540.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM		Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	95%	540.000.000	
	7.01.05.2.01					7.01.05.2.01					
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	95%	540.000.000	Koordinasi penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	95%	540.000.000	
	7.01.05.2.01.0003					7.01.05.2.01.0003					
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	750 orang	80.000.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	750 orang	80.000.000	
	7.01.05.2.01.0004					7.01.05.2.01.0004					
	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra suku, Umat Beraganma, Ras dan Golongan lainnya Guna mewujudkan Stabilitas keamanan Lokal, Regional dan Nasional		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku dan Intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	790 rang	460.000.000	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra suku, Umat Beraganma, Ras dan Golongan lainnya Guna mewujudkan Stabilitas keamanan Lokal, Regional dan Nasional		Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku dan Intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	790 0rang	460.000.000	
					12.241.991.000					12.241.991.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk usulan program dan kegiatan tahun anggaran 2025, setiap kelurahan mengadakan musrenbang yang kemudian dirangkum usulan dari 4 kelurahan tersebut yaitu Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kelurahan Sungai Beliung dan Kelurahan Pallima.

Selanjutnya Kecamatan Pontianak Barat mengadakan Musrenbang untuk membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan. Tujuannya agar aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi kedalam proses perencanaan untuk tahun berikutnya yang dilakukan Pemerintah Kota Pontiannak

Tabel II.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
(POKIR)

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan/Rincian Pokir	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-	-	-	-
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	-
	Subkegiatan : Pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	-
1	Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	Jln. Tabrani Ahmad Komplek Pondok Camar, Kota Pontianak	Pembuatan saluran Drainase	200 meter	*Tidak diakomodir*
2	Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	Jln. H. Rais A. Rahman Gg. Kini Balu , Kota Pontianak	Pekerjaan pengaspalan	200 meter	*Tidak diakomodir*
3	Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	Jln Karya Tani , Kota Pontianak	Pembuatan saluran Drainase	100 meter	*Tidak diakomodir*

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan/Rincian Pokir	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
4	Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	Jln. Berdikari 1 , Kota Pontianak	Pekerjaan pengaspalan	100 meter	*Tidak diakomodir*
5	Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	Jl. Apel Gg. Apel 1 , Kota Pontianak	Pekerjaan pengaspalan	150 meter	*Tidak diakomodir*
6	Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	Jln. Husien Hamzah, Komplek Manday Lestari Permai , Kota Pontianak	Pembuatan saluran Drainase	150 meter	*Tidak diakomodir*
7	Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	Jln. Tanggul Dalam Gg. Madrasah1 , Kota Pontianak	Pembuatan saluran Drainase	150 meter	*Tidak diakomodir*
8	Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	Jln. Nipah Kuning Gg. Madrasah 1 , Kota Pontianak	Pekerjaan rapat beton	200 meter	*Tidak diakomodir*
9	Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	Jln. Komyos Sudarso Gg. Ilham , Kota Pontianak	Pekerjaan rapat beton	150 meter	*Tidak diakomodir*
10	Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	Jln. Martadinata Gg. Sentosa , Kota Pontianak	Pekerjaan pengaspalan dan beton	200 meter	*Tidak diakomodir*
11	Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	Jln. Komyos Sudarso Gg. Kuini 1 , Kota Pontianak	Pembuatan Jalan Pengecoran	150 meter	*Tidak diakomodir*

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan/Rincian Pokir	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
12	Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	Jln. Komyos Sudarso Gg. Gotong Royong 1 , Kota Pontianak	Pekerjaan rapat beton	200 meter	*Tidak diakomodir*
13	Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	Jln. Apel Gg. Semangka , Kota Pontianak	Pekerjaan pengaspalan	150 meter	*Tidak diakomodir*
14	Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	Jln. Komyos Sudarso Gg. Kayu Manis , Kota Pontianak	Pekerjaan pengaspalan	150 meter	*Tidak diakomodir*
15	Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	Jln. Komyos Sudarso Gg. Palawija 1 , Kota Pontianak	Pembuatan Jalan Pengecoran	150 meter	*Tidak diakomodir*
16	Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	JL. H. RAIS A RAHMAN GG. KELUARGA, Kota Pontianak	Pekerjaan Pengaspalan	150 meter	*Tidak diakomodir*
17	Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	JL. H RAIS A RAHMAN GG. GUNUNG LAWIT , Kota Pontianak	Pekerjaan Pengaspalan	150 meter	*Tidak diakomodir*
18	Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	JL. H. RAIS A RAHMAN GG. SEKAWAN , Kota Pontianak	Pekerjaan Drainase	200 meter	*Tidak diakomodir*
19	Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	JL H RAIS A RAHMAN GG. HARAPAN , Kota Pontianak	Pekerjaan Pengaspalan	150 meter	*Tidak diakomodir*

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan/Rincian Pokir	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
20	Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	JL. APEL KOMPLK PEMDA , Kota Pontianak	Pekerjaan Drainase	200 meter	*Tidak diakomodir*
21	Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	JL. PEMBANGUNAN KOMPLK DELYSA , Kota Pontianak	Pekerjaan Drainase	150 meter	*Tidak diakomodir*
22	Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	JL. KOM YOS SUDARSO GG. DURIAN 1 , Kota Pontianak	Pekerjaan Pengaspalan	150 meter	*Tidak diakomodir*
23	Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	JL. KOM YOS SUDARSO YUKA JALUR 4 LAUT , Kota Pontianak	Pekerjaan Rabat Beton	200 meter	*Tidak diakomodir*
24	Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	JL. KARET GG. KARET JAYA , Kota Pontianak	Pekerjaan Pengaspalan	150 meter	*Tidak diakomodir*
25	Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	JL. HUSEIN HAMZAH KOMP DIDIS PERMAI 8 , Kota Pontianak	Pekerjaan Drainase	200 meter	*Tidak diakomodir*
26	Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	JL. TEBU GG. MAKMUR , Kota Pontianak	Pekerjaan Pengaspalan	150 meter	*Tidak diakomodir*
27	Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	JL. TEBU GG BERSAMA 1C , Kota Pontianak	Pekerjaan Drainase	200 meter	*Tidak diakomodir*

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan/Rincian Pokir	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
28	Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	JL. TEBU GG. ILHAM , Kota Pontianak	Pekerjaan Rabat Beton	200 meter	*Tidak diakomodir*
29	Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	JL. APEL GG PISANG RAJA , Kota Pontianak	Pekerjaan Pengaspalan	150 meter	*Tidak diakomodir*
30	Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	JL. KOMYOS SUDARSO GG BUNGA , Kota Pontianak	Pekerjaan Drainase	150 meter	*Tidak diakomodir*
31	Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	JL HUSEIN HAMZAH GG ASSALAM , Kota Pontianak	Pekerjaan Drainase	150 meter	*Tidak diakomodir*
32	Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	JL HUSEIN HAMZAH GG HIKMAH , Kota Pontianak	Pekerjaan Drainase	200 meter	*Tidak diakomodir*
33	Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	JL . H RAIS ARAHMAN GG GUNUNG PRAMAS , Kota Pontianak	Pekerjaan Drainase	150 meter	*Tidak diakomodir*
34	Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	JL . KOMYOS SUDARSO GG. JAGUNG , Kota Pontianak	Pekerjaan Pengaspalan	150 meter	*Tidak diakomodir*
35	Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	JL . KOMYOS SUDARSO GG. JAGUNG , Kota Pontianak	Pekerjaan Pengaspalan	200 meter	*Tidak diakomodir*

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan/Rincian Pokir	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
36	Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	Jl. Padat Karya Gg. Puring Lestari , Kota Pontianak	Pekerjaan Rabat Beton/Pengaspalan	200 meter	*Tidak diakomodir*
37	Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	Jl. Padat Karya Gg. Anugrah Ujung , Kota Pontianak	Pekerjaan Rabat Beton/Pengaspalan	200 meter	*Tidak diakomodir*
38	Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	RT.003/RW.010, KEL.SUNGAI JAWI LUAR, PONTIANAK BARAT, Kota Pontianak	PEMBUATAN STEIGHER TEPI SUNGAI UNTUK PUSAT BERJUALAN KULINER WARGA RT.003/RW.010, KEL. SUNGAI LUAR # PAGU = 200 JUTA	1 paket	*Tidak diakomodir*
39	Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	Jl. Muhammad Sa'ad Aim Gg. Kaca Piring RT 002 RW 023 Kel. S. Jawi Luar, Kota Pontianak	Pekerjaan Pengaspalan	200 meter	*Tidak diakomodir*

Tabel II.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
(ASMAS)

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan/Rincian Asmas	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
	KELURAHAN SUNGAI JAWI DALAM	-	-	-	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	-
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	-
1	Bantuan Sarana dan Prasarana Sanggar Budaya Lingkup Kelurahan	Jl. Puskesmas Pal III RT.001/RW.023, Kel. S.Jawi Dalam Kota Pontianak	Pengecoran Lapangan Badminton	P=20m, L=9m, Dalam=20cm	*Diakomodir*
	KELURAHAN SUNGAI JAWI LUAR	-	-	-	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	-
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	-
2	Fasilitasi Kegiatan Forum Anak Kelurahan	Kelurahan S.Jawi Luar	Bantuan Alat Kesenian Tradisional/ Pakaian Seraga mKelompok Kesenian dan Sound System		*Diakomodir*

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan/Rincian Asmas	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
3	Bantuan Sarana dan Prasarana Sanggar Budaya Lingkup Kelurahan	Lingkungan RW 018 Kelurahan S.Jawi Luar Kec. Pontianak Barat	Bantuan Alat Kesenian Tradisional/ Pakaian Seragam Kelompok Kesenian		*Diakomodir*
4	Bantuan Sarana dan Prasarana Sanggar Budaya Lingkup Kelurahan	Lingkungan RW. 020 Kelurahan S. Jawi Luar Kec. Pontianak Barat	Bantuan Alat Kesenian Tradisional/ Pakaian Seragam Kelompok Kesenian		*Diakomodir*
5	Bantuan Sarana dan Prasarana Sanggar Budaya Lingkup Kelurahan	Lingkungan RW. 028 Kelurahan S. Jawi Luar Kec. Pontianak Barat	Bantuan Alat Kesenian Tradisional/ Pakaian Seragam Kelompok Kesenian, Pengeras Suara Hadrah, Qasidah		*Diakomodir*
6	Fasilitasi Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana di Lingkungan Perumahan	Lingkungan RW. 006 Kel. S.Jawi Luar Kec. Pontianak Barat	Fasilitasi Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana di Lingkungan Perumahan		*Diakomodir*

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra. Sedangkan Rencana Kerja Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang akan di implementasikan ke dalam Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (RAPBD) Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2025.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Perubahan Rencana Kerja kecamatan Pontianak Barat Tahun 2025 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Barat merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu 1 Tahun 2025, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Suistainable Development Goals (SDG's). Perencanaan pembangunan daerah tersebut dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana Organisasi perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan telah mendapatkan legalisasi dan jaminan bahwa paling sedikit

30% dari Usulan Musrenbang akan diakomodasi dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.Telaahan terhadap kebijakan pembangunan daerah baik ditingkat pusat maupun Provinsi, merupakan masukkan bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2025, dimana baik kebijakan di tingkat pusat, tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten diharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Pontianak Barat dapat menyentuh sasaran yang tepat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai tujuan strategis untuk kurun satu sampai tiga tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Agar dapat diukur keberhasilan suatu Organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur melalui :

Tujuan meningkatnya kualitas layanan kepada publik dengan indikator sasaran adalah Indek Kepuasan Masyarakat yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pontianak Barat Periode 2024-2026 adalah :

- Sasaran 1

  Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan dengan Indikator :

  2. Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (didalamnya memuat pertanyaan tentang layanan trantib)
- Sasaran 2

  Terwujudnya Masyarakat Kecamatan yang berdaya untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat di ukur dengan indikator :

  3. Indek Gotong Royong
  4. Persentase partisipasi masyarakat

3.3 . Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2025 (Periode 2025-2026) terdiri dari 5 Program,14 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan.

Adapun bentuk kongkrit kegiatan-kegiatan pokok terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pontianak Barat yang direncanakan pada tahun anggaran 2025 terdiri dari 14 kegiatan Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian target kegiatan Kecamatan Pontianak Barat pada kurun waktu 1 (satu) tahun.

Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Rencana Program dan Kegiatan merupakan Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan–permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2025 meliputi:

I. Program : Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d. Koordinasi dan Penyusuna Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD
e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Lisrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Pemeliharaan Mebel
c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Untuk Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota merupakan program kegiatan rutin setiap tahun.

II. Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sub Kegiatan :

a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait

<u>Rencana Aksi</u> :

- Mengadakan Rapat/ Pertemuan di Luar Kantor yang (melibatkan eselon III kebawah)
- Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya

Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak di Laksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan

Sub Kegiatan :

a. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan

<u>Rencana Aksi</u> :

- Tim Mengadakan Rapat dalam Peningkatan IKM di Wilayah Kecamatan atau seluruh Kelurahan

III. Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Sub Kegiatan :

a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Rencana Aksi :

- Mengadakan kegiatan Forum Anak, Senam, PKK dan Gotong Royong

Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan

Sub Kegiatan :

a. Evaluasi Kelurahan

Rencana Aksi :

- Mengadakan Lomba Kelurahan, GSI, PKK KB-KES, Jambore Posyandu, Senam Jepin Pawai Muharam dan Ramadhan

IV. Program : Koordinasi Ketentraman Umum.

Kegiatan : Koordnasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada

Sub Kegiatan :

a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Rencana Aksi :

- Tim Mengadakan Rapat
- Aktivitas di Lapangan Sebagai Implementasi Ketentraman dan Ketertiban di Lingkungan Masyarakat

V. Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Rencana Aksi :

- Peringatan HUT RI
- Senam Bersama

b. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional.

Rencana Aksi :

- Hari Besar Keagamaan
- MTQ
- Peringatan HUT Kota Pontianak

Tabel III.1

Daftar Rencana Aksi dan Sub Kegiatan Pengampu

No	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran	Volume	Lokasi	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	• Mengadakan Rapat/ Pertemuan di Luar Kantor yang (melibatkan eselon III kebawah) • Kegiatan Seminar/Diseminasi/FGD dan sejenisnya	61.420.600,00	1 laporan	Kec. Pontianak Barat	-
2	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	Tim Mengadakan Rapat dalam Peningkatan IKM di Wilayah Kecamatan atau seluruh Kelurahan	106.301.000,00	72 laporan	Kec. Pontianak Barat	-
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Mengadakan kegiatan Forum Anak, Senam, PKK dan Gotong Royong	166.143.600,00	7 laporan	Kec. Pontianak Barat	-
4	Evaluasi Kelurahan	Mengadakan Lomba Kelurahan, GSI, PKK KB-KES, Jambore Posyandu, Senam Jepin Pawai Muharam dan Ramadhan	80.000.000,00	16 laporan	Kec. Pontianak Barat	-
5	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan	• Tim Mengadakan Rapat • Aktivitas di Lapangan Sebagai Implementasi Ketentraman dan Ketertiban di Lingkungan Masyarakat	120.000.000,00	12 laporan	Kec. Pontianak Barat	-

	Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					
6	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	• Peringatan HUT RI • Senam Bersama	78.860.800,00	750 orang	Kec. Pontianak Barat	-
7	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	• Hari Besar Keagamaan • MTQ • Peringatan HUT Kota Pontianak	294.796.500,00	790 orang	Kec. Pontianak Barat	-

Untuk Belanja Earmarked terdapat kegiatan pembangunan sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dengan masing-masing kelurahan mendapat pagu sebesar Rp. 200.000.000 yang bersumber dari dana DAU dengan total dari 4 Kelurahan berarti secara keseluruhan pagu Rp. 800.000.000.-

Belanja Prioritas lainnya antara lain :

- Bantuan Operasional RT dan RW yang ditampung pada sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebesar Rp.1.000.500.000,- yang bersumber dari dana DAU.
- Tambahan untuk percepatan penurunan stunting sebesar Rp.400.000.000,- dengan masing-masing Rp. 100.000.000,- tiap kelurahan yang bersumber dari dana DAU yang ditampung pada sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
- Bantuan Operasional Posyandu dengan Rp.3.000.000,- tiap posyandu /tahun yang ditampung pada sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari dana DAU

Tahun 2025 ini secara proyek strategis saat Forum Lintas Perangkat Daerah terdiri atas :

1. Penanganan stunting (ditampung melalui sub kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan)

   Untuk mewujudkannya berbagai langkah yang dilakukan oleh Pemkot Pontianak, adanya Peraturan Walikota Pontinak Nomor 18 Tahun 2022 tentang percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kota Pontianak, penyusunan rencana aksi percepatan penurunan stunting sebagai bahan implementasi aksi konvergensi penurunan stunting. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dibentuk mulai dari tingkat kota hingga kelurahan. Pertemuan untuk membahas masalah stunting tingkat kota dan kecamatana juga rutin digelar. Tim pendampingan keluarga juga dikerahkan ke lapangan untuk pendampingan keluarga berisiko stunting.

2. Pemberian bantuan material untuk pembangunan sarana prasarana kelurahan

   Sesuai dengan Tabel II.4 terdapat 6 usulan yang diakomodir yaitu di kelurahan sungai jawi dalam dan Kelurahan sungai jawi luar.

Tujuan meningkatnya kualitas layanan kepada publik dengan indikator sasaran adalah Indek Kepuasan Masyarakat yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pontianak Barat Periode 2024-2026 adalah :

- Sasaran 1

  Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan dengan Indikator :

  1. Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (didalamnya memuat pertanyaan tentang layanan trantib)

- Sasaran 2

  Terwujudnya Masyarakat Kecamatan yang berdaya untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat di ukur dengan indikator :

1. Indek Gotong Royong
2. Persentase partisipasi masyarakat

Tabel III.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran 2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik
		Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan (didalamnya termuat tentang pertanyaan layanan transtib)	Sangat Baik
		Terwujudnya Masyarakat Kecamatan yang Berdaya	Indeks Gotong Royong	95%
			Persentase Partisipasi Masyarakat	95%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Mempedomani RKPD Kota Pontianak Tahun 2025 serta Review Renstra Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2024 – 2026.
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pontianak terpilih, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Pontianak

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2025, sebagai rangkaian Rencana Pembangunan Perangkat Daerah Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2025 dengan mempedomi Undang-Undang nomor 14 tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Adapun faktor – faktor yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Rencana kerja adalah :

1. Program dan Kegiatan yang bersifat rutin se tiap tahun ;
2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilakukan ;
3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial budaya yang menjadi skala prioritas di masing – masing Kelurahan se Kecamatan Pontianak Barat.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan / sub kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan/sub kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Rencana Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu.

Arah kebijakan daerah bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang mendesak dan urgent, serta dalam rangka akselerasi pembangunan guna menciptakan dan mengembangkan instruktur perekonomian yang tangguh dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, maka arah kebijakan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak diselaraskan dengan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2024-2026.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2025, sebagaimana tersebut dalam Tabel IV.I (TC.33) ;

Tabel IV.1

PERUBAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PONTIANAK BARAT KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						KECAMATAN PONTIANAK BARAT							14.286.176.000,00	14.531.402.506,00	16.928.790.474,00							17.153.104.550,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							14.286.176.000,00	14.531.402.506,00	16.928.790.474,00							17.153.104.550,00	
	7	01				KECAMATAN							14.286.176.000,00	14.531.402.506,00	16.928.790.474,00							17.153.104.550,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan				95 persen	95 persen	10.524.676.000,00	10.440.659.806,00	10.142.617.274,00							10.769.903.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			95 Persen	95 Persen	50.000.000,00	83.750.400,00	83.750.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak		50.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13 Dokumen	13 Dokumen	24.538.260,00	27.218.100,00	27.218.100,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			24.538.260,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT

7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	8.755.000,00	13.385.000,00	13.385.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			8.755.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	3.994.000,00	5.057.200,00	5.057.200,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			3.994.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Laporan	8 Laporan	6.920.000,00	15.655.600,00	15.655.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			6.920.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT

7	01	0	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	5.792.740,00	22.434.500,00	22.434.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			5.792.740,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			95 persen	95 persen	7.698.263.000,00	7.761.417.006,00	7.761.417.006,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak		7.943.490.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
7	01	0	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	6.934.608.000,00	7.179.834.506,00	7.179.835.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			7.179.835.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
7	01	0	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan																
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	742.920.000,00	564.160.000,00	564.160.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			742.920.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT

7	01	0	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.135.000,00	3.838.500,00	3.838.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			2.135.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
7	01	0	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	18.600.000,00	13.584.000,00	13.584.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			18.600.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	-			95 persen	95 persen	1.980.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak		1.980.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
7	01	0	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	1.980.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			1.980.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT

	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			95 persen	95 persen	146.860.000,00	262.374.000,00	262.374.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak		146.860.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	2 Paket	96.860.000,00	139.030.000,00	139.030.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			96.860.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	50.000.000,00	123.344.000,00	91.931.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			50.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			95 Persen	95 Persen	585.450.225,00	587.008.800,00	587.008.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak		585.450.225,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT

7	01	0	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20.973.225,00	18.318.000,00	18.318.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			20.973.225,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
7	01	0	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	150.000.000,00	145.790.100,00	145.790.100,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			150.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
7	01	0	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	54.410.000,00	64.031.500,00	64.031.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			54.410.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
7	01	0	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	104.467.000,00	116.821.000,00	116.821.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			104.467.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT

	7	01	0	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	96.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			96.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	19.600.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			19.600.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	121.724.000,00	38.834.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			50.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	-			95 persen	95 persen	300.000.000,00	401.206.350,00	401.206.350,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak		300.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT

	7	01	0	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	300.000.000,00	401.206.350,00	256.933.100,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			300.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			95 persen	95 persen	1.130.543.836,00	992.885.250,00	992.885.250,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak		1.130.543.836,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	252.003.836,00	306.806.850,00	305.273.562,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			252.003.836,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	878.540.000,00	686.078.400,00	648.144.912,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			878.540.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT

	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			95 persen	95 persen	611.578.939,00	349.798.000,00	349.798.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak		611.578.939,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	18 Unit	278.200.000,00	145.260.000,00	145.260.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			278.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel																	
							Jumlah Mebel yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			100.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	72.478.700,00	34.990.000,00	34.990.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			72.478.700,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT

	7	01	0	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	120.900.239,00	129.968.000,00	129.968.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			120.900.239,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di				100 Persen	100 Persen	168.000.000,00	197.286.600,00	167.721.600,00							168.000.000,00	
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	-			100 persen	100 persen	70.000.000,00	90.985.600,00	90.985.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak		70.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	70.000.00	90.985.600,00	61.420.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			70.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik yang dilimpahkan di Kecamatan	-			95 persen	95 persen	98.000.000,00	106.301.000,00	106.301.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak		98.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT

	7	01	0	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				72 Laporan	72 Laporan	98.000.000,00	106.301.000,00	106.301.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			98.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat Yang Aktif				100 Persen	100 Persen	2.933.500.000,00	3.075.560.800,00	6.024.153.300,00							5.555.201.550,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	-			95 persen	95 persen	70.000.000,00	181.423.600,00	181.423.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak		70.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	7 Laporan	70.000.000,00	181.423.600,00	166.143.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			70.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	-			97 persen	97 persen	2.863.500.000,00	2.894.137.200,00	2.894.137.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak		5.485.201.550,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT

	7	01	0	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				16 Laporan	16 Laporan	80.000.000,00	81.576.200,00	81.576.200,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			80.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan				95 Persen	95 Persen	120.000.000,00	153.210.000,00	134.128.000,00							120.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat di Selesaikan	-			95 persen	95 persen	120.000.000,00	153.210.000,00	153.210.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak		120.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				60 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	67.507.000,00	67.507.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			120.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan				100 persen	100 persen	540.000.000,00	664.685.300,00	460.170.300,00							540.000.000,00	

	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			100 Persen	100 Persen	540.000.000,00	664.685.300,00	664.685.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak		540.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				750 Orang	750 Orang	80.000.000,00	78.860.800,00	78.860.800,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			80.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan				790 Orang	790 Orang	460.000.000,00	450.026.500,00	294.796.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			460.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
						KELURAHAN SUNGAIJAWI DALAM							14.286.176.000,0	14.531.402.506,0	16.928.790.474,0							17.153.104.550,0	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							14.286.176.000,0	14.531.402.506,0	16.928.790.474,0							17.153.104.550,0	
	7	01				KECAMATAN							14.286.176.000,0	14.531.402.506,0	16.928.790.474,0							17.153.104.550,0	
6	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan				95 Persen	95 Persen	10.524.676.000,00	10.440.659.806,00	10.142.617.274,00							10.769.903.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			95 Persen	95 Persen	585.450.225,00	587.008.800,00	587.008.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak		585.450.225,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT

	7	01	0	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.500.000,00	12.500.800,00	12.500.800,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			12.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			10.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			95 Persen	95 Persen	611.578.939,00	349.798.000,00	349.798.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak		611.578.939,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			10.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
7	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat Yang Aktif				95 Persen	95 Persen	2.933.500.000,00	3.075.560.800,00	6.024.153.300,00							5.555.201.550,00	

	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	-			95 Persen	95 Persen	2.863.500.000,00	2.894.137.200,00	2.894.137.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak		5.485.201.550,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	42.167.000,00	34.467.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			40.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	30.000.000,00	167.718.300,00	167.718.300,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			30.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	510.750.000,00	475.862.900,00	1.205.548.900,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah DAU Tambahan Dukungan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			1.205.548.900,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
8	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan				-	95 Persen	120.000.000,00	153.210.000,00	134.128.000,00							120.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi	-			-	95 Persen	120.000.000,00	153.210.000,00	153.210.000,00			-	Meningkatnya Tata Kelola	-		120.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT

	7	01	0	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan				-	12 Laporan	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			0,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
9	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan				-	100 Persen	540.000.000,00	664.685.300,00	460.170.300,00							540.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi	-			-	100 Persen	540.000.000,00	664.685.300,00	664.685.300,00			-	Meningkatnya Tata Kelola	-		540.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan				-	50 Orang	0,00	10.000.000,00	3.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola			0,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan				-	20 Orang	0,00	20.000.000,00	8.911.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			0,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
						KELURAHAN SUNGAIJAWI LUAR							14.286.176.000,0	14.531.402.506,0	16.928.790.474,0							17.153.104.550,0	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							14.286.176.000,0	14.531.402.506,0	16.928.790.474,0							17.153.104.550,0	
	7	01				KECAMATAN							14.286.176.000,0	14.531.402.506,0	16.928.790.474,0							17.153.104.550,0	
10	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan				95 Persen	95 Persen	10.524.676.000,00	10.440.659.806,00	10.142.617.274,00							10.769.903.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			95 Persen	95 Persen	585.450.225,00	587.008.800,00	587.008.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak		585.450.225,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT

	7	01	0	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			12.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			10.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			95 Persen	95 Persen	611.578.939,00	349.798.000,00	349.798.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak		611.578.939,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			10.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
11	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat Yang Aktif				95 Persen	95 Persen	2.933.500.000,00	3.075.560.800,00	6.024.153.300,00							5.555.201.550,00	

	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	-			95 Persen	95 Persen	2.863.500.000,00	2.894.137.200,00	2.894.137.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak		5.485.201.550,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.000.000,00	39.520.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			40.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	30.000.000,00	147.610.000,00	146.624.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			30.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	651.750.000,00	536.654.000,00	1.364.855.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah DAU Tambahan Dukungan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			1.364.855.500,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
12	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan				-	95 Persen	120.000.000,00	153.210.000,00	134.128.000,00							120.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi	-			-	95 Persen	120.000.000,00	153.210.000,00	153.210.000,00			-	Meningkatnya Tata Kelola	-		120.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT

	7	01	0	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan				-	12 Laporan	0,00	20.000.000,00	2.160.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			0,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
13	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan				-	100 Persen	540.000.000,00	664.685.300,00	460.170.300,00							540.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi	-			-	100 Persen	540.000.000,00	664.685.300,00	664.685.300,00			-	Meningkatnya Tata Kelola	-		540.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan				-	50 Orang	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola			0,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama,				-	20 Orang	0,00	30.000.000,00	15.340.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaijawi Luar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			0,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
						KELURAHAN SUNGAIBELIUNG							14.286.176.000,0	14.531.402.506,0	16.928.790.474,0							17.153.104.550,0	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							14.286.176.000,0	14.531.402.506,0	16.928.790.474,0							17.153.104.550,0	
	7	01				KECAMATAN							14.286.176.000,0	14.531.402.506,0	16.928.790.474,0							17.153.104.550,0	
14	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan				95 Persen	95 Persen	10.524.676.000,00	10.440.659.806,00	10.142.617.274,00							10.769.903.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			95 Persen	95 Persen	585.450.225,00	587.008.800,00	587.008.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak		585.450.225,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT

	7	01	0	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.500.000,00	12.908.500,00	12.908.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			12.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	10.015.000,00	10.015.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			10.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			95 Persen	95 Persen	611.578.939,00	349.798.000,00	349.798.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak		611.578.939,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	9.580.000,00	9.580.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			10.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
15	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat Yang Aktif				95 Persen	95 Persen	2.933.500.000,00	3.075.560.800,00	6.024.153.300,00							5.555.201.550,00	

	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	-			95 Persen	95 Persen	2.863.500.000,00	2.894.137.200,00	2.894.137.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak		5.485.201.550,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	44.884.100,00	33.764.100,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			40.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	30.000.000,00	149.705.000,00	141.588.050,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			30.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	725.250.000,00	627.029.700,00	1.677.204.150,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah DAU Tambahan Dukungan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			1.677.204.150,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
16	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan				-	95 Persen	120.000.000,00	153.210.000,00	134.128.000,00							120.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi	-			-	95 Persen	120.000.000,00	153.210.000,00	153.210.000,00			-	Meningkatnya Tata Kelola	-		120.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT

	7	01	0	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan				-	12 Laporan	0,00	25.703.000,00	25.703.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			0,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
17	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan				-	100 Persen	540.000.000,00	664.685.300,00	460.170.300,00							540.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi	-			-	100 Persen	540.000.000,00	664.685.300,00	664.685.300,00			-	Meningkatnya Tata Kelola	-		540.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan				-	200 Orang	0,00	16.276.200,00	16.276.200,00	Kota Pontianak, Pontianak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola			0,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama,				-	20 Orang	0,00	18.021.800,00	10.456.800,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Sungaibeliung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			0,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
						KELURAHAN PALLIMA							14.286.176.000,0	14.531.402.506,0	16.928.790.474,0							17.153.104.550,0	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							14.286.176.000,0	14.531.402.506,0	16.928.790.474,0							17.153.104.550,0	
	7	01				KECAMATAN							14.286.176.000,0	14.531.402.506,0	16.928.790.474,0							17.153.104.550,0	
18	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan				95 Persen	95 Persen	10.524.676.000,00	10.440.659.806,00	10.142.617.274,00							10.769.903.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			95 Persen	95 Persen	585.450.225,00	587.008.800,00	587.008.800,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak		585.450.225,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT

	7	01	0	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi																
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12.500.000,00	12.499.900,00	12.499.900,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			12.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			10.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			95 Persen	95 Persen	611.578.939,00	349.798.000,00	349.798.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak		611.578.939,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			10.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT

19	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Masyarakat Yang Aktif				95 Persen	95 Persen	2.933.500.000,00	3.075.560.800,00	6.024.153.300,00							5.555.201.550,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	-			95 Persen	95 Persen	2.863.500.000,00	2.894.137.200,00	2.894.137.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kota Pontianak		5.485.201.550,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	40.620.000,00	34.465.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			40.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	30.000.000,00	173.270.000,00	53.085.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			30.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	615.750.000,00	367.040.000,00	877.593.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah DAU Tambahan Dukungan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			877.593.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
20	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan				-	95 Persen	120.000.000,00	153.210.000,00	134.128.000,00							120.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi	-			-	95 Persen	120.000.000,00	153.210.000,00	153.210.000,00			-	Meningkatnya Tata Kelola	-		120.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT

	7	01	0	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan				-	12 Laporan	0,00	20.000.000,00	18.758.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			0,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
21	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan				-	100 Persen	540.000.000,00	664.685.300,00	460.170.300,00							540.000.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi	-			-	100 Persen	540.000.000,00	664.685.300,00	664.685.300,00			-	Meningkatnya Tata Kelola	-		540.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan				-	50 Orang	0,00	11.500.000,00	11.485.000,00	Kota Pontianak, Pontianak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola			0,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
	7	01	0	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama,				-	20 Orang	0,00	20.000.000,00	11.044.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Barat, Pallima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			0,00	KECAMATAN PONTIANAK BARAT
												J U M L A H	**4.286.176.000,00**	**4.531.402.506,00**	**6.928.790.474,00**							**17.153.104.550,00**	

BAB V
PENUTUP

A. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja 2025 ini adalah :

1. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Barat merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2024 – 2026.
2. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Barat memuat sasaran, kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih indikatif sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/ anggaran yang tersedia.

B. Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPJMD-Renstra PD dan Renja Tahunan, ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Sekretariat, Seksi dan seluruh staf Kecamatan Pontianak Barat secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   - Melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.
   - Menjaga konsistensi Renstra, Perubahan Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2025.

C. Rencana Tindak lanjut

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Barat tahun 2025 dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan proram dan kegiatan Kecamatan Pontianak Barat pada Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2025 senantiasa akan dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, transparan dan bercirikan

penyelenggaraan pemerintah yang baik. Dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2025 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus di akomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah – langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2025 sebagai wujud dari pembangunan yang maju dan berkembang.

Pontianak, Mei 2025
CAMAT PONTIANAK BARAT,

TITIN WIDIYANTI, S.STP, M.Si
Pembina IV/A
NIP. 19820320 200112 2 001

PEMERINTAH KOTA
PONTIANAK

RENJA PERUBAHAN 2025

RENCANA KERJA
KECAMATAN PONTIANAK KOTA

JL. ALIANYANG NO. 10D,
SUNGAI BANGKONG, PONTIANAK

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya penyesuaian penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pontianak Kota Tahun Anggran 2025 dapat diselesaikan. Walaupun masih dapat dikembangkan sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat.

Dalam suatu akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah dimana sangat diperlukan adanya integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lain agar mampu menjawab perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah.

Melalui Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini, kami akan dapat melaksanakan kegiatan berdasarkan hasil Renstra Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak sebagai pertanggung jawaban Tahunan atas keberhasilan dalam mengemban tugas di era Otonomi Daerah ini.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini, untuk itu kami mengharapkan masukan demi perbaikan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2025 ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga Rencana Kerja Perubahan dapat dijadikan pedoman bagi semua komponen Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pontianak, 20 Juni 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN.....I-1

1.1 Latarbelakang.....I-1

1.2 Landasan Hukum.....I-3

1.3 Maksud Dan Tujuan.....I-7

1.4 Sistematika Penulisan.....I-7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU.....II-8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....II-8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... .....II-16

2.3 Isu-Isu Penting Peyelenggaraan Tugsa dan Fungsi Kecamatan Pontianak Kota.....II-18

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD……...II-20

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat……..II-30

BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....III-32

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....III-32

3.2 Tujuan Sasaran.....III-33

3.3 Program dan Kegiatan.....III-33

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....IV-39

BAB V PENUTUP.....V-102

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pontianak Kota Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan delam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Rencana Kerja Perubahan (Renja) Tahun 2025 Kecamatan Pontianak Kota merupakan implementasi dari visi dan misi Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Kota Tahun 2024-2026 sesuai arah operasional dalam Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Pontianak Kota disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Kegiatan pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis guna mencapai tujuan pembangunan daerah. Untuk mencapai hal tersebut harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan. Dengan perencanaan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik pula. Oleh sebab itu dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Kecamatan Pontianak Kota ini diharapkan dapat terakomudasi dalam KUA-PPAS dan penetapan APBD Tahun 2025, sehingga akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Pontianak Kotaa mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perubahan PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemah dari program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja Perubahan merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perubahan harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yaitu :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan PD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan rancangan Renja Perubahan PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perubahan PD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perubahan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perubahan dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.Penyusunan Renja Perubahan PD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan,mencakup :

1. **Tahap Perumusan Rancangan Renja PD;**
   - Pengolahan data dan informasi;
   - Analisis gambaran pelayanan PD;
   - Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD;
   - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD;
   - Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

- Perumusan tujuan dan sasaran;
- Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- Perumusan tujuan dan sasaran;
- Penelaahan usulan;
- Perumusan kegiatan prioritas;
- Penyajian awal dokumen rancangan Renja PD;
- Penyempurnaan rancangan Renja PD;
- Pembahasan forum PD; dan
- Penyesuaian dokumen rancangan Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

2. Tahap Penyajian Rancangan Renja PD.

- Menyusun Renja PD;
- Rancangan Renja-PD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- Rancangan Renja PD memuat kebijakan , program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- Program dan kegiatan meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru , indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD serta menunjukan prakiraan maju;
- Rancangan Renja PD dibahas dalam forum OPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak Tahun 2025 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat

II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Imdonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1114)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419):
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
17. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);

19. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas pokok, Fungsi, Uraian tugas Dan tata Kerja Kecamatan di Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 79).
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5);
21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 29).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 10);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 13).
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
26. (tambahan regulasi yang terkait khusus urusan penyelenggaraan pemerintahan. Tata urutan perundang-undangan disesuaikan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Perubahan Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen renja Perubahan PD dengan renstra PD serta dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan urusan Kecamatan Pontianak Kota berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*).

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Penyusunan Renja Perubahan Tahun 2025 merupakan tahun kedua dari renstra perangkat daerah periode 2024-2026. Tahun 2024 yang merupakan tahun pertama baru berjalan beberapa bulan sehingga tidak bisa dilakukan evaluasi tahunan. Untuk itu, pengisian Tabel TC. 29 lebih diarahkan pada pengisian Urusan, Bidang Urusan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta indikator dan targetnya di akhir tahun renstra (2026) dan target pada tahun berjalan (2024).u

Beberapa kali perubahan regulasi tentang nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan, dan satuannya menjadi salah satu kendala dalam penghitungan realisasi dan capaian. Misalnya setelah menetapkan indikator dan satuan pada saat penyusunan dokumen renstra, ternyata tahun berikutnya keluar aturan baru yang mewajibkan perubahan pada indikator dan satuan. Akibatnya terjadi ketidaksinkronan antara perencanaan dan evaluasi.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sudah mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

Tabel II.1 (TC. 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi CapaianProgram dan Kegiatan s/d (tahun 2024)	Tingkat Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Realisasi Anggaran Dalam pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah**	**360%**						**0**	**0**
7.01.01.2.01	**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun**	**360%**						**0**	**0**
7.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan pada dokumen RKA-SKPD yang disusun	51 Dokumen					17	17	34
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Sub Kegiatan Yang Berubahn Pada Dokumen RKA-SKPD Yang Disusun	3 Dokumen					3	3	3,0
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Sub Kegiatan Yang Berubahn Pada Dokumen RKA-SKPD Yang Disusun	3 Dokumen					3	3	3,0
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD)	36 Laporan					12	12	34
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Database dan Profil Kecamatan	36 Laporan					12	12	34

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi CapaianProgram dan Kegiatan s/d (tahun 2024)	Tingkat Realisasi (%)
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**360%**						0	0
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jangka waktu penyediaan gaji dan tunjangan	165 orang					55	55	34
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan skpd	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan skpd	36 Bulan					12	12	34
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jangka waktu pelaksanaan akuntansi SKPD	3 Laporan					3	3	3,0
7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan bulanan/triwulan/semesteran	36 Laporan					12	12	34
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daeah Pada Perangkat Daerah**		**360%**						0	0
7.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun	6 Dokumen					2	2	34
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**360%**						0	0
7.01.01.2.05.02	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	6 Paket					2	2	34
7.01.01.2.05.02	Bimbingan Teknis Ipmpelmatasi Peraturasn Perundang-undangan	Jumlah yang mengikuti bimtek	30 orang					10	10	34
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**360%**						0	0

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi CapaianProgram dan Kegiatan s/d (tahun 2024)	Tingkat Realisasi (%)
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponent Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	36 Laporan					12	12	34
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jangka waktu penyediaan ATK	36 Laporan					12	12	34
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jangka waktu penyediaan kebutuhan rumah tangga (alat kebersihan kantor)	36 Laporan					12	12	34
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Jangka waktu penyediaan makan minum dan kegiatan rapat	36 Laporan					12	12	34
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jangka Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36 Laporan					12	12	34
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jangka Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36 Dokumen					12	12	34
7.01.01.2.06.06	Penyelengraan Rapat Koordinsai dan Konsultasi SKPD	Yang mengikuti Rapat koordinasi dan konslutasi	36 Laporan					12	12	34
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**360%**						0	0
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	180 Unit					60	60	34
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	0						0	0
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Umum**		**360%**						0	0

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi CapaianProgram dan Kegiatan s/d (tahun 2024)	Tingkat Realisasi (%)
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**360%**						0	0
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya, Air dan Listrik	Jumlah rekening air,listrik telpon dan internet yang dibayar	36 Laporan					12	12	34
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa kebersihan,pengamanan,supir dan IT	36 Bulan					12	12	34
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan(Kecamatan)	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	18 Unit					6	6	34
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan dan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	150 Unit					50	50	34
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor	36 Laporan					12	12	34
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publiik**	**360%**						0	0
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Presentase terlaksananya kegiatan pemeritahan dan pelayanan publik**	**360%**						0	0

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi CapaianProgram dan Kegiatan s/d (tahun 2024)	Tingkat Realisasi (%)
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Intansi terkait	Jumlah kegiatan Fasiltas dan Sosialisasi Organisasi Perangkat Daarah Dalam Wilayah Kecamatan, Inovasi Unggulan Keluarahan, Musrenbang Kecamatan	9 Laporan					3	3	34
7.01.02.2.01.02	Penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publk	**360%**						0	0
7.01.02.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Pelayanan Prima Sesuai Standar dan SOP; kepada masyarakat dan Dokumen IKM	45 Laporan					15	15	34
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase LPM Aktif**	**360%**						0	0
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Presentase LPM Aktif**	**360%**						0	0
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan Olahraga, Kesenian dan Kebudayaan, Pembinaan Gotong royong, Pembinaan kegiatan Posyandu, Pembinaan Forum Anak, Fasiltas Kegiatan PKK, Pembinaan Pengawasan serta pendukung dana kelurahan di Kecamatan	78 Laporan					26	26	34
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Prsentase LPM Aktif**	**360%**						0	0
7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan dan berkoordinasi dengan Kelurahan	18 LPM					6	6	34

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi CapaianProgram dan Kegiatan s/d (tahun 2024)	Tingkat Realisasi (%)
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan Bantuan Material Penataan Lingkungan dan Drainase Kelurahan (DAU)	18 Lembaga					6	6	34
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Penimbang dan Sejenisnya, Penyaluran Bahan Material Sarana Prasarana Fasilitas Pendidikan dan Kebudayaan Masyarakat Non Komersil, Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Rutin Tingkat Kelurahan, Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan Masyarakat Kelurahan, Penyediaan Sarana Ptasarana Kebersihan Lingkungan dan Pengumpul Sampah Kelurahan, Fasilitasi Kegiatan PKK Kelurahan, Gotong Royong Kelurahan, Pembinaan Forum Anak Kelurahan	18 Pokmas					6	6	34
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kegiatan Lomba Kelurahan dan Fasiltas Lomba Tk. Kecamatan (PHBS, Lomba Posyandu, LBS, Siskamling)	30 Kegiatan					10	10	34
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan**	**360%**						0	0

KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi CapaianProgram dan Kegiatan s/d (tahun 2024)	Tingkat Realisasi (%)
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananaya Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	**360%**						0	0
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	60 Laporan					20	20	
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**360%**						0	0
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**360%**						0	0
7.01.05.2.03	Pembinaan Persatuan dan Kestauan Bangsa	Terlaksanaan kegiatan HUT RI	750 orang					250	250	34
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan MTQ//STQ, Perayaan Hari Jadi Kota Pontianak, Pembinaan Hari Besar Kegamaan	180 orang					60	60	34

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan pada Kecamatan Pontianak Kota merupakan kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja di Kecamatan Pontianak Kota ditentukan dalam Pelaksanaan Pelayanan Prima di Kecamatan Pontianak Kota mengacu kepada pelaksanaan Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Adalah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Standart Operasioanal Prosedur diatur pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 94 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pada Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, meliputi 16 jenis pelayanan di Kecamatan dan 26 jenis pelayanan dikelurahan:

Berikut tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pontianak Kota, sebagaimana tertuang dalam tabel TC.30 sebagai berikut :

TABEL II.2 (TC.30)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PONTIANAK KOTA

NO	INDKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE-				REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan - Indeks Kepuasan Masayarakat Terwujudnya Masyarakat yang berdaya Saing - Indeks Gotong Royong - Persentase Partisipasi Masyarakat			Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	
						Sangat Baik	Sangat Baik			Sangat Baik	Sangat Baik	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Publik - Perseentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamaatn dan Kelurahan			95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum - Persentase Koordinasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum			95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum - Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum			95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan - Persentase Lembaga / Masyarakat yang Aktif			95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan			95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan (Renja) sebagai sebuah rangkaian cara untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan yang akan ditetapkan. Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi ada beberapa permasalahan/kendala atau isu-isu di Kecamatan Pontianak Kota, sebagai berikut :

1. Sekretariat Kecamatan
    a) Kurangnya pegawai di Kecamatan dan Kelurahan
    b) Meningkatkan pembinaan Aparatur/pegawai di Kecamatan dan Kelurahan
    c) Fasilitasi kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan
    d) Memperoleh data yang cepat dan tepat untuk penyusunan laporan di Kecamatan dan Kelurahan
2. Seksi Pemerintahan
    a) Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan umum
    b) Kesadaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan masih rendah
    c) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
    a) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
    b) Belum terakomodirnya semua usulan masyarakat
    c) Meningkatkan sektor ekonomi lokal
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
    a) Belum tertatarapinya pedagang informal (PKL)
    b) Pengetahuan tentang peraturan yang berlaku masih rendah

Dari beberapa permasalahan/kendala atau isu-isu berdasarkan tugas pokok dan fungsi, maka ditetapkanlah isu strategis Kecamatan pontianak Kota tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Issu-issu Strategis Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak
Tahun 2024 – 2025

NO	ISSUE STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1	Pengelolaan Keuangan Daerah	• Perlu mendapatkan perhatian dalam aspek pengelolaan keuangan adalah tata kelola aset-aset daerah dalam hal ini aset aset di Kecamatan yang dirasa saat ini masih jauh dari kata optimal. Tata kelola aset ini menyangkut aspek manajemen data dan informasi aset-aset yang ada serta optimalisasi pemanfaatannya bagi pelayanan prima kepada masyarakat
2	Pelayanan Publik	• Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan umum perlu ditingkatkan. • Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah perlu ditingkatkan. • Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan (kantor camat dan lurah)
3.	Kemiskinan Ekstrim	• kecamatan/kelurahan menjadi lokus penanggulangan kemiskinan ekstrim
4.	Perubahan Iklim	• Perlu adanya peningkatan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim (ketahanan iklim)
5	Stunting	• Prioritas Penanganan stunting di masing-masing kelurahan khususnya yang ditetapkan pada lokus stunting
6	Kesehatan	• Mengeliminasi hiv/aids, TBC, dan malaria pada Tahun 2030
7	Sarana Pendidikan	• Belum terpenuhinya sarana pendidikan yang sesuai dengan standar
8	Kelembagaan Masyarakat	• Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan
9	Sektor Pedagang Informal (PKL)	• Penataan pedagang kaki lima (PKL) • Keterlibatan tokoh masyarakat agar sering dilakukan untuk koordinasi • Perlu penataan terhadap jalan akses masuk, ketertiban pedagang informal maupun areal perparkiran di Wilayah Waterfront • Penataan kembali beberapa Taman Bermain dan Ruang Terbuka Hijau • Peningkatan Fasilitas Ekonomi Kreatif • Penggalian potensi Kecamatan di bidang pariwisata dan Ekonomi Kreatif
10.	Kualitas Lingkungan Hidup	• Rendahnya cakupan layanan persampahan • Masih kurangnya kesadaran serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah • Meningkatnya jumlah penduduk dan perumahan yang mengakibatkan berkurangnya ruang terbuka hijau.
11	Peningkatan infrastrukstur jalan, drainase dan fasilitas umum di Kecamatan	• Penyaluran bantuan material di wilayah yang belum tertangani oleh PD Teknis
12	Kepadatan jumlah penduduk	• Tidak meratanya sebaran penduduk di setiap kecamatan
13	Penanganan Kawasan Kumuh Pinggiran Sungai	• Penanganan kawasan kumuh di beberapa kecamatan yang berada di pinggiran sungai

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 2025

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Pontianak Kota tidak dilaksanakan dengan membandingkan antara Rancangan Awal Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Pontianak Kota, yang disajikan pada :

TABEL II.3 (TC.31)
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PONTIANAK

KECAMATAN PONTIANAK KOTA

N0	Rencana Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikatif (Rp.000)**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**		**Pagu Indikatif (Rp.000)**	
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**		**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**		**(11)**	**(12)**
1	7.01.01						7.01.01						
1.	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***	Kecamatan Pontianak Kota	**Tingkat Kepuasan Bidang terhadap pelayanan kesekretariatan**	95%		***11,398,887,000***	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***	Kecamatan Pontianak Kota	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	95%		***11.198.591.421,00***	
	7.01.01.2.01						7.01.01.2.01						
1.	Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kenerja,Perangkat Daerah		**Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**			**114,000,000**	Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kenerja,Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah			**53.567.500,00**	
	7 01 01 2.01.0001						7 01 01 2.01.0001						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**	18	Doc	37,000,000.00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17	Doc	30.510.500,00	
	7 01 01 2.01.0002						7 01 01 2.01.0002						
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		**Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**	1	Doc	22,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Doc	2.393.000,00	
	7 01 01 2.01 0003.						7 01 01 2.01 0003.						

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		**Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**	1	Doc	22,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Doc	4.050.000,00	
	7 01 01 2.01 0006						7 01 01 2.01 0006						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		**Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**	12	Lap	22,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Lap	4.965.000,00	
	7 01 01 2.01 0007						7 01 01 2.01 0007						
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	12	lap	11,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	lap	6.257.000,00	
	7 01 01 2.02						7 01 01 2.02						
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100%		**8.856.269.000**	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95%		**9.087.359.611,00**	
	7 01 01 2.02 0001						7 01 01 2.02 0001						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		**Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN**	55	org/bln	8,132,269,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	org/bln	8.381.235.000,00	
	7 01 01 2.02 0003						7 01 01 2.02 0003						
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		**Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**	12	dok	680,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dok	680.080.000,00	
	7 01 01 2.02 0005						7 01 01 2.02 0005						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		**Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	12	lap	22,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	lap	1.000.000,00	

	7 01 01 2.02 0007						7 01 01 2.02 07						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semes teran SKPD		**Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD**	12	lap	22,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semes teran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	12	lap	7.137.000,00	
	7 01 01 2.03						7 01 01 2.03						
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	95%		**11,000,000**	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	95%		4.160.000,00	
	7 01 01 2.03 0001						7 01 01 2.03 01						
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		**Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	2	dok	11,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Lap	4.160.000,00	
	7 01 01 2.05						7 01 01 2.05						
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	95%		**315,668,000**	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95%		258.210.000, 00	
	7 01 01 2.05 0002						7 01 01 2.05 02						
	Pengadaan Pakaian DinasBeserta AtributKelengkapan nya		**Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan**	2	paket	227,668,000	Pengadaan Pakaian DinasBeserta AtributKelengkapan nya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	paket	101.400.000, 00	
	7 01 01 2.05 0011						7 01 01 2.05 11						
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		**Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**	10	org	88,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		jumlah orang yang mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang undangan	10	org	0,00	
	7 01 01 2.06						7 01 01 2.06						
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	95%		**464,300,000**	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	95%		551.935.940, 00	
	7 01 01 2.06 0001						7 01 01 2.06 01						
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	12	paket	38,500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	paket	55.301.350,0 0	

	7 01 01 2.06 0002						7 01 01 2.06 02						
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	12	paket	203,500,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	paket	181.225.800,00	
	7 01 01 2.06 0003						7 01 01 2.06 03						
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**	12	paket	55,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12	paket	56.433.400,00	
	7 01 01 2.06 0004						7 01 01 2.06 04						
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**	12	paket	66,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	paket	98.833.000,00	
	7 01 01 2.06 0005						7 01 01 2.06 05						
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		**Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan**	12	paket	35,300,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket	48.822.500,00	
	7 01 01 2.06 0006						7 01 01 2.06 06						
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan		**Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan**	12	doc	11,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	doc	7.920.000,00	
	7 01 01 2.06 0009						7 01 01 2.06 09						
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	12	lap	55,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	lap	15.000.000,00	
	7.01.01.2.07						7.01.01.2.07						
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah		**Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	95%		**300,000,000**	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah		Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	95%		132.121.100,00	
	7.01.01.2.07.0001												
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan\		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	6	unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan\		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	6	unit	0,00	
	7.01.01.2.07.0006												
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60	unit	300,000,000	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60	unit	199.152.740,00	

	7 01 01 2.08											
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	95%		1,282,650,000			Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	95%		**1.300.423.160,00**	
	7 01 01 2.08 02						7 01 01 2.08 02						
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan**	12	lap	395,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	lap	438.720.271,00	
	7 01 01 2.08 0004						7 01 01 2.08 04						
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	12	lap	887.650.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	lap	703.027.840,00	
	7 01 01 2.09						7 01 01 2.09						
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah**	95%		**55.000.000**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	95%		**168.450.000,00**	
	7 01 01 2.09 0001						7 01 01 2.09 01						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		**Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya**	8	Unit	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8	Unit	58.790.000,00	
	7 01 01 2.09 0006						7 01 01 2.09 06						
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	74	unit	55,000,000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	74	unit	87.660.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**Persetase penyelesaian Layanan publik di Kecamatan dan Kelurahan**	95%		***178.050.000.00***	***PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***		Persetase penyelesaian Layanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	95%		***177.311.200,00***	
	7 01 02 2.01						7 01 02 2.01						

	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		**Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	95%		**87,000,000, 00**	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	95%		***88.082.600,0 0***	
	7 01 02 2.01.0001						7 01 02 2.01 01						
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		**Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	1	lap	87,000,000, 00	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3	lap	58.887.600,0 0	
	7 01 02 2.02						7 01 02 2.02						
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan**	100%		**91,050,000, 00**	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	95%		**256.854.800, 00**	
	7 01 02 2.02 0003						7 01 02 2.02 03						
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		**Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	1	lap	91,050,000, 00	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	lap	118.423.600, 00	
3	7 01 03					-	7 01 03						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif**	100%		***1,198,000,0 00,00***	***PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***		Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	90%		***6.334.465.90 0,00***	
	7 01 03 2.01						7 01 03 2.01						
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan**	90%		**1,114,000,0 00,00**	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	95%		**103.300.200, 00**	
	7 01 03 2.01 03						7 01 03 2.01 03						

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		**Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	26	lap	1,114,000,000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26	keg	82.300.200,00	
	7 01 03 2.02						7 01 03 2.02						
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		**Persentase Terlaksananya Kegiatan Permberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif**	95%		**84,000,000,00**	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Presentase LPM Aktif	95%		**3.409.318.700,00**	
	7 01 03 2.02 0001						7 01 03 2.02 01						
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		**Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	1	Lembaga	275,000,000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		Jumlah Laporan Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5	keg	191,226,600	
	7 01 03 2.02 0002						7 01 03 2.02 02						
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		**Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun**	5	pokmas/ormas	1,000,000,000	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5	pokmas/ormas	569,159,000	
	7 01 03 2.02 0003						7 01 03 2.02 03						
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		**Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	10	pokmas/ormas	189,200,000	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10	pokmas/ormas	5,333,331,500	
	7 01 03 2.02 0004						7 01 03 2.02 04						
	Evaluasi Kelurahan		**Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan**	7	lap	194,000,000	Evaluasi Kelurahan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7	lap	68.296.600,00	
	7 01 04						7 01 04						

4	***PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***		**Persetase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum**	95%		**275,000,000**	***PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***		Persetase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum	95%		***352.958.800, 00***	
	7 01 04 2.02						7 01 04 2.02						
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		**Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan**	95%		**275,000,000**	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	95%		402.839.800, 00	
	7 01 04 2.02 0001						7 01 04 2.02 01						
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		**Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia**	6	lap	385,000,000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6	lap	78.503.600,0 0	
5	7 01 05						7 01 05						
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM		**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	95%		**570,650,000 ,00**	***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM***		Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	95%		**610.496.900, 00**	
	7 01 05 2.01						7 01 05 2.01						
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	95%		**570,650,000 ,00**	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	95%		768.929.200, 00	
	7 01 05 2.01 0003						7 01 05 2.01 03						
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa**	30 0	org	55,000,000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	30 0	keg	60.017.900,0 0	
	7 01 05 2.01 0004						7 01 05 2.01 04						

	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional**	20 0	0rg	515,650,000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	20 0	Org	325.076.000, 00	
						16,336,587, 000						***18.673.824.2 21***	

2.5 Penalahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, tokoh masyarakat yang bermusyawarah dalam musrenbang. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah Tahunan para pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di Wilayah Kecamatan yang didasarkan pada masukan dari kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan tersebut. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Pontianak Kota tahun 2025 dilihat pada tabel :

TABEL II.4 (TC.32)
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
TAHUN 2025 KECAMATAN PONTIANAK KOTA

No	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARNYA/ VOLUME	INDIKATOR KINERJA
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Bantuan sarana prasarana TPA lingkup Kelurahan	Jl. HM. Suwignyo GG. Tegal rejo 3 Rt. 001/Rw. 002		1 Unit	Bantuan Material Pengecatan dan penataan lingkungan jalan 800 mm
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bantuan sarana prasarana TPA lingkup Kelurahan	Jl. Wahidin Gg. Silva Jaya Rt. 002 / Rw. 034		1 Unit	Bantuan Pembangunan Pintu Gerbang di Gang, P: 4,5 m dan T : 3,5 m
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bantuan sarana prasarana TPA lingkup Kelurahan	Fasiltas Pendidikan dan pelatihan Keterampilan di Lingkungan Rt. 041		1 Unit	Pelatihan Jamu
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bantuan sarana prasarana TPA lingkup Kelurahan	Sarana dan Prasarana Rt. 041 Kel. Sungai Jawi		1 Unit	Pengadaan Rebana
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bantuan sarana prasarana TPA lingkup Kelurahan	Sungai Jawi		1 Unit	Sarana Prasarana Taman Bacaan
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bantuan sarana prasarana TPA lingkup Kelurahan	Kelurahan Sungai Bangkong		1 Unit	Pengadaan APE utk Posyandu 22 Set
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Bantuan sarana prasarana TPA lingkup Kelurahan	GG delima Rt. 001 / 001 Kel. Tengah		1 Unit	Bantuan Pengadaan Tempat sampah, Gerobak sampah
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Bantuan sarana prasarana TPA lingkup Kelurahan	Gg. Nuri Rt. 002/003 Kelurahan Tengah		1 Unit	Bantuan Pengadaan Tempat sampah, Gerobak sampah

Pada usulan program ini Kecamatan Pontianak Kota mengakomodir sebanyak 8 (delapan) Aspirasi Masyarkat yang tercantum di APBD Kecamatan Pontianak Kota Tahun 2025.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PONTIANAK KOTA

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kecamatan, Kecamatan Pontanak Kota telah menyusun Rencana Kerja Perubahan (Renja) Tahun 2025. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pontianak Kota merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu tahun 2025, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Millenium Development Goals (MDG's). Perencanaan pembangunan daerah tersebut dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana Organisasi perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan telah mendapatkan legalisasi dan jaminan bahwa paling sedikit 30% dari Usulan Musrenbang akan diakomodasi dalam Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah. Telaahan terhadap kebijakan pembangunan daerah baik ditingkat pusat maupun Provinsi, merupakan masukkan bagi penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pontianak Kota Tahun 2023, dimana baik kebijakan di tingkat pusat, tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten diharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Pontianak Kota dapat menyentuh sasaran yang tepat.

3.2. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun satu sampai lima tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Agar dapat diukur keberhasilan suatu Organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya maka setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indicator kinerja (performance indicator) yang terukur melalui tujuan **"Meningkatnya Kualitas Layanan Kepada Masyarakat" dengan indikator sasaran adalam "Indeks Kepuasan Masyarakat"** yang di jabarkan dalam Rencana Strategs (Renstra) Kecamatan Pontianak Kota Periode 2024-2026 adalah:

- **Sasaran 1**

  Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator :

  - *Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (didalamnya memuat pertanyaan tentang layanan trantib)*

- **Sasaran 2**

  Terwujud Masayarakat Kecamatan yang berdaya untuk menilai indicator keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diuur dengan indicator :

  - Indeks Gotong Royong
  - Persentase Partisipasi Masyarakat

3.3. Program Dan Kegiatan

3.3.1. Rencana Aksi

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tentunya akan dapat mewujudkan keberhasilan pencapaian misi yang pada akhirnya dapat pula mendukung keberhasilan pencapaian visi suatu organisasi.

Program Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak mengacu pada Rencana Strategis 2024-2026. Program di uraikan dalam bentuk kegiatan sebagaimana kegiatan pokok Pemerintah Daerah Kota Pontianak yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Kota. Jumlah Program Kecamatan Pontianak Kota berjumlah 5 (Lima) Program, 13 (Tiga Belas) kegiatan dan 77 (Tujuh Puluh Tujuh) sub kegiatan.

3.3.2. Kegiatan

Adapun bentuk kongkrit kegiatan-kegiatan pokok terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pontianak Kota yang direncanakan pada tahun anggaran 2024 terdiri dari 5 program, 13 kegiatan dan 77 sub kegiatan Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Pontianak Kota pada kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Rencana Program dan Kegiatan merupakan Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak Tahun 2025 meliputi :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
      a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

d. Koordinasi dan Penyusuna Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD

e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Recana Aksi : Mengadakan Rapat Internal dengan Pejabat Struktural di lingkungan Kecamatan Pontianak Kota.

2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD

Rencana Aksi : Mengadakan Rapat Internal Tim Penyusunan Laporan Keuangan.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Rencana Aksi : Rapat Internal dengan Pengurus dan Penyimpan Barang.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Rencana Aksi : Mengadakan Pengukuran Pakaian kepada seluruh ASN Di Kecamatan Pontianak Kota.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Lisrik/Penerangan Bangunan Kantor

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

f. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

g. Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Rencana Aksi : Mengadakan Rapat Internal dan Persiapan Administrasi.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Rencana Aksi : Mengadakan Rapat Internal dan Pengadministrasian di Ekatalag.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b. Penyediaan Jasa dan Umum Kantor

Rencana Aksi : Persiapan Adminstrasi

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

   Rencana Aksi : Persiapan Adminsitrasi

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan Sub Kegiatan :
   a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah

   Rencana Aksi : Pelayanan Prima Kepada Masyarakat
2. Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak di Laksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan dengan Sub Kegiatan :
   a. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan

   Rencana Aksi : Mengadakan Rapat dan kegiatan Musrenbang

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan :
   a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
   b. Adapun rinciana Kegiatan Stunting di Kecamatan sebesar 450 Paket
   c. Adapun rinciana Kegiatan Stunting di Kelurahan sebagai berikut
   d. Kelurahan Sungai Bangkong sebesar 1.634 Paket
   e. Kelurahan Darat sekip sebesar 960 Paket
   f. Kelurahan Mariana sebesar 400 Paket
   g. Kelurahan Tengah sebesar 472 Paket
   h. Kelurahan Sungaijawi 684 Paket

Rencana Aksi : - Mengadakan Rapat dan Lomba-lomba

- Memberikan Makanan Tambahan untuk ibu hamil Dan Balita

2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan Sub Kegiatan :
   a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Di Kelurahan

      Rencana Aksi : Mengadakan rapat internal, Pra Musrenbang Keluarahan dan Musrenbang Tk. Kelurahan.

   b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

      Rencana Aksi : Mengadakan Rapat, Pembagian Rapat yang diserahkan kepada Masyarakat terkait kegiatan DAU Kelurahan.

      Rencana Aksi : Mengadakan Rapat, Pelatihan dan Sosialisasi terkait kegiatan DAU Kelurahan.

   c. Evaluasi Kelurahan

      Rencana Aksi : Mengadakan Rapat dan Lomba Tk. Keluarahan.

IV. Program Koordinasi Ketentraman Umum

1. Kegiatan : Koordnasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada dengan Sub Kegiatan :
   a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

      Rencana Aksi :

      - **Rapat internal denga melibatkan Babin, Babinsa dan Tokoh Masayarakat**
      - **Mengadakan Pegawasan terhadap PKL, Rumah Kost dan Pengamanan Lingkungan di wilayah Kecamatan Pontianak Kota.**

V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan Sub Kegaiatan :
   a. Persatuan dan Kesatauan Bangsa

      Rencana Aksi : Mengadakan Kegiatan dalam Rangak HUT RI

b. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional

Rencana Aksi : Mengadakan Rapat dalam rangkaian kegiatan seperti : MTQ, Harjad Kota Pontianak dan Kegaiatn Keagamaan.

3.3.3 Proyeksi Staretegi Kecamatan Pontianak Kota Tahun 2025

Pada tahun 2025 Proyek Strategis Daerah tetap mengacu pada Renstra 2024-2026 yaitu sesuai dengan tabel di bawah ini :

Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	1. Terwujudnya Layanan Publik Pemerinthan Kecamatan yang berkualitas	1. Meningkatkan Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1.Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan 2.Melaksanakan kegiatan pelayanan publik yang dilimpahkan di kecamatan
		2. Meningkatkan koordinasi penyelenggaran urusan pemerintahan umum	1. Melaksanakan Koordinasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
		3. Meningkatkan koordinasi gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	1. Melaksanakan koordinasi gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
	2. Terwujudnya masyarakat kecamatan yang aktif	1. Meningkatkan lembaga/ masyarakat yang aktif	1. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan di kecamatan 2. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif 3. Melaksanakan kegiatan Stunting 4. Melaksanakan kegiatan bantuan material untuk Pembangunan sarana prasrana kelurahan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2025 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program dan kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain :

1. Mempedomani Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Mempedomani RKPD Kota Pontianak Tahun 2025 serta Review Renstra Kecamatan Pontianak Kota Tahun 2024 – 2026.
3. Mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pontianak terpilih, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Pontianak

Menyajikan rumusan program dan kegiatan beserta indikator Kinerja dan pagu indikatif Kecamatan Pontianak Kota, yang disajikan dalam tabel IV (TC 33) sebagai berikut :

TABEL IV.1 (TC.33). RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAN MAJU 2026 KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000
KECAMATAN PONTIANAK KOTA
Sub Unit Organisasi :
7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN
PONTIANAK KOTA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						KECAMATAN PONTIANAK KOTA							16.336.587.000,00	16.585.552.611,00	18.673.824.221,00							18.757.303.250,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							16.336.587.000,00	16.585.552.611,00	18.673.824.221,00							18.757.303.250,00	
	7	01				KECAMATAN							16.336.587.000,00	16.585.552.611,00	18.673.824.221,00							18.757.303.250,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				100 %	100 %	11.398.887.000,00	11.556.227.311,00	11.198.591.421,00							12.035.186.450,00	

	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	114.000.000,00	53.567.500,00	53.567.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		108.900.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				18 Dokumen	18 Dokumen	37.000.000,00	26.010.500,00	30.510.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			24.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000,00	7.100.000,00	2.393.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			24.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	22.000.000,00	7.100.000,00	4.050.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			24.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	22.000.000,00	7.100.000,00	4.965.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			24.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	11.000.000,00	6.257.000,00	6.257.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			12.100.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan Administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	100 %	8.856.269.000,00	9.087.359.611,00	9.087.359.611,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		9.301.282.450,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	8.132.269.000,00	8.381.234.611,00	8.381.235.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			8.538.882.450,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	680.000.000,00	679.200.000,00	680.080.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			714.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12 Laporan	22.000.000,00	4.965.000,00	1.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			24.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	22.000.000,00	21.960.000,00	7.137.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			24.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-			95 %	100 %	11.000.000,00	4.160.000,00	4.160.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		12.100.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	11.000.000,00	4.160.000,00	4.160.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			12.100.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-			95 %	100 %	315.668.000,00	258.210.000,00	258.210.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		324.468.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				162 Paket	162 Paket	227.668.000,00	145.500.000,00	101.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			227.668.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	0 Orang	88.000.000,00	112.710.000,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			96.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			95 %	100 %	464.300.000,00	551.935.940,00	551.935.940,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		594.150.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	38.500.000,00	8.877.000,00	55.301.350,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			97.370.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA

	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	203.500.000,00	177.815.100,00	181.225.800,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			200.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	55.000.000,00	54.986.200,00	56.433.400,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			55.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	66.000.000,00	98.833.000,00	98.833.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			72.600.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	35.300.000,00	18.856.000,00	48.822.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			38.830.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	11.000.000,00	7.920.000,00	7.920.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			12.100.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				5 Laporan	5 Laporan	55.000.000,00	120.000.000,00	15.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			60.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			95 %	100 %	300.000.000,00	132.121.100,00	132.121.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		252.581.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			0,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				60 Unit	60 Unit	300.000.000,00	132.121.100,00	199.152.740,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			252.581.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			95 %	100 %	1.282.650.000,00	1.300.423.160,00	1.300.423.160,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		1.309.655.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	395.000.000,00	431.215.320,00	438.720.271,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			414.750.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	887.650.000,00	869.207.840,00	703.027.840,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			894.905.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-			95 %	95 %	55.000.000,00	168.450.000,00	168.450.000,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		132.050.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				-	8 Unit	0,00	80.790.000,00	58.790.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			71.550.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	55.000.000,00	87.660.000,00	87.660.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			60.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persetase penyelesaian Layanan publik di Kecamatan dan Kelurahan				100 %	100 %	178.050.000,00	344.937.400,00	177.311.200,00							186.952.500,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			100 %	100 %	87.000.000,00	88.082.600,00	88.082.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		91.350.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	87.000.000,00	88.082.600,00	58.887.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			91.350.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	-			100 %	100 %	91.050.000,00	256.854.800,00	256.854.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		95.602.500,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	91.050.000,00	256.854.800,00	118.423.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			95.602.500,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan				100 %	100 %	3.529.000.000,00	3.512.618.900,00	6.334.465.900,00							5.244.014.300,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			90 %	90 %	1.114.000.000,00	103.300.200,00	103.300.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		1.169.700.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				26 Laporan	26 Laporan	1.114.000.000,00	103.300.200,00	82.300.200,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			1.169.700.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	-	2.415.000.000,00	3.409.318.700,00	3.409.318.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		4.074.314.300,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				10 Laporan	10 Laporan	84.000.000,00	71.296.600,00	68.296.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			84.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan Gangguan Trantibum				100 %	100 %	385.000.000,00	402.839.800,00	352.958.800,00							418.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	-			90 %	90 %	385.000.000,00	402.839.800,00	402.839.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		418.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	110.000.000,00	109.943.600,00	78.503.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			121.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 %	100 %	845.650.000,00	768.929.200,00	610.496.900,00							873.150.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			100 %	100 %	845.650.000,00	768.929.200,00	768.929.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		873.150.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				300 Orang	300 Orang	55.000.000,00	60.017.900,00	60.017.900,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			55.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				200 Orang	200 Orang	515.650.000,00	470.208.300,00	325.076.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			515.650.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
						KELURAHAN SUNGAIBANGKONG							16.336.587.000,00	16.585.552.611,00	18.673.824.221,00							18.757.303.250,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							16.336.587.000,00	16.585.552.611,00	18.673.824.221,00							18.757.303.250,00	
	7	01				KECAMATAN							16.336.587.000,00	16.585.552.611,00	18.673.824.221,00							18.757.303.250,00	
6	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	11.398.887.000,00	11.556.227.311,00	11.198.591.421,00							12.035.186.450,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	464.300.000,00	551.935.940,00	551.935.940,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-		594.150.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	12 Paket	0,00	7.195.000,00	3.608.750,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			6.300.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	12 Paket	0,00	6.994.500,00	1.857.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			5.250.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
7	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan				100 %	100 %	3.529.000.000,00	3.512.618.900,00	6.334.465.900,00							5.244.014.300,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan lpm	-			95 %	95 %	2.415.000.000,00	3.409.318.700,00	3.409.318.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		4.074.314.300,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	55.000.000,00	58.955.000,00	34.250.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			60.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	12 Unit	200.000.000,00	125.903.240,00	106.100.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			245.910.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	189.200.000,00	722.496.760,00	1.892.505.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaiangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			198.660.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	22.000.000,00	12.552.000,00	6.452.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaiangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			24.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan Gangguan Trantibum				100 %	100 %	385.000.000,00	402.839.800,00	352.958.800,00							418.000.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	-			90 %	90 %	385.000.000,00	402.839.800,00	402.839.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		418.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00	59.100.000,00	47.210.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			55.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
9	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	845.650.000,00	768.929.200,00	610.496.900,00							873.150.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	-	845.650.000,00	768.929.200,00	768.929.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		873.150.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	50 Orang	55.000.000,00	30.825.000,00	24.595.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaibangkong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			60.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
						KELURAHAN SUNGAIJAWI							16.336.587.000,00	16.585.552.611,00	18.673.824.221,00							18.757.303.250,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							16.336.587.000,00	16.585.552.611,00	18.673.824.221,00							18.757.303.250,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01				KECAMATAN							16.336.587.000,00	16.585.552.611,00	18.673.824.221,00							18.757.303.250,00	
10	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	11.398.887.000,00	11.556.227.311,00	11.198.591.421,00							12.035.186.450,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	464.300.000,00	551.935.940,00	551.935.940,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-		594.150.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	12 Paket	0,00	4.992.600,00	1.223.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaiawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			6.300.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	12 Paket	0,00	6.000.000,00	1.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaiawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			5.250.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
11	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan				100 %	100 %	3.529.000.000,00	3.512.618.900,00	6.334.465.900,00							5.244.014.300,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan lpm	-			95 %	95 %	2.415.000.000,00	3.409.318.700,00	3.409.318.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		4.074.314.300,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaiawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			60.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	12 Unit	200.000.000,00	115.820.000,00	99.320.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaiawi	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			245.910.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	189.200.000,00	589.566.000,00	1.583.566.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaiawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Antar Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			1.650.354.300,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			24.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
12	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan Gangguan Trantibum				100 %	100 %	385.000.000,00	402.839.800,00	352.958.800,00							418.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	-			90 %	90 %	385.000.000,00	402.839.800,00	402.839.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		418.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00	55.000.000,00	53.900.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaijawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			60.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
13	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 %	100 %	845.650.000,00	768.929.200,00	610.496.900,00							873.150.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			100 %	100 %	845.650.000,00	768.929.200,00	768.929.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		873.150.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	50 Orang	55.000.000,00	59.300.000,00	55.100.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Sungaiawi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			60.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
						KELURAHAN MARIANA							16.336.587.000,00	16.585.552.611,00	18.673.824.221,00							18.757.303.250,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							16.336.587.000,00	16.585.552.611,00	18.673.824.221,00							18.757.303.250,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01				KECAMATAN							16.336.587.000,00	16.585.552.611,00	18.673.824.221,00							18.757.303.250,00	
14	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	11.398.887.000,00	11.556.227.311,00	11.198.591.421,00							12.035.186.450,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	464.300.000,00	551.935.940,00	551.935.940,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-		594.150.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	12 Paket	0,00	6.000.000,00	2.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Mariana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			6.300.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	12 Paket	0,00	7.460.000,00	3.640.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Mariana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			5.250.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
15	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan				100 %	100 %	3.529.000.000,00	3.512.618.900,00	6.334.465.900,00							5.244.014.300,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan lpm	-			95 %	95 %	2.415.000.000,00	3.409.318.700,00	3.409.318.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		4.074.314.300,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	55.000.000,00	55.000.000,00	36.710.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Mariana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			60.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program /	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhi	Realisasi Capa	Prakiraan Capai	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah

						Kegiatan / Sub Kegiatan		r Periode Renstra OPD	ian RENJA OPD Tahun 2023	an Target RENJA OPD Tahun 2024	Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Sasaran	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Penanggung Jawab
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	12 Unit	200.000.000,00	141.895.000,00	126.660.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Mariana	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			245.910.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	189.200.000,00	326.940.600,00	594.551.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Mariana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			162.750.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Mariana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			24.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
16	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan Gangguan Trantibum				100 %	100 %	385.000.000,00	402.839.800,00	352.958.800,00							418.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	-			90 %	90 %	385.000.000,00	402.839.800,00	402.839.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		418.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00	56.176.200,00	59.046.200,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Mariana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			60.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
17	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 %	100 %	845.650.000,00	768.929.200,00	610.496.900,00							873.150.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			100 %	100 %	845.650.000,00	768.929.200,00	768.929.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		873.150.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	50 Orang	55.000.000,00	52.540.000,00	49.670.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Mariana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			60.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
						KELURAHAN TENGAH							16.336.587.000,00	16.585.552.611,00	18.673.824.221,00							18.757.303.250,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							16.336.587.000,00	16.585.552.611,00	18.673.824.221,00							18.757.303.250,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01				KECAMATAN							16.336.587.000,00	16.585.552.611,00	18.673.824.221,00							18.757.303.250,00	
18	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	11.398.887.000,00	11.556.227.311,00	11.198.591.421,00							12.035.186.450,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	464.300.000,00	551.935.940,00	551.935.940,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-		594.150.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	12 Paket	0,00	5.996.800,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			6.300.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	12 Paket	0,00	5.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			5.250.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
19	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan				100 %	100 %	3.529.000.000,00	3.512.618.900,00	6.334.465.900,00							5.244.014.300,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan lpm	-			95 %	95 %	2.415.000.000,00	3.409.318.700,00	3.409.318.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		4.074.314.300,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	55.000.000,00	46.315.600,00	28.015.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			60.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	12 Unit	200.000.000,00	103.579.000,00	103.579.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			245.910.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	189.200.000,00	348.608.600,00	573.908.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			162.750.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	22.000.000,00	22.000.000,00	18.300.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			24.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
20	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan Gangguan Trantibum				100 %	100 %	385.000.000,00	402.839.800,00	352.958.800,00							418.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	-			90 %	90 %	385.000.000,00	402.839.800,00	402.839.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		418.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00	55.000.000,00	50.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			60.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
21	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 %	100 %	845.650.000,00	768.929.200,00	610.496.900,00							873.150.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			100 %	100 %	845.650.000,00	768.929.200,00	768.929.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		873.150.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	50 Orang	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			60.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
						KELURAHAN DARATSEKIP							16.336.587.000,00	16.585.552.611,00	18.673.824.221,00							18.757.303.250,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							16.336.587.000,00	16.585.552.611,00	18.673.824.221,00							18.757.303.250,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01				KECAMATAN							16.336.587.000,00	16.585.552.611,00	18.673.824.221,00							18.757.303.250,00	
22	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	11.398.887.000,00	11.556.227.311,00	11.198.591.421,00							12.035.186.450,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	464.300.000,00	551.935.940,00	551.935.940,00			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-		594.150.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				-	12 Paket	0,00	4.999.740,00	2.052.670,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Daratsekip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			6.300.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				-	12 Paket	0,00	10.010.000,00	8.235.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Daratsekip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			5.250.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
23	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan				100 %	100 %	3.529.000.000,00	3.512.618.900,00	6.334.465.900,00							5.244.014.300,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan lpm	-			95 %	95 %	2.415.000.000,00	3.409.318.700,00	3.409.318.700,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		4.074.314.300,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	55.000.000,00	55.000.000,00	37.251.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Daratsekip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			60.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	12 Unit	200.000.000,00	133.500.000,00	133.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Daratsekip	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			245.910.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	189.200.000,00	359.490.300,00	688.800.300,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Daratsekip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			162.750.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	22.000.000,00	21.400.000,00	21.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Daratsekip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			24.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
24	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan Gangguan Trantibum				100 %	100 %	385.000.000,00	402.839.800,00	352.958.800,00							418.000.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	-			90 %	90 %	385.000.000,00	402.839.800,00	402.839.800,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		418.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00	67.620.000,00	64.299.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Daratsekip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			60.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
25	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 %	100 %	845.650.000,00	768.929.200,00	610.496.900,00							873.150.000,00	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			100 %	100 %	845.650.000,00	768.929.200,00	768.929.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		873.150.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				50 Orang	50 Orang	55.000.000,00	41.038.000,00	41.038.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Kota, Daratsekip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			60.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK KOTA
	J U M L A H												**16.336.587.000,00**	**16.585.552.611,00**	**18.673.824.221,00**							**18.757.303.250,00**	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja) Kecamatan Pontianak Kota tahun 2025 merupakan RPD 2024-2026 Kota Pontianak dan Rencana Strategis (Renstra) yang disesuaikan dengan kemampuan dukungan sumber daya dan dukungan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pontianak.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pontianak Kota tahun 2025 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di Kecamatan Pontianak Kota. Harapan kami, semoga dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Kecamatan Pontianak Kota sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan good goverrnance dan publik .

Pontianak, 20 Juni 2025

CAMAT PONTIANAK KOTA

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
KECAMATAN PONTIANAK KOTA

ANISAH NURBAYANI, S.STP
Pembina
Nip. 198207122000122 003

KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

SELALU UNTUK PEMERDAYAAN RAKYAT

RENCANA KERJA PERUBAHAN KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke-*Khadirat* Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan tepat waktu sebagai rencana pelaksanaan kegiatan yang sudah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub. kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kami menyadari Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini masih banyak kekurangannya, kami berharap dengan Renja ini semua kebijakan, program, kegiatan dan sub. kegiatan yang di susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Pontianak Selatan.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini dapat dijadikan pedoman bagi semua komponen Kecamatan Pontianak Selatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan mendukung dalam tercapainya visi Kota Pontianak yaitu “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan yang Cerdas dan Bermartabat”.

Demikian penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 semoga dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak sehingga pelaksanaan program kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana.

Pontianak, Juni 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... …i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN... 1

1.1 Latar Belakang... 1

1.2 Landasan Hukum 5

1.3 Maksud dan Tujuan.....…….. 8

1.4 Sistematika Penulisan .....…8

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU……..…12

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....12

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....…...24

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....…...27

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....….28

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....….36

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH……..38

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... .....…..38

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah. .....…. 39

3.3 Program dan Kegiatan.....…. 54

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....59

BAB V PENUTUP..…… 107

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub. kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program kegiatan dan sub. kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kecamatan Pontianak Selatan merupakan implementasi dari visi dan misi Strategis (Renst ra) Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2021-2025 sesuai arah operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Pontianak Selatan disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Kegiatan pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis guna mencapai tujuan pembangunan daerah.

Untuk mencapai hal tersebut harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan, dengan perencanaan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik pula. Oleh sebab itu dalam Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Pontianak Selatan ini diharapkan dapat terakomudasi dalam KUA-PPAS dan penetapan APBD Tahun 2025, sehingga akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan program, kegiatan dam sub. kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Pontianak Selatan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan yang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yaitu:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam Renja PD harus selaras dengan program, kegiatan dan sub. kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Program, kegiatan dan sub. kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) , indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

Penyusunan Renja PD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan,mencakup :

1. Tahap Perumusan Rancangan Renja PD;
   - Pengolahan data dan informasi
   - Analisis gambaran pelayanan PD;
   - Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD;

- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD;
- Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
- Perumusan tujuan dan sasaran
- Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- Perumusan tujuan dan sasaran
- Penelaahan usulan
- Perumusan kegiatan prioritas;
- Penyajian awal dokumen rancangan Renja PD;
- Penyempurnaan rancangan Renja PD;
- Pembahasan forum PD; dan
- Penyesuaian dokumen rancangan Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM

2. Tahap Penyajian Rancangan Renja PD.

- Menyusun Renja PD;
- Rancangan Renja-PD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- Rancangan Renja PD memuat kebijakan , program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- Program dan kegiatan meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru , indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD serta menunjukan prakiraan maju;

- Rancangan Renja PD dibahas dalam forum OPD yang diselenggarakan bersama atar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam pelaksanaan penyusunan Renja Kecamatan Pontianak Selatan adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).

12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).

18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).

19. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).

20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 34 tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 34)
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pengaunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyeleraskan dokumen renja PD dengan renstra PD serta dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan urusan Kecamatan Pontianak Selatan Kota

Pontianak berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dialkukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stackeholders)*.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Selatan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik meliputi

1.1 Latar belakang,
1.2 Landasan hukum,
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PONTIANAK SELATAN TAHUN LALU

Bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah lalu dan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang sudah disyahkan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
1.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
1.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

Bab ini menjabarkan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Kecamatan Pontianak Selatan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut serta penjelasan tambahan yang dianggap perlu.

BAB. II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PONTIANAK SELATAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu (Tahun 2025) pada Kecamatan Pontianak Selatan, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Tujuan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2025 yang terealisasi dalam Dokumen Rencana anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) capaian program dan kegiatannya. Dana yang telah tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan Pontianak Selatan bersumber dari APBD Kota Pontianak. Penganggaran dana untuk kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Selatan.

Dikarenakan Tahun 2025 merupakan tahun awal perencanaan, sehingga yang bisa ditampilkan di tabel II.1 adalah hanya target program, kegiatan, sub kegiatan untuk tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

II.1 Tabel TC-29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra

Perangkat Daerah 2024-2026

Kota Pontianak

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pontianak Selatan

	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Pogram dan Keluaran Kegiatan s.d dengan Tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	1					2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11= (10/4)
7	01	01				PRORAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasaan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	95	%			95	%	95	%		95 %	95 %	
7	01	01	2.01			Perencanaan, Penggangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%			100	%	100	%		100 %	100 %	
7	01	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dokumen			11	Dokumen	11	Dokumen		11 Dokumen	3 Dokumen	
7	01	01	2.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen			1	Dokumen	1	Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	
7	01	01	2.01	0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	Dokumen			3	Dokumen	3	Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	
7	01	01	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	Laporan			10	Laporan	10	Laporan		30 Laporan	3 Laporan	
7	01	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan			2	Laporan	2	Laporan		2 Laporan	1 Laporan	
7	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95	%			95	%	95	%		95 %	95 %	
7	01	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53	Orang/Bulan			53	Orang/Bulan	53	Orang/Bulan		53 Orang/ Bulan	53 Orang/ Bulan	0

	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Pogram dan Keluaran Kegiatan s.d dengan Tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen			12	Dokumen	12	Dokumen		12 Dokumen	3 Dokumen	0
7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen			12	Dokumen	12	Dokumen		12 Dokumen	3 Dokumen	0
7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	Dokumen			12	Dokumen	12	Dokumen		12 Dokumen	3 Dokumen	0
7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Seme steran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan			12	Laporan	12	Laporan		12 Laporan	3 Laporan	0
7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	18	Laporan			18	Laporan	18	Laporan		18 Laporan	14 Laporan	0
7	01	01	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**95**	**%**			**95**	**%**	**95**	**%**		95 %	95 %	0
7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen			1	Dokumen	1	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0
7	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKP D	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan			4	Laporan	4	Laporan		4 Laporan	1 Laporan	0
7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Laporan			2	Laporan	2	Laporan		2 Laporan	1 Laporan	0
7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Laporan			12	Laporan	12	Laporan		12 Laporan	3 Laporan	0
7	01	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**95**	**%**			**95**	**%**	**95**	**%**		95 %	95 %	0
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	142	Paket			142	Paket	142	Paket		142 Paket	142 Paket	0
7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokumen			1	Dokumen	1	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0
7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah DokumenMonitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen			1	Dokumen	1	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**95**	**%**			**95**	**%**	**95**	**%**		95 %	95 %	0
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket			12	Paket	12	Paket		12 Paket	3 Paket	0

	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Pogram dan Keluaran Kegiatan s.d dengan Tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Parittokaya)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket			12	Paket	12	Paket		12 Paket	3 Paket	0
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kel3urahan Akcaya)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket			12	Paket	12	Paket		12 Paket	3 Paket	0
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Ke3lurahan Kota Baru)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket			12	Paket	12	Paket		12 Paket	3 Paket	0
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Ke3lurahan Ben3ua Melayu Darat)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket			12	Paket	12	Paket		12 Paket	3 Paket	0
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kelurahan Benua Melayu Laut)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket			12	Paket	12	Paket		12 Paket	3 Paket	0
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket			12	Paket	12	Paket		12 Paket	3 Paket	0
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Parittokaya)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket			12	Paket	12	Paket		12 Paket	3 Paket	0
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (kelurahan Akcaya)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket			12	Paket	12	Paket		12 Paket	3 Paket	0
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Kota Baru)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket			12	Paket	12	Paket		12 Paket	3 Paket	0
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (kelurahan Benua Melayu Darat)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket			12	Paket	12	Paket		12 Paket	3 Paket	0
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kelurahan Benua Laut)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket			12	Paket	12	Paket		12 Paket	3 Paket	0
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket			12	Paket	12	Paket		12 Paket	3 Paket	0
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kelurahan Parittokaya)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket			12	Paket	12	Paket		12 Paket	3 Paket	0
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kelurahan Akcaya)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket			12	Paket	12	Paket		12 Paket	3 Paket	0
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kelurahan Kota Baru)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket			12	Paket	12	Paket		12 Paket	3 Paket	0
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kelurahan Benua Melayu Darat)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket			12	Paket	12	Paket		12 Paket	3 Paket	0
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (kelurahan Benua Melayu Laut)	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket			12	Paket	12	Paket		12 Paket	3 Paket	0

	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Pogram dan Keluaran Kegiatan s.d dengan Tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket			12	Paket	12	Paket		12 Paket	3 Paket	0
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Parittokaya)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket			12	Paket	12	Paket		12 Paket	3 Paket	0
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor (kelurahan Akcaya)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket			12	Paket	12	Paket		12 Paket	3 Paket	0
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Kota Baru)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket			12	Paket	12	Paket		12 Paket	3 Paket	0
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kelurajan Benua Melayu Darat)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket			12	Paket	12	Paket		12 Paket	3 Paket	0
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Benua Melayu Laut)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket			12	Paket	12	Paket		12 Paket	3 Paket	0
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket			12	Paket	12	Paket		12 Paket	3 Paket	0
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kelurahan Parittokaya)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket			12	Paket	12	Paket		12 Paket	3 Paket	0
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kelurahan Akcaya)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket			12	Paket	12	Paket		12 Paket	3 Paket	0
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (kelurahan Kota Baru)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket			12	Paket	12	Paket		12 Paket	3 Paket	0
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kelurahan Benua Melayu Darat)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket			12	Paket	12	Paket		12 Paket	3 Paket	0
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (kelurahan Benua Melayu Laut)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket			12	Paket	12	Paket		12 Paket	3 Paket	0
7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen			12	Dokumen	12	Dokumen		12 Dokumen	3 Dokumen	0
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan			12	Laporan	12	Laporan		12 Laporan	3 Laporan	0
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95	%			95	%	95	%		95 %	95 %	0
7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	66	Unit			66	Unit	66	Unit		66 Unit	0 Unit	0
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95	%			95	%	95	%		95 %	95 %	0
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan			12	Laporan	12	Laporan		12 Lporan	3 Lporan	0

	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Pogram dan Keluaran Kegiatan s.d dengan Tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan			12	Laporan	12	Laporan		12 Laporan	3 Laporan	0
7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**95**	**%**			**95**	**%**	**95**	**%**		95 %	95 %	0
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan P erorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit			2	Unit	2	Unit		2 Unit	Unit	0
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26	Unit			26	Unit	26	Unit		26 Unit	Unit	0
7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK**	**95**	**%**			**95**	**%**	**95**	**%**		95 %	95 %	0
7	01	02	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**95**	**%**			**95**	**%**	**95**	**%**		95 %	95 %	0
7	01	02	2.01	0001	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10	Laporan			10	Laporan	10	Laporan		10 Laporan	3 Laporan	0
7	01	03			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**PERSENTASE KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN DI KECAMATAN**	**95**	**%**			**95**	**%**	**95**	**%**		95 %	95 %	0
7	01	03	2.01		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan**	**95**	**%**			**95**	**%**	**95**	**%**		95 %	95 %	0
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif**	**95**	**%**			**95**	**%**	**95**	**%**		95 %	95 %	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kecamatan)	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5	Lembaga Kemasyarakatan			5	Lembaga Kemasyarakatan	5	Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Parittokaya)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan			1	Lembaga Kemasyarakatan	1	Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	0
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Akcaya)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan			1	Lembaga Kemasyarakatan	1	Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	0
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Kota Baru)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan			1	Lembaga Kemasyarakatan	1	Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	0

	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Pogram dan Keluaran Kegiatan s.d dengan Tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Benua Melayu Darat)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan			1	Lembaga Kemasyarakatan	1	Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	0
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Kelurahan Benua Melayu Laut)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1	Lembaga Kemasyarakatan			1	Lembaga Kemasyarakatan	1	Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	0
7	01	03	2.01	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Parittokaya)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3	Unit			3	Unit	3	Unit		3 Unit	Unit	0
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Akcaya)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3	Unit			3	Unit	3	Unit		3 Unit	Unit	0
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Kota Baru)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3	Unit			3	Unit	3	Unit		3 Unit	Unit	0
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Benua Melayu Darat)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3	Unit			3	Unit	3	Unit		3 Unit	Unit	0
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Benua Melayu Laut)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3	Unit			3	Unit	3	Unit		3 Unit	Unit	0
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	33	Laporan			33	Laporan	33	Laporan		33 Laporan	10 Laporan	0
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakkat di Kelurahan (Kelurahan Parittokaya)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas/Ormas			5	Pokmas/Ormas	5	Pokmas/Ormas		5 Pokmas/ Ormas	5 Pokmas/ Ormas	0
					Pemberdayaan Masyarakkat di Kelurahan (Kelurahan Akcaya)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas/Ormas			5	Pokmas/Ormas	5	Pokmas/Ormas		5 Pokmas/ Ormas	5 Pokmas/ Ormas	0
					Pemberdayaan Masyarakkat di Kelurahan (Kelurahan Kota Baru)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas/Ormas			5	Pokmas/Ormas	5	Pokmas/Ormas		5 Pokmas/ Ormas	5 Pokmas/ Ormas	0
					Pemberdayaan Masyarakkat di Kelurahan (Kelurahan Benua Melayu Darat)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas/Ormas			5	Pokmas/Ormas	5	Pokmas/Ormas		5 Pokmas/ Ormas	5 Pokmas/ Ormas	0
					Pemberdayaan Masyarakkat di Kelurahan (Kelurahan Benua Melayu Laut)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5	Pokmas/Ormas			5	Pokmas/Ormas	5	Pokmas/Ormas		5 Pokmas/ Ormas	5 Pokmas/ Ormas	0
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7	Laporan			7	Laporan	7	Laporan		7 Laporan	2 Laporan	0
7	01	03	2.06		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Presentasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**95**	**%**			**95**	**%**	**95**	**%**		95 %	95 %	0
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	75	Keluarga			75	Keluarga	75	Keluarga		75 Keluarga	75 Keluarga	0

	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Pogram dan Keluaran Kegiatan s.d dengan Tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
												Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1	Keluarga			1	Keluarga	1	Keluarga		1 Keluarga	1 Keluarga	0
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1	Keluarga			1	Keluarga	1	Keluarga		1 Keluarga	1 Keluarga	0
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1	Keluarga			1	Keluarga	1	Keluarga		1 Keluarga	1 Keluarga	0
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	10	Keluarga			10	Keluarga	10	Keluarga		10 Keluarga	10 Keluarga	0
7	01	04			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE GANGGUAN TRANTIBUM YANG DAPAT DISELESAIKAN**	**95**	**%**			**95**	**%**	**95**	**%**		95 %	95 %	0
7	01	04	2.02		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	**95**	**%**			**95**	**%**	**95**	**%**		95 %	95 %	0
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kecamatan)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	Laporan			12	Laporan	12	Laporan		12 Laporan	3 Laporan	0
					Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kelurahan Parittokaya)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	Laporan			12	Laporan	12	Laporan		12 Laporan	3 Laporan	0
					Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kelurahan Akcaya)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	Laporan			12	Laporan	12	Laporan		12 Laporan	3 Laporan	0
					Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kelurahan Kota Baru)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	Laporan			12	Laporan	12	Laporan		12 Laporan	3 Laporan	0
					Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (kelurahan Benua Melayu Darat)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	Laporan			12	Laporan	12	Laporan		12 Laporan	3 Laporan	0

	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Pogram dan Keluaran Kegiatan s.d dengan Tahun (n-3) 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2024					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun Berjalan Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (kelurahan Benua Melayu Laut)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	Laporan			12	Laporan	12	Laporan		12 Laporan	3 Laporan	0
7	01	05			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**PERSENTASE KOORDINASI PENY ELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM**	**95**	**%**			**95**	**%**	**95**	**%**		95 %	95 %	0
7	01	05	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**95**	**%**			**95**	**%**	**95**	**%**		95 %	95 %	0
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	2000	Orang			2000	Orang	2000	Orang		2000 Orang	Orang	0
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, da n Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Kecamatan)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	350	Orang			350	Orang	350	Orang		350 Orang	Orang	0
					Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, da n Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Kelurahan Parittokaya)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	350	Orang			350	Orang	350	Orang		350 Orang	Orang	0
					Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, da n Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Kelurahan Akcaya)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	350	Orang			350	Orang	350	Orang		350 Orang	Orang	0
					Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, da n Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Kelurahan Kota Baru)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	350	Orang			350	Orang	350	Orang		350 Orang	Orang	0
					Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, da n Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Kelurahan Ben3ua Meelayu Darat)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	350	Orang			350	Orang	350	Orang		350 Orang	Orang	0
					Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, da n Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Kelurahan Benua Meleayu Laut)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	350	Orang			350	Orang	350	Orang		350 Orang	Orang	0

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan pada Kecamatan Pontianak Selatan merupakan kajian terhadap capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja di Kecamatan Pontianak Selatan ditentukan dalam Pelaksanaan Pelayanan Prima di Kecamatan Pontianak Selatan mengacu kepada pelaksanaan Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Standart Operasioanal Prosedur diatur pada Peraturan Walikota Pontianak Nomor 94 Tahun 2016, meliputi 16 jenis pelayanan di Kecamatan dan 26 jenis pelayanan dikelurahan.

II.2 Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pontianak Selatan

Kota Pontianak

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	**Indikator Sasaran**											
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Perencanaan Pembangunan Kecamatan				95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan				95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	
3.	Terwujudnya Masyarakat yang Berdaya				95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	
	- Indeks Gotong Royong											
	- Persentase Partisipasi masyarakat											
II	**Indikator Program**											
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Layanan Publik				95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	
	- Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan											
2.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	
	- Persentase Koordinasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum											

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum				95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	
	- Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum											
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan				95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	
	- Persentase Lembaga / Masyarakat yang Aktif											
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95	
	- Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan											

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) sebagai sebuah rangkaian cara untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan yang akan ditetapkan. Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi ada beberapa permasalahan/kendala atau isu-isu di Kecamatan Pontianak Selatan, sebagai berikut:

i. Permasalahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, sebagai berikut:

1) Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan-peraturan daerah yang ada kepada masyarakat.
2) Lemahnya kepastian hukum bagi pelanggar ketentraman dan ketertiban.
3) Kurangnya personel ASN pada seksi ketentraman dan ketertiban.
4) Minimnya kesadaran masayarakat
5) Kurangnya koordinasi Perangkat Daerah yang berhubungan dengan lokai di Kecamatan

ii. Permasalahan Bidang Tata Pemerintahan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Tata Pemerintahan, sebagai berikut:

1) Belum maksimalnya pemanfaatan dan tersedianya teknologi informasi dan ketersediaan SDM yang ada.
2) Masih kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan pelayanan prima.

iii. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1) Kurangnya koordinasi antara seksi pemberdayaan masyarakat baik di kecamatan dan kelurahan dengan OPD terkait maupun sebaliknya sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Pontianak Selatan dilaksanakan dengan membandingkan antara Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan hasil analisis kebutuhan Kecamatan Pontianak Selatan, yang disajikan Pada:

II.4 Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Tahun 2025 Kota Pontianak

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Pontianak Selatan

No.			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikatator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikatator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**14.758.479.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**14.758.479.000**	
1	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**66.650.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**66.650.000.000**	
1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	42.600.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terwujudnya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	42.600.000,000	
1	1	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumentasi RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	4.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terwujudnya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4.300.000.000	
1	1	5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	4.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terwujudnya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4.300.000.000	
1	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja	10 Laporan	11.150.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terwujudnya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	11.150.000.000	
1	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	4.300.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terwujudnya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4.300.000..000	
1	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**9.991.157.880**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**9.991.157.880,000**	
1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua	Jumlah Orang yang Menrima Gaji dan Tunjangan ASN	53 orang/bulan	9.370.705.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.370.705.000.000	

No.			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikatator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikatator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
				Kelurahan					Kelurahan				
1	2	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	555.320.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	555.320.000.00	
1	2	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	43.320.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43.320.000.00	
1	2	4	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	2.506.970	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.506.970.00	
1	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	17.495.910	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.495.910.00	
1	2	6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	1.810.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.810.000.00	
1	**3**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**				16.925.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				16.925.000.00	
1	3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	4.450.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terpenuhinya Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.450.000.00	
1	2	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4.125.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terpenuhinya Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.125.000,00	
1	2	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua	Jumlah Laporan Rekonsilasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	4.175.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua	Jumlah Laporan Rekonsilasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terpenuhinya Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.175.000,00	

No.			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikatator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikatator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
				Kelurahan					Kelurahan				
1	2	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	12 Laporan	4.175.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Terpenuhinya Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.175.000,0	
1	**4**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**146.575.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**				**146.575.000,0**	
1	4	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	142 Stel	126.775.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terpenuhinya administrasi kepegawaiannya	126.775.000,00	
1	4	3	Pendataan dan Pengeleloaan Administrasi Kepegawaian	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	9.400.000	Pendataan dan Pengeleloaan Administrasi Kepegawaian	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Terpenuhinya administrasi kepegawaiannya	9.400.000,00	
1	4	5	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	10.400.000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terpenuhinya administrasi kepegawaiannya	10.400.000,00	
1	**5**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**339.024.735**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**339.024.735,0**	
1	5	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	11.880.300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.880.300,0	
1	5	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	47.290.865	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	47.290.865,0	

No.			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikatator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikatator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
1	5	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	23.084.770	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	23.084.770,00	
1	5	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	90.905.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.905.000,00	
1	5	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	34.771.800	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.771.800,00	
1	5	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	8.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.000.000	
1	5	7	Penyelenggaraan Rapat Ko ordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	123.092.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	123.092.000,00	
1	**6**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				525.127.733	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**525.127.733,00**	
1	6	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gesung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	66 Unit	525.127.733	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gesung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah	525.127.733,00	
1	**7**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				1.066.071.352	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**1.066.071.352,00**	
1	7	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	202.787.352	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.787.352,00	

No.			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikatator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikatator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
1	7	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	863.284.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	863.284.000	
1	**8**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**58.130.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**58.130.000,00**	
1	8	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	37.830.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.830.000,00	
1	8	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	20.300.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.300.000,00	
2			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**797.265..000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**				**797.265..000,00**	
2	**1**		**Penyelenggaraan Urusan Pemeintahanyang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan**				**797.265..000**	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**				**797.265..000,00**	
2	1	1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	797.265..000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	797.265..000	

No.			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikatator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Lokasi	Indikatator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1			2	3	4	5	6	7	3	9	10	11	12
3			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**1.266.542.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**				**1.266.542.000,00**	
3	1		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**				350.000.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				350.000.000,00	
3	1	1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	33 Laporan	350.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan di Kecamatan	350.000.000,00	
3	**2**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**271.558.000**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**				**271.558.000,00**	
3	2	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	64.658.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	64.658.000	
			Evaluasi Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7 Laporan	206.900.000	Evaluasi Kelurahan	Kota Pontianak, Pontianak Selatan,Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	206.900.000	
3	6		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				**644.984.000**	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**				644.984.000	
3	6	2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	75 Keluarga	138.550.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	138.550.000	
3	6	5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1 Keluarga	138.900.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	138.900.000	
3	6	7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Keluarga	60.500.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	60.500.000	

3	6	9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	1 Keluarga	109.334.000	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	109.334.000	
3	6	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	1 Keluarga	197.700.000	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	197.700.000	
4			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**65.491.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**				**65.491.000**	
4	**1**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**65.491.000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**				**65.491.000**	
4	1	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	65.491.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananaya Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	**65.491.000**	
5			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**419.519.300**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**				**419.519.300**	
5	**1**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**419.519.300**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**				**419.519.300**	
5	1	1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	2000 Orang	60.490.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	60.490.000	
5	1	2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	350 Orang	359.029.300	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	**359.029.300**	
Total							**14.758.479.000**					14.758.479.000	

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, tokoh masyarakat yang bermusyawarah dalam musrenbang . Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kecamatan adalah forum musyawarah Tahunan para pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di Wilayah Kecamatan yang didasarkan pada masukan dari kelurahan, serta menyepakati rencana kegiatan tersebut. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Pontianak Selatan tahun 2025 dilihat pada tabel:

II.5 Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kota Pontianak

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Pontianak Selatan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
Asmas					
1	Fasilitasi kegiatan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan Masyarakat dan penanggulangan bencana di lingkungan perumahan	Wilayah Administrasi RT di RW.015, Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak		Pembinaan Pemilik Kios Sewa, Rumah Kontrak dan Rumah Kost (Pencatatan dan Perjanjian Dengan Pengguna Bangunan) 35 orang	
2	Bantuan material penataan lingkungan (jalan,drainase, taman, lapangan, fasos, fasum dll...)	RT.002 RW.015, Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak		Bantuan Penyelesaian Pembuatan Taman Gang Madyosari 1	
3	Pengadaan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan dan pengumpul sampah (tosa, gerobak, mesin tebas dll…)	RT.002 RW.008, Kelurahan Parittokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak		bantuan 1 unit mesin tebas gang purnama indah 1	
4	Pengadaan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan dan pengumpul sampah (tosa, gerobak, mesin tebas dll…)	RT 002 RW 007, Kelurahan Parittokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak		bantuan 4 unit tempat sampah Purnama Agung 7 blok D, E, F dan G	
5	Pengadaan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan dan pengumpul sampah (tosa, gerobak, mesin tebas dll…)	RT 003 RW 007, Kelurahan Parittokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak		Bantuan 1 unit mesin tebas	
6	Pengadaan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan dan pengumpul sampah (tosa, gerobak, mesin tebas dll…)	RT 005 RW 013, Kelurahan Parittokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak		Bantuan 1 unit mesin tebas	
7	Fasilitasi pendidikan keterampilan bagi masyarakat	PKK Kelurahan Parittokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak		Pembinaan dan Keterampilan bagi Keluarga yang Beresiko Stunting	
8	Fasilitasi pendidikan keterampilan bagi masyarakat	Forum Anak Kelurahan Parittokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak		Pelatihan MC Bagi Anak Anak	
9	Bantuan dan pemeliharaan sarana dan prasarana posyandu	PKK Kelurahan Kotabaru Jl. Kurnia, Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak		Perlu bantuan sarana dan Prasarana posyandu anggota PKK Kelurahan Kotabaru berupa karpet plastik sebanyak 9 posyandu berukuran 2 meter x 15 meter per posyandu	

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
Pokir					
	(Kec. Selatan) Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	Gg. Teluk Pakedai, Kota Pontianak		200 Meter	Pekerjaan Pengaspalan
	(Kec. Selatan) Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	Jl. Bina Jaya Gg. Berkah Jaya, Kota Pontianak		200 Meter	Pekerjaan Drainase
	(Kec. Selatan) Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	Jl. Harapan Jaya Gg. Harapan Jaya 1, Kota Pontianak		150 Meter	Pekerjaan Drainase
	(Kec. Selatan) Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	Jl. Bina Jaya Gg. Keluarga Damai, Kota Pontianak		150 Meter	Pekerjaan Pengaspalan
	(Kec. Selatan) Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	Jl. Prof. M. Yamin Gg. Baru, Kota Pontianak		100 Meter	Pekerjaan Pengaspalan
	(Kec. Selatan) Bantuan Material Panataan Lingkungan (Jalan, Drainase, Taman, Lapangan, Fasos, Fasum, dll...)	Jl. Prof. M. Yamin Gg. Swakarya 2, Kota Pontianak		150 Meter	Pekerjaan Pengaspalan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku pembangunan kecamatan, Kecamatan Pontanak Selatan telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.

Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Selatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu tahun 2025, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Millenium Development Goals (MDG's).

Perencanaan pembangunan daerah tersebut dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana Organisasi perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat sehingga penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mekanisme Musrenbang sebagai saluran formal bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan telah mendapatkan legalisasi dan jaminan bahwa paling sedikit 30% dari Usulan Musrenbang akan diakomodasi dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah. Telaahan terhadap kebijakan pembangunan daerah baik ditingkat pusat maupun Provinsi, merupakan masukkan bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2025, dimana baik kebijakan di tingkat pusat, tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten diharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Pontianak Selatan dapat menyentuh sasaran yang tepat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan lebih spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalamRenstra.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*spesific*), terukur (*measuable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

III.2 Tabel
Tujuan Sasaran, Strategi, dan Arah
Kebijakan Kecamatan Pontianak Selatan

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas layanan Publik	1	Sasaran 1.1 Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas	1	Strategi 1.1 Tingkatkan Kepuasaan masyarakat atas layanan publik Kecamatan termasuk respon atas laporan masyarakat atas aduan mengenai gangguan keamanan dan ketertiban	1	Arah Kebijakan 1.1 - Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Melaksanakan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	2	Sasaran 1.2 Terwujudnya Masyarakat Kecamatan yang berdaya	2	Strategi 1.2 Meningkatkan keaktifan masyarakat dalam bergotong royong membersihkan lingkungan	2	Arah Kebijakan 1.2 Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan
				Strategi 1.3 Meningkatkan partisipasi masyarakat Kecamatan baik dalam perencanaan pembangunan maupun dalam pelaksanaan pembangunan		Arah Kebijakan 1.3 Melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

III.2 Tabel (T-C.27)
Daftar Rencana Aksi dan Sub Kegiatan Pengampu
Tahun 2025

No	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran	Volume	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KECAMATAN PONTIANAK SELATAN						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.653.600	…	Kecamatan Pontianak Selatan	…
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.775.000		Kecamatan Pontianak Selatan	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kerja	12.980.000		Kecamatan Pontianak Selatan	
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.000.000		Kecamatan Pontianak Selatan	
Administrasi Keuangan						
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menrima Gaji dan Tunjangan ASN	8.293.945.000		Kecamatan Pontianak Selatan	
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	548.840.000		Kecamatan Pontianak Selatan	
7	Koordinasi san pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD	27.460.000		Kecamatan Pontianak Selatan	
8	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.506.970		Kecamatan Pontianak Selatan	

No	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran	Volume	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.552.910		Kecamatan Pontianak Selatan	
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.810.000		Kecamatan Pontianak Selatan	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
11	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.220.000		Kecamatan Pontianak Selatan	
12	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1.220.000		Kecamatan Pontianak Selatan	
13	Rekonsiliasi dan pemyusunana Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsilasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.220.000		Kecamatan Pontianak Selatan	
14	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	1.220.000		Kecamatan Pontianak Selatan	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	130.660.000		Kecamatan Pontianak Selatan	
16	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	3.095.000		Kecamatan Pontianak Selatan	
17	Monitoring, evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.095.000		Kecamatan Pontianak Selatan	
Administrasi Umum Perangkat Daerah						

No	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran	Volume	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.080.500		Kecamatan Pontianak Selatan	
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50.452.400		Kecamatan Pontianak Selatan	
20	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16.807.300		Kecamatan Pontianak Selatan	
21	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	89.792.000		Kecamatan Pontianak Selatan	
22	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17.014.000		Kecamatan Pontianak Selatan	
23	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8.000.000		Kecamatan Pontianak Selatan	
24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.110.000		Kecamatan Pontianak Selatan	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
25	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	156.724.950		Kecamatan Pontianak Selatan	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	227.663.910,37		Kecamatan Pontianak Selatan	
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	633.954.581,63		Kecamatan Pontianak Selatan	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

No	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran	Volume	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	42.590.000		Kecamatan Pontianak Selatan	
29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18.750.000		Kecamatan Pontianak Selatan	
PROGRAM PENYELENGGRAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						
30	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Dokumen SKM Se-Kecamatan Pontianak Selatan , Peningkatan Kualitas Pelayanan Dikecamatan dan Kelurahan,	4.880.000		Kecamatan Pontianak Selatan	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						
31	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Gotongroyong, Fasilitasi kegiatan PKK Kecamatan, Pembinaan Kegiatan Posyandu, Pembinaan Olahraga Kesenian dan kebudayaan, Kegiatan Forum anak Kecamatan	167.863.600		Kecamatan Pontianak Selatan	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
32	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Musrenbang Kecamatan	32.788.700		Kecamatan Pontianak Selatan	
33	Evaluasi Kelurahan	Pelaksanaan Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan, Fasilitasi kegiatan Lomba Lomba, Lomba Kebersihan dan Penghijauan	32.107.300		Kecamatan Pontianak Selatan	
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						

No	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran	Volume	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar – Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Pelaksanaan Kegiatan senam, Kegiatan Monitoring Gotong royong	138.550.000		Kecamatan Pontianak Selatan	
35	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah sehat dan Layak huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, pendataan , Survei	138.500.000		Kecamatan Pontianak Selatan	
36	Penumbuhan kesadaran Keluarga dalam Peningkatan derajat kesejahteraan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan perilaku Hidup bersih dan Sehat	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Perilaku Hidup Sehat, Pendataan Wilayah.	60.500.000		Kecamatan Pontianak Selatan	
37	Penumbuhan kesadaran Keluarga dalam peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Lingkungan Bersih dan Sehat, Pendataan Wilayah.	109.334.000		Kecamatan Pontianak Selatan	
38	Penumbuhan dan Peningkatahn Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan menuju Keluarga Berkualitas.	Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Balita , Pendataan Balita Stunting, dan Sosialisasi	197.700.000		Kecamatan Pontianak Selatan	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERIBAN UMUM						
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						
39	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau	Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	65.491.000		Kecamatan Pontianak Selatan	

No	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran	Volume	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kepolisian Negara Republik Indonesia					
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						
40	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kegiatan HUT RI Kecamatan	60.490.000		Kecamatan Pontianak Selatan	
41	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kegiatan Lomba Lomba Kelurahan, Pembinaan STQ/MTQ Kecamatan, Kegiatan Perayaan hari Jadi Kota Pontianak	359.029.300		Kecamatan Pontianak Selatan	
KELURAHAN PARITTOKAYA						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.196.700		Kelurahan Parittokaya	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10.806.500		Kelurahan Parittokaya	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3.948.500		Kelurahan Parittokaya	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi	9.955.000		Kelurahan Parittokaya	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5.840.000		Kelurahan Parittokaya	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	3.760.000		Kelurahan Parittokaya	

No	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran	Volume	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				
7	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.430.000		Kelurahan Parittokaya	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
8	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Musrenbang Kecamatan	24.138.000		Kelurahan Parittokaya	
9	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Pelaksanaan Pengadaan sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000		Kelurahan Parittokaya	
10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Gotongroyong, Fasilitasi kegiatan PKK Kecamatan, Pembinaan Kegiatan Posyandu, Pembinaan Olahraga Kesenian dan kebudayaan, Kegiatan Forum anak Kecamatan	221.000.000		Kelurahan Parittokaya	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERIBAN UMUM						
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						
11	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12.000.000		Kelurahan Parittokaya	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						

No	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran	Volume	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kegiatan Lomba Lomba Kelurahan, inovasi kelurahan, Fasilitasi kegiatahn Lomba Lomba , Lomba Kebersihan dan Penghijauan, Kegiatan Perayaan hari Jadi Kota Pontianak	13.000.000		Kelurahan Parittokaya	
KELURAHAN AKCAYA						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.000.000		Kelurahan Akcaya	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10.000.000		Kelurahan Akcaya	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4.000.000		Kelurahan Akcaya	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi	10.000.000		Kelurahan Akcaya	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8.000.000		Kelurahan Akcaya	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3.760.000		Kelurahan Akcaya	
7	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		7.430.000		Kelurahan Akcaya	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
8	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Musrenbang Kecamatan	25.333.900		Kelurahan Akcaya	

No	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran	Volume	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					
9	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Pelaksanaan Pengadaan sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000		Kelurahan Akcaya	
10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Gotongroyong, Fasilitasi kegiatan PKK Kecamatan, Pembinaan Kegiatan Posyandu, Pembinaan Olahraga Kesenian dan kebudayaan, Kegiatan Forum anak Kecamatan	215.000.000		Kelurahan Akcaya	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERIBAN UMUM						
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						
11	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12.050.000		Kelurahan Akcaya	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						
12	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kegiatan Lomba Lomba Kelurahan, inovasi kelurahan, Fasilitasi kegiatahn Lomba Lomba , Lomba Kebersihan dan Penghijauan, Kegiatan Perayaan hari Jadi Kota Pontianak	13.187.200		Kelurahan Akcaya	
KELURAHAN KOTABARU						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4.000.000		Kelurahan Kotabaru	

No	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran	Volume	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4.000.000		Kelurahan Kotabaru	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi	10.000.000		Kelurahan Kotabaru	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8.000.000		Kelurahan Kotabaru	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3.760.000		Kelurahan Kotabaru	
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8.000.000		Kelurahan Kotabaru	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
7	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Musrenbang Kecamatan	25.000.000		Kelurahan Kotabaru	
8	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Pelaksanaan Pengadaan sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000		Kelurahan Kotabaru	
9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Gotongroyong, Fasilitasi kegiatan PKK Kecamatan, Pembinaan Kegiatan Posyandu, Pembinaan Olahraga Kesenian dan kebudayaan, Kegiatan Forum anak Kecamatan	224.000.000		Kelurahan Kotabaru	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERIBAN UMUM						
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						

No	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran	Volume	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12.000.000		Kelurahan Kotabaru	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						
11	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kegiatan Lomba Lomba Kelurahan, inovasi kelurahan, Fasilitasi kegiatahn Lomba Lomba , Lomba Kebersihan dan Penghijauan, Kegiatan Perayaan hari Jadi Kota Pontianak	13.000.000		Kelurahan Kotabaru	
KELURAHAN BENUAMELAYU DARAT						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.999.050		Kelurahan benua Melayu Darat	
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3.998.900		Kelurahan benua Melayu Darat	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi	10.000.000		Kelurahan benua Melayu Darat	
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8.000.000		Kelurahan benua Melayu Darat	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	3.760.000		Kelurahan benua	

No	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran	Volume	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Melayu Darat	
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7.510.000		Kelurahan benua Melayu Darat	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
7	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Musrenbang Kecamatan	25.000.000		Kelurahan benua Melayu Darat	
8	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Pelaksanaan Pengadaan sarana dan Prasarana Kelurahan	150.000.000		Kelurahan benua Melayu Darat	
9	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Gotongroyong, Fasilitasi kegiatan PKK Kecamatan, Pembinaan Kegiatan Posyandu, Pembinaan Olahraga Kesenian dan kebudayaan, Kegiatan Forum anak Kecamatan	100.000.000		Kelurahan benua Melayu Darat	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERIBAN UMUM						
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						
10	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12.000.000		Kelurahan benua Melayu Darat	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						

No	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran	Volume	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kegiatan Lomba Lomba Kelurahan, inovasi kelurahan, Fasilitasi kegiatahn Lomba Lomba , Lomba Kebersihan dan Penghijauan, Kegiatan Perayaan hari Jadi Kota Pontianak	13.000.000		Kelurahan benua Melayu Darat	
KELURAHAN BENUAMELAYU LAUT						
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.554.800		Kelurahan Benua Melayu Laut	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9.992.000		Kelurahan Benua Melayu Laut	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4.001.400		Kelurahan Benua Melayu Laut	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi	9.607.000		Kelurahan Benua Melayu Laut	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8.000.000		Kelurahan Benua Melayu Laut	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3.760.000		Kelurahan Benua Melayu Laut	
7	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8.120.000		Kelurahan Benua	

No	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran	Volume	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Melayu Laut	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						
8	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pelaksanaan Tahapan Kegiatan Musrenbang Kecamatan	26.286.900		Kelurahan Benua Melayu Laut	
9	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan	Pelaksanaan Pengadaan sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000		Kelurahan Benua Melayu Laut	
10	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Gotongroyong, Fasilitasi kegiatan PKK Kecamatan, Pembinaan Kegiatan Posyandu, Pembinaan Olahraga Kesenian dan kebudayaan, Kegiatan Forum anak Kecamatan	227.000.000		Kelurahan Benua Melayu Laut	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERIBAN UMUM						
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						
11	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	8.680.000		Kelurahan Benua Melayu Laut	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						
12	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan	Kegiatan Lomba Lomba Kelurahan, inovasi kelurahan, Fasilitasi kegiatan Lomba Lomba , Lomba Kebersihan dan Penghijauan, Kegiatan Perayaan hari Jadi Kota Pontianak	16.652.000		Kelurahan Benua Melayu Laut	

No	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran	Volume	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Lokal, Regional, dan Nasional					

Proyek Strategis berdasarkan Hasil Musrenbang Kecamatan Pontianak Selatan			
Bidang	**Jumlah Usulan**	**Tanggapan**	**Usulan Kecamatan**
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**89**	Telah diteruskan ke OPD terkait	**1**
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	**50**	Telah diteruskan ke OPD terkait	**-**
Bidang Pembangunan Manusia	**39**	Telah diteruskan ke OPD terkait	**7**
Jumlah Total Usulan	**178**		

3.3 Program dan Kegiatan

1. Program

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tentunya akan dapat mewujudkan keberhasilan pencapaian misi yang pada akhirnya dapat pula mendukung keberhasilan pencapaian visi suatu organisasi.

Program Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak mengacu pada Rencana Strategis 2024-2026. Program di uraikan dalam bentuk kegiatan sebagaimana kegiatan pokok Pemerintah Daerah Kota Pontianak yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Selatan. Jumlah Program Kecamatan Pontianak Selatan berjumlah 5 (Program) Program, didalam program terdapat 14 kegiatan dan 99 sub. Kegiatan yang mendukung program/kegiatan Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2025.

2. Kegiatan

Adapun bentuk kongkrit kegiatan-kegiatan pokok terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pontianak Selatan yang direncanakan pada tahun anggaran 2025 terdiri dari 5 program, 14 kegiatan dan 99 sub kegiatan. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Pontianak pada kurun waktu 5 (lima) tahun.

Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah

pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Rencana Program dan Kegiatan merupakan cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan–permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Tahun 2025 meliputi :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusuna Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD
   d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
   c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
   d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
   f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
   b. Pembinaan, Pengawasan,dan Pengendalian Barang Milik Daerah Pada SKPD
   c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD
   d. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   a. Pengadaan Pakaian Dinas BesertaAtribut Kelengkapannya
   b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
   c. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Komponen Instalasi Lisrik/Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan dan 5 Kelurahan)
   b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Kecamatan dan 3 Kelurahan)
   c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Kecamatan dan 5 Kelurahan)
   d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan dan 5 Kelurahan)
   e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kecamatan dan 5 Kelurahan)
   f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
   g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

b. Penyediaan Jasa dan Umum Kantor (Kecamatan dan 5 Kelurahan)

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Kecamatan dan 5 Kelurahan)

❖ Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak di Laksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan

a. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan dan 5 Kelurahan)

❖ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Di Kelurahan (5 Kelurahan)

b. Evaluasi Kelurahan

3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

a. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat

b. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah

c. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
d. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
e. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

❖ Program Koordinasi Ketentraman Umum

1. Koordnasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada

a. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kecamatan dan 5 Kelurahan)

❖ Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

a. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

b. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional (Kecamatan dan 5 Kelurahan)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan/sub. kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dn adaan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan/sub. kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Rencana Program dan Kegiatan/Sub. Kegiatalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan/Sub. Kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan– permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Tahun 2025 meliputi (tabel terlampir).

IV.1 Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kota Pontianak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						KECAMATAN PONTIANAK SELATAN							15.495.444.000,00	15.789.302.003,00	17.318.317.622,00							12.559.382.500,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							15.495.444.000,00	15.789.302.003,00	17.318.317.622,00							12.559.382.500,00	
	7	01				KECAMATAN							15.495.444.000,00	15.789.302.003,00	17.318.317.622,00							12.559.382.500,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	11.087.234.250,00	11.012.454.779,00	10.645.965.822,00							9.517.172.750,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	81.650.000,00	140.208.600,00	140.208.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		81.650.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	57.600.000,00	44.453.600,00	41.653.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			57.600.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																	

							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.300.000,00	2.775.000,00	2.775.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			4.300.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																	
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	4.300.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			4.300.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	10 Laporan	11.150.000,00	12.980.000,00	12.980.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			11.150.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	4.300.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			4.300.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 %	100 %	8.620.539.880,00	8.956.394.883,00	8.956.394.883,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		7.238.675.880,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

																		an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.					
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	8.000.087.000,00	8.293.945.003,00	8.293.946.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			6.618.223.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	555.320.000,00	623.120.000,00	548.840.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			555.320.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																	
							Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	43.320.000,00	27.460.000,00	27.460.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			43.320.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.506.970,00	2.506.970,00	2.506.970,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			2.506.970,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	17.495.910,00	7.552.910,00	7.552.910,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			17.495.910,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	1.810.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			1.810.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	-	16.925.000,00	16.925.000,00	16.925.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		16.925.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.450.000,00	4.450.000,00	1.220.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			4.450.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	4.125.000,00	4.125.000,00	1.220.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintah			4.125.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

																		pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	an yang Baik				
	7	01	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.175.000,00	4.175.000,00	1.220.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			4.175.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	4.175.000,00	4.175.000,00	1.220.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			4.175.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	146.575.000,00	153.405.000,00	153.405.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		32.477.500,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				142 Paket	142 Paket	126.775.000,00	133.605.000,00	130.660.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			12.677.500,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

	7	01	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	9.400.000,00	9.400.000,00	3.095.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			9.400.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
							Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	10.400.000,00	10.400.000,00	3.095.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			10.400.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	514.925.285,00	425.084.270,00	425.084.270,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		514.925.285,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	11.880.300,00	11.862.800,00	5.080.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			11.880.300,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	47.290.865,00	47.286.900,00	50.452.400,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintah			47.290.865,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

																		memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	an yang Baik				
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	23.084.770,00	23.084.770,00	16.807.300,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			23.084.770,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	90.905.000,00	73.200.000,00	89.792.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			90.905.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	34.771.800,00	34.771.800,00	17.014.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			34.771.800,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			8.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

																		penyeludupan.					
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	123.092.000,00	68.130.000,00	44.110.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			123.092.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	-	525.127.733,00	375.798.300,00	375.798.300,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		525.127.733,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				66 Unit	66 Unit	525.127.733,00	375.798.300,00	156.724.950,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			525.127.733,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	1.066.071.352,00	830.578.726,00	830.578.726,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		991.971.352,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	202.787.352,00	185.050.276,00	227.663.910,37	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			202.787.352,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	863.284.000,00	645.528.450,00	633.954.581,63	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			789.184.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	115.420.000,00	114.060.000,00	114.060.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		115.420.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	37.830.000,00	37.830.000,00	42.590.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			37.830.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				26 Unit	26 Unit	20.300.000,00	20.300.000,00	18.750.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantas	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			20.300.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

																		an korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.					
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELESAIAN LAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN DAN KELURAHAN				100 %	100 %	38.265.000,00	8.354.200,00	4.880.000,00							38.265.000,00	
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-			95 %	95 %	38.265.000,00	8.354.200,00	8.354.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		38.265.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				10 Laporan	10 Laporan	38.265.000,00	8.354.200,00	4.880.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			38.265.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE LEMBAGA / MASYARAKAT YANG AKTIF				90 %	90 %	3.759.444.950,00	4.023.973.500,00	5.969.448.700,00							2.393.444.950,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan lpm	-			95 %	95 %	350.000.000,00	193.934.000,00	193.934.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		350.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																	
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				33 Laporan	33 Laporan	350.000.000,00	193.934.000,00	167.863.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			350.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	-			95 %	95 %	2.764.460.950,00	3.012.638.400,00	3.012.638.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		1.397.460.950,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	64.658.000,00	64.658.000,00	32.788.700,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			64.658.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan																	
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				7 Laporan	7 Laporan	206.900.000,00	191.886.700,00	32.107.300,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			206.900.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	-	644.984.000,00	817.401.100,00	817.401.100,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		645.984.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				50 Keluarga	50 Keluarga	138.550.000,00	206.944.200,00	206.944.200,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			138.550.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah				50 Keluarga	50 Keluarga	138.900.000,00	138.898.100,00	90.548.100,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			139.900.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				50 Keluarga	50 Keluarga	60.500.000,00	60.487.500,00	30.897.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantas	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			60.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

																		an kemiskinan.					
	7	0 1	0 3	2.0 6	000 9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				50 Keluarga	50 Keluarga	109.334.000,00	213.374.900,00	284.099.900,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			109.334.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	0 1	0 3	2.0 6	001 2	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				50 Keluarga	50 Keluarga	197.700.000,00	197.696.400,00	178.246.400,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			197.700.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
4	7	0 1	0 4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENANGANAN GANGGUAN TRANTIBUM				90 %	90 %	122.221.000,00	314.232.900,00	289.737.900,00							122.221.000,00	
	7	0 1	0 4	2.0 2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	-			95 %	95 %	122.221.000,00	314.232.900,00	314.232.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		122.221.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	0 1	0 4	2.0 2	000 1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	65.491.000,00	256.741.000,00	258.101.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			65.491.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				90 %	90 %	488.278.800,00	430.286.624,00	408.285.200,00							488.278.800,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			95 %	95 %	488.278.800,00	430.286.624,00	430.286.624,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		488.278.800,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				2000 Orang	2000 Orang	60.490.000,00	60.485.600,00	60.485.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			60.490.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				350 Orang	350 Orang	359.029.300,00	296.622.900,00	297.832.900,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			359.029.300,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
						KELURAHAN PARIT TOKAYA							15.495.444.000,00	15.789.302.003,00	17.318.317.622,00							12.559.382.500,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							15.495.444.000,00	15.789.302.003,00	17.318.317.622,00							12.559.382.500,00	
	7	01				KECAMATAN							15.495.444.000,00	15.789.302.003,00	17.318.317.622,00							12.559.382.500,00	
6	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	11.087.234.250,00	11.012.454.779,00	10.645.965.822,00							9.517.172.750,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	514.925.285,00	425.084.270,00	425.084.270,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		514.925.285,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	3.196.700,00	3.196.700,00	2.557.360,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			3.196.700,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	10.806.500,00	10.806.500,00	8.112.440,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			10.806.500,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	3.948.500,00	3.948.500,00	3.158.800,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			3.948.500,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	9.955.000,00	9.955.000,00	7.808.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			9.955.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	5.840.800,00	5.840.800,00	4.672.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintah			5.840.800,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

																		pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	an yang Baik				
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	115.420.000,00	114.060.000,00	114.060.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		115.420.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	3.760.000,00	3.760.000,00	2.632.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			3.760.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	7.430.000,00	7.430.000,00	5.201.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			7.430.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
7	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE LEMBAGA / MASYARAKAT YANG AKTIF				90 %	90 %	3.759.444.950,00	4.023.973.500,00	5.969.448.700,00							2.393.444.950,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan lpm	-			95 %	95 %	2.764.460.950,00	3.012.638.400,00	3.012.638.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		1.397.460.950,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	

							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	24.138.000,00	24.138.000,00	24.138.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			24.138.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			100.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	351.500.000,00	401.500.000,00	772.807.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			100.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
8	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENANGANAN GANGGUAN TRANTIBUM				90 %	90 %	122.221.000,00	314.232.900,00	289.737.900,00							122.221.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	-			95 %	95 %	122.221.000,00	314.232.900,00	314.232.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		122.221.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	7.700.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			12.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

																		ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
9	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	488.278.800,00	430.286.624,00	408.285.200,00							488.278.800,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			95 %	95 %	488.278.800,00	430.286.624,00	430.286.624,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		488.278.800,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				350 Orang	350 Orang	12.920.300,00	12.920.300,00	10.735.300,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Parittokaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			12.920.300,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
						KELURAHAN AKCAYA							15.495.444.000,00	15.789.302.003,00	17.318.317.622,00							12.559.382.500,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							15.495.444.000,00	15.789.302.003,00	17.318.317.622,00							12.559.382.500,00	
	7	01				KECAMATAN							15.495.444.000,00	15.789.302.003,00	17.318.317.622,00							12.559.382.500,00	
10	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	11.087.234.250,00	11.012.454.779,00	10.645.965.822,00							9.517.172.750,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	-	514.925.285,00	425.084.270,00	425.084.270,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		514.925.285,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	3.193.200,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			4.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

																		dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.					
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	7.362.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			10.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	3.198.200,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			4.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	5.438.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			10.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	8.000.000,00	7.999.700,00	6.334.200,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			8.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	115.420.000,00	114.060.000,00	114.060.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		115.420.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	3.760.000,00	3.760.000,00	2.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			3.760.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	7.430.000,00	7.430.000,00	4.790.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			7.430.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
11	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	3.759.444.950,00	4.023.973.500,00	5.969.448.700,00							2.393.444.950,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan lpm	-			95 %	95 %	2.764.460.950,00	3.012.638.400,00	3.012.638.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		1.397.460.950,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	25.333.900,00	25.333.900,00	25.333.900,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			25.333.900,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

																		pemberantasan kemiskinan.					
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			100.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	344.000.000,00	394.000.000,00	773.872.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			100.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
12	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	122.221.000,00	314.232.900,00	289.737.900,00							122.221.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	-	122.221.000,00	314.232.900,00	314.232.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		122.221.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	12.050.000,00	12.050.000,00	3.480.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			12.050.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

13	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	488.278.800,00	430.286.624,00	408.285.200,00							488.278.800,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			95 %	95 %	488.278.800,00	430.286.624,00	430.286.624,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		488.278.800,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				350 Orang	350 Orang	13.187.200,00	13.187.200,00	9.447.200,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Akcaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			13.187.200,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
						KELURAHAN KOTABARU							15.495.444.000,00	15.789.302.003,00	17.318.317.622,00							12.559.382.500,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							15.495.444.000,00	15.789.302.003,00	17.318.317.622,00							12.559.382.500,00	
	7	01				KECAMATAN							15.495.444.000,00	15.789.302.003,00	17.318.317.622,00							12.559.382.500,00	
14	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	11.087.234.250,00	11.012.454.779,00	10.645.965.822,00							9.517.172.750,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	514.925.285,00	425.084.270,00	425.084.270,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		514.925.285,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	2.010.400,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			4.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

																		penyeludupan.					
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	10.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Kotabaru	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			10.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			4.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	10.000.000,00	14.210.000,00	16.400.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			10.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	6.194.900,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			8.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	-	115.420.000,00	114.060.000,00	114.060.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		115.420.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	3.760.000,00	2.400.000,00	2.526.800,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			3.760.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	8.000.000,00	8.000.000,00	5.970.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			8.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
15	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	3.759.444.950,00	4.023.973.500,00	5.969.448.700,00							2.393.444.950,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan lpm	-			95 %	95 %	2.764.460.950,00	3.012.638.400,00	3.012.638.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		1.397.460.950,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	32.150.000,00	21.650.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			25.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

																		pemberantasan kemiskinan.					
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Kotabaru	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			100.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	363.500.000,00	363.499.600,00	775.874.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			100.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
16	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	122.221.000,00	314.232.900,00	289.737.900,00							122.221.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	-	122.221.000,00	314.232.900,00	314.232.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembadapangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		122.221.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	6.785.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembadapangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			12.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

17	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM				95 %	95 %	488.278.800,00	430.286.624,00	408.285.200,00							488.278.800,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			95 %	95 %	488.278.800,00	430.286.624,00	430.286.624,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		488.278.800,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				350 Orang	350 Orang	13.000.000,00	13.000.000,00	3.820.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Kotabaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			13.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
						KELURAHAN BENUA MELAYU DARAT							15.495.444.000,00	15.789.302.003,00	17.318.317.622,00							12.559.382.500,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							15.495.444.000,00	15.789.302.003,00	17.318.317.622,00							12.559.382.500,00	
	7	01				KECAMATAN							15.495.444.000,00	15.789.302.003,00	17.318.317.622,00							12.559.382.500,00	
18	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	11.087.234.250,00	11.012.454.779,00	10.645.965.822,00							9.517.172.750,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	514.925.285,00	425.084.270,00	425.084.270,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		514.925.285,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	3.999.050,00	3.999.200,00	2.183.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			3.999.050,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

																		penyeludupan.					
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	9.999.900,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			9.999.900,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	3.998.900,00	3.999.100,00	2.924.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			3.998.900,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	10.000.000,00	15.803.000,00	15.803.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			10.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	6.500.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			8.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	115.420.000,00	114.060.000,00	114.060.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		115.420.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			3.760.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	7.510.000,00	7.510.000,00	7.510.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			7.510.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
19	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN DI KECAMATAN				95 %	95 %	3.759.444.950,00	4.023.973.500,00	5.969.448.700,00							2.393.444.950,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan lpm	-			95 %	95 %	2.764.460.950,00	3.012.638.400,00	3.012.638.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		1.397.460.950,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	25.144.150,00	25.716.200,00	25.716.200,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			25.144.150,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

																		pemberantasan kemiskinan.					
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Darat	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			100.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	504.500.000,00	556.720.600,00	1.387.210.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			100.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
20	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENANGANAN GANGGUAN TRANTIBUM				90 %	90 %	122.221.000,00	314.232.900,00	289.737.900,00							122.221.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	-			95 %	95 %	122.221.000,00	314.232.900,00	314.232.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembadapangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		122.221.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																	
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.421.900,00	10.121.900,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembadapangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			12.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

21	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM				95 %	95 %	488.278.800,00	430.286.624,00	408.285.200,00							488.278.800,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			95 %	95 %	488.278.800,00	430.286.624,00	430.286.624,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		488.278.800,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				350 Orang	350 Orang	13.000.000,00	13.901.800,00	10.461.800,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			13.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
						KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT							15.495.444.000,00	15.789.302.003,00	17.318.317.622,00							12.559.382.500,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN							15.495.444.000,00	15.789.302.003,00	17.318.317.622,00							12.559.382.500,00	
	7	01				KECAMATAN							15.495.444.000,00	15.789.302.003,00	17.318.317.622,00							12.559.382.500,00	
22	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 %	95 %	11.087.234.250,00	11.012.454.779,00	10.645.965.822,00							9.517.172.750,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	100 %	514.925.285,00	425.084.270,00	425.084.270,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-		514.925.285,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	2.554.800,00	2.554.800,00	2.554.800,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			2.554.800,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

																		penyeludupan.					
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	9.992.000,00	3.186.300,00	3.186.300,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			9.992.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	4.001.400,00	4.001.400,00	4.001.400,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			4.001.400,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	9.607.000,00	9.247.000,00	9.247.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			9.607.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	8.000.000,00	8.000.000,00	7.500.800,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			8.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	100 %	115.420.000,00	114.060.000,00	114.060.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		115.420.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	3.760.000,00	3.760.000,00	2.760.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			3.760.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	8.120.000,00	8.120.000,00	5.440.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			8.120.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
23	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN DI KECAMATAN				95 %	95 %	3.759.444.950,00	4.023.973.500,00	5.969.448.700,00							2.393.444.950,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan lpm	-			95 %	95 %	2.764.460.950,00	3.012.638.400,00	3.012.638.400,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		1.397.460.950,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	26.286.900,00	26.286.900,00	26.286.900,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			26.286.900,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

																		pemberantasan kemiskinan.					
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Laut	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			100.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	303.500.000,00	356.748.500,00	563.063.800,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			100.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
24	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	122.221.000,00	314.232.900,00	289.737.900,00							122.221.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	-			95 %	95 %	122.221.000,00	314.232.900,00	314.232.900,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembadapangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		122.221.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	8.680.000,00	9.020.000,00	3.550.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembadapangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			8.680.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

25	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM				95 %	95 %	488.278.800,00	430.286.624,00	408.285.200,00							488.278.800,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			95 %	95 %	488.278.800,00	430.286.624,00	430.286.624,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat		488.278.800,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				350 Orang	350 Orang	16.652.000,00	20.168.824,00	15.502.400,00	Kota Pontianak, Pontianak Selatan, Benuamelayu Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			16.652.000,00	KECAMATAN PONTIANAK SELATAN
												J U M L A H	**15.495.444.000,00**	**15.789.302.003,00**	**17.318.317.622,00**							**12.559.382.500,00**	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Selatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2024-2026, yang memuat antara lain evaluasi atas pelaksanaan rencana kerja, telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Selatan, tujuan dan sasaran renja Kecamatan, serta program dan kegiatan/sub. kegiatan.

Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2024 akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2025 dengan mempertimbangkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun yang lalu ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pada pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, antara lain:

1. Meskipun perencanaan anggaran telah disusun, namun ada beberapa kegiatan yang penyerapan anggarannya kurang optimal karena beberapa faktor seperti:
   - Penggunaan Anggaran Makan dan Minum untuk Kegiatan Lain
   - Penyerapan Anggaran Yang Kurang Maksimal dikarenakan Kondisi Dilapangan Yang tidak Memungkinkan untuk Kegiatan tersebut dilaksanakan.
2. Adanya Penambahan Anggaran untuk Tim Penangan pencegahan Stunting Kecamatan Pontianak Selatan yang diberikan untuk Kecamatan dan Kelurahan.
3. Adanya Penambahan Anggaran Untuk Kegiatan Forum OPD Di sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4. Adanya penambahan Dana Operasional RT/RW sesuai program walikota Terpilih.

Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap bagian dalam lingkup Kecamatan Pontianak Selatan wajib melakukan pengendalian dan evaluasi atas hasil pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Pontianak Selatan tahun 2025. Hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan rencana kerja Kecamatan Tahun 2025.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Selatan Tahun 2025 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di Kecamatan Pontianak Selatan.

Pontianak, Juni 2025

Camat Kecamatan Pontianak Selatan

Martagus, SE
Pembina/IVa
NIP. 19670926 198903 1 009

PERUBAHAN

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2025

KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
KOTA PONTIANAK

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan dokumen ini dimaksudkan untuk menyelaraskan indikator dan target kinerja yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan dokumen Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025. Sinkronisasi ini penting dilakukan agar pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat kecamatan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terarah, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Kami berharap Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini dapat menjadi acuan sekaligus alat ukur kinerja perangkat daerah, khususnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Tenggara. Dengan demikian, proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan kualitasnya secara berkelanjutan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat yang optimal dalam pelaksanaan pembangunan daerah ke depan.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah. Dokumen ini mencakup kebijakan, program, dan kegiatan yang dijalankan baik oleh pemerintah secara langsung maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Renja memiliki peran penting karena menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan di tingkat paling dekat dengan masyarakat.

Sebagai bagian dari sistem perencanaan dan penganggaran daerah, penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pontianak Tenggara Tahun 2025 dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, khususnya setelah terjadinya perubahan kondisi, kebutuhan, dan kebijakan yang berkembang pada tahun 2025. Penyusunan perubahan ini juga merujuk pada peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan pentingnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran melalui dokumen RKPD sebagai dasar penyusunan APBD.

Selain sebagai dokumen perencanaan, Perubahan Renja juga berfungsi sebagai alat ukur kinerja perangkat daerah. Oleh karena itu, perubahan Renja perlu disusun dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan Renja sebelumnya, serta mempertimbangkan penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran.

Dalam konteks Kecamatan Pontianak Tenggara, dokumen ini turut memperkuat dua fungsi utama kecamatan, yaitu:

1. Fungsi Pembinaan Wilayah, yang bertujuan untuk mewujudkan wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak yang kondusif yang memiliki daya dukung bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan di Kota Pontianak.
2. Fungsi Pelayanan Publik, yang bertolak dari posisi kecamatan sebagai perangkat daerah yang terdekat posisinya dengan masyarakat dan sejalan dengan strategi mendekatkan institusi pelayan kepada masyarakat.

Dengan demikian, penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pontianak Tenggara Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi pedoman kerja yang relevan, adaptif, dan

responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2025 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
17. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).

19. Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Kecamatan Di Kota Pontianak; (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 79).
20. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
21. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026. (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 13).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 10).
23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 15.1 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 15.1).
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2025 dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, penyusunan ini juga merupakan tindak lanjut atas Surat Edaran Wali Kota Pontianak mengenai Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen ini adalah untuk menyelaraskan indikator kinerja dan target yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan dokumen Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dengan tetap mempertimbangkan dinamika dan isu strategis yang berkembang selama kurun waktu Januari hingga Juni 2025. Sinkronisasi ini diharapkan dapat memperkuat arah kebijakan pembangunan yang responsif, adaptif, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah secara optimal.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 merupakan bagian penting dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Tenggara. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai capaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama enam bulan pertama tahun berjalan, baik dari sisi hasil program (*outcome*) maupun hasil kegiatan (*output*).

Melalui proses evaluasi, diperoleh informasi mengenai sejauh mana indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja dapat dicapai. Beberapa program dan kegiatan yang bersifat prioritas dan wajib, seperti pelayanan dasar, pengembangan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, serta pengentasan kemiskinan, menjadi perhatian utama dalam evaluasi ini. Apabila capaian indikator pada bidang-bidang tersebut belum memenuhi target, maka perlu dilakukan penyesuaian anggaran, penambahan kegiatan, atau perubahan strategi pelaksanaan, tentunya dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah dan sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran.

Sebaliknya, jika terdapat program atau kegiatan yang capaian indikatornya telah melebihi target namun tidak termasuk prioritas daerah, maka dapat dilakukan peninjauan ulang berupa efisiensi anggaran, penyesuaian ruang lingkup kegiatan, atau bahkan penghapusan kegiatan apabila dianggap tidak lagi relevan.

Selain itu, hasil evaluasi juga dapat menjadi dasar dalam melakukan revisi terhadap target indikator kinerja, terutama jika terdapat perubahan kondisi daerah yang signifikan. Dengan demikian, evaluasi Triwulan II ini menjadi landasan penting dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 agar tetap sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat, arah kebijakan pembangunan daerah, dan kemampuan keuangan daerah.

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pontianak Tenggara Periode Triwulan II 2025

No	TUJUAN / SASARAN (Renstra)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra)	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 -2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun Berjalan (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
											I			II														
1	2	3	4	6		7		8			9			10			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp	K	Rp.		K	Rp.		
	Tujuan PD : Meningkatnya kualitas layanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik		Sangat Baik		Sangat Baik									Sangat Baik											
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat kepuasan bidang terhadap pelayanan kesekretariatan	95 %	22.409.673.000	83 %	7.918.517.508	95 %	8.954.517.000		%	1.835.473.235		%		0,00	%	1.835.473.235	0,00	20,50	0	%	9.753.990.743,00	0,00	43,53		
I.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase terlaksananya perencanan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	108.400.000,00	100 %	35.850.000	100 %	50.850.000	33,33	%	5.199.600		%		33,33	%	5.199.600	33,33	10,23	133	%	41.049.600,00	133,33	37,87	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan)	-
I.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kecamatan Perangkat Daerah	33 Dokumen	27.200.000	11 Dokumen	9.000.000	11 Dokumen	24.000.000	5	Dokumen	1.654.600		Dokumen		5	Dokumen	1.654.600	45,45	6,89	16	Dokumen	10.654.600,00	48,48	39,17	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan)	-
I.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	16.500.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	5.500.000		Dokumen	0		Dokumen		0	Dokumen	0	0,00	0,00	1	Dokumen	5.500.000,00	33,33	33,33	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan)	Belum terealisasi di Tw I karena kegiatan baru dilaksanakan di triwulan III dan IV
I.1.3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	11.700.000	1 Dokumen	3.850.000	1 Dokumen	3.850.000		Dokumen	0		Dokumen		0	Dokumen	0	0,00	0,00	1	Dokumen	3.850.000,00	33,33	32,91	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan)	kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan II dan III
I.1.4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Laporan	17.000.000	4 Laporan	5.500.000	4 Laporan	5.500.000	1	Laporan	0		Laporan		1	Laporan	0	25,00	0,00	5	Laporan	5.500.000,00	41,67	32,35	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan)	-
I.1.5		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	12 Laporan	36.000.000	4 Laporan	12.000.000	4 Laporan	12.000.000	1	Laporan	3.545.000		Laporan		1	Laporan	3.545.000	25,00	29,54	5	Laporan	15.545.000,00	41,67	43,18	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan)	-
I.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	17.929.581.000	94.61 %	6.494.296.226	100 %	7.460.967.000	72,06	%	1.622.597.305		%		#REF!	%	1.622.597.305	#REF!	21,75	#VALUE!	%	8.116.893.531	#VALUE!	45,27	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan)	-
I.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	43 Orang/bln	16.451.781.000	42 Orang/bln	6.014.736.226	43 Orang/bln	6.952.487.000	42	orang/bln	1.529.017.305		orang/bln		42	orang/bln	1.529.017.305	97,67	21,99	84	orang/bln	7.543.753.531	195,35	45,85	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan)	-
I.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	1.444.600.000	12 Dokumen	468.560.000	12 Dokumen	497.480.000	3	Dokumen	91.410.000		Dokumen		3	Dokumen	91.410.000	25,00	18,37	15	Dokumen	559.970.000	41,67	38,76	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Perencanaan dan	-

No	TUJUAN / SASARA	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 -2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan			Realisasi Kinerja Pada						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja			Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit Perangkat	Keterangan
																														Keuangan)	
I.2.3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Laporan	12.000.000	1	Laporan	4.000.000	1	Laporan	4.000.000	1	Laporan	2.170.000		Laporan		1	Laporan	2.170.000	100,00	54,25	2	Laporan	6.170.000	66,67	51,42	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan)	-
I.2.4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	36	Laporan	21.200.000	12	Laporan	7.000.000	12	Laporan	7.000.000	3	Laporan	0		Laporan		3	Laporan	0	25,00	0,00	15	Laporan	7.000.000	41,67	33,02	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan)	-
I.2.7		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun									0							0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	0		0			Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan)	
I.3		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**100**	**%**	**7.100.000**	**100**	**%**	**1.700.000**	**100**	**%**	**2.500.000**		**%**	**0**		**%**		**0,00**	**%**	**0**	**0,00**	**0,00**	**100**	**%**	**1.700.000**	**100,00**	**23,94**		-
I.3.1		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan barang milik daerah SKPD	3	Dokumen	7.100.000	1	Dokumen	1.700.000	1	Dokumen	2.500.000		Dokumen	0		Dokumen		0	Dokumen	0	0,00	0,00	1	Dokumen	1.700.000	33,33	23,94	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Umum dan Aparatur)	kegiatan baru akan dilaksanakan pada triwulan III
I.4		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100**	**%**	**209.700.000**	**100**	**%**	**59.990.000**	**100**	**%**	**69.000.000**		**%**	**0**		**%**		**0,00**	**%**	**0**	**0,00**	**0,00**	**100**	**%**	**59.990.000**	**100,00**	**28,61**		-
I.4.1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	3	Paket	201.500.000	1	Paket	58.990.000	1	Paket	67.500.000		Paket	0		Paket		0	Paket	0	0,00	0,00	1	Paket	58.990.000	33,33	29,28	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Umum dan Aparatur)	kinerja kegiatan sudah tereali - sasi namun reali sasi keuangan belum
I.4.2		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	3	Dokumen	8.200.000	1	Dokumen	1.000.000	1	Dokumen	1.500.000		Dokumen	0		Dokumen		0	Dokumen	0	0,00	0,00	1	Dokumen	1.000.000	33,33	12,20	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Umum dan Aparatur)	kinerja kegiatan sudah tereali - sasi namun reali sasi keuangan belum
I.3.3		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Peltihan Formal									0							0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	0		0			Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Umum dan Aparatur)	
I.5		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**749.000.000**	**100**	**%**	**245.953.990**	**100**	**%**	**183.000.000**	**9,87**	**%**	**44.803.900**		**%**		**9,87**	**%**	**44.803.900**	**9,87**	**24,48**	**110**	**%**	**290.757.890**	**109,87**	**38,82**	**Kecamatan/ Kelurahan Ptk Tenggara (Kasubbag Umpar dan Sekkel)**	
I.5.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (Kecamatan)	Jumlah paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	3	Paket	17.500.000	1	Paket	6.498.715	1	Paket	6.500.000		Paket	0		Paket		0	Paket	0	0,00	0,00	1	Paket	6.498.715	33,33	37,14	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Umpar dan Sekkel)	
I.5.2		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (kel. Bangka Belitung Darat)	Jumlah paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	3	Paket	8.200.000	1	Paket	1.461.700	1	Paket	3.000.000		Paket	0		Paket		0	Paket	0	0,00	0,00	1	Paket	1.461.700	33,33	17,83	Kelurahan Bangka Belitung Darat (Sekkel)	baru akan direalisasikan pada triwulan berikutnya
I.5.3		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (kel. Bangka Belitung Laut)	Jumlah paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	3	Paket	8.200.000	1	Paket	2.186.700	1	Paket	3.000.000		Paket	0		Paket		0	Paket	0	0,00	0,00	1	Paket	2.186.700	33,33	26,67	Kelurahan Bangka Belitung Laut (Sekkel)	

No	TUJUAN / SASARA	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 -2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan			Realisasi Kinerja Pada						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja			Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit Perangkat	Keterangan
I.5.4		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (kel. Bansir Darat)	Jumlah paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	3	Paket	8.200.000	1	Paket	1.618.600	1	Paket	3.000.000		Paket	0		Paket		0	Paket	0	0,00	0,00	1	Paket	1.618.600	33,33	19,74	Kelurahan Bansir Darat (Sekkel)	
I.5.5		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (kel. Bansir Laut)	Jumlah paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	3	Paket	8.200.000	1	Paket	1.066.400	1	Paket	3.000.000		Paket	0		Paket		0	Paket	0	0,00	0,00	1	Paket	1.066.400	33,33	13,00	Kelurahan Bansir Laut (Sekkel)	
I.5.6		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	36	Paket	233.000.000	12	Paket	66.265.100	12	Paket	70.000.000	3	Paket	28.680.300		Paket		3	Paket	28.680.300	25,00	40,97	15	Paket	94.945.400	41,67	40,75	Kecamatan (Kasubbag Umpar)	
I.5.7		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	36	Paket	41.000.000	12	Paket	12.019.000	1	Paket	14.000.000	3	Paket	3.877.100		Paket		3	Paket	3.877.100	300,00	27,69	15	Paket	15.896.100	41,67	38,77	Kecamatan (Kasubbag Umpar)	
I.5.8		Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kecamatan)	Jumlah paket penyediaan bahan logistik kantor	36	Paket	113.000.000	12	Paket	37.235.000	12	Paket	38.000.000	3	Paket	6.900.000		Paket		3	Paket	6.900.000	25,00	18,16	15	Paket	44.135.000	41,67	39,06	Kecamatan (Kasubbag Umpar)	
I.5.9		Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kel. Bangka Belitung Darat)	Jumlah paket penyediaan bahan logistik kantor	36	Paket	18.200.000	12	Paket	7.100.000	12	Paket	7.000.000		Paket	0		Paket		0	Paket	0	0,00	0,00	12	Paket	7.100.000	33,33	39,01	Kelurahan Bangka Belitung Darat (Sekkel)	kinerja kegiatan sudah tereali - sasi namun reali sasi keuangan belum
I.5.10		Penyediaan Bahan Logistik Kantor (kel. Bangka Belitung Laut)	Jumlah paket penyediaan bahan logistik kantor	36	Paket	18.200.000	12	Paket	6.550.000	12	Paket	6.050.000		Paket	0		Paket		0	Paket	0	0,00	0,00	12	Paket	6.550.000	33,33	35,99	Kelurahan Bangka Belitung Laut (Sekkel)	
I.5.11		Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kel. Bansir Darat)	Jumlah paket penyediaan bahan logistik kantor	36	Paket	18.200.000	12	Paket	4.900.000	12	Paket	6.000.000		Paket	0		Paket		0	Paket	0	0,00	0,00	12	Paket	4.900.000	33,33	26,92	Kelurahan Bansir Darat (Sekkel)	
I.5.12		Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kel. Bansir Laut)	Jumlah paket penyediaan bahan logistik kantor	36	Paket	18.200.000	12	Paket	7.100.000	12	Paket	7.000.000		Paket	0		Paket		0	Paket	0	0,00	0,00	12	Paket	7.100.000	33,33	39,01	Kelurahan Bansir Laut (Sekkel)	
I.5.13		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Kecamatan)	jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	36	Paket	94.000.000	12	Paket	14.660.200	12	Paket	18.000.000	3	Paket	3.201.500		Paket		3	Paket	3.201.500	25,00	17,79	15	Paket	17.861.700	41,67	19,00	Kecamatan (Kasubbag Umpar)	kinerja kegiatan sudah tereali - sasi namun reali sasi keuangan belum
I.5.14		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (kel. Bangka Belitung Darat)	jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	36	Paket	14.100.000	12	Paket	4.049.900	12	Paket	5.000.000		Paket	0		Paket		0	Paket	0	0,00	0,00	12	Paket	4.049.900	33,33	28,72	Kelurahan Bangka Belitung Darat (Sekkel)	kinerja kegiatan sudah tereali - sasi namun reali sasi keuangan belum
I.5.15		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (kel. Bangka Belitung Laut)	jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	36	Paket	14.100.000	12	Paket	4.051.800	12	Paket	5.000.000		Paket	0		Paket		0	Paket	0	0,00	0,00	12	Paket	4.051.800	33,33	28,74	Kelurahan Bangka Belitung Laut (Sekkel)	
I.5.16		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (kel. Bansir Darat)	jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	36	Paket	14.100.000	12	Paket	727.500	12	Paket	5.000.000		Paket	0		Paket		0	Paket	0	0,00	0,00	12	Paket	727.500	33,33	5,16	Kelurahan Bansir Darat (Sekkel)	
I.5.17		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (kel. Bansir Laut)	jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	36	Paket	14.100.000	12	Paket	3.243.500	12	Paket	5.000.000		Paket	0		Paket		0	Paket	0	0,00	0,00	12	Paket	3.243.500	33,33	23,00	Kelurahan Bansir Laut (Sekkel)	
I.5.18		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	36	Dokumen	34.000.000	12	Dokumen	8.580.000	12	Dokumen	12.000.000	3	Dokumen	2.145.000		Dokumen		3	Dokumen	2.145.000	25,00	17,88	15	Dokumen	10.725.000	41,67	31,54	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Umum dan Aparatur)	
I.5.19		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	Laporan	42.300.000	5	Laporan	51.839.875	1	Laporan	19.500.000		Laporan	0		Laporan		0	Laporan	0	0,00	0,00	5	Laporan	51.839.875	166,67	122,55	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Umum dan Aparatur)	baru akan direalisasikan pada triwulan berikutnya
I.5.20		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3	Dokumen	12.200.000	1	Dokumen	4.800.000	1	Dokumen	5.000.000		Dokumen	0		Dokumen		0	Dokumen	0	0,00	0,00	1	Dokumen	4.800.000	33,33	39,34	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Umum dan Aparatur)	pada Tw 1 baru pada tahapan persiapan pelaksana

No	TUJUAN / SASARA	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 -2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan			Realisasi Kinerja Pada						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja			Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit Perangkat	Keterangan
																														an shg output belum terealisasi
I.6		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**%**	**463.592.000**	**100**	**%**	**152.748.000**	**100**	**%**	**140.000.000**		**%**	**0**		**%**		**0,00**	**%**	**0**	**0,00**	**0,00**	**100**	**%**	**152.748.000**	**100,00**	**32,95**		
I.6.1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36	Unit	463.592.000	23	Unit	152.748.000	12	Unit	140.000.000		Unit	0		Unit		0	Unit	0	0,00	0,00	23	Unit	152.748.000	64	33	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Umum dan Aparatur)	kegiatan baru akan selesai dilaksanakan pada triwulan III dan di triwulan I baru pada tahap persiapan pengadaan
I.7		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**%**	**2.612.400.000**	**100**	**%**	**826.140.349**	**100**	**%**	**956.200.000**	**25,00**	**%**	145.459.230		**%**		**25,00**	**%**	**145.459.230**	**25,00**	**15,21**	**125**	**%**	**971.599.579**	**125,00**	**37,19**		
I.7.1		Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa layanan internet, telepon, air dan listrik yang disediakan	36	Laporan	659.400.000	12	Laporan	169.271.845	12	Laporan	238.800.000	3	Laporan	39.280.190		Laporan		3	Laporan	39.280.190	25,00	16,45	15	Laporan	208.552.035	41,67	31,63	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Umum dan Aparatur)	
I.7.2		Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36	Laporan	1.953.000.000	12	Laporan	656.868.504	12	Laporan	717.400.000	3	Laporan	106.179.040		Laporan		3	Laporan	106.179.040	25,00	14,80	15	Laporan	763.047.544	41,67	39,07	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Umum dan Aparatur)	
I.8		**Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah**	**100**	**%**	**329.900.000**	**100**	**%**	**101.839.240**	**100**	**%**	**92.000.000**	**15,71**	**%**	**17.413.200**		**%**		**15,71**	**%**	**17.413.200**	**15,71**	**18,93**	**116**	**%**	**119.252.440**	**115,71**	**36,15**		
I.8.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9	Unit	138.000.000	3	Unit	44.359.300	3	Unit	46.000.000	3	Unit	6.613.200		Unit		3	Unit	6.613.200	100,00	14,38	6	Unit	50.972.500	66,67	36,94	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Umum dan Aparatur)	
I.7.2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara											Unit			Unit		0	Unit	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	Unit	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Umum dan Aparatur)	
I.8.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya (kecamatan)	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	9	Unit	88.600.000	34	Unit	25.570.000	40	Unit	34.000.000	8	Unit	10.800.000		Unit		8	Unit	10.800.000	20,00	31,76	42	Unit	36.370.000	466,67	41,05	Kecamatan (Kasubbag Umpar)	
I.8.3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya (kel, Bangka Belitung Darat)	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	24	Unit	24.000.000	8	Unit	8.430.000	8	Unit	8.500.000		Unit	0		Unit		0	Unit	0	0,00	0,00	8	Unit	8.430.000	33,33	35,13	Kelurahan Bangka Belitung Darat (Sekkel)	pada triwulan I belum ada kebutuhan pemeliharaan unit
I.8.4		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya (kel, Bangka Belitung Laut)	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	18	Unit	15.100.000	6	Unit	4.140.000	6	Unit	5.000.000		Unit	0		Unit		0	Unit	0	0,00	0,00	6	Unit	4.140.000	33,33	27,42	Kelurahan Bangka Belitung Laut (Sekkel)	
I.8.5		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya (kel. Bansir Darat)	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	18	Unit	15.100.000	6	Unit	4.060.000	6	Unit	5.000.000		Unit	0		Unit		0	Unit	0	0,00	0,00	6	Unit	4.060.000	33,33	26,89	Kelurahan Bansir Darat (Sekkel)	
I.8.6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya (kel. Bansir Laut)	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	18	Unit	15.100.000	6	Unit	6.090.000	6	Unit	6.000.000		Unit	0		Unit		0	Unit	0	0,00	0,00	6	Unit	6.090.000	33,33	40,33	Kelurahan Bansir Laut (Sekkel)	
I.8.7		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3	Unit	34.000.000	1	Unit	9.189.940	1	Unit	12.000.000		Unit	0		Unit		0	Unit	0	0,00	0,00	1	Unit	9.189.940	33,33	27,03	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasubbag Umum dan	sedang dalam tahap persiapan awal

No	TUJUAN / SASARA	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 -2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan			Realisasi Kinerja Pada						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja			Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit Perangkat	Keterangan
																													Aparatur)	
1.	**Sasaran PD : Terwujudnya layanan publik pemerintahan kecamatan yang berkualitas**		**IKM kecamatan (didalamnya termuat pertanyaan tentang layanan trantib)**	**Sangat Baik**		**3.443.918.000**	**1.045.916.450**			**Sangat Baik**											**#REF!**					**452.261.400**				
1		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan**	**97**	**%**	**1.389.000.000**	**96.67**	**%**	**474.022.000**	**96**	**%**	**100.565.000**		**%**	**46.209.000**		**%**		**0,00**	**%**	**46.209.000**	**0,00**	**45,95**	**#VALUE!**	**%**	**520.231.000**	**#VALUE!**	**37,45**		
I.1		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan di tingkat Kecamatan**	**100**	**%**	**205.000.000**	**100**	**%**	**84.022.000**	**100**	**%**	**87.000.000,00**	**33,33**	**%**	**46.209.000**		**%**		**33,33**	**%**	**46.209.000**	**33,33**	**53,11**	**133,3333333**	**%**	**130.231.000**	**133,33**	**63,53**	**Kecamatan Ptk Tenggara (Kasi Pemerintahan)**	
II.1.1		Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9	Laporan	205.000.000	3	Laporan	84.022.000	3	Laporan	87.000.000	1	Laporan	46.209.000		Laporan		1	Laporan	46.209.000	33,33	53,11	4	Laporan	130.231.000	44,44	63,53	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasi Pemerintahan)	realiasasi keuangan diatas 100% dikarenakan perubahan target keuangan dari Renja sehingga pada DPA lebih besar anggaran yang dilaksanakan
I.2		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat daerah Yang Ada Dikecamatan**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan**	**100**	**%**	**1.184.000.000**	**93,33**	**%**	**390.000.000**	**100**	**%**	**13.565.000**	**21,43**	**%**	**0**		**%**		**21,43**	**%**	**0**	**21,43**	**0,00**	**114,7585714**	**%**	**390.000.000**	**114,76**	**32,94**	**Kecamatan Ptk Tenggara (Kasi Pemerintahan)**	
I.2.1		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat diwilayah Kecamatan	15	Laporan	1.184.000.000	14	Laporan	390.000.000	14	Laporan	13.565.000,00	3	Laporan	0		Laporan		3	Laporan	0	21,43	0,00	17	Laporan	390.000.000	113,33	32,94	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasi Pemerintahan)	pada triwulan I belun terdapat realisasi keuangan krn angkas terdapat pada triwulan II. Utk laporan pelayanan prima sdh sampe bln Maret (tw1)
II		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**97**	**%**	**1.582.800.000**	**95**	**%**	**422.874.050**	**96**	**%**	**371.000.000**		**%**	**0**		**%**		**0,00**	**%**	**#REF!**	**0,00**	**#REF!**	**95**	**%**	**#REF!**	**97,94**	**#REF!**		
II.1		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**97**	**%**	**1.582.800.000**	**95**	**%**	**422.874.050**	**96**	**%**	**371.000.000**		**%**	**0**		**%**		**0,00**	**%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95**	**%**	**422.874.050**	**97,94**	**26,72**		
II.1.1		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan	300	Orang	156.000.000	600	Orang	43.498.500	100	Orang	45.000.000		Orang	0		Orang		0	Orang	0	0,00	0,00	600	Orang	43.498.500	200	27,88	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasi Pemerintahan)	kegiatan baru akan selesai dilaksanakan pada triwulan III

No	TUJUAN / SASARA	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 -2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan			Realisasi Kinerja Pada						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja			Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit Perangkat	Keterangan
II.1.2		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Lokal, Regional dan Nasional (KECAMATAN)	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Lokal, Regional dan Nasional	150	Orang	986.800.000	200	Orang	298.128.300	50	Orang	326.000.000		Orang	0		Orang		0	Orang	0	0,00	0,00	200	Orang	298.128.300	133,33	30,21	Kecamatan Pik Tenggara (Kasi Pemerintahan)	terdapat perbedaan target kinerja dari Renja yang ada sblmnya 50 orang pada pelaksanannya (MTQ Kecamatan) peserta sebanyak 100 orang
II.1.2		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Lokal, Regional dan Nasional (Kel. Bangka Belitung Darat)	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Lokal, Regional dan Nasional	150	Orang	110.000.000	50	Orang	30.254.100	50	Orang	30.000.000		Orang	0		Orang		0	Orang	0	0,00	0,00	50	Orang	30.254.100	33,33	27,50	Kelurahan Bangka Belitung Darat (Kasi Pemerintahan)	baru akan direalisasikan pada triwulan berikutnya pada Tw1 sedang dlm tahap persiapan
II.1.2		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Lokal, Regional dan Nasional (kel. Bangka Belitung Laut)	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Lokal, Regional dan Nasional	150	Orang	110.000.000	45	Orang	12.630.000	50	Orang	13.000.000		Orang	0		Orang		0	Orang	0	0,00	0,00	45	Orang	12.630.000	30,00	11,48	Kelurahan Bangka Belitung Laut (Kasi Pemerintahan)	baru akan direalisasikan pada triwulan berikutnya pada Tw1 sedang dlm tahap persiapan
II.1.2		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Lokal, Regional dan Nasional (kel. Bansir Darat)	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Lokal, Regional dan Nasional	150	Orang	110.000.000	65	Orang	16.361.650	50	Orang	27.000.000		Orang	0		Orang		0	Orang	0	0,00	0,00	65	Orang	16.361.650	43,33	14,87	Kelurahan Bansir Darat (Kasi Pemerintahan)	baru akan direalisasikan pada triwulan berikutnya pada Tw1 sedang dlm tahap persiapan
II.1.2		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Lokal, Regional dan Nasional (kel. Bansir Laut)	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Lokal, Regional dan Nasional	150	Orang	110.000.000	50	Orang	22.001.500	50	Orang	23.000.000		Orang	0		Orang		0	Orang	0	0,00	0,00	50	Orang	22.001.500	33,33	20,00	Kelurahan Bansir Laut (Kasi Pemerintahan)	baru akan direalisasikan pada triwulan berikutnya pada Tw1 sedang dlm tahap persiapan
III		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum**	**97**	**%**	**472.118.000**	**105,26**	**%**	**149.020.400**	**96**	**%**	**60.000.000**		**%**	**0**		**%**		**0,00**	**%**	**0**	**0,00**	**0,00**	**105,26**	**%**	**149.020.400**	**108,52**	**31,56**		
III.1		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan**	**100**	**%**	**472.118.000**	**100**	**%**	**149.020.400**	**100**	**%**	**60.000.000**	**30**	**%**	**0**		**%**		**30**	**%**	**0**	**30**	**0**	**130,00**	**%**	**149.020.400**	**130,00**	**31,56**		
III.1.1		Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya Dibidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kecamatan)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	Laporan	200.118.000	4	Laporan	59.410.000	4	Laporan	60.000.000	1	Laporan	0		Laporan		1	Laporan	0	25,00	0,00	5	Laporan	59.410.000	41,67	29,69	Kecamatan Pik Tenggara (Kasi Tranib Kecamatan/ Kasi Pemerintahan Kelurahana	pada triwulan I kinerja kegiatan sudah dilaksankan namun realisasi keuangan belum sedang dalm tahap persiapan pembayaran

No	TUJUAN / SASARA	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 -2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan			Realisasi Kinerja Pada						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja			Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit Perangkat	Keterangan
III.1.2		Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya Dibidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kel. Bangka Belitung Darat)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	Laporan	68.000.000	4	Laporan	6.000.000	4	Laporan	15.500.000	1	Laporan	0		Laporan		1	Laporan	0	25,00	0,00	5	Laporan	6.000.000	41,67	8,82	Kelurahan Bangka Belitung Darat (Kasi Pemerintahan)	pada triwulan I kinerja kegiatan sudah dilaksanakan namun realisasi keuangan belum sedang dalm tahap persiapan pembayaran
III.1.3		Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya Dibidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kel. Bangka Belitung Laut)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	Laporan	68.000.000	4	Laporan	30.249.000	4	Laporan	30.788.000	1	Laporan	0		Laporan		1	Laporan	0	25,00	0,00	5	Laporan	30.249.000	41,67	44,48	Kelurahan Bangka Belitung Laut (Kasi Pemerintahan)	pada triwulan I kinerja kegiatan sudah dilaksanakan namun realisasi keuangan belum sedang dalm tahap persiapan pembayaran
III.1.4		Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya Dibidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kel. Bansir Darat)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	Laporan	68.000.000	4	Laporan	20.862.900	4	Laporan	23.000.000	1	Laporan	0		Laporan		1	Laporan	0	25,00	0,00	5	Laporan	20.862.900	41,67	30,68	Kelurahan Bansir Darat (Kasi Pemerintahan)	pada triwulan I kinerja kegiatan sudah dilaksanakan namun realisasi keuangan belum sedang dalm tahap persiapan pembayaran
III.1.5		Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya Dibidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kel. Bansir Laut)	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	Laporan	68.000.000	4	Laporan	32.498.500	4	Laporan	32.500.000	1	Laporan	0		Laporan		1	Laporan	0	25,00	0,00	5	Laporan	32.498.500	41,67	47,79	Kelurahan Bansir Laut (Kasi Pemerintahan)	pada triwulan I kinerja kegiatan sudah dilaksanakan namun realisasi keuangan belum sedang dalm tahap persiapan pembayaran
1	**Meningkatnya Kualitas Layanan kepada Masyarakat**		**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**									**BAIK**													**0**		**0**				
2.	**Sasaran PD : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat**		**Indeks Gotong Royong**			**89**			**78.37%**										**10,53**			**#DIV/0!**		**#VALUE!**			**#VALUE!**			
			Persentase partisipasi masyarakat	**93**	**%**				**92.33%**			**%**			**%**			**%**	**0**		**%**	**#DIV/0!**		**#VALUE!**		**%**	**#VALUE!**	**72**		
I		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif**	**97**	**%**	**3.781.800.000**	**95**	**%**	**1.221.054.626**	**96**	**%**	**137.000.000**		**%**	**390.683.200**		**%**		**85,00**	**%**	**390.683.200**	**88,54**	**285,17**	**180**	**%**	**1.611.737.826**	**185,57**	**42,62**		
I.1		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan di Kecamatan**	**100**	**%**	**291.000.000**	**95**	**%**	**94.990.050**	**100**	**%**	**97.000.000**	**25,00**	**%**	**0**		**%**		**25,00**	**%**	**0**	**25,00**	**0,00**	**120**	**%**	**94.990.050**	**120,00**	**32,64**		
I.1.1		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	12	Laporan	291.000.000	4	Laporan	94.990.050	4	Laporan	97.000.000	1	Laporan	0		Laporan		1	Laporan	0	25,00	0,00	5	Laporan	94.990.050	41,67	32,64	Kecamatan Ptk Tenggara (Kasi Pemberday	

No	TUJUAN / SASARA	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 -2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan			Realisasi Kinerja Pada						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja			Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit Perangkat	Keterangan
		diwilayah Kecamatan	diwilayah Kecamatan																										aan Masyarakat)	
I.2		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Permberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif**	**97**	**%**	**3.490.800.000**	**95**	**%**	**1.126.064.576**	**96**	**%**	**40.000.000**	**47**	**%**	**390.683.200**		**%**		**#REF!**	**%**	**390.683.200**	**#REF!**	**976,71**	**#REF!**	**%**	**1.516.747.776**	**#REF!**	**43,45**		
I.2.1		Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Bangka Belitung Darat)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dlm Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	21	Lemb Kemasyarakatan	71.200.000	7	Lemb Kemasyarakatan	42.633.000	7	Lemb Kemasyarakatan	44.000.000	7	Lemb Kemasyarakatan	13.844.800,00		Lemb Kemasyarakatan		7	Lemb Kemasyarakatan	13.844.800	100,00	31,47	14	Lemb Kemasyarakatan	56.477.800	66,67	79,32	Kelurahan Bangka Belitung Darat (Kasi Pemberdayaan Masyarakat)	realiasasi keuangan diatas 100% dikarenakan perubahan target keuangan dari Renja sehingga pada DPA lebih besar anggaran yang dilaksanakan
I.2.2		Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Bangka Belitung Laut)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dlm Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	21	Lemb Kemasyarakatan	71.200.000	7	Lemb Kemasyarakatan	42.664.000	7	Lemb Kemasyarakatan	43.000.000	7	Lemb Kemasyarakatan	11.388.400,00		Lemb Kemasyarakatan		7	Lemb Kemasyarakatan	11.388.400	100,00	26,48	14	Lemb Kemasyarakatan	54.052.400	66,67	75,92	Kelurahan Bangka Belitung Laut (Kasi Pemberdayaan Masyarakat)	realiasasi keuangan diatas 100% dikarenakan perubahan target keuangan dari Renja sehingga pada DPA lebih besar anggaran yang dilaksanakan
I.2.3		Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Bansir Darat)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dlm Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	21	Lemb Kemasyarakatan	71.200.000	7	Lemb Kemasyarakatan	31.414.000	7	Lemb Kemasyarakatan	34.000.000	7	Lemb Kemasyarakatan	9.950.000,00		Lemb Kemasyarakatan		7	Lemb Kemasyarakatan	9.950.000	100,00	29,26	14	Lemb Kemasyarakatan	41.364.000	66,67	58,10	Kelurahan Bansir Darat (Kasi Pemberdayaan Masyarakat)	realiasasi keuangan diatas 100% dikarenakan perubahan target keuangan dari Renja sehingga pada DPA lebih besar anggaran yang dilaksanakan
I.2.4		Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Bansir Laut)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dlm Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	21	Lemb Kemasyarakatan	71.200.000	7	Lemb Kemasyarakatan	31.000.000	7	Lemb Kemasyarakatan	33.000.000	7	Lemb Kemasyarakatan	0,00		Lemb Kemasyarakatan		7	Lemb Kemasyarakatan	0	100,00	0,00	14	Lemb Kemasyarakatan	31.000.000	66,67	43,54	Kelurahan Bansir Laut (Kasi Pemberdayaan Masyarakat)	realiasasi keuangan diatas 100% dikarenakan perubahan target keuangan dari Renja sehingga pada DPA lebih besar anggaran yang dilaksanakan
I.2.5		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bangka Belitung Darat)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	450.000.000	4	Unit	104.058.000	4	Unit	150.000.000		Unit	0		Unit		0	Unit	0	0,00	0,00	4	Unit	104.058.000	33,33	23,12	Kelurahan Bangka Belitung Darat (Kasi Pemberdayaan	Dana DAU Kelurahan belum ada arahan

No	TUJUAN / SASARA	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 -2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan			Realisasi Kinerja Pada						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja			Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit Perangkat	Keterangan
																													Masyarakat)	pelaksanaan di Tw I pada tahap ini baru pada perencanaan awal
I.2.6		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bangka Belitung Laut)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	450.000.000	4	Unit	105.045.000	4	Unit	150.000.000		Unit	0		Unit		0	Unit	0	0,00	0,00	4	Unit	105.045.000	33,33	23,34	Kelurahan Bangka Belitung Laut (Kasi Pemberdayaan Masyarakat)	Dana DAU Kelurahan belum ada arahan pelaksanaan di Tw I pada tahap ini baru pada perencanaan awal
I.2.7		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bansir Darat)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	450.000.000	4	Unit	102.770.000	4	Unit	150.000.000		Unit	0		Unit		0	Unit	0	0,00	0,00	4	Unit	102.770.000	33,33	22,84	Kelurahan Bansir Darat (Kasi Pemberdayaan Masyarakat)	Dana DAU Kelurahan belum ada arahan pelaksanaan di Tw I pada tahap ini baru pada perencanaan awal
I.2.8		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Bansir Laut)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12	Unit	450.000.000	4	Unit	98.410.200	4	Unit	150.000.000		Unit	0		Unit		0	Unit	0	0,00	0,00	4	Unit	98.410.200	33,33	21,87	Kelurahan Bansir Laut (Kasi Pemberdayaan Masyarakat)	Dana DAU Kelurahan belum ada arahan pelaksanaan di Tw I pada tahap ini baru pada perencanaan awal
I.2.9		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bangka Belitung Darat)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	15	Pokmas/Ormas	320.000.000	5	Pokmas/Ormas	133.575.900	5	Pokmas/Ormas	333.600.000	1	Pokmas/Ormas	112.500.000		Pokmas/Ormas		1	Pokmas/Ormas	112.500.000	20,00	33,72	6	Pokmas/Ormas	246.075.900	40,00	76,90	Kelurahan Bangka Belitung Darat (Kasi Pemberdayaan Masyarakat)	Dana DAU Kelurahan belum ada arahan pelaksanaan di Tw I pada tahap ini baru pada perencanaan awal utk sumber dana rutin sdh ada realisasi
I.2.10		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bangka Belitung Laut)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	16	Pokmas/Ormas	320.000.000	5	Pokmas/Ormas	136.210.500	5	Pokmas/Ormas	330.270.000	1	Pokmas/Ormas	103.500.000		Pokmas/Ormas		2	Pokmas/Ormas	103.500.000	40,00	31,34	7	Pokmas/Ormas	239.710.500	43,75	74,91	Kelurahan Bangka Belitung Darat (Kasi Pemberdayaan Masyarakat)	Dana DAU Kelurahan belum ada arahan pelaksanaan di Tw I pada tahap ini baru pada perencanaan awal utk sumber dana rutin sdh ada realisasi
I.2.11		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bansir Darat)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	17	Pokmas/Ormas	320.000.000	5	Pokmas/Ormas	142.171.476	5	Pokmas/Ormas	288.505.000	1	Pokmas/Ormas	69.000.000		Pokmas/Ormas		1	Pokmas/Ormas	69.000.000	20,00	23,92	6	Pokmas/Ormas	211.171.476	35,29	65,99	Kelurahan Bangka Belitung Darat (Kasi Pemberdayaan Masyarakat)	Dana DAU Kelurahan belum ada arahan pelaksanaan di Tw I pada tahap ini baru pada perencanaan awal utk

No	TUJUAN / SASARA	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 -2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan			Realisasi Kinerja Pada						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja			Tingkat Capaian Kinerja dan		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026			Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit Perangkat	Keterangan
																														sumber dana rutin sdh ada realisasi
I.2.12		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Bansir Laut)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	15	Pokmas/Ormas	320.000.000	5	Pokmas/Ormas	131.862.500	5	Pokmas/Ormas	287.060.000	1	Pokmas/Ormas	70.500.000		Pokmas/Ormas		1	Pokmas/Ormas	70.500.000	20,00	24,56	6	Pokmas/Ormas	202.362.500	40,00	63,24	Kelurahan Bansir Laut (Kasi Pemberdayaan Masyarakat)	Dana DAU Keluraha n belum ada arahan pelaksana an di Tw I pada tahap ini baru pada perencan aan awal
I.2.13		Evaluasi Kelurahan	Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	3	Laporan	126.000.000	1	Laporan	24.250.000	1	Laporan	40.000.000		Laporan	0		Laporan		0	Laporan	0	0,00	0,00	1	Laporan	24.250.000	33,33	19,25	Kecamatan Pnk Tenggara (Kasi Pemberdayaan Masyarakat)	kinerja kegiatan sudah terlaksana namun laporan hasil evaluasi masih pada tahap pengerjaan
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KINERJA				**96,6**	**%**	**29.635.391.000**			10.185.488.584	**95,8**	%	**11.893.855.000**		**%**	**2.272.365.435**		**%**	**0**		**%**	**#REF!**				**%**					

Untuk mengetahui pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kantor Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak, perlu dilakukan evaluasi kinerja yaitu dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan capaian realisasinya. Perbandingan antara target dan capaian realisasi ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang harus dilakukan untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dalam tahun anggaran 2025 Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak melaksanakan 5 (lima) program dan 14 (empat belas) kegiatan serta 70 (tujuh puluh) sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2025. Dari 5 (lima) program dan 14 (empat belas) kegiatan serta 70 (tujuh puluh) sub kegiatan tersebut secara umum dapat dilaksanakan dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan presentase penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar 37,06% dengan capaian realisasi kinerja sebesar 67,52% dari rata-rata 5 (lima) program yang telah dilaksanakan.

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak secara umum telah digambarkan melalui tabel 3.1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan yang direncanakan tidak ada, karena program/kegiatan telah dilakukan perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan dan rencana. Dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna adanya keseimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta adanya relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia Adapun secara umum dapat disampaikan hal sebagai berikut:

1. **Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**

   Sampai dengan Triwulan II (Semester 1) Tahun 2025 di Kecamatan Pontianak Tenggara tidak ada realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

2. **Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan.**

   Sampai pada Triwulan II (Semester 1) Tahun 2025 Kecamatan Pontianak Tenggara telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan baik untuk Program kegiatan rutin maupun program urusan penunjang lainnya di Kecamatan.

3. **Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**

Sampai pada Triwulan II (Semester 2) Tahun 2025 Kecamatan Pontianak Tenggara tidak terdapat program/kegiatan yang melebih target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

4. **Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan**

   Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja, penetapan anggaran kas sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan.

5. **Implikasi yang Timbul terhadap Capaian Program Renstra Kecamatan Pontianak Tenggara.**

   Dengan adanya capaian program Renstra Perangkat Daerah maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terencana dan teranggarkan, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik bisa tercapai.

6. **Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.**

   Perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur dalam hal perencanaan, pengganggaran baik itu staf yang menangani perencanaan dan penganggaran serta para pejabat eselon, sehingga capaian target kinerja program/kegiatan lebih optimal.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Rencana Kerja

Rencana program dan kegiatan prioritas Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2025 merupakan hasil pemilihan program dan kegiatan strategis yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan, dengan mempertimbangkan isu-isu penting serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan. Penyusunan program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan pendekatan yang memperhatikan kebutuhan masyarakat serta dinamika pembangunan wilayah.

Dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini, Kecamatan Pontianak Tenggara juga terus berupaya mengintegrasikan pengarusutamaan gender serta penanganan penurunan angka stunting ke dalam proses perencanaan dan penganggaran, sebagai bagian dari komitmen terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan serta mengakomodir beberapa kebutuhan masyarakat terkait penanganan Posyandu serta peningkatan peran RT/RW dalam bersinergi membangun Kota Pontianak secara khusus di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara.

Setiap program dan kegiatan yang direncanakan disertai dengan informasi lengkap meliputi: indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi pelaksanaan, target capaian kinerja, pagu indikatif, dan sumber pendanaan. Perubahan terhadap kegiatan, capaian kinerja, dan alokasi anggaran tersebut didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan hingga Triwulan II Tahun 2025 serta perkembangan kondisi aktual di lapangan.

Adapun rincian perubahan program, kegiatan, dan pagu indikatif dalam Perubahan Renja Kecamatan Pontianak Tenggara Tahun 2025 disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Pontianak Tenggara Tahun 2025

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
		Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah				
2	3	4	5	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19	20
KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA				**11.893.855.000,00**	**12.150.389.994,00**	**12.915.909.093,00**	**1.022.054.093**							**10.139.519.000,00**	
UNSUR KEWILAYAHAN				**11.893.855.000,00**	**12.150.389.994,00**	**12.915.909.093,00**	**1.022.054.093**							**10.139.519.000,00**	
KECAMATAN				**11.893.855.000,00**	**12.150.389.994,00**	**12.915.909.093,00**	**1.022.054.093**							**10.139.519.000,00**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 %	95 %	9.037.067.000,00	9.369.167.694,00	9.199.606.593,00	-1.413.148.000							7.623.919.000,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	50.850.000,00	50.850.000,00	41.616.400,00	- 9.233.600			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-		36.700.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	11 Dokumen	24.000.000,00	24.000.000,00	20.260.000,00	-3.740.000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			9.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	5.500.000,00	4.367.900,00	-1.132.100	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			5.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.850.000,00	3.850.000,00	3.108.600,00	-741.400	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			4.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	5.500.000,00	5.500.000,00	4.351.900,00	-1.148.100	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			6.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	9.528.000,00	-2.472.000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			12.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	7.460.967.000,00	7.720.421.994,00	7.742.061.900,00	281.094.900			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kecamatan		6.056.527.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	51 Orang/bulan	6.952.487.000,00	7.209.021.994,00	7.209.022.000,00	256.535.000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			5.555.727.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	497.480.000,00	500.400.000,00	523.440.000,00	25.960.000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			489.600.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			4.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	7.000.000,00	7.000.000,00	5.599.900,00	- 1.400.100	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			7.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan adminsitrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kecamatan		2.600.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD															
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			2.600.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	69.000.000,00	87.440.000,00	87.140.000	18.140.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-		72.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	4 Paket	67.500.000,00	85.940.000,00	85.940.000,00	18.440.000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			69.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian															
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	- 300.000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			3.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	241.050.000,00	243.695.500,00	196.421.000	- 44.629.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-		262.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6 Paket	6.500.000,00	6.649.200,00	7.636.700,00	1.136.700	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			6.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	70.000.000,00	77.062.500,00	67.591.600,00	- 2.408.400	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			80.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6 Paket	14.000.000,00	16.550.400,00	14.098.400,00	98.400	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			15.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	38.000.000,00	37.996.000,00	30.300.000,00	- 7.700.000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			39.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	18.000.000,00	18.000.000,00	14.391.600,00	- 3.608.400	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			32.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			12.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2 Laporan	19.500.000,00	31.662.000,00	14.220.000,00	- 5.280.000	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			15.300.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD															
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	3.817.500,00	3.030.000,00	- 1.970.000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			4.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	140.000.000,00	170.572.300,00	279.930.300	139.930.300			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-		193.592.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Pengadaan Mebel															
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	10 Unit	0,00	40.403.800,00	66.225.400	66.225.400	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			30.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	140.000.000,00	130.168.500,00	213.704.900,00	73.704.900	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			163.592.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	956.200.000,00	981.424.620,00	766.295.871	- 189.904.129			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-		887.400.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	238.800.000,00	272.024.620,00	260.868.001	22.068.001	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			224.400.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	717.400.000,00	709.400.000,00	505.427.870,00	- 211.972.130	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			663.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	116.500.000,00	112.263.280,00	83.641.122	- 32.858.878			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-		112.900.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	5 Unit	46.000.000,00	46.000.000,00	37.169.000,00	- 8.831.000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			47.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	40 Unit	34.000.000,00	34.000.000,00	23.630.000,00	- 10.370.000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			30.600.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	12.000.000,00	11.913.280,00	8.242.122,00	- 3.757.878	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			12.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan	-	96 %	100.565.000,00	108.749.600,00	85.870.200,00	- 14.694.800							470.000.000,00	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan di tingkat Kecamatan	100 %	100 %	87.000.000,00	92.069.000,00	73.009.000	- 13.991.000			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kecamatan		70.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait															
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	1 Laporan	87.000.000,00	92.069.000,00	73.009.000,00	- 13.991.000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			70.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan publik yang dilimpahkan di Kecamatan	100 %	100 %	13.565.000,00	16.680.600,00	12.861.200	- 703.800			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kecamatan		400.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	14 Laporan	14 Laporan	13.565.000,00	16.680.600,00	12.861.200,00	- 703.800	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			400.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/masyarakat yang aktif	96 %	96 %	2.130.435.000,00	2.088.757.300,00	3.147.222.100,00	- 806.635.000							1.323.800.000,00	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Kegiatan di Kecamatan	100 %	100 %	97.000.000,00	104.084.500,00	77.498.500	- 19.501.500			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kecamatan		99.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	97.000.000,00	104.084.500,00	77.498.500,00	- 19.501.500	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			99.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	96 %	96 %	2.033.435.000,00	1.984.672.800,00	3.069.723.600	1.036.288.600			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kecamatan		1.224.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Evaluasi Kelurahan															
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	32.258.000,00	25.543.600,00	- 14.456.400	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			44.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan gangguan trantibum	96 %	96 %	161.788.000,00	148.039.900,00	152.841.700,00	- 8.946.300,00							169.000.000,00	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	100 %	100 %	161.788.000,00	148.039.900,00	152.841.700,00	- 8.946.300,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kecamatan		169.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia															
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	4 Laporan	60.000.000,00	57.000.000,00	84.073.900,00	24.073.900	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			69.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	96 %	96 %	464.000.000,00	435.675.500,00	330.368.500,00	88.800.000							552.800.000,00	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	96 %	96 %	464.000.000,00	435.675.500,00	330.368.500	- 133.631.500			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kecamatan		552.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa															
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang	600 Orang	45.000.000,00	45.000.000,00	41.478.000,00	- 3.522.000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			54.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional															
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	100 Orang	326.000.000,00	326.199.700,00	245.788.200,00	- 80.211.800	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			346.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT				**11.893.855.000,00**	**12.150.389.994,00**	**12.915.909.093,00**	**1.022.054.093**							**10.139.519.000,00**	
UNSUR KEWILAYAHAN				**11.893.855.000,00**	**12.150.389.994,00**	**12.915.909.093,00**	**1.022.054.093**							**10.139.519.000,00**	
KECAMATAN				**11.893.855.000,00**	**12.150.389.994,00**	**12.915.909.093,00**	**1.022.054.093**							**10.139.519.000,00**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 %	95 %	9.037.067.000,00	9.369.167.694,00	9.297.826.593,00	260.759.593							7.623.919.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	241.050.000,00	243.695.500,00	194.321.000	- 46.729.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-		262.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	714.600,00	562.700,00	- 2.437.300	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			3.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Penyediaan Bahan Logistik Kantor															

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.000.000,00	7.010.000,00	5.520.000,00	- 1.480.000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			6.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	3.196.200,00	2.556.500,00	- 2.443.500	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			5.100.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	116.500.000,00	112.263.280,00	78.229.122	- 38.270.878			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-		112.900.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	7 Unit	8.500.000,00	4.670.000,00	3.250.000,00	- 5.250.000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			8.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/masyarakat yang aktif	96 %	96 %	2.130.435.000,00	2.088.757.300,00	3.092.022.100,00	961.587.100							1.323.800.000,00	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	96 %	96 %	2.033.435.000,00	1.984.672.800,00	3.014.523.600	981.088.600			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan		1.224.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	44.000.000,00	47.424.800,00	47.424.800,00	3.424.800	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			25.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	150.000.000,00	129.693.000,00	155.857.000,00	5.857.000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			150.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	333.600.000,00	338.074.400,00	639.178.400,00	305.578.400	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			120.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan gangguan trantibum	96 %	96 %	161.788.000,00	148.039.900,00	103.521.700,00	- 58.266.300							169.000.000,00	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	100 %	100 %	161.788.000,00	148.039.900,00	103.521.700	- 58.266.300			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan		169.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia															
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	4 Laporan	15.500.000,00	28.560.000,00	20.768.000,00	5.268.000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			25.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	96 %	96 %	464.000.000,00	435.675.500,00	336.668.500,00	- 127.331.500							552.800.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	96 %	96 %	464.000.000,00	435.675.500,00	336.668.500	- 127.331.500			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan		552.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional															
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	50 Orang	30.000.000,00	8.100.000,00	5.800.000,00	- 24.200.000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			38.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT				**11.893.855.000,00**	**12.150.389.994,00**	**12.915.909.093,00**	**1.022.054.093**							**10.139.519.000,00**	
UNSUR KEWILAYAHAN				**11.893.855.000,00**	**12.150.389.994,00**	**12.915.909.093,00**	**1.022.054.093**							**10.139.519.000,00**	
KECAMATAN				**11.893.855.000,00**	**12.150.389.994,00**	**12.915.909.093,00**	**1.022.054.093**							**10.139.519.000,00**	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 %	95 %	9.037.067.000,00	9.369.167.694,00	9.297.826.593,00	260.759.593							7.623.919.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	241.050.000,00	243.695.500,00	194.321.000	- 46.729.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-		262.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	1.801.800,00	1.438.400,00	- 1.561.600	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			3.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.050.000,00	6.260.000,00	4.880.000,00	- 1.170.000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			6.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	4.495.000,00	3.444.000,00	- 1.556.000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			5.100.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	116.500.000,00	112.263.280,00	78.229.122	- 38.270.878			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-		112.900.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	7 Unit	5.000.000,00	4.920.000,00	3.430.000,00	- 1.570.000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			5.100.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/masyarakat yang aktif	96 %	96 %	2.130.435.000,00	2.088.757.300,00	3.092.022.100,00	961.587.100							1.323.800.000,00	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	96 %	96 %	2.033.435.000,00	1.984.672.800,00	3.014.523.600	981.088.600			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan		1.224.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	43.000.000,00	38.218.400,00	38.218.400,00	- 4.781.600	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			25.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	150.000.000,00	119.557.000,00	142.131.800,00	- 7.868.200	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			150.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	330.270.000,00	364.172.100,00	636.590.700,00	306.320.700	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			120.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan gangguan trantibum	96 %	96 %	161.788.000,00	148.039.900,00	103.521.700,00	- 58.266.300							169.000.000,00	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	100 %	100 %	161.788.000,00	148.039.900,00	103.521.700	- 58.266.300			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan		169.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia															

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	4 Laporan	30.788.000,00	22.313.000,00	14.862.400,00	- 15.925.600	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			25.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	96 %	96 %	464.000.000,00	435.675.500,00	336.668.500,00	- 127.331.500							552.800.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	96 %	96 %	464.000.000,00	435.675.500,00	336.668.500	- 127.331.500			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan		552.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional															
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	50 Orang	13.000.000,00	9.188.800,00	6.244.400,00	- 6.755.600	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bangka Belitung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			38.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
KELURAHAN BANSIR DARAT				**11.893.855.000,00**	**12.150.389.994,00**	**12.915.909.093,00**	**1.022.054.093**							**10.139.519.000,00**	
UNSUR KEWILAYAHAN				**11.893.855.000,00**	**12.150.389.994,00**	**12.915.909.093,00**	**1.022.054.093**							**10.139.519.000,00**	
KECAMATAN				**11.893.855.000,00**	**12.150.389.994,00**	**12.915.909.093,00**	**1.022.054.093**							**10.139.519.000,00**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 %	95 %	9.037.067.000,00	9.369.167.694,00	9.297.826.593,00	260.759.593							7.623.919.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	241.050.000,00	243.695.500,00	194.321.000	- 46.729.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-		262.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	1.656.800,00	1.323.600,00	- 1.676.400	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			3.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	6.000.000,00	1.704.000,00	1.360.000,00	- 4.640.000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			6.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	1.438.500,00	1.150.500,00	- 3.849.500	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			5.100.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	116.500.000,00	112.263.280,00	78.229.122	- 38.270.878			-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-		112.900.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6 Unit	5.000.000,00	4.670.000,00	3.250.000,00	- 1.750.000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			5.100.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/masyarakat yang aktif	96 %	96 %	2.130.435.000,00	2.088.757.300,00	3.092.022.100,00	961.587.100							1.323.800.000,00	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	96 %	96 %	2.033.435.000,00	1.984.672.800,00	3.014.523.600	981.088.600			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan		1.224.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	34.000.000,00	35.974.800,00	35.974.800,00	1.974.800	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			25.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	150.000.000,00	89.970.624,00	94.867.700,00	- 55.132.300	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			150.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	288.505.000,00	329.438.476,00	532.306.400,00	243.801.400	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			120.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi penanganan gangguan trantibum	96 %	96 %	161.788.000,00	148.039.900,00	103.521.700,00	- 58.266.300							169.000.000,00	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	100 %	100 %	161.788.000,00	148.039.900,00	103.521.700	- 58.266.300			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan		169.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia															
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	4 Laporan	23.000.000,00	19.581.900,00	13.765.400,00	- 9.234.600	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			25.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	96 %	96 %	464.000.000,00	435.675.500,00	336.668.500,00	- 127.331.500							552.800.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	96 %	96 %	464.000.000,00	435.675.500,00	336.668.500	- 127.331.500			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan		552.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional															
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	50 Orang	27.000.000,00	13.272.000,00	10.077.500,00	- 16.922.500	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Darat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			38.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
KELURAHAN BANSIR LAUT				**11.893.855.000,00**	**12.150.389.994,00**	**12.915.909.093,00**	**1.022.054.093**							**10.139.519.000,00**	
UNSUR KEWILAYAHAN				**11.893.855.000,00**	**12.150.389.994,00**	**12.915.909.093,00**	**1.022.054.093**							**10.139.519.000,00**	
KECAMATAN				**11.893.855.000,00**	**12.150.389.994,00**	**12.915.909.093,00**	**1.022.054.093**							**10.139.519.000,00**	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan	95 %	95 %	9.037.067.000,00	9.369.167.694,00	9.297.826.593,00	260.759.593							7.623.919.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	241.050.000,00	243.695.500,00	194.321.000	- 46.729.000			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-		262.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	- 1.730.000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			3.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	7.000.000,00	7.210.000,00	5.340.000,00	- 1.660.000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			6.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	5.000.000,00	3.201.000,00	2.207.000,00	- 2.793.000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			5.100.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	116.500.000,00	112.263.280,00	78.229.122	- 38.270.878			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	-		112.900.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	9 Unit	6.000.000,00	6.090.000,00	4.670.000,00	- 1.330.000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			5.100.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	96 %	96 %	2.130.435.000,00	2.088.757.300,00	3.092.022.100,00	961.587.100							1.323.800.000,00	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Permberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	96 %	96 %	2.033.435.000,00	1.984.672.800,00	3.014.523.600	981.088.600			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan		1.224.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	33.000.000,00	37.726.400,00	37.726.400,00	4.726.400	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			25.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	150.000.000,00	141.460.000,00	138.050.000,00	- 11.950.000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Laut	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			150.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	287.060.000,00	280.704.800,00	490.653.600,00	203.593.600	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			120.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penanganan gangguan trantibum	96 %	96 %	161.788.000,00	148.039.900,00	103.521.700,00	- 58.266.300							169.000.000,00	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	100 %	100 %	161.788.000,00	148.039.900,00	103.521.700	- 58.266.300			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan		169.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia															

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	4 Laporan	4 Laporan	32.500.000,00	20.585.000,00	15.172.000,00	- 17.328.000	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			25.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	96 %	96 %	464.000.000,00	435.675.500,00	336.668.500,00	- 127.331.500							552.800.000,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	96 %	96 %	464.000.000,00	435.675.500,00	336.668.500	- 127.331.500			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan		552.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional															
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50 Orang	50 Orang	23.000.000,00	33.915.000,00	27.280.400,00	4.280.400	Kota Pontianak, Pontianak Tenggara, Bansir Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			38.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA
			J U M L A H	**11.893.855.000,00**	**12.150.389.994,00**	**12.915.909.093,00**	**1.022.054.093**							**10.139.519.000,00**	

3.2 Pendanaan

Pendanaan dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun pada Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Tenggara Tahun 2025 terdapat kegiatan maupun sub kegiatan yang mengalami perubahan pagu anggaran serta target kinerja. Hal ini menunjukkan terjadi dinamika dalam pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah serta menjawab kebutuhan masyarakat di Wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara.

Adapun kegiatan/sub kegiatan yang mengalami perubahan pagu ini sesuai dengan kebutuhan organisasi dan berdasarkan Surat Edaran Walikota Pontianak Nomor : B/000.7.2.4/ /BAPPERIDA/2025 tanggal April 2025 pada lampiran I terdiri dari:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah semula dianggarkan sebesar Rp. 50.850.000,00 setelah perubahan turun menjadi sebesar Rp. 41.616.400,00 terjadi penurunan dikarenakan *refocusing* anggaran serta penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah semula dianggarkan sebesar Rp. 7.720.421.994,00 setelah perubahan anggaran bertambah menjadi sebesar Rp. 7.746.861.900,00 artinya terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.26.439.906,00 yang didapatkan dari pergeseran antar kegiatan di Kecamatan Pontianak Tenggara dan telah melalui pertimbangan kebutuhan organisasi yang mendesak.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah semula dianggarkan sebesar Rp. 87.440.000,00 setelah perubahan anggaran turun menjadi sebesar Rp.87.140.000,00 artinya terdapat pengurangan/efisiensi anggaran sebesar Rp.300.000,00.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah semula dianggarkan sebesar Rp.243.695.500,00 setelah perubahan turun menjadi sebesar Rp. 194.321.000,00 terjadi penurunan dikarenakan *refocusing* anggaran serta penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah semula dianggarkan sebesar Rp. 170.572.300,00 setelah perubahan anggaran bertambah menjadi sebesar Rp. 365.945.900,00 artinya terdapat penambahan anggaran sebesar Rp. 195.373.600,00.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah semula dianggarkan sebesar Rp. 981.424.620,00 setelah perubahan turun menjadi sebesar Rp. 781.212.271,00 terjadi penurunan dikarenakan *refocusing* anggaran serta penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah semula dianggarkan sebesar Rp. 112.263.280,00 setelah perubahan turun menjadi sebesar Rp. 78.229.122,00 terjadi penurunan dikarenakan penyesuaian anggaran sebagai akibat dari prioritas baru dalam perencanaan pembangunan daerah.
8. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan semula dianggarkan sebesar Rp. 92.069.000,00 setelah perubahan turun menjadi sebesar Rp. 73.009.000,00 artinya terdapat pengurangan/efisiensi anggaran sebesar Rp.19.060.000,00. Penurunan ini merupakan hasil dari penyesuaian terhadap ketersediaan dana melalui rasionalisasi kegiatan/sub kegiatan.
9. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan semula dianggarkan sebesar Rp. 16.680.600,00 setelah perubahan anggaran turun menjadi sebesar Rp.12.861.200,00 artinya terdapat pengurangan/efisiensi anggaran sebesar Rp.3.819.400,00. Penurunan ini merupakan hasil dari penyesuaian terhadap ketersediaan dana melalui rasionalisasi kegiatan/sub kegiatan.
10. Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Kegiatan Desa semula dianggarkan sebesar Rp. 104.084.500,00 setelah perubahan anggaran turun menjadi sebesar Rp.77.498.500,00 terjadi penurunan dikarenakan penyesuaian anggaran sebagai akibat dari prioritas baru dalam perencanaan pembangunan daerah.
11. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan semula dianggarkan sebesar Rp.1.984.672.800,00 setelah perubahan anggaran bertambah menjadi sebesar Rp. 3.014.523.600,00 artinya terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.1.029.850.800,00. Adapun terdapat pergeseran anggaran antar sub kegiatan di kegiatan yang sama dikarenakan penyesuaian pada hasil asistensi penggunaan anggaran DAU Kelurahan dan telah memperhatikan kebutuhan masyarakat.
12. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah semula dianggarkan sebesar Rp. 148.039.900,00 setelah perubahan turun menjadi sebesar Rp. 103.521.700,00 terjadi penurunan dikarenakan *refocusing* anggaran serta penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah.
13. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah semula dianggarkan sebesar Rp. 435.675.500,00 setelah perubahan turun menjadi sebesar Rp. 336.668.500,00 terjadi penurunan dikarenakan penyesuaian anggaran sebagai akibat dari prioritas baru dalam perencanaan pembangunan daerah.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh Perangkat Daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2025. Dokumen ini merupakan bagian dari implementasi tahun kedua Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Tenggara Tahun 2024–2026, yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak.

Perubahan Renja Tahun 2025 ini berperan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Kecamatan Pontianak Tenggara Tahun 2025. Selain itu, dokumen ini juga menjadi dasar dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian kinerja tahunan, yang dilakukan secara berkala setiap triwulan sepanjang tahun anggaran berjalan.

Capaian atau *output* yang termuat dalam Perubahan Renja mencerminkan program tahunan yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kecamatan. Renja ini diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, sehingga memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Pontianak Tenggara.

Pontianak, Mei 2025

Camat Pontianak Tenggara Kota Pontianak,

ttd

M. Yatim, S.AP, M.Si
Pembina
NIP. 19760105 199803 1 003

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2025

Prepared by

Kecamatan Pontianak Timur

kecptktimur.pontianak.go.id
Jl. Rasuna Said Perumnas III Tanjung Hulu

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan tepat waktu sebagai rencana pelaksanaan kegiatan yang sudah disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub. kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kami menyadari Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024 masih banyak kekurangannya, kami berharap dengan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak ini, semua kebijakan, program, kegiatan dan sub. kegiatan yang di susun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2025 ini dapat dijadikan pedoman bagi semua komponen Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan mendukung dalam tercapainya visi Kota Pontianak.

Demikian penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2025 semoga dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program di Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak sehingga pelaksanaan program kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …...…… i
DAFTAR ISI …..……...…… ii

BAB I PENDAHULUAN ……...…… I-1
1.1 Latar Belakang …..…….. I-1
1.2 Landasan Hukum ……..……...…….. I-1
1.3 Maksud dan Tujuan …….……. I-4
1.4 Sistematika Penulisan ..……...…… I-4

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN ..…… II-1 TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN …… III-1
3.1 Rencana Kerja ……..…… III-1
3.2 Pendanaan ……... III-11

BAB IV PENUTUP …….……..…….. IV-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun Anggaran 2025, Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan Renja OPD Tahun Anggaran 2025;
4. Pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan sasaran kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor

3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
17. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
19. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur, Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 79).
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 32).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 47 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 47).

23. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 15.1 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangat Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 15.1).
24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor).
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan indikator dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD Tahun Anggaran 2025 dengan Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 serta renstra PD dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang dalam kurun waktu Januari-Maret 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2025, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Kebijakan perencanaan program dan kegiatan;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:

1. Sinergitas dengan RPJMN dan RPJMD;
2. Konsisten dengan Rencana Strategis;
3. Program kegiatan yang diutamakan;
4. Masalah yang ada dan perlu diatasi;
5. Tujuan dan sasaran serta prioritas untuk mewujudkannya.

Analisis Capaian Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak didasarkan pada Perubahan Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024-2026 dimana indikator program dan target renstra OPD telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak.

Sampai dengan triwulan II penyerapan anggaran Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai karena adanya kegiatan yang belum dilaksanakan dan tidak optimal sehingga anggaran tidak dapat terserap sesuai yang direncanakan.

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah tahun 2024 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pontianak Timur sampai dengan triwulan I Tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 terlampir.

Tabel 2.1

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah

Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak

Periode Pelaksanaan Triwulan I

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PONTIANAK TIMUR KOTA PONTIANAK
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN I TAHUN 2025

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/Sub.Kegiatan	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra sirangkat daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
														I		II		III		IV																	
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11		12						13=9+10+11+12		14=13/8x100		15=7+13			16=15/8x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K		K	Rp	K	Rp.	K		Rp	K			
	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Layanan Publik		**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Capaian IKM Yang di Peroleh Dari Hasil Survey**	**Sangat Baik**		**47,829,549,000**	**Sangat Baik**		**16,417,923,099**	**Sangat Baik**		**19,387,047,000**	**Sangat Baik**	**4,157,117,728**	**Sangat Baik**	-	-	%	-	-	%	-	-	**Sangat Baik**	**4,157,117,728**	**Sangat Baik**	**21**	**Sangat Baik**		**20,575,040,027**	**Baik**	**43.02**		
		SKPD PENUNJANG																																			
I		**7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatatan**	**Tingkat Kepuasan Kelurahan/Kecamatan terhadap Pelayanan Kesekretariatatan diperoleh berdasarkan hasil survey di Kantor Kelurahan dan Kecamatan Pontianak Timur**	**98**	**%**	**32,370,949,000**	**96**	**%**	**11,373,591,099**	**95**	**%**	**13,192,002,000**	**9**	**%**	**2,949,614,728**	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**9**	**%**	**2,949,614,728**	**9.86**	**22.38**	**9**	**%**	**14,923,205,927**	**9.36**	**45.79**		**Terdapat endahan Lokasi elaksanaan egiatan Adanya Efisiensi nggaran**
1.1		**7.01.01.2.01 Perencanaan, Pengangganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Pengangganan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**(Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Pengangganan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/Target)x Persentase Target**	**100**	**%**	**82,320,000**	**100**	**%**	**32,005,000**	**100**	**%**	**42,440,000**	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	-	-	**100**	**%**	**32,005,000**	**100.00**	**38.88**		
1.1.1		7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	(Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun/Diklim : Dokumen Perencanaan Yang Harus Ditargetkan)x Persentase Target	36	Dok	30,000,000	12	Dok	10,000,000	12	Dok	25,000,000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	-	12	Dok	10,000,000	33.33	33.33	agian,Umum dan epegawaian	
1.1.2		7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	(Jumlah Dokumen RKA-SKPD Yang Disusun/Diselesaikan : Jumlah Dokumen RKA-SKPD Yang Ditargetkan) x Persentase Target	3	Dok	9,000,000	2	Dok	5,640,000	1	Dok	3,000,000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	-	1	Dok	5,640,000	33.33	62.67	agian,Umum dan epegawaian	
1.1.3		7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASHPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	(Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Yang Disusun/Diselesaikan : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Yang Ditargetkan)x Persentase Target	3	Dok	9,000,000	3	Dok	3,000,000	1	Dok	3,000,000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	-	1	Dok	3,000,000	33.33	33.33	agian,Umum dan epegawaian	
1.1.4		7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	(Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Disusun/Dilaporkan : Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang ditargetkan)x Persentase Target	30	Lap	21,120,000	10	Lap	10,285,000	10	Lap	7,040,000	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-	-	-	10	Lap	10,285,000	33.33	48.70	agian,Umum dan epegawaian	
1.1.5		7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Ditargetkan)x Persentase Target	3	Lap	13,200,000	3	Lap	3,080,000	1	Lap	4,400,000	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-	-	-	1	Lap	3,080,000	33.33	23.33	agian,Umum dan epegawaian	
1.2		**7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**(Penyelesaian Administrasi/Dokumen Keuangan Perangkat Daerah/Target)xPersentase Target**	**98**	**%**	**24,437,461,000**	**100**	**%**	**9,409,228,408**	**100**	**%**	**10,565,722,000**	**25**	**%**	**2,672,685,258**	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**25**	**%**	**2,672,685,258**	**24.58**	**25.30**	**125**	**%**	**12,081,913,666**	**124.58**	**49.44**		
		7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	(Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Yang Diminta :Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Yang Ditargetkan) x Persentase Target	2,268	Org/ Bln	22,256,741,000	756	Org/ Bln	8,725,518,408	756	Org/ Bln	9,834,302,000	189	Org/ Bln	2,515,595,258	-	Org/ Bln	-	-	Org/ Bln	-	-	Org/ Bln	-	189	Org/ Bln	2,515,595,258	25.00	25.58	945	Org/ Bln	11,241,113,666	41.67	50.51	agian,Umum dan epegawaian	
1.2.1		7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaandan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Yang Disusun :Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Ditargetkan) x Persentase Target	36	Dok	2,160,000,000	12	Dok	676,780,000	12	Dok	721,800,000	3	Dok	157,090,000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	3	Dok	157,090,000	25.00	21.76	15	Dok	833,870,000	41.67	38.61	agian,Umum dan epegawaian	
1.2.2		7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	(Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir dan SKPD yang Disusun: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir dan SKPD yang ditargetkan) x Persentase Target	3	Lap	3,300,000	3	Lap	1,100,000	1	Lap	1,100,000	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-	-	-	1	Lap	1,100,000	33.33	33.33	agian,Umum dan epegawaian	
1.2.3		7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	(Jumlah Laporan Keuangannyang Disusun : Jumlah Laporan Keuangan Yang Ditargetkan) x Persentase Target	36	Lap	17,400,000	12	Lap	5,830,000	12	Lap	8,520,000	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-	-	-	12	Lap	5,830,000	33.33	33.47	agian,Umum dan epegawaian	
1.3		**7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase pengelolaan administrasi barang milk daerah pada perangkat daerah**	**(Jumlah Dokumen administrasi barang milk daerah pada perangkat daerah yang disusun/Target)xPersentase Target**	**98**	**%**	**13,200,000**	**100**	**%**	**1,320,000**	**100**	**%**	**4,400,000**	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	-	-	**100**	**%**	**1,320,000**	**100.00**	**10.00**		
1.3.1		7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD	(Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD Yang Disusun : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milk Daerah SKPD Yang Ditargetkan) x Persentase Target	1	Dok	13,200,000	1	Dok	1,320,000	1	Dok	4,400,000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	-	1	Dok	1,320,000	33.33	10.00	agian,Umum dan epegawaian	
1.4		**7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**(Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun/Target)xPersentase Target**	**98**	**%**	**403,200,000**	**100**	**%**	**91,930,000**	**100**	**%**	**160,580,000**	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	-	-	**100**	**%**	**91,930,000**	**100.00**	**22.80**		
1.4.1		7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	(Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Yang di Pesan : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang Dianggarkan) x Persentase Target	252	Paket	390,000,000	157	Paket	90,830,000	259	Paket	156,180,000	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	-	-	157	Paket	90,830,000	62.30	23.29	agian,Umum dan epegawaian	
1.4.2		7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	(Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Yang Disusun : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Yang Ditargetkan)x Persentase Target	1	Dok	13,200,000	1	Dok	1,100,000	1	Dok	4,400,000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	-	1	Dok	1,100,000	33.33	8.33	agian,Umum dan epegawaian	
1.5		**7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah**	**(Penyelesaian administrasi umum perangkat daerah/Target)xPersentase Target**	**98**	**%**	**1,530,500,000**	**100**	**%**	**447,426,100**	**100**	**%**	**486,300,000**	**10**	**%**	**5,373,200**	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**10**	**%**	**5,373,200**	**10.19**	**1.10**	**110**	**%**	**452,799,300**	**110.19**	**29.59**		
1.5.1		7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	(Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan/Bangunan Kantor yang Direalisasikan : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan) x Persentase Target	24	Paket	135,000,000	8	Paket	17,482,500	8	Paket	24,000,000	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	-	-	8	Paket	17,482,500	33.33	12.95	agian,Umum dan epegawaian	
1.5.2		7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	(Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Direalisasikan : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan)x Persentase Target	24	Paket	510,000,000	8	Paket	146,529,300	8	Paket	170,000,000	2	Paket	1,460,000	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	2	Paket	1,460,000	25.00	0.86	10	Paket	147,989,300	41.67	29.02	agian,Umum dan epegawaian	
1.5.3		7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	(Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Direalisasikan : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan) x Persentase Target	24	Paket	165,000,000	8	Paket	44,052,100	8	Paket	55,000,000	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	-	-	8	Paket	44,052,100	33.33	26.70	agian,Umum dan epegawaian	
1.5.4		7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	(Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Direalisasikan : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan) x Persentase Target	288	Paket	364,000,000	96	Paket	101,360,000	96	Paket	120,000,000	3	Paket	1,644,000	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	3	Paket	1,644,000	3.13	1.37	99	Paket	103,004,000	34.38	28.30	agian,Umum dan epegawaian	
1.5.5		7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	(Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Direalisasikan : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan)x Persentase Target	288	Paket	202,500,000	96	Paket	55,338,800	96	Paket	67,500,000	3	Paket	1,249,200	-	Paket	-	-	Paket	-	-	Paket	-	3	Paket	1,249,200	3.13	1.85	99	Paket	56,588,000	34.38	27.94	agian,Umum dan epegawaian	
1.5.6		7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Kecamatan Pontianak Timur)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	(Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Direalisasikan :Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Ditargetkan) x Persentase Target	288	Dok	44,200,000	96	Dok	13,440,000	96	Dok	13,200,000	24	Dok	1,020,000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	24	Dok	1,020,000	25.00	7.73	120	Dok	14,460,000	41.67	32.71	agian,Umum dan epegawaian	

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)/Sub.Kegiatan	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang dievaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra erangkat daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
														I			II			III			IV															
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			11			12			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp.	K		Rp	K	Rp		
I.5.7		7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kecamatan Pontianak Timur)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Disusun : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Yang Ditargetkan) x Persentase Target	3	Lap	90,000,000	4	Lap	67,243,400	1	Lap	30,000,000	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-	-	-	4	Lap	67,243,400	133.33	74.71	a.l.jan.Umum dan epegawaian	
I.5.8		7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	(Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Yang Disusun : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD yang Ditargetkan) x Persentase Target	3	Dok	19,800,000	1	Dok	1,980,000	1	Dok	6,600,000	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	Dok	-	-	-	1	Dok	1,980,000	33.33	10.00	a.l.jan.Umum dan epegawaian	
I.6		**7.01.01.2.07** **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**(Jumlah Barang Milik Daerah yang Disediakan/Target)x Persentase Target**	**100**	**%**	**782,000,000**	**100**	**%**	**373,225,176**	**100**	**%**	**450,000,000**	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**100**	**%**	**373,225,176**	**100.00**	**47.73**		
I.6.1		7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipesan : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Ditargetkan) x Persentase Target	81	Unit	782,000,000	36	Unit	373,225,176	27	Unit	450,000,000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	-	36	Unit	373,225,176	44.44	47.73	a.l.jan.Umum dan epegawaian	
I.7		**7.01.01.2.08** **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**(Jumlah Jasa Penunjang Yang Disediakan/Target)x Persentase Target**	**100**	**%**	**3,939,268,000**	**100**	**%**	**1,191,888,971**	**100**	**%**	**1,017,920,000**	**25**	**%**	**249,710,270**	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**25**	**%**	**249,710,270**	**25.00**	**24.53**	**125**	**%**	**1,441,899,241**	**125.00**	**36.60**		
I.7.1		7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	(Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang terbayarkan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Dianggarkan) x Persentase Target	36	Lap	789,268,000	12	Lap	167,139,872	12	Lap	304,834,880	3	Lap	36,087,134	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-	3	Lap	36,087,134	25.00	11.84	15	Lap	203,227,006	41.67	25.75	a.l.jan.Umum dan epegawaian	
I.7.2		7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	(Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Dibayar : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Yang Dikontrak) x Persentase Target	36	Lap	3,150,000,000	12	Lap	1,024,749,099	12	Lap	713,085,120	3	Lap	213,623,136	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-	3	Lap	213,623,136	25.00	29.96	15	Lap	1,238,372,235	41.67	39.31	a.l.jan.Umum dan epegawaian	
I.8		**7.01.01.2.09** **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah**	**(Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara/Target)x Persentase Target**	**100**	**%**	**1,183,000,000**	**100**	**%**	**326,567,444**	**100**	**%**	**454,640,000**	**19**	**%**	**21,846,000**	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**19**	**%**	**21,846,000**	**19.00**	**4.81**	**119**	**%**	**348,413,444**	**119.00**	**29.45**		
I.8.1		7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	(Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Yang Dianggarkan) x Persentase Target	54	Unit	360,000,000	216	Unit	103,087,100	216	Unit	151,220,000	54	Unit	21,846,000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	54	Unit	21,846,000	25.00	14.45	270	Unit	124,933,100	41.67	34.70	a.l.jan.Umum dan epegawaian	
I.8.2		7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	(Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara :Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dianggarkan) x Persentase Target	198	Unit	123,000,000	66	Unit	28,820,000	66	Unit	53,420,000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	-	66	Unit	28,820,000	33.33	23.43	a.l.jan.Umum dan epegawaian	
		7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	(Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terpelihara : Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dianggarkan) x Persentase Target	2	Unit	700,000,000	2	Unit	194,660,344	1	Unit	250,000,000	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	Unit	-	-	-	2	Unit	194,660,344	66.67	27.81	a.l.jan.Umum dan epegawaian	
Sasaran: Terwujudnya Layanan Publik Pemerintahan Kecamatan Yang Berkualitas			**IKM Kecamatan (Dideleminya Termuat Pertanyaan tentang Layanan Trantib)**	**Tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik kecamatan termasuk respon atas laporan masyarakat atas akan mengenai gangguan keamanan dan ketertiban**	**Sangat Baik**		**6,026,600,000**	**Sangat Baik**		**1,767,227,800**	**Sangat Baik**		**1,375,750,000**	**Sangat Baik**		**89,405,000**	**Sangat Baik**		-	**Sangat Baik**		-	**Sangat Baik**		-	**Sangat Baik**		**89,405,000**	**Sangat Baik**		**6.50**	**Sangat Baik**		**1,846,632,800**	**Sangat Baik**		**30.63**		
		BIDANG PENUJUANG																																				
II		**7.01.02** **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan**	**(Jumlah Dokumen Yang Diselesaikan :Jumlah Dokumen Yang Diajukan) x Target**	**95**	**%**	**2,673,600,000**	**90**	**%**	**865,461,300**	**92**	**%**	**117,600,000**	**14**	**%**	**80,553,000**	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**14**	**%**	**80,553,000**	**15.00**	**68.50**	**14**	**%**	**946,014,300**	**14.53**	**35.38**		
II.1		**7.01.02.2.01** **Koordinasi/Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**(Jumlah Koordinasi Yang Dilaksanakan/Target)x Persentase Target**	**100**	**%**	**240,000,000**	**100**	**%**	**73,409,500**	**100**	**%**	**80,000,000**	**100**	**%**	**80,553,000**	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**100**	**%**	**80,553,000**	**100.00**	**100.69**	**100**	**%**	**153,962,500**	**100.00**	**64.15**		
II.1.1		7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	(Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Yang Disusun: Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Yang Ditargetkan) x Persentase Target	9	Lap	240,000,000	3	Lap	73,409,500	3	Lap	80,000,000	3	Lap	80,553,000	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-	3	Lap	80,553,000	100.00	100.69	6	Lap	153,962,500	66.67	64.15	Bidang Pemerintahan	
II.2		**7.01.02.2.02** **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan**	**(Jumlah Pelayanan Publik Yang Dilaksanakan/Target)x Persentase Target**	**100**	**%**	**2,433,600,000**	**100**	**%**	**792,051,800**	**100**	**%**	**37,600,000**	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**100**	**%**	**792,051,800**	**100.00**	**32.55**	Bidang Pemerintahan	
II.2.1		7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Yang disusun : Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Yang Ditargetkan) x Persentase Target	51	Lap	2,433,600,000	17	Lap	792,051,800	17	Lap	37,600,000	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-	-	-	17	%	792,051,800	33.33	32.55	Bidang Pemerintahan	
III		**7.01.05** PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**(Jumlah koordinasi dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Umum dibagi Jumlah tugas pemerintahan umum yang diamanatkan ke kecamatan) x 100%**	**95**	**%**	**3,025,000,000**	**90**	**%**	**798,712,500**	**92**	**%**	**1,108,150,000**	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	-	-	-	**%**	**798,712,500**	-	**26.40**		
III.1		**7.01.05.2.01** **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**(Jumlah Koordinasi Yang Dilaksanakan/Target)x Persentase Target**	**95**	**%**	**3,025,000,000**	**90**	**%**	**798,712,500**	**92**	**%**	**1,108,150,000**	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	-	-	-	**%**	**798,712,500**	-	**26.40**		
III.1.1		7.01.05.2.01.0003 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	(Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang Ditargetkan) x Persentase Target	750	Org	300,000,000	250	Org	95,622,500	250	Org	103,150,000	-	Org	-	-	Org	-	-	Org	-	-	Org	-	-	Org	-	-	-	250	Org	95,622,500	33.33	31.87	Bidang Pemerintahan	
III.1.2		7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Ketukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Ketukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	(Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Ketukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional : Jumlah Target)x Persentase Target	8,700	Org	2,725,000,000	2,900	Org	703,090,000	2,900	Org	1,005,000,000	-	Org	-	-	Org	-	-	Org	-	-	Org	-	-	Org	-	-	-	2,900	Org	703,090,000	33.33	25.80	Bidang Pemerintahan	
IV		**7.01.04** **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan**	**(Jumlah Laporan Trantibum Yang Ditindaklanjuti/Diselesaikan dibagi Jumlah Laporan Pengaduan Trantibum) x 100**	**95**	**%**	**330,000,000**	**90**	**%**	**93,054,000**	**92**	**%**	**150,000,000**	**23**	**%**	**8,852,000**	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**23**	**%**	**8,852,000**	**25.00**	**5.90**	**23**	**%**	**101,906,000**	**24.21**	**30.88**		
IV.1		**7.01.04.2.02** **Koordinasi/Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan**	**(Jumlah Koordinasi Trantibum Yang Dilaksanakan/Target)x Persentase Target**	**100**	**%**	**330,000,000**	**100**	**%**	**93,054,000**	**100**	**%**	**150,000,000**	**25**	**%**	**8,852,000**	-	**%**	-	-	**%**	-	-	**%**	-	**25**	**%**	**8,852,000**	**25.00**	**5.90**	**25**	**%**	**101,906,000**	**25.00**	**30.88**		
IV.1.1		7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	(Jumlah Pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Yang Diselesaikan/Dilaporkan : Jumlah Pelaksanaan Koordinasi/Sinergi Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Ditargetkan x Persentase Target	36	Lap	330,000,000	12	Lap	93,054,000	12	Lap	150,000,000	3	Lap	8,852,000	-	Lap	-	-	Lap	-	-	Lap	-	3	Lap	8,852,000	25.00	5.90	15	Lap	101,906,000	41.67	30.88	ntang Ketentraman an Ketertiban	

No	Tujuan/Sasaran	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)/Sub.Kegiatan	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Sampai Dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2025)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Direvaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra yang direvaluasi Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra erangkat daerah s.d Tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
														I		II		III		IV																	
1	2	3	4	5	6			7			8			9		10		11		12		13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
					K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp.	K		Rp	K	Rp		
	Sasaran: Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Yang Berdaya		Indeks Gotong Royong	Menggambarkan tingkat keaktifan masyarakat dalam bergotong royong membersihkan lingkungan berdasarkan wilayah RW dalam rentang waktu satu tahun. Dalam lingkup RW, minimal dilaksanakan 12 kali gotong royong menjaga kebersihan lingkungan dalam satu tahun. Target nilai adalah 100.	90	%	9,430,000,000	85	%	2,787,104,200	88	%	4,829,295,000	79	% 1,118,090,000	-	% -	-	% -	-	% -	79	%	1,118,090,000	89.34	23.15	79		3,905,202,200	87.36	41.41		
			Persentase Partisipasi Masyarakat	Menggambarkan rata-rata tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan baik dalam perencanaan pembangunan maupun dalam pelaksanaan pembangunan. Target nilai minimal 90%	90	%		85	%		88	%		79	%	-	%	-	%	-	%	79	%		89.34		79			87.36				
V		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif	(Jumlah Lembaga/Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Kegiatan dibagi Jumlah Target Lembaga/Masyarakat yang Ikut Serta Dalam Pelaksanaan Kegiatan) x 100	90	%	9,430,000,000	85	%	2,787,104,200	88	%	4,829,295,000	79	% 1,118,090,000	-	% -	-	% -	-	% -	79	%	1,118,090,000	89.34	23.15	79	%	3,905,202,200	87.36	41.41		
V.1		7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	(Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Yang Dilaksanakan/Target)xPersentase Target	100	%	820,000,000	100	%	155,263,000	100	%	350,000,000	11	% 8,400,000	-	% -	-	% -	-	% -	11	%	8,400,000	11.11	2.40	11	%	160,663,000	11.11	19.96		
V.1.1		7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	(Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Yang Disusun : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Yang Ditargetkan) x Persentase Target	81	Lap	820,000,000	27	Lap	155,263,000	27	Lap	350,000,000	3	Lap 8,400,000	-	Lap -	-	Lap -	-	Lap -	3	Lap	8,400,000	11.11	2.40	30	Lap	160,663,000	37.04	19.96	Idang embetdayaan asyarakat	
V.2		7.01.03.2.02 Kegiatan Pembertdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pembertdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif	(Jumlah Kegiatan Pembertdayaan Kelurahan Yang Dilaksanakan/Target)xPersentase Target	90	%	8,610,000,000	85	%	2,631,841,200	88	%	4,479,295,000	81	% 1,109,690,000	-	% -	-	% -	-	% -	81	%	1,109,690,000	92.55	24.77	166	%	3,741,539,200	184.94	43.46		
V.2.1		7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	(Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diundang dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan) x Persentase Target	147	Lembaga Masyarakat	525,000,000	49	Lembaga Masyarakat	156,683,200	49	Lembaga Masyarakat	210,000,000	49	Lembaga Masyarakat 120,596,000	-	Lembaga Masyarakat -	-	Lembaga Masyarakat -	-	Lembaga Masyarakat -	49	Lembaga Masyarakat	120,596,000	100.00	57.43	98	Lembaga Masyarakat	277,279,200	66.67	52.82	Idang embetdayaan asyarakat	
V.2.2		7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	(Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang targetkan) x Persentase Target	42	Unit	4,200,000,000	14	Unit	1,423,746,700	14	Unit	1,400,000,000	-	Unit -	-	Unit -	-	Unit -	-	Unit -	-	Unit	-	-	-	14	Unit	1,423,746,700	33.33	33.90	Idang embetdayaan asyarakat	
V.2.3		7.01.03.2.02.0003 Pembertdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembertdayaan Masyarakat di Kelurahan	(Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pembertdayaan Masyarakat di Kelurahan : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Ditargetkan ikut serta dalam Pembertdayaan Masyarakat di Kelurahan) x Persentase Target	105	Pokmas/ Ormas	3,465,000,000	35	Pokmas/ Ormas	958,746,300	594	Pokmas/ Ormas	2,719,295,000	559	Pokmas/ Ormas 957,845,000	-	Pokmas/ Ormas -	-	Pokmas/ Ormas -	-	Pokmas/ Ormas -	559	Pokmas/ Ormas	957,845,000	94.11	35.22	594	Pokmas/ rmas	1,916,591,300	565.71	55.31	Idang embetdayaan asyarakat	
V.2.4		7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	(Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Yang Disusun : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan Yang Ditargetkan) x Persentase Target	3	Lap	420,000,000	3	Lap	92,665,000	1	Lap	150,000,000	1	Lap 31,257,000	-	Lap -	-	Lap -	-	Lap -	1	Lap	31,257,000	100.00	20.84	4	Lap	123,922,000	133.33	29.51	Idang embetdayaan asyarakat	
Jumlah					95.00	%	47,829,549,000	90.00	%	16,417,923,099	91.80	%	19,387,047,000	24.96	% 4,157,117,728	-	% -	-	% -	-	% -	24.96	%	4,157,117,728					20,575,040,827		43.02		
				Rata-rata Capaian Kinerja Sub. Kegiatan (%)																					17.47					60.01				
				Predikat Kinerja																					Tinggi					Sangat Rendah				
				Rata-rata Capaian Kinerja Program (%)																					27.84					27.09				
				Predikat Kinerja									-												Tinggi					Sangat Rendah				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan anggaran kas

Faktor penghambat capaian kinerja: perubahan rencana dan jadwal kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Meningkatkan Kinerja di Lingkungan Kecamatan agar tercapain target yang telah ditetapkan dan Meningkatkan Koordinasi dengan Instansi Terkait

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya : Mengevaluasi kembali pelaksanaan kegiatan yang ada sebagai dasar penetapan renja berikutnya

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rencana Kerja

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan/sub kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan/sub kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Rencana Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan/Sub. Kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan–permasalahan yang dihadapi.

Arah kebijakan daerah bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang mendesak dan urgent, serta dalam rangka akselerasi pembangunan guna menciptakan dan mengembangkan struktur perekonomian yang tangguh dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, maka arah kebijakan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak diselaraskan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024-2026.

Adapun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak terinci dalam Tabel 3.1 Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2025, sebagaimana tersebut dalam tabel 3.1 terlampir.

Tabel 3.1

Rekapitulasi Daftar Perubahan Program Dan Perubahan Kegiatan Pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Perubahan Tahun 2025

REKAPITULASI DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM DAN PERUBAHAN KEGIATAN PADA RENCANA

KERJA PEMERINTAH DAERAH RKPD PERUBAHAN TAHUN 2025

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		KECAMATAN PONTIANAK TIMUR							**19,387,047,000.00**	**19,733,012,061.00**	**21,285,164,849.00**	**1,898,117,849.00**							**24,895,482,612.00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**19,387,047,000.00**	**19,733,012,061.00**	**21,285,164,849.00**	**1,898,117,849.00**							**24,895,482,612.00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**19,387,047,000.00**	**19,733,012,061.00**	**21,285,164,849.00**	**1,898,117,849.00**							**24,895,482,612.00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan**				**95 %**	**95 %**	**13,182,002,000.00**	**13,521,864,061.00**	**13,424,045,400.00**	**4,362,277,012.00**						**95 %**	**17,544,279,012.00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				100 %	100 %	42,440,000.00	40,642,000.00	38,642,000.00	-3,798,000.00			Memperkuat reformasi birokrasi, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah	100 %	27,440,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	25,000,000.00	25,000,000.00	23,000,000.00	-2,000,000.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi birokrasi, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		12 Dokumen	10,000,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi birokrasi, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		1 Dokumen	3,000,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi birokrasi, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		1 Dokumen	3,000,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	10 Laporan	7,040,000.00	7,040,000.00	7,040,000.00	0.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi birokrasi, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		10 Laporan	7,040,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4,400,000.00	2,602,000.00	2,602,000.00	-1,798,000.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi birokrasi, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		1 Laporan	4,400,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*				100 %	100 %	10,565,722,000.00	10,933,127,061.00	10,896,928,000.00	331,206,000.00			Memperkuat reformasi birokrasi, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah	100 %	14,837,418,500.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				63 Orang/b ulan	73 Orang/b ulan	9,834,302,000.00	10,180,267,061.00	10,180,268,000.00	345,966,000.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi birokrasi, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		73 Orang/b ulan	14,105,998,500.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	721,800,000.00	743,240,000.00	707,040,000.00	-14,760,000.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi birokrasi, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		12 Dokumen	721,800,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi birokrasi, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		1 Laporan	1,100,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	8,520,000.00	8,520,000.00	8,520,000.00	0.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi birokrasi, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		12 Laporan	8,520,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah*				100 %	100 %	4,400,000.00	5,430,000.00	5,430,000.00	1,030,000.00			Memperkuat reformasi birokrasi, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah	100 %	4,400,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,400,000.00	5,430,000.00	5,430,000.00	1,030,000.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		1 Dokumen	4,400,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah*				100 %	100 %	160,580,000.00	132,170,000.00	132,170,000.00	-28,410,000.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah	100 %	160,580,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	3 Paket	156,180,000.00	129,580,000.00	129,580,000.00	-26,600,000.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		3 Paket	156,180,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	4,400,000.00	2,590,000.00	2,590,000.00	-1,810,000.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		1 Dokumen	4,400,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*				100 %	100 %	486,300,000.00	478,212,100.00	409,147,500.00	-77,152,500.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah	100 %	508,785,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	24,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		8 Paket	25,200,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	170,000,000.00	151,730,100.00	125,264,000.00	-44,736,000.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		8 Paket	178,500,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	55,000,000.00	55,000,000.00	42,430,700.00	-12,569,300.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		8 Paket	57,750,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	35,300,000.00	24,734,000.00	24,734,000.00	-10,566,000.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		12 Paket	37,065,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	22,000,000.00	22,000,000.00	13,192,800.00	-8,807,200.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		12 Paket	23,100,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				96 Dokumen	96 Dokumen	13,200,000.00	13,440,000.00	13,440,000.00	240,000.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		96 Dokumen	13,860,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30,000,000.00	30,000,000.00	16,814,000.00	-13,186,000.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		1 Laporan	30,000,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,600,000.00	27,108,000.00	27,108,000.00	20,508,000.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		1 Dokumen	6,600,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	450,000,000.00	418,519,900.00	489,538,600.00	39,538,600.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah	100 %	450,000,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				27 Unit	190 Unit	450,000,000.00	418,519,900.00	489,538,600.00	39,538,600.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi birokrasi, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		190 Unit	450,000,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	1,017,920,000.00	1,073,073,400.00	1,055,204,700.00	37,284,700.00			Memperkuat reformasi birokrasi, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah	100 %	1,090,783,512.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	304,834,880.00	183,171,432.00	183,722,752.00	-121,112,148.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi birokrasi, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		12 Laporan	306,389,880.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	713,085,120.00	889,901,968.00	871,481,968.00	158,396,848.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi birokrasi, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		12 Laporan	784,393,632.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	454,640,000.00	440,689,600.00	396,984,600.00	-57,655,400.00			Memperkuat reformasi birokrasi, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah	100 %	464,872,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	18 Unit	151,220,000.00	151,220,000.00	115,465,000.00	-35,755,000.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi birokrasi, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		18 Unit	158,781,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	24 Unit	25,000,000.00	25,000,000.00	16,000,000.00	-9,000,000.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi birokrasi, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		24 Unit	26,250,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	3 Unit	250,000,000.00	236,049,600.00	237,099,600.00	-12,900,400.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi birokrasi, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		3 Unit	250,000,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan**				**92 %**	**92 %**	**117,600,000.00**	**119,453,000.00**	**105,643,000.00**	**62,535,000.00**						**92 %**	**180,135,000.00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*				100 %	100 %	80,000,000.00	81,853,000.00	81,853,000.00	1,853,000.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	100 %	84,000,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3 Laporan	3 Laporan	80,000,000.00	81,853,000.00	81,853,000.00	1,853,000.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		3 Laporan	84,000,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan*				100 %	100 %	37,600,000.00	37,600,000.00	23,790,000.00	-13,810,000.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	100 %	96,135,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	2 Laporan	15,200,000.00	15,200,000.00	1,390,000.00	-13,810,000.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		2 Laporan	16,720,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif**				**88 %**	**88 %**	**4,829,295,000.00**	**4,833,545,000.00**	**6,783,740,800.00**	**985,308,600.00**						**88 %**	**5,814,603,600.00**	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan*				100 %	100 %	350,000,000.00	345,800,000.00	212,560,000.00	-137,440,000.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	100 %	350,000,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				27 Laporan	27 Laporan	350,000,000.00	345,800,000.00	212,560,000.00	-137,440,000.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		27 Laporan	350,000,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Keluruhan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif*				88 %	88 %	4,479,295,000.00	4,487,745,000.00	6,571,180,800.00	2,091,885,800.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	88 %	5,464,603,600.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				1 Laporan	1 Laporan	150,000,000.00	138,800,000.00	132,300,000.00	-17,700,000.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		1 Laporan	200,000,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan trantibum**				-	**92 %**	**150,000,000.00**	**150,000,000.00**	**108,171,649.00**	**15,000,000.00**						**92 %**	**165,000,000.00**	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan*				-	100 %	150,000,000.00	150,000,000.00	108,171,649.00	-41,828,351.00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	100 %	165,000,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	150,000,000.00	150,000,000.00	108,171,649.00	-41,828,351.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		12 Laporan	165,000,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**92 %**	**92 %**	**1,108,150,000.00**	**1,108,150,000.00**	**863,564,000.00**	**83,315,000.00**						**92 %**	**1,191,465,000.00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*				92 %	92 %	1,108,150,000.00	1,108,150,000.00	863,564,000.00	-244,586,000.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	92 %	1,191,465,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				250 Orang	250 Orang	103,150,000.00	103,150,000.00	103,150,000.00	0.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		250 Orang	113,465,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				1570 Orang	1570 Orang	550,000,000.00	550,000,000.00	428,275,000.00	-121,725,000.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		1570 Orang	577,500,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
		KELURAHAN SAIGON							**19,387,047,000.00**	**19,733,012,061.00**	**21,285,164,849.00**	**1,898,117,849.00**							**24,895,482,612.00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**19,387,047,000.00**	**19,733,012,061.00**	**21,285,164,849.00**	**1,898,117,849.00**							**24,895,482,612.00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**19,387,047,000.00**	**19,733,012,061.00**	**21,285,164,849.00**	**1,898,117,849.00**							**24,895,482,612.00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan**				**95 %**	**95 %**	**13,182,002,000.00**	**13,521,864,061.00**	**13,424,045,400.00**	**4,362,277,012.00**						**95 %**	**17,544,279,012.00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	486,300,000.00	478,212,100.00	409,147,500.00	-77,152,500.00			*Memperkuat reformasi* birokrasi, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah	100 %	508,785,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12,100,000.00	12,100,000.00	12,100,000.00	0.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	*Memperkuat reformasi* birokrasi, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		12 Paket	12,705,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	*Memperkuat reformasi* birokrasi, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		12 Paket	6,825,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	454,640,000.00	440,689,600.00	396,984,600.00	-57,655,400.00			*Memperkuat reformasi* birokrasi, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah	100 %	464,872,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	4,060,000.00	4,060,000.00	4,060,000.00	0.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	*Memperkuat reformasi* birokrasi, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		6 Unit	4,263,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan**				**92 %**	**92 %**	**117,600,000.00**	**119,453,000.00**	**105,643,000.00**	**62,535,000.00**						**92 %**	**180,135,000.00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan*				100 %	100 %	37,600,000.00	37,600,000.00	23,790,000.00	-13,810,000.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	100 %	96,135,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		2 Laporan	15,375,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif**				**88 %**	**88 %**	**4,829,295,000.00**	**4,833,545,000.00**	**6,783,740,800.00**	**985,308,600.00**						**88 %**	**5,814,603,600.00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif*				88 %	88 %	4,479,295,000.00	4,487,745,000.00	6,571,180,800.00	2,091,885,800.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	88 %	5,464,603,600.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	30,000,000.00	31,725,000.00	31,725,000.00	1,725,000.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		7 Lembaga Kemasyara katan	33,000,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		2 Unit	200,000,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				114 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	430,145,000.00	431,120,000.00	899,420,800.00	469,275,800.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		5 Pokmas / Ormas	899,420,800.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**92 %**	**92 %**	**1,108,150,000.00**	**1,108,150,000.00**	**863,564,000.00**	**83,315,000.00**						**92 %**	**1,191,465,000.00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*				92 %	92 %	1,108,150,000.00	1,108,150,000.00	863,564,000.00	-244,586,000.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	92 %	1,191,465,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				190 Orang	190 Orang	65,000,000.00	65,000,000.00	39,930,000.00	-25,070,000.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Saigon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		190 Orang	71,500,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
		KELURAHAN TANJUNG HULU							**19,387,047,000.00**	**19,733,012,061.00**	**21,285,164,849.00**	**1,898,117,849.00**							**24,895,482,612.00**	
	7	**URUSAN KEWILAYAHAN**							**19,387,047,000.00**	**19,733,012,061.00**	**21,285,164,849.00**	**1,898,117,849.00**							**24,895,482,612.00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**19,387,047,000.00**	**19,733,012,061.00**	**21,285,164,849.00**	**1,898,117,849.00**							**24,895,482,612.00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan**				**95 %**	**95 %**	**13,182,002,000.00**	**13,521,864,061.00**	**13,424,046,400.00**	**4,362,277,012.00**						**95 %**	**17,544,279,012.00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	486,300,000.00	478,212,100.00	409,147,500.00	-77,152,500.00			Memperkuat reformasi birokrasi, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah	100 %	508,785,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12,100,000.00	12,100,000.00	4,064,000.00	-8,036,000.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi birokrasi, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		12 Paket	12,705,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi birokrasi, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		12 Paket	6,825,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	454,640,000.00	440,689,600.00	396,984,600.00	-57,655,400.00			Memperkuat reformasi birokrasi, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah	100 %	464,872,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	4,060,000.00	4,060,000.00	4,060,000.00	0.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi birokrasi, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		6 Unit	4,263,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan**				**-**	**92 %**	**117,600,000.00**	**119,463,000.00**	**105,643,000.00**	**62,535,000.00**						**92 %**	**180,135,000.00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan*				-	100 %	37,600,000.00	37,600,000.00	23,790,000.00	-13,810,000.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	100 %	96,135,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		2 Laporan	16,150,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif**				**88 %**	**88 %**	**4,829,295,000.00**	**4,833,545,000.00**	**6,783,740,800.00**	**985,308,600.00**						**88 %**	**5,814,603,600.00**	

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif*				88 %	88 %	4,479,295,000.00	4,487,745,000.00	6,571,180,800.00	2,091,885,800.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	88 %	5,464,603,600.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	30,000,000.00	31,725,000.00	31,725,000.00	1,725,000.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		7 Lembaga Kemasyara katan	33,000,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	200,000,000.00	200,000,000.00	187,500,000.00	-12,500,000.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		2 Unit	200,000,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				134 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	453,195,000.00	454,920,000.00	937,692,800.00	484,497,800.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		5 Pokmas / Ormas	463,195,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**92 %**	**92 %**	**1,108,150,000.00**	**1,108,150,000.00**	**863,564,000.00**	**83,315,000.00**						**92 %**	**1,191,465,000.00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*				92 %	92 %	1,108,150,000.00	1,108,150,000.00	863,564,000.00	-244,586,000.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	92 %	1,191,465,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				190 Orang	190 Orang	65,000,000.00	65,000,000.00	51,605,000.00	-13,395,000.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		190 Orang	71,500,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
		KELURAHAN TANJUNG HILIR							**19,387,047,000.00**	**19,733,012,061.00**	**21,285,164,849.00**	**1,898,117,849.00**							**24,895,482,612.00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**19,387,047,000.00**	**19,733,012,061.00**	**21,285,164,849.00**	**1,898,117,849.00**							**24,895,482,612.00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**19,387,047,000.00**	**19,733,012,061.00**	**21,285,164,849.00**	**1,898,117,849.00**							**24,895,482,612.00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan**				**95 %**	**95 %**	**13,182,002,000.00**	**13,521,864,061.00**	**13,424,045,400.00**	**4,362,277,012.00**						**95 %**	**17,544,279,012.00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	486,300,000.00	478,212,100.00	409,147,500.00	-77,152,500.00			Memperkuat reformasi birokrasi, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah	100 %	508,785,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12,100,000.00	12,100,000.00	12,100,000.00	0.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi birokrasi, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		12 Paket	12,705,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi birokrasi, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		12 Paket	6,825,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	454,640,000.00	440,689,600.00	396,984,600.00	-57,655,400.00			Memperkuat reformasi birokrasi, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah	100 %	464,872,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	4,060,000.00	4,060,000.00	4,060,000.00	0.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi birokrasi, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		6 Unit	4,263,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan**				**92 %**	**92 %**	**117,600,000.00**	**119,483,000.00**	**105,643,000.00**	**62,535,000.00**						**92 %**	**180,135,000.00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan*				100 %	100 %	37,600,000.00	37,600,000.00	23,790,000.00	-13,810,000.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	100 %	96,135,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		2 Laporan	8,710,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif**				**88 %**	**88 %**	**4,829,295,000.00**	**4,833,545,000.00**	**6,703,740,800.00**	**985,308,600.00**						**88 %**	**5,814,603,600.00**	

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif*				88 %	88 %	4,479,295,000.00	4,487,745,000.00	6,571,180,800.00	2,091,885,800.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	88 %	5,464,603,600.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	30,000,000.00	31,725,000.00	31,725,000.00	1,725,000.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		7 Lembaga Kemasyara katan	33,000,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	200,000,000.00	200,000,000.00	193,251,000.00	-6,749,000.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		2 Unit	200,000,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				64 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	352,395,000.00	353,370,000.00	570,418,000.00	218,023,000.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		5 Pokmas / Ormas	570,418,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**92 %**	**92 %**	**1,108,150,000.00**	**1,108,150,000.00**	**863,564,000.00**	**83,315,000.00**						**92 %**	**1,191,465,000.00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*				92 %	92 %	1,108,150,000.00	1,108,150,000.00	863,564,000.00	-244,586,000.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	92 %	1,191,465,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				190 Orang	190 Orang	65,000,000.00	65,000,000.00	49,254,000.00	-15,746,000.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tanjunghilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		190 Orang	71,500,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
		KELURAHAN DALAM BUGIS							**19,387,047,000.00**	**19,733,012,061.00**	**21,285,164,849.00**	**1,898,117,849.00**							**24,895,482,612.00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**19,387,047,000.00**	**19,733,012,061.00**	**21,285,164,849.00**	**1,898,117,849.00**							**24,895,482,612.00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**19,387,047,000.00**	**19,733,012,061.00**	**21,285,164,849.00**	**1,898,117,849.00**							**24,895,482,612.00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan**				**95 %**	**95 %**	**13,182,002,000.00**	**13,521,864,061.00**	**13,424,045,400.00**	**4,362,277,012.00**						**95 %**	**17,544,279,012.00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	486,300,000.00	478,212,100.00	409,147,500.00	-77,152,500.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah	100 %	508,785,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12,100,000.00	12,100,000.00	12,100,000.00	0.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		12 Paket	12,705,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		12 Paket	6,825,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah*				-	100 %	454,640,000.00	440,689,600.00	396,984,600.00	-57,655,400.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah	100 %	464,872,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	4,060,000.00	4,060,000.00	4,060,000.00	0.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		6 Unit	4,263,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan**				**92 %**	**92 %**	**117,600,000.00**	**119,483,000.00**	**105,643,000.00**	**62,535,000.00**						**92 %**	**180,135,000.00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan*				100 %	100 %	37,600,000.00	37,600,000.00	23,790,000.00	-13,810,000.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	100 %	96,135,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		2 Laporan	14,600,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif**				**88 %**	**88 %**	**4,829,295,000.00**	**4,833,545,000.00**	**6,783,740,800.00**	**985,308,600.00**						**88 %**	**5,814,603,600.00**	

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif*				88 %	88 %	4,479,295,000.00	4,487,745,000.00	6,571,180,800.00	2,091,885,800.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	88 %	5,464,603,600.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	30,000,000.00	31,725,000.00	31,725,000.00	1,725,000.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		7 Lembaga Kemasyara katan	33,000,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	200,000,000.00	200,000,000.00	189,300,000.00	-10,700,000.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		2 Unit	200,000,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				112 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	434,535,000.00	435,510,000.00	851,284,800.00	416,749,800.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		5 Pokmas / Ormas	444,535,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**92 %**	**92 %**	**1,108,150,000.00**	**1,108,150,000.00**	**863,564,000.00**	**83,315,000.00**						**92 %**	**1,191,465,000.00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*				92 %	92 %	1,108,150,000.00	1,108,150,000.00	863,564,000.00	-244,586,000.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	92 %	1,191,465,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				190 Orang	190 Orang	65,000,000.00	65,000,000.00	51,500,000.00	-13,500,000.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Dalambugis	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		190 Orang	71,500,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
		KELURAHAN PARITMAYOR							**19,387,047,000.00**	**19,733,012,061.00**	**21,285,164,849.00**	**1,898,117,849.00**							**24,895,482,612.00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**19,387,047,000.00**	**19,733,012,061.00**	**21,285,164,849.00**	**1,898,117,849.00**							**24,895,482,612.00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**19,387,047,000.00**	**19,733,012,061.00**	**21,285,164,849.00**	**1,898,117,849.00**							**24,895,482,612.00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan**				**95 %**	**95 %**	**13,182,002,000.00**	**13,521,864,061.00**	**13,424,045,400.00**	**4,362,277,012.00**						**95 %**	**17,544,279,012.00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	486,300,000.00	478,212,100.00	409,147,500.00	-77,152,500.00			Memperkuat reformasi pdltik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penoegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah	100 %	508,785,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12,100,000.00	12,100,000.00	12,100,000.00	0.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi pdltik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penoegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		12 Paket	12,705,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi pdltik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penoegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		12 Paket	6,825,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	454,640,000.00	440,689,600.00	396,984,600.00	-57,655,400.00			Memperkuat reformasi pdltik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penoegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah	100 %	464,872,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	4,060,000.00	4,060,000.00	4,060,000.00	0.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi pdltik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penoegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		6 Unit	4,263,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan**				**92 %**	**92 %**	**117,600,000.00**	**119,483,000.00**	**105,643,000.00**	**62,535,000.00**						**92 %**	**180,135,000.00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan*				100 %	100 %	37,600,000.00	37,600,000.00	23,790,000.00	-13,810,000.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	100 %	96,135,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Paritmayor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		2 Laporan	8,400,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif**				**88 %**	**88 %**	**4,829,295,000.00**	**4,833,545,000.00**	**6,703,740,800.00**	**985,308,600.00**						**88 %**	**5,814,603,600.00**	

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif*				88 %	88 %	4,479,295,000.00	4,487,745,000.00	6,571,180,800.00	2,091,885,800.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	88 %	5,464,603,600.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	30,000,000.00	31,725,000.00	31,725,000.00	1,725,000.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Partimayor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		7 Lembaga Kemasyara katan	33,000,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Partimayor	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		2 Unit	200,000,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				58 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	341,565,000.00	342,540,000.00	528,574,800.00	187,009,800.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Partimayor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		5 Pokmas / Ormas	528,574,800.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**92 %**	**92 %**	**1,108,150,000.00**	**1,108,150,000.00**	**863,564,000.00**	**83,315,000.00**						**92 %**	**1,191,465,000.00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*				92 %	92 %	1,108,150,000.00	1,108,150,000.00	863,564,000.00	-244,586,000.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	92 %	1,191,465,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				190 Orang	190 Orang	65,000,000.00	65,000,000.00	44,500,000.00	-20,500,000.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Partimayor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		190 Orang	71,500,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
		KELURAHAN BANJAR SERASAN							**19,387,047,000.00**	**19,733,012,061.00**	**21,285,164,849.00**	**1,898,117,849.00**							**24,895,482,612.00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**19,387,047,000.00**	**19,733,012,061.00**	**21,285,164,849.00**	**1,898,117,849.00**							**24,895,482,612.00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**19,387,047,000.00**	**19,733,012,061.00**	**21,285,164,849.00**	**1,898,117,849.00**							**24,895,482,612.00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan**				**95 %**	**95 %**	**13,182,002,000.00**	**13,521,864,061.00**	**13,424,045,400.00**	**4,362,277,012.00**						**95 %**	**17,544,279,012.00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	486,300,000.00	478,212,100.00	409,147,500.00	-77,152,500.00			Memperkuat reformasi birokrasi, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah	100 %	508,785,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12,100,000.00	12,100,000.00	12,100,000.00	0.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi birokrasi, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		12 Paket	12,705,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi birokrasi, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		12 Paket	6,825,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	454,640,000.00	440,689,600.00	396,984,600.00	-57,655,400.00			Memperkuat reformasi birokrasi, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah	100 %	464,872,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	4,060,000.00	4,060,000.00	4,060,000.00	0.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi birokrasi, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		6 Unit	4,263,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan**				**92 %**	**92 %**	**117,600,000.00**	**119,483,000.00**	**105,643,000.00**	**62,535,000.00**						**92 %**	**180,135,000.00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan*				100 %	100 %	37,600,000.00	37,600,000.00	23,790,000.00	-13,810,000.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	100 %	96,135,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		2 Laporan	9,020,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif**				**88 %**	**88 %**	**4,829,295,000.00**	**4,833,545,000.00**	**6,763,740,800.00**	**985,308,600.00**						**88 %**	**5,814,603,600.00**	

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif*				88 %	88 %	4,479,295,000.00	4,487,745,000.00	6,571,180,800.00	2,091,885,800.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	88 %	5,464,603,600.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	30,000,000.00	31,725,000.00	31,725,000.00	1,725,000.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		7 Lembaga Kemasyara katan	33,000,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	200,000,000.00	200,000,000.00	150,129,500.00	-49,870,500.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		2 Unit	200,000,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				68 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	366,115,000.00	367,090,000.00	615,486,300.00	249,371,300.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		5 Pokmas / Ormas	376,115,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**92 %**	**92 %**	**1,108,150,000.00**	**1,108,150,000.00**	**863,564,000.00**	**83,315,000.00**						**92 %**	**1,191,465,000.00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*				92 %	92 %	1,108,150,000.00	1,108,150,000.00	863,564,000.00	-244,586,000.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	92 %	1,191,465,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				190 Orang	190 Orang	65,000,000.00	65,000,000.00	51,425,000.00	-13,575,000.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Banjar Serasan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		190 Orang	71,500,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
		KELURAHAN TAMBELANSAMPIT							**19,387,047,000.00**	**19,733,012,061.00**	**21,285,164,849.00**	**1,898,117,849.00**							**24,895,482,612.00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**							**19,387,047,000.00**	**19,733,012,061.00**	**21,285,164,849.00**	**1,898,117,849.00**							**24,895,482,612.00**	
	7.01	**KECAMATAN**							**19,387,047,000.00**	**19,733,012,061.00**	**21,285,164,849.00**	**1,898,117,849.00**							**24,895,482,612.00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan**				**95 %**	**95 %**	**13,182,002,000.00**	**13,521,864,061.00**	**13,424,045,400.00**	**4,362,277,012.00**						**95 %**	**17,544,279,012.00**	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah*				100 %	100 %	486,300,000.00	478,212,100.00	409,147,500.00	-77,152,500.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah	100 %	508,785,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	12,100,000.00	12,100,000.00	12,100,000.00	0.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		12 Paket	12,705,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		12 Paket	6,825,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah*				100 %	100 %	454,640,000.00	440,689,600.00	396,984,600.00	-57,655,400.00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah	100 %	464,872,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	4,060,000.00	4,060,000.00	4,060,000.00	0.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		6 Unit	4,263,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan**				**92 %**	**92 %**	**117,600,000.00**	**119,483,000.00**	**105,643,000.00**	**62,535,000.00**						**92 %**	**180,135,000.00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan*				100 %	100 %	37,600,000.00	37,600,000.00	23,790,000.00	-13,810,000.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	100 %	96,135,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		2 Laporan	7,160,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif**				**88 %**	**88 %**	**4,829,295,000.00**	**4,833,545,000.00**	**6,783,740,800.00**	**985,308,600.00**						**88 %**	**5,814,603,600.00**	

	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif*				88 %	88 %	4,479,295,000.00	4,487,745,000.00	6,571,180,800.00	2,091,885,800.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	88 %	5,464,603,600.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	30,000,000.00	31,725,000.00	31,725,000.00	1,725,000.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		7 Lembaga Kemasyara katan	33,000,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		2 Unit	200,000,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				54 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	341,345,000.00	342,320,000.00	493,747,800.00	152,402,800.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		5 Pokmas / Ormas	351,345,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
4.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**				**92 %**	**92 %**	**1,108,150,000.00**	**1,108,150,000.00**	**863,564,000.00**	**83,315,000.00**						**92 %**	**1,191,465,000.00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*				92 %	92 %	1,108,150,000.00	1,108,150,000.00	863,564,000.00	-244,586,000.00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	92 %	1,191,465,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				190 Orang	190 Orang	65,000,000.00	65,000,000.00	43,925,000.00	-21,075,000.00	Kota Pontianak, Pontianak Timur, Tambelansampit	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik		190 Orang	71,500,000.00	KECAMATAN PONTIANAK TIMUR
	J U M L A H								**19,387,047,000.00**	**19,733,012,001.00**	**21,285,164,849.00**	**1,898,117,848.00**							**24,895,482,612.00**	

3.2. Pendanaan

Anggaran Belanja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2025 sebesar Rp. 19.733.012.061,- dan mengalami penambahan di RKPD Perubahan 2025 sebesar Rp 1.552..152.788,- menjadi Rp. 21.285.164.849,- atau penambahan sebesar 1,08%, dengan rincian:

No.	Uraian	APBD	APBD REFOCUSING	Perubahan RKPD
1	**Belanja Pegawai**	**10.180.267.061**	**10.180.267.061**	**10.180.268.000**
	- Gaji + Tunjangan PNS	4.802.000.000	4.802.000.000	5.147.966.000
	- Penambahan PPH 21 Gaji	345.965.061	345.965.061	0
	- Gaji + Tunjangan PPPK	390.545.000	390.545.000	390.545.000
	- TPP PNS	4.413.334.000	4.413.334.000	4.413.334.000
	- TPP PPPK	228.423.000	228.423.000	228.423.000
2	**Belanja Earmarket**	**1.400.000.000**	**1.400.000.000**	**1.400.000.000**
	- DAU Pendanaan Kelurahan	1.400.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000
3	**Belanja Prioritas Lainnya**	**8.152.745.000**	**8.152.745.000**	**8.152.745.000**
	- Belanja Operasional RT/RW	747.000.000	747.000.000	747.000.000
	- Tambahan untuk Percepatan Penurunan Stunting	700.000.000	700.000.000	700.000.000
	- Tambahan Kampung Aman	40.000.000	40.000.000	40.000.000
	- Bantuan Operasional Posyandu	177.000.000	177.000.000	177.000.000
	- Tambahan untuk Kenaiukan Gaji Non ASN	101.400.000	101.400.000	101.400.000
	- Pelaksanaan Forum OPD untuk Penyusunan Renstra	15.000.000	15.000.000	15.000.000
4	**Pagu Dasar**	**6.372.345.000**	**6.372.345.000**	**6.372.345.000**
	Refocusing Pagu 2025	0	753.348.151	753.348.151
	Redistribusi Pagu 2025 Insentif Operasional RT RW	0	2.263.500.000	2.263.500.000
	Perubahan RKPD 2025	0	0	42.000.000
	- Penanbahan Bantuan Operasional RT/RW	0	0	24.000.000
	- Penambahan Bantuan Operasional	0	0	18.000.000
Total Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025		**19.733.012.061**	**21.243.163.910**	**21.285.164.849**

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan I tahun 2025, masih diperlukan peningkatan kinerja untuk pencapaian target pada tahun 2025 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2024-2026 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Walikota Pontianak serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi OPD diharapkan akan lebih terakomodasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama OPD di lingkup Pemerintah Kota Pontianak maupun dengan OPD yang membidangi fungsi lain.

Perubahan Renja Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak Tahun 2025 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Pemerintah Kota Pontianak. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparasi, danakuntabilitas.

Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahanTahun Anggaran 2025, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Pontianak.

Pontianak, Mei 2025

CAMAT PONTIANAK TIMUR

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

M. AKIF, SH

Pembina

NIP. 19720103 200701 1 028

PEMERINTAH KOTA
PONTIANAK
KECAMATAN PONTIANAK UTARA

PONTIANAK UTARA BISA!!!

PERUBAHAN RENJA

KECAMATAN PONTIANAK UTARA

TAHUN 2025

Telp. (0561) 881386 Fax (0561) 881386
Email : kec.ptk.utara@pontianak.go.id
Jalan Khatulistiwa Nomor 2 Pontianak

DAFTAR ISI

		Halaman
DAFTAR ISI		i
KATA PENGANTAR.....		ii
DAFTAR TABEL		iii
BAB I	PENDAHULUAN	I - 1
	1.1 Latar Belakang	I - 1
	1.2 Landasan Hukum	I - 3
	1.3 Maksud dan Tujuan	I - 6
	1.4 Sistematika Penulisan	I - 6
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN 1	II - 1
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian renstra	II - 1
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	III - 1
	3.1 Rencana Kerja	III - 3
	3.2 Pendanaan	III - 42
BAB.V.	PENUTUP	V - 1

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kota Pontianak Tahun 2025 dapat diselesaikan sebagai rencana pelaksanaan kegiatan yang memuat kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2025 telah disesuaikan dengan sistematika penulisan berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang diharapkan dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan Good Governance yang merupakan tuntutan terselenggaranya manajemen pemerintah yang bersih dan berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna berpedoman kepada RPD Kota Pontianak dan Renstra PD .

Demikian penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2025, semoga bermanfaat untuk kelancaran serta keberhasilan Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak.

Pontianak, 27 Mei 2025

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II.1.	Evaluasi terhadap Hasil renja Perangkat Daerah Kecamatan pontianak utara Periode Januari - Maret 2025 (Triwulan I)	II - 2
Tabel III.1.	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak	III - 2

BAB .I.
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan delam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak merupakan implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2024-2026 sesuai arah operasional dalam Rencana Pemerintah Daerah (RPD). Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Kegiatan pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis guna mencapai tujuan pembangunan daerah. Untuk mencapai hal tersebut harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan. Dengan perencanaan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik pula. Oleh sebab itu dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2025 ini diharapkan dapat terakomodasi dalam KUA-PPAS dan penetapan APBD Tahun 2025, sehingga akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Perubahan Renja Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Pemerintah Daerah (RPD).
2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang

tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja harus mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yaitu :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RPD tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam Renja PD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Penyusunan Renja PD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap Perumusan Rancangan Renja PD;

- Pengolahan data dan informasi
- Analisis gambaran pelayanan PD;
- Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD;
- Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD;
- Telaahan terhadap rancangan awal RPD;
- Perumusan tujuan dan sasaran
- Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- Perumusan tujuan dan sasaran
- Penelaahan usulan
- Perumusan kegiatan prioritas;
- Penyajian awal dokumen rancangan Renja PD;
- Penyempurnaan rancangan Renja PD;

- Pembahasan forum PD; dan
- Penyesuaian dokumen rancangan Renja PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

2. Tahap Penyajian Rancangan Renja PD.

- Menyusun Renja PD;
- Rancangan Renja - PD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat;
- Rancangan Renja PD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- Program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RPD serta menunjukan Prakiraan maju ;
- Rancangan Renja PD dibahas dalam forum OPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan .

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi landasan dan acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Utara (Renja) tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9) sebagai undang - Undang sebagaimana telah di ubah dengan Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalog dengan mengubah Undang - Undang Darurat nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Imdonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Imdonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1114)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419):
16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
17. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);
19. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas pokok, Fungsi, Uraian tugas Dan tata Kerja Kecamatan di Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 79).
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5);
21. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 29).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 10);

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan dokumen Renja PD dengan Renstra PD serta dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Daerah (RPD) agar penyelenggaraan urusan Kecamatan Pontianak Utara kota pontianak berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku, dan saran dan/atau masukan pemangku kepentingan (stakeholder).

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV. PENUTUP

BAB .II.

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak , maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 .

Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan I Tahun 2025 menguraikan tentang hasil Evaluasi Renja tahun berjalan 2025, dengan acuan pada Rencana Strategis (Renstra). Untuk capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kota Pontianak menguraikan pada Pencapaian Kinerja Evaluasi Terhadap Renja Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak yang meliputi :

1. Kebijakan Perencanaan Program dan Kegiatan:
2. Pelaksanaan program dan kegiatan:
3. Hasil Pelaksanaan Program Kegiatan

Dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2025 memperhatikan beberapa unsur pokok yaitu :

1. Sinergitas dengan RPJMN dan RPJMD;
2. Konsisten dengan Rencana strategis:
3. Program Kegiatan yang diutamakan:
4. Masalah yang ada dan perlu diatasi:
5. Tujuan dan sasaran serta prioritas untuk mewujudkannya

Analisis capaian kinerja pelayanan pada Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak berdasarkan pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2024-2026 dengan indikator program dan target renstra PD telah disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak pada Evaluasi Rencana Kerja (Renja) sampai dengan triwulan I tahun 2025.

Untuk capaian realisasi Kecamatan Pontianak Utara pada perubahan Renja sebesar 0,22% dikarenakan adanya penggantian Pembantu Bendahara Pengeluaran di Kelurahan Siantan Hulu, Siantan Tengah dan Batulayang , selain itu menunggu surat mutasi dari BKPSDM yang dilanjutkan ke BKD untuk pembuatan SK Bendahara yang akan digunakan untuk pembuatan speciment syarat untuk transaksi di kelurahan. Untuk trwulan II terdapat beberapa kegiatan yang belum di realisasikan karena anggaran yang tidak cukup dan akan direalisasikan pada triwulan III. Dan ada beberapa kegiatan triwulan III yang belum bisa direalisasikan diantaranya disebabkan karena :

1. masih terdapat pergeseran anggaran yang dilakukan, sehingga terdapat kegiatan yang menyesuaikan waktu pelaksanaannya secara khusus dalam pelaksanaan kegiatan di kelurahan

Untuk evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak sampai dengan triwulan I dapat dilihat pada tabel 2.1 , sebagai berikut:

Tabel II.1

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PONTIANAK UTARA
PERIODE JANUARI - MARET 2025 (Triwulan I)

No	Tujuan Perangkat Daerah dan Sasaran Perangkat Daerah	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Renja	Indikator-indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Definisi Operasional / Formulasi masing-masing Indikator Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 Hingga Akhir Tahun Perencanaan			Realisasi Capaian Kinerja dan Keuangan RENSTRA Tahun 2025 - 2026 sampai dengan Renja Tahun Lalu			Target Kinerja Dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi, sesuai Renja TA 2025			Realisasi Kinerja Pada Triwulan I			Total Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025 (%)		Unit/bidang Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6			7			8			9			13=9+10+11+12			14=13/8x100		15=7+13			16=15/6x100		17	18
					K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp	K		Rp.	K	Rp.		
	Tujuan PD : Meningkatkan Kualitas Layanan Kepada Masyarakat		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Tingkat Pelayanan= Volume/Capacity Ratio	Sangat Baik		25.838.134.040	Sangat Baik		-	Sangat Baik		10.212.866.187	10	%	1.984.303.687	10	%	1.984.303.687	10	19	#VALUE!	%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		Kegiatan blm masuk angkas
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	(Jumlah Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap Pelayanan Kesekretariatan : Jumlah Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap Pelayanan Kesekretariatan Yang Ditargetkan) x Persentase Target	285	%	25.838.134.040	-	-	-	95	%	10.212.866.187	10	%	1.984.303.687	10	%	1.984.303.687	10	19	#VALUE!	%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		
1.1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		285	%	247.098.000	-	-	-	95	%	97.300.000	0	%	0	0	%	0	-	-	#VALUE!	%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah		39	dokumen	24.300.000				13	Dokumen	24.300.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	-	-	0	dokumen	-			Umum dan Aparatur Kecamatan	

1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		3	dokumen	27.900.000				1	Dokumen	9.300.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	-	-	0	dokumen	-			Umum dan Aparatur Kecamatan	
1.1.3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		3	dokumen	15.400.000				1	Dokumen	5.100.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	-	-	0	dokumen	-			Umum dan Aparatur Kecamatan	
1.1.6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		36	laporan	24.978.000				12	laporan	8.300.000	0	laporan	0	0	laporan	0	-	-	0	laporan	-			Umum dan Aparatur Kecamatan	
1.1.7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah		30	laporan	151.020.000				10	laporan	50.300.000	0	laporan	0	0	laporan	0	-	-	0	laporan	-			Umum dan Aparatur Kecamatan	
1.2		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase jumlah realisasi capaian kinerja sub kegiatan dibagi jumlah seluruh target capaian kinerja sub kegiatan dikali 100**	**285**	**%**	**18.438.153.000**	**-**	**-**	**-**	**95**	**%**	**7.688.326.287**	**20**	**%**	**1.731.724.614**	**20**	**%**	**1.731.724.614**	21	23	#VALUE!	%	**1.731.724.614**	**#VALUE!**	**9,39**		
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		141	org/bln	16.868.573.000				658	org/bln	7.184.006.287	141	org/bln	1.731.724.614	188	org/bln	1.731.724.614	29	24	188	orang/bln	1.731.724.614			Umum dan Aparatur Kecamatan	
1.2.3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		36	dokumen	1.538.680.000				12	dokumen	497.120.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	-	-	0	Dokumen	-			Umum dan Aparatur Kecamatan	
1.2.5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		3	laporan	9.300.000				1	laporan	-	0	laporan	0	0	laporan	0	-	#DIV/0!	0	laporan	-			Umum dan Aparatur Kecamatan	

1.2.7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD		36	laporan	21.600.000				12	laporan	7.200.000	0	laporan	0	0	laporan	0	-	-	0	laporan	-			Umum dan Aparatur Kecamatan	
1.3		**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase jumlah realisasi capaian kinerja sub kegiatan dibagi jumlah seluruh target capaian kinerja sub kegiatan dikali 100**	**285**	**%**	**7.000.000**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**%**	**0,00**	**0,00**	**dok**	**0**	#DIV/0!	#DIV/0!			**-**				
1.3.1		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		4	dokumen	7.000.000				0	0	-	0	0	0	0	dok	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	dok	-			Umum dan Aparatur Kecamatan	
1.5		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase jumlah realisasi capaian kinerja sub kegiatan dibagi jumlah seluruh target capaian kinerja sub kegiatan dikali 100**	**285**	**%**	**330.960.000**	**-**	**-**	**-**	**95**	**%**	**99.230.000,00**	**0**	**%**	**0**	**0**	**%**	**0**	-	-		**Paket**	**-**				
1.5.2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		390	paket	330.960.000				130	Paket	99.230.000	0	paket	0	0	Paket	0	-	-		Paket	-			Umum dan Aparatur Kecamatan	
1.6		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase jumlah realisasi capaian kinerja sub kegiatan dibagi jumlah seluruh target capaian kinerja sub kegiatan dikali 100**	**285**	**%**	**940.575.350**	**-**	**-**	**-**	**95**	**%**	**360.377.975**	**12**	**%**	**1.080.000**	**12**	**%**	**1.080.000**	12	0	**#VALUE!**	**0**	**1.080.000**	**#VALUE!**	**0,11**		
1.6.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		120	paket	41.181.150				40	paket	13.681.375	0	paket	0	0	paket	0	-	-	0	paket	-			Umum dan Aparatur Kecamatan dan Sekretaris Kelurahan	
1.6.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		36	paket	363.664.000				12	paket	121.680.000	0	paket	0	0	paket	0	-	-	0	paket	-			Umum dan Aparatur Kecamatan	

1.6.3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		180	paket	107.945.500				12	paket	35.494.500	0	paket	0	0	paket	0	-	-	0	paket	-			Umum dan Aparatur Kecamatan dan Sekretaris Kelurahan	
1.6.4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		180	paket	216.400.000				12	paket	71.160.000	0	paket	0	0	paket	0	-	-	0	paket	-			Umum dan Aparatur Kecamatan dan Sekretaris Kelurahan	
1.6.5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		180	paket	30.799.700				12	paket	49.272.100	0	paket	0	0	paket	0	-	-	0	paket	-			Umum dan Aparatur Kecamatan dan Sekretaris Kelurahan	
1.6.6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		18	dokumen	20.400.000				84	Dokumen	6.600.000	21	Dokumen	1.080.000	21	dok	1.080.000	25	16	21	dok	1.080.000			Umum dan Aparatur Kecamatan	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		36	laporan	160.185.000				12	laporan	62.490.000	0	laporan	0	0	bulan	0	-	-	0	bulan	-			Umum dan Aparatur Kecamatan	
1.7		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase jumlah realisasi capaian kinerja sub kegiatan dibagi jumlah seluruh target capaian kinerja sub kegiatan dikali 100**	**285**	**%**	**1.337.633.000**	**-**	**-**	**-**	**95**	**%**	**456.300.700**	**0**	**%**	**0**	**0**	**%**	**0**	-	-		**%**	**-**		**-**		
1.7.6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan		180	unit	1.337.633.000				60	unit	456.300.700	0	unit	0	0	unit	0	-	-	0	unit	-			Umum dan Aparatur Kecamatan	
1.8		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase jumlah realisasi capaian kinerja sub kegiatan dibagi jumlah seluruh target capaian kinerja sub kegiatan dikali 100**	**285**	**%**	**3.670.367.690**	**-**	**-**	**-**	**95**	**%**	**1.214.139.225**	**24**	**%**	**242.998.273**	**24**	**%**	**242.998.273**	25	20		**%**	**242.998.273**	**-**	**6,62**		
1.8.2		Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		36	laporan	729.363.050				12	laporan	267.136.345	3	laporan	49.502.401	3	laporan	49.502.401	25	19	3	laporan	49.502.401			Umum dan Aparatur Kecamatan	
1.8.4		Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		36	laporan	2.941.004.640				12	laporan	947.002.880	3	laporan	193.495.872	3	laporan	193.495.872	25	20	3	laporan	193.495.872			Umum dan Aparatur Kecamatan	

1.9		**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase jumlah realisasi capaian kinerja sub kegiatan dibagi jumlah seluruh target capaian kinerja sub kegiatan dikali 100**	**285**	**%**	**866.347.000**	**-**	**-**	**-**	**95**	**%**	**297.192.000**	**3**	**%**	**8.500.800**	**3**	**%**	**8.500.800**	3	3	#VALUE!	%	**8.500.800**	**#VALUE!**	**0,98**		
1.9.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		24	unit	275.122.000				8	unit	98.887.000	2	unit	8.500.800	2	unit	8.500.800	25	9	2	unit	8.500.800			Umum dan Aparatur Kecamatan dan Sekretaris Kelurahan	
1.9.6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara		177	unit	127.960.000				59	unit	43.940.000	0	unit	-	0	unit	0	-	-	0	unit	-			Umum dan Aparatur Kecamatan dan Sekretaris Kelurahan	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		15	unit	463.265.000				5	unit	154.365.000	0	unit	-	0	bulan	0	-	-	0	bulan	-			Umum dan Aparatur Kecamatan	
	Sasaran PD																											
	Program Pembangunan																											
2	**Meningkatnya Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap layanan kepada masyarakat**		**Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap Layanan kepada Masyarakat**	**Tingkat Penyelenggaran Pelayanan Publik= Jumlah Fasilitas Yang Tersedia/Fasilitas sesuai dengan Standar**	**300**	**%**	**4.021.139.500**	**-**	**-**	**-**	**95**	**%**	**1.322.295.800**	**22**	**%**	**1.156.451.400**	**22**	**%**	**1156451400**	23	87	**#VALUE!**	**%**	**1.156.451.400**	**#VALUE!**	**28,76**		**SK Operasional RT RW masih dalam Proses**
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan**	**(Jumlah terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik : Jumlah terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang ditargetkan) x Persentase**	**300**	**%**	**4.021.139.500**	**-**	**-**	**-**	**95**	**%**	**1.322.295.800**	**22**	**%**	**1.156.451.400**	**22**	**%**	**1.156.451.400,00**	23	87	**#VALUE!**	**%**	**1.156.451.400**	**#VALUE!**	**28,76**		

				Target																									
2.1		**Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase jumlah realisasi capaian kinerja sub kegiatan dibagi jumlah seluruh target capaian kinerja sub kegiatan**	**300**	**%**	**586.550.000**	**-**	**-**	**-**	**95**	**%**	**189.382.800**	**32**	**%**	**94.451.400**	**32**	**%**	**94.451.400,00**	33	50	#VALUE!	%	**94.451.400**	**#VALUE!**	**16,10**		
2.1.1		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		24	laporan	586.550.000				8	laporan	189.382.800	1	laporan	94.451.400	1	laporan	94.451.400	13	50	1	laporan	94.451.400			Kasi Pemerintahan Kecamatan	
2.2		**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat daerah Yang Ada Dikecamatan**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik yang Dilimpahkan di Kecamatan**	**Persentase jumlah realisasi capaian kinerja sub kegiatan dibagi jumlah seluruh target capaian kinerja sub kegiatan**	**300**	**%**	**3.434.589.500**	**-**	**-**	**-**	**95**	**%**	**1.132.913.000**	**13**	**%**	**1.062.000.000**	**13**	**%**	**1.062.000.000,00**	13	94	#VALUE!	%	**1.062.000.000**	**#VALUE!**	**30,92**		
2.2.3		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		45	laporan	3.434.589.500				15	laporan	1.132.913.000	2	laporan	1.062.000.000	2	laporan	1.062.000.000	13	94	2	laporan	1.062.000.000			Kasi Pemerintahan Kecamatan	
3	**Meningkatnya pemberdayaan masyarakat**		**Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat**	**Tingkat Pemberdayaan = Jumlah Pemberdayaan Yang Dilaksanakan**	**300**	**%**	**5.260.976.560**	**-**	**-**	**-**	**100**	**%**	**2.409.798.900**	**24**	**%**	**137.900.000**	**24**	**%**	**137.900.000,00**	24	6	**#VALUE!**	**%**	**137.900.000**	**#VALUE!**	**2,62**		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Lembaga / Masyarakat yang Aktif**	**(Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif : Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Ada di Kecamatan) x Persentase Target**	**300**	**%**	**5.260.976.560**	**-**	**-**	**-**	**100**	**%**	**2.409.798.900**	**24**	**%**	**137.900.000**	**24**	**%**	**137.900.000**	24	6	**#VALUE!**	**%**	**137.900.000**	**#VALUE!**	**2,62**		**Karena adanya pergeseran anggaran dan angkas**

3.1		**Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan**	**Persentase jumlah realisasi capaian kinerja sub kegiatan dibagi jumlah seluruh target capaian kinerja sub kegiatan**	**300**	**%**	**1.120.963.300**	**-**	**-**	**-**	**100**	**%**	**377.570.300**	**0**	**%**	**-**	**0**	**%**	**0**	**-**	**-**	**#VALUE!**	**%**	**-**	**#VALUE!**	**-**		
3.1.3		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		99	laporan	1.120.963.300				33	laporan	377.570.300	0	laporan	-	0	laporan	0	-	-	-	laporan	-			Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	
3.2		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Melibatkan LPM dan Masyarakat Aktif**	**Persentase jumlah realisasi capaian kinerja sub kegiatan dibagi jumlah seluruh target capaian kinerja sub kegiatan**	**300**	**%**	**4.140.013.260**	**-**	**-**	**-**	**100**	**%**	**2.032.228.600**	**48**	**%**	**137.900.000**	**48**	**%**	**137.900.000**	48	7	#VALUE!	%	**137.900.000**	**#VALUE!**	**3,33**		
3.2.1		Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		99	lembaga kemasyarakatan	370.572.000				34	lembaga kemasyarakatan	140.952.000	34	lembaga kemasyarakatan	137.900.000	34	keg	137.900.000,00	100	98	34	keg	137.900.000			Kasi Pemerintahan Kelurahan	
3.2.2		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		48	unit	1.852.888.000				16	unit	600.000.000	0	unit	-	0	unit	0,00	-	-	0	unit	-			Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	
3.2.3		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		48	pokmas/ ormas	1.621.836.000				16	pokmas/ ormas	1.193.132.000	0	pokmas/ ormas	-	0	pokmas/ ormas	0,00	-	-	0	pokmas/ ormas	-			Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	
3.2.4		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		15	laporan	294.717.260				5	laporan	98.144.600	0	laporan	-	0	kegiatan	0,00	-	-	0	kegiatan	-			Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	
4	**Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban terhadap layanan masyarakat**		**Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan**	**Tingkat Koordinasi Trantib= Jumlah Masalah Trantib Yang Diselesaikan/ Ditangani**	**300**	**%**	**431.129.700**	**-**	**-**	**-**	**100**	**%**	**171.989.200**	**11**	**%**	**-**	**11**	**%**	**-**	11	-	**#VALUE!**	**%**	**-**	**#VALUE!**	**-**		**SPJ blm ada**

		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum**	**(Jumlah Laporan Trantibum Yang Ditindaklanjuti/ Diselesaikan dibagi Jumlah Laporan Pengaduan Trantibum) x Persentase Target**	**30 0**	**%**	**431.129. 700**	**-**	**-**	**-**	**10 0**	**%**	**171.989. 200**	**11**	**%**	**-**	**11**	**%**	**0**	11	-	**#VA LUE!**	**%**	**-**	**#VA LUE!**	**-**		
4. 2		**Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan**	**Persentase jumlah realisasi capaian kinerja sub kegiatan dibagi jumlah seluruh target capaian kinerja sub kegiatan**	**30 0**	**%**	**431.129. 700**	**-**	**-**	**-**	**10 0**	**%**	**171.989. 200**	**11**	**%**	**-**	**11**	**%**	**0**	11	-	**#VA LUE!**	**%**	**-**	**#VA LUE!**	**-**		
4. 2. 1		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas dan Fungsinya Dibidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		84	laporan	431.129. 700				28	laporan	171.989. 200	3	laporan		3	laporan	0	11	-	3	bulan	-			Kasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	
5	**Meningkatnya penyelenggaran urusan pemerintahan umum terhadap layanan masyarakat**		**Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum= Jumlah Layanan Masyarakat/Layanan sesuai Dengan Standar**	**30 0**	**%**	**752.021. 200**	**-**	**-**	**-**	**95**	**%**	**853.931. 200**	**5**	**%**	**7.500.0 00**	**5**	**%**	**7500000**	5	1	**#VA LUE!**	**%**	**7.500.0 00**	**#VA LUE!**	**1,00**		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Persentase Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**(Jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan : Jumlah koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Yang Ditargetkan) x Persentase Taget**	**30 0**	**%**	**752.021. 200**	**-**	**-**	**-**	**95**	**%**	**853.931. 200**	**5**	**%**	**7.500.0 00**	**4,7 3**	**%**	**7.500.000**	**4,9 8**	1	**#VA LUE!**	**%**	**7.500.0 00**	**#VA LUE!**	**1,00**		

5.1		**Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Persentase jumlah realisasi capaian kinerja sub kegiatan dibagi jumlah seluruh target capaian kinerja sub kegiatan**	**300**	**%**	**752.021.200**	**-**	**-**	**-**	**95**	**%**	**853.931.200**	**5**	**%**	**7.500.000**	**4,73**	**%**	**7.500.000**	**4,98**	1	**#VALUE!**	**%**	**7.500.000**	**#VALUE!**	**1,00**		
5.1.3		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		1662	orang	186.746.000				554	Orang	82.836.000		Orang		0	orang	0	-	-	0	orang	-			Kasi Pemerintahan Kecamatan	
5.1.4		Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional		5571	orang	565.275.200				1.857	Orang	771.095.200	120	Orang	7.500.000	120	orang	7.500.000	6	1	120	orang	7.500.000			Kasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	
		Peningkatan Gedung Kantor Lurah Bansir Laut			5	5	0				0	0				0	0	0	0			0	0	0	**0**	**#DIV/0!**		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI KINERJA					**297,0**	**%**	**36.303.401.000**	**-**	**-**	**-**	**97,0**	**%**	**14.970.881.287**	**14,2**	**%**	**3.286.155.087**	**14,23**	**%**	**3.286.155.087**	**14,61**	**21,95**	**#VALUE!**	**%**	**#VALUE!**	**#VALUE!**	**#VALUE!**		
RATA RATA CAPAIAN KINERJA (%) SUB KEGIATAN															**10,0%**	**(triwulan I)**												
PREDIKSI KINERJA															**SANGAT RENDAH**													
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA PER PROGRAM															**14,2%**	**(triwulan I)**												
CAPAIAN KINERJA AKHIR PERIODE RENJA 2023															**14,61**													
PREDIKAT KINERJA															**SANGAT RENDAH**													

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : - Perencanaan yang cukup baik dimana seluruh Kegiatan/Sub Kegiatan harus dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan; - dukungan dana dan SDM

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : - Adanya penggantian pembantu bendaha pengeluaran di 3 Kelurahan yang menunggu SK Mutasi dari BKPSDM dalam penetapan SK Bendahara dari BKD untuk pembuatan Specimen yang digunakan untuk Transaksi Keuangan

Keterangan: Predikat Kinerja

Interval Nilai Realisasi Kinerja		
91% ≤ 100%	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	≤ 50%	Sangat Rendah

disusun,
Pontianak, April 2025
Camat Pontianak Utara

INDRAWAN TAUHID, S.STP, M.Si
NIP. 19840903 200312 1 001

dievaluasi,
Pontianak, April 2025
Kepala Bappeda Kota Pontianak

dr. SIDIQ HANDANU WIDOYONO, M.Kes
NIP. 19660516 199603 1 003

BAB .III.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Kerja

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak tahun 2025, sebagai rangkaian Penyusunan Perubahan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak tahun 2025 dengan mempedomi Undang-Undang nomor 14 tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Adapun faktor – faktor yang menjadi pertimbangan dalam menyusun Rencana kerja adalah :

1. Program dan Kegiatan yang bersifat rutin se tiap tahun ;
2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilakukan ;
3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial budaya yang menjadi skala prioritas dimasing – masing Kelurahan se Kecamatan Pontianak Utara.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan/sub kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan/sub kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Rencana Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan.

Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu.

Arah kebijakan daerah bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang mendesak dan urgent, serta dalam rangka akselerasi pembangunan guna menciptakan dan mengembangkan instruktur perekonomian yang tangguh dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, maka arah kebijakan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak diselaraskan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2024-2026.

Adapun Perencanaan Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak terinci dalam Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2025 dilihat pada tabel III.1., sebagai berikut :

Tabel. III.1.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KECAMATAN PONTIANAK UTARA KOTA PONTIANAK

TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
									Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						KECAMATAN PONTIANAK UTARA					14.714.642.000,00	14.970.881.287,00	17.520.909.659,00							15.108.749.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					14.714.642.000,00	14.970.881.287,00	17.520.909.659,00							15.108.749.000,00	
	7	01				KECAMATAN					14.714.642.000,00	14.970.881.287,00	17.520.909.659,00							15.108.749.000,00	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		95 %	95 %	10.008.443.790,00	10.212.866.187,00	9.886.774.259,00							10.796.594.000,00	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 %	100 %	97.300.000,00	97.300.000,00	97.300.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kecamatan Pontianak Utara		84.778.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA

	7	0 1	0 1	2 . 0 1	0 0 0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		13 Dokumen	13 Dokumen	24.300.000,00	24.300.000,00	21.500.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			9.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	0 1	0 1	2 . 0 1	0 0 0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			9.600.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	0 1	0 1	2 . 0 1	0 0 0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			5.300.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA

	7	0 1	0 1	2 . 0 1	0 0 0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Laporan	12 Laporan	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			8.578.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	0 1	0 1	2 . 0 1	0 0 0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10 Laporan	10 Laporan	50.300.000,00	50.300.000,00	25.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			51.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	0 1	0 1	2 . 0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 %	100 %	7.464.707.000,00	7.688.326.287,00	7.688.326.287,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	ASN Kecamatan Pontianak Utara		8.138.062.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	0 1	0 1	2 . 0 2	0 0 0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		50 Orang/ bulan	50 Orang/ bulan	6.927.767.000,00	7.184.006.287,00	7.184.007.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			7.600.822.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.02	003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	12 Dokumen	526.640.000,00	497.120.000,00	455.530.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			526.640.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1 Laporan	3.100.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			3.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD															

							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		12 Laporan	12 Laporan	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			7.400.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-	100 %	100 %	3.000.000,00	0,00	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Pontianak Utara		4.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD															
							Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	0,00	0,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			4.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA

	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	100 %	100 %	110.280.000,00	99.230.000,00	99.230.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	ASN Kecamatan Pontianak Utara		113.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.05	002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		126 Paket	126 Paket	110.280.000,00	99.230.000,00	99.230.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			113.500.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-	100 %	100 %	298.200.000,00	360.377.975,00	360.377.975,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Pontianak Utara		390.400.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		11 Paket	11 Paket	6.100.000,00	6.097.775,00	6.097.775,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			6.300.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	121.000.000,00	121.680.000,00	121.680.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			124.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	25.100.000,00	25.098.300,00	25.098.300,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			26.100.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	30.800.000,00	30.012.000,00	30.012.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			32.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	30.800.000,00	30.799.700,00	30.799.700,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			31.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		6 Dokumen	6 Dokumen	6.800.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			7.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															

							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	2 Laporan	0,00	62.490.000,00	15.479.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			82.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	100 %	100 %	486.000.000,00	456.300.700,00	456.300.700,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Pontianak Utara		491.633.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		60 Unit	60 Unit	486.000.000,00	456.300.700,00	488.993.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			491.633.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	100 %	100 %	1.260.084.790,00	1.214.139.225,00	1.214.139.225,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Pontianak Utara		1.288.586.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA

	7	0 1	0 1	2 . 0 8	0 0 0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	261.412.342,00	267.136.345,00	272.324.246,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			280.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	0 1	0 1	2 . 0 8	0 0 0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	12 Laporan	998.672.448,00	947.002.880,00	803.116.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			1.008.586.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	0 1	0 1	2 . 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-	100 %	100 %	288.872.000,00	297.192.000,00	297.192.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-	Kecamatan Pontianak Utara		285.635.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	0 1	0 1	2 . 0 9	0 0 0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															

							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		4 Unit	4 Unit	78.000.000,00	85.180.000,00	85.180.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			80.275.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		33 Unit	33 Unit	22.000.000,00	23.140.000,00	23.140.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			22.600.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		5 Unit	5 Unit	154.365.000,00	154.365.000,00	55.495.938,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-			158.900.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelesaian Layanan Publik di Kecamatan dan Kelurahan		100 %	100 %	1.335.550.000,00	1.322.295.800,00	4.454.565.800,00							1.380.000.000,00	

	7	0 1	0 2	2 . 0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-	95 %	195.550.000,00	189.382.800,00	189.382.800,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kecamatan Pontianak Utara		200.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	0 1	0 2	2 . 0 1	0 0 0 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		8 Laporan	8 Laporan	195.550.000,00	189.382.800,00	150.422.800,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			200.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	0 1	0 2	2 . 0 2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Publik Yang Dilimpahkan di Kecamatan	-	95 %	95 %	1.140.000.000,00	1.132.913.000,00	1.132.913.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara		1.180.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	0 1	0 2	2 . 0 2	0 0 0 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		15 Laporan	15 Laporan	1.140.000.000,00	1.132.913.000,00	4.304.143.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			1.180.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA

3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif		100 %	100 %	2.405.859.510,00	2.409.798.900,00	2.397.182.200,00							1.936.090.000,00	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan	-	95 %	95 %	373.563.300,00	377.570.300,00	377.570.300,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara		384.400.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	03	2.01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		33 Laporan	33 Laporan	373.563.300,00	377.570.300,00	321.160.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			384.400.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	-	95 %	95 %	2.032.296.210,00	2.032.228.600,00	2.032.228.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara		1.551.690.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	03	2.02	004	Evaluasi Kelurahan															

							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		5 Laporan	5 Laporan	98.212.210,00	98.144.600,00	88.144.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			101.070.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum		100 %	100 %	146.654.700,00	171.989.200,00	102.400.200,00							152.475.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	-	95 %	95 %	146.654.700,00	171.989.200,00	171.989.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara		152.475.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia															
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		12 Laporan	12 Laporan	74.095.200,00	99.430.200,00	72.861.200,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			76.200.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA

5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100 %	100 %	818.134.000,00	853.931.200,00	679.987.200,00							843.590.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	95 %	95 %	818.134.000,00	853.931.200,00	853.931.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara		843.590.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		554 Orang	554 Orang	61.746.000,00	82.836.000,00	82.836.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			65.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		1583 Orang	1583 Orang	550.568.000,00	565.275.200,00	449.025.200,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			566.590.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA

						KELURAHAN SIANTAN HULU					14.714.642.000,00	14.970.881.287,00	17.520.909.659,00							15.108.749.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					14.714.642.000,00	14.970.881.287,00	17.520.909.659,00							15.108.749.000,00	
	7	01				KECAMATAN					14.714.642.000,00	14.970.881.287,00	17.520.909.659,00							15.108.749.000,00	
6	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		95 %	95 %	10.008.443.790,00	10.212.866.187,00	9.886.774.259,00							10.796.594.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-	100 %	100 %	298.200.000,00	360.377.975,00	360.377.975,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Hulu		390.400.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		9 Paket	9 Paket	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			2.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															

							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		17 Paket	17 Paket	2.600.000,00	2.596.200,00	2.596.200,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			2.750.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	10.300.000,00	10.248.000,00	10.248.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			10.600.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	4.600.000,00	4.656.000,00	4.656.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			4.750.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA

	7	0 1	0 1	2 . 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-	100 %	100 %	288.872.000,00	297.192.000,00	297.192.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Hulu		285.635.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	0 1	0 1	2 . 0 9	0 0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		2 Unit	2 Unit	5.927.000,00	5.927.000,00	5.927.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			0,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	0 1	0 1	2 . 0 9	0 0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		9 Unit	9 Unit	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			0,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
7	7	0 1	0 3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif		100 %	100 %	2.405.859.510,00	2.409.798.900,00	2.397.182.200,00							1.936.090.000,00	

	7	0 1	0 3	2 . 0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	-	95 %	95 %	2.032.296.210,00	2.032.228.600,00	2.032.228.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara		1.551.690.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	0 1	0 3	2 . 0 2	0 0 0 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	35.238.000,00	35.238.000,00	35.238.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			35.238.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	0 1	0 3	2 . 0 2	0 0 0 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		4 Unit	4 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			158.857.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	0 1	0 3	2 . 0 2	0 0 0 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	329.783.000,00	329.783.000,00	351.909.400,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-			141.676.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA

8	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum		100 %	100 %	146.654.700,00	171.989.200,00	102.400.200,00							152.475.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	-	95 %	95 %	146.654.700,00	171.989.200,00	171.989.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara		152.475.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia															
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		4 Laporan	4 Laporan	26.250.000,00	26.250.000,00	3.050.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			28.875.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
9	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100 %	100 %	818.134.000,00	853.931.200,00	679.987.200,00							843.590.000,00	

	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	95 %	95 %	818.134.000,00	853.931.200,00	853.931.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara		843.590.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	05	2.01	004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		65 Orang	65 Orang	51.455.000,00	51.455.000,00	37.205.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			53.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
						KELURAHAN SIANTAN TENGAH					14.714.642.000,00	14.970.881.287,00	17.520.909.659,00							15.108.749.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					14.714.642.000,00	14.970.881.287,00	17.520.909.659,00							15.108.749.000,00	
	7	01				KECAMATAN					14.714.642.000,00	14.970.881.287,00	17.520.909.659,00							15.108.749.000,00	
10	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		95 %	95 %	10.008.443.790,00	10.212.866.187,00	9.886.774.259,00							10.796.594.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-	100 %	100 %	298.200.000,00	360.377.975,00	360.377.975,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Tengah		390.400.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA

															.					
	7	0 1	0 1	2 . 0 6	0 0 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		13 Paket	13 Paket	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			2.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	0 1	0 1	2 . 0 6	0 0 0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			2.750.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	0 1	0 1	2 . 0 6	0 0 0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	10.300.000,00	10.300.000,00	8.245.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			10.600.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA

	7	0 1	0 1	2 . 0 6	0 0 0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	Kota Pontian ak, Pontian ak Utara, Siantan Tengah	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintah an yang Baik			4.750.000,00	KECAMATA N PONTIANA K UTARA
	7	0 1	0 1	2 . 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-	100 %	100 %	288.872.000,00	297.192.000,00	297.192.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintah an yang Baik	Kelurahan Siantan Tengah		285.635.000,00	KECAMATA N PONTIANA K UTARA
	7	0 1	0 1	2 . 0 9	0 0 0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	1 Unit	3.890.000,00	3.890.000,00	3.890.000,00	Kota Pontian ak, Pontian ak Utara, Siantan Tengah	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasa n korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintah an yang Baik			3.980.000,00	KECAMATA N PONTIANA K UTARA
	7	0 1	0 1	2 . 0 9	0 0 0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		15 Unit	15 Unit	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			5.300.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
11	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif		100 %	100 %	2.405.859.510,00	2.409.798.900,00	2.397.182.200,00							1.936.090.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	-	95 %	95 %	2.032.296.210,00	2.032.228.600,00	2.032.228.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara		1.551.690.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	35.238.000,00	35.238.000,00	35.238.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			35.238.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															

							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		10 Unit	10 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			150.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	275.783.000,00	275.783.000,00	285.148.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			275.783.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
12	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum		100 %	100 %	146.654.700,00	171.989.200,00	102.400.200,00							152.475.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	-	95 %	95 %	146.654.700,00	171.989.200,00	171.989.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara		152.475.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia															

							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		4 Laporan	4 Laporan	15.436.500,00	15.436.000,00	11.216.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			15.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
13	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100 %	100 %	818.134.000,00	853.931.200,00	679.987.200,00							843.590.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	95 %	95 %	818.134.000,00	853.931.200,00	853.931.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara		843.590.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		88 Orang	88 Orang	51.455.000,00	51.455.000,00	40.234.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			53.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA

						KELURAHAN SIANTAN HILIR					14.714.642.000,00	14.970.881.287,00	17.520.909.659,00							15.108.749.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					14.714.642.000,00	14.970.881.287,00	17.520.909.659,00							15.108.749.000,00	
	7	01				KECAMATAN					14.714.642.000,00	14.970.881.287,00	17.520.909.659,00							15.108.749.000,00	
14	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		95 %	95 %	10.008.443.790,00	10.212.866.187,00	9.886.774.259,00							10.796.594.000,00	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-	100 %	100 %	298.200.000,00	360.377.975,00	360.377.975,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Hilir		390.400.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		7 Paket	7 Paket	1.900.000,00	1.883.600,00	1.883.600,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			2.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															

							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		9 Paket	9 Paket	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			2.750.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	10.300.000,00	10.300.000,00	10.260.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			10.600.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	4.600.000,00	4.616.400,00	4.694.400,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			4.750.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA

	7	0 1	0 1	2 . 0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-	100 %	100 %	288.872.000,00	297.192.000,00	297.192.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan Siantan Hilir		285.635.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	0 1	0 1	2 . 0 9	0 0 0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	1 Unit	3.890.000,00	3.890.000,00	3.890.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			3.980.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	0 1	0 1	2 . 0 9	0 0 0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		8 Unit	8 Unit	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			5.300.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA

15	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif		100 %	100 %	2.405.859.510,00	2.409.798.900,00	2.397.182.200,00							1.936.090.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	-	95 %	95 %	2.032.296.210,00	2.032.228.600,00	2.032.228.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara		1.551.690.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	03	2.02	001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	35.238.000,00	35.238.000,00	35.238.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			35.238.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	03	2.02	002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		9 Unit	9 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			150.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	03	2.02	003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															

							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	308.783.000,00	308.783.000,00	322.893.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			141.676.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
16	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum		100 %	100 %	146.654.700,00	171.989.200,00	102.400.200,00							152.475.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	-	95 %	95 %	146.654.700,00	171.989.200,00	171.989.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara		152.475.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia															
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		4 Laporan	4 Laporan	15.436.500,00	15.436.500,00	4.836.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			15.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA

17	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100 %	100 %	818.134.000,00	853.931.200,00	679.987.200,00							843.590.000,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	95 %	95 %	818.134.000,00	853.931.200,00	853.931.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara		843.590.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		55 Orang	55 Orang	51.455.000,00	51.455.000,00	34.632.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Siantan Hilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			53.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
						KELURAHAN BATULAYANG					14.714.642.000,00	14.970.881.287,00	17.520.909.659,00							15.108.749.000,00	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					14.714.642.000,00	14.970.881.287,00	17.520.909.659,00							15.108.749.000,00	
	7	01				KECAMATAN					14.714.642.000,00	14.970.881.287,00	17.520.909.659,00							15.108.749.000,00	
18	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan		95 %	95 %	10.008.443.790,00	10.212.866.187,00	9.886.774.259,00							10.796.594.000,00	

	7	0 1	0 1	2 . 0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-	100 %	100 %	298.200.000,00	360.377.975,00	360.377.975,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan Batulayang		390.400.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	0 1	0 1	2 . 0 6	0 0 0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	4 Paket	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			2.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	0 1	0 1	2 . 0 6	0 0 0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		8 Paket	8 Paket	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			2.750.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	0 1	0 1	2 . 0 6	0 0 0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															

							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	10.300.000,00	10.300.000,00	7.800.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			10.600.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.06	005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	12 Paket	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			4.750.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	288.872.000,00	297.192.000,00	297.192.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Kelurahan Batulayang		285.635.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	01	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															

							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		8 Unit	8 Unit	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			5.300.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
19	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga/Masyarakat Yang Aktif		100 %	100 %	2.405.859.510,00	2.409.798.900,00	2.397.182.200,00							1.936.090.000,00	
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat aktif	-	95 %	95 %	2.032.296.210,00	2.032.228.600,00	2.032.228.600,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara		1.551.690.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	35.238.000,00	35.238.000,00	35.238.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			35.238.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan															

							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		8 Unit	8 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	136.100.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			150.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan															
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	278.783.000,00	278.783.000,00	300.875.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			141.676.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
20	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Gangguan Trantibum		100 %	100 %	146.654.700,00	171.989.200,00	102.400.200,00							152.475.000,00	
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	-	95 %	95 %	146.654.700,00	171.989.200,00	171.989.200,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara		152.475.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia															

							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		4 Laporan	4 Laporan	15.436.500,00	15.436.500,00	10.436.500,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			15.800.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
2 1	7	0 1	0 5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		100 %	100 %	818.134.000,00	853.931.200,00	679.987.200,00							843.590.000,00	
	7	0 1	0 5	2 . 0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-	95 %	95 %	818.134.000,00	853.931.200,00	853.931.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik	Masyarakat Kecamatan Pontianak Utara		843.590.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	7	0 1	0 5	2 . 0 1	0 0 0 4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional															
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		66 Orang	66 Orang	51.455.000,00	51.455.000,00	36.055.000,00	Kota Pontianak, Pontianak Utara, Batulayang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik			53.000.000,00	KECAMATAN PONTIANAK UTARA
	J U M L A H										**14.714.642.000,00**	**14.970.881.287,00**	**17.520.909.659,00**							**15.108.749.000,00**	

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2025 , mengakibatkan terjadinya perubahan anggaran terhadap beberapa kegiatan sebagai berikut :

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1). Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah

a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Refocusing sebesar Rp 25.300.000,00 kegiatan Database Kelurahan pada belanja sppd dan mamin kegiatan.

2). Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Efesiensi anggaran sebesar Rp 504.319.287,00 untuk penambahan PPh 21 pada Gaji dan Tunjangan / perhitungan dari BKD

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Efesiensi anggaran sebesar Rp 41.590.000,00 karena kelebihan pada honor penanggung jawab pengelola keuangan (kpa dan pptk), dan honor tenaga operator

3). Administrasi umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Refocusing anggaran sebesar Rp 4.595.000,00 pada kegiatan makanan dan minuman kelurahan Siantan Tengah, Siantan Hilir dan Batulayang.

b. Penyelenggaraann Rapat Koordinasi dam Konsultasi SKPD

Refocusing anggaran sebesar Rp 47.010.400,00 kegiatan sppd apeksi dan mtq tingkat propinsi

4). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Refocusing anggaran sebesar Rp 32.692.000,00 dengan target awal 60 unit menjadi 48 unit

5). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Bertambah sebesar Rp 3.936.714 untuk penambahan Biaya listrik di kecamatan dan penambahan kecepatan internet di Kelurahan Siantan Hulu

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Efesiensi anggaran sebesar Rp 143.886.880,00 karena gaji untuk tenaga IT beserta iuran bjs sudah tidak ada lagi

6). Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang Urusan pemerintahan daerah

a. Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya

Refocusing anggaran sebesar Rp 98.869.062 kegiatan pemeliharaan gedung kantor dengan target 5 unit menjadi 1 unit Kantor Lurah Siantan Hulu

2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

a. Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Refocusing anggaran sebesar Rp 38.960.000,00 kegiatan fasilitasi organisasi perangkat daerah dalam wilayah kecamatan pada belanja sppd dan makanan dan minuman kegiatan

2) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak DilaksanakanOleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada Di Kecamatan

a. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Bertambah anggaran sebesar Rp 3.171.230.000,00 pada belanja :

- ✓ Perioritas bantuan operasional RT/RW
- ✓ Refocusing sppd pendamping operasional RT

3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

a Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

Refocusing sebesar Rp 56.410.100,00 pada belanja :

- ✓ Sppd kegiatan gotong royong, makanan dan minuman kegiatan, uang transportasi dan honor narsum pada kegiatan sosilisasi stunting di Kecamatan Pontianak Utara.

2) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Efesiensi anggaran sebesar Rp 13.900.000,00 adanya pemindahan anggaran DAU ke Pemberdayaan Masyarakat (DAU) di Kelurahan Batulayang

b. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Bertambah anggaran sebesar Rp 40.260.000,00 di Kelurahan Siantan Hulu, Siantan Tengah, Siantan Hilir dan Batulayang pada belanja :

- ✓ Operasional Posyandu
- ✓ Sound sistem , alat hadrah dan pemandian jenazah

3) Kegiatan Evaluasi kelurahan

Refocusing anggaran sebesar Rp 10.000.000,00 kegiatan Lomba Kelurahan, PKK KB Kes, Posyandu, LBS dan PHBS pada belanja SPPD.

4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1). Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah

a. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Refocusing anggaran sebesar Rp 69.588.500,00 kegiatan

- ✓ Kecamatan Pontianak Utara Kegiatan sosilisasi Narkoba
- ✓ Kelurahan Siantan Hulu Kegiatan Sosilisasi PKL
- ✓ Kelurahan Siantan Tengah , Siantan Hilir dan Batulayang Belanja SPPD

5 Program Peyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

a. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama,Ras dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan lokal, regional dan Nasional

Refocusing anggaran sebesar Rp 173.944.000,00 pada kegiatan :

- ✓ Arakan Pengantin dalam rangka HUT Kota Pontianak untuk Kecamatan Pontianak Utara
- ✓ Lomba Seprahan dalam rangka HUT Kota Pontianak untuk Kelurahan Siantan Hulu, Siantan Tengah, Siantan Hilir dan Batulayang.

2. Pendanaan

Pagu Indikatif atau pendanaan Kecamatan Pontianak Utara tahun 2025 Berdasarakan Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor 000.7.2.4/14/BAPPEDA/TAHUN 2024 tentang Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebesar Rp 15.372.697.000, terjadinya Perubahan Pagu Indikatif atau pendanaan Kecamatan Pontianak Utara tahun 2025 berdasarakan Surat Wali Kota Pontianak Nomor B/000.7.7.24/ /2024 tentang Penyusunan Kebijakan Keuangan pada Rancangan Akhir RKPD Kota Pontianak Tahun 2025 adalah sebesar Rp 14.714.642.000, setelah itu berdasarakan Surat Wali Kota Pontianak Nomor B/000.7.7.24/ /2024 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebesar Rp 17.520.909.659,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU ABPD 2025	PAGU APBD 2025 Refocusing (pergeseran 2)	Perubahan RKPD 2025
	Kecamatan Pontianak Utara	**14.970.881.287,00**	**17.439.908.946,00**	**17.520.909.659,00**
	Belanja Pegawai (Gaji-TPP-Insentif)	**7.184.006.287,00**	**7.184.006.287,00**	**7.184.007.000,00**
-	Gaji + Tunjangan PNS	3.651.000.000,00	3.651.000.000,00	3.907.240.000,00
	penambahan PPH 21 gaji	256.239.287,00	256.239.287,00	
-	Gaji + Tunjangan PPPK	111.585.000,00	111.585.000,00	111.585.000,00
-	TPP PNS	3.099.918.000,00	3.099.918.000,00	3.099.918.000,00
-	TPP PPPK	65.264.000,00	65.264.000,00	65.264.000,00
	Belanja Earmarked	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**
-	DAU Pendanaan Kelurahan - Untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat Di kelurahan (@ Rp. 200 juta / kelurahan)	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00
	Belanja Prioritas Lainnya	**6.986.875.000,00**	**9.455.902.659,00**	**9.536.902.659,00**
-	Bantuan Operasional RT dan RW - ***(pada sub kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan)***	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00
-	Tambahan untuk percepatan penurunan stunting (@Rp. 100 juta per kelurahan) - ***pemberian makanan tambahan***	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
-	Bantuan Operasional Posyandu (Rp.3 juta per Posyandu/tahun) - pada ***sub kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan***	258.000.000,00	258.000.000,00	258.000.000,00
-	Tambahan untuk keniakan Gaji Non ASN	85.800.000,00	85.800.000,00	85.800.000,00
-	Pelaksanaan Forum OPD untuk Penyusunan Renstra	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
-	***Pagu Dasar***	***5.178.075.000,00***	***5.178.075.000,00***	***5.178.075.000,00***
-	***refocusing pagu 2025***		***-716.972.341,00***	***-716.972.341,00***
-	***redistribusi pagu 2025 insentif operasional rt rw***		**3.186.000.000,00**	**3.186.000.000,00**
-	***Perubahan RKPD 2025***			***81.000.000,00***
	Penambahan Bantuan Operasional Posyandu (Rp.3 juta per Posyandu/tahun)			*81.000.000,00*

BAB .IV.
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak tahun 2025 merupakan Rencana Kerja tahunan berdasarkan pada RPD Kota Pontianak dan Rencana Strategis (Renstra) yang disesuaikan dengan kemampuan dukungan sumber daya dan dukungan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pontianak, dilaksanakan dengan baik untuk mengemban visi dan misi yang ditetapkan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak Tahun 2025 disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja perencanaan dan penganggaran yang dibuat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Pontianak.

Pontianak, 27 Mei 2025
Camat Pontianak Utara

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK KECAMATAN PONTIANAK UTARA

Taufiqurrahman Tauhid,S.STP,M.Si
Pembina
NIP.19840903 200312 1 001

RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK

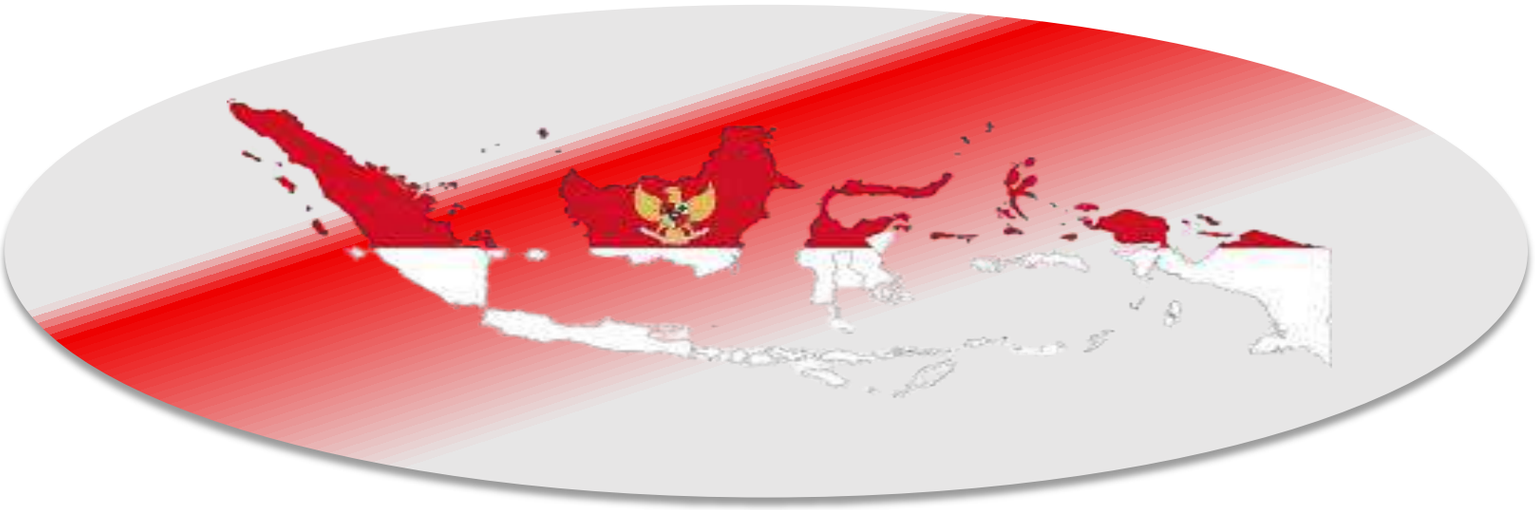

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak telah menyelesaikan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja- Kesbangpol) Tahun 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Sebagaimana Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam merencanakan, merumuskan, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengevaluasikan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Atas dasar ini Perubahan RENJA-KESBANGPOL Tahun 2025 disusun dengan memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berikut, dengan pendanaan bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 serta Rancangan Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini. Perlu disadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunannya, oleh karena itu masukan serta saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna kesempurnaan penyusunannya di masa mendatang. Terima kasih.

DAFTAR ISI

Uraian		Halaman
KATA PENGANTAR…….…….		i
DAFTAR ISI …….……..		ii
DAFTAR TABEL…….……		iii
BAB I	PENDAHULUAN ……..	1
	1.1. Latar Belakang……..	1
	1.2. Landasan Hukum…….....	2
	1.3. Maksud dan Tujuan…….....	5
	1.4. Sistematika Penulisan……..	6
BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 PERANGKAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK.....	7
	2.1. Evaluasi Rencana Kerja Sampai Triwulan II Tahun 2025.....	7
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK	51
BAB IV	PENUTUP	53

DAFTAR TABEL

Uraian		Halaman
Tabel 2.1.	Evaluasi Rencana Kerja Sampai Triwulan II Tahun 2025……	II-10
Tabel 3.1.	Rekapitulasi Rka Semula – Menjadi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD - RI) ……	III-2
Tabel. 3.2	Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025.....	III-11
Tabel 3.3.	Rincian Perubahan Pagu Anggaran Badan Kesbangpol Kota Pontianak….....	III-12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi perangkat daerah, dokumen Perubahan Renja- PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Dokumen Perubahan Renja-PD disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja-PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Perangkat Daerah dan selanjutnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Pontianak.

Dokumen Perubahan Renja Kesbangpol Kota Pontianak tahun 2025 merupakan suatu dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Pontianak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025. Oleh karena itu, dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui tahapan perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dokumen Perubahan Renja-PD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Perubahan Renja-PD sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Perubahan Renja-PD sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Perubahan Rencana Kerja Kesbangpol Kota Pontianak Tahun 2025 memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan harus mengarah pada pencapaian target dalam Indikator Kinerja Utama Kesbangpol Kota Pontianak;
2. Program dan Kegiatan harus mengarah pada pencapaian target dalam Indikator Kinerja Renca Strategis Kesbangpol Kota Pontianak;
3. Program dan Kegiatan harus mendukung Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2023 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
22. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
25. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pontianak Kota Pontianak Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor.)
26. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 10).

27. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 139).
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
30. Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor 2705 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025.
31. Surat Edaran Wali Kota Pontianak Nomor : B/000.7.2.4/ 11 / BAPPERIDA/2025 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2025 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan menindaklanjuti Surat Edaran Wali Kota Pontianak tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Sedangkan tujuannya adalah menyelaraskan indikator dan target dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD Tahun Anggaran 2025 dengan dokumen renja PD Tahun 2025 serta renstra PD dengan mempertimbangkan dinamika dan isu yang berkembang dalam kurun waktu Januari-Juni 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Pagu anggaran tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak adalah semula sebesar Rp. 9.404.059.949,00 menjadi (refocusing) Rp. 9.009.306.409,00. Realisasi anggaran sampai Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2.369.546.653,00 Atau % capaian kinerja sebesar 26.30 %. Realisasi anggaran hingga Triwulan II tahun 2025 (Januari s/d 10 Juni 2025) terbilang sangat rendah karena ada beberapa yang dilakukan pergeseran dan refocusing yang terjadi sehingga anggaran yang harusnya bisa di realisasikan menjadi terlambat. Salah satu penyebabnya adalah

a. melakukan efisiensi/penghematan pada :

1) Belanja makan minum minimal sebesar 20 % (Dua Puluh Persen)
2) Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor minimal sebesar 20 % (Dua Puluh Persen)
3) Belanja perjalanan dinas minimal sebesar 50 % (Lima Puluh Persen)
4) Belanja pemeliharaan minimal sebesar 30 % (Tiga Puluh Persen)
5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi minimal sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen)

b. melakukan efisiensi/penghematan pemberian hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga sesuai dengan ketentuan Pasal 13 pada Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak dan terjadinya pergeseran dengan menyampaikan matrik kode rekening ke Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak pada program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan pada sub kegiatan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah yaitu belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebesar Rp. 400.000.000,00 dimana untuk TNI sebesar Rp. 100.000.000,00 dan untuk POLRI sebesar Rp. 300.000.000,00 serta melakukan pergeseran belanja hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sehingga anggaran Sebagian bisa di realisasikan di anggaran perubahan 2025.

Adapun rincian realisasi anggaran dan capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2025 tertuang pada tabel 2.1.

TABEL 2.1

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025 (s/d 10 JUNI 2025)

No	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kegiatan (Output) / Indikator Sub Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026 (Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada T						
														I			II			
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K
		Urusan Pemerintahan Umum																		
		Kesatuan Bangsa dan Politik					49.890.036.000,00			41.457.114.665,00			9.009.306.409,00			1.488.979.253,00			763.117.400,00	
	Meningkatkan Kerukunan Masyarakat Kota Pontianak		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)																	
1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Presntase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Pada Perangkat Daerah	90	%	9.138.983.000	95	%	3.448.583.365,00	95	%	3.187.753.585,00	25	%	904.854.253,00	25	%	688.117.400,00	
1.1.		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dibagi jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	100	%	30.000.000	100	%	12.590.000,00	100	%	24.617.660,00	0	%	-	0	%	17.270.000,00	
1.1.1		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24	Dok	15.000.000,00	8	Dok	6.295.000,00	8	Dok	20.000.000,00	0	Dok	-			17.270.000,00	
1.1.2		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	21	Lap	15.000.000,00	7	Lap	6.295.000,00	7	Lap	4.617.660,00	0	Lap	-				

No	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kegiatan (Output) / Indikator Sub Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026 (Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada T						
														I			II			
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K
1.2.		**Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persetanse Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan adminstrasi keuangan, Rata-rata capaian pemenuhan admisntrasi keuangan perangkat daerah**	**100**	**%**	**7.198.481.000,00**	**100**	**%**	**2.333.082.057,00**	**100**	**%**	**2.588.719.949,00**	**27**	**%**	**733.904.041,00**	**27**	**%**	**561.715.447,00**	
1.2.1		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66	Orang	6.298.481.000,00	22	orang	2.112.082.057,00	22	orang	2.384.119.949,00	14	Orang	682.754.041,00			527.615.447,00	
1.2.2		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen penatausahaan pengujian/verifikasi SKPD Keuangan	18	Dok	900.000.000,00	6	Dok	221.000.000,00	6	Dok	204.600.000,00	1	Dok	51.150.000,00			34.100.000,00	
1.3		**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persetanse Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**105.000.000,00**	**95**	**%**	**37.000.000,00**	**95**	**%**	**20.000.000,00**	**0**	**%**	**-**	**0**	**%**	**-**	
1.3.1		Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH), Jumlah Pakaian Batik, dan Jumlah pakaian Kerja Non ASN	96	Stel	105.000.000,00	32	stel	37.000.000,00	32	Unit	20.000.000,00	0	Unit	-				
1.3.2		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimtek yang diikuti		-	-	0,00	0	orang	-	0	orang	-	0	Orang	-				
1.4		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persetanse Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah jenis kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah, Rata-rata capaian Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**652.502.000,00**	**95**	**%**	**294.099.593,00**	**95**	**%**	**161.537.096,00**	**20**		**80.464.805,00**	**20**		**37.059.171,00**	
1.4.1		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Buah/Bulan kompoenen instalasi listrik kantor yang di sediakan	3	paket	9.002.000,00	1	Paket	2.667.100,00	1	paket	3.764.400,00	0	Paket	1.476.600,00			-	
1.4.2		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Buah/Bulan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	paket	90.000.000,00	1	Paket	41.471.500,00	1	paket	50.319.200,00	0	Paket	21.304.900,00			14.736.800,00	

No	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kegiatan (Output) / Indikator Sub Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026 (Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada T						
														I			II			
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K
1.4.3		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah kali bahan logistik kantor yang disediakan	3	paket	150.000.000,00	1	Paket	46.750.000,00	1	paket	24.522.000,00	0	Paket	3.150.000,00			6.100.000,00	
1.4.4		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Lembar Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	paket	90.000.000,00	1	Paket	57.068.200,00	1	paket	36.521.720,00	0	Paket	12.469.000,00			9.457.500,00	
1.4.5		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Jenis Koran Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	dok	13.500.000,00	12	Dok	2.980.000,00	12	Dok	4.000.000,00	3	Dok	440.000,00			440.000,00	
1.4.6		Sub Kegiatan Penyelenggaraaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21	Lap	300.000.000,00	7	Lap	143.162.793,00	7	Lap	42.409.776,00	2	Lap	35.624.305,00			6.324.871,00	
1.5		**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinrah Daerah**	**Presentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Rata-rata capaian Pemenuhan Pengadaan Barang**	**100**	**%**	**580.000.000,00**	**95**	**%**	**425.398.400,00**	**95**	**%**	**11.000.000,00**	**0**	**%**	**10.800.000,00**	**0**	**%**	**-**	
1.5.1		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Bulan Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor yang di Sediakan	6	Unit	180.000.000,00	2	Unit	128.598.400,00	3	Unit	11.000.000,00	0	Unit	10.800.000,00			-	
1.5.2		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan dinas operasional kantor yang disediakan	1	Unit	400.000.000,00	1	Unit	296.800.000,00	0	Unit	-	0	Unit	-			-	
1.6		**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Bulan Kegiatan Jasa Penunjang, Rata-rata Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**510.000.000,00**	**95**	**%**	**308.952.815,00**	**95**	**%**	**324.758.480,00**	**21**	**%**	**68.728.791,00**	**21**	**%**	**63.395.982,00**	
1.6.1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Lap	105.000.000,00	4	Lap	61.140.767,00	12	Lap	65.000.000,00	3	Lap	8.444.583,00			3.072.222,00	
1.6.2		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lap	405.000.000,00	4	Lap	247.812.048,00	4	Lap	259.758.480,00	1	Lap	60.284.208,00			60.323.760,00	

No	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kegiatan (Output) / Indikator Sub Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026 (Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada T						
														I			II			
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10			
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K
1.7		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urursan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan barang milik daerah, Rata-rata capaian Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	63.000.000,00	95	%	37.460.500,00	95	%	57.120.400,00	18	%	10.956.616,00	18	%	8.676.800,00	
1.7.1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan yang dipeliharan dan dibayarkan pajak dan perizinanya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	18.000.000,00	2	Unit	24.730.500,00	3	Unit	37.917.400,00	1	Unit	8.036.616,00			8.676.800,00	
1.7.2		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	Unit	45.000.000,00	3	Unit	12.730.000,00	3	Unit	19.203.000,00	1	Unit	2.920.000,00			-	
	1. Meningkatnya Toleransi Kelompok Masyarakat Kota Pontianak		Indeks Toleransi																	
2		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Tingkat Pemahaman Nilai Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, dan Rata-rata Pemenuhan Fasiltiasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	90	%	1.604.786.000	90	%	852.902.300,00	90	%	948.625.224,00	1	%	14.200.000,00			-	
2.1		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidangn Indeologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		1	Dok	1.604.786.000,00	90	%	852.902.300,00	90	%	948.625.224,00	1	%	14.200.000,00	1	%	52.300.000,00	

No	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kegiatan (Output) / Indikator Sub Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026 (Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada					
														I			II		
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10		
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp
2.1.1		Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2100	Orang	957.000.000,00	150	orang	90.315.000,00	500	orang	138.721.000,00	0	Orang	-			-
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	96	Orang	1.600.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2.1.2		Sub Kegiatan Pembentukan Paskibra	Terbentuknya Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	Jumlah Paskibraka	32	Orang	600.000.000,00	32	orang	710.512.300,00	32	orang	777.127.224,00	0	Orang	14.200.000,00			52.300.000,00
2.1.3		Sub Kegiatan Pembinaan Lanjutan Kepada Purnapaskibraka	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	aporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1	dok	47.786.000,00	1	Dok	52.075.000,00	1	Dok	32.777.000,00	0	Orang	-			-
3		**Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**	**Persentase Pemberdayaan Ormas**	**Rata-rata Capaian Efektifitas Penguatan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**85**	**%**	**35.402.267.000**	**90**	**%**	**36.030.479.000**	**90**	**%**	**3.702.468.874,00**	**1**	**%**	**23.025.000,00**			**29.500.000,00**
3.1		***Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta***	***Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pematauan situasi politik di Daerah***	**Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,**	1	Dok	35.402.267.000,00	**90**	**%**	***36.030.479.000,00***	90	%	***3.702.468.874,00***	**1**	%	***23.025.000,00***			***29.500.000,00***

No	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kegiatan (Output) / Indikator Sub Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026 (Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada					
														I			II		
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10		
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp
3.1.1		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pematauan situasi politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12	parpol	9.943.770.000	12	Parpol	3.364.852.000,00	36	orang	3.582.843.500,00	0	%	-			-
3.1.2		Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pematauan situasi politik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1066	Orang	25.100.000.000	500	orang	32.626.827.000,00	50	orang	119.619.374,00	14	Orang	23.025.000,00			29.500.000,00
3.1.3		Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pematauan situasi politik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3	Lap	358.497.000	1	Lap	38.800.000,00	1	Lap	-	0	Lap	-			
4		**Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Pemberdayaan Ormas**	**Rata-rata Capaian Efektifitas Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan**	85	%	**1.260.000.000,00**	85	%	**482.050.000,00**	85	%	**581.790.726,00**	**59**	%	**400.000.000,00**			-

No	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kegiatan (Output) / Indikator Sub Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026 (Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada					
														I			II		
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10		
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp
4.1		*Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*	*Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*	Jumlah rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1	Dok	1.260.000.000,00	85	%	482.050.000,00	85	%	581.790.726,00	59	%	400.000.000,00			-
4.1.1		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendiaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, evaluasi dan Mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Dearah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3	Dokumen	1.200.000.000,00	1	Dok	469.225.000,00	1	Dok	581.790.726,00	0	Dok	400.000.000,00			
4.1.2		Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3	Lap	60.000.000,00	1	Lap	12.825.000,00	1	Lap	-	0	Lap	-			
	2. Meningkatkan Harmonisasi Masyarakat Kota Pontianak		Indeks Kesetaraan																

No	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kegiatan (Output) / Indikator Sub Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026 (Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada					
														I			II		
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10		
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp
5		**Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial, dan Budaya**	**Presentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Rata-rata Capaian Efektifitas Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**	**90**	**%**	**300.000.000,00**	**90**	**%**	**132.275.000,00**	**90**	**%**	**87.975.000,00**	**0**	**%**	**-**			**-**
5.1		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	**Jumlah rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Rata-rata Pemenuhan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**90**	**%**	300.000.000,00	**90**	**%**	***132.275.000,00***	90	%	***87.975.000,00***	**0**	%	-			-
5.1.1		Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika,Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300	orang	300.000.000,00	50	orang	132.275.000,00	500	orang	87.975.000,00	0	Orang	-			-
6		**Program Peningkatan Kewaspdaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase Fasilitas Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Nasional**	**Rata-rata Capaian Efektifitas Penyelenggaraan Kewaspadaan Nasional di Daerah**	**100**	**%**	**2.184.000.000,00**	**100**	**%**	**510.825.000,00**	**100**	**%**	**500.693.000,00**	**27**	**%**	**146.900.000,00**			**45.500.000,00**

No	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Indikator Kegiatan (Output) / Indikator Sub Kegiatan (Output)	Definisi Operasional	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024-2026 (Renstra)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra s/d Renja Tahun Lalu (2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2025)			Realisasi Kinerja Pada					
														I			II		
1	2	3	4	5	6			7			8			9			10		
								K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp
6.1		*Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik Sosial*	*Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*	**Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, Rata-rata Pemenuhan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	100	%	2.184.000.000,00	100	%	*510.825.000,00*	100	%	500.693.000,00	27	%	146.900.000,00			*45.500.000,00*
6.1.1		Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini,kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing,Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	450	Orang	1.641.000.000,00	150	orang	470.500.000,00	150	orang	247.693.000,00	25	Orang	55.500.000,00			45.500.000,00
6.1.2		Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, kerjasama intelejen, Pemantauan orang asing, Tenaga Kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3	Lap	543.000.000,00	1	Lap	40.325.000,00	1	Lap	3.800.000,00	0	Lap	3.800.000,00			-
6.1.3		Sub Kegiatan Pelaksnaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1	Dok	249.200.000,00	-	-	-	1	Dok	249.200.000,00	0	Dok	87.600.000,00			65.150.000,00
RATA RATA CAPAIAN KINERJA (%)							**49.890.036.000,00**			**41.457.114.665,00**			**9.009.306.409,00**			**1.488.979.253,00**			**763.117.400,00**

No	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi CapaianKinerja dan Anggaran yang Dievaluasi (2025)			persentase capaian kinerja		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2025			Tingkat Capian Kinerja dan realisasi Anggaran Renstra s/d Tahn 2025 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jwab	Keterangan
			II			III			IV															
1	2	3	10			11			12			13 = (9+10+11+12)			14=13/8*100		15=7+13			16= 15/6*100			17	18
			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K		Rp	K		Rp		
6.1.3		Sub Kegiatan Pelaksnaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			65.150.000,00							0	lap	152.750.000,00	-	61,30	0	Lap	152.750.000,00	0	Lap	0,61	Kabid Kesbang	
RATA RATA					763.117.400,00			-			-			2.369.546.653,00		26,30	43.826.661.318,00					16,85		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)												8,33		2.369.546.653,00		#DIV/0!	8		43.826.661.318,00					
Predikat Kinerja												Sangat Rendah					Sangat Rendah		Sangat Tinggi					

	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong	
1	Kurangnya kompetensi dan pemahaman akan tupoksi dari para aparatur; I Mediasi, komunikasi, sosialisasi, fasilitasi dan koordinasi sampai dengan penetapan arah kebijakan lintas sektor	Dukungan peraturan perundang-undangan maupun instansi pemerintah terkait lainnya dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi badan
2	- Terbatasnya Sumber Daya Manusia	Anggaran yang memadai/cukup
	prasarana kantor masih kurang	
	- Masih terbatasnya koordinasi antar OPD yang Vertikal	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Rencana Kerja

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak disusun dengan menyesuaikan perubahan pagu anggaran. Efisiensi dan rasionalisasi pagu anggaran dilakukan pada tahun 2025. Oleh karena itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak melakukan beberapa penyesuaian dalam target kinerja pada tahun 2025.

Walaupun demikian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak tetap melaksanakan kegiatan- kegiatan yang menjadi prioritas seperti sosialisasi pemilih pemula, sarasehan dengan tema Kolaborasi dan Sinergi dalam rangka mendukung kinerja pemerintah Kota Pontianak untuk maju, sejahtera, berwawasan lingkungan yang humanis, sosialisasi wawasan kebangsaan yaitu Pembentukan Paskibraka dan Duta Pancasila, dan Dialog Forum Kerukunan Umat Beragama serta Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Kegiatan yang merupakan core Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak yaitu terkait urusan Pemerintahan Umum.

3.2. Pendanaan

Sesuai dengan Surat Edaran Wali Kota Nomor : B/000.7.2.4/ / BAPPERIDA/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 anggaran semula Rp. 9.404.059.949,00 menjadi (Refocusing) Rp. 9.009.306.409,00 dan menjadi (Perubahan) Rp. 9.509.306.460,00

Perubahan pagu anggaran terjadi pada hampir semua program kecuali bantuan partai politik dan bantuan sosial organisasi kemasyarakatan. Selain itu, Kesbangpol Kota Pontianak juga melakukan efisiensi dan rasionalisasi pada kegiatan di program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Adapun perubahan pagu anggaran pada masing-masing program tertuang pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1

REKAPITULASI RKA SEMULA – MENJADI

SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD-RI)

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PONTIANAK

KODE REKENING	SUB/RINCIAN KEGIATAN	NILAI PAGU TERINPUT			KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI (Refocusing)	MENJADI (Perubahan)	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9.404.059.949,00	9.009.306.409,00	9.509.306.460,00	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.003.128.000,00	948.625.224,00	948.625.224,00	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.003.128.000,00	948.625.224,00	948.625.224,00	
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	170.301.000,00	138.721.000,00	138.721.000,00	Pengurangan anggaran terjadinya efisiensi belanja makanan dan minuman rapat, honorarium narasumber dan perjalanan dinas dalam kota
	[#] Belanja Barang				
	[-] Belanja Barang Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.957.000,00	2.957.000,00	2.957.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.044.000,000	1.044.000,00	1.044.000,00	
	[-] Makanan dan Minuman Dialog FPK				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.400.000,00	13.420.000,00	13.420.000,00	Pengurangan anggaran terjadinya efisiensi belanja makanan dan minuman rapat namun tidak mengurangi jumlah peserta
	[-] Makanan dan Minuman Fasilitasi Rapat Pengurus FPK				
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.150.000,00	9.150.000,00	9.150.000,00	
	[-] Honorarium Narasumber Dialog FPK				
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
	[-] Honorarium Panitia Kegiatan Dialog FPK				
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.100.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	
	[-] Honorarium Narasumber Dialog FPK				
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.200.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	
	[#] Belanja Jasa				
	[-] Transport Peserta Dialog FPK				
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	Efisiensi belanja perjalanan dinas
	[#] Belanja Barang				
	[-] Buku Pendidikan Pancasila				
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	79.950.000,00	79.950.000,00	79.950.000,00	

8.01.02.2.01.0008	**Pembentukan Paskibraka**	**800.050.000,00**	**777.127.224,00**	**777.127.224,00**	Pengurangan anggaran terjadinya efisiensi belanja pakaian paskibraka dari 2 stel menjadi 1 stel
	[#] Belanja Barang				
	[-] Belanja Barang Pakai Habis				
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis				
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	241.000,00	241.000,00	241.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	8.011.224,00	8.011.224,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.623.000,00	1.623.000,00	1.623.000,00	
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	39.280.000,00	39.280.000,00	39.280.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	132.126.000,00	141.032.000,00	141.032.000,00	Penambahan belanja makanan dan minuman
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	63.680.000,00	31.840.000,00	31.840.000,00	Pakaian paskibraka dari 2 stel menjadi 1 stel
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	62.800.000,00	62.800.000,00	62.800.000,00	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	122.500.000,00	122.500.000,00	122.500.000,00	
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	16.960.000,00	16.960.000,00	16.960.000,00	
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	193.000.000,00	193.000.000,00	193.000.000,00	
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	23.240.000,00	23.240.000,00	23.240.000,00	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	
8.01.02.2.01.0009	**Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila**	**32.777.000,00**	**32.777.000,00**	**32.777.000,00**	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.607.000,00	2.607.000,00	2.607.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.710.000,00	6.710.000,00	6.710.000,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.660.000,00	3.660.000,00	3.660.000,00	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	

8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	3.722.468.874,00	3.702.468.874,00	3.705.578.874,00	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	3.722.468.874,00	3.702.468.874,00	3.705.578.874,00	
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.582.849.500,00	3.582.849.500,00	3.574.009.500,00	Pengurangan anggaran terjadinya efisiensi belanja makanan dan minuman rapat
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.320.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.389.500,00	1.389.500,00	1.389.500,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.500.000,00	12.500.000,00	3.660.000,00	Pengurangan anggaran terjadinya efisiensi belanja makanan dan minuman rapat namun tidak mengurangi jumlah peserta
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.565.640.000,000	3.565.640.000,000	3.565.640.000,000	
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	119.619.374,00	119.619.374,00	131.569.374,00	Penambahan anggaran belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor dan honorarium tim pelaksana kegiatan serta efisiensi belanja makanan dan minuman rapat
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.139.374,00	5.139.374,00	7.389.374,00	Penambahan anggaran untuk ATK kegiatan Penandatanganan BA Hibah Parpol
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	48.080.000,00	48.080.000,00	45.580.000,00	Pengurangan anggaran terjadinya efisiensi belanja makanan dan minuman rapat namun tidak mengurangi jumlah peserta
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.900.000,00	11.900.000,00	11.900.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	34.600.000,00	34.600.000,00	46.800.000,00	Penambahan pembayaran honor dari 4 bln menjadi 6 bln
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	9.900.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	

5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20.000.000,00	-	-	Pengurangan anggaran terjadinya efisiensi belanja perjalanan dinas dalam kota
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.000.000,00	-	-	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	672.580.726,00	581.790.726,00	1.078.680.777,00	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	672.580.726,00	581.790.726,00	1.078.680.777,00	
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	652.580.726,00	581.790.726,00	1.078.680.777,00	Penambahan anggaran terjadi pada Belanja Hibah uang kepada TNI dan Polri sebesar Rp. 400.000.000,00 penambahan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor, makanan dan minuman rapat dan honorarium narasumber dan tim pelaksana kegiatan
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.111.226,00	10.111.226,00	13.947.877,00	Penambahan anggaran untuk ATK kegiatan konsolidasi dan evaluasi Ormas penerima hibah
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.389.500,00	1.389.500,00	3.032.900,00	Penambahan anggaran untuk ATK kegiatan penandatanganan BA hibah ormas
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	41.830.000,00	21.040.000,00	45.800.000,00	Penambahan anggaran untuk makan minum kegiatan konsolidasi dan evaluasi ormas penerima hibah
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.100.000,00	7.100.000,00	15.100.000,00	Penambahan anggaran untuk kegiatan Launching Satgas Premanisme
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	27.150.000,00	27.150.000,00	40.800.000,00	Penambahan pembayaran honor dari 4 bln menjadi 6 bln
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Penambahan anggaran hibah untuk TNI sebesar Rp. 100.000.000,00 dan untuk Polri sebesar Rp. 300.000.000,00

8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20.000.000,00	-	-	Pengurangan anggaran terjadinya efisiensi belanja perjalanan dinas dalam kota
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.000.000,00	-	-	
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**125.825.000,00**	**87.975.000,00**	**87.975.000,00**	
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**125.825.000,00**	**87.975.000,00**	**87.975.000,00**	
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	125.825.000,00	87.975.000,00	87.975.000,00	Pengurangan anggaran terjadinya efisiensi belanja makanan dan minuman rapat, honorarium dan belanja perjalanan dinas dalam kota.
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.575.000,00	2.575.000,00	2.575.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.550.000,00	48.300.000,00	48.300.000,00	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.700.000,00	12.100.000,00	12.100.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	46.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**537.800.000,00**	**500.693.000,00**	**500.693.000,00**	
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**537.800.000,00**	**500.693.000,00**	**500.693.000,00**	
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	278.600.000,00	247.693.000,00	247.693.000,00	Pengurangan anggaran terjadinya efisiensi belanja makanan dan minuman rapat.
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Dialog FKDM	30.000.000,00	9.150.000,00	9.150.000,00	
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Pengurus FKDM	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	
	[-] Makanan dan Minuman Rapat Tim Kewaspadaan Dini	20.000.000,00	9.943.000,00	9.943.000,00	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	

5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan				
	[-] Honorarium Pengurus FKDM	56.500.000,00	56.500.000,00	56.500.000,00	
	[-] Honorarium Tim Kewaspadaan Dini	82.500.000,00	82.500.000,00	82.500.000,00	
	[-] Pelaksana Administrasi FKDM	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	
	[-] Pelaksana Administrasi Tim Kewaspadaan Dini	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10.000.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	Pengurangan anggaran terjadinya efisiensi belanja perjalanan dinas dalam kota.
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	249.200.000,00	249.200.000,00	249.200.000,00	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	37.200.000,00	37.200.000,00	37.200.000,00	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	212.000.000,00	212.000.000,00	212.000.000,00	
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**3.342.257.349,00**	**3.187.753.585,00**	**3.187.753.585,00**	
8.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**30.730.000,00**	**24.617.660,00**	**24.617.660,00**	
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Pengurangan anggaran terjadinya efisiensi belanja makanan dan minuman rapat
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.570.500,00	8.450.500,00	8.450.500,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.566.000,00	1.566.000,00	1.566.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	223.500,00	223.500,00	223.500,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				
	[-] Makan dan Minum Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan	5.490.000,00	5.490.000,00	5.490.000,00	
	[-] Pelaksanaan Forum OPD Penyusunan Renstra 2025-2029	2.400.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	
	[-] Pelaksanaan Forum OPD Penyusunan Renstra 2025-2029	6.750.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.730.000,00	4.617.660,00	4.617.660,00	Pengurangan anggaran terjadinya efisiensi belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.650.000,00	1.537.660,00	1.537.660,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.080.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	-	-	
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.588.719.949,00**	**2.588.719.949,00**	**2.588.719.949,00**	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.384.119.949,00	2.384.119.949,00	2.384.119.949,00	
8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	204.600.000,00	204.600.000,00	204.600.000,00	
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	25.200.000,00	25.200.000,00	25.200.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	139.200.000,00	139.200.000,00	139.200.000,00	
8.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**40.700.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	
8.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	40.700.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Pengurangan anggaran terjadinya efisiensi Belanja Pakaian Batik Tradisional
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	16.100.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00	
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	20.700.000,00	-	-	
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**273.204.520,00**	**161.537.096,00**	**161.537.096,00**	
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.764.400,00	3.764.400,00	3.764.400,00	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.764.400,00	3.764.400,00	3.764.400,00	
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.198.400,00	50.319.200,00	50.319.200,00	Pengurangan anggaran terjadinya efisiensi belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.603.000,00	16.110.300,00	16.110.300,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	11.607.000,00	9.672.500,00	9.672.500,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9.495.000,00	6.330.000,00	6.330.000,00	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	951.000,00	951.000,00	951.000,00	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	21.542.400,00	16.255.400,00	16.255.400,00	

8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.500.000,00	24.522.000,00	24.522.000,00	Pengurangan anggaran terjadinya efisiensi belanja makanan dan minuman rapat
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.500.000,00	24.522.000,00	24.522.000,00	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.521.720,00	36.521.720,00	36.521.720,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	36.521.720,00	36.521.720,00	36.521.720,00	
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.220.000,00	42.409.776,00	42.409.776,00	Pengurangan anggaran terjadinya efisiensi belanja perjalanan dinas biasa
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	135.220.000,00	42.409.776,00	42.409.776,00	
8.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**22.754.000,00**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	
8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.754.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Pengurangan anggaran terjadinya efisiensi belanja modal alat penyimpan perlengkapan Kantor (lemari 2 Unit)
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	11.754.000,00	-	-	Refocusing
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**324.758.480,00**	**324.758.480,00**	**324.758.480,00**	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	16.219.450,00	16.219.450,00	16.219.450,00	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	37.400.000,00	37.400.000,00	37.400.000,00	
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.380.550,00	6.380.550,00	6.380.550,00	
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	259.758.480,00	259.758.480,00	259.758.480,00	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	79.300.000,00	79.300.000,00	79.300.000,00	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	118.950.000,00	118.950.000,00	118.950.000,00	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	39.650.000,00	39.650.000,00	39.650.000,00	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8.208.000,00	8.208.000,00	8.208.000,00	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	492.480,00	492.480,00	492.480,00	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	615.600,00	615.600,00	615.600,00	
5.1.02.02.02.0010	Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN	7.592.400,00	7.592.400,00	7.592.400,00	
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.390.400,00	57.120.400,00	57.120.400,00	
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.917.400,00	37.917.400,00	37.917.400,00	
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	27.757.400,00	27.757.400,00	27.757.400,00	
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.160.000,00	10.160.000,00	10.160.000,00	
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.473.000,00	19.203.000,00	19.203.000,00	Pengurangan anggaran terjadinya efisiensi belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	14.640.000,00	10.370.000,00	10.370.000,00	
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.833.000,00	8.833.000,00	8.833.000,00	
TOTAL RENCANA PAGU ANGGARAN KESBANGPOL TA. 2025		9.404.059.949,00	9.009.306.409,00	9.509.306.460,00	

Tabel. 3.2

Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6
1	**Meningkatnya Toleransi Di Kalangan Masyarakat**		**Indikator Tujuan: Angka Konflik**	(Jumlah masalah yg masuk - Jumlah masalah yg diselesaikan)	**0**
		Meningkatnya Kondisi Kondusif di Kota Pontianak			
			Indikator Sasaran 1: Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Menggunakan- Hak Pilih	(Jumlah masyarakat pemilih x 100% : Jumlah hak pilih)	80 %
			Indikator Sasaran 2: Presentase Penanganan Potensi Konflik Agar Tidak terjadi Konflik	Jumlah potensi konflik yg selesai x 100% : Jumlah potensi konflik)	100 %
			Indikator Sasaran 3: Persentase Peningkatan Kapasitas Ormas/LSM di Kota Pontianak	Jumlah ormas, orpem dan LSM yang terdaftar x 100% : Jumlah ormas dan LSM yang ada)	75%

Tabel. 3.3
Rincian Perubahan Pagu Anggaran Badan Kesbangpol Kota Pontianak

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD					aian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2025		Pagu Indikat					Prioritas					
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							8.663.625.000,00	9.404.059.949,00	9.509.306.450,00							9.794.125.000,00	
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							8.663.625.000,00	9.404.059.949,00	9.509.306.450,00							9.794.125.000,00	
	8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							8.663.625.000,00	9.404.059.949,00	9.509.306.450,00							9.794.125.000,00	
1	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Bidang terhadap Pelayanan Kesekretariatan				95 Persen	95 Persen	3.428.784.000,00	3.342.257.349,00	3.187.733.585,00							3.454.535.000,00	
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	-	35.000.000,00	30.730.000,00	30.730.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	Perangkat Daerah		22.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bag Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			11.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	10.000.000,00	5.730.000,00	4.617.660,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bag Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			11.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			100 Persen	100 Persen	2.614.535.000,00	2.588.719.949,00	2.588.719.949,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	-		2.644.535.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	2.264.535.000,00	2.384.119.949,00	2.384.119.949,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			2.264.535.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

204.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			380.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
40.700.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	-		40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan															
						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	350.000.000,00	204.500.000,00	204.600.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			380.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	-	35.000.000,00	40.700.000,00	40.700.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	-		40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai															
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				32 Unit	32 Unit	35.000.000,00	40.700.000,00	20.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	-			100 Persen	100 Persen	282.000.000,00	273.204.520,00	273.204.520,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	-		298.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	3.764.400,00	3.764.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			3.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	63.198.400,00	50.319.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			45.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	30.500.000,00	24.522.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			45.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	45.000.000,00	36.521.720,00	36.521.720,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			4.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	135.220.000,00	42.409.776,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 Persen	90 Persen	30.000.000,00	22.754.000,00	22.754.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	-		35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	1 Unit	30.000.000,00	22.754.000,00	11.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 Persen	100 Persen	382.249.000,00	324.758.480,00	324.758.480,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	-		360.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	317.249.000,00	259.758.480,00	259.758.480,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			290.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	61.390.400,00	61.390.400,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	-		55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	35.000.000,00	37.917.400,00	37.917.400,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	15.000.000,00	23.473.000,00	19.203.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase tingkat pemahaman nilai pancasila dan karakter kebangsaan				90 Persen	90 Persen	900.000.000,00	1.003.128.000,00	948.625.224,00							1.320.000.000,00	
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-			1 Dokumen	1 Dokumen	900.000.000,00	1.003.128.000,00	1.003.128.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	-		1.320.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				500 Orang	500 Orang	50.000.000,00	170.301.000,00	138.721.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka																
							Jumlah Paskibraka				32 Orang	32 Orang	800.000.000,00	800.050.000,00	777.127.224,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM),	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			900.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	02	2.01	0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila																
							Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	32.777.000,00	32.777.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM),	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase tingkat pemahaman politik				90 Persen	90 Persen	3.384.590.000,00	3.722.468.874,00	3.705.578.874,00							3.494.590.000,00	

8	01	03	2.01		Penumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemataun situasi politik di Daerah	-			1 Dokumen	1 Dokumen	3.384.590.000,00	3.722.468.874,00	3.722.468.874,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	-		3.494.590.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, sentauan Situasi Politik di Daerah																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				35 Orang	36 Orang	3.314.590.000,00	3.582.849.500,00	3.574.009.500,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			3.314.590.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				10 Orang	50 Orang	50.000.000,00	119.619.374,00	131.569.374,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM),	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM),	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pemberdayaan ormas				85 Persen	85 Persen	420.000.000,00	672.580.726,00	1.078.680.777,00							525.000.000,00	

	8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-			1 Dokumen	1 Dokumen	420.000.000,00	672.580.726,00	672.580.726,00			-	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	-		525.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				60 Orang	60 Orang	400.000.000,00	652.580.726,00	1.078.680.777,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Pendapatan Transfer Antar Daerah Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																	
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase tingkat pemahaman masyarakat terkait ketahanan ekonomi, sosial dan budaya				90 Persen	90 Persen	138.000.000,00	125.825.000,00	87.975.000,00							150.000.000,00	

8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-			1 Dokumen	1 Dokumen	138.000.000,00	125.825.000,00	125.825.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib	-		150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									87.975.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				500 Orang	500 Orang	138.000.000,00	125.825.000,00								

	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kele									n Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah									
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				-	6 Laporan	0,00	10.000.000,00	3.800.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				-	1 Dokumen	0,00	249.200.000,00	249.200.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan, Berkelanjutan disertai Kondisi Aman dan Tertib			230.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
													J U M L A H	8.663.625.000,00	9.404.059.	9.505.305.460,00							9.794.125.000,00	
							Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak tahun 2025 ini memuat perubahan pagu anggaran beserta perubahan kinerja sesuai dengan ketentuan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak telah melakukan efisiensi dan rasionalisasi anggaran sekaligus penyesuaian target kinerja. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan evaluasi Rencana Kerja (RENJA) sampai dengan Triwulan II (s/d 26 Mei tahun 2025) sebagai dasar analisis dalam melakukan efisiensi dan rasionalisasi hasil refocusing.

Walaupun demikian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak tetap mengutamakan pencapaian target-target kinerja sasaran, program, kegiatan, dan sub-kegiatan pada tahun 2025, serta melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak Tahun 2025 ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan, sekaligus menjadi sarana peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pontianak dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pontianak,

ttd

Ahmad Hasyim, ST
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip. 19680615 199803 1 009